PT Pelabuhan Tanjung Priok

2024

PELINDO MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Laporan Tahunan Annual Report

Driving Growth Through **Service Excellence**



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan tahunan ini memuat kata "PTP Terminal Nonpetikemas", dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Tanjung Priok yang menjalankan bisnis utamanya di bidang penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan.

Penyampaian Laporan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan *audited*, dan Laporan Evaluasi Kinerja. Penggunaan dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi PTP Terminal Nonpetikemas dalam menghadirkan informasi dan data yang valid.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PTP Terminal Nonpetikemas tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan PTP Terminal Nonpetikemas disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini juga dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Perusahaan, yaitu www.ptp.co.id.

The Annual Report contains references to "PTP Terminal Nonpetikemas" and the "Company," which refer to PT Pelabuhan Tanjung Priok, whose core business focuses on the provision and operation of port services.

The preparation of this Annual Report by PT Pelabuhan Tanjung Priok incorporates several corporate documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Corporate Long-Term Plan (RJPP), Audited Financial Statements, and Performance Evaluation Reports. The integration of these documents is intended to provide a solid foundation for presenting reliable information and data by PTP Terminal Nonpetikemas.

The Annual Report contains forward-looking statements concerning the Company's financial conditions, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are made in accordance with prevailing laws and regulations. These forward-looking statements inherently involve risks, uncertainties, and potential deviations from actual outcomes. The prospective statements presented herein are based on current assumptions and forecasts related to the Company's business environment. PTP Terminal Nonpetikemas makes no guarantees that the validated documents referenced will produce specific results.

The PTP Terminal Nonpetikemas Annual Report is presented in both Indonesian and English, using legible fonts and high quality printing. This report is also available for viewing and download on the Company's official website: www.ptp.co.id.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK
NOTICE ON TABLES AND CHARTS

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

The tables and charts presented in this Annual Report display numerical data in accordance with the standard writing conventions of the Indonesian language. Numerical presentations within the text follow either Indonesian or English language conventions, depending on the context in which they are used.

PENJELASAN TEMA
THEME EXPLANATION



Driving Growth Through Service Excellence

Menghadapi tahun politik dan ketidakpastiaan ekonomi PTP Terminal Nonpetikemas telah menjalankan strategi yang terarah untuk mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen penuh dalam mendukung Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek hilirisasi mineral seperti SGAR. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi PTP Terminal Nonpetikemas untuk terus melakukan pengembangan usaha sekaligus memperkokoh kepemimpinannya di industri Pelabuhan dan logistik.

Pencapaian hasil tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen Perusahaan untuk terus menjalankan transformasi dan inovasi untuk memberikan kemudahan akses layanan melalui implementasi sistem PTOS-M terbukti efektif, mengurangi waktu *port stay* hingga 33% dari rata-rata 3 hari menjadi 2 hari dan meningkatkan keselamatan kerja. Implementasi sistem PTOS M juga memungkinkan layanan operasional berjalan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi, dan transparansi.

Disamping itu, upaya memperluas cakupan layanan juga dilakukan Perusahaan dengan melakukan ekspansi layanan di beberapa terminal antara lain Terminal Kijing menangani komoditas baru seperti *Caustic Soda Liquid*, dan Pelabuhan Muara Sabak Jambi dalam menangani komoditas *condentsat*, dan LPG. PTP Terminal Nonpetikemas terus berinovasi dengan menerapkan enam pilar reformasi kepelabuhanan yang mencakup Proses Bisnis, SDM, Teknologi, Peralatan, Infrastruktur, dan HSSE (*Health, Safety, Security, and Environment*).

Perusahaan mendukung industrialisasi nasional melalui layanan pelabuhan yang andal dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Sejalan dengan upaya Perusahaan di tahun 2024 tersebut, tema yang dipilih adalah "*Driving Growth through Service Excellence*."

Driving Growth Through Service Excellence

In navigating a political year and economic uncertainty, PTP Terminal Nonpetikemas has implemented a focused strategy aimed at achieving sustainable business growth. The Company remains fully committed to supporting National Strategic Projects, including mineral downstreaming initiatives such as the SGAR project. These developments present strategic opportunities for PTP Terminal Nonpetikemas to further expand its business while solidifying its leadership in the port and logistics industry.

The Company's achievements in 2024 reflect its ongoing commitment to transformation and innovation, particularly through the implementation of the PTOS-M system, which has proven effective. The system reduced average port stay by 33%, from 3 days to 2, while also enhancing occupational safety. Furthermore, PTOS-M enabled seamless, queue-free operational services, thereby increasing efficiency and transparency.

In addition, the Company expanded its service coverage by launching operations at several terminals, including Terminal Kijing, handling new commodities such as Caustic Soda Liquid, and Muara Sabak Port in Jambi for Condensate and LPG handling. PTP Terminal Nonpetikemas continues to drive innovation through the application of six pillars of port reform, including Business Processes, Human Capital, Technology, Equipment, Infrastructure, and HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Through its reliable and efficient port services, the Company supports national industrialization and contributes to Indonesia's economic growth by enhancing the added value of the country's natural resources. In alignment with these 2024 initiatives, the chosen theme for this year is "Driving Growth Through Service Excellence."

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY



2020 **Meningkatkan Inovasi Menuju Operator Terminal *Multipurpose* Terpadu**
Enhancing Innovation Towards An Integrated Multipurpose Terminal Operator

Tahun 2023 menjadi tahun pengembangan inovasi bagi PTP Terminal Nonpetikemas dalam usahanya menuju Operator Terminal *Multipurpose* yang terpadu. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PTP Terminal Nonpetikemas tentang Operasi Pelabuhan Terintegrasi, PTP Terminal Nonpetikemas terus berkomitmen penuh dalam pengembangan usaha serta meningkatkan inovasi bisnisnya. Salah satu yang dikembangkan adalah layanan *Shorebase* yang berupa fasilitas pusat kegiatan logistik di pinggir laut area lini-1 dan lini-2 pelabuhan, yang dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan logistik (*inbound* dan *outbound*) industri hulu minyak dan gas bumi dalam melakukan eksplorasi, pengeboran, proyek konstruksi dan kegiatan produksi lepas pantai.

Selepas perubahan fokus bisnis Perusahaan menjadi *Operation & Maintenance* dan mulai berfokus pada pengembangan empat bidang di antaranya *Operation, Asset and Maintenance*, *Human Resource*, IT dan *Customer Focus*, PTP Terminal Nonpetikemas terus meningkatkan kinerja bisnisnya dalam rangka mewujudkan kepemimpinan dalam operasi terminal digital. Salah satu upayanya adalah dengan mulai berperan aktif dalam memperlancar arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong pengembangan pelabuhan sebagai salah satu fasilitas publik yang memiliki konsep pelabuhan *digital* (*digital port*), terutama dalam penggunaan alat kerja berbasis teknologi di seluruh wilayah kerja perusahaan.

PTP Terminal Nonpetikemas akan selalu menyelaraskan setiap langkah dan strateginya guna menghasilkan kinerja yang efisien dan unggul, menjawab tantangan di era perubahan saat ini, serta menginspirasi aksi dalam menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan menuju Operator Terminal *Multipurpose* yang terpadu.

The year 2023 marked a period of innovation development for PTP Terminal Nonpetikemas in its journey towards becoming an integrated multipurpose terminal operator. Aligned with the company's long-term plan, PTP Terminal Nonpetikemas remains fully committed to business development and enhancing its business innovations. One of the developments is the shorebase service, which consists of logistics center facilities located along the coast of line-1 and line-2 areas of the port. These facilities are designed, built, and operated to support logistics activities (inbound and outbound) for upstream oil and gas industries involved in exploration, drilling, construction projects, and offshore production activities.

Following the shift in the company's business focus towards operation & maintenance and beginning to focus on the development of four areas including operation, asset and maintenance, human capital, it, and customer focus, PTP Terminal Nonpetikemas continues to improve its business performance towards achieving leadership in digital terminal operations. One of its efforts is actively facilitating the traffic of goods and logistics to and from the port to stimulate national economic growth, as well as promoting port development as a digital port concept, particularly in the use of technology-based tools across its operational areas.

PTP Terminal Nonpetikemas will consistently align its steps and strategies to achieve efficient and superior performance, addressing challenges in this era of change, and inspiring actions to create added value for the company towards becoming an integrated multipurpose terminal operator.



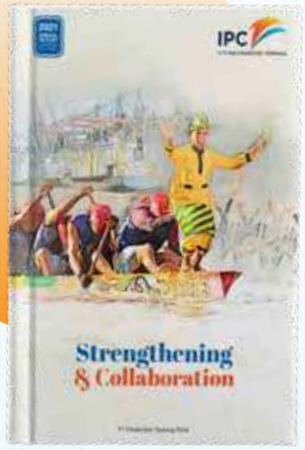
2022 **Fokus Bisnis *Operation & Maintenance***
Operation & Maintenance Business Focus

Pada tahun 2022 PTP Terminal Nonpetikemas masih dihadapkan pada beratnya tantangan ekonomi global dan nasional serta dampak rembetan lain yang mengikutinya, di samping perubahan yang terjadi di lingkup Pelindo sebagai entitas induk utama, antara lain perubahan Pemegang Saham mayoritas dari Pelindo ke SPMT, serta perubahan fokus bisnis menjadi *operation & maintenance*, dan berfokus pada pengembangan empat bidang, yaitu *Operation, Asset and Maintenance, Human Resource*, IT dan *Customer Focus*.

Perubahan fokus bisnis ini juga telah selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025, di mana tahun 2022 merupakan tahun *Operation & Maintenance Business* Fokus. Pada tahap ini, Perusahaan berfokus untuk mendorong kinerja melalui *digitalization business process, standardized equipment and optimized performance availability, optimizing terminal facilities, effective cost of capital, optimum working capital cycle,* dan *innovative and entrepreneurial culture with strong competencies.*

In 2022, PTP Terminal Nonpetikemas still had to deal with severe global and national economic challenges as well as other related impacts that follow, in addition to the changes that have occurred within Pelindo as the main parent entity, among others, the change of major Shareholder from Pelindo to SPMT, and the change in business focus to operations & maintenance, which is focused on developing four areas, namely Operation, Asset and Maintenance, Human Capital, IT and Customer Focus.

The change in business focus is also aligned with the 2021- 2025 Corporate Long Term Plan (RJPP), where 2022 is the year of Operation & Maintenance Business Focus. At this stage, the Company focused on boosting performance through digitalization of business processes, standardized equipment and optimized performance availability, optimizing terminal facilities, effective cost of capital, optimum working capital cycle, and innovative and entrepreneurial culture with strong competencies.



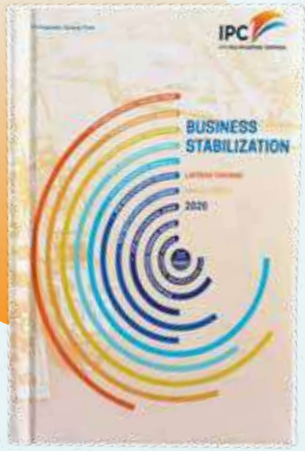
Seiring dengan penggabungan usaha bumn pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, maka PTP Terminal Nonpetikemas sebagai anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pun mengalami pergantian pemegang saham, semula pelindo II menjadi pelindo, dengan kepemilikan saham sebesar 99,00%.

PTP Terminal Nonpetikemas yang menjadi bagian dari pelindo pun berkomitmen penuh untuk terus memperkuat sinergi antar elemen pelindo melalui penguatan strategi dan inovasi yang diwujudkan pelayanan terminal *multipurpose* yang unggul, profesional, dan efisien, di seluruh wilayah kerja pelindo, dengan sasaran utama yaitu meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Along with the merger of port soes, namely PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo, PTP Terminal Nonpetikemas as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) also experienced a change in shareholder, originally pelindo II became pelindo, with 99.00% Share ownership.

PTP Terminal Nonpetikemas which is part of pelindo is fully committed to continuing to strengthen the synergy between elements of pelindo through strengthening strategies and innovations that are manifested in superior, professional and efficient multipurpose terminal services, in all pelindo work areas, with the main goal of increasing the company's value for shareholders and all stakeholders.

20 ***Strengthening & Collaboration***
21 **Strengthening Collaboration**



Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi perekonomian dan industri secara global dan nasional, termasuk di dalamnya industri kepelabuhan. Menghadapi tantangan tersebut, PTP *Multipurpose* mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten guna mendukung keberlanjutan bisnis inti Perusahaan serta sejalan dengan komitmen Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024, yaitu "Stabilisasi Bisnis".

Keberhasilan Perusahaan di tahun 2020 ini menjadi langkah awal dari strategi jangka panjang PTP Multipurpose untuk mencapai Visi Perusahaan untuk menjadi Operator Terminal *Multipurpose* yang Terdepan untuk *Maritime Gateway* di Indonesia.

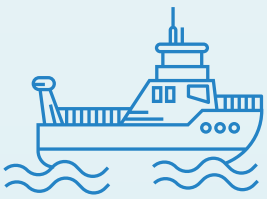
The COVID-19 pandemic affected the economic and industrial conditions globally and nationally, including the port industry. In the face of this challenge, PTP Multipurpose Implemented strategic measures by prioritizing the appropriate and consistent health protocols to support the Company's core business sustainability, in line with the Company's commitment as outlined in the Corporate 2020-2024 Long Term Plan (RJPP), namely "Business Stabilization".

The Company's success in 2020 fulfilled the first step of PTP Multipurpose's long-term strategy to achieve the Company's Vision to be the Leading Multipurpose Terminal Operator for Maritime Gateways in Indonesia.

20 ***Business Stabilization***
20 **Business Stabilization**









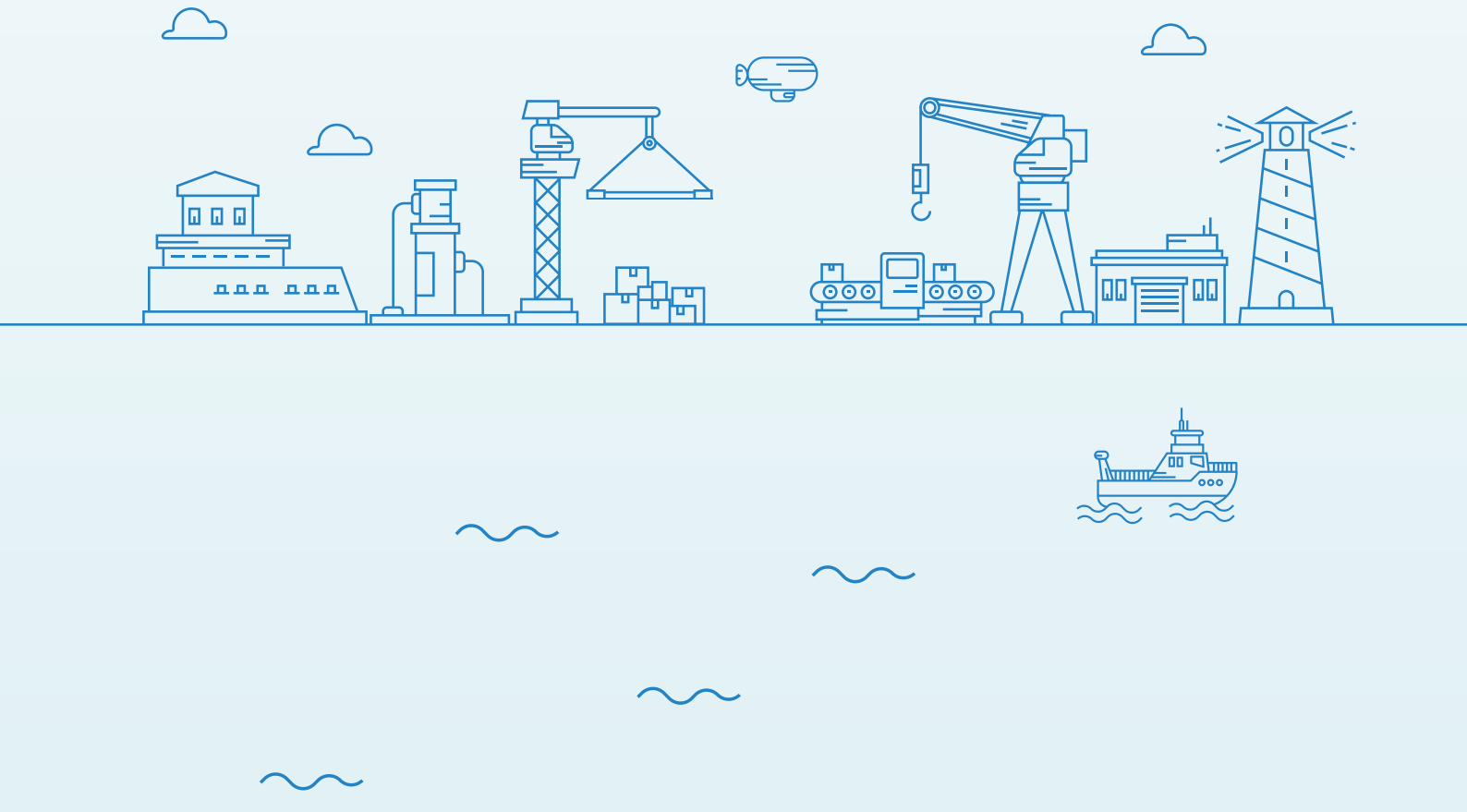
Untuk menunjang proses bisnis Perusahaan agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, Perusahaan merencanakan untuk melakukan IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia serta melakukan pengembangan bisnis di luar negeri.

Perusahaan menjalankan kebijakan strategis dengan terus berpegang teguh pada nilai-nilai perusahaan yaitu "*Innovation, Passion to Collaborate, Transparency, and Pride to the Nation*". Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi Perusahaan untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Perusahaan sehingga diharapkan tidak hanya akan berdampak dalam jangka panjang, tapi juga harapan sebagai anak perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis secara mandiri di masa yang akan datang.

To support the Company's business processes in order to grow and develop sustainably, the Company plans to conduct an IPO (Initial Public Offering) on the Indonesia Stock Exchange and conduct business development overseas.

The Company carries out strategic policies by continuing to adhere to corporate values, namely "Innovation, Passion to Collaborate, Transparency, and Pride to the Nation". These values are the foundation of the Company to continuously improve the capabilities and capacity of the Company, hence it is expected not only to have an impact in the long term, but also the hope as a subsidiary that conducts its business activities independently in the future.

20 ***Sustainable Expansion***
19 **Sustainable Expansion**



DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

3 SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

3 PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK
NOTICE ON TABLES AND CHARTS

4 PENJELASAN TEMA
THEME EXPLANATION

5 KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

8 DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

12 *CORPORATE ROADMAP* DAN SASARAN STRATEGIS
CORPORATE ROADMAP AND STRATEGIC GOALS

13 STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

16 MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN
FOSTERING SUSTAINABILITY CULTURE

17 UPAYA MENGINTEGRASIKAN KEBERLANJUTAN KE DALAM KEGIATAN OPERASIONAL
EFFORTS TO INTEGRATE SUSTAINABILITY INTO OPERATIONAL ACTIVITIES

18 PENCAPAIAN PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
ACHIEVEMENT OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

20 JEJAK LANGKAH
MILESTONES

IKHTISAR DATA KEUANGAN DAN OPERASIONAL
FINANCIAL AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS

24 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

27 IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

29 IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS

30 AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

31 IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI
BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS HIGHLIGHTS

31 INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

32 PERISTIWA PENTING
SIGNIFICANT EVENTS

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

38 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

64 LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

88 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2024
STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE 2024 ANNUAL REPORT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

92 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION ON THE COMPANY

94 AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
ACCESS TO THE COMPANY, INCLUDING BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

95 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

97 KEGIATAN USAHA
BUSINESS ACTIVITIES

99 PRODUK DAN JASA LAYANAN
PRODUCTS AND SERVICES

101 PROSES BISNIS
BUSINESS PROCESS

102 WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREA

103 PROFIL CABANG PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PROFILE OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS BRANCHES

128 VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

130 FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN
PHILOSOPHY OF THE COMPANY LOGO

131 KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

131 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

134 PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

148 PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

158 PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS THAT OCCURRED AFTER THE FISCAL YEAR ENDED

159 PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILE

164 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

183 DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

189 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION

190 PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU
MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO INDIVIDUAL OWNERS

191 PEMEGANG SAHAM UTAMA
MAJORITY SHAREHOLDERS

192 DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

192 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
GROUP STRUCTURE OF THE COMPANY

193 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

193 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OF BOND AND OTHER SECURITIES

194 AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

194 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

196 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATION

199 INFORMASI PADA SITUS PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

202 TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

204 RENCANA KERJA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 2024
2024 WORK PLAN AND STRATEGIC POLICIES

207 STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

209 TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

237 KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY

250 KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
ABILITY TO PAY DEBTS AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

253 TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

253 STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

255 IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOOD INVESTMENT

255 REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

256 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

266 PROYEKSI TAHUN 2025
2025 PROJECTION

271 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE ACCOUNTING'S REPORTING DATE

272 PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

274 ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

275 PANGSA PASAR
MARKET SHARE

275 INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH
MATERIAL INCREASE OR DECREASE IN SALES OR NET INCOME

276 DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERUSAHAAN SERTA LABA OPERASI PERUSAHAAN
IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY SALES OR NET INCOME AND OPERATING PROFIT

276 TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA
OTHER FINANCIAL OVERVIEW

278 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)
EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

278 REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

278 INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL
MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

279 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/ BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/ RELATED PARTIES

280 TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI
MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

284 KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE STATE

285 PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES TO LAWS AND REGULATIONS AND ITS IMPACT ON THE COMPANY

285 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES IMPLEMENTED IN THE LAST FISCAL YEAR

286 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

291 PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
BUSINESS ROAD MAP: CORPORATE LONG-TERM PLAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTION

296 PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN
INFORMATION TECHNOLOGY'S ROLE IN BUSINESS DEVELOPMENT OF THE COMPANY

297 VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
INFORMATION TECHNOLOGY VISION AND MISSION OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

298 *ROADMAP* PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

299 FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2024
FOCUS OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2024

301 PROGRAM STRATEGIS TI 2024
2024 IT STRATEGIC PROGRAM

301 INVESTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT

301 RENCANA PENGEMBANGAN TI TAHUN 2025
2025 IT DEVELOPMENT PLAN

302 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

303 PROFIL *SENIOR MANAGER* SISTEM INFORMASI
SENIOR MANAGER OF INFORMATION SYSTEMS PROFILE

303 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI SISTEM INFORMASI
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION SYSTEMS DIVISION

305 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SERTIFIKASI SDM TI
IT HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND CERTIFICATION PROGRAM

306 KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER
CYBER RESILIENCE AND SECURITY

309 AUDIT PENYELENGGARAAN TI
IT AUDIT

309 PENGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE DEVELOPMENT

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

312 *GOVERNANCE FRAMEWORK*
GOVERNANCE FRAMEWORK

315 *GOVERNANCE PRINCIPLE*
GOVERNANCE PRINCIPLE

319 *GOVERNANCE COMMITMENT*
GOVERNANCE COMMITMENT

322 *GOVERNANCE STRUCTURE*
GOVERNANCE STRUCTURE

323 *GOVERNANCE PROCESS*
GOVERNANCE PROCESS

325 *GOVERNANCE OUTCOME*
GOVERNANCE OUTCOME

326 PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN
IMPROVEMENT OF SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION QUALITY

334 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

400 DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

420 DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

441 PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

462 NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

495 PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI
DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

497 PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITION

500 PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE

501 KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

501 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

501 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGAN

502 SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

506 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

518 KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

527 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DIBAWAH KOMITE PEMANTAU RISIKO
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DIBAWAH KOMITE PEMANTAU RISIKO

538 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

538 SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

542 AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM
INTERNAL AUDIT / INTERNAL AUDIT & LEGAL UNIT

552 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

555 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

581 AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

583 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

586 KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

590 KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA
POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS, AND ITS IMPLEMENTATION

590 PERNYATAAN KOMITMEN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION COMMITMENT STATEMENT

592 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

594 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
WHISTLEBLOWING SYSTEM

601 PENGELOLAAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION MANAGEMENT

606 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

610 INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK
INFORMATION ON PROVISION OF FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

610 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

612 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICY

613 KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*
INSIDER TRADING POLICY

613 PERKARA PENTING
SIGNIFICANT EVENTS

614 KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY COMPOSITION

618 TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

620 PEMENUHAN REKOMENDASI PUGKI
FULFILLMENT OF PUGKI RECOMMENDATIONS

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR)

646 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR)

657 TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA
SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

658 TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL
SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONS

659 TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION

664 TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY

669 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA
SOCIAL RESPONSIBILITY ON RESPONSIBILITIES TO CONSUMERS AND PARTNERS

674 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

CORPORATE ROADMAP DAN SASARAN STRATEGIS
CORPORATE ROADMAP AND STRATEGIC OBJECTIVES

Strategi pengembangan PT Pelabuhan Tanjung Priok 2021-2025 difokuskan pada peningkatan kualitas operasi dan pendukungnya serta peningkatan kualitas fasilitas pelabuhan untuk mencapai sasaran di tahun 2025, yaitu "menjadi pemimpin operator terminal nonpetikemas di Indonesia".

The 2021–2025 development strategy of PT Pelabuhan Tanjung Priok is focused on enhancing operational quality and its supporting functions, as well as improving port facilities to achieve its 2025 objective of becoming "the leading non-container terminal operator in Indonesia."

CORPORATE ROADMAP 2021-2025

2021

Penguatan & Kemitraan
Strengthening & Partnership

1. Perencanaan perusahaan yang kuat
2. Kinerja tata kelola Perusahaan yang kuat
3. SCR berkelanjutan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan *asset* yang ada
5. Manajemen Proyek strategis yang efektif
6. Implementasi yang optimal dari prosedur operasi standar
7. Penguatan manajemen risiko Perusahaan, SLA Internal dan Eksternal
8. Sistem terstandarisasi dan terintegrasi yang mendukung pelaporan tepat waktu
9. Organisasi dan model operasi yang gesit

1. Strong corporate planning
2. Strong corporate governance performance
3. Continuous SCR
4. Optimizing the utilization of existing assets
5. Effective strategic Project Management
6. Optimal implementation of standard operating procedures
7. Strengthening the Company's risk management, internal and external SLA
8. Standardized and integrated system that supports timely reporting
9. Agile organization and operation model.

2022

Fokus Bisnis *Operation & Maintenance*
Operation & Maintenance Business Focus

1. Proses bisnis digitalisasi
2. Peralatan standar kinerja dan ketersediaan yang dioptimalkan
3. Mengoptimalkan fasilitas Pelabuhan
4. Biaya modal yang efektif
5. Siklus modal kerja yang optimal
6. Budaya inovatif dan kewirausahaan dengan kompetensi yang kuat

1. Business process digitization
2. Optimized standard performance equipment and availability
3. Optimizing port facilities
4. Effective capital costs
5. Optimal working capital cycle
6. Innovative and entrepreneurial culture with strong competence

2023-2024

Kinerja Unggul *Operation & Maintenance*
Excellence Operation & Maintenance Performance

1. Inovasi untuk integrasi Terminal
2. Penyebaran peralatan hijau dan suprastruktur
3. Kepemimpinan dalam operasi terminal digital
4. Operasi Pelabuhan terintegrasi
5. Pengembalian maksimal dari aset keuangan termasuk kas mengganggur
6. Dukungan yang efektif dan terintegrasi untuk Pelindo Group
7. Internalisasi budaya AKHLAK untuk pelayanan prima
8. Implementasi terminal operator berstandar internasional

1. Innovation for Terminal integration
2. Deployment of green equipment and superstructures
3. Leadership in digital terminal operations
4. Integrated port operations
5. Maximum return on financial assets including idle cash
6. Effective and integrated support for Pelindo Group
7. Internalization of AKHLAK culture for excellent service
8. Implementation of international standard operator terminals

2025

Pemimpin Operator Terminal *Multipurpose*
Leading Multipurpose Terminal Operator

1. *Image operator* yang kuat dan mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan
2. Operasi Pelabuhan dan keunggulan layanan
3. Matrik keuangan utama terkemuka di industri
4. Implementasi atas teknologi digital untuk tujuan bisnis

1. Strong Image operator and recognized by stakeholders
2. Port Operation and service excellence
3. Industry-leading key financial metrics
4. Implementation of digital technology for business purposes

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

Rumah Strategi PTP Terminal Nonpetikemas

PTP Terminal Nonpetikemas Strategy House

Menjadi Pemimpin
Operator Terminal Non Petikemas di Indonesia
To be the Leading Non-Container Operator in Indonesia

Menyediakan pelayanan yang kompetitif dan berkelanjutan guna mendukung ekosistem logistik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
To provide integrated, competitive, and sustainable services to support the logistics ecosystem in order to promote national economic growth.

Strategic Pillars

Peningkatan Kualitas Operasi dan Pendukungnya
Enhancement of Operational Quality and Supporting Functions

- Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang Terintegrasi
- Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan pendukungnya
- Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif
- Melakukan Ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia
- Standardization of Integrated Port Operations and Commercial Activities
- Systematization and Digitization of Port Operations and Supporting Services
- Increasing Production Capacity and Achieving a Competitive Market Share
- Expanding Operations Across All Regions of Indonesia

Peningkatan Kualitas Pelabuhan
Port Facility Quality Enhancement

- Penataan, Standarisasi dan Optimalisasi Peralatan Operasi
- Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan Peralatan Operasi
- Structuring, Standardization and Optimization of Operating Equipment
- Improved Performance and Availability of Operating Equipment

Enablers

- Peningkatan Tata Kelola Perusahaan
- Peningkatan *Corporate Branding* dan Komunikasi Perusahaan
- Restrukturisasi Organisasi Program *Learning and Development* SDM yang Terintegrasi
- Internalisasi Budaya
- Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
- Improved Corporate Governance
- Improved Corporate Branding and Corporate Communication
- Organizational Restructuring Integrated HC Learning and Development Program
- Culture Internalization
- Financial Planning and Control

Sumber: Data Internal

Dengan adanya perubahan bisnis PTP menjadi O5M maka fokus Perusahaan adalah pada transformasi operasi.
With the shift in PTP's business focus to Operation & Maintenance (O&M), the Company's primary focus is on operational transformation.

PENCAPAIAN STRATEGI 2024 KINERJA UNGGUL *OPERATION AND MAINTENANCE*

2024 STRATEGY ACHIEVEMENT OPERATION AND MAINTENANCE EXCELLENT PERFORMANCE



Inovasi dalam integrasi terminal
Innovation in terminal integration

- Inovasi untuk Integrasi Terminal
- Penyebaran peralatan hijau dan suprastruktur
- Kepemimpinan dalam operasi terminal digital
- Operasi Pelabuhan terintegrasi
- Pengembalian maksimal dari *asset* keuangan, termasuk kas mengganggur
- Dukungan yang efektif dan terintegrasi untuk Pelindo *Group*
- Internalisasi budaya AKHLAK untuk pelayanan prima
- Implementasi terminal operator berstandar internasional

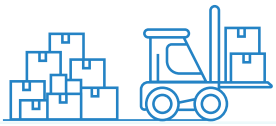
- Innovation for Terminal Integration
- Deployment of green equipment and superstructure
- Leadership in digital terminal operations
- Integrated port operations
- Maximized returns from financial assets, including idle cash
- Effective and integrated support for the Pelindo Group
- Internalization of AKHLAK core values to drive service excellence
- Implementation of international standardized terminal operations

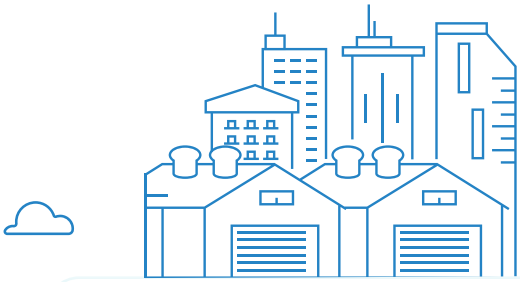


Pemerataan perangkat pendukung green technology termasuk suprastruktur pendukungnya
Equal supporting tools of green technology including supporting superstructure

Dilaksanakannya program implementasi *Green Technology* pada fasilitas dan Utilitas di wilayah kerja PTP Terminal Nonpetikemas.

The implementation of the Green Technology program has been carried out across facilities and utilities within the operational areas of PTP Terminal Nonpetikemas.







Kepemimpinan dalam operasi terminal digital
Leadership in digital terminal operations

Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP telah tercapai progres 100,00% dan progres *expected* sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
- Go Live PTOS M Pombo tanggal 1 Agustus 2024
- Go Live PTOS M Ambon tanggal 26 Agustus 2024

The standardization of branch operations at PTP has reached 100.00% progress, matching the expected target of 100.00%, with the following milestones achieved:
- Go Live PTOS-M Pombo on August 1, 2024
- Go Live PTOS-M Ambon on August 26, 2024



Integrasi operasional terminal
Integration of terminal operations

- Implementasi standarisasi operasi cabang PTP Terminal Nonpetikemas
- Pengembangan sistem TI

- Implementation of standardized operations at PTP Terminal Nonpetikemas branches
- IT system Development



Maksimalisasi pengembalian dari aset finansial termasuk *idle cash*
Maximizing return on financial assets including idle cash

Dilaksanakannya program optimalisasi *idle cash* untuk memaksimalkan *cash in* Perusahaan dengan capaian pembukuan bunga deposito sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp11.064.526.019,-.

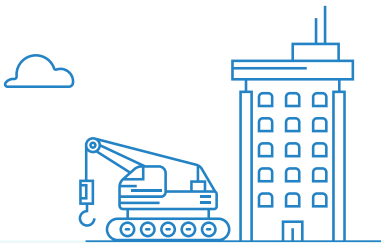
The implementation of an idle cash optimization program to maximize its cash position, resulting in recorded deposit interest bookings as of December 2024 amounting to Rp11,064,526,019,-.



Efektif dan integrasi dukungan dari Pelindo *Group*
Effective and integrated support from Pelindo Group

- Perusahaan telah menjalin kerja sama pengoperasian dan pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal.
- Perusahaan telah menjalin kerja sama pengoperasian terminal maupun dermaga nonpetikemas secara *business-to-business* dengan beberapa cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:
  1. Kerja sama pengoperasian lapangan Kalijapat di Pelabuhan Tanjung Priok.
  2. Kerja sama pengoperasian dermaga F di Pelabuhan Panjang.
  3. Kerja sama optimalisasi aset dermaga dan lahan eks PT Tunas Bahari Servita di Pelabuhan Pangkal Balam.

- The Company has established a partnership agreement for the operation and maintenance of the Multipurpose Terminal with the Sub-holding entity, PT Pelindo Multi Terminal.
- In addition, the Company has engaged in business-to-business partnership agreements for the operation of non-container terminals and wharf with several branches of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), including:
  1. Operational partnership for the Kalijapat Yard at Tanjung Priok Port.
  2. Operational partnership for Wharf F at Panjang Port.
  3. Asset optimization cooperation for the wharf and land formerly operated by PT Tunas Bahari Servita at Pangkal Balam Port.





Internalisasi budaya AKHLAK untuk mendukung pelayanan prima
Internalization of AKHLAK culture to support service excellence

Dilaksanakannya program internalisasi budaya AKHLAK, antara lain program NGOPI (Ngobrol Inspiratif) Bidang Curah Kering, NGOPI *Culvating Risk Culture For Global Competitiveness*, dan NGOPI & CPO *Inspired Journey Reflections and Success Stories High Potential Employee*.

The internalization of the AKHLAK corporate values through various programs, including NGOPI (Ngobrol Inspiratif) for the Dry Bulk Division, NGOPI: Cultivating Risk Culture for Global Competitiveness, and NGOPI & CPO: Inspired Journey Reflections and Success Stories of High-Potential Employees.



Implementasi ISO untuk terminal
ISO implementation for terminals

Telah dilakukan sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001 di 11 cabang serta kantor pusat dan ISO 37001 di 1 cabang dan kantor pusat.

The completion of certification of ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 across 11 branch offices and the head office ISO 37001 at 1 branch office and the head office.

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN
FOSTERING SUSTAINABILITY CULTURE

Dalam upaya membangun keberlanjutan yang menyeluruh dan berkesinambungan, PTP Terminal Nonpetikemas menjadikan budaya keberlanjutan sebagai landasan penting dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Perseroan mengacu pada delapan prinsip kegiatan berkelanjutan sebagai panduan utama, yaitu:

1. Prinsip investasi bertanggung jawab;
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
4. Prinsip Tata Kelola;
5. Prinsip komunikasi yang informatif;
6. Prinsip inklusif;
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pilar dalam membentuk budaya kerja yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan delapan prinsip tersebut, Perseroan konsisten menanamkan budaya keberlanjutan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan nilai, serta penguatan praktik kerja sehari-hari yang mendukung tujuan keberlanjutan. Budaya keberlanjutan ini secara erat terintegrasi dengan nilai-nilai budaya kerja "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi pedoman perilaku di lingkungan BUMN. Nilai-nilai AKHLAK menjadi fondasi dalam membentuk karakter insan Perseroan yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk menginternalisasi budaya keberlanjutan secara efektif, Perseroan menjalankan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari integrasi dalam sistem manajemen dan kebijakan internal, hingga pembentukan perilaku individu yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan berkala, kampanye komunikasi internal, serta pemberdayaan unit kerja untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan inisiatif berkelanjutan. Perseroan juga mendorong keterlibatan aktif setiap karyawan dalam program lingkungan, efisiensi energi, dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari rutinitas kerja.

In its effort to build comprehensive and continuous sustainability, PTP Terminal Nonpetikemas has established a culture of sustainability as a core foundation in its operational activities and strategic decision-making. The Company refers to eight sustainable business principles as its primary guidance, namely:

1. Responsible investment principles;
2. Sustainable business strategies and practices;
3. Social and environmental risk management principles;
4. Governance principles;
5. Informative communication principles;
6. Inclusivity principles;
7. Development of prioritized leading sectors; and
8. Coordination and collaboration principles.

These principles serve as key pillars in fostering a work culture that is not only efficient and productive but also socially and environmentally responsible.

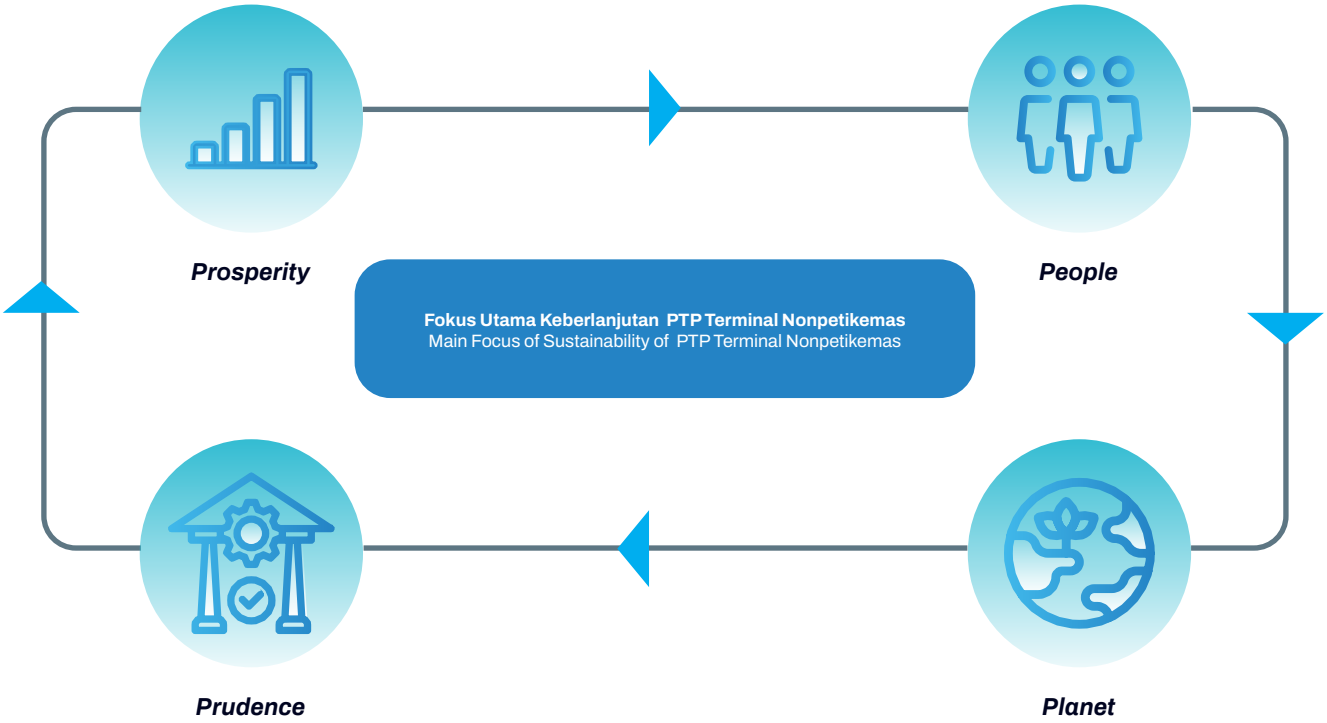
In line with these eight principles, the Company consistently instills a culture of sustainability among all management and employees through value socialization initiatives, reinforcement of sustainability-aligned workplace behaviors, and internal capacity-building activities. The culture of sustainability is closely integrated with the AKHLAK values (Amanah - Trustworthy, Kompeten - Competent, Harmonis - Harmonious, Loyal Loyal, Adaptif - Adaptive, and Kolaboratif - Collaborative), which serve as the behavioral guidelines across all SOEs. These AKHLAK values form the foundation for shaping the character of the Company's personnel to be not only professional but also conscious of their responsibility to contribute to economic, social, and environmental sustainability.

To effectively internalize this sustainability culture, the Company adopts a holistic approach starting with the integration of sustainability principles into management systems and internal policies, and extending to the cultivation of individual behavior that aligns with sustainability objectives. It is achieved through regular training, internal communication campaigns, and the empowerment of work units to identify and implement sustainability initiatives. The Company also promotes active employee involvement in environmental programs, energy efficiency efforts, and community engagement as part of their routine work practices.

UPAYA MENGINTEGRASIKAN KEBERLANJUTAN KE DALAM KEGIATAN OPERASIONAL

EFFORTS TO INTEGRATE SUSTAINABILITY INTO OPERATIONAL ACTIVITIES

Fokus Utama Keberlanjutan PTP Terminal Nonpetikemas
Main Focus of Sustainability of PTP Terminal Nonpetikemas



Prosperity
Kinerja Operasional Keberlanjutan Manfaat Ekonomi yang Optimal;

Prosperity
Sustainable Operational Performance, Optimal Economic Benefits;

People
Katalisator Insan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Berkembang;

People
Catalyzing the People of PT Pelabuhan Tanjung Priok to Thrive;

Planet
Komitmen Menjaga Lingkungan untuk Masa Depan;

Planet
Commitment to Protect the Environment for the Future;

Prudence
Perwujudan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Prudence
Realization of Good Corporate Governance.

PENCAPAIAN PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
ACHIEVEMENTS OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Kinerja Keuangan
Financial Performance



Pendapatan Operasi
Operating Revenue

Rp1.470,39 Miliar / Billion

Menurun 19,90% dari tahun 2023 sebesar Rp1.835,71 miliar.
Decreased by 19.90% from Rp1,835.71 billion in 2023.



Jumlah Aset
Total Assets

Rp933,88 Miliar / Billion

Menurun 11,38% dari tahun 2023 sebesar Rp1.053,84 miliar.
Decreased by 11.38% from Rp1,053.84 billion in 2023.



Total Ekuitas
Total Equity

Rp444,21 Miliar / Billion

Menurun 19,44% dari tahun 2023 sebesar Rp551,43 miliar.
Decreased by 19.44% from Rp551.43 billion in 2023



Laba (Rugi) Bruto
Gross Profit (Loss)

(Rp47,038) Miliar / Billion

Menurun 123,37% dari tahun 2023 sebesar Rp201,29 miliar.
Decreased by 123.37% from Rp201.29 billion in 2023.

Trafik Berdasarkan Kemasan
Traffic by Packaging

Curah Cair
Liquid Bulk

2023		2024
11.604.051 TON	▼ 11,46%	10.274.554 TON

Curah Kering
Dry Bulk

2023		2024
22.494.718 TON	▼ 1,46%	22.167.360 TON

General Cargo

2023		2024
8.667.887 TON	▲ 16,88%	10.131.190 TON

Bag Cargo

2023		2024
3.228.445 TON	▼ 5,57%	3.048.694 TON

Peti Kemas
Container

2023		2024
203.226 BOX	▲ 6,45%	216.339 BOX

Assessment GCG berdasarkan PUGKI

Pada tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas telah memenuhi (*apply*) 71 (tujuh puluh satu) rekomendasi dari 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan PUG-KI 2021.

GCG Assessment based on PUGKI

In 2024, PTP Terminal Nonpetikemas has applied 71 (seventy-one) out of 81 (eighty one) corporate governance implementation recommendations based on the 2021 PUG-KI guidelines.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2020

Dalam merespon berbagai tantangan usaha, diantaranya Pandemi COVID-19, PTP Terminal Nonpetikemas membentuk 3 (tiga) *cluster business*, yaitu *Optimize Existing Business, Full Handle Non-Container Cargo IPC Group, dan Expand Business Beyond IPC.*

In response to various business challenges, including the COVID-19 pandemic, PTP Terminal Nonpetikemas established 3 (three) business clusters, Optimize Existing Business, Full Handle of Non-Container Cargo within IPC Group, and Expand Business Beyond IPC.

2019

Penambahan wilayah operasi Perusahaan yang sebelumnya 5 (lima) cabang menjadi 10 (sepuluh) cabang. Penambahan wilayah ini meliputi Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.

The Expansion of its operational network from 5 (five) branches to 10 (ten), with the addition of Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan.

2018

- **Perubahan fokus bisnis dan bertambahnya wilayah operasi, menjadi Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok, Banten, Panjang, Jambi, dan Bengkulu. Kegiatan usaha yang sebelumnya hanya terminal operator petikemas dan non- petikemas, menjadi terminal operator *multipurpose*.**
- **Perubahan logo dan *branding* Perusahaan, semula PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi PTP *Multipurpose Terminal*.**
- The shift in business focus and the expansion of operational areas have resulted in the establishment of new branches in Tanjung Priok, Banten, Panjang, Jambi, and Bengkulu. The Company's business activities, which previously focused solely on container and non-container terminal operations, have evolved into multipurpose terminal operations.
- As part of its rebranding strategy, the Company underwent name change and logo change from PT Pelabuhan Tanjung Priok to PTP Multipurpose Terminal.

2017

Penyusunan dan Penetapan Visi-Misi PTP *Multipurpose*.

The formulation and establishment of the Vision and Mission of PTP Multipurpose

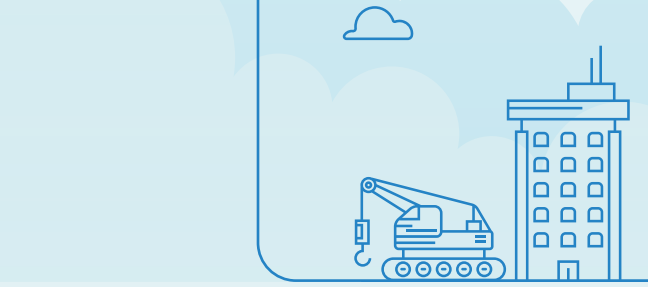
2013

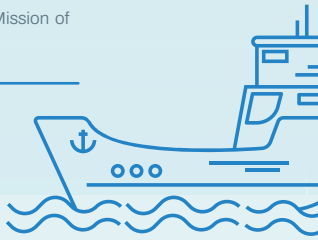
Pada 10 Juli 2013, PT Pelabuhan Tanjung Priok didirikan atas inisiatif strategis dari Pemegang Saham, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia.

On July 10, 2013, PT Pelabuhan Tanjung Priok was established as a strategic initiative by its shareholders, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Multi Terminal Indonesia.

2014

- **Memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 818 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014.**
- **PT Pelabuhan Tanjung Priok resmi beroperasi secara komersial melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.339/3/11/2/PTP 14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok.**
- **Reaktivasi Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, di mana Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi merangkap jabatan sebagai *General Manager* Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.**
- **Penetapan zonasi berdasarkan kebijakan Pelindo II selaku Pemegang Saham, mengakibatkan berubahnya wilayah operasi dan kegiatan usaha PTP *Multipurpose*.**
- Obtained business license as a Port Business Entity through the Decree of the Minister of Transportation No. KP 818 of 2014 dated September 29, 2014.
- PT Pelabuhan Tanjung Priok officially commenced commercial operations following the signing of the Minutes of Agreement by the Company's Board of Directors No. UM.339/3/11/2/PTP 14 dated November 3, 2014, regarding the commencement of operations.
- The reactivation of the Tanjung Priok Port Branch marked an organizational restructuring, whereby the President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok no longer concurrently served as the General Manager of the Tanjung Priok Port Branch.
- The determination of zoning policies by PT Pelabuhan Indonesia II (as the Shareholder) resulted in changes to the operational areas and business activities of PTP Multipurpose.





2021

- Penggabungan usaha BUMN Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero), menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
- Perubahan Pemegang Saham mayoritas, dari Pelindo II ke Pelindo, dengan kepemilikan saham sebesar 99,00%.
- Berdirinya Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)
- Penambahan wilayah operasi/cabang baru, yaitu Sunda Kelapa dan Pontianak.
- The merger of SOEs Ports, PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero), becoming PT Pelabuhan Indonesia (Persero), also known as Pelindo.
- The majority shareholding shifted from Pelindo II to Pelindo, with a 99.00% ownership stake.
- The establishment of the Subholding entity, PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)
- The expansion of its operational areas with the addition of two new branches, Sunda Kelapa and Pontianak.

2022

- Pengembalian Cabang Sunda Kelapa kepada Pelindo. Total jumlah cabang menjadi 11.
- Perubahan Pemegang Saham mayoritas dari Pelindo ke SPMT.
- Perubahan fokus bisnis menjadi *operation and maintenance*.
- Perubahan logo dan *brand* Perusahaan, semula PTP *Multipurpose* Terminal menjadi PTP Terminal Nonpetikemas.
- The Sunda Kelapa Branch was returned to Pelindo, bringing the total number of branches to 11.
- The majority shareholder of the Company also changed from Pelindo to SPMT.
- The Company's business focus was realigned to emphasize operation and maintenance.
- The Change of Company logo and branding, from PTP Multipurpose Terminal to PTP Terminal Nonpetikemas.

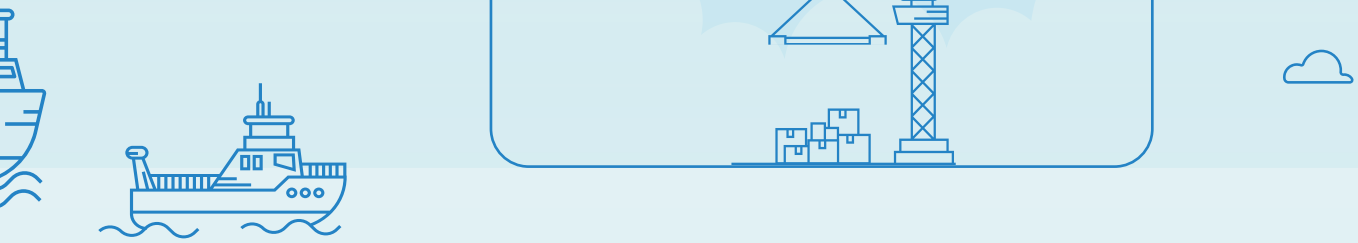
2023

PTP Terminal Nonpetikemas mendorong pengelolaan serta pengembangan layanan baru bernama *Shorebase* yang dimana pada tahun sebelumnya *project Shorebase* ini juga sudah mulai dijalankan oleh Perusahaan.

PTP Terminal Nonpetikemas continues to promote the management and development of a new service offering called Shorebase, a project the Company had initiated in the previous year.

2024

- Serah terima operasi Lini 2 area Pelabuhan Tanjung Priok ke PT Multi Terminal Indonesia.
- Proses Pengalihan Saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas.
- Akuisisi PT Prima Tangki Indonesia dan PT Terminal Nilam Utara.
- Ekspansi layanan di terminal kijing dalam mendukung proyek strategis nasional *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR).
- Telah terjadi penyesuaian Tarif *Port Facility Service* di Cabang Cirebon dan Cabang Banten.
- The operational handover of Line 2 area at Tanjung Priok Port was completed to PT Multi Terminal Indonesia.
- The Transfer of Shares Process of PT Pelindo3 Terminal Petikemas.
- The acquisition of PT Prima Tangki Indonesia and PT Terminal Nilam Utara.
- Service expansion was carried out at Kijing Terminal in support of the National Strategic Project, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR).
- Adjustments to the Port Facility Service Tariff were made at both the Cirebon and Banten branches.



PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





01

Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional

Financial and Operational Highlights


PELINDO

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

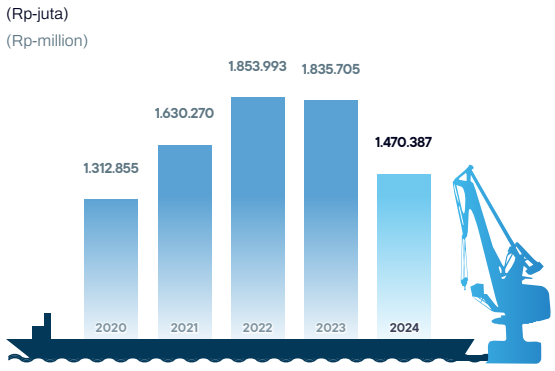
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Pendapatan Operasi Operating Revenue	1.470.387	1.835.705	1.853.993	1.630.270	1.312.855	(19,90) ↓	2,29 ↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.345.472)	(1.512.369)	(1.570.591)	(1.593.313)	(1.370.537)	(11,04) ↓	(0,37) ↓
(Rugi) Laba Bruto (Loss) Gross Profit	124.916	323.336	283.402	36.957	(57.681)	(61,37) ↓	(216,71) ↓
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	2.338	2.455	20.084	446.247	40.178	(4,77) ↓	(43,38) ↓
(Rugi) Laba Usaha (Loss) Income From Operations	(44.916)	203.283	207.722	373.998	(108.066)	(122,10) ↓	(29,70) ↓
Pendapatan Keuangan Financial Income	18.600	20.255	15.363	16.438	24.635	(8,17) ↓	(5,47) ↓
Beban Keuangan Financial Cost	(498)	(1.151)	(521)	(72.352)	(72.687)	(56,73) ↓	(63,09) ↓
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan (Loss) Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	(26.815)	222.386	222.564	318.084	(156.118)	(112,06) ↓	(29,70) ↓
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(4.225)	(4.186)	(2.318)	(2.176)	(1.070)	0,94 ↑	31,61 ↑
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan (Loss) Income Before Corporate Income Tax	(31.040)	218.200	220.246	315.907	(157.188)	(114,23) ↓	(27,71) ↓
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax (Expense) Benefit	2.847	43.615	(54.320)	(62.374)	19.307	(93,47)↓	(31,81)↓
(Rugi) Laba Tahun Berjalan (Loss) Income for the Year	(28.193)	158.059	168.374	253.533	(137.881)	(117,84) ↓	(27,20) ↓
Total (Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive (Loss) Income for the Year**	**(28.193)**	**158.059**	**168.374**	**253.533**	**(137.881)**	**(117,84) ↓**	**(27,20) ↓**

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

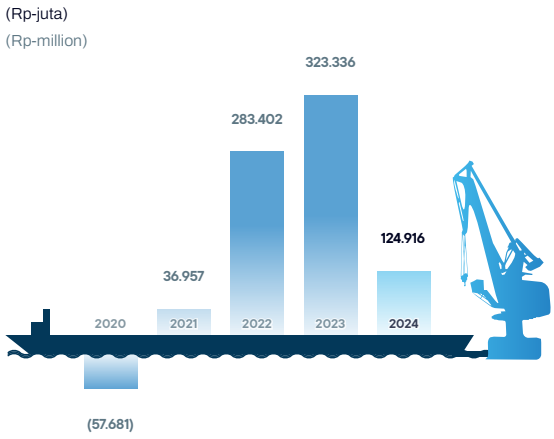
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 20202024 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets	617.308	788.554	975.749	1.068.733	1.270.420	(21,72) ↓	(13,44) ↓
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	316.571	265.289	270.783	143.751	3.402.337	19,33 ↑	(37,81) ↓
Total Aset Total Assets	933.879	1.053.843	1.246.532	1.212.484	4.672.757	(11,38) ↓	(27,53) ↓
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	489.496	501.545	795.560	886.275	1.124.981	(2,40) ↓	(15,33) ↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	173	864	7.599	1.209	3.352.482	(79,98) ↓	(86,12) ↓
Total Liabilitas Total Liabilities	489.669	502.410	803.159	887.484	4.477.462	(2,54) ↓	(35,76) ↓
Ekuitas Equity	444.210	551.433	443.373	324.999	195.295	(19,44) ↓	17,86 ↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	933.879	1.053.843	1.246.532	1.212.484	4.672.757	(11,38) ↓	(27,53) ↓

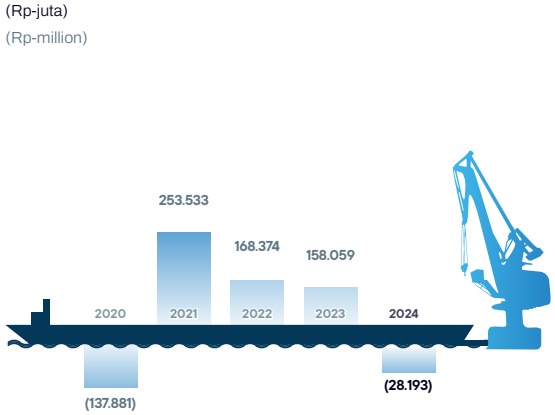
Pendapatan Operasi
Operating Revenue



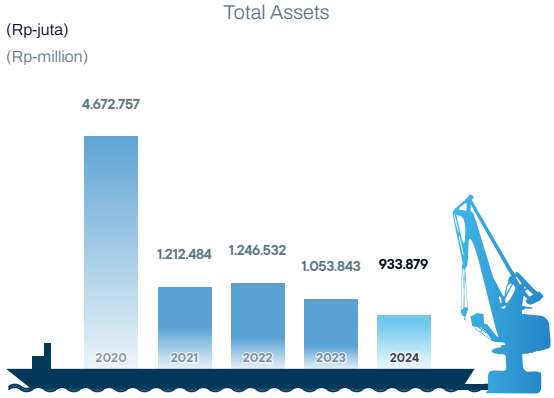
Rugi (Laba) Bruto
(Loss) Gross Profit



Total (Rugi) Laba komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive (Loss) Income for the Year

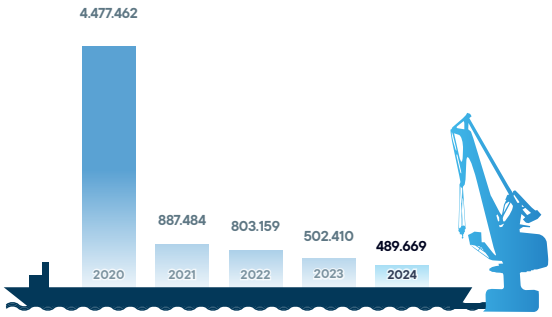


Total Aset
Total Assets



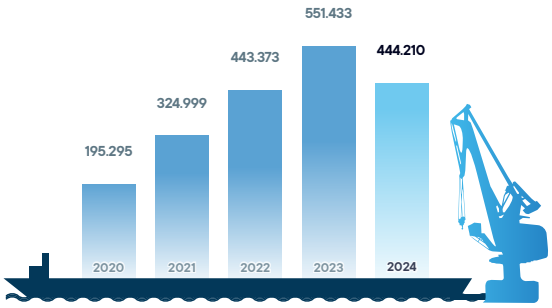
Total Liabilitas
Total Liabilities

(Rp-juta)
(Rp-million)



Total Ekuitas
Total Equity

(Rp-juta)
(Rp-million)



Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022*	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(67.524)	59.307	117.692	221.739	(98.064)	(213,86) ↓
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(32.191)	(88.485)	(100.272)	(19.949)	(21.567)	(63,62) ↓
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(86.185)	(110.027)	(585)	(116.431)	(79.582)	(21,67) ↓
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) In Cash and Cash Equivalents	(185.899)	(139.204)	16.835	85.359	(181.081)	33,54 ↑
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents At Beginning of Year	541.815	681.019	664.185	578.826	759.907	(20,44) ↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents At End of Year	355.916	541.815	681.019	664.185	578.826	(34,31) ↓

*Disajikan kembali sebab reklasifikasi akun tertentu
*Restated due to the reclassification of certain accounts.

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)							
Rasio Lancar Current Ratio	126,11	157,22	122,65	128,92	131,08	(19,79) ↓	(0,77) ↓
Rasio Cepat Quick Ratio	100,67	121,17	106,91	99,37	86,30	(16,92)↓	3,13↑
Rasio Kas Cash Ratio	72,71	108,03	85,60	74,94	60,05	(32,69) ↓	3,90 ↑
Rasio Imbal Hasil terhadap Aset (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)	(3,02)	14,99	13,32	19,71	(2,95)	(120,14) ↓	0,46 ↑

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	(6,17)	28,66	37,98	63,57	(70,60)	(121,53) ↓	(38,58) ↓
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)							
Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) Debt to Asset Ratio (DAR)	52,43	47,67	63,51	68,99	95,82	9,98 ↑	(11,46) ↓
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)	110,23	91,11	181,15	610,82	1.452,17	20,99 ↑	(40,29) ↓
Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility							
Receivable Turn Over (x)	28,90	20,86	17,50	12,82	11,62	38,54 ↑	19,99 ↑
Average Collection Period (days)	12,63	16,72	20,86	28,22	42,43	(24,46) ↓	(21,52) ↓
Rasio Keuangan Lainnya (%) Other Financial Ratios (%)							
Operating Ratio	103,20	89,03	89,70	104,15	111,05	15,92 ↑	(1,46) ↓
Working Ratio	30,2	87,05	88,29	86,09	89,77	65,31 ↑	(19,58) ↓
Profit Margin	(191,77)	8,61	9,08	15,58	(12,58)	(2.327,29) ↓	72,43 ↑

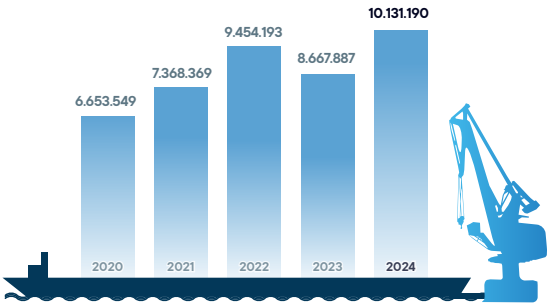
IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (2023-2024) (%) Increase (Decrease) (2023-2024)	
Trafik Berdasarkan Kemasan Traffic by Packaging								
General Cargo	Ton Tons	10.131.190	8.667.887	9.454.193	7.368.369	6.653.549	16,88	↑
	M³	1.424.987	1.341.856	841.577	1.114.715	-	6,20	↑
Bag Cargo	Ton Tons	3.048.694	3.228.445	3.119.762	3.110.737	2.500.805	(5,57)	↓
Curah Cair Liquid Bulk	Ton Tons	10.274.554	11.604.051	10.306.251	8.854.729	7.009.951	(11,46)	↓
Curah Kering Dry Bulk	Ton Tons	22.167.360	22.494.718	23.128.255	24.555.308	21.356.908	(1,46)	↓
Kendaraan Vehicles	Unit	101.127	142.529	78.487	68.974	47.009	(29,05)	↓
Hewan Animals	Ekor Headcount	535.937	373.232	340.909	400.239	438.538	43,59	↑

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (2023-2024) (%) Increase (Decrease) (2023-2024)	
Peti Kemas Containers	Box	216.339	203.226	190.223	236.069	141.811	6,45	↑
	Teus	233.581	216.891	199.298	245.493	147.981	7,70	↑
Jumlah Total	Ton Tons	45.621.798	45.995.101	46.008.464	43.889.143	38.910.552	(0,81)	↓
	M³	1.424.987	1.341.856	841.577	1.114.715	-	6,20	↑
	Box	216.339	203.226	190.223	236.069	141.811	6,45	↑
	Teus	233.581	216.891	199.298	245.493	147.981	7,70	↑
	Unit	101.127	142.529	78.487	68.974	47.009	(29,05)	↓
	Ekor Headcount	535.937	373.232	340.909	400.239	438.538	43,59	↑

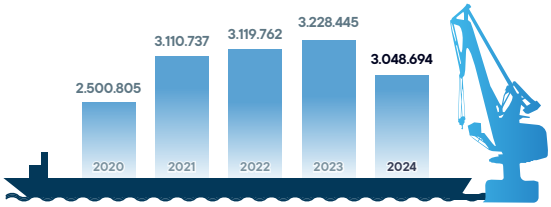
General Cargo

Ton
Tons



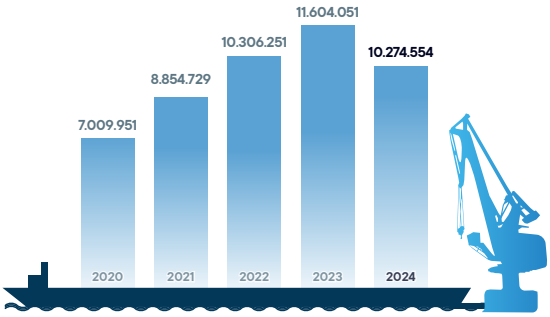
Bag Cargo

Ton
Tons



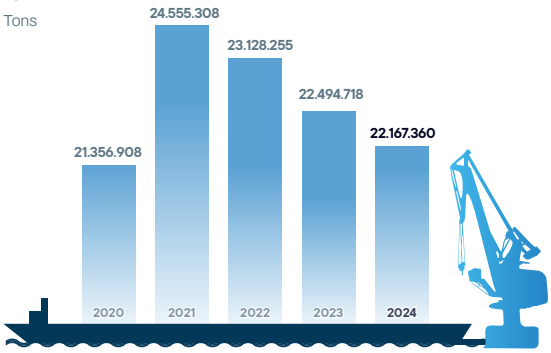
Curah Cair
Liquid Bulk

Ton
Tons

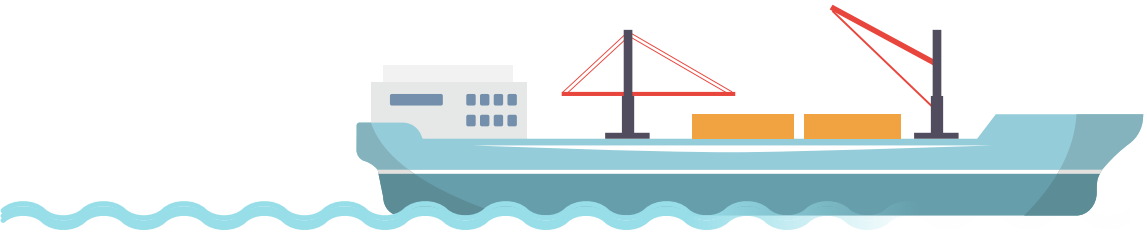


Curah Kering
Dry Bulk

Ton
Tons



IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS



Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan belum pernah melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*). Perusahaan tidak menerbitkan dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia maupun bursa saham lain. Dengan demikian, tidak terdapat pengungkapan terkait:

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:
   a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;
   b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan
   c. Volume perdagangan saham pada bursa efek tempat saham dicatatkan.
2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:
   a. Harga penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan
   b. Volume perdagangan saham pada bursa efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 tahun buku terakhir.
3. Perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, maka perusahaan wajib menjelaskan alasan penghentian sementara dan/atau pembatalan pencatatan saham tersebut; dan
4. Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penghentian sementara dan/atau pembatalan pencatatan saham masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan.

Jumlah saham beredar PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebanyak 25.000 lembar saham dengan kepemilikan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebanyak 24.750 lembar saham atau 99,00% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 250 lembar saham atau 1,00%.

As of December 31, 2024, the Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO). The Company has not issued or listed its shares on the Indonesia Stock Exchange or any other stock exchange. Accordingly, the following disclosures are not applicable:

1. Information presented in tabular form, including:
   a. Market capitalization based on stock prices at the exchange where the shares are listed;
   b. Highest, lowest, and closing share prices on the exchange; and
   c. Share trading volume on the stock exchange where the shares are listed.
2. Information presented in graphical form, including at minimum:
   a. Closing prices based on stock exchange data; and
   b. Share trading volume for each quarter over the last 2 fiscal years.
3. In the event of a trading suspension and/or share delisting within the fiscal year, the Company is required to disclose the reasons for the suspension and/or delisting; and
4. Any actions taken to resolve the trading suspension and/or share delisting if still ongoing by the end of the annual reporting period.

The total outstanding shares of PT Pelabuhan Tanjung Priok amount to 25,000 shares, with PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) holding 24,750 shares or 99.00%, and PT Pelabuhan Indonesia Investama holding 250 shares or 1.00%.

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

1. Proses Pengalihan Saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas.

   Pada tanggal 04 Juli 2024, PT Pengerukan Indonesia menyampaikan minat untuk melakukan akuisisi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas dalam rangka mendukung program Pemurnian Bisnis PT Pelindo *Group* yang mana disambut baik oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.

   Sebagai langkah awal, dilakukan proses valuasi saham PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah ditunjuk oleh PT Pelindo Jasa Maritim dengan hasil nilai pasar 100% ekuitas PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas adalah sebesar Rp678.882.065 (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

   Pada tanggal 30 September 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Pengerukan Indonesia menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat nomor KS.01/30/9/2/TRAP/DIRU/PTP-24 dan nomor: HM.03.03/30/9/2/SPH/DIRUT/RKD-24 yang menyepakati bahwa harga jual beli saham adalah sebesar Rp1.368.882,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) untuk setiap saham dengan total harga pembelian saham atas 500 saham dengan nilai sebesar Rp684.441.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

   Sampai dengan akhir tahun 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Surat nomor: PU.02.02/5/11/1/DK/DK/KPTP-24 tanggal 05 November 2024 perihal Persetujuan Pengalihan Saham PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas Kepada PT Pengerukan Indonesia, serta persetujuan dari PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia Investama melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor: SK.03/15/11/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan nomor: SK.03/15/11/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Persetujuan Pelepasan Saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas milik PT Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Serah terima operasi Lini 2 area Pelabuhan Tanjung Priok ke MTI
   a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
      1 Februari 2024.
   b. Reduksi pendapatan dan novasi perjanjian.
   c. Lokasi lapangan 005 Selatan, Lapangan Ex Perca, Lapangan Ex Trisari, Lapangan Ex Glorius, Gudang Ex Arsa dan Lapangan Ex Arsa.

1. The Transfer of Shares Process of PT Pelindo3 Terminal Petikemas.
   On July 4, 2024, PT Pengerukan Indonesia expressed its interest in acquiring the subsidiary of PT Pelabuhan Tanjung Priok, namely PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas, as part of the PT Pelindo Group's Business Purification Program, which was positively welcomed by PT Pelabuhan Tanjung Priok.

   As an initial step, a share valuation of PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas was carried out by a Office of Public Appraisal Service (KJPP) appointed by PT Pelindo Jasa Maritim, resulting in a market value of 100% equity in PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas of Rp678,882,065 (Six Hundred Seventy Eight Million Eight Hundred Eighty Two Thousand Sixty Five Rupiah).

   On September 30, 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT Pengerukan Indonesia signed a Conditional Share Purchase Agreement No. KS.01/30/9/2/TRAP/DIRU/PTP-24 and No. HM.03.03/30/9/2/SPH/DIRUT/RKD-24, agreeing that the share purchase price is Rp1,368,882 (one million three hundred sixty eight thousand eight hundred eighty two rupiah) per share, with a total share purchase price for 500 shares amounting to Rp684,441,000 (six hundred eighty four million four hundred forty one thousand rupiah).

   By the end of 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok had obtained approval from the Board of Commissioners through Letter No. PU.02.02/5/11/1/DK/DK/KPTP-24 dated November 5, 2024, regarding the Approval of the Transfer of Shares in PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas to PT Pengerukan Indonesia. Additionally, approvals were obtained from PT Pelindo Multi Terminal and PT Pelabuhan Indonesia Investama through the Circular Resolution of Shareholders Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok, No. SK.03/15/11/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/15/11/2/DHKP/DIRU/PII-24, concerning the Approval for the Divestment of Shares in PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas owned by PT Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Operational Handover of Line 2 Area at Tanjung Priok Port to MTI
   a. Date of corporate action: February 1, 2024

   b. Revenue reduction and novation of agreements
   c. Affected locations South Yard 005, Ex-Perca Yard, Ex-Trisari Yard, Ex-Glorius Yard, Ex-Arsa Warehouse, and Ex-Arsa Yard

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI
BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS HIGHLIGHTS

Hingga 31 Desember 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok belum melakukan aktivitas penerbitan dan perdagangan efek lainnya di luar saham seperti obligasi, sukuk, atau obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat pengungkapan terkait:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
2. Tingkat bunga/imbalan;
3. Tanggal jatuh tempo; dan
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2023 dan 2024.

As of December 31, 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok has not engaged in the issuance or trading of securities other than shares, such as bonds, sukuk, or convertible bonds. Accordingly, the following disclosures are not applicable:

1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;
2. Interest/profit rates;
3. Maturity dates; and
4. Bond/sukuk credit ratings for the years 2023 and 2024.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

Hingga akhir tahun 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) atau pendanaan berbentuk utang lainnya.

As of the end of 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok has not issued any Medium Term Notes (MTNs) or undertaken other forms of debt financing.



PERISTIWA PENTING
SIGNIFICANT EVENT



29 Januari 2024
January 29, 2024

PTP Terminal Nonpetikemas mendukung kegiatan ekspor kopi kepahiang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi.
PTP Terminal Nonpetikemas supports coffee export activities in Kepahiang in Port of Pulau Baai Bengkulu, by the Financial Services Authority (OJK) of South Sumatra Province in collaboration with the Provincial Government.



12 Februari 2024
February 12, 2024

PTP Terminal Nonpetikemas berkolaborasi dengan Regional II dan Pelindo *Group* yang beroperasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok mengadakan kegiatan *Management Walktrough*.
PTP Terminal Nonpetikemas also collaborated with Pelindo Regional II and Pelindo Group operating within the Tanjung Priok Port area to conduct a Management Walkthrough activity.



18 Maret 2024
March 18, 2024

Terdapat perubahan jajaran Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yaitu Indra Hidayat Sani sebagai Direktur Utama menggantikan Rino Wisnu Putro, Kalbar Yanto sebagai Direktur Opersi menggantikan Dwi Rahmad Toto, dan Dwi Rahmad Toto menjadi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.
There were changes in the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), with Indra Hidayat Sani appointed as President Director, replacing Rino Wisnu Putro; Kalbar Yanto appointed as Director of Operations, replacing Dwi Rahmad Toto; and Dwi Rahmad Toto appointed as Director of Commercial and Business Development.



1 April 2024
April 1, 2024

Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok secara resmi mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham. Hal ini tertuang dalam Keputusan Sirkluer Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT.24 dan nomor SK.03/1/4/1/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam Keputusan Pemegang Saham ini mengangkat Bapak Prakosa Hadi T. sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan dengan hormat Bapak Ogi Rulino sebagai Komisaris Utama, penetapan Bapak Lukijanto sebagai Komisaris Independen.
The Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok was also officially restructured based on the Shareholders' Circular Resolution Outside the General Meeting of Shareholders, documented in Decree No. SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT.24 and No. SK.03/1/4/1/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, concerning the change in the composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok. In this resolution, Mr. Prakosa Hadi T. was appointed as President Commissioner, Mr. Ogi Rulino was honorably discharged from his role as President Commissioner, and Mr. Lukijanto was appointed as Independent Commissioner.



21 Mei 2024
May 21, 2024

PTP Terminal Nonpetikemas menyelenggarakan acara pisah sambut Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus silaturahmi halalbihalal dengan para pekerja PTP Terminal Nonpetikemas di Jakarta, 6 Mei 2024. Acara ini diadakan di *Function Hall* lantai 5 Pelindo Tower dan diikuti oleh seluruh pekerja Cabang PTP Terminal Nonpetikemas yang bergabung melalui media *zoom*.

Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah baru. PTP Terminal Nonpetikemas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ogi Rulino, Bapak Sabri Saiman, dan Bapak Rino Wisnu Putro atas semua arahan dan dedikasi yang telah diberikan dalam kebersamaan demi kemajuan PTP Terminal Nonpetikemas mewujudkan visi dan misi. Selamat mengemban posisi baru semoga amanah.

PTP Terminal Nonpetikemas held a farewell and welcoming ceremony for the Board of Commissioners and Directors, which also served as a Halalbihalal gathering with employees on May 6, 2024, in Jakarta. The event took place at the Function Hall on the 5th floor of Pelindo Tower and was attended by all employees from PTP Terminal Nonpetikemas branches via Zoom.

This farewell marks not an end, but the beginning of a new chapter. PTP Terminal Nonpetikemas extends its sincere appreciation to Mr. Ogi Rulino, Mr. Sabri Saiman, and Mr. Rino Wisnu Putro for their guidance and dedication in advancing the Company's mission and vision. We wish them continued success in their new roles and responsibilities.



28 Juli 2024
July 28, 2024

Kerjasama Pengoperasian dan Perawatan TUKS PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) dimana PT TLB menunjuk PTP Terminal Nonpetikemas sebagai operator bongkar muat untuk kargo batubara dan pemeliharaan alat-alat diterminal untuk kepentingan sendiri PT TLB untuk memastikan ketersediaan listrik di bengkulu terpenuhi dengan baik.
The Company entered into an Operational and Maintenance Partnership Agreement with PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB), under which PTP Terminal Nonpetikemas was appointed as the terminal operator for coal cargo handling and maintenance of equipment at the private terminal operated by PT TLB, to ensure the reliable supply of electricity in the Bengkulu region.



25 Juni 2024
June 25, 2024

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Terminal Nonpetikemas) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 bertempat di Gedung Pelindo Tower Lt.16 Tanjung Priok Jakarta Utara.
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Terminal Nonpetikemas) also convened the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2023 at Pelindo Tower, 16th Floor, Tanjung Priok, North Jakarta.



13 Agustus 2024
August 13, 2024

PTP Terminal Nonpetikemas *Branch* Palembang mengadakan acara *coffee morning* Bersama *Customer* Pelabuhan Palembang di The Royal Hallroom Lt. 2 Palembang Golf Club.

Melalui *coffee morning* ini diharapkan hubungan antara entitas Pelindo *Group* di pelabuhan Palembang dengan para *stakeholder* serta *customer* dapat semakin meningkat sehingga pelayanan operasional dapat semakin optimal.

PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch organized a Coffee Morning event with Port Customers at The Royal Hallroom, 2nd Floor, Palembang Golf Club.

The coffee morning event aimed to strengthen relationships between Pelindo Group entities at the Palembang Port and key stakeholders and customers, with the shared goal of enhancing the quality and efficiency of port operations.



6 September 2024
September 6, 2024

PT Pelabuhan Tanjung Priok atau dikenal dengan PTP Terminal Nonpetikemas terus mengambil langkah proaktif dalam menghadapi persaingan ketat di sektor layanan jasa terminal nonpetikemas. Melalui program *High Potential Employee* (HIPO), yang dimulai sejak April 2023, PTP Terminal Nonpetikemas memperkuat kompetensi inti teknis para karyawannya.

Program HIPO dirancang secara khusus untuk memaksimalkan pengembangan kompetensi melalul metode pembelajaran berbasis pengalaman dan bimbingan dari para ahli di bidangnya. Sebanyak 30 peserta dari berbagai divisi yang memiliki minat dan bakat di bidang Operasi, Rendal, HSSE, serta spesialisasi penanganan mencapai puncaknya dengan acara kelulusan pelatihan yang diselenggarakan pada 6 September 2024 di Pelindo Tower, Jakarta Utara.

Lulusan program HIPO ini akan terus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui berbagai program lanjutan, termasuk pelatihan keterampilan dasar, partisipasi dalam program strategis terminalisasi, serta kolaborasi pengembangan talenta operasi bersama SBM ITB. Program HIPO ini merupakan salah satu wujud investasi jangka panjang PTP Terminal Nonpetikemas dalam pengembangan karyawannya, sekaligus sebagai persiapan menghadapi tantangan masa depan di industri jasa terminal nonpetikemas yang semakin kompetitif. Dengan SDM Multipurpose yang andal, PTP Terminal Nonpetikemas siap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

PT Pelabuhan Tanjung Priok, also known as PTP Terminal Nonpetikemas, continues to take proactive measures in navigating the intense competition within the non-container terminal services sector. Through the High Potential Employee (HIPO) program, launched in April 2023, the Company is focused on strengthening the technical core competencies of its employees.

The HIPO program is specifically designed to maximize competency development through experiential learning methods and mentorship from industry experts. A total of 30 participants from various divisions, who demonstrated strong interest and talent in Operations, Planning and Control (Rendal), HSSE, and cargo handling specialization, successfully completed the program, culminating in a graduation ceremony held on September 6, 2024, at Pelindo Tower, North Jakarta.

Graduates of the HIPO program will continue to receive development opportunities through a range of follow-up initiatives, including basic skill training, participation in terminalization strategic programs, and collaborative talent development programs with SBM ITB. The HIPO program represents a long-term investment by PTP Terminal Nonpetikemas in employee development and serves as part of the Company's preparation to meet future challenges in the increasingly competitive non-container terminal services industry. With a reliable and capable multipurpose workforce, PTP Terminal Nonpetikemas is well-positioned to meet customer demands.



21 Oktober 2024
October 21, 2024

Jakarta, 21 Oktober 2024 Direktur Utama PTP Terminal Nonpetikemas Bapak Indra Hidayat Sani memberikan semangat dan berinteraksi langsung dengan para pegawai melalui program CEO *Talk*. CEO Talk merupakan program yang diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kepada para pegawai dan merupakan media bagi para pegawai untuk dapat berinteraksi langsung dengan Direktur Utama. Tema yang diangkat pada CEO *Talk* kali ini adalah "*Advancing Forward By Creating More Value*" . Bapak Indra Hidayat Sani menyampaikan pentingnya untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif, selain itu sharing tentang pencapian perusahaan sampai dengan saat ini dan memeberikan motivasi kepada para pekerja. Para pegawai PTP Terminal Nonpetikemas terlihat antusias mengikuti CEO *Talk* dan memberi pertanyaan kepada Bapak Direktur Utama. Untuk memeriahkan suasana, panitia membagikan *merchandise* PTP Terminal Nonpetikemas bagi pemenang kuis interaktif.

Jakarta, October 21, 2024 – The President Director of PTP Terminal Nonpetikemas, Mr. Indra Hidayat Sani, inspired and engaged employees directly through the CEO Talk program. CEO Talk is an initiative designed to boost employee morale and serve as a platform for direct interaction between the President Director and employees. The theme of this session was "Advancing Forward by Creating More Value." Mr. Indra Hidayat Sani emphasized the importance of thinking creatively and innovatively, shared the Company's latest achievements, and offered motivational insights to the employees. PTP Terminal Nonpetikemas employees participated enthusiastically, actively engaging with the President Director during the Q&A session. To add to the excitement, the organizing team distributed PTP Terminal Nonpetikemas merchandise to winners of the interactive quiz.



21 November 2024
October 21, 2024

Jakarta, 21 November 2024. PT Pelabuhan Tanjung Priok atau yang dikenal dengan PTP Terminal Nonpetikemas untuk keempat kalinya kembali membawa pulang penghargaan peringkat Perak dalam ajang Penganugerahan SNI Award 2024 kategori Organisasi Menengah dan Besar Jasa, yang diselenggarakan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) di *Assembly Hall*, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. SNI Award merupakan sebuah penghargaan tertinggi dari Pemerintahan Republik Indonesia skala nasional bagi organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten dengan kinerja unggul dan berkelanjutan. Penganugerahan SNI Award diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional. PTP Terminal Nonpetikemas sendiri telah menjalankan ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security Code*) sebagi bentuk pemenuhan Standar Nasional Indonesia. PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk terus memenuhi standardisasi dalam segala aspek operasional bisnis seperti pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian Perusahaan dengan selalu menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

Jakarta, November 21, 2024, For the fourth consecutive time, PT Pelabuhan Tanjung Priok, also known as PTP Terminal Nonpetikemas, proudly received the Silver Award in the 2024 SNI Award under the Medium and Large Service Organization category. The award ceremony was hosted by the National Standardization Agency of Indonesia (BSN) at the Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC). The SNI Award is the highest national recognition from the Government of the Republic of Indonesia for organizations that consistently apply the Indonesian National Standards (SNI) with excellent and sustainable performance. Organized by BSN, the award is a part of the National Quality Month celebration. PTP Terminal Nonpetikemas has implemented ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and the ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) as part of its commitment to meeting Indonesian National Standards. PTP Terminal Nonpetikemas remains dedicated to upholding standardization across all aspects of its operations, including risk management and corporate control, while continuously ensuring the quality of service delivered to port service users.



20 Desember 2024
December 20, 2024

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) Dan Perumda Panca Karya ini. Acara ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kami percaya bahwa kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Secara Umum MoU ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji kemungkinan-kemungkinan serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kerjasama yang akan dilaksanakan. Untuk selanjutnya MoU ini bertujuan pada membangun sinergi dan kemitraan antara PTP sebagai BUMN bersama dengan Maluku Energy Abadi (persero) dan perumda Panca Karya sebagai unsur pemeintah daerah, dengan prinsip saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah dan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku dan persetujuan masing-masing.

The Memorandum of Understanding (MoU) signed between PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), and Perumda Panca Karya represents a strategic step toward strengthening collaboration and improving community welfare. We believe this partnership will bring positive impacts to society and contribute to enhancing the quality of life. In general, the MoU aims to explore and assess potential opportunities and to prepare all necessary elements for the implementation of the proposed collaboration. Moving forward, this MoU is intended to establish synergy and partnership between PTP, as a State-Owned Enterprise (SOE), and Maluku Energi Abadi (Perseroda) along with Perumda Panca Karya as regional government entities. The collaboration will be based on a mutually beneficial approach that leverages each party's respective potential, grounded in the principles of good governance and sound corporate practices, and fully compliant with all applicable laws, regulations, procedures, and mutual approvals.

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





02

Laporan Manajemen

Management Report



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



PRAKOSA HADI TAKARIYANTO

Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris memandang bahwa strategi Perusahaan tahun 2024 yang dilakukan oleh Direksi telah berjalan dengan cukup baik. Kami telah melakukan fungsi pengawasan, memberikan dukungan, rekomendasi dan saran yang diperlukan dalam implementasi strategi serta kebijakan tersebut.

The Board of Commissioners considers that the strategy executed by the Board of Directors throughout 2024 has been implemented effectively. We have performed our supervisory function and provided the necessary support, recommendations, and advice in the implementation of the strategy and related policies.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT Pelabuhan Tanjung Priok mampu menghadapi berbagai macam tantangan di tengah ketegangan geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, volatilitas pasar keuangan, serta perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi tambahan risiko negatif bagi perekonomian global. Dewan Komisaris menilai Perusahaan dapat membukukan kinerja yang cukup baik. Bersama ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pengawasan kegiatan Perusahaan untuk tahun buku 2024 yang merupakan bagian dari penerapan prinsip Governansi.

LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2013 tidak lepas dari inisiatif strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai entitas induk, setelah *merger* BUMN sektor pelabuhan pada tahun 2021, menjadi *Holding* BUMN Sektor Pelabuhan dengan nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Kegiatan usaha utama PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah *stevedoring, cargodoring, receiving and delivery* dan penumpukan.

Memasuki tahun 2018, terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana PT Pelabuhan Tanjung Priok mulai melakukan transformasi yang meliputi perubahan kegiatan usaha utama yang semula "Terminal Operator Tanjung Priok" menjadi "Terminal Operator *Multipurpose*" yang menangani kargo *multipurpose* (kargo kemasan, perlengkapan proyek, hasil ternak *livestock*, dan kargo umum lainnya), curah cair, dan curah kering.

Perubahan fokus bisnis Perusahaan mengakibatkan bertambahnya wilayah operasi, yang semula hanya di terminal *multipurpose* Cabang Tanjung Priok, menjadi 11 wilayah operasi, yaitu Cabang Tanjung Priok, Cabang Banten, Cabang Panjang, Cabang Bengkulu, Cabang Jambi, Cabang Teluk Bayur, Cabang Palembang, Cabang Cirebon, Cabang Pangkal Balam, Cabang Pontianak, dan Cabang Tanjung Pandan.

Melalui transformasi ini, Perusahaan melakukan pengembangan layanan yang berfokus pada bisnis kargo *multipurpose* di seluruh wilayah Indonesia (Nusantara) hingga ke luar negeri (regional dan internasional). PT Pelabuhan Tanjung Priok pun menjadi operator terminal *multipurpose* pertama di Indonesia yang menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, *general cargo*, dan lain-lain.

Di tahun 2022, selaras dengan pembentukan *holding* dan *sub holding* BUMN sektor pelabuhan, di mana pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan yang semula adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), fokus bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami perubahan, yang semula "Terminal Operator *Multipurpose*" menjadi "*Operation and Maintenance*". Perubahan fokus bisnis tersebut mengharuskan PT Pelabuhan Tanjung Priok menyusun sasaran dan strategi bisnis baru yang disesuaikan dengan hasil pemetaan posisi Perusahaan berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Gratitude to the God Almighty for His Blessing and Grace which has enabled PT Pelabuhan Tanjung Priok to overcome various challenges in the midst of geopolitical tension, tightening monetary policy, financial market volatility, economic slowdown in China, which adds to the negative risks facing the global economy. The Board of Commissioners views that the Company was able to book a robust performance. Accordingly, we hereby present the Board of Commissioners' accountability report on the supervision of the Company's activities for the 2024 fiscal year, as part of the implementation of governance principles.

BACKGROUND OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DEVELOPMENT

The establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2023 was part of a strategic initiatives by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which following the 2021 merger of SOEs in the port sectors, currently serves as the Holding Company under the name PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo. PT. Pelabuhan Tanjung Priok core business activities included stevedoring, cargodoring, receiving and delivery, field and stacking activities.

In 2018, the Company underwent a significant transformation, shifting its primary business activity from "Tanjung Priok Terminal Operator" to "Multipurpose Terminal Operator," expanding its services to handle multipurpose cargo (packaged cargo, project equipment, livestock, and other general cargo), liquid bulk, and dry bulk cargo.

This business focus shift resulted in an expansion of operational areas, from initially operating only in the multipurpose terminal at the Tanjung Priok Branch to managing 11 operational areas: Tanjung Priok, Banten, Panjang, Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Pangkal Balam, Pontianak, and Tanjung Pandan branches.

Through this transformation, the Company expanded its services to focus on the multipurpose cargo business across the Indonesian archipelago and beyond (regional and international). PT Pelabuhan Tanjung Priok thus became the first multipurpose terminal operator in Indonesia to handle the loading and unloading of liquid bulk, dry bulk, general cargo, and other types of cargo.

In 2022, in line with the establishment of the port sector holding and sub-holding structure, the Company's controlling shareholder changed from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal (SPMT). Accordingly, PT Pelabuhan Tanjung Priok's business focus shifted from "Multipurpose Terminal Operator" to "Operation and Maintenance." This shift required the Company to formulate new business goals and strategies aligned with its corporate positioning as determined through a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis, later outlined in the 2021–2025 Long-Term Corporate Plan (RJPP).

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, Perusahaan harus memperbaiki kekurangan dan menjadi lebih agresif dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam melakukan transformasi operasi dimana hal tersebut perlu disesuaikan pada sasaran dan strategi yang akan diimplementasikan kedepannya.

Based on the SWOT analysis, the Company recognized the need to address its weaknesses and adopt a more aggressive approach in business operations, particularly in transforming its operational model to align with future strategic objectives.

Sebagai tindak lanjut perubahan fokus bisnis tersebut, PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Pelindo Multi Terminal sebagai induk perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama pengoperasional dan pemeliharaan terminal *multipurpose* di wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal dengan jangka waktu 10 tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2032.

In order to implement the change in business focus, PT Pelabuhan Tanjung Priok and its parent company, PT Pelindo Multi Terminal, signed an operational and maintenance agreement for multipurpose terminals under the working area of PT Pelindo Multi Terminal. This agreement is valid for 10 years, effective from January 1, 2022, to December 31, 2032.

Hingga akhir tahun 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan kegiatan usaha utama, yaitu jasa terminal nonpetikemas, yang meliputi sebagaimana dijelaskan pada bagan berikut:

As of the end of 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok focuses on the business core, particularly on non-container terminal services, as further illustrated in the following:

Jasa dan Layanan PTP Terminal Nonpetikemas
Product and Services of PTP Terminal Nonpetikemas



Barang-barang yang dilayani Perusahaan yaitu kargo *multipurpose* (kargo kemasan, perlengkapan proyek, hasil ternak *livestock*, dan kargo umum lainnya termasuk hewan dan kendaraan), curah cair, dan curah kering. Jasa dan layanan lainnya yang disediakan dan berkontribusi terhadap pendapatan Perusahaan, yaitu:

1. Kerja sama pelabuhan;
2. Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik (TBAL)
3. Pengusahaan alat; dan
4. Terminal petikemas.

The types of cargo handled by the Company include multipurpose cargo (packaged cargo, project equipment, livestock, and other general cargo, including animals and vehicles), liquid bulk, and dry bulk. Other services and offerings that contribute to the Company's revenue include:

1. Port cooperation;
2. Land, building, water, and electricity operations (TBAL);
3. Equipment operations; and
4. Container terminal operations.

PT Pelabuhan Tanjung Priok beroperasi di 11 cabang Pelabuhan, yaitu:

1. Cabang Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta
2. Cabang Banten di Provinsi Banten
3. Cabang Cirebon di Provinsi Jawa Barat
4. Cabang Jambi, termasuk didalamnya wilayah Pelabuhan Muara Sabak dan TUKS di Provinsi Jambi
5. Cabang Palembang termasuk didalamnya wilayah Pelabuhan Sungai Lais dan TUKS di Provinsi Sumatera Selatan
6. Cabang Pangkal Balam termasuk di dalamnya wilayah Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Belinyu, di Provinsi Bangka Belitung
7. Cabang Tanjung Pandan di Provinsi Bangka Belitung

PT Pelabuhan Tanjung Priok operates across 11 port branches, particularly:

1. Tanjung Priok Branch in DKI Jakarta Province
2. Banten Branch in Banten Province
3. Cirebon Branch in West Java Province
4. Jambi Branch, including the Muara Sabak Port and TUKS areas in Jambi Province
5. Palembang Branch, including Sungai Lais Port and TUKS areas in South Sumatra Province
6. Pangkal Balam Branch, including Muntok Port and Belinyu Port in the Bangka Belitung Province
7. Tanjung Pandan Branch in Bangka Belitung Province

8. Cabang Bengkulu di Provinsi Bengkulu
9. Cabang Panjang di Provinsi Lampung
10. Cabang Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat
11. Cabang Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat termasuk didalamnya wilayah Pelabuhan Dwikora, Ketapang, Kijing, Sintete (Pangkalan Singkawang dan Sambas).

Untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, di tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok berhasil melakukan pengembangan usaha pengoperasian *ship to ship* dengan PT Borneo Indobara, PT EPS Shipping, PT Multi Guna Maritim dan PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya.

PERAN PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI PELABUHAN DAN BONGKAR MUAT BARANG NONPETIKEMAS

Sebagaimana diketahui, Pelabuhan memiliki peranan dalam menghubungkan moda transportasi laut dan darat (*intermoda transportation*), juga menjadi titik vital dalam rantai pasokan global yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, dan menjadi gerbang perekonomian bagi suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pelabuhan pun dikembangkan untuk memastikan agar kegiatan transportasi dan logistik di suatu negara berjalan dengan lancar.

Pelabuhan terdiri dari beberapa terminal sesuai dengan fungsinya, diantaranya terminal penumpang, terminal petikemas, terminal barang nonpetikemas atau *multipurpose*. Terminal sebagai bagian dari pelabuhan yang terintegrasi menjadi fasilitator perdagangan bahkan katalisator aktivitas ekonomi suatu negara. Terminal nonpetikemas melayani semua jenis barang, seperti kargo, curah cair, curah kering, termasuk hewan dan kendaraan.

8. Bengkulu Branch in Bengkulu Province
9. Panjang Branch in Lampung Province
10. Teluk Bayur Branch in West Sumatra Province
11. Pontianak Branch in West Kalimantan Province, including Dwikora, Ketapang, Kijing, Sintete Ports (Pangkalan Singkawang and Sambas)

In order to promote sustainable business growth, in 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok successfully expanded its business by operating ship to ship services in collaboration with PT Borneo Indobara, PT EPS Shipping, PT Multi Guna Maritim, and PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya.

THE COMPANY'S ROLE IN THE PORT AND NON-CONTAINER CARGO HANDLING INDUSTRY

As is widely known, ports play a crucial role in connecting sea and land transportation modes (intermodal transportation). They are also vital hubs in the global supply chain, playing a key role in international trade and serving as economic gateways for nations. As the economy grows, ports are further developed to ensure the seamless operation of transportation and logistics activities in a country.

Ports consist of various terminals according to their functions, such as passenger terminals, container terminals, and non-container or multipurpose cargo terminals. Terminals, as integral components of ports, serve not only as trade facilitators but also as catalysts of a nation's economic activity. Non-container terminals handle all types of cargo, including bulk cargo, liquid bulk, dry bulk, animals, and vehicles.

Jenis Terminal di Pelabuhan
Types of Terminals in the Port



Terminal Penumpang
Passenger Terminal

Terminal Petikemas
Container Terminal

Terminal Nonpetikemas
Noncontainer Terminal

Kegiatan bongkar muat barang di Terminal Nonpetikemas, disebut juga terminal *multipurpose,* merupakan fokus bisnis utama PT Pelabuhan Tanjung Priok. Di terminal ini, PT Pelabuhan Tanjung Priok melayani bongkar muat dari dan ke kapal dengan berbagai jenis barang, komoditas, dan kargo *multipurpose*, seperti kargo kemasan seperti semen, pupuk, perlengkapan proyek, hasil ternak *livestock*, dan kargo umum lainnya termasuk hewan dan kendaraan, curah cair seperti minyak sawit, dan curah kering seperti batubara.

Setiap jenis barang yang ditangani tentunya memerlukan kapabilitas dari sumber daya yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, keandalan peralatan/fasilitas bongkar muat, hingga sistem informasi/digital agar pelayanan bongkar muat barang dapat berjalan lancar, cepat, dan efisien sesuai harapan pengguna jasa.

Untuk itu, PT Pelabuhan Tanjung Priok berupaya memaksimalkan kemampuan, daya upaya, kompetensi, peluang dan market yang tersedia dengan sebaik-baiknya, melalui penerapan inisiatif strategis, sebagaimana tertuang dalam RJPP 2021-2025, yaitu:

Loading and unloading activities at the Non-Container Terminal, also known as the multipurpose terminal, constitute the core business focus of PT Pelabuhan Tanjung Priok. At this terminal, the Company provides stevedoring services for various types of goods, commodities, and multipurpose cargo, including packaged cargo such as cement, fertilizer, project equipment, livestock, and other general cargo such as animals and vehicles, as well as liquid bulk like palm oil and dry bulk like coal.

Each type of cargo handled naturally requires capable resources from human capital, reliable stevedoring equipment/facilities, to information/digital systems, so that cargo handling services run seamlessly, swiftly, and efficiently in line with customer expectations.

To that end, PT Pelabuhan Tanjung Priok strives to fully optimize its capabilities, resources, competencies, opportunities, and markets through strategic initiatives as outlined in the RJPP 2021–2025, which include:

1. Peningkatan kualitas operasi dan pendukungnya di seluruh Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi:
   a. Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang Terintegrasi
      Salah satu tulang punggung bisnis kepelabuhanan adalah operasi dari pelabuhan untuk memastikan bahwa operator terminal dapat memberikan layanan yang *reliable* bagi pelanggan. Memastikan *reliability* sangat penting karena hal ini berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan pelanggan dan juga ketepatan waktu pelanggan dalam memproses barang yang akan mereka kirimkan.

      Setelah proses standarisasi terlaksana, maka selanjutnya dapat dilakukan proses digitalisasi dan sistemisasi sehingga dapat meningkatkan performansi/kinerja operasi di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

   b. Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan Pendukungnya
      Setelah standarisasi operasi berhasil dilakukan, langkah berikutnya dalam meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan adalah melakukan sistemisasi dan digitalisasi baik operasi, keuangan, komersial, rencana strategis, dan divisi lainnya.

      Tujuan dari inisiatif ini adalah mengaplikasikan *digital tools,* seperti jadwal, *tracking*, dan *billing*, untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan akurasi proses beserta pengumpulan data untuk pengambil keputusan operasi yang tepat.

      Dalam rencana 5 tahun PT Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat tiga buah digitalisasi yang dapat dilakukan. Pertama adalah adanya Nonpetikemas Terminal Operating System (NPKTOS) yang akurat dan dipakai di seluruh wilayah PT Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua adalah diimplementasikan *auto gate* pada wilayah kerja untuk membantu *flow* keluar dan masuk truk kedalam terminal. Ketiga adalah implementasi dari *predictive maintenance* setelah adanya data yang akurat terhadap utilisasi aset dan alat di terminal yang dapat mengurangi *breakdown* dan mengoptimalkan biaya perawatan untuk sebagian peralatan Pelindo.

   c. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif
      Peningkatan kapasitas produksi dan pangsa pasar yang kompetitif merupakan inisiatif yang menggambarkan rencana pengembangan perusahaan baik di dalam maupun di luar wilayah Pelindo yang dituangkan ke dalam rencana investasi *as usual*, inisiatif strategis, dan proyek strategis.

   d. Melakukan Ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia
      Dalam rangka meningkatkan operasional dan komersial, maka dilakukan upaya inisiatif ekspansi di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi inisiatif strategi ini dapat berupa kerja sama operasi Pelabuhan swasta maupun milik kementerian perhubungan yang memiliki potensi pasar yang besar. Sehingga, diharapkan melalui inisiatif ini didapatkan peningkatan *throughput* dan pendapatan yang signifikan di luar bisnis inti.

1. Improving operational quality and its supporting functions across all branches of PT Pelabuhan Tanjung Priok, including:
   a. Integrated Operational and Commercial Port Standardization
      One of the backbones of the port business is port operations, which ensure that terminal operators can provide reliable services to customers. Ensuring reliability is crucial as it directly relates to customer costs and their timeliness in processing goods for shipment.

      Once standardization is implemented, the next steps are digitalization and systematization, which are expected to enhance operational performance across PT Pelabuhan Tanjung Priok's environment.

   b. Systematization and Digitalization of Port Operations and Supporting Functions
      Following successful standardization, the next step in improving service quality for customers involves systematizing and digitalizing all aspects of operations, including finance, commercial activities, strategic planning, and other divisions.

      The objective of this initiative is to apply digital tools, such as scheduling, tracking, and billing, to improve efficiency, speed, and accuracy in processing, as well as data collection to support accurate operational decision-making.

      Within PT Pelabuhan Tanjung Priok's 5 year plan, three main digitalization initiatives were outlined. First, the implementation of an accurate Nonpetikemas Terminal Operating System (NPKTOS) across all PT Pelabuhan Tanjung Priok operational areas. Second, the implementation of auto gate systems to manage the flow of trucks entering and exiting the terminal. Third, the application of predictive maintenance, utilizing accurate data on asset and equipment utilization in terminals to reduce breakdowns and optimize maintenance costs for certain Pelindo equipment.

   c. Enhancement of Production Capacity and Competitive Market Share
      The initiative to enhance production capacity and gain a competitive market share reflects the Company's development plans both within and outside the Pelindo operating areas. These plans are outlined in the Company's regular investment roadmap, strategic initiatives, and key strategic projects.

   d. Expansion Across Indonesia
      In order to improve operations and commercial performance, the Company undertakes expansion initiatives throughout Indonesia. These initiatives may include operational partnerships with privately-owned ports or ports managed by the Ministry of Transportation that have strong market potential. Through these strategies, the Company aims to significantly increase throughput and revenue beyond its core business.

2. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pelabuhan
   a. Penataan, Standarisasi, dan Optimalisasi Peralatan Operasi
      Penataan, standarisasi, dan optimalisasi peralatan operasi dapat dilakukan antara lain dengan penataan wilayah operasi, pemasangan *gate* dan pagar, juga pemindahan dan pembangunan beberapa fasilitas pelabuhan. Selain itu, penataan dapat dilakukan dengan implementasi program Paket C dan *Basic Improvement* yang dapat menunjang penerapan sistem NPKTOS, penerapan standar/ISO proses (ISO 14001, ISO 9001, dan OHSAS 18001) pada kegiatan operasi, melakukan *review* prosedur operasi (SOP) dan petunjuk teknis sebagai dasar standarisasi dalam operasional agar proses bisnis dapat lebih optimal, serta implementasi ISPS *Code* untuk terminal-terminal di mana di dalamnya terdapat kegiatan internasional dan kegiatan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL.

      Pelaksanaan hal-hal tersebut di atas akan mampu membawa Perusahaan pada perbaikan yang berkelanjutan sehingga diharapkan setiap target yang diemban Perusahaan dapat tercapai.

   b. Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan Peralatan Operasi
      Pemenuhan pelayanan dilakukan dengan menghadirkan kinerja yang optimal dan melengkapi semua fasilitas utama maupun pendukung bongkar muat yang modern sesuai *minimum requirement* dalam rangka menuju *smart terminal* dan memberikan jaminan kesiapan fasilitas, memiliki standarisasi sarana dan prasarana untuk mempermudah pelayanan di semua wilayah kerja Perusahaan, modernisasi alat bongkar muat sesuai perkembangan dan permintaan pasar (generasi alat), sertifikasi alat supaya laik pakai (KIR), dan melakukan kalibrasi rutin peralatan.

3. Melakukan upaya-upaya strategis peningkatan aspek SDM, keuangan, dan lainnya
   a. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan
      Memiliki tanggung jawab selain untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan (GCG) juga untuk menjalin hubungan/relasi dengan *stakeholder* perusahaan. Selain itu, implementasi tata kelola perusahaan terintegrasi adalah melakukan optimalisasi aset sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

   b. Peningkatan *Corporate Branding* dan Komunikasi Perusahaan
      Perlu dilakukan proses komunikasi atas peningkatan *corporate branding* kepada publik melalui berbagai media (elektronik, cetak, dan *online*).

   c. Restrukturisasi Organisasi
      Restrukturisasi organisasi secara keseluruhan terkait dengan rencana Perusahaan untuk mengoperasikan cabang-cabang pelabuhan yang lain serta mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan bisnis inti dan bisnis pendukung berupa pengoperasian terminal baik di dalam maupun di luar wilayah Pelindo.

2. Improving Port Quality and Facilities
   a. Reorganization, Standardization, and Optimization of Operational Equipment
      Reorganization, standardization, and optimization of operational equipment are implemented through initiatives such as restructuring operational areas, installing gates and fences, and relocating or constructing port facilities. Additionally, improvements are supported by the implementation of "Package C" and basic improvement programs that facilitate the adoption of the NPKTOS system, compliance with operational standards/ISO certifications (ISO 14001, ISO 9001, and OHSAS 18001), and a thorough review of operational procedures (SOPs) and technical guidelines as the basis for operational standardization. The implementation of the ISPS Code is also applied to terminals with international activities, along with environmental monitoring aligned with AMDAL documentation.

      The execution of these initiatives is expected to drive continuous improvement within the Company, ensuring all corporate targets can be successfully achieved.

   b. Improvement of Operational Equipment Performance and Availability
      Service fulfillment is carried out by ensuring optimal performance and equipping all primary and supporting loading and unloading facilities with modern infrastructure that meets the minimum requirements in the transition toward becoming a smart terminal. This includes guaranteeing the readiness of facilities, standardizing infrastructure across all operational areas, modernizing cargo handling equipment in accordance with market trends and demand (equipment generation), certifying tools for feasibility (KIR), and conducting routine equipment calibration.

3. Strategic Efforts in Enhancing Human Capital, Finance, and Other Aspects
   a. Corporate Governance Enhancement
      In addition to improving corporate governance (GCG) processes, the Company is responsible for fostering strong relationships with stakeholders. The implementation of integrated corporate governance also involves asset optimization to ensure accountability and maximize asset utilization

   b. Corporate Branding and Communication Enhancement

      Efforts to strengthen corporate branding must be communicated to the public through various media channels, including electronic, print, and online platforms.

   c. Organizational Restructuring
      Comprehensive organizational restructuring is aligned with the Company's plans to operate additional port branches and prepare human capital to support the development of both core and supporting businesses, particularly terminal operations within and outside Pelindo's area.

d. Program *Learning and Development* yang Terintegrasi
Program ini merupakan upaya peningkatan kompetensi pekerja. Dalam rangka mewujudkan dan menyiapkan personel baik organik maupun tenaga non organik (TNO) yang andal, mandiri, kreatif, berwawasan luas serta memiliki *skill* dan kompetensi yang memadai.

e. Internalisasi Budaya
Melalui tahapan-tahapan internalisasi dan sosialisasi budaya Perusahaan dengan harapan seluruh Insan Perusahaan mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan bisnis inti, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam upaya penguatan internal perusahaan.

f. Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
Tujuan utama dari pelaksanaan inisiatif perencanaan dan pengendalian keuangan adalah adanya kontrol terhadap biaya yang berimbas kepada kenaikan laba Perusahaan.

Melalui penerapan inisiatif strategis di atas, diharapkan PT Pelabuhan Tanjung Priok dapat mewujudkan layanan dan operasi yang unggul dan berstandar internasional sehingga mendukung penciptaan nilai tambah Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

LAPORAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan *Key performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris;
5. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Adapun realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2024, adalah sebagai berikut:

d. Integrated Learning and Development Program
This program aims to enhance employee competencies by preparing reliable, independent, creative, and broad-minded personnel—both organic and non-organic (TNO)—with the necessary skills and qualifications.

e. Cultural Internalization
Through phased internalization and dissemination of the Company's values, the goal is to ensure that all personnel can adapt to changes in the core business and develop into superior human capital to strengthen the Company internally.

f. Financial Planning and Control
The primary goal of financial planning and control initiatives is to maintain cost control that contributes to increased corporate profitability.

Through the implementation of the aforementioned strategic initiatives, PT Pelabuhan Tanjung Priok is expected to deliver excellent and internationally standardized services and operations, thereby supporting the creation of added value for all stakeholders and contributing positively to sustainable national economic growth.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE REPORT

The Board of Commissioners prepares a work plan at the beginning of the year and conducts a self-assessment based on the Board's performance achievements and the Key Performance Indicators (KPIs) that have been established and submitted to the Shareholders at the GMS for evaluation. As stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024 concerning the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners within PT Pelabuhan Tanjung Priok, the performance evaluation criteria for the Board of Commissioners and individual members of the Board, proposed by the Board of Commissioners and ratified at the General Meeting of Shareholders, are as follows:

1. Contribution to the achievement of the Company's performance targets;
2. Timeliness in providing opinions and recommendations, which are among the duties of the Board of Commissioners;
3. Contribution to the implementation of GCG;
4. Attendance Rate of Commissioners Member;
5. Effectiveness of the Board of Commissioners' supporting activities.

The realization of the Board of Commissioners' KPIs for 2024 is as follows:

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners 2024 KPI

No.	Aspek Dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 Target for 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) Achievement Score 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Achievement						
	Kontribusi terhadap Realisasi Capaian KPI Direksi Contribution to the Realization of KPI Achievements of Board of Directors	Poin Point	6	100	96,99	97%	5,82
2	Ketepatan Waktu Penyampaian Pendapat dan Saran yang Menjadi Kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of Submission of Opinions and Suggestions that are the Obligation of Board of Commissioners						
	a. Pendapat dan Saran atas RJPP a. Opinions and Suggestions on RJPP	Hari Day	6	14	14	100%	6,00
	b. Pendapat dan Saran atas RKAP b. Opinions and Suggestions on RKAP	Hari Day	6	14	14	100%	6,00
	c. Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala c. Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari Day	6	14	14	100%	6,00
	d. Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan d. Opinions and Suggestions on Annual Report	Hari Day	6	14	14	100%	6,00
	e. Tanggapan atas Tindakan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan RUPS e. Response to Board of Directors Actions that Must Obtain GMS Approval	Hari Day	6	14	14	100%	6,00
3	Kontribusi terhadap Penerapan GCG Contribution to GCG Implementation						
	a. Kontribusi Kualitas Penerapan GCG a. Contribution to the Quality of GCG Implementation	Poin Point	5	100	94,12	94%	4,71
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG – Dekom b. Follow-up on Recommendations from GCG Assessment Results - Board of Commissioners	%	5	100	100	100%	5,00
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Rate of Board of Commissioners Members						

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners 2024 KPI

No.	Aspek Dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 Target for 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) Achievement Score 2024 (%)
	a. Rapat Internal Dewan Komisaris a. Internal Meeting of Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	5	12	13	108%	5,42
	b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi b. Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	5	12	12	100%	5,00
	c. Pra RUPS dan RUPS RKAP c. Pre GMS and GMS RKAP	Kehadiran Attendance	5	1	1	100%	5,00
	d. Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan d. Pre GMS and GMS Annual Report	Kehadiran Attendance	5	1	1	100%	5,00
5	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners						
	I. Peningkatan Kompetensi Dekom I. Board of Commissioners Competency Improvement						
	a. Pengembangan Kompetensi a. Competency Development	Kepesertaan Participation	4	1	5	110%	4,40
	b. Laporan Kunjungan Kerja b. Working Visit Report	Laporan Report	3	4	6	110%	3,30
	II. Efektivitas Organ Pendukung II. Effectiveness of Supporting Organizations						
	Komite Audit Audit Committee						
	a. Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit a. Attendance Rate of Audit Committee Members	Kehadiran Attendance	3	62	63	102%	3,05
	b. Risalah Rapat Komite Audit b. Minutes of Audit Committee Meeting	Risalah Minutes	3	4	4	100%	3,00

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners 2024 KPI

No.	Aspek Dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 Target for 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) Achievement Score 2024 (%)
	c. Laporan Penugasan Komite Audit c. Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	29	35	100%	3,30
	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee						
	a. Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko a. Attendance Rate of Risk Monitoring Committee Members	Kehadiran Attendance	3	62	61	98%	2,95
	b. Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko b. Minutes of Risk Monitoring Committee Meeting	Risalah Minutes	3	4	4	100%	3,00
	c. Laporan Penugasan Komite Pemantau Risiko c. Risk Monitoring Committee Assignment Report	Laporan Report	3	17	17	100%	3,00
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
	a. Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi a. Attendance Rate of Nomination and Remuneration Committee Members	Kehadiran Attendance	3	62	59	95%	2,85
	b. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi b. Minutes of Nomination and Remuneration Committee Meeting	Risalah Minutes	3	4	4	100%	3,00
	c. Laporan Penugasan Komite Nominasi dan Remunerasi c. Nomination and Remuneration Committee Assignment Report	Laporan Report	3	17	17	100%	3,00
	TOTAL (I+II+III+IV)		100				100,80

Penilaian Individual Anggota Dewan Komisaris
Individual Assessment of Members of Board of Commissioners

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Skor Total KPI KPI Total Score
1	Prakosa Hadi Takariyanto (Komisaris Utama | President Commissioner)	100,80
2	Lukijanto (Komisaris Independen | Independent Commissioner)	100,84
3	Dedy Cahyadi (Komisaris | Commissioner)	99,60
4	Andi Hamdani (Komisaris | Commissioner)	100,18

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI SERTA KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam proses implementasi strategi dalam pencapaian target dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, industri dan bisnis. Dewan Komisaris juga memastikan strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan RKAP dan RJPP. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, maka dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, disusunlah program kerja Dewan Komisaris tahun 2024, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris
   Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris dengan Organ Pendukung sebanyak 13 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata sebesar 98% dari jumlah realisasi rapat. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara kolektif kolegial, sehingga seluruh keputusan/persetujuan yang diambil telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat memberikan surat kuasa kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang hadir.

   Adapun agenda yang dibahas dalam rapat internal Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024, antara lain:
   a. Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Pembahasan Laporan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS;
   c. Pembahasan Penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2025;
   d. Pembahasan penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan tahun buku 2024 dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
   e. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2025 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS.
   f. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya.

SUPERVISION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners oversees and provides guidance to the Board of Directors in the implementation of strategies to achieve the Company's targets, while taking into account developments in the economic, industrial, and business landscape. The Board of Commissioners also ensures that the strategies implemented by the Board of Directors align with the RKAP and RJPP. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are governed by the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024 concerning the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

In line with its supervisory duties and responsibilities to oversee management policies, general management practices of the Company and its business conducted by the Board of Directors, and to provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners formulated its 2024 Work Program as follows:

1. Board of Commissioners Meetings
   In 2024, the Board of Commissioners held 13 internal meetings with its supporting organs, with an average attendance rate of 98%. Decisions were made collectively and collegially, ensuring all approvals and resolutions were unanimously agreed upon by the Commissioners. Absent members of the Board of Commissioners provided a proxy to present members.

   Agendas in the Board of Commissioners Meeting throughout 2024 included:
   a. Discussion on Management Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Discussion of the 2023 Audited Annual Report in preparation for Pre-GMS and GMS;
   c. Discussion on setting the 2025 KPI for the Board of Commissioners;
   d. Discussion on the appointment of KAP for the implementation of General Audit of Financial Statement Fiscal Year 2024 and compliance with Law and Regulation, as well as KAP Audit Schedule and Program Implemenation;
   e. Discussion on the proposed Company Work Plan and Budget (RKAP) for PT Pelabuhan Tanjung Priok for fiscal year 2025, along with the KPI/Management Contract for 2025, as part of the preparation for the Pre-HGMS and GMS;
   f. Holding of special meetings to address critical or urgent issues and other strategic matters.

2. Rencana Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

   a. Rapat Rutin
   Rapat rutin dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan setiap bulan dan waktunya sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Di sepanjang tahun 2024, rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi terlaksana sebanyak 12 kali rapat dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata 98%. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat memberikan surat kuasa kepada Anggota Dewan Komisaris lain yang hadir.

   Adapun pembahasan dalam rapat koordinasi, antara lain, sebagai berikut:
   - Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   - Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2023 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS;
   - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan Kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit Oleh KAP;
   - Pembahasan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2025 dalam rangka persiapan RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham;
   - Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya;

   - Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mengikutsertakan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris.

   b. Rapat dengan Pemegang Saham atau RUPS
   Di tahun 2024, Dewan Komisaris juga mengikuti rapat dengan Pemegang Saham, yaitu:
   - Rapat dalam rangka Pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (*Audited*) PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   - Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan
   a. Kunjungan berkala
      - Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas realisasi dari rencana kerja sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP;
      - Mendapatkan masukan dari manajemen tingkat bawah untuk penyusunan RKAP dan pengendalian internal.
   b. Kunjungan berdasarkan kebutuhan
      - Dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan atau urgensinya berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Manajemen ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan bersama Dewan Komisaris.

2. Coordination Plans between the Board of Commissioners and the Board of Directors
   a. Regular Meetings
   Regular meetings for the management and administration of the Company were held on a monthly basis, with the schedule determined by mutual agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Throughout 2024, a total of 12 coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were conducted, with an average attendance rate of 98% among the members of the Board of Commissioners. Members who were unable to attend provided a power of attorney to other attending members of the Board of Commissioners.

   Discussion points included:

   - Discussion on Management Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   - Discussion on Annual Report (Audited) in 2023 in the preparation of Pre GMS and GMS;
   - Deliberation on the appointment of a KAP for the General Audit of the Financial Statements and Performance Report for fiscal year 2024 of PT Pelabuhan Tanjung Priok, including the audit schedule and program to be conducted by the appointed firm;
   - Discussion of the proposed 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok and the 2025 KPI/Management Contract, in preparation for the GMS;

   - Conducting special meetings with each respective Directorate (partnership units) within PT Pelabuhan Tanjung Priok to address urgent matters and other strategic issues.
   - In these meetings, the Board of Commissioners involved the supporting Committees under the Board of Commissioners as well as the Secretary to the Board of Commissioners.

   b. Meetings with Shareholders or the GMS.
   In 2024, the Board of Commissioners also attended meetings with the Shareholders, including:
   - Pre General Meeting of Shareholders (GMS) Meeting and GMS on Ratification of the Annual Report and Financial Statment Fiscal Year 2023 (Audited) PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   - Meetings in preparation for the GMS and the GMS with Shareholders for the Approval of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Management Contract/KPI of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Work Visit Program to the Field
   a. Regular Visits (Domestic)
      - Performs monitoring and audit on the realization of work plan as budgeted in the RKAP;

      - To gather input from lower-level management for the preparation of the RKAP and for internal control purposes.
   b. Based on Need
      - Scheduled according to the level of urgency or need, based on considerations and input from Management or other relevant parties, as well as mutual agreement by the Board of Commissioners.

Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, yaitu ke Cabang Cirebon, Palembang, Bengkulu, Banten, Lhokseumawe dan Teluk Bayur. Hasil kunjungan tersebut ditindaklanjuti dalam rapat *partnership* atau rapat dengan Direktorat terkait.

By the end of 2024, the Board of Commissioners had conducted field visits to the following branches: Cirebon, Palembang, Bengkulu, Banten, Lhokseumawe, and Teluk Bayur. The outcomes of these visits were followed up in partnership meetings or meetings with the relevant Directorates.

4. Program Pengembangan Kompetensi
   Untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan, maka Dewan Komisaris juga mengikuti beragam program pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Pelindo maupun eksternal Pelindo.

4. Competency Development Program
   To support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in overseeing and providing advice to the Board of Directors in managing the Company, the Board of Commissioners also participates in various competency development programs organized both by Pelindo and external parties.

5. Program Pengawasan Pengendalian Internal
   Program ini dimaksudkan agar kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh Direksi dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan Perusahaan dan bilamana diterapkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima oleh Perusahaan.

5. Internal Control Monitoring Program
   This program is intended to ensure that the policies and procedures designed by the Board of Directors provide reasonable assurance for the achievement of the Company's objectives. When implemented effectively and efficiently, these measures can help mitigate business risks to a certain level deemed acceptable by the Company.

6. Kegiatan Komite dalam Rangka Mendukung Pengawasan Dewan Komisaris
   Pada tahun 2024, Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Bersama komite-komite tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal, serta tugas khusus sesuai bidang.

6. Committee Activities in Supporting the Board of Commissioners' Oversight
   In 2024, the Board of Commissioners also carried out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors with the assistance of its supporting organs, such as the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Together with these Committees, the Board of Commissioners conducted internal and external coordination meetings as well as specific tasks in their respective fields.

REKOMENDASI TERTULIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjaga komunikasi yang konstruktif dan secara aktif memberikan saran kepada Direksi terkait kebijakan dan penentuan strategi Perusahaan. Rekomendasi dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir). Beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut:

WRITTEN RECOMMENDATIONS FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners maintains constructive communication and actively provides advice to the Board of Directors regarding policies and strategic decisions of the Company. Recommendations and advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors are delivered through the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Coordination Meetings (Rakomdir). Some of the key recommendations and advice provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors include the following:

No	Topik Topic	Ringkasan Summary
1	Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development	• Melakukan *Root Cause Analysis* secara mendalam terkait dengan penurunan arus barang dan *marketshare* di beberapa cabang, mengidentifikasi *room of improvement* dan menindaklanjuti secara serius seluruh saran dan masukan dari pengguna jasa; • Melakukan kolaborasi dengan SPMT untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dalam mempertahankan pasar eksisting dan meraih peluang pasar baru; • Melakukan eksplorasi potensi Kerjasama dengan TUKS dan kegiatan *shorebase* di wilayah lain yang belum dikelola PTP; • Melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan/atau besaran *sharing* pada cabang, khususnya pada cabang/ layanan yang belum memberikan keuntungan bagi PTP.

No	Topik Topic	Ringkasan Summary
1	Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development	• Implement an in-depth Root Cause Analysis related to the decline in traffic and market share in several branches, identifying room for improvement and seriously following up on all suggestions and input from customers. • Collaborate with SPMT to develop and implement effective marketing strategies to maintain existing markets and achieve new market opportunities. • Running exploration of potential cooperation with TUKS and shorebase activities in other areas not yet managed by PTP. • Running an evaluation of the mechanism and/or amount of sharing at branches, especially at branches/ services that have not provided profit to PTP.
2	Keuangan Finance	• Melakukan rekonsiliasi pencatatan keuangan secara berkala atas transaksi interco dengan entitas Pelindo *Group* dan melakukan pencatatan pendapatan & biaya secara akrual sesuai dengan ketentuan PSAK dan kebijakan akuntansi yang berlaku; • Membangun *awareness* dan mendorong penerapan efisiensi biaya di seluruh unit kerja PTP; • Melakukan langkah-langkah perbaikan pada cabang Pelabuhan dengan BOPO>100%, yaitu Cabang Palembang, Cabang Panjang, Cabang Jambi dan Cabang Pontianak. • Running periodic financial record reconciliation of interco transactions with Pelindo Group entities and record income & expenses on an accrual basis in accordance with applicable PSAK and accounting policies. • Building awareness and encouraging the implementation of cost efficiency across all PTP work units. • Taking corrective measures at Port branches with BOPO>100%, particularly Palembang Branch, Panjang Branch, Jambi Branch and Pontianak Branch.
3	Piutang Perusahaan Account Receivables	• Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan *Term of Payment* (ToP) dan berkoordinasi dengan SPMT terkait langkah-langkah perbaikannya; • Terkait dengan tingginya piutang macet yang antara lain disebabkan ketentuan minimum *throughput*, agar selanjutnya dalam pelaksanaan perikatan kerjasama lebih memperhatikan aspek risiko terkait dengan ketidakmampuan mitra/pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban yang disepakati. • Running an evaluation of the effectiveness of the Term of Payment (ToP) policy and coordinating with SPMT regarding improvement steps. • Regarding the high number of bad debts which are caused by, among other things, minimum throughput provisions, in the future, the implementation of cooperation agreements should pay more attention to the risk aspects related to the inability of partners/customers to carry out the agreed obligations.
4	Operasional dan Teknik Operational & Technics	• Terkait dengan tidak tercapainya produktivitas B/M Curah Kering dan efektivitas tambatan non petikemas (ET/ BT), agar dilakukan *monitoring* lebih intensif terhadap kinerja PBM, melakukan koordinasi dengan pemilik barang dan memastikan kesiapan dan kehandalan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas B/M; • Meningkatkan mutu pelayanan operasional melalui penerapan SLA dan SLG pada setiap pelayanan; • Melakukan pemetaan dan optimalisasi terhadap alat-alat yang belum terutilisasi dengan baik; • Memastikan kegiatan perawatan Peralatan Bongkar Muat yang dilakukan oleh PT. BIMA berjalan sesuai kontrak perawatan termasuk diantaranya ketersediaan tenaga mekanik dan ketersediaan *sparepart* yang bersifat *fast moving*. • In relation to the failure to achieve productivity of Dry Bulk B/M and the effectiveness of non-container berthing (ET/BT), more intensive monitoring of PBM performance should be carried out, coordination with cargo owners should be carried out and the facilities and equipment needed to support B/M activities should be ensured; • Improving the quality of operational services through the implementation of SLA and SLG in each service; • Mapping and optimizing equipment that have not been utilized properly; • Ensure that the maintenance activities of Loading and Unloading Equipment are carried out by PT. BIMA runs according to the maintenance contract including the availability of mechanics and the availability of fast-moving spare parts.
5	HSSE	Untuk meningkatkan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Direksi agar lebih meningkatkan dan melakukan *monitoring* secara berkala terkait implementasi atas kesadaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja Perusahaan. In order to improve the Occupational Health and Safety (OHS) implementation, the Board of Directors must further improve and carry out regular monitoring regarding the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) awareness in the Company's work environment.
6	*Standard Operating Procedure* (SOP)	• Memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan standar ISO 37001 dan pedoman SMAP PT Pelabuhan Tanjung Priok. Melalui Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan /Unit Gratifikasi secara periodik melakukan tindakan pemantauan implementasi SMAP di lingkungan PTP sehingga target *zero fraud* tercapai; • Agar dipastikan pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Kerja telah didukung dengan SOP yang memadai, disertai dengan upaya mitigasi risiko dan memperhatikan prinsip GCG. • Ensure that all ISO 37001 standard requirements and SMAP guidelines of PT Pelabuhan Tanjung Priok are met. Through the Anti-Bribery Compliance Function Team/Gratification Unit, periodically carry out monitoring actions on the implementation of SMAP in the PTP environment so that the zero fraud target is achieved; • To ensure that the implementation of tasks in the Work Unit is supported by adequate SOPs, accompanied by risk mitigation efforts and attention to GCG principles.

No	Topik Topic	Ringkasan Summary
7	Budaya Risiko Risk Culture	• Melakukan perhitungan Peringkat Komposit Risiko secara berkala sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Risiko Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023; • Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana mitigasi pada risiko signifikan Perusahaan. • Running measurement of the Risk Composite Rating as stipulated in the Technical Instructions for State-Owned Enterprise Risk Reporting Number SK-7/DKU.MBU/10/2023. • Improve monitoring and evaluation of the implementation of mitigation plans for the Company's significant risks.
8	Investasi Investment	Berkoordinasi dengan Regional 2 untuk mendorong penyelesaian program investasi agar terlaksana sesuai rencana dan dapat mendukung efektivitas kegiatan operasional dan produktivitas alat B/M. Coordinate with Regional 2 to encourage the completion of investment programs so that they are implemented according to plan and can support the effectiveness of operational activities and productivity of B/M equipment.
9	Aset Asset	Agar dilakukan percepatan proses penyelesaian penghapusan aset karena sudah tertunda cukup lama. To speed up the process of completing the asset write-off because it has been delayed for quite a long time.
10	SDM Human Capital	• Melakukan realokasi dan/atau penambahan/pengurangan pekerja berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK) agar penempatan pekerja dapat mendukung pencapaian kinerja perusahaan; • Melaksanakan program *capacity building* dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi, khususnya pada kapabilitas terkait dengan fungsi pemasaran. • Reallocating and/or adding/reducing workers based on the results of the Workload Analysis (ABK) so that worker placement can support the achievement of company performance. • Implementing capacity building programs to improve HR competency and organizational capabilities, especially capabilities related to marketing functions.
11	Pengawasan Internal Internal Audit	• Memastikan fungsi pengendalian internal berjalan efektif yang didukung dengan jumlah dan kompetensi personil yang memadai; • Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal untuk menghindari penyimpangan dan meminimalisir temuan audit eksternal; • Mendorong pemisahan Unit Kerja Pengawasan Internal dan Hukum. • Ensure that internal control functions run effectively, supported by an adequate number and competence of personnel. • Improve the effectiveness of internal control systems to avoid deviations and minimize external audit findings. • Encourage the separation of Internal Audit and Legal Work Units.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris memahami bahwa kinerja Direksi dalam melakukan pengelolaan Perusahaan dan upaya Manajemen dalam mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan tidak lepas dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal, antara lain, di tahun 2024 masih menjadi tahun lanjutan dari adaptasi Perusahaan terhadap perubahan fokus bisnis yang semula "Terminal Operator *Multipurpose*" menjadi "*Operation and Maintenance*".

Dari faktor eksternal, Perusahaan juga menghadapi tantangan makro ekonomi terutama adanya ketegangan geopolitik (perang Rusia – Ukraina) yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas barang seperti BBM, CPO, batubara, gandum dan pupuk, yang berdampak pada penurunan *volume cargo* yang ditangani oleh PTP Terminal Nonpetikemas.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta merespons tantangan yang ada dengan baik sepanjang tahun 2024.

Direksi mampu secara tepat menyusun rencana bisnis, mengembangkan beberapa rencana strategis, serta melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Direksi juga mampu menerjemahkan tantangan eksternal maupun internal ke dalam penerapan kebijakan dan strategi Perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi yang telah berusaha memberikan kinerja yang baik di tahun 2024.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN COMPANY MANAGEMENT AND THE BASIS OF EVALUATION

The Board of Commissioners acknowledges that the performance of the Board of Directors in managing the Company and the Management's efforts to drive sustainable business growth were influenced by both internal and external factors.

Internal factors, among others, in 2024 was the year of the Company's continuation in adapting to change in business focus from "Multipurpose Terminal Operator" to "Operation and Maintenance".

Externally, the Company also encountered macroeconomic challenges, particularly due to geopolitical tensions (such as the Russia–Ukraine war), which led to fluctuations in the prices of commodities such as fuel, CPO, coal, wheat, and fertilizers. These conditions impacted the volume of cargo handled by PTP Terminal Nonpetikemas.

In light of these circumstances, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities effectively and has responded well to the challenges throughout 2024.

The Board of Directors is able to accurately prepare business plans, develop several strategic plans, and innovate to face existing challenges. The Board of Directors is also able to transform external and internal challenges into the implementation of Company policies and strategies. Therefore, the Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors for their efforts in delivering commendable performance in 2024.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran manajemen telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan Perusahaan dengan baik, memitigasi risiko dalam menghadapi tantangan dan lingkungan bisnis di industri pelabuhan pada umumnya, dan industri bongkar muat Nonpetikemas secara khusus, sehingga Perusahaan mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu perusahaan bongkar muat Nonpetikemas terdepan dan berpengalaman di Indonesia.

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi tersebut didasarkan pada kontrak manajemen yang tertuang dalam *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai kriteria penilaian kinerja Direksi. KPI 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berisi target kinerja untuk periode 2024 yang terdiri dari lima perspektif yaitu keuangan, pemangku kepentingan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan, dengan mengupayakan pencapaian target KPI tahun 2024 sebesar 100.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors and all management personnel have shown a strong commitment to the sound management of the Company, effectively mitigating risks in the face of challenges and the overall port industry environment, and more specifically in the Non-container cargo sector. As a result, the Company has been able to maintain its position as one of the leading and experienced Non-container cargo handling companies in Indonesia.

The Board of Commissioners' evaluation of the Board of Directors' performance was based on the management contract outlined in the Key Performance Indicators (KPI), which serve as the assessment criteria. The 2024 KPIs, audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, include performance targets for the 2024 period across five perspectives: financial, stakeholder, process, and learning and growth, aiming for a maximum 2024 KPI target achievement is 100.

Key Performance Indicator (KPI) Direksi 2024
Board of Directors 2023 Key Performance Indicator (KPI)

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot 2024 2024 Weight	Polaritas Polarity	RKAP Tahun 2024 RKAP 2024	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Tahun 2024 2024 Achievement	Skor Tahun 2024 2024 Score
A.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia		50					44,38
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	4	*Maximize*	283,7	(4,19)	(1,48%)	0,00
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	4	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	3,38
3	BOPO	%	3	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	2,39
4	*Market Share* Bongkar Muat Curah Bulk Loading and Unloading Market Share	%	6	*Maximize*	50,00	50,72	101,44%	6,09
5	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	5	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	4,58
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	%	4	*Maximize*	100,00	93,16	93,16%	3,73
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	%	7	*Maximize*	100,00	103,60	103,60%	7,25
8	Tingkat Efektivitas Tambatan Nonpetikemas (ET/BT) Non container mooring effectiveness rate (ET/ BT)	%	3	*Maximize*	64,00	63,20	98,75%	2,96
9	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Improvement	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
10	Implementasi Program TJSL CSR Program Implementation	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00

Key Performance Indicator (KPI) Direksi 2024
Board of Directors 2023 Key Performance Indicator (KPI)

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot 2024 2024 Weight	Polaritas Polarity	RKAP Tahun 2024 RKAP 2024	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Tahun 2024 2024 Achievement	Skor Tahun 2024 2024 Score
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		15					15,15
11	Layanan Non- Petikemas Tambahan & Ekspansi Bisnis Additional Noncontainer Services & Business Expansion	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
12	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	104,62%	7,00
13	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	4	*Maximize*	90,00	94,16	104,62%	4,18
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		8					8,40
14	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Nonpetikemas Standardization and Digitalization of Noncontainer Services	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
15	Implementasi HSSE dan Tingkat *Fatality* HSSE Implementation and Fatality Rate	%	4	*Maximize*	100,00	165,90	165,90%	4,40
D.	Peningkatan Investasi Increased Investment		12					13,04
16	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Port Infrastructure and Equipment Investment Development	%	5	*Maximize*	90,00	96,16	106,84%	5,30
17	*Value Creation* Optimalisasi Aset Operasi Noncontainer Value Creation Optimization of Noncontainer Operating Assets	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	7	*Maximize*	4,00	6,68	167,00%	7,70
E.	Pengembangan Talenta Talent Development		15					15,60
18	Implementasi Hubungan Industrial Industrial Relationship Implementation	%	3	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	3,00
19	Pengelolaan *Talent* Pelindo (*Talent* Perempuan/Milenial, Organ Pengelola Risiko dan Budaya) Pelindo Talent Management (Female/ Millennial Talent, Risk and Culture Management Organ)	%	6	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	6,00

Key Performance Indicator (KPI) Direksi 2024
Board of Directors 2023 Key Performance Indicator (KPI)

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot 2024 2024 Weight	Polaritas Polarity	RKAP Tahun 2024 RKAP 2024	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Tahun 2024 2024 Achievement	Skor Tahun 2024 2024 Score
20	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Innovation Idea Implementation	%	6	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	6,60
	TOTAL		100					96,61

Sedangkan penilaian kinerja Direksi secara individual merupakan kewenangan Pemegang Saham.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" posisi keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok per 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dari aspek keuangan, Pendapatan Usaha tercatat sebesar Rp1.470,39 miliar mengalami penurunan sebesar 19,90% dibanding tahun 2023 lalu yaitu sebesar Rp1.835,70 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan terminal sebesar 21,58%. Penurunan pendapatan terminal terjadi karena adanya penurunan kegiatan bongkar muat untuk komoditi baja, gipsum, dan CPO di Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, penurunan kegiatan bongkar muat batu bara di Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu akibat adanya penurunan harga komoditi batu bara pada periode Juni sampai dengan September 2023.

Rugi Bersih tahun berjalan sebesar Rp28,19 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp186,25 miliar dibanding tahun 2023 yaitu Laba Bersih sebesar Rp158,06 miliar.
Dari aspek produktivitas layanan jasa terminal nonpetikemas berdasarkan arus barang umum (*general cargo*) sebesar 10.131.190 ton atau 16,88% di atas realisasi 2023 yang tercatat sebesar 8.667.887 ton. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. PTP Cabang Tanjung Priok terdapat kenaikan arus barang umum sebesar 17,21% atau 8.573.273 ton jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 7.314.411 Ton. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan untuk kemasan *steel product* untuk Mitra PT Tata Bandar Samudera terjadi kenaikan sebanyak 28 kapal, *Pulp* untuk mitra PT Anugerah Cahayamas Abadi terjadi kenaikan sebanyak 1 kapal dan barang konstruksi untuk mitra Kaluku Maritima Utama terjadi kenaikan sebanyak 12 kapal.
2. PTP Cabang Banten realisasi arus barang umum sebesar 837.912 ton atau naik 48,49% jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 564.301 ton. Kenaikan ini terutama dikarenakan ada peningkatan arus barang dalam melayani kegiatan B/M *cargo Equipment Project, Steel Product* diantaranya *Steel Billet*, *Steel Pipe, Steel Coil, Steel Plate* dan *Steel Structure*. Selain itu adanya geliat ekspor *cargo Wind Mill Tower* milik PT Kenertec Power System berdampak pada pertumbuhan arus barang *General Cargo* tahun 2024 di atas realisasi tahun 2023.
3. PTP Cabang Cirebon realisasi arus barang *general cargo* sebesar 80.805 ton, meningkat 155,17% dibandingkan tahun 2023 sebesar 31.667 ton. Hal ini disebabkan terutama teralisasinya pembongkaran RTGC sebanyak 19.365 ton yang pada tahun lalu tidak ada kegiatan.

While the assessment of the performance of individual Directors falls under the authority of the Shareholders.

Meanwhile, based on the 2024 fiscal year financial statements audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with an "unqualified opinion," the financial position of PT Pelabuhan Tanjung Priok as of December 31, 2024, along with its financial performance and cash flows for the year then ended, are in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

From the financial perspective, operating revenue was recorded at Rp1,470.39 billion, reflecting a decline of 19.90% compared to Rp1,835.70 billion in 2023. This decrease was mainly due to a 21.58% drop in terminal revenue. The decline in terminal revenue occurred as a result of decreased loading and unloading activities for steel, gypsum, and CPO commodities at the Non-Container Terminal in the Tanjung Priok Branch, and reduced coal handling activities at the Non-Container Terminal in the Bengkulu Branch due to the decline in coal commodity prices during the period from June to September 2023.

Net loss for the year amounted to Rp28.19 billion, showing a decrease of Rp186.25 billion compared to a net profit of Rp158.06 billion in 2023.
From a productivity perspective in non-container terminal services, general cargo throughput reached 10,131,190 tons, or 16.88% above the 2023 realization of 8,667,887 tons. This was due in part to the following:

1. PTP Tanjung Priok Branch recorded an increase in general cargo volume of 17.21% or 8,573,273 tons compared to 7,314,411 tons in 2023. This increase was driven by higher volumes of steel product packaging for partner PT Tata Bandar Samudera with 28 additional vessels, pulp for partner PT Anugerah Cahayamas Abadi with 1 additional vessel, and construction materials for partner Kaluku Maritima Utama with 12 additional vessels.
2. PTP Banten Branch recorded a general cargo traffic realization reached 837,912 tons, representing an increase of 48.49% compared to the 2023 realization of 564,301 tons. This significant growth was primarily driven by higher cargo volumes related to B/M cargo handling for Equipment Projects and Steel Products, including Steel Billet, Steel Pipe, Steel Coil, Steel Plate, and Steel Structure. In addition, the increase in export activity of Wind Mill Tower components by PT Kenertec Power System positively contributed to the growth in general cargo traffic in 2024, surpassing the 2023 performance.
3. The Cirebon Branch recorded a general cargo volume of 80,805 tons, a 155.17% increase from 31,667 tons in 2023. This was mainly driven by the unloading of 19,365 tons of RTGC, which did not take place in the previous year.

Realisasi arus barang dalam karung (*bag cargo*) tercatat sebesar 3.048.694 ton atau turun 5,57% dari realisasi 2023 sebesar 3.228.445. Hal ini disebabkan, antara lain terdapat penurunan realisasi arus barang dalam karung di beberapa Terminal Nonpetikemas yang menurunnya arus barang dalam karung berupa komoditi lokal, seperti semen dan kaolin. Demikian pula terjadi peningkatan produksi pada arus barang curah cair, curah kering, petikemas, kendaraan, dan hewan.

The realization of bag cargo flow was recorded at 3,048,694 tons, reflecting a 5.57% decrease from the 2023 figure of 3,228,445 tons. This decline was primarily due to a reduction in bag cargo flow at several Non-Container Terminals, especially for local commodities such as cement and kaolin. Conversely, there was an increase in the volume of liquid bulk, dry bulk, containerized cargo, vehicles, and livestock.

Dewan Komisaris mengapresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Transparansi dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, memfasilitasi kemudahan bagi Dewan Komisaris sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, menyediakan media bagi peningkatan kompetensi dan pengetahuan Komisaris.

The Board of Commissioners appreciates the strong working relationship established with the Board of Directors. Transparency and timeliness in report submissions have significantly supported the Board of Commissioners in effectively performing its supervisory role and in accessing resources to enhance their competence and knowledge.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk bersama-sama dengan Direksi dan Manajemen Perusahaan mengatasi tantangan ini dengan bekerja bersama bahu-membahu demi mewujudkan visi, misi, dan target Perusahaan seraya terus berkontribusi mendukung Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

The Board of Commissioners remains committed to working closely with the Directors and Corporate Management to overcome challenges, striving together to realize the Company's vision, mission, and targets, while continuing to contribute to the Government of Indonesia's efforts to drive national economic growth.

KINERJA DAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi akan mampu menghadapi tantangan dan meningkatkan performansi Perusahaan untuk keberlanjutan Perusahaan di masa mendatang. Keberlanjutan bukan hanya sebagai komitmen moral, tetapi juga sebagai bagian integrasi dari Tata Kelola Perusahaan yang modern dan bertanggungjawab. Perusahaan telah menerapkan tata kelola berkelanjutan secara terstruktur dan menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan nilai jangka panjang yang seimbang antara kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan juga telah menerapkan sistem pelaporan berkelanjutan yang transparan dan terukur melalui publikasi rutin Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*).

COMPANY PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors will be able to face these challenges and improve the Company's performance to ensure its sustainable future. Sustainability is not merely a moral commitment but also an integral part of modern and responsible corporate governance. The Company has implemented a structured and comprehensive sustainable governance system. This is an effort to create long-term value by balancing economic, social, and environmental performance. The Company has also implemented a transparent and measurable sustainability reporting system through the regular publication of the Sustainability Report.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan diatur dan diselaraskan dengan Sistem Teknologi Informasi dalam lingkungan Pelindo *Group*. Hal ini dimaksudkan agar Sistem Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan dan terintegrasi dengan sistem informasi di lingkungan Pelindo.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company's Information Technology (IT) Governance is regulated and aligned with the IT System framework within the Pelindo Group. This alignment is intended to ensure that the IT systems meet the Company's needs and are integrated with the broader information systems across Pelindo.

Dewan Komisaris menilai selama tahun 2024 Manajemen Perusahaan telah melakukan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkup Perusahaan melalui Divisi Sistem Informasi sesuai dengan arahan Pemegang Saham.

The Board of Commissioners assessed that, throughout 2024, the Company's Management has managed and developed Information Technology through the Information Systems Division in accordance with directives from the Shareholders.

Dewan Komisaris berkomitmen mendukung Manajemen untuk proaktif melakukan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi sebagai *business enabler* dalam mengoptimalkan layanan bongkar muat barang nonpetikemas yang andal, cepat, dan efisien, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna jasa.

The Board of Commissioners remains committed to supporting Management in proactively managing and developing Information Technology as a business enabler to optimize reliable, fast, and efficient non-container loading and unloading services, thereby enhancing customer and service user satisfaction.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

Berdasarkan Laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Januari 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 3,3% per tahun. Dari proyeksi ini menunjukkan bahwa ekonomi global masih dalam tahap pemulihan. *World Bank*

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the January 2025 report by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth is projected at 3.3% per year. The projection indicates that the global economy remains under a recovery phase The World Bank projects Indonesia's economic

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,1%. Angka pertumbuhan ini merupakan sinyal positif akan kemampuan Indonesia untuk tetap mampu bertumbuh meskipun dibayangi adanya ketidakpastian secara global. Proyeksi pertumbuhan yang positif ini akan turut berdampak pada peningkatan kegiatan perdagangan dan sektor logistik.

growth in 2025 to reach 5.1%. This growth figure signals a positive outlook for Indonesia's ability to continue expanding despite ongoing global uncertainties. The favorable growth projections are expected to positively influence trade activity and the logistics sector.

Berdasarkan prediksi kondisi geopolitik, perekonomian dan industri Pelabuhan serta asumsi internal PTP Terminal Nonpetikemas, Direksi menyusun prospek usaha yang dituangkan dalam RKAP tahun 2025. Atas prospek Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris berpandangan bahwa PTP Terminal Nonpetikemas memiliki prospek yang baik untuk berkembang di masa mendatang.

Taking into account geopolitical forecasts, macroeconomic outlook, the condition of the port industry, as well as internal assumptions of PTP Terminal Nonpetikemas, the Board of Directors has prepared a business outlook incorporated into the Company's 2025 RKAP. With regard to the Company's business outlook prepared by the Board of Directors, the Board of Commissioners believes that PTP Terminal Nonpetikemas has promising prospects for future growth.

Dewan Komisaris meminta agar Direksi mewaspadai dan mengantisipasi potensi ketegangan geopolitik dunia yang cenderung meningkat, serta selalu tanggap terhadap risiko-risiko yang berpotensi mengganggu kinerja dan performansi Perusahaan. Hal yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan peningkatan harga komoditas dan pengaruhnya ke perdagangan dan khususnya ke arus barang. Selain itu agar Direksi menyiapkan dan menyusun langkah-langkah mitigasi dan pengendalian pada setiap aspek bisnis.

The Board of Commissioners urges the Board of Directors to remain vigilant and anticipate the potential escalation of global geopolitical tensions, and to stay responsive to any risks that could disrupt the Company's performance. Particular attention should be given to rising commodity prices and their impact on trade and, specifically, cargo flows. Furthermore, the Board of Directors is advised to prepare and implement mitigation and control measures across all business aspects.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selama tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas telah melaksanakan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan bisa dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan PTP Terminal Nonpetikemas senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Throughout 2024, PTP Terminal Nonpetikemas has undertaken various efforts to ensure the consistent implementation of corporate governance practices. The Company's management is always carried out based on the principles of prudence and Good Corporate Governance (GCG), in accordance with applicable regulations.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan dan manajemen risiko di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Hasil penilaian GCG di tahun 2024 menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi (*apply*) 71 (tujuh puluh satu) rekomendasi dari 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan PUG-KI 2021 dan skor sebesar 97,43 dari penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Hasil tersebut menunjukkan bahwa PTP Terminal Nonpetikemas telah membuktikan komitmennya dalam melaksanakan GCG.

The Board of Commissioners consistently encourages a strong commitment to implementing corporate governance and risk management across all levels and tiers of the organization. The 2024 GCG Assessment results indicate that the Company has applied 71 (seventy-one) out of 81 (eighty-one) corporate governance recommendations based on PUG-KI 2021 and achieved a score of 97.43 in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment. These results demonstrate PTP Terminal Nonpetikemas' strong commitment in GCG.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal dapat mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, *responsible*, mandiri, adil dan terpercaya serta akan mampu memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan bahwa Perusahaan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki dan dikelola.

Board of Commissioners' View on the Effectiveness of the Internal Control System

One of the most important aspects in the GCG implementation is the Internal Control System. An effective and reliable Internal Control System can foster more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and trustworthy corporate management. It also provides assurance to stakeholders that the Company is capable of managing its resources properly.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.56/6/6/1/ AUDITPTP-17 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The implementation of the Internal Control System in the Company refers to the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.56/6/6/1/AUDITPTP-17 dated June 6, 2017, concerning the General Guidelines for the Internal Control System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PTP Terminal Nonpetikemas secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Penilaian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah dilaksanakan melalui prosedur tinjauan kualitas dan model kemampuan audit internal. Tujuan dilakukannya prosedur tersebut adalah untuk menetapkan peta jalan guna memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan oleh *Institute of Internal Aud*itor (IIA).

PTP Terminal Nonpetikemas regularly evaluates the effectiveness of its Internal Control System. The Assessment is carried out through quality review procedures and an internal audit capability model. These procedures aim to develop a roadmap toward meeting the ideal standards set by the Institute of Internal Auditors (IIA).

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan PTP Terminal Nonpetikemas sudah mencapai tingkat kecukupan yang sesuai. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan pedoman yang tertuang dalam *Audit Charter*, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan Sistem Audit Manajemen.

Based on the evaluation results of the Internal Control System implementation in 2024, the Board of Commissioners considers that the Internal Control System implemented by PTP Terminal Nonpetikemas has reached a sufficient level. The Assessment is based on the guidelines stated in the Audit Charter, the Annual Audit Work Plan (PKPT), and the Management Audit System.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menyadari bahwa Perusahaan memiliki berbagai risiko karena semakin meningkatnya kompleksitas aktivitas Perusahaan. Sasaran utama implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai Perusahaan.

Pengelola Manajemen Risiko bertugas dan telah mengidentifikasi profil risiko beserta rencana mitigasi dan realisasi penanganannya. Identifikasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi segala perubahan yang berdampak bagi Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko tahun 2024 telah dilaksanakan secara memadai.

Board of Commissioners' View on Risk Management Implementation

The Board of Commissioners recognizes that the Company is exposed to various risks due to the increasing complexity of its activities. The primary objective of implementing risk management is to protect and create Company value.

The Risk Management Committee is responsible for identifying risk profiles along with mitigation plans and their implementation. This identification is expected to serve as a foundation for the Company in addressing and anticipating any changes that may impact the Company. The Board of Commissioners assesses that the Risk Management System in 2024 has been implemented adequately.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS), Kebijakan Anti Korupsi, Anti Pungli, dan Gratifikasi

Whistleblowing System (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran diterapkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Perusahaan dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilandasi dengan niat yang baik.

Perusahaan telah dan senantiasa memberikan sosialisasi dan pemahaman atas penerapan sistem WBS ini, baik kepada insan Perusahaan maupun pihak *stakeholders*. Organ Dewan Komisaris yaitu Komite Audit berperan dalam me*review* pelaksanaan tanggungjawab Satuan Pengawasan Internal terkait dengan penerapan WBS.

Board of Commissioners' Views and Role in the Implementation of the Whistleblowing System (WBS), Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Gratuity Policies

The Whistleblowing System (WBS) is implemented to provide an opportunity for all personnel of the Company and other stakeholders to report indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and driven by good intentions.

The Company has consistently provided socialization and raised awareness on the implementation of the WBS, both among its personnel and external stakeholders. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, plays a role in reviewing the responsibilities carried out by the Internal Audit Unit related to the implementation of the WBS.

EVALUASI KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2024, ketiga komite tersebut telah melaksanakan fungsinya dengan baik serta memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, diantaranya:

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by three committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2024, these three committees have performed their respective functions effectively and have provided opinions and recommendations to the Board of Commissioners in exercising its supervisory role over the Company's management, including the following:

1. Komite Audit berfungsi untuk memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas eksternal auditor dan internal auditor, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
2. Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan evaluasi dan memastikan agar penerapan pengelolaan risiko di Perusahaan memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi berfungsi dalam kapasitasnya untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan penilaian kinerja individu Dewan Komisaris dan Direksi serta melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan.

Dalam rangka melakukan pengawasan secara aktif kepada Direksi, termasuk pelaksanaan kebijakan strategis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga Komite tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan antara lain melakukan evaluasi laporan bulanan, laporan triwulan, pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta secara berkala mendampingi rapat baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, Senior Manager Pengawasan Internal dan Hukum, Sekretaris Perusahaan dan Direktorat terkait lainnya. Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja para komite dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi telah terlaksana dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan. Alasan perubahan karena penyegaran organisasi Perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Berikut susunan dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024, dan setelah tahun buku 2024 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

1. The Audit Committee functions to ensure the implementation of internal control and to assist the Board of Commissioners in overseeing the effectiveness of the internal control system, as well as the performance of both external and internal auditors. The Committee provides recommendations for improving the management control system and its implementation, and ensures that adequate evaluation procedures are in place for all information disclosed by the Company.
2. The Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners for assisting in evaluating and ensure that risk management is implemented in the Company meets the adequacy of procedures and risk management methodologies.
3. The Remuneration and Nomination Committee serves in its capacity to evaluate the remuneration policies of the Board of Directors and the Board of Commissioners, assess individual performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, and evaluate the achievement of the Company's Management Work Plan (RKM).

In actively overseeing the Board of Directors, including the implementation of strategic policies and the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. These three committees have carried out their duties in accordance with the annual work programs, including evaluating monthly and quarterly reports, reviewing assessments, providing recommendations to the Board of Commissioners, periodically assisting the meeting with the Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Manager Internal Audit and Legal, the Corporate Secretary, and other relevant directorates. The Board of Commissioners concludes that the performance of the committees in assisting the Board in performing its oversight function and in providing advice to the Board of Directors has been carried out effectively.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent several changes. The reason for the changes was to refresh the Company's organizational structure.

As of December 31, 2024, the Board of Commissioners of PTP Terminal Nonpetikemas consisted of 4 (four) members, comprising 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner.

The following presents the structure and composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024, and after the end of the 2024 fiscal year until the issuance of this Annual Report.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 Januari 2024 – 1 April 2024
Composition of the Board of Commissioners Period of January 1, 2024-April 1, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Ogi Rulino	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai pejabat Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor SK-003/PII/D1-1/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as the President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 and Number SK-003/PII/D1-1/2020 dated May 13, 2020, regarding Dismissal and Appointment of the President Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	13 Mei 2020 – 1 April 2024, Periode ke-1 May 13, 2020 – April 2024, First Period
Marta Hardisarwono	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan SK-002/ PII-SK.D1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and SK-002/PII-SK.D1/VI/2021 dated June 21, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode ke-1 June 21, 2021 – August 1, 2024, First Period
Lukijanto	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders No: SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dated April 26, 2022, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	26 April 2022 – 1 April 2024, Periode ke-1 April 26, 2022 – April 1, 2024, First Period
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK.DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024 - 2029*), Periode ke-1 January 1, 2024 – 2029*) First Period

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 April 2024 – 1 Agustus 2024
Composition of the Board of Commissioners Period of April 1, 2024-August 1, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Prakosa Hadi Takariyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/ PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/ DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024 - 2029*), Periode ke-1 April 1, 2024 - 2029*), First Period
Marta Hardisarwono	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan SK-002/ PII-SK.D1/ VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and SK-002/PII-SK.D1/ VI/2021 dated June 21, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode ke-1 June 21, 2021 – August 1, 2024, First Period
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/ PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024 - 2029*), Periode ke-1 January 1, 2024 – 2029*), First Period
Lukijanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/ DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024-2027*), Periode ke-1 April 1, 2024-2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentIkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 Agustus 2024 – 31 Desember 2024
Composition of the Board of Commissioners Period of August 1, 2024-December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Prakosa Hadi Takariyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/ PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/ DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024 - 2029*), Periode ke-1 April 1, 2024 - 2029*), First Period
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/ PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024 - 2029*), Periode ke-1 January 1, 2024 - 2029*), First Period
Dedy Cahyadi	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/31/7/2/PAPS/ DIRU/PLMT-24 and SK.03/31/7/1/ DHKP/DIRU/PII-24 dated July 31, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Agustus 2024 - 2029*), Periode ke-1 August 1, 2024 - 2029*), First Period
Lukijanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/1/4/2/PAPS/ DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024-2027*), Periode ke-1 April 1, 2024-2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time

APRESIASI DAN PENUTUP

Kami sangat memahami bahwa seluruh kinerja dan pencapaian PT Pelabuhan Tanjung Priok di tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham, mitra bisnis, karyawan dan *stakeholders* lainnya atas kepercayaan dan dukungannya selama ini.

Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan jajaran manajemen atas dedikasi, kerja keras serta komitmennya dalam menghadapi dinamika bisnis di tahun 2024. Kami mengharapkan tahun 2024 menjadi tahun pembelajaran bagi insan Perusahaan dan untuk selanjutnya selalu berupaya untuk meningkatkan performa di tahun-tahun selanjutnya.

Dewan Komisaris akan terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan agar kinerja Perusahaan dapat terus tumbuh di masa mendatang, dengan terus mengoptimalkan peluang bisnis yang ada guna mencapai pertumbuhan kinerja Perusahaan yang berkelanjutan.

APPRECIATION AND CLOSING

We understands that all performance and achievement made by PT Pelebuhan Tanjung Priok in 2024 are inseparable from the supports from all stakeholders. Therefore, the Board of Commissioners expresses utmost gratitude to shareholders, business partners, employees, and other stakeholders for their trust and support.

We also extend appreciation to the Board of Directors and management on their dedication, hard works, and commitment in facing business dynamics throughout 2024. We hope that the year 2024 serves as valuable learning for the Company personnel, laying the foundation for continued performance improvement in the years to come.

The Board of Commissioners remains committed to strengthening its supervisory and advisory role to ensure future growth of the Company by seizing available business opportunities in the process of achieving the Company's sustainable growth.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025
Atas nama Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok
On behalf of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok



PRAKOSA HADI TAKARIYANTO
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT



INDRA HIDAYAT SANI

Direktur Utama
President Director

Pada tahun 2024, Perusahaan masih menghadapi dinamika bisnis. Direksi senantiasa menyesuaikan strategi Perusahaan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya.

In 2024, the Company remained facing business dynamics. Board of Directors continuously aligned the Company strategies and are committed to enhance their performances.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kami panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan izin-Nya sehingga PT Pelabuhan Tanjung Priok dapat memberikan kinerja terbaik di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *Corporate Plan* periode 2021-2025, tahun 2024 merupakan tahun "Kinerja Unggul *Operation & Maintenance*" bagi PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP Terminal Nonpetikemas atau Perusahaan, di mana pada tahun ini Kami berupaya meningkatkan kualitas kinerja perusahaan unggul melalui:

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

We extend out gratitude to the God Almighty for His Blessings and Grace enabling PT Pelabuhan Tanjung Priok to deliver commendable performance amidst the challenging economic situation. In accordance with the Corporate Long-Term Plan (RJPP) or Corporate Plan for the 2021–2025 period, the year 2024 marks the "Excellent Operation & Maintenance Performance" for PT Pelabuhan Tanjung Priok, also known as PTP Terminal Nonpetikemas or the Company. This year, we strive to enhance the Company's performance excellence through the following initiatives:

Upaya Effort	**Pelaksanaan** Implementation
Inovasi dalam integrasi terminal Innovation in terminal integration	• Inovasi untuk Integrasi Terminal • Penyebaran peralatan hijau dan suprastruktur • Kepemimpinan dalam operasi terminal digital • Operasi Pelabuhan terintegrasi • Pengembalian maksimal dari asset keuangan, termasuk kas mengganggur • Dukungan yang efektif dan terintegrasi untuk Pelindo *Group* • Internalisasi budaya AKHLAK untuk pelayanan prima • Implementasi terminal operator berstandar internasional • Innovation for Terminal Integration • Deployment of green equipment and superstructure • Leadership in digital terminal operations • Integrated port operations • Maximized returns from financial assets, including idle cash • Effective and integrated support for the Pelindo Group • Internalization of AKHLAK core values to drive service excellence • Implementation of international standardized terminal operations
Pemerataan perangkat pendukung *green technology* termasuk suprastruktur pendukungnya Equal supporting tools of green technology including supporting superstructure	Dilaksanakannya program implementasi *Green Technology* pada fasilitas dan Utilitas di wilayah kerja PTP Terminal Nonpetikemas. The implementation of the Green Technology program has been carried out across facilities and utilities within the operational areas of PTP Terminal Nonpetikemas.
Kepemimpinan dalam operasi terminal digital Leadership in digital terminal operations	Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP telah tercapai progres 100,00% dan *progres expected* sebesar 100,00%, dengan pencapaian: • *Go Live* PTOS M Pombo tanggal 1 Agustus 2024 • *Go Live* PTOS M Ambon tanggal 26 Agustus 2024 The standardization of branch operations at PTP has reached 100.00% progress, matching the expected target of 100.00%, with the following milestones achieved: • Go Live PTOS-M Pombo on August 1, 2024 • Go Live PTOS-M Ambon on August 26, 2024
Integrasi operasional terminal Integration of terminal operations	• Implementasi standarisasi operasi cabang PTP Terminal Nonpetikemas • Pengembangan sistem IT • Implementation of standardized operations at PTP Terminal Nonpetikemas branches • IT system Development
Maksimalisasi pengembalian dari aset finansial termasuk *idle cash* Maximizing return on financial assets including idle cash	Dilaksanakannya program optimalisasi *idle cash* untuk memaksimalkan *cash in* Perusahaan dengan capaian pembukuan bunga deposito sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp11.064.526.019. The implementation of an idle cash optimization program to maximize its cash position, resulting in recorded deposit interest bookings as of December 2024 amounting to Rp11,064,526,019.
Efektif dan integrasi dukungan dari Pelindo *Group* Effective and integrated support from Pelindo Group	Perusahaan telah menjalin kerja sama pengoperasian dan pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal. Perusahaan telah menjalin kerja sama pengoperasian terminal maupun dermaga nonpetikemas secara *business-to-business* dengan beberapa cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain: • Kerja sama pengoperasian lapangan Kalijapat di Pelabuhan Tanjung Priok. • Kerja sama pengoperasian dermaga F di Pelabuhan Panjang. • Kerja sama optimalisasi aset dermaga dan lahan eks PT Tunas Bahari Servita di Pelabuhan Pangkal Balam.

Upaya Effort	Pelaksanaan Implementation
Efektif dan integrasi dukungan dari Pelindo Group Effective and integrated support from Pelindo Group	The Company has established a partnership agreement for the operation and maintenance of the Multipurpose Terminal with the Sub-holding entity, PT Pelindo Multi Terminal. In addition, the Company has engaged in business-to-business partnership agreements for the operation of non-container terminals and wharves with several branches of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), including: • Operational partnership for the Kalijapat Yard at Tanjung Priok Port. • Operational partnership for Wharf F at Panjang Port. • Asset optimization cooperation for the Wharf and land formerly operated by PT Tunas Bahari Servita at Pangkal Balam Port.
Internalisasi budaya AKHLAK untuk mendukung pelayanan prima Internalization of AKHLAK culture to support service excellence	Dilaksanakannya program internalisasi budaya AKHLAK, antara lain program NGOPI (Ngobrol Inspiratif) Bidang Curah Kering, NGOPI *Culvating Risk Culture For Global Competitiveness,* dan NGOPI & CPO *Inspired Journey Reflections and Success Stories High Potential Employee.* The internalization of the AKHLAK corporate values through various programs, including NGOPI (Ngobrol Inspiratif) for the Dry Bulk Division, NGOPI: Cultivating Risk Culture for Global Competitiveness, and NGOPI & CPO: Inspired Journey Reflections and Success Stories of High-Potential Employees.
Implementasi ISO untuk terminal ISO implementation for terminals	Telah dilakukan sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001 di 11 cabang serta kantor pusat dan ISO 37001 di 1 cabang dan kantor pusat. The completion of certification of ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 across 11 branch offices and the head office ISO 37001 at 1 branch office and the head office.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2024.

On this auspicious occasion, we hereby present the accountability report for the management of the Company for the 2024 fiscal year.

ANALISIS MAKROEKONOMI

Perekonomian global sepanjang tahun 2024 masih menjadi tantangan seperti perang di Ukraina dan Palestina, dampak pengetatan kebijakan moneter yang diperlukan untuk mengurangi inflasi, penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang, dan peristiwa cuaca ekstrem. Dilansir dari *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), Pertumbuhan global diperkirakan akan relatif stabil dari 3,0% pada tahun 2023 menjadi 3,2% pada tahun 2024. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 6,9% pada tahun 2023 menjadi 5,8 % pada tahun 2024.

Di tengah relatif stagnannya pertumbuhan perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03% (yoy). Pertumbuhan perekonomian Indonesia ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada tahun 2024 sebesar USD 31,04 miliar. Nilai ekspor Indonesia tahun 2024 mencapai USD 264,70 miliar atau naik 2,29% dibanding tahun 2023. Nilai impor Indonesia tahun 2024 mencapai USD 233,66 miliar atau meningkat 11,07% dibanding tahun 2023.

Realisasi kurs yang digunakan pada laporan keuangan Desember 2024 adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, yaitu sebesar Rp16.162 per USD, di mana nilai mata uang Rupiah secara aktual melemah dibandingkan dengan kurs asumsi RKAP tahun 2024, yaitu sebesar Rp15.000 per USD. Sementara untuk realisasi kurs tahun 2023 sebesar Rp15.206 per USD. Tingkat inflasi bulan Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy) lebih rendah dari asumsi inflasi RKAP 2024 sebesar 2,80% (yoy) dan tingkat inflasi Desember 2023 sebesar 2,61%.

MACROECONOMIC ANALYSIS

The global economy throughout 2024 remained challenging due to several factors, including the prolonged wars in Ukraine and Palestine, the impact of tightened monetary policies required to curb inflation, the withdrawal of fiscal support amidst high debt levels, and extreme weather events. According to the World Economic Outlook published by the International Monetary Fund (IMF), global growth is projected to remain relatively stable, from 3.0% in 2023 to 3.2% in 2024. Global inflation is expected to continue declining, from 6.9% in 2023 to 5.8% in 2024.

Amid stagnant global economic growth, climate change, and declining prices of key export commodities, Indonesia's economy grew by 5.03% (yoy), exceeding global economic growth. Furthermore, Indonesia's trade balance once again recorded a surplus in 2024. The Central Bureau of Statistics (BPS) reported a trade surplus of USD31.04 billion in 2024. Indonesia's export value reached USD264.70 billion in 2024, an increase of 2.29% compared to 2023. Meanwhile, import value reached USD233.66 billion, a rise of 11.07% compared to 2023.

The exchange rate used in the financial statements as of December 2024 was the Bank Indonesia middle rate on the reporting date, at Rp16,162 per USD. This reflects a depreciation of the Rupiah compared to the 2024 RKAP assumed rate of Rp15,000 per USD. For comparison, the realized exchange rate in 2023 was Rp15,206 per USD. The inflation rate in December 2024 was recorded at 1.57% (yoy), lower than the 2024 RKAP inflation assumption of 2.80% (yoy) and the December 2023 rate of 2.61%.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS SERTA IMPLEMENTASINYA

Strategi dan kebijakan strategi Perusahaan disusun dengan mengacu kepada sasaran Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024.

CORPORATE STRATEGIES, POLICIES, AND THEIR IMPLEMENTATION

The Company's strategic direction and policy framework are developed in line with the Company's objectives as outlined in the 2024 Work Plan and Budget (RKAP).

Asumsi yang digunakan dalam RKAP 2024 adalah asumsi ekonomi makro dan asumsi internal Perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

The assumptions used in the 2024 RKAP include both macroeconomic and internal company assumptions, as detailed in the following table:

Asumsi Ekonomi Makro

Macro Economic Assumptions

Indikator Indicator	Asumsi Makro RKAP Tahun 2024 Macro Assumptions for the 2024 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi Economic growth	5,2%
Tingkat Inflasi Inflation rate	2,8%
Kurs Rupiah per USD Rupiah exchange rate per USD	Rp15.000
Tingkat SBN SBN Rate	6,7%

Asumsi Internal

Internal Assumptions

No	Uraian Description	Acuan Reference
1.	*Shorebase* Lhokseumawe	*Shorebase* Harbour *Shorebase* Mubadala
2.	Penerapan PSAK 73 Implementation of PSAK 73	Sewa Ruangan di Pelindo Tower Jangka Waktu 3 tahun Lease at Pelindo Tower for a period of 3 year
3.	Transformasi Cabang PTP PTP Branch Transformation	Melakukan Transformasi terkait Standarisasi Operasi pada 11 Cabang PTP Carrying out transformations related to operational standardization in 11 PTP branches
4.	Pemurnian Bisnis Business Refinement	Akuisisi PT P3TPK Acquisition of PT P3TPK

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka Perusahaan merumuskan sasaran dan rencana kerja manajemen untuk tahun buku 2024, sebagai berikut:

Based on the assumptions above, the Company formulated the following management objectives and work plans for the 2024 fiscal year:

Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

Corporate Management Work Plan (RKM)

Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2024 telah disusun berdasarkan evaluasi terhadap parameter-parameter biaya, pendapatan, keterkaitan dengan pihak lain, dan durasi, maka telah dilakukan pemilihan 9 RKM *Strategis Corporate* sebagai berikut:

The proposed 2024 Management Work Plan (RKM) was prepared based on evaluations of cost parameters, revenue, inter-party dependencies, and time duration. As a result, the Company has selected the following 9 Strategic Corporate RKMs:

No	Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Proposed Management Work Plan	Direktorat Directorate
1	Pengoperasian *Ship to Ship* Operationalization of Ship to Ship	Direktorat Komersil dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Directorate
2	Implementasi HSSE di seluruh cabang PT PTP Company-Wide Implementation of HSSE Standards across all PT PTP branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
3	Implementasi Standarisasi Operasi cabang PTP Implementation of Operational Standardization Across PTP Branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
4	Pelaksanaan investasi pengadaan fasilitas pendukung bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Kijing Execution of Investment for Supporting Facilities related to stevedoring activities at the Kijing Port Terminal	Direktorat Operasi Operation Directorate
5	Pengadaan dan Optimalisasi alat bongkar muat kebutuhan cabang-cabang PTP Procurement and Optimization of stevedoring Equipment to meet operational requirements at various PTP branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
6	Pengadaan perangkat *Hardware* di Kantor Pusat dan Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Procurement of Hardware Infrastructure for PT Pelabuhan Tanjung Priok Headquarters and Branches	Direktorat Operasi Operation Directorate

No	Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Proposed Management Work Plan	Direktorat Directorate
7	Peningkatan kompetensi atau *skill* pengelolaan manajemen risiko Enhancing Risk Management Competence and Skills	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management
8	Kajian dan implementasi struktur organisasi PTP dan Anak Perusahaan Assessment and Implementation of Organizational Structure for PT PTP and its subsidiaries	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management
9	Sentralisasi *knowledge management* kepelabuhan Centralization of Port Knowledge Management	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management

SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran Perusahaan merupakan hal-hal yang dituju oleh Perusahaan pada tahun pelaksanaan anggaran perusahaan. Berdasarkan arahan dari Kementerian BUMN dan RJPP *Holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, sasaran Perusahaan harus sejalan dengan 5 (lima) agenda prioritas BUMN, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta yang telah dijalankan sejak tahun 2021.

Sasaran Perusahaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

CORPORATE OBJECTIVES

The Company's objectives represent the goals it aims to achieve within the year of budget implementation. Based on directives from the Ministry of SOEs and the RJPP of the Holding Company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo, the Company's objectives must align with the five priority agendas of SOEs, which are Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technological Leadership, Investment Enhancement, and Talent Development which have been carried out since 2021.

The Company's objectives can be defined as follows:

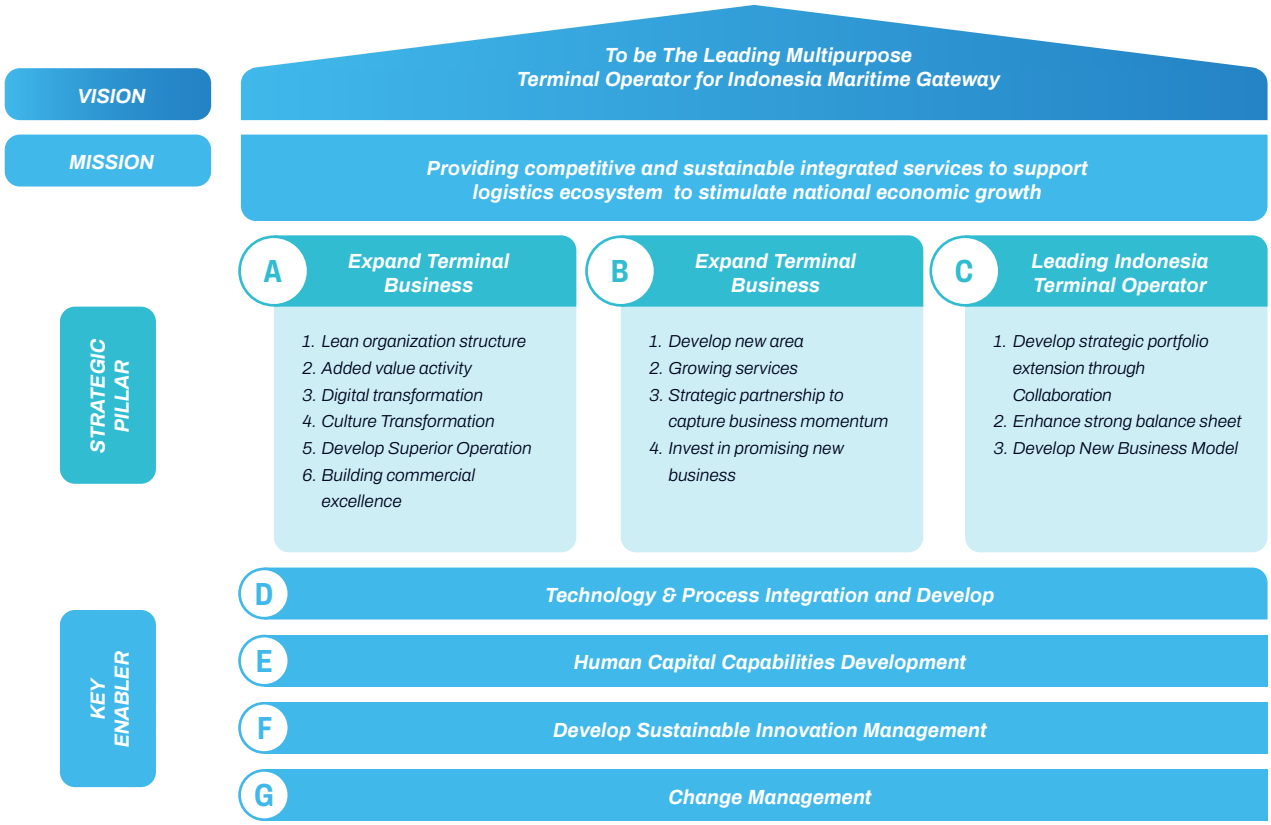
Aspek Aspect		Sasaran Objectives
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	Finansial Financial	Keseimbangan kepentingan Jangka Pendek dengan peningkatan performansi finansial perusahaan untuk pertumbuhan bisnis Jangka Panjang Balance in short-term interests with improvement of company's financial performance for long-term business growth
	Operasional Operational	Peningkatan performansi operasional untuk memberi *value added* pada setiap Pelayanan Barang di Terminal Improved operational performance to provide added value to each Goods Service at the Terminal
	Sosial Social	Pengembangan Terminal untuk mendukung peningkatan daya saing komoditi barang di pasar global maupun domestik yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Development of Terminal to support the increasing competitiveness of commodity goods in global and domestic markets which will have an impact on people's welfare
Model Bisnis Business Model		Kolaborasi, Sinergi dan Integrasi Terminal untuk pengelolaan bisnis kepelabuhanan yang lebih efektif & efisien guna penciptaan nilai *(value creation)* yang lebih optimal Terminal Collaboration, Synergy and Integration for more effective & efficient port business management for more optimal value creation
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		Digitalisasi proses bisnis perusahaan dan inisiasi penggunaan teknologi ramah lingkungan Digitizing the company's business processes and initiating the use of environmentally friendly technologies
Peningkatan Investasi Increased Investment		Optimalisasi pendayagunaan aset dan pengembangan infrastruktur di seluruh terminal untuk penyempurnaan standarisasi Optimization of asset utilization and infrastructure development in all terminals to improve standardization
Pengembangan Talenta Talent Development		Meningkatkan kompetensi dan performansi pegawai Mendorong lingkungan inklusif untuk memberikan *diversity* pemikiran pada level struktural Improving employee competency and performance to encouraging an inclusive environment and provide diversity of thought at the structural level

Pada tahun 2024, Perusahaan telah menyusun strategi untuk mencapai target dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025. Rencana strategis yang diterapkan Perusahaan bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, ketersediaan alat produksi, sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki, maupun sistem manajemen dan keuangan yang modern dalam rangka mencapai tujuan usahanya.

Adapun strategi yang dijalankan Perusahaan di tahun 2024 yang diatur dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah sebagai berikut:

In 2024, the Company has developed strategies to achieve the established target by referring to Corporate Long Term Plan (RJPP) 2021-2025. These strategic plans are designed to support the Company's business activities by allocating available resources including human capital, corporate governance, production equipment availability, information and communication systems, as well as modern management and financial systems in the process of accomplishing its business objectives.

The strategies implemented by the Company in 2024, as stipulated in the Corporate Long-Term Plan (RJPP), are as follows:



Strategic Pillar

1. *Unlock Terminal Capacity*
   Unlock Terminal Capacity merupakan rencana strategi yang dilakukan Perusahaan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas layanan, kualitas kinerja, serta pengembangan bisnis sesuai dengan visi Perusahaan yaitu menjadi profesional operator terminal. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka *Unlock Terminal Capacity* meliputi perencanaan struktur bisnis perusahaan, penambahan nilai tambah pelayanan, transformasi digital dan budaya, serta peningkatan kapasitas operasional dan komersial.
2. *Expand Terminal Business*
   Expand Terminal Business merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperluas layanan bisnis pelabuhan di dalam dan di luar wilayah kerja Pelindo. Strategi ini sejalan dengan visi perusahaan menuju profesional terminal operator dimana memiliki pelayanan prima yang didukung dengan fasilitas yang lengkap serta kerja sama usaha yang sinergi. Aktivitas atau tindakan yang disiapkan dalam rangka implementasi *strategic pillar* ini meliputi pengembangan area baru, peningkatan pelayanan, kerja sama usaha strategis, dan investasi bisnis baru.
3. *Leading Independent* Indonesia *Terminal Operator*
   Leading Independent Indonesia *Terminal Operator* merupakan rencana strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat dan mengukuhkan posisi perusahaan baik di dalam maupun di luar wilayah kerja dan bisnis induk melalui kerjasama dengan pihak lain yang berada dalam satu rantai logistik. Sehingga, PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pionir dalam pengelolaan terminal didukung dengan usaha logistik terkait. Aktivitas atau tindakan yang mendukung rencana strategi ini adalah pengembangan strategi bisnis, penguatan permodalan perusahaan, pengembangan model bisnis baru, kerja sama 3PL *logistic*, dan kerja sama operasi.

Strategic Pillar

1. Unlock Terminal Capacity
   Unlock Terminal Capacity is a strategic plan carried out by the Company to enhance and optimize service quality, performance quality, and business development in line with the Company's vision of becoming a professional terminal operator. Activities and actions prepared under the Unlock Terminal Capacity initiative include planning the corporate business structure, adding service value, driving digital and cultural transformation, and increasing operational and commercial capacity.
2. Expand Terminal Business
   Expand Terminal Business is a strategic plan designed to expand port business services within and beyond the operational areas of Pelindo. This strategy aligns with the Company's vision of becoming a professional terminal operator offering excellent services supported by complete facilities and synergistic business partnerships. Activities under this strategic pillar include the development of new areas, service enhancement, strategic business partnerships, and investment in new business ventures.
3. Leading Independent Indonesia Terminal Operator
   Leading Independent Indonesia Terminal Operator is a strategic plan aimed at strengthening and solidifying the Company's position both within and outside the parent company's business scope through collaboration with other parties in the same logistics chain. It enables PT Pelabuhan Tanjung Priok to become a pioneer in terminal operations, supported by related logistics businesses. Supporting activities include business strategy development, capital strengthening, new business model development, collaboration with 3PL logistics providers, and operational partnerships.

Key Enabler

1. *Technology & Process Integration and Development*
   Technology & Process Integration and Development merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk memadukan antara kebutuhan proses kerja dan standar operasi yang diharapkan dengan tren teknologi dan *best practices* yang berkembang di industri. Inisiatif-inisiatif yang direncanakan sebagai bagian dari *enable* ini antara lain pengembangan TI *Infrastructure* dan Sistemisasi Proses Bisnis.
2. *Human Capital Capabilities Development*
   Human Capital Capabilities Development merupakan Aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan *Human Capital* yang unggul dan adaptif untuk dapat memasuki era bisnis perusahaan yang semakin luas sebagai terminal operator yang profesional.
3. *Develop Sustainable Innovation Management*
   Develop Sustainable Innovation Management merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk membangun suatu tata kelola inovasi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ataupun keunggulan bersaing dalam setiap proses kerja maupun model bisnis Perusahaan.
4. *Innovation and Change Management*
   Innovation and Change Management merupakan rencana kerja strategi yang disusun untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung unit kerja maupun individu dalam perusahaan untuk dapat mengadopsi setiap perubahan-perubahan yang dihadapi dalam perjalannya mencapai visi dan misi perusahaan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Direksi memiliki peran penting dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, dimana secara berkala dalam setiap tahunnya telah tertuang dalam Rencana Kerja Manajemen (*Corporate*) yang merupakan hasil dari rancangan RKM Strategis pada masing-masing direktorat. Penyusunan RKM ini juga mengacu pada RJPP 2021-2025 dengan fondasi utama adalah visi dan misi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan beberapa faktor eksternal dan internal. Penyusunan RJPP dilakukan Direksi dengan pengawasan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta mengacu pada aspirasi pemegang saham.

Peranan dan Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Strategi dan Kebijakan Strategis yang Dijalankan

Hasil rumusan kebijakan strategis wajib dijalankan oleh seluruh unit terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa setiap unit memahami tugas pokok dan fungsi yang dijalankan agar rencana kerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, Direksi juga mengambil peran sebagai pengambil keputusan strategis.

Seluruh strategi dan kebijakan strategis yang telah dilaporkan dalam RKM dituangkan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) di mana Direksi memiliki kaitan langsung dengan berbagai capaian penting dalam KPI tersebut. Dengan demikian, mendorong

Key Enabler

1. Technology & Process Integration and Development
   Technology & Process Integration and Development refers to activities and actions aimed at integrating work process requirements and expected operational standards with technological trends and industry best practices. Initiatives planned under this enabler include IT infrastructure development and business process systemization.

2. Human Capital Capabilities Development
   Human Capital Capabilities Development includes activities or actions taken to prepare outstanding and adaptive human capital to enter the Company's growing business landscape as a professional terminal operator.

3. Develop Sustainable Innovation Management
   Develop Sustainable Innovation Management refers to activities or actions carried out to establish sustainable innovation governance aimed at enhancing efficiency, effectiveness, and competitive advantage in every business process and model.

4. Innovation and Change Management
   Innovation and Change Management is a strategic work plan designed to prepare, equip, and support work units and individuals within the Company to adapt to changes encountered in the journey to achieve the Company's vision and mission.

The Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategy and Strategic Policies

The Board of Directors plays a vital role in formulating strategies and strategic policies, which are outlined annually in the Corporate Work Plan, derived from the Strategic RKM developed by each directorate. The preparation of the RKM also refers to the RJPP 2021–2025, with its foundation based on the established vision and mission, while also taking into account both external and internal factors. The formulation of the RJPP is carried out by the Board of Directors under the supervision and guidance of the Board of Commissioners and is aligned with the shareholders aspirations.

The Role and Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy and Strategic Policy Implementation

The results of strategic policy formulations must be implemented by all relevant units according to their respective main duties and functions. As stipulated in the Board Manual governing the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners within PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Board of Directors plays an active role in ensuring that each unit understands its primary duties and functions, so that the established work plans can be successfully achieved. In addition, the Board of Directors also assumes the role of strategic decision-maker.

All strategies and strategic policies reported in the RKM are formulated into Key Performance Indicators (KPI), in which the Board of Directors is directly linked to various critical achievements. Thus, it encourages the direct involvement of the

keterlibatan langsung Direksi dalam merancang dan merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan serta menjalankan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk dapat merealisasikan rancangan dan rumusan kebijakan strategis Perusahaan.

Direksi berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi tersebut. Sebagai upaya untuk memperoleh *feedback* terkait penerapan strategi, Direksi mengadakan rapat atau *meeting* dengan Direktorat terkait mengenai kondisi dan realita yang terjadi di lapangan. Selain itu, Direksi juga mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris untuk membahas penerapan strategi dan kebijakan strategis yang telah disusun untuk memperoleh arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Dengan demikian, segenap Direksi akan terus bergerak secara dinamis dan adaptif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi demi mendorong Perusahaan dalam mencapai tujuan.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Kinerja Keuangan

Pendapatan Usaha tahun 2024 sebesar Rp1,47 triliun atau 19,90% di bawah realisasi tahun 2023 sebesar Rp1,83 triliun dan 15,40% di bawah RKAP Tahun 2024 sebesar Rp1,74 triliun.

EBITDA *(Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization)* Tahun 2024 sebesar -Rp4,19 miliar atau 101,52% di bawah realisasi Tahun 2023 sebesar Rp275,17 miliar dan 101,48% di bawah RKAP Tahun 2024 sebesar Rp283,50 miliar.

Operating Ratio Tahun 2024 sebesar 103,20% atau 14,16% di atas realisasi Tahun 2023 sebesar 89,03% dan 17,32% di atas RKAP Tahun 2024 sebesar 85,88%.

Adapun penjelasan Pendapatan Usaha Tahun 2024 dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Petikemas Tahun 2024 (*Audited*) terealisasi sebesar Rp80,65 miliar. Hal ini disebabkan karena Perusahaan masih melayani kapal kombo yang membawa petikemas.
2. Pendapatan Barang Nonpetikemas Tahun 2024 (*Audited*) terealisasi sebesar Rp481,39 miliar. Pendapatan barang non petikemas tahun 2024 tidak dianggarkan namun masih terdapat kegiatan bongkar muat international di PTP Cabang Tanjung Priok yang belum *switching* nota SPMT dan di PTP Cabang Panjang terdapat kenaikan pendapatan diluar area BASO serta adanya pendapatan *Ship to ship* Bunati.
3. Pendapatan Pengusahaan Alat Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp40,33 miliar. Pendapatan pengusahaan alat tahun 2024 tidak dianggarkan namun masih terdapat pendapatan alat antara lain di PTP Cabang Tanjung Priok karena masih terdapat kegiatan bongkar muat *international* yang belum *switching* nota SPMT dan di PTP Cabang Panjang karena adanya pendapatan diluar BASO.
4. Pendapatan Pengusahaan Properti Tahun 2024 sebesar Rp32,30 miliar atau 15,38% di bawah RKAP Tahun 2024 sebesar Rp38,16 miliar. Realisasi pendapatan pengusahaan properti karena terdapat kerjasama pemanfaatan lahan proyek *shorebase* di Banyuwangi dan Lhokseumawe.

Board of Directors in designing and formulating the Company's strategies and strategic policies, as well as undertaking the necessary actions to realize the strategic plans and policies.

The Board of Directors plays an active role in monitoring and evaluating the implementation of the strategies. As part of efforts in obtaining feedback on the strategy implementation, the Board of Directors holds meetings with the relevant directorates to discuss actual conditions and realities on the ground. In addition, the Board of Directors also conducts meetings with the Board of Commissioners to discuss the execution of the established strategies and strategic policies in order to receive guidance and recommendations from the Board of Commissioners. Thus, the entire Board of Directors continues to act dynamically and adaptively in carrying out supervision and evaluation to drive the Company toward achieving its objectives.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Comparison Between Results Realization and Targets

Financial Performance

The Operating Revenue in 2024 amounted to Rp1.47 trillion, or 19.90% lower than the 2023 realization of Rp1.83 trillion, and 15.40% below the 2024 RKAP target of Rp1.74 trillion.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) in 2024 was recorded at Rp4.19 billion, or 101.52% below the 2023 realization of Rp275.17 billion, and 101.48% below the 2024 RKAP target of Rp283.50 billion.

The Operating Ratio in 2024 was 103.20%, or 14.16% higher than the 2023 realization of 89.03%, and 17.32% above the 2024 RKAP target of 85.88%.

The following is an explanation of the Operating Revenue in 2024 compared to the 2024 RKAP target:

1. Container Services in 2024 (Audited) was realized at Rp80.65 billion. This was due to the Company still serving combo vessels carrying containers.
2. In 2024, non-container services (Audited) was recorded at Rp481.39 billion. Non-container services was not included in the 2024 budget, but was realized due to several factors, including ongoing international stevedoring activities at the PTP Tanjung Priok Branch that have not yet transitioned to SPMT invoicing, an increase in revenue outside the BASO area at the PTP Panjang Branch, and additional revenue from Ship-to-Ship (STS) operations in Bunati.
3. In 2024, equipment services were realized at Rp40.33 billion. This revenue was not budgeted for, but was generated primarily from international stevedoring activities at the PTP Tanjung Priok Branch that had not switched to SPMT invoicing, and from equipment related revenue outside the BASO area at the PTP Panjang Branch.
4. Land, building, water, and electricity services amounted to Rp32.30 billion, or 15.38% below the 2024 budget of Rp38.16 billion. The realized revenue was derived from land utilization partnerships related to shorebase projects in Banyuwangi and Lhokseumawe.

5. Pendapatan Rupa-Rupa Usaha Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp825,46 miliar atau 51,44% di bawah RKAP Tahun 2024 sebesar Rp1,7 triliun. Hal ini disebabkan antara lain:

   a. Menurunnya arus barang komoditi *steel product* di PTP Cabang Tanjung Priok, Selain itu terdapat penurunan untuk kegiatan B/M atas mitra PT Kaluku Maritim Utama yang dikarenakan beberapa mitra beralih ke PT Tata Bandar Samudera (non PBM *Clustering*) dimana pendapatan *net off*, 40%, sementara PT Kaluku Maritim Utama (PBM *Clustering*) pendapatan dicatat 100%. Serta, berkurangnya pendapatan Lumpsum sewa lapangan 005 dan *stuffing - striping* dari PT Tanto dan SPIL karena pemurnian bisnis yang beralih ke PT MTI. Penurunan distribusi pengiriman komoditi karet untuk kegiatan ekspor tujuan USA, karena dua pabrik pengolahan karet di Padang tutup dan harga getah karet relatif rendah, dan rendahnya arus trafik komoditi *project cargo* di PTP Teluk bayur. Berkurangnya kunjungan kapal *bag cargo* (semen dan pupuk) dan adanya pendangkalan alur di PTP Cabang Bengkulu. Terjadi penurunan kegiatan Muat *General Cargo* seperti Alat Proyek, Pipa dan *Plywood* di Pelabuhan Talang Duku maupun Pelabuhan Kawasan Muara Sabak serta masih rusaknya dermaga *ferrocement* 02 dan 03 di PTP Cabang Jambi.

   b. Penurunan komoditi CPO dan turunannya imbas penurunan produksi dari hulu di PTP Cabang Tanjung Priok. Penurunan pelayanan kegiatan b/m komoditi CPO dan turunannya di *Jetty* DKC Gaung akibat penurunan penjualan PT Padang Raya Cakrawala serta kunjungan kapal CPO di *Jetty* VII belum optimal disebabkan beberapa *shipper* masih menahan pengiriman barang karena melihat perkembangan situasi ekonomi global dan adanya periode *replanting* di perkebunan sehingga produksi kelapa sawit menurun di PTP Cabang Teluk bayur. Penurunan arus barang dalam melayani kegiatan B/M kegiatan B/M *Asphalt, marine fuel oil*, *methanol, HSD, acetic acid* dan *base oil kinetric* 4 di PTP Cabang Banten. Terjadi penurunan untuk komoditi CPO, CPKO dan minyak sawit karena beralih ke TUKS milik PT SJIM sendiri di PTP Cabang Panjang.
   c. Penundaan Ekspor Batubara di PTP Cabang Panjang. Penurunan arus barang dalam melayani kegiatan B/M semen curah, *raw sugar* dan *split stone* di PTP Cabang Banten. Menurunnya kegiatan *loading* batubara dikarenakan adanya penutupan tambang sementara, adanya pembatasan *hauling* dan kerusakan *Dolphin* Dermaga *Jetty Conveyor* yang roboh di PTP Cabang Jambi.
   d. Terdapat *net off* pendapatan atas PBM *clustering* dari bulan oktober ke desember sehingga PTP hanya mencatatkan pendapatan *revenue sharing* setelah dikurangi beban PBM *clustering*.

Kinerja Operasional

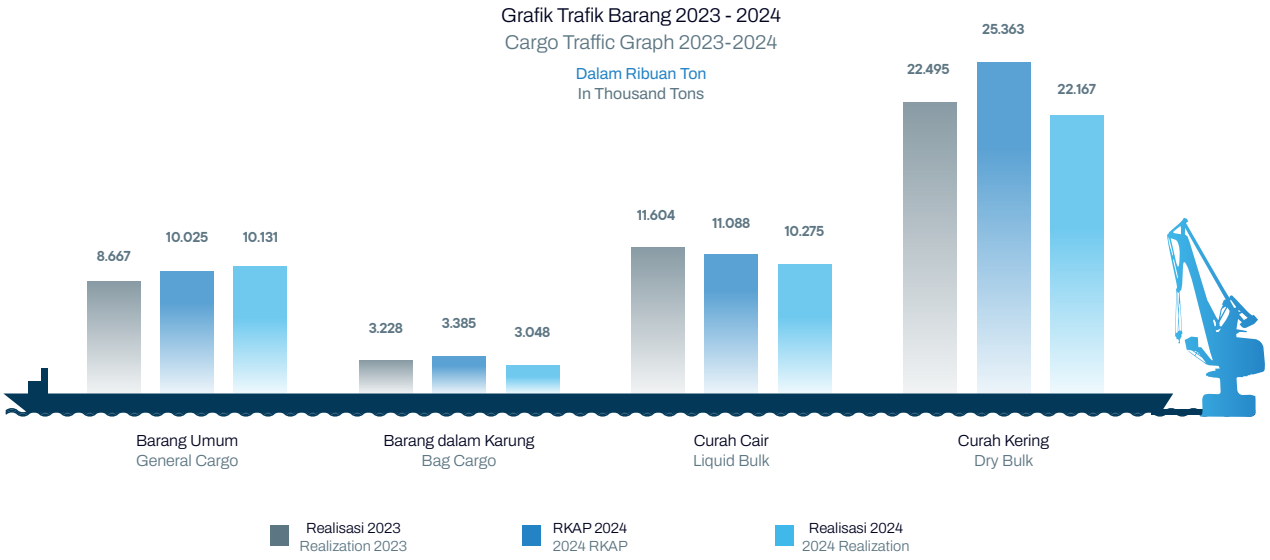
Kinerja operasional Perusahaan tercermin dari arus atau trafik barang berdasarkan kemasan yang terdiri dari *general cargo*, *bag cargo*, curah cair, curah kering, dan lain-lain. Adapun target RKAP 2024 dan realisasinya, dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini:

5. Revenue from miscellaneous business activities in 2024 was realized at Rp825.46 billion, which is 51.44% below the 2024 RKAP of Rp1.7 trillion. Several factors contributed to this shortfall, including:

   a. There was a decline in steel product cargo traffic at the PTP Tanjung Priok Branch. In addition, stevedoring activities for PT Kaluku Maritim Utama also decreased, as several partners shifted their operations to PT Tata Bandar Samudera (non-PBM clustering), where revenue is recognized on a net-off basis at 40%, compared to 100% revenue recognition for PT Kaluku Maritim Utama (PBM clustering). Furthermore, there was a reduction in lump-sum revenue from yard 005 lease agreements and stuffing–stripping services provided by PT Tanto and SPIL, due to business consolidation that redirected these operations to PT MTI. A decline in rubber commodity shipments for export to the United States was also observed, caused by the closure of two rubber processing plants in Padang and the relatively low price of raw rubber. Additionally, project cargo traffic at PTP Teluk Bayur remained weak. There was also a reduction in bag cargo vessel calls (cement and fertilizer) and channel siltation issues at the PTP Bengkulu Branch. Lastly, general cargo loading activities, such as project equipment, pipes, and plywood, decreased at both Talang Duku Port and Muara Sabak Port, exacerbated by ongoing damage to ferrocement Wharf 02 and 03 at the PTP Jambi Branch.
   b. The decline in CPO and its derivative commodities was driven by decreased upstream production at PTP Tanjung Priok Branch. The reduction in stevedoring activities for CPO and its derivatives at DKC Gaung Jetty was due to lower sales by PT Padang Raya Cakrawala, while vessel calls at Jetty VII remained suboptimal as several shippers continued to withhold shipments in response to global economic uncertainty and ongoing replanting cycles at plantations, which reduced palm oil production at PTP Teluk Bayur Branch. There was also a decline in cargo throughput for L/U activities involving asphalt, marine fuel oil, methanol, HSD, acetic acid, and base oil Kinetric 4 at PTP Banten Branch. Furthermore, a decrease in CPO, CPKO, and palm oil volumes occurred as shipments were redirected to PT SJIM's own TUKS facility at PTP Panjang Branch.
   c. Coal exports at PTP Panjang Branch experienced delays. A decline in cargo throughput was also observed for L/U activities related to bulk cement, raw sugar, and split stone at PTP Banten Branch. The reduction in coal loading activity was caused by temporary mine closures, hauling restrictions, and structural damage to the Dolphin Conveyor Jetty at PTP Jambi Branch.
   d. Additionally, there was a net-off of revenue from PBM clustering for the period from October to December, resulting in PTP only recording revenue sharing income after deducting PBM clustering expenses.

Operational Performance

The Company's operational performance is reflected in cargo flow or traffic, categorized by packaging types, which include general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, and others. The 2024 RKAP target and its realization are presented in the following chart:



Secara keseluruhan trafik berdasarkan kemasan Tahun 2024 terealisasi sebesar 45.621.798 Ton dan 1.424.987 M³ atau terserap 91,50% dari RKAP tonase Tahun 2024 sebesar 49.861.900 Ton dan 108,34% dari RKAP M³ Tahun 2024 sebesar 1.315.299 M³. Untuk petikemas Tahun 2024 terealisasi sebesar 233.581 Teus. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Arus Barang Umum (*General Cargo*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* tercapai sebesar 10.131.190 Ton dan 1.424.987 M³ atau terserap 101,05% dari RKAP tonase Tahun 2024 sebesar 10.025.615 Ton dan 108,34% dari RKAP M³ Tahun 2024 sebesar 1.315.299 M³. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP Cabang Tanjung Priok realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* sebesar 8.573.273 Ton terserap 102,71% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 8.347.417 Ton. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan untuk kemasan *steel product* PT Tata Bandar Samudra sebanyak 28 kapal, Pulp untuk mitra PT Anugerah Cahayamas Abadi terjadi kenaikan 1 kapal dan barang konstruksi untuk mitra PT Kaluku Maritima Utama terjadi kenaikan sebanyak 12 kapal.
2. PTP Cabang Banten realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* sebesar 837.912 Ton terserap 136,35% jika dibandingkan dengan Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 614.542 Ton. Hal ini disebabkan adanya peningkatan arus barang dalam melayani kegiatan B/M *cargo Equipment Project, Tin Mill Black Plate* dan *Steel product,* diantaranya *Steel Billet, Steel Pipe, Steel Coil, Steel Plate* dan *Steel Structure.* Selain itu adanya geliat *export cargo Wind Mill Tower* milik PT Kenertec Power System berdampak pada pertumbuhan arus barang *General Cargo* tahun 2024 diatas RKAP Tahun 2024.
3. PTP Cabang Panjang realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* sebesar 220.016 Ton terserap 147,30% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 149.365 Ton. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pendistribusian untuk komoditi Pipa Besi, Tiang Listrik dan Tiang Pancang oleh PT WIKA dan peningkatan permintaan dari Exportir untuk komoditi MDF *Plywood* ke Timur Tengah (Saudi Arabia). Selain itu, terdapat peningkatan permintaan dari importir untuk komoditi *Tin Plate* milik PT GGLC.

In 2024, total cargo traffic by packaging reached 45,621,798 tons and 1,424,987 m³, representing 91.50% absorption of the 2024 RKAP tonnage target of 49,861,900 tons, and 108.34% of the 2024 RKAP volume target of 1,315,299 m³. Additionally, container cargo traffic realized 233,581 TEUs. The breakdown is presented as follows:

General Cargo Traffic

The realization of general cargo traffic in 2024 stood at 10,131,190 tons and 1,424,987 m³, achieving 101.05% of the 2024 RKAP tonnage target of 10,025,615 tons and 108.34% of the volume target of 1,315,299 m³. The performance was driven by the following operational highlights:

1. PTP Tanjung Priok Branch realization in 2024 for the General cargo traffic reached 8,573,273 tons, equivalent to 102.71% of the 2024 RKAP target of 8,347,417 tons. The increase was primarily attributable to higher vessel calls for specific commodities, including Steel products from PT Tata Bandar Samudra 28 vessels addition, Pulp shipments from PT Anugerah Cahayamas Abadi 1 vessel addition, Construction materials from PT Kaluku Maritima Utama 12 vessels addition.
2. PTP Banten Branch General cargo realization in 2024 amounted to 837,912 tons, representing 136.35% of the Revised 2024 RKAP target of 614,542 tons. This significant increase stemmed from higher cargo volumes associated with B/M Cargo Equipment Projects and various steel products, including Steel Billet, Steel Pipe, Steel Coil, Steel Plate, and Steel Structure. The export surge of Wind Mill Tower components by PT Kenertec Power System also contributed substantially to the 2024 above-target general cargo traffic compared to RKAP 2024.
3. PTP Panjang Branch realized general cargo volume totaled 220,016 tons, or 147.30% of the 2024 RKAP target of 149,365 tons. This growth was primarily driven by increased distribution of iron pipes, utility poles, and foundation piles by PT Wijaya Karya (WIKA), alongside rising export demand for MDF plywood to the Middle East (notably Saudi Arabia). Moreover, there was heightened import demand for tin plate products by PT GGLC.

Arus Barang dalam Karung (*Bag Cargo*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Bag Cargo* tercapai sebesar 3.048.694 Ton atau terserap 90,05% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 3.385.563 Ton. Hal ini disebabkan karena:

1. PTP Cabang Tanjung Priok realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Bag Cargo* sebesar 126.254 Ton atau terserap 15,10% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 826.123 Ton. Hal ini disebabkan banyak kegiatan yang pengakuan pencatatan di system menjadi kemasan *general cargo* karena adanya selisih biaya kontribusi antara *general cargo* dengan *bag cargo*. Kebijakan ini lebih menguntungkan untuk PTP, namun semenjak menggunakan PTOS-M ada beberapa kegiatan yang sudah tercatat sebagai *bag cargo*, untuk tahun ini ada kegiatan B/M an. PT Trans Trijaya Samudera dengan komoditi gula pasir.
2. PTP Cabang Banten realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Bag Cargo* sebesar 44.559 Ton atau terserap 45,99% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 96.881 Ton. Hal ini disebabkan tidak adanya permintaan peningkatan arus barang dalam melayani kegiatan cement bag milik PT Semen Jakarta.
3. PTP Cabang Palembang realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Bag Cargo* sebesar 220.694 Ton atau terserap 67,56% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 326.680 Ton. Hal ini disebabkan penurunan *ship call* unyuk komoditas *cargo* semen *in bag*, pupuk *in bag* serta peralihan *cargo* pupuk *in bag* yang dibongkar ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan peralihan *cargo* semen *in bag* ke TUKS PT Lambung Karang Sakti.

Arus Barang Curah Cair (*Liquid Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *liquid bulk* tercapai sebesar 10.274.554 Ton atau terserap 92,67% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 11.087.583 Ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP Cabang Tanjung Priok realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Cair sebesar 1.330.245 Ton atau terserap 79,21% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 1.679.303 Ton. Hal ini disebabkan terjadi penurunan trafik curah cair dari komoditi CPO dan turunannya. Untuk *customer* terbesar yaitu PT Jasa Anugerah Samudera mengalami penurunan dari tahun lalu yaitu 26 kapal.
2. PTP Cabang Bengkulu realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Cair sebesar 449.935 Ton atau terserap 61,30% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 734.006 Ton. Hal ini disebabkan belum terealisasinya pembangunan TCC di Pelabuhan Bengkulu, berkurangnya *cargo* khususnya CPO yang ditangani oleh PT Adrian Berkah Mandiri dan PT Bengkulu Bahari Bara Tambang dikarenakan oleh jarak antara pabrik dan pelabuhan sangat jauh dengan kegiatan pola *Truck Lossing* dan dipengaruhi oleh pendangkalan alur sehingga ada pengalihan *cargo* via darat ke Pelabuhan Teluk Bayur dan Lampung serta berkurangnya kegiatan aspal PT Sinar Baai Mandiri.
3. PTP Cabang Teluk Bayur realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Cair sebesar 2.783.465 Ton atau terserap 88,91% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 3.130.525 Ton. Hal ini disebabkan adanya penurunan pelayanan kegiatan bongkar muat komoditi CPO dan turunannya di *Jetty* DKC Gaung akibat penurunan penjualan PT Padang Raya Cakrawala. Selain itu kunjungan kapal CPO di *Jetty* VII belum optimal disebabkan beberapa *shipper* masih

Bag Cargo Traffic

In 2024, the total realized bag cargo traffic amounted to 3,048,694 tons, representing 90.05% of the 2024 RKAP target of 3,385,563 tons. The breakdown by branch is as follows:

1. PTP Tanjung Priok Branch realized bag cargo traffic stood at 126,254 tons, which is 15.10% of the 2024 RKAP target of 826,123 tons. The underperformance was primarily due to the reclassification of cargo packaging in the system, where several transactions were recorded under general cargo instead of bag cargo. This classification was financially favorable to PTP due to the differential in contribution fees. However, with the adoption of the PTOS-M system, certain activities are now being correctly recorded as bag cargo, as for the year included stevedoring activities under PT Trans Trijaya Samudera, particularly for granulated sugar.
2. PTP Banten Branch realized bag cargo traffic totaling 44,559 tons, or 45.99% of the 2024 RKAP target of 96,881 tons. The shortfall was caused by the absence of increased demand from PT Semen Jakarta for bag cement handling.
3. PTP Palembang Branch realized bag cargo traffic reached 220,694 tons, or 67.56% of the 2024 RKAP target of 326,680 tons. The decline was due to a reduced number of vessel calls for bag cement and bag fertilizer commodities. In addition, a portion of the fertilizer and cement cargo was diverted to the Private Interest Terminal (TUKS), including to PT Lambung Karang Sakti, reducing volume handled at the main terminal.

Liquid Bulk Cargo Traffic

In 2024, liquid bulk cargo traffic reached 10,274,554 tons, accounting for 92.67% of the 2024 RKAP target of 11,087,583 tons. Detail explanation are on the following:

1. PTP Tanjung Priok Branch realization in 2024 for Liquid Bulk was 1,330,245 tons, or 79.21% of the 2024 RKAP target of 1,679,303 tons. The shortfall was primarily due to a decline in CPO and derivative product volumes. One of the major customers, PT Jasa Anugerah Samudera, experienced a decrease in vessel calls from the previous year, totaling 26 vessels fewer.
2. PTP Bengkulu Branch realized liquid bulk cargo volume in 2024 was 449,935 tons, or 61.30% of the 2024 RKAP target of 734,006 tons. It was attributed to the delayed completion of the TCC in Bengkulu Port, decreased volumes, especially CPO, handled by PT Adrian Berkah Mandiri and PT Bengkulu Bahari Bara Tambang, and logistical inefficiencies due to the significant distance between plants and the port. These issues were exacerbated by reliance on truck-losing operations, shallow navigation channels, and the subsequent redirection of cargo overland to Teluk Bayur and Lampung ports. Additionally, there was a decline in asphalt handling activities by PT Sinar Baai Mandiri.
3. PTP Teluk Bayur Branch recorded 2,783,465 tons of liquid bulk cargo in 2024, achieving 88.91% of the 2024 RKAP target of 3,130,525 tons. The shortfall was caused by decreased cargo handling activities for CPO and its derivatives at Jetty DKC Gaung, mainly due to reduced sales by PT Padang Raya Cakrawala. Furthermore, CPO vessel visits at Jetty VII remained below target, as several shippers postponed deliveries due to uncertainties in global economic conditions,

menahan pengiriman barang karena melihat perkembangan situasi ekonomi global termasuk di dalamnya penolakan Uni Eropa untuk komoditi CPO dari Indonesia dan adanya periode *replanting* di perkebunan sehingga produksi kelapa sawit turun.

Arus Barang Curah Kering (*Dry Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *dry bulk* tercapai sebesar 22.167.360 Ton atau terserap 87,40% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 25.363.138 Ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP Cabang Banten realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Kering sebesar 2.794.946 Ton atau terserap 61,39% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 4.552.904 Ton. Hal ini disebabkan adanya penurunan arus barang *Raw Sugar* milik PT Sentra Usahatama Jaya dikarenakan operasionalnya pindah ke Pelabuhan KBS, selain itu juga terdapat penurunan yang signifikan *cargo Cement Bulk* milik PT *Semen* Indonesia dikarenakan adanya *switching* peningkatan *throughput* di wilayah operasi Cabang lain PT Semen Indonesia, serta terdapat penurunan *cargo Nickle Ore* dari bulan Februari s.d Mei 2024 dikarenakan terkendala proses izin tambang di Sulawesi. Selain itu juga adanya pemakaian Dermaga 07 untuk kegiatan Nataru tahun 2024 berdampak terhadap tidak dapat dilakukannya sandar Tongkang yang bermuatan *Nickel Ore* milik PT Growth Java Industry.
2. PTP Cabang Cirebon realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Kering sebesar 3.178.768 Ton atau terserap 83,12% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 3.824.371 Ton. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kegiatan bongkar batubara baik yang ditangani PTP (PT Transindo Perkasa Prima) maupun yang ditangani PBM Mitra (PT Abra Cirebon Sakti). Selain itu juga turunnya komoditi *Cement in bulk*.
3. PTP Cabang Jambi realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Curah Kering sebesar 123.438 Ton atau terserap 10,85% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 1.146.897 Ton. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kegiatan bongkar muat atas komoditi batubara di Pelabuhan Talang Duku dikarenakan masih belum selesainya perbaikan *dolphin* dermaga *conveyor*, kondisi lapangan *stockpile* mengalami banjir dan penutupan jalur *hauling* via darat.

Arus Barang Peti Kemas (*Container*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Petikemas (*Container*) tercapai sebesar 233.581 Teus atau terserap 123,98% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 188,401 Teus. Hal ini disebabkan di PTP Cabang Tanjung Priok realisasi Tahun 2024 untuk arus Petikemas sebesar 134.893 Teus atau terserap 135,03% jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2024 sebesar 99.896 Teus. Hal ini disebabkan peningkatan trafik untuk kegiatan B/M kapal petikemas PT Tanto, PT Salam Pasific Indonesia Lines, PT Solusi Mudah Logistic dan beberapa Kapal Pombo yaitu PT Citra Dermaga Perkasa, PT Firma Berkah Jaya dan PT Hemprisa Karyasaksama.

Target dan Realisasi Rencana Kerja Manajemen

Rencana Kerja Manajemen (RKM) *Corporate* merupakan 9 RKM Strategis *Corporate* Tahun 2024 yang berasal dari RKM Strategis masing-masing Direktorat di PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pada realisasi Tahun 2024 progres pencapaian RKM *Corporate* adalah sebesar 99,00%. Berikut adalah rincian dari RKM Strategis Tahun 2024:

including the European Union's rejection of Indonesian CPO imports and the impact of ongoing replanting periods in palm oil plantations, which temporarily reduced palm oil production.

Dry Bulk Cargo Traffic

In 2024, total dry bulk cargo traffic amounted to 22,167,360 tons, representing 87.40% of the 2024 RKAP target of 25,363,138 tons. The variance in realization was primarily due to the following:

1. PTP Banten Branch realized dry bulk traffic in 2024 reached 2,794,946 tons, equivalent to 61.39% of the 2024 RKAP target of 4,552,904 tons. The decline was attributed to a reduction in raw sugar cargo volumes handled for PT Sentra Usahatama Jaya, which shifted its operations to KBS Port. Additionally, a significant decrease in bulk cement cargo volumes from PT Semen Indonesia occurred due to a reallocation of throughput to other PTP branch areas. Furthermore, nickel ore cargo volumes dropped between February and May 2024 as a result of licensing issues at mining operations in Sulawesi. The use of Port 07 for year-end operations (Nataru 2024) also prevented barge docking activities for nickel ore shipments from PT Growth Java Industry.
2. PTP Cirebon Branch realization in 2024 for the dry bulk cargo traffic totaled 3,178,768 tons, or 83.12% of the 2024 RKAP target of 3,824,371 tons. The underperformance was largely due to unmet coal unloading targets, both for activities handled by PT Transindo Perkasa Prima (PTP) and third-party stevedores such as PT Abra Cirebon Sakti, as well as declining volumes of bulk cement cargo.
3. PTP Jambi Branch realization in 2024 for the dry bulk traffic reached only 123,438 tons, or 10.85% of the 2024 RKAP target of 1,146,897 tons. The underachievement was due to the suspension of coal loading/unloading activities at Talang Duku Port, caused by ongoing repairs to the conveyor port dolphin, flooding of the stockpile yard, and road closures impacting land hauling routes.

Container Cargo Traffic

In 2024, container cargo traffic reached 233,581 TEUs, representing 123.98% of the 2024 RKAP target of 188,401 TEUs. The performance was primarily supported by the following, PTP Tanjung Priok Branch realized container traffic totaled 134,893 TEUs, or 135.03% of the 2024 RKAP target of 99,896 TEUs. The surge was driven by increased ship calls for stevedoring operations under PT Tanto, PT Salam Pacific Indonesia Lines, PT Solusi Mudah Logistic, and Pombo vessels operated by PT Citra Dermaga Perkasa, PT Firma Berkah Jaya, and PT Hemprisa Karyasaksama.

Corporate Management Work Plan (RKM)

The Corporate Management Work Plan (RKM) for 2024 comprised 9 strategic initiatives, aligned with the strategic work plans of each directorate within PT Pelabuhan Tanjung Priok. As of year-end 2024, the overall realization of corporate RKM progress stood at 99.00%. Highlights of 2024 Strategic RKMs:

1. RKM Pengoperasian *Ship to Ship* tercapai *progress overall* sebesar 100,00% dengan *progress expected* sebesar 100,00% dengan pencapaian;
   a. Penandatanganan Perjanjian *Transhipment* Batubara dengan PT Borneo Indobara;
   b. Penandatanganan perjanjian Kerjasama PTP dengan PT EPS Shipping;
   c. Pelayanan *Stevedoring* untuk kegiatan STS PT Multi Guna Maritim;
   d. Pelayanan *Stevedoring* untuk kegiatan STS PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya;
   e. Penyampaian Evaluasi *Project* tahun 2024.

2. RKM Implementasi HSSE di seluruh Cabang PTP telah tercapai *progress overall* Program CSR tercapai sebesar 100,00% dengan *progress expected* 100,00% dengan pencapaian;
   a. Pelaksanaan *Emergency Drill* di Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang dan Tanjung Pandan;
   b. Pelaksanaan *Training* IMO level 1;
   c. Pelaksanaan SoCPF;
   d. Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum;
   e. Penandatanganan BA Komitmen Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Regional;
   f. Implementasi Pengelolaan *Oil Spill Response* (OSR) Cabang Pontianak;
   g. Sosialisasi dan *Training* Modul HSSE *Dashboard* pada aplikasi HSSE *Mobile*.

3. RKM Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP telah tercapai progress 100,00% dan *progress expected* sebesar 100,00% dengan pencapaian:
   a. *Go Live* PTOS M Pombo tanggal 1 Agustus 2024;
   b. *Go Live* PTOS M Ambon tanggal 26 Agustus 2024.

4. RKM Pelaksanaan Investasi Pengadaan Fasilitas Pendukung Bongkar Muat di Dermaga Pelabuhan Kijing telah tercapai *progress* sebesar 95,40% dan *progress expected* sebesar 100.00% dengan pencapaian;
   a. BAST Pengadaan 2 (dua) unit Grab kapasitas 7 CBM di PTP;
   b. BAST Pengadaan Peralatan Pendukung B/M Curah Cair *Ship to Ship* Terminal Kijing;
   c. BAST Pekerjaan Pengadaan *Shower Caustic* Soda untuk Terminal Kijing;
   d. BAST Pekerjaan Jasa Konsultansi Individual *Expert* Penataan *Pipeline* dan desain *Pipe Rack* di Dermaga *Jetty* Terminal Kijing;
   e. BAST Pengadaan 2 unit *Spreader Bar* Kapasitas 40 Ton Kebutuhan Terminal Kijing PTP Cabang Pontianak;
   f. BMAK Pekerjaan Pembangunan *Pipe Rack* Dermaga *Jetty* dan *Trestle* di Terminal Kijing PTP;
   g. Perhitungan EBT Kijing.

5. RKM Pengadaan dan Optimalisasi Alat Bongkar Muat Kebutuhan Cabang Cabang telah tercapai *progress* sebesar 95,61% dengan program *expected* sebesar 100% dengan pencapaian:
   a. Perjanjian Pekerjaan *Overhaul* RS 05 di PTP Cabang Palembang;
   b. SPT Pengawas Pekerjaan *Overhaul* RS 05 di PTP Cabang Palembang;

1. RKM for Ship to Ship Operations Achieved an overall progress of 100.00%, meeting its expected progress targets. Key accomplishments included:
   a. Signing of the coal transshipment agreement with PT Borneo Indobara;
   b. Signing of a partnership agreement between PTP and PT EPS Shipping;
   c. Provision of stevedoring services for STS operations with PT Multi Guna Maritim;
   d. Provision of stevedoring services for STS operations with PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya;
   e. Completion and submission of the 2024 project evaluation report.

2. RKM for HSSE Implementation across all PTP branches recorded an overall progress of 100.00%, meeting the expected target. Key accomplishments under this strategic initiative included:
   a. Execution of emergency drills at the Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang, and Tanjung Pandan branches;
   b. Implementation of IMO Level 1 training;
   c. Execution of the SoCPF program;
   d. Implementation of General OHS Expert training;
   e. Signing of MoA with the Regional Office on Occupational Health and Safety (OHS) compliance;
   f. Implementation of Oil Spill Response (OSR) management at the Pontianak Branch;
   g. Socialization and training on the HSSE Dashboard module via the HSSE Mobile Application

3. RKM for Branch Operations Standardization Program achieved a 100.00% realization rate, meeting its expected progress target. Notable milestones included:
   a. Go live of PTOS-M at Pombo Terminal on August 1, 2024
   b. Go-live of PTOS-M at Ambon Terminal on August 26, 2024

4. RKM for Infrastructure Investment for Supporting Equipment at Kijing Port Terminal for stevedoring supporting facilities at Kijing Port Terminal achieved 95.40% progress, compared to the targeted 100.00%. Key deliverables included:
   a. Handover certificate (BAST) for the procurement of 2 (two) units of 7 CBM grab;
   b. BAST for the procurement of liquid bulk Ship-to-Ship (STS) cargo handling terminal supporting equipment;
   c. BAST for caustic soda shower installation at Kijing Terminal;
   d. BAST for individual expert consultancy services related to pipeline layout and pipe rack design at Jetty Port Kijing Terminal;
   e. BAST for the procurement of two spreader bars with 40-ton capacity for Kijing Terminal, Pontianak Branch;
   f. BMAK certificate for pipe rack and trestle construction at Jetty Kijing Terminal;
   g. Renewable Energy Potential (EBT) calculation for Kijing

5. RKM for Procurement and Optimization of Stevedoring Equipment for Branch Needs reached 95.61% realization, with an expected target of 100%. Notable achievements included:
   a. Execution of a work agreement for RS 05 overhaul at Palembang Branch;
   b. Issuance of supervisory assignment letter (SPT) for RS 05 overhaul at Palembang Branch;

c. BAST Pembongkaran SLC1 dan TC.3.1 dan Perkuatan Tiang *Support* di PTP Cabang Bengkulu;
d. BAST Pekerjaan *Overhaul* RS 05 di PTP Cabang Palembang.

6. RKM Pengadaan Perangkat TI di Kantor Pusat dan Cabang Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok telah tercapai *progress overall* sebesar 100,00% dan *progress expected* sebesar 100,00% dengan pencapaian:
   a. *Testing & Commisioning* Instalasi;
   b. BAST Tahap Dua Pekerjaan Pengadaan Perangkat TI sebagai pendukung penyediaan layanan *backup* Sistem Informasi di area PTP.

7. RKM Peningkatan Kompetensi atau *skill* pengelolaan Manajemen Risiko telah mencapai *progress overall* sebesar 100,00% dengan *progress expected* sebesar 100,00% dengan pencapaian:
   a. Penyusunan *Gap Analysis* kebutuhan pelatihan/ sertifikasi;
   b. *Sharing Session* Manajemen Risiko tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Hotel Ibis Sunter;
   c. *Training Officer Management Risk* tanggal 17-18 Juli 2024 bertempat di Hotel Ibis Sunter.

8. RKM Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi PTP dan Anak Perusahaan telah tercapai *progress overall* sebesar 100,00% dengan *progress expected* sebesar 100% dengan pencapaian:
   a. Peraturan Direksi Struktur Organisasi, Nama Jabatan dan Uraian Jabatan pada Kantor Pusat PTP;
   b. Surat ke SPMT terkait Perubahan Struktur Organisasi PTP;
   c. SK Penempatan di Struktur Organisasi Baru.

9. RKM Sentralisasi *Knowledge Management* Kepelabuhanan tercapai *progress overall* sebesar 100,00% dengan *progress* expected sebesar 100,00% dengan pencapaian:
   a. BA *Knowledge Map* semua bidang;
   b. Pelaksanaan Ngopi Bidang Curah Kering;
   c. Pelaksanaan Ngopi *Cultivating Risk Culture For Global Competitiveness*;
   d. Pelaksanaan Ngopi & COP *Inspired Journey Reflection and Success Stories High Potential Employee.;*
   e. Penyusunan *Knowledge Taxonomy*;
   f. Pelaksanaan Ngopi *Building a Resilient & Reliable Archival Management System*.

KENDALA, TANTANGAN DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Tahun 2024 merupakan tahun penuh tantangan bagi Perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah terjadinya perubahan fokus bisnis Perusahaan selaras dengan pembentukan *holding* dan *sub holding* BUMN sektor pelabuhan, di mana fokus bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami perubahan, yang semula "Terminal Operator *Multipurpose*" menjadi "*Operation and Maintenance*".

Tantangan akibat perubahan pola bisnis, pola *sharing* dengan *subholding*, regional, dan mitra kerja. Untuk menghadapi tantangan tersebut Perusahaan melakukan koordinasi dengan SPMT. Selain itu, Perusahaan menghadapi kendala pada

c. BAST for dismantling SLC1 and TC.3.1 cranes and reinforcing support columns at Bengkulu Branch;
d. BAST for the completion of RS 05 overhaul at Palembang Branch.

6. RKM for IT Infrastructure Procurement at Headquarters and Branches achieved 100.00% realization, fully aligned with its expected progress. Key results included:
   a. Testing and commissioning of the installation;
   b. Second phase BAST for the procurement of IT equipment to support the provision of information system backup services across the PTP operational areas

7. RKM for Risk Management Competency Development achieved an overall progress of 100.00%, fully meeting the expected target of 100.00%. Key accomplishments under this initiative included:
   a. Completion of a gap analysis to identify training/ certification needs;
   b. Conducting a Risk Management Sharing Session on July 16, 2024, held at Hotel Ibis Sunter;
   c. Implementing Risk Management Officer Training on July 17–18, 2024, also held at Hotel Ibis Sunter.

8. RKM for Organizational Structure Review and Implementation – PTP and Subsidiaries reached an overall and expected progress of 100.00%. The key outcomes included:
   a. Issuance of a Board of Directors Regulation concerning the organizational structure, job titles, and job descriptions at PTP Headquarters;
   b. Formal notification to SPMT regarding changes in PTP's organizational structure;
   c. Issuance of placement decrees (SK) in accordance with the new organizational structure

9. RKM For Centralization of Port Knowledge Management achieved 100.00% realization, matching the expected progress. Achievements under this initiative included:
   a. BA Knowledge Map in all fields;
   b. Execution of Ngopi (Knowledge Sharing Forum) Dry Bulk events;
   c. Execution of Ngopi Cultivating Risk Culture for Global Competitiveness;
   d. Execution of Ngopi & COP Inspired Journey Reflection and Success Stories of High Potential Employees;
   e. Knowledge Taxonomy Development;
   f. Implementation of Coffee in Building a Risilient and Rekiable Archival Management System.

CHALLENGES, CONSTRAINTS, AND MITIGATION MEASURES

2024 was a challenging year for the Company. One of the main challenges was the shift in the Company's business focus, which aligned with the broader restructuring of SOEs in the port sector through the establishment of a holding and sub-holding structure. Consequently, PT Pelabuhan Tanjung Priok's core business focus transitioned from a "Multipurpose Terminal Operator" to an "Operation and Maintenance" entity.

The challenges were derived from changes in business models, sharing schemes with subholdings, regional entities, and partners. To address these challenges, the Company coordinated with SPMT. In addition, the Company faced obstacles in the

proses Divestasi PT P3TPK. Sampai saat ini, PT Rukindo belum mendapatkan persetujuan dari SPJM selaku Pemegang Saham PT Rukindo. Adapun langkah yang diambil Perusahaan adalah melakukan rapat dan koordinasi dengan SPJM dan Rukindo.

GAMBARAN DAN ANALISIS PROSPEK USAHA

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2025 relatif sama dengan 2024, yakni di 3,3% (2024: 3,2%). Beberapa risiko, seperti risiko geopolitik, perubahan kepemimpinan pasca pemilu dan kebijakan negara-negara perekonomian utama, serta perlambatan ekonomi Tiongkok merupakan risiko ekonomi global ke depan. Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diperkirakan akan ditutup dalam angka 5%, sama dengan proyeksi pertumbuhan untuk 2025. Permintaan domestik masih mampu mendorong perekonomian nasional untuk tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Selain itu juga, arus investasi domestik maupun internasional juga akan menopang pertumbuhan perekonomian nasional selaras dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain mengelola bisnis *existing*, Direksi akan fokus pada pengembangan pengoperasian Pelabuhan Kijing dan pengembangan pasar pada kegiatan *shorebase* yang potensial.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan landasan utama bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan memastikan seluruh aspek operasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perusahaan juga menjunjung tinggi prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*, dan *Trusted*. Dalam operasionalnya, Perusahaan juga mengedepankan etika dan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan kebijakan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perusahaan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara periodik manajemen melakukan tinjauan dan pengkinian atas kebijakan yang dimiliki, agar terus memiliki relevansinya baik terhadap perkembangan Perusahaan, perkembangan regulasi yang diberlakukan.

Pada tahun 2024 ini, telah dilakukan pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Penilaian implementasi GCG Perusahaan untuk tahun buku 2024 dilakukan dengan menggunakan parameter Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dilakukan oleh *assessor* independen, yaitu PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Perusahaan telah memenuhi (*apply*) 71 (tujuh puluh satu) rekomendasi dari 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan PUGKI 2021, dengan rincian sebagai berikut.

divestment process of PT P3TPK. As of now, PT Rukindo has not received approval from SPJM as the Shareholder of PT Rukindo. The steps taken by the Company include conducting meetings and coordination with SPJM and Rukindo.

BUSINESS OUTLOOK AND ANALYSIS

The IMF projects global economic growth in 2025 to be relatively similar to 2024, at 3.3% (2024: 3.2%). Several risks, such as geopolitical tensions, leadership changes following elections, and the policies of major economies, as well as the economic slowdown in China, are seen as global economic risks going forward. Domestically, Indonesia's economic growth in 2024 is expected to close at 5%, the same as the projected growth for 2025. Robust domestic demand continues to serve as a key driver of national economic activity, keeping it at a relatively high level. In parallel, both domestic and foreign investment flows are expected to support Indonesia's economic growth, in line with the ongoing development of National Strategic Projects (Proyek Strategis Nasional/PSN).

In addition to managing the existing business, the Board of Directors will focus on the development of Kijing Port operations and market expansion in potential shorebase activities.

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The principles of Good Corporate Governance (GCG) serve as the foundation for the Company in conducting its business activities. The Company ensures that all operational aspects comply with applicable laws and regulations. Moreover, the Company upholds the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, and Trusted. In its operations, the Company also prioritizes ethics and considers sustainability aspects.

The Board of Directors, along with the Board of Commissioners, formulates various guidelines and policies to define the scope of responsibilities for each corporate organ. These boundaries are essential to ensure harmonious relationships among corporate organs and to support the achievement of the established vision and mission. The management regularly reviews and updates these policies to ensure their continued relevance to the Company's development and applicable regulatory changes.

In 2024, the Company conducted an assessment of GCG implementation, referring to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) as benchmark frameworks for evaluation.

The assessment of the Company's GCG implementation for the 2024 fiscal year was conducted using the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) as the evaluation framework. The assessment was carried out by an independent assessor, PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Based on the results of the assessment, the Company successfully applied 71 (seventy one) out of 81 (eighty one) recommendations outlined in the PUGKI 2021. The detailed breakdown of the assessment results is as follows:

Tabel Hasil Penilaian PUG-KI
PUGKI Assessment Results

Prinsip Principle		Terpenuhi (Apply) Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations Apply			
Prinsip 1 Principle 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners	29	dari of	31	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 2 Principle 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	4	dari of	11	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 3 Principle 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners	5	dari of	5	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 4 Principle 4	Perilaku Etis Ethical Behavior	4	dari of	4	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 5 Principle 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	6	dari of	6	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 6 Principle 6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	9	dari of	9	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 7 Principle 7	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	10	dari of	11	Rekomendasi Recommendations
Prinsip 8 Principle 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan Stakeholder Rights	4	dari of	4	Rekomendasi Recommendations
Total		71	dari of	81	Rekomendasi Recommendations

Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan pengukuran berdasarkan parameter ACGS yang dilakukan oleh *assessor* independen PT Kharisma Integrasi Manajemen.

In 2024, the Company conducted an assessment of its corporate governance implementation using the ACGS framework. The evaluation was carried out by an independent assessor, PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Sebagaimana diketahui, PT Pelabuhan Tanjung Priok merupakan"perusahaan non-Tbk" sehingga terdapat 8 faktor uji yang tidak dapat diimplementasikan dalam Perusahaan (*not applicable* atau "NA") yang pada umumnya sebagai akibat dari perusahaan non-Tbk, sehingga jumlah faktor uji seluruhnya dari sebanyak 193 menjadi 189 faktor uji.

As PT Pelabuhan Tanjung Priok is a non-listed company (non-Tbk), eight assessment factors were deemed not applicable (NA) due to the Company's non-public status. Consequently, the total number of applicable assessment factors was adjusted from 193 to 189.

Total nilai akhir yang diperoleh Perusahaan tahun 2025 untuk pengungkapan tahun 2024 adalah 97,43 *point* dari total nilai maksimal sebesar 140 *point*. Dengan demikian secara *overall* hasil *assessment* implementasi *ASEAN CG Scorecard* mendapatkan predikat "*Very Good*" artinya "*Perusahaan sudah mampu memenuhi standar internasional praktik ASEAN Corporate Governance Scorecard*".

For the 2024 disclosure year, the Company achieved a total score of 97.43 points out of a maximum 140 points. Based on the ACGS criteria, this score earned the "Very Good" category, indicating that the Company has met international standards of ASEAN Corporate Governance practices.

Hal ini merupakan nilai yang sangat luar biasa terlebih dengan mempertimbangkan status Perusahaan sebagai "Perusahaan non-Tbk". Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen seluruh pihak penyelenggara dan pengawas Perusahaan, dan oleh karenanya kami meyakini bahwa ke depan PT Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi perusahaan yang memenuhi praktik-praktik GCG berstandar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

It is an outstanding achievement, especially considering the Company's status as a non-listed entity. The result reflects the strong commitment of all governance and supervisory bodies within the Company. Accordingly, we believe that PT Pelabuhan Tanjung Priok is on the right path toward becoming a Company that fully aligns with the ASEAN Corporate Governance Scorecard practices and can compete effectively at both national and international levels.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap aktivitasnya, termasuk melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). WBS adalah mekanisme yang dirancang untuk mendukung transparansi,

WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

The Company is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all its activities, including through the Whistleblowing System (WBS). WBS is a mechanism designed to support transparency, integrity, and accountability in

integritas, dan akuntabilitas dalam operasional Perusahaan.Sistem ini memberikan kesempatan kepada Insan Perusahaan, mitra bisnis, serta pihak eksternal lainnya untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum, Kode Etik, atau kebijakan internal Perusahaan. Sistem ini juga bertujuan melindungi pelapor dari kemungkinan tindakan balasan atau intimidasi, sehingga mendorong lebih banyak pihak untuk berani melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Dengan demikian, Perusahaan berupaya memperkuat budaya kerja yang jujur, transparan, dan berintegritas tinggi di semua aspek kegiatan bisnis serta membangun lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan akuntabilitas.

Penerapan sistem WBS Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 25 November 2024 yang menetapkan pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Lebih lanjut, Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) bertanggung jawab dalam menerima dan memproses pengaduan yang diterima melalui saluran pelaporan yang tersedia. Penanganan pengaduan juga dilaksanakan melalui struktur Pelindo *Group*, yaitu Komite Pelindo Bersih. Oleh karena itu, Direksi senantiasa memastikan bahwa sinergi antara Tim UPG dengan Komite Pelindo Bersih selalu terjaga demi menciptakan kinerja yang optimal.

Setiap laporan yang diterima melalui WBS akan melalui proses investigasi, dan apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, sanksi akan dikenakan kepada pihak terlapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Pada tahun 2024, tidak terdapat laporan yang diterima atau terindikasi pelanggaran dalam saluran pelaporan yang telah disediakan Perusahaan. Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab dalam mengelola Perusahaan, akan terus menjaga semangat dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi Perusahaan diatur dan diselaraskan dengan Teknologi Informasi dalam lingkungan Pelindo *Group*. Sebagai bagian dari Pelindo *Group*, Perusahaan senantiasa berupaya meningkatkan layanan Teknologi Informasi dalam kegiatan Perusahaan. Perusahaan dimungkinkan membangun dan mengembangkan Teknologi Informasi yang digunakan khusus di lingkungan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Adapun program kerja Teknologi Informasi pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemeliharaan dan Perawatan
   a. Telah dilakukan perawatan komputer dan perangkat jaringan di seluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Telah dilakukan perawatan sistem *monitoring* operasional di seluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok yang didukung dengan teknologi *Closed-Circuit Television (CCTV)*;
   c. Telah dilakukan proses pengadaan pekerjaan *manage operation support* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam bentuk penempatan personil *engineer on site* (EOS) di seluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;

the Company's operations. The system provides an opportunity for Company personnel, business partners, and other external parties to report actions that violate laws, the Code of Conducts, or internal Company policies. It also aims to protect whistleblowers from potential retaliation or intimidation, thereby encouraging more individuals to report violations without fear. Through the system, the Company strives to foster an honest, transparent, and highly ethical work culture across all aspects of its business activities and to create a conducive work environment while enhancing accountability.

The implementation of the Company's WBS is under the responsibility of the Gratification Control Unit (UPG) Team, which was established by the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 25, 2024. This decree outlines the formation of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP), which also serves as the Gratification Control Unit (UPG), the Conflict of Interest Management Unit, and the Fraud Control Unit within the Anti-Bribery Management System of PT Pelabuhan Tanjung Priok. Furthermore, the UPG Team is responsible for receiving and processing complaints submitted through the available reporting channels. Complaint handling is also carried out through the Pelindo Group structure, namely the Pelindo Bersih Committee. Therefore, the Board of Directors ensures that synergy between the UPG Team and the Pelindo Bersih Committee is consistently maintained to achieve optimal performance.

Every report received through the WBS will undergo an investigation process. If the reported violation is substantiated, appropriate sanctions will be imposed in accordance with the Company's policies. In 2024, there were no reports received or any indications of violations through the reporting channels provided by the Company. As the corporate organ responsible for managing the Company, the Board of Directors will continue to uphold the spirit and dedication demonstrated throughout the year to create a clean and ethical working environment.

INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

The Company's Information Technology implementation is regulated and aligned with Information Technology within the Pelindo Group. As part of the Pelindo Group, the Company always strives to improve Information Technology services in the Company's activities. The Company is allowed to build and develop Information Technology that is used specifically within the Company's environment while paying attention to alignment with integrated Information Technology.

Information Technology Programs in 2024 such as:

1. Maintenance and Servicing
   a. Routine maintenance of computers and network devices has been carried out across all PT Pelabuhan Tanjung Priok operational areas;
   b. Maintenance of operational monitoring systems, supported by Closed-Circuit Television (CCTV) technology, has been performed across all PT Pelabuhan Tanjung Priok work sites;
   c. The Company has carried out the procurement process for operational support services management within the PT Pelabuhan Tanjung Priok by deploying on-site engineers (EOS) across all operational areas of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

d. Telah dilakukan *monitoring* dan pengendalian terhadap sistem operasional maupun sistem pendukung di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam bentuk penempatan personil *engineer on site* (EOS) serta TI *helpdesk support* untuk dokumentasi dan perbaikan kendala yang terjadi pada sistem.

2. Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi
   a. Pekerjaan pengadaan perangkat TI untuk mendukung penyediaan layanan *backup* Sistem Informasi di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak;
   c. Pekerjaan pengadaan perangkat pendukung TI di Terminal Internasional PTP Cabang Tanjung Priok dalam mendukung terlaksananya transformasi dan standarisasi pola operasi serta implementasi aplikasi PTOS-M;
   d. Pekerjaan standarisasi *software endpoint protection* berbasis teknologi XDR;
   e. Perpanjangan ATS Perangkat *Network Security* guna menjamin fungsi dan fitur perangkat *Network Security* PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap dapat digunakan untuk mendukung proses kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan normal;
   f. Pengadaan dan Pemasangan CCTV di Ruang *Planning & Control* Cabang-Cabang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap dapat digunakan untuk mendukung proses kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan normal;
   g. Pengadaan *Handheld* sebagai perangkat penunjang kegiatan *tally* di dermaga dan lapangan guna mendukung kelancaran implementasi PTOS-M di area Terminal Internasional PTP Cabang Tanjung Priok;
   h. Penambahan lisensi *Milestone Pro Plus* untuk meningkatkan kapasitas dan integritas CCTV di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok agar CCTV yang baru terpasang dapat terintegrasi ke dalam satu sistem dan tersentralisasi sehingga dapat dipantau secara langsung dari Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   i. Penambahan HDD *Server Storage* PT Pelabuhan Tanjung Priok guna mengakomodir kebutuhan pembangunan aplikasi-aplikasi *inhouse* yang dibangun dan di kembangkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   j. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI untuk Pengoperasian Dermaga Ketapang di PTP Cabang Pangkal Balam;
   k. Pekerjaan Pengadaan Perangkat TI & Penarikan Kabel FO untuk Pengoperasian Dermaga Ketapang di PTP Cabang Pangkal Balam;
   l. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Annoucher* di Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak;
   m. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Annoucher* di PTP Cabang Pangkal Balam;
   n. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Annoucher* di PTP Cabang Cirebon;
   o. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Annoucher* di Dermaga Inggom PTP Cabang Tanjung Priok;
   p. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Annoucher* di PTP Cabang Tanjung Pandan;
   q. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI dalam rangka optimalisasi pengoperasian *gate* Lini 1 di PTP Cabang Banten;
   r. Penyediaan *backup link* internet PTP Cabang Banten sebagai *mitigation plan* apabila *main link* internet

d. Monitoring and controlling of both operational systems and support systems within PT Pelabuhan Tanjung Priok have been carried out through the deployment of on-site engineers (EOS) as well as IT helpdesk support for documentation and troubleshooting of system issues.

2. IT Infrastructure Development
   a. Procurement of IT equipment to support backup information system services within the environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Enhancement of IT infrastructure at Kijing Port, PTP Pontianak Branch;
   c. Procurement of supporting IT equipment at the International Terminal of PTP Tanjung Priok Branch to facilitate the transformation and standardization of operational patterns and the implementation of the PTOS-M application;
   d. Standardization of endpoint protection software using XDR technology;
   e. Extension of the ATS for Network Security Devices to ensure that their functions and features remain operational in supporting smooth and uninterrupted business activities at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   f. Procurement and installation of CCTV in the Planning & Control Rooms of branches managed by PT Pelabuhan Tanjung Priok to support uninterrupted operational processes;
   g. Procurement of handheld devices to support tally operations at docks and yards for the smooth implementation of PTOS-M at the International Terminal of PTP Tanjung Priok Branch;
   h. Additional Milestone Pro Plus licenses to enhance the capacity and integration of CCTV systems across PT Pelabuhan Tanjung Priok, allowing all newly installed CCTV units to be integrated into a centralized system monitored directly from the Head Office;
   i. Addition of HDD Server Storage at PT Pelabuhan Tanjung Priok to accommodate the development of various in-house applications;
   j. Enhancement of IT infrastructure to support operations at Ketapang Wharf, PTP Pangkal Balam Branch;
   k. Procurement of IT devices and fiber optic cabling for operations at Ketapang Wharf, PTP Pangkal Balam Branch;
   l. Procurement and installation of Public Announcer systems at Kijing Port, PTP Pontianak Branch;
   m. Procurement and installation of Public Announcer systems at PTP Pangkal Balam Branch;
   n. Procurement and installation of Public Announcer systems at PTP Cirebon Branch;
   o. Procurement and installation of Public Announcer systems at Inggom Wharf, PTP Tanjung Priok Branch;
   p. Procurement and installation of Public Announcer systems at PTP Tanjung Pandan Branch;
   q. Enhancement of IT infrastructure to optimize gate operations at Line 1, PTP Banten Branch;
   r. Provision of internet backup link for PTP Banten Branch as a mitigation plan in case the main internet link fails, ensuring

mengalami gangguan sehingga koneksi internet untuk kebutuhan kegiatan *back office* maupun kegiatan operasional dapat tetap berjalan dengan normal;

s. Penyediaan *backup link* internet Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak sebagai *mitigation plan* apabila *main link* internet mengalami gangguan sehingga koneksi internet untuk kebutuhan kegiatan *back office* maupun kegiatan operasional dapat tetap berjalan dengan normal.

3. Pengembangan Sistem Aplikasi
   a. Implementasi dan Stabilisasi *Single* ERP SAP;
   b. Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi *Dashboard* HSSE;
   c. Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi *Manpower Planning* dan *Berthing Map*;
   d. Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Inovasi e-Magang (MAGNIT);
   e. Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Inovasi e-ISO (AIA);
   f. Implementasi Aplikasi SIMOP Barang untuk wilayah kerja STS Bunati;
   g. Implementasi Sentralisasi *IT Service Desk* Pelindo;
   h. Implementasi Sistem Aplikasi PTOS-M pada wilayah Cabang Tanjung Priok untuk kegiatan *Ocean Going*;
   i. Implementasi *Change Request* Penambahan *Footer* pada Pranota;
   j. Implementasi *Change Request* PTOS-M untuk kegiatan di luar wilayah kerja sama Pelindo;
   k. Implementasi Aplikasi *Locking* Piutang;
   l. Implementasi *Change Request* Pemadanan NPWP menjadi 16 digit;
   m. Implementasi *Change Request* Penambahan Porsi Konsesi PBM Mitra *Clustering* pada Tagihan Nota;
   n. Implementasi *Change Request* Penyesuaian Tarif PPN menjadi 12%.
4. Pengembangan *IT Strategic & Governance*
   a. Pekerjaan Penyusunan *IT Master Plan* PT Pelabuhan Tanjung Priok periode 2025-2029;
   b. Pekerjaan *IT Maturity Level Assessment* PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perusahaan turut berperan serta aktif dalam kegiatan kepedulian sosial dan lingkungan di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Management (RKM) Tahun 2024 dan target KPI (*Key Performance Indicator*) Perusahaan Tahun 2024 dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Investment* (SROI);
2. Meningkatkan Kolaborasi (bisa dengan BUMN lain, Regional, Pelindo dan antar Subholding) maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan TJSL dengan tujuan meningkatkan dampak positif program, diantaranya pada bidang Pendidikan, Lingkungan dan UMKM;
3. Melibatkan peran serta Karyawan secara aktif dalam program TJSL;

uninterrupted internet connectivity for both back-office and operational activities;

s. Provision of internet backup link for Kijing Port, PTP Pontianak Branch as a mitigation plan in case the main internet link fails, ensuring continuous internet service for both back-office and operational needs.

3. Application System Development
   a. Implementation and Stabilization of Single ERP SAP;
   b. Planning and Development of HSSE Dashboard Application;
   c. Planning and Development of Manpower Planning and Berthing Map Applications;
   d. Planning and Development of e-Internship Innovation Application (MAGNIT);
   e. Planning and Development of e-ISO Innovation Application (AIA);
   f. Implementation of SIMOP Cargo Application for STS Bunati operational area;
   g. Implementation of Pelindo IT Service Desk Centralization;
   h. Implementation of PTOS-M Application System in the Tanjung Priok Branch area for Ocean Going activities;
   i. Implementation of Change Request for Addition of Footer on Proforma Invoice;
   j. Implementation of Change Request for PTOS-M for activities outside Pelindo collaboration areas;
   k. Implementation of Receivables Locking Application;
   l. Implementation of Change Request for Conversion of Tax ID Number (NPWP) to 16 digits;
   m. Implementation of Change Request for Addition of PBM Partner Clustering Concession Portion on Invoice Billing;
   n. Implementation of Change Request for VAT Rate Adjustment to 12%.
4. Development of IT Strategic & Governance
   a. Preparation of the IT Master Plan for PT Pelabuhan Tanjung Priok for the 2025–2029 period;
   b. IT Maturity Level Assessment for PT Pelabuhan Tanjung Priok.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Referring to Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility, the Company actively participates in social and environmental concern activities around its operational areas.

The Company's 2024 Corporate Social Responsibility (CSR) or TJSL program was implemented in alignment with the 2024 Management Work Plan (RKM) and the Company's Key Performance Indicators (KPIs), which included 3 (three) key indicators:

1. Measuring the impact of CSR programs using the Social Return on Investment (SROI) methodology;
2. Strengthening collaboration (either with other SOEs, regional entities, the Pelindo Group, or relevant third parties in order to amplify the positive impact of programs in areas such as education, environmental , and MSME development;
3. Encouraging active employee involvement in CSR programs.

Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari 12 program turunan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikelompokkan kedalam beberapa kategori diantaranya:

1. PTP Peduli Lingkungan
2. PTP Peduli Ekonomi
3. PTP Peduli Sosial

Selain dari kategori di atas, PT Pelabuhan Tanjung Priok juga mengadakan program PTP Peduli Sesama sebagai kegiatan rutin tahunan dan bantuan sosial untuk musibah bencana.

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan mengalokasikan dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Bantuan Sosial sebesar Rp2.300.000.000. Adapun realisasi tahun 2024 untuk program TJSL/ CSR dan Bantuan Sosial adalah sebesar Rp1.811.410.440.

Adapun program TJSL/ CSR unggul di tahun 2024 adalah penyusunan *Roadmap* Program Unggulan TJSL/CSR sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2024.

Implementasi dari *roadmap* tersebut adalah dibentuknya UMKM Akademi PTP yang bertujuan menciptakan penggiat UMKM baru yang diharapkan mandiri dalam mendirikan usaha. Melalui proses seleksi peserta yang panjang dengan kategori merupakan pemuda kurang mampu, ingin memiliki usaha dan terus belajar mengembangkan diri, UMKM Akademi telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) peserta untuk *batch* 1 (satu).

Dalam UMKM Akademi PTP, para peserta dibekali pelatihan *hard skill* dan *soft skill* untuk membuat suatu produk, bagaimana mempersiapkan, memasarkan hingga mengelola hasil penjualannya. Adapun produk yang dibuat adalah *Juice Merger - a Collaboration of Fruits* dan dipasarkan di Pelindo Tower Lantai 4
.
Sebagai tahap lanjutan pada tahun 2024 penerima manfaat (*batch* 1) mendapatkan program pada Fase 2 yaitu pembinaan dengan lokasi pelatihan berada di Kios jl. Swasembada Tanjung Priok, Adapun rangkaian kegiatan berupa Pendampingan intensif, pelatihan pemasaran digital dan berlatih menjadi seorang manajer store pada penerima baru (*batch* 2 *fase* 1) yang melanjutkan program pembibitan baru.

Kegiatan ini juga melibatkan peran serta pegawai untuk *sharing* ilmu dan pengalaman dalam bidang pembuatan laporan keuangan, pengembangan usaha, pemasaran digital dan aksesbilitas *platform* e-*commerce*.

Program ini merupakan inovasi baru dalam implementasi kegiatan TJSL dimana biasanya membina UMKM yang telah ada, akan tetapi program ini menciptakan bibit penggiat UMKM baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah terhadap UMKM untuk berperan sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil dan sarana pengentasan kemiskinan. Dengan berjalannya program ini PTP Terminal Nonpetikemas juga telah mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)*, nomor 1 (satu) Tanpa Kemiskinan, nomor 8 (delapan)

The Corporate Social Responsibilities (CSR) initiatives undertaken by PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2024 were aligned with 12 derivative programs of the SDGs and categorized under the following themes:

1. PTP Cares for the Environment
2. PTP Cares for the Economy
3. PTP Cares for Social Welfare

In addition to the above, the Company also conducted annual programs under “PTP Cares for Humanity”, which include routine philanthropic activities and emergency aid in response to natural disasters.

By the end of 2024, the Company had allocated a total of Rp2,300,000,000 for CSR and social assistance programs, with actual disbursements amounting to Rp1,811,410,440.

A notable achievement in 2024 was the development of a CSR Signature Program Roadmap, formulated as a follow-up to the Company’s 2024 Management Work Plan (RKM).

As part of the roadmap implementation, PTP MSME Academy was established to foster the development of new MSME entrepreneurs, aiming to empower them to establish and operate independent businesses. Participants were selected through a rigorous process, with criteria focusing on underprivileged youth who demonstrate a strong desire to start a business and continuously develop themselves. As a result, 3 (three) participants were selected for Batch 1 (one).

Within the PTP MSME Academy, participants received both hard skill and soft skill training, covering product development, preparation, marketing, and financial management. The pilot product, Juice Merger – A Collaboration of Fruits, was developed and marketed at Pelindo Tower, 4th Floor.

In 2024, the beneficiaries from Batch 1 entered the next Phase, which included advanced coaching and practical training held at a training kiosk on Jl. Swasembada, Tanjung Priok. Activities included intensive mentoring, digital marketing training, and managerial training for new participants from Batch 2 – Phase 1, marking the continuation of the MSME incubation cycle.

The program also actively engaged PTP employees who shared their knowledge and experiences in financial reporting, business development, digital marketing, and accessing e-commerce platforms.

This program represents an innovative approach to CSR implementation, shifting from the traditional model of supporting existing MSMEs to incubating new entrepreneurs within the community around Pelabuhan Tanjung Priok.

The initiative is expected to support government efforts to promote MSMEs as instruments for equitable economic distribution and poverty alleviation. Through this program, PTP Terminal Nonpetikemas also contributes directly to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 1: No Poverty, Goal 8: Decent Work and Economic Growth, and Goal 10:

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan nomor 10 (sepuluh) Berkurangnya Kesenjangan.

Reduced Inequalities.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Terhitung hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki Komite di bawah Direksi. Oleh karena itu, tidak terdapat penilaian yang dilakukan terhadap Komite di bawah Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of the end of 2024, the Company did not establish any Committees under the Board of Directors. Therefore, no performance assessment was conducted for such committees.

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, komposisi anggota Direksi mengalami perubahan. Alasan perubahan komposisi Direksi karena penyegaran Organisasi.

Komposisi Direksi PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

Susunan Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE REASONS

During 2024, the composition of the Board of Directors underwent changes as part of an organizational refreshment initiative.

As of December 31, 2024, the Board of Directors of PTP Terminal Nonpetikemas consisted of three members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Director of Commercial and Business Development, 1 (one) Director of Finance, Human Capital, and Risk Management.

The full composition of the Board of Directors throughout 2024 was as follows:

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Januari 2024 – 1 Maret 2024
Composition of the Board of Directors for period of January 1, 2024-March 1, 2024

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Appointment Basis	**Masa dan Periode Jabatan** Period of Office
Rino Wisnu Putra	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor:SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode ke-1 June 2, 2022 - March 1, 2024, First Period
Rino Wisnu Putra	Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-004/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Persetujuan Atas Perubahan Logo Perusahaan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Acting Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-004/PII-SK.D/IV/2022 dated April 18, 2022, regarding the Approval of Changes to the Company Logo and Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	18 April 2022 – 1 Maret 2024, Periode ke-1 April 18, 2022 – March 1, 2024, First Period
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Operasi Director of Operation	Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode ke-1 June 2, 2022 - March 1, 2024, First Period

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Januari 2024 – 1 Maret 2024
Composition of the Board of Directors for period of January 1, 2024-March 1, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Period of Office
Bambang Sakti	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HC	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/ PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Finance and HC of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/ DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode ke-1 June 2, 2022 – March 1, 2024, First Period

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024
Composition of the Board of Directors for period of March 1, 2024-August 30, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Period of Office
Indra Hidayat Sani	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2029*), Periode ke-1 March 1, 2024 -2029*), First Period
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/ PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/ PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2029*), Periode ke-1 March 1, 2024 - 2029*), First Period
Kalbar Yanto	Direktur Operasi Director of Operation	Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024, Periode ke-1 March 1, 2024 – August 30, 2024, First Period

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024
Composition of the Board of Directors for period of March 1, 2024-August 30, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Period of Office
Bambang Sakti	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Finance, HC, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2027*), Periode ke-1 March 1, 2024 - 2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time

Susunan Keanggotaan Direksi per 30 Agustus 2024 – 31 Desember 2024
Composition of the Board of Directors for period of August 30, 2024- December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Period of Office
Indra Hidayat Sani	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2029*), Periode ke-1 March 1, 2024 -2029*), First Period
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2029*), Periode ke-1 March 1, 2024 -2029*), First Period
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Plt. Direktur Operasi Director of Operations	Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Acting Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 dated August 30, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 September 2024 - 2029*), Periode ke-1 September 1, 2024 - 2029*), First Period

Susunan Keanggotaan Direksi per 30 Agustus 2024 – 31 Desember 2024
Composition of the Board of Directors for period of August 30, 2024- December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa dan Periode Jabatan Period of Office
Bambang Sakti	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC and Risk Management	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 14 tanggal 30, juni 2022 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PIISK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 Appointed as Director of Finance, HC, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	2 Juni 2022 - 2027*), Periode ke-1 June 2, 2022 - 2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time

APRESIASI DAN PENUTUP

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang dan menjadi tahun pembelajaran bagi insan Perusahaan. Masih terdapat beberapa hal untuk ditangani dan dicarikan solusi untuk meningkatkan performansi Perusahaan. Direksi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi.

Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan, pengawasan serta arahan-arahan yang diberikan. Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra bisnis, regulator dan pemangku kepentingan. Kami berharap dan optimis bahwa kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok akan meningkat di masa mendatang.

APPRECIATION AND CLOSING STATEMENT

The year 2024 was a challenging period and served as a valuable learning for the Company's personnel. Several matters remain to be addressed and resolved to increase the Company's performance. The Board of Directors extends utmost gratitude to employees for their hard work and dedication.

The Board of Directors also expresses respect and gratitude to the Board of Commissioners and Shareholders for their trust, oversight, and directive provided. The Board of Directors also expresses appreciation and gratitude to the business partners, regulators, and stakeholders. We remain hopeful and optimistic that PT Pelabuhan Tanjung Priok will improve in the years to come.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025
Atas nama Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
On behalf of Board of Director of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

INDRA HIDAYAT SANI
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2024

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information presented in the 2024 Annual Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok has been disclosed in its entirety and that we fully accept responsibility for the accuracy and completeness of the contents of this Annual Report.

This statement is made truthfully and in good faith.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioner



PRAKOSA HADI TAKARIYANTO
Komisaris Utama
President Commissioner



ANDI HAMDANI
Komisaris
Commissioner



DEDY CAHYADI
Komisaris
Commissioner



LUKIJANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2024

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information presented in the 2024 Annual Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok has been disclosed in its entirety and that we fully accept responsibility for the accuracy and completeness of the contents of this Annual Report.

This statement is made truthfully and in good faith.

Jakarta, 31 Mei 2025
Jakarta, May 31, 2025

Direksi
Board of Directors

INDRA HIDAYAT SANI
Direktur Utama
President Director

DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Director of Commercial and Business Development

DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
Plt. Direktur Operasi
Acting Director of Operations

BAMBANG SAKTI
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





03

Profile Perusahaan

Company Profile


PELINDO

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Nama Brand
Brand Name

PTP Terminal Nonpetikemas

Informasi Perubahan Nama
Information on Name Change

Sampai dengan tahun 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak melakukan perubahan nama Perusahaan
As of 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok has not undergone any company name changes.

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

10 Juli 2013/July 10, 2013

Tahun Beroperasi Komersial
Year of Commercial Operations

1 November 2014/November 1, 2014

Bidang Usaha
Business Fields

1. **Penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan**
2. **Penyediaan dan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhan**
1. Provision and operation of port services
2. Provision and operation of services related to port activities

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

1. **Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.**
2. **Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-13799 AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
3. **Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM. 339/3/11/2/PTP-14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok.**
4. **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler No. 10 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-0026958.AH.01.02.tanggal 30 April 2021.**
1. Deed of Establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 dated July 10, 2013, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-42024.AH.01.01 Year 2013 dated August 1, 2013 regarding Ratification of the Company's Legal Entity.
2. Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 dated March 14, 2014, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-13799 AH.01.02 Year 2014 regarding Approval of Amendment to the Company's Articles of Association.
3. Minutes of Agreement of Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.339/3/11/2/PTP-14 dated November 3, 2014 concerning the Operation of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Deed of Statement of Circular Meeting Resolution No. 10 dated April 30, 2021, drawn up before Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0026958.AH.01.02 dated April 30, 2021.

Izin Usaha
Business License

Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 818 Tahun 2014, tanggal 29 September 2014.
Port Business Entity according to the Minister of Transportation Decree No. KP 818 of 2014 dated September 29, 2014.

Produk dan Jasa Layanan
Products and Services

Jasa *stevedoring*, *cargodoring*, gudang penumpukan, *receiving/delivery*, lapangan dan penumpukan, layanan pengangkutan, *shorebase & ship to ship*, dan pelayanan lainnya
Services of stevedoring, cargodoring, stacking warehouse, receiving/delivery, yard and stacking services, transportation services, shorebase & ship to ship services, and other supporting services

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp100.000.000.000 terbagi atas 100.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.
Rp100,000,000,000 divided into 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-up Capital

Rp25.000.000.000 terbagi atas 25.000 lembar saham.
Rp25,000,000,000 divided into 25,000 shares.

Jumlah Karyawan
Total Employees

301 orang (2024)
301 employees (2024)

Total Aset
Total Assets

Rp933.879.499 (dalam ribuan)
Rp933,879.499 (in thousands)

Kepemilikan Saham
Share Ownership

PT Pelindo Multi Terminal (99,00%)
PT Pelabuhan Indonesia Investama (01,00%)

1 Kantor Pusat
11 Kantor Cabang :

1. Cabang Tanjung Priok
2. Cabang Banten
3. Cabang Panjang
4. Cabang Bengkulu
5. Cabang Jambi
6. Cabang Teluk Bayur
7. Cabang Palembang
8. Cabang Cirebon
9. Cabang Pangkal Balam
10. Cabang Pontianak
11. Cabang Tanjung Pandan

1 Head Office
11 Branch Offices:

1. Tanjung Priok Branch
2. Banten Branch
3. Panjang Branch
4. Bengkulu Branch
5. Jambi Branch
6. Teluk Bayur Branch
7. Palembang Branch
8. Cirebon Branch
9. Pangkal Balam Branch
10. Pontianak Branch
11. Tanjung Pandan Branch

AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

ACCESS TO THE COMPANY, INCLUDING BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

Jaringan Kantor Office Networks	**Alamat** Address
Kantor Pusat Head Office	**Gedung Pelindo Tower Lt. 16** Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230 Email : ptpnonpetikemas@ptp.co.id
Situs Web Website	https://ptp.co.id/
Kontak Perusahaan Company Contact	**Sekretaris Perusahaan** Email : ptpnonpetikemas@ptp.co.id
	Pengaduan Gratifikasi +62 811 933 2345
	Whistleblowing System https://ipcbersih.whistleblowing.link/
	Media Sosial LinkedIn : PTP Nonpetikemas Facebook : PTP Nonpetikemas X/Twitter : @PTPNonpetikemas Youtube : PTP Nonpetikemas Instagram : @ptpnonpetikemas
Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	Jalan Nusantara 2 (PTP Terminal Nonpetikemas cabang Tanjung Priok), Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Telp : (021) 4367505 Email : tanjungpriok@ptp.co.id Jalan Nusantara 2 (PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch), Tanjung Priok, North Jakarta 14310 Tel: (021) 4367505 Email: tanjungpriok@ptp.co.id
Cabang Banten Banten Branch	Jl. Raya Ciwandan, Gunungsugih, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon , Banten Telp : (0254) 601417 Email : banten@ptp.co.id Jl. Raya Ciwandan, Gunungsugih, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Tel: (0254) 601417 Email: banten@ptp.co.id
Cabang Cirebon Cirebon Branch	Jl. Ambon No.3, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon , Jawa Barat 45112 Telp : (0231) 20424 Email : cirebon@ptp.co.id Jl. Ambon No.3, Panjunan, Lemahwungkuk District, Cirebon City, West Java 45112 Tel: (0231) 20424 Email: cirebon@ptp.co.id
Cabang Jambi Jambi Branch	Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36382 Telp : (0741) 35067 Email : jambi@ptp.co.id Talang Duku, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency, Jambi 36382 Tel: (0741) 35067 Email: jambi@ptp.co.id
Cabang Palembang Palembang Branch	Lorong Pasundan No. 599, RT.6/RW.6, Lawang Kidul, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30115 Telp : (0711) 710611 Email : palembang@ptp.co.id Lorong Pasundan No. 599, RT.6/RW.6, Lawang Kidul, Ilir Timur II District, Palembang City, South Sumatra 30115 Tel: (0711) 710611 Email: palembang@ptp.co.id
Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	Jl. Yos Sudarso No. 1, Kepulauan Bangka Belitung 33114 Telp : (0717) 424990 Email : pangkalbalam@ptp.co.id Jl. Yos Sudarso No.1, Bangka Belitung Islands 33114 Tel: (0717) 424990 Email: pangkalbalam@ptp.co.id

Jaringan Kantor Office Networks	**Alamat** Address
Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	Jl. Pelabuhan Tanjungpandan No.1 Tj. Pandan, Kec. Tj Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33411 Telp : (0719) 25075 Email : tanjungpandan@ptp.co.id Jl. Pelabuhan Tanjungpandan No.1, Tanjung Pandan District, Belitung Regency, Bangka Belitung Islands 33411 Tel: (0719) 25075 Email: tanjungpandan@ptp.co.id
Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	Jalan Pelabuhan Pulau Baai, Tlk. Sepang, Kec.Kp Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216 Telp : (0736) 51409 Email : bengkulu@ptp.co.id Jalan Pelabuhan Pulau Baai, Teluk Sepang, Kampung Melayu District, Bengkulu City, Bengkulu 38216 Tel: (0736) 51409 Email: bengkulu@ptp.co.id
Cabang Panjang Panjang Branch	Jalan Yos Sudarso No. 337, Pidada, Panjang, Jl. Yos Sudarso No.175, Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241 Telp : (0721) 031149 Email : panjang@ptp.co.id Jalan Yos Sudarso No. 337, Pidada, Panjang, Jalan Yos Sudarso No.175, Panjang Utara, Panjang District, Bandar Lampung City, Lampung 35241 Tel: (0721) 031149 Email: panjang@ptp.co.id
Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	Jl. Belawan, Tlk. Bayur, Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat 25215 Telp : (0751) 61646 Email : telukbayur@ptp.co.id Jl. Belawan, Teluk Bayur, South Padang District, Padang City, West Sumatra 25215 Tel: (0751) 61646 Email: telukbayur@ptp.co.id
Cabang Pontianak Pontianak Branch	Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Telp : - Email : pontianak@ptp.co.id Siantan Hilir, North Pontianak District, Pontianak City, West Kalimantan Tel: - Email: pontianak@ptp.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Pelabuhan Tanjung Priok, disebut juga "Perusahaan" atau "PTP Terminal Nonpetikemas", didirikan sebagai inisiatif strategis entitas induk usaha, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dalam mengembangkan usaha kepelabuhanan, khususnya terkait pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan sistem jaringan yang terintegrasi antar pelabuhan dan dikelola secara andal dan profesional.

Pada awal pendiriannya, PT Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu cabang operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang memiliki 11 cabang, yaitu cabang Teluk Bayur, Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Banten, Cirebon, Pontianak, Tanjung Priok, dan wilayah kerja Sunda Kelapa. Pada 10 Juli 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersama PT Multi Terminal Indonesia mendirikan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang berfokus pada pengelolaan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu area operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Pada 1 November 2014, setelah memperoleh Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 818 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014,

PT Pelabuhan Tanjung Priok, also referred to as the "Company" or "PTP Terminal Nonpetikemas", was established as a strategic initiative by its parent entity, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II, to develop port operations, specifically in managing PT Pelabuhan Tanjung Priok, North Jakarta, through an integrated port network system that is reliably and professionally managed.

Initially, PT Pelabuhan Tanjung Priok was one of eleven operational branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), covering Teluk Bayur, Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Banten, Cirebon, Pontianak, Tanjung Priok, and the Sunda Kelapa working area. On July 10, 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), together with PT Multi Terminal Indonesia, established PT Pelabuhan Tanjung Priok, focusing on business operations at the Port of Tanjung Priok, North Jakarta, one of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) operational areas.

On November 1, 2014, after obtaining a Business License as Port Business Entity based on the Minister of Transportation Decree No. KP 818 of 2014 dated September 29, 2014, PT Pelabuhan

PT Pelabuhan Tanjung Priok resmi beroperasi secara komersial dengan kegiatan usaha, yaitu pelayanan kapal, pelayanan barang, dan pelayanan jasa lain di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara wilayah operasional yang dikelola Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) terminal utama, yaitu Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3, kemudian area Lini Dua, serta area yang dikelola oleh Divisi Properti PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Luas wilayah kerja Perusahaan mencapai 197 hektare, membentang dari Jalan Raya Ancol Baru di sebelah barat hingga Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok di sebelah timur.

Tanjung Priok officially commenced commercial operations, offering vessel services, cargo services, and other services at Tanjung Priok Port, North Jakarta. The operational areas managed by the Company consisted of three main terminals, which are Terminal 1, Terminal 2, and Terminal 3, along with the Line Two area and properties managed by the Property Division of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Company's operational area covers 197 hectares, stretching from Jalan Raya Ancol Baru in the west to Pos 9 of Tanjung Priok Port in the east.

Di tahun 2021, terjadi pergantian Pemegang Saham utama yang semula PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Pergantian Pemegang Saham ini terkait dengan penggabungan Pelindo I, III dan IV ke dalam Pelindo II yang merupakan inisiatif strategis pemerintah selaku Pemegang Saham seluruh Pelindo dalam mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang kuat dan andal. Penggabungan keempat entitas usaha tersebut merupakan terobosan bisnis pelabuhan yang sebelumnya bersifat regional, kini bertransformasi menjadi skala nasional.

In 2021, a major shareholder shift occurred, changing from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo. Change in the shareholders was due to the merger of Pelindo I, III, and IV into Pelindo II, which was a strategic initiative by the government as the sole shareholder of all Pelindo entities, aimed at establishing a national connectivity network and a strong, reliable logistics ecosystem. The merger of these four business entities marked a major breakthrough in the port industry, transitioning from a regional based business model to a national scale operation.

Dengan membentuk 4 (empat) korporasi *subholding* setara BUMN yaitu, *Subholding* Pelindo Terminal Peti Kemas, *Subholding* Pelindo Multi Terminal, *Subholding* Pelindo Jasa Maritim, dan *Subholding* Pelindo Solusi Logistik. Maka skema bisnis akan lebih terfokus pada tiap-tiap kluster sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo *Group* dan efisiensi usaha. Sebagai entitas anak usaha Pelindo, Perusahaan pun berfokus pada penguatan sinergi dengan Pelindo selaku Pemegang Saham dan juga entitas sepengendalian Pelindo lainnya.

As part of this transformation, four subholding companies were established, Pelindo Terminal Peti Kemas Subholding, Pelindo Multi Terminal Subholding, Pelindo Jasa Maritim Subholding, and Pelindo Solusi Logistik Subholding. This business structure enables an enhanced focused business approach within each cluster, enhancing Pelindo Group's service capacity and business efficiency. As a Pelindo subsidiary, the Company focuses on strengthening synergy with Pelindo as the shareholder, as well as with other Pelindo controlled entities.

Di tahun 2022, kembali terjadi perubahan susunan Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan, yang semula adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan salah satu *subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 1%. Seiring dengan diberlakukannya ***subholding***, tepatnya pada 4 Januari 2022, PTP Terminal Nonpetikemas mengalami perubahan fokus bisnis kembali, yaitu menjadi perusahaan *Operation and Maintenance*. PTP Terminal Nonpetikemas dan SPMT telah menandatangani perjanjian kerja sama tentang pengoperasional dan pemeliharaan terminal *multipurpose* dengan jangka waktu 10 tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2032.

In 2022, another change in the Company's majority and controlling shareholders occurred, shifting from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal, one of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) subholdings, with a 99% shareholding, and PT Pelabuhan Indonesia Investama holding 1%. Along with the subholding formation, as of January 4, 2022, PTP Terminal Nonpetikemas realigned its business focus to become an Operation and Maintenance company. PTP Terminal Nonpetikemas and SPMT signed a partnership agreement for the operation and maintenance of multipurpose terminals for a period of 10 years, effective from January 1, 2022, to December 31, 2032.

PTP Terminal Nonpetikemas berusaha seoptimal mungkin menghadirkan pelayanan yang profesional dengan dukungan fasilitas modern, termasuk fokus pada operasional dan layanan yang andal. Selain itu, PTP Terminal Nonpetikemas juga terus mengutamakan pelayanan kepelabuhanan yang berkualitas, fleksibel, cepat, dan fokus dalam efisiensi biaya operasi. Perusahaan meyakini bahwa transformasi tersebut merupakan langkah strategis yang tepat untuk memantapkan langkah menjadi *operator smart* terminal kelas dunia berbasis *platform* yang merupakan pilihan pertama pelanggan. PTP Terminal Nonpetikemas pun menjadi operator terminal *multipurpose* pertama di Indonesia yang berpengalaman dalam menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, *general cargo* dan lain-lain.

PTP Terminal Nonpetikemas strives to deliver professional services supported by modern facilities, focusing on reliable operations and services. In addition, PTP Terminal Nonpetikemas continues to prioritize high-quality, flexible, fast, and cost-efficient port services. The Company believes that the transformation represents a strategic step toward establishing itself as a world-class smart terminal operator with platform based as the first choice for customers. PTP Terminal Nonpetikemas has also become the first multipurpose terminal operator in Indonesia with extensive experience in handling liquid bulk, dry bulk, general cargo, and others

Memasuki tahun 2023, PTP Terminal Nonpetikemas mengelola dan mengembangkan layanan baru bernama *shorebase* yang dimana pada tahun sebelumnya *project shorebase* ini juga sudah mulai dijalankan. *Shorebase* merupakan fasilitas pusat kegiatan logistik di

Entering 2023, PTP Terminal Nonpetikemas expanded by managing and developing a new service called Shorebase, which had already been initiated the previous year. Shorebase is a coastal logistics hub facility, typically located in the Line-1 and

pinggir laut, yang umumnya terletak di area lini-1 dan lini-2 pelabuhan, yang dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan logistik (*inbound* dan *outbond*) industri hulu minyak dan gas bumi dalam melakukan eksplorasi, pengeboran, proyek konstruksi dan kegiatan produksi lepas pantai. Seluruh kegiatan layanan ini dijalankan di lahan Pelindo *group* Lhokseumawe.

Cikal bakal terciptanya layanan *Shorebase* ini bermula dari tuntutan Perusahaan untuk meningkatkan *value creation* dan menciptakan sub direktorat sebagai *revenue generator*, selain itu Perusahaan juga tidak dibekali fasilitas layaknya *branch* yang lain. Sehingga dari beberapa *trigger* tersebut, Perusahaan akhirnya dapat meng-*create* pendapatan yang anti *mainstream* dari *port* yang eksisting berupa layanan *shorebase*. Perusahaan telah berhasil menciptakan dan mengembangkan kompetensi operasinya dalam hal menyediakan berbagai layanan serta fasilitas operasi *shorebase* yang berstandar internasional.

Pelayanan yang diberikan dari *project Shorebase* PTP Terminal Nonpetikemas berupa *Open Yard for stacking & staging point*, *Open Yard for Liquid Mud Plant, Open Yard for Dry bulk plant,* 24 *hours Jetty operations, Shorebase Site Office*, Gudang berstandar keselamatan dan keamanan yang tinggi, Layanan Alat Berat, layanan jasa personil *shorebase* yang bersertifikasi migas, *workshop* dan industrial hub *complex*.

Ke depannya, Perusahaan akan terus memperluas pangsa pasar bisnis *Shorebase* di wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Perusahaan juga terus melakukan improvement setiap harinya pada *project Shorebase* berupa *service excellent, zero fatality*, serta Perusahaan tetap berkomitmen penuh akan *responsibility* untuk *customer satisfaction*.

Pada tahun 2024, Pelabuhan Muara Sabak Jambi dalam menangani komoditas condentsat, dan LPG, ekspansi layanan di Terminal Kijing dalam mendukung proyek strategis nasional *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR), memperluas pasar bisnis kegiatan *shorebase* di Banyuwangi.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sampai dengan 31 Desember 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak melakukan perubahan nama.

Line-2 port areas, designed, built, and operated to support the inbound and outbound logistics activities of the upstream oil and gas industry, covering exploration, drilling, construction projects, and offshore production activities. All Shorebase activities are conducted on Pelindo Group land in Lhokseumawe.

The inception of Shorebase services was driven by the Company's aim to enhance value creation and establish a sub directorate as a revenue generator, particularly since the Company did not initially have facilities comparable to other branches. As a result, the Company successfully created a non-mainstream revenue stream through Shorebase services from existing ports. The Company has built and developed its operational competence in providing a wide range of international-standard Shorebase services and facilities.

The services offered by the PTP Terminal Nonpetikemas Shorebase Project include Open Yard for stacking and staging points, Open Yard for Liquid Mud Plant, Open Yard for Dry Bulk Plant, 24 hours Jetty Operations, Shorebase Site Office, High-standard safety and security warehouses, Heavy Equipment Services, Certified offshore personnel services, Workshop and Industrial Hub Complex.

Moving forward, the Company will continue to expand its Shorebase business market across other regions in Indonesia. Additionally, the Company remains committed to continuous improvement in the Shorebase project, focusing on service excellence, zero fatality, and maintaining full responsibility for customer satisfaction.

In 2024, Muara Sabak Port in Jambi handled condensate and LPG commodities, expanded its services at the Kijing Terminal to support the National Strategic Project of Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), and broadened its business market for shorebase activities in Banyuwangi.

INFORMATION ON NAME CHANGE

As of December 31, 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok has not undergone any name change.

KEGIATAN USAHA
BUSINESS ACTIVITIES

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir mengalami perubahan dan disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler No. 10 tanggal 30 April 2021 yang dibuat di hadapan Nur Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-0026958.AH.01.02 tanggal 30 April 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 maksud dan tujuan. Perusahaan adalah menyediakan

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3, Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, as recently amended and ratified through Deed of Statement of Circular Meeting Resolutions No. 10 dated April 30, 2021, drawn up before Nur Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0026958.AH.01.02 dated April 30, 2021 regarding the Amendment of the Company's Articles of Association, particularly Article 3 concerning the Company's purpose and objectives to

jasa kepelabuhanan di pelabuhan. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu, penyediaan dan pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, serta jasa usaha terkait lainnya.

Maksud dan Tujuan PTP Terminal Nonpetikemas Sesuai Anggaran Dasar

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Penyedia dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang barang meliputi:
   a. Penyedia dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
   b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
   c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
   d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat dan petikemas;
   e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
   f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
   g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang, dan/atau;
   h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, dan/atau;
   i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
2. Jasa usaha terkait lainnya, meliputi
   a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan pergudangan, antara lain:
      - Pergudangan dan Penyimpanan, antara lain:
        i. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).
        ii. Aktivitas *Cold Storage* (KBLI 52102).
      - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan, antara lain:
        i. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221).
        ii. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI 52222).
        iii. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan (KBLI 52223).
        iv. Aktivitas Pelabuhan Perikanan (KBLI 52224).
        v. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).
      - Aktivitas Penunjang Angkutan lainnya, antara lain:
        i. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291).
        ii. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (KBLI 52293).
   b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya YTDL (KBLI 77309).

provide port services at ports. To realize this purpose and objective, the Company is authorized to conduct business activities including the provision and operation of services related to vessels, passenger and cargo, as well as other related business services.

PTP Terminal Nonpetikemas Purpose and Objectives In accordance with the Articles of Association

Meanwhile, according to Article 3, Paragraph 2 the Company may conduct the following business activities:

1. Provision and/or operation of vessels services, passengers and cargo services, including:
   a. Provision and/or operation of berth facilities for vessel docking;
   b. Provision and/or operation of refueling services and clean water supply;
   c. Provision and/or operation of facilities for passenger and/or vehicle boarding and disembarkation;
   d. Provision and/or operation of berth facilities for cargo and container loading and unloading activities;
   e. Provision and/or operation of warehouse services and storage areas, cargo handling equipment, and port facilities;
   f. Provision and/or operation of container terminals, liquid bulk terminals, dry bulk terminals, and roll-on/roll-off (Ro-Ro) terminals;
   g. Provision and/or operation of cargo loading and unloading services;
   h. Provision and/or operation of distribution centers and cargo consolidation services;
   i. Provision and/or operation of vessel tugging services.
2. Other related business services, including:
   a. Engaging in businesses in the field of Transporting and Warehousing, including:
      - Warehousing and Storage Activities, among others:
        i. Warehousing and Storage (Indonesian Standard Industrial Classification - KBLI 52101)
        ii. Cold Storage Activities (KBLI 52102)
      - Water Transportation Support Activities, among others:
        i. Seaport Services (KBLI 52221)
        ii. River and Lake Port Services (KBLI 52222)
        iii. Ferry Port Services (KBLI 52223)
        iv. Fishing Port Activities (KBLI 52224)
        v. Other Water Transporting Support Activities (KBLI 52229)
      - Other Transportation Support Activities, among others:
        i. Freight Forwarding Services (JPT) (KBLI 52291)
        ii. Shipping Cargo Expedition Services (EMKL) (KBLI 52293
   b. Leasing and Rental Services Without Ownership Transfer for Machinery, Equipment, and Other Tangible Goods (KBLI 77309).

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Pada tahun buku 2024, Perusahaan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha utama yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan.

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE FISCAL YEAR

In the fiscal year 2024, the Company carried out all of its core business activities as stipulated in Article 3, Paragraph 2 of the Company's Articles of Association.

PRODUK DAN JASA LAYANAN
PRODUCTS AND SERVICES

Jasa dan Layanan PTP Terminal Nonpetikemas
Product and Services of PTP Terminal Nonpetikemas



Stevedoring



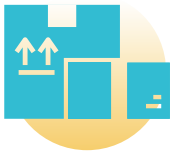
Cargodoring



Gudang Penumpukan
Stacking Warehouse



Receiving/Delivering



Lapangan dan Penumpukan
Yards and Stacking



Layanan Pengangkutan
Transportation Services



Shorebase



Ship to Ship



Pelayanan Lainnya
Other Services

Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dilakukan, Perusahaan mengembangkan jasa dan layanan terminal *multipurpose* yang meliputi jasa *stevedoring, cargodoring*, gudang penumpukan, *receiving/delivery*, lapangan dan penumpukan, layanan pengangkutan, pelayanan lainnya, dan *shorebase & ship to ship.*

Based on its purpose, objectives, and business activities, the Company has developed multipurpose terminal services, which include stevedoring, cargodoring, stacking warehouse, receiving/delivery services, yards and stacking area services, transportation services, other services, as well as shorebase and ship-to-ship services

Stevedoring
Kegiatan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal.

Cargodoring
Kegiatan memindahkan barang dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan, selanjutnya menyusun di gudang/lapangan atau sebaliknya.

Gudang Penumpukan
Suatu bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.

Receiving/Delivery
Kegiatan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Lapangan dan Penumpukan
Sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menempatkan atau barang yang disusun secara berencana baik barang yang akan dimuat ke kapal ataupun barang setelah dibongkar dari kapal.

Layanan Pengangkutan
Usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

Shorebase
Shorebase adalah fasilitas logistik terpadu yang disediakan di area lini-1 dan lini-2 pelabuhan untuk mendukung operasi industri minyak dan gas, khususnya pada sektor hulu (*upstream*). Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat dukungan logistik lepas pantai (*offshore*), meliputi layanan pergudangan material, pemuatan dan pembongkaran peralatan, logistik kapal pendukung, rotasi personel (*crew change*), serta penyediaan ruang tunggu, tempat istirahat, dan fasilitas pendukung lainnya untuk kru lapangan.

Shorebase dirancang untuk menjamin kelancaran arus logistik *inbound* dan *outbound* dalam kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengembangan lapangan, proyek konstruksi, serta operasi produksi minyak dan gas di wilayah lepas pantai.

Sebagai bagian dari peran pelabuhan sebagai *trade facilitator, shorebase* memainkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan logistik darat dan laut, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok dalam industri migas.

Ship to Ship
Ship to Ship (STS) merupakan layanan pemindahan muatan atau kargo dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan secara terencana di area tertentu sesuai dengan ketentuan keselamatan dan operasional yang berlaku. Layanan ini mencakup seluruh proses transfer kargo antar kapal, termasuk dukungan kapal tunda (*tug boat assist),* penanganan penambatan oleh *mooring master*, serta kesiapsiagaan penanggulangan tumpahan muatan atau minyak (*oil spill response*), guna memastikan kelancaran dan keamanan operasi secara menyeluruh.

Pelayanan Lainnya
Penyewaan alat-alat pelabuhan dan Penyediaan dan/atau pelayanan konsolidasi barang.

Stevedoring
Activities involving the unloading of cargo from ships onto wharves, barges, or trucks, or the loading of cargo from wharves, barges, or trucks onto ships.

Cargodoring
Activities involving the transfer of cargo from the wharf to warehouses or stacking yards, followed by the arrangement of goods in the warehouse or yard, or vice versa.

Stacking Warehouse
A building or enclosed area used for storing goods either unloaded from vessels or awaiting loading onto vessels.

Receiving/Delivery
Activities involving the transfer of goods from the stacking area in warehouses or yards and placing them onto vehicles at the warehouse/yard gate, or vice versa.

Yard and Stacking
An open area within the terminal used for systematically arranging and placing goods, either for loading onto vessels or after unloading from vessels.

Transportation Services
The business of shipping and/or packing large volumes of goods via railway, land transportation, sea transportation, or air transportation.

Shorebase
A shorebase is an integrated logistics facility located within the port's line-1 and line-2, designed to support oil and gas industry operations, particularly in the upstream sector. The facility serves as an offshore logistics support center, providing services such as material warehousing, equipment loading and unloading, offshore support vessel logistics, crew change operations, as well as waiting areas, rest facilities, and other amenities for field personnel.

The shorebase is designed to ensure smooth inbound and outbound logistics flows for activities such as exploration, drilling, field development, construction projects, and offshore oil and gas production operations.

As part of the port's role as a trade facilitator, the shorebase plays a strategic role in bridging onshore and offshore logistics needs, while enhancing supply chain efficiency in the oil and gas industry.

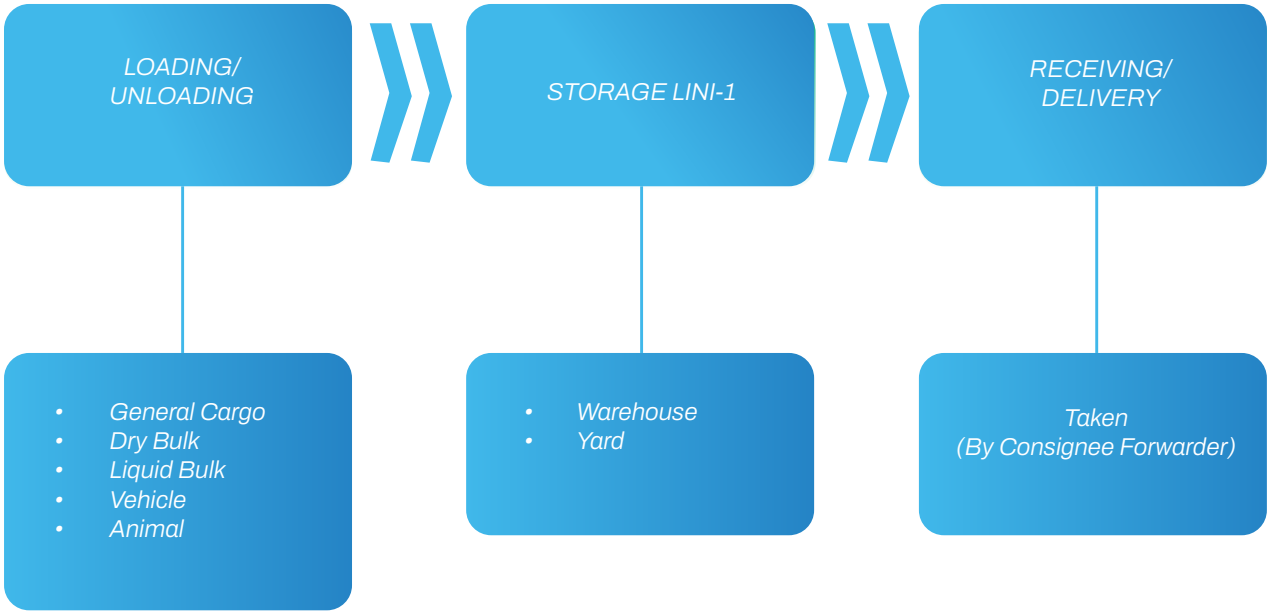
Ship to Ship
Ship to Ship (STS) transfer is a service involving the planned transfer of cargo from one vessel to another within a designated area, in accordance with prevailing safety and operational regulations. The service encompasses the entire cargo transfer process between vessels, including tug boat assistance, mooring operations handled by a mooring master, and oil spill response preparedness, all to ensure the seamless and safe execution of operations.

Other Services
Rental of port equipment and the provision and/or operation of cargo consolidation services.

PROSES BISNIS
BUSINESS PROCESS

Perusahaan telah memiliki proses bisnis untuk menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional di pelabuhan dan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di Pelabuhan serta sebagai dasar pertimbangan dalam memperhitungkan tarif jasa kepelabuhanan. Proses bisnis telah sesuai dengan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

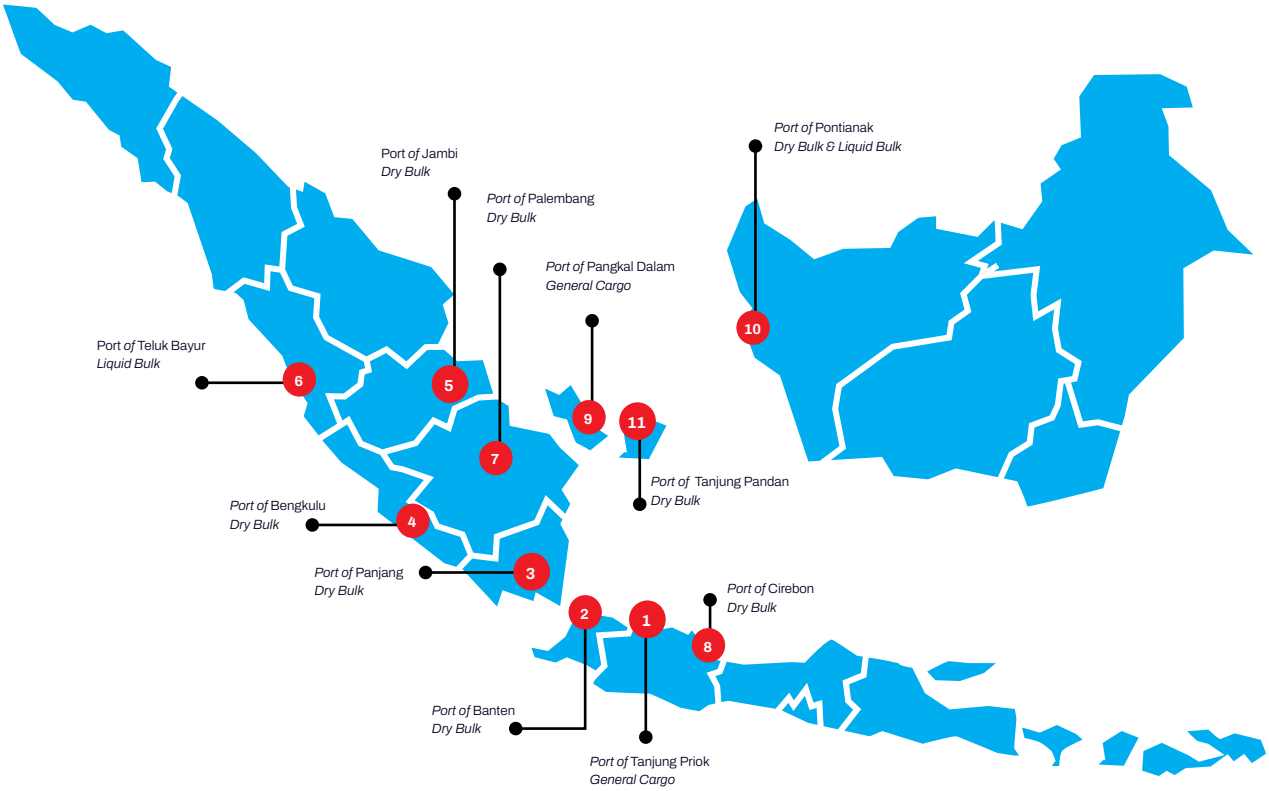
The Company has established a business process to ensure seamless flow of goods, enhance the effectiveness of operational performance at the port, and monitor the level of service performance in port operations, which also serves as a basis for determining port service tariff calculations. The business process is aligned with the Operational Service Performance Standards for the Port of Tanjung Priok as stipulated by the Tanjung Priok Main Port Authority.



WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREAS

PTP Terminal Nonpetikemas memiliki 11 cabang Pelabuhan yang aktif beroperasi tersebar di wilayah strategis Indonesia.

PTP Terminal Nonpetikemas operates 11 active port branches strategically located across Indonesia.



11 cabang yang dimiliki PTP Terminal Nonpetikemas adalah sebagai berikut:

1. Cabang Tanjung Priok
2. Cabang Banten
3. Cabang Panjang
4. Cabang Bengkulu
5. Cabang Jambi
6. Cabang Teluk Bayur
7. Cabang Palembang
8. Cabang Cirebon
9. Cabang Pangkal Balam
10. Cabang Pontianak
11. Cabang Tanjung Pandan

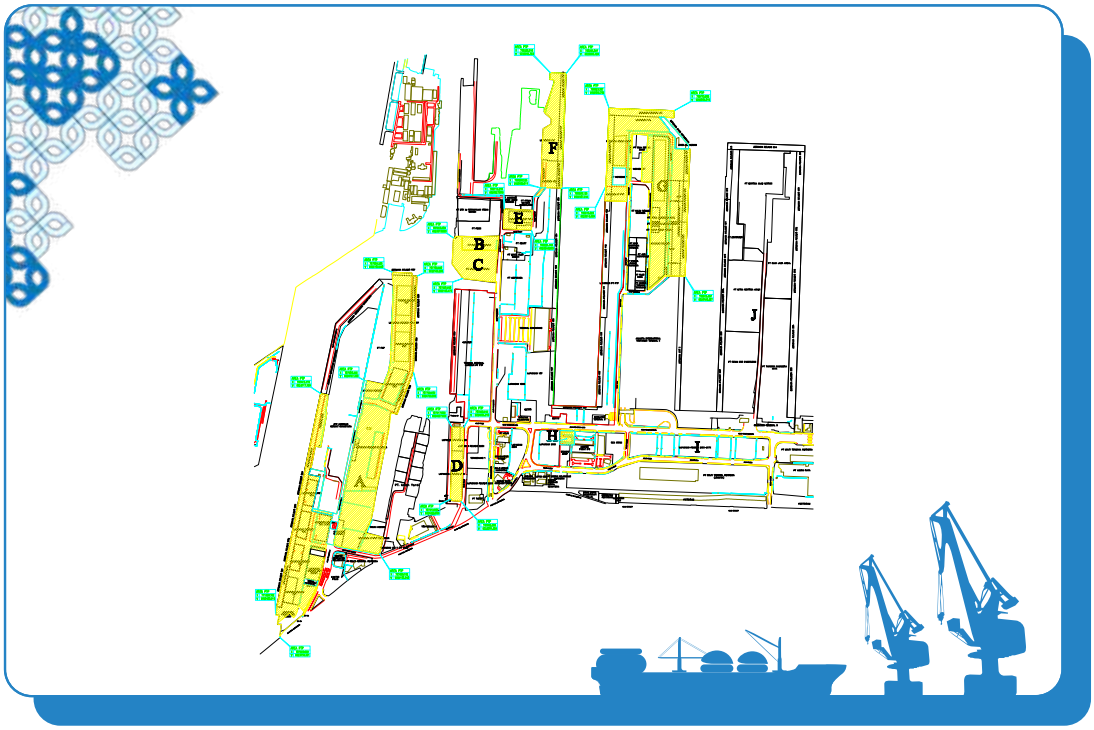
The 11 branches operated by PTP Terminal Nonpetikemas are as follows:

1. Tanjung Priok Branch
2. Banten Branch
3. Panjang Branch
4. Bengkulu Branch
5. Jambi Branch
6. Teluk Bayur Branch
7. Palembang Branch
8. Cirebon Branch
9. Pangkal Balam Branch
10. Pontianak Branch
11. Tanjung Pandan Branch

PROFIL CABANG PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PROFILE OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS BRANCHES

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok

PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch



PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok yang beralamat di Jalan Nusantara 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan jenis kargo yang dilayani oleh PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok sangat beraneka ragam, terdiri dari kargo *multipurpose* yang meliputi antara lain bahan hasil tambang, barang-barang strategis, seperti sembako dan lain-lain, curah cair baik BBM maupun non-BBM serta kargo lainnya.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch is located at Jalan Nusantara 2, Tanjung Priok, North Jakarta. Based on types of cargo, PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch handles diverse cargo types, consisting of multipurpose cargo, which includes mining products, strategic goods such as basic necessities, liquid bulk cargo (both fuel and non-fuel), and other types of cargo.

PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch operates the following facilities:

Panjang Dermaga Wharf Length	: 3.319,7 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 24.655 m²
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 238.342 m²
Gantry Luffing Crane	: 11 Unit
Over Head Crane	: 12 Unit
Hopper	: 8 Unit
Grab	: 10 Unit
Forklift	: 1 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 9 Unit

Fasilitas PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok
PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch Facilities

No	Dermaga Wharf	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
A	DERMAGA PELABUHAN NUSANTARA I NUSANTARA I PORT WHARF				
1	Dermaga 001 S/D 003 Selatan Wharf 001 to 003 South	310,00	15,00	4.650,00	-
2	Dermaga 003 S/D Utara 004 Wharf 003 to 004 North	356,00	16,00	5.696,00	-
B	DERMAGA PELABUHAN NUSANTARA II NUSANTARA II PORT WHARF				
1	Dermaga 005 S/D 007 Wharf 005 to 007	544,50	20,00	10.890,00	
2	Dermaga 007 Utara Wharf 007 North	74,70	11,00	821,70	
C	DERMAGA LAIN-LAIN OTHER WHARF				
1	Dermaga Walie Jaya Walie Jaya Wharf	155,00	6,00	930,00	
2	Dermaga Inggom Inggom Wharf	200,00	18,00	3.600,00	
D	DERMAGA PELABUHAN 1 BARAT PORT 1 WEST WHARF				
1	Dermaga Pelabuhan 1 Barat Sisi Utara Port 1 West Wharf North Side	64,00	25,00	1.600,00	
2	Dermaga Utara 101 North Wharf 101	263,00	18,00	4.734,00	
3	Dermaga 101-102 Wharf 101-102	240,00	27,00	6.480,00	
E	DERMAGA PELABUHAN 1 TIMUR PORT 1 EAST WHARF				
1	Dermaga 114 Wharf 114	356,60	22,15	7.898,69	
F	DERMAGA PELABUHAN 1 UTARA PPORT 1 NORTH WHARF				
1	Dermaga 115 Wharf 115	250,00	21,80	5.450,00	
G	DERMAGA PELABUHAN II BARAT PORT II WEST WHARF				
1	Dermaga 201 S/D GD. 202 Wharf 201 to 202	320,40	14,00	4.485,60	-
2	Depan GD. 203 Front GD. 203 Wharf	185,50	18,50	3.431,75	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	3.319,70		60.667,74	

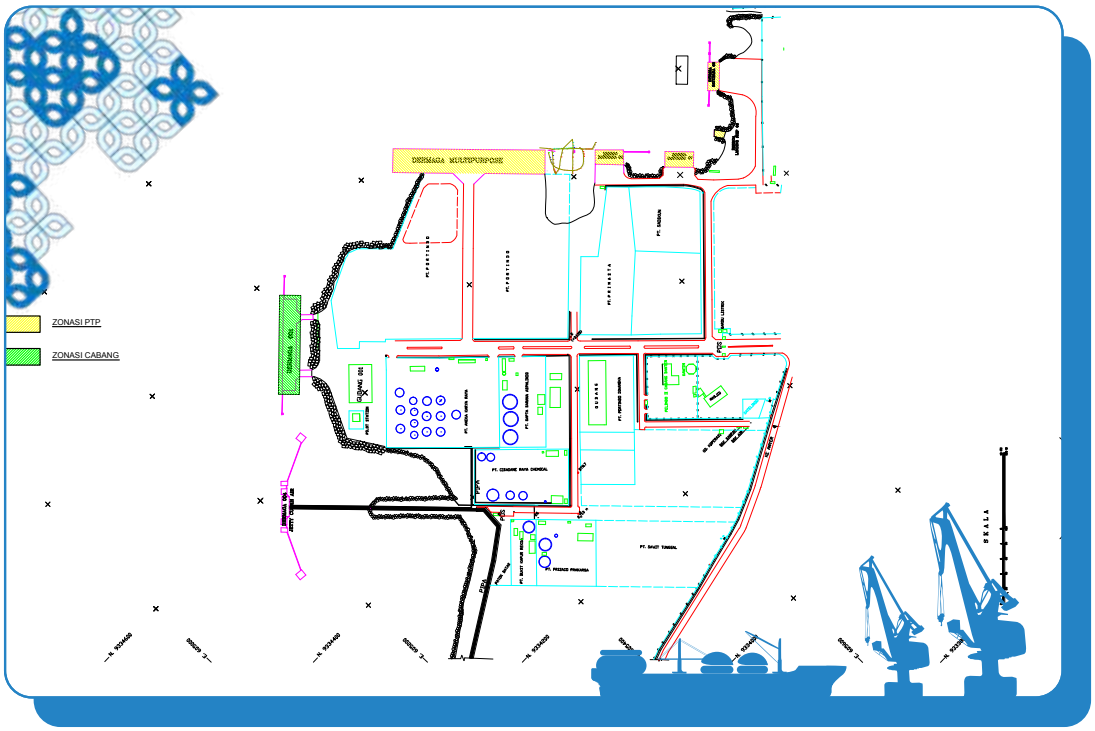
No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan 001, 003, dan 004 Utara Yard 001, 003, and 004 North	11.754,00	-
2	Lapangan 002 dan 004 Yard 002 and 004	8.025,00	-
3	Lapangan Sisi Barat Pos 1 Western Side Yard of Post 1	5.474,00	-
4	Lapangan Sisi Utara Jalan Tembus Northern Side Yard of Shortcut Road	3.626,22	

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
5	Lapangan Sisi Selatan Ex. Gudang 001 Southern Side Yard of Ex. Warehouse 001	3.943,00	
6	Lapangan Ex. Bulog Ex. Bulog Yard	6.358	
7	Lapangan 005 dan 007 Utara Yard 005 and 007 North	4.696	
8	Lapangan 003 Ex. Union Yard Yard 003 Ex. Union Yard	4.937,42	
9	Lapangan 005 Selatan Yard 005 South	4.687,7	
10	Lapangan Ex. Gudang 005 Ex. Warehouse 005 Yard	7.881,3	
11	Lapangan Ex. Perca/CEF Nusantara II Ex. Perca/CEF Nusantara II Yard	2.753,9	
12	Lapangan Ex. Glorius dan Ex. Tri Sari Ex. Glorius and Ex Tri Sari Yard	17.898,58	
13	Lapangan 226 Ex. Arsa Yard 226 Ex. Arsa	5.108	
14	Area *Buffer Truck* (Lapangan Ex. Arsa) Buffer Truck Area (Ex. Arsa Yard)	4.892	
15	Lapangan Ex. Inggom Ex. Inggom Yard	54.425,9	
16	Lapangan 101 - 101 Utara Yard 101-101 North	16473	
17	Lapangan 102 Yard 102	4424	
18	Lapangan 114 Selatan Yard 114 South	3.377	
19	Lapangan Ex. Gudang 114 Ex. Warehouse 114 Yard	4950	
20	Lapangan 115 Yard 115	1525	
21	Lapangan 201, 202, 202 Ex. 203, dan 203 Ex Yard 201, 202, 202 Ex. 203, and 203 Ex	18.266	
22	Lapangan Ex. Walie Jaya Ex. Walie Jaya Yard	7081	
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	238.342,12	

No	Lokasi Gudang Warehouse Location	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
1	Gudang 006 Warehouse 006	113,10	50,00	5.655,00	-
2	Gudang 007 Warehouse 007	113,10	50,00	5.655,00	-
3	Gudang Ambon Ambon Warehouse	234,00	42,50	9.945,00	-
4	Gudang Pombo Pombo Warehouse	85,00	40,00	3.400,00	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA	545,2		24.655,00	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Banten

PTP Terminal Nonpetikemas Banten Branch



Pelabuhan Banten terletak di Provinsi Banten yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km2. Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis sebagai penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Pelabuhan Banten melayani kargo yang didominasi oleh Curah Kering.

The Port of Banten is located in Banten Province, one of the provinces of Indonesia situated in the western part of Java Island, covering an area of 9,662.92 km². Banten Province holds a strategic position as a land connector between Java Island and Sumatra Island, comprising 8 (eight) regencies/cities. The Port of Banten primarily handles dry bulk cargo.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Banten mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Banten Branch operates the following facilities:

Panjang Dermaga Pier Length	: 1.025,23 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 10.800m²
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 15.999,45m²
Gantry Luffing Crane	: 6 unit
Hopper	: 6 Unit
Grab	: 11 Unit
Forklift	: 1 Unit
Head Truck	: 1 Unit
Chassis	: 1 Unit
Rampdoor	: 2 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 8 Unit
Excavator	: 7 Unit
Wheel Loader	: 6 Unit

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Banten
Terminal Nonpetikemas Banten Branch Facilities

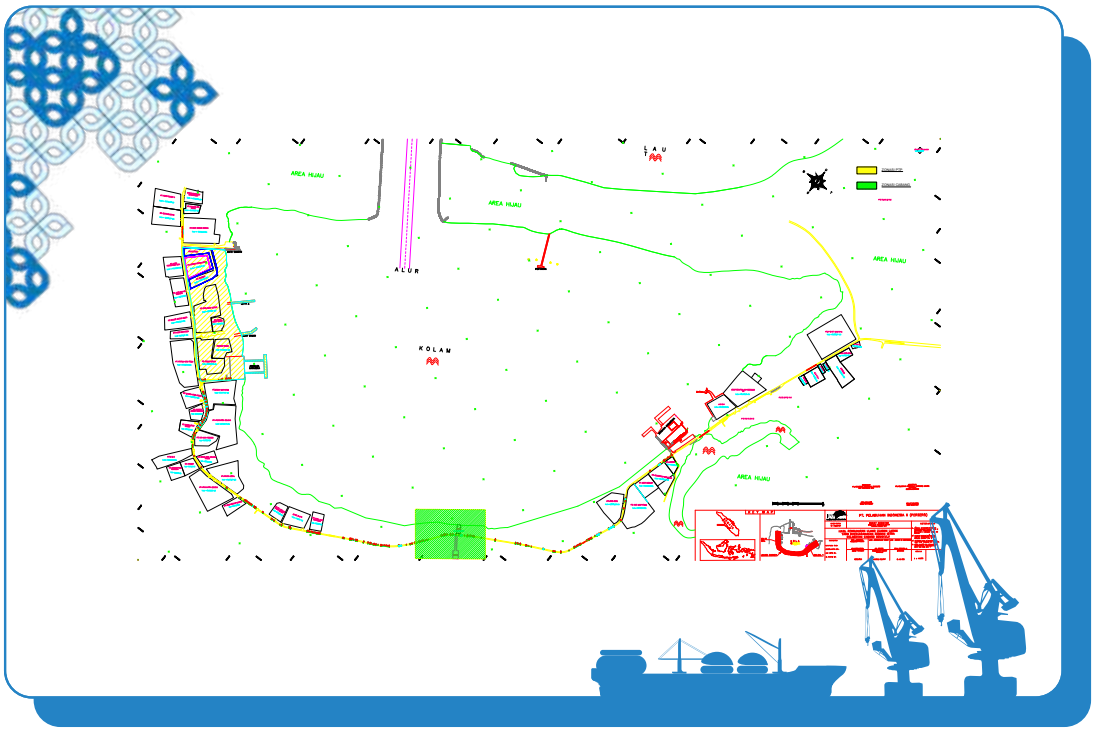
No	Dermaga Wharf	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
1	Dermaga 01 Wharf 01	122,00	19,00	-10	2.318,00	-
2	Dermaga 02 Wharf 02	38,00	17,00	-7	646,00	-
3	Dermaga 03 Wharf 03	38,00	19,00	-10	722,00	-
4	Dermaga 04 Wharf 04	26,00	10,00	-9	260,00	-
5	Dermaga 05A Wharf 05A	400,00	32,00	-14	12.800,00	-
6	Dermaga 05B dan 05C Wharf 05B and 05C	300,00	44,00	-16	13.200,00	-
7	Dermaga 06 Wharf 06	9,00	3,00	-4	27,00	-
8	Dermaga 07 Wharf 07	38,00	19,00	-7	722,00	-
9	Dermaga *Closing Gap* Closing Gap Wharf	54,32	37,53	-	2.038,63	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	**1.025,32**			**32.733,63**	**-**

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan TPS I TPS 1 Yard	11.700,00	-
2	Lapangan Belakang Dermaga 002 & Dermaga 006 Back Side Wharf 002 and Wharf 006 Yard	3.500,00	-
3	*Workshop*	799,45	
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	15.999,45	-

No	Nama Gudang Warehouse Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Gudang Curah Kering Dry Bulk Warehouse	10.800,00	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA	10.800,00	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu

PTP Terminal Nonpetikemas Bengkulu Branch



Pelabuhan Bengkulu berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu. Pelabuhan Bengkulu memiliki *hinterland* yang cukup luas, dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu mengoperasikan sarana dan prasarana sebagai berikut:

The Port of Bengkulu is located on Pulau Baai, approximately 20 kilometers from the city center of Bengkulu. The Port of Bengkulu has a broad hinterland with significant potential in the mining, plantation, and forestry sectors. Loading and unloading activities at the Port of Bengkulu are predominantly focused on dry bulk cargo, liquid bulk cargo, and sacked goods.

PTP Terminal Nonpetikemas Bengkulu Branch operates the following facilities and infrastructure:

Panjang Dermaga Wharf Length	: 494 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 1.750 m²
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 39.860 m²
Conveyor	: 3 Unit
Gantry Luffing Crane	: 1 Unit
Wheel Loader	: 4 Unit
Reach Stacker	: 2 Unit
Excavator	: 1 Unit
Head Truck	: 4 Unit
Forklift	: 5 Unit
Chassis	: 6 Unit
Buldozer Bulldozer	: 3 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 3 Unit

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu
Terminal Nonpetikemas Bengkulu Branch Facilities

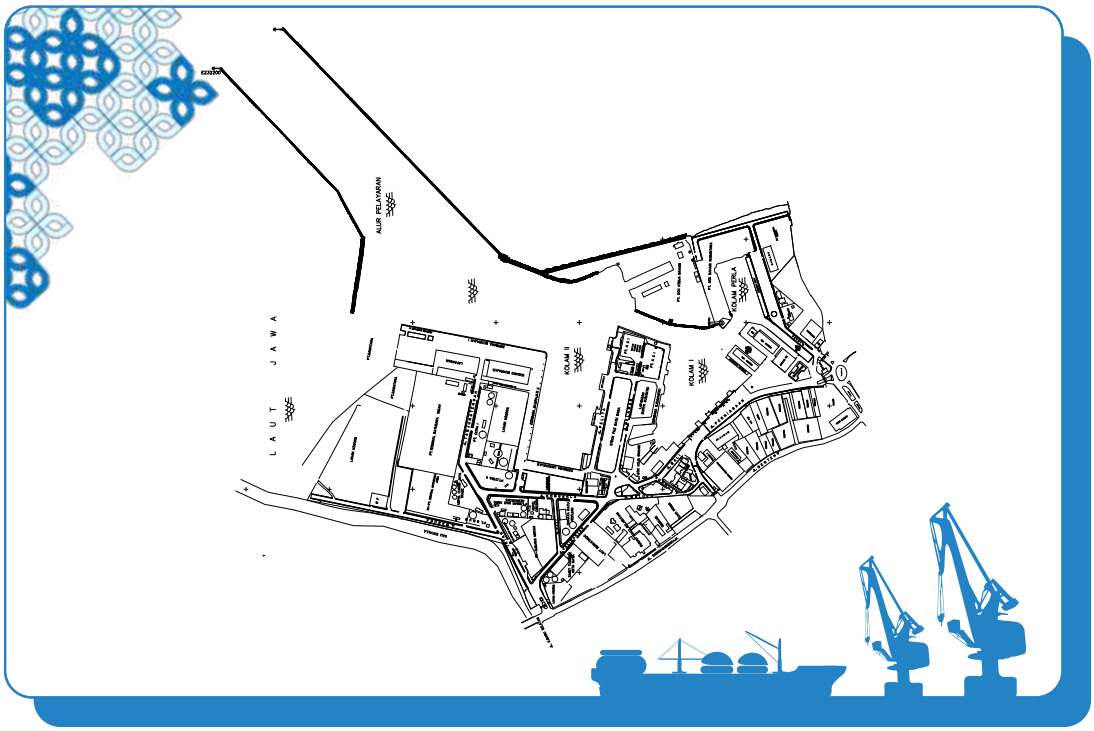
No	Dermaga Wharf	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
1	Dermaga Samudera Samudera Wharf	165,00	18,00	-8	2.970,00	-
2	Jetty A Samudera Samudera Jetty A	16,00	11,00	-	176,00	-
3	Dermaga Nusantara Nusantara Wharf	84,00	18,00	-7	1.512,00	-
4	Dermaga Nusantara I Nusantara I Wharf	126,50	20,50	-9	2.593,25	-
5	Dermaga Lokal Local Wharf	102,50	10,00	-4	1.025,00	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	494,00			8.276,25	-

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan Samudera Samudera Yard	12.000	-
2	Lapangan Belakang *Jetty A* Back Side Jetty A Yard	6.347	-
3	Lapangan Area Nusantara Nusantara Area Yard	20.110	-
4	Lapangan Area *Stuffing Stripping* Stuffing Stripping Area Yard	1.403	-
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	39.860,00	-

No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
1	Gudang Nusantara Nusantara Warehouse	50,00	35,00	1.750,00	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA	50,00		1.750,00	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Cirebon

PTP Terminal Nonpetikemas Cirebon Branch



Pelabuhan Cirebon terletak di pantai utara, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pelabuhan yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1865 ini memiliki potensi menjadi Pelabuhan teramai di Jawa Barat setelah Tanjung Priok. Kini, Pelabuhan Cirebon menjadi pintu gerbang perekonomian Jawa Barat dan merupakan pelabuhan alternatif bagi Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya dalam melayani kegiatan perdagangan antar pulau. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Cirebon mengoperasikan terminal *multipurpose* yang melayani berbagai macam komoditi curah kering, curah cair, dan *general cargo*. Komoditi curah kering antara lain batu bara, pasir, clinker, semen, dan gypsum. Komoditi curah cair antara lain CPO, biosolar, aspal. Sedangkan untuk *general cargo*, komoditi yang ditangani antara lain *heavy equipment, project cargo*, dan pipa.

The Port of Cirebon is located on the northern coast, at the border between West Java and Central Java. Constructed during the Dutch colonial era in 1865, the port has significant potential to become the busiest port in West Java after Tanjung Priok. Nowadays, the Port of Cirebon serves as a gateway for West Java's economy and acts as an alternative port to Tanjung Priok, particularly in supporting inter-island trade activities. PTP Terminal Nonpetikemas Cirebon Branch operates a multipurpose terminal handling various commodities, including dry bulk commodities such as coal, sand, clinker, cement, and gypsum; liquid bulk commodities such as CPO, biodiesel, and asphalt; general cargo including heavy equipment, project cargo, and pipes.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Cirebon mengoperasikan sarana dan prasarana sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Cirebon Branch operates the following facilities and infrastrucute:

Panjang Dermaga Wharf Length	: 939 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 8.662,5 m²
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yard Area	: 33.538 m²
Excavator	: 6 Unit
Wheel Loader	: 3 Unit
Dump Truck	: 4 Unit
Forklift	: 2 Unit
Jembatan Timbang Weighbrige	: 2 Unit
Rampdoor	: 4 Unit

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Cirebon
Terminal Nonpetikemas Cirebon Branch Facilities

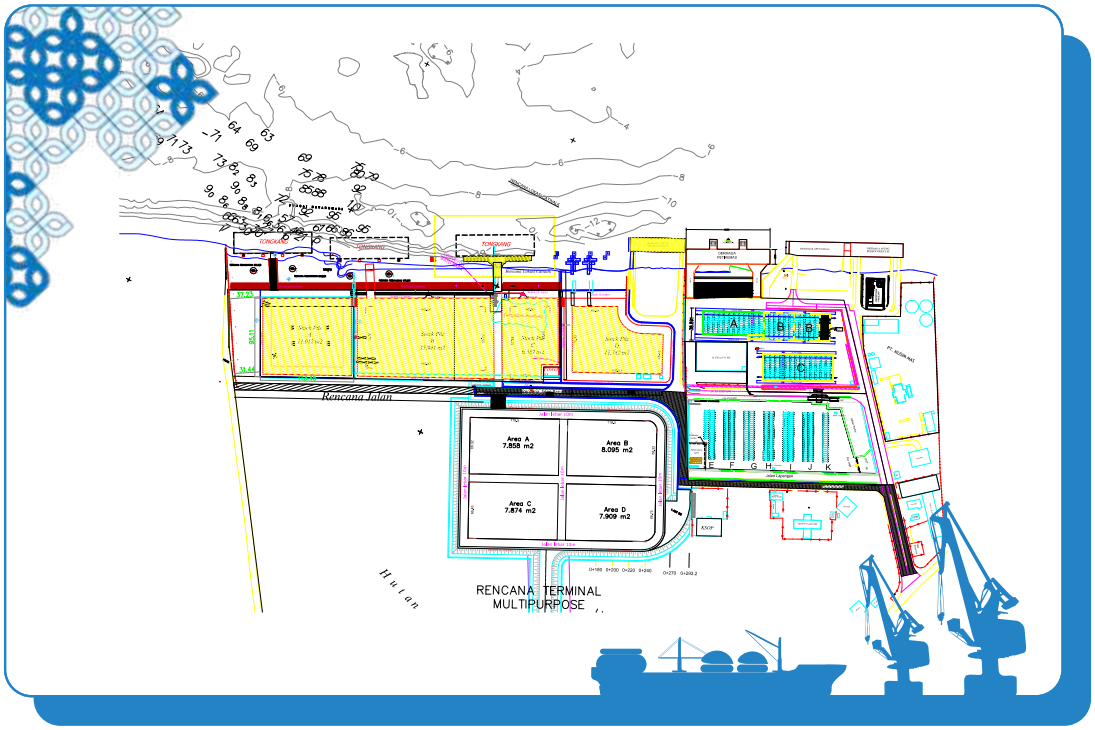
No	Dermaga Wharf	Panjang Length	Lebar Width	Draft (M LWS) (M LWS) Draft		Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	Desain Design	Eksisting Existing	M²	
1	Dermaga Samadikun Sadikun Wharf	67,00	10,00	-5	-4	670,00	-
2	Dermaga Muara Jati I Muara Jati I Wharf	275,00	14,00	-6,5	-6	3.850,00	-
3	Dermaga Muara Jati II Muara Jati II Wharf	248,00	12,00	-6	-5,5	2.976,00	-
4	Dermaga Muara Jati III Muara Jati III Wharf	80,00	15,00	-6,5	-6	1.200,00	-
5	Dermaga Linggarjati I Linggarjati I Wharf	131,00	15,00	-6	-6	1.965,00	-
6	Dermaga Linggarjati II Linggarjati II Wharf	40,00	3,00	-6	-6	120,00	-
7	Dermaga Pelita I Pelita I Wharf	30,00	12,00	-5,5	-	360,00	-
8	Dermaga Pelita II Pelita II Wharf	38,00	12,00	-5,5	-	456,00	-
9	Dermaga Pelita III Pelita III Wharf	30,00	12,00	-5,5	-	360,00	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	939,00				11.957,00	-

No	Nama Lapangan Yard Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Kapasitas Capacity	Keterangan Remarks
		M	M	M²	Ton Tons	
1	Lapangan Muarajati Muarajati Yard	112	40	4.480	5.400	Curah Kering Dry Bulk
2	Lapangan Pelita Pelita Yard	326	30	9.780	13.000	Curah Kering Dry Bulk
3	Lapangan Surya Sumantri Surya Sumantri Yard	-	-	4.291	20.400	Curah Kering Dry Bulk
5	Lapangan Ex. PT. Citra II Ex. PT. Citra II Yard	-	-	4.958	-	-
6	Lapangan Ex. PT. Citra I Ex. PT. Citra I Yard	-	-	6.292	-	-
7	Lapangan Belakang Dermaga Muarajati III Behind Muarajati III Pier Yard	-	-	3.737	-	-
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	438		33.538,00	38.800	-

No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Kapasitas Capacity	Keterangan Remarks
		M	M	M²	Ton Tons	
1	Gudang Muarajati Muarajati Warehouse	100,00	40,00	4.000,00	4.800,00	-
2	Gedung 101 Warehouse 101	42,50	42,50	1.806,25	1.932,00	-
3	Gedung 102 Warehouse 102	60,00	25,00	1.500,00	1.640,00	-
4	Gedung 103 Warehouse 103	17,50	17,50	306,25	416,00	-
5	Gedung 104 Warehouse 104	70,00	15,00	1.050,00	1.224,00	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA	290		8.662,50	10.012,00	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Jambi

PTP Terminal Nonpetikemas Jambi Branch



Pelabuhan Jambi awalnya terletak di Kota Jambi (Boom Batu), namun karena perkembangan dan penataan kota serta perubahan Sistem Angkutan langsung yang beralih ke petikemas, maka pada tahun 1996, Pelabuhan Jambi dipindahkan ke Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi yang jaraknya 10 Km dari Kota Jambi. *Hinterland* Pelabuhan Jambi bukan saja Provinsi Jambi, namun meliputi juga daerah sekitarnya seperti Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Wilayah ini dikenal luas sebagai penghasil utama berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, pinang, kelapa, kopi, teh dan coklat. Pelabuhan Jambi melayani curah cair dan curah kering.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Jambi mengoperasikan sarana dan prasarana sebagai berikut:

The Port of Jambi was originally located in Jambi City (Boom Batu). However, due to urban development, city planning, and the shift to containerized transportation systems, the port was relocated in 1996 to Talang Duku, in Muaro Jambi Regency, approximately 10 kilometers from Jambi City. The hinterland of the Port of Jambi covers not only Jambi Province but also neighboring regions such as Riau Province, West Sumatra, Jambi, and South Sumatra. This region is widely known as a major producer of various plantation commodities, including oil palm, rubber, areca nut, coconut, coffee, tea, and cocoa. The Port of Jambi primarily handles liquid bulk and dry bulk.

PTP Terminal Nonpetikemas Jambi Branch operates the following facilities and infrastructure:

Pelabuhan Talang Duku Talang Duku Port	
Panjang Dermaga Wharf Length	: 66,80 m
Luas Lapangan Penumpukan Stacking Yard Area	: 76.701 m^2
Conveyor	: 1 unit
Wheel Loader	: 1 Unit
Excavator	: 1 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 2 Unit

Pelabuhan Muara Sabak Muara Sabak Port	
Panjang Dermaga Wharf with the Length	: 100 m
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yard Area	: 7.884 m^2
Luas Gudang Warhouse Area	: 1.350 m^2

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Jambi
Terminal Nonpetikemas Jambi Branch Facilities

No	Dermaga Wharf	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
	TALANG DUKU					
1	Dermaga Apung Baja Apung Baja Wharf	66,80	17,00	-8	1.135,60	-
	MUARA SABAK					
1	Dermaga 03 Wharf 03	100,00	18,00	-4	1.800,00	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	166,8			2.935,60	

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M2	
	TALANG DUKU		
1	*Stockpile* A	11.012	
2	*Stockpile* B	15.941	
3	*Stockpile* C	6.352	
4	*Stockpile* D	11.342	
5	Lapangan Area A Area A Yard	7.858	
6	Lapangan Area B Area B Yard	7.874	
7	Lapangan Samping *Stockpile* A Yard Beside Stockpile A	3.522	
8	Lapangan Ex.PT Musim Mas Ex. PT Musim Mas Yard	12.800	
	MUARA SABAK		
1	Lapangan Yard	2.533	-
2	Area Sekitara Jembatan Timbang Weighbridge Surrounding Area	449	-
3	Lapangan PT Sarana Jambi Utara PT Sarana Jambi Utara Yard	4.902	-
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	84.585	-

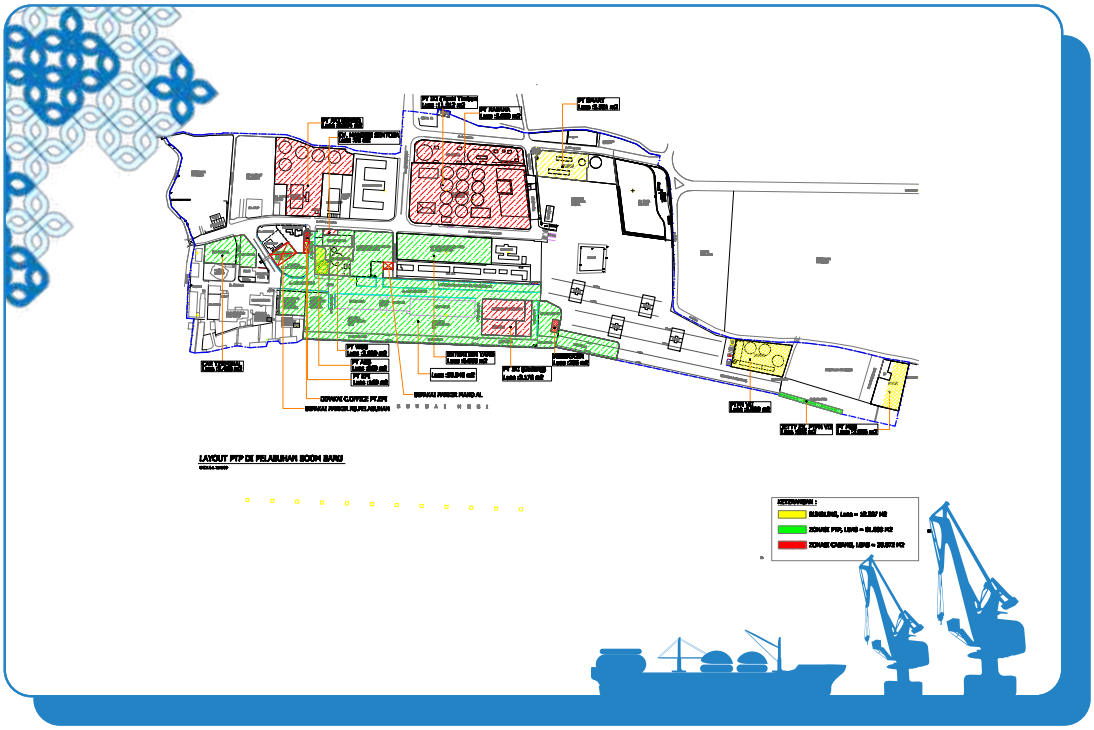
No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Kapasitas Capacity	Keterangan Remarks
		M	M	M²	Ton Tons	
Kawasan Muara Sabak Muara Sabak Area						
1	Gudang Muara Sabak Muara Sabak Warehouse	45,00	30,00	1.350,00	-	
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA	45,00	30,00	1.350,00	-	

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang

Boom Baru

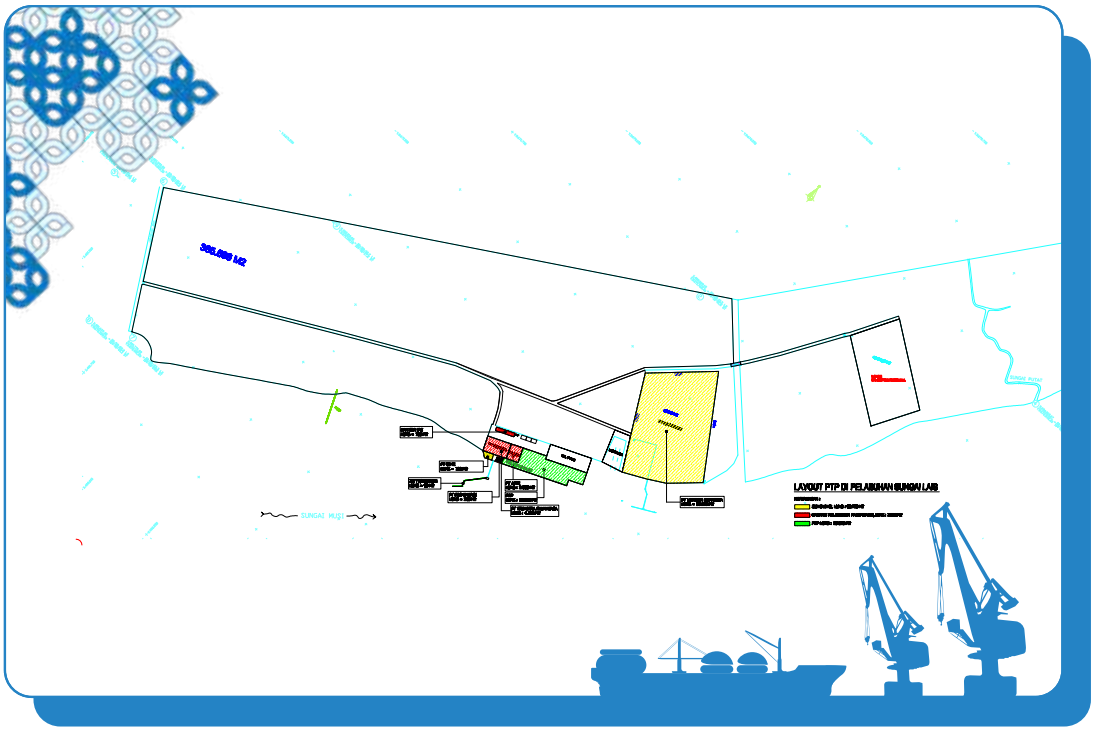
PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch

Boom Baru



Sungai Lais

Sungai Lais



Wilayah operasi PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang berada di Pelabuhan Boom Baru, Palembang. Pelabuhan ini memiliki peranan yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya bagi masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya karena merupakan pelabuhan yang dimanfaatkan untuk kegiatan bongkar muat barang dalam jumlah yang besar. Saat ini, sarana dan prasarana pelabuhan telah cukup memadai untuk melayani kegiatan ekspor/impor dan sekaligus menjadi pintu gerbang perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya serta telah dilengkapi dengan peralatan yang siap digunakan untuk melayani kegiatan kepelabuhanan. PTP Terminal Nonpetikemas mengoperasikan terminal *multipurpose* yang melayani berbagai macam komoditi curah kering, curah cair, dan *general cargo*. Komoditi curah kering antara lain pupuk, bungkil, dan semen. Komoditi curah cair antara lain CPO, aspal, *caustic* soda. Sedangkan untuk *general cargo*, komoditi yang ditangani adalah *heavy equipment, project cargo*, karet, mobil, dan sebagainya.

The operational area of PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch is located at Boom Baru Port, Palembang. This port plays a significant role for the Provincial Government of South Sumatra and especially for the people of Palembang City and its surrounding areas, as it is heavily utilized for large-scale cargo handling activities. Currently, the port's infrastructure and facilities are adequately equipped to support export/import activities, serving as the economic gateway for South Sumatra Province and surrounding regions. The port is also equipped with equipment ready to support port operations. PTP Terminal Nonpetikemas operates a multipurpose terminal handling a variety of commodities ranging from dry bulks, liquid bulks, and general cargo. Dry bulk commodities include fertilizer, meal, and cement. Liquid bulk commodities include crude palm oil (CPO), asphalt, and caustic soda. While, general cargo includes heavy equipment, project cargo, rubber, automobiles, and more.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch operates the following facilities and infrastructure:

Pelabuhan Boom Baru
Boom Baru Port

Panjang Dermaga Wharf Length	: 514,89 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 5.064,81m^2
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 33.668 m^2
Jib Crane	: 4 unit
Hopper	: 2 Unit
Forklift	: 12 Unit
Head Truck	: 5 Unit
Chasiss	: 5 Unit
Reach Stacker	: 2 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 2 Unit

Pelabuhan Sungai Lais
Sungai Lais Port

Panjang Dermaga Wharf Lenght	: 222 m

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang
Terminal Nonpetikemas Palembang Branch

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M^2	
	BOOM BARU					
1	Dermaga ABCDEH Wharf ABCDEH	377,18	13,00	-6	4.903,34	
2	Dermaga HI Wharf HI	29,47	18,50	-6	545,20	
3	Dermaga I Wharf I	100,00	28,60	-6	2.860,00	
4	Jetty	8,24	2,62		21,59	
	SUNGAI LAIS					
1	Dermaga Eks DKB II Ex. DKB II Wharf	222,00	19,00	-1	4.218,00	-
TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA		**736,89**			**12.586,13**	**-**

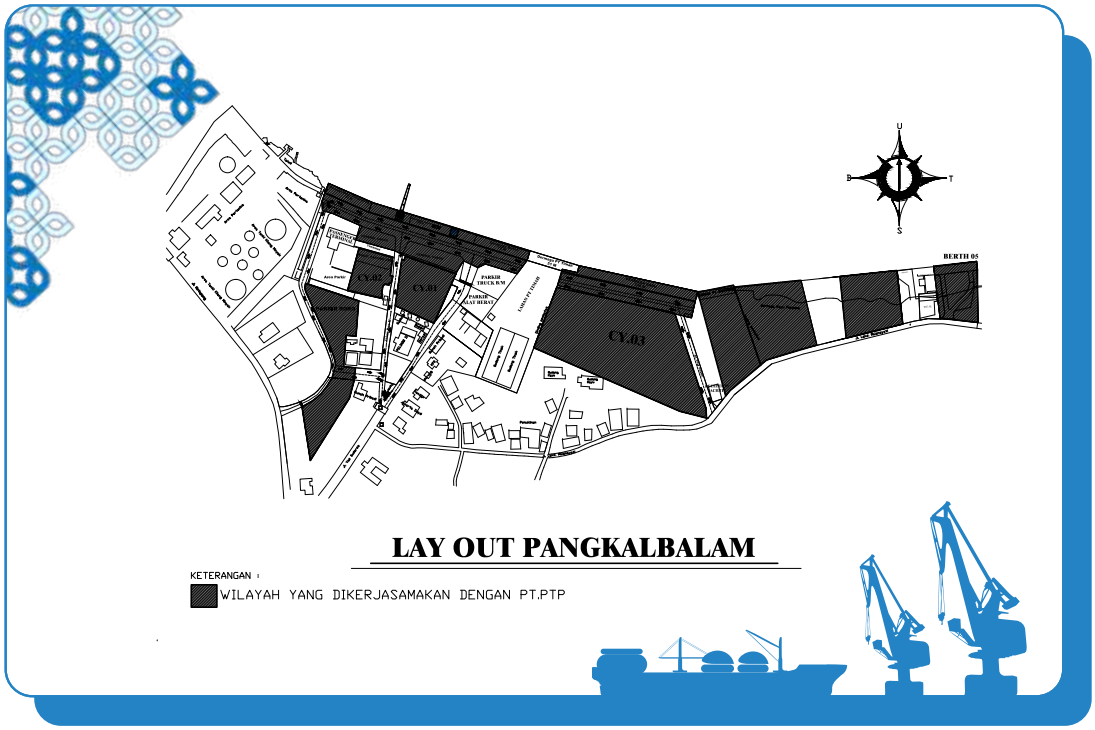
No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area M²	Keterangan Remarks
	BOOM BARU		
1	Lapangan Car Terminal Car Terminal Yard	3.342	
2	Lapangan Belakang Terminal Penumpang Back Yard of Passanger Terminal	1.597	
3	Lapangan Samping Gudang A Side Yard of Warehouse A	1.423	
4	Lapangan Ex. Rm Telaga Biru Ex. Telaga Biru Restaurant Yard	1.346	
5	Lapangan Ex. Rulin SDM dan Umum Ex. HC and General Yard Housing	793	
6	Lapangan Sekitar Gudang Uster Warehouse Uster Surrounding Yard	578	
7	Lapangan Ex. Kantor Tkbm Ex. Tkbm Office Yard	3.842	
8	Lapangan Penumpukan Belakang Gudang Warehouse Rear Stacking Yard	4.006	
9	Lapangan *Extention Yard* Ex. Rudin Muntok Extension Yard Area Ex. Muntok Housing	6.426	
10	Lapangan *Stuffing* Uster Uster Stuffing Yard	1.844	
	Sungai Lais		
1	Lapangan Belakang Dermaga Wharf Rear Yard	9.600	-
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	**34.797**	**-**

*) Alih fungsi jadi lapangan parkir kendaraan Regional 2 Palembang
*) Converted into a parking lot for Regional 2 Palembang vehicles

No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length M	Lebar Width M	Luas Area M²	Keterangan Remarks
1	Gudang A B Warehouse A B	72,77	23,31	1.696,27	-
2	Gudang C Warehouse C	23,33	27,37	638,54	-
3	Gudang D E Warehouse D E	105,00	26,00	2.730,00	-
Total Luas Gudang Total Warehouse Area		**201,1**		**5.064,81**	

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pangkal Balam

PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Branch



Pelabuhan Pangkal Balam melayani komoditi dari sektor Pertanian dan Perkebunan. Hal ini karena sektor Pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pangkal Balam mengoperasikan terminal *multipurpose* yang meliputi Dermaga Beton, Dermaga *Sheet Pile* 1, Dermaga *Sheet Pile* 2, Dermaga Beton, Dermaga Perahu Layar, Dermaga Ketapang I, Trestle Dermaga Beton dan Dermaga Perahu Layar.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pangkal Balam mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

The Port of Pangkal Balam primarily serves commodities from the agriculture and plantation sectors, given that agriculture is a leading sector prioritized in the regional development plan of South Bangka. PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Branch operates a multipurpose terminal, which includes facilities such as Concrete Wharf, Sheet Pile Wharf 1, Sheet Pile Wharf 2, Concrete Wharf, Sailing Boat Wharf, Ketapang I Wharf, Trestle Concrete Wharf, and Sailing Boat Wharf.

PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Branch operates the following facilities:

Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Balam Port	
Panjang Dermaga Wharf Length	: 416 m
Luas Lapangan Penumpukkan	: 20.505,49 m^2
Jib Crane	: 4 unit
Forklift	: 2 Unit
Head Truck	: 4 Unit
Chasiss	: 4 Unit
Reach Stacker	: 4 Unit
Mobile Crane	: 1 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 1 Unit
Rampdoor	: 1 Unit

Pelabuhan Belinyu Belinyu Port	
Panjang Dermaga Wharf Length	: 101,36 m
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yard Area	: 1.724 m^2

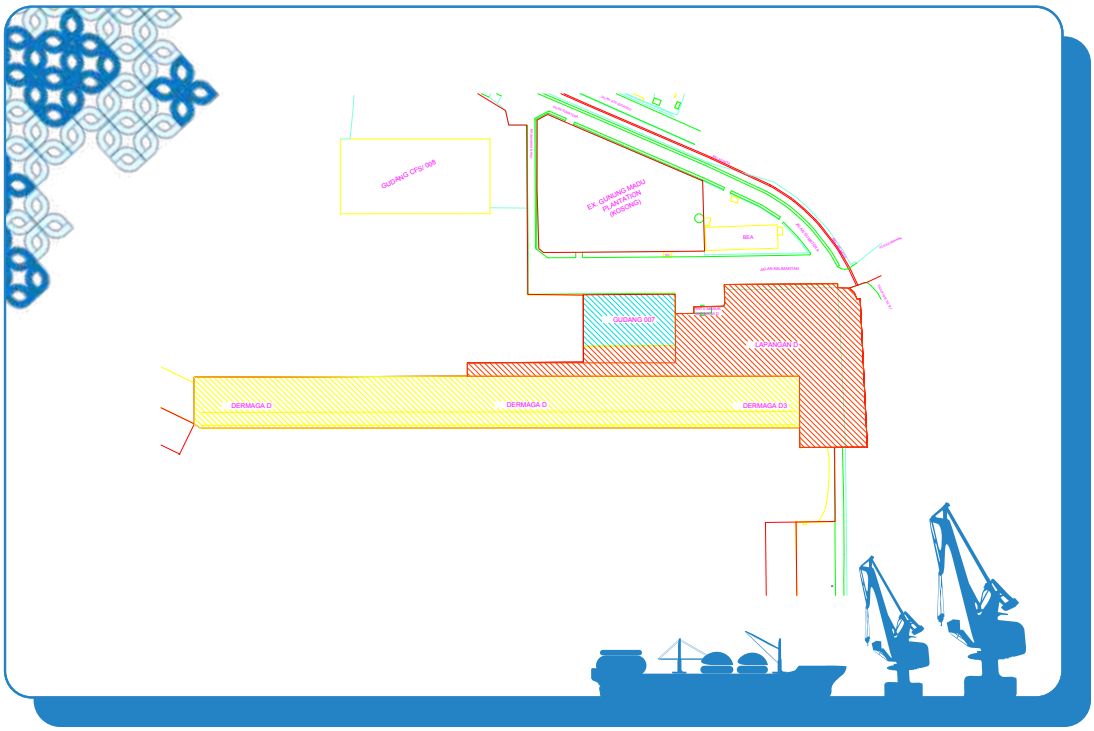
Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Pangkal Balam
Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Branch Facilities

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
	PANGKAL BALAM					
1	Dermaga Beton Penumpang (Berth 1) Passengers Concrete Wharf (Berth 1)	11,00	11,50	-3,5	126,50	-
2	Dermaga Beton (Berth 2) Concrete Wharf (Berth 2)	128,00	11,50	-3,5	1.472,00	-
3	Dermaga Beton (Berth 3) Concrete Wharf (Berth 3)	72,00	11,50	-3,5	828,00	-
4	Dermaga Beton (Berth 4) Concrete Wharf (Berth 4)	140,00	11,50	-3,5	1.610,00	-
5	Dermaga PT Baharndo PT Baharndo Wharf	42,00	8,86	-3,5	372,12	-
6	Dermaga Perahu Layar (Berth 5) Sailing Boats Wharf (Berth 5)	23,00	11,00	-3,5	253,00	-
1	BELINYU	39,00	7,00		273,00	-
	Dermaga Wharf	101,36	15,00		1.520,40	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	**556,36**			**6.455,02**	**-**

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan *General Cargo* (Depan CY 02) General Cargo Yard (In front of CY 02)	733	-
2	Lapangan *General Cargo* (Depan CY 01) General Cargo Yard (In front of CY 01)	1.122	-
3	Lapangan Belakang Dermaga PT Baharindo PT Baharindo Wharf Rear Yard	5.445	-
4	Lapangan Pelabuhan Ketapang 1 Ketapang 1 Port Yard	4.569	-
5	Lapangan Pelabuhan Ketapang 2 Ketapang 2 Port Yard	2.453	-
6	Lapangan Belakang Dermaga Perahu Layar (*Berth* 05) Sailing Boats Wharf Rear Yard (Berth 05)	590	-
7	Lapangan Parkir Roro 1	2.970	
8	Lapangan Parkir Roro 2	2.624	
	BELINYU		
1	Lapangan Belinyu Belinyu Yard	1.724	-
TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL Belinyu Yard		**22.229**	**-**

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Panjang

PTP Terminal Nonpetikemas Panjang Branch



Pelabuhan Panjang pada awalnya merupakan pelabuhan kecil yang terletak di Teluk Betung, Lampung, yang disinggahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah Lampung atau sebaliknya mengangkut barang barang dari luar daerah Lampung ke daerah Lampung untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung dan sekitarnya. Pembangunan Pelabuhan Panjang dengan menambah fasilitas dan peralatan penunjang, terus dilakukan sejalan dengan tuntutan permintaan pengguna jasa serta perkembangan perdagangan internasional. Kini, pelabuhan ini tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan samudera yang melayani pelayaran antar pulau dan antar negara.

The Port of Panjang initially started as a small port located in Teluk Betung, Lampung, serving motor vessels and sailing boats transporting fishery and agricultural products out of the Lampung region, and bringing in goods from other areas to meet the needs of Lampung Province and its surroundings. The development of the Port of Panjang, through the addition of supporting facilities and equipment, has continued in line with the growing demands of service users and the expansion of international trade. Nowadays, the port has evolved into an ocean port serving inter-island and international shipping routes.

Di Pelabuhan Panjang ini, PTP Terminal Nonpetikemas mengoperasikan terminal *multipurpose* yang melayani berbagai macam komoditi curah kering, curah cair, dan *general cargo*. Komoditi curah kering adalah pupuk, batu spit, *soya bean, raw sugar*, garam, *clinker*, dan jagung. Untuk komoditi curah cair yang ditangani, yaitu CPO, POME, RBD PO, aspal, dan solar. Sedangkan untuk *general cargo* di antaranya adalah *heavy equipment*, rel, gerbong kereta, dan tiang pancang.

At the Port of Panjang, PTP Terminal Nonpetikemas operates a multipurpose terminal handling a variety of commodities, including dry bulks, liquid bulks, and general cargo. Dry bulk commodities include fertilizer, split stone, soybean, raw sugar, salt, clinker, and corn. Liquid bulk commodities include CPO, POME, RBD PO, asphalt, and diesel fuel. General cargo includes heavy equipment, railway tracks, railcars, and piling poles.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Panjang mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Panjang Branch operates the following facilities::

Panjang Dermaga Wharf Length	: 922 m
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yard Area	: 33.504 m^2
Gantry Luffing Crane	: 2 Unit
Jib Crane	: 4 Unit
Hopper	: 7 Unit
Grab	: 8 Unit
Forklift	: 2 Unit

Pompa POME POME Pump	: 1 Unit
Jembatan Timbang Weighbridge	: 2 Unit

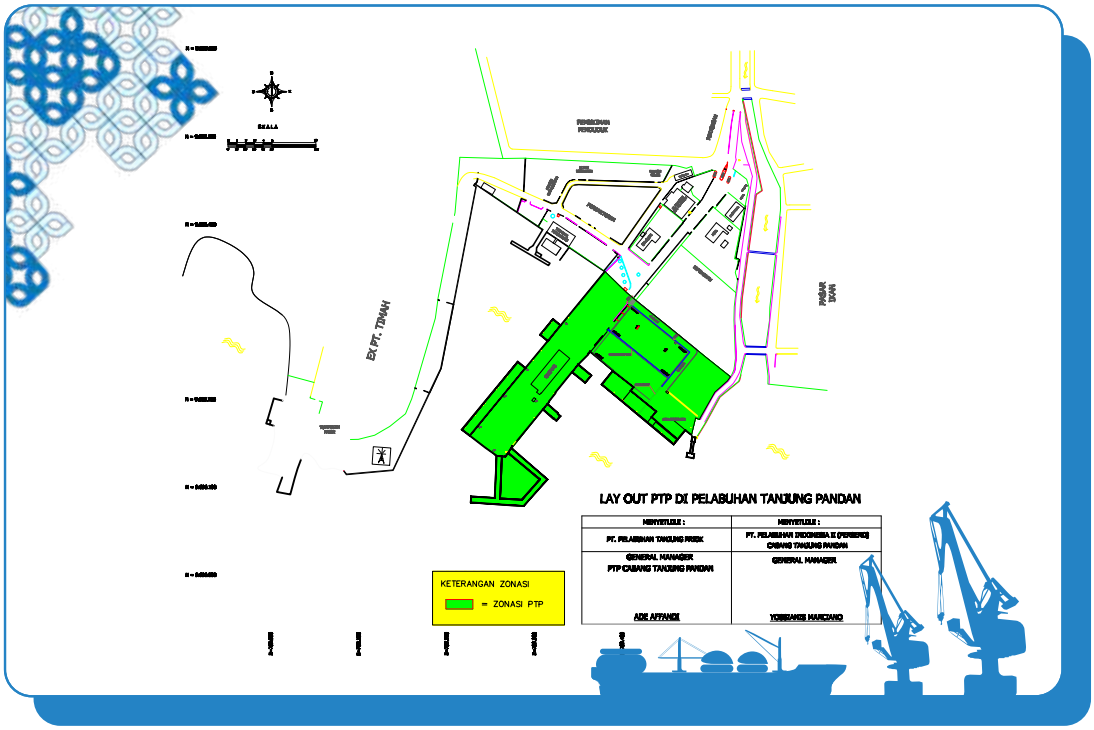
Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Panjang
Terminal Nonpetikemas Panjang Branch Facilities

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M^2	
1	Dermaga A Wharf A	170,00	14,00	-10	2.380,00	-
2	Dermaga B Wharf B	212,00	30,00	-7	6.360,00	-
3	Dermaga C Wharf C	140,00	24,00	-10	3.360,00	-
4	Dermaga D Wharf D	400,00	42,00	-14	16.800,00	-
TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL PIER AREA		**922,00**			**28.900,00**	**-**

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M^2	
1	Lapangan A 1 dan sekitar Gudang 001 Yard A1 and surrounding area of Warehouse 001	2.481	-
2	Lapangan B 1 Yard B1	1.173	-
3	Lapangan B 2 Yard B2	1.551	-
4	Lapangan B3 / *Buffer* Ro-ro Yard B3 / Ro-ro Buffer Yard	13.652	
5	Lapangan Eks CKG Ex. CKG Yard	5.895	
6	Lapangan D Yard D	5.753	-
7	Lapangan Eks Gudang 007 Ex. Warehouse 007 Yard	3.000	-
TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA		**33.504**	**-**

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Pandan

PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Pandan Branch



Pelabuhan Tanjung Pandan berada di kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, yang memiliki *hinterland* dengan potensi perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Jasa dan layanan PTP Terminal Nonpetikemas di pelabuhan ini meliputi berbagai macam komoditi curah kering dan *general cargo*. Komoditi curah kering antara lain cangkang sawit, batu bara, split, biji sawit. Sedangkan untuk *general cargo*, komoditi yang di-*handle* adalah besi, tiang listrik, tiang pancang, keramik, kaolin.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Pandan mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

The Port of Tanjung Pandan is located in Belitung Regency, Bangka Belitung Province, with a hinterland rich in plantation, forestry, and mining potential. The services provided by PTP Terminal Nonpetikemas at this port cover a wide range of dry bulk and general cargo commodities. Dry bulk commodities include palm kernel shells, coal, crushed stone (split), and palm seeds. General cargo includes iron, electric poles, piling poles, ceramics, and kaolin.

PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Pandan Branch operates the following facilities:

Panjang Dermaga Wharf Length	: 345,08 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 750 m2
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 9.541 m2
Forklift	: 2 Unit
Head Truck	: 1 Unit
Chassis	: 1 Unit

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Pandan
Terminal Nonpetikemas Tanjung Pandan Branch

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M^2	
1	Dermaga 01 Wharf 01	100,00	10,00	1.000,00	-
2	Dermaga 02 Wharf 02	60,00	6,00	360,00	-
3	Dermaga 03 Wharf 03	36,58	6,36	232,65	-

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Pandan
Terminal Nonpetikemas Tanjung Pandan Branch

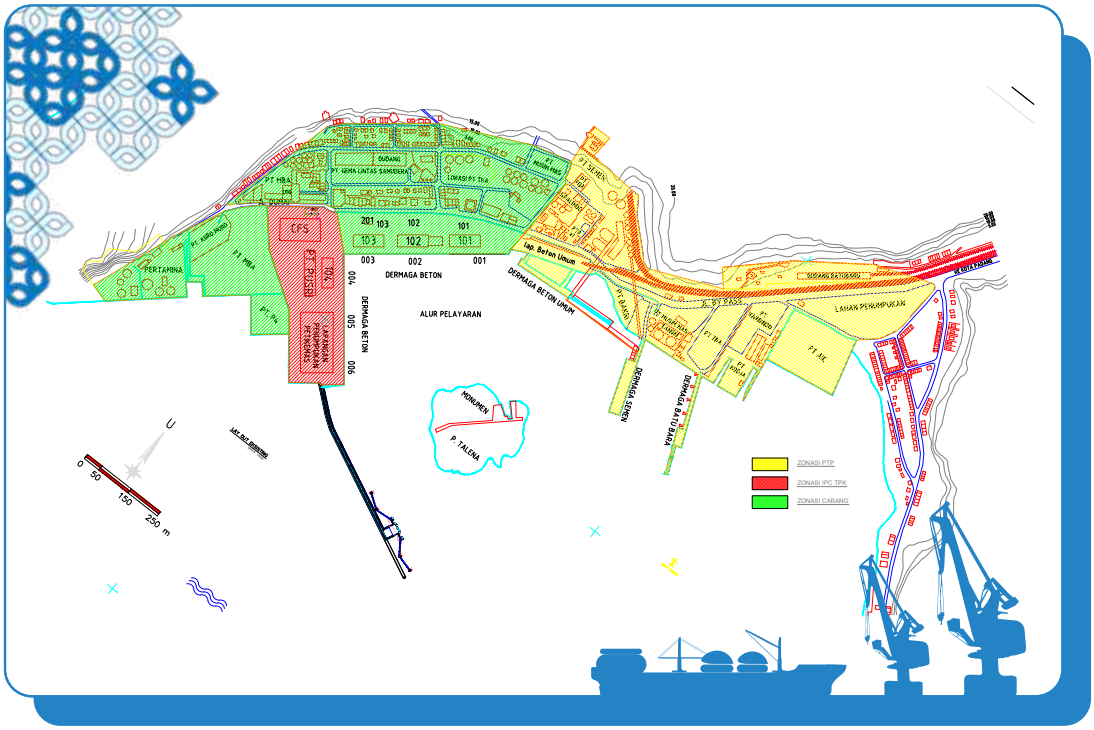
No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
4	Dermaga 04 Wharf 04	30,00	20,00	600,00	-
5	Dermaga 04 *Temporary* Temporary Pier 04	11,00	20,00	220,00	-
6	Dermaga 06 Wharf 06	23,00	11,00	253,00	-
7	Dermaga 07 Wharf 07	8,00	20,00	160,00	-
8	Dermaga 08 Wharf 08	39,00	7,00	273,00	-
9	Dermaga Roro 1 Roro 1 Wharf	37,50	16,00	600,00	-
TOTAL LUAS DERMAGA TOAL WHARF AREA		**345,08**		**3.698,65**	**-**

No	Nama Lapangan Yard Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
1	Lapangan Belakang Dermaga 08 Wharf 08 Rear Yard	-	-	3.178	-
2	Lapangan Belakang Dermaga 01 dan Dermaga 06 Wharf 01 and Wharf 06 Rear Yard	-	-	6.363	-
TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA				9.541	-

No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
1	Lini 1 Line 1	50	15	750	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA			750	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur

PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Branch



Pelabuhan Teluk Bayur berada kurang lebih 7 km ke arah selatan Kota Padang yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Oleh karena itu, Pelabuhan Teluk Bayur menjadi salah pintu gerbang perekonomian yang berperan penting dalam rantai arus logistik nasional. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur mengoperasikan terminal curah kering dan curah cair.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

The Port of Teluk Bayur is located approximately 7 kilometers south of Padang City, directly bordering the Indian Ocean. As a result, the Port of Teluk Bayur serves as a vital economic gateway, playing a significant role in the national logistics chain. PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Branch operates dry bulk and liquid bulk terminals.

PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Branch operates the following facilities:

Panjang Dermaga Wharf Length	: 917,37 m
Luas Gudang Warehouse Area	: 14.552,09 m²
Luas Lapangan Penumpukkan Stacking Yards Area	: 36.341 m²
Jib Crane	: 3 Unit
Wheel loader	: 5 Unit
Excavator	; 3 Unit
Head Truck	: 2 Unit
Hopper	: 3 Unit
Dump Truck	: 6 Unit
Flexible Hose	: 35 Unit
Forklift	: 7 Unit
Side Loader	: 2 Unit

Fasilitas Terminal Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur
Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Branch Facilities

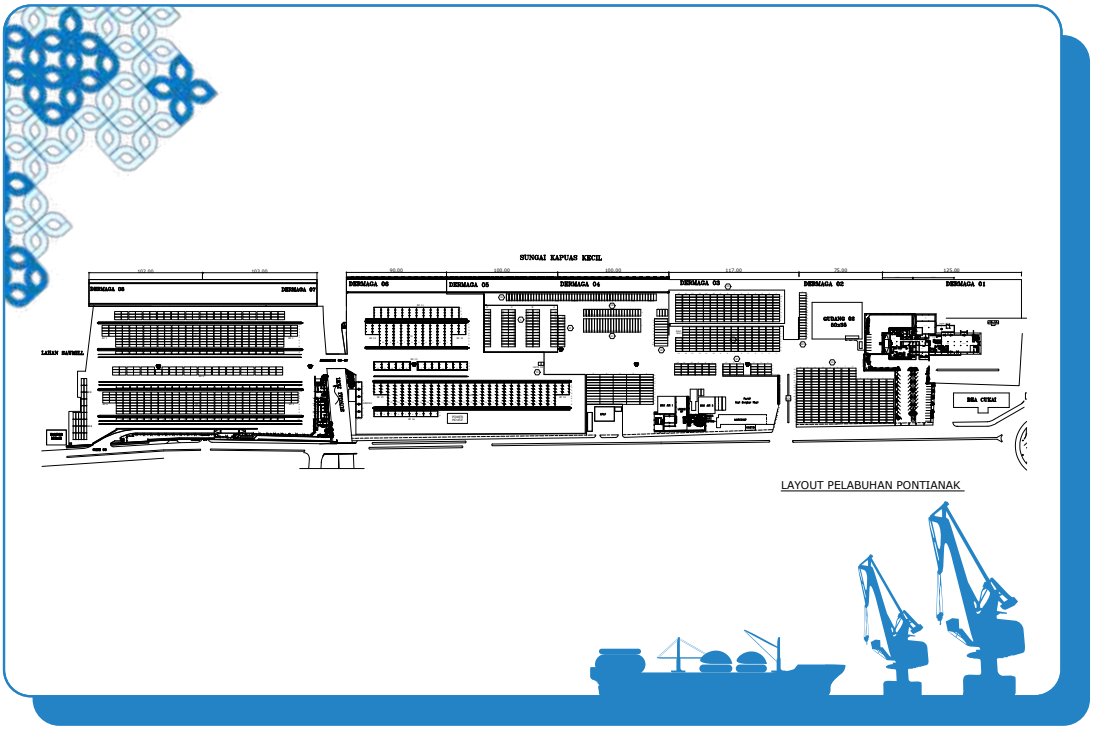
No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
1	Dermaga 7 Wharf 7	63,00	7,00		441,00	-
2	Dermaga 3 Wharf 3	124,00	20,42		2.532,08	-
3	Dermaga 2 Wharf 2	140,00	20,34		2.847,60	-
4	Dermaga 1 Wharf 1	176,94	20,21		3.575,96	-
5	Dermaga Beton Umum General Concrete Wharf	175,28	20,00	-10,00	3.505,60	-
6	Dermaga Khusus Semen Special Cement Wharf	150,00	19,00	-11 s/d -12	2.850,00	-
7	*Jetty* Batu bara Coal Jetty	58,15	12,85	-10,00	747,23	-
8	Dermaga Eks DKB I Ex DKB I Wharf	15,00	22,35	-5,00	335,25	-
9	Dermaga Eks DKB II Ex DKB II Wharf	15,00	22,64	-5,00	339,60	-
	TOTAL LUAS DERMAGA TOTAL WHARF AREA	**917,37**			**17.174,32**	**-**

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Area	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan Gudang A Warehouse A Yard	7.756	-
2	Lapangan Belakang Gudang 101-103 Warehouse 101-103 Rear Yard	15.084	-
3	Lapangan Belakang Gudang Warehouse Rear Yard	6.729	-
4	Lapangan DBU DBU Yard	6.772	-
	TOTAL LUAS LAPANGAN TOTAL YARD AREA	36.341	-

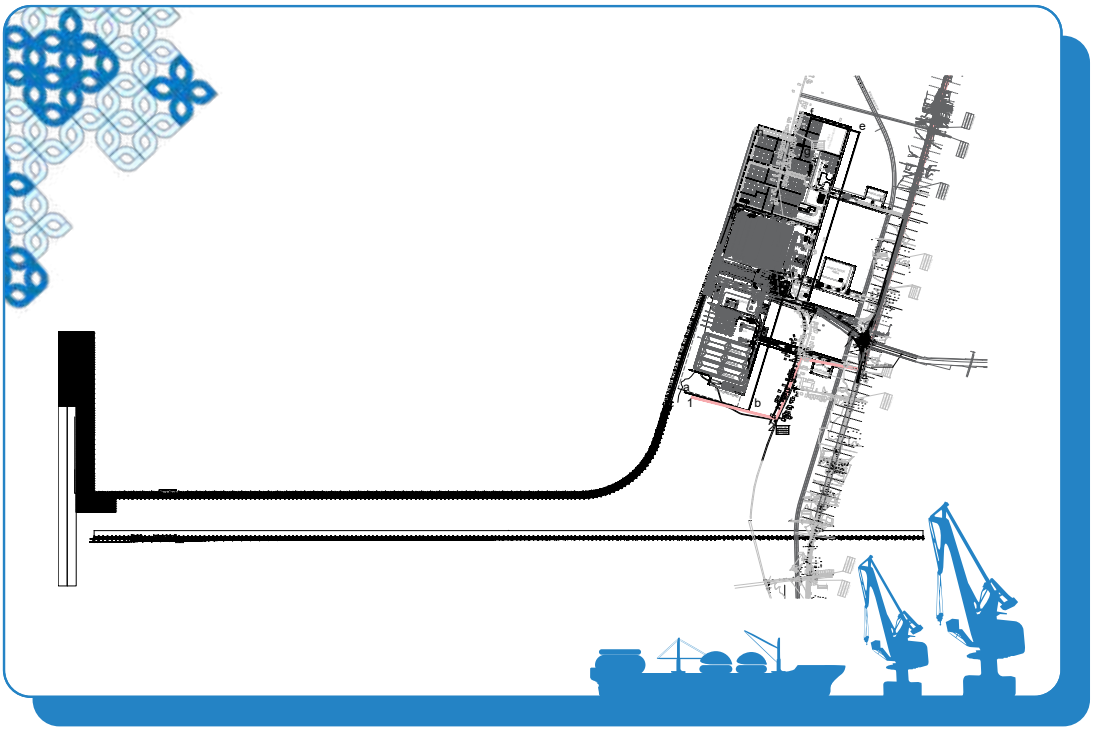
No	Nama Gudang Warehouse Name	Panjang Length	Lebar Width	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M²	
1	Gudang 104 Warehouse 104	80,62	27,47	2.214,63	-
2	Gudang 105 (CFS) Warehouse 105 (CFS)	105,33	55,22	5.816,32	-
3	Gudang 103 Warehouse 103	80,41	27,37	2.200,82	-
4	Gudang 102 Warehouse 102	81,00	27,33	2.213,73	-
5	Gudang 101 Warehouse 101	82,00	25,69	2.106,58	-
	TOTAL LUAS GUDANG TOTAL WAREHOUSE AREA			14.552,09	-

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pontianak

Dwikora



Kijing



PTP Terminal Nonpetikemas Pontianak Branch

Dwikora

Kijing

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pontianak memiliki memiliki 7 area terminal non-petikemas yang dikelola oleh PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pontianak yaitu Kawasan Dwikora, Pelabuhan Sintete, Singkawang, Sambas, Pemangkat, Ketapang, dan Kawasan Kijing Pelabuhan ini memiliki beberapa pelayanan komiditi yang termasuk dalam general cargo seperti contoh karet, bungkil dan kayu lapis.

PTP Terminal Nonpetikemas Pontianak Branch manages 7 non-container terminal areas, Dwikora Area, Sintete Port, Singkawang, Sambas, Pemangkat, Ketapang, and Kijing Area. This port provides services for various general cargo commodities, including rubber, meal, and plywood.

PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pontianak mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

PTP Terminal Nonpetikemas Pontianak Branch operates the following facilities:

Pelabuhan Pontianak-Dwikora
Pontianak-Dwikora Port

Panjang Dermaga Wharf Length	: 867m
Mobile Crane	: 1 Unit
Jembatan Timbang Konvesional Conventional Wighbridge	: 4 Unit

Pelabuhan Kijing
Kijing Port

Panjang Dermaga Wharf Length	: 1.129 m
Luas Lapangan Penumpukan Stacking Yards Area	: 6.014 m^2
Mobile Conveyor	: 1 Unit
Wheel Loader	: 1 Unit
Excavator	: 1 Unit
Mobile Crane	: 4 Unit
Hopper	: 7 Unit
Forklift	: 2 Unit
Shower CPO	: 1 Unit
Bak Curah Bulk Container	: 2 Unit
Flexible Hose	: 1 Unit
Jembatan Timbang Wighbridge	: 3 Unit
Grab	: 4 Unit
Spreader Bar	: 2 Unit

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M^2	
1	PONTIANAK-DWIKORA					
	Dermaga 01a Wharf 01a	125,00	12,00	-3.7	3.041,00	-
	Dermaga 01b Wharf 01b	67,00	23,00			-
	Dermaga 02 Wharf 02	75,00	20,00	-4.5	1.500,00	-
	Dermaga 03 Wharf 03	117,00	10,00	-4.4	1.170,00	-
	Dermaga 04 Wharf 04	100,00	35,00	-4.4	3.500,00	-

No	Nama Dermaga Wharf Name	Panjang Length	Lebar Width	Kedalaman Depth	Luas Area	Keterangan Remarks
		M	M	M LWS	M²	
1	Dermaga 05 Wharf 05	100,00	25,00	-4.3	2.500,00	-
	Dermaga 06a Wharf 06a	90,00	25,00	-4.5	2.250,00	-
	Dermaga 06b Wharf 06b	20,00	15,00			-
	Dermaga 07 Wharf 07	103,00	24,00	-5,3	2.472,00	-
	Dermaga 08 Wharf 08	102,00	24,00	-5,2	2.448,00	-
	Dermaga KSOP Wharf KSOP	55,00	4,00	-3.7	220,00	-
TOTAL LUAS DERMAGA PONTIANAK - DWIKORA TOTAL PONTIANAK-DWIKORA WHARF AREA		867,00			19.101,00	
TERMINAL KIJING(Setelah Perjanjian O n M kijing 1 Agustus 2022) KIJING (Post O n N Kijing Agreement August 1, 2022)						
1	Dermaga 81 Terminal Kijing Wharf 81 Kijing Terminal	1.129	49,95	-15	56.393,55	
2	*Trestle* Terminal Kijing Kijing Terminal Trestle	3.450	19,8		68.310	
TOTAL LUAS DERMAGA KIJING TOTAL KIJING WHARF AREA		4.579	69,75	-15	124.703,55	

No	Nama Lapangan Yard Name	Luas Length	Keterangan Remarks
		M²	
1	Lapangan Penumpukan Terminal Kijing Terminal Kijing Stacking Yard	6.014	
2	Lapangan 01 Pontianak Pontianak Yard 01	3.625	
3	Lapangan 02 Pontianak Pontianak Yard 02	6.200	
4	Lapangan 03 Pontianak Pontianak Yard 03	7.839	
TOTAL		23.678	

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

VISI
VISION

"Menjadi Pemimpin Operator Terminal Non-Petikemas di Indonesia."
"Become Noncontainer Terminal Operator Leader in Indonesia."

MISI
MISSION

"Menyediakan pelayanan terintegrasi yang kompetitif dan berkelanjutan guna mendukung ekosistem logistik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional."
"Providing competitive and sustainable integrated services to support the logistics ecosystem in order to increase national economic growth."

Penjelasan Visi

PTP Terminal Nonpetikemas menjalankan pelayanan jasa operator terminal nonpetikemas (*multipurpose*, curah cair, dan curah kering) yang mengutamakan kebutuhan pelanggan melalui pelayanan efektif dan efisien dengan teknologi digital, peralatan modern. Selain hal tersebut, PTP Terminal Nonpetikemas juga melakukan fungsi *leading* bagi terminal operator dan Perusahaan sejenis sebagai salah satu bentuk kolaborasi antar *stakeholders* di dalam industri maritim.

Vision Explanation

PTP provides Noncontainer terminal operator services (multipurpose, liquid bulk and dry bulk) that prioritize customer needs through effective and efficient services with digital technology and modern equipment. In addition, PTP also performs a leading function for terminal operators and similar companies as a form of collaboration between stakeholders in the maritime industry

Penjelasan Misi

1. Pelanggan & Mitra: Menyediakan layanan terminal secara berkelanjutan, terintegrasi, berkualitas, dan modern untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan pelanggan dan mitra
2. Karyawan: Menerapkan budaya perusahaan yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan profesionalitas karyawan.
3. Pemegang Saham: Menumbuhkan Nilai Perusahaan secara berkesinambungan bagi Pemegang Saham dengan memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik.
4. Masyarakat dan Negara: Mewujudkan logistik ekosistem yang efisien, ramah lingkungan, berkepedulian sosial, mampu meningkatkan ekonomi makro, serta menjadi kebanggaan bangsa dan Negara.

Mission Explanation

1. Customers & Partners: Providing sustainable, integrated, quality and modern terminal services to meet the needs and exceed the expectations of customers and partners.
2. Employees: Implementing a corporate culture that can improve employee comfort and professionalism.
3. Shareholders: Growing corporate value on an ongoing basis for Shareholders by fulfilling aspects of good corporate governance.
4. Community and State: Realizing efficient ecosystem logistics, environmentally friendly, socially concerned, able to improve the macro economy, and become the pride of nation and the State.

Reviu Visi dan Misi oleh Manajemen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian secara berkala atas kesesuaian Visi dan Misi. Visi dan Misi PTP Terminal Nonpetikemas masih selaras dengan tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahan (RJPP) 2021-2025.

Review of Vision and Mission by Management

The Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors have conducted periodic reviews of the alignment of the Company's Vision and Mission. The Vision and Mission of PTP Terminal Nonpetikemas remain aligned with the business objectives as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2021–2025.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi di Tahun 2024

1. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan.
2. Peningkatan *Corporate Branding* dan Komunikasi Perseroan
3. Restrukturisasi Organisasi
4. Program *Learning and Development* SDM yang terintegrasi
5. Internalisasi Budaya
6. Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

Vision and Mission Achievement Strategy in 2024

1. Strengthening Corporate Governance
2. Enhancing Corporate Branding and Communications
3. Organizational Restructuring
4. Implementing an Integrated Learning and Development Program for Human Capita
5. Internalizing Corporate Culture
6. Financial Planning and Control

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Budaya Perusahaan merupakan sebuah nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang di terapkan oleh seluruh insan Perusahaan. PTP Terminal Nonpetikemas mengikuti arahan dari Kementerian BUMN terkait penerapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, & Kolaboratif) yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja.

Corporate culture represents the values, beliefs, and attitudes embraced by all personnel within the Company. PTP Terminal Nonpetikemas adopts the directive from the Ministry of SOEs regarding the implementation of the Core Values of Human Capitals, known as "AKHLAK" (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative), which serve as the guiding principles for the Company's work culture.

AKHLAK

A Amanah
Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

- Fulfilling promises and commitments;
- Responsible for duties, decisions, and actions taken ;
- Holding fast to moral and ethical values

K Kompeten
Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continue to learn and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

- Improve self-competency to respond to ever-changing challenges;
- Helping others learn;
- Completing tasks with the best quality

H Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Caring for each other and respecting differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

- Respect everyone regardless of their background;
- Fond of helping others;
- Building a conducive work environment

L Loyal
Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

- Maintain the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State;
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal;
- Obey the leaders as long as does not conflict with law and ethics

A Adaptif
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing changes.

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

- Quickly adjust to be better;
- Continuously make improvements following technological developments;
- Act proactively

K Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic collaboration

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

- Provide opportunities for various parties to contribute;
- Being open in team work to produce added value;
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

Perusahaan telah melakukan sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan dengan melibatkan seluruh pegawai. Pada tahun 2024, program Budaya Internalisasi Akhlak yang meliputi:

1. NGOPI (Ngobrol Inspiratif)
   Ngopi (Ngobrol Inspiratif) adalah sebuah program yang dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan sosial (*soft skill*) karyawan melalui webinar atau seminar. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang lebih baik antara karyawan dalam organisasi. Program ini dilakukan melalui Pendidikan dan pembicaraan yang dilakukan oleg pembicara yang handal
2. OMES (*mOnthly Meeting Solusions*)
   OMES (*mOnthly Meeting Solusions*) adalah sebagai wadah untuk membahas informasi terupdate pada kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan kinerja.
3. Samawa (Sarapan Bersama Semua)
   Samawa (Sarapan Bersama Semua) dilakukan untuk menciptakan kebersamaan antar pegawai.

Socialization and Internalization of Corporate Culture

The Company has carried out the socialization and internalization of its Corporate Culture by involving all employees. In 2024, the Akhlak Culture Internalization Program was implemented, consisting of the following initiatives:

1. NGOPI (Inspirational Talk Show)
   NGOPI (Inspirational Talk Show) is a program developed to enhance employees' social skills (soft skills) through webinars or seminars. Its objective is to foster better communication skills among employees within the organization. The program is conducted through educational sessions and talks delivered by experienced speakers.
2. OMES (Monthly Meeting Solutions)
   OMES (Monthly Meeting Solutions) serves as a platform to discuss updated information regarding operational activities based on performance outcomes.
3. SAMAWA (Breakfast Gathering with All Employees)
   SAMAWA (Breakfast Gathering with All Employees) is organized to foster camaraderie among employees.

FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN
PHILOSOPHY OF COMPANY LOGO

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

1. Implementasi *brand architecture* pada Perusahaan di bawah *Subholding* menggunakan konsep *monolithic* (mengikuti logo induk Perusahaannya/*Subholding*).
2. *Brand name* diletakkan di bawah logo *Subholding*. *Brand name* menggambarkan bisnis inti Perusahaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau berisi singkatan Perusahaan.
3. Logo di atas merupakan logo *full colour* yang digunakan di atas dasar materi berwarna putih atau berwarna terang. Warna biru menggambarkan warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.
4. Warna merah melambangkan aksi, antusiasme, kecepatan, keberanian, dan bagian dari warna simbol negara Indonesia. Merepresentasikan Perusahaan yang kuat, berkomunikasi secara terbuka, serta mampu memberikan semangat persatuan dan energi antar Perusahaan-perusahaan di Pelindo *Group*.

1. The implementation of brand architecture within the companies under the Subholding adopts a monolithic concept (following the logo of their parent company/Subholding).
2. The brand name is placed below the Subholding logo. The brand name reflects the Company's core business, using the Indonesian language or incorporating an abbreviation of the Company's name.
3. The logo shown above represents the full color version, intended for use on a white or light colored background. The blue color symbolizes the seas of Indonesia, which are closely associated with Pelindo. It represents stability, trust, integrity, professionalism, and dedication. Additionally, the blue color signifies Pelindo's ongoing commitment, as part of SOEs, to consistently deliver the best for all stakeholders.
4. The red color symbolizes action, enthusiasm, speed, courage, and is part of the national colors of Indonesia. It reflects a strong company identity, open communication, and the ability to foster a spirit of unity and energy among the companies within the Pelindo Group.

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS

Pada tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak bergabung dalam keanggotaan asosiasi apapun. Sehingga, tidak terdapat informasi mengenai keikutsertaan Perusahaan dalam keanggotaan asosiasi atau organisasi apapun.

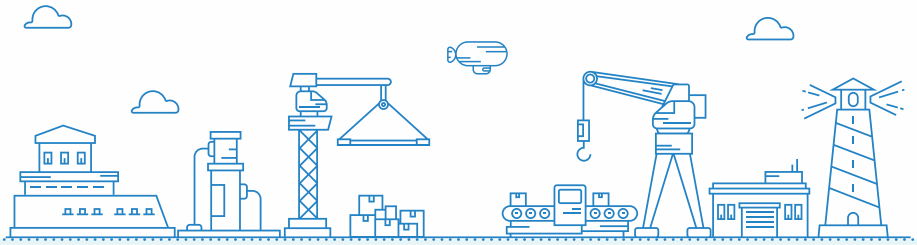
In 2024, PTP Terminal Nonpetikemas was not a member of any association. Therefore, there is no information regarding the Company's participation in any associations or organizations.

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 tentang struktur organisasi, nama jabatan dan uraian jabatan pada kantor pusat di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana terlampir di bawah ini.

The Organizational Structure of PTP Terminal Nonpetikemas as of December 31, 2024, has been established through Director Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 concerning the organizational structure, job titles, and job descriptions at the Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as attached below.









DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
INDRA HIDAYAT SANI

DIREKTUR KOMERSIAL & PENGEMBANGAN USAHA
DIRECTOR OF COMMERCIAL & BUSINESS DEVELOPMENT
DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO

SM PERENCANAAN STRATEGIS
SM STRATEGIC PLANNING
M. SUSANTO PUJI RAHARJO

- **ASM PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN**
  ASM COMPANY STRATEGIC PLANNING
- **ASM TRANSFORMASI PERUSAHAAN**
  ASM CORPORATE TRANSFORMATION
- **ASM PENGENDALIAN KINERJA & JAMINAN MUTU**
  ASM PERFORMANCE CONTROL & QUALITY ASSURANCE

SM SEKRETARIS PERUSAHAAN
SM CORPORATE SECRETARY
FIONA SARI UTAMI

- **ASM KOMUNIKASI PERUSAHAAN & CSR**
  ASM CORPORATE COMMUNICATION & CSR
- **ASM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**
  ASM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Plh SM PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM
ACTING SM INTERNAL AUDIT & LEGAL
HERU SUSETYOHADI

- **ASM PENGAWASAN INTERNAL**
  ASM INTERNAL AUDIT
- **ASM HUKUM**
  ASM LEGAL

SM PEMASARAN & *CUSTOMER RELATION*
SM MARKETING & CUSTOMER RELATION
MUHAMMAD NOORDIN

- **ASM PEMASARAN**
  ASM MARKETING
- **ASM *CUSTOMER SERVICE***
  ASM CUSTOMER SERVICE

SM PENGEMBANGAN USAHA
SM BUSINESS DEVELOPMENT
HARTONO

- **ASM PENGEMBANGAN & ANALISIS KELAYAKAN USAHA**
  ASM BUSINESS FEASIBILITY DEVELOPMENT & ANALYSIS
- **ASM KERJASAMA & PORTOFOLIO USAHA**
  ASM PARTNERSHIP & BUSINESS PORTOFOLIO



STRUKTUR ORGANISASI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Plt. DIREKTUR OPERASI
ACTING DIRECTOR OF OPERATION
DWI RAHMAD SUGIARTO

DIREKTUR KEUANGAN, SDM, & MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, HC, & RISK MANAGEMENT
BAMBANG SAKTI

SM OPERASI
SM OPERATIONS
PANJI BHARATA TJAHJO TUNGGUL

- **ASM PERENCANAAN OPERASI** — ASM OPERATIONAL PLANNING
- **ASM PENGENDALIAN OPERASI** — ASM LEGAL
- **ASM HSSE** — ASM HSSE

SM TEKNIK
SM ENGINEERING
PRAMUJAYA SIMBOLON

- **ASM PERALATAN** — ASM EQUIPMENT
- **ASM SARANA & PRASARANA** — ASM FACILITIES & INFRASTUCTURE

SM SISTEM INFORMASI
SM INFORMATION SYSTEM
MEIRISAL DWI WALDI

- **ASM PEMELIHARAAN & PENGEMBANGAN *HARDWARE*** — ASM HARDWARE MAINTENANCE & DEVELOPMENT
- **ASM DUKUNGAN SISTEM** — ASM SYSTEM SUPPORT

SM KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO
SM FINANCE & RISK MANAGEMENT
ACHMAD NUGROHO HARIYADI

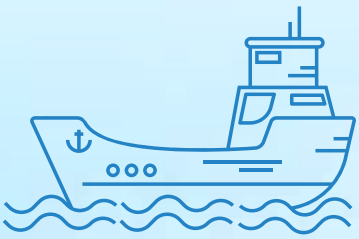
- **ASM AKUNTANSI & PERPAJAKAN** — ASM ACCOUNTING & TAXATION
- **ASM PENGELOLAAN ANGGARAN** — ASM BUDGET MANAGEMENT
- **ASM PEMBENDAHARAAN** — ASM TREASURY
- **ASM MANAJEMEN RISIKO** — ASM RISK MANAGEMENT

SM SUMBER DAYA & UMUM
SM HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIRS
MIFTAH NURJANAH

- **ASM SUMBER DAYA MANUSIA** — ASM HUMAN CAPITAL
- **ASM ADMINISTRASI SDM, UMUM, & RUMAH TANGGA** — ASM HUMAN CAPITAL, GENERAL AFFAIRS, & HOUSEHOLD ADMINISTRATION

***BRANCH MANAGER* CABANG-CABANG**
BRANCH MANAGER - ALL BRANCHES





PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Prakosa Hadi Takariyanto

Komisaris Utama
President Commissioner

1 April 2024-2029*), Periode Ke-1
April 1, 2024–2029*), First Term

Usia
59 Tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Klaten, 11 November 1965

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pendidikan
- Magister Manajemen Jurusan Manajemen (2013)
- Magister Teknik Jurusan Sistem dan Transportasi Jalan Raya (1995)
- Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil (1992)

Sertifikasi Profesi
- *Certification in Audit Committee Practice* (2024)
- Perlindungan Data Pribadi (2023)
- *Qualified Risk Governance Professional* (2023)
- *Executive Leadership Program* (2023)
- *Professional Coach* (2021)

Riwayat Jabatan
- Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2021-2023)
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV (2018-2023)
- GM pengembangan Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018)
- MD Investasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2018)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Kordinator seluruh Komite (April 2024-sekarang)
Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2022-2024)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
59 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Klaten, November 11, 1965

Citizenship
Indonesian

Domicile
Bogor

Legal Basis of Appointment
Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Education
- Master of Management, Management Major (2013)
- Master of Engineering, Roadway Systems and Transportation Major (1995)
- Bachelor of Engineering, Civil Engineering Major (1992)

Professional Certifications
- Certification in Audit Committee Practice (2024)
- Personal Data Protection (2023)
- Qualified Risk Governance Professional (2023)
- Executive Leadership Program (2023)
- Professional Coach (2021)

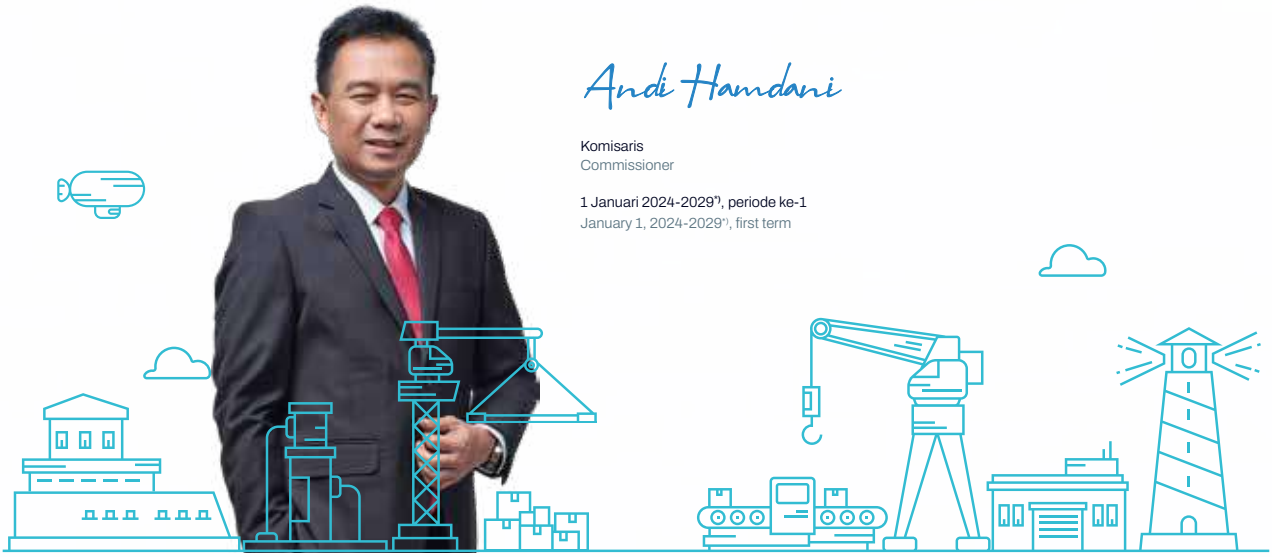
Career Experience
- Technical Director of PT Pelindo Multi Terminal (2021–2023)
- Technical Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV (2018–2023)
- GM of Business Development at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017–2018)
- MD of Investment at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016–2018)

Concurrent Position
Within the Company:
Coordinator of All Committees (April 2024-present)
Outside the Company:
President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2022–2024)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Andi Hamdani

Komisaris
Commissioner

1 Januari 2024-2029*), periode ke-1
January 1, 2024-2029*), first term

Usia
54 Tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Serang, 22 September 1970

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Banten

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 Shipping and Transformation, Netherland Maritime University (2014)
- S1 Ekonomi *Management*, Universitas Terbuka (2002)

Sertifikasi Profesi
- *Certification in Audit Committee Practice* (2024)
- *Qualified Risk Governance Professional* (2024)
- Improving Port Performance 1 dari PT PMLI (2014)
- Improving Port Performance 2 dari Balai Diklat Pelindo (2014)
- Pelatihan Sekolah Manager Operasi dari Balai Diklat Pelindo (2005)
- Diklat Ahli Kepelabuhanan dari DEPHUB (2005)
- Seminar on Break Bulk Cargo (2003)
- Port Operation Management (2002)

Riwayat Jabatan
- Direktur Operasi dan Teknik PT IKT Tbk (2021-2023)
- Specialis PT Pelindo 2 (2021-2021)
- Direktur Komersial PT MTI (2019-2021)
- Plt. Direktur Utama PT MTI (2019-2019)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT MTI (2017-2019)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Pemantau Risiko (Januari 2024-sekarang)
Di luar Perusahaan:
Group Head Pelayanan Terminal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
54 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Serang, September 22, 1970

Citizenship
Indonesian

Domicile
Banten

Legal Basis of Appointment
Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master's Degree in Shipping and Transportation, Netherlands Maritime University (2014)
- Bachelor's Degree in Management Economics, Indonesia Open University (2002)

Professional Certifications
- Certification in Audit Committee Practice (2024)
- Qualified Risk Governance Professional (2024)
- Improving Port Performance 1 from PT PMLI (2014)
- Improving Port Performance 2 from Pelindo Training Center (2014)
- Operational Manager Training from Pelindo Training Center (2005)
- Certified Port Expert Training from the Ministry of Transportation (DEPHUB) (2005)
- Seminar on Break Bulk Cargo (2003)
- Port Operation Management (2002)

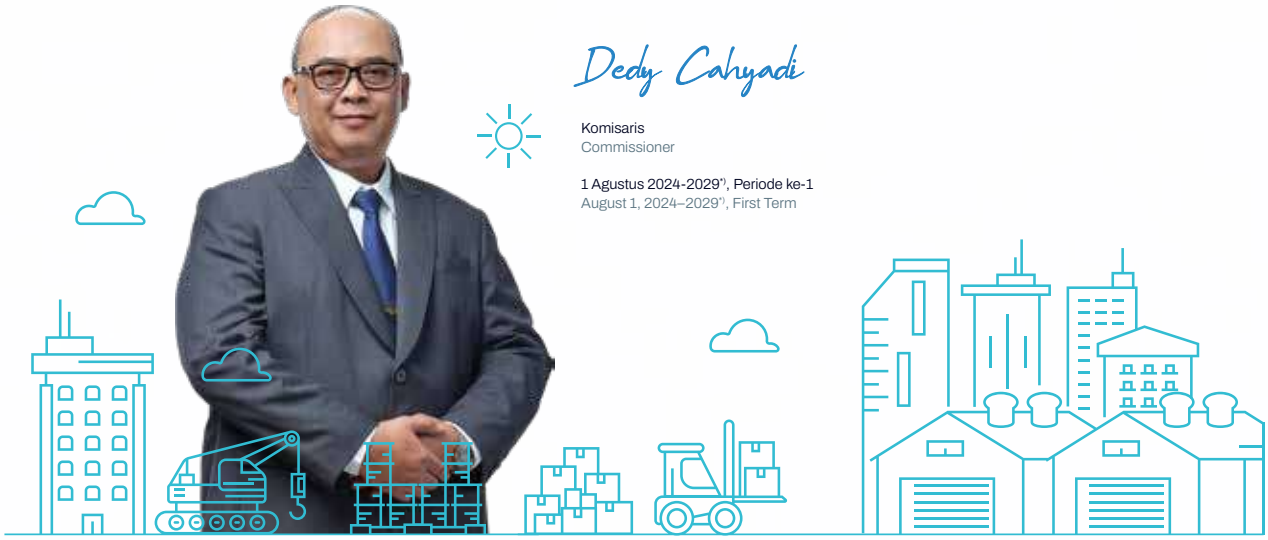
Career Experience
- Director of Operations and Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021–2023)
- Specialist, PT Pelindo II (2021-2021)
- Director of Commercial, PT Multi Terminal Indonesia (2019–2021)
- Acting President Director, PT Multi Terminal Indonesia (2019-2019)
- Director of Commercial and Business Development, PT Multi Terminal Indonesia (2017–2019)

Concurrent Position
Within the Company:
Chairman of Risk Monitoring Committee (January 2024-Present)
Outside the Company:
Group Head of Terminal Services, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Dedy Cahyadi

Komisaris
Commissioner

1 Agustus 2024-2029*), Periode ke-1
August 1, 2024–2029*), First Term

Usia
51 Tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Tangerang, 22 September 1973

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Kota Tangerang

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 Magister Transportasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002)
- D-IV Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi (2000)
- D-III Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi (1995)

Sertifikasi Profesi
- PIM Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (2019)
- *Dangerous Goods* (2019)
- *Workshop* Pengembangan Kompetensi Pegawai (2017)
- Diklat Pengujian Sarana Perkeretaapian Berpenggerak Non Listrik (2015)
- *Advanced Road Safety Investigation Training Course* (2014)
- *Allwast Resources &Amp; Training* (2013)
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2013)
- Seminar Multimodal *Transport System* (2012)
- *Road Safety Short Course* (2012)
- *Railway Training Development* Tahap III (2011)
- *Railway Training Development*Tahap II (2011)
- *Railway Training Development* Tahap I (2011)
- Manajemen Strategi Dan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard Dalam Mendorong Reformasi Birokrasi (2010)
- *Railway Safety* (2009)
- *Public Private Partnership* (2009)
- *Workshop* Potensi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Di Indonesia (2009)
- *International Railway Safety Council* (2009)
- Seminar/*Workshop*/Kursus/Magang Struktural (2008)
- Penyusunan Kursil dan Bahan Ajar (2008)
- Barang Dan Jasa (2008)
- PIM Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan *Administrator* (2007)
- Diklat Keahlian Inspektur Rangkaian Ka (2007)
- Spama/Sepadya (2007)
- Adum/Sepala (2004)
- PIM Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas(2004)
- *Comunicating Business* (2003)
- Standar Mutu (2002)
- *Road Safety Investigation Workshop* (2000)
- Bahasa Asing (2000)

Age
51 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Tangerang, September 22, 1973

Citizenship
Indonesian

Domicile
Tangerang City

Legal Basis of Appointment
Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 dated July 31, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master's Degree in Transportation, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002)
- Diploma IV in Land Transportation, Land Transport Academy (STTD), Bekasi (2000)
- Diploma III in Road Transport Traffic, Land Transport Academy (STTD), Bekasi (1995)

Professional Certifications
- Leadership Training Level II/National Leadership Training II (2019)
- Dangerous Goods (2019)
- Employee Competency Development Workshop (2017)
- Training in Non-Electric Railway Vehicle Testing (2015)
- Advanced Road Safety Investigation Training Course (2014)
- Allwast Resources &Amp; Training (2013)
- Government Internal Control System (2013)
- Seminar on Multimodal Transport System (2012)
- Road Safety Short Course (2012)
- Railway Training Development Stages III (2011)
- Railway Training Development Stages II (2011)
- Railway Training Development Stages I (2011)
- Strategic Management and Performance Based on Balanced Scorecard to Encourage Bureaucratic Reform (2010)
- Railway Safety (2009)
- Public Private Partnership (2009)
- Workshop on the Potential of Sovereign Wealth Fund (SWF) in Financing Transportation Infrastructure in Indonesia (2009)
- International Railway Safety Council (2009)
- Structural Seminars/Workshops/Courses/Internships (2008)
- Curriculum Development and Teaching Material Preparation (2008)
- Goods and Services (2008)
- PIM Level III/Leadership Training for Administrators (2007)
- Railway Inspector Skill Training (2007)
- Spama/Sepadya (2007)
- Adum/Sepala (2004)
- PIM Level IV/Supervisor Leadership Training (2004)
- Comunicating Business (2003)
- Quality Standards (2002)
- Road Safety Investigation Workshop (2000)
- Foreign Language Training (2000)

Riwayat Jabatan
- Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2022-2024)
- Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2021-2022)
- Direktur Keselamatan Perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub (2021-2021)
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda di Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemenhub (2020-2021)
- Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2019-2020)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Agustus 2024-sekarang)
Di luar Perusahaan:
Sekretaris BPTJ di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kemenhub (2024-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Career Experience
- Head of the Center for Functional Transportation Position Development, Secretariat General, Ministry of Transportation (2022–2024)
- Head of Bureau of Procurement Services and State Asset Management, Secretariat General, Ministry of Transportation (2021–2022)
- Director of Railway Safety, Directorate General of Railways, Ministry of Transportation (2021)
- Head of Research and Development Center for Intermodal Transportation, Research and Development Agency, Ministry of Transportation (2020–2021)
- Head of Center for Sustainable Transportation Management, Secretariat General, Ministry of Transportation (2019–2020)

Concurrent Position
Within the Company:
Chairman of Nomination and Remuneration Committee (August 2024-present)
Outside the Company:
Secretary of BPTJ in Greater Jakarta Transport Authority, Ministry of Transportation (2024–present)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Lukijanto

Komisaris Independen (1 April 2024-2027*))
Komisaris (26 April 2022-1 April 2024)
Independent Commissioner (April 1, 2024-2027*))
Commissioner (April 26, 2022-April 1, 2024)

26 April 2022 – 2027*), Periode ke-1
April 26, 2022 – 2027*), First Term

Usia
55 Tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Pasuruan, 10 April 1969

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
- Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

- Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S3 *Maritime System Engineering*, Kyushu University, Japan (2010)
- S2 *Coastal Engineering and Geosciences*, Christian Albrechts Universitaet Kiel, Jerman (2002)
- S1 lulusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Universitas Hasanuddin Makasar (1996)

Sertifikasi Profesi
- *Certification in Audit Committee Practice* (2024)
- *Awareness Good Corporate Governance* dari KIM *Consult* (2023)
- *Risk Awareness dari Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)
- ASIA PACIFIC *Government Leadership Program* dari Washington *University*, STERN, USA (2019)
- ASEAN *Government Leadership Program* dari *General Electric* (GE), Crotonville, USA (2016)
- *Training Knowledge Co-Creation Program* (Country Focus) "PPP *Implementation Capacity Development in* Japan dari JICA *Headquarters Office*, Tokyo (2016)
- *Benchmarking National Capital Integrated Coastal Development* dari *Port of* Rotterdam, Nederland, (2015)
- Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Bidang Teknik Pantai dan Rawa (Maritim) (2014)

- *Business Planning and Curriculum Development for Logistics Community College* dari STC *Logistics dan HQ Port of* Rotterdam (2013)
- Kursus Bahasa Jepang Dasar & *Intermediate* dari Kyushu *University* (2007)
- *Training for* TOCS (*Tropical Ocean Climate Studies*) dari JAMSTEC, Japan (2006)
- Kursus Bahasa Inggris *Advance* dari Waikato *University*, Hamilton, NZ (2002)
- Kursus Bahasa Jerman Dasar dari Goethe *Institute*, Bremen, Jerman (1999)
- *Training* Pengolahan Data CODAS Program dari JAMSTEC, Japan (1996)

Age
55 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Pasuruan, April 10, 1969

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
- Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

- Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders No: SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dated April 26, 2022, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Ph.D. in Maritime System Engineering, Kyushu University, Japan (2010)
- Master's Degree in Coastal Engineering and Geosciences, Christian Albrechts Universitaet Kiel, Germany (2002)
- Bachelor's Degree in Marine Science and Technology, University of Hasanuddin Makassar (1996)

Professional Certifications
- Certification in Audit Committee Practice (2024)
- Awareness of Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness dari Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)
- Asia Pacific Government Leadership Program, Washington University, STERN, USA (2019)
- ASEAN Government Leadership Program, General Electric (GE), Crotonville, USA (2016)
- Training Knowledge Co-Creation Program (Country Focus) "PPP Implementation Capacity Development in Japan", JICA Headquarters Office, Tokyo (2016)
- Benchmarking National Capital Integrated Coastal Development, Port of Rotterdam, Netherlands (2015)
- Certification from the Professional Certification Institute for Coastal and Marshland Engineering (Maritime) (2014)
- Business Planning and Curriculum Development for Logistics Community College, STC Logistics and Port of Rotterdam (2013)
- Basic and Intermediate Japanese Language Course, Kyushu University (2007)
- Training for TOCS (Tropical Ocean Climate Studies), JAMSTEC, Japan (2006)
- Advanced English Course, Waikato University, Hamilton, New Zealand (2002)
- Basic German Language Course, Goethe Institute, Bremen, Germany (1999)
- CODAS Data Processing Program Training, JAMSTEC, Japan (1996)

Riwayat Jabatan
- Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok (2022-2024)
- Kepala Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2020-2020)
- Kepala Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di Kemenko Kemaritiman (2015-2020)
- Kepala Bagian Program, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Kemaritiman (2015-2015)
- Kepala Sub Bidang Perlindungan Konsumen, Deputi Perniagaan di Kemenko Perekonomian (2014-2015)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Audit (2022-sekarang)
Di luar Perusahaan:
- Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (2021-sekarang)
- Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi periode (2020-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Career Experience
- Commissioner, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2022–2024)
- Head of Water Resources and Coastal Infrastructure Division, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2020-2020)
- Head of Integrated Maritime Logistics Development Division, Deputy for Infrastructure Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs (2015–2020)
- Head of Program Section, Deputy for Infrastructure and Transportation Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs (2015-2015)
- Head of Consumer Protection Subdivision, Deputy for Trade Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014–2015)

Concurrent Position
Within the Company:
Chairman of the Audit Committee (2022-present)
Outside the Company:
- Acting Deputy Assistant for Connectivity Infrastructure at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2021–present)
- Secretary of the Deputy for Infrastructure and Transportation at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2020–present)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Ogi Rukino

Komisaris Utama
President Commissioner

13 Mei 2020 - 1 April 2024, Periode Ke-1
May 13, 2020 - April 1, 2024, First Term

Usia
56 tahun per Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Banda Aceh, 27 September 1968

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjuk Priok No. KP.03/13/5/1/MTA/ UT/PI-II2020 dan No. SK-003/ PII-SK.D1/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- *Master of Engineering, Graduate School University of Electro- Communications* Tokyo (1995)
- *Bachelor of Science, University of Electro-Communications* Tokyo (1993)
- *Mechanical Engineering, Bandung Institute of Technology* (ITB) (1987)

Sertifikasi Profesi
- *Awareness Good Corporate Governance* dari KIM Consult (2023)
- *Risk Awareness dari Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)

Riwayat Jabatan
- *Director of Transformation & Business Development*, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
- *Director of Logistics & Business Development*, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018-2019)
- *Director of Logistics*, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018)
- *Director of* PT Portco Infranusantara, *member* of Rajawali Corpora (2014-2015)
- *Business Development General Manager* of PT Nusantara Infrastructure Tbk, Rajawali Corpora (2012-2015)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Kordinator seluruh Komite (2020-Maret 2024)
Di luar Perusahaan:
Direktur PT Rukun Raharja Tbk

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
55 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Banda Aceh, September 27, 1968

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
Initially appointed as President Commissioner (Pjs.) of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders No. KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI-II-2020 and No. SK-003/PII-SK. D1/V/2020 dated May 13, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Board of President Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master of Engineering, Graduate School University of Electro- Communications Tokyo (1995)
- Bachelor of Science, University of Electro-Communications Tokyo (1993)
- Mechanical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) (1987)

Professional Certifications
- Awareness Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness, Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)

Career Experience
- Director of Transformation & Business Development, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
- Director of Logistics & Business Development, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018-2019)
- Director of Logistics, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018)
- Director of PT Portco Infranusantara, member of Rajawali Corpora (2014-2015)
- Business Development General Manager of PT Nusantara Infrastructure Tbk, Rajawali Corpora (2012-2015)

Concurrent Position
Within the Company:
Coordinator of Commitee (2020-March 2024)
Outside the Company:
Director PT Rukun Raharja Tbk

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None



Marta Hardisarwono

Komisaris
Commissioner

21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode Ke-1
June 21, 2021 – August 1, 2024, First Term

Usia
60 tahun per Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 07 Maret 1964

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan SK-002/PII-SK.D1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 Teknik dari STIAMI Ilmu Administrasi (2006)
- S1 Manajemen Universitas Jayabaya (1988)

Sertifikasi Profesi
- *Certification in Audit Committee Practice (2024)*
- *Certified Risk Management Professional* dari CRMP) (2023)
- *Awareness Good Corporate Governance* dari KIM Consult (2023)
- *Risk Awareness* dari *Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)
- DIKLATPIM II di Bandung (2010)
- DIKLATPIM III di Jakarta (1997)

Riwayat Jabatan
- Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan (2015-2020)
- Sesitjen Kemenhub Kementerian perhubungan (2015-2015)
- Kabag Perbendaharaan - Biro Keuangan Kementerian perhubungan (2014-2015)
- Kabag Pelaksanaan Aggaran - Biro Keuangan Kementerian perhubungan (2007-2014)
- Kasubag Angg. Trp. Laut Kementerian perhubungan (2005-2007)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Januari 2024-Juli 2024)
Di luar Perusahaan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (2020-Sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
60 years old as of December 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, March 7, 1964

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and SK-002/PII-SK.D1/VI/2021 dated June 21, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master's Degree in Engineering, STIAMI School of Administrative Sciences (2006)
- Bachelor's Degree in Management, University of Jayabaya (1988)

Professional Certifications
- Certification in Audit Committee Practice (2024)
- Certified Risk Management Professional (CRMP) (2023)
- Awareness of Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness, Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)
- Leadership Training Level II (DIKLATPIM II), Bandung (2010)
- Leadership Training Level III (DIKLATPIM III), Jakarta (1997)

Career Experience
- Head of Bureau of Finance and Equipment, Ministry of Transportation (2015–2020)
- Secretary for the Inspectorate General of the Ministry of Transportation (2015)
- Head of Treasury Division, Bureau of Finance, Ministry of Transportation (2014–2015)
- Head of Budget Implementation Division, Bureau of Finance, Ministry of Transportation (2007–2014)
- Head of Marine Transportation Budget Subdivision, Ministry of Transportation (2005–2007)

Concurrent Position
Within the Company:
Nomination and Remuneration (January 2024-July 2024)
Outside the Company:
Secretary for the Directorate General of Land Transportation, Ministry of Transportation (2020–Present)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

Ogi Rulino

Komisaris Utama
President Commissioner

Dedy Cahyadi

Komisaris
Commissioner

Prakosa Hadi Takariyanto

Komisaris Utama
President Commissioner





Andi Hamdani

Komisaris
Commissioner

Lukijanto

Komisaris Independen (1 April 2024-2027*))
Komisaris (26 April 2022-1 April 2024)
Independent Commissioner (April 1, 2024-2027*))
Commissioner (April 26, 2022-April 1, 2024)

Marta Hardisarwono

Komisaris
Commissioner

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan. Alasan perubahan karena penyegaraan Organisasi Komposisi Dewan Komisaris PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent several changes. The changes were made as part of the organizational restructure process. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners of PTP Terminal Nonpetikemas consists of 4 (four) members, comprising 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner. The detailed composition of the Board of Commissioners during 2024 is presented in the table below.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 Januari 2024-1 April 2024
The Composition of Board of Commissioners January 1, 2024-April 1, 2024

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa dan Periode Jabatan** Term and Period of Office
Ogi Rulino	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor SK-003/ PII/D1-1/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as the President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 and Number SK-003/PII/ D1-1/2020 dated May 13, 2020, regarding the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok	13 Mei 2020 - 1 April 2024, Periode Ke-1 May 13, 2020 - April 1, 2024, First Term
Marta Hardisarwono	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan SK-002/ PII-SK.D1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and SK-002/PII-SK.D1/VI/2021 dated June 21, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode Ke-1 June 21, 2021 – August 1, 2024, First Term
Lukijanto	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/ PLMT-22 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders No: SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dated April 26, 2022, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	26 April 2022 – 1 April 2024, Periode ke-1 April 26, 2022-April 1, 2024, First Term
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/ DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/ PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024 -2029*), Periode Ke-1 January 1, 2024-2029*), First Term

*dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 April 2024-1 Agustus 2024
The Composition of Board of Commissioners April 1, 2024-August 1, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Prakosa Hadi Takariyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024-2029*), Periode Ke-1 April 1, 2024–2029*), First Term
Marta Hardisarwono	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan SK-002/ PII-SK.D1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and SK-002/PII-SK.D1/VI/2021 dated June 21, 2021, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode Ke-1 June 21, 2021 – August 1, 2024, First Term
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024-2029*), Periode Ke-1 January 1, 2024-2029*), First Term
Lukijanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024 – 2027*), Periode ke-1 April 1, 2024 – 2027*), First Term

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris 1 Agustus 2024-31 Desember 2024
The Composition of Board of Commissioners August 1, 2024-December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Prakosa Hadi Takariyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024-2029*), Periode Ke-1 April 1, 2024–2029*), First Term
Andi Hamdani	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Januari 2024-2029*), Periode Ke-1 January 1, 2024-2029*), First Term
Dedy Cahyadi	Komisaris Commissioner	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 dated July 31, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Agustus 2024-2029*), Periode Ke-1 August 1, 2024–2029*), First Term
Lukijanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 April 2024-2027*), Periode ke-1 April 1, 2024-2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.


PELINDO
PELINDO

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Indra Hidayat Sani

Direktur Utama
President Director

1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1
March 1, 2024 – 2029*), First Term

Usia
53 Tahun, per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Rantau Prapat, 21 Desember 1971

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Depok

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- Magister Administrasi Bisnis (Leadership & Logistics), Kühne Logistics University, Jerman (2013)
- S2 *Master of Science*, World Maritime University, Swedia (2002)
- Sarjana Teknik Listrik/Elektro, Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1996)

Sertifikasi Profesi
- *Directorship Program* (2018)
- Tata Kelola Perusahaan (2018)
- *Executive Development Program* (2018)
- Manajamen Pengelolaan Perusaahaan (2015)
- Pendidikan *Senior Level* Manajemen (2014)

Riwayat Jabatan
- *General Manager* TPK Koja (2022-2024)
- Staf Madya Direktur Pengelola Pelindo (2021-2022)
- *Junior Chief Specialist* Pelindo II (2020-2021)
- *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia II, Cabang Pelabuhan Palembang (2019-2020)
- Direktur Operasional PT Indonesia Kendaraan Terminal (2015-2019)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.
Di luar Perusahaan:
Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
53 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Rantau Prapat, December 21, 1971

Citizenship
Indonesian

Domicile
Depok

Legal Basis of Appointment
Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master of Business Administration (Leadership & Logistics), Kühne Logistics University, Germany (2013)
- Master of Science, World Maritime University, Sweden (2002)
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering, University of Gadjah Mada Yogyakarta (1996)

Professional Certifications
- Directorship Program (2018)
- Corporate Governance (2018)
- Executive Development Program (2018)
- Corporate Management Training (2015)
- Senior Level Management Training (2014)

Career Experience
- General Manager, TPK Koja (2022–2024)
- Senior Staff to the Managing Director, Pelindo (2021–2022)
- Junior Chief Specialist, Pelindo II (2020–2021)
- General Manager, PT Pelabuhan Indonesia II, Palembang Branch (2019–2020)
- Director of Operations, PT Indonesia Kendaraan Terminal (2015–2019)

Concurrent Position
Within the Company:
None
Outside the Company:
None

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Dwi Rahmad Toto Sugiarto

Direktur Operasi (2 Juni 2022-1 Maret 2024)
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha (1 Maret 2024-2029*))
Plt. Direktur Operasi (30 Agustus 2024-2029*))
Director of Operations (June 2, 2022-March 1, 2024)
Director of Commercial and Business Development (March 1, 2024-2029*))
Acting Director of Operations (August 30, 2024-2029*))

1 Maret 2024-2029, Periode Ke-1
March 1, 2024-2029, First Period

Usia
51 tahun per Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Tanjung Karang Bandar Lampung, 1 Desember 1973

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Makassar

Dasar Hukum Pengangkatan
- Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 Manajemen Pemasaran di Universitas Hasanuddin (2012)
- Sarjana Ilmu Ekonomi, STIEM Bongaya (2003)
- Diploma Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Universitas Hasanuddin (1996)

Sertifikasi Profesi
- *Awareness Good Corporate Governance* dari KIM *Consult* (2023)
- *Risk Awareness* dari *Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)
- EDP BOD-1 PT Pelindo IV (Persero) dari PPM managemen Jakarta/Makassar (2018)
- *Expand Leadership Program* dari *Corporate Leadership Program* (2017)
- MDP Tingkat Utama Lanjutan dari PPM managemen Jakarta/ Makassar (2012)
- Diklat Penjenjangan Bagi Managerial Utama dari PPM managemen Jakarta/ Makassar (2010)
- Diklat Auditor Internal Tk.I dan Tk. II dari YPIA Jakarta/Jakarta (2006)

Riwayat Jabatan
- Sekretaris Perusahaan Pelindo IV (2021-2021)
- *Corporate Secretary* (2020-2021)
- Pelaksanaan Harian Direktur Utama PT Nusantara Terminal Services (2018- 2020)
- Direktur SBU Marine Service (2017- 2018)
- Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan Kantor Pusat (2016-2017)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.
Di luar Perusahaan:
Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
51 Years old as of December 2024

Place and Date of Birth
Tanjung Karang Bandar Lampung, December 1, 1973

Citizenship
Indonesian

Domicile
Makassar

Legal Basis of Appointment
- Appointed as Acting Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 dated August 30, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022

Education
- Master's Degree in Marketing Management, Hasanuddin University (2012)
- Bachelor's Degree in Economics, STIEM Bongaya (2003)
- Diploma in Shipping and Port Management, Hasanuddin University (1996) Yogyakarta (1996)

Professional Certifications
- Awareness on Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness, the Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)
- Executive Development Program (EDP BOD-1) PT Pelindo IV (Persero) by PPM Management Jakarta/Makassar (2018)
- Expand Leadership Program, Corporate Leadership Program (2017)
- Advanced Main Level MDP, PPM Management Jakarta/Makassar (2012)
- Managerial Main Level Training, PPM Management Jakarta/Makassar (2010)
- Internal Auditor Training Level I and II, YPIA Jakarta (2006)

Career Experience
- Corporate Secretary Pelindo IV (2021–2021)
- Corporate Secretary (2020–2021)
- Acting President Director of PT Nusantara Terminal Services (2018–2020)
- Director of Marine Service SBU (2017–2018)
- Head of Corporate Planning and Strategy Bureau at Head Office (2016–2017)

Concurrent Position
Within the Company:
None
Outside the Company:
None

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Bambang Sakti

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HC, and Risk Management

2 Juni 2022 – 2027*), Periode Ke-1
June 2, 2022 – 2027*), First Term

Usia
52 Tahun, per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 26 Maret 1972

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
- Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 *Business Administration*, Monash University Melbourne (2000)
- S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1995)

Sertifikasi Profesi
- *Awareness Good Corporate Governance* dari *KIM Consult* (2023)
- *Risk Awareness* dari *Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)

Riwayat Jabatan
- *Executive Advisor to* CEO PT ANTAM Tbk (2020-2021)
- *Business Advisor Independent Consultant* (2017-2020)
- *Executive Advisor to Operations Director* (COO) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2017)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.
Di luar Perusahaan:
Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
52 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, March 26, 1972

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
- Appointed as Director of Finance and HC of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Appointed as Director of Finance, HC, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master of Business Administration, Monash University, Melbourne (2000)
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1995)

Professional Certifications
- Awareness on Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness, the Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)

Career Experience
- Executive Advisor to CEO PT ANTAM Tbk (2020-2021)
- Business Advisor Independent Consultant (2017-2020)
- Executive Advisor to Operations Director (COO) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2017)

Concurrent Position
Within the Company:
None
Outside the Company:
None

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Rino Wisnu Putro

Direktur Utama (02 Juni 2022–1 Maret 2024)
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
(18 April 2022–1 Maret 2024)
President Director (June 02, 2022-March 1, 2024)
Acting Director of Commercial and Business Development
(April 18, 2022- March 1, 2024)

02 Juni 2022-1 Maret 2024, Periode Ke-1
June 2, 2022- March 1, 2024, First Term

Usia
46 tahun per Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Yogyakarta, 19 Juli 1978

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
- Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor:SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT- 22 dan Nomor: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022
- Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-004/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Persetujuan Atas Perubahan Logo Perusahaan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S2 Magister Manajemen, STM PPM Manajemen, Jakarta (2021)
- S1 Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhanan, Pendidikan dan Pelatihan Ahli Pelayaran Jakarta (2000)

Sertifikasi Profesi
- *Awareness Good Corporate Governance* dari KIM *Consult* (2023
- *Risk Awareness dari Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS) (2022)
- *Certified Profesional In Logistics* dari ORSI *EXCELLENCE* (2022)
- Imo Model *Course* 3.21 dari DON & PROFESIONAL (2021)
- Ahli Kepelabuhanan dari IPC *Corporate University* (2021)
- *Enterprise Risk Management* dari PSA *Group Risk Management* (2018)
- *Directorship Program* dari IPC *Corporate University* (2018)
- *International on Breakbulk* dari APEC-ANTWERP *Port Training* (2014)
- Ahli Kepabeanan dari Diklat Dept Keuangan (2008)
- *Container Terminal Operations* dari Hongkong Int *Terminal* (2001)

Riwayat Jabatan
- Direktur Operasi PT PTP (2019-2021)
- Direktur Komersial NPCT1 (2018-2019)
- SM Operasi dan QHSSE IPCTPK3 (2018-2018)
- Manajer Operasi T3 (2015-2018)
- Manajer *Planning* dan *Control* PTP (2014-2015

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.
Di luar Perusahaan:
Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
46 years old as of December 2024

Place and Date of Birth
Yogyakarta, July 19, 1978

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
- Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022
- Appointed as Acting Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-004/PII-SK.D/IV/2022 dated April 18, 2022, regarding the Approval of Changes to the Company Logo and Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Master's Degree in Management, STM PPM Management, Jakarta (2021)
- Bachelor's Degree in Naval and Port Administration, Jakarta Shipping and Training Institute (2000)

Professional Certifications
- Awareness on Good Corporate Governance, KIM Consult (2023)
- Risk Awareness, the Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) (2022)
- Certified Professional in Logistics, ORSI EXCELLENCE (2022)
- IMO Model Course 3.21, DON & PROFESSIONAL (2021)
- Port Specialist Certification, IPC Corporate University (2021)
- Enterprise Risk Management, PSA Group Risk Management (2018)
- Directorship Program, IPC Corporate University (2018)
- International Training on Breakbulk, APEC-ANTWERP Port Training (2014)
- Customs Specialist Certification, the Ministry of Finance Training (2008)
- Container Terminal Operations Training, Hong Kong International Terminal (2001)

Career Experience
- Director of Operations, PT PTP (2019–2021)
- Director of Commercial, NPCT1 (2018–2019)
- Senior Manager of Operations and QHSSE, IPCTPK3 (2018)
- Terminal 3 Operations Manager (2015–2018)
- Planning and Control Manager, PTP (2014–2015)

Concurrent Position
Within the Company:
None
Outside the Company:
None

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None



Kalbar Yanto

Direktur Operasional
Director of Operations

1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024, Periode Ke-1
March 1, 2024- August 30, 2024, First Term

Usia
50 Tahun, per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Langkat Sumatera Utara,11 Februari 1974

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

Pendidikan
- S1 Ekonomi STIEM Bongaya, Makassar (2002)
- Diploma Pelayanan Kepelabuhanan, Ujung Pandang (1996)

Sertifikasi Profesi
- Executive Development Program for BOD-1 (2020)
- Workshop Anti Korupsi Batch 1 (2019)
- Training For The Trainers (2018)
- Expand Leadership Program For BOD/BOC (2017)
- Workshop Building Advance Communicatian and Negotiation (2016)

Riwayat Jabatan
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar New Port (2021-2022)
- Deputy General Manager of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar New Port (2019-2021)
- Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar New Port (2018-2019)
- Senior Vice President of Terminal Services Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018-2018)
- Senior Vice President of Business Development and Tariff Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017-2018)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.
Di luar Perusahaan:
Direktur Operasi dan Teknik PT Terminal Teluk Lamong (2022-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Age
50 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Langkat, North Sumatra, February 11, 1974

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok

Education
- Bachelor's Degree in Economics, STIEM Bongaya, Makassar (2002)
- Diploma in Port Services, Ujung Pandang (1996)

Professional Certifications
- Executive Development Program for BOD-1 (2020)
- Anti-Corruption Workshop Batch 1 (2019)
- Training for the Trainers (2018)
- Expand Leadership Program for BOD/BOC (2017)
- Workshop on Building Advanced Communication and Negotiation Skills (2016)

Career Experience
- General Manager, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar New Port (2021–2022)
- Deputy General Manager, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar New Port Branch (2019–2021)
- Director of Operations and Commercial, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar New Port Branch (2018–2019)
- Senior Vice President of Terminal Services, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018)
- Senior Vice President of Business Development and Tariff, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017–2018)

Concurrent Position
Within the Company:
None
Outside the Company:
Director of Operations and Engineering, PT Terminal Teluk Lamong (2022–present)

Affiliation
Does not have any affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Company's Majority and Controlling Shareholders.

Share Ownership
None


PELINDO
MULTI TERMINAL
PELINDO
MULTI TERMINAL
SAFETY FIRST
BAYDILLAH A
PELINDO



Rino Wisnu Putro

Direktur Utama (02 Juni 2022–1 Maret 2024)
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (18 April 2022–1 Maret 2024)
President Director (June 02, 2022-March 1, 2024)
Acting Director of Commercial and Business Development (April 18, 2022- March 1, 2024)

Indra Hidayat Sani

Direktur Utama
President Director

Bambang Sakti

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HC, and Risk Management

Dwi Rahmad Toto Sugiarto

Direktur Operasi (2 Juni 2022-1 Maret 2024)
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha (1 Maret 2024-2029*))
Plt. Direktur Operasi (30 Agustus 2024-2029*))
Director of Operations (June 2, 2022-March 1, 2024)
Director of Commercial and Business Development (March 1, 2024-2029*))
Acting Director of Operations (August 30, 2024-2029*))

Kalbar Yanto

Direktur Operasional
Director of Operations



PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, komposisi anggota Direksi Perusahaan mengalami perubahan. Alasan perubahan komposisi Direksi karena Alasan perubahan karena penyegaraan Organisasi. Komposisi Direksi PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. Susunan Dewan Komisaris selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Directors underwent changes. The changes were made as part of the organizational restructure process. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Directors of PTP Terminal Nonpetikemas totaling 3 (three) people, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Director of Commercial and Business Development, and 1 (one) Director of Finance, HC, and Risk Management.The detailed composition of the Board of Directors during 2024 is presented in the table below.

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Januari 2024-1 Maret 2024
The Composition of Board of Directors January 1, 2024- March 1, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Rino Wisnu Putra	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor:SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT- 22 dan Nomor: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024 June 02, 2022-March 1, 2024
Rino Wisnu Putra	Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Acting Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-004/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Persetujuan Atas Perubahan Logo Perusahaan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Acting Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-004/PII-SK.D/IV/2022 dated April 18, 2022, regarding the Approval of Changes to the Company Logo and Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	18 April 2022-1 Maret 2024, Periode Ke-1 April 18, 2022- March 1, 2024, FIrst Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Operasi Director of Operations	Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Ke-1 June 2, 2022-March 1, 2024, First Term
Bambang Sakti	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Finance and HC of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Ke-1 June 2, 2022-March 1, 2024, First Term

Susunan Keanggotaan Direksi per 1 Maret 2024-30 Agustus 2024
The Composition of Board of Directors March 1, 2024-August 30, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Indra Hidayat Sani	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024 – 2029*), First Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term
Kalbar Yanto	Direktur Operasi Director of Operations	Ditunjuk sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024, Periode Ke-1 March 1, 2024- August 30, 2024, First Term
Bambang Sakti	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Finance, HC, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024 - 2027*), Periode Ke-1 March 1, 2024 - 2027*), First Term

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentIkan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Susunan Keanggotaan Direksi per 30 Agustus 2024-31 Desember 2024
The Composition of Board of Directors August 30, 2024- December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Indra Hidayat Sani	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024-2029, Periode Ke-1 March 1, 2024 – 2029*), First Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Plt. Direktur Operasi Acting Director of Operations	Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Acting Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 dated August 30, 2024, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1 September 2024-2029*) Periode Ke-1 September 1, 2024-2029*), First Term
Bambang Sakti	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 14 tanggal 30, juni 2022 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 Appointed as Director of Finance, HC, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Number: SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022, regarding Changes in the Management Composition of PT Pelabuhan Tanjung Priok	2 Juni 2022 - 2027*), Periode Ke-1 June 2, 2022-2027*), First Term

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah tahun buku berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE END OF THE FISCAL YEAR

There were no changes in the composition or structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners after the end of the fiscal year until the issuance of this Annual Report.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICER PROFILE

Direktorat Utama (Direktur Utama)

Main Directorate (President Director)



Fiona Sari Utami

SM Sekretaris Perusahaan
Senior Manager of Corporate Secretary

1 Agustus 2024
August 1, 2024

Usia
37 Tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Batusangkar, 7 Juli 1987

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: Kp.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pendidikan
- S1 Ilmu Komunikasi-*Public Relations*, Universitas Padjajaran, Bandung (2009)

Sertifikasi Profesi
- Sertifikasi Humas Manajerial, Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) (2018)
- *International Corporate Communications* (3 bulan), Christelijke Hoogeschool Ede, *University of Applied Sciences*, Ede-Wageningen, Belanda (2016)
- *Container Terminal Management*, Flanders *Government*, Antwerp, Belgia (2014)
- *Port Management, Port of* Rotterdam, Medan (2014)

Pengalaman Kerja
- *Vice President* Humas dan Hubungan Antar Lembaga , PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2024)
- *Public Relations Officer for* PT Pelabuhan Indonesia 1 (persero) (2016-2016)
- *News Presenter (freelance)*, Sindo TV Medan (2011-2014)
- *News Reporter and Presenter for* ANTV dan Trans TV (2009-2010)

Age
37 Years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Batusangkar, July 7, 1987

Citizenship
Indonesian

Domicile
Tangerang Selatan

Legal Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: Kp.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24 regarding Transfer of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Education
- Bachelor's Degree in Communication Science-Public Relations, University of Padjadjaran, Bandung (2009)

Professional Certifications
- Managerial Public Relations Certification, National Professional Certification Agency (BNSP) (2018)
- International Corporate Communications (3 months), Christelijke Hogeschool Ede, University of Applied Sciences, Ede-Wageningen, Netherlands (2016)
- Container Terminal Management, Flanders Government, Antwerp, Belgium (2014)
- Port Management, Port of Rotterdam, Medan (2014)

Work Experience
- Vice President of Public Relations and Inter-Institutional Relations, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016–2024)
- Public Relations Officer, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016)
- News Presenter (freelance), Sindo TV Medan (2011–2014)
- News Reporter and Presenter for ANTV and Trans TV (2009–2010)



M. Susanto Puji Raharjo

SM Perencanaan Strategis
Senior Manager of Strategic Planning

17 Juli 2018
July 17, 2018

Usia
49 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 18 Maret 1975

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Perencanaan Strategis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21

Age
49 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, March 18, 1975

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Strategic Planning based on the Decree of the Board of Directors No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21

Pendidikan
- S2 MSC *in Transport and Maritime Economics* (MTME), Antwerp *University* Belgia (2010)
- S1 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang (1999)

Sertifikasi Profesi
- *Workshop Finetuning* Inisiatif Strategis
- *Workshop* Analisa Keuangan, Operasi, Pemasaran dan Mutu

Pengalaman Kerja
- SVP Perencanaan Strategis PTP (2018-2019)
- Manajer Bidang Strategi Perusahaan dan *Junior Specialist* PTP (2018-2018)
- Pj. SDVP Transformasi Perusahaan Kantor Pusat (2016-2018)
- AKB Transformasi Kantor Pusat (2015-2015)
- AKB. SP Bidang Perencanaan Strategis Kantor Pusat (2015-2015)

Education
- Master of Science (MSc) in Transport and Maritime Economics (MTME), University of Antwerp, Belgium (2010)
- Bachelor's Degree in Civil Engineering, University of Brawijaya, Malang (1999)

Professional Certifications
- Workshop on Finetuning Strategic Initiatives
- Workshop on Financial, Operational, Marketing, and Quality Analysis

Work Experience
- Senior Vice President of Strategic Planning, PTP (2018–2019)
- Manager of Corporate Strategy and Junior Specialist, PTP (2018-2018)
- Acting Senior Deputy Vice President of Corporate Transformation, Head Office (2016–2018)
- AKB Corporate Transformation, Head Office (2015-2015)
- AKB SP Strategic Planning, Head Office (2015-2015)



Heru Susetyohadi

Plh SM Pengawasan Internal & Hukum
Acting Senior Manager Internal Audit & Legal

27 Desember 2024
December 27, 2024

Usia
54 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Sleman, 11 Desember 1970

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Plh SM Pengawasan Internal & Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 tanggal 24 Desember 2024

Pendidikan
Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1995)

Sertifikasi Profesi
Sertifikasi Profesi QIA Tingkat Manajerial

Pengalaman Kerja
- Auditor Anak Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (Anak Perusahaan) (2021– sekarang)
- *Vice President Treasury & Corporate Finance* PT Pelabuhan Tanjung Priok (Anak Perusahaan) (2020-2021)
- Deputi *Vice President* Pusat Layanan Keuangan Pelanggan (2018-2020)
- Deputi *General Manager* Keuangan dan SDM Cabang Teluk Bayur (2017-2018)
- Keuangan dan Pajak PT IPC Terminal Petikemas (Anak Perusahaan) (2015-2017)

Age
54 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Sleman, December 11, 1970

Citizenship
Indonesian

Domicile
Bekasi

Legal Basis of Appointment
Appointed as Acting Senior Manager of Internal Audit & Legal based on Decree Number: KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 dated December 24, 2024.

Education
Bachelor's Degree (S1) in Management, University of Gadjah Mada (1995)

Professional Certifications
Qualified Internal Auditor (QIA) – Managerial Level

Work Experience
- Subsidiary Auditor at PT Pelabuhan Tanjung Priok (Subsidiary) (2021–present)
- Vice President of Treasury & Corporate Finance, PT Pelabuhan Tanjung Priok (Subsidiary) (2020–2021)
- Deputy Vice President of Customer Financial Services Center (2018–2020)
- Deputy General Manager of Finance and Human Resources, Teluk Bayur Branch (2017–2018)
- Finance and Taxation Department, PT IPC Terminal Petikemas (Subsidiary) (2015–2017)

Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha

Directorate Commercial and Business Development



Muhammad Noordin

SM Pemasaran & *Customer Relation*
Senior Manager of Marketing & Customer Relations

5 September 2023
September 5, 2023

Usia
53 tahun per 31 Desember 2023

Tempat dan Tanggal Lahir
Tanah Merah, 22 November 1971

Kewarganegaraan
Indonesia

Age
53 years old as of December 31, 2023

Place and Date of Birth
Tanah Merah, November 22, 1971

Citizenship
Indonesian

Domisili
Medan, Sumatera Utara

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Pemasaran dan Customer Relation berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/5/9/5/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 05 September 2023.

Pendidikan
- S2 Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara (2005)
- S1 Hukum Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara (1995)

Sertifikasi Profesi
- *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) (2023)
- *Certified Professional in Organization Development* (CPOD) (2022)
- Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan *Batch* II (2020)

Pengalaman Kerja
- SVP Hukum PT Pelindo Multi Terminal (2021-2023)
- SVP Hukum PT Pelindo 1 (Persero) (2020-2021)

Domicile
Medan, North Sumatera

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Marketing and Customer Relations based on the Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/5/9/5/RKTK/SDMA/PLND-23 dated September 5, 2023.

Education
- Master's Degree in Notarial Studies, University of Sumatera Utara (2005)
- Bachelor's Degree in State Administrative Law, University of Sumatera Utara (1995)

Professional Certifications
- Qualified Chief Risk Officer (QCRO) (2023)
- Certified Professional in Organization Development (CPOD) (2022)
- Port Expert Certification Training, Batch II (2020)

Work Experience
- Senior Vice President of Legal Affairs, PT Pelindo Multi Terminal (2021–2023)
- Senior Vice President of Legal Affairs, PT Pelindo I (Persero) (2020–2021)



Hartono

SM Pengembangan Usaha
Senior Manager of Business Development

22 Oktober 2024
October 22, 2024

Usia
54 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Sragen, 06 September 1970

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi, Jawa Barat

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Pengembangan Usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/22/10/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pendidikan
S1 Ilmu Hukum, Universitas Jakarta (2012)

Sertifikasi Profesi
- *Business Feasibility Study Batch* I
- *Health & Safety Fundamental Batch* 12 & 13
- *Change Agent Development Program Batch* 7

Pengalaman Kerja
- ASM Kerjasama & Portofolio Usaha PTP (2023)

Age
54 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Sragen, September 06, 1970

Citizenship
Indonesian

Domicile
Bekasi, West Java

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Business Development based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/22/10/1/RKTK/SDMA/PLND-24 regarding the Transfer of Duties/Positions within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Education
Bachelor's Degree in Law, University of Jakarta (2012)

Professional Certifications
- Business Feasibility Study, Batch I
- Health & Safety Fundamental, Batches 12 & 13
- Change Agent Development Program Batch 7

Work Experience
- Assistant Senior Manager of Business Cooperation and Portfolio, PTP (2023)

Direktorat Operasi

Directorate of Operations



Panji Bharata Tjahjo Tunggul

SM Operasi
Senior Manager of Operations

1 Februari 2019
February 1, 2019

Usia
48 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 08 Mei 1976

Kewarganegaraan
Indonesia

Age
48 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, May 08, 1976

Citizenship
Indonesian

Domisili
Bekasi, Jawa Barat

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Februari 2019

Pendidikan
- Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2002-2005)
- S1 Teknik Mesin, Trisakti Jakarta (1994-2000)

Sertifikasi Profesi
- Penanganan Kargo Berbahaya dan Beracun
- *Workshop Finetuning* Inisiatif Strategis
- Penyusunan Modul *Training* Nonpetikemas
- Sertifikasi *Training for Trainer Batch* 3
- *Workshop* Analisa Keuangan, Operasi, Pemasaran dan Mutu

Pengalaman Kerja
- Manajer Cabang, PT SAN, Cabang Belawan (2018-2019)
- Kepala Sekretaris Perusahaan, PT SAN, Kantor Pusat Medan (2016-2018)
- Wakil Manajer Cabang, PT SAN, Cabang Belawan (2013-2016)

Domicile
Bekasi, West Java

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Operations based on the Director of the Board of Directors No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated February 1, 2019.

Education
- Master's Degree in Agribusiness Management, IPB University, Bogor (2002–2005)
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Trisakti University, Jakarta (1994–2000)

Professional Certifications
- Handling of Hazardous and Toxic Cargo
- Strategic Initiative Finetuning Workshop
- Non-Container Cargo Training Module Development
- Training for Trainer Certification, Batch 3
- Workshop on Financial, Operational, Marketing, and Quality Analysis

Work Experience
- Branch Manager, PT SAN, Belawan Branch (2018–2019)
- Head of Corporate Secretary, PT SAN, Head Office Medan (2016–2018)
- Deputy Branch Manager, PT SAN, Belawan Branch (2013–2016)



Pramujaya Simbolon

SM Teknik
Senior Manager of Engineering

31 Juli 2023
July 31, 2023

Usia
50 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Pematangsiantar, 12 Maret 1974

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Medan, Sumatera Utara

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Teknik berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/31/7/1/RKTK/PLND-23 tanggal 31 Juli 2023.

Pendidikan
- S1 Teknik Mesin, STT Harapan Medan, Medan (2002)
- D3 Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Medan (Politeknik USU), Medan (1996)

Sertifikasi Profesi
- *Certified Port Expert*
- Pelatihan Sistem Proteksi Petir
- *Young Leader Transformation Program*
- *Developing Customer Focus Team*
- *Workshop Certified Professional Trainers*

Pengalaman Kerja
- SVP Peralatan Pelabuhan Direktorat Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2021-2023)
- SVP Peralatan di Direktorat Teknik Kantor Pusat (2019-2021)
- ASM Alat Bongkar Muat di Divisi Peralatan Kantor Pusat (2017-2019)
- Manajer Teknik Cabang Dumai (2015-2017)

Age
50 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Pematangsiantar, March 12, 1974

Citizenship
Indonesian

Domicile
Medan, North Sumatra

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Engineering based on the Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/31/7/1/RKTK/PLND-23 dated July 31, 2023.

Education
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, STT Harapan Medan, Medan (2002)
- Diploma 3 in Energy Conversion Engineering, Medan State Polytechnic (Politeknik USU), Medan (1996)

Professional Certifications
- Certified Port Expert
- Lightning Protection System Training
- Young Leader Transformation Program
- Developing Customer Focus Team
- Certified Professional Trainers Workshop

Work Experience
- Senior Vice President of Port Equipment, Directorate of Engineering, PT Pelindo Multi Terminal (2021–2023)
- Senior Vice President of Equipment, Directorate of Engineering, Head Office (2019–2021)
- Assistant Senior Manager of Loading and Unloading Equipment, Equipment Division, Head Office (2017–2019)
- Technical Manager, Dumai Branch (2015–2017)



Meirisal Dwi Waldi

SM Sistem Informasi
Senior Manager of Information System

2 September 2024
September 2, 2024

Usia
36 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 24 Mei 1988

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Sistem Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/9/2/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 2 September 2024

Pendidikan
- *Master of Science* (MSc), Coventry University (2015)
- Sarjana Teknik, Universitas Indonesia (2010)

Sertifikasi Profesi
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), IPC
- MDP I - *Managing The Business* Tahun 2020 *Batch* II, IPC
- *Officer Development Program Batch I,* IPC

Pengalaman Kerja
- Plt. SM Sistem Informasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (Agustus 2023 - Agustus 2024)
- SM Perencanaan dan Implementasi Proyek PT. ILCS (2020 – 2023)
- ADGM Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (2017-2020)
- Staff Sistem Informasi Kantor Pusat (2011-2017)

Age
36 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, May 24, 1988

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of Information Systems based on the Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/2/9/2/RKTK/SDMA/PLND-24 date September 2, 2024

Education
- Master of Science (MSc), Coventry University (2015)
- Bachelor of Engineering, University of Indonesia (2010)

Professional Certifications
- Efficiency in the Use of Natural Resources, IPC
- MDP I - Managing the Business, 2020 Batch II, IPC
- Officer Development Program Batch I, IPC

Work Experience
- Acting Senior Manager of Information Systems PT Pelabuhan Tanjung Priok (August 2023 - August 2024)
- Senior Manager of Project Planning and Implementation, PT ILCS (2020–2023)
- Assistant Deputy General Manager of Information Systems, Teluk Bayur Port Branch (2017–2020)
- Information Systems Staff, Head Office (2011–2017)

Direktorat Keuangan SDM dan Manajemen Risiko

Directorate of Finance, HC, and Risk Management



Achmad Nugroho Hariyadi

SM Keuangan dan Manajemen Risiko
Senior Manager of Finance and Risk Management

2 April 2023
April 2, 2023

Usia
39 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Palembang, 20 Juni 1985

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, DKI Jakarta,

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/4/3/RKTK/SDMA/PLND- 23 tanggal 02 April 2023.

Pendidikan
S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (2006)

Sertifikasi Profesi
Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan IPC, Tahun 2020, *Batch* 3 *Online*

Pengalaman Kerja
- *Departement Head* Akuntansi Regional (2021-2021)
- DVP Akuntansi Umum & Sistem Keuangan Kantor Pusat (2020-2020)
- *Budgeting, Accounting & Tax Manager* PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2019-2020)

Age
39 years old as of December 31, 2024

Place and Date of Birth
Palembang, June 20, 1985

Citizenship
Indonesian

Domicile
Jakarta, DKI Jakarta,

Legal Basis of Appointment
Appointed as the Senior Manager of Finance based on the Decree of the Board of Directors No. No. KP.10.02/2/4/3/RKTK/SDMA/PLND- 23 dated on April 02, 2023.

Education
Bachelor's Degree in Accounting, University of Gadjah Mada (2006)

Professional Certifications
Certified Port Expert, IPC, 2020, Batch 3 Online

Work Experience
- Department Head Regional Accounting (2021)
- Deputy Vice President of General Accounting & Financial Systems, Head Office (2020)
- Budgeting, Accounting & Tax Manager, PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2019–2020)



Miftah Nurzanah

SM SDM & Umum
Senior Manager of HC & General Affairs

5 September 2023
September 5, 2023

Usia
37 tahun per 31 Desember 2024

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 29 Oktober 1987

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi, Jawa Barat

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SM SDM & Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/5/9/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 5 September 2023

Pendidikan
- M.Sc. World Maritime University (2013)
- S.Psi Psikologi, Universitas Indonesia (2010)

Sertifikasi Profesi
Certified Human Resources Program

Pengalaman Kerja
SM SDM & Umum ILCS (2021-2023)

Age
37 years old as of December 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, October 29, 1987

Citizenship
Indonesian

Domicile
Bekasi, West Java

Legal Basis of Appointment
Appointed as Senior Manager of HC & General Affairs based on the Decree of the Board of Directors No.KP.10.02/5/9/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated September 5, 2023

Education
- Master of Science, World Maritime University (2013)
- Bachelor's Degree in Psychology, University of Indonesia (2010)

Professional Certifications
Certified PI/PLI Analyst

Work Experience
Senior Manager of HC & General Affairs, ILCS (2021–2023)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengelolaan SDM yang mengatur berbagai aspek terkait manajemen SDM, yang terdiri dari:

1. Perencanaan, yaitu Analisa Beban Kerja, Struktur Organisasi, Nomenklatur, *Job Description*, Direktori Kompetensi;
2. Pemenuhan, yaitu pemenuhan kekuatan SDM bersumber dari:
   a. Internal: Pegawai Pelindo yang ditugaskan di anak perusahaan, dan rekrutmen pegawai PTP Terminal Nonpetikemas;
   b. Eksternal: Tenaga Alih Daya (TAD), dan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
3. Pemeliharaan, yaitu Penilaian Performansi Bulanan (P2B), jaminan kesehatan, layanan SDM;
4. Pengembangan, yaitu pelatihan internal PTP Terminal Nonpetikemas, pelatihan pegawai Pelindo, Promosi dan *Talent Management*.

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan dan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bisnis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan standar kualitas dalam pengelolaan talenta yang dimiliki. Selain itu, kebijakan

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

The Company has established a Human Capital (HC) management policy that regulates various aspects related to HC management, consisting of:

1. Planning, including Workload Analysis, Organizational Structure, Nomenclature, Job Descriptions, and Competency Directory;
2. Fulfillment, involving the fulfillment of HC needs sourced from:
   a. Internal: Pelindo employees assigned to subsidiaries and recruitment of PTP Terminal Nonpetikemas employees;
   b. External: Outsourced Personnel (TAD) and Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) employees;
3. Maintenance, including Monthly Performance Assessment (P2B), health insurance, and HC services;
4. Development, including internal training at PTP Terminal Nonpetikemas, Pelindo employee training, Promotion, and Talent Management.

The Company continuously evaluates all Human Capital (HC) activities and policies in accordance with organizational and business needs. It is conducted to enhance the quality standards in talent management. Furthermore, the HC management policy refers to the agreement between Pelindo and PTP Terminal

pengelolaan SDM mengacu kepada perjanjian antara Pelindo dengan PTP Terminal Nonpetikemas tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja Pelindo yang ditugaskan pada PTP Terminal Nonpetikemas No: OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/ PI.II-19 dan No: HK.566/15/11/1/PTP-19 tanggal 15 November 2019.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM di Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan SDM sebagaimana ditetapkan dalam Struktur Organisasi PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.05.01/29/2/2/SDMA/ DIRU/PTP-24 tentang struktur organisasi, nama jabatan dan uraian jabatan pada kantor pusat di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

Berikut struktur organisasi pengelola SDM di lingkup Perusahaan, per 31 Desember 2024.

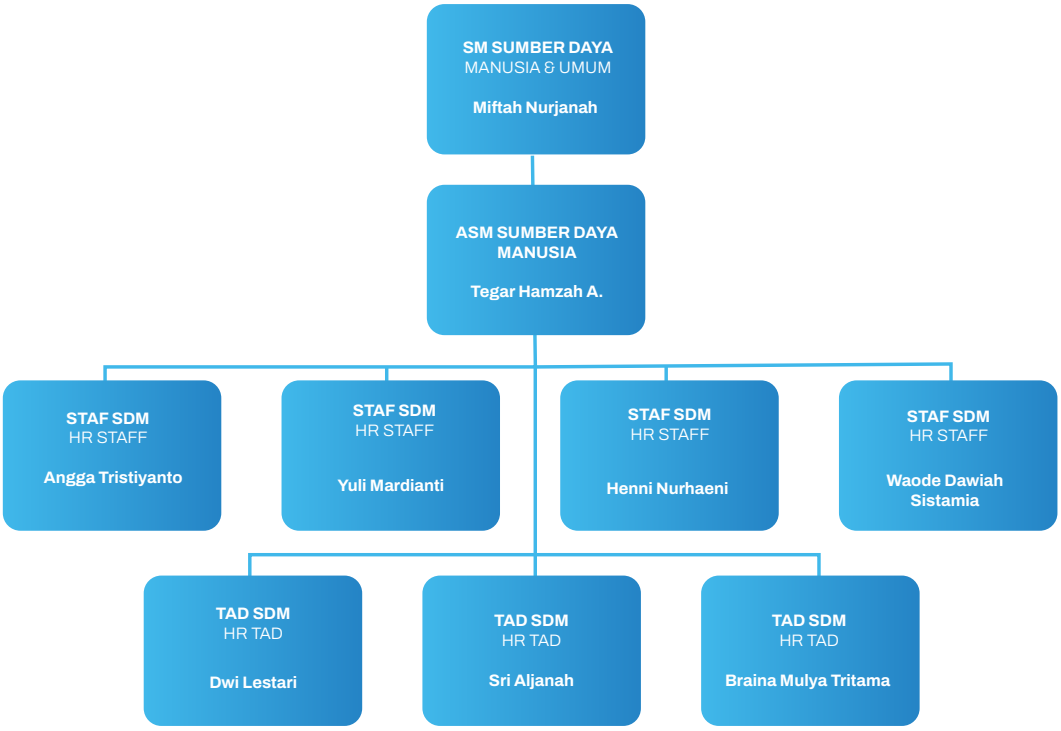
Nonpetikemas regarding the Assignment and Development of Pelindo Employees assigned to PTP Terminal Nonpetikemas No: OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19 and No: HK.566/15/11/1/PTP-19 dated November 15, 2019.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The HC management within the Company is carried out by the Human Capital and General Affairs Division, which reports directly to the Director of Finance and Human Capital, as stipulated in the Organizational Structure of PTP Terminal Nonpetikemas as of December 31, 2024 stipulated in Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: KP.05.01/29/2/2/SDMA/ DIRU/PTP -24 regarding the organizational structure, position titles, and job descriptions at the head office of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The following is the organizational structure of HC management within the Company as of December 31, 2024.

Struktur Organisasi Pengelola SDM,
HR Management Organizational Structure



PROGRAM REKRUTMEN KARYAWAN DAN KEBIJAKANNYA

Melalui program rekrutmen yang baik, Perusahaan dapat memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kompetensi maupun karakter guna semakin meningkatkan Bisnis dari PTP Terminal Nonpetikemas. Selama proses rekrutmen ini peran Divisi SDM dan Umum sangat besar untuk dapat menyeleksi bibit unggul yang berkarakter sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan.

Kebijakan program rekrutmen PTP Terminal Nonpetikemas adalah dengan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh talenta talenta yang berasal dari semua wilayah

EMPLOYEE RECRUITMENT PROGRAM AND POLICY

Through a well-structured recruitment program, the Company is able to acquire human capital (HC) that match its needs, both in terms of competencies and character, in order to further enhance the business of PTP Terminal Nonpetikemas. Throughout the recruitment process, the role of the Human Capital and General Affairs Division is crucial in selecting outstanding candidates whose character aligns with the Company's needs.

The recruitment policy of PTP Terminal Nonpetikemas is to provide equal opportunities to talents from all regions of Indonesia. PTP Terminal Nonpetikemas believes in the capabilities of

Indonesia. Di dalam hal ini, PTP Terminal Nonpetikemas yakin pada kemampuan talenta muda yang dimiliki bangsa Indonesia dan mengembangkan putera daerah tanpa membedakan gender, etnik, ras, agama maupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/2/1/3/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja yang kosong dan/atau akan kosong, dan rencana bisnis Perusahaan dalam rangka menjamin kontinuitas ketersediaan karyawan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan secara adil, dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada siapa pun agar dapat berkarier di PTP Terminal Nonpetikemas. Pemenuhan kebutuhan karyawan melalui sumber internal maupun sumber eksternal, dilakukan dengan program atau jalur sebagai berikut:

1. Penugasan pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PTP Terminal Nonpetikemas;
2. Tenaga Kerja Alih Daya (TAD);
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Penugasan pegawai Pelindo pada PT Pelabuhan Tanjung Priok diatur berdasarkan Peraturan Direksi No. HK.01/29/6/1/ PSOS/DIRU/ PLMT/22 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

Proses rekrutmen Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) diatur berdasarkan Surat Perjanjian Anak No. KS.02/21/3/1/SDMA/DIRU/PTP-23 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/17/12/6/ PTP-20 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah melakukan pemenuhan kebutuhan karyawan tidak tetap melalui pemenuhan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 9 orang yang merupakan pengalihan TNO dari Pelindo Grup, sedangkan untuk karyawan tetap yang mendapatkan penugasan dari Pelindo tidak ada penambahan karyawan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Guna meningkatkan produktivitas operasional dan kematangan organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya, maka Perusahaan harus mempersiapkan program pengembangan kompetensi SDM. Melalui program pelatihan maupun sertifikasi sesuai bidang masing-masing pegawai, dengan menganut prinsip-prinsip sesuai Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/2/1/1/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

the Indonesian youth and is committed to developing local talents without discrimination based on gender, ethnicity, race, religion, or physical condition. This policy is regulated under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: HK.55/2/1/3/PTP-18 dated January 2, 2018 concerning Guidelines for Recruitment within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Recruitment is carried out to obtain employees who meet the required competencies to fill vacant or soon to be vacant positions, and to support the Company's business plans in ensuring continuity of workforce availability to support operations, enhance performance, and achieve the Company's vision and mission. The recruitment process is conducted fairly by providing equal opportunities for everyone to pursue a career at PTP Terminal Nonpetikemas. The fulfillment of employee needs through internal and external sources is carried out through the following programs or pathways:

1. Assignment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) employees to PTP Terminal Nonpetikemas;
2. Outsourced Personnel (TAD);
3. Fixed-Term Employment Agreements (PKWT).

The assignment of Pelindo employees to PT Pelabuhan Tanjung Priok is regulated under the Board of Directors Regulation No. HK.01/29/6/1/PSOS/DIRU/PLMT/22 dated June 29, 2022 regarding Human Capital (HC) Management Policies for Subsidiaries, Affiliated Companies, and Joint Operations (KSO) within PT Pelindo Multi Terminal.

The recruitment process for Outsourced Personnel (TAD) is regulated under Child Agreement Letter No. KS.02/21/3/1/SDMA/DIRU/PTP-23 dated March 21, 2023 concerning the Provision of Outsourced Personnel Services within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The recruitment process for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) is regulated under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/17/12/6/PTP-20 dated December 17, 2020 concerning Guidelines for Recruitment of Fixed-Term Employment within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Throughout 2024, the Company fulfilled the need for non-permanent employees by engaging 9 outsourced personnel, which were transferred from the Pelindo Group. Meanwhile, for permanent employees, while permanent employees assigned from Pelindo did not experience any increase in numbers.

COMPETENCY DEVELOPMENT

To enhance operational productivity and organizational maturity for more effective and efficient achievement of its vision and mission, the Company must implement a HC competency development program. It is conducted through training and certification programs aligned with each employee's area of expertise, adhering to the principles stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: HK.55/2/1/1/PTP-18 dated January 2, 2018 concerning Employee Development within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terfokus, berdasarkan strategi pengelolaan SDM;
2. Terencana, sesuai hasil pemetaan, arah dan prioritas pengembangan;
3. Efektif dan efisien, pemilihan mengutamakan program pengembangan yang tepat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

The guiding principles are as follows:
1. Focused, based on HC management strategies;
2. Planned, according to mapping results, development directions, and priorities;
3. Effective and Efficient, prioritizing the selection of appropriate development programs while considering budget availability.

Karyawan Pelindo penugasan pada PTP Terminal Nonpetikemas diberikan saldo *learning e-wallet* untuk pengembangan kompetensi pribadi karyawan sesuai kebutuhan individu. Sedangkan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perusahaan berfokus pada kebutuhan kompetensi terkait *core business* Perusahaan.

Pelindo employees assigned to PTP Terminal Nonpetikemas are provided with a learning e-wallet balance to support their personal competency development according to individual needs. Meanwhile, the competency development initiatives carried out by the Company focus on developing competencies related to the Company's core business.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2024
Competency Development in 2024

Level Jabatan Position Level	**Jenis Pendidikan atau Pelatihan** Type of Education or Training	**Nama Pendidikan atau Pelatihan** Name of Education or Training	**Tujuan Pendidikan atau Pelatihan** Objective of Education or Training	**Jumlah Peserta** Participants Name	**Komposisi Peserta** Participants Composition	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organizational Level	**Berdasarkan Jenis Pelatihan (%)** Based on Type of Training
Senior Manager Branch Manager	*GENERAL*	*Workshop* Nasional Komite Anti Korupsi National Workshop of the Anti-Corruption Committee	*KNOWLEDGE*	1	0,16%	0,16%
Assistant Senior Manager Deputy Manager	*ADVANCED SKILL*	Qualified Internal Audit Tingkat Manajerial Managerial-Level Qualified Internal Audit	SERTIFIKASI CERTIFICATION	1	1,28%	0,16%
Assistant Senior Manager Deputy Manager	*ADVANCED SKILL*	Pelatihan Qualified *Risk Management Officer Analyst* (QRMA) Qualified Risk Management Officer Analyst (QRMA) Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	2	1,28%	0,32%
	ADVANCED SKILL	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced-Level QIA Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	1		0,16%
	ADVANCED SKILL	*Workshop Subject Matter Expert & Community of Practice* Subject Matter Expert & Community of Practice Workshop	KOMPETENSI COMPETENCY	4		0,64%
Supervisor	*ADVANCED SKILL*	Pelatihan IMO OPRC Level 3 IMO OPRC Level 3 Training	KOMPETENSI COMPETENCY	6	0,96%	0,96%

Pengembangan Kompetensi Tahun 2024
Competency Development in 2024

Level Jabatan Position Level	**Jenis Pendidikan atau Pelatihan** Type of Education or Training	**Nama Pendidikan atau Pelatihan** Name of Education or Training	**Tujuan Pendidikan atau Pelatihan** Objective of Education or Training	**Jumlah Peserta** Participants Name	**Komposisi Peserta** Participants Composition	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organizational Level	**Berdasarkan Jenis Pelatihan (%)** Based on Type of Training
Pelaksana Staff	*BASIC SKILL*	Pelatihan ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Training	KOMPETENSI COMPETENCY	1		0,16%
	BASIC SKILL	Pelatihan ISO 39001:2015 ISO 39001:2015 Training	KOMPETENSI COMPETENCY	1		0,16%
	BASIC SKILL	Pelatihan ISO 9001, 14001 & 45001 ISO 9001, 14001 & 45001 Training	KOMPETENSI COMPETENCY	2		0,32%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan Internal Auditor ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Internal Auditor Training for ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018	KOMPETENSI COMPETENCY	1		0,16%
	GENERAL	Pelatihan *Awareness for* ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, SMK3 & Proper Awareness Training for ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, SMK3 & PROPER	*KNOWLEDGE*	208		33,28%
	GENERAL	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Training ISO 37001:2016	*KNOWLEDGE*	26		4,16%
	BASIC SKILL	Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301 Compliance Management Training ISO 37301	KOMPETENSI COMPETENCY	30	72,80%	4,80%
	BASIC SKILL	Pelatihan Anti *Bribery Management System* Anti-Bribery Management System Training	KOMPETENSI COMPETENCY	4		0,64%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan Internal Audit Tingkat Dasar Basic Level Internal Audit Training	KOMPETENSI COMPETENCY	1		0,16%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	3		0,48%
	ADVANCED SKILL	Sertifikasi QIA Tingkat Dasar Basic QIA Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	1		0,16%
	ADVANCED SKILL	Sertifikasi Brevet Pajak Tax Brevet Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	1		0,16%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan *Knowledge Management* Knowledge Management Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	14		2,24%
	BASIC SKILL	Pelatihan Manajemen Risiko Risk Management Training	KOMPETENSI COMPETENCY	22		3,52%
	GENERAL	Pelatihan Pilot Drone Drone Pilot Training	KOMPETENSI COMPETENCY	49		7,84%

Pengembangan Kompetensi Tahun 2024
Competency Development in 2024

Level Jabatan Position Level	**Jenis Pendidikan atau Pelatihan** Type of Education or Training	**Nama Pendidikan atau Pelatihan** Name of Education or Training	**Tujuan Pendidikan atau Pelatihan** Objective of Education or Training	**Jumlah Peserta** Participants Name	**Komposisi Peserta** Participants Composition	
					Berdasarkan Level Organisasi (%) Based on Organizational Level	**Berdasarkan Jenis Pelatihan (%)** Based on Type of Training
Pelaksana Staff	*BASIC SKILL*	Pelatihan dan *Workshop* Organization Health *& Human Capital Assessment Workshop* Training and Workshop on Organization Health & Human Capital Assessment Workshop	KOMPETENSI COMPETENCY	4		0,64%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan Dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Basic Domestic Component Level (TKDN) Training	KOMPETENSI COMPETENCY	10		1,60%
	BASIC SKILL	Pelatihan Studi Kelayakan Usaha Tingkat Dasar Basic Business Feasibility Study Training	KOMPETENSI COMPETENCY	4	72,80%	0,64%
	BASIC SKILL	Pelatihan *Ready to Retire* Ready to Retire Training	KOMPETENSI COMPETENCY	30		4,80%
	SOFT SKILL	*Workshop* Validasi *Knowledge Taxonomy* Knowledge Taxonomy Validation Workshop	KOMPETENSI COMPETENCY	10		1,60%
	BASIC SKILL	Sertifikasi BNSP *Draught Survey* BNSP Draught Survey Certification	*KNOWLEDGE*	33		5,28%
Operasional Operational	*ADVANCED SKILL*	Sertifikasi PFSO - ISPS *Code* PFSO - ISPS Code Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	38		6,08%
	BASIC SKILL	Pelatihan IMO OPRC Level 1 IMO OPRC Level 1 Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	19		3,04%
	BASIC SKILL	Pelatihan IMO OPRC Level 2 IMO OPRC Level 2 Training	KOMPETENSI COMPETENCY	11	24,80%	1,76%
	ADVANCED SKILL	Sertifikasi SIO GLC SIO GLC Certification	KOMPETENSI COMPETENCY	6		0,96%
	ADVANCED SKILL	Sertifikasi SIO *Over Head Crane* SIO Over Head Crane Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	9		1,44%
Operasional Operational I	*ADVANCED SKILL*	Sertifikasi SIO *Mobile Crane* SIO Mobile Crane Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	36		5,76%
	ADVANCED SKILL	Pelatihan Ahli K3 Umum General OSH Expert Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	5		0,80%
	BASIC SKILL	Sertifikasi SKP AK3U SKP AK3U Certification	KOMPETENSI COMPETENCY	4	24,80%	0,64%
	BASIC SKILL	Sertifikasi IMDG IMDG Certification	SERTIFIKASI CERTIFICATION	10		1,60%
	BASIC SKILL	Pelatihan *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Training	SERTIFIKASI CERTIFICATION	17		2,72%

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perusahaan terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu komitmenya adalah menyediakan anggaran untuk program pengembangan kompetnsi karyawan secara berkelanjutan. Berikut adalah realisasi biaya pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.117.986.900 mengalami kenaikan 25,35% atau setara dengan Rp428.326.495 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1.689.660.405.

Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The Company continues to make efforts to enhance the capabilities and quality of its human resources. As part of its commitment, the Company allocates a budget for ongoing employee competency development programs. In 2024, the total realization of training and development expenses amounted to Rp2,117,986,900, marking an increase of 25.35% or Rp428,326,495 compared to Rp1,689,660,405 in 2023.

The total employee competency development costs are detailed in the table below.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Costs

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Perbandingan Realisasi 2024 dan 2023 Comparison of 2024 and 2023 Realization	
			Selisih (Rp) Difference (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Pengembangan Kompetensi Competency Development	2.117.986.900	1.689.660.405	428.326.495	25,35

PENILAIAN KINERJA DAN KEBIJAKANNYA

Setiap tahun Perusahaan melakukan pengukuran kinerjasesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KP.05.02/26/9/1/SDMA/DIRU/PTP-2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Implementasi penilaian kinerja karyawan menjadi sarana pengembangan diri bagi karyawan sekaligus sarana bagi Perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas sistem-sistem dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Perusahaan, Pelaksanaan pengukuran kinerja menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya berperan menjadi acuan bagi karyawan maupun Perusahaan dalam menciptakan kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan penilaian atas unjuk kerja dan kompetensi karyawan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan atas remunerasi dan pengembangan kompetensi karyawan yang bersangkutan. Di mana, remunerasi karyawan dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL AND POLICY

Annually, the Company conducts performance evaluations based on the Key Performance Indicators (KPI) established under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KP.05.02/26/9/1/SDMA/DIRU/PTP-2023 dated September 26, 2023 concerning Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Tanjung Priok. The implementation of employee performance appraisals serves as a means for personal development as well as a tool for the Company to assess the effectiveness of its systems and policies. The performance appraisals process generates recommendations that later serve as a reference for both employees and the Company in fostering improved performances. Furthermore, the results of employee performance and competency evaluations are used as considerations for determining remuneration and competency development of the respective employees. Employee remuneration is carried out fairly and transparently in accordance with applicable regulations.

REMUNERASI DAN KEBIJAKANNYA

Perusahaan memahami bahwa kompensasi dan *benefit* yang diberikan kepada karyawan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran karyawan. Oleh karenanya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan karyawan dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara karyawan dan Perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

PTP Terminal Nonpetikemas telah menyusun kebijakan terkait remunerasi dalam Peraturan Direksi No. HK.55/1/9/2/PTP-21 tanggal 1 September 2021 tentang Pedoman Penghasilan Bagi Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok dan Peraturan Direksi No. HK.55/17/12/8/PTP-20 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penghasilan Non-Bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok.

REMUNERATION AND POLICY

The Company recognizes that compensation and benefits provided to employees significantly influence work productivity and employee turnover rates. Therefore, the Company consistently prioritizes employee welfare by striving to meet their needs, fostering a mutually beneficial relationship that encourages employee engagement and synergy to achieve common goals.

PTP Terminal Nonpetikemas has established policies related to remuneration through Board of Directors Regulation No. HK.55/1/9/2/PTP-21 dated September 1, 2021 on Guidelines for Earnings for Employees of PT Pelabuhan Tanjung Priok, and Board of Directors Regulation No. HK.55/17/12/8/PTP-20 dated December 17, 2020 on Non-Monthly Earnings for Employees of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PENGEMBANGAN KARIER

Perusahaan berupaya untuk dapat mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki Perusahaan, salah satu upayanya adalah menyediakan jenjang karier yang jelas. Karenanya, Perusahaan memperhatikan kebutuhan pengembangan karyawan melalui hasil pembinaan sebagai bagian dari evaluasi kerja dan penilaian kompetensi yang memunculkan kebutuhan pelatihan sesuai kondisi operasional di lapangan. Setiap Pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan Perusahaan itu sendiri, *job family* atas jabatan, kemampuan, tingkat kinerja, *talent classification*, *job grade* maupun *individual grade*, dan beberapa persyaratan lainnya. Beberapa jenis pengembangan karier yang ada di Perusahaan yaitu diatur dalam Peraturan Direksi Nomor HK.55/2/1/5/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pola Karir Jabatan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

CAREER DEVELOPMENT

The Company strives to retain its best talents by providing clear career pathways. Therefore, the Company places great importance on employee development needs through mentoring results as part of work evaluations and competency assessments, identifying training needs based on operational conditions in the field. Every employee is given equal opportunities to grow and develop, taking into account several factors such as the Company's needs, the job family on positions, capabilities, performance levels, talent classification, job grades, and other relevant requirements. Various types of career development within the Company are regulated under the Board of Directors Regulation No. HK.55/2/1/5/PTP-18 dated January 2, 2018 concerning Career Path Patterns at PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF

Perusahaan menyadari bahwa pembentukan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan ide-ide kreatif dari pegawai yang mana juga untuk kemajuan Perusahaan. Sebagai implementasinya, Perusahaan menyediakan beberapa program dan fasilitas, yaitu sebagai berikut:

1. PTP *Innovation*, berupa program budaya Kompeten yang berbentuk *Innovation Management System* (IMS) yang berfungsi sebagai penyedia wadah bagi para pegawai untuk berinovasi. Ide pemenang kompetisi inovasi akan diimplementasikan di dalam perusahaan;
2. Adanya fasilitas berupa:
   a. Fasilitas tempat ibadah;
   b. Fasilitas ruang menyusui;
   c. Fasilitas Kesehatan P3K;
   d. Toilet Disabilitas;
   e. *Pantry*;
   f. Ruang Rapat;
   g. Alat Elektronik.

CREATING CONDUCIVE WORK ENVIRONMENT

The Company recognizes that creating a conducive work environment is a key factor in enhancing employee productivity and encouraging creative ideas for the Company's advancement. As part of its implementation, the Company provides several programs and facilities, including:

1. PTP Innovation, a Competence Culture Program in the form of an Innovation Management System (IMS) that serves as a platform for employees to innovate. Winning ideas from the innovation competition are implemented within the Company;
2. Facilities provided:
   a. Worship facilities;
   b. Nursing rooms;
   c. First Aid (P3K) health facilities;
   d. Disability-friendly restrooms;
   e. Pantries;
   f. Meeting rooms;
   g. Electronic equipment.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan terus berkomitmen untuk membangun serta memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, dan Perusahaan. Hubungan tersebut dilandasi pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hal tersebut dilakukan dengan komunikasi intensif dan keterlibatan antara Perusahaan dan karyawan dalam mencapai target Perusahaan yang telah dirancang.

PTP Terminal Nonpetikemas berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu tanggal 29 September 2021;

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company remains committed to building and maintaining healthy and harmonious industrial relations, fostering a constructive working system between employees and the Company. Such relationships are based on mutual respect to create a balance between fulfilling rights and carrying out obligations. This is achieved through intensive communication and engagement between the Company and employees to meet the Company's predetermined targets.

PTP Terminal Nonpetikemas aims to establish labor relations complying with the applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 21 of 2000 on Labor/Labor Unions;
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
3. Articles of Association and Bylaws of the United Indonesian Port Workers Union (SPPI Bersatu) dated September 29, 2021;

4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu Nomor: 03/III/SKEP/SPPI-B/2024 Tentang Pengukuhan Struktur Organisasi Dan Susunan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode 2023 – 2026.

4. Decree of the Central Executive Board of the United Port of Indonesia Workers' Union Number: 03/III/SKEP/SPPI-B/2024 Concerning the Establishment of the Organizational Structure and Composition of the Branch Executive Board of the United Port of Indonesia Workers' Union at PT Pelabuhan Tanjung Priok for the 2023-2026 Period.

Pegawai Perusahaan berstatus sebagai pegawai Entitas Induk Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang ditugaskan di Perusahaan. Dengan demikian, maka seluruh pegawai Perusahaan menyalurkan aspirasinya kepada organisasi pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yaitu Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu (SPPI Bersatu). SPPI Bersatu berdiri berdasarkan Surat Pencatatan SPPI Bersatu pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor : 2410/III/SP/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

The Company's employees are officially employees of the Parent Company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), assigned to the Company. Accordingly, all employee aspirations are channeled through the employee organization of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), partiularly the United Indonesian Port Workers Union (SPPI Bersatu). SPPI Bersatu was established based on the registration letter with the North Jakarta Administration City's Department of Labor, Transmigration, and Energy No. 2410/III/SP/X/2021 dated October 6, 2021.

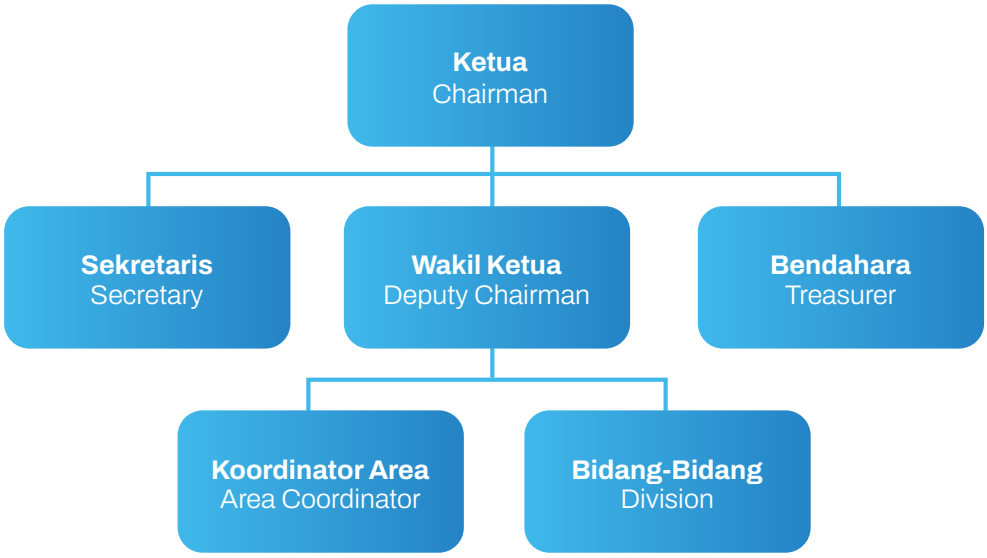
Sebagai perwakilan dari PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPPI Bersatu membentuk Dewan Perwakilan Cabang SPPI Bersatu PT Pelabuhan Tanjung Priok yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu Nomor: 18/XI/SKEP/SPPI-B/2021 tanggal 20 November 2021 tentang Pengukuhan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode 2020–2023. Serta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

As the representative of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Central Executive Board (DPP) of SPPI Bersatu established the Branch Executive Board of SPPI Bersatu at PT Pelabuhan Tanjung Priok, formalized through the Decree No. 18/XI/SKEP/SPPI-B/2021 dated 20 November 2021 concerning the Formalization of the Organizational Structure and Composition of the Branch Executive Board of the United Indonesian Port Workers Union at PT Pelabuhan Tanjung Priok for the 2020–2023 period. The Union also upholds its own Vision and Mission, as outlined below:

VISI VISION	"Memperjuangkan Insan Pekerja yang Profesional, Cerdas, Mandiri dan Diperlakukan secara Adil, Sejahtera dan Bermartabat." "Fighting for Professional, Intelligent, Independent Employees and Treating them Fairly, Prosperously and with Dignity."
MISI MISSION	1. Komitmen mendorong peningkatan kinerja Perusahaan; 2. Mendorong peningkatan kompetensi pekerja; 3. Sebagai mitra pengusaha terhadap keberlangsungan Perusahaan; 4. Terciptanya perangkat organisasi dalam kemandirian. 1. Committed to encourage the improvement of the Company performance; 2. Encouraging the improvement of employees' competence; 3. As an entrepreneur partner for the sustainability of the Company; 4. Creating independent organizational devices

Seluruh anggota Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia PT Pelabuhan Tanjung Priok berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

All members of the Executive Board of the Branch Leadership Council of the Indonesian Port Workers Union at PT Pelabuhan Tanjung Priok total 34 (thirty-fourth) individuals, with the organizational structure as follows:



Hubungan konstruktif yang saling menghormati antara Pegawai dan Perusahaan dimanifestasikan dalam bentuk kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh Manajemen dan SPPI Bersatu.

Manajemen secara berkala mengadakan berbagai pertemuan bersama Serikat Pekerja, yang bertujuan untuk menerima aspirasi, usulan, dan saran dari pegawai. Selama ini Perusahaan telah mengembangkan hubungan industrial yang baik sehingga menghasilkan suasana kerja yang kondusif yang ditandai di antaranya dengan tidak adanya pemogokan kerja pegawai atau insiden lainnya di sepanjang tahun 2024.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan PTP Terminal Nonpetikemas setelah berakhirnya hubungan kerja serta meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, Perusahaan menyiapkan program benefit setelah berakhirnya hubungan kerja.

Perusahaan memiliki kebijakan pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KP.07.01/20/8/3/KRF/SDU/PI,II-21 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Kesejahteraan Pasca Kerja bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Di mana pada ketentuan tersebut batas usia pensiun Pekerja adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dengan persyaratan.

Adapun program masa purnabakti meliputi:
1. Penghargaan Masa Bakti;
2. Pesangon;
3. Uang Pindah Pensiun;
4. Cinderamata;
5. Kenaikan Kelas Jabatan Pengabdian (dengan syarat tertentu).

A constructive and mutually respectful relationship between employees and the Company is manifested through agreements and regulations as outlined in the Collective Labor Agreement (CLA), signed by Management and SPPI Bersatu.

Management regularly holds various meetings with the Labor Union to receive aspirations, proposals, and suggestions from employees. To date, the Company has maintained good industrial relations, resulting in a conducive work environment, as evidenced by the absence of employee strikes or other incidents throughout 2024.

RETIREMENT POLICY AND PROGRAMS

In improving the welfare of PTP Terminal Nonpetikemas employees after the end of their employment and to enhance comfort during active service, the Company provides post-employment benefit programs.

The Company's retirement policy is stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number KP.07.01/20/8/3/KRF/SDU/PI.II-21 dated August 20, 2021, regarding Post-Employment Welfare for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). According to the policy, the retirement age is 56 (fifty-six) years and can be extended to 58 (fifty-eight) years under certain conditions.

The retirement program includes:
1. Service Period Award;
2. Severance Pay;
3. Retirement Relocation Allowance;
4. Souvenirs;
5. Honorary Job Level Promotion (subject to specific requirements).

RENCANA PENGEMBANGAN PEKERJA TAHUN 2025

Rencana pengembangan pekerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

THE EMPLOYEE DEVELOPMENT PLAN FOR 2025

The employee development plan for 2025 is as follows:

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
1	Auditor Hukum/CLA Legal Auditor / Certified Legal Auditor (CLA)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	4
2	Sertifikasi Mediator Mediator Certification	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	4
3	PKPA	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	2
4	*Financial Statement Analysis*	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
5	Microsoft Excel *for Advance*	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
6	*Certified Chief Governance Officer* (CCGO)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	8
7	Pelatihan Tingkat Dasar Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (*online*) Basic Level Training for Qualified Internal Audit Certification (online)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
8	Pelatihan Tingkat Lanjutan Sertifikasi *Qualified Internal Audit (online)* Advanced Level Training for Qualified Internal Audit Certification (online)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
9	Pelatihan Tingkat Manajerial Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (*online*) Managerial Level Training for Qualified Internal Audit Certification (online)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
10	Pelatihan Tingkat Dasar Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (*online*) Managerial Level Training for Qualified Internal Audit Certification (online)	Divisi Pengawasan dan Internal dan Hukum Internal Audit and Legal Division	1
11	Ahli K3 Umum General OHS Expert	Divisi Operasi Operations Division	5
12	Ahli K3 Lingkungan Kerja OHS Expert for Work Environment	Divisi Operasi Operations Division	1
13	Ahli K3 Kimia OHS Expert in Chemicals	Divisi Operasi Operations Division	1
14	Ahli K3 Listrik OHS Expert in Electricity	Divisi Operasi Operations Division	1
15	Ahli K3 Migas (Pengawas) OHS Expert in Oil and Gas (Supervisor)	Divisi Operasi Operations Division	1
16	Ahli K3 Migas (Operator) OHS Expert in Oil and Gas (Operator)	Divisi Operasi Operations Division	2
17	IMO 32.1	Divisi Operasi Operations Division	9
18	IMO 32.5	Divisi Operasi Operations Division	13
19	OPRC Level 1 (Batch 2)	Divisi Operasi Operations Division	12
20	OPRC Level 2 (Batch 1)	Divisi Operasi Operations Division	12
21	OPRC Level 3 (Batch 2)	Divisi Operasi Operations Division	2
22	Pemadam Kebakaran Tingkat D Firefighting Level D	Divisi Operasi Operations Division	15
23	*Awareness* HSSE	Divisi Operasi Operations Division	20

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
24	*Emergency Response Plan* (*Inhouse Training*)	Divisi Operasi Operations Division	30
25	Petugas dan Penanggung Jawab Pengendali dan Pengelola Limbah B3 Officer and Person in Charge of Hazardous Waste (B3) Management and Control	Divisi Operasi Operations Division	3
26	Investigasi Kecelakaan Accident Investigation	Divisi Operasi Operations Division	15
27	*Waste Management*	Divisi Operasi Operations Division	15
28	*Lifting & Rigging*	Divisi Operasi Operations Division	30
29	HIRADC & IADL	Divisi Operasi Operations Division	20
30	Penanganan *Dangerous Goods* Dangerous Goods Handling	Divisi Operasi Operations Division	20
31	*Safety Agent & Safety Inspector*	Divisi Operasi Operations Division	20
32	NEBOSH	Divisi Operasi Operations Division	1
33	CSMS	Divisi Operasi Operations Division	2
34	Persiapan Pengoperasian TCC di Bengkulu Preparation for the Operation of the Liquid Bulk Terminal (TCC) in Bengkulu	Divisi Operasi Operations Division	30
35	*Training* Pelayanan Cargo Curah Cair di Muara Sabak Training on Liquid Bulk Cargo Services in Muara Sabak	Divisi Operasi Operations Division	10
36	Persiapan Pengoperasian TCC di Pangkal Balam Preparation for the Operation of the Liquid Bulk Terminal (TCC) in Pangkal Balam	Divisi Operasi Operations Division	30
37	Pengoperasian *Conveyor* Jambi Operation of the Conveyor in Jambi	Divisi Operasi Operations Division	30
38	Pengoperasian Terminal Kijing *handling Caustic* Soda Operation of Kijing Terminal for Handling Caustic Soda	Divisi Operasi Operations Division	30
39	Sertifikasi penangan curah padat dari kementrian perhubungan Solid Bulk Handling Certification from the Ministry of Transportation	Divisi Operasi Operations Division	30
40	Sertifikasi penanganan Barang berbahaya dari kementrian perhubungan Hazardous Goods Handling Certification from the Ministry of Transportation	Divisi Operasi Operations Division	30
41	*Site Visit/Benchmarking* Pelabuhan	Divisi Operasi Operations Division	46
42	Loading Master	Divisi Operasi Operations Division	30
43	Pelatihan *Advanced Multiporpuse* (NCTO, Curah Kering, Curah Cair) Advanced Multipurpose Training (NCTO, Dry Bulk, Liquid Bulk)	Divisi Operasi Operations Division	40
44	*Draft survey*	Divisi Operasi Operations Division	20

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
45	*Port* Manajemen Sistem Port Management System	Divisi Operasi Operations Division	10
46	*Modern Port* Manajemen Modern Port Management	Divisi Operasi Operations Division	40
47	*Refresment Operator* GLC GLC Operator Refreshment	Divisi Operasi Operations Division	30
48	Pelatihan penangan kargo curah di Gudang Training on Bulk Cargo Handling in Warehouse	Divisi Operasi Operations Division	20
49	*Refreshment* Aplikasi PTOS-M dan *Refreshment* PNC PTOS-M Application Update and PNC Update	Divisi Operasi Operations Division	80
50	*Project Management*	Divisi Operasi Operations Division	10
51	Data analisi *for Port Operation* Data Analysis for Port Operations	Divisi Operasi Operations Division	10
52	*Financial Statement Analysis*	Divisi Keuangan Finance Division	3
53	*Microsoft Excel for Advance*	Divisi Keuangan Finance Division	4
54	*Financial For Non Financial Manager*	Divisi Keuangan Finance Division	1
55	*Financial Business Modeling*	Divisi Keuangan Finance Division	1
56	Pelatihan SMAP Anti-Bribery Management System (SMAP) Training	Divisi Keuangan Finance Division	3
57	*Certified Governance Professional*	Divisi Keuangan Finance Division	2
58	*Business Continuity Management Certified Professional*	Divisi Keuangan Finance Division	3
59	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	Divisi Keuangan Finance Division	1
60	*Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)	Divisi Keuangan Finance Division	1
61	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	Divisi Keuangan Finance Division	1
62	*Selling Negotiation: Essential Strategies and Skills*	Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* Marketing and Customer Relation Division	1
63	*Effective Business Communication*	Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* Marketing and Customer Relation Division	1
64	*Boost Sales with Key Account Management (B2B)*	Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* Marketing and Customer Relation Division	1
65	*Market Research: Understanding Customer Behavior*	Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* Marketing and Customer Relation Division	1
66	*Finance for Non Finance Professionals*	Divisi Renstra Renstra Division	1
67	*Feasibility Study*	Divisi Renstra Renstra Division	1
68	*Finance for Non Finance Professionals*	Divisi Renstra Renstra Division	1
69	*Feasibility Study*	Divisi Renstra Renstra Division	1
70	KPI : *aligning organization's performance*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
71	*Certified Procurement Officer* (CPOF)	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
72	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (BPJP) Level 1 Government Goods & Services Procurement (BPJP) Level 1	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
73	*Employee Engagement: Key to Your Organization's Performance*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
74	*Human Capital*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
75	Manajemen Kerumah Tanggaan Household Management	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
76	*Building Digital Human Resource Capability and Mindset*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
77	*Training Needs Analysis*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
78	Pelatihan *Certified Human Capital Officer* (CHCO) Certified Human Capital Officer (CHCO) Training	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
79	Sertifikasi & Pelatihan BNSP *Data Analyst* BNSP Certification & Training for Data Analyst	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	1
80	Pelatihan & Sertifikasi BNSP Skema Staf Sumber Daya Manusia (SDM) BNSP Training & Certification for Human Resources Staff Scheme	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
81	Diklat Kearsipan Archival Training	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
82	Pengelolaan Arsip Dinamis Dynamic Archive Management	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
83	Pengelolaan Arsip Elektronik Electronic Archive Management	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
84	Penyusutan Arsip Archive Disposal	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
85	*Training Supervisory*	Divisi SDM dan Umum HC and General Affairs Division	2
86	ITIL4 *Foundation*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	5
87	COBIT2019 *Foundation*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	5
88	*IT Project Management Fundamentals*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	3
89	*Systems Analysis and Design Fundamentals*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	2
90	UI/UX *Design Fundamentals*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	2
91	PowerBI *Fundamentals*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	2
92	Sertifikasi CCNA CCNA Certifications	Divisi Sistem Informasi Information System Division	2
93	IT *Security Fundamental*	Divisi Sistem Informasi Information System Division	3
94	*Certified Data Analyst*	Divisi Pengembangan Usaha Business Development Division	4
95	*Analytical and Creative Thinking Certification*	Divisi Pengembangan Usaha Business Development Division	3
96	*Finance for Non Finance*	Divisi Pengembangan Usaha Business Development Division	7

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
97	*Certified Business Intelligence Analyst*	Divisi Pengembangan Usaha Business Development Division	4
98	*Business Management Certification*	Divisi Pengembangan Usaha Business Development Division	7
99	*Effective Business Communication*	Satuan Kerja Work Unit	5
100	*Powerful Business Presentation*	Satuan Kerja Work Unit	6
101	*Managing Business Partnership*	Satuan Kerja Work Unit	5
102	*Mini master of business administration in supply chain*	Satuan Kerja Work Unit	4
103	*Logistics Management & Operations in Oil & Gas Upstream Industry Training Program*	Satuan Kerja Work Unit	5
104	*Logistics Shorebase Operations Training*	Satuan Kerja Work Unit	5
105	*Project Management professional in supply chain*	Satuan Kerja Work Unit	5
106	Ahli K3 Umum General OHS Expert	Satuan Kerja Work Unit	4
107	*Market Research: Understanding Customer Behavior*	Satuan Kerja Work Unit	3
108	*Financial For Non Financial Manager*	Satuan Kerja Work Unit	7
109	*Financial Statement Analysis*	Satuan Kerja Work Unit	5
110	*Financial Business Modeling*	Satuan Kerja Work Unit	5
111	*Certified professional in Logistic*	Satuan Kerja Work Unit	5
112	*Cerified* Ahli Kepelabuhanan Certified Port Expert	Satuan Kerja Work Unit	4
113	*Certified Governance Professional* (CGP)	Sekper Corporate Secretary	3
114	*Certified Chief Governance Officer* (CCGO)	Sekper Corporate Secretary	3
115	SDGs	Sekper Corporate Secretary	3
116	Sistem Instalasi dan Proteksi Jaringan Listrik Electrical Installation and Network Protection System	Teknik Engineering	5
117	*Troubleshooting* & Pemeliharaan Sistem Kelistrikan Gedung dan Industri Troubleshooting & Maintenance of Electrical Systems in Buildings and Industries	Teknik Engineering	5
118	*Successful Project Management*	Teknik Engineering	3
119	*Project Management*	Teknik Engineering	6
120	Ahli K3 Umum General OHS Expert	Teknik Engineering	6
121	*Energy Efficiency for Green Building Design*	Teknik Engineering	5

No	**Uraian** Description	**Unit Kerja/Cabang** Work Unit/ Branch	**Jumlah Peserta** Total Participants
122	*Heavy Equipment Maintenance Management*	Teknik Engineering	3
123	*Fidic Contract Management for Project Practitioners*	Teknik Engineering	6
124	*Augmented Realty for Construction and Monitoring Project*	Teknik Engineering	6
125	*Autodesk Revit*	Teknik Engineering	6
126	Petugas dan Penanggung Jawab Pengendali dan Pengelola Limbah B3 Officer and Person in Charge of Hazardous Waste (B3) Management and Control	Cabang Banten Banten Branch	1
127	Investigasi Kecelakaan Accident Investigation	Cabang Banten Banten Branch	2
128	Sertifikasi penangan curah padat dari kementrian perhubungan Certification for Solid Bulk Handling from the Ministry of Transportation	Cabang Banten Banten Branch	4
129	Sertifikasi penangan Barang berbahaya dari kementrian perhubungan Certification for Hazardous Goods Handling from the Ministry of Transportation	Cabang Banten Banten Branch	4
130	*Loading Master*	Cabang Banten Banten Branch	3
131	Pelatihan *Advanced Multipurpose* (NCTO, Curah Kering, Curah Cair) Advanced Multipurpose Training (NCTO, Dry Bulk, Liquid Bulk)	Cabang Banten Banten Branch	6
132	*Draft survey*	Cabang Banten Banten Branch	3
133	Pelatihan penangan kargo curah di Gudang Bulk Cargo Handling Training in Warehouse	Cabang Banten Banten Branch	3
134	Penanganan Terminal Curah Kering dan Aktifitas Pola Operasi Batu Bara Dry Bulk Terminal Handling and Coal Work Flow Operation Activities	Cabang Banten Banten Branch	3
135	Evaluasi Biaya Pokok Produksi (BPP) dan Harga Pokok Produksi (HPP) Evaluation of Cost of Goods Manufactured (COGM) and Cost of Goods Sold (COGS)	Cabang Banten Banten Branch	2
136	*Advance Competitive Marketing* Strategi Advance Competitive Marketing Strategy	Cabang Banten Banten Branch	2
137	*Negotiation Skill For Business*	Cabang Banten Banten Branch	1
138	Dasar-dasar Akutansi Fundamentals of Accounting	Cabang Banten Banten Branch	3
139	*Microsoft Excel For Advance*	Cabang Banten Banten Branch	1
140	Sistem Instalasi dan Proteksi Jaringan Listrik Electrical Network Installation and Protection Systems	Cabang Banten Banten Branch	2
141	IT *Security Fundamentals*	Cabang Banten Banten Branch	1

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
142	Pengelolahan Arsip Elektronik Electronic Archive Management	Cabang Banten Banten Branch	2
143	KPI	Cabang Banten Banten Branch	2
144	Pelatihan *Certified Human Capital* Certified Human Capital Training	Cabang Banten Banten Branch	2
145	Manajeman Rumah Tangga Household Management	Cabang Banten Banten Branch	2
146	Penyusunan Arsip Archive Management	Cabang Banten Banten Branch	2
147	*Basic Ship Operation Planning*	Cabang Banten Banten Branch	6
148	Kinerja Operasional Operational Performance	Cabang Banten Banten Branch	2
149	IMDG CODE	Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	2
150	IMSBC Code	Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	2
151	Sertifikasi PFSO PFSO Certification	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
152	Sertifikasi Penanganan & Pengangkutan Kargo Curah Padat Sesuai IMO Model Training Course 1.45 Certification in Handling & Transporting Solid Bulk Cargo in accordance with IMO Model Training Course 1.45	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
153	Sertifikasi Penanganan & Pengangkutan Barang Berbahaya Sesuai IMO Model *Training Course* 1.10 Certification in Handling & Transporting Dangerous Goods in accordance with IMO Model Training Course 1.10	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
154	Ahli Kepelabuhanan Port Expert	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
155	Penagihan Piutang Receivables Collection	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
156	Sertifikasi Ahli Manajemen Proyek Certified Project Management Expert	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
157	Penanganan Terminal Curah Kering dan Aktifitas Pola Operasi Batu Bara Handling Dry Bulk Terminal and Coal Work Flow Operations Activities	Cabang Cirebon Cirebon Branch	2
158	Ahli K3 Umum General OHS Expert	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
159	Penanganan *Dangerous Goods*	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
160	Pelatihan penangan kargo curah di Gudang Handling Dangerous Goods	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
161	*Refreshment* Aplikasi PTOS-M dan *Refreshment* PNC PTOS-M Application Update and PNC Update	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
162	*Draft survey*	Cabang Cirebon Cirebon Branch	1
163	*Business Presentation Skill / Online*	Cabang Jambi Jambi Branch	5
164	*Negotiation Skill For Business / Online*	Cabang Jambi Jambi Branch	5
165	Ahli K3 OHS Expert	Cabang Jambi Jambi Branch	1

No	**Uraian** Description	**Unit Kerja/Cabang** Work Unit/ Branch	**Jumlah Peserta** Total Participants
166	*Financial Statement Analysis*	Cabang Jambi Jambi Branch	1
167	*Human Resource Management*	Cabang Jambi Jambi Branch	1
168	Inventaris Inventories	Cabang Jambi Jambi Branch	1
169	Pentarifan Tariffing	Cabang Jambi Jambi Branch	2
170	*Qualified Risk Management Offcier* (Qrmo)	Cabang Jambi Jambi Branch	2
171	Sistem Instalasi & Proteksi Jaringan Listrik Electrical Network Installation & Protection System	Cabang Jambi Jambi Branch	1
172	*Lobbying & Negotiation Skill*	Cabang Palembang Palembang Branch	7
173	*Effective People Skill*	Cabang Palembang Palembang Branch	2
174	*Advance Excel*	Cabang Palembang Palembang Branch	5
175	*Proposal Writing*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
176	*Compliance Management*	Cabang Palembang Palembang Branch	5
177	*Risk Assessment Technique*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
178	*Key Risk Indicator & Early Warning System*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
179	*Business Risk Management*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
180	*Business Feasibility Study*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
181	*Civil Construction Regulation Knowledge*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
182	*Port and Coastal Engineer*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
183	Penyusunan AMDAL Environmental Impact Assessment (AMDAL) Preparation	Cabang Palembang Palembang Branch	1
184	Sertifikasi Penyusunan AMDAL AMDAL Preparation Certification	Cabang Palembang Palembang Branch	1
185	Gratifikasi Gratification	Cabang Palembang Palembang Branch	4
186	*Legal Drafting*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
187	*Competitor Intelligent*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
188	*Strategic Marketing Plan*	Cabang Palembang Palembang Branch	2
189	*Customer Service Excellent*	Cabang Palembang Palembang Branch	4
190	*Customer Relations Management*	Cabang Palembang Palembang Branch	4
191	*Tariff Management*	Cabang Palembang Palembang Branch	1
192	Pengelolaan Arsip Dinamis Dynamic Archive Management	Cabang Palembang Palembang Branch	2
193	*Business Risk management*	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	1
194	*Designing Standard Operating Procedure* (SOP)	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	1

No	Uraian Description	Unit Kerja/Cabang Work Unit/ Branch	Jumlah Peserta Total Participants
195	*Effective Business Communication*	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	1
196	*Compliance Management*	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	1
197	Kinerja Operasional Operational Performance	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	1
198	Penanganan Barang Curah Kering Dry Bulk Cargo Handling	Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	2
199	Manajemen Mutu & HSSE Quality & HSSE Management	Cabang Panjang Panjang Branch	3
200	Peralatan & Kinerja Equipment & Performance	Cabang Panjang Panjang Branch	2
201	Bidang SDM Human Capital Division	Cabang Panjang Panjang Branch	1
202	Pemasaran & Layanan Pelanggan Marketing & Customer Service	Cabang Panjang Panjang Branch	1
203	Ahli K3 Umum General OHS Expert	Cabang Pontianak Pontianak Branch	2
204	*Business presentation skills (online training)*	Cabang Pontianak Pontianak Branch	1
205	*Basic Fire Awareness*	Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	2
206	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	1
207	*Safety Agent* dan *Safety Inspektor*	Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	2
208	Sertifikasi ISPS CODE ISPS Code Certification	Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	1
209	Sio Forklift	Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	2
210	*Financial Statement Analysis*	Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	1
211	*Human Resource Management*	Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	1
212	Sertifikasi PFSO-ISPS Code	Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	2
213	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	1
214	*Refreshment* Penggunaan Aplikasi SIGAP SIGAP Application Refreshment	Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	2
215	(Pengangkutan Barang Curah Padat) IMSBC (Solid Bulk Cargo Transportation) IMSBC	Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	1
216	*Total Productive Maintenance* (TPM)	Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	1
217	*Multipurpose Terminal Operation*	Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	1

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

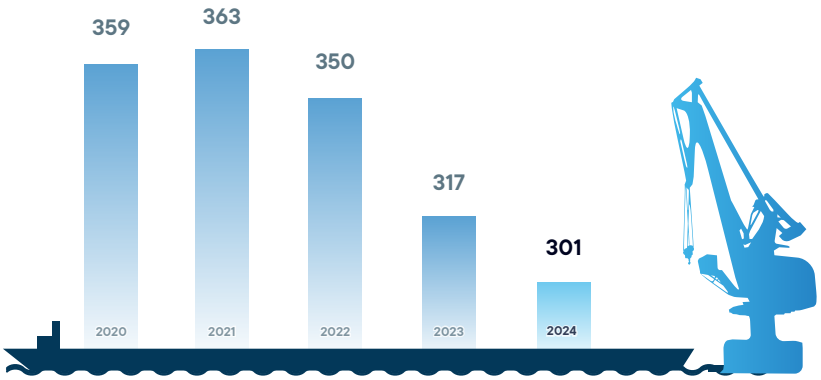
DEMOGRAFI KARYAWAN

Sampai dengan 31 Desember 2024, total pegawai tetap (organik) Perusahaan mencapai 301 orang, mengalami penurunan sebesar 5,00% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2023, yaitu 317 orang.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

As of December 31, 2024, the total number of permanent employee (organic) in the Company reached 301, showing a decrease of 5.00% compared to the total number of employees as of December 31, 2023, which was 317.

Pergerakan Jumlah Karyawan 2020-2024 (orang)
Employee Turnover 2020-2024 (people)



No	Level Organisasi Organization Level	2024			2023		
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	0	4	4	0	4
2	Direksi Board of Directors	3	0	3	3	0	3
Level Jabatan Position Level							
3	23	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0
5				0	0	0	0
6	22	0	0	0	1	0	1
7	21	7	0	7	1	0	1
8					5	1	6
9	20	4	0	4	3	1	4
10	19	15	3	18	28	2	30
11	18	5	2	7			
12	17	16	1	17	14	3	17
13	16	49	10	59	60	6	66
14	15	7	1	8			
15	14	25	7	32	28	9	37
16	13	3	0	3			
17	12	25	5	30	28	6	34

No	Level Organisasi Organization Level	2024			2023		
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
18	11	41	9	50	41	11	52
19	10	40	0	40	44	0	44
20	9	9	0	9	10	1	11
21	8	13	4	17	13	1	14
Jumlah Total		259	42	301	276	41	317

Organik
Organic

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)
Employee Demographics Based on Organizational Level (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023		
	L M	P L	Jumlah Total	L M	P L	Jumlah Total
Pascasarjana (S2)/Sederajat Master's Degree/Equivalent	22	7	29	20	7	27
Sarjana (S1) /Sederajat Bachelor's Degree/Equivalent	102	26	128	111	27	138
Sarjana Muda/Sederajat Diploma/Equivalent	30	5	35	30	4	34
SLTA/Sederajat Senior High School/Equivalent	105	4	109	115	3	118
SLTP/Sederajat Junior High School/Equivalent	0	0	0	0	0	0
SD/Sederajat Elementary School/Equivalent	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	259	42	301	276	41	317

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Tenaga Alih Daya (TAD)
Outsourcing

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)
Employee Demographics Based on Education Level (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023		
	L M	P L	Jumlah Total	L M	P L	Jumlah Total
Pascasarjana (S2)/Sederajat Master's Degree/Equivalent	0	0	0	1	0	1
Sarjana (S1) /Sederajat Bachelor's Degree/Equivalent	17	4	21	117	26	143
Sarjana Muda/Sederajat Diploma/Equivalent	21	1	22	41	9	50
SLTA/Sederajat Senior High School/Equivalent	653	47	700	533	13	546
SLTP/Sederajat Junior High School/Equivalent	2	0	2	18	0	18
SD/Sederajat Elementary School/Equivalent	2	0	2	10	0	10
Jumlah Total	695	52	747	720	48	768

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Employee Demographics Based on Employment Status (people)						
Status Kepegawaian Employment Status	**2024**			**2023**		
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total
Pegawai Pelindo Organik yang Ditugaskan di PTP Terminal Nonpetikemas Organic Employee from Pelindo Assigned in PTP Terminal Petikemas	257	42	299	274	41	315
Pegawai PTP Terminal Nonpetikemas Employee of PTP Terminal Nonpetikemas	2	0	2	2	0	2
Tenaga Alih Daya (TAD) Outsourcing	695	52	747	720	48	768
Pegawai Kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Fixed-Term Contract Employee	3	1	4	5	1	6
Pegawai Kontrak PKWT *Project* Fixed-Term Contract Employee (Project)	49	3	52	75	4	79
Jumlah Total	1.006	98	1.104	1.076	94	1.170

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Organik
Organic

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia (orang) Employee Demographics Based on Age (people)						
Rentang Usia Age Group	**2024**			**2023**		
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total
<26 tahun <26 years old	0	0	0	1	0	1
26-35 tahun 26-35 years old	52	27	79	70	26	96
36-45 tahun 36-45 years old	95	7	102	87	7	94
46-51 tahun 46-51 years old	55	4	59	60	4	64
52-55 tahun 52-55 years old	57	4	61	58	4	62
>55 tahun >55 years old	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	259	42	301	276	41	317

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Tenaga Alih Daya (TAD)
Outsourcing

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia (orang) Employee Demographics Based on Age (people)						
Rentang Usia Age Group	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
<26 tahun <26 years old	55	7	62	41	6	47
26-35 tahun 26-35 years old	215	28	243	262	30	292
36-45 tahun 36-45 years old	314	13	327	311	7	318
46-51 tahun 46-51 years old	79	2	81	76	2	78
52-55 tahun 52-55 years old	31	2	33	25	3	28
>55 tahun >55 years old	1	0	1	5	0	5
Jumlah Total	695	52	747	720	48	768

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Organik
Organic

Demografi Karyawan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja (orang) Employee Demographics Based on Work Unit Placement (people)						
Berdasarkan Penempatan Unit Kerja Based on Work Unit Placement	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	81	26	107	86	19	105
Cabang Priok Priok Branch	48	1	49	49	2	51
Cabang Banten Banten Branch	27	2	29	27	3	30
Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	17	0	17	17	0	17
Cabang Jambi Jambi Branch	5	0	5	4	1	5
Cabang Panjang Panjang Branch	14	0	14	18	1	19
Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	15	2	17	17	0	17
Cabang Palembang Palembang Branch	16	2	18	24	2	26
Cabang Cirebon Cirebon Branch	13	4	17	12	5	17

Organik
Organic

Demografi Karyawan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja (orang) Employee Demographics Based on Work Unit Placement (people)						
Berdasarkan Penempatan Unit Kerja Based on Work Unit Placement	**2024**			**2023**		
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total
Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	6	4	10	6	5	11
Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	3	0	3	2	1	3
Cabang Pontianak Pontianak Branch	14	1	15	14	2	16
Jumlah Total	259	42	301	276	41	317

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Tenaga Alih Daya (TAD)
Outsourcing

Demografi Karyawan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja (orang) Employee Demographics Based on Work Unit Placement (people)						
Berdasarkan Penempatan Unit Kerja **Based on Work Unit Placement**	**2024**			**2023**		
	L **M**	**P** **F**	**Jumlah** **Total**	**L** **M**	**P** **F**	**Jumlah** **Total**
Kantor Pusat Head Office	36	24	60	39	21	60
Cabang Priok Priok Branch	186	9	195	203	9	212
Cabang Banten Banten Branch	105	3	108	106	3	109
Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	103	6	109	105	5	110
Cabang Jambi Jambi Branch	16	1	17	16	1	17
Cabang Panjang Panjang Branch	49	3	52	49	2	51
Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	52	1	53	52	1	53
Cabang Palembang Palembang Branch	61	1	62	60	2	62
Cabang Cirebon Cirebon Branch	36	0	36	38	0	38
Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	20	0	20	20	0	20
Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	6	2	8	6	2	8
Cabang Pontianak Pontianak Branch	25	2	27	26	2	28
Jumlah Total	695	52	747	720	48	768

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Organik
Organic

Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja* (orang) Employee Demographics Based on Years of Service * (people)						
Berdasarkan Masa Kerja Based Years of Service	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
<1 tahun <1 years	0	0	0	0	0	0
1-5 tahun 1-5 years	5	6	11	0	0	0
6-10 tahun 6-10 years	15	3	18	151	26	177
10-15 tahun 10-15 years	145	23	168	33	7	40
15-20 tahun 15-20 years	29	4	33	19	1	20
>20 tahun >20 years	65	6	71	52	2	54
Jumlah Total	259	42	301	276	41	317

L = Laki-laki / P = Perempuan
*) tidak termasuk Direksi
M = Male/ F = Female
*) exclude Directors

Tenaga Alih Daya (TAD)
Outsourcing

Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja* (orang) Employee Demographics Based on Years of Service * (people)						
Berdasarkan Masa Kerja Based Years of Service	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
<1 tahun <1 years	6	2	8	4	2	6
1-5 tahun 1-5 years	689	50	739	716	46	762
6-10 tahun 6-10 years	0	0	0	0	0	0
10-15 tahun 10-15 years	0	0	0	0	0	0
15-20 tahun 15-20 years	0	0	0	0	0	0
>20 tahun >20 years	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	695	52	747	720	48	768

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male/ F = Female

Demografi Karyawan Berdasarkan *Gender*/Jenis Kelamin (orang) Employee Demographic Based on Gender (People)		
Gender	2024	2023
Laki-Laki Male	954	996
Perempuan Female	94	89
Jumlah Total	1.048	1.085

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

The composition of shareholders is presented as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok per 1 Januari 2024
Table of Shareholder Composition in PT Pelabuhan Tanjung Priok as of January 1, 2024

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham** (lembar) Number of Shares (shares)	**Nilai Nominal** (Rp) Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)	24.750	24.750.000.000	99,00
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	250	250.000.000	01,00
Jumlah Total	25.000	25.000.000.000	100,00%

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok per 31 December 2024
Table of Shareholder Composition in PT Pelabuhan Tanjung Priok as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham** (lembar) Number of Shares (shares)	**Nilai Nominal** (Rp) Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)	24.750	24.750.000.000	99,00
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	250	250.000.000	01,00
Jumlah Total	25.000	25.000.000.000	100,00%

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

As of December 31, 2024, there is no record of local institutional ownership, foreign institutional ownership, local individual ownership, or foreign individual ownership.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2024 PTP Terminal Nonpetikemas tidak menerbitkan saham untuk *public*. Dimana 99,00% kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pelindo Multi Terminal selaku pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan dan 1,00% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 1,00% saham. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 Pemegang Saham Tersebar.

TOP 20 SHAREHOLDERS COMPOSITION

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas has not issued shares to the public. A total of 99.00% of shares are owned by PT Pelindo Multi Terminal as the main and controlling shareholder, while 1.00% is owned by PT Pelabuhan Indonesia Investama. Accordingly, no information is available regarding the top 20 shareholder composition.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal yaitu sebesar 99,00% saham. PTP Terminal Nonpetikemas tidak pernah menerbitkan saham untuk publik maupun oleh karyawan.

SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE OWNERSHIP

The shareholder holding 5% or more of the Company's shares is PT Pelindo Multi Terminal, with a 99.00% stake. PTP Terminal Nonpetikemas has never issued shares to the public or to employees.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Komposisi Kelompok Pemegang saham kurang dari 5% adalah PT Pelabuhan Indonesia Investama yaitu sebesar 1,00%. Dimana PTP Terminal Nonpetikemas tidak pernah menerbitkan saham baik untuk publik maupun karyawan.

SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

The shareholder group with less than 5% ownership consists of PT Pelabuhan Indonesia Investama, with a 1.00% stake. The Company has not issued any shares to the public or employees.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN MANAJEMEN

PTP Terminal Nonpetikemas tidak mempunyai program kepemilikan saham Dewan Komisairs, Direksi dan Manajemen, dan tidak menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh publik. Dengan demikian, PTP Terminal Nonpetikemas tidak menyajikan informasi mengenai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung yang dimiliki oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND MANAGEMENT

PTP Terminal Nonpetikemas does not have a share ownership program for the Board of Commissioners, Directors, or Management, and has not issued shares available to the public. Therefore, the Company does not present any information on direct or indirect shareholding by members of the Board of Directors or Board of Commissioners.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS, BOTH DIRECT AND INDIRECT, INCLUDING ULTIMATE INDIVIDUAL OWNERSHIP

Bagan Kepemilikan Saham PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The shareholding structure of PTP Terminal Nonpetikemas as of December 31, 2024, is illustrated as follows:



PEMEGANG SAHAM UTAMA
MAJORITY SHAREHOLDERS

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Nama Perusahaan Company Name	PT Pelindo Multi Terminal
Alamat Address	Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan, Medan 20411
Persentase Kepemilikan Saham di Perusahaan Share Ownership Percentage in the Company	24.750 lembar saham atau 99,00% 24,750 shares or 99.00%
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Type/Legal Entity of the Company	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprises (SOEs)
Bidang Usaha Business Fields	Jasa Kepelabuhanan Terminal Non Petikemas Non-Container Terminal Port Services
Produk dan Jasa Product and Services	Terminal Curah Cair, Terminal Curang Kering, Terminal Kendaraan, Terminal Khusus, Terminal *Multipurpose*, dan TUKS Liquid Bulk Terminal, Dry Bulk Terminal, Vehicles Terminal, Special Terminal, Multipurpose Terminal, and Private Use Terminal (TUSK)
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian No. 19 tanggal 29 September 2021 Deed of Establishment No. 19 dated September 29, 2021
Total Aset per 31 Desember 2024 Total Assets as of December 31, 2024	Rp4.010.489.341.211,- Rp4,010,489,341,211,-
Situs Web Website	https://pelindomultiterminal.co.id/
Wilayah Operasional Operational Area	36 *Branch* yang tersebar di wilayah: 1. Sumatera: Belawan, Dumai, Malahayati, Lhokseumawe, Tanjung Pinang, Sibolga, dan Tanjung Balai Karimun. 2. Jawa: Jamrud Nilam Mirah, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Tanjung Emas, dan Gresik. 3. Kalimantan: Bumiharjo Bagendang, Trisakti, dan Balikpapan. 4. Sulawesi: Makassar dan Parepare. 5. Bali Nusra: Lembar, Benoa, dan Bima Badas. 36 Branches located in the following regions: 1. Sumatera: Belawan, Dumai, Malahayati, Lhokseumawe, Tanjung Pinang, Sibolga, and Tanjung Balai Karimun. 2. Jawa: Jamrud Nilam Mirah, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Tanjung Emas, and Gresik. 3. Kalimantan: Bumiharjo Bagendang, Trisakti, and Balikpapan. 4. Sulawesi: Makassar and Parepare. 5. Bali Nusra: Lembar, Benoa, and Bima Badas.
Grup Perusahaan Company Group	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), dan PT Terminal Curah Utama (TCU)

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) adalah *Subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-744/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Persetujuan Pendirian dan Penyertaan Modal Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sebagai salah satu subholding Pelindo, SPMT memiliki komitmen untuk fokus dalam bisnis kepelabuhanan di bidang operasi terminal multipurpose di Indonesia, seperti curah cair, curah kering, dan kargo umum.

SPMT mengelola 3 Anak Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) yang merupakan terminal kendaraan terbesar di ASEAN, dan PT Terminal Curah Utama (TCU). SMPT merupakan pemegang saham utama dan pengendali PTP Terminal Nonpetikemas sebesar 99,00%.

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) is a Subholding of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), established pursuant to the Letter of Approval from the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. S-744/MBU/09/2021 dated September 28 2021, concerning the Approval for the Establishment and Capital Participation in a Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). As one of Pelindo's subholdings, SPMT is committed to focusing on the port business, particularly in the operation of multipurpose terminals across Indonesia, including liquid bulk, dry bulk, and general cargo segments.

SPMT manages 3 subsidiaries: PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) the largest vehicle terminal in ASEAN, and PT Terminal Curah Utama (TCU). SPMT is the majority shareholder and controlling entity of PTP Terminal Nonpetikemas, holding 99.00% of its shares.

ENTITAS INDUK TERTINGGI

Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas induk tertinggi, atau *ultimate parent entity* Perusahaan karena merupakan pemegang saham utama/pengendali dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali Perusahaan, sebesar 100,00%.

ULTIMATE PARENT ENTITY

The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate parent entity of the Company, as it holds 100.00% ownership of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the controlling shareholder of the Company.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)	Waktu Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operational Status	Jumlah Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)	Domisili Domicile
PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("P3TPK)	Jasa Layanan Bongkar Muat Barang Goods Loading and Unloading Services	100%	2016	Beroperasi In Operation	683.569	PT Pelindo Terminal Petikemas Pelindo *Place Office* Tower Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya 60165 - Indonesia

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("P3TPK") adalah Entitas Anak PTP Terminal Nonpetikemas yang bergerak dalam bidang Jasa Layanan Bongkar Muat Barang. PTP Terminal Nonpetikemas membeli saham P3TPK berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., No.99 dan 100 tanggal 28 April 2023.

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("P3TPK") is a subsidiary of PTP Terminal Nonpetikemas engaged in Loading and Unloading cargo services. PTP Terminal Nonpetikemas acquired shares of P3TPK based on Notarial Deeds No. 99 and 100 dated April 28, 2023, drawn up by Yatiningsih, S.H., M.H.

ENTITAS ASOSIASI
ASSOCIATED ENTITIES

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)	Waktu Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operational Status	Jumlah Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)	Domisili Domicile
PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Operasional Pelabuhan Development of Port Operational Supporting Infrastructure	0,02	24 Juli 2014 July 24, 2024	Beroperasi In Operation	3.860	Jakarta

Secara resmi berdiri pada tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.kn. PT Akses Pelabuhan Indonesia adalah anak usaha dari Pelindo Solusi Logistik yang bergerak di bidang pengembangan infrastruktur pendukung operasional pelabuhan.

Officially established on July 24, 2014 based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 from Yulianti Irawati, S.H., substitute for Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.kn. PT Akses Pelabuhan Indonesia is a subsidiary of Pelindo Solusi Logistik which is engaged in the development of port operational supporting infrastructure.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
GROUP STRUCTURE OF THE COMPANY

PTP Terminal Nonpetikemas merupakan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), salah satu *subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan kepemilikan saham 99,00% dan PT Pelabuhan Investama Indonesia sebesar 1,00%.

PTP Terminal Nonpetikemas is a subsidiary of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), one of the subholdings of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with a 99.00% shareholding, while PT Pelabuhan Investama Indonesia holds 1.00%.

Struktur Grup PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desembaer 2024
Group Structure of PTP Terminal Nonpetikemas as of December 31, 2024



Sampai dengan tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak memiliki *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of 2024, PTP Terminal Nonpetikemas does not have any Joint Ventures or Special Purpose Vehicles (SPVs).

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, aksi korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa yang harus diungkapkan.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas has never listed its shares on any Stock Exchange; therefore, there is no information regarding the chronology of listing, corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the stock exchange that needs to be disclosed.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF BOND AND OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek yang harus diungkapkan.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas has never listed any other securities on any Stock Exchange; therefore, there is no information regarding the chronology of listing, types of corporate actions, changes in the number of securities, the name of the stock exchange, or securities ratings that needs to be disclosed.

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING

Akuntan Publik adalah pihak eksternal yang membantu Perusahaan dalam melakukan pengauditan serta pemeriksaan laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan akuntan publik membuat Perusahaan untuk memberikan data serta informasi yang akuntabel serta wajar kepada *shareholder* maupun *stakeholder* serta pemangku kepentingan lainnya.

The Public Accountant is an external party assisting the Company in auditing and reviewing its financial statements to ensure compliance with the prevailing Financial Accounting Standards in Indonesia. Engaging a Public Accountant enables the Company to present accountable and fair data and information to shareholders, stakeholders, and other parties.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Nama Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan periode penugasan tahun 2024 adalah:

The Public Accounting Firm (KAP) and the name of the Public Accountant responsible for auditing the Annual Financial Statements for the 2024 assignment period are as follows:

Nama KAP KAP Name	Purwantono, Sungkoro dan Surja.
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 7 . Jl. Jend Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190 Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	31 Oktober 2024 s.d 30 April 2025 October 31, 2024 to April 30, 2025
Jasa Audit yang Diberikan Audit Services Provided	Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 October 31, 2024 to April 30, 2025
Biaya Jasa Audit Audit Services Fee	Rp2.015.000.000,-
Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services Provided	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak memberikan jasa atestasi lainnya kepada Perusahaan selain jasa audit atas laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja did not perform attestation services to the Company besides the audit sevices for the annual financial statement for the fiscal year dated December 31, 2024.
Biaya Jasa Non-Audit Non-Audit Services Fee	Tidak ada biaya jasa non-audit There was non-audit services fee

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Jasa Penilai
Appraisal Services

Nama Lembaga/Profesi Institution/Profession Name	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) Yogyakarta
Alamat Address	Jalan Laksda Adi Sucipto, Papringan, Catur Tunggal Depok Kab. Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Jl. Laksda Adi Sucipto, Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta
Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Pekerjaan Konsultansi dan Pemberian Kajian Hukum Penghapusan Sisa Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok Consultancy Services and Legal Review on the Write-off of Residual Container Loading and Unloading Equipment Assets at Terminal 009, Tanjung Priok Port
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Biaya Fee	Rp37.550.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Rp37,550,000 (Thirty-seven million five hundred fifty thousand rupiah)

Notaris
Notary

Nama Lembaga/Profesi Institution/Profession Name	Jimmy Tanal, SH.,M.Kn
Alamat Address	Gedung The"H"Tower Lantai 20 Suite A & G Jl.H.R Rasuna Said Kavling C-20 Kuningan Jakarta Selatan 12940 The "H" Tower Building, 20th Floor, Suite A & G Jl. H.R Rasuna Said, Kavling C-20, Kuningan, South Jakarta 12940
Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Penugasan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Assignment for the Preparation of the Shareholders' Resolution Deed of PT Pelabuhan Tanjung Priok
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Biaya Fee	Rp5.855.500,- (Lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) Rp5,855,500 (Five million eight hundred fifty-five thousand five hundred rupiah)

Catatan: Tidak ada Perjanjian Hanya Biaya timbul bila ada pekerjaan saja
Note: No formal Agreement Fees are incurred only upon service provision

Notaris
Notary

Nama Lembaga/Profesi Institution/Profession Name	Dewi Sugina Mulyani, SH
Alamat Address	Ruko MoI (Mall of Indonesia) Samping Lobby 5 Blok K5 Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading Ruko MoI (Mall of Indonesia), Next to Lobby 5, Block K5, Jl. Boulevard Barat, Kelapa Gading
Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Penugasan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Assignment for the Preparation of the Circular Resolution of Shareholders Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Biaya Fee	Rp8.250.000,- (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Rp8,250,000 (Eight million two hundred fifty thousand rupiah)

Catatan: Tidak ada Perjanjian Hanya Biaya timbul bila ada pekerjaan saja
Note: No formal Agreement Fees are incurred only upon service provision

Kejaksaan
Prosecutors' Offices

Nama Lembaga/Profesi Institution/Profession Name	Kejaksaan Negeri Jakarta Utara North Jakarta Prosecutors' Office
Alamat Address	Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok, North Jakarta
Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Assistance in Handling Civil and Administrative Law Issues
Periode Penugasan Assignment Period	9 Maret 2023-8 Maret 2025 March 9, 2023 – March 8, 2025
Biaya Fee	Tidak ada None

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATION

PENGHARGAANI

AWARDS

12 Februari 2024
February 12, 2024



K3 *Safety Concern Awards* 2024
Ohs Safety Concern Awards 2024

Performasi Implentasi K3 Anak Usaha Terbaik
Best Ohs Implementation Performance By A Subsidiary

Pelindo Regional 2

Nasional
National

29 Februari 2024
February 29, 2024



Branch Terbaik - Kriteria Operasional
Best Branch - Operational Criteria

Branch Terbaik I - Kriteria Operasional
Best Branch I - Operational Criteria

PT Pelindo Multi Terminal

Nasional
National

29 Februari 2024
February 29, 2024



Branch Terbaik - Kriteria Operasional
Best Branch - Operational Criteria

Branch Terbaik II - Kriteria Operasional
Best Branch II - Operational Criteria

PT Pelindo Multi Terminal

Nasional
National

19 Februari 2024
February 19, 2024



Annual Report Competition 2022/23

Silver Award

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

19 Februari 2024
February 19, 2024



Annual Report Competition 2022/23

Top 100 *Reports Worldwide*

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

19 Februari 2024
February 19, 2024



Annual Report Competition 2022/23

Technical Achievement Awards

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

19 Februari 2024
February 19, 2024



Sustainability Report Competition 2022/23

Gold Award

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

19 Februari 2024
February 19, 2024



Sustainability Report Competition 2022/23

Top 100 *Reports Worldwide*

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

19 Februari 2024
February 19, 2024



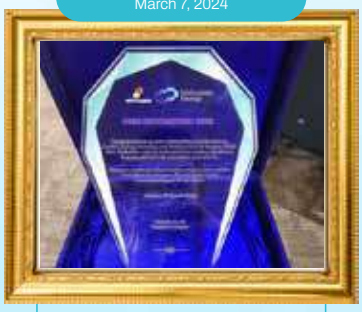
Sustainability Report Competition 2022/23

Technical Achievement Awards

League of American Communication Professionals (LACP)

Internasional
International

7 Maret 2024
March 7, 2024



Health, Safety, Security, & Environment

Hsse *Recognition* 2023

Mubadala Energy

Nasional
National

21 November 2024
November 21, 2024



Peringkat Perak
Silver Rating

Organisasi Menengah Besar Jasa
Medium to Large-Scale Service Organization

Badan Standardisasi Nasional
National Standardization

Nasional
National Agency

28 November 2024
November 28, 2024



Anak Usaha BUMN di Bidang Pelabuhan Umum
Soe Subsidiary in the Public Port

Anak Usaha Bumn di Bidang Pelabuhan Umum
Soe Subsidiary in the Public Port

Bisnis Indonesia Group

Nasional
National

SERTIFIKASI

CERTIFICATION

1

ISO 45001 : 2018 Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 45001 : 2018 Environmental Management System

PT SGS Indonesia

12 April 2021
April 12, 2021

12 April 2024
April 12, 2024

2

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS)

SGS

8 Februari 2022
February 8, 2022

8 Februari 2025
February 8, 2025

3

***Occupational Health & Safety Management System*- ISO 45001:2018**

bsi

7 Maret 2024
March 7, 2024

6 Maret 2027
March 6, 2027

4

***Anti-Bribery Management System*-ISO 37001:2016**

bsi

26 Mei 2024
May 26, 2024

25 Mei 2027
May 25, 2027

5

***Anti-Bribery Management System*-ISO 37001:2016**

bsi

12 Mei 2024
May 12, 2024

11 Mei 2027
May 11, 2027

6

***Quality Management System*-ISO 9001:2015**

bsi

7 Maret 2024
March 7, 2024

6 Maret 2027
March 6, 2027

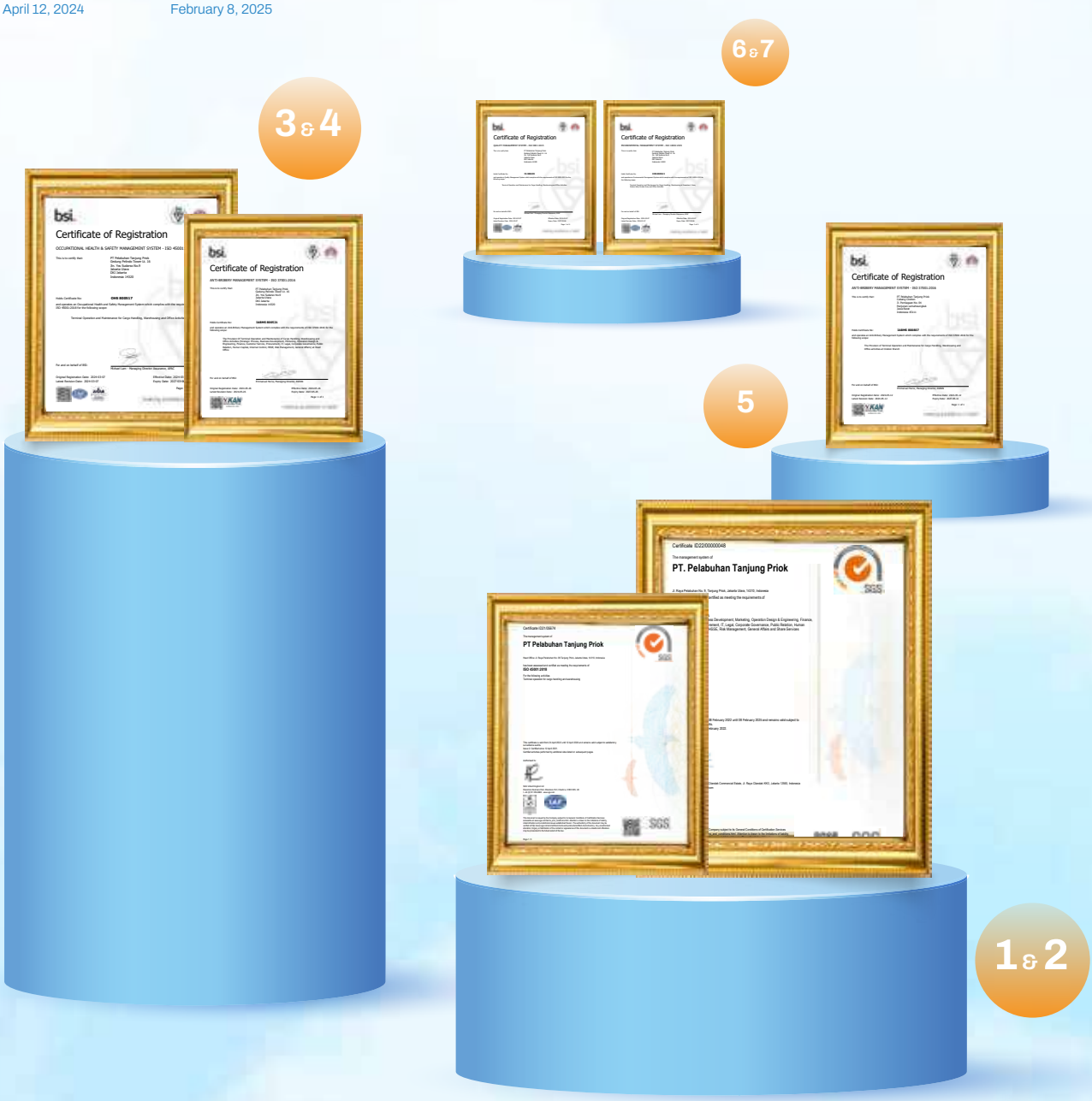
7

***Environmental Management System*-ISO 14001:2015**

bsi

7 Maret 2024
March 7, 2024

6 Maret 2027
March 6, 2027



INFORMASI PADA SITUS PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

PTP Terminal Nonpetikemas memiliki situs web resmi dengan alamat https://ptp.co.id/. yang diperuntukkan sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk menyampaikan beragam informasi umum mengenai Perusahaan. Seluruh informasi yang ditampilkan pada situs web Perusahaan dikelola secara profesional dan transparan. Informasi yang dimuat pada situs web Perusahaan disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

PTP Terminal Nonpetikemas operates an official website at https://ptp.co.id/, which serves as a communication platform for both external and internal parties to access a wide range of general information about the Company. All information presented on the Company's website is managed professionally and transparently. The information is provided in 2 (two) languages, Indonesian and English.

Informasi yang dapat di akses melalui *website* adalah sebagai berikut: Information accessible through the website is as follows:	
Profil Profile	1. Tentang Kami 2. Manajemen 3. Komite 4. Organ Pendukung Direksi 5. Struktur Pemegang Saham 6. Struktur Organisasi 7. Wilayah Operasi 8. Penghargaan 1. About Us 2. Management 3. Committees 4. Board of Directors Supporting Organs 5. Shareholder Structure 6. Organizational Structure 7. Operational Areas 8. Awards
GCG GCG	1. Pedoman Tata Kelola 2. RUPS 1. Corporate Governance Guidelines 2. General Meeting Of Shareholders
Layanan Services	1. Layanan Perusahaan 2. Proses Bisnis 3. Tarif 1. Corporate Services 2. Business Processes 3. Tariffs
Hubungan Investor Investor Relation	1. Laporan Tahunan 2. Laporan Keberlanjutan 3. Laporan Manajemen 1. Annual Report 2. Sustainability Report 3. Management Report
Pelanggan Customers	Kontak Pelanggan Customer Contact
TJSL CSR	Program TJSL CSR (Corporate Social Responsibility) Program
Pengadaan Procurement	

Perusahaan *mengupdate* informasi didalam website secara berkala bagi pemangku kepentingan dan *Stakeholder*. Selain situs web, Perusahaan juga memiliki media sosial untuk memberitahukan dan mengkomunikasikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube*, dan *LinkedIn*.

The Company regularly updates information on its website for stakeholders. In addition to the website, the Company also utilizes social media platforms to disseminate and communicate information to all stakeholders through Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and LinkedIn.

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Pada tahun 2024, perekonomian global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang moderat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Inflasi global, yang sempat melonjak di beberapa tahun terakhir, diprediksi akan menunjukkan penurunan, namun ketegangan geopolitik tetap menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dunia. Ketidakpastian politik dan keamanan di kawasan-kawasan strategis, seperti Eropa dan Timur Tengah, memperburuk ketegangan di pasar global, yang berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi domestik di banyak negara. Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh beberapa bank sentral besar masih membatasi ruang gerak ekonomi, meningkatkan biaya pinjaman, dan memperburuk ketidakpastian di pasar keuangan internasional.

Harga barang dan bahan baku yang terus meningkat, terutama dalam sektor energi dan pangan, memberikan tekanan tambahan pada daya beli konsumen di banyak negara. Kenaikan biaya hidup ini dapat memperburuk ketidakstabilan sosial-ekonomi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Masyarakat semakin tertekan oleh inflasi yang belum sepenuhnya mereda, sementara tingkat pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi di beberapa negara masih menjadi masalah besar yang perlu ditangani dengan lebih serius. Ketegangan ini memperburuk ketahanan sosial dan ekonomi, yang dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Ketegangan geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah diperkirakan akan terus memengaruhi harga energi di seluruh dunia. Lonjakan harga energi, terutama gas alam dan minyak, dapat memicu inflasi lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Meskipun demikian, ada tren positif menuju transisi energi terbarukan yang semakin kuat, dengan banyak negara besar yang meningkatkan investasi dalam infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan. Investasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Di sisi lain, sektor keuangan global juga menghadapi ketidakpastian besar terkait kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat. Meskipun tingkat pengangguran telah menunjukkan perbaikan, ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga acuan (*Fed Funds Rate*) yang lebih rendah masih tidak stabil. Fluktuasi ini memengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah AS serta memperkuat dolar AS, yang dapat berdampak pada negara-negara dengan utang luar negeri yang tinggi, serta memperburuk ketegangan di pasar valuta asing.

Dalam proyeksi Bank Indonesia, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang sama diprediksi untuk tahun 2025. Proyeksi ini mencerminkan stabilitas harga yang lebih terkendali dan pemulihan yang lebih terstruktur di beberapa sektor utama. Meskipun tantangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan moneter masih menghantui, ada optimisme bahwa transisi menuju ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi, dan kemajuan dalam

GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

In 2024, the global economy is projected to grow at a moderate pace, despite significant challenges. After surging in recent years, global inflation is expected to ease, however, geopolitical tensions continue to pose a substantial risk to global economic stability. Political and security uncertainties in strategic regions, particularly Europe and the Middle East, have heightened volatility in global markets, potentially hampering domestic economic recovery efforts in various countries. Furthermore, the high interest rate policies maintained by several major central banks have constrained economic momentum. These restrictive monetary stances have elevated borrowing costs, thereby exacerbating uncertainty in international financial markets.

The continued increase in commodity and raw material prices, particularly within the energy and food sectors, has exerted additional pressure on consumer purchasing power worldwide. Rising living costs have the potential to intensify socio-economic instability, particularly in developing countries. Many populations remain burdened by inflationary pressures that have yet to fully subside, while elevated unemployment rates and persistent social and economic inequality remain critical issues requiring urgent policy intervention. These tensions further weaken social and economic resilience, posing risks to the momentum of global economic recovery.

Geopolitical tensions across Europe and the Middle East are also expected to continue influencing global energy prices. Spikes in energy prices, especially for natural gas and crude oil, may trigger further inflationary pressures, which, in turn, could dampen global economic growth. Nonetheless, there is a growing positive trend toward renewable energy transition. Numerous developed countries have ramped up investments in green infrastructure and environmentally friendly technologies. These investments are aimed at fostering sustainable energy systems, with the ultimate goal of reducing dependence on fossil fuels and supporting long-term sustainable development objectives.

On another front, the global financial sector faces heightened uncertainty surrounding monetary policy directions, particularly in the United States. Although labor market indicators, such as unemployment rates, have shown signs of improvement, market expectations regarding a potential reduction in the Federal Funds Rate remain volatile. This policy uncertainty has influenced U.S. Treasury yields and contributed to the strengthening of the U.S. dollar, which could adversely impact highly leveraged emerging markets and exacerbate tensions in foreign exchange markets.

According to projections by Bank Indonesia, the global economy is expected to grow by 3.2% in 2024, with a similar growth rate forecasted for 2025. This outlook reflects a more contained inflationary environment and a more structured recovery across several key sectors. While geopolitical tensions and monetary policy uncertainties remain prominent risks, there is optimism that the ongoing transition toward a green economy, the acceleration of digital transformation, and progress in inclusive economic

pembangunan ekonomi inklusif akan menjadi faktor-faktor kunci yang mendorong perekonomian global ke arah yang lebih positif. Keberhasilan dalam mengelola ketegangan ini dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan akan menjadi penentu utama dalam menentukan arah perekonomian dunia di masa depan.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tetap menunjukkan stabilitas meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi. Dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03%, Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan yang cukup kuat menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi pasar global.

Konsumsi domestik, sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan momentum pertumbuhan yang stabil. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memperkuat program perlindungan sosial yang menjangkau kelompok masyarakat rentan. Selain itu, insentif yang diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak oleh gejolak ekonomi global, seperti pariwisata dan manufaktur, membantu meningkatkan daya saing serta menjaga lapangan pekerjaan di tengah tantangan internasional.

Seiring dengan perkembangan ini, sektor investasi juga terus menunjukkan tren positif, dengan perhatian yang lebih besar pada sektor-sektor yang berorientasi pada inovasi dan teknologi. Indonesia semakin menarik minat investasi asing, terutama dalam sektor energi terbarukan, teknologi digital, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi. Pemerintah terus mengupayakan berbagai reformasi untuk mempermudah proses investasi, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kemudahan berusaha. Hal ini diharapkan akan mendorong arus investasi yang lebih besar lagi, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada 2024 menunjukkan stabilitas yang relatif baik, meskipun tantangan dari ketidakpastian global masih ada. Dengan proyeksi pertumbuhan yang tetap positif, ada optimisme bahwa kebijakan yang lebih berfokus pada transformasi struktural, peningkatan investasi, dan penguatan sektor-sektor produktif akan semakin memperkokoh pondasi perekonomian Indonesia untuk jangka panjang. Upaya terus-menerus dalam memperbaiki iklim investasi, mendorong diversifikasi ekonomi, dan memastikan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.

development will serve as key drivers of global economic momentum. The ability of nations to effectively manage these risks and strategically allocate investments toward sustainability-oriented sectors will be critical in shaping the trajectory of the global economy in the years ahead.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

In 2024, Indonesia's economy demonstrated resilience and maintained overall stability despite continued global economic uncertainties. With a recorded GDP growth rate of 5.03%, Indonesia successfully navigated a complex external factor marked by commodity price fluctuations and heightened geopolitical tensions impacting global markets.

Domestic consumption, as the primary pillar of Indonesia's economic growth, played a critical role in sustaining growth momentum. The government implemented a range of strategic initiatives to preserve household purchasing power, including the expansion of social protection programs targeting vulnerable populations. Additionally, stimulus measures directed toward sectors affected by global economic volatility, such as tourism and manufacturing. have helped bolster competitiveness and safeguard employment amid external challenges.

Investment activity also continued on an upward trajectory, with increasing focus on innovation-driven and technology-oriented industries. Indonesia has become an increasingly attractive destination for foreign direct investment (FDI), particularly in renewable energy, digital technology, and high-tech manufacturing sectors. The government remains committed to structural reforms aimed at streamlining regulations and enhancing ease of doing business. These efforts are expected to drive further capital inflows and fortify the country's long-term economic resilience.

Overall, Indonesia's 2024 economic performance reflects relative stability in the face of global headwinds. With a positive growth outlook, there is growing confidence that continued emphasis on structural transformation, investment expansion, and productivity-led growth will strengthen the foundation of the national economy in the long term. Sustained efforts to improve the investment climate, encourage economic diversification, and ensure inclusive growth will be instrumental in keeping Indonesia on a sustainable development path.

RENCANA KERJA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 2024
2024 WORK PLAN AND STRATEGIC POLICIES

Rencana kerja dan kebijakan strategis untuk tahun 2024 tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Dalam penyusunan RKAP, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain:
1. Asumsi Ekonomi Makro
2. Asumsi Mikro
3. Sasaran dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) perusahaan
4. Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal

Penyusunan RKAP juga dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari pencapaian tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disusun sasaran utama, strategi, program kerja, dan target kinerja yang akan dicapai.

Penyusunan RKAP mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU.03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok HK.01/27/12/1/ANGG/DIRU/PT-23 tanggal; 27 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Selain itu, RKAP juga merujuk pada asumsi makro penyusunan RKAP 2024 mengacu pada RAPBN 2024 dan Nota Keuangan yang disampaikan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023 serta Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2024 pada tanggal 29 September 2023 nomor: S-491/MBU/09/2023.

Secara teknis, RKAP disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2024 PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).

The 2024 Work Plan and Strategic Policies are outlined in the 2024 Company's Work Plan and Budget (RKAP). The formulation of the RKAP is guided by various factors that may influence the Company's performance, including:
1. Macroeconomic assumptions
2. Microeconomic assumption
3. The Company's Management Goals and Work Plan (RKM)
4. Shareholder/Capital Owner aspirations

In developing the RKAP, the Company also took into account the evaluation results from the previous year's performance. These evaluations served as the foundation for defining key objectives, strategies, work programs, and performance targets.

The preparation of the RKAP is aligned with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 concerning the establishment, management, supervision, and dissolution of State-Owned Enterprises (SOEs), particularly the provisions mandating the Board of Directors to develop and submit the RKAP. It also refers to the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-10/MBU/2002 regarding the formulation of the RKAP for SOEs.

In addition, the RKAP preparation process refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-21/MBU/2012 on Guidelines for the Implementation of Financial Accountability in SOEs, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/07/2017, which amends the previous regulation concerning the SOE Partnership and Community Development Program, and Letter of the Minister of SOEs No. S-683/MBU/10/2022, which outlines shareholder aspirations for the preparation of the 2024 RKAP.

From a technical standpoint, the 2024 RKAP is developed in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of the 2024 RKAP Proposal of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RKAP Tahun 2024 sebagai berikut:

MACROECONOMIC ASSUMPTIONS
The macroeconomic assumptions used as the foundation for preparing the 2024 RKAP are as follows:

Indikator Indicator	Asumsi Makro RKAP Tahun 2024 Macro Macro Assumptio for the 2024 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,2%
Tingkat Inflasi Inflation Rate	2,8%
Kurs Rupiah per USD Rupiah Exchange Rate per USD	Rp15.000
Tingkat SBN SBN Rate	6,7%

ASUMSI MIKRO

MICRO ASSUMPTIONS

No	Uraian Description	Acuan Reference
1	*Shorebase* Lhokseumawe	*Shorebase* Harbour Shorebase Mubadala
2	Penerapan PSAK 73 PSAK 73 Implementation	Sewa Ruangan di Pelindo Tower Jangka Waktu 3 Tahun Room Lease at Pelindo Tower for a period of 3 years
3	Transformasi Cabang PTP PTP Branch Transformation	Melakukan Transformasi terkait Standarisasi Operasi pada 11 Cabang PTP Carrying out transformation related to operational standardization in 11 PTP branches
4	Pemurnian Bisnis Business Refinement	Akuisisi PT P3TPK Acquisition of PT P3TPK

ASUMSI KHUSUS

SPECIFIC ASSUMPTION

No	Uraian Description
1	Telak dilakukan *switching* nota pada 11 Cabang PTP ke SPMT Switching of invoices has been completed at 11 PTP branches to SPMT
2	Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi PTP dan Anak Perusahaan Study and implementation of the organizational structure of PTP and its subsidiaries
3	Migrasi Sistem Keuangan dari *Oracle* ke SAP Migration of the financial system from Oracle to SAP
4	Pengoperasian Gudang Banten Operation of the Banten Warehouse
5	Pengadaan Perangkat *Hardware* di PTP Kantor Pusat dan Cabang terkait standarisasi Operasi Procurement of hardware devices at PTP Head Office and Branches in accordance with operational standardization
6	Pendapatan atas kegiatan petikemas di PTP Cabang Pangkalbalam diserah operasikan ke IPC TPK pada TW IV 2024 Revenue from container activities at PTP Pangkalbalam Branch was transferred to IPC TPK in Q4 2024
7	Pengusahaan lapangan lini 2 di PTP cabang Tanjung Priok diserah operasikan ke MTI pada Februari 2024 Operation of Line 2 yard at PTP Tanjung Priok Branch was transferred to MTI in February 2024

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disebutkan di atas, perusahaan merumuskan sasaran dan rencana kerja manajemen untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Based on the aforementioned assumptions, the Company has formulated its management objectives and work plan for the 2024 fiscal year as follows:

Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

Proposed Corporate Management Work Plan (RKM) for 2024

Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi terhadap parameter-parameter biaya, pendapatan, keterkaitan dengan pihak lain, dan durasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, telah dipilih 9 RKM Strategis *Corporate* yang terdiri dari hal-hal berikut:

The proposed 2024 Management Work Plan (RKM) was developed through a comprehensive evaluation of cost parameters, revenue streams, interdependencies with external parties, and implementation timelines. Based on this evaluation, the Company has identified 9 strategic corporate RKMs, which consist of the following key initiatives:

No	Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Proposed Management Work Plan	Direktorat Directorate
1	Pengoperasian *Ship to Ship* Operationalization of Ship to Ship	Direktorat Komersil dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Directorate
2	Implementasi HSSE di seluruh cabang PT PTP Company-Wide Implementation of HSSE Standards across all PT PTP branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
3	Implementasi Standarisasi Operasi cabang PTP Implementation of Operational Standardization Across PTP Branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
4	Pelaksanaan investasi pengadaan fasilitas pendukung bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Kijing Execution of Investment for Supporting Facilities related to stevedoring activities at the Kijing Port Terminal	Direktorat Operasi Operation Directorate
5	Pengadaan dan Optimalisasi alat bongkar muat kebutuhan cabang-cabang PTP Procurement and Optimization of stevedoring Equipment to meet operational requirements at various PTP branches	Direktorat Operasi Operation Directorate

No	Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Proposed Management Work Plan	Direktorat Directorate
6	Pengadaan perangkat *Hardware* di Kantor Pusat dan Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Procurement of Hardware Infrastructure for PT Pelabuhan Tanjung Priok Headquarters and Branches	Direktorat Operasi Operation Directorate
7	Peningkatan kompetensi atau *skill* pengelolaan manajemen risiko Enhancing Risk Management Competence and Skills	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management
8	Kajian dan implementasi struktur organisasi PTP dan Anak Perusahaan Assessment and Implementation of Organizational Structure for PT PTP and its subsidiaries	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management
9	Sentralisasi *knowledge management* kepelabuhan Centralization of Port Knowledge Management	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management

Berikut adalah penjelasan dari masing masing Usulan 9 RKM Strategis *Corporate* Tahun 2024:

1. Peningkatan kompetensi atau *skill* pengelolaan manajemen risiko, melalui pelatihan dan sertifikasi untuk organ pengelola risiko
2. Pengoperasian *Ship to Ship* target EBT Rp500.000.000
3. Implementasi Standarisasi Operasi cabang PTP, dengan target pada standarisasi Tanjung Priok Internasional dan *enhancement* Banten
4. Implementasi HSSE di seluruh cabang PT PTP dengan target:
   a. *Zero Fatality*
   b. Implementasi Kegiatan HSSE
   c. Tindak Lanjut Paska Audit
   d. Emergency Drilling 1x
   e. Evaluasi Program K3 1Xper semester
   f. Capaian BA/Pakta integritas ke *external*
5. Pelaksanaan investasi pengadaan fasilitas pendukung bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Kijing dengan target EBT Rp1.028.701.701
6. Pengadaan dan Optimalisasi alat bongkar muat kebutuhan cabang-cabang PTP dengan target EBT Rp4.000.000.000
7. Pengadaan perangkat TI di PTP kantor pusat dan cabang, dengan target penyediaan layanan *backup server* dan/ atau jaringan di area PT Pelabuhan Tanjung Priok
8. Kajian dan implementasi struktur organisasi PTP dan Anak Perusahaan dengan target reviu struktur dan penempatan SDM Anak Perusahaan
9. Sentralisasi *knowledge management* kepelabuhan dengan target *roadmap* KM, *knowledge Map* PTP, dan pelaksnaan program budaya AKHLAK (2 program terselenggara)

SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran Umum Berdasarkan Agenda Prioritas BUMN

Tujuan Perusahaan merujuk pada capaian-capaian yang ingin diraih oleh Perusahaan dalam tahun anggaran yang berlaku. Merujuk pada petunjuk dari Kementerian BUMN dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) *Holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, tujuan Perusahaan dirancang agar sejalan dengan lima agenda utama BUMN, yaitu: Nilai Ekonomi dan Sosial bagi Indonesia, Inovasi Model Bisnis,

The following outlines the details of the nine proposed Strategic Corporate Management Work Plans (RKM) for the 2024 fiscal year:

1. Enhancing Risk Management Competence and Skills through structured training and certification programs for designated risk management personnel.
2. Operationalization of Ship to Ship Operations with the EBT target of Rp500,000,000
3. Implementation of Operational Standardization Across PTP Branches, with a focus on standardizing operations at Tanjung Priok International and enhancing operational procedures at the Banten branch
4. Company-Wide Implementation of HSSE Standards across all PT PTP branches with target:
   a. Zero Fatality
   b. Implementation of HSSE Activities
   c. Follow-up After Audit
   d. Emergency Drilling 1x
   e. Evaluation of K3 Program 1x per semester
   f. Achievement of BA/Integrity Pact to external
5. Investment realization for the procurement of supporting loading and unloading facilities at the Kijing Port Wharf with an EBT target of Rp1,028,701,701.
6. Procurement and Optimization of stevedoring Equipment to meet operational requirements at various PTP branches with target EBT Rp4.000.000.000
7. Procurement of IT Infrastructure for PTP Headquarters and Branches, targeting the provision of backup server and/ or network services across PT Pelabuhan Tanjung Priok operational areas
8. Assessment and Implementation of Organizational Structure for PT PTP and its subsidiaries with the target to review the structure and placement of human resources in the subsidiary
9. Centralization of Port Knowledge Management port with target roadmap KM, knowledge Map PTP, and implementation of AKHLAK cultural programs (2 programs held)

CORPORATE TARGETS

General Targets Based on SOE Priority Agendas

The Company's objectives are aligned with the performance achievements set for the current fiscal year. Referring to the directives issued by the Ministry of SOEs and the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the holding entity, the Company's objectives are structured in accordance with the five key strategic agendas of the SOEs Ministry, particularly: Economic and Social Value for Indonesia,

Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta, yang telah diterapkan sejak tahun 2021.

Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Acceleration, and Talent Development, which have been applied since 2021.

Sasaran Perusahaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

The Corporate targets for the 2024 fiscal year can be defined as follows:

Aspek Aspect		Sasaran Targets
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	Finansial Financial	Keseimbangan kepentingan Jangka Pendek dengan peningkatan performansi finansial perusahaan untuk pertumbuhan bisnis Jangka Panjang Balance in short-term interests with improvement of company's financial performance for long-term business growth
	Operasional Operational	Peningkatan performansi operasional untuk memberi *value added* pada setiap Pelayanan Barang di Terminal Improved operational performance to provide added value to each Goods Service at the Terminal
	Sosial Social	Pengembangan Terminal untuk mendukung peningkatkan daya saing komoditi barang di pasar global maupun domestik yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Development of Terminal to support the increasing competitiveness of commodity goods in global and domestic markets which will have an impact on people's welfare
Model Bisnis Business Model		Kolaborasi, Sinergi dan Integrasi Terminal untuk pengelolaan bisnis kepelabuhanan yang lebih efektif & efisien guna penciptaan nilai (*value creation*) yang lebih optimal Terminal Collaboration, Synergy and Integration for more effective & efficient port business management for more optimal value creation
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		Digitalisasi proses bisnis perusahaan dan inisiasi penggunaan teknologi ramah lingkungan Digitizing the company's business processes and initiating the use of environmentally friendly technologies
Peningkatan Investasi Increased Investment		Optimalisasi pendayagunaan aset dan pengembangan infrastruktur di seluruh terminal untuk penyempurnaan standarisasi Optimization of asset utilization and infrastructure development in all terminals to improve standardization
Pengembangan Talenta Talent Development		Meningkatkan kompetensi dan performasi pegawai Mendorong lingkungan inklusif untuk memberikan diversity pemikiran pada level struktural Improving employee competency and performance to encouraging an inclusive environment and provide diversity of thought at the structural level

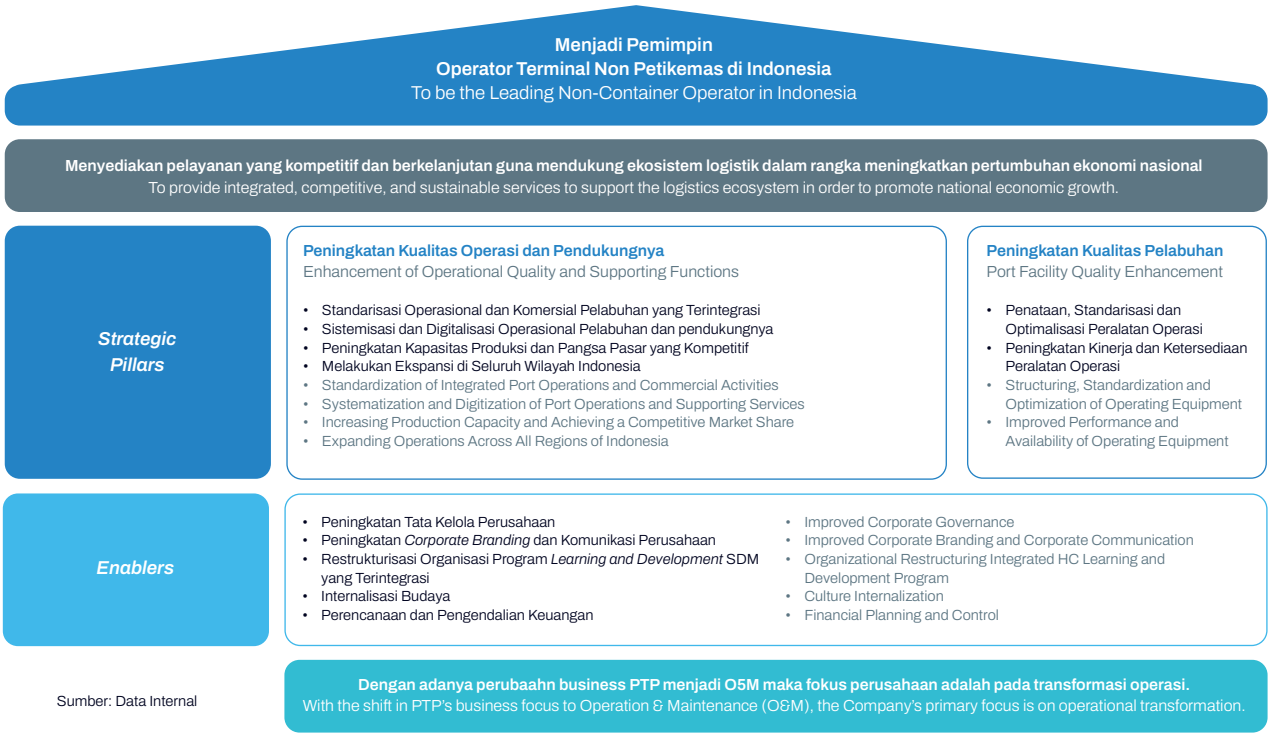
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

Untuk mencapai target kinerja Perusahaan pada tahun 2024, Perusahaan telah merumuskan strategi yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024. Rencana strategis yang diterapkan bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, infrastruktur produksi, sistem informasi dan komunikasi, serta sistem manajemen dan keuangan yang modern untuk mencapai tujuan perusahaan.

In order to achieve the Company's performance targets in 2024, the Company has formulated strategies as outlined in the Corporate Long-Term Plan (RJPP) 2020–2024. The implemented strategic plans are intended to support the seamless execution of business operations by optimizing available resources, including human capital, corporate governance, production infrastructure, information and communication systems, as well as modern management and financial systems, in order to achieve the Company's objectives.

Adapun, strategi yang akan dilaksanakan Perusahaan pada tahun 2024, yang tercantum dalam RJPP, meliputi hal-hal berikut:

The strategies to be implemented by the Company in 2024, as stated in the RJPP, include the following:



Sumber: Data Internal

STRATEGIC PILLAR

1. Peningkatan Kualitas Operasi dan Pendukungnya
   Merupakan strategi yang dirancang oleh Perseroan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas layanan, kinerja, serta pengembangan bisnis sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi operator terminal profesional. Aktivitas yang disiapkan dalam rangka peningkatan kualitas operasi dan pendukungnya meliputi standarisasi operasional dan komersial pelabuhan yang terintegrasi, sistemisasi dan digitalisasi operasional pelabuhan dan pendukungnya, peningkatan kapasitas produksi & pangsa pasar yang kompetitif, serta melakukan ekspansi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Peningkatan Kualitas Fasilitas Pelabuhan
   Merupakan strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas fasilitas pelabuhan di seluruh cabang PTP Non Petikemas. Strategi ini sejalan dengan visi perusahaan menjadi pemimpin operator terminal non petikemas di Indonesia dimana memilki fasilitas yang memadai. Aktivitas yang disiapkan dalam rangka implementasi strategi ini meliputi penataan, standarisasi, dan optimaliasi peralatan operasi, serta peningkatan kinerja dan ketersediaan peralatan operasi.

ENABLERS

Enablers mencakup bidang-bidang pendukung keberjalanan bisnis utama, yaitu peningkatan Tata Kelola Perusahaan, peningkatan *corporate branding* dan komunikasi perusahaan, restrukturisasi organisasi, program *learning and development* yang terintegrasi, internalisasi budaya, dan perencanaan dan pengendalian keuangan. Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya enablers yang harus direalisasikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok

STRATEGIC PILLARS

1. Enhancing Operational Quality and Supporting Functions
   It is designed to improve and optimize the quality of services, performance, and business development in alignment with the Company's vision to become a professional terminal operator. Key initiatives under this pillar include the integration and standardization of port operational and commercial activities, the systemization and digitalization of port operations and supporting functions, the expansion of production capacity and competitive market share, and the execution of business expansion across various regions in Indonesia.

2. Improving the Quality of Port Facilities
   This strategy focuses on enhancing the quality of port facilities across all non-container terminal branches of PTP. It is aligned with the Company's vision to become the leading non-container terminal operator in Indonesia by ensuring adequate and reliable port infrastructure. Activities prepared under this strategy include the structuring, standardization, and optimization of operational equipment, as well as improving the performance and availability of such equipment to meet operational demands.

ENABLERS

The enablers represent key support areas ensuring the effective implementation of the Company's core business strategies. These include the enhancement of Corporate Governance, strengthening of corporate branding and communication, organizational restructuring, integrated learning and development programs, internalization of corporate culture, and comprehensive financial planning and control. All strategic pillars are supported by these enablers, which must be effectively realized by PT Pelabuhan Tanjung Priok.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
REVIEW OF BUSINESS SEGMENT OPERATION

PENJELASAN SEGMEN USAHA

Pembahasan mengenai tinjauan segmen usaha dalam laporan ini didasarkan pada pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, yang disusun sesuai dengan PSAK 5 tentang Segmen Operasi. Segmen usaha merujuk pada bagian dari Perusahaan yang beroperasi dalam menyediakan produk atau jasa tertentu, atau beroperasi dalam lingkungan ekonomi tertentu, yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dibandingkan dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, aset, dan liabilitas pada masing-masing segmen mencakup item-item yang dapat langsung diatribusikan kepada segmen tersebut, serta item yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai.

DETAILS ON BUSINESS SEGMENT

The discussion on business segment performance in this report is based on the segment classification presented in the Company's Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with PSAK 5 regarding Operating Segments. A business segment refers to a component of the Company that engages in providing specific products or services, or operates within a particular economic environment, and is subject to risks and returns that are distinct from those of other segments.

Revenue, expenses, assets, and liabilities in each segment include items that are directly attributable to that segment, as well as items that can be allocated on a reasonable and consistent basis.

SEGMEN USAHA PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
Business Segment of PTP Terminal Nonpetikemas

SEGMEN OPERASI KEPELABUHAN
Port Opertation Segment

SEGMEN GEOGRAFIS
Geographic Segment

Perusahaan mengelola bisnisnya dalam satu segmen operasi kepelabuhanan, yang fokus pada penyediaan layanan jasa nonpetikemas serta jasa lainnya. Secara geografis, operasional Perusahaan mencakup beberapa wilayah, antara lain Tanjung Priok, Panjang, Banten, Bengkulu, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Palembang, Jambi, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan

The Company operates its business under a single operating segment in the port services sector, with a focus on providing non-container terminal services and other related services. Geographically, the Company's operations span multiple regions, including Tanjung Priok, Panjang, Banten, Bengkulu, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Palembang, Jambi, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan.

SEGMEN OPERASI KEPELABUHAN

Perkembangan Segmen Kepelabuhan

PTP Terminal Nonpetikemas memulai operasinya pada 2014 dengan fokus pada layanan kapal, barang, dan jasa lainnya di Pelabuhan Tanjung Priok, meliputi Terminal 1, 2, 3, Lini Dua, serta area yang dikelola oleh Divisi Properti PT Pelabuhan Indonesia II.

Pada 2018, Perusahaan mengalami transformasi besar dengan beralih menjadi Terminal Operator *Multipurpose*, yang mencakup kargo kemasan, perlengkapan proyek, hasil ternak, serta kargo curah cair dan curah kering. Perubahan ini juga memperluas cakupan operasional menjadi 11 cabang di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Cabang Banten, Cabang Panjang, Cabang Bengkulu, Cabang Jambi, Cabang Teluk Bayur, Cabang Palembang, Cabang Cirebon, Cabang Pangkal Balam, Cabang Pontianak, dan Cabang Tanjung Pandan.

Transformasi ini memungkinkan Perusahaan untuk mengembangkan layanan kargo *multipurpose* baik di dalam negeri maupun internasional, menjadikannya operator terminal *multipurpose* pertama di Indonesia yang menangani beragam jenis kargo.

PORT SEGMENT DEVELOPMENT

Port Operations Segment

PTP Terminal Nonpetikemas commenced its operations in 2014, focusing on vessel services, cargo handling, and other related services at Tanjung Priok Port. Operations initially covered Terminal 1, 2, 3, Line Two, and areas managed by the Property Division of PT Pelabuhan Indonesia II.

In 2018, the Company underwent a major transformation, transitioning into a Multipurpose Terminal Operator. This shift expanded its service offerings to include packaged cargo, project equipment, livestock, as well as liquid and dry bulk cargo. The transformation also broadened its operational coverage to 11 branch locations across Indonesia, namely PTP Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok Branch, Banten Branch, Panjang Branch, Bengkulu Branch, Jambi Branch, Teluk Bayur Branch, Palembang Branch, Cirebon Branch, Pangkal Balam Branch, Pontianak Branch, and Tanjung Pandan Branch.

The transformation enabled the Company to provide integrated multipurpose cargo handling services, both domestically and internationally, making it the first multipurpose terminal operator in Indonesia to manage such a wide range of cargo types.

Pada 2022, setelah pembentukan *holding* dan *sub holding* pelabuhan, pengendali Perusahaan berubah dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), yang mengarah pada perubahan fokus bisnis menjadi *Operation and Maintenance*. Perusahaan kemudian menandatangani perjanjian kerja sama dengan SPMT untuk pengoperasian dan pemeliharaan terminal *multipurpose* selama 10 tahun, mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2032.

Hingga akhir tahun 2024, pada segmen operasi kepelabuhan, PTP Terminal *Multipurpose* menyediakan jasa nonpetikemas dan jasa lainnya.

Jasa nonpetikemas meliputi jasa dan layanan:

In 2022, following the establishment of the port holding and sub-holding structure, the Company's controlling shareholder shifted from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal (SPMT). As a result, the Company's business focus transitioned to Operation and Maintenance. The Company subsequently entered into a partnership agreement with SPMT for the operation and maintenance of multipurpose terminals for a period of 10 years, effective from January 1, 2022 to December 31, 2032.

As of the end of 2024, within its port operations segment, PTP Multipurpose Terminal continues to provide non-container terminal services and other related services.

The non-container terminal services include:

Jasa dan Layanan PTP Terminal Nonpetikemas
Product and Services of PTP Terminal Nonpetikemas



Adapun barang yang dilayani Perusahaan yaitu kargo kemasan, perlengkapan proyek, hasil ternak *livestock*, dan kargo umum lainnya, curah cair, dan curah kering.

Sementara pada jasa lainnya, meliputi:
1. Kerja sama pelabuhan;
2. Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik (TBAL);
3. Pengusahaan alat; dan
4. Terminal petikemas

The types of cargo handled by the Company include packaged cargo, project equipment, livestock, and other general cargo, as well as liquid bulk and dry bulk cargo.

Meanwhile, the other services provided by the Company include:
1. Port Sharing Revenue;
2. Land, buildings, water, and electricity (TBAL) services;
3. Equipment services; and
4. Container terminal services.

KINERJA SEGMEN KEPELABUHAN

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, kegiatan usaha pada segmen kepelabuhan yang berkontribusi terhadap pendapatan Perusahaan adalah pelayanan jasa terminal, kerja sama pelabuhan, pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik (TBAL), pengusahaan alat, dan terminal petikemas.

Kontribusi Jasa dan Layanan Terhadap Pendapatan Perusahaan

Segmen operasi kepelabuhanan berkontribusi terhadap kinerja keuangan Perusahaan, baik dari sisi pendapatan, laba, maupun aset. Adapun kontribusi segmen operasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PORT SEGMENT PERFORMANCE

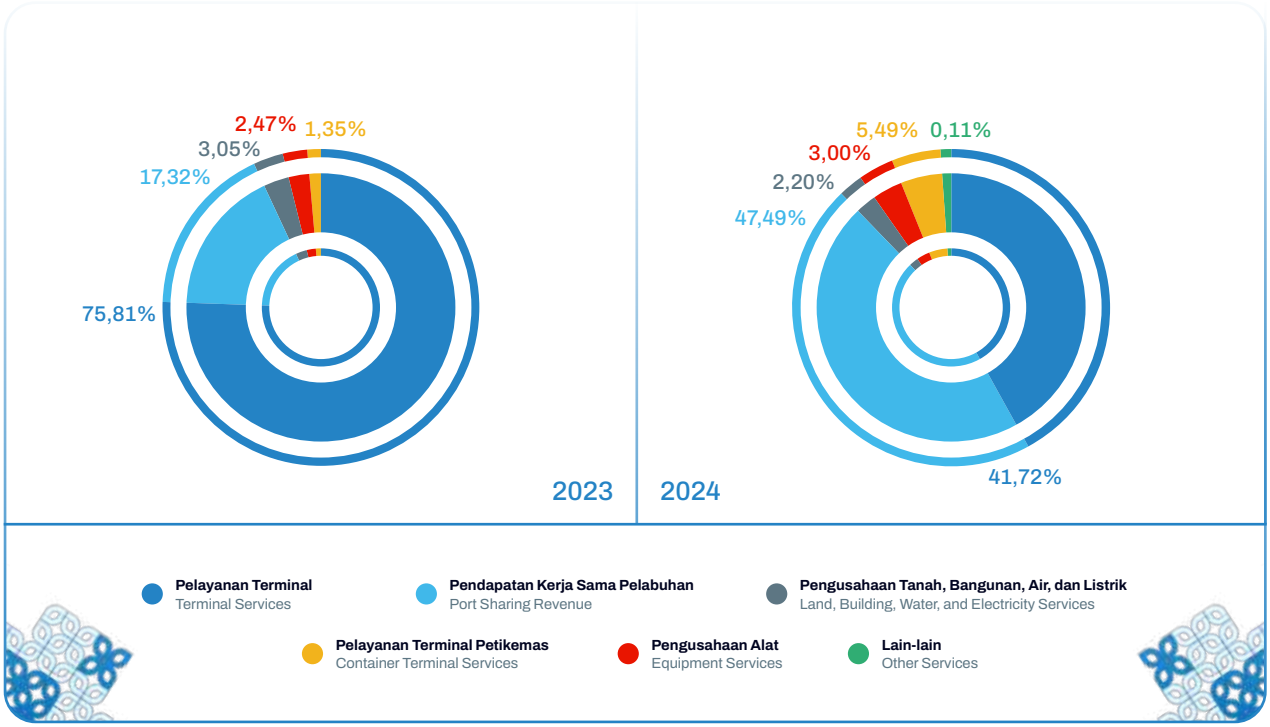
Based on the audited Financial Statements by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, the business activities within the port operations segment that contributed to the Company's revenue include terminal services, port sharing revenue, land, buildings, water, and electricity (TBAL) services, equipment services, and container terminal services.

Contribution of Services to Company Revenue

The port operations segment has contributed significantly to the Company's financial performance in terms of revenue, profit, and assets. The contribution of the port operations segment to the Company's financial performance over the past 2 (two) years is as follows:

Tabel Kontribusi Segmen Operasi terhadap Pendapatan Perusahaan 2023-2024
Contribution of Operating Segment to the Company's Revenue 2023-2024

Segmen Operasi Kepelabuhan Port Operations Segment	**2024**		**2023**		**Pertumbuhan** Growth	
	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Nominal (Rp-juta)** Nominal (Rp-million)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Pelayanan Terminal Terminal Services	613.483	41,72%	1.391.578	75,81%	(778.095)	-55,91%
Pendapatan Kerja Sama Pelabuhan Port Sharing Revenue	698.299	47,49%	318.000	17,32%	380.299	119,59%
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water, and Electricity Services	32.296	2,20%	56.004	3,05%	(23.708)	-42,33%
Pengusahaan Alat Equipment Services	44.052	3,00%	45.284	2,47%	(1.232)	-2,72%
Pelayanan Terminal Petikemas Container Terminal Services	80.651	5,49%	24.839	1,35%	55.812	224,70%
Lain-lain Other Services	1.607	0,11%	-	-	1.607	100,00%
Jumlah Pendapatan **Total Revenue**	**1.470.387**	**100,00%**	**1.835.705**	**100,00%**	**(365.318)**	**-19,90%**



Di tahun 2024, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan operasi sebesar Rp1,47 triliun, mengalami penurunan Rp365,32 miliar atau 19,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,84 triliun. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan tahun 2024 berasal dari pendapatan kerja sama pelabuhan sebesar 47,49%, dan kontribusi terkecil berasal dari lain-lain sebesar 0,11%. Adapun penjelasan perkembangan kinerja jasa layanan usaha Perusahaan, sebagai berikut:

PENJELASAN PELAYANAN JASA TERMINAL

Perusahaan menyediakan berbagai layanan terminal, antara lain *stevedoring, cargodoring*, menerima dan mengirimkan barang (*receiving and delivering*), *stripping* dan *stuffing, lift on lift off, trucking*, serta pengelolaan lapangan.

Proses Layanan Bongkar Muat Nonpetikemas

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan, Perusahaan menerapkan prosedur, alur, atau tahapan dalam layanan bongkar muat. Secara umum, prosedur layanan bongkar muat barang yang dilakukan adalah sebagai berikut:

In 2024, the Company recorded operating revenue of Rp1.47 trillion, representing a decrease of Rp365.32 billion or 19.90% compared to Rp1.84 trillion in 2023. The largest contributor to 2024 revenue was port sharing revenue, amounting for 47.49% of total revenue, while the smallest contribution came from miscellaneous income, at 0.11%. The following provides a detailed explanation of the Company's business service performance:

TERMINAL SERVICE OPERATIONS

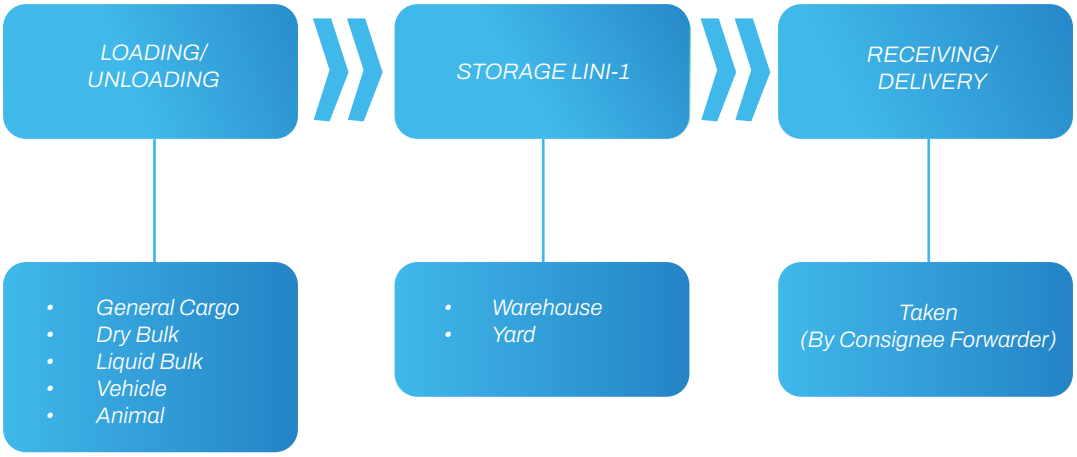
The Company offers a range of terminal services, including: Stevedoring, Cargodoring, Receiving and delivering of goods, Stripping and stuffing, Lift-on lift-off operations, Trucking services, and Yard management.

Non-Container Stevedoring Procedures

In order to enhance operational effectiveness, efficiency, and customer satisfaction, the Company has implemented structured procedures and process flows for stevedoring services. In general, the procedures are as follows:

Proses Kegiatan Bongkar Muat Barang Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas

Non-Container Stevedoring Process at PTP Terminal Nonpetikemas



Sebelum kegiatan bongkar muat dimulai, pelanggan mendaftar secara *online* ke tim operasi PTP Terminal Nonpetikemas dan mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditentukan.

Selanjutnya, dilakukan kegiatan *stevedoring* untuk bongkar muat barang dari dan ke kapal. Perusahaan melayani muatan barang berupa:

1. *General Cargo*
2. Curah Kering
3. Curah Cair
4. Kendaraan
5. Hewan

Setelah bongkar muat, barang akan dipindahkan ke lapangan penumpukan untuk proses *cargodoring*. Di sini, PTP Terminal Nonpetikemas menyediakan layanan perawatan dan pengawasan barang, termasuk *stacking services* dan penggunaan peralatan mekanik.

Setelah itu, barang akan melalui proses *delivery*, yaitu pengiriman barang dari lapangan penumpukan ke luar area terminal (*gate out*) atau sebaliknya oleh pemilik barang.

Prior to the commencement of loading and unloading activities, customers must register online with the operations team of PTP Terminal Nonpetikemas and follow a series of predefined procedures.

The stevedoring process is then conducted to load or discharge cargo to and from the vessel. The types of cargo handled include:

1. General Cargo
2. Dry Bulk
3. Liquid Bulk
4. Vehicles
5. Livestock

After stevedoring, the cargo is transferred to the stacking yard for cargodoring operations. At this stage, PTP Terminal Nonpetikemas provides cargo care and monitoring services, including stacking services and the use of mechanical handling equipment.

Subsequently, the cargo enters the delivery phase, which involves the transportation of goods from the stacking yard to outside the terminal area (gate out) or vice versa, as managed by the cargo owner.

Produktivitas Pelayanan Jasa Terminal

Terminal Services Productivity

Tabel Produktivitas Berdasarkan Arus Barang 2023-2024
Productivity Table Based on Cargo Flow in 2023-2024

Berdasarkan Trafik/Arus Barang
Based on Traffic/Cargo Flow

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
				Selisih Difference	(%)
General Cargo	Ton Tons	10.131.190	8.667.887	1.463.303	16,88
	m^3	1.424.987	1.341.856	83.131	6,20
Bag Cargo	Ton Tons	3.048.694	3.228.445	(179.751)	(5,57)
Curah Cair Liquid Bulk	Ton Tons	10.274.554	11.604.051	(1.329.497)	(11,46)
Curah Kering Dry Bulk	Ton Tons	22.167.360	22.494.718	(327.358)	(1,46)
Gas	Ton Tons	-	-	-	-
	MMBT	-	-	-	-
Kendaraan Vehicles	Ton Tons	-	-	-	-
	Unit	101.127	142.529	(41.402)	(29,05)
Hewan Livestocks	Ton	-	-	-	-
	Ekor Heads	535.937	373.232	162.705	43,59
Petikemas Container	*Box*	216.339	203.226	13.113	6,45
	TEUs	233.581	216.891	16.690	7,70
Total	Ton Tons	45.621.798	45.995.101	(373.303)	(0,81)
	m^3	1.424.987	1.341.856	83.131	6,20
	Box	216.339	203.226	13.113	6,45
	TEUs	233.581	216.891	16.690	7,70
	Unit	101.127	142.529	(41.402)	(29,05)
	Ekor Heads	535.937	373.232	162.705	43,59
	Ton/m^3 Tons/m^3	47.046.785	47.336.957	(290.172)	(0,61)

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan merealisasikan jasa layanan bongkar muat berdasarkan kemasan sebesar 45.621.798 ton di bawah realisasi 2023 sebesar 290.172 ton atau 0,61%. Dan untuk m^3 terealisasi sebesar 1.424.987 m^3 atau meningkat dari realisasi 2023 sebesar 83.131 m^3 atau 6,20%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

As of the end of 2024, the Company recorded a total volume of cargo handling services based on packaging of 45,621,798 tons, which was 290.172 tons or 0.61% lower than the 2023 realization. In terms of volume, the realization reached 1,424,987 m^3, an increase of 83,131 m^3 or 6.20% compared to 2023. This can be explained as follows:

Arus Barang Umum (*General Cargo*)

General Cargo Flow

Realisasi tahun 2024 tercatat sebesar 10.131.190 ton atau 16,88% di atas realisasi 2023 yang tercatat sebesar 8.667.887 ton. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 untuk arus barang *general cargo* sebesar 8.573.273 ton.
2. PTP cabang Banten realisasi tahun 2024 untuk arus barang *general cargo* sebesar 837.912 ton.
3. PTP cabang panjang realisasi tahun 2024 untuk barang *general cargo* sebesar 220.016 ton.

The realization in 2024 was recorded at 10,131,190 tons, or 16.88% higher than the 2023 realization of 8,667,887 tons. It was due to:

1. PTP Tanjung Priok Branch's 2024 realization for general cargo flow of 8,573,273 tons
2. PTP Banten Branch's 2024 realization for general cargo flow of 837,912 tons
3. PTP Panjang Branch's 2024 realization for general cargo flow of 220,016 tons

Arus Barang dalam Karung (*Bag Cargo*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Bag Cargo* tercapai sebesar 3.048.694 ton turun 5,57% dari realisasi 2023 sebesar 3.228.445 ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 sebesar 126.254 ton.
2. PTP cabang Pangkal Balam realisasi tahun 2024 sebesar 332.762 ton.
3. PTP cabang Palembang realisasi tahun 2024 sebesar 220.694 ton.

Arus Barang Curah Cair (*Liquid Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Liquid Bulk* tercapai sebesar 10.274.554 ton, menurun 11,46% dari realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 11.604.051 ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP cabang Panjang realisasi tahun 2024 sebesar 883.923 ton, menurun 37,80% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.421.065 ton.
2. PTP cabang Palembang realisasi tahun 2024 sebesar 925.925 ton, menurun 17,04% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.116.135 ton.
3. PTP cabang Teluk Bayur realisasi tahun 2024 sebesar 2.783.465 ton, menurun 12,13% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3.167.5769 ton.

Arus Barang Curah Kering (*Dry Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *Dry Bulk* tercapai sebesar 22.167.360 Ton menurun sebesar 1,46% dari realisasi tahun 2023 sebesar 22.494.718 ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP cabang Banten realisasi tahun 2024 sebesar 2.794.946 ton, turun 13,12% dari tahun 2023 sebesar 3.216.921 ton.
2. PTP cabang Jambi realisasi tahun 2024 sebesar 124.438 ton, turun 76,85% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 537.447 ton.
3. PTP cabang Bengkulu realisasi tahun 2024 sebesar 3.943.740 ton, turun 6,57% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4.221.037 ton.

Arus Barang Petikemas (*Container*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Petikemas (*Container*) tercapai sebesar 233.581 TEUs, meningkat sebesar 7.70% dari realisasi tahun 2023 sebesar 216.891 TEUs. Hal ini disebabkan pada PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 sebesar 134.893 Teus, naik 11,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 121.208 Teus, hal ini disebabkan peningkatan trafik untuk kegiatan B/M kapal Petikemas milik PT Tanto, PT Salam Pasific Indonesia Lines, PT Solusi Mudah Logistic dan beberapa kapal kombo yaitu PT Citra Dermaga Perkasa, PT Firma Berkah Jaya, dan PT Hemprisa Karyasaksama.

Arus Barang Kendaraan

Realisasi arus barang kendaraan tahun 2024 tercapai sebanyak 101.127 unit, menurun 29,05% dari realisasi 2023 sebanyak 142.529 unit. Hal ini disebabkan PTP cabang Panjang realisasi tahun 2024 sebesar 77 unit, turun 99,88% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 62.237 unit, penurunan ini dipengaruhi oleh belum

Bag Cargo Flow

The 2024 realization for bag cargo flow reached 3,048,694 tons, down 5.57% from the 2023 realization of 3,228,445 tons. It was due to the following:

1. PTP Tanjung Priok Branch's 2024 realization of 126,254 tons.
2. PTP Pangkal Balam Branch's 2024 realization of 332,762 tons.
3. PTP Palembang Branch's 2024 realization of 220,694 tons.

Liquid Bulk Cargo Flow

In 2024, the realization of liquid bulk cargo flow reached 10,274,554 tons, a decrease of 11.46% compared to the 2023 realization of 11,604,051 tons. The decline was due to the following:

1. PTP Panjang Branch 2024 realization was 883,923 tons, down 37.80% from 1,421,065 tons in 2023
2. PTP Palembang Branch 2024 realization was 925,925 tons, down 17.04% from 1,116,135 tons in 2023
3. PTP Teluk Bayur Branch 2024 realization was 2,783,465 tons, down 12.13% from 3,167,576 tons in 2023

Dry Bulk Cargo Flow

The realization of dry bulk cargo in 2024 reached 22,167,360 tons, a decrease of 1.46% from the 2023 realization of 22,494,718 tons. It was due to the following:

1. PTP Banten Branch 2024 realization was 2,794,946 tons, down 13.12% from 3,216,921 tons in 2023
2. PTP Jambi Branch 2024 realization was 124,438 tons, down 76.85% from 537,447 tons in 2023
3. PTP Bengkulu Branch 2024 realization was 3,943,740 tons, down 6.57% from 4,221,037 tons in 2023

Container Cargo Flow

In 2024, the realization of container cargo flow reached 233,581 TEUs, representing an increase of 7.70% from 216,891 TEUs in 2023. This growth was primarily attributed to the performance of PTP Tanjung Priok Branch, which recorded 134,893 TEUs in 2024, an increase of 11.29% compared to 121,208 TEUs in 2023. The improvement was driven by higher traffic in container vessel loading and unloading activities involving operators such as PT Tanto, PT Salam Pacific Indonesia Lines, PT Solusi Mudah Logistic, and several combo vessels operated by PT Citra Dermaga Perkasa, PT Firma Berkah Jaya, and PT Hemprisa Karyasaksama.

Vehicle Cargo Flow

In 2024, vehicle cargo flow reached 101,127 units, a decrease of 29.05% from 142,529 units in 2023. The decline was largely due to the performance of PTP Panjang Branch, which recorded only 77 units in 2024, down 99.88% from 62,237 units in 2023. This significant drop was attributed to the absence of a cooperation

adanya kesepakatan kerjasama antara PTP cabang Panjang dengan pihak PT Atosim Lampung Perdana.

agreement between PTP Panjang Branch and PT Atosim Lampung Perdana.

Arus Barang Hewan

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang Hewan tercapai sebesar 535.937 ekor meningkat 43,59% dari realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 373.232 ekor. Meningkatnya realisasi arus barang hewan tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan Sapi Impor sejalan dengan perayaan hari raya natal dan tahun baru. Selain itu, terjadi peningkatan kapal yaitu 12 kapal yang terdiri dari *customer* PT Citra Dermaga Perkasa, PT Sinatra Dewa Samudra, dan PT Tiga Bintang Andalas.

Livestock Cargo Flow

In 2024, livestock cargo flow reached 535,937 heads, an increase of 43.59% compared to 373,232 heads in 2023. This growth was primarily driven by higher demand for imported cattle in line with the Christmas and New Year holidays. Additionally, there was an increase in vessel arrivals, with 12 vessels operated by PT Citra Dermaga Perkasa, PT Sinatra Dewa Samudra, and PT Tiga Bintang Andalas.

Pelayanan Jasa Terminal Berdasarkan Kemasan

Terminal Services by Packaging

General Cargo

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2024 2024 RKAP	Realisasi 2024 2024 Realization	Penyerapan RKAP RKAP Absorption	Deviasi Deviation	Trend
						(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6-5)/5)	9 (6/4)
General Cargo								
1	Dermaga Wharf	Ton Tons	11.855.564	13.411.175	13.101.141	97,69%	(2,31%)	110,51%
2	Gudang Penumpukan Diusahakan Operated Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Days	746.725	1.722.524	541.663	31,45%	(68,55%)	72,54%
3	Lapangan Penumpukan Diusahakan Operated Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Days	1.047.665	739.329	1.310.442	177,25%	77,25%	125,08%
4	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Stevedoring*) Stevedoring	Ton Tons	1.877.477	1.331.886	2.884.919	216,60%	116,60%	153,66%
5	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*) Cargodoring	Ton Tons	7.028	60.000	-	0,00%	(100,00%)	0,00%
6	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/ Delivery)* Receiving/Delivery	Ton Tons	13.546	60.000	-	0,00%	(100,00%)	0,00%
7	Kerja Sama Pelayanan B/M Loading and Unloading Cooperation Services	Ton Tons	8.145.089	10.506.932	8.193.286	77,98%	(22,02%)	100,59%
8	*Roll On Roll Off* (Ro Ro)	Unit	112.478	117.539	101.127	86,04%	(13,96%)	89,91%

1. Dermaga
   Realisasi tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* di Dermaga (ton) sebesar 1.310.442 ton atau meningkat 10,51% dari realisasi tahun 2023 sebesar 11.855.564 ton.
2. Gudang Penumpukan Diusahakan
   Realisasi tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* di Gudang Penumpukan (ton hari) sebesar 541.663 ton hari atau turun 27,46% dari realisasi tahun 2023 sebesar 746.725 ton hari.
3. Lapangan Penumpukan Diusahakan
   Realisasi tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* di

1. Wharf
   In 2024, General Cargo Production at the Wharf reached 1,310,442 tons, an increase of 10.51% compared to 1,185,564 tons in 2023.
2. Operated Stacking Warehouse
   In 2024, General Cargo Production at the operated stacking warehouse was 541,663 ton-days, a decrease of 27.46% from 746,725 ton-days in 2023.
3. Operated Stacking Yard
   In 2024, General Cargo Production at the operated stacking

Lapangan Penumpukan (ton hari) sebesar 1.310.442 ton hari, naik 25,08% dari realisasi tahun 2023 sebesar 1.047.665 ton hari.

4. *Stevedoring*
   Realisasi tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* Bongkar Muat *Stevedoring* (Ton) sebesar 2.884.919 Ton atau terserap 216,60% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 1.331.886 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 1.877.477 Ton atau naik 53,66%.
5. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* Bongkar Muat *Cargodoring* (Ton) sebesar 0 Ton dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 60.000 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 7.028 Ton atau turun 100%.
6. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/Delivery*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* Bongkar Muat *Receiving/Delivery* (Ton) sebesar 0 Ton dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 60.000 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 13.548 Ton atau turun 100%.
7. Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat (Ton) sebesar 8.193.286 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 8.145.089 Ton atau naik 0,59%.
8. *Roll On/Roll Off* (Ro Ro)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi *General Cargo* Pelayanan *Roll On/Roll Off* (Unit) sebesar 101.127 Unit atau terserap 86,04% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 117.539 Unit dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 112.478 Unit atau turun 10,09%.

yard reached 1,310,442 ton-days, an increase of 25.08% compared to 1,047,665 ton-days in 2023.

4. Stevedoring
   In 2024, General Cargo Production through stevedoring reached 2,884,919 tons, or 216.60% of the revised 2024 RKAP target of 1,331,886 tons, and a 53.66% increase compared to 1,877,477 tons in 2023.

5. Cargodoring
   In 2024, General Cargo Production through cargodoring was recorded at 0 tons, compared to the revised 2024 RKAP target of 60,000 tons, and a 100% decrease from 7,028 tons in 2023.

6. Receiving/Delivery
   In 2024, General Cargo Production through receiving/delivery services was also 0 tons, compared to the revised 2024 RKAP target of 60,000 tons, and a 100% decrease from 13,548 tons in 2023.

7. Loading and Unloading Cooperation Services
   In 2024, General Cargo Production under loading and unloading cooperation services reached 8,193,286 tons, a 0.59% increase from 8,145,089 tons in 2023.

8. Roll On/Roll Off (Ro-Ro) Services
   In 2024, General Cargo Production handled through Ro-Ro services reached 101,127 units, achieving 86.04% of the revised 2024 RKAP target of 117,539 units, and reflecting a 10.09% decrease from 112,478 units in 2023.

Kemasan Curah Kering
Liquid Bulk

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	Revisi RKAP 2024 2024 RKAP Revision	Realisasi 2024 2024 Realization	Penyerapan RKAP RKAP Absorption	Deviasi Deviation	Trend
						(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6-5)/5)	9 (6/4)
Curah Kering Liquid Bulk								
1	Dermaga Wharf	Ton Tons	22.231.861	24.087.826	22.040.715	91,50%	(8,50%)	99,14%
2	Gudang Penumpukan Diusahakan Operated Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Days	501.933	858.750	1.189.812	138,55%	38,55%	237,05%
3	Lapangan Penumpukan Diusahakan Operated Stacking Yard	Ton Hari Ton-Days	157.063	146.988	115.256	78,41%	(21,59%)	73,38%
4	Penyimpanan (Silo) Storage (Silo)	Ton Tons	-		-	-	-	-
5	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Stevedoring*) Stevedoring	Ton Tons	11.831.645	13.488.299	11.983.258	88,84%	(11,16%)	101,28%
6	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*) Cargodoring	Ton Tons	47.800	772.036	22.850	2,96%	(97,04%)	47,80%
7	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/Delivery*) Receiving/Delivery	Ton Tons	47.800	772.036	22.850	2,96%	(97,04%)	47,80%

Kemasan Curah Kering
Liquid Bulk

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	Revisi RKAP 2024 2024 RKAP Revision	Realisasi 2024 2024 Realization	Penyerapan RKAP RKAP Absorption	Deviasi Deviation	Trend
						(%)	(%)	(%)
8	Kerja Sama Pelayanan B/M Loading and Unloading Cooperation Services	Ton Tons	8.021.997	11.146.340	7.891.166	70,80%	(29,20%)	98,37%

1. Dermaga
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering di Dermaga (Ton) untuk sebesar 22.040.715 Ton atau terserap 91,50% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 24.087.826 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 22.231.861 Ton atau turun 0,86%.
2. Gudang Penumpukan Diusahakan
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering di Gudang Penumpukan (Ton Hari) untuk sebesar 1.189.812 Ton Hari atau terserap 138,55% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 856.750 Ton Hari dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 501.933 Ton Hari atau naik 137,05%.
3. Lapangan Penumpukan Diusahakan
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering di Lapangan Penumpukan (Ton Hari) untuk sebesar 115.256 Ton Hari, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 157.063 Ton Hari atau turun 26,62%.
4. Penyimpanan (Silo)
   Tidak ada kegiatan Produksi Curah Kering Pelayanan Penyimpanan (Silo).
5. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Stevedoring*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering Bongkar Muat (*Stevedoring*) (Ton) sebesar 11.983.258 Ton atau terserap 88,48% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 13.488.299 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 11.831.645 Ton atau naik 1,28%.
6. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering Bongkar Muat (*Cargodoring*) (Ton) sebesar 22.850 Ton atau terserap 2,96% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 772.036 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 47.800 Ton atau turun 52,20%.
7. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/Delivery*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering Bongkar Muat (*Receiving/Delivery*) (Ton) sebesar 22.850 Ton atau terserap 2,96% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 772.036 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 47.800 Ton atau turun 52,20%.
8. Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat
   Realisasi Tahun 2024 untuk Produksi Curah Kering Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat sebesar 7.891.166 Ton atau terserap 70,80% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 11.146.340 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 8.021.997 Ton atau turun 1,63%.

1. Wharf
   In 2024, dry bulk production at the wharf reached 22,040,715 tons, or 91.50% of the revised 2024 RKAP target of 24,087,826 tons, representing a 0.86% decrease from 22,231,861 tons in 2023.
2. Operated Stacking Warehouse
   In 2024, dry bulk production at the operated stacking warehouse reached 1,189,812 ton-days, or 138.55% of the revised 2024 RKAP target of 856,750 ton-days, and increased by 137.05% compared to 501,933 ton-days in 2023.
3. Operated Stacking Yard
   In 2024, dry bulk production at the operated stacking yard reached 115,256 ton-days, representing a 26.62% decrease from 157,063 ton-days in 2023.
4. Storage (Silo)
   There was no dry bulk production activity under storage (silo) services during 2024.
5. Stevedoring
   In 2024, dry bulk production through stevedoring reached 11,983,258 tons, or 88.48% of the revised 2024 RKAP target of 13,488,299 tons, and increased by 1.28% compared to 11,831,645 tons in 2023.
6. Cargodoring
   In 2024, dry bulk production through cargodoring reached 22,850 tons, or 2.96% of the revised 2024 RKAP target of 772,036 tons, representing a 52.20% decrease from 47,800 tons in 2023.
7. Receiving/Delivery
   In 2024, dry bulk production through receiving/delivery services also reached 22,850 tons, or 2.96% of the revised 2024 RKAP target of 772,036 tons, a 52.20% decrease compared to 47,800 tons in 2023.
8. Loading and Unloading Cooperation Services
   In 2024, dry bulk production under loading and unloading cooperation services reached 7,891,166 tons, or 70.80% of the revised 2024 RKAP target of 11,146,340 tons, and decreased by 1.63% compared to 8,021,997 tons in 2023.

Kemasan Curah Cair
Liquid Bulk

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2024 2024 RKAP	Realisasi 2024 2024 Realization	Penyerapan RKAP RKAP Absorption	Deviasi Deviation	Trend
						(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/7)	8 (6-5)/5)	9 (6/4)
Curah Cair Liquid Bulk								
1	Dermaga Wharf	Ton Tons	10.847.829	11.087.585	9.560.456	86,23%	(13,77%)	88,13%
2	Penyimpanan (*Tank Storage*) Tank Storage	Ton Tons	-	423.992	-	0,00%	(100,00%)	-
3	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Stevedoring*) Stevedoring	Ton Tons	8.575.146	8.395.000	8.055.523	95,96%	(4,04%)	93,94%
4	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*) Cargodoring	Ton Tons	-		-	-	-	-
5	Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/ Delivery*) Receiving/Delivery	Ton Tons	-		3.799	-	-	-
6	Kerja Sama Pelayanan B/M Loading and Unloading Cooperation Services	Ton Tons	2.298.035	2.042.464	1.568.637	76,80%	(23,20%)	68,26%

1. Dermaga
   Realisasi Tahun 2024 untuk produksi curah cair di dermaga (ton) untuk sebesar 9.560.456 Ton atau terserap 86,23% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 11.087.585 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10.847.829 Ton atau turun 11,87%.
2. Penyimpanan (*Tank Storage*)
   Tidak ada Produksi Pelayanan Penyimpanan (*tank storage*) sedangkan RKAP 2024 sebesar 423.998 ton.
3. Bongkar Muat Per Mata Rantai (*stevedoring*)
   Realisasi Tahun 2024 untuk produksi curah cair bongkar muat (*stevedoring*) (Ton) sebesar 8.055.523 ton atau terserap 95,96% dari RKAP tahun 2024 sebesar 8.395.000 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 8.575.146 Ton atau turun 6,06%.
4. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Cargodoring*)
   Tidak ada Produksi Bongkar Muat (*Cargodoring*).
5. Bongkar Muat per Mata Rantai (*Receiving/Delivery*)
   Realisasi tahun 2024 sebesar 3.799 ton dari RKAP tahun 2024 sebesar 0 ton.
6. Kerja sama pelayanan bongkar muat
   Realisasi Tahun 2024 untuk produksi curah cair kerja sama pelayanan bongkar muat sebesar 1.568.637 Ton atau terserap 76,80% dari Revisi RKAP Tahun 2024 sebesar 2.042.464 Ton dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 2.298.035 Ton atau turun 31,74%.

1. Wharf
   In 2024, liquid bulk production at the wharf reached 9,560,456 tons, or 86.23% of the 2024 RKAP target of 11,087,585 tons, representing a 11.87% decrease compared to 10,847,829 tons in 2023.
2. Tank Storage
   There was no production recorded under tank storage services in 2024, whereas the RKAP 2024 target was 423,998 tons.
3. Stevedoring
   In 2024, liquid bulk production through stevedoring reached 8,055,523 tons, or 95.96% of the 2024 RKAP target of 8,395,000 tons, reflecting a 6.06% decrease from 8,575,146 tons in 2023.
4. Cargodoring
   There was no cargodoring production.
5. Receiving/Delivery
   In 2024, liquid bulk production under receiving/delivery services reached 3,799 tons, compared to an RKAP 2024 target of 0 tons.
6. Loading and Unloading Cooperation Services
   In 2024, liquid bulk production under loading and unloading cooperation services amounted to 1,568,637 tons, or 76.80% of the revised 2024 RKAP target of 2,042,464 tons, representing a 31.74% decrease from 2,298,035 tons in 2023.

Pendapatan dan Profitabilitas Layanan Jasa Terminal

Revenue and Profitabilities Terminal Services

Tabel Pelayanan Jasa Terminal 2023-2024
Table of Terminal Services in 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services	613.483	1.391.578	(778.095)	(55,91%)

Per 31 Desember 2024, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa terminal atau terminal nonpetikemas sebesar Rp613,48 miliar, mengalami penurunan Rp778,10 miliar atau 55,91% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.391,58 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2023, implementasi *switching* nota SPMT dimulai pada bulan Juni pada beberapa cabang.

Sementara itu, pada tahun 2024, seluruh cabang PTP telah menerapkan *switching* nota SPMT. untuk mendukung pelakasaan kerjasma *Operation* dan *Manintenance*. *Switching nota* untuk kegiatan operasional di Area BASO dimana sebelumnya nota diterbitkan atas nama PTP disesuaikan menjadi nota atas nama SPMT, meskipun demikian terdapat pendapatan dari pelayanan cargo non petikemas internasional di cabang priok yang sedang dalam tahap proses switching nota.

Selain menjalankan operation dan maintenance di area BASO, PTP juga melakukan pengembangan bisnis di luar area BASO pada cabang-cabang PTP. Dengan adanya operasional diluar area BASO tersebut, memberikan kontribusi pendapatan secara langsung kepada perusahaan melalui penerbitan nota atas nama PTP. Meskipun demikian, pada tahun 2024, masih terdapat pendapatan dari barang non-petikemas internasional di Cabang Tanjung Priok dan pendapatan di luar area BASO di cabang lainnya.

As of December 31, 2024, the Company recorded revenue from terminal service activities or non-container terminals amounting to Rp613.48 billion, a decrease of Rp778.10 billion or 55.91% compared to the previous year's revenue of Rp1,391.58 trillion. The decline was due to the implementation of the SPMT billing switch, which began in June 2023 in several branches.

In contrast, by 2024, all PTP branches had fully implemented the SPMT billing switch to support the implementation of the Operation and Maintenance partnership. Invoice switching has been carried out for operational activities in the BASO area, whereas previously invoices were issued under the name of PTP; they have now been adjusted to be issued under the name of SPMT. Nevertheless, revenue from international non-container cargo services at the Priok branch is still in the process of invoice switching.

In addition to operating and maintaining the BASO area, PTP is also engaged in business development outside of the BASO area across PTP branches. The operations conducted outside the BASO area contribute directly to the Company's revenue through the issuance of invoices under the name of PTP. Nevertheless, in 2024, the Company still generated revenue from international non-container cargo at the Tanjung Priok Branch and from areas outside BASO at other branches.

PELAYANAN JASA PENGUSAHAAN ALAT

Perusahaan menyediakan layanan penyewaan berbagai jenis alat untuk mendukung kegiatan bongkar muat. Alat angkat yang tersedia untuk disewa meliputi *container crane*, HMC, *forklift, fixed crane, mobile crane, reach stacker, top loader, wheel loader, luffing crane*, dan *excavator*. Untuk alat angkut, Perusahaan menyewakan *head truck, trailer*, dan *dump truck*. Selain itu, tersedia juga alat bantu bongkar muat yang dapat disewa, seperti timbangan, grab, *hopper*, damkar, *bucket*, dan *rampdoor*.

EQUIPMENT SERVICES

The Company provides rental services for a wide range of equipment to support loading and unloading activities. The available lifting equipment for rent includes container cranes, HMCs (harbor mobile cranes), forklifts, fixed cranes, mobile cranes, reach stackers, top loaders, wheel loaders, luffing cranes, and excavators. For transport equipment, the Company offers rentals of head trucks, trailers, and dump trucks. In addition, a variety of supporting equipment is available for rent, such as weighbridges, grabs, hoppers, fire trucks, buckets, and ramp doors.

Produktivitas Jasa Pengusahaan Alat

Produktivitas jasa pengusahaan alat didukung oleh kesiapan alat bongkar muat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Equipment Services Productivity

The productivity of equipment services is supported by the availability and readiness of loading and unloading equipment, as outlined in the following table:

No	Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	Perubahan Change	
					Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Persentase (%) Percentage (%)
	Kesiapan Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment Readiness					
1	*Gantry Jib Crane*	%	81,62	93,31	(11,69)	(12,53%)
2	*Gantry Luffing Crane*	%	94,73	95,24	(0,51)	(0,54%)
3	*Fixed Jib Crane*	%	95,42	94,41	1,01	1,07%
4	*Reach Stacker*	%	54,77	74,32	(19,55)	(26,31%)
5	*Side Loader*	%	80,90	71,44	9,46	13,24%
6	*Head Truck*	%	94,33	96,32	(1,99)	(2,07%)
7	*Chassis*	%	98,58	97,67	0,91	0,93%
8	*Mobile Crane*	%	95,30	94,30	1,00	1,06%
9	*Overhead Crane*	%	99,44	99,62	(0,18)	(0,18%)
10	*Hopper*	%	95,00	94,36	0,64	0,68%
11	*Excavator*	%	91,58	92,91	(1,33)	(1,43%)
12	*Conveyor*	%	89,58	77,57	12,01	15,48%
13	*Wheel Loader*	%	90,74	84,82	5,92	6,98%
14	*Bulldozer*	%	78,03	62,20	15,83	25,45%
15	*Dump Truck*	%	93,58	87,21	6,37	7,30%
16	*Forklift*	%	94,61	89,29	5,32	5,96%
17	Pompa Pump	%	90,00	91,25	(1,25)	(1,37%)
	Rata-Rata Average		88,01	88,01	1,30	1,48%
	Utilisasi Alat Bongkar Muat Loading Unloading Utilization					
1	*Gantry Jib Crane*	%	32,60	31,90	0,70	2,19%
2	*Gantry Luffing Crane*	%	24,25	25,22	(0,97)	(3,85%)
3	*Fixed Jib Crane*	%	23,11	-	23,11	100,00%
4	*Reach Stacker*	%	10,50	11,61	(1,11)	(9,56%)
5	*Side Loader*	%	14,95	16,53	(1,58)	(9,56%)
6	*Head Truck*	%	7,87	7,20	0,67	9,31%
7	*Chassis*	%	8,85	8,20	0,65	7,93%
8	*Mobile Crane*	%	11,58	9,23	2,35	25,46%
9	*Overhead Crane*	%	0,33	0,51	(0,18)	(35,29%)
10	*Hopper*	%	10,88	9,25	1,63	17,62%
11	*Excavator*	%	10,19	12,39	(2,20)	(17,76%)
12	*Conveyor*	%	7,58	17,47	(9,89)	(56,61%)
13	*Wheel Loader*	%	8,77	8,23	0,54	6,56%
14	*Bulldozer*	%	2,74	3,74	(1,00)	(26,74%)
15	*Dump Truck*	%	1,78	2,63	(0,85)	(32,32%)
16	*Forklift*	%	9,20	8,29	0,91	10,98%
17	Pompa Pump	%	23,33	76,92	(53,59)	(69,67%)
	Rata-Rata Average		11,59	16,03	(4,44)	(27,70%)

Capaian penyerapan kesiapan alat bongkar muat tahun 2024 tercapai sebesar 89,31% atau meningkat 1,30% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 88,01%. Hal ini dikarenakan *Head Truck* 11 & 13 *breakdown, Reach Stacker* 05 *generatoroverhaul* engine di Cabang Palembang, kerusakan *Reach Stacker* di Cabang Teluk Bayur. Sementara capaian utilisasi alat bongkar muat tahun 2024 tercapai sebesar 11,59% menurun 4,44% dibanding tahun 2023 yang mencapai kesiapan 16,03%.

The equipment readiness realization for loading and unloading activities in 2024 reached 89.31%, an increase 1.30% compared to 88.01% in 2023. It was due to Head Truck 11 & 13 breakdown, Reach Stacker 05 generator overhaul engine in Palembang, Reach Stacker breakdown in Teluk Bayur Branch. Meanwhile, the equipment utilization rate in 2024 was recorded at 11.59%, also declining by 4.44% from the 2023 level, which reached 16.03%.

Pendapatan dan Profitabilitas Jasa Pengusahaan Alat

Perusahaan memberikan pelayanan berupa persewaan alat bongkar muat dan penunjangnya berupa *forklift*, dan *crane*. Adapun pendapatan jasa pengusahaan alat pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Revenue and Profitability from Equipment Services

The Company provides services in the form of equipment rental for loading and unloading operations and their supporting functions, including forklifts and cranes. The revenue from equipment services in 2024 and 2023 is as follows:

Tabel Pelayanan Jasa Pengusahaan Alat 2023-2024
Table of Equipment Services in 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pelayanan Pengusahaan Alat Equipment Services	44.052	45.284	(1.232)	(2,72%)

Per 31 Desember 2024, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari segmen pelayanan jasa pengusahaan alat sebesar Rp44,05 miliar, mengalami penurunan Rp1,23 miliar atau 2,72% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp45,28 miliar.

As of December 31, 2024, the Company recorded revenue from the equipment services segment amounting to Rp44.05 billion, a decrease of Rp1.23 billion or 2.72% compared to Rp45.28 billion in the previous year.

PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS

Jasa layanan terminal petikemas yang diberikan di terminal nonpetikemas yang dikelola Perusahaan, meliputi jasa:

1. *Stevedoring*
2. *Haulage*
3. Jasa Penumpukan
4. *Receiving/Delivery*

CONTAINER TERMINAL SERVICES

Container terminal services provided by the Company at its non-container terminal facilities include:

1. Stevedoring
2. Haulage
3. Stacking Services
4. Receiving/Delivery

Produktivitas Pelayanan Terminal Petikemas

Realisasi produktivitas Bongkar Muat Petikemas di Terminal *Multipurpose* tahun 2024 sebesar 18,02 B/S/H jika dibandingkan dengan Revisi RKAP tahun 2024 sebesar 18,10 B/S/H tercapai 99,54% atau di bawah target. Hal ini dipengaruhi kinerja pada:

1. Cabang Tanjung Priok terealisasi sebesar 17,10 B/S/H jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 18,10 B/S/H tercapai 94,45% atau dibawah target, hal ini dipengaruhi oleh mayoritas kegiatan menggunakan hanya *mobile crane* yang secara *performance* kurang baik.
2. Cabang Bengkulu terealisasi sebesar 16,63 B/S/H jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 16,20 B/S/H tercapai 102,63% atau diatas target.
3. Cabang Pangkal Balam terealisasi sebesar 20,33 B/S/H jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 20,00 B/S/H tercapai 101,63% diatas target.

Container Terminal Services Productivity

In 2024, the realization of container loading and unloading productivity at the multipurpose terminal was 18.02 Boxes/Ship/Hour (B/S/H). Compared to the revised 2024 RKAP target of 18.10 B/S/H, this achievement reached 99.54%, falling slightly below the target. This performance was influenced by the following:

1. Tanjung Priok Branch realized 17.10 B/S/H, or 94.45% of the 2024 RKAP target of 18.10 B/S/H, falling short primarily due to the dominance of operations using mobile cranes, which generally have lower performance.
2. Bengkulu Branch realized 16.63 B/S/H, exceeding its 2024 RKAP target of 16.20 B/S/H, with an achievement rate of 102.63%.
3. Pangkal Balam Branch realized 20.33 B/S/H, exceeding its 2024 RKAP target of 20.00 B/S/H, with an achievement rate of 101.63%.

Pendapatan dan Profitabilitas Pelayanan Terminal Petikemas

Revenue and Profitabilities Terminal Services

Tabel Pendapatan Terminal Petikemas 2023-2024
Table of Terminal Services in 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pelayanan Terminal Petikemas Terminal Services	80.651	24.839	55.812	224,70%

Per 31 Desember 2024, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari pelayanan terminal petikemas

As of December 31, 2024, the Company recorded revenue from container terminal services amounting to Rp80.65 billion,

sebesar Rp80,65 miliar, mengalami peningkatan Rp55,81 miliar atau 224,70% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp24,84 miliar.

PELAYANAN JASA PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR, DAN LISTRIK (TBL)

Perusahaan menyediakan layanan pengusahaan properti, termasuk tanah dan bangunan, serta layanan air dan listrik. Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan melalui kegiatan *shorebase* yang berlokasi di Lhoksemawe, Aceh, dan Banyuwangi, Jawa Timur.

Produktivitas Jasa Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik

Perusahaan menyediakan layanan pengusahaan properti (tanah dan bangunan), serta layanan air dan listrik, yang terkait dengan kegiatan operasi dan bisnis yang dikembangkan. Pendapatan dari layanan ini diperoleh melalui biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas penggunaan air dan listrik.

Pengembangan Usaha *Shorebase*

Pada tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas melanjutkan rencana strategis pengembangan usaha dengan fokus pada pelayanan kepelabuhanan, khususnya dalam penyediaan fasilitas *shorebase* yang memenuhi standar internasional. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kegiatan logistik di pinggir laut, yang dirancang dan dibangun untuk mendukung operasional industri hulu minyak dan gas bumi, termasuk eksplorasi, pengeboran, proyek konstruksi, dan produksi lepas pantai.

Shorebase merupakan pelabuhan khusus yang mendukung kegiatan pengeboran lepas pantai, dengan sistem *zero-waiting time*, di mana waktu di pelabuhan terbagi menjadi dua komponen: NOT (*Non-Operational Time*) dan ET (*Effective Time*). ET dihitung berdasarkan rata-rata waktu penggunaan *box/crane/hour* pada *mobile crane*, sedangkan *NOT* diasumsikan memakan waktu 1 jam. Tarif untuk layanan *shorebase* ini pun disesuaikan dengan keunikan pelabuhan khusus tersebut.

PTP Terminal Nonpetikemas menyediakan berbagai layanan, antara lain *open yard for stacking & staging point, open yard for liquid mud plant, open yard for dry bulk plant*, *operasi jetty* 24 jam, kantor lapangan *shorebase*, gudang dengan standar keselamatan dan keamanan tinggi, layanan alat berat, personel *shorebase* bersertifikasi migas, *workshop*, serta *industrial hub complex*.

Hingga akhir tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas telah melayani berbagai pengguna jasa domestik dan internasional dalam sektor minyak dan gas bumi, termasuk *Harbour Energy* (Inggris), Mubadala *Energy* (Abu Dhabi), HCML (China & Australia), serta *Conrad Energy* (Singapura), dengan wilayah operasional yang meliputi Jakarta, Lhokseumawe (Aceh), dan Banyuwangi (Jawa Timur)

Pendapatan dan Profitabilitas Jasa Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik

Perusahaan menjalankan kegiatan usaha melalui segmen operasi dengan menghadirkan segmen pelayanan jasa yang berasal dari pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik yang berada di seluruh wilayah operasi PTP Terminal Nonpetikemas.

representing an increase of Rp55.81 billion or 224.70% compared to Rp24.84 billion in the previous year.

LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY SERVICES

The Company provides land, building, water, and electricity services, including property utilization and utility supply. Land use is implemented through shorebase activities located in Lhokseumawe, Aceh, and Banyuwangi, East Java.

Productivity of Land, Building, Water, and Electricity Services

The Company offers land and building management services, along with water and electricity supply, supporting operational and business development activities. Revenue from these services is derived from fees charged to customers for the use of water and electricity infrastructure.

Shorebase Business Development

In 2024, PTP Terminal Nonpetikemas continued its strategic business development plans by focusing on port services, particularly the provision of shorebase facilities in accordance with international standards. These facilities serve as coastal logistics centers, specifically designed and constructed to support upstream oil and gas industry operations, including exploration, drilling, construction projects, and offshore production.

A shorebase functions as a dedicated port supporting offshore drilling operations, operating under a zero-waiting time system. Port time is divided into two components: NOT (Non-Operational Time) and ET (Effective Time). ET is calculated based on the average usage time per box/crane/hour for mobile cranes, while NOT is assumed to be 1 hour. Service tariffs for the shorebase are tailored to the specific nature of this specialized port facility.

PTP Terminal Nonpetikemas offers a wide range of shorebase services, including open yard for stacking and staging point, open yard for liquid mud plant, open yard for dry bulk plant, 24-hour jetty operation, shorebase field office, warehouses with high safety and security standards, heavy equipment services, certified shorebase personnel (oil and gas sector), workshop facilities, and industrial hub complex.

By the end of 2024, PTP Terminal Nonpetikemas had served numerous domestic and international clients in the oil and gas sector, including Harbour Energy (UK), Mubadala Energy (Abu Dhabi), HCML (China & Australia), and Conrad Energy (Singapore), with operational coverage across Jakarta, Lhokseumawe (Aceh), and Banyuwangi (East Java).

Revenue and Profitability of Land, Building, Water, and Electricity Services

The Company conducts its business through operational segments, including revenue-generating land, building, water, and electricity services, provided across all operational areas of PTP Terminal Nonpetikemas.

Tabel Pelayanan Jasa Pengusahaan TBAL 2023-2024
Table of Land, Building, Water, and Electricity Services in 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pelayanan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water, and Electricity Services	32.296	56.004	(23.708)	(42,33%)

Perusahaan berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari segmen pelayanan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik pada tahun 2024 sebesar Rp32,30 miliar, mengalami penurunan Rp23,71 miliar atau 42,33% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp56,00 miliar.

In 2024, the Company recorded revenue from the land, building, water, and electricity services segment amounting to Rp32.30 billion, representing a decrease of Rp23.71 billion or 42.33% compared to Rp56.00 billion in the previous year.

KERJA SAMA PELABUHAN

Produktivitas Kerja Sama Pelabuhan

Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama usaha dengan Cabang Regional 2 dan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), kerja sama antara Perusahaan dan *sub holding* PT Pelindo Multi Terminal dilakukan melalui mekanisme *revenue sharing*, yakni sebagai berikut:

PORT SHARING

Port Sharing Productivity

The Company has established business cooperation agreements with Regional Branch 2 and subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). The cooperation between the Company and the sub-holding PT Pelindo Multi Terminal is carried out through a revenue sharing mechanism, as follows:

No	Cabang/Terminal Branch/Terminal	*Revenue Sharing*		
		PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Pelindo Multi Terminal	PT Pelabuhan Tanjung Priok
1	Tanjung Priok	16,50%	5,50%	78%
2	Banten	15%	5%	80%
3	Bengkulu	20%	5%	75%
4	Cirebon	12%	3%	85%
5	Jambi	23%	3%	74%
6	Palembang	20%	5%	75%
7	Pangkal Balam	30%	3%	67%
8	Panjang	25%	5%	70%
9	Tanjung Pandan	25%	3%	72%
10	Teluk Bayur	27,50%	5%	67,50%
11	Pontianak	23%	5%	72%
12	Terminal Kijing	49%	3%	48%
Mulai 1 Agustus 2024 Since August 1, 2024				
13	General cargo dan curah kering General cargo and dry bulk	16%	3%	81%
14	Curah cair Liquid bulk	49%	3%	48%

Pendapatan dan Profitabilitas Kerja Sama Pelabuhan

Revenue and Profitabilities of Port Sharing

Tabel Kerja Sama Pelabuhan 2023-2024
Table of Port Sharing 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Kerja Sama Pelabuhan Port Sharing	698.299	318.000	380.299	119,59%

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp698,30 miliar yang berasal dari Kerja Sama Pelabuhan. Kerja sama dengan *sub holding* PT Pelindo Multi Terminal dilakukan melalui mekanisme *revenue sharing*, di mana Perusahaan mengelola dan mengoperasikan fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Kargo *Multipurpose*. Fasilitas-fasilitas ini telah diserahoperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT Pelindo Multi Terminal, mencakup 11 cabang yaitu Tanjung Priok, Banten, Panjang, Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Pangkal Balam, Pontianak, dan Tanjung Pandan.

SEGMEN GEOGRAFIS

Perusahaan terus mengembangkan kegiatan operasionalnya di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus pada bisnis terminal *multipurpose*. Hingga 31 Desember 2024, Perusahaan telah mengoperasikan 11 cabang terminal, yang meliputi Tanjung Priok, Banten, Panjang, Jambi, Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Pangkal Balam, Pontianak, dan Tanjung Pandan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kontribusi segmen geografis terhadap pendapatan Perusahaan.

In 2024, the Company recorded port sharing revenue of Rp698.30 billion. The cooperation with the sub-holding PT Pelindo Multi Terminal is carried out through a revenue sharing mechanism, under which the Company manages and operates port facilities at multipurpose cargo ports. These facilities were previously handed over by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal, and include operations at 11 branches, namely: Tanjung Priok, Banten, Panjang, Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Pangkal Balam, Pontianak, and Tanjung Pandan.

GEOGRAPHICAL SEGMENT

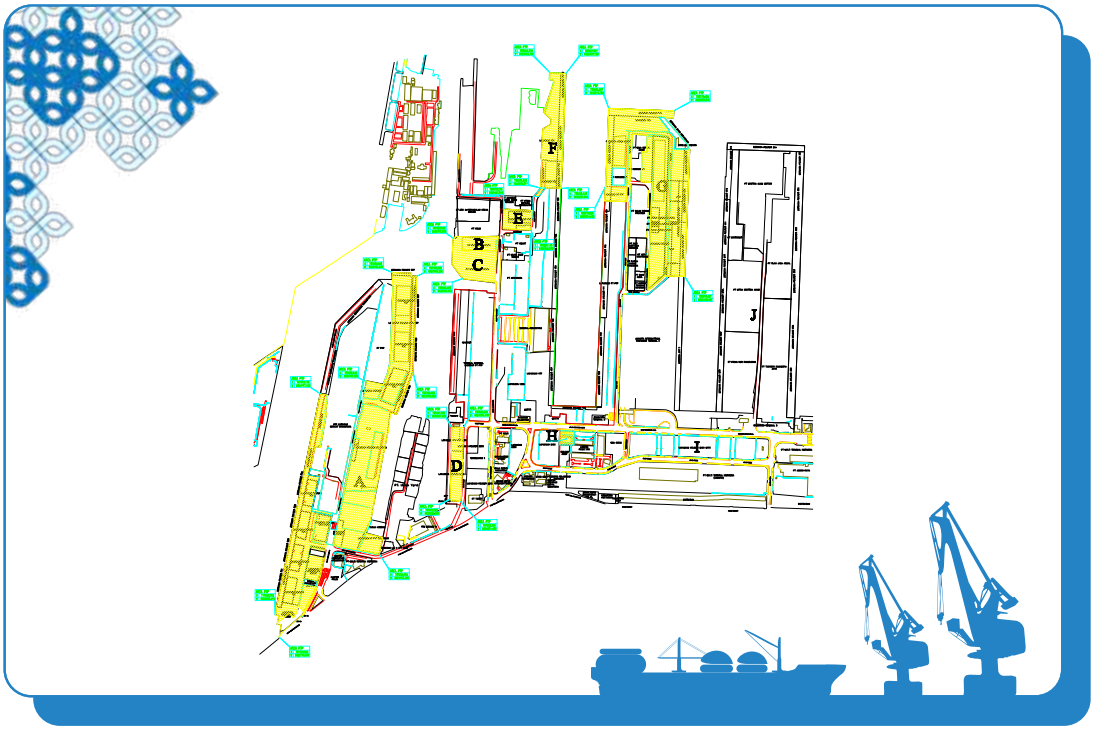
The Company continues to expand its operational activities across various regions in Indonesia, with a primary focus on the multipurpose terminal business. As of December 31, 2024, the Company operated 11 terminal branches, including Tanjung Priok, Banten, Panjang, Jambi, Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Pangkal Balam, Pontianak, and Tanjung Pandan.

The following table presents the contribution of each geographical segment to the Company's revenue:

Segmen Geografis Geographical Segment	**2024**		**2023**		**Pertumbuhan** Growth	
	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Nominal (Rp-juta)** Nominal (Rp-million)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Tanjung Priok	840.333	57,15%	1.055.683	57,51%	(215.350)	(20,40%)
Panjang	97.472	6,63%	163.608	8,91%	(66.136)	(40,42%)
Banten	118.928	8,09%	159.002	8,66%	(40.074)	(25,20%)
Bengkulu	115.112	7,83%	122.515	6,67%	(7.403)	(6,04%)
Teluk Bayur	82.764	5,63%	80.831	4,40%	1.933	2,39%
Pontianak	76.470	5,20%	73.596	4,01%	2.874	3,91%
Cirebon	47.128	3,21%	52.265	2,85%	(5.137)	(9,83%)
Palembang	37.184	2,53%	49.168	2,68%	(11.984)	(24,37%)
Jambi	20.606	1,40%	36.770	2,00%	(16.164)	(43,96%)
Pangkal Balam	26.708	1,82%	32.189	1,75%	(5.481)	(17,03%)
Tanjung Pandan	7.683	0,52%	10.077	0,55%	(2.394)	(23,76%)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**1.470.387**	**100,00%**	**1.835.705**	**100,00%**	**(365.318)**	**(19,90%)**

CABANG TANJUNG PRIOK

TANJUNG PRIOK BRANCH



Cabang Tanjung Priok berada di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Jakarta. Wilayah layanan hinterland mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta sebagian wilayah Jawa Tengah, sesuai dengan tujuan dan asal barang. PTP Terminal Nonpetikemas di Tanjung Priok menangani berbagai jenis kargo, termasuk nonpetikemas seperti bahan tambang dan barang-barang strategis (sembako, dan lainnya), serta curah cair seperti BBM dan non-BBM. Sejak 1 November 2014, PTP Terminal Nonpetikemas telah beroperasi di wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang kemudian merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan. Seiring dengan perkembangan, zonasi wilayah ini telah mengalami beberapa perubahan. Pada 31 Desember 2021, PTP Terminal Nonpetikemas telah mengelola 13 dermaga dan 22 lapangan penumpukan, dengan kargo utama yang ditangani seperti pasir, semen, CPO, gypsum, batu bara, dan sulfur.

Tanjung Priok Branch is located on the northern coast of Java Island, specifically in Jakarta Bay. Its hinterland service area includes DKI Jakarta, West Java, Banten, and parts of Central Java, depending on the origin and destination of cargo. PTP Terminal Nonpetikemas in Tanjung Priok handles various types of cargo, including non-container cargo such as mineral commodities and strategic goods (e.g., staple foods), as well as liquid bulk cargo such as fuel and non-fuel products. Since November 1, 2014, PTP Terminal Nonpetikemas has been operating within the territory formerly managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which has since merged into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the parent company. Over time, the operational zoning in this area has undergone several adjustments. As of December 31, 2021, PTP Terminal Nonpetikemas managed 13 wharves and 22 operated stacking yards, handling major cargo types including sand, cement, CPO, gypsum, coal, and sulfur.

Pendapatan Cabang Tanjung Priok

Revenue of Tanjung Priok Branch

Tabel Pendapatan Cabang Tanjung Priok 2023-2024
Total Revenue of Tanjung Priok Branch in 2023-2024

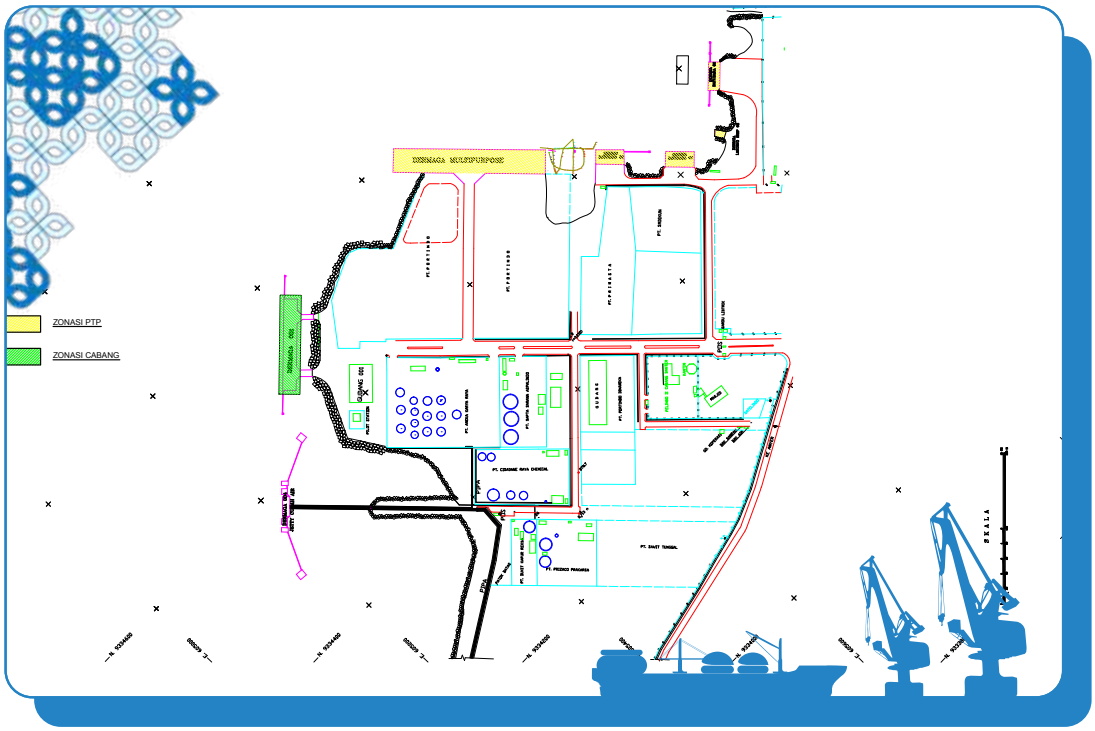
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	840.333	1.055.683	(215.350)	(20,40%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Tanjung Priok sebesar Rp840,33 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp215,35 miliar atau 20,40% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.055,68 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Tanjung Priok Branch amounting to Rp840.33 billion, representing a decrease of Rp215.35 billion or 20.40% compared to Rp1,055.68 billion in the previous year.

CABANG BANTEN

BANTEN BRANCH



PTP Terminal Nonpetikemas cabang Banten terletak di Kota Cilegon, yang merupakan bagian dari wilayah PT Pelindo (Persero) Cabang Pelabuhan Banten. Hingga 31 Desember 2022, cabang ini telah mengelola 9 dermaga, yaitu Dermaga Batu Bara 03, *Multipurpose* 05, Batu Bara 07, *Landing Ship* 06, dan Batu Bara 02, dengan total panjang mencapai 1.025,23 meter. Aktivitas utama cabang ini meliputi penanganan berbagai kargo, seperti batu bara, semen, gula mentah, biji-bijian, dan plat baja.

PTP Terminal Nonpetikemas Banten Branch is located in Cilegon City, which forms part of the operational area of PT Pelindo (Persero) Banten Port Branch. As of December 31, 2022, the branch managed 9 Wharves, namely Coal Wharf 03, Multipurpose Wharf 05, Coal Wharf 07, Landing Ship Wharf 06, and Coal Wharf 02, with a total length of 1,025.23 meters. The branch's core activities include handling various types of cargo, such as coal, cement, raw sugar, grains, and steel plates.

Pendapatan Cabang Banten

Revenue of Banten Branch

Tabel Pendapatan Cabang Banten 2023-2024
Total Revenue of Banten Branch in 2023-2024

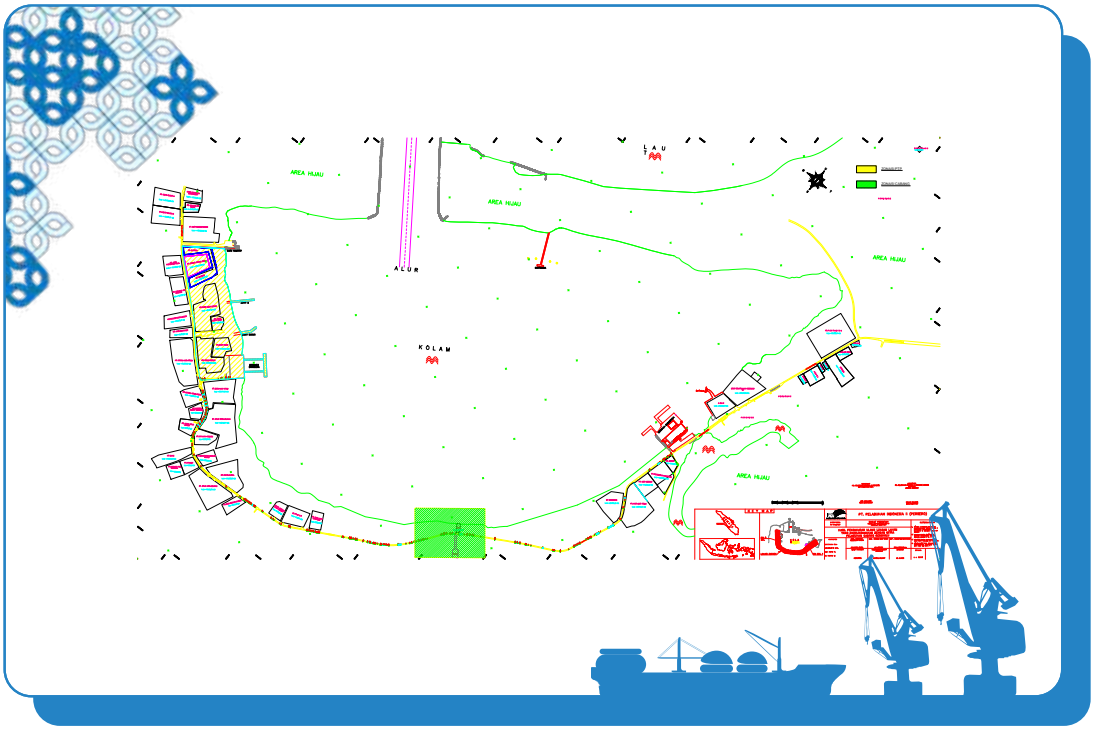
Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Cabang Banten Banten Branch	118.928	159.002	(40.074)	(25,20%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Banten sebesar Rp118,93 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp40.07 miliar atau 25,20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp159,00 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Banten Branch amounting to Rp118.93 billion, representing a decrease of Rp40.07 billion or 25.20% compared to Rp159.00 billion in the previous year.

CABANG BENGKULU

BENGKULU BRANCH



Cabang Bengkulu PTP Terminal Nonpetikemas terletak di wilayah PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, yang berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu. Terminal ini mengoperasikan 5 dermaga, yaitu Dermaga Samudera dan Dermaga *Jetty* A Samudera, dengan total panjang mencapai 494 meter. Terminal *multipurpose* ini fokus pada penanganan komoditas seperti batu bara, CPO (*Crude Palm Oil*), dan semen, dengan area lapangan seluas 39.860 m².

PTP Terminal Nonpetikemas Bengkulu Branch is located within the operational area of PT Pelindo (Persero) Bengkulu Branch, situated in Pulau Baai, approximately 20 kilometers from the city center of Bengkulu. The terminal operates 5 wharves, namely Samudera and Jetty A Samudera Wharf, with a total length of 494 meters. The multipurpose terminal primarily handles key commodities such as coal, CPO (Crude Palm Oil), and cement, and is supported by a yard area of 39,860 square meters.

Pendapatan Cabang Bengkulu

Revenue of Bengkulu Branch

Tabel Pendapatan Cabang Bengkulu 2023-2024
Total Revenue of Bengkulu Branch in 2023-2024

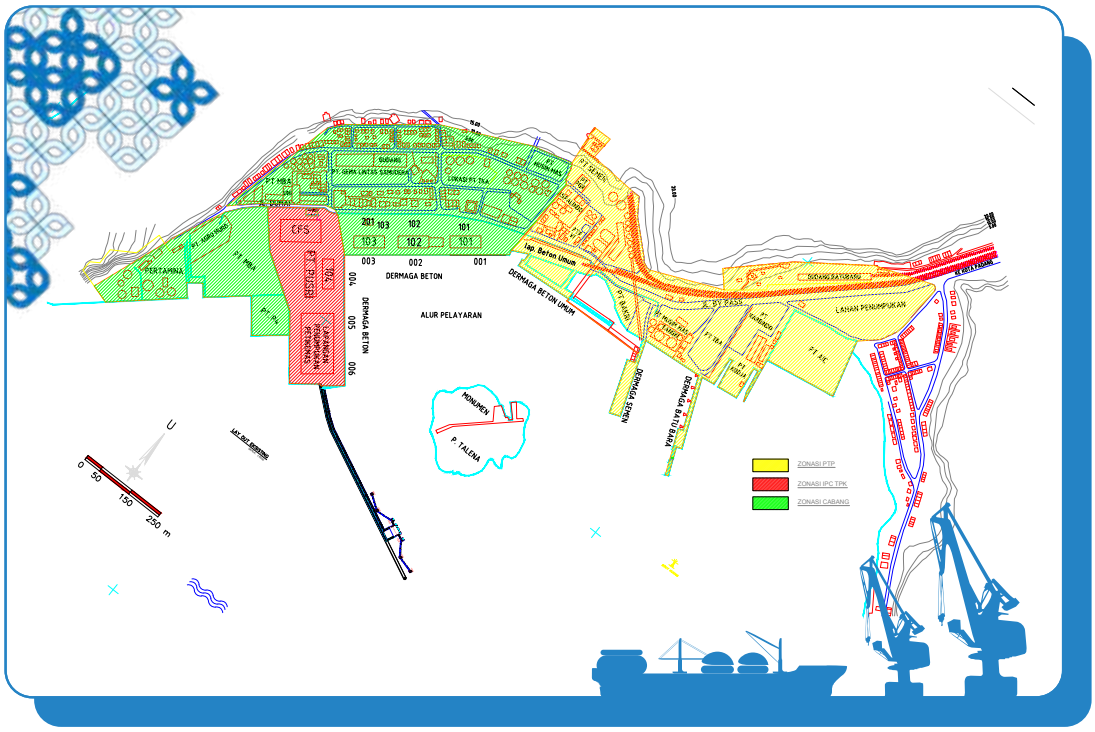
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	115.112	122.515	(7.403)	(6,04%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Bengkulu sebesar Rp115,11 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp7,40 miliar atau 6,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp122,52 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Bengkulu Branch amounting to Rp115.11 billion, representing a decrease of Rp7.40 billion or 6.04% compared to Rp122.52 billion in the previous year.

CABANG TELUK BAYUR

TELUK BAYUR BRANCH



Cabang Teluk Bayur, yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang sejak tahun 1888 dengan nama Emmahaven. Awalnya berfungsi sebagai pelabuhan samudera terbuka untuk perdagangan internasional di Provinsi Sumatera Barat, pelabuhan ini kini telah berkembang menjadi pusat penting di wilayah tersebut, menghubungkan kegiatan ekonomi di Muara Padang dan Air Bangis. Dengan 9 dermaga dan 4 lapangan penumpukan, Teluk Bayur melayani berbagai komoditas, seperti batu bara, semen, *clinker*, CPO, kayu manis, teh, *moulding*, furnitur, dan karet. Komoditas utama yang ditangani di cabang ini adalah CPO, semen, dan batu bara, yang diekspor ke berbagai benua, termasuk Asia, Australia, Amerika, Afrika, dan Eropa.

Located in Padang City, West Sumatra, Teluk Bayur Branch has a long history dating back to 1888, when it was known as Emmahaven. Initially established as an open-sea port to support international trade in West Sumatra Province, the port has since evolved into a key regional hub, connecting economic activities in Muara Padang and Air Bangis. Equipped with 9 wharves and 4 stacking yard, Teluk Bayur handles a diverse range of commodities, including coal, cement, clinker, crude palm oil (CPO), cinnamon, tea, mouldings, furniture, and rubber. The branch's primary export commodities are CPO, cement, and coal, which are shipped to various continents, including Asia, Australia, the Americas, Africa, and Europe.

Pendapatan Cabang Teluk Bayur

Revenue of Teluk Bayur Branch

Tabel Pendapatan Cabang Teluk Bayur 2023-2024
Total Revenue of Teluk Bayur Branch in 2023-2024

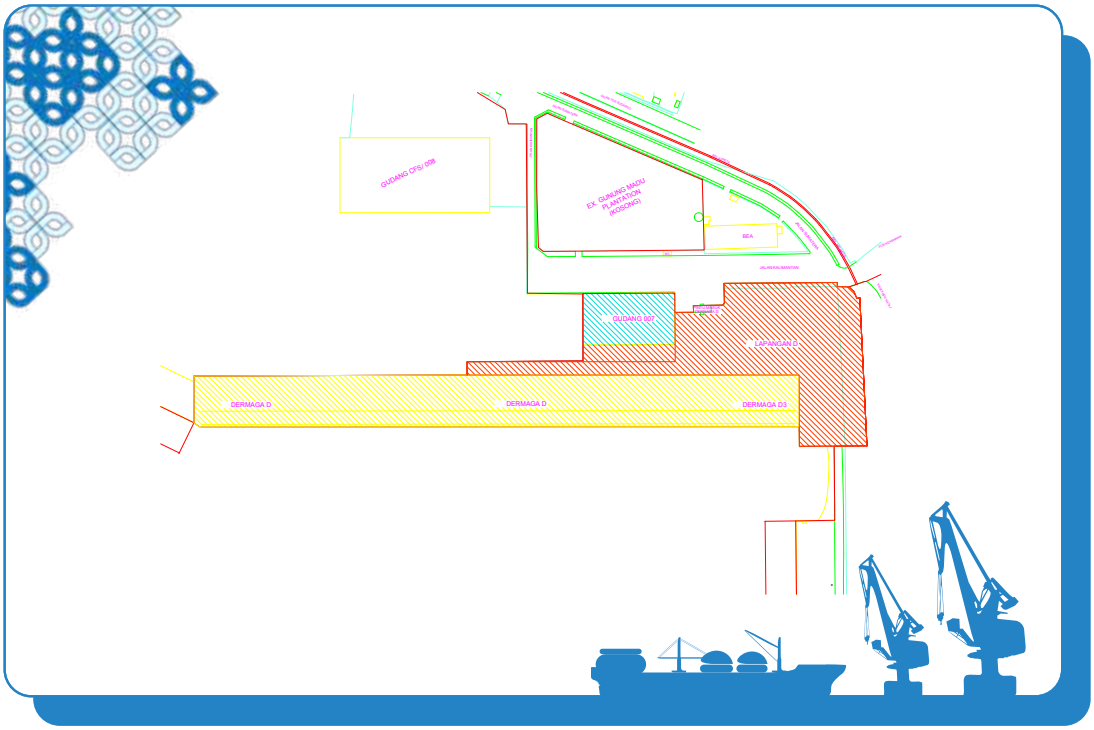
Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Cabang Teluk Bayur Teluk Bayur Branch	82.764	80.831	1.933	2,39%

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Telur Bayur sebesar Rp82,76 miliar. Ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,93 miliar atau 2,39% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp80,83 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Teluk Bayur Branch amounting to Rp82.76 billion, representing an increase of Rp1.93 billion or 2.39% compared to Rp80.83 billion in the previous year.

CABANG PANJANG

PANJANG BRANCH



Cabang Panjang terletak di titik persilangan strategis antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang telah dibangun sejak abad ke-17. Pelabuhan ini memiliki 4 dermaga, yaitu Dermaga A,B, C dan D, dengan total panjang mencapai 922 meter. Sebagai pelabuhan utama di Pulau Sumatera, Teluk Panjang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. PTP Terminal Nonpetikemas cabang Panjang melayani berbagai jenis kapal untuk pengangkutan barang, termasuk barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering, dan petikemas. Komoditas utama yang ditangani di pelabuhan ini antara lain gula mentah, minyak kelapa sawit, batu bara, kedelai, dan bungkil.

Panjang Branch is strategically located at the crossroads between Sumatra and Java Islands, with port infrastructure established in the 17th century. The port comprises 4 wharves A, B, C, and D, with a total length of 922 meters. As one of the principal ports in Sumatra, Teluk Panjang plays a vital role in supporting the economic growth of Lampung Province. PTP Terminal Nonpetikemas – Panjang Branch serves various types of vessels for transporting goods, including general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, and containers. Key commodities handled at this port include raw sugar, palm oil, coal, soybeans, and meal (bungkil).

Pendapatan Cabang Panjang

Revenue of Panjang Branch

Tabel Pendapatan Cabang Panjang 2023-2024
Total Revenue of Panjang Branch in 2023-2024

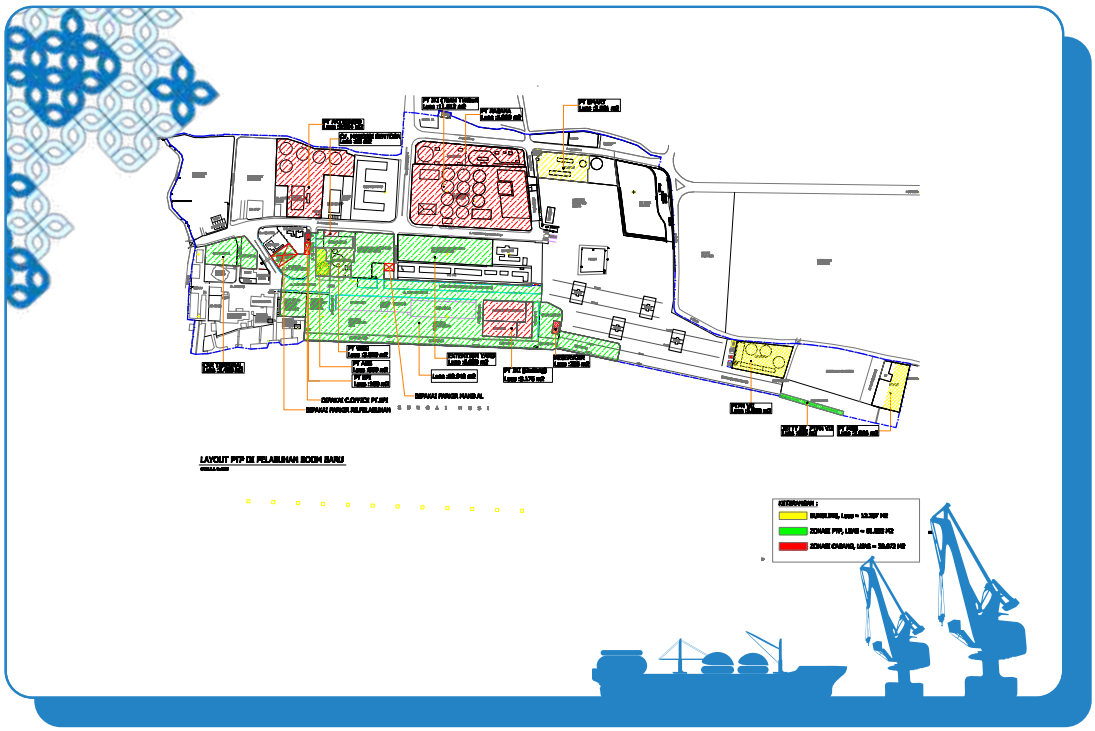
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Panjang Panjang Branch	97.472	163.608	(66.136)	(40,42%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari Cabang Panjang sebesar Rp97,47 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp66,14 miliar atau 40,42% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp163,61 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Panjang Branch amounting to Rp97.47 billion, representing a decrease of Rp66.14 billion or 40.42% compared to Rp163.61 billion in the previous year.

CABANG PALEMBANG

PALEMBANG BRANCH



Cabang Palembang, yang terletak di antara dua muara anak Sungai Musi, yakni Sungai Lawang Kidul dan Sungai Belabak, merupakan pelabuhan sungai terbesar di Sumatera dan pusat utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Dibangun pada tahun 1924, pelabuhan ini mengelola aktivitas bongkar muat yang didominasi oleh barang curah kering, petikemas, dan barang kemasan lainnya. Selain itu, cabang Palembang juga memiliki potensi sebagai sub-pelabuhan yang terbuka untuk investasi, dengan area luas yang mendukung kegiatan industri pengolahan, khususnya di Pelabuhan Sungai Lais. Pelabuhan Lais telah dilengkapi dengan terminal petikemas *modern* untuk mendukung peningkatan arus komoditas di masa depan. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang memiliki 5 dermaga dan 11 lapangan penumpukan, dengan fokus pada penanganan kargo utama seperti karet, batu bara, dan CPO.

Palembang Branch, located between the two tributaries of the Musi River, Lawang Kidul River and Belabak River, is the largest river port in Sumatra and a key economic center for South Sumatra Province. Established in 1924, the port handles loading and unloading activities that are primarily dominated by dry bulk cargo, containers, and other packaged goods. In addition, the Palembang Branch holds significant potential as a sub-port open for investment, supported by large available areas suitable for industrial processing activities, particularly in the Sungai Lais Port area. Lais Port is equipped with a modern container terminal, designed to support increased commodity flows in the future. PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch operates 5 wharves and 11 stacking yards, with a primary focus on handling major cargoes such as rubber, coal, and CPO.

Pendapatan Cabang Palembang

Revenue of Palembang Branch

Tabel Pendapatan Cabang Palembang 2023-2024
Total Revenue of Palembang Branch in 2023-2024

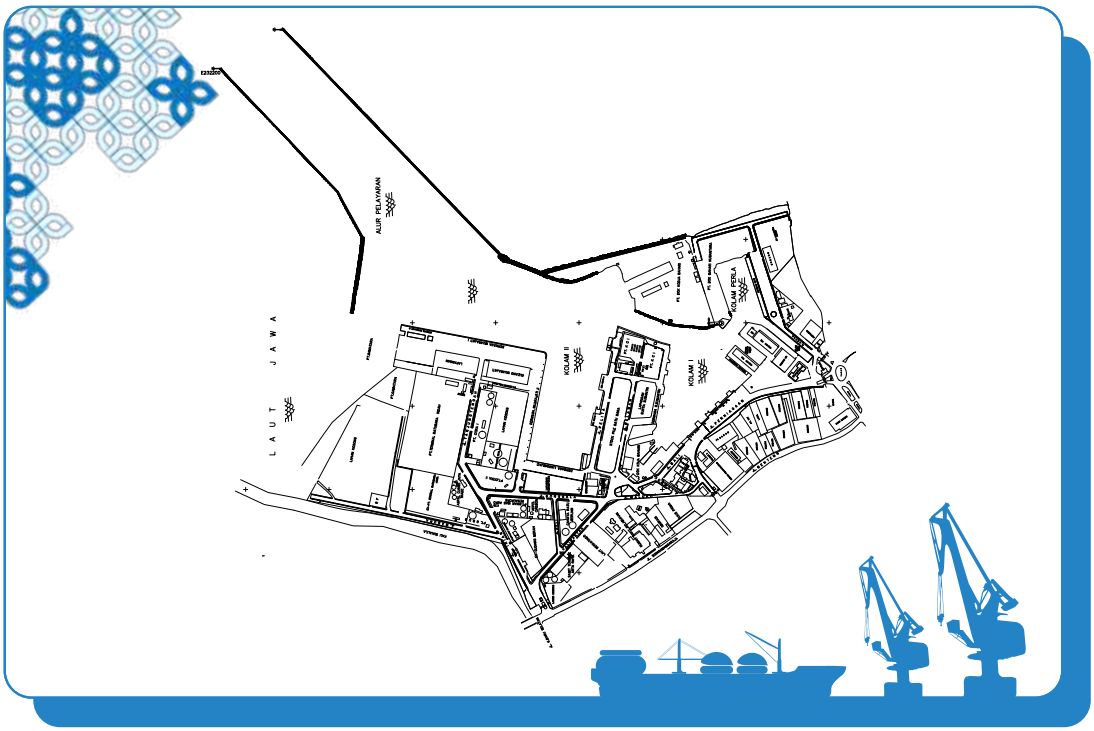
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Palembang Palembang Branch	37.184	49.168	(11.984)	(24,37%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Palembang sebesar Rp37,18 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp11,98 miliar atau 24,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,17 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Palembang Branch amounting to Rp37.18 billion, representing a decrease of Rp11.98 billion or 24.37% compared to Rp49.17 billion in the previous year.

CABANG CIREBON

CIREBON BRANCH



Pelabuhan cabang Cirebon, yang terletak di Kota Cirebon, Jawa Barat, didirikan pada tahun 1865 dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan utama untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keberadaannya yang strategis, di jalur utama jalan raya dan kereta api yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa, memberikan keunggulan logistik yang signifikan. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk area penumpukan petikemas, terminal batu bara, terminal aspal curah, serta tangki penyimpanan minyak kelapa sawit. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Cirebon kini mengelola 9 dermaga dan 7 lapangan penumpukan, dengan fokus utama pada penanganan kargo seperti batu bara, CPO, dan aspal.

The Cirebon Branch Port, located in Cirebon City, West Java, was established in 1865 and serves as a major gateway for trade across West Java and Central Java Provinces. Its strategic location, along key highway and railway routes connecting various cities on Java Island, offers a significant logistics advantage. The port is equipped with a variety of facilities, including container stacking areas, coal terminals, bulk asphalt terminals, and palm oil storage tanks. PTP Terminal Nonpetikemas Cirebon Branch currently operates 9 wharves and 7 operated stacking yards, with a primary focus on handling cargo such as coal, crude palm oil (CPO), and asphalt.

Pendapatan Cabang Cirebon

Revenue of Cirebon Branch

Tabel Pendapatan Cabang Cirebon 2023-2024
Total Revenue of Cirebon Branch in 2023-2024

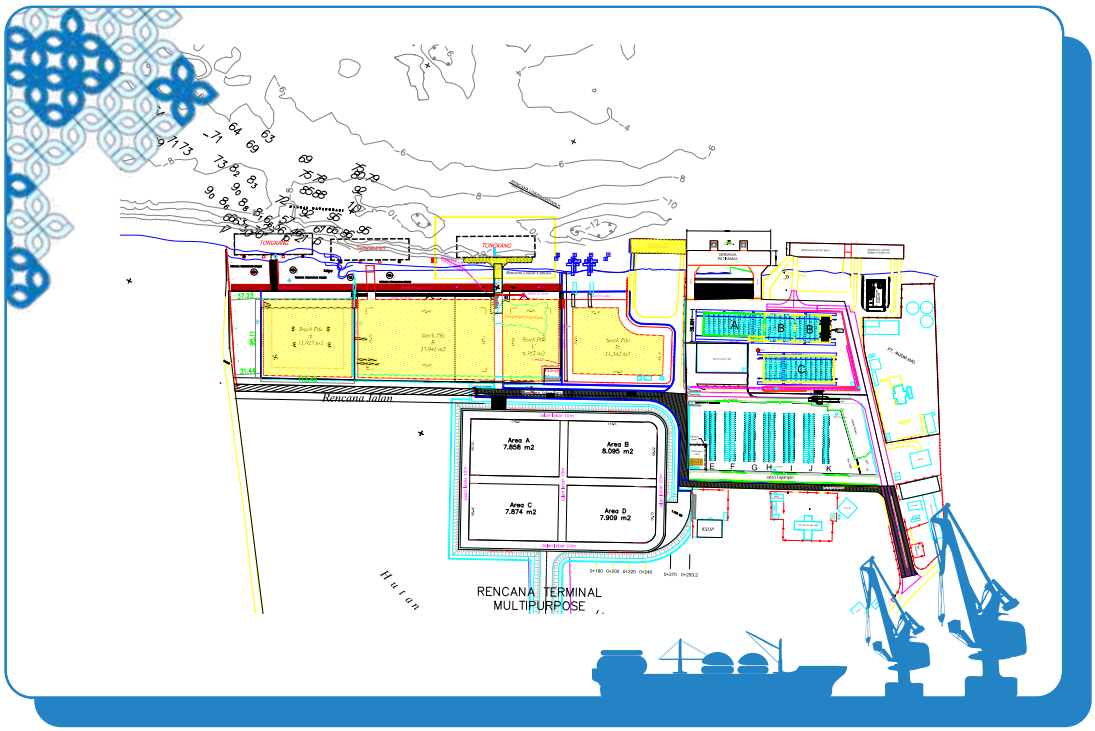
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Cirebon Cirebon Branch	47.128	52.265	(5.137)	(9,83%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Cirebon sebesar Rp47,13 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp5,14 miliar atau 9,83% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp52,27 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Cirebon Branch amounting to Rp47.13 billion, representing a decrease of Rp5.14 billion or 9.83% compared to Rp52.27 billion in the previous year.

CABANG JAMBI

JAMBI BRANCH



PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Jambi terletak di Pelabuhan Talang Duku, Hilir Sungai Batanghari, dan mengoperasikan 2 dermaga, yaitu Dermaga Apung Baja dan Dermaga 03 dengan total panjang dermaga mencapai 66,80 meter. Terminal *multipurpose* ini memiliki area lapangan seluas 76.701 m² dan fokus utama dalam melayani penanganan kargo seperti karet, minyak kelapa sawit, dan batu bara.

PTP Terminal Nonpetikemas Jambi Branch is located at Talang Duku Port, downstream of the Batanghari River, and operates 2 wharves, Apung Baja wharves and 03 wharves with a total wharf length of 66.80 meters. The multipurpose terminal spans a yard area of 76,701 square meters and primarily handles cargo such as rubber, crude palm oil (CPO), and coal.

Pendapatan Cabang Jambi

Revenue of Jambi Branch

Tabel Pendapatan Cabang Jambi 2023-2024
Total Revenue of Jambi Branch in 2023-2024

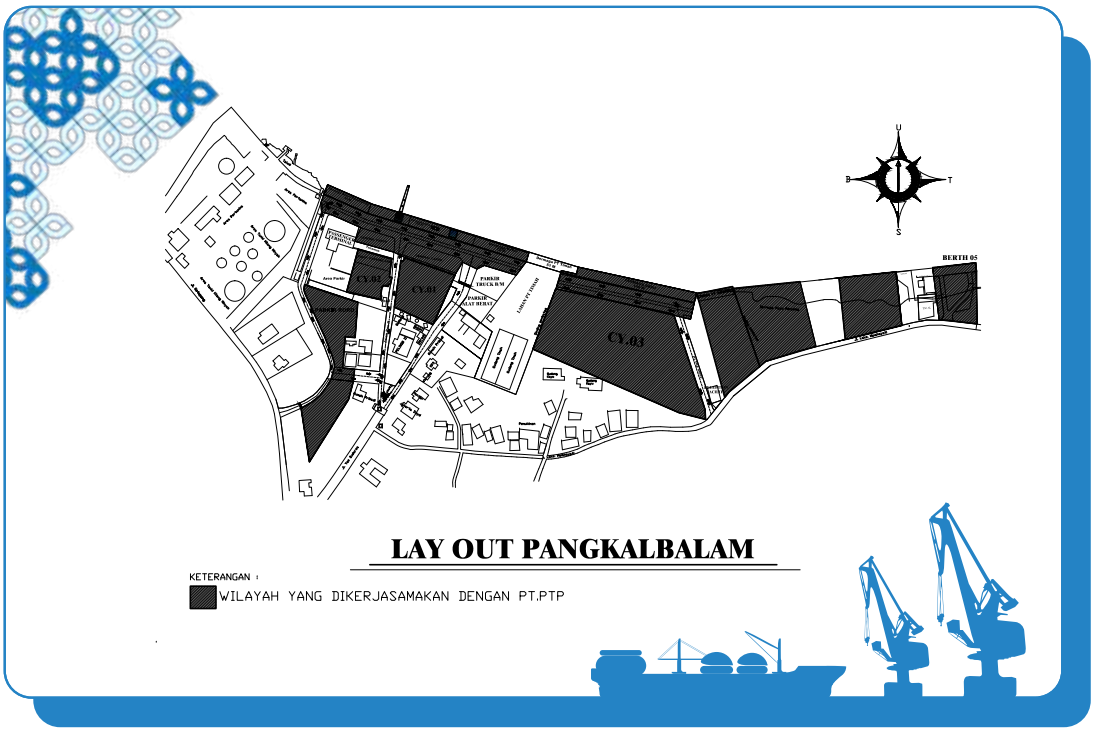
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Jambi Jambi Branch	20.606	36.770	(16.164)	(43,96%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Jambi sebesar Rp20,61 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp16,16 miliar atau 43,96% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,77 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Jambi Branch amounting to Rp20.61 billion, representing a decrease of Rp16.16 billion or 43.96% compared to Rp36.77 billion in the previous year.

CABANG PANGKAL BALAM

PANGKAL BALAM BRANCH



Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka dan memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk-produk pertambangan, pertanian, dan agroindustri. PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Pangkal Balam mengelola 7 dermaga dan 9 lapangan penumpukan, dengan komoditas utama yang meliputi timah, kaolin, pasir kuarsa, granit, karet, minyak kelapa sawit, dan lada. Kargo utama yang ditangani di cabang ini adalah CPO, kaolin, dan kernel.

Located on Bangka Island, Pangkal Balam Port holds significant potential in supporting the production of mining, agriculture, and agro-industrial commodities. PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Branch manages 7 wharves and 9 stacking yards, with primary commodities including tin, kaolin, silica sand, granite, rubber, crude palm oil (CPO), and pepper. The key cargoes handled at this branch are CPO, kaolin, and palm kernel.

Pendapatan Cabang Pangkal Balam

Revenue of Pangkal Balam Branch

Tabel Pendapatan Cabang Pangkal Balam 2023-2024
Total Revenue of Pangkal Balam Branch in 2023-2024

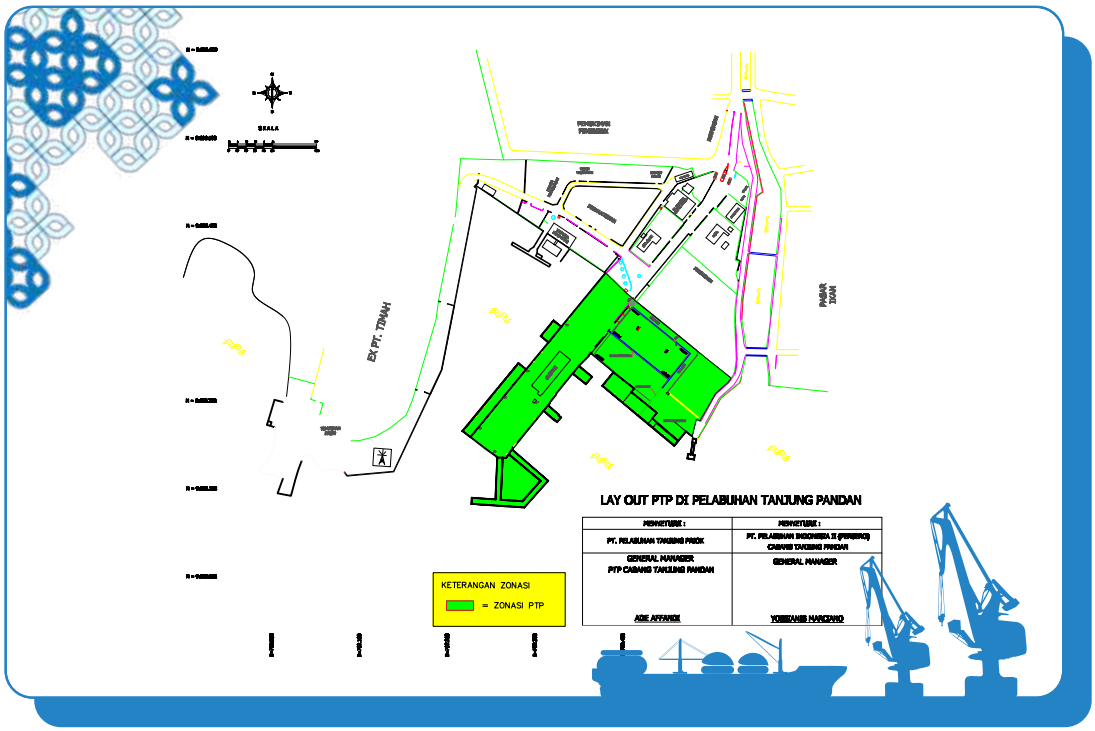
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Pangkal Balam Pangkal Balam Branch	26.708	32.189	(5.481)	(17,03%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Pangkal Balam sebesar Rp26,71 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp5,48 miliar atau 17,09% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,19 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Pangkal Balam Branch amounting to Rp26.71 billion, representing a decrease of Rp5.48 billion or 17.09% compared to Rp32.19 billion in the previous year.

CABANG TANJUNG PANDAN

TANJUNG PANDAN BRANCH



Pelabuhan Tanjung Pandan, yang terletak di Pulau Belitung, didirikan pada 11 Juni 2011 dan dikenal dengan Terminal Pelabuhan Laskar Pelangi, yang dirancang untuk mendukung pengembangan pariwisata di pulau tersebut. Pelabuhan ini telah direnovasi menjadi fasilitas *modern* yang dapat menampung hingga 200 penumpang, dengan fasilitas tambahan seperti ruang VIP dan area pertokoan. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Pandan mengelola 9 dermaga dan 2 lapangan penumpukan, dengan fokus utama pada pengangkutan kaolin dan kernel.

Located on Belitung Island, Tanjung Pandan Port was established on June 11, 2011, and is known as the Laskar Pelangi Port Terminal, designed to support the island's tourism development. The port has since been renovated into a modern facility capable of accommodating up to 200 passengers, featuring additional amenities such as a VIP lounge and retail area. Currently, Tanjung Pandan Port manages 9 wharves and 2 operated stacking yards, with a primary focus on the transportation of kaolin and palm kernel.

Pendapatan Cabang Tanjung Pandan

Revenue of Pandan Branch

Tabel Pendapatan Cabang Tanjung Pandan 2023-2024
Total Revenue of Pandan Branch in 2023-2024

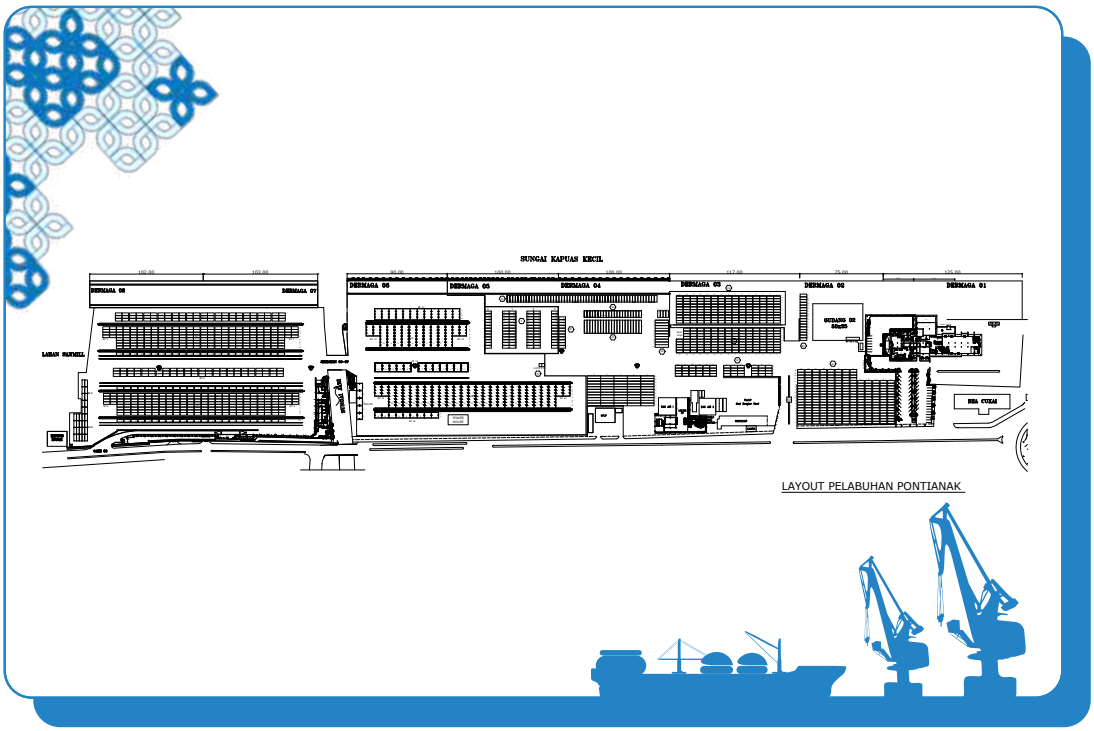
Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Tanjung Pandan Tanjung Pandan Branch	7.683	10.077	(2.394)	(23,76%)

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Tanjung Pandan sebesar Rp7,68 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar Rp2,39 miliar atau 23,76% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,08 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Tanjung Pandan Branch amounting to Rp7.68 billion, representing a decrease of Rp2.39 billion or 23.76% compared to Rp10.08 billion in the previous year.

CABANG PONTIANAK

PONTIANAK BRANCH



Pelabuhan Cabang Pontianak terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan merupakan pelabuhan utama yang vital bagi kegiatan bongkar muat di wilayah tersebut. Pelabuhan ini menangani berbagai komoditi dalam kategori *general cargo*, seperti karet, bungkil, dan kayu lapis. Sebagai pelabuhan yang mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kalimantan Barat, Pelabuhan Pontianak kini mengoperasikan 13 dermaga dan 4 lapangan penumpukan untuk melayani berbagai kebutuhan logistik di daerah ini.

The Pontianak Branch Port, located in Pontianak City, West Kalimantan, serves as a key gateway for loading and unloading activities in the region. The port handles various commodities under the general cargo category, including rubber, palm kernel meal, and plywood. As a port that supports the economic and trade activities of West Kalimantan, Pontianak Port currently operates 13 and 4 stacking yards to meet the region's diverse logistics needs.

Pendapatan Cabang Pontianak

Revenue of Pontianak Branch

Tabel Pendapatan Cabang Pontianak 2023-2024
Total Revenue of Pontianak Branch in 2023-2024

Uraian Description	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2023 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta)** Increase (Decrease) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Cabang Pontianak Pontianak Branch	76.470	73.596	2.874	3,91%

Per 31 Desember 2024, PTP Terminal Nonpetikemas berhasil membukukan pendapatan yang berasal dari cabang Pontianak sebesar Rp76,47 miliar. Ini mengalami peningkatan sebesar Rp2,87 miliar atau 3,91% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp73,60 miliar.

As of December 31, 2024, PTP Terminal Nonpetikemas recorded revenue from the Pontianak Branch amounting to Rp76.47 billion, representing an increase of Rp2.87 billion or 3.91% compared to Rp73.60 billion in the previous year.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Laporan Keuangan PTP Terminal Nonpetikemas disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), mengikuti prinsip akrual dan menggunakan dasar pengukuran biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang menggunakan dasar pengukuran yang dijelaskan dalam catatan yang relevan. Laporan arus kas menggambarkan perubahan kas dan setara kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, dengan menggunakan metode langsung.

Analisis kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini merujuk pada Laporan Keuangan yang mencakup periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young). Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND COMPLIANCE WITH SAK

The financial statements of PTP Terminal Nonpetikemas are prepared in accordance with the accounting policies established by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), using the accrual basis and the historical cost convention, except for certain accounts that are measured using the bases described in the relevant notes to the financial statements. The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents arising from operating, investing, and financing activities, using the direct method.

The financial performance analysis presented in this Annual Report refers to the Financial Statements for the periods ended December 31, 2024 and December 31, 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young). The Company's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants.

POSISI KEUANGAN

Tabel Posisi Keuangan 2023-2024
Table of Financial Position 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Keterangan Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Total Aset Total Assets	933.879	1.053.843	(119.964)	(11,38)
Total Liabilitas Total Liabilities	489.669	502.410	(12.741)	(2,54)
Ekuitas Equity	444.210	551.433	(107.223)	(19,44)
Total Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**933.879**	**1.053.843**	**(119.964)**	**(11,38)**

FINANCIAL POSITION

Perusahaan pada tahun 2024 telah mencatat total aset, total liabilitas dan total ekuitas yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 11,38%, 2,54%, dan 19,44%. adapun kinerjas masing-masing posisi keuangan Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

In 2024, the Company recorded a decline in its total assets, total liabilities, and total equity by 11.38%, 2.54%, and 19.44%, respectively. The performance of each component of the Company's financial position is outlined as follows:

ASET

Tabel Aset 2023-2024
Table of Assets 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024 (Rp-juta) 2024 (Rp-million)	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	(%)
Aset Lancar Current Assets	617.308	788.554	(171.246)	(21,72)

ASSETS

Tabel Aset 2023-2024
Table of Assets 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024 (Rp-juta) 2024 (Rp-million)	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	(%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	316.571	265.289	51.282	19,33%
Total Aset **Total Assets**	**933.879**	**1.053.843**	**(119.964)**	**(11,38)**

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mencatat total aset sebesar Rp933,88 miliar, turun 11,38% atau Rp119,96 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesa Rp1.053,84 miliar. hal ini seiring dengan adanya penurunan pada aset lancar sebesar 21,72%.

In 2024, the Company recorded total assets of Rp933.88 billion, representing a decrease of 11.38% or Rp119.96 billion compared to Rp1,053.84 billion in 2023. This decline was primarily due to a 21.72% reduction in current assets.

ASET LANCAR

CURRENT ASSETS

Tabel Aset Lancar 2023-2024
Table of Current Assets 2023-2024

Dalam juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Uraian Description	2024 (Rp-juta) 2024 (Rp-million)	2023 (Rp-juta) 2023 (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	(%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	355.916	541.815	(185.899)	(34,31)
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables - Net				
Pihak Berelasi Related Parties	143.039	1.985	141.054	7.105,99
Pihak Ketiga Third Parties	25.144	76.616	(51.472)	(67,18)
Piutang Lain-Lain Other Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	18.184	16.171	2.013	12,45
Aset Kontrak Contract Assets				
Pihak Berelasi Related Parties	12.523	64.044	(51.521)	(80,45)
Pihak Ketiga Third Parties	34.054	58.533	(24.479)	(41,82)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	15.278	28.810	(13.532)	(46,97)
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	13.170	579	12.591	2174,61
Total Aset Lancar **Total Current Assets**	**617.308**	**788.554**	**(171.246)**	**(21,72)**

Total aset lancar Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp617,31 miliar, turun 21,72% atau Rp171,25 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp788,55 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan signifikan pada aset kontrak pihak berelasi sebesar Rp51,52 miliar, dan piutang usaha neto pihak ketiga sebesar Rp51,47 miliar.

The Company's total current assets in 2024 amounted to Rp617.31 billion, a decrease of 21.72% or Rp171.25 billion from Rp788.55 billion in the previous year. This decline was primarily driven by a significant decrease in contract assets related parties, which fell by Rp51.52 billion, and in trade receivables - net from third parties, which declined by Rp51.47 billion.

KAS DAN SETARA KAS

CASH AND CASH EQUIVALENT

Tabel Kas dan Setara Kas 2023-2024
Table of Cash and Cash Equivalent 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Bank				
Pihak Berelasi Related Parties	119.036	89.437	29.599	33,09
Pihak Ketiga Third Parties	86.880	102.378	(15.498)	(15,14)
Deposito Berjangka Time Deposits				
Pihak Berelasi Related Parties	150.000	350.000	(200.000)	(57,14)
Jumlah **Total**	**355.916**	**541.815**	**(185.899)**	**(34,31)**

Perusahaan telah mencatat total Kas dan setara kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp355,92 miliar, turun 34,31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp541,82 miliar. hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada deposito berjangka pihak berelasi yang cukup signifikan sebesar 57,14%.

As of December 31, 2024, the Company recorded cash and cash equivalents totaling Rp355.92 billion, a decrease of 34.31% compared to Rp541.82 billion in the previous year. This decline was primarily attributed to a significant 57.14% reduction in time deposits related parties.

PIUTANG USAHA - NETO

TRADE RECEIVABLES - NET

Tabel Piutang Usaha – Neto 2023-2024
Table of Trade Receivables - Net 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pihak Berelasi Related Parties	143.039	1.985	141.054	7.105,99
Pihak Ketiga Third Parties	25.144	76.616	(51.472)	(67,18)
Jumlah **Total**	**168.182**	**78.601**	**89.581**	**113,97**

Pada tahun 2024, piutang usaha – neto naik sebesar 113,97%, dari tahun 2023 sebesar Rp78,60 miliar menjadi Rp168,18 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan piutang usaha neto pihak berelasi sebesar 7.105,99%.

In 2024, trade receivables - net increased by 113.97%, from Rp78.60 billion in 2023 to Rp168.18 billion. This increase was primarily driven by a 7,105.99%. surge in trade receivables - net related parties.

ASET KONTRAK

Tabel Aset Kontrak 2023-2024
Table of Contract Assets 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pihak Berelasi Related Parties	12.523	64.044	(51.521)	(80,45)
Pihak Ketiga Third Parties	34.054	58.533	(24.479)	(41,82)
Jumlah Total	46.577	122.577	(76.000)	(62,00)

Perusahaan pada tahun 2024 telah mencatat aset kontrak sebesar Rp46,58 miliar, menurun 62,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp122,58 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada aset kontrak pihak berelasi sebesar Rp51,52 miliar.

CONTRACT ASSETS

In 2024, the Company recorded contract assets of Rp46.58 billion, representing a 62.00% decrease from Rp122.58 billion in the previous year. This decline was mainly due to a significant decrease in contract assets related parties, which dropped by Rp51.52 billion.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pada tahun 2024, pajak dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar 46,97% atau Rp13,53 miliar menjadi Rp15,28 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp28,81 miliar.

PREPAID TAXES

In 2024, prepaid taxes decreased by 46.97%, or Rp13.53 billion, to Rp15.28 billion, compared to Rp28.81 billion in 2023.

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka 2023-2024
Table of Advances and Prepaid Expenses 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Uang Muka - Pegawai Advances - Employee	4.162	568	3.594	632,75
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses				
Pemeliharaan Maintenance	8.800	-	8.800	100,00
Asuransi Insurance	208	-	208	100,00
Lain-lain Others	-	11	(11)	(100,00)
Jumlah Total	**13.170**	**579**	**12.591**	**2.174,61**

Perusahaan telah mencatat total uang muka dan beban dibayar di muka pada tahun 2024 sebesar Rp13,17 miliar, naik 2.174,61% dari tahun sebelumnya sebesar Rp579 juta. hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat beban dibayar di muka pemeliharan dan asuransi.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

In 2024, the Company recorded total advances and prepaid expenses of Rp13.17 billion, representing a significant increase of 2,174.61% from Rp579 million in the previous year. This increase was primarily due to the prepaid maintenance and insurance expenses in 2024.

ASET TIDAK LANCAR

Tabel Aset Tidak Lancar 2023-2024
Table of Non-Current Assets 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	31.120	23.452	7.668	32,70
Investasi Saham Investment in Shares of Stock	3.860	3.860	0	0,00
Aset Tetap – Neto FIxed Assets - Net	216.867	211.357	5.510	2,61
Aset Hak Guna – Neto Right-of-Use Assets - Net	4.719	11.012	(6.293)	(57,15)
Aset Lain-lain Other Assets	21.626	15.609	6.017	38,55
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Estimated Claim For Tax Refund	38.379	-	38.379	100,00
Total Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**316.571**	**265.289**	**51.282**	**19,33**

Aset tidak lancar Perusahaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 19,33% dari tahun 2023 sebesar Rp265,29 miliar menjadi Rp316,57 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya taksiran tagihan restitusi pajak di tahun 2024.

Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2024, aset pajak tangguhan yang dimiliki Perusahaan sebesar Rp31,12 miliar, meningkat 32,70% atau Rp7,67 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp23,45 miliar.

Investasi Saham

Nilai investasi saham Perusahaan pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Sehingga nilai investasi saham Perusahaan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3,86 miliar.

NON-CURRENT ASSETS

The Company's non-current assets in 2024 increased by 19.33%, rising from Rp265.29 billion in 2023 to Rp316.57 billion. This increase was primarily due to the recognition of estimated claim for tax refund in 2024.

Deferred Tax Assets

In 2024, the Company reported deferred tax assets of Rp31.12 billion, an increase of 32.70% or Rp7.67 billion compared to Rp23.45 billion in the previous year.

Investment In Shares Of Stock

The value of the Company's investment in shares of stock remained unchanged in 2024. As such, the investment in shares of stock was maintained at Rp3.86 billion, the same as in the previous year.

ASET TETAP - NETO

Tabel Aset Tetap – Neto 2023-2024
Table of Fixed Assets - Net 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Harga Perolehan Acquisition Costs				
Alat Fasilitas Perubahan Port Equipment	202.777	177.517	25.260	14,23
Peralatan Equipment	74.498	69.861	4.637	6,64
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation	46.684	45.243	1.441	3,19
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Building	14.821	22.903	(8.082)	(35,29)
Jalan dan Bangunan Roads and Building	8.936	-	8.936	100,00

FIXED ASSETS - NET

Tabel Aset Tetap – Neto 2023-2024
Table of Fixed Assets - Net 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress	15.833	10.749	5.084	47,30
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Alat Fasilitas Perubahan Port Equipment	(80.449)	(65.563)	(14.886)	22,70
Peralatan Equipment	(50.699)	(37.749)	(12.950)	34,31
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation	(12.710)	(10.090)	(2.620)	25,97
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Building	(1.213)	(1.517)	304	(20,04)
Jalan dan Bangunan Roads and Building	(1.610)	-	-1.610	(100,00)
Jumlah **Total**	**216.867**	**211.357**	**5.510**	**2,61**

Pada tahun 2024, aset tetap – neto Perusahaan sebesar Rp216,87 miliar, meningkat sebesar 2,61% dari tahun sebelumnya sebesar Rp211,36 miliar.

In 2024, the Company's fixed assets – net amounted to Rp216.87 billion, reflecting an increase of 2.61% from Rp211.36 billion in the previous year.

Aset Hak Guna - Neto

Aset hak guna – neto Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp4,72 miliar, turun 57,15% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,01 miliar.

Right-Of-Use Assets – Net

The Company's right-of-use assets – net in 2024 amounted to Rp4.72 billion, a decrease of 57.15% compared to Rp11.01 billion in the previous year.

Aset Lain-Lain

Pada tahun 2024, aset lain-lain Perusahaan sebesar Rp21,63 miliar, meningkat 38,55% dari tahun 2023 sebesar Rp15,61 miliar.

Other Assets

In 2024, the Company recorded other assets of Rp21.63 billion, an increase of 38.55% compared to Rp15.61 billion in 2023.

LIABILITAS

Tabel Liabilitas 2023-2024
Table of Liabilities 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	489.496	501.546	(12.050)	(2,40)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	173	864	(691)	(79,98)
Total Liabilitas **Total Liabilities**	**489.669**	**502.410**	**(12.741)**	**(2,54)**

Total liabilitas pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp489,67 miliar, turun 2,54% dari tahun sebelumnya sebesar Rp502,41 miliar. Penurunan ini seiring dengan penurunan yang terjadi pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar 2,40% dan 79,98%

LIABILITIES

In 2024, the Company's total liabilities amounted to Rp489.67 billion, representing a decrease of 2.54% compared to Rp502.41 billion in the previous year. The decrease was in line with the decline in both current liabilities and non-current liabilities, which fell by 2.40% and 79.98%, respectively.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Tabel Liabilitas Jangka Pendek 2023-2024
Table of Current Liabilities 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Ketiga Third Parties	12.836	6.818	6.018	88,27
Utang lain-lain Other payables				
Pihak Berelasi Related Parties	226.484	281.591	(55.107)	(19,57)
Pihak Ketiga Third Parties	25.359	20.412	4.947	24,24
Liabilitas kontrak jangka pendek Short-term contract liabilities	1.869	866	1.003	115,82
Uang titipan Deposited money	9.479	17.508	(8.029)	(45,86)
Beban Akrual Accrued Expenses	211.263	149.415	61.848	41,39
Utang Pajak Taxes Payables	2.206	18.230	(16.024)	(87,90)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	-	6.706	(6.706)	(100,00)
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**489.496**	**501.546**	**(12.050)**	**(2,40)**

Total liabilitas jangka pendek Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp489,50 miliar, turun 2,40% atau Rp12,05 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp501,55 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan pada utang pajak, serta pada tahun 2024 tidak adanya liabilitas sewa.

In 2024, the Company's total current liabilities amounted to Rp489.50 billion, a decrease of 2.40% or Rp12.05 billion from Rp501.55 billion in the previous year. This decrease was primarily due to a significant reduction in taxes payables and the absence of lease liabilities in 2024.

UTANG USAHA

TRADE PAYABLES

Tabel Utang Usaha 2023-2024
Table of Trade Payables 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pihak Ketiga Third Parties	12.836	6.818	6.018	88,27
Jumlah **Total**	12.836	6.818	6.018	88,27

Perusahaan telah mencatat total utang usaha pada tahun 2024 sebesar Rp12,84 miliar, naik 88,27% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6,82 miliar.

In 2024, the Company recorded total trade payables of Rp12.84 billion, representing an increase of 88.27% compared to Rp6.82 billion in the previous year.

Liabilitas Kontrak Jangka Pendek

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mencatat liabilitas kontrak jangka pendek sebesar Rp1,87 miliar, naik 115,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp866,23 juta.

Short-term Contract Liabilities

In 2024, the Company reported short-term contract liabilities amounting to Rp1,87 billion, an increase 115.82% compared to Rp866.23 million.

BEBAN AKRUAL

Tabel Beban Akrual 2023-2024
Table of Accrued Expenses 2023-2024

ACCRUED EXPENSES

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Kerja Sama Mitra Usaha Partnership	109.268	74.066	35.202	47,53
Pemeliharaan Maintenance	62.469	24.651	37.818	153,41
Umum General	25.129	36.330	(11.201)	(30,83)
Administrasi Kantor Office Administration	2.366	1.947	419	21,52
Bahan Supplies	12.032	4.037	7.995	198,04
Lain-lain Others	-	8.384	(8.384)	(100,00)
Jumlah Total	**211.263**	**149.415**	**61.848**	**41,39**

Beban akrual Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp211,26 miliar, meningkat Rp61,85 miliar atau 41,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp149,42 miliar.

In 2024, the Company recorded accrued expenses of Rp211.26 billion, an increase of Rp61.85 billion or 41.39% compared to Rp149.42 billion in the previous year.

Utang Pajak

Perusahaan mencatat utang pajak pada tahun 2024 turun Rp16,02 miliar atau 87,90%, dari tahun 2023 sebesar Rp18,23 miliar menjadi Rp2,21 miliar.

Taxes Payables

In 2024, the Company's taxes payables decreased by Rp16.02 billion or 87.90%, from Rp18.23 billion in 2023 to Rp2.21 billion.

Liabilitas Sewa

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mencatat liabilitas sewa sebesar nihil, berbeda dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6,71 miliar.

Lease Liabilities

In 2024, the Company reported no lease liabilities, compared to Rp6.71 billion recorded in the previous year.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Tabel Liabilitas Jangka Panjang 2023-2024
Table of Non-Current Liabilities 2023-2024

NON-CURRENT LIABILITIES

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Liabilitas Kontrak Jangka Panjang Long-Term Contract Liabilities	173	864	(691)	(79,98)
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**173**	**864**	**(691)**	**(79,98)**

Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp173 juta, turun 79,98% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp864 juta. Hal ini seiring dengan penurunan yang terjadi pada liabilitas kontrak jangka panjang.

As of December 31, 2024, the Company's non-current liabilities amounted to Rp173 million, a decrease of 79.98% compared to Rp864 million in the previous year. This decline was primarily due to a reduction in long-term contract liabilities.

EKUITAS

EQUITY

Tabel Ekuitas 2023-2024
Table of Equity 2023-2024

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	25.000	25.000	0	0
Tambahan Modal disetor Additional Paid-in Capital	0,977	0,977	0	0
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	144.816	136.913	7.903	5,77
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	274.394	389.520	(115.126)	(29,56)
Total Ekuitas **Total Equity**	**444.210**	**551.433**	**(107.223)**	**(19,44)**

Total ekuitas Perusahaan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 19,44% atau Rp107,22 miliar, dari tahun 2023 sebesar Rp551,43 miliar menjadi Rp444,21 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp115,13 miliar.

In 2024, the Company's total equity decreased by 19.44%, or Rp107.22 billion, from Rp551.43 billion in 2023 to Rp444.21 billion. This decline was primarily due to a significant decrease of Rp115.13 billion in retained earnings unappropriated.

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS A AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain 2023-2024
Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pendapatan Operasi Operating Revenue	1.470.387	1.835.705	(365.318)	(19,90)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.345.472)	(1.512.369)	166.897	(11,04)
Laba Bruto Gross Income	124.916	323.336	(198.420)	(61,37)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(171.954)	(122.170)	(49.784)	40,75
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating income	2.338	2.455	(117)	(4,77)
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	(216)	(338)	122	(36,09)
(Rugi) Laba Usaha (Loss) Income from Operations	(44.916)	203.283	(248.199)	(122,10)
Pendapatan Keuangan Finance Income	18.600	20.255	(1.655)	(8,17)
Beban Keuangan Finance Costs	(498)	(1.151)	653	(56,73)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan (Loss) Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	(26.815)	222.386	(249.201)	(112,06)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(4.225)	(4.186)	(39)	0,93

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain 2023-2024
Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan (Loss) Income Before Corporate Income Tax	(31.040)	218.200	(249.240)	(114,23)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax (Expense) Benefit				
Kini Current	(4.821)	(51.877)	47.056	(90,71)
Tangguhan Deferred	7.668	(8.263)	15.931	(192,80)
(Rugi) Laba Tahun Berjalan (Loss) Income for the Year	(28.193)	158.059	(186.252)	(117,84)
Total (Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive (Loss) Income for the Year**	**(28.193)**	**158.059**	**(186.252)**	**(117,84)**

PENDAPATAN OPERASI

OPERATING REVENUES

Tabel Pendapatan Operasi 2023-2024
Table of Revenue Operation 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pendapatan Kerjasama Pelabuhan Port Sharing Revenue	698.299	318.000	55.812	224,70
Pendapatan Terminal Terminal Services	613.483	1.391.578	(778.095)	(55,91)
Pendapatan Terminal Petikemas Container Services	80.651	24.839	(23.708)	(42,33)
Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Services	44.052	45.284	380.299	119,59
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water and Electricity Services	32.296	56.004	(1.232)	(2,72)
Lain-lain Others	1.607	-	1.607	100,00
Jumlah **Total**	**1.470.387**	**1.835.705**	**(365.318)**	**(19,90)**

Pada tahun 2024, pendapatan operasi Perusahaan sebesar Rp1.470,39 miliar, turun 19,90% dari tahun 2023 sebesar Rp1.835,71 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada pendapatan terminal sebesar 55,91%.

In 2024, the Company recorded operating revenues of Rp1,470.39 billion, representing a 19.90% decrease from Rp1,835.71 billion in 2023. The decrease was due to a decline in terminal revenue by 55.91%.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

COST OF REVENUE

Tabel Beban Pokok Pendapatan 2023-2024
Table of Cost of Revenue 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Kerjasama Mitra Usaha Partnership	890.161	1.064.491	(174.330)	(16,38)
Amortisasi Amortization	10.927	8.688	2.239	25,77
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employees Welfare	217.565	200.932	16.633	8,28
Pemeliharaan Maintenance	103.889	110.065	(6.176)	(5,61)
Bahan Bakar dan Perlengkapan Fuels and Supplies	66.347	61.603	4.744	7,70
Konsesi Concession	12.786	22.642	(9.856)	(43,53)
Penyusutan Depreciation	31.764	27.857	3.907	14,03
Lain-lain Others	12.035	16.092	(4.057)	(25,21)
Jumlah Total	**1.345.472**	**1.512.369**	**(166.897)**	**(11,04)**

Beban pokok pendapatan Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp1.345,47 miliar, turun 11,04% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.512,37 milair. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada kerjasama mitra usaha di tahun 2024.

The Company's cost of revenue in 2024 amounted to Rp1,345.47 billion, representing a decrease of 11.04% compared to Rp1,512.37 billion in the previous year. This decline was primarily due to a reduction partnership in 2024.

Laba Bruto

Laba bruto Perusahaan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 61,37% atau Rp198,42 miliar, dari tahun 2023 sebesar Rp323,34 miliar menjadi Rp124,92 miliar. Hal ini seiring dengan pendapatan operasi yang menurun.

Gross Income

The Company's gross income in 2024 decreased by 61.37%, or Rp198.42 billion, from Rp323.34 billion in 2023 to Rp124.92 billion. This decline was in line with the decrease in operating revenues.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Tabel Beban Umum dan Administrasi 2023-2024
Table of General and Administrative Expenses 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employees Welfare	52.283	45.572	6.711	14,73
Pajak Bumi dan Bangunan Property Taxes	41.284	14.919	26.365	176,72
Umum General	24.877	27.628	(2.751)	(9,96)
Konsultan Consultant	4.927	4.275	652	15,25
Administrasi Kantor Office Administration	3.550	6.892	(3.342)	(48,49)
Penyisihan Piutang Usaha Allowance for Receivables	34.854	7.972	26.882	337,21
Bahan Bakar dan Perlengkapan Fuels and Supplies	5.804	9.244	(3.440)	(37,21)

Tabel Beban Umum dan Administrasi 2023-2024
Table of General and Administrative Expenses 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Lain-lain Others	4.376	5.669	(1.293)	(22,81)
Jumlah **Total**	**171.954**	**122.170**	**49.784**	**40,75**

Beban umum dan administrasi Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp171,95 miliar, naik 40,75% atau Rp49,78 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp122,17 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan pada pajak bumi dan bangunan di tahun 2024.

The Company's general and administrative expenses in 2024 amounted to Rp171.95 billion, an increase of 40.75% or Rp49.78 billion compared to Rp122.17 billion in the previous year. This increase was primarily due to a significant rise in property taxes in 2024.

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Tabel Pendapatan dan Beban Operasi Lain 2023-2024
Total Other Operating Income and Expenses 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income and Expenses				
Denda/Klaim Penalty/Claim	1.502	119	1.383	1162,18
Laba selisih kurs - neto Gain from Foreign Exchange - net	161	-	161	100,00
Lain-lain Others	675	2.336	(1.661)	(71,10)
Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya Total Other Operating Income	2.338	2.455	(117)	(4,77)
Beban Operasi Lainnya Other Expenses				
Rugi Selisih Kurs – Neto Loss on Foreign Exchange - Net	-	27	(27)	(100,00)
Denda Pajak Tax Penalties	-	1	(1)	(100,00)
Lain-lain Others	216	310	(94)	(30,32)
Jumlah **Total**	**216**	**338**	**(122)**	**(36,09)**

Perusahaan mencatat pendapatan operasi lainnya di tahun 2024 sebesar Rp2,34 miliar, turun 4,77% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,46 miliar. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan lain-lain sebesar 71,10%.

In 2024, the Company recorded other operating income of Rp2.34 billion, a decrease of 4.77% compared to Rp2.46 billion in the previous year. This was in line with a 71.10% decline in other income.

Sementara itu, beban operasi lainnya pada tahun 2024 menurun sebesar 36,09% dari tahun 2023 sebesar Rp338 juta menjadi Rp216 juta. Hal ini disebabkan oleh rugi selisih kurs- neto dan denda pajak pada tahun 2024 yang tercatat sebesar nihil.

Meanwhile, other operating expenses in 2024 decreased by 36.09%, from Rp338 million in 2023 to Rp216 million. This decline was due to the absence of loss on foreign exchange - net and tax penalties, which were recorded as none in 2024.

PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

FINANCE INCOME AND EXPENSES

Tabel Pendapatan (Beban) Keuangan 2023-2024
Table of Finance Income and Expenses 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Pendapatan Keuangan FInance Income				
Pendapatan Bunga Deposito Interest Income from Deposits	11.065	13.442	(2.377)	(17,68)
Pendapatan Jasa Giro Interest Income on Current Accounts	7.535	6.813	722	10,60
Jumlah Pendapatan Keuangan Total Finance Income	18.600	20.255	(1.655)	(8,17)
Beban Keuangan Finance Expenses				
Beban Bunga Sewa Lease Interest Expense	449	1.022	(573)	(56,07)
Beban Administrasi Bank Bank Administrative Expense	50	129	(79)	(61,24)
Jumlah Beban Keuangan Total Lease Interest Expense	**499**	**1.151**	**(652)**	**(56,65)**

Perusahaan mencatat pendapatan keuangan di tahun 2024 sebesar Rp18,60 miliar, turun 8,17% dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,26 miliar. Sementara itu, beban keuangan Perusahaan pada tahun 2024 menurun sebesar 56,65% dari tahun 2023 sebesar Rp1,15 milar menjadi Rp499 juta.

In 2024, the Company recorded finance income of Rp18.60 billion, a decrease of 8.17% compared to Rp20.26 billion in the previous year. Meanwhile, the Company's finance costs decreased by 56.65%, from Rp1.15 billion in 2023 to Rp499 million in 2024.

Laba Tahun Berjalan

(Loss) Income for The Year

Perusahaan telah mencatat Rugi tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp28,19 miliar, turun 117,84% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat laba sebesar Rp158,06 miliar.

The Company recorded a loss for the year - net 2024 amounting to Rp28.19 billion, a decline of 117.84% compared to an income of Rp158.06 billion in the previous year.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive (Loss) Income for The Year

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp28,19 miliar, turun 117,84% dari tahun sebelumnya yang mencatat laba sebesar Rp158,06 miliar.

In 2024, the Company recorded a comprehensive loss for the year of Rp28.19 billion, a decline of 117.84% compared to a comprehensive income of Rp158.06 billion in the previous year.

ARUS KAS

CASH FLOWS

Tabel Laporan Arus Kas 2023-2024
Table of Cash Flows 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash (Used in) Provide by Operating Activities	(67.524)	59.307	(126.831)	(213,86)
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash (Used in) Provide by Operating Activities	(32.191)	(88.485)	56.294	(63,62)
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash (Used in) Provide by Operating Activities	(86.185)	(110.027)	23.842	(21,67)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash And Cash Equivalents	(185.899)	(139.204)	(46.695)	(33,54)

Tabel Laporan Arus Kas 2023-2024
Table of Cash Flows 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	(%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	541.815	681.019	(139.204)	(20,44)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End Of Year	355.916	541.815	(185.899)	(34,31)

Arus Kas Diperoleh dari (Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tahun 2024, Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp67,52 miliar. Nilai tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya peningkatan pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain.

Arus Kas Diperoleh dari (Untuk) Aktivitas Investasi

Perusahaan telah mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 sebesar Rp32,19 miliar, turun Rp56,29 miliar atau 63,62% dari tahun sebelumnya sebesar Rp88,49 miliar. Hal ini seiring dengan akuisisi entitas anak yang tercatat nihil pada tahun 2024, dan menurunnya perolehan aset tetap.

Arus Kas Diperoleh dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 sebesar Rp86,19 miliar, menurun 21,67% dari tahun sebelumnya sebesar Rp110,03 miliar. Hal ini seiring adanya penurunan pada pembayaran liabilitas sewa dan pembayaran dividen kas.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp355,92 miliar, menurun 34,31% dari kas dan setara kas awal tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp541,82 miliar.

Cash Flows from (Used In) Operating Activities

In 2024, the Company recorded net cash used in operating activities amounting to Rp67.52 billion. This was primarily influenced by an increase in payment for income taxes and payments for other operating activities.

Cash Flows from (Used In) Investing Activities

The Company recorded cash used in investing activities of Rp32.19 billion in 2024, a decrease of Rp56.29 billion or 63.62% compared to Rp88.49 billion in the previous year. This decline was in line with the absence of acquisitions of a subsidiary in 2024 and a decrease in acquisitions of fixed assets.

Cash Flows from (Used In) Financing Activities

In 2024, cash used in financing activities amounted to Rp86.19 billion, a decrease of 21.67% from Rp110.03 billion in the previous year. This was mainly due to lower payments of lease liabilities and payments of cash dividends.

Cash and Cash Equivalents At End of Year

The Company's cash and cash equivalents at end of year of 2024 amounted to Rp355.92 billion, representing a 34.31% decrease from the cash of cash equivalents at beginning of year amounted Rp541.82 billion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATIO

Perusahaan melakukan penilaian terhadap kemampuannya dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, melalui analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasional Perusahaan.

The Company assesses its ability to meet both short-term and long-term obligations through an analysis of liquidity and solvency ratios. This assessment is carried out to ensure the smooth operation and long-term sustainability of the Company.

RASIO LIKUIDITAS

Perusahaan memanfaatkan rasio likuiditas, seperti rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin mampu perusahaan dalam menyelesaikan utang yang harus segera dibayar.

Pada tahun 2024, Perusahaan mengalami peningkatan dalam aktivitas pengembangan dan ekspansi bisnis, yang menyebabkan kebutuhan dana yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi Perusahaan untuk mengelola risiko likuiditas dengan efektif. Perusahaan secara rutin memantau dan mengelola kas serta setara kas untuk memastikan kecukupan dana guna mendukung kebutuhan operasional.

Selain itu, Perusahaan juga melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak fluktuasi, termasuk dalam hal pembayaran jangka panjang, serta terus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengambil langkah strategis dalam penempatan dan penggalangan dana, seperti pinjaman bank, penerbitan saham di pasar modal, dan utang. Tabel berikut menggambarkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perusahaan berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

LIQUIDITY RATIOS

The Company utilizes liquidity ratios including the current ratio, quick ratio, and cash ratio in the process of evaluating its capacity to meet current liabilities due. A higher liquidity ratio indicates a stronger ability to fulfill immediate debt obligations.

In 2024, the Company engaged in increased business development and expansion activities, which required significant funding. Therefore, effective liquidity risk management is critical. The Company regularly monitors and manages its cash and cash equivalents to ensure sufficient funding for operational needs.

Additionally, the Company conducts periodic evaluations of cash flows projections to manage the impact of fluctuations, including long-term payment obligations. It also closely monitors financial market conditions to implement strategic measures for fundraising and cash deployment, such as bank loans, equity issuance, and debt instruments. The following table outlines the maturity profile of the Company's liabilities based on contractual terms:

Tabel Rincian Jangka Waktu Pembayaran Liabilitas 2023-2024
Table of Liability Maturity Period Details 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	Kurang dari 1 tahun Less than 1 year	1-3 tahun 1-3 years	3-5 tahun 3-5 years	Lebih dari 5 tahun Over 5 years	Total
Liabilitas Liabilities					
Utang Usaha Trade Payables					
Pihak Ketiga Third Parties	12.836	-	-	-	12.836
Utang Lain-lain Other Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	226.484	-	-	-	226.484
Pihak ketiga Third Parties	25.359	-	-	-	25.359
Uang Titipan Deposits from Customers	9.479	-	-	-	9.479
Beban Akrual Accrued Expenses	211.263	-	-	-	211.263
Jumlah **Total**	**485.421**	**-**	**-**	**-**	**485.421**

Adapun perhitungan rasio likuiditas Perusahaan tahun 2024 sebagai berikut:

The calculation of the Company's liquidity ratio in 2024, as follows:

Tabel Rasio Likuiditas 2023-2024
Table of Liquidity Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)
Rasio Lancar Current Ratio	126,11	157,22
Rasio Cepat Quick Ratio	100,67	121,17
Rasio Kas Cash Ratio	72,76	108,03

Rasio Lancar

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki Perusahaan. Nilai rasio lancar Perusahaan tahun 2024 tercatat 126,11% menurun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 157,22%. Hal ini mencerminkan kecukupan aset yang dimiliki Perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek.

Current Ratio

The current ratio is used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations using its current assets. In 2024, the Company's current ratio stood at 126.11%, a decrease from 157.22% in 2023. This reflects the Company's sufficient asset base to cover its short-term obligations, although with a lower margin compared to the previous year.

Rasio Cepat

Rasio cepat atau *quick ratio* adalah jenis rasio keuangan yang berguna untuk menilai posisi likuiditas sebuah perusahaan, bisnis, proyek, pusat laba, ataupun pusat investasi. Ciri khusus dari rasio ini dibandingkan dengan jenis rasio likuiditas lain adalah hanya memperhitungkan kas serta item setara kas untuk perhitungan dan interpretasi. Nilai rasio cepat Perusahaan tahun 2024 tercatat 100,67% meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 121,17%.

Quick Ratio

The quick ratio is a financial metric used to assess the liquidity position of a company, business unit, project, profit center, or investment center. Unlike other liquidity ratios, the quick ratio only considers cash and cash equivalents in its calculation and interpretation. The Company's quick ratio in 2024 was recorded at 100.67% an increase from 121.17% in 2023.

Rasio Kas

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai rasio kas Perusahaan tahun 2024 tercatat 72,76% menurun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 108,03%. Hal ini mencerminkan kecukupan pada ketersediaan kas Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Cash Ratio

The cash ratio measures the Company's ability to fulfill immediate obligations using only its most liquid assets. In 2024, the Company's cash ratio was 72.76%, a decline from 108.03% in 2023. It reflects the Company's adequate but reduced cash availability to meet short-term obligations compared to the previous year.

RASIO SOLVABILITAS

Perusahaan menggunakan rasio solvabilitas dalam mengukur kemampuannya dalam membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas sendiri diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset.

SOLVENCY RATIOS

The Company uses solvency ratios to assess its ability to meet all of its obligations, both short-term and long-term. Solvency is evaluated through the debt to equity ratio and the debt to asset ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas 2023-2024
Table of Solvency Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)	110,23	91,11
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt to Asset Ratio (DAR)	52,43	47,67

Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Di tahun 2024, nilai rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan sebesar 110,23%, lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 91,11%.

Debt to Equity Ratio

In 2024, the Company's debt to equity ratio stood at 110.23%, higher than 91.11% in 2023.

Rasio Utang Terhadap Aset

Pada tahun 2024, nilai rasio utang terhadap aset Perusahaan sebesar 52,43%, lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 47,67%.

Debt to Asset Ratio

In 2024, the Company's debt to asset ratio was 52.43%, an increase from 47.67% in the previous year.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang 2023-2024
Table of Collectibility Rate 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)
Tingkat Perputaran Piutang (Kali) Receivables Turnover Rate (Times)	28,90	20,86
Lama Penagihan Rata-rata (Hari) Average Collection Period (Days)	12,63	16,72

Tingkat perputaran piutang Perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 28,90 kali, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 20,86 kali. Kenaikan perputaran piutang ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan piutang, di mana proses pembayaran piutang berlangsung lebih cepat. Selain itu, rata-rata waktu penagihan Perusahaan terhadap piutang tercatat sebesar 12,63 hari, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 16,72 hari. Penurunan dalam jangka waktu penagihan ini menandakan bahwa piutang dapat dilunasi lebih cepat, meningkatkan likuiditas Perusahaan.

The Company's accounts receivable turnover in 2024 was recorded at 28.90 times, an increase compared to 20.86 times in 2023. The improvement reflects greater efficiency in receivables management, as receivables were collected quicker. In addition, the average collection period in 2024 was 12.63 days, a decrease from 16.72 days in 2023. This reduction in collection period indicates that receivables were settled faster, thereby enhancing the Company's liquidity position.

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan menunjukkan perbaikan, meskipun penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti adanya perubahan dalam prosedur *switching* nota yang diterapkan oleh Perusahaan. Hal ini turut berkontribusi pada percepatan proses penagihan dan pembayaran piutang, sehingga memperbaiki kualitas piutang Perusahaan secara keseluruhan.

The Company's receivables collectibility showed improvement, although the decrease in collection period was also influenced by several factors, including the implementation of revised invoice switching procedures. These changes contributed to an accelerated billing and payment process, thereby improving the overall quality of the Company's receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Struktur modal merupakan perimbangan berbasis bunga dan ekuitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan. Di tahun 2024, komposisi struktur modal Perusahaan mengalami perubahan, yakni sebesar 5,63% berasal dari modal saham dan 94,37% dari saldo laba yang seluruhnya merupakan bagian dari ekuitas Perusahaan.

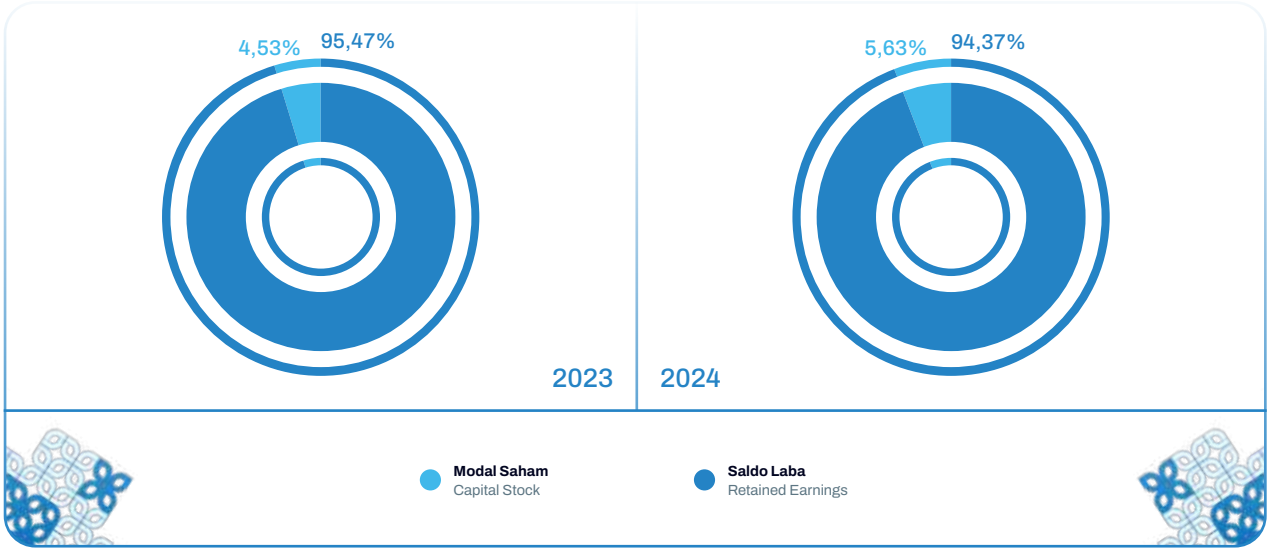
COMPANY CAPITAL STRUCTURE

The capital structure represents the balance between interest-bearing liabilities and equity, aimed at optimizing the Company's value. In 2024, the composition of the Company's capital structure changed, with 5.63% derived from capital stock and 94.37% from retained earnings, both of which are components of the Company's total equity.

Tabel Komposisi Struktur Modal 2023-2024
Table of Capital Structure 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan Growth	
	Nominal	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal	Komposisi (%) Composition (%)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-juta) Increase (Decrease) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage(%)
Modal Saham Capital Stock	25.000	5,63%	25.000	4,53%	0	0
Saldo Laba Retained Earnings	419.210	94,37%	526.433	95,47%	(107.223)	(20,37)
Total Ekuitas Total Equity	444.210	100,00%	551.433	100,00%	(107.223)	(19,44)



DASAR PEMILIHAN STRUKTUR MODAL

Kebijakan yang diterapkan oleh PTP Terminal Nonpetikemas terkait struktur modal bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal yang efisien. Strategi pengelolaan struktur modal yang diterapkan oleh perusahaan telah selaras dengan arahan dari pemegang saham, yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Untuk mendukung kelangsungan operasional, perusahaan mengelola permodalannya dengan fokus pada pemaksimalan manfaat bagi pemegang saham, termasuk menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Dalam rangka memastikan pengelolaan struktur modal yang efektif, perusahaan secara berkala melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa struktur modal tetap dalam kondisi terbaik dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pemegang saham.

BASIS FOR CAPITAL STRUCTURE SELECTION

The capital structure policy implemented by PTP Terminal Nonpetikemas is aimed at ensuring business sustainability and delivering optimal returns to shareholders through efficient capital management. The Company's capital structure management strategy is aligned with the directives of the shareholders, as outlined in the Company's Articles of Association.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

In order to support ongoing operations, the Company manages its capital with a focus on maximizing shareholder value, including maintaining an optimal capital structure to minimize the cost of capital. To ensure effective capital structure management, the Company regularly conducts evaluations to ensure that its capital structure remains sound and delivers maximum value to shareholders.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENTS

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material investasi barang modal yang bersifat material dengan pihak manapun. Perusahaan merupakan entitas anak usaha tidak langsung PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, melalui PT Pelindo Multi Terminal. Dengan demikian, ikatan yang material untuk investasi barang modal dilakukan oleh Pelindo.

As of the end of 2024, the Company had no material commitments for capital investment with any party. The Company is an indirect subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo, through PT Pelindo Multi Terminal. Accordingly, any material capital investment commitments are carried out by Pelindo.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURES

Investasi dalam barang modal (*capital expenditure*) memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis, karena merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal di masa depan. Pengeluaran ini digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh atau meningkatkan aset yang mendukung kelancaran operasi bisnisnya. Adapun, realisasi investasi barang modal perusahaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Capital expenditures play a critical role in business development, as they are essential to achieving optimal future outcomes. These expenditures are used by the Company to acquire or upgrade assets supporting its operational activities. The realization of the Company's capital expenditures as of December 31, 2024, is as follows:

Tabel Jenis Investasi Barang Modal 2023-2024
Table of Capital Expenditure 2023-2024

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Expenditure	**Tujuan Investasi** Investment Objectives of Capital Expenditure	**Nilai (Rp-ribu)** Value (Rp-thousand)
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Facility Building	Pendukung kegiatan operasional Supporting operational activities	14.284.850
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation	Pendukung kegiatan operasional Supporting operational activities	18.684.013
Jumlah **Total**		**32.968.863**

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal 2023-2024
Realization of Capital Expenditure 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**Kenaikan/Penurunan** Increase/ Decrease	
			Selisih Difference	**(%)**
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	32.968.863	44.250.074	(11.281.211)	(25,49)

Investasi barang modal yang direalisasikan Perusahaan pada 2024 adalah sebesar Rp32,97 miliar menurun sebesar 25,49% dari realisasi investasi barang modal di tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp44,25 miliar.

Realisasi investasi barang modal sepanjang tahun 2024, dipengaruhi antara lain oleh :

1. Pekerjaan Penggantian Motor *Gantry Jib Crane* No. 01,02,03 dan 04 PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Palembang tahun 2024 terserap sebesar Rp 2,7 miliar.
2. Pengadaan satu unit Forklift kap. 7 ton di PTP pelabuhan Cirebon tahun 2024 terserap sebesar Rp1,3 miliar.
3. Pekerjaan jembatabn timbang termasuk jalan akses dan ruang operator di dermaha F pelabuhan Panjang tahun 2024 terserap sebesar Rp1,07 miliar.
4. Pekerjaan pembangunan *Pipe Rack* Dermaga *Jetty* dan *Trestle* di Terminal Kijing PT Pelabuhan Tanjung Priok cabang Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2024 terserap sebesar Rp10,52 miliar.
5. Pekerjaan pengadaan perangkat TI sebagai pendukung penyediaan layanan *backup system* informasi di area PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2024 terserap sebesar Rp2,37 miliar.
6. Pengadaan satu unit *Forklift* kap. 5 di Pelabuhan terminal Kijing tahun 2024 terserap sebesar Rp1 miliar.

The Company's realized capital expenditures in 2024 amounted to Rp32.97 billion, a decrease of 25.49% from the 2023 realization of Rp44.25 billion.

The capital expenditure realization throughout 2024 was influenced, among others, by the following projects:

1. Replacement of Gantry Jib Crane Motors No. 01, 02, 03, and 04 at PT Pelabuhan Tanjung Priok Palembang Branch, with an absorption of Rp2.7 billion.
2. Procurement of one 7-ton capacity forklift at PTP Cirebon Port, with an absorption of Rp1.3 billion.
3. Construction of a weighbridge including access road and operator room at Wharf F, Panjang Port, with an absorption of Rp1.07 billion.
4. Construction of pipe rack, jetty, and trestle at Kijing Terminal, PT Pelabuhan Tanjung Priok Pontianak Branch, West Kalimantan, with an absorption of Rp10.52 billion.
5. Procurement of IT equipment to support the provision of backup information systems at PT Pelabuhan Tanjung Priok, with an absorption of Rp2.37 billion.
6. Procurement of one 5-ton capacity forklift at Kijing Terminal, with an absorption of Rp1 billion.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan revisi RKAP Tahun 2024 dengan realisasi tahun buku 2024, adalah sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI LAPORAN LABA (RUGI)

COMPARISON OF 2024 TARGETS AND REALIZATION

The Company established several performance targets in the revised 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), which were adjusted in accordance with prevailing industry and economic conditions. The comparison between the 2024 revised RKAP targets and the actual results for the 2024 fiscal year is as follows:

TARGET DAN REALISASI LAPORAN LABA (RUGI)

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) 2024
Table of Target and Realization of Statement of Profit or Loss 2024

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	**Realisasi 2024 (Rp-Juta)** 2024 Realization (Rp-Million)	**RKAP 2024 (Rp-Juta)** 2024 RKAP (Rp-Million)	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
LABA (RUGI) PROFIT (LOSS)			
PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUES			

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) 2024
Table of Target and Realization of Statement of Profit or Loss 2024

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	RKAP 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (Rp-Million)	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pelayanan Peti Kemas Container Services	80.651	-	-
Pendapatan Barang Non Petikemas Non-Container Services	481.385	-	-
Pengusahaan Alat Equipment Services	40.332	-	-
Pengusahaan Properti Property services	32.295	38.164	84,62%
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Other Revenue	825.464	1.699.877	48,56%
Pelayanan pengusahaan air/listrik Water and electricity services	-	1	-
Jumlah Pendapatan Total Income	1.470.387	1.738.041	84,60%
BEBAN USAHA COST OF REVENUES			
Beban Pegawai Salaries and Employees Welfare Expenses	222.980	219.258	101,70%
Beban Bahan Supplies Expenses	69.005	80.289	85,95%
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	103.889	108.273	95,95%
Beban Penyusutan Amortization Expenses	42.690	38.020	112,28%
Beban Asuransi Insurance Expenses	7.451	12.742	58,48%
Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Partnership Expenses	890.973	929.094	95,90%
Beban Administrasi Kantor Office Administration Expenses	4.470	5.112	87,44%
Beban Umum General Expenses	175.968	99.773	176,37%
Jumlah Beban Usaha Total Cost of Revenue	1.517.426	99.773	101,67%
LABA (RUGI) USAHA (LOSS) INCOME FROM OPERATIONS	(47.038)	245.480	(19,16%)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA OTHER OPERATING INCOME AND (EXPENSES)			
Pendapatan di Luar Usaha Lainnya Other Non-Operating Income	20.938	16.356	128,01%
Beban Usaha di Luar Lainnya Other Non-Operating Expenses	4.491	523	858,15%
Beban Bunga Interest Expenses	449	654	68,62%
Selisih Pendapatan & Beban Diluar Usaha Difference Between Non-Operating Income and Non Expenses	16.006	(9.832)	(162,80%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Income Tax	(31.040)	235.648	(13,17%)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(2.847)	58.912	(4,83%)
Laba Tahun Berjalan Income For the Year	(28.193)	176.736	(15,95%)
EBITDA	(4.817)	283.500	(1,48%)
EBITDA Margin (%)	(0,28%)	16,31%	(1,72%)

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) 2024
Table of Target and Realization of Statement of Profit or Loss 2024

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	**Realisasi 2024 (Rp-Juta)** 2024 Realization (Rp-Million)	**RKAP 2024 (Rp-Juta)** 2024 RKAP (Rp-Million)	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Operating Ratio (%)	103,20%	85,88%	120,17%
Net Profit Margin (%)	(1,92%)	10,17%	(18,88%)

Pendapatan Usaha dan EBITDA

Secara umum, kinerja keuangan Perusahaan di tahun 2024, terlihat dari Pendapatan Usaha yang terealisasi sebesar Rp1,47 triliun, menurun 19,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1,83 triliun. Perusahaan mencatatkan EBITDA yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar minus Rp4,19 miliar atau mencapai 101,52% dibawah RKAP tahun 2024 sebesar Rp283,5 miliar. Realisasi Pendapatan Usaha yang tercatat lebih rendah terhadap target tersebut terutama dipengaruhi oleh:

1. Pendapatan petikemas tahun 2024 terealisasi sebesar Rp80,65 miliar. nilai tersebut disebabkan karena Perusahaan masih melayani kapal kombo yang membawa petikemas
2. Pendapatan barang non petikemas tahun 2024 terealiasi sebesar Rp481,39 miliar. Pendapatan barang non petikemas tahun 2024 tidak dianggarkan namin masih terdapat kegiatan bongkar muat internasional di PTP cabang Tanjung Priok yang belum *switching* nota SPMT dan di PTP cabang Panjang terdapat kenaikan pendapatan diluar area BASO serta adanya pendapatan *Ship to Ship* Bunati.
3. Pendapatan pengusahaan alat tahun 2024 terealisasi sebesar Rp40,33 miliar. pendapatan pengusahaan alat tahun 2024 tidak dianggarkan namun masih terdapat pendapatan alat antara lain di PTP cabang Tanjung Priok karena masih terdapat kegiatan bongkar muat internasional yang belum *switching* nota SPMT dan di PTP cabang Panjang karena adanya pendapatan diluar BASO.
4. Pendapatan pengusahaan properti tahun 2024 terealisasi sebesar Rp32,30 miliar, atau 84,62% dari RKAP 2024 sebesar Rp38,16 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama pemanfaatan lahan proyek *shorebase* di Banyuwangi dan Lhokseumawe.
5. Pendapatan rupa-rupa usaha tahun 2024 sebesar Rp825,46 miliar atau 48,56% dari RKAP 2024 sebesar Rp1,70 triliun.

Beban Usaha

Perusahaan mencatatkan Beban Usaha tahun 2024 sebesar Rp1,52 triliun atau 1,67% diatas RKAP 2024 yang sebesar Rp1,49 triliun. Adapun rincian Beban Usaha serta analisis ketercapaian atau keterserapannya target RKAP tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai tahun 2024 terealisasi sebesar Rp222,98 miliar, terserap diatas anggaran sebesar 1,70% dari RKAP 2024 sebesar Rp219,26 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian *base salary* dan tunjangan kelas individu.
2. Beban bahan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp69,00 miliar, mencapai 14,05% dari RKAP 2024 sebesar Rp80,29 miliar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan bahan bakar sejalan dengan pendapatan dan bahan makanan di cabang-cabang.
3. Beban pemeliharan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp103,89 miliar, mencapai 95,95% dari RKAP 2024 sebesar Rp108,27 miliar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi

Operating Revenues and EBITDA

Overall, the Company's financial performance in 2024, as reflected in Operating Revenue, reached Rp1.47 trillion, representing a decrease of 19.90% compared to Rp1.83 trillion in 2023. The Company recorded a negative EBITDA of Rp4.19 billion, which was 101.52% below the 2024 RKAP target of Rp283.5 billion. The shortfall in realized operating revenues compared to the target was primarily influenced by the following:

1. Container revenue in 2024 was Rp80.65 billion, as the Company continued to serve combo vessels carrying containers.
2. Non-container cargo revenue in 2024 reached Rp481.39 billion. This revenue was not budgeted, but it was realized due to ongoing international loading and unloading activities at PTP Tanjung Priok Branch that had not yet been switched to SPMT invoicing, and at the PTP Panjang Branch, where there was an increase in revenue outside the BASO area as well as income from Ship-to-Ship operations at Bunati.
3. Equipment services revenue in 2024 was Rp40.33 billion. Although not included in the budget, this revenue came from, among others, international handling activities at the PTP Tanjung Priok Branch that had not been switched to SPMT invoicing, and from non-BASO activities at the PTP Panjang Branch.
4. Property services in 2024 was Rp32.30 billion, or 84.62% compared to the 2024 RKAP of Rp38.16 billion, mainly due to the land use cooperation for shorebase projects in Banyuwangi and Lhokseumawe.
5. Other revenue in 2024 amounted to Rp825.46 billion 48.56% of lower than the 2024 RKAP target of Rp1.70 trillion.

Operating Expenses

In 2024, the Company recorded Operating Expenses of Rp1.52 trillion, or 1.67% exceeding the 2024 RKAP target of Rp1.49 trillion. The details of the Operating Expenses and the analysis of the 2024 RKAP target absorption are as follows:

1. Employee expenses in 2024 were realized at Rp222.98 billion, exceeding the budget by 1.70% compared to the 2024 RKAP of Rp219.26 billion. This increase was due to adjustments in base salary and individual class.
2. Supplies expenses in 2024 were realized at Rp69.00 billion, achieving 14.05% of the 2024 RKAP of Rp80.29 billion. It was due to low absorption of fuel in line with revenue and food supplies at the branches.
3. Maintenance expenses in 2024 were realized at Rp103.89 billion, or 95.95% of the 2024 RKAP target of Rp108.27 billion. The shortfall was due to lower spending on maintenance of

pemeliharaan alat faspel, bangunan faspel, serta peralatan TI dan non TI di cabang-cabang PTP.

4. Beban penyusutan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp42,69 miliar, terserap dibawah anggaran sebesar 12,48% dari RKAP 2024 sebesar RP38,02 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya kapitalisasi aset aset dan amortisasi atas beban ditangguhkan.
5. Beban asuransi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7,45 miliar, 41,52% dibawah RKAP 2024 sebesar Rp12,74 miliar. hal ini disebabkan oleh menurunnya biaya asuransi tenaga kerja karena masih terdapat beberapa posisi sdm yang belum terpenuhi.
6. Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp890,97 miliar, terserap dibawah anggaran sebesar 4,10% dari RKAP 2024 sebesar Rp929,09 miliar. Hal ini disebabkan adanya realisasi beban KSMU *sharing* operasi di PTP cabang Tanjung Priok atas kegiatan internasional.
7. Beban administrasi kantor tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4,47 miliar, terserap dibawah anggaran sebesar 12,56% dari RKAP 2024 sebesar Rp5,11 miliar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi cetak fotocopy, ATK, pengiriman surat.
8. Beban umum tahun 2024 terealisasi sebesar Rp175,97 miliar, terserap diatas anggaran sebesar 76,37% dari RKAP 2024 sebesar Rp99,77 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan piutang karena piutang RAP (Rizki Anugrah Pratama) dan piutang Indo Energy Solutions di cabang Panjang atas kegiatan minimum throughput dan PT Prima Bandar Samudera dan Golden Ocean Line atas kegiatan bongkar muat di PTP cabang Tanjung Priok, serta adanya realisasi beban PBB tahun 2022-2024.

port equipment and infrastructure, as well as IT and non-IT equipment at various PTP branches.

4. Depreciation expenses in 2024 were recorded at Rp42.69 billion, 12.48% above budget compared to the 2024 RKAP of Rp38.02 billion, mainly due to the capitalization of assets assets and amortization on deferred expenses.
5. Insurance expenses in 2024 were realized at Rp7.45 billion, which was 41.52% below the 2024 RKAP of Rp12.74 billion. This decrease was due to lower employee insurance costs, as several staffing positions had not yet been filled.
6. Partnership (KSMU) Expenses in 2024 were realized at Rp890.97 billion, bellow the 2024 RKAP target of Rp929.09 billion by 4.10%. This increase was primarily due to the realization of KSMU sharing operations at the PTP Tanjung Priok branch for international activities.
7. Office administration expenses in 2024 were realized at Rp4.47 billion, 12.56% below the 2024 RKAP target of Rp5.11 billion. This was attributed to lower actual costs for printing, office supplies, and mailing services.
8. General expenses in 2024 were realized at Rp175.97 billion, 76.37% above the 2024 RKAP target of Rp99.77 billion. This increase was driven by higher receivable difference expenses, particularly related to receivables from RAP (Rizki Anugrah Pratama) and Indo Energy Solutions at the PTP Panjang Branch for minimum throughput activities, as well as from PT Prima Bandar Samudera and Golden Ocean Line for loading and unloading activities at the PTP Tanjung Priok Branch. In addition, there was the realization of land and building tax (PBB) expenses for 2022–2024.

TARGET DAN REALISASI POSISI KEUANGAN

TARGET AND REALIZATION OF FINANCIAL POSITION

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Posisi Keuangan dan Struktur Modal
Table of Comparison of Target and Realization of Financial Position and Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	**Realisasi 2024 (Rp-Juta)** 2024 Realization (Rp-Million)	**RKAP 2024 (Rp-Juta)** 2024 RKAP (Rp-Million)	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Posisi Keuangan Financial Position			
Aset Lancar Current Assets	617.308	685.987	89,99%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	316.571	397.817	79,58%
Jumlah Aset Total Assets	933.879	1.083.804	86,17%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	489.496	382.448	127,99%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	173	835	20,72%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	489.669	383.283	127,76%
Modal Saham Capital Stock	25.000	25.000	100,00%
Cadangan Umum General Reserve	-	-	-

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Posisi Keuangan dan Struktur Modal
Table of Comparison of Target and Realization of Financial Position and Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	RKAP 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (Rp-Million)	Pencapaian (%) Achievement (%)
Laba Tahun Berjalan (Saldo Laba) Income For the Year (Retained Earnings)	419.210	368.548	113,75%
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**444.210**	**700.521**	**63,41%**
Jumlah Liabiltas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**933.879**	**1.083.804**	**86,17%**

Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2024 menunjukkan saldo Aset dan Liabilitas & Ekuitas sebesar Rp933,88 miliar atau 13,83% di bawah RKAP per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,08 triliun. Secara garis besar perbandingan Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2024 dengan revisi RKAP 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp617,31 miliar atau 10,01% di bawah Revisi RKAP 2024 sebesar Rp685,99 miliar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya saldo kas dan pendapatan yang akan diterima.
2. Aset tidak lancar per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp316,57 miliar atau 20,42% di bawah Perubahan RKAP 2024 sebesar Rp397,82 miliar. Hal ini sejalan dengan penyerapan investasi pada tahun 2024.
3. Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp489,50 miliar atau 27,99% di atas RKAP 2024 sebesar Rp382,45 miliar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya saldo utang seiring dengan kesepakatan pembauaran utang ke regional 2 dengan skema cicilan.
4. Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp173 juta atau 79,28% di bawah RKAP 2024 sebesar Rp835 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya reklasifikasi yang semula dicatat sebagai pendapatan diterima di muka jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek lainnya atas pendapatan PT SMART cabang Cirebon.
5. Ekuitas per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp444,21 miliar atau 36,59% dibawah RKAP 2024 sebesar Rp700,52 miliar. Hal ini dikarenakan rendahnya saldo laba periode berjalan.

Assets, Liabilities, and Equity

The Company's Statement of Financial Position as of December 31, 2024 reported total Assets and Liabilities & Equity of Rp933.88 billion, which was 13.83% lower than the 2024 RKAP target of Rp1.08 trillion. In general, the comparison between the financial position as of December 31, 2024, and the revised 2024 RKAP is as follows:

1. Current assets as of December 31, 2024, were realized at Rp617.31 billion, or 10.01% below the revised RKAP of Rp685.99 billion. This was mainly due to a decline in cash balance and receivables.
2. Non-current assets as of December 31, 2024, were realized at Rp316.57 billion, or 20.42% below the revised RKAP of Rp397.82 billion, in line with lower capital expenditure absorption during 2024.
3. Current liabilities as of December 31, 2024, amounted to Rp489.50 billion, or 27.99% above the 2024 RKAP of Rp382.45 billion, primarily due to a decrease in payables following the installment agreement for settlement of payables with Regional 2.
4. Non-current liabilities as of December 31, 2024, were recorded at Rp173 million, or 79.28% below the 2024 RKAP of Rp835 million. This was due to a reclassification of amounts previously recorded as prepaid long-term revenue to other current liabilities, particularly from PT SMART revenue at the Cirebon Branch.
5. Equity as of December 31, 2024, stood at Rp444.21 billion, which was 36.59% below the 2024 RKAP target of Rp700.52 billion, largely due to a decline in retained earnings for the year.

TARGET DAN REALISASI ARUS KAS

TARGET AND REALIZATION OF CASH FLOWS

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Kas
Table of Comparison of Target and Realization of Cash FLows

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	RKAP 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (Rp-Million)	Pencapaian (%) Achievement (%)
Arus Kas Cash Flows			
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows From (Used in) Operating Activities	(67.524)	(23.640)	285,63%
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows From (Used in) Financing Activities	(86.185)	(26.706)	322,72%
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows From (Used in) Investing Activities	(32.191)	(127.620)	25,22%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Kas
Table of Comparison of Target and Realization of Cash FLows

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	RKAP 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (Rp-Million)	Pencapaian (%) Achievement (%)
Kenaikan/Penurunan Kas Increase or Decrease in Cash or Cash Equivalent	(185.899)	(177.966)	104,46%
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year	541.815	541.815	100,00%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalent at the End of Year	355.916	363.849	97,82%

Laporan Arus Kas periode tahun 2024 menunjukkan jumlah kas dan setara kas sebesar Rp355,92 miliar atau 2,18% di bawah Perubahan RKAP tahun 2024 sebesar Rp363,85 miliar. Penjelasan ringkas atas Laporan Arus Kas tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus kas bersih untuk aktivitas operasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp67,52 miliar, naik 185,63% dari RKAP tahun 2024 sebesar Rp23,64 miliar. Hal ini dikarenakan menurunnya saldo penerima kas dari pelanggan sejalan dengan penurunan pendapatan dan terdapat pembayaran cicilan utang ke regional 2.
2. Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan tahun 2024 terealiasi sebesar Rp86,19 miliar, naik 222,72% dari RKAP tahun 2024 sebesar Rp26,71 miliar. Hal ini disebabkan oleh terdapat pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham atas tahun buku 2023 dan pembayaran liabilitas sewa atas sewa gedung Pelindo Tower.
3. Arus kas bersih untuk aktivitas investasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp32,19 miliar, turun 74,78% dari RKAP tahun 2024 sebesar Rp127,62 miliar.

The Statement of Cash Flows for the fiscal year 2024 showed cash and cash equivalents amounting to Rp355.92 billion, or 2.18% below the revised 2024 RKAP target of Rp363.85 billion. A summary explanation of the 2024 cash flow performance is as follows:

1. Net cash flows from operating activities in 2024 were realized at Rp67.52 billion, an increase of 185.63% compared to the 2024 RKAP of Rp23.64 billion. This was driven by a decline in cash receipts from customers in line with lower revenues, and the installment payments of payables to Regional 2.
2. Net cash flows from financing activities in 2024 were realized at Rp86.19 billion, up 222.72% from the 2024 RKAP of Rp26.71 billion. This increase was primarily due to cash outflows for payments of cash dividends for shareholders for the 2023 fiscal year and payments of lease liability for office space at Pelindo Tower.
3. Net cash flows from investing activities in 2024 amounted to Rp32.19 billion, a decrease of 74.78% compared to the 2024 RKAP of Rp127.62 billion.

TARGET DAN REALISASI DIVIDEN

TARGET AND REALIZATION OF DIVIDEND

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi (Dalam jutaan rupiah)
Table of Comparison of Target and Realization (In million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	RKAP 2024 2024 RKAP	Pencapaian (%) Achievement (%)
Dividen Dividend	79.030	20.000	395,15%

Realisasi pajak dan dividen tahun 2024 adalah sebesar Rp79,03 miliar dengan pencapaian 395,15% dari target RKAP 2024 yaitu sebesar Rp20,00 miliar. Pencapaian ini sejalan dengan kenaikan laba rugi tahun 2024.

The realization of tax and dividend payments in 2024 amounted to Rp79.03 billion, achieving 395.15% of the 2024 RKAP target of Rp20.00 billion. This achievement was in line with the increase in (Loss) Income for the year 2024.

TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal Perusahaan di tahun 2024 terdiri dari liabitas dan ekuitas. Adapun perbandingan antara target dan realisasi struktur modal dan posisi keuangan di tahun 2024, sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE TARGET AND REALIZATION

The Company's capital structure in 2024 consisted of liabilities and equity. The comparison between the targeted and realized capital structure and financial position for the year 2024 is presented as follows:

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	RKAP 2024 2024 RKAP	Pencapaian (%) Achievement (%)
Total Liabilitas Total Liabilities	489.669	383.283	127,76%
Total Ekuitas Total Equity	444.210	700.521	63,41%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	933.879	1.083.804	86,17%

Realisasi struktur modal tahun 2024 adalah sebesar Rp933,88 miliar dengan pencapaian 86,17% dari target RKAP 2024 yaitu sebesar Rp1,08 triliun. Tidak tercapainya target struktur modal terutama karena adanya penurunan pada nilai ekuitas yang dipangruhi oleh rendahnya saldo laba periode berjalan

The realized capital structure in 2024 amounted to Rp933.88 billion, achieving 86.17% of the 2024 RKAP target of Rp1.08 trillion. The shortfall in meeting the capital structure target was primarily due to a decline in equity, which was affected by the lower retained earnings for the year.

TARGET DAN REALISASI OPERASIONAL

Kinerja operasional Perusahaan tercermin dari arus atau trafik barang berdasarkan kemasan yang terdiri dari *general cargo, bag cargo*, curah cair, curah kering, dan lain-lain. Adapun target RKAP 2024 dan realisasinya, dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini:

TARGET AND REALIZATION OF OPERATIONAL PERFORMANCE

The Company's operational performance is reflected in the cargo traffic flow by packaging type, which includes general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, and others. The 2024 RKAP target and its realization are illustrated in the following chart:

Grafik Tarif Barang 2023-2024
Cargo Tariffs Graph 2023-2024



Secara keseluruhan trafik berdasarkan kemasan Tahun 2024 terealisasi sebesar 45.621.798 Ton dan 1.424.987 m^3 atau terserap 91,50% dan 108,34% dari RKAP tonase Tahun 2024 sebesar 49.861.900 Ton dan 1.315.299. hal ini antara lain disebabkan oleh:

Arus Barang Umum (*General Cargo*)

Realisasi tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* tercapai sebesar 10.131.190 Ton dan 1.424.987 m^3 atau terserap 101,05% untuk tonase dan 108,34% untuk m^3 dari RKAP Tahun 2024 sebesar 10.025.615 Ton dan 1.315.299 m^3. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

4. PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 untuk arus barang *General Cargo* sebesar 8.573.273 ton atau terserap 102,71% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 8.347.417 ton.
5. PTP cabang Banten realisasi tahun 2024 untuk arus barang *general cargo* sebesar 837.912 ton atau terserap 136,35% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 614.542 ton.
6. PTP cabang Panjang realisasi tahun 2024 untuk arus barang *general cargo* sebesar 220.016 ton atau terserap 147,30% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 149.365 ton.

Arus Barang Dalam Karung (*Bag Cargo*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *bag cargo* tercapai sebesar 3.048.694 Ton atau terserap 90,05% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 3.385.563 Ton. Hal ini disebabkan karena:

1. PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 untuk barang *bag cargo* sebesar 126.254 ton atau terserap 15,10% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 836.123 ton
2. PTP cabang Banten realisasi tahun 2024 untuk arus barang *bag cargo* sebesar 44.559 ton atau terserap 45,99% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 96.881 ton
3. PTP cabang Palembang realisasi tahun 2024 untuk arus barang *bag cargo* sebesar 220.694 ton atau terserap 67,56% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 326.680 ton.

Arus Barang Curah Cair (*Liquid Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *liquid bulk* tercapai sebesar 10.274.554 Ton atau terserap 92,67% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 11.087.583 Ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 untuk arus barang curah cair sebesar 1.330.245 ton atau terserap 79,21% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 1.679.303 ton.
2. PTP cabang Bengkulu realisasi tahun 2024 untuk arus barang curah cair sebesar 449.935 ton atau terserap 61,30% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 734.006 ton
3. PTP cabang Teluk Bayur realisasi tahun 2024 untuk arus barang curah cair sebesar 2.783.465 ton atau terserap 88,91% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 3.130.525 ton.

Arus Barang Curah Kering (*Dry Bulk*)

Realisasi Tahun 2024 untuk arus barang *dry bulk* tercapai sebesar 22.167.360 Ton atau terserap 87,40% dari RKAP Tahun 2024 sebesar 25.363.138 Ton. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

Overall, the 2024 cargo traffic by packaging type was realized at 45,621,798 tons and 1,424,987 m^3, achieving 91.50% and 108.34%, respectively, of the 2024 RKAP targets of 49,861,900 tons and 1,315,299 m^3. This outcome was influenced by the following:

General Cargo Flow

The realized general cargo flow in 2024 reached 10,131,190 tons and 1,424,987 m^3, or 101.05% and 108.34%, respectively, of the 2024 RKAP targets of 10,025,615 tons and 1,315,299 m^3. This was driven by:

4. PTP Tanjung Priok Branch's 2024 realization for general cargo flow of 8,573,273 tons or 102.71% of the 2024 RKAP target of 8,347,417 tons.
5. PTP Banten Branch's 2024 realization for general cargo flow of 837,912 tons, or 136.35% of the 2024 RKAP target of 614,542 tons.
6. PTP Panjang Branch's 2024 realization for general cargo flow of 220,016 tons, or 147.30% of the 2024 RKAP target of 149,365 tons.

Bag Cargo Flow

The realized bag cargo flow in 2024 reached 3,048,694 tons, achieving 90.05% of the 2024 RKAP target of 3,385,563 tons. This was due to the following:

1. PTP Tanjung Priok Branch's 2024 realization for bag cargo of 126,254 tons, or 15.10% of the 2024 RKAP target of 836,123 tons.
2. PTP Banten Branch's 2024 realization for bag cargo of 44,559 tons, or 45.99% of the 2024 RKAP target of 96,881 tons.
3. PTP Palembang Branch's 2024 realization for bag cargo of 220,694 tons, or 67.56% of the 2024 RKAP target of 326,680 tons.

Liquid Bulk Cargo Flow

The realized liquid bulk cargo flow in 2024 amounted to 10,274,554 tons, achieving 92.67% of the 2024 RKAP target of 11,087,583 tons. This was driven by the following:

1. PTP Tanjung Priok Branch's 2024 realization for liquid bulk of 1,330,245 tons, or 79.21% of the 2024 RKAP target of 1,679,303 tons.
2. PTP Bengkulu Branch's 2024 realization for liquid bulk of 449,935 tons, or 61.30% of the 2024 RKAP target of 734,006 tons.
3. PTP Teluk Bayur Branch's 2024 realization for liquid bulk of 2,783,465 tons, or 88.91% of the 2024 RKAP target of 3,130,525 tons.

Dry Bulk Cargo Flow

The realized dry bulk cargo flow in 2024 reached 22,167,360 tons, or 87.40% of the 2024 RKAP target of 25,363,138 tons. This was due, among other factors, to the following:

1. PTP cabang Banten realisasi tahun 2024 untuk arus barang curah kering sebesar 2.794.946 ton atau terserap 61,39% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 4.552.904 ton.
2. PTP cabang Cirebon realisasi tahun 2024 untuk arus barang curah kering sebesar 3.178.768 ton atau terserap 83,12% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 3.824.371 ton.
3. PTP cabang Jambi terealisasi tahun 2024 untuk arus barang curah kering sebesar 124.438 ton atau terserap 10,85% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 1.146.897 ton.

Arus Barang Peti Kemas (*Container*)

Untuk petikemas (Container) Tahun 2024 terealisasi sebesar 233.581 Teus atau terserap 123,98% diatas RKAP tahun 2024 sebesar 188.401 Teus . Hal ini dikarenakan PTP cabang Tanjung Priok realisasi tahun 2024 untuk arus barang petikemas sebesar 134.893 Teus atau terserap 135,03% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar 99.896 Teus.

TARGET DAN REALISASI INVESTASI

Realisasi capaian investasi sampai tahun 2024 adalah sebesar Rp32,96 miliar atau sebesar 73,26% dibandingkan dengan RKAP tahun 2024 sebesar Rp45 miliar.

TARGET DAN REALISASI SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 adalah 1.055 orang, lebih rendah 36 orang dari tahun 2023 dan lebih rendah 39 orang dari RKAP tahun 2024 yang disebabkan adanya mutasi, meninggal dunia dan pensiun di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2024.

TARGET DAN REALISASI RENCANA KERJA MANAJEMEN

Rencana Kerja Manajemen (RKM) *Corporate* terdiri atas RKM Strategis *Corporate* Tahun 2024 yang berasal dari RKM Strategis masing-masing Direktorat di PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pada realisasi Tahun 2024 progres pencapaian RKM *Corporate* adalah sebesar 99,00%. Dengan rincian sebagai berikut:

4. RKM Pengoperasian *Ship to Ship* telah tercapai *progress overall* sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
   a. Penandatanganan perjanjian *Transhipment* Batubara dengan PT Borneo Indobara
   b. Penandatanganan perjanjian kerjasama PTP dengan PT EPS Shipping
   c. Pelayanan *stevedoring* untuk kegiatan STS PT Multi Guna Maritim
   d. Pelayanan *stevedoring* untuk kegiatan STS PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya
   e. Penyampaian Evaluasi Project tahun 2024
5. RKM Implementasi HSSE di seluruh cabang PT PTP telah tercapai *progress* secara keseluruhan sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
   a. Pelaksanaan *Emergency* Drill di Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang, dan Tanjung Pandan
   b. Pelaksanaan *training* IMO level 1
   c. Pembaharuan SoCPF
   d. Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum
   e. Penandatanganan BA komitmen penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan regional
   f. Implementasi pengelolaan *Oil Spill Response* (OSR) cabang Pontianak

1. PTP Banten Branch's 2024 realization for dry bulk of 2,794,946 tons, or 61.39% compared to the 2024 RKAP target of 4,552,904 tons.
2. PTP Cirebon Branch's 2024 realization for dry bulk of 3,178,768 tons, or 83.12% compared to the 2024 RKAP target of 3,824,371 tons.
3. PTP Jambi Branch's 2024 realization for dry bulk of 124,438 tons, or 10.85% compared to the 2024 RKAP target of 1,146,897 tons.

Container Cargo Flow

In 2024, the container cargo flow was realized at 233,581 TEUs, achieving 123.98% of the 2024 RKAP target of 188,401 TEUs. This was primarily driven by PTP Tanjung Priok Branch, which recorded a realization of 134,893 TEUs, or 135.03% of the 2024 RKAP target of 99,896 TEUs.

TARGET AND REALIZATION OF INVESTMENT

As of 2024, the realized investment reached Rp32.96 billion, or 73.26% of the 2024 RKAP target of Rp45 billion.

TARGET AND REALIZATION OF HUMAN CAPITAL

The realized headcount of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2024 was 1,055 employees, which is 36 fewer than in 2023 and 39 fewer than the 2024 RKAP target. The decrease was due to employee transfers, deaths, and retirements within PT Pelabuhan Tanjung Priok during 2024.

TARGET AND REALIZATION OF MANAGEMENT WORK PLAN

The Company's Corporate Management Work Plan (RKM) for 2024 consisted of strategic initiatives derived from the work plans of each Directorate within PT Pelabuhan Tanjung Priok. As of 2024, the overall progress of the Corporate RKM reached 99.00%, with the following highlights:

4. Ship to Ship Operation RKM has reached 100.00% realization:
   a. Signing of transshipment agreement with PT Borneo Indobara
   b. Cooperation agreement between PTP and PT EPS Shipping
   c. Stevedoring services for STS operations with PT Multi Guna Maritim
   d. Stevedoring services for STS operations with PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya
   e. Submission of 2024 project evaluation
5. HSSE Implementation at All PTP Branches (100.00% Realized)
   a. Emergency drills in Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang, and Tanjung Pandan
   b. IMO Level 1 training
   c. SoCPF renewal
   d. General OSH Expert Training
   e. Signing of commitment to OSH implementation with Regional Management
   f. Implementation of Oil Spill Response (OSR) at Pontianak Branch

g. Sosialisasi dan *Training* Modul HSSE *Dashboard* pada aplikasi HSSE *Mobile*.

6. RKM Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP telah tercapai progress 100,00%, dengan pencapaian
   a. *Go Live* PTOS M Pombo tanggal 1 Agustus 2024
   b. *Go Live* PTOS M Ambon tanggal 26 Agustus 2024
7. RKM Pelaksanaan investasi pengadaan fasilitas pendukung bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Kijing telah tercapai *progress* sebesar 95,40% dan progres *expected* sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
   a. BAST pengadaan 2 unit Grab Kapasitas 7 CBM di PTP
   b. BAST pengadaan perlatan pendukung B/M curah cair *Ship to Ship* terminal Kijing
   c. BAST pekerjaan pengadaan *shower caustic* soda untuk terminal Kijing
   d. BAST pekerjaan jasa konsultasi individual *expert* penataan pipeline dan desain *pipe rack* di dermaga *Jetty* terminal Kijing
   e. BAST pengadaan 2 unit *Spreader Bar* kapasitas 40 ton kebutuhan terminal Kijing PTP cabang Pontianak
   f. BAMK pekerjaan pembangunan *pipe rack* dermaga *Jetty* dan *Trestle* di terminal Kijing PTP.
8. RKM pengadaan dan optimalisasi alat bongkar muat kebutuhan cabang-cabang PTP telah tercapai progres sebesar 95,61% dengan progres expected sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
   a. Perjanjian pekerjaan overhaul RS 05 di PTP cabang Palembang
   b. SPT pengawas pekerjaan overhaul RS 05 di PTP cabang Palembang
   c. BAST pembongkaran SLC1 dan TC 3.1 dan perkuatan tiang support di PTP cabang Bengkulu
   d. BAST pekerjaan overhaul TS 05 di PTP cabang Palembang
9. RKM pengadaan perangkat TI di Kantor Pusat dan cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok telah tercapai *progress* keseluruhan sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
   a. *Testing & Commisioning* instalasi
   b. BAST tahap dua pekerjaan pengadaan perangkat TI sebagai pendukung penyediaan layanan *backup sistem* Informasi di area PTP
10. Pada peningkatan kompetensi atau *skill* pengelolaan Manajemen Risiko telah mencapai *progress overall* sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
    a. Penyusunan *gap analysis* kebutuhan pelatihan/ sertifikasi
    b. *Sharing session* Manajemen risiko tanggal 6 Juli 2024 bertempat di Hotel Ibis Sunter
    c. *Training Officer Management Risk* tanggal 17-18 Juli 2024 bertempat di Hotel Ibis Sunter.
11. RKM kajian dan implementasi struktur organisasi PTP dan anak perusahaan telah tercapai progress sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
    a. Perdir Struktur Organisasi, Nama Jabatan, dan uraian Jabatan pada kantor pusat PTP
    b. Surat ke SPMT terkait perubahan struktur organisasi PTP
    c. SK penempatan di struktur baru
12. RKM sentralisasi *Knowledge Management* kepelabuhanan tercapai progres sebesar 100,00%, dengan pencapaian:
    a. BA *knowledge map* bidang teknik, sekretaris perusahaan, SPI & Hukum, sistem informasi
    b. Pelaksanaan Ngopi Bidang Curah Kering
    c. Pelaksanaan Ngopi *Cultivating Risk Culture for Global Competitiveness*

g. Socialization and training of HSSE Dashboard Module on the HSSE Mobile App

6. Standardization of Operations at PTP Branches have reached 100.00% realization.
   a. PTOS M Pombo Go-Live on August 1, 2024
   b. PTOS M Ambon Go-Live on August 26, 2024
7. Investment in Loading and Unloading Support Facilities at Kijing Wharf has reached 95.40% realization out of 100.00% expectation:
   a. BAST (Handover) Procurement of 2 Grab Units (7 CBM capacity)
   b. BAST procurement of liquid bulk STS support equipment
   c. BAST procurement of caustic soda shower installation
   d. BAST for individual expert consultancy services for pipeline arrangement and pipe rack design at Jetty Wharf, Kijing Terminal
   e. BAST procurement of 2 spreader bars (40-ton capacity) for Pontianak Branch
   f. BAMK work for pipe rack and trestle construction at Kijing Terminal
8. Procurement & Optimization of Handling Equipment at Branches has reached 95.61% realization out of 100.00%, with the following achievement:
   a. Overhaul agreement for RS 05 at Palembang Branch
   b. Appointment of supervisor for RS 05 overhaul
   c. Handover of SLC1 and TC 3.1 dismantling, and support column reinforcement in Bengkulu Branch
   d. Handover of overhaul work for TS 05 at Palembang Branch
9. IT Equipment Procurement at Head Office and Branches have reached 100.00% realization, with the following achievement:
   a. Testing and commissioning
   b. BAST of Phase 2 IT procurement to support information system backup services
10. Risk Management Competency Development has reached 100.00% realization with the following acheivement:
    a. Gap analysis on training/certification needs
    b. Risk Management Sharing Session on July 6, 2024, at Hotel Ibis Sunter
    c. Risk Management Officer Training on July 17–18, 2024, at Hotel Ibis Sunter
11. Organizational Structure Study and Implementation has reached 100.00% realization, with the following achievement:
    a. Director's Decree on Organizational Structure, Position Titles, and Job Descriptions
    b. Correspondence to SPMT regarding structural changes
    c. Official placements in the new organizational structure
12. The Port Knowledge Management Centralization RKM achieved 100.00% progress, with the following accomplishments:
    a. BA Knowledge Map for Technical Division, Corporate Secretary, SPI & Legal, and Information Systems
    b. Implementation of Ngopi Session on Dry Bulk Division
    c. Implementation of Ngopi Session on Cultivating Risk Culture for Global Competitiveness

d. Pelaksanaan Ngopi & CPO *Inspired Journey Reflections and Succes Stories High Potential Employee*

d. Implementation of Ngopi & CPO Inspired Journey: Reflections and Success Stories of High-Potential Employees

PROYEKSI TAHUN 2025
2025 PROJECTION

Proyeksi untuk tahun 2025 tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 yang disusun oleh Direksi untuk memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/27/12/1/ANGG/DIRU/PT P-23 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pengendalian Anggaran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

RKAP disusun dengan mempertimbangkan berbagai asumsi, yang merujuk pada asumsi makro yang disampaikan dalam Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2024 Nomor: S-468/MBU/09/2024.

The projection for 2025 is outlined in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), prepared by the Board of Directors to ensure compliance with the Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/27/12/1/ANGG/DIRU/PT P-23 dated December 27, 2023, concerning Guidelines for the Preparation of the Company Work Plan and Budget, Budget Control, and Performance Reporting within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

RKAP is developed by considering various assumptions which refer to the macro assumption outlined in the Shareholders' Aspiration for 2025 the Company Work Plan and Budget on September 30, 2024 No: S-468/MBU/09/2024.

Indikator Indicators	**Asumsi Makro 2025** Macro Assumptions for 2025
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,20%
Inflasi Inflation	2,50%
Kurs Dolar Dollar Exchange Rate	Rp16.100
Tingkat SBN SBN Level	7,10%

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan pada tahun 2024 meskipun menghadapi tantangan global. Pada triwulan III-2024, PDB mencapai Rp5.638,9 triliun, dengan pertumbuhan 1,50% secara kuartalan dan 4,95% secara tahunan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional antara 4,7-5,5% sepanjang tahun, dengan kemungkinan kenaikan lebih lanjut pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, terutama dari kelas menengah ke atas, serta investasi yang terus berlanjut melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sedangkan asumsi khusus penyusunan RKAP 2025, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan *switching* nota pada 11 Cabang PTP ke SPMT
2. Penyesuaian perhitungan beban konsesi (2,5% x pendapatan kotor)
3. Kegiatan bongkar muat atas *cargo* PT BAI secara *full year* sebesar 2,6 juta ton di PTP cabang Pontianak (Kijing)
4. *Revenue sharing* PTP cabang Kijing mulai dari bulan Agustus 2024 menjadi:

Indonesia's economy demonstrated resilience in 2024 despite global headwinds. In the third quarter of 2024, the national GDP reached Rp5,638.9 trillion, reflecting 1.50% quarterly growth and 4.95% yearly growth. Bank Indonesia projected national economic growth in the range of 4.7% to 5.5% for the year, with the potential for further improvement in 2025. This growth is mainly driven by household consumption, particularly from the upper-middle income segment, and continued investment through National Strategic Projects (PSN).

The following are specific assumptions used in preparing the 2025 RKAP:

1. Invoice switching has been completed for 11 PTP branches to SPMT
2. Adjustment to concession fee calculation (2.5% × gross revenue)
3. Full-year handling of PT BAI cargo totaling 2.6 million tons at PTP Pontianak Branch (Kijing)
4. Revenue sharing scheme for PTP Kijing Branch, starting August 2024:

a. Curah kering dan gencar: 81%
b. Curah cair: 48%
5. Perusahaan tidak mencatatkan pendapatan atas kegiatan petikemas di Dermaga 005 atas dampak pemurnian bisnis di PTP cabang tanjung Priok
6. Perubahan pencatatan beban PBM *clustering* yang dibukukan ke SPMT
7. Kenaikan tarif di cabang Priok

Berdasarkan asumsi umum dan khusus di atas, maka Perusahaan menetapkan sejumlah proyeksi yang hendak dicapai, sebagai berikut:

a. Dry bulk and gencar cargo: 81%
b. Liquid bulk cargo: 48%
5. The Company will no longer record revenue from container operations at Wharf 005 due to the business streamlining at PTP Tanjung Priok Branch
6. Clustering of PBM expenses will now be recorded under SPMT
7. Tariff increase applied at Tanjung Priok Branch

Based on the above general and specific assumptions, the Company has established the following key projections to be achieved:

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024
Table of Comparison between 2025 Projections and 2024 Realization

(Dalam Jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(In Million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	**Proyeksi 2025** 2025 Projection	**Realisasi 2024** 2024 Realization	**Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)** 2025 Projection to 2024 Realization (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.560.887	1.470.387	106,15%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	234.423	(28.193)	(831,49%)
BOPO	79,47%	103,20%	23,73%
EBITDA	361.570	(4.187)	(361.570)
EBITDA MARGIN	23,16%	(0,28%)	23,44%
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Lancar Current Assets	791.857	617.308	128,28%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	279.172	316.571	88,19%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	416.922	489.496	85,17%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	6.833	173	3949,71%
Ekuitas Equity	647.273	444.210	145,71%
Kebijakan Dividen Dividend Policy	-	79.030	79.030

PENDAPATAN

Perusahaan menargetkan mampu membukukan peningkatan kinerja keuangan di tahun 2025, di mana total Pendapatan Usaha diproyeksikan dapat dibukukan sebesar Rp1,56 triliun, atau mencapai 106,15% terhadap realisasi 2024 sebesar Rp1,47 triliun.

LABA (RUGI)

Adapun di tahun 2025, Perusahaan memproyeksikan Laba sebesar Rp234,42 miliar, terhadap realisasi 2024 yang tercatat rugi sebesar Rp28,19 miliar.

POSISI KEUANGAN DAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perusahaan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Proyeksi laporan posisi keuangan dan struktur modal untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

OPERATING REVENUE

The Company aims to achieve improved financial performance in 2025, with projected Operating Revenue of Rp1.56 trillion, representing 106.15% of the actual revenue recorded in 2024 of Rp1.47 trillion.

PROFIT (LOSS)

In 2025, the Company projects generating Income of Rp234.42 billion, compared to a Loss of Rp28.19 billion recorded in 2024.

FINANCIAL POSITION AND CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure consists of three key components of Assets, Liabilities, and Equity. The projected Statement of Financial Position and capital structure for 2025 are as follows:

ASET

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Perusahaan di tahun 2025, diproyeksikan sebesar Rp791,86 miliar atau mencapai 128,28% terhadap realisasi 2024 sebesar Rp617,31 miliar. Meningkatnya saldo kas setara kas serta piutang sejalan dengan proyeksi peningkatan pendapatan.

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar Perusahaan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp279,17 miliar atau mencapai 88,19% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp316,57 miliar.

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Sementara jumlah Liabilitas Jangka Pendek, diproyeksikan sebesar Rp416,92 miliar di tahun 2025, atau mencapai 85,17% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp489,50 miliar. Hal ini antara lain disebabkan antara lain oleh menurunnya saldo utang usaha pihak berelasi seiring dengan komitmen perusahaan dalam rangka pelunasan utang regional 2.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang di tahun 2025, diproyeksikan sebesar Rp6,83 miliar atau mencapai 3949,71% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp173 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya pencatatan liabilitas sewa jangka panjang atas sewa gedung Pelindo Tower atas kontrak baru selama 3 tahun kedepan.

EKUITAS

Jumlah Ekuitas Perusahaan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp647,27 miliar atau mencapai 145,71% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp444,21 miliar. Hal ini disebabkan adanya kenaikan laba bersih.

Kebijakan Dividen

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak memproyeksikan kebijakan dividen.

Hal Lain yang Penting Bagi Perusahaan

ASSETS

Current Assets

Total Current Assets for 2025 are projected to reach Rp791.86 billion, or 128.28% of the 2024 actual of Rp617.31 billion. The increase is primarily attributable to higher balances of cash and cash equivalents and trade receivables, in line with the expected rise in revenue.

Non-Current Assets

Non-Current Assets are projected to amount to Rp279.17 billion in 2025, or 88.19% of the 2024 realization of Rp316.57 billion.

LIABILITIES

Current Liabilities

Current Liabilities are projected at Rp416.92 billion in 2025, representing 85.17% of the 2024 level of Rp489.50 billion. This decline is primarily driven by the reduction in trade payables to related parties, aligned with the Company's commitment to settling Regional 2 obligations.

Non-Current Liabilities

Non-Current Liabilities are projected to rise substantially to Rp6.83 billion in 2025, which equals 3,949.71% of the 2024 realization of Rp173 million. This significant increase results from the recognition of long-term lease liabilities related to a new three-year lease agreement for the Pelindo Tower office premises.

EQUITY

Total Equity in 2025 is projected to reach Rp647.27 billion, or 145.71% of the 2024 realization of Rp444.21 billion, driven by projected net income growth.

Dividend Policy

In 2024, the Company does not project a dividend policy.

Other Matters Relevant To The Company

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024
Table of Comparison between 2025 Projections and 2024 Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2025 2025 Projection	Realisasi 2024 2024 Realization	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) 2025 Projection to 2024 Realization (%)
Trafik/Arus Barang Traffic/ Goods Flow	Ton	51.736.771	45.621.798	113,40%
	M^3	1.763.236	1.424.987	123,74%
	Unit (Kendaraan) Unit (Vehicle)	138.347	101.127	136,81%
	Ekor (Hewan) Head (Animal)	515.031	535.937	96,10%

Perusahaan menargetkan peningkatan kinerja operasional di tahun 2025, di mana total Trafik Barang diproyeksikan sebesar

The Company targets improved operational performance in 2025, with total Cargo Throughput projected to reach 51,736,771 tons

51.736.771 ton atau 1.763.236 M^3, atau mencapai 113,40% dari jumlah ton dan 123,74% dari jumlah M^3 terhadap realisasi 2024 sebesar 45.621.798 ton dan 1.424.987 M^3.

Arus barang kendaraan diproyeksikan sebesar 138.347 Unit atau mencapai 136,81% dari realisasi tahun 2024. Hal ini disebabkan di PTP Cabang Tanjung Priok diproyeksikan sebesar 110.136 unit, hal ini disebabkan adanya kenaiakn ship call salah satunya milik PT Hemprisa Karyasaksama.

Arus barang hewan diproyeksikan sebesar 515.031 Ekor atau mencapai 96,10% dari realisasi tahun 2024. Hal ini disebabkan untuk arus barang hewan di PTP Cabang Tanjung Priok diproyeksikan sebesar 281.965 ekor, hal ini disebabkan bongkar hewan sapi import diprediksi akan berkurang di tahun 2025 karena pada 3 bulan terakhir di tahun 2024 sudah banyak kegiatan import sapi yang diprediksi awal tahun 2025 akan berkurang karena persediaan sapi yang sudah terpenuhi.

or 1,763,236 cubic meters (M^3). This represents 113.40% of the 2024 realized volume in tons (45,621,798 tons) and 123.74% of the realized volume in M^3 (1,424,987 M^3).

Vehicle cargo flow is projected to reach 138,347 units, equivalent to 136.81% of the 2024 realization. This increase is primarily attributed to an expected throughput of 110,136 units at PTP Tanjung Priok Branch, driven in part by a projected rise in ship calls, including those operated by PT Hemprisa Karyasaksama.

Livestock cargo flow is projected at 515,031 heads, or 96.10% of the 2024 realization. At PTP Tanjung Priok Branch alone, livestock throughput is projected to reach 281,965 heads, reflecting a decline in imported cattle unloading activities. This decrease is anticipated due to high import volumes in the final quarter of 2024, which are expected to reduce cattle imports in early 2025 as domestic supply levels stabilize.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROJECTION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Nama Program Program Name	**RKAP 2025** (Rp) 2025 RKAP (Rp)
Kepemimpinan Leadership	382.000.000
Sertifikasi Certification	955.000.000
Knowledge Management	152.800.000
Internalisasi Budaya Cultural Internalization	229.200.000
High Potential Talent Employee	2.101.000.000
TOTAL	**3.820.000.000**

Anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup biaya akademik dan non-akademik. Biaya akademik mencakup pengeluaran untuk pengembangan pekerja, seperti sertifikasi, pelatihan, *workshop*, *seminar*, dan pendidikan formal. Sementara itu, biaya non-akademik meliputi biaya pendukung pelaksanaan, seperti akomodasi peserta, transportasi, serta kebutuhan ATK dan *souvenir kit*.

Pada tahun 2024, realisasi biaya pengembangan SDM mencapai 56,23% dari total anggaran yang direncanakan. Pencapaian ini menjadi dasar untuk penyusunan anggaran tahun 2025, yang diselaraskan dengan HR *Roadmap*, Rencana Kerja Manajemen (RKM), Inisiatif Strategis, serta pemenuhan *value creation* yang telah disepakati. Total anggaran pengembangan SDM untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3,82 miliar, dengan alokasi untuk transportasi dan akomodasi sebesar Rp1,93 miliar. Rencana program magang juga diperkirakan sebesar Rp1,02 miliar. Fokus pengembangan SDM pada tahun 2025 akan diarahkan pada program kepemimpinan, pelatihan dan sertifikasi, *Knowledge Management*, program internalisasi budaya, dan program *high potential talent employee* (Hi-Po).

The Human Capital Development (HCD) budget includes both academic and non-academic expenditures. Academic costs consist of employee development related expenses such as certification programs, training sessions, workshops, seminars, and formal education. Meanwhile, non-academic costs cover supporting implementation expenses, including participant accommodations, transportation, as well as office supplies and souvenir kits.

In 2024, the realization of the HCD budget reached 56.23% of the total planned allocation. This achievement serves as the basis for the 2025 budget planning, which is aligned with the Human Capital Roadmap, Management Work Plan (RKM), Strategic Initiatives, and the agreed value creation targets. The total Human Capital Development budget for 2025 is estimated at Rp3.82 billion, with an allocation of Rp1.93 billion designated for transportation and accommodations. The internship program is also projected to receive a budget of Rp1.02 billion. The key focus areas for HCD in 2025 will include leadership programs, training and certification, knowledge management, cultural internalization program, and high potential talent employee (Hi-Po) program.

PROYEKSI TEKNIK DAN TEKNOLOGI

Teknologi Informasi berfungsi sebagai pendorong utama bagi transformasi digital dalam mendukung proses bisnis, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional, di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Penggunaan anggaran untuk divisi Teknologi Informasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu Investasi/ *Capital Expenditure* (Capex) dan Pemeliharaan/*Operational Expenditure* (Opex). Usulan anggaran Teknologi Informasi untuk tahun 2025 mencakup hal-hal berikut:

TECHNOLOGY AND ENGINEERING PROJECTIONS

Information Technology serves as a key enabler of digital transformation, supporting both operational and non-operational business processes across PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Information Technology budget is categorized into two components, which are Capital Expenditure (Capex) for investments and Operational Expenditure (Opex) for maintenance and ongoing operations. The proposed Information Technology budget for 2025 includes the following components:

Jenis Anggaran Budget Type	**Penjelasan** Explanation	**Nilai (Rp)** Value (Rp)
Capital Expenditure	Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur TI di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok	2.500.000.000
Operational Expenditure	Beban perlengkapan operasional (Pusat & Cabang-cabang) Operational Equipment Expenses (Head Office & Branches)	4.324.205.875
	Beban pemeliharaan peralatan (Pusat & Cabang-cabang) Equipment Maintenance Expenses (Head Office & Branches)	20.192.379.025
	Beban sumber daya pihak ketiga peralatan Equipment Third Party Resource Expenses	12.343.965.550
	Beban jaringan dan koneksi data (Pusat & Cabang-cabang) Network and Data Connection Expenses (Head Office & Branches)	5.718.359.306

Anggaran *Capital Expenditure* (Capex) dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur TI, termasuk fasilitas pendukung dan perangkat utama di *colocation data center* yang terletak di gedung cabang Tanjung Priok. Langkah ini diambil untuk memastikan dan meningkatkan ketersediaan layanan TI di seluruh area operasional perusahaan, serta pemutakhiran perangkat pendukung keamanan sistem informasi sebagai langkah mitigasi atas maraknya serangan *cyber* yang dapat berdampak pada kebocoran data-data penting perusahaan.

Sementara itu, anggaran *Operational Expenditure* (Opex) lebih difokuskan pada pengelolaan operasional perusahaan dalam bidang teknologi informasi, termasuk sistem aplikasi, infrastruktur dan jaringan yang terdiri atas penyediaan layanan pengelolaan *support* TI (*Service desk*), penyediaan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan TI baik yang bersifat perangkat keras maupun perangkat lunak serta penyediaan layanan konektifitas jaringan dan komunikasi data untuk seluruh area perusahaan.

The Capital Expenditure (Capex) budget is allocated for the procurement of IT infrastructure, including supporting facilities and core equipment at the colocation data center located within the Tanjung Priok branch office. This initiative aims to ensure and enhance the availability and reliability of IT services across all operational areas of the Company. It also includes the upgrading of cybersecurity support systems as a proactive mitigation measure in response to the increasing frequency of cyberattacks that pose a risk of compromising the Company's critical data.

Meanwhile, the Operational Expenditure (Opex) budget is primarily focused on the day to day management of the Company's IT operations. This includes application systems, infrastructure, and network services, encompassing IT support services (service desk), procurement of IT equipment, maintenance and repair of both hardware and software, as well as the provision of network connectivity and data communication services throughout the Company's operational areas.

PROYEKSI RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN TJSL

Dalam rangka memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PT Pelabuhan Tanjung Priok memaksimalkan nilai tambahnya dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian sosial dan lingkungan di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Rencana implementasi program Tanggung Jawab Sosial PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2025 telah tertuang dalam Rencana Kerja Manajemen tahun (RKM) 2025, diantaranya:

8. Melakukan pengukuran dampak program terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Invesment* (SRoI).
9. Meningkatkan Kolaborasi dengan BUMN lain, Regional dan Pelindo Grup.
10. Melibatkan peran serta Karyawan secara aktif dalam program TJSL.

CSR PROGRAM AND BUDGET PROJECTION

In compliance with Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Companies, PT Pelabuhan Tanjung Priok remains committed to creating added value by actively engaging in social and environmental initiatives within the Company's operational areas.

The 2025 implementation plan for the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program has been incorporated into the 2025 Management Work Plan (RKM), and includes the following initiatives:

8. Measuring the impact of CSR programs using the Social Return on Investment (SROI) methodology.
9. Strengthening collaboration with other SOEs, regional entities, and members of the Pelindo Group.
10. Actively involving employees in CSR program implementation.

Usulan program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) disusun sesuai dengan *roadmap* Tanggung Jawab Sosial PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai komitmen perusahaan dalam menudukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori diantaranya:

1. PTP Peduli Lingkungan
2. PTP Peduli Sosial
3. PTP Peduli Peningkatan Ekonomi

TARGET KINERJA

Usulan program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) tahun 2025 akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja *Managemen* (RKM) tahun 2025 dan target KPI (*Key Performance Indicator*) Perusahaan tahun 2025 dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Invesment* (SRoI).
2. Meningkatkan Kolaborasi dengan BUMN lain, Regional dan Pelindo Grup.
3. Melibatkan peran serta Karyawan secara aktif dalam program TJSL.

The proposed CSR programs are designed in alignment with PT Pelabuhan Tanjung Priok's CSR Roadmap and reflect the Company's commitment to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals /SDGs. The programs are categorized into the following pillars:

1. PTP Cares for the Environment
2. PTP Cares for the Community
3. PTP Cares for Economic Empowerment

PERFORMANCE TARGETS

The 2025 Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) will be executed in accordance with the 2025 Management Work Plan (RKM) and the Company's Key Performance Indicators (KPIs), with a focus on 3 (three) primary indicators:

1. Measuring the impact of CSR programs using the Social Return on Investment (SROI) approach.
2. Enhancing collaboration with other SOEs, regional partners, and the Pelindo Group.
3. Encouraging active employee participation in the implementation of CSR programs.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE ACCOUNTING REPORTING DATE

PENGALIHAN SAHAM ENTITAS ANAK

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo") No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 tanggal 30 April 2025, Perusahaan setuju untuk menjual seluruh saham milik P3TPK, yang telah disetorkan dan ditempatkan penuh sejumlah 500 lembar saham kepada Rukindo berikut seluruh hak-hak serta seluruh kepentingan atas atau terkait saham yang melekat saat ini atau dikemudian hari.

Penjualan dan pengalihan saham dilakukan dengan total Rp684.441.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.368.882 (nilai penuh) per saham.

Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Akta Jual Beli Saham dengan Notaris masih dalam proses pembuatan.

DIVESTMENT OF SHARES IN A SUBSIDIARY

Pursuant to the Share Purchase Agreement between the Company and PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo") No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 dated April 30, 2025, the Company agreed to sell its entire shareholding in P3TPK amounting to 500 fully paid and issued shares to Rukindo, along with all rights and interests attached to or associated with those shares, either now or in the future.

The total transaction value for the sale and transfer of shares amounts to Rp684,441,000 (full amount), consisting of 500 shares, each with a nominal value of Rp1,368,882 (full amount) per share.

As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Notarial Deed of Share Sale and Purchase is still in the process of being finalized.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Pada tahun 2025, prospek ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan moderat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 2,8%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Ketidakpastian yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik, inflasi global, dan kebijakan proteksionisme tetap menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, sejumlah negara berkembang, terutama India, diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 6,7%. Kondisi ini akan menciptakan peluang baru dalam perdagangan internasional yang juga akan berdampak pada sektor logistik.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 4,7% pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh tantangan global dan dampak inflasi, namun pemerintah Indonesia telah merencanakan berbagai kebijakan stimulus untuk mendorong sektor konsumsi dan investasi. Kebijakan tersebut termasuk insentif sektor pariwisata, subsidi untuk kebutuhan dasar, serta penguatan sektor manufaktur. Ini akan membuka peluang bagi sektor logistik untuk mengoptimalkan distribusi barang di pasar domestik.

Industri logistik Indonesia juga diperkirakan akan tumbuh pesat pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 12,53%. Hal ini didorong oleh meningkatnya digitalisasi dalam sektor logistik, pengembangan infrastruktur, serta ekspansi e-commerce yang terus berkembang. Dalam konteks ini, kebutuhan akan solusi logistik yang efisien dan terintegrasi akan semakin tinggi. Namun, meskipun ada pertumbuhan yang signifikan, tantangan seperti tingginya biaya logistik dan ketimpangan infrastruktur antar wilayah Indonesia masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Dengan proyeksi pertumbuhan yang positif untuk industri logistik, PTP Terminal Nonpetikemas memiliki peluang besar untuk memperluas kapasitas operasional dan meningkatkan efisiensi layanan. Pengembangan terminal baru di beberapa lokasi strategis seperti Bengkulu, Banten, Kijing akan memperkuat jaringan distribusi barang, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam alur logistik. Proyek pengembangan terminal ini akan memperkuat posisi PTP Terminal Nonpetikemas dalam mendukung pertumbuhan sektor logistik Indonesia.

Sebagai upaya optimalisasi kinerja operasional serta peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*) dengan tetap mengedepankan efisiensi biaya (*cost efficiency*), PTP Terminal Nonpetikemas melakukan pengembangan layanan terminal yang lebih modern dan terintegrasi. Transformasi ini telah diterapkan pada beberapa cabang PTP antara lain di cabang Pangkal Balam yaitu melalui peningkatan kinerja operasional dengan melakukan perubahan mekanisme bongkar muat dari sebelumnya menggunakan truk, kini beralih ke sistem *drop tank* dengan pipa khusus untuk kargo curah cair.

Selain itu, PTP Terminal Nonpetikemas berencana untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital, seperti sistem otomatisasi dan data analitik, untuk mengoptimalkan operasional terminal. Penerapan teknologi ini akan mempercepat proses bongkar muat, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan

In 2025, the global economy is projected to experience moderate growth, with economic expansion forecasted at 2.8%, slightly below previous projections. Persistent uncertainty driven by geopolitical tensions, global inflation, and protectionist policies continues to pose significant challenges. Nevertheless, several emerging markets, particularly India, are expected to serve as primary drivers of global growth, with an estimated growth rate of 6.7%. This environment will create new opportunities in international trade, which is anticipated to have a positive impact on the logistics sector.

On the domestic front, Indonesia's economy is expected to grow at a rate of approximately 4.7% in 2025. This slower pace of growth compared to the previous year is influenced by global headwinds and inflationary pressures. However, the Indonesian government has outlined a series of fiscal stimulus policies aimed at boosting consumption and investment. These include incentives for the tourism sector, subsidies for essential goods, and strengthened support for the manufacturing sector. Such initiatives present opportunities for the logistics sector to optimize goods distribution across domestic markets.

Indonesia's logistics industry is also forecasted to grow significantly in 2025, with an expected growth rate of around 12.53%. This expansion is fueled by increased digitization within the sector, infrastructure development, and continued growth in e-commerce. In this context, the demand for efficient and integrated logistics solutions will become increasingly critical. Nonetheless, challenges such as high logistics costs and infrastructure disparities between regions in Indonesia remain key issues to be addressed.

Given the positive growth outlook for the logistics industry, PTP Terminal Nonpetikemas is well-positioned to expand its operational capacity and enhance service efficiency. The development of new terminals in strategic locations such as Bengkulu, Banten, Kijing will strengthen the Company's distribution network, improving both speed and efficiency in logistics flow. These terminal development projects will reinforce PTP Terminal Nonpetikemas' role in supporting the advancement of Indonesia's logistics sector.

To optimize operational performance and revenue enhancement while maintaining cost efficiency, PTP Terminal Nonpetikemas has developed modern and integrated terminal services. The transformation has been carried out in several PTP branches such as Pangkal Balam branch through the enhancement of operational performance by conducting loading and unloading mechanism change from conventional truck-based systems to drop tank systems utilizing specialized pipelines for liquid bulk cargo.

Additionally, PTP Terminal Nonpetikemas plans to enhance the use of digital technologies, such as automation systems and data analytics, to optimize terminal operations. The application of such technologies is expected to accelerate cargo handling processes, reduce operating costs, and improve accuracy in logistics

akurasi dalam pengelolaan logistik. Digitalisasi ini juga akan mempermudah integrasi dengan sistem lainnya, yang pada gilirannya akan memberikan layanan lebih cepat dan transparan bagi pelanggan.

management. This digital transformation will also facilitate system integration, resulting in faster and more transparent services for customers.

Pemanfaatan fasilitas tangki timbun (*storage tank*), yang memungkinkan pengelolaan kargo curah cair secara lebih efektif. Selain itu, keberadaan Kawasan Pendukung Terminal di Kijing menjadi elemen penting dalam ekosistem logistik yang terintegrasi, mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan daya saing layanan terminal.

The utilization of storage tank facilities enables more effective management of liquid bulk cargo. In addition, the presence of the Terminal Support Area in Kijing serves as a critical component in the integrated logistics ecosystem, supporting smooth operations and enhancing the competitiveness of terminal services.

Dalam rangka pengembangan bisnis Perusahaan, selain melaksanakan *operation & maintenance* di area BASO, PTP Terminal Nonpetikemas menjalin kerja sama berbasis ***business-to-business*** (B2B) dengan cabang-cabang setempat untuk mengelola terminal atau dermaga yang belum masuk dalam BASO. PTP Terminal Nonpetikemas dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, meningkatkan kapasitas layanan, serta memperluas jangkauan bisnis secara lebih fleksibel dan adaptif. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi mitra bisnis dan pelanggan dengan layanan yang lebih terintegrasi dan efisien.

As part of its business development strategy, in addition to carrying out operation and maintenance activities in the BASO area, PTP Terminal Nonpetikemas has established business-to-business (B2B) partnerships with local branches to manage terminals or piers that are not yet included in BASO. Through this initiative, PTP Terminal Nonpetikemas seeks to optimize the utilization of existing facilities, enhance service capacity, and expand its business reach in a more flexible and adaptive manner. This initiative not only supports the Company's growth but also delivers added value to business partners and customers through more integrated and efficient services.

PTP Terminal Nonpetikemas juga terus mengembangkan bisnisnya dengan memperluas cakupan layanan di luar area operasional utama, termasuk ekspansi *shorebase* ke wilayah strategis. Salah satu inisiatif terbaru adalah kerja sama dengan cabang di luar area kerja saat ini, seperti di Lhokseumawe.

PTP Terminal Nonpetikemas is also continuously expanding its business by extending service coverage beyond its primary operational areas, including shorebase expansion to strategic regions. One of the latest initiatives includes a partnership with branches outside the current operational zone, such as in Lhokseumawe.

Meskipun terdapat peluang, PTP Terminal Nonpetikemas juga harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan logistik dan distribusi hingga Perubahan kebijakan terkait lingkungan dan keselamatan kerja menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan standar kepatuhan guna menjaga keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, diversifikasi layanan dan fleksibilitas operasional menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika pasar.

Despite these opportunities, PTP Terminal Nonpetikemas must also navigate various challenges. Global economic uncertainty may affect demand for logistics and distribution services, while evolving environmental and occupational safety regulations require the Company to continuously enhance compliance standards to ensure long-term business sustainability. Hence, service diversification and operational flexibility are key in adapting to market dynamics.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, pengembangan layanan baru di sektor yang relevan dan memastikan tenaga kerja yang kompetitif dan siap menghadapi perubahan industri.

To address these challenges, strategies include improving service speed and efficiency, developing new services in relevant sectors, and ensuring a competitive and industry-ready workforce.

Dengan strategi yang tepat dan kesiapan dalam menghadapi tantangan, PTP Terminal Nonpetikemas memiliki prospek pertumbuhan yang positif di tahun 2025. Dengan terus berinovasi, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan, perusahaan dapat mempertahankan daya saing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

With the right strategy and preparedness to face upcoming challenges, PTP Terminal Nonpetikemas is well-positioned for positive growth in 2025. By continuing to innovate, expanding its business network, and strengthening its commitment to efficiency and sustainability, the Company can maintain its competitiveness and achieve sustainable growth in the future.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan melalui penerapan berbagai strategi pemasaran. Strategi ini dirancang untuk menarik dan memperluas peluang dalam meraih pelanggan potensial serta mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Beberapa program pemasaran yang direncanakan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok antara lain:

1. Peningkatan *Market Share*
   Program pemasaran dalam rangka peningkatan *market share* dilakukan oleh masing-masing *branch* di area kerja masing-masing dengan melakukan pendekatan kepada *cargo owner, logistic company*, dan *shipping line* dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perusahaan. Program ini dilakukan melalui aktivitas strategis yang dilakukan antara lain kegiatan pemasran aktif dan *sales visit* dan *sales call* kepada *cargo owner, logistic company*, dan/ atau *shipping line.*
2. *Customer Retention*
   Untuk mempertahankan kepuasan pelayanan bagi pengguna jasa eksiting, PT Pelabuhan Tanjung Priok melakukan beberapa program customer retention. Program ini direncalan dan diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan loyalitas pelanggan untuk tetap mempercayakan pelayanan jasa kepelabuhan kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun beberapa program *Customer Retention* yang direncanakan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya:
   a. *Customer Visit*
      Kegiatan kunjungan dilakukan untuk bertemu langsung dengan pengguna jasa yang berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan umpan balik yang berharga guna meningkatkan dan menyempurnakan layanan yang telah diberikan, serta untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru.
   b. *Coffee Morning*
      Acara ini mengundang perwakilan pengguna jasa untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terkait layanan yang diterima. Selain itu, acara ini juga menjadi forum untuk mempresentasikan program-program yang akan dijalankan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok guna meningkatkan kualitas layanan.
   c. Survei Pelanggan
      Survei ini dilakukan untuk memperoleh wawasan mengenai kualitas layanan yang disediakan, serta untuk mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.
   d. *Customer Hearing*
      Penghargaan ini diberikan kepada pengguna jasa yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam pendapatan dan throughput selama setahun terakhir di PT Pelabuhan Tanjung Priok.

MARKETING STRATEGY

The Company remains committed to optimizing revenue through the implementation of various marketing strategies. These strategies are designed to attract and expand opportunities to engage potential customers while retaining the loyalty of existing clients. PT Pelabuhan Tanjung Priok has outlined several planned marketing programs, including the following:

1. Market Share Expansion
   Marketing programs aimed at increasing market share are implemented by each branch within its respective operational area. These efforts involve direct engagement with cargo owners, logistics companies, and shipping lines, while adhering to the Company's internal regulations. The strategy includes proactive marketing activities such as active promotion, sales visits, and sales calls directed at cargo owners, logistics companies, and/or shipping lines.
2. Customer Retention
   In order maintain service satisfaction among existing customers, PT Pelabuhan Tanjung Priok carries out several customer retention initiatives. These programs are designed and expected to preserve and strengthen customer loyalty, ensuring continued trust in the Company's port services. Key customer retention programs planned by PT Pelabuhan Tanjung Priok include:

   a. Customer Visits
      These visits are conducted to engage directly with service users who significantly contribute to the Company's revenue. The main objectives are to obtain valuable feedback for improving and refining service quality, and to identify new business opportunities.

   b. Coffee Morning Events
      These events invite representatives of service users to provide feedback and constructive criticism regarding the services received. Additionally, they serve as a platform to present upcoming programs aimed at improving service excellence at PT Pelabuhan Tanjung Priok.

   c. Customer Satisfaction Surveys
      These surveys are conducted to gain insights into service quality, and to assess customer satisfaction and loyalty toward the Company.

   d. Customer Hearing
      The award is presented to service users who have made the most significant contributions to the Company's revenue and throughput over the past year.

PANGSA PASAR
MARKET SHARE

Untuk mencapai target perusahaan dan mengamankan pangsa pasar di wilayah PTP Terminal Nonpetikemas, beberapa program pemasaran akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1. Peningkatan *Market Share*
   Program pemasaran ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan akan dilaksanakan oleh cabang-cabang di wilayah kerjanya masing-masing. Pendekatan akan difokuskan kepada pemilik kargo, perusahaan logistik, dan perusahaan pelayaran dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemasaran proaktif, kunjungan penjualan, dan komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan. Program ini akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Manajemen (RKM) serta Inisiatif Strategis yang telah disusun oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok, Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal, dan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. *Customer Retention*
   Untuk tetap bersaing dengan perusahaan bongkar muat swasta, perkembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta, PT Pelabuhan Tanjung Priok perlu memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan agar mereka terus menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan.

In achieving corporate targets and secure market share within the PTP Terminal Nonpetikemas operating region, several marketing initiatives are planned for implementation in 2024.

1. Market Share Expansion
   This marketing program aims to expand the Company's market share and will be executed by branch offices within their respective areas of operation. The primary focus will be on engaging cargo owners, logistics companies, and shipping lines, while ensuring full compliance with applicable regulations. Activities will include proactive marketing efforts, sales visits, and direct communication with key stakeholders. The program will be aligned with the 2024 Management Work Plan (RKM) and Strategic Initiatives established by PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Sub-Holding PT Pelindo Multi Terminal, and the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Customer Retention
   To remain competitive against private stevedoring companies, the development of privately operated terminals (TUKS), and private Port Business Entities (BUP), PT Pelabuhan Tanjung Priok must ensure high levels of customer satisfaction and loyalty, encouraging clients to continue utilizing the Company's services.

INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH
INFORMATION ON MATERIAL INCREASE OR DECREASE IN SALES OR NET INCOME

Per 31 Desember 2024, Perusahaan tidak memiliki dampak terkait peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, the Company did not experience any material increase or decrease in sales or income. Accordingly, there is no information regarding material changes in sales or income presented in this Annual Report.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERUSAHAAN SERTA LABA OPERASI PERUSAHAAN

IMPACT OF PRICE CHANGES ON THE COMPANY'S SALES, NET INCOME, AND OPERATING REVENUES

Per 31 Desember 2024, Perusahaan tidak mengalami dampak perubahan harga terhadap pendapatan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terhadap dampak perubahan harga terhadap pendapatan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, the Company did not experience any impact from price changes on its income. Therefore, no information regarding the impact of price changes on income is presented in this Annual Report.

TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

OTHER FINANCIAL REVIEW

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Perusahaan telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan pembagian dividen. Keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, dengan selalu mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak Pemegang Saham dengan memberikan dividen interim.

Pembagian dividen interim akan dilakukan jika diizinkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan tidak menyebabkan aset bersih Perusahaan turun di bawah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, serta cadangan wajib. Keputusan mengenai dividen interim akan disusun oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan rencana pengembangan usaha Perusahaan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 dan SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 tanggal 25 Juni 2024, Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui untuk membagikan dividen tunai atas dividen tahun buku 2023 sebesar Rp79.029.629. Pada tanggal 10 Juli 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada kepada SPMT sebesar Rp78.239.332. Pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada PII masing-masing sebesar Rp671.752 dan Rp118.545.

Adapun informasi pembagian dan pembayaran dividen untuk 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Basis of Dividend Policy

The Company complies with the provisions stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with respect to dividend distribution. Decisions regarding dividend payments are made at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), taking into account the Company's financial and operational conditions. In addition, the Company remains committed to fulfilling shareholders' rights by providing interim dividends when applicable.

Interim dividends may be distributed if permitted under the Company's Articles of Association and provided that such distribution does not reduce the Company's net assets below the total issued and fully paid up capital and statutory reserves. The decision to distribute interim dividends shall be made by the Board of Directors, with prior approval from the Board of Commissioners, considering the interests of shareholders and the Company's business development plans.

Dividend Declaration and Payment

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 and SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 dated June 25, 2024, the Shareholders resolved and approved the payment of cash dividends for the 2023 financial year in the amount of Rp79,029,629. On July 10, 2024, the Company made payments of dividend to SPMT in the amount of Rp78,239,332. On August 9, 2024, and August 23, 2024, payments of dividend were made to PII in the amounts of Rp671,752 and Rp118,545, respectively.

Information regarding dividend declarations and payments over the last 5 (five) years is presented in the following table:

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen per Tahun Buku 2023-2024
Table of Dividend Declaration and Payment for Fiscal Year of 2023-2024

Uraian Description	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021	Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019
Laba Bersih (Rp) Net Income (Rp)	158.059.257.000	168.373.939.000	253.532.900.000	170.294.747.000	147.270.332.000
Jumlah Dividen Tunai (Rp) Total Cash Dividend (Rp)	79.029.629	50.000.000	500.000.000	50.000.000.000	51.544.616.000
Cadangan Umum dari Laba Bersih General Reserves from Net Income	7.902.963	-	253.032.900.000	120.294.747.000	95.725.716.000
Payout Ratio (%)	0,05%	0,03%	0,20%	29,36%	35%
Jumlah Saham (Lembar) Number of Share (Shares)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	3.161	2.000	20.000	2.000.000	5.890.813
Tanggal Pengumuman Dividen Dividend Declaration Date	25 Juni 2024 June 25, 2024	27 Juni 2023 June 27, 2023	2 Juni 2022 June 2, 2022	24 Agustus 2021 August 24, 2021	13 Juli 2020 July 13, 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	10 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 23 Agustus 2024 July 10, 2024, August 9, 2024. and August 23, 2024	24 Juli 2023 July 24, 2023	5 September 2022 September 5, 2022	3 September 2021 September 3, 2021	13 Agustus 2020 August 13, 2020

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)
EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2024, saham PT Pelabuhan Tanjung Priok dimiliki oleh PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebesar 99% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 1%, dengan saham Perusahaan tidak diperdagangkan di pasar publik. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Akibatnya, tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/ MSOP, pelaksanaannya, periode berlakunya, kriteria kelayakan bagi karyawan dan/atau manajemen, maupun harga *exercise* yang berlaku.

As of December 31, 2024, the shareholding structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok is comprised of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) holding 99% ownership, and PT Pelabuhan Indonesia Investama holding 1%. The Company's shares are not publicly traded. Accordingly, the Company does not have a policy related to an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or Management Stock Ownership Program (MSOP). As a result, there is no information available regarding the number of ESOP/ MSOP shares, implementation status, effective period, eligibility criteria for employees and/or management, or applicable exercise price.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek manapun. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah total dana yang diperoleh, rencana penggunaannya, rincian alokasi dana, atau tanggal persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of the end of 2024, the Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange. Accordingly, there is no information available regarding the total proceeds raised, the planned use of proceeds, details of fund allocation, or any resolutions by the General Meeting of Shareholders concerning changes in the use of public offering proceeds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI

Sepanjang tahun 2024, tidak ada Informasi material mengenai investasi yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT

Throughout 2024, the Company did not engage in any material investment activities. Accordingly, there is no related information to be disclosed in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa ekspansi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai terkait yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information on Expansion

During 2024, the Company did not conduct any corporate actions in the form of expansion. Therefore, there is no related information to be reported in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa divestasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai terkait yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information On Divestment

Throughout 2024, the Company did not undertake any corporate actions in the form of divestment. Accordingly, there is no related information to be disclosed in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/ Peleburan

Usaha Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa penggabungan/peleburan usaha. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai terkait yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information on Merger/Consolidation

During 2024, the Company did not engage in any corporate actions involving mergers or consolidations. Therefore, there is no related information to be reported in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa akuisisi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai terkait yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information On Acquisition

Throughout 2024, the Company did not carry out any corporate actions in the form of acquisitions. Accordingly, there is no related information to be disclosed in this Annual Report.

Investasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/ Modal

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa restrukturisasi utang/modal. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai terkait yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information on Debt/Capital Restructuring

During 2024, the Company did not conduct any corporate actions involving debt or capital restructuring. Therefore, there is no related information to be reported in this Annual Report.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan telah mengadopsi kebijakan untuk mengatur transaksi material yang melibatkan potensi benturan kepentingan dan/atau pihak afiliasi/pihak berelasi. Prosedur *review* transaksi dengan pihak berelasi melibatkan audit internal dan eksternal, serta selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK 224 (dahulu PSAK 7) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Perusahaan juga memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, dengan mengungkapkan informasi terkait PSAK 224 (dahulu PSAK 7) dalam Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip transaksi yang adil (*arm's length principle*). Dewan Komisaris dan Komite Audit turut melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi sesuai dengan standar bisnis umum dan prinsip transaksi yang adil. Laporan transaksi afiliasi untuk tahun 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk

POLICY AND REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

The Company has adopted policies to govern material transactions that may involve potential conflicts of interest and/or transactions with affiliated or related parties. The review procedures for related-party transactions involve both internal and external audits and are conducted with strict adherence to the prudence principle, in line with POJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, and PSAK 224 (formerly PSAK 7) on Related Party Disclosures. The Company also ensures compliance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), including disclosures in accordance with PSAK 224 (formerly PSAK 7), as presented in the 2024 Financial Statements audited by Public Accounting Firm Purwantono.

The Board of Directors is responsible for ensuring that all affiliated transactions are conducted based on the arm's length principle. The Board of Commissioners and the Audit Committee oversee the verification process to ensure that such transactions adhere to standard business practices and reflect fair transaction principles. The affiliated party transactions report for 2024 was audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to assess

memastikan kewajaran dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Selama tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak melanggar ketentuan hukum terkait transaksi pihak berelasi dan tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Kebijakan Tentang Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan defini yang diuraikan pada PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan no. 26 Laporan Keuangan Perusahaan. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

SIFAT RELASI DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang didasari oleh persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun nama-nama, sifat hubungan, serta sifat transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

fairness and compliance with applicable accounting standards in Indonesia.

Throughout 2024, PTP Terminal Nonpetikemas did not violate any legal provisions related to related-party transactions and did not engage in any transactions that resulted in a conflict of interest.

MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Related Party Policy

The Company and its subsidiaries conduct transactions with related parties in accordance with the definition set forth in PSAK 7 on "Related Party Disclosures." These transactions are carried out under terms and conditions agreed upon by both parties, which may differ from those of transactions conducted with unrelated third parties.

Significant balances and transactions with related parties are disclosed in Note 26 of the Company's Financial Statements. Unless specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the consolidated financial statements are considered third parties.

NATURE OF RELATIONSHIPS AND TYPES OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company conducts transactions with related parties based on terms mutually agreed upon. The names, nature of relationships, and types of transactions with related parties are as follows:

Sifat Hubungan Nature of Relationship	**Pihak yang Berelasi** Related Parties	**Sifat Transaksi** Nature of Transactions
Pemegang Saham Shareholders	PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)	Pembayaran *sharing revenue* dan dividen Payment of sharing revenue and dividends
	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	Pembayaran dividen dan pembelian jasa Payment of dividends and purchase of services
Entitas Sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Entity under the control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Imbalan kerja Employee benefits
	PT Multi Terminal Indonesia (MTI)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI)	Penjualan jasa Sales of service
	PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)	Penjualan dan pembelian jasa Sales and purchase of service

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Transaksi Nature of Transactions
Entitas Sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Entity under the control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)	Pembelian layanan kesehatan Purchase of health service
	PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Investasi saham Stock investment
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	Pembelian layanan teknologi informasi Purchase of information technology service
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	Pemeliharaan alat pelabuhan Port equipment maintenance
	PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)	Pembelian layanan teknologi informasi Purchase of information technology service
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)	Pembelian jasa Sales of service
	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Pembelian jasa Sales of service
	PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Penyedia Tenaga Ahli Daya Outsourcing provider
	PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Layanan sewa ruang kantor Office Lease
	PT Prima Indonesia Logistik (PIL)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Berkah Multi Cargo (BMC)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Pelindo Energi Logistik (PEL)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Intan Sejarah Utama (ISMA)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)	Penjualan jasa Sales of service
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Entity related to the Government	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking Service
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking Service
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking Service
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking Service
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Entity related to the Government	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking Service
	PT BNI Life Insurance	Jasa pensiun Pension Service
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of service
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa Sales of service
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales of service
	PT Sarana Bandar Nasional	Penjualan jasa Sales of service
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of service
	PT Semen Padang	Penjualan jasa Sales of service
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa Sales of service
	PT Angkasa Pura Logistik	Penjualan jasa Sales of service

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Transaksi Nature of Transactions
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Entity related to the Government	PT Timah (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of service
	PT Prima Jasa Logistik	Penjualan jasa Sales of service
	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)	Penjualan jasa Sales of service

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut adalah gambaran tentang bagaimana realisasi saldo dan transaksi dengan pihak berelasi memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan selama tahun 2023 dan 2024.

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following is an overview of how the realization of balances and transactions with related parties impacted the Company's financial performance during 2023 and 2024.

(Dalam Ribuah Rupiah)
(In Thousand Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Aset **Assets**		
Kas dan Setara Kas **Cash and Cash Equivalent**		
Bank Bank	119.035.727	89.437.449
Deposito Berjangka Time Deposits	150.000.000	350.000.000
Piutang Usaha Trade Receivables	143.038.538	1.985.085
Aset Kontrak Contract Assets	12.523.309	64.044.243
Piutang Lain-lain Other Receivables	18.184.229	16.171.279
Investasi Saham Investment in Shares of Stock	3.860.000	3.860.000
Utang Usaha Trade Payables	12.836.057	6.817.975
Utang Lain-lain Other Payables	226.484.003	281.590.821
Beban Akrual Accrued Expenses	111.705.159	110.933.455
Uang Titipan Deposits from Customers	2.716.929	1.764.249
Pendapatan Operasi Operating Revenues	704.024.318	388.634.949

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak berelasi sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis perusahaan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan adanya hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Reasons for Related Party Transactions

Transactions carried out by the Company with related parties were aligned with operational and business development needs. These transactions were conducted based on ownership and/or management relationships that comply with applicable regulations and were intended to support the Company's operational continuity and business growth.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihakpihak berelasi telah diungkapkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dan telah sesuai dengan standar PSAK 224 (dahulu PSAK 7) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

KEBIJAKAN MEKANISME *REVIEW* ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Seluruh transaksi afiliasi yang telah disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kegiatan operasional Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Transaksi ini dilaksanakan secara rutin, berulang, dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja, dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material."

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur transaksi material yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Mekanisme pengawasan atas transaksi dengan pihak berelasi telah diterapkan melalui proses audit oleh auditor internal dan eksternal. Setiap transaksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pedoman bisnis yang ditetapkan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Direksi memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang adil (*arm's length principle*). Dewan Komisaris dan Komite Audit turut melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip kewajaran. Sebagai bagian dari upaya memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, laporan transaksi afiliasi Perusahaan pada tahun 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Sepanjang tahun 2024, PTP Terminal Nonpetikemas tidak mengalami pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait transaksi dengan pihak berelasi dan tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

FAIRNESS OF TRANSACTIONS

All transactions conducted with related parties have been disclosed in the Financial Statements audited by an independent auditor and comply with PSAK 224 (formerly PSAK 7) on Related Party Disclosures. Related-party transactions were executed based on terms agreed upon by both parties. In the normal course of business, the Company enters into related-party transactions under pricing and terms mutually agreed upon.

REVIEW POLICY AND COMPLIANCE WITH REGULATIONS

All affiliated transactions mentioned above form an integral part of the Company's regular operational activities aimed at generating operating revenue. These transactions were conducted on a routine, recurring, and continuous basis, as disclosed in the Company's 2024 Financial Statements audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, which issued an opinion stating that the financial statements were presented "fairly, in all material respects."

The Company has established a policy to govern material transactions that may pose a potential conflict of interest and/or involve affiliated or related parties. Oversight of such transactions is conducted through audits by both internal and external auditors. All transactions are executed with due care and prudence in accordance with the business guidelines outlined in PSAK 224 (formerly PSAK 7) on Related Party Disclosures.

The Board of Directors ensures that all affiliated transactions are carried out based on the arm's length principle. The Board of Commissioners and the Audit Committee also evaluate and confirm that related-party transactions are conducted under generally accepted business practices and comply with the fairness principle. To ensure that transactions are conducted fairly and in accordance with applicable accounting standards in Indonesia, the Company's related-party transaction report for 2024 was audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja.

Throughout 2024, PTP Terminal Nonpetikemas did not commit any violations of prevailing laws and regulations related to related-party transactions, and no transactions gave rise to any conflict of interest.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE STATE

Di tahun 2024, Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam hal pajak sebesar Rp254,81 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp67,81 miliar atau 36,26% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp187,00 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran gaji harmonisasi sesuai dengan Surat dari PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/23/1/2/PSOS/DSDM/PLMT-24 tanggal 23 Januari 2024 yang berdampak pada meningkatnya PPh Pasal 21.

Adapun kontribusi kepada negara berupa perpajakan yang direalisasikan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2024, the Company fulfilled its tax obligations amounting to Rp254.81 billion, representing an increase of Rp67.81 billion or 36.26% compared to the 2023 realization of Rp187.00 billion. This increase is due to the payment of harmonized salaries in accordance with the letter from PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/23/1/2/PSOS/DSDM/PLMT-24 dated January 23, 2024, which has an impact on the increase of Article 21 Income Tax.

The Company's contribution to the state in the form of realized tax payments is detailed as follows:

Tabel Kontribusi Kepada Negara 2023-2024
Table of Contribution to the Country 2023-2024

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

No	Kontribusi kepada Negara Contribution to the Country	2024 (Rp-juta) 2024 (Rp-million)	2023 (Rp-juta) 2024 (Rp-million)
1	Penyetoran Kontribusi Dividen Payment of Dividend Contribution	79.030	99.500
2	Kontribusi Pajak: Tax Contribution:		
	Penyetoran PPh Pasal 25 dan 29 Deposit of Income Tax Articles 25 and 29	24.571	18.750
	Penyetoran PPN + PPN Impor + PPN WAPU Deposit of VAT + Import VAT + WAPU VAT	48.188	2.873
	Penyetoran PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 (2), PPh 26 Deposit of Income Tax 21, Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	69.156	52.985
	Penyetoran Pajak Lainnya (Termasuk PBB)	14.881	-
	Total Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	156.797	74.607
3	PNBP:		
	Pandu & Tunda Towage & Pilotage	-	-
	Konsesi Concession	18.982	12.895
	Total PNBP Total PNBP	18.982	12.895
	Jumlah Kontribusi kepada Negara Total Contribution to the Country	254.808	187.003

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki kasus hukum terkait pajak. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan memenuhi kewajiban perpajakan.

As of the end of 2024, the Company had no outstanding legal cases related to taxation. The Company remains committed to contributing to the state by fulfilling its tax obligations in full compliance with applicable laws and regulations.

PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap Perusahaan.

As of the end of 2024, there were no changes in laws or regulations that had a significant impact on the Company. Accordingly, there is no information to report regarding regulatory changes or their potential effects on the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE MOST RECENT FISCAL YEAR

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang memengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

The Company has adopted all new and/or revised standards that became effective for periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that had an impact on the Company's consolidated financial statements:

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi 2024
Table of Accounting Policy 2024

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reasons of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
1	Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran Amendment to PSAK 221: Lack of Exchangeability	Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang mempengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas The amendment requires the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency that is not exchangeable with another currency and how it affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position, and cash flows.	Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut terhadap pelaporan keuangan grup The Group is currently assessing the impact of the amendment on its financial reporting.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi 2024
Table of Accounting Policy 2024

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reasons of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
2	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 62: Kontrak Asuransi. PSAK 104: Kontrak asuransi berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur. This is a new comprehensive accounting standard for insurance contracts, covering recognition and measurement, presentation, and disclosure. Upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts of life, non-life, direct insurance, and reinsurance, regardless of the issuing entity. It also applies to certain guarantees and financial instruments with non-discretionary participation features, with some scope exceptions. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurers.	Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya. The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets, and liabilities, as well as disclosures of contingent liabilities at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in material adjustments to the carrying amounts of affected assets and liabilities in future reporting periods.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Sebagai bagian penting dari industri pelabuhan dan logistik, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan memegang peranan krusial dalam memastikan kelancaran distribusi barang di sebuah negara atau wilayah, yang pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberlanjutan dan perkembangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, serta faktor internal yang ada dalam perusahaan.

As a critical component of the port and logistics industry, cargo loading and unloading activities play a pivotal role in ensuring the smooth flow of goods distribution within a country or region, ultimately driving accelerated economic growth. However, the sustainability and development of this business are heavily influenced by both external factors such as macroeconomic conditions and internal factors within the Company.

Untuk itu, PTP Terminal Nonpetikemas secara rutin melakukan kajian dan analisis guna memetakan berbagai tantangan dan hambatan yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan, serta mengubahnya menjadi peluang pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Temuan-temuan dari kajian tersebut digunakan sebagai landasan bagi Perusahaan untuk merumuskan strategi, kebijakan strategis, inisiatif strategis, serta sasaran-sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

In order To address these dynamics, PTP Terminal Nonpetikemas routinely conducts assessments and analyses to map out various challenges and obstacles that may impact its operational continuity. These findings are then transformed into growth opportunities that can be strategically leveraged. The insights gained from these assessments form the foundation for the formulation of corporate strategies, strategic policies, initiatives, and objectives, which are reflected in the Corporate Long-Term Corporate Plan (RJPP).

Kajian dan analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan perspektif objektif. Kajian ini dilakukan pada periode tahun buku 2024 sebagai dasar dalam menyusun arah strategis perusahaan di masa mendatang.

These assessments are conducted using the SWOT analysis method, with the involvement of third-party professionals to provide an objective and independent perspective. The review was carried out during the 2024 fiscal year and serves as the basis for shaping the Company's future strategic direction.

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Berdasarkan metode analisis SWOT, lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan antara lain adalah kondisi perekonomian dan perdagangan, regulasi pemerintah, bidang energi dan isu lainnya yang berkaitan dengan pelabuhan. Berikut analisis lingkungan eksternal yang dihadapi Perusahaan:

FACTORS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

According to the SWOT analysis, external environments that could impact the Company Business includes economy, trade, government regulation, energy sector, and other port-related issues. The following external environment analysis faced by the Company:

Aspek Aspect	Hasil Analisis Analysis Results
Kondisi Perekonomian dan Perdagangan Economic and Trade Conditions	Tantangan ekonomi global yang sedang mengalami pelambatan berdampak pada penurunan volume ekspor dan impor. Kondisi ini berpotensi menghambat laju produksi yang dihasilkan oleh PTP Terminal Nonpetikemas, termasuk dalam hal pelayanan di berbagai terminal seperti *multipurpose*, curah cair, dan curah kering. Selain itu, terdapat juga ancaman dari faktor eksternal lain, seperti kebijakan pelarangan ekspor komoditas kelapa sawit dalam bentuk CPO (*Banned* CPO) oleh sejumlah negara di Uni Eropa (EU), yang dapat mempengaruhi pasar global. Lebih jauh lagi, adanya peningkatan tarif bongkar muat di beberapa wilayah turut memperburuk kondisi operasional, mengakibatkan penurunan aktivitas bongkar muat yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi kegiatan logistik Perusahaan. The ongoing global economic slowdown poses challenges, notably a decline in export and import volumes. This condition has the potential to hinder production output at PTP Terminal Nonpetikemas, including services across various terminals such as multipurpose, liquid bulk, and dry bulk. Additionally, external threats persist, such as the export ban on crude palm oil (CPO) imposed by several European Union (EU) countries, which could impact global markets. Furthermore, the increase in loading and unloading tariffs in several regions exacerbates operational challenges, leading to a reduction in loading and unloading activities and ultimately affecting the Company's logistics efficiency.
Regulasi Pemerintah Government Regulations	Penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan pembatasan *volume* atau tonase serta jam operasional truk di beberapa wilayah Indonesia, memberikan dampak signifikan pada kelancaran pengiriman kargo. Kebijakan ini menyebabkan rute pengiriman barang menjadi lebih panjang, karena truk harus mematuhi perubahan rute yang ditetapkan, sehingga memperlambat proses distribusi barang dari lokasi produksi atau penambangan ke pelabuhan. Dampaknya, pengiriman barang dapat dialihkan ke pelabuhan lain yang lebih mudah diakses, yang berpotensi mengurangi aktivitas di terminal milik PTP Terminal Nonpetikemas. Selain itu, batasan minimum terhadap muatan yang dapat diangkut oleh kapal saat bersandar di pelabuhan juga menambah kompleksitas dalam perencanaan pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kepastian order atau muatan kapal, guna memastikan perjalanan kapal lebih efisien dan menghindari pemborosan waktu serta biaya operasional. The implementation of regional government policies regarding volume or tonnage restrictions and truck operating hours in several regions of Indonesia has significantly impacted cargo delivery operations. These regulations have led to longer delivery routes, as trucks must adhere to the designated detours, thereby slowing the distribution process from production or mining sites to ports. As a result, cargo shipments may be redirected to other more accessible ports, potentially reducing activity at PTP Terminal Nonpetikemas facilities. Additionally, minimum load restrictions for vessels docking at ports add further complexity to shipment planning. Therefore, a system is needed that provides clear information on cargo or vessel order certainty, to ensure more efficient voyages and avoid wasted time and operational costs.

ASSESSMENT MANAJEMEN

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Hasil dari analisa SWOT yang telah dilakukan melalui High Level Scanning dan Assessment terhadap kondisi internal/*external* PTP Terminal Nonpetikemas adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan:
   a. Memiliki Terminal Operasi Non Petikemas dengan lokasi geografis yang sangat strategis dengan akses yang relatif baik ke pelabuhan/ terminal operasi.
   b. Memiliki posisi perusahaan yang kuat serta keterikatan hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder kepelabuhanan dan logistik (Pemerintah, swasta, asosiasi, dan vendor).
   c. Memiliki pengalaman, Pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan jasa pelayanan kepelabuhanan dan kegiatan operasional terminal multipurpose yang lengkap dan penanganan bisnis kargo non petikemas (general cargo, curah kering, curah cair, dan kargo lainnya).
   d. Memiliki tata kelola perusahaan (GCG) dan citra perusahaan yang baik dalam memberikan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik dalam hal kemudahan, kecepatan, efektivitas dan efisiensi pekerjaan, transparansi pentarifan, kelengkapan fasilitas, keamanan kargo serta keselamatan pekerja dan pelanggan dalam melakukan jasa pelayanan dan kegiatan operasional terminal *multipurpose*.
   e. Memiliki kondisi keuangan / finansial yang stabil dengan posisi laba tumbuh secara komprehensif dari banyaknya sumber pendapatan usaha atas beberapa jasa pelayanan.
   f. Memiliki sumber daya perusahaan yang memadai dan mencukupi serta spesifikasi yang tinggi dalam menjalankan bisnis terminal multipurpose yang dioperasikan (tenaga kerja, infrastruktur dan suprastruktur, peralatan, TI).
   g. Pelayanan jasa berbasis digital (servis dan pembayaran).
   h. Beberapa pelabuhan memiliki sertifikasi ISO 9001:9008 & ISPS *Code*.
   i. Telah memiliki dedicatd terminal sesuai jenis kargonya sehingga menjamin produktivitas dan kinerja B/M.
   j. Telah memiliki *shorebase facilities* dan personil yang handal tersertifikasi di bidang *oil and gas*.
   k. Terminal beroperasi 24 jam dengan pengawasan ketat termasuk CCTV.
   l. Tingkat ACP baik.

2. Kelemahan:
   a. Belum memiliki aset atas beberapa fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang dimiliki atau menjadi aset perusahaan sendiri dimana saat ini fasilitas infrastruktur terminal menggunakan pola kerjasama atau sewa kepada cabang IPC.
   b. Belum seimbang dan optimalnya availability, capacity dan utilisasi (YOR, BOR) beberapa jenis fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikarenakan keterbatasan lahan dan wilayah serta kurangnya jumlah perlalatan bongkar muat yang dimiliki.
   c. Belum optimalnya kinerja operasional terhadap target atas beberapa komoditas yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kondisi dan *reability* peralatan bongkar muat, pola operasi, dan kapasitas terminal.
   d. Belum adanya standarisasi menyeluruh terhadap kegiatan operasional.

MANAGEMENT ASSESSMENT

Assumptions Used by Management in Conducting the Assessment

The results of the SWOT analysis conducted through High-Level Scanning and Assessment of the internal and external conditions of PTP Terminal Nonpetikemas are as follows:

1. Strengths:
   a. Operating Non-Container Terminals with highly strategic geographic locations and relatively good access to port/ terminal operations.
   b. Strong corporate position and well-established relationships with all port and logistics stakeholders (Government, private sector, associations, and vendors).
   c. Possession of experience, knowledge, and capabilities in providing comprehensive port services and operating multipurpose terminals, including the handling of non-container cargo (general cargo, dry bulk, liquid bulk, and other cargo types).
   d. Possession of strong corporate governance (GCG) and a positive corporate image in delivering excellent performance and services to customers, particularly in terms of ease, speed, effectiveness, and efficiency of operations, transparent tariff structures, completeness of facilities, cargo security, and the safety of both workers and customers in providing services and carrying out multipurpose terminal operations.
   e. Stable financial condition with comprehensively growing profit driven by diverse service revenue streams.
   f. Adequate and high-spec corporate resources for operating multipurpose terminals (manpower, infrastructure and superstructure, equipment, IT).
   g. Digital-based service offerings (services and payments).
   h. Several ports certified with ISO 9001:2008 & ISPS Code.
   i. Dedicated terminals tailored to cargo types, ensuring high productivity and performance in B/M.
   j. Established shorebase facilities with certified, skilled personnel in oil and gas operations.
   k. 24-hour terminal operations with strict supervision, including CCTV monitoring.
   l. High ACP level.

2. Weaknesses:
   a. Lack of ownership of several infrastructure and superstructure facilities, as these are currently utilized through cooperation or lease agreements with IPC branches.
   b. Imbalance and suboptimal availability, capacity, and utilization (YOR, BOR) of various company-owned facilities and equipment, due to limited land and space as well as insufficient loading and unloading equipment.
   c. Suboptimal operational performance in meeting targets for several commodities, caused by factors such as the condition and reliability of loading and unloading equipment, operational patterns, and terminal capacity.
   d. Absence of comprehensive standardization across all operational activities.

e. Belum memiliki standarisasi pentarifan untuk semua jenis komoditas.
f. Terdapat beberapa Alat dan Fasilitas dermaga yang sudah berumur, perlu dilakukan penyegaran dan rekonfigurasi.
g. Terbatasnya area pengembangan dikarenakan lahan yang ada milik Pelindo kondisinya masih berupa lahan belum matang dan beberapa area memiliki luas terbatas.
h. Kurangnya jumlah SDM dan juga tenaga terampil dalam menangani kegiatan Bongkar Muat kargo Curah Cair CPO.
i. Belum adanya Terminal *Operating System*.
j. Integrasi area perindustrian dengan pelabuhan yang belum Optimal.

3. Peluang:
a. Kebijakan pemerintah tentang undang-undang pelayaran no 17 tahun 2008 dan kebijakan lain yang mendorong aktivitas perdagangan didalam indonesia maupun kegiatan ekspor dan impor.
b. Adanya peluang pengembangan bisnis baru di Pelabuhan eksisting dengan melakukan penambahan pelayanan seperti *blending, crushing*, dll.
c. Adanya peluang penguatan bisnis sebagai *operation and maintenance*.
d. Peningkatan *volume* ekspor dan impor komoditas-komoditas umum yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah seperti pembukaan lahan-lahan pertanian baru serta pembebasan Bea masuk impor untuk gandum dan pelarangan ekspor mineral mentah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang antara lain mengatur bahwa kewajiban PBM luar melakukan Kerjasama dengan BUP (PTP) dan hanya bisa melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal *Multipurpose*.
f. Kebijakan Konsep Tol Laut yang dapat menjadi peluang pengembangan rute transportasi rutin antar pelabuhan. Sehingga, mendukung peningkatan kargo bongkar muat.
g. Adanya trend global industri kepelabuhanan yang mengindikasikan adanya *rebound volume* perdangangan global paska pandemi.
h. Adanya potensi kargo *smelter* dan tingginya cadangan batubara Indonesia.

4. Ancaman:
a. Penurunan kargo ekspor batubara ke Cina dikarenakan kebijakan pengurangan impor bahan bakar fosil.
b. Munculnya kompetitor terminal / pelabuhan dari sektor swasta nasional dan asing yang melakukan penanganan kargo sendiri akibat dari mudahnya pembangunan dan izin TUKS/ TERSUS ataupun izin Badan usaha pelabuhan (BUP) sehngga menciptakan sensitivitas tarif.
c. Persaingan penanganan kargo dengan beberapa perusahaan bongkar muat yang meliputi aspek pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja operasional di terminal, peralatan terminal, fleksibilitas tarif serta kemampuan melakukan pemasaran (*marketing*) kepada cargo *owner*.
d. Harga Komoditas batubara yang *volatile* (mengikuti harga pasar dunia).
e. Adanya kebijakan pemda yang berkaitan dengan pembatasan *volume*/tonase dan jam operasional truk di beberap daerah di Indonesia.

e. Lack of standardized tariffs for all types of commodities.
f. Several wharf equipment and facilities are outdated and in need of refreshment and reconfiguration.
g. Limited development areas due to existing land being owned by Pelindo, which remains in raw or undeveloped condition, and some areas being of limited size.
h. Insufficient number of human capital and skilled labor to handle the unloading activities of liquid bulk CPO cargo.
i. Absence of a Terminal Operating System.
j. Suboptimal integration between industrial zones and the port area.

3. Opportunities:
a. Government policies such as the Shipping Law No. 17 of 2008 and other regulations that promote domestic trade as well as export and import activities.
b. Opportunities for new business development at existing ports by adding services such as blending, crushing, and others.
c. Business strengthening opportunities in the area of operations and maintenance.
d. Increase in the volume of exports and imports of general commodities due to government initiatives such as the opening of new agricultural lands, import duty exemptions for wheat, and bans on the export of raw minerals.
e. Government Regulation No. 31 of 2021 on Shipping Administration, which mandates external PBM to cooperate with BUP (PTP) and allows them to perform loading and unloading activities only at Multipurpose Terminals.
f. The Sea Toll Program policy creates opportunities to develop regular inter-port transportation routes, thereby supporting growth in cargo loading and unloading volume.
g. A global trend in the port industry showing signs of a rebound in trade volume post-pandemic.
h. The potential for smelter cargo and the abundance of coal reserves in Indonesia.

4. Threats:
a. Decline in coal export cargo to China due to its policy of reducing fossil fuel imports.
b. Emergence of competing terminals/ports from national and foreign private sectors handling their own cargo, driven by the ease of obtaining permits for Special Terminals (TUKS/TERSUS) or Port Business Entity (BUP) licenses, creating tariff sensitivity.
c. Competition in cargo handling with several stevedoring companies, involving aspects such as the knowledge and capabilities of terminal operational personnel, terminal equipment, tariff flexibility, and marketing capability to cargo owners.
d. Volatility in coal commodity prices, which are subject to global market fluctuations.
e. Regional government regulations that limit truck volume/ tonnage and operating hours in several areas of Indonesia.

HASIL *ASSESSMENT*

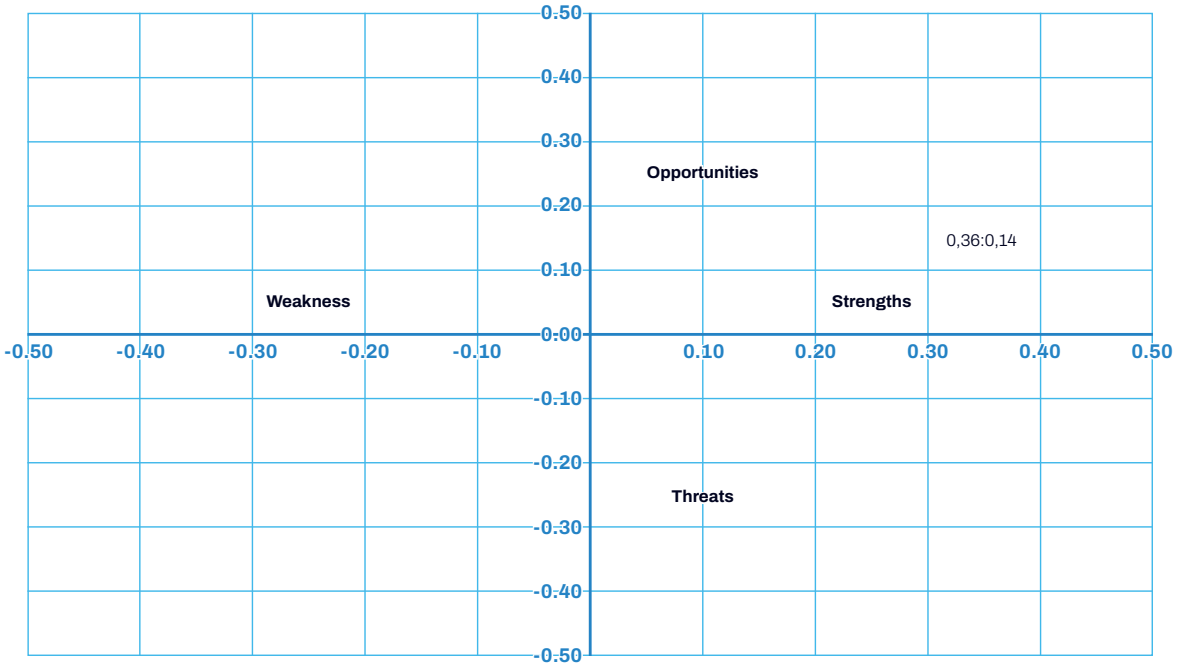
Berdasarkan analisis SWOT di atas, posisi PTP Terminal Nonpetikemas dapat digambarkan melalui diagram berikut:

MATRIKS POSISI ANALISIS SWOT PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ASSESSMENT RESULTS

Based on the above SWOT analysis, the PTP Terminal Nonpetikemas position can be illustrated as follows:

SWOT ANALYSIS POSITION MATRIX OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Sumber: Data Internal
Source : Internal Data

IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*)

Dengan posisi PTP Nonpetikemas pada Matrix SWOT tersebut, menggambarkan bahwa PTP Terminal Nonpetikemas memiliki *Strength* yang cukup besar namun juga masih memiliki Weakness yang masih mendominasi dan perlu diperbaiki. Hal tersebut menyebabkan nilai IFAS memiliki nilai 2,47 (*Weakness*) tersebut terkait dengan kondisi internal perusahaan yang masih memiliki kekurangan pada beberapa hal, antara lain:

1. Struktur Organisasi
2. Standarisasi kompetensi, karir dan pengembangan pegawai
3. Aset infrastruktur dan suprastruktur
4. Optimalisasi availability dan utilisasi alat
5. Optimalisasi kinerja operasional
6. Integrasi pelayanan
7. Sistem birokrasi perusahaan
8. Pengalaman dan portofolio dalam pengembangan bisnis perusahaan
9. Standarisasi pentarifan
10. Jaringan pelanggan

IFAS (Internal Factor Analysis Strategy)

Based on PTP Nonpetikemas' position on the SWOT Matrix, it indicates that PTP Terminal Nonpetikemas possesses significant Strengths, yet still faces Dominant Weaknesses that require improvement. This is reflected in the IFAS score of 2.47 (Weakness), indicating that internal weaknesses on several matters, including:

1. Organizational structure
2. Standardization of employee competencies, career paths, and development programs
3. Infrastructure and superstructure assets
4. Optimization of equipment availability and utilization
5. Operational performance optimization
6. Service integration across terminals
7. Company bureaucratic system
8. Experience and portfolio in business development for the company
9. Tariff standardization
10. Customer network

EFAS (*Eksternal Factor Analysis Strategy*)

Walaupun masih banyaknya aspek kekurangan (*Weakness*) yang masih mendominasi dan perlu diperbaiki oleh Perusahaan, namun masih terdapat beberapa peluang (*Opportunity*) yang dapat memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk berkembang. Hal tersebut menyebabkan nilai memiliki nilai 2,00 (*Opportunity*), dimana terlihat sedikit mendominasi dibandingkan ancaman (*Threat*) yang akan dihadapi oleh Perusahaan. Hal tersebut terkait dengan beberapa peluang (*Opportunity*) yang dimiliki perusahaan antara lain:

1. Kebijakan pemerintah mengenai Tol laut dan proyek strategis nasional
2. Program holding Kementrian BUMN
3. Kerjasama dengan TUKS dan TERSUS
4. Pengembangan bisnis organik baru (diversifikasi pelayanan dan produk)
5. Perubahan status terminal dan klasifikasi terminal
6. Investasi perusahaan luar
7. Pembangunan kawasan industri dan proyek lainnya
8. Peningkatan kargo antara lain CPO, batu bara dan komoditas lainnya

Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan masih mempunyai peluang untuk melakukan pengembangan ke depannya. Hal ini perlu sejalan dengan beberapa strategi rencana jangka panjang yang akan dilakukan perusahaan oleh masingmasing divisi pada tiap direktorat.

EFAS (External Factor Analysis Strategy)

Despite the fact that internal weaknesses still dominate and need to be addressed by the Company, there remain several external opportunities that could facilitate the Company's future growth. It is reflected in an EFAS score of 2.00 (Opportunity), indicating that opportunities slightly outweigh threats faced by the Company. These key opportunities include:

1. Government policies on Sea Toll and National Strategic Projects
2. SOEs holding program
3. Partnership opportunities with TUKS (Private Jetty) and TERSUS (Special Terminals)
4. Organic business development (service and product diversification)
5. Changes in terminal status and classification
6. Foreign direct investment
7. Development of industrial zones and other infrastructure-related projects
8. Increasing cargo volumes, particularly CPO, coal, and other commodities

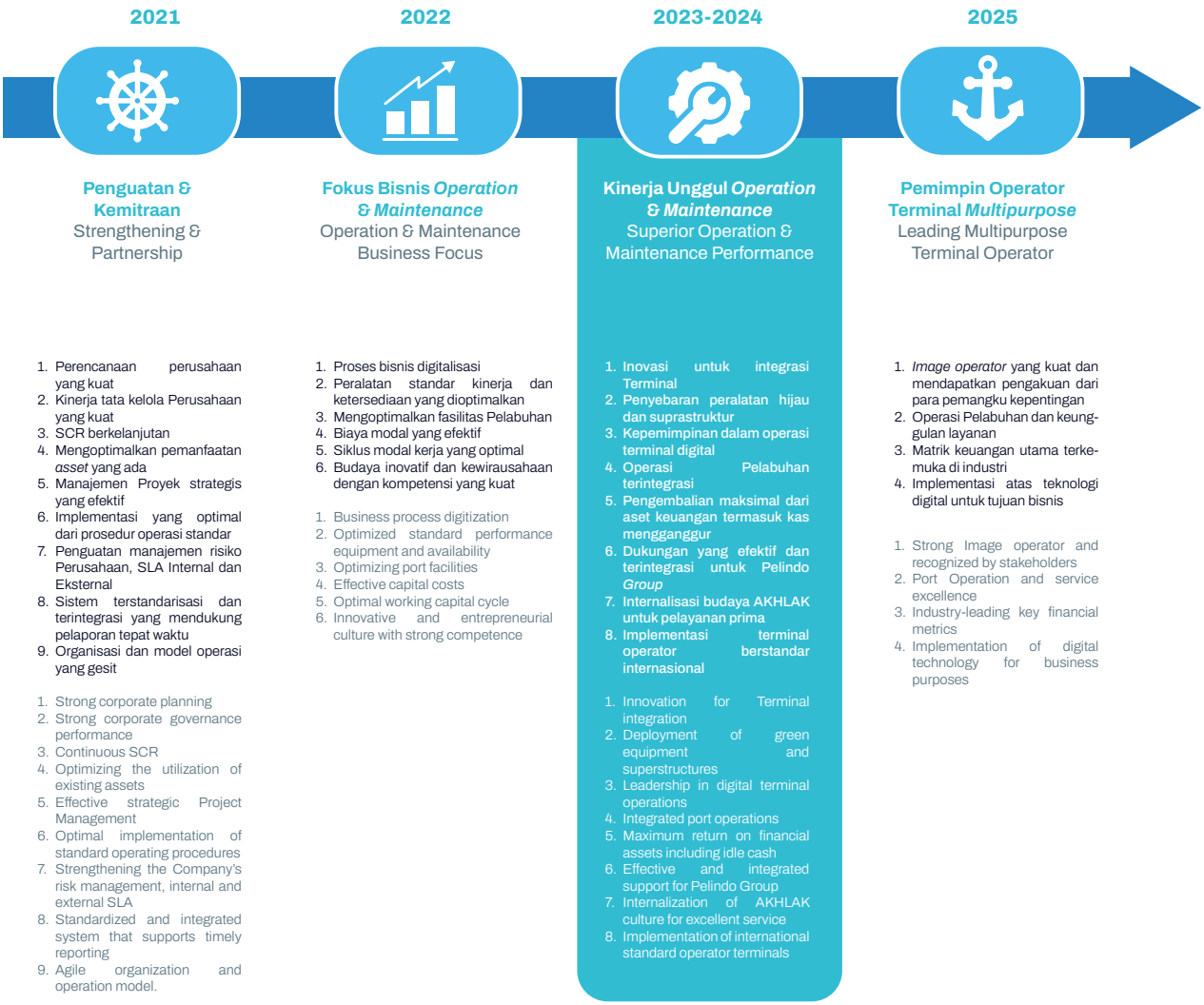
The analysis indicates that the Company still has viable growth opportunities that should be seized. To realize these opportunities effectively, they must be aligned with the Corporate long-term strategic plan, to be implemented through coordinated strategies across divisions and directorates.

PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
BUSINESS ROADMAP: CORPORATE LONG-TERM PLAN

Perusahaan telah menyusun peta jalan usaha (*Business Roadmap*) sebagai bagian dari Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2021-2025. Dalam penyusunan program kerja ini, Perusahaan berpedoman pada peta jalan korporasi yang selaras dengan *roadmap* korporasi milik entitas induk, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). *Corporate roadmap* Perusahaan untuk periode 2021-2025 dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The Company has developed a Business Roadmap as part of its Corporate Long-Term Plan (RJPP) for the period 2021–2025. In formulating this strategic work program, the Company refers to a corporate roadmap that is aligned with the parent entity's strategic direction, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Company's corporate roadmap for the 2021–2025 period is illustrated in the diagram below:

CORPORATE ROADMAP 2021-2025



Perusahaan telah merumuskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2021-2025 sebagai bagian integral dari strategi pengembangan Perusahaan, dengan fokus utama pada pengoperasian Terminal Nonpetikemas (Terminal *Multipurpose*, Curah Kering, dan Curah Cair). Penyusunan RJPP ini didasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Perusahaan, serta mengacu pada RJPP dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai *holding* dan PT Pelindo Multi Terminal sebagai *subholding*. Proses ini menghasilkan pokok-pokok rencana jangka panjang yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan Perusahaan.

RJPP ini dirancang untuk memberikan panduan bagi manajemen dalam menyusun Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan, serta sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan Perusahaan hingga akhir periode 2025. Strategi pengembangan PTP Terminal Nonpetikemas pada periode 2021-2025 akan difokuskan pada peningkatan kualitas operasional dan fasilitas pendukung, serta pengembangan fasilitas pelabuhan yang lebih baik. Sasaran utama Perusahaan pada tahun 2025 adalah menjadi pemimpin operator terminal nonpetikemas di Indonesia. Berbagai langkah strategis akan diambil untuk meningkatkan daya saing, dengan harapan bahwa pada akhir periode RJPP ini, Perusahaan akan memiliki kemampuan yang sejalan dengan visi dan misinya.

The Company has formulated its Corporate Long-Term Plan (RJPP) for the period 2021–2025 as an integral part of its development strategy, with a primary focus on the operation of Non-Container Terminals (including multipurpose, dry bulk, and liquid bulk terminals). The formulation of the RJPP is based on a comprehensive analysis of both internal and external conditions and is aligned with the RJPP of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the holding company and PT Pelindo Multi Terminal as the sub-holding. This process has resulted in a set of strategic long-term directives that serve as a guideline for the Company's future development.

The RJPP is designed to guide management in the preparation of the Annual Company Work Plan and Budget (RKAP), while also serving as a reference for corporate development planning through to the end of 2025. The development strategy of PTP Terminal Nonpetikemas for the 2021–2025 period focuses on improving operational quality, enhancing supporting infrastructure, and developing more advanced port facilities. The Company's primary objective for 2025 is to become the leading non-container terminal operator in Indonesia. Various strategic initiatives will be undertaken to strengthen competitiveness, with the expectation that by the end of the RJPP period, the Company's capabilities will be aligned with its vision and mission.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY SOUNDNESS LEVEL

Sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTP Terminal Nonpetikemas secara rutin melakukan evaluasi terhadap kesehatan Perusahaannya. Evaluasi ini mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan ini, penilaian kesehatan Perusahaan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek, seperti keuangan, operasional, dan administrasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

As part of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), a State-Owned Enterprise (SOE), PTP Terminal Nonpetikemas conducts regular evaluations of its organizational health. This evaluation refers to the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the Assessment of the Soundness of State-Owned Enterprises. Pursuant to this regulation, the Company's soundness level is assessed through the review of several dimensions, including financial performance, operational efficiency, and administrative effectiveness, as described below:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan 2024
Table of Company Soundness Level 2024

Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2024 2024 RKAP		Realisasi 2024 Audited 2024 Audited Realizations	
			Nilai Value	Bobot Weight	Nilai Value	Bobot Weight
A. Aspek keuangan Financial Aspect						
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE) Return on Equity	%	15,00	33,98	15,00	(6,17)	1,00
2. Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment	%	10,00	26,26	10,00	(0,46)	-
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Cash Ratio	%	3,00	95,14	3,00	72,71	3,00
4. Rasio Lancar (*Current Ratio*) Current Ratio	%	4,00	179,37	3,00	126,11	3,00
5. *Collection Period*	Hari Day	4,00	23,58	4,00	41,75	4,00
6. Perputaran persediaan Inventories Turnover	Hari Day	4,00	-	4,00	0,00	4,00
7. Perputaran *Total Asset/Total Asset* Total Assets Turnover/Total Assets	%	4,00	160,92	4,00	160,42	4,00
8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Ratio of Total Equity to	%	6,00	64,64	4,50	47,57	5,50
Jumlah aspek keuangan **Total Financial Aspects**		**50,00**	**583,88**	**47,50**	**441,92**	**24,50**
B. Aspek operasional Operational Aspect						
1. Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Effectiveness Rate of Non-Container Berth (ET/BT)	%	11,00	64,17	11,00	60,41	10,36
2. Produktivitas Bongkar Muat Loading and Unloading Productivity						
a. *General Cargo*		-	-	-	-	-
b. Curah Cair Liquid Bulk		12,00	3.124,45	12,00	3.263,86	12,54
c. Curah Kering Dry Bulk		12,00	6.288,72	12,00	6.216,29	11,86
Jumlah aspek operasional **Total Operational Aspects**		**35,00**	**9.477,34**	**35,00**	**9.540,56**	**34,75**
C. Aspek administrasi Administrative Aspect						
1. Laporan perhitungan tahunan Annual Financial Statement		5,00	<= bulan ke-4 <= 4th Month	<= bulan ke-4 <= 4th Month	5,00	5,00
2. Rancangan RKAP RKAP Draft		5,00	< 2 bulan < 2th Month	< 2 bulan < 2th Month	5,00	5,00
3. Laporan periodik Periodic Report		5,00	0<x<= 30 hari 0<x<= 30 days	0<x<= 30 hari 0<x<= 30 days	5,00	5,00
Jumlah aspek administrasi **Total administrative aspect**		**15,00**			**15,00**	**15,00**
Jumlah A+B+C **Total A+B+C**		**100,00**				**74,25**
KATEGORI **CATEGORY**						**SEHAT** ***SOUNDNESS*** **AA**

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





05

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Functions



PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN

INFORMATION TECHNOLOGY'S ROLE IN BUSINES DEVELOPMENT OF THE COMPANY



PTP Terminal Nonpetikemas menyadari bahwa optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat membawa Perusahaan dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis, beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dari perkembangan bisnis, sehingga Perusahaan akan menjadi semakin kompetitif dan risiko operasional yang dihadapi dapat diminimalkan. Sistem teknologi informasi Perusahaan dirancang untuk mendukung kinerja Perusahaan dan meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi meningkatkan efektifitas berbagai proses operasional, serta meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengutamakan inovasi yang berkelanjutan dan selalu memperhatikan kebutuhan bisnis Perusahaan.

PTP Terminal Nonpetikemas recognizes that optimizing the use of Information Technology (IT) can accelerate business growth, enable the Company to adapt to ongoing changes and challenges in the business environment, thus the Company would become more competitive and would minimize the operational risks. The Company's information technology system is designed to support overall performance and enhance work efficiency by automating processes and improving effectiveness of various operational processes. It also aims to strengthen competitiveness and competitive advantage by prioritizing continuous innovation and consistently aligning with the Company's evolving business needs.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

INFORMATION TECHNOLOGY VISION AND MISSION OF PTP TERMINAL NONPETIKEMAS



Visi
Vision

Mengantarkan Perusahaan menjadi *smart port* tahun 2024.

To transform the Company into a smart port by 2024.

Misi
Mission

Melakukan transformasi di bidang IT dengan implementasi program digitalisasi sistem menyeluruh yang bukan saja mengikuti perkembangan teknologi, namun memudahkan proses bisnis Perseroan sehingga dapat berjalan efisien dan efektif, menghemat waktu, transaksi yang *real-time* dan transparan serta hemat biaya dalam rangka menuju era *digital port*.

To implement a comprehensive IT transformation through the digitalization of systems that not only keep pace with technological advancements but also streamline the Company's business processes, ensuring efficiency, effectiveness, time savings, real-time and transparent transactions, as well as cost efficiency toward the realization of a digital port era.

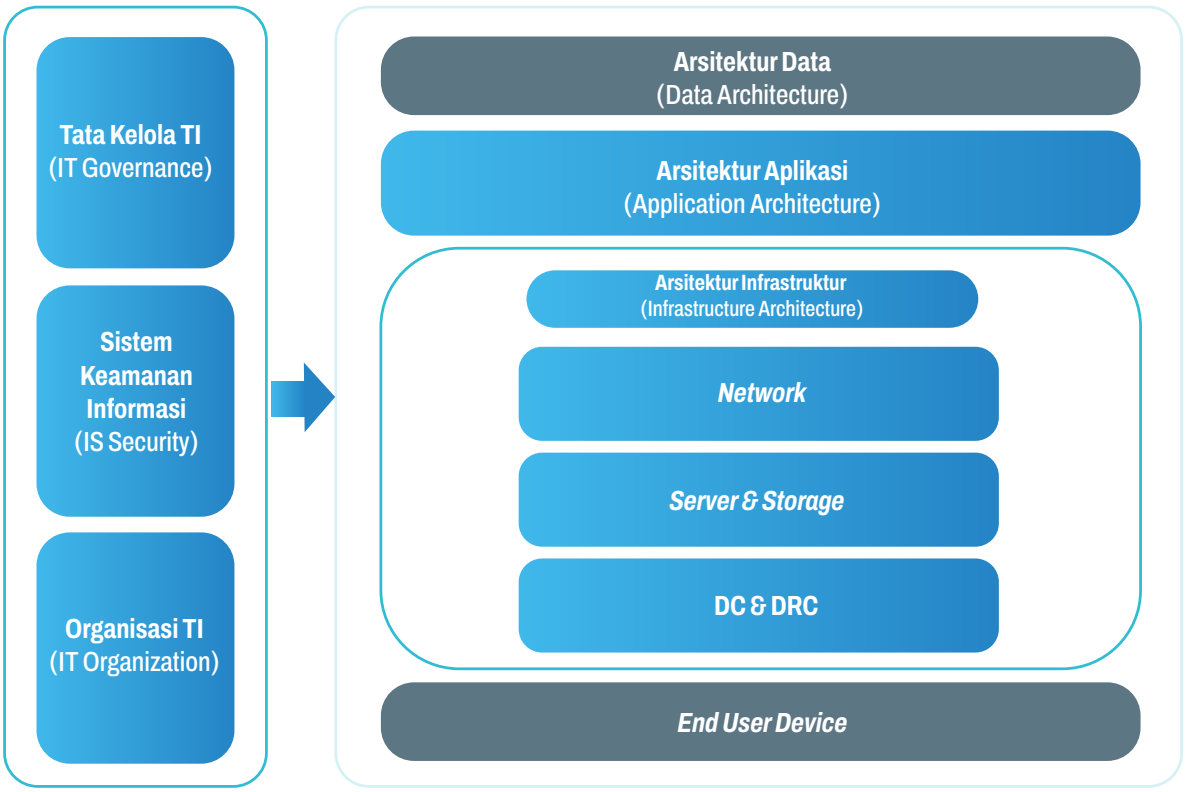
ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

Untuk memperkuat aspek Teknologi Informasi PTP Terminal Nonpetikemas, Perusahaan telah membuat *roadmap* pengembangan TI periode 2020-2024. *Roadmap* tersebut menjadi acuan bagi Perusahaan dalam penyusunan program kerja dan investasi agar efektif dan efisien serta lebih terarah dan tepat sasaran. *Roadmap* ini disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan implementasi teknologi informasi dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimal.

Rancangan rencana dan dokumen arsitektur dan tata kelola Digital *Roadmap* Teknologi Informasi terdiri atas Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Jaringan, Arsitektur *Server-Storage*, Arsitektur DC-DRC, Arsitektur *End User Device*, Tata Kelola TI, Sistem Keamanan Informasi dan Organisasi TI yang dalam Digital *Roadmap* tersebut, Teknologi Informasi diharapkan terus dapat berkembang dan menjadi *enablers* bagi bisnis Perusahaan yang dapat memberikan nilai lebih bagi pelayanan kepada seluruh *Stakeholders* dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien.

In strengthening the PTP Terminal Nonpetikemas Information Technology capabilities, the Company has developed an IT Development Roadmap for the 2020–2024 period. The roadmap serves as a reference for the formulation of work programs and investment planning to ensure effectiveness, efficiency, and well targeted. The roadmap was developed with careful consideration of various contextual, situational, and environmental factors to ensure the effective and efficient achievement of the Company's IT implementation goals.

The architecture and governance plan outlined in the Digital Information Technology Roadmap includes Data Architecture, Application Architecture, Network Architecture, Server-Storage Architecture, DC-DRC Architecture, End User Device Architecture, IT Governance, Information Security Systems, and IT Organizational Structure. Through this roadmap, Information Technology is expected to continue evolving and serve as a business enabler for the Company that deliver added value to Stakeholders by providing effective and efficient services.



FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2024
FOCUS OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2024

Sesuai dengan *Roadmap* Teknologi Informasi PTP Terminal Nonpetikemas 2020-2024, fokus pengembangan Teknologi Informasi tahun 2024 adalah Tata Kelola TI (*IT Governance*), Sistem Keamanan Informasi (*IT Security*) dan Organisasi TI (*IT Organization*),

Pada tahun 2024, Divisi Sistem Informasi melakukan beberapa program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi sebagai berikut:

Pemeliharaan dan Perawatan:

1. Telah dilakukan perawatan *end user devices* dan perangkat keras jaringan di seluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Telah dilakukan perawatan sistem *monitoring* operasional di seluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok yang didukung dengan teknologi *Closed-Circuit Television* (CCTV).
3. Telah dilakukan proses pengadaan pekerjaan manage *operation support* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam bentuk penempatan personal *engineer on site* (EOS) diseluruh wilayah operasi kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Telah dilakukan *monitoring* dan pengendalian terhadap sistem operasional maupun sistem pendukung di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam bentuk penempatan personal *engineer on site* (EOS) serta *IT helpdesk support* untuk dokumentasi dan perbaikan kendala yang terjadi pada sistem.

Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi

1. Pekerjaan pengadaan perangkat TI untuk mendukung penyediaan layanan *backup* Sistem Informasi di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak.
3. Pekerjaan pengadaan perangkat pendukung TI di Terminal Internasional PTP Cabang Tanjung Priok dalam mendukung terlaksananya transformasi dan standarisasi pola operasi serta implementasi aplikasi PTOS-M.
4. Pekerjaan standarisasi *software endpoint protection* berbasis teknologi XDR.
5. Pekerjaan ATS Perangkat *Network Security* guna menjamin fungsi dan fitur Perangkat *Network Security* PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap dapat digunakan untuk mendukung proses kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan normal.
6. Pengadaan dan Pemasangan CCTV di Ruang *Planning* & *Control* Cabang-Cabang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka *monitoring* kesiapan kegiatan operasional.
7. Pengadaan *Handheld* sebagai perangkat penunjang kegiatan tally di dermaga dan di lapangan guna mendukung kelancaran implementasi PTOS-M di area Terminal Internasional PTP Cabang Tanjung Priok.
8. Penambahan Lisensi *Milestone Pro Plus* untuk meningkatkan kapasitas dan integrasi CCTV di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok agar CCTV yang baru terpasang dapat terintegrasi ke dalam satu sistem dan tersentralisasi sehingga dapat dipantau secara langsung dari Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok.

In line with the PTP Terminal Nonpetikemas Information Technology Roadmap 2020–2024, the 2024 focus areas for IT development were IT Governance, Information Security Systems, and IT Organization.

Throughout 2024, the Information Systems Division implemented several initiatives for the management and development of Information Technology, including:

Maintenance and Service:

1. Maintenance of end-user devices and network hardware across all PT Pelabuhan Tanjung Priok operational areas.
2. Maintenance of operational monitoring systems supported by Closed-Circuit Television (CCTV) across all operational regions of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Procurement of managed operation support services in the PT Pelabuhan Tanjung Priok's environment through on-site engineer (EOS) placements across all operational areas of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Ongoing monitoring and control of both operational and supporting systems in the PT Pelabuhan Tanjung Priok environment in the form of on-site engineer (EOS) placements and IT helpdesk support for documentation and issue resolution.

Information System Infrastructure Development:

1. Procurement of IT devices to support the Information System backup service in the PT Pelabuhan Tanjung Priok's environment.
2. IT infrastructure Enhancement at Kijing Port , PTP Pontianak Branch.
3. Procurement of IT support equipment at the International Terminal of PTP Tanjung Priok Branch to support the implementation of operational transformation and standardization, as well as the deployment of the PTOS-M application.
4. Standardization of endpoint protection software using XDR-based technology.
5. ATS for Network Security Devices to ensure that the functions and features of PT Pelabuhan Tanjung Priok's network security systems remain operational and fully support seamless and normal operational activities.
6. CCTV procurement and installation in Planning & Control Rooms at branch offices managed by PT Pelabuhan Tanjung Priok in monitoring operational readiness.
7. Procurement of Handheld devices to support tally activities at wharf and yards in support of PTOS-M implementation at the PTP International Terminal, Tanjung Priok.
8. Additional Milestone Pro Plus licenses to increase CCTV capacity and integration across PT Pelabuhan Tanjung Priok, enabling newly installed CCTV systems to be centralized into a unified monitoring system accessible from the PT Pelabuhan Tanjung Priok Head Office.

9. Penambahan HDD *Server Storage* PT Pelabuhan Tanjung Priok guna mengakomodir kebutuhan pembangunan aplikasi-aplikasi *inhouse* yang dibangun dan dikembangkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.
10. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI untuk Pengoperasian Dermaga Ketapang di PTP Cabang Pangkal Balam.
11. Pekerjaan Pengadaan Perangkat TI & Penarikan Kabel FO untuk Pengoperasian Dermaga Ketapang di PTP Cabang Pangkal Balam.
12. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Announcer* di Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak.
13. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Announcer* di PTP Cabang Pangkal Balam.
14. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Announcer* di PTP Cabang Cirebon.
15. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Announcer* di Dermaga Inggom PTP Cabang Tanjung Priok.
16. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Public Announcer* di PTP Cabang Tanjung Pandan.
17. Pekerjaan *Enhancement* Perangkat Infrastruktur TI dalam rangka optimalisasi pengoperasian gate Line 1 di PTP Cabang Banten.
18. Penyediaan *backup link* internet Pelabuhan Kijing PTP Cabang Pontianak sebagai *mitigation plan* apabila *main link* internet mengalami gangguan sehingga koneksi internet untuk kebutuhan kegiatan *back office* maupun kegiatan operasional dapat tetap berjalan dengan normal.

Pengembangan Sistem Aplikasi

1. Implementasi dan Stabilisasi *Single* ERP SAP.
2. Implementasi Aplikasi *Dashboard* HSSE.
3. Implementasi Aplikasi *Manpower Planning* dan *Berthing Map*.
4. Implementasi Aplikasi Inovasi *e-Magang* (MAGNIT).
5. Implementasi Aplikasi Inovasi *e-ISO* (AIA).
6. Implementasi Aplikasi SIMOP Barang untuk wilayah kerja STS Bunati.
7. Implementasi Sentralisasi *IT Service Desk* Pelindo.
8. Implementasi Sistem Aplikasi PTOS-M pada wilayah Cabang Tanjung Priok untuk kegiatan *Ocean Going*.
9. Implementasi *Change Request* Penambahan *Footer* pada Pranota.
10. Implementasi *Change Request* PTOS-M untuk kegiatan di Luar Wilayah Kerjasama Pelindo.
11. Implementasi *Change Request* Pemadanan NPWP menjadi 16 digit.
12. Implementasi *Change Request* Penambahan Porsi Konsesi PBM Mitra *Clustering* pada Tagihan Nota.
13. Implementasi *Change Request* Penyesuaian Tarif PPN menjadi 12%.
14. Implementasi *Change Request* Aplikasi *Locking* Piutang.

Pengembangan *IT Strategic & Governance*

1. Pekerjaan Penyusunan *IT Master Plan* PT Pelabuhan Tanjung Priok periode 2025-2029.
2. Pekerjaan *IT Maturity Level Assessment* PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024.

9. Additional HDD server storage for PT Pelabuhan Tanjung Priok to accommodate the development needs of in-house applications built and developed by the PT Pelabuhan Tanjung Priok.
10. IT infrastructure Enhancement for the operation of Ketapang Wharf at PTP Pangkal Balam Branch.
11. Procurement of IT equipment and FO cable installation to support the operation of Ketapang Wharf at PTP Pangkal Balam Branch.
12. Procurement and installation of Public Announcers at the Kijing Port, PTP Pontianak Branch.
13. Procurement and installation of Public Announcers at the PTP Pangkal Balam Branch.
14. Procurement and installation of Public Announcers at the PTP Cirebon Branch.
15. Procurement and installation of Public Announcers at the Inggom Wharf, PTP Tanjung Priok Branch.
16. Procurement and installation of Public Announcers at the PTP Tanjung Pandan Branch.
17. Enhancement of IT infrastructure for gate Line 1 operation optimization at PTP Banten Branch.
18. Provision of a backup internet link at Kijing Port (PTP Pontianak Branch) as a mitigation plan in case of disruption to the main link, ensuring uninterrupted internet connectivity for both back-office and operational activities.

Application System Development:

1. Implementation and Stabilization of SAP Single ERP.
2. Implementation of the HSSE Dashboard Application.
3. Implementation of the Manpower Planning and Berthing Map Application.
4. Implementation of the e-Magang Innovation Application (MAGNIT).
5. Implementation of the e-ISO Innovation Application (AIA).
6. Implementation of SIMOP Goods Application at STS Bunati.
7. Implementation of centralized IT Service Desk for Pelindo.
8. Implementation of the PTOS-M system at Tanjung Priok Branch for Ocean-Going operations.
9. Change Request implementation for footer addition on Pranota.
10. Change Request implementation for PTOS-M in non-Pelindo partnership areas.
11. Change Request Implementation for NPWP adjustment to 16 digits.
12. Change Request Implementation for concession portion addition PBM Mitra Clustering on billing notes.
13. Change Request Implementation for VAT rate adjustment to 12%.
14. Implementation of Change Request for the Accounts Receivable Locking Application.

IT Strategy & Governance Development:

1. Preparation of the IT Master Plan for PT Pelabuhan Tanjung Priok for the period 2025–2029.
2. Execution of the IT Maturity Level Assessment for PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2024.

PROGRAM STRATEGIS TI 2024
2024 STRATEGIC IT PROGRAMS

Perusahaan senantiasa melakukan inovasi guna meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman pengguna yang baik bagi setiap unit bisnis. Perusahaan berusahaan memberi *support* dengan menyediakan aplikasi (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan beragam infrastruktur untuk mendorong kinerja yang terbaik.

Berikut adalah program strategis teknologi informasi di sepanjang tahun 2024:
1. Implementasi Sistem ERP SAP
2. Pengembangan Sistem TI
3. Pengadaan Perangkat TI di Kantor Pusat dan Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok

The Company continuously pursues innovation to enhance service quality and deliver a positive user experience across all business units. The Company supports these efforts by providing software applications, hardware, and a wide range of infrastructure to drive optimal performance.

The following are the key strategic information technology programs throughout 2024:
1. Implementation of the SAP ERP System
2. IT System Development
3. Procurement of IT Equipment for the Head Office and Branch Offices of PT Pelabuhan Tanjung Priok

INVESTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT

Implementasi TI pada bisnis PTP Terminal Nonpetikemas menjadi katalis bagi Perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk mendukung tujuan tersebut. Pada tahun 2024, nilai investasi TI yakni sebesar Rp2,5 Miliar. Hal ini merupakan gambaran komitmen manajemen untuk menjadikan TI sebagai landasan keberlanjutan bisnis Perusahaan di masa yang akan datang.

The implementation of IT within PTP Terminal Nonpetikemas' business operations serves as a catalyst for enhancing the Company's competitiveness. In support of this objective, the Company allocated a dedicated budget. In 2024, total investment in IT amounted to Rp2.5 Billion reflecting management's strong commitment to positioning IT as the foundation for future business sustainability.

RENCANA PENGEMBANGAN TI TAHUN 2025
IT DEVELOPMENT PLAN FOR 2025

Perusahaan merencanakan program kerja tahun 2025 sebagai usaha dalam memaksimalkan sistem teknologi yang dimiliki. Rencana program kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas infrastruktur TI untuk mendukung peningkatan kinerja operasional serta menjamin keamanan data Perusahaan, meliputi :
   a. Penambahan jalur kabel FO (*Fiber* Optik) dan penambahan kapasitas fasilitas pendukung *Data Center* TO 1;
   b. Pengadaan Perangkat Pendukung *Security Operation Center* (SOC);
2. Implementasi pengembangan sistem aplikasi untuk mendukung kinerja operasional, meliputi :
   a. Implementasi Ide inovasi terkait BPP;
   b. Implementasi *Berthing Allocation* MAP (BA MAP);
   c. Pengembangan *Dashboard* Keuangan.

The Company prepares 2025 Work Plan as effort to maximize the technology system owned. The aforementioned Work Plans are as follow:
1. Enhancement of IT infrastructure to support work performance improvement as well as safeguarding the Company Data, including:
   a. Addition of FO (Fiber Optic) Cable Network and addition of Data Center TO 1 supporting facilities;
   b. Procurement of Security Operation Center (SOC) Supporting Facilities;
2. mplementation of system development on the application to support the work performance, including:
   a. Implementation of Idea Innovation on BPP;
   b. Implementation of Berthing Allocation MAP (BA MAP);
   c. Implementation of Financial Dashboard.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Tata Kelola Teknologi Informasi memastikan seluruh penggunakan TI berjalan efektif dan efisien disetiap aktivitas Perusahaan. Selain itu juga Tata Kelola Teknologi Informasi dapat menetapkan strategi risiko, identifikasi ancaman, analisis, menentukan tingkat risiko dan memberikan rekomendasi.

Mengacu pada Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Tanjung Priok yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024, Teknologi Informasi Perusahaan diarahkan untuk menjadi tulang punggung dalam menjalankan aktivitas operasi Perusahaan yang terkoneksi dengan dunia international, dengan:

1. Pengelolaan Teknologi Informasi dimaksudkan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional ataupun strategi bisnis Perseroan;
2. Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Perseroan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola TI paling sedikit mencakup :
    a. Prinsip Manajemen;
    b. Prinsip Data dan Informasi;
    c. Prinsip Teknologi;
    d. Prinsip Keamanan Teknologi Informasi
3. Pengelolaan teknologi informasi, meliputi:
    a. Proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan manajemen Perusahaan.
    b. Proses penyediaan infrastruktur pendukung berupa pusat data (*data center*), media komunikasi, dan perangkat pengguna.
    c. Layanan teknologi informasi di lingkungan Perseroan berdasarkan prinsip dan komitmen yang telah disepakati.
4. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.
5. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan yang berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi dengan tetap menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.
6. Untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi Perusahaan, fungsi teknologi informasi berusaha menerapkan kendali proses berdasarkan konsep dan standar tata kelola TI (*IT Governance*) yang baik.
7. Direksi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola Perusahaam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Perusahaan telah menyusun kebijakan dan pedoman terkait pengelolaan teknologi informasi, yaitu:

1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/9/3/PTP-22 tanggal 6 September 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem dan Perangkat Teknologi Informasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/9/1/PTP-22 tanggal 6 September 2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Sistem Informasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Information Technology governance ensures that all IT activities across the Company operate effectively and efficiently. In addition, Information Technology Governance enables the establishment of risk strategies, threat identification, analysis, risk assessment, and the provision of recommendations.

Referring to the PT Pelabuhan Tanjung Priok Good Corporate Governance Guidelines, as last amended under the Board of Directors Regulation No. SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated September 13, 2024, the Company's Information Technology serves as a backbone for operations connected to the global environment. It includes:

1. Information Technology management to support all operational and strategic business activities of the Company;
2. The implementation of the Company's Information Technology Governance takes into account IT Governance principles, which at a minimum include the following:
    a. Management Principles;
    b. Data and Information Principles;
    c. Technology Principles;
    d. Information Technology Security Principles
3. Information technology management activities include:
    a. Planning, development, operation, and control processes of information technology to meet Company operational and management needs;
    b. Provision of supporting infrastructure such as data centers, communication media, and end-user devices;
    c. Information technology services within the Company based on agreed principles and commitments.
4. Building information technology with strategic value to support the delivery of competitive and high-quality Company products or services.
5. Considering the benefits of information technology investment in terms of cost efficiency and accessibility of information, while maintaining confidentiality, integrity, and availability.
6. Provide the greatest benefit to the Company, the information technology function seeks to implement process controls based on sound IT governance concepts and standards.
7. The Board of Directors is obliged to protect and ensure the security of personal data managed by the Company in compliance with data protection regulations.

The Company has established policies and guidelines for IT management, including:

1. Board of Directors Regulation No. HK.55/6/9/3/PTP-22 dated September 6, 2022, on Guidelines for Information Technology Systems and Device Management within PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Board of Directors Regulation No. HK.55/6/9/1/PTP-22 dated September 6, 2022, on Guidelines for Information System Security Management within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Implementasi yang dilakukan berdasarkan strategi pengelolaan tersebut antara lain:

1. Prosedur Pengelolaan Operasional Perangkat Sistem Informasi;
2. Prosedur Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
3. Prosedur Keamanan Sistem Informasi.

Pengelola Teknologi Informasi

PTP Terminal Nonpetikemas memiliki Divisi Sistem Informasi. *Senior Manager* membawahi Divisi Sistem Informasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi. Divisi Sistem Informasi dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan TI di lingkungan Perusahaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi setiap program yang telah dijalankan selain itu juga divisi ini juga bertanggungjawab atas setiap aktivitas yang dijalankan dan direncanakan terkait Teknologi Informasi.

Dalam merealisasikan Visi dan Misi Perusahaan Divisi Sistem Informasi berusaha terus mengikuti dan melaksanakan perkembangan Teknologi Informasi dalam menunjang produktivitas kerja Perusahaan yang optimal, kompeten dan terintegrasi dengan baik.

Implementation based on these management strategies includes:

1. Operational Procedures for Information System Devices;
2. Information System Planning and Development Procedures;
3. Information System Security Procedures.

Information Technology Management

PTP Terminal Nonpetikemas has Information System Division and directly responsible yo the Director of Operations. The Information System Division is established to implement IT management and development in the Company starting by planning to evaluation of every program implemented. In addition, the Division also responsible to every activity conducted and planned in relation to Information Technology.

In realizing the Company Vision and Mission the Information System Division always keep up and perform Technology Information development to support the productivity of the Company that is optimal, competent, and well integrated.

PROFIL SENIOR MANAGER SISTEM INFORMASI
SENIOR MANAGER OF INFORMATION SYSTEMS PROFILE

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mengangkat Meirisal Dwi Waldi sebagai *Senior Manager* Sistem Informasi. Profil Meirisal Dwi Waldi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan sub bab Pejabat Eksekutif.

In 2024, the Company appointed Meirisal Dwi Waldi as Senior Manager of Information Systems. Further details on Meirisal Dwi Waldi's profile can be found in Chapter Company Profile, under the Executive Officers subsection.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI SISTEM INFORMASI
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION SYSTEMS DIVISION

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Sistem Informasi memiliki wewenang penuh untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan *monitoring* Teknologi Informasi Perusahaan untuk pengembangan/pengadaan Sistem Informasi proyek strategis dan non-strategis.

Fungsi serta tugas Divisi Sistem Informasi berada dalam tanggung jawab *Senior Manager* yang dibantu oleh ASM Dukungan Sistem dan ASM Pengembangan dan Pemeliharaan *Hardware*. Adapun fungsi serta tugas yang dimiliki *Senior Manager* antara lain:

Fungsi :

Bertanggung jawab untuk memastikan rencana dan program kerja sebagai berikut:

In fulfilling its roles and responsibilities, the Information Systems Division holds full authority to plan, implement, and monitor the Company's Information Technology operations related to the development/procurement of Information Systems for both strategic and non-strategic projects.

The division's functions and duties fall under the responsibility of the Senior Manager, supported by the ASM for System Support and the ASM for Hardware Development and Maintenance. The roles and responsibilities of the Senior Manager include:

Functions:

Responsible for ensuring the planning and execution of the following work programs:

1. Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan hubungan sistem serta pengembangan dan pemeliharaan *hardware*.
2. Menyusun kebijakan terkait dengan perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan manajemen sistem informasi di Perseroan.
3. Mengembangkan teknologi dalam manajemen sistem informasi.
4. Melakukan pengamanan dan keamanan manajemen sistem informasi.
5. Menyusun arsitektur pengembangan manajemen sistem informasi dalam rangka mengantisipasi disrupsi dan mendorong program digitalisasi di Perseroan.
6. Mengoordinasikan dan menghubungkan manajemen sistem informasi Perseroan dengan kebijakan ataupun sistem informasi *stakeholders*.

Tugas:

1. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang dukungan sistem serta pengembangan dan pemeliharaan *hardware* dalam mendukung proses bisnis Perseroan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja dan anggaran bidang dukungan sistem serta pengembangan dan pemeliharaan *hardware* dalam mendukung proses bisnis Perseroan berdasarkan hasil putusan Direksi.
3. Melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap:
   a. Usulan *IT Master Plan* termasuk rencana pengembangan sistem informasi baik *software* ataupun *hardware* untuk mendukung proses bisnis Perseroan.
   b. Usulan *IT Governance* yang terdiri dari: panduan proses TI, rencana strategis, kebijakan TI, kelengkapan SOP TI, *Framework Quality Assurance* dan SLM *System*.
   c. Hasil analisis aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung proses bisnis Perseroan.
   d. Hasil analisis kebutuhan Perseroan terhadap pengembangan sistem informasi ataupun kebutuhan terhadap penambahan *hardware*.
   e. Hasil evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang telah digunakan.
   f. Integrasi data dan informasi di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Merekomendasikan terhadap:
   a. Usulan strategi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.
   b. Usulan *architecture* pelaksanaan pengembangan dan pengoperasian sistem dalam rangka mendorong program digitalisasi dalam Perseroan.
5. Melakukan *monitor* terhadap:
   a. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran bidang Sistem Informasi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
   b. Implementasi strategi dan/atau peraturan Perusahaan terkait bidang Sistem Informasi.
6. Mengoordinasikan terhadap pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan bidang teknologi informasi di korporat.
7. Tugas lain yang terkait:
   a. Sharing knowledge terhadap pekerjaan atau bidangnya melalui media komunikasi dan pembelajaraan Perusahaan berupa media cetak dan digital.
   b. Merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan RKA/RKM dan pelaporan bidangnya,

1. Develop policies, Standard Operating Procedures (SOPs), work programs, and Key Performance Indicators (KPIs) related to systems integration and hardware development and maintenance.
2. Formulate policies concerning the planning, implementation, control, and supervision of information system management within the Company.
3. Advance technology within the scope of information system management.
4. Ensure security and protection of information system management.
5. Design information system architecture to anticipate disruption and promote digitalization programs within the Company.
6. Coordinate and align the Company's information systems with the policies and systems of stakeholders.

Duties:

1. Formulate and propose work programs and budget plans related to system support and hardware development and maintenance to support the Company's business processes in the PT Pelabuhan Tanjung Priok environment.

2. Make decisions regarding the implementation of work programs and budget plans for system support and hardware development, based on decisions made by the Board of Directors.

3. Conduct reviews and evaluations of:
   a. IT Master Plan proposals, including development plans for software and hardware to support business processes of the Company.
   b. IT Governance proposals, including IT process guidelines, strategic plans, IT policies, SOP completeness, QA Framework, and SLM systems.
   c. Application analysis outcomes related to business process support of the Company.
   d. Company's needs analysis outcomes regarding information system development or hardware upgrade requirements.
   e. Evaluation outcomes of the implementation of existing information technology.
   f. Data and information integration within the environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Provide recommendations regarding:
   a. Proposal for Information system management and development strategies.
   b. Proposal for Architectural frameworks for system development and operation to support the Company's digital transformation initiatives.
5. Monitor the following:
   a. Realization of work programs and alignment of Information Systems budget management with the previously approved budget.
   b. Implementation of strategies and/or company regulations related to Information Systems.
6. Coordination of Information Technology development, control, and maintenance at the corporate level.
7. Other responsibilities include:
   a. Sharing knowledge related to their area of expertise through internal communication and learning platforms of the Company in the form of print and digital media.
   b. Planning, coordinating, and managing the preparation of the division's budget and reports, as well as implementing

penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen.
c. Memelihara dan mengawasi aset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya.
d. Mengidentifikasi dan mengelola risiko masing-masing bidangnya.
e. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan secara taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta memberikan input terkait sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*).
f. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya.
g. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan apabila terdapat permintaan dari pihak eksternal/internal.
h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait sesuai kebijakan Direksi.
j. Memeriksa dokumen pengadaan.
k. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja.
l. Mengusulkan rencana penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

management information systems and procedures.
c. Maintaining and supervising assets and inventories under their responsibility.
d. Identifying and managing risks within their area.
e. Ensuring compliance to corporate governance (GCG and best practices) in all activities and providing input for continuous improvement of systems and procedures.
f. Following up on and/or guiding audit findings within their area of responsibility.
g. Providing the required data and information in accordance with applicable regulations upon request from internal/external parties.
h. Coaching, directing, and evaluating subordinate performance.
i. Carrying out other related duties as assigned by the Board of Directors.
j. Reviewing procurement documents.
k. Ensuring occupational health and safety in the work environment.
l. Proposing document archiving plans in accordance with applicable regulations.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SERTIFIKASI SDM TI
IT HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND CERTIFICATION PROGRAM

Perusahaan memiliki program pengembangan dan sertifikasi SDM TI sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi. PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi seluruh pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama. Berikut adalah program pengembangan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sistem Informasi.

The Company has established IT HC Development and Certification Programs as part of its commitment to enhancing the skills and capabilities of its HC in the field of Information Technology. PTP Terminal Nonpetikemas is committed to fostering employee competencies by providing equal opportunities for all personnel. Below is a list of development and certification programs that have been implemented by the Information Systems Division.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Pelatihan Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Meirisal Dwi Waldi SM Sistem Informasi SM Information Systems	Internal Audit ISO 37001:2016	ISO 37001:2016	Jakarta/ Agustus 2021 Jakarta/August 2021	3 CEM
	Change Management	*Change Management*	Jakarta/Agustus 2022 Jakarta/August 2022	*International Business Management Institute*
	Project Management	*Change Management*	Jakarta/Agustus 2022 Jakarta/August 2022	*International Business Management Institute*
	Leadership and Team Development	*Leadership and Team Development*	Jakarta/Agustus 2022 Jakarta/August 2022	*International Business Management Institute*
	Risk Management	*Risk Management*	Jakarta/Agustus 2022 Jakarta/August 2022	*International Business Management Institute*
	Project Manager Accredited Certification	*Project Management*	Jakarta/ Maret 2022 Jakarta/March 2022	104PM
	Certified Professional Project Manager (CPPM)	*Project Management*	Jakarta/ Desember 2021 Jakarta/December 2021	IEEEL

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Pelatihan Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Meirisal Dwi Waldi SM Sistem Informasi SM Information Systems	*Digital Transformation Roadmap For Businesses*	*Digital Transformation Roadmap For Businesses*	Jakarta/ Agustus 2023 Jakarta/August 2023	Udemy
	Certified Ethical Hacker (CEH)	*Infomation System Security*	Jakarta/ 2016	Global *Knowledge*
	Cisco	*Certified Network Associate Routing and Switching* (CCNA)	Jakarta / 2012	Cisco
Amie Maulana ASM Pemeliharaan & Pengembangan Hardware Hardware ASM Hardware Maintenance & Development	NSE 1 *Network Security Associate*	*The Threat Landscape*	Makassar/ Mei 2020 Makassar/May 2020	Fortinet
	NSE 2 *Network Security Associate*	*The Evolution of Cybersecurity*	Makassar/ Mei 2020 Makassar/May 2020	Fortinet
	VMWare	*VSPhere Install Manage V5.5*	Makassar/September 2016 Makassar/September 2016	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
	Cisco	*Certified Network Associate Routing and Switching* (CCNA)	Yogyakarta/Oktober 2024 Yogyakarta/October 2024	Cisco
	Mikrotik	*Certified Network associate*	Makassar/November 2012 Makassar/November 2012	Mikrotik
	Public Training	*Certified Enterprise Architecture Associate*	Jakarta/Desember 2023 Jakarta/December 2023	Dilatih.co
	SAP	*Certified Technology Associate – SAP System Administration with SAP NetWeaver 7.5* (Delta)	Makassar/November 2020 Makassa/November 2020	PT Astra Graphia Information Technology (AGIT)
Rizky Delfianto ASM Dukungan Sistem ASM System Support	*Happy Digital X*	*Cities, Systems, Products & Services*	Jakarta, Bali/2023	Tsinghua Southeast Asia Center
	Leading Business for Port Industry		2022	Singapore Management University/Singapore, Bogor (*Hybrid Online*)
	Artificial Intelligence and Machine Learning	*Strategies and Frameworks for Decision-Making*	Jakarta/15 Desember 2021 - 02 Maret 2022 (8 minggu) Jakarta/December 15, 2021 March 02, 2022 (8 Weeks)	Singapore Management University/Singapore, Jakarta (*Online*)
	Data Management dan Governance		Jakarta/2021	Inixindo/Jakarta (*Online*)
	webMethods 10.1 Certified Integration Developer		Jakarta/2020	Software AG/Singapore, Jakarta (*Online*)

KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER
CYBER RESILIENCE AND SECURITY

Perusahaan menyadari bahwa layanan bersifat penting dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Sehingga adanya gangguan pada layanan serta kerentanan dan kebocoran informasi/data pelanggan dari layanan tersebut merupakan hal yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen melindungi informasi/data pelanggan dengan mendukung peningkatan keamanan layanan dari serangan dan gangguan siber. Keamanan informasi yang andal, akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

The Company recognizes that service delivery plays a critical role in creating added value for customers and stakeholders. Therefore, service disruptions, information security vulnerabilities, or customer data breaches are unacceptable. In response, the Company is fully committed to protecting customer information and data by enhancing service security against cyber threats and disruptions. A robust information security system is essential for building customer trust in the Company's electronic systems for public services.

Sesuai perkembangan digitalisasi dan tren perkembangan serangan siber, Perusahaan telah telah memberlakukan standar tentang manajemen keamanan sistem informasi, yang mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga. Standar tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/8/2/4/PTP-21 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Sistem Informasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pedoman tersebut diberlakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan sistem teknologi informasi dan keamanan sistem informasi dalam menunjang kegiatan operasional Perusahaan. Standar tersebut mencakup, antara lain:

1. Tanggung jawab umum;
2. Pengendalian organisasi keamanan informasi dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal Perusahaan yang terkait dengan keamanan informasi;
3. Pengendalian pengelolaan aset informasi di setiap Unit Pengelola Sistem Informasi bertanggung jawab terhadap keamanan aset informasi yang meliputi Identifikasi aset informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset informasi dan menetapkan aset informasi yang terkait dengan perangkat pengolah informasi;
4. Pengendalian keamanan informasi dari aspek sumber daya manusia;
5. Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan;
6. Pengendalian pengelolaan operasional;
7. Pengendalian akses;
8. Pengendalian keamanan informasi dalam pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi;
9. Pengendalian pengelolaan gangguan keamanan informasi;
10. Pengendalian keamanan informasi dalam pengelolaan keberlangsungan proses bisnis;
11. Pengendalian kepatuhan;
12. Pengendalian Hak Akses.

Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi

Prosedur *Disaster Recovery Plan* adalah prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan atau kelanjutan dari infrastruktur teknologi yang vital bagi Perusahaan setelah terjadinya bencana baik karena faktor alam maupun disebabkan manusia. Ketentuan–ketentuan dalam membangun prosedur *Disaster Recovery Plan* (DR *Plan*) antara lain:

1. Prosedur DR *Plan* dikembangkan dan disusun oleh Divisi Sistem Informasi mengacu kepada kebijakan *Disaster Recovery Plan* yang telah diatur pengelolaannya pada Pedoman Manajemen Risiko dan *Business Continuity Management* (BCM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Prosedur DR *Plan* mencakup layanan TI yang dinilai kritikal dalam mendukung bisnis dan operasional unit kerja kritikal berdasarkan hasil *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA) serta penilaian kritikalisasi setiap sistem aplikasi.
3. Komponen Prosedur DR *Plan* sekurang–kurangnya mencakup:
   a. Konfigurasi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
   b. *Backup* dokumentasi, sistem dan data;
   c. Skenario kejadian bencana;
   d. Prosedur pemulihan berdasarkan skenario;
   e. Fasilitas Komunikasi;

In line with ongoing digitalization trends and the rising complexity of cyberattacks, the Company has adopted a standard for Information Security Management, which governs the protection of data confidentiality, integrity, and availability. The standard is outlined in the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/8/2/4/PTP-21, dated February 8, 2021, on Information Security Management Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok's environments.

These guidelines are enforced to ensure the continuity of information technology services and information system security in support of the Company's operations. The standard encompasses, among others:

1. General responsibilities;
2. Organizational control of information security may involve collaboration with external parties related to the Company's information security;
3. Controls over information asset management require each Information System Management Unit to be responsible for the security of information assets, including identifying such assets, documenting them in an information asset inventory list, and designating assets associated with information processing devices;
4. Human resource-related information security controls;
5. Physical and environmental security controls;
6. Operational management controls;
7. Access controls;
8. Information security controls in the procurement, development, and maintenance of information systems;
9. Incident management controls for information security breaches;
10. Information security control in managing business process continuity;
11. Compliance controls;
12. Access rights controls.

Information Technology Service Continuity

The Disaster Recovery Plan (DRP) procedure refers to the process of preparing for the recovery or continuation of the Company's critical technology infrastructure following a disaster, whether caused by natural events or human factors. The key provisions in establishing a Disaster Recovery Plan (DR Plan) include the following:

1. The DR Plan procedure is developed and prepared by the Information Systems Division, referring to the Disaster Recovery Plan policy as regulated under the Risk Management and Business Continuity Management (BCM) Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. The DR Plan procedure covers IT services deemed critical in supporting business operations and key work units, based on the results of a Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), and criticality assessments for each application system.
3. The components of the DR Plan procedure include, at a minimum:
   a. Configuration of hardware and software;
   b. Backup of documentation, systems, and data;
   c. Disaster event scenarios;
   d. Recovery procedures based on the scenarios;
   e. Communication facilities;

f. Tim penanganan gangguan TI yang terdiri dari karyawan yang kompetensi khusus dibidangnya masing–masing.

Proses governansi terkait ketahanan dan keamanan Teknologi Informasi di Perusahaan mencakup identifikasi, pengelolaan, dan pelaporan risiko-risiko utama, termasuk gangguan (*disruption*), keamanan dunia maya (*cyber security*) dan pemulihan bencana (*disaster recovery*) kepada Direksi.

Potensi terjadinya kerusakan, gangguan atau tidak berfungsinya infrastruktur teknologi informasi dikarenakan ha-hal yang tidak dapat dihindari dan diprediksi dapat memiliki dampak serius terhadap operasional Perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Perusahaan untuk memiliki strategi yang memadai untuk mengatasi dan meminimalkan dampak dari gangguan tersebut. Pemulihan bencana juga merupakan aspek krusial dalam tata kelola TI, di mana Perusahaan harus memiliki rencana yang terstruktur untuk memulihkan sistem dan data dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kegagalan sistem. Dengan adanya proses tata kelola yang kuat, Perusahaan dapat mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan siber.

Dengan menerapkan proses tata kelola yang efektif terkait dengan isu-isu ini, Perusahaan dapat memastikan bahwa risiko-risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Direksi, sehingga meminimalkan potensi dampak negatif terhadap operasional dan reputasi Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menekankan efektivitas penerapan *cyber security*.

Pengelolaan Data

PTP Terminal Nonpetikemas telah memiliki tim yang bertanggung jawab dalam menerapkan program-program perlindungan data. Perusahaan melakukan pengelolaan data dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan secara internal. Standar mengenai manajemen keamanan sistem informasi berlaku untuk pengelolaan pengamanan seluruh informasi Perusahaan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Perusahaan baik di Kantor Pusat maupun di Cabang – Cabang Perusahaan, demikian juga pihak ketiga baik sebagai pengelola dan/atau pengguna TI.

Perseroan menerapkan secara konsisten proses tata kelola yang baik. Setiap permintaan terhadap data diajukan melalui dokumen resmi Perusahaan yang divalidasi oleh unit terkait dan dievaluasi Sistem Informasi dengan tujuan meminimalisir dan mencegah risiko penyalahgunaan data. Eksekusi terhadap pemberian data dilakukan oleh personil Sistem Informasi kepada *user* yang disertai dengan penandatanganan formulir kerahasiaan data.

f. An IT Incident Response Team composed of employees with specialized competencies in their respective fields.

The Company's governance process for cyber resilience and security includes identifying, managing, and reporting key risks, including disruptions, cybersecurity threats, and disaster recovery, to the Board of Directors.

The potential for damage, disruption, or malfunction of information technology infrastructure due to unforeseeable and unavoidable events can have serious consequences for the Company's operations. Therefore, it is essential for the Company to have an adequate strategy in place to address and minimize the impact of such disruptions. Disaster recovery is also a critical aspect of IT governance, requiring the Company to have a structured plan for restoring systems and data during emergencies, such as natural disasters or system failures. With a strong governance process in place, the Company can effectively identify security threats and take proactive measures to prevent cyberattacks.

By implementing effective governance processes in this area, the Company ensures that all major risks are identified, managed, and reported to the Board of Directors, minimizing potential negative impacts on operations and reputation. The Board of Commissioners and Board of Directors continue to emphasize the importance of strong cybersecurity implementation.

Data Management

PTP Terminal Nonpetikemas has established a dedicated team responsible for implementing data protection programs. The Company manages data in accordance with prevailing laws and regulations, as well as internal policies and procedures. The standards governing information security management apply to the protection of all Company information, managed by every work unit whether at the Head Office or across Branch Offices, as well as by third parties, whether acting as administrators and/or users IT.

The Company consistently implements good governance practices. All data requests must be submitted through official documentation, validated by the relevant unit, and reviewed by the Information Systems Division to prevent data misuse. Data distribution is handled exclusively by authorized personnel and requires the signing of a data confidentiality form.

AUDIT PENYELENGGARAAN TI
IT AUDIT

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan audit terkait penyelenggaraan teknologi informasi guna memastikan kesesuaian dalam pengelolaan TI. *IT Maturity Level Assessment* dilakukan oleh PT Altha Dyanusa Consulting. Perusahaan berhasil memperoleh skor 2,68 dari target sesuai dengan penetapan kementrian BUMN yaitu 3,00.

In 2024, the Company conducted audits of its Information Technology operations to ensure proper governance and compliance. An IT Maturity Level Assessment was carried out by PT Altha Dyanusa Consulting. The Company achieved a score of 2.68 out of the target set by the Ministry of SOEs which is 3.00.

PENGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE DEVELOPMENT

Perusahaan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas layanan TI baik aplikasi maupun perangkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan implementasi aplikasi yang meningkatkan performansi Perusahaan.

e-Magang (MAGNIT)
MAGNIT (Magang Nusantara Untuk Inovasi dan Talenta) adalah sebuah program magang yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan *fresh graduate* untuk mendapatkan pengalaman kerja serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka dalam dunia kerja.

e-ISO (AIA)
Merupakan sistem yang berfungsi sebagai *tools* dalam pelaksanaan Audit Internal Perusahaan dari mulai pelaksanaan Audit Internal hingga membuat laporan akhir pelaksanaan Audit Internal. Dalam Aplikasi AIA audit materi yang akan di Audit menyesuaikan dengan ISO 9001 , ISO 37001, ISO 14001, dan ISO 40001.

The Company constantly strives to improve IT services whether through application or hardware. One of the efforts conducted is implemenwtion of application to increase company performance.

e-Magang (MAGNIT)
MAGNIT (Magang Nusantara untuk Inovasi dan Talenta) is an internship program that offers university students and fresh graduates the opportunity to gain professional experience and develop their potential and skills in the workplace.

e-ISO (AIA)
This system functions as a tool for conducting the Company's internal audits, covering the entire process from audit execution to the preparation of the final audit report. The AIA application is designed to align audit materials with applicable standards, including ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, and ISO 45001.

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





06

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance


Grafik Tarif Barang 2023-2024
Cargo Tariffs Graph 2023-2024

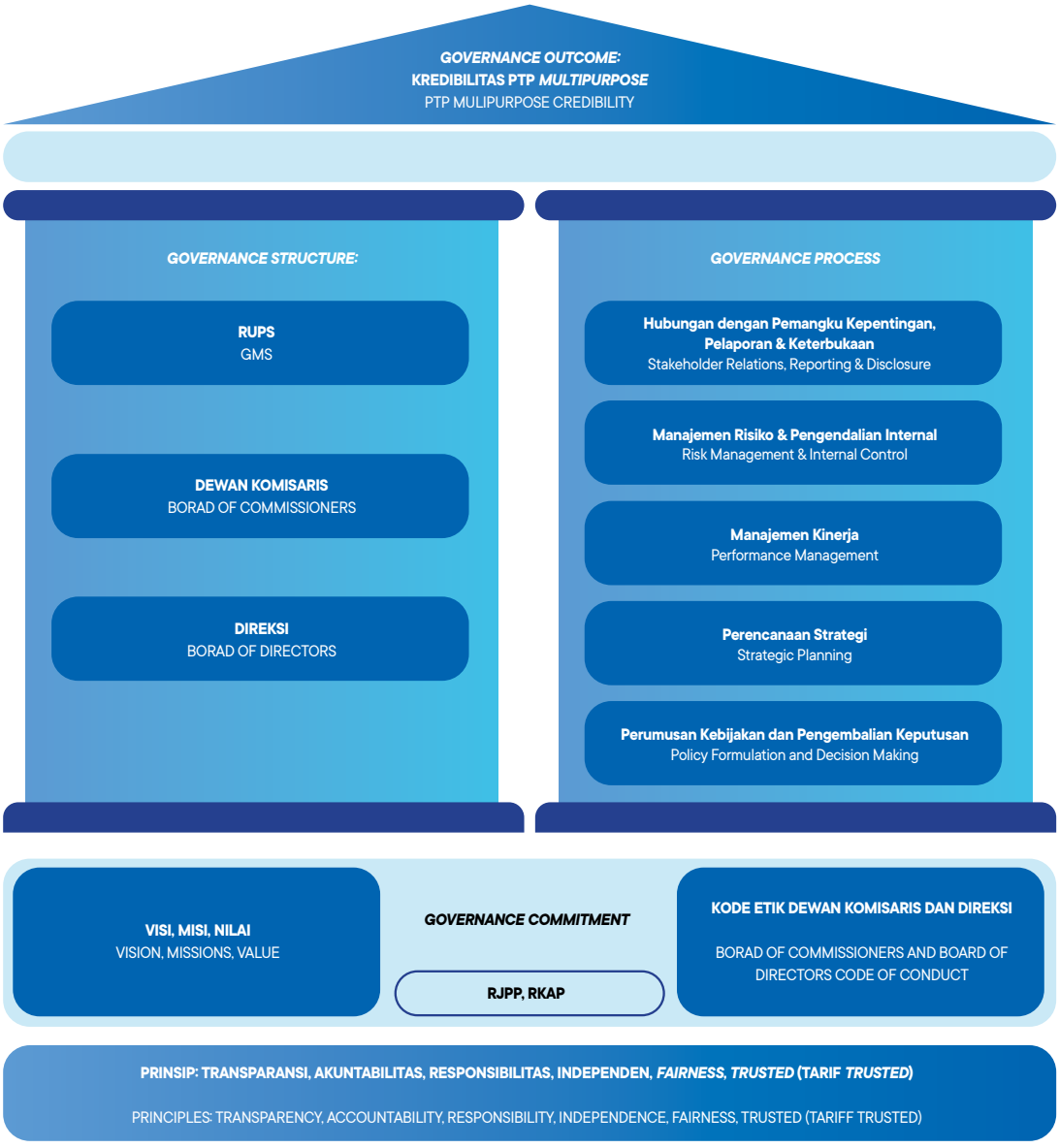
Pencapaian kinerja Perusahaan merupakan hasil dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dan efisien. Perusahaan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.

The Company's performance achievements are the outcomes of the effective and efficient implementation of Good Corporate Governance. The Company remains committed to continuously improving and enhancing the sustainable implementation of Good Corporate Governance.

GOVERNANCE FRAMEWORK
GOVERNANCE FRAMEWORK

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) hal ini tercermin dalam Kerangka Kerja Tata Kelola. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

The Company demonstrates a strong and consistent commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), as reflected in its Governance Framework. This framework serves as a guideline for the implementation of GCG within the Company's operations.



Kerangka Kerja GCG PTP Terminal Nonpetikemas memuat 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

Governance Principles, yaitu prinsip-prinsip GCG yang melandasi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Perusahaan, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, *Trusted* yang disingkat menjadi TARIF *Trusted.*

Governance Commitment, yakni wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta satuan kerja Direksi untuk menerapkan dan menegakan Tata Kelola Perusahaan yang memuat visi, misi v*alues code of ethics* dan menjadi rujukan dalam menyusun RJPP dan RKAP.

Governance Structure, yakni organ internal dan eksternal Perusahaan yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan pengawasan terhadap Perusahaan.

Governance Process, yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.

Governance Outcome, yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG PTP Terminal Nonpetikemas yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

Sementara ruang lingkup penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTP Terminal Nonpetikemas, dijelaskan melalui bagan berikut:

The GCG Framework of PTP Terminal Nonpetikemas consists of five key elements:

Governance Principles, GCG Principles guiding the implementation of good governance in the Company, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trusted which are abbreviated to TARIF Trusted.

Governance Commitment, the commitment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all relevant units to uphold corporate governance encompassing the Company's vision, mission, values, and code of Coduct, serving as the basis for formulating the RJPP and RKAP.

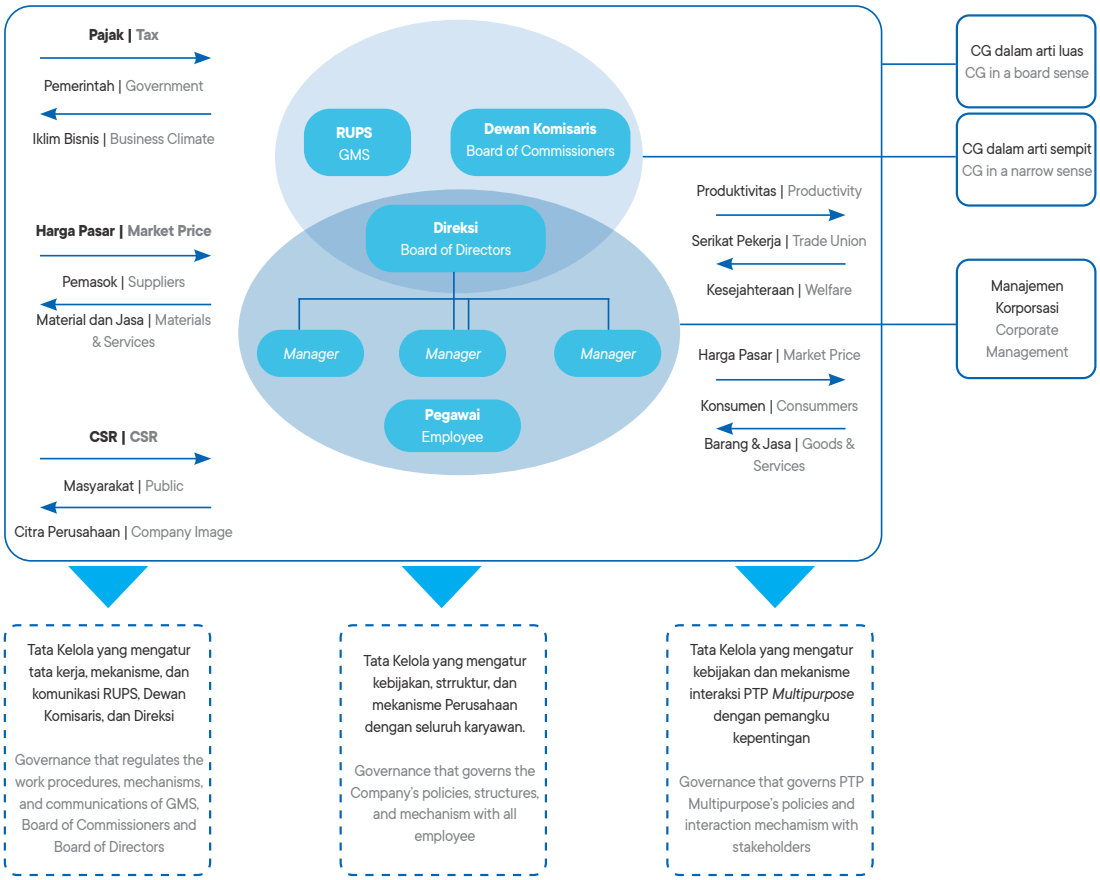
Governance Structure, internal and external organs of the Company authorized to carry out mandates and oversee the Company's operations.

Governance Process, a set of standards and procedures used by governance organs and units to ensure the planned, consistent, and sustainable implementation and enforcement of good corporate governance.

Governance Outcome, the tangible impact resulting from the consistent application and enforcement of GCG at PTP Terminal Nonpetikemas, reflected in value creation and long-term business sustainability.

The scope of Good Corporate Governance implementation at PTP Terminal Nonpetikemas is further illustrated through the following diagram:

Ruang Lingkup GCG PTP Terminal Nonpetikemas
Scope of GCG PTP Terminal Nonpetikemas



TUJUAN PENERAPAN GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Penerapan Tata Kelola yang Baik di dalam Perusahaan bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan Tata Kelola Perusahaan dengan baik, kinerja dan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat Keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Landasan hukum penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas mengacu pada:

1. Undang-Undang:
   a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
   c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
   d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni tentang Badan Usaha Milik Negara;
   e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
   g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   h. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   i. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
   j. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   k. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
   l. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah:
   a. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

The implementation of Good Corporate Governance in the Company aims to:

1. Maximize Corporate Governance, performance, and Company value for shareholders by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness to ensure the Company remains highly competitive;
2. Enhance corporate management to be professional, transparent, and efficient, while strengthening the empowerment and independence of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
3. Encourage corporate organs to base their decisions and actions on strong moral values, comply with prevailing laws and regulations, and remain aware of their social responsibilities toward stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increase the Company's contribution to the national economy; and
5. Foster a conducive climate for the growth of national investment.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

The legal basis for the implementation of GCG at PTP Terminal Nonpetikemas refers to the following:

1. Laws:
   a. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market;
   b. Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents;
   c. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
   d. Law No. 19 of 2023 dated June 19 concerning State-Owned Enterprises;
   e. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   f. Law No. 17 of 2008 concerning Shipping;
   g. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
   h. Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
   i. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law;
   j. Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions;
   k. Law No. 25 of 2009 concerning Public Services; and
   l. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law.

2. Government Regulations:
   a. Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;

b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; dan
e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan/Keputusan Menteri:
a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

4. Pedoman Pelaksanaan GCG:
a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

5. Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Government Regulation No. 27 of 1998 on Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Limited Liability Companies;
c. Government Regulation No. 43 of 2011 on the Procedures for Proposing and Using Company Names for Limited Liability Companies;
d. Government Regulation No. 31 of 2021 on Shipping Administration; and
e. Government Regulation No. 23 of 2022 amending Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.

3. Ministerial Regulations/Decrees:
a. Minister of Law and Human Rights Regulation No. 21 of 2021 on Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Amendments, and Dissolution of Limited Liability Companies;
b. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 of 2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
c. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises; and
d. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

4. GCG Implementation Guidelines:
a. Indonesia's General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021 by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

5. The Company's Articles of Association.

GOVERNANCE PRINCIPLE
GOVERNANCE PRINCIPLE

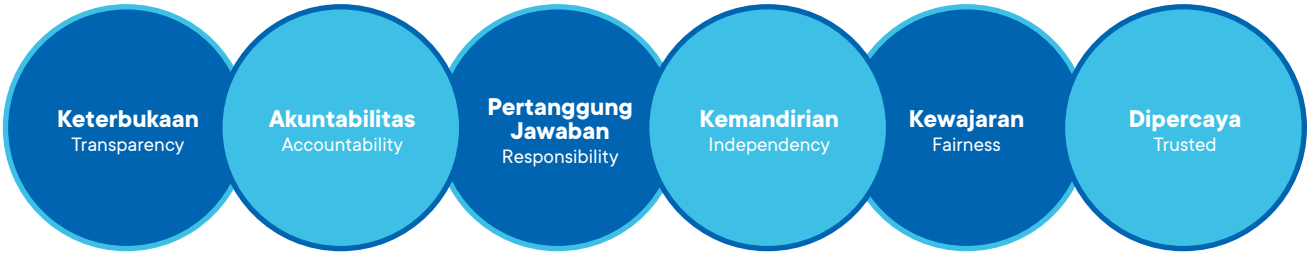
Penerapan Prinsip-Prinsip GCG TARIFT

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG TARIFT Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas mengacu pada Pedoman GCG yaitu TARIFT, akronim dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted*.

Implementation of GCG Principles – TARIFT

The implementation of GCG Principles at PTP Terminal Nonpetikemas refers to the GCG Guidelines under the acronym TARIFT, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted.

Prinsip-Prinsip GCG di PTP Terminal Nonpetikemas
GCG Principles in PTP Terminal Nonpetikemas



Adapun penerapan di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas, dijelaskan melalui tabel berikut ini:

The implementation within the scope of PTP Terminal Nonpetikemas is further detailed in the following table:

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG 2024 PTP Terminal Nonpetikemas
GCG Principle Implementation in 2024 at PTP Terminal Nonpetikemas

Prinsip Dasar Basic Principle	**Komitmen** Commitment	**Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas** Implementation in PTP Terminal Nonpetikemas scope
Keterbukaan (*Transparency*)	Perusahaan berkomitmen untuk terbuka dalam penyelenggaraan Perusahaan. Komitmen tersebut diimplementasikan dengan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. The Company is committed to being transparent in its management. The commitment is implemented by being transparent in every decision-making process and by disclosing material and relevant information about the Company	Perusahaan memberikan seluruh informasi yang materil dan relevan terkait dengan Perusahaan yang disampaikan secara jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dengan tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company provides all material and relevant information regarding the Company, which is conveyed in a clear, accurate, timely, and easily accessible for stakeholders, without prejudice to the Company's obligation to protect confidential information, Company Management and other related parties, in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.
Akuntabilitas (*Accountability*)	Perusahaan memastikan tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ Perusahaan sehingga pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok terlaksana secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. The Company ensures clarity of functions, implementation and accountability of the Company organs to ensure effective and accountable management of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, budaya Perusahaan serta etika perilaku bisnis, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. The Company has established clear details of duties and responsibilities of each Company organ, in line with the Company's vision, mission, culture and business ethics, so that management of the Company can run well in order to achieve the Company's performance on an ongoing basis.
Pertanggungjawaban (*Responsibility*)	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab dengan selalu memperhatikan kesesuaian pengelolaan PTP Terminal Nonpetikemas terhadap peraturan perundang- undangan serta SOP yang berlaku. The Company carries out its responsibilities by always paying attention to the suitability of PTP Terminal Nonpetikemas management with prevailing laws and regulations and SOP	Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan Perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. The Company adheres to prudential principle and ensures compliance with laws and regulations, and the Company's Articles of Association and regulations, and carries out social responsibility activities including caring for communities and environmental sustainability, especially in areas around the Company's facilities through adequate planning and implementation.
Kemandirian (*Independency*)	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, atau tekanan dan pengaruh pihak lain. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company carries out its business activities in a professional manner, free from conflicts of interest, or pressure and the influence of other parties.	Pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company's management is carried out professionally by avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran (*Fairness*)	Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dan bersikap secara adil dan setara. The Company is committed to fulfilling stakeholders' rights and acting fairly and equally	Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. The Company always pays attention to the interests of stakeholders based on principles of fairness and equality in accordance with the criteria and proportions that should be, so that no party is harmed.
Dipercaya (*Trusted*)	Perusahaan berkomitmen untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. The Company is committed to gaining full trust and support of all stakeholders.	Perusahaan senantiasa membangun dan menciptakan kepercayaan dan dukungan penuh dari *stakeholders*. The Company always builds and creates trust and full support with its stakeholders.

PENERAPAN PILAR GOVERNANSI PUGKI (ETAK)

PTP Terminal Nonpetikemas berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dengan mengimplementasikan Pilar Governansi Korporat dalam Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dirilis pada tahun 2021. Perusahaan yakin bahwa penerapan Pilar Governansi Korporat secara menyeluruh akan memperkuat fondasi Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.

PUGKI 2021 mencakup prinsip, rekomendasi, dan panduan yang bertujuan untuk mendorong praktik governansi korporat yang baik. Masing-masing korporasi menerapkan PUGKI tersebut dengan melaksanakan prinsip, rekomendasi dan panduan serta mengungkapkannya. Dalam laporan tahunan ini, halaman 633, Perusahaan telah melakukan pemetaan terkait penerapan prinsip, rekomendasi, dan panduan sebagaimana dituangkan dalam indeks PUGKI yang menjadi lampiran Bab Tata Kelola Perusahaan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Empat pilar governansi korporat merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2021.

IMPLEMENTATION OF PUGKI GOVERNANCE PILLARS (ETAK)

PTP Terminal Nonpetikemas continuously strives to enhance the quality of GCG implementation within the Company by adopting the Corporate Governance Pillars outlined in the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021. The Company believes that comprehensive implementation of these governance pillars will strengthen its foundation in facing increasingly complex business challenges.

PUGKI 2021 encompasses principles, recommendations, and guidelines aimed at promoting sound corporate governance practices. Each corporation applies PUGKI by implementing these principles, recommendations, and guidelines, and disclosing their implementation. In this annual report, on page 633, the Company has mapped its implementation of the PUGKI principles, recommendations, and guidelines as presented in the PUGKI Index attached to the Corporate Governance Chapter.

The principles outlined in PUGKI, along with the corresponding recommendations and guidelines, are rooted in four governance pillars, ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability (ETAK). These four pillars represent the latest evolution of the core TARIF values (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) previously used in PUGKI 2021.

4 (Empat) Pilar Governansi Korporasi Indonesia
4 (Four) Pillars of Indonesian Corporate Governance



Pilar Pillar	Penjelasan Description	Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas Implementation in the scope of PTP Terminal Nonpetikemas
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the corporation consistently upholds honesty, treats all parties with respect, fulfills its commitments, and builds as well as maintains moral values and trust consistently. The corporation considers the interests of Shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality, and it is managed independently so that each corporate organ does not dominate one another and cannot be intervened by external parties.	PTP Terminal Nonpetikemas memastikan integritas dan kejujuran sebagai pilar utama dalam setiap operasionalnya, dengan menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam semua interaksi dengan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Perusahaan memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan dengan tepat waktu dan integritas penuh, dengan membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Dalam mengelola Perusahaan, kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya diutamakan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan, sementara manajemen dijalankan secara independen tanpa adanya dominasi dari pihak eksternal. PTP Terminal Nonpetikemas ensures that integrity and honesty serve as the main pillars in all of its operations, while respecting human rights and upholding fairness in all interactions with employees, business partners, and the community. The Company fulfills its commitments to stakeholders in a timely manner and with full integrity, fostering a corporate culture based on high moral and ethical values. In managing the Company, the interests of Shareholders and other stakeholders are prioritized under the principles of fairness and equality, while management is carried out independently without domination from external parties.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan. To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and comprehensible to stakeholders. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also other important information relevant to decision-making by shareholders, creditors, and stakeholders.	PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk meningkatkan GCG dengan memastikan transparansi informasi yang komprehensif, termasuk penyediaan laporan keuangan dan kinerja Perusahaan secara teratur dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Selain memenuhi kewajiban pelaporan hukum, Perusahaan juga mengambil inisiatif untuk melaporkan hal-hal yang dianggap material bagi pengambilan keputusan. Komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko yang efektif, pelatihan karyawan tentang pentingnya GCG, dan penerapan standar etika yang tinggi menjadi prioritas dalam menjalankan operasional, menciptakan lingkungan yang berintegritas dan dapat dipercaya untuk pertumbuhan jangka panjang. PTP Terminal Nonpetikemas is committed to enhancing GCG by ensuring comprehensive information transparency, including the regular and accessible provision of the Company's financial and performance reports to stakeholders. In addition to fulfilling legal reporting obligations, the Company proactively discloses matters deemed material to informed decision-making. Open communication with stakeholders, effective risk management, employee training on the importance of GCG, and the implementation of high ethical standards are prioritized in operations to create an environment of integrity and trust, fostering long-term growth.
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	PTP Terminal Nonpetikemas mengambil komitmen kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan korporasi Perusahaan. Dengan prinsip-prinsip manajemen yang bertanggung jawab, keterbukaan yang terjaga, dan pengukuran kinerja yang terukur, perusahaan ini memprioritaskan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melakukan setiap keputusan, Perusahaan mengakui bahwa akuntabilitas merupakan landasan penting untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, dan dengan demikian, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko dengan baik dan mengambil tanggung jawab penuh atas dampak dari setiap tindakan yang diambil.

Pilar Pillar	**Penjelasan** Description	**Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas** Implementation in the scope of PTP Terminal Nonpetikemas
	The corporation must be able to account for its performance in a transparent and fair manner. Therefore, the Corporation must be managed properly, measurably, and in alignment with corporate interests, while still taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	PTP Terminal Nonpetikemas has taken a strong commitment to ensure transparency and accountability in the management of the Company. With responsible management principles, maintained openness, and measurable performance evaluations, the Company prioritizes corporate interests while still considering the interests of Shareholders and other stakeholders. In every decision-making process, the Company recognizes that accountability is a fundamental basis for achieving sustainable performance. As such, the Company is committed to managing risks effectively and taking full responsibility for the impact of every action taken.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The corporation complies with prevailing laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment to contribute to sustainable development through collaboration with all relevant stakeholders to improve lives in ways aligned with business interests and the sustainable development agenda.	PTP Terminal Nonpetikemas menegaskan komitmennya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan penuh kesungguhan. Melalui kerja sama erat dengan semua pihak terkait, PTP Terminal Nonpetikemas berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Upaya ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. PTP Terminal Nonpetikemas reaffirms its commitment to legal compliance and sincerely upholds its social and environmental responsibilities. Through close cooperation with all related parties, PTP Terminal Nonpetikemas strives to enhance the quality of life for surrounding communities and protect environmental sustainability. These efforts are aligned not only with business interests but also with a comprehensive approach to supporting the sustainable development agenda.

GOVERNANCE COMMITMENT
GOVERNANCE COMMITMENT

Sepanjang perjalanan PTP Terminal Nonpetikemas dalam melayani pelanggan, Perusahaan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG PTP Terminal Nonpetikemas tertanam dalam visi dan misi, *core value,* serta strategi kebijakan. Perusahaan memiliki komitmen secara simbolis yang dituangkan dalam deklarasi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 13 September 2024.

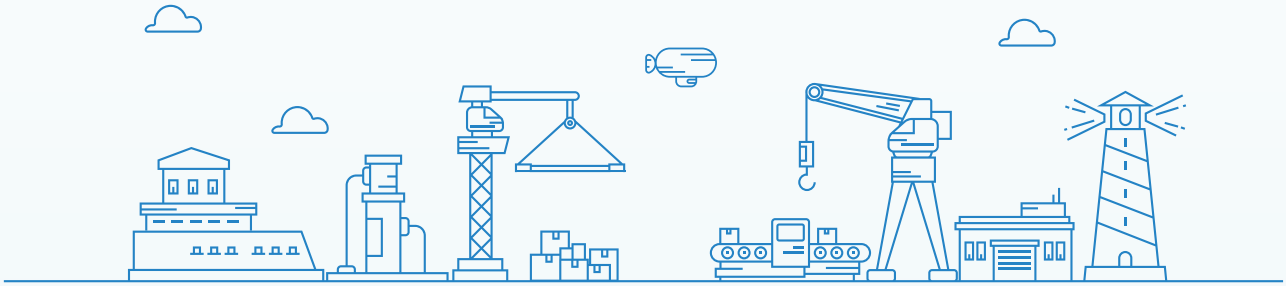
Throughout its journey in serving customers, PTP Terminal Nonpetikemas remains committed to continuously evaluating, improving, enhancing, and refining the GCG implementation to align with evolving laws, regulations, and current business conditions. The GCG commitment of PTP Terminal Nonpetikemas is embedded in its vision and mission, core values, and strategic policies. This commitment is also symbolically represented through a commitment declaration by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok, signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors on September 13, 2024.

01



02







PELINDO
MULTI TERMINAL

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang menyatakan dan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Hidayat Sani
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kedudukan : Jl. Yos Sudarso No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dengan kesadaran penuh sebagai Insan Pelindo yang bertanggungjawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk patuh terhadap Peraturan Perusahaan dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), namun tidak terbatas pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, professionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perusahaan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip 5 NO's, yaitu:
   a. No Bribery (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. No Kickback (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. No Gift (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
   d. No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada penyembutan dan jamuan yang berlebihan);
   e. No Corruption (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan/atau korporasi baik secara sadar maupun tidak sadar).
5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan Pelindo termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip 5 NO's;

03



PELINDO
MULTI TERMINAL

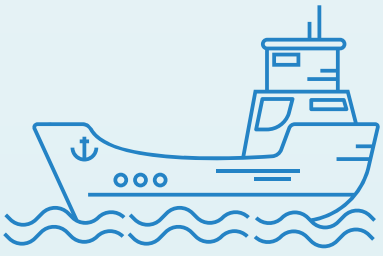
6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan Standard Operating Procedurres (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
8. Bersedia melaporkan melalui Whistleblowing System Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penipuan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PELINDO;
9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian **PERNYATAAN INTEGRITAS** ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, bilamana ternyata dalam pelaksanaan tugas Perusahaan saya terbukti secara sah dan meyakinkan **TIDAK MELAKSANAKAN PERNYATAAN TERSEBUT DI ATAS**, maka saya **BERSEDIA DIBERIKAN SANKSI** sesuai ketentuan yang berlaku.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA

INDRA HIDAYAT SANI

04





Pernyataan komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga diwujudkan secara simbolis oleh seluruh Insan PTP Terminal Petikemas melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan setiap tahun.

The commitment to implementing Good Corporate Governance is also symbolically demonstrated by all personnel of PTP Terminal Nonpetikemas through the annual signing of the Integrity Pact.

STRUKTUR ORGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan telah mengimplementasikan praktik GCG dengan bantuan kerangka kerja serta prosedur yang dirancang untuk memastikan penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

CORPORATE GOVERNANCE ORGAN STRUCTURE AND MECHANISM

The Company has implementedGCG practices with the support of a framework and procedures designed to ensure seamless GCG implementation at PTP Terminal Nonpetikemas in accordance with prevailing regulations.

The Corporate Governance Structure and Mechanism of PT Pelabuhan Tanjung Priok.



GOVERNANCE STRUCTURE
GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas Organ Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ pendukung struktur Tata Kelola antara lain: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Di samping itu, Direksi didukung oleh manajemen efisien dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Organ Perusahaan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme *check and balance*.

The Company's governance structure consists of the Company's Organs. In accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company Organs consist of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors

Supporting organs within the governance structure include, the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee. In addition, the Board of Directors is supported by an efficient management team in the implementation of company policies.

The Company Organs are established to ensure the effective implementation of Good Corporate Governance principles by defining clear roles and responsibilities to create a proper check and balance mechanism.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelabuhan Tanjung Priok Corporate Governance Structure



GOVERNANCE PROCESS
GOVERNANCE PROCESS

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG.

Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan landasan kokoh pada pedoman-pedoman atau kebijakan tertulis yang memuat tentang kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Setiap langkah yang diambil Perusahaan tidak hanya didasarkan pada kebijakan yang sudah ada, tetapi juga terus menerus disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha serta regulasi yang berlaku. Untuk memastikan kesesuaian dan kerelevanan kebijakan, PTP Terminal Nonpetikemas secara berkala melakukan *review* menyeluruh. Berikut kebijakan Tata Kelola Perusahaan PTP Terminal Nonpetikemas, antara lain:

The governance process of a company refers to the methods or mechanisms carried out by the Company's organs and their subordinate units in performing their functions and duties to fulfill the commitment of achieving optimal performance and establishing a governance structure in accordance with GCG principles.

The Company performs its duties and responsibilities based on strong foundations rooted in written policies and guidelines related to corporate governance. Every step taken by the Company is not only based on existing policies but is also continuously adjusted in line with evolving business dynamics and prevailing regulations. To ensure the relevance and alignment of these policies, PTP Terminal Nonpetikemas regularly conducts comprehensive reviews. The corporate governance policies implemented by PTP Terminal Nonpetikemas include, among others:

Kebijakan Policy	Penetapan Formalization
Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association	• Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. • Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-13799 AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. • Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM. 339/3/11/2/PTP-14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok. • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler No. 10 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-0026958.AH.01.02 tanggal 30 April 2021. • Deed of establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 dated July 10, 2013, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision No.AHU-42024. AH.01.01 of 2013 dated August 1, 2013, on Legal Ratification of the Company. • Deed of Shareholders' Extraordinary Resolution of Limited Liability Company PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 dated March 14, 2014, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,S.H., M.Kn.a Notary in Jakarta and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decree No. AHU-13799 AH.01.02 of 2014 on Approval of amendment of the Company's Articles of Association. • Minutes of Agreement of Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM. 339/3/11/2/PTP-14 dated November 3, 2014, on the Operation of PT Pelabuhan Tanjung Priok. • Deed of Circular Resolution No. 10 dated April 30, 2021, drawn up before Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0026958.AH.01.02 dated April 30, 2021.
Pedoman Pelaksanaan GCG GCG Implementation Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated September 13, 2024, concerning the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) Governance, Risk, & Compliance (GRC) Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 dated December 12, 2024, concerning the Guidelines for Governance, Risk, & Compliance (GRC) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024, concerning the Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Guidelines for Supervisory and Advisory by the Board of Commissioners	Peraturan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/10/11/5/PTP2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Commissioners Regulation No. DK/10/11/5/PTP2016 dated November 10, 2016, concerning the Guidelines for Supervision and Advisory Functions of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Kode Etik Bisnis Code of Conduct	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, concerning the Guidelines for the Code of Conduct within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/23/11/13/ PTP-2018 tanggal 29 November 2018 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pengawas Mutu, GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. DK/23/11/13/PTP-2018 dated November 29, 2018 concerning Charters for Audit Committee, Quality Control Committee, GCG and Risk Management Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko Business Development and Risk Management Monitoring Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/18/8/5/PTP2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. DK/18/8/5/PTP-2020 dated August 18, 2020 concerning Business Development and Risk Management Monitoring Committee Charter of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Kebijakan Policy	**Penetapan** Formalization
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/29/8/10/PTP-18 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. SK/29/8/10/PTP-18 dated August 29, 2018 concerning Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Internal Audit Internal Audit Charter	Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Pelabuhan Tanjung Priok Satuan Pengawas Internal Tahun 2019. Internal Audit Charter Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2019.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Director Regulation No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, concerning the Guidelines for Gratification Control within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman *Whistleblowing System* *Whistleblowing System Guidelines*	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 concerning the Guidelines for the Whistleblowing System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman *Anti Fraud* *Anti-Fraud Guidelines*	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pedoman Anti *Fraud* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, concerning the Anti-Fraud Guidelines within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.330/5/12/1/PTP2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. UM.330/5/12/1/PTP2018 dated December 5, 2018, concerning the Implementation of Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman LHKPN Guidelines on State Officials' Wealth Report (LHKPN)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/10/11/1/PTP-21 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.55/10/11/1/PTP-21 concerning the Obligation to Report Assets for Officials within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated September 13, 2024, concerning the Governance of Anti-Bribery Management System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan Terintegrasi Integrated Conflict of Interest Control Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan Terintegrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, concerning the Guidelines for Integrated Conflict of Interest Control within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Guidelines for the Procurement of Goods and/or Services	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 dated March 21, 2024, concerning the Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

GOVERNANCE OUTCOME

Untuk memastikan hasil Tata Kelola Perusahaan telah memadai, Perusahaan melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan setiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas implementasi penerapan dari struktur tata Kelola dan proses tata kelola di Perusahaan. Penilaian ini dilakukan juga untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan penerapannya di masa yang akan datang. Penilaian GCG ini dilakukan secara periodik yang terdiri dari penilaian yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai berikut:

GOVERNANCE OUTCOME

In order to ensure that the corporate governance implementation yields adequate results, the Company conducts an annual assessment of its Good Corporate Governance (GCG) practices. The assessment aims to evaluate the quality level of governance structure and processes within the Company. It also serves as a feedback mechanism to support continuous improvement in future implementation. The GCG assessment is carried out periodically through two methods, consisting self-assessment and assessment conducted by an independent third party, as follows:

SKOR *ASSESSMENT* GCG 2024
GCG ASSESSMENT SCORE IN 2024

PEDOMAN UMUM *GOVERNANCE* KORPORAT INDONESIA (PUGKI)	GENERAL GUIDELINE FOR INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE (PUGKI)
Memenuhi 71 dari 81 Rekomendasi PUGKI	Complied with 71 out of 81 PUGKI Recommendations

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

Perusahaan terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas serta implementasi penerapan GCG, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini:

The Company continues to undertake various improvement efforts to enhance the quality and implementation of GCG, as illustrated in the diagram below:



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas, meliputi:

1. Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG;
2. Implementasi GCG;
3. *Monitoring* GCG;
4. Pengukuran/*Assessment* GCG;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan *Benchmarking*.

The cycle of improving the quality of GCG implementation at PTP Terminal Nonpetikemas includes:

1. Establishment of GCG Quality Standards;
2. Implementation of GCG;
3. Monitoring of GCG;
4. Measurement/Assessment of GCG;
5. Sustainable Improvement and Benchmarking of GCG Implementation

PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Perusahaan menetapkan standar kualitas sebagai acuan utama dalam penerapan GCG, yang mencakup kriteria yang harus dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Acuan ini berfungsi sebagai pendorong bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG. Standar tersebut disusun berdasarkan regulasi yang relevan, masukan dari para pemangku kepentingan, serta hasil penilaian dan *benchmarking*.

ESTABLISHMENT OF GCG QUALITY STANDARDS

The Company sets quality standards as a primary reference for the GCG implementation, which includes the criteria that must be achieved across various aspects related to GCG. These references serve as a driver for the Company to continuously enhance the quality of GCG implementation. The standards are developed based on applicable regulations, feedback from stakeholders, as well as results from assessments and benchmarking.

Standar implementasi GCG di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Implementasi GCG di Perusahaan juga melakukan penelaahan terhadap praktik-praktik bisnis terbaik yang meliputi:
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
2. Penerapan GCG dengan melihat indeks persepsi dari sisi bidang tertentu terkait Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas yaitu TARIFT, akronim dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted*. Serta Pilar Governansi PUGKI, yaitu ETAK, akronim dari Perilaku Beretika, Tanggung Jawab, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan.

Berikut rekam jejak penerapan prinsip-prinsip GCG serta *Assessment* penerapannya di Perusahaan.

REKAM JEJAK IMPLEMENTASI GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

GCG implementation standards in the Company referring to regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises.

The implementation of GCG in the Company also includes a review of best business practices, which covers:
1. Corporate Governance Principles for Stated Owned Company developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
2. Implementation of GCG by referring to perception indices in specific areas related to corporate governance, namely the Corporate Governance Perception Index (CGPI).

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

As previously described, the principles of Good Corporate Governance (GCG) implemented at PTP Terminal Nonpetikemas are reflected in TARIFT, an acronym for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted. As well as the PUGKI Governance Pillars, namely ETAK, an acronym for Ethical Behavior, Responsibility, Accountability, and Sustainability.

The following presents the track record of GCG principles implementation and its Assessment within the Company.

MILESTONE OF GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

2015	Tahun 2015 merupakan tahun pertama Perusahaan melakukan sosialisasi dan pengukuran (*self Assessment*) terhadap implementasi GCG dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping. *Assessment* GCG tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *self Assessment* sebesar 68,77 dengan predikat "Cukup Baik". The year of 2015 marked the first year the Company conducted socialization and self-Assessment on GCG implementation, with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) acting as facilitator. The GCG Assessment was carried out to provide an overview of the status of GCG implementation in relation to prevailing regulations and best practices, allowing areas requiring improvement or refinement to be identified. The result of the self-Assessment was a score of 68.77, with a rating of "Fairly Good".
2016	Dilakukan pengukuran (*Assessment*) kembali terhadap implementasi GCG dengan BPKP selaku *assessor* (penilai). Hasil *Assessment* meningkat 17% dari tahun 2015 menjadi 81 dengan predikat "Baik". A follow-up Assessment of GCG implementation was conducted with BPKP as the assessor. The Assessment score increased by 17% from 2015, reaching 81, with a "Good" rating.
2017	Dalam upaya perbaikan implementasi GCG, Perusahaan melakukan penyempurnaan dengan melengkapi *soft structure* Tata Kelola Perusahaan. Perusahaan juga melakukan sosialisasi dan *Assessment* GCG, dan berhasil meraih sebesar 94,07 dengan predikat "Sangat Baik". As part of efforts to improve GCG implementation, the Company enhanced the soft structure of corporate governance. It also conducted socialization and reassessment of GCG, achieving a score of 94.07, with a rating of "Very Good".
2018	Untuk mencapai target skor *Assessment* GCG yang tertuang RJPP 2016- 2020, yaitu sebesar 95,00, Perusahaan kembali melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen Tata Kelola Perusahaan dan melakukan *monitoring* serta menindaklanjuti rekomendasi *Area of Improvement*. Realisasi skor *Assessment* GCG pun meningkat menjadi 97,9 dengan predikat "Sangat Baik". In order to meet the GCG Assessment score target stated in the 2016–2020 RJPP, which was 95.00, the Company further refined its governance documents, carried out monitoring, and followed up on recommendations in the identified Areas of Improvement. The GCG Assessment score rose to 97.9, with a "Very Good" rating.

2019	Mengingat pencapaian skor GCG telah memenuhi target RJPP 2016- 2020, maka Perusahaan merevisi target skor GCG dari 85 menjadi 96,00. Perusahaan terus berupaya membangun budaya GCG dalam setiap rantai bisnisnya, sehingga setiap unit kerja memiliki tanggung jawab langsung atas aspek yang diukur dalam penilaian GCG dan setiap Insan Perusahaan memiliki keyakinan bahwa penerapan GCG secara konsisten menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Skor *Assessment* tahun 2019 mencapai 98,3 dengan predikat "Sangat Baik". Given the GCG score had already met the 2016–2020 RJPP target, the Company revised the target score upward from 85 to 96.00. The Company continues to instill a GCG culture in every business line, ensuring that each unit is directly responsible for the aspects measured in the GCG evaluation, and that all employees are committed to consistently applying GCG as a foundation for sustainable business growth. The 2019 Assessment score reached 98.3, with a "Very Good" rating.
2020	Untuk memenuhi target capaian tahun 2020, yaitu sebesar 97,00, Perusahaan mengevaluasi dan menyempurnakan infrastruktur GCG yang masih memiliki kelemahan dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan sehingga pemenuhan target nilai GCG, sehingga Perusahaan dapat mempertahankan skor *Assessment* GCG sebesar 98,3. In order to meet the 2020 target score of 97.00, the Company evaluated and improved the GCG infrastructure with weaknesses, formalizing the improvements into policies. As a result, the Company was able to maintain its GCG Assessment score at 98.3.
2021	Pada tahun 2021, skor *Assessment* GCG mengalami penurunan dari 98,3 di tahun 2020, menjadi 97,197 dengan predikat "Sangat Baik". Meski demikian, skor *Assessment* GCG telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 96, 5. Penurunan ini terkait dengan adanya transisi perubahan Pemegang Saham. Perusahaan tetap berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha sehari-hari dan skor *Assessment* GCG di tahun buku mendatang. In 2021, the GCG Assessment score declined from 98.3 in 2020 to 97.197, while still retaining the "Very Good" rating. Despite the decrease, the score still exceeded the target of 96.5. This decline was associated with the transition in shareholder structure. Nonetheless, the Company remained strongly committed to continuously improving the quality of GCG principles implementation in its daily business activities and in the following fiscal year.
2022	Pada tahun 2022, skor *Assessment* GCG kembali meningkat tipis dari 97,197 dengan predikat "Sangat Baik" di tahun 2021, menjadi 97,32 dengan predikat "Sangat Baik". Skor *Assessment* GCG tahun 2022 juga telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 96,5. In 2022, the GCG assessment score slightly increased from 97.197 in 2021 to 97.32, maintaining the "Very Good" rating. The 2022 score also surpassed the predetermined target of 96.5.
2023	*Assessment* GCG tahun 2023 menggunakan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Skor *assessment* ACGS 94,12 poin dengan predikat "*Very Good*" sementara hasil *assessment* PUGKI Perusahaan telah menerapkan 70 dari 81 rekomendasi PUGKI. The 2023 GCG assessment applied the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters and the 2021 General Guidelines For Indonesian Corporate Governance (PUGKI). The ACGS score was 94.12 points with a "Very Good" rating, while under the PUGKI guidelines, the Company had implemented 70 out of 81 recommendations.
2024	Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan kembali penilaian ACGS dengan skor 97,43 poin termasuk dalam predikat "*Very Good*" dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 telah menerapkan 71 dari 81 rekomendasi PUGKI. In 2024, the Company conducted another ACGS assessment, achieving a score of "97,43" points, classified as "Very Good", and had complied with 71 out of 81 recommendations of the 2021 PUGKI.

MONITORING PENERAPAN GCG

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, implementasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.02/14/4/1/GDCG/DIRU/PTP-23 tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Tugas Penanggung Jawab dalam penerapan dan pemantauan pelaksanaan GCG di Perseroan, antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip GCG;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga;
4. Membuat laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik satu tahun sekali;
5. Melaksanakan *Assessment* GCG dan menjaga agar pencapaian skor *Assessment* GCG dapat terpenuhi;
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan GCG Perseroan

GCG IMPLEMENTATION MONITORING

Responsible Party for the GCG Implementation

The planning, coordination, monitoring, implementation, and evaluation of GCG implementation are carried out by the designated Person in Charge (PIC) for GCG Implementation at PTP Terminal Nonpetikemas. This responsibility is formalized through the Board of Directors Decree PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.01.02/14/4/1/GDCG/DIRU/PTP-23 dated April 14, 2023, regarding the Appointment of the President Director as the Person in Charge for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Duties of the GCG responsible party in the implementation and monitoring of GCG, include :

1. Preparing a work plan to fulfill GCG principles;
2. Monitoring and ensuring the Company's business activities to comply with applicable regulations;
3. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made with third parties;
4. Preparing an report on the implementation of Good Corporate Governance annually;
5. Conducting GCG assessments and ensuring the achievement of target assessment scores;
6. Conducting monitoring of GCG implementation and submitting

yang dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham memuat:

a. Rencana Kerja (*action plan*) untuk penerapan GCG;
b. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen terhadap *stakeholder*;
c. Laporan hasil *Assessment* GCG.

reports at the minimum once in a year to the President Director, Board of Commissioners, and Shareholders, which include:

a. GCG implementation action plans ;
b. Monitoring of regulatory compliance and stakeholder commitment;
c. GCG assessment report.

ASSESSMENT PENERAPAN GCG BERDASARKAN PUGKI

Pelaksanaan penilaian implementasi GCG Perusahaan tahun buku 2024 dilakukan secara *assessment* (penilaian) oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen. Penilaian GCG di Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang mencakup 8 (delapan) prinsip pengukuran yakni:

1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Perilaku Etis;
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan;
6. Pengungkapan dan Transparansi;
7. Hak-Hak Pemegang Saham; dan
8. Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *assessment* (penilaian) penerapan GCG di PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk tahun buku 2024, Perusahaan telah memenuhi (*apply*) 71 rekomendasi dari 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan PUGKI 2021.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT BASED ON PUGKI

The implementation of GCG assessment for the 2024 fiscal year at PT Pelabuhan Tanjung Priok was conducted by PT Kharisma Integrasi Manajemen. The assessment referred to the General Guideline for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021, which encompasses 8 (eight) measurement principles:

1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Ethical Behavior;
5. Risk Management, Internal Control, and Compliance;
6. Disclosure and Transparency;
7. Shareholders' Rights; and
8. Stakeholders' Rights

Based on the results of the 2024 GCG assessment at PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Company has fulfilled (applied) 71 recommendations out of a total of 81 GCG implementation recommendations outlined in PUGKI 2021.

Evaluasi Penerapan GCG Tahun Buku 2024
Evaluation on the GCG Implementation for the Fiscal Year 2024

Jenis Pengukuran Measurement Type	:	*Assessment* (Penilaian) Assessment
Assessor/Penilai Assessor/Appraiser	:	PT Kharisma Integrasi Manajemen
Tahun Ukur Year Measured	:	2024
Periode Penerapan Implementation Period	:	2025
Tempat Venue	:	Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok
Waktu Pengukuran Measurement Period	:	24 Maret 2025-21 Juni 2025 March 24, 2025-June 21, 2025

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Details on the Company assessment results for the Fiscal Year 2024, as follows:

Prinsip Principle		**Terpenuhi (*Apply*) Jumlah Rekomendasi** Total Applied Recommendation			
Prinsip 1 Principle 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	29	Dari Out Of	31	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 2 Principle 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioner	4	Dari Out Of	11	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 3 Principle 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	5	Dari Out Of	5	Rekomendasi Recommendation

Prinsip Principle		Terpenuhi (*Apply*) Jumlah Rekomendasi Total Applied Recommendation			
Prinsip 4 Principle 4	Perilaku Etis Ethical Behavior	4	Dari Out Of	4	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 5 Principle 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	6	Dari Out Of	6	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 6 Principle 6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	9	Dari Out Of	9	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 7 Principle 7	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	10	Dari Out Of	11	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 8 Principle 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan Stakeholders' Rights	4	Dari Out Of	4	Rekomendasi Recommendation
TOTAL		71	Dari Out Of	81	Rekomendasi **Recommendation**

Adapun pemenuhan penerapan rekomendasi berdasarkan PUGKI termuat dalam pembahasan Pemenuhan Rekomendasi PUGKI dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN BERDASARKAN ASEAN *CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD*

Penilaian melalui ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) adalah salah satu pendekatan evaluasi untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan di ASEAN, terutama dalam konteks *Good Corporate Governance*. ACGS ini disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) dan didasarkan pada Prinsip *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD *Principles*), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang terdaftar di ASEAN. Dengan menggunakan ACGS, Perusahaan dapat secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki kualitas praktik tata kelola sesuai dengan standar internasional, serta memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard meliputi*:

1. Hak-hak dan Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*);
2. Keberlanjutan dan Ketangguhan (*Sustainability and Resilience*);
3. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*);
4. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibility of the Board*).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Skor Penilaian

Berdasarkan aspek penilaian yang telah ditentukan, pencapaian hasil GCG PTP Terminal Nonpetikemas berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The fulfillment of the implementation of recommendations based on PUGKI is presented in the Fulfillment of PUGKI Recommendations section of this Annual Report.

ASSESSMENT BASED ON THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) is an evaluation framework used to assess corporate governance practices within ASEAN countries, particularly in the context of Good Corporate Governance. The ACGS was agreed upon by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and is based on the Organization for Economic, Co-operation and Development (OECD Principles), with the primary objective of enhancing investor confidence in publicly listed companies in ASEAN. Through the application of the ACGS, the Company can systematically evaluate and improve the quality of its governance practices in line with international standards, emphasizing transparency and accountability in its operations.

Assessment Criteria

The ASEAN Corporate Governance Scorecard consists of the following components:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders;
2. Sustainability and Resilience;
3. Disclosure and Transparency;
4. Responsibilities of the Board;

Assessors Conducting the Assessment

The ACGS assessment for PTP Terminal Nonpetikemas was conducted by PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Assessment Score

Based on the established assessment criteria, the achievement of PTP Terminal Nonpetikemas' GCG implementation under the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard is as follows:

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP)
Ringkasan Hasil Penilaian *Assessment* Atas Penerapan *Good Corporate Governance* ACGS Tahun buku 2024
Summary of the Assessment Results on the Implementation of ACGS Good Corporate Governance Fiscal Year 2024

LEVEL 1	Number of Questions			Weighted (%)	Number of Comply	Score
Part	(Included N/A)	(N/A)	TOTAL			
A. *Rights and Equitable Treatment of Shareholders*	30	4	26	20%	15	11,54
B. *Sustainability and Resilience*	22	0	22	15%	22	15,00
C. *Disclosure and Transparency*	34	3	31	25%	27	21,77
D. *Responsibility of the Board*	63	2	61	40%	50	32,79
SUB TOTAL	**149**	**9**	**140**	**100%**	**114**	**81,43**
LEVEL 2						
Bonus	18	-	-	-	-	16
Penalty	26	-	-	-	-	0
SUB TOTAL	**44**					**16**
TOTAL LEVEL 1 + LEVEL 2	**193**		**184**			**97,43**

Mengacu pada hasil penilaian yang telah disebutkan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki untuk ke depannya, yaitu:

Referring to the assessment results that have been mentioned, there are several recommendations that need to be improved in the future, particularly:

No.	Rekomendasi Recommendations
	Rekomendasi secara Umum General Recommendations
1	Walaupun hasil akhir penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun pengungkapan 2023 ini sangat baik, namun untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan perbaikan kedepan, kami sampaikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut: Rekomendasi secara umum dapat kami sampaikan bahwa: • Metodologi pengukuran ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah berdasarkan kepada informasi publik, sehingga Perusahaan tetap perlu meningkatkan keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik. • Memanfaatkan *Website* semaksimal mungkin sebagai salah satu sarana publikasi yang murah, mudah, cepat, tepat dan efisien. • Informasi dan materi yang diunggah di *Website* tetap dilakukan 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). • Sejauh tidak bertentangan dengan peraturan lain yang melarang sebaliknya, maka seluruh faktor uji ASEAN *Corporate Governance Scorecard* upayakan tetap dipublikasikan. • Memanfaatkan hasil penilaian independen ini sebagai upaya untuk mempertahankan faktor uji ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang sudah *comply* dan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan. Although the final outcome of the ASEAN CG Scorecard implementation for the 2023 disclosure year is very good, in order to maintain and enhance future improvements, we provide the following recommendations: General recommendations are as follows: • The ASEAN CG Scorecard assessment methodology is based on publicly available information; therefore, the Company must continue improving information transparency accessible to the public. • Maximize the use of the corporate website as a low-cost, easy, fast, accurate, and efficient means of disclosure. • Ensure that all uploaded materials and information on the website are provided in two languages (Indonesian and English). • As long as it does not conflict with other regulations, all ASEAN CG Scorecard assessment criteria should continue to be disclosed. • Utilize the results of this independent assessment as an effort to maintain compliance with the ASEAN CG Scorecard criteria already fulfilled and to consider the recommendations provided.
	Rekomendasi secara Khusus Specific Recommendations
1	Pelaksanaan RUPS baik RUPS Tahunan (laporan kinerja) maupun RUPS Luar Biasa, sebaiknya diungkap pada *website* perusahaan sebagai informasi bagi *stakeholder* berisi sekurang-kurangnya: a. Undangan atau Pemanggilan RUPS disarankan untuk disampaikan maksimal 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan serta dipublikasi dengan dual bahasa. b. CV calon Direksi/Dewan Komisaris yang akan diangkat/diangkat kembali dalam RUPS. c. Ketersediaan Surat Kuasa Pemegang Saham. d. Bukti/catatan risalah RUPS yang menunjukan adanya proses pengangkatan Direksi dan/atau Komisaris secara individual. e. Risalah RUPS disarankan mencatat pemberian kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan.
2	Pengungkapan secara detail profil Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk atau ditunjuk kembali pada saat RUPS dan dicatatkan dalam Risalah RUPS.
3	Jasa audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan tidak hanya *audit fee* saja, tetapi juga jasa non-*audit fee*.

No.	Rekomendasi Recommendations
4	Jumlah Komisaris Independen disarankan lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (akan lebih baik jika salah satu Komisaris Independen adalah Perempuan).
5	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mayoritas harus Independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen).
6	Seluruh Ketua Komite Dewan Komisaris disarankan Komisaris Independen.
7	Minimum kuorum Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris adalah 2/3 dari jumlah anggota.
8	Hal-hal lain dapat merujuk kepada hasil *assessment* yang belum terpenuhi (*NO*).
1	The implementation of the GMS, both Annual GMS (performance reporting) and Extraordinary GMS, should be disclosed on the Company's website as information for stakeholders, including at minimum: a. The GMS invitation/announcement should be published at least 21 days prior to the GMS and presented in dual languages. b. Candidates CV for Directors/ Commissioners to be appointed or reappointed in the GMS. c. Availability of power attorney for shareholders. d. Evidence/records of GMS minutes showing individual appointment processes for Directors and/or Commissioners. e. GMS minutes should record opportunities provided to shareholders to raise questions.
2	Detailed disclosure of the appointed/reappointed Public Accounting Firm (KAP) at the GMS, with the information included in the GMS minutes.
3	Audit services disclosed in the Annual Report should include both audit fees and non-audit fees.
4	The number of Independent Commissioners should be more than 50% of the total Board of Commissioners (preferably with at least one female Independent Commissioner).
5	The Nomination and Remuneration Committee should consist of a majority of Independent members (Independent Commissioners and Independent Parties).
6	All Chairmans of the Board Committees should be Independent Commissioners.
7	The minimum quorum for Board of Directors and Board of Commissioners meetings should be 2/3 of the total members.
8	Other items should refer to unmet criteria (marked as NO) in the assessment results.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Inisiatif Strategis Penguatan GCG

Perusahaan terus berkomitmen untuk meningkatkan penerapan GCG melalui pengembangan dan perbaikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga melakukan *monitoring* secara berkala terhadap pelaporan GCG, melakukan tinjauan terhadap penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian implementasi GCG yang dilakukan oleh penilai independen. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas penerapan praktik GCG dan mendukung proses transformasi yang sedang berlangsung.

Kegiatan *Monitoring* dilakukan untuk melengkapi seluruh *Soft Structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan kajian bagi penyempurnaan yang telah ada guna meningkatkan penerapan GCG.

Berikut inisiatif strategis penguatan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas:

1. *Cascading Roadmap* dan seluruh kebijakan GCG ke seluruh Divisi;
2. *Website* sebagai *showcase* program dan inisiatif GCG;
3. Optimalisasi pelaksanaan *Whistleblowing System* dengan meningkatkan sosialisasi dan efektivitas penanganan kasus;
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
5. Penguatan *Subsidiary Governance;*

IMPROVING THE QUALITY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Strategic Initiatives to Strengthen GCG

The Company remains committed to strengthen the implementation of GCG through ongoing development and improvements aligned with prevailing regulations. In addition, the Company conducts regular monitoring of GCG reporting, reviews GCG implementation practices, and facilitates GCG assessments by independent assessors. These steps are taken to ensure the quality of GCG practices and support the ongoing transformation process.

Monitoring activities are carried out to complete all soft structures in accordance with current regulations and best GCG practices. Moreover, these activities aim to evaluate existing policies to further improve GCG implementation.

The following are strategic initiatives to strengthen GCG at PTP Terminal Nonpetikemas:

1. Cascading the Roadmap and All GCG Policies across all Divisions;
2. Company website serving as a showcase for GCG programs and initiatives;
3. Optimization of Whistleblowing System implementation through enhanced socialization and more effective case handling;
4. Implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS);
5. Strengthening Subsidiary Governance

6. *Assessment* GCG yang diakui secara nasional dan internasional;
7. Penguatan peran unit GCG untuk melakukan koordinasi pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* (GRC);
8. Kompetisi internal terkait inisiatif pelaksanaan GCG;
9. Inisiatif bisnis yang berorientasi pada manfaat *win-win* dengan pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
10. Implementasi *Corporate Social Responsibility* berbasis ISO 26000 dan *Guidance Social Responsibility*.

6. Conducting GCG assessments recognized at both national and international levels
7. Enhancing GCG unit role in coordinating the implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC);
8. Internal competitions to promote GCG initiative implementation;
9. Business initiatives focused on win-win benefits for stakeholders and environmental sustainability; and
10. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) aligned with ISO 260000 and Guidance Social Responsibility.

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

Dalam rangka meningkatkan pemahaman karyawan terhadap penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, PTP Terminal Nonpetikemas secara konsisten mengadakan kegiatan sosialisasi. Hal ini dilakukan melalui berbagai *platform* komunikasi, termasuk tatap muka seperti forum dan rapat-rapat internal, serta melalui saluran internal seperti intranet, *website* perusahaan, dan media sosial. Pada tahun 2024, beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi:

Socialization and Internalization of GCG Principles

In order to increase employee understanding of GCG implementation within the Company, PTP Terminal Nonpetikemas consistently conducts socialization activities. These are carried out through various communication platforms, including face-to-face forums and internal meetings, as well as through internal channels such as the intranet, the corporate website, and social media. In 2024, several materials presented during these socialization activities included:

No	Bentuk Sosialisasi Form of Socialization	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	Sosialisasi Pemahaman GCG melalui P-Good Socialization of GCG Understanding through P-Good	6 Februari 2024-31 Maret 2024 February 6, 2024-March 31, 2024	Pemahaman GCG saat pengisian *survey* GCG dan penandatanganan Pakta Integritas Understanding of Good Corporate Governance (GCG) During the GCG Survey Completion and Integrity Pact Signing
2	Sosialisasi *Awareness* GCG: (@KIM.consult|Linktree) • Pemahaman Governansi Korporat • Pemahaman PUGKI yang merupakan Pedoman Praktik Governansi Korporat Indonesia • Sosialisasi ACGS *Awareness* *GCG Awareness Socialization (@KIM.consul|Llinktree)* • *Corporate Goverance Understanding* • *PUGKI Understanding, known as General Guideline for Indonesian Corporate Governance* • *ACGS Awareness Socialization*	2 Agustus 2024 August 2, 2024	Melalui *platform Zoom Meeting* Conducted via the Zoom Meeting

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Sebagai organ tertinggi, RUPS memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan batasan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS sekaligus merupakan forum komunikasi antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui penyelenggaraan rapat, antara lain guna menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta hasil kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
6. Anggaran Dasar Perusahaan.

PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham PTP Terminal Nonpetikemas per 31 Desember 2024 adalah PT Pelindo Multi Terminal dengan kepemilikan saham sebesar 99,00%, dan PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) dengan kepemilikan saham sebesar 1,00%. Dengan demikian, PT Pelindo Multi Terminal merupakan Pemegang Saham utama/pengendali.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance structure. As the supreme body, the GMS holds rights and authorities that are not vested in the Board of Commissioners or the Board of Directors, within the limits defined by laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The GMS also serves as a communication forum between the Shareholders and the Board of Commissioners and Board of Directors through the conduct of meetings, including to present accountability reports on the performance of duties and the Company's achievements to the Shareholders.

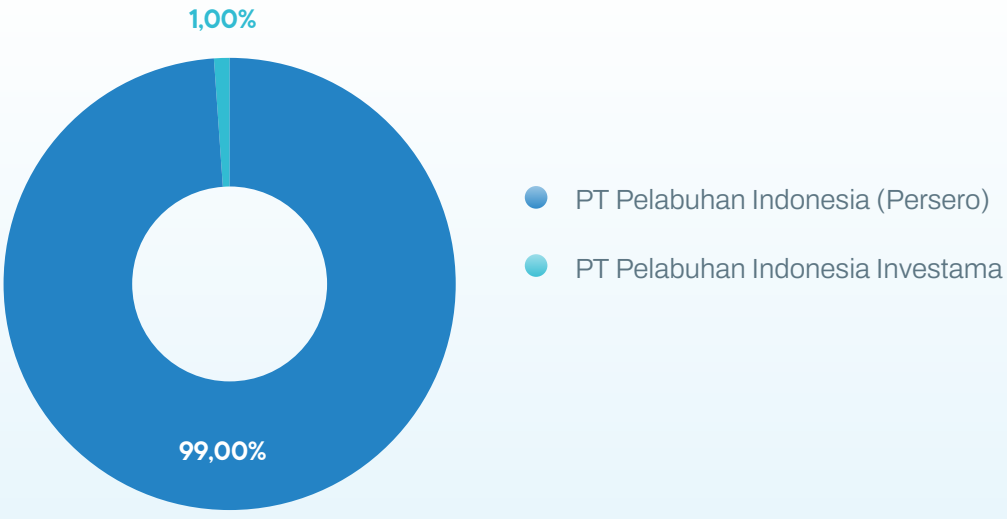
LEGAL BASIS

The legal basis for holding a GMS includes:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law;
4. Government Regulation No. 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
6. Articles of Association of the Company.

SHAREHOLDERS

As of December 31, 2024, the shareholding composition of PTP Terminal Nonpetikemas is as follows, PT Pelindo Multi Terminal holds 99.00% of the shares, while PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) holds 1.00%. Accordingly, PT Pelindo Multi Terminal is the majority/controlling shareholder.



PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) yang memiliki saham Perusahaan sebesar 99,00%. Informasi terkait Pemegang Saham utama/pengendali telah disampaikan secara terperinci pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

HAK PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Hak Pemegang Saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perusahaan, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
5. Hak untuk mengambil Keputusan tertinggi pada Perusahaan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
6. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang/pemilik modal dalam bentuk dividen, sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
7. Hak untuk mendapatkan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas; dan
8. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JENIS-JENIS RUPS

Penyelenggaraan RUPS berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar Perusahaan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diadakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan;
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku berakhir;
3. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Selain RUPS di atas, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 91, juga mengatur mengenai Keputusan RUPS Sirkuler, yang berbunyi, “Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara yang tertulis dengan usul yang bersangkutan”.

RUPS Sirkuler atau Pengambilan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang Saham.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan RUPS didahului pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS.

CONTROLLING/MAJORITY SHAREHOLDER

The controlling/majority shareholder of the Company is PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), which holds 99.00% of the Company’s shares. Detailed information on the controlling/majority shareholder is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

SHAREHOLDER RIGHTS AT THE GMS

The rights of shareholders at the GMS include:

1. The right to request the holding of a GMS;
2. The right to request information regarding GMS agenda items;
3. The right to propose agenda items to be discussed in the GMS;
4. The right to attend and cast votes at the GMS, specifically for shareholders of the Company, whereby each share entitles the holder to 1 (one) vote;
5. The right to make the Company’s highest-level decisions in a timely, measurable and orderly manner;
6. The right to receive profit distributions allocated to shareholders in the form of dividends or remaining liquidation proceeds, proportionate to the number of shares/capital held;
7. The right to fair treatment for all shareholders, including minority shareholders; and
8. Other rights as stated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

TYPES OF GMS

The GMS implementation, In accordance with regulations and the Company’s Articles of Association, as follows:

1. Annual GMS to ratify the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), held no later than 30 days after the start of the fiscal year;
2. Annual GMS to approve the Annual Report, held no later than June following the end of the fiscal year;
3. Extraordinary GMS (EGMS) may be convened at any time as needed in the interest of the Company upon request from the Board of Commissioners and/or shareholders.

In addition to the GMS types above, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 91, also regulates Circular Resolutions of Shareholders, which state, “Shareholders may also adopt binding decisions outside of a GMS, provided all shareholders with voting rights give written approval of the proposed resolution.”

A Circular GMS or Circular Resolution refers to a resolution adopted without a physical GMS meeting, where the resolution is taken by sending the proposal in writing to all shareholders and is unanimously approved in writing by shareholders.

GMS IMPLEMENTATION PROCESS

The Company’s Articles of Association stipulate that all GMS shall be held at the Company’s domicile or at its primary business location within the territory of the Republic of Indonesia. GMS convening must be preceded by a GMS notice issued no later than 15 (fifteen) days from the date the request for a GMS is received.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

The GMS notice is made through registered mail and/or publication in a newspaper. The GMS can proceed if shareholders representing at least 51% (fifty one percent) of the total shares with voting rights are present or represented.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2024

Di tahun 2024, Perusahaan melaksanakan RUPS sebanyak 9 (Sembilan) kali, yakni 1 (satu) kali RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, 1 (satu) kali RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, dan 7 (Tujuh) keputusan RUPS Sirkuler.

IMPLEMENTATION OF THE 2024 GMS

In 2024, the Company held a total of 9 (nine) GMS, consisting of, 1 (one) GMS for the ratification of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP), 1 (one) GMS for the approval of the 2023 Annual Report and ratification of the Financial Statements; and 7 (Seven) GMS Circular Resolutions.

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024

   Tahapan pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

1. GMS for the Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP)

   The stages of implementing the GMS for the ratification of the 2024 RKAP are outlined in the table below.

Undangan Invitation	**Pelaksanaan** Implementation	**Hasil RUPS** GMS Resolutions
Disampaikan pada 25 Januari 2024 melalui Surat Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/25/1/2/PAPS/DIRU/PLMT-24. Delivered on January 25, 2024 via the Board of Directors' Letter of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/25/1/2/PAPS/DIRU/PLMT-24.	Senin, 29 Januari 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 16 Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarsi No. 9 Jakarta Utara. Monday, January 29, 2024, held in the Meeting Room of PT Pelabuhan Tanjung Priok, 16th Floor, Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.	Risalah RUPS PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HM.03.03/29/I/I/PAPS/DISK/PLMT-24 dan No. SK.03/29/I/I/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 29 Januari tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HM.03.03/29/I/I/PAPS/DISK/PLMT-24 and No. SK.03/29/I/I/DHKP/DIRU/PII-24 dated January 29, concerning the Approval of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP).

Hari/Tanggal Day/Date	:	Senin, 29 Januari 2024 Monday, January 29, 2024
Waktu Time	:	16.00 WIB - 18.00 WIB 16.00 - 18.00
Tempat Venue	:	Ruang Rapat PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 16 Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarsi No. 9 Jakarta Utara Meeting Room 16th floor of Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.
Kehadiran Attendance	:	**Pemegang Saham** **Shareholders** • PT Pelindo Multi Terminal 1. Rizki Kurniawan Direktur Strategi dan Komersial Director of Strategy and Commercial • PT Pelabuhan Indonesia Investama 1. Arief Karna Kepala Divisi Hukum, Pengadaan & Kesekretariatan Head of Legal, Procurement, & Secretariat

Kehadiran Attendance	:	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners • Ogi Rulino Komisaris Utama President Commissioner • Lukijanto Komisaris Commissioner • Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner • Andi Hamdani Komisaris Commissioner **Direksi** Board of Directors • Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director • Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Acting Director of Commerce and Business Development) • Dwi Rahmad Toto S. Direktur Operasi Director of Operations • Bambang Sakti Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital
Pihak Independen Pelaksana Independent Party	:	PTP Terminal Nonpetikemas tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara karena bukan emiten/perusahaan publik. PTP Terminal Nonpetikemas did not assign an independent party for vote counting as it is not a publicly listed company.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Meeting resolutions were made based on consensus. The resolutions of the GMS for the Ratification of the 2024 RKAP, along with their implementation and follow-up actions by the Company's Management through the end of 2024, are as follows:

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 1:

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok pada kuadran Netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Approved and ratified the Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok for 2024 Fiscal Year, including determination of risk classification of PT Pelabuhan Tanjung Priok in Neutral quadrant, with the following points :

a. Target Laba (Rugi) Perseroan
Company's Profit (Loss) Target

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Pendapatan Usaha Operating Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	1.738.041
2	Reduksi Pendapatan Revenue Reduction	Juta Rupiah Million Rupiah	0
3	Pendapatan Bersih Net Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	1.738.041
4	Beban Usaha Operating Expenses	Juta Rupiah Million Rupiah	(1.492.561)
5	Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	Juta Rupiah Million Rupiah	245.480
6	Pendapatan (Beban) Diluar Usaha Non-operating Income (Expenses)	Juta Rupiah Million Rupiah	(9.832)
7	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	Juta Rupiah Million Rupiah	235.648

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
8	Beban Pajak Tax Expenses	Juta Rupiah Million Rupiah	(58.912)
9	Laba Bersih Net Profit	Juta Rupiah Million Rupiah	176.735
10	EBITDA	Juta Rupiah Million Rupiah	283.575

b. Proyeksi Arus Kas Perseroan
The Company's Cash Flows Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	(23.640)
2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	(127.620)
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	(26.706)
4	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas & Setara Kas Net Increase/Decrease in Cash & Cash Equivalents	Juta Rupiah Million Rupiah	(177.966)
5	Saldo Kas & Setara Kas Awal Periode Cash & Cash Equivalents at Beginning of the Period	Juta Rupiah Million Rupiah	541.815
6	Saldo Kas & Setara Kas Akhir Periode Cash & Cash Equivalents at End of the Period	Juta Rupiah Million Rupiah	363.849

c. Proyeksi Posisi Keuangan Perseroan
The Company's Financial Position Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Aset Lancar Current Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	685.987
2	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	397.817
3	Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	1.083.804
4	Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	Juta Rupiah Million Rupiah	382.448
5	Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	Juta Rupiah Million Rupiah	835
6	Ekuitas Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	700.521
7	Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities and Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	1.083.804

d. Target Investasi Perseroan
The Company's Investment Target

No.	Uraian Description	RKAP 2024
1	Bangunan Fasilitas Building Facilities	Rp1.000.000.000
2	Alat-Alat Fasilitas Equipment Facilities	Rp6.000.000.000
3	Instalasi Fasilitas Installation Facilities	Rp38.000.000.000
	Total	Rp45.000.000.000

e. Proyeksi Kebutuhan SDM Perseroan
The Company's Human Capital Needs Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
1	BOD Pelindo (Penugasan) Pelindo BOD (Assignment)	Orang People	3
2	BOD Non Pelindo Non Pelindo BOD	Orang People	1
3	Organik Pelindo (Penugasan) Pelindo Organic (Assignment)	Orang People	316
4	Organik Perusahaan Company Organic	Orang People	2
5	PKWT Perusahaan Company's Fixed Term Contracts Employees (PKWT)	Orang People	6
6	Tenaga Alih Daya Outsourcing	Orang People	763
7	JUMLAH TOTAL	Orang People	1.091

f. Arus Barang
Flows of Goods

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024
1	*General Cargo*	Ton Tons	10.025.615,29
		M^3	1.315.399,00
2	*Bag Cargo*	Ton Tons	3.385.563,49
3	Curah Cair Liquid Bulk	Ton Tons	11.087.582,09
4	Curah Kering Dry Bulk	Ton Tons	25.363.138,27
5	Kendaraan Vehicles	Unit	116.193,00
6	Hewan Livestock	Ekor Head	328.725,00
Total		Ton Tons	49.861.900,04
		M^3	1.315.299,00
		Unit	116.193,00
		Ekor Head	328.725,00

g. Produksi
Production

No.	Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah
I	Pelayanan Barang Non Peti Kemas *Non-Conatiner Goods Services*		
	1. Dermaga Wharf	Ton Tons	48.586.586,07
		M^3	1.315.299,27
		Unit	7.500,00
	2. Gudang Penumpukan *Stacking Warehouse*	Ton Hari Tons per Day	2.581.274,00
		M^3 Hari M3 per Day	1.315.299,27

No.	Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah
I	3. Lapangan Penumpukan Stacking Yard	Ton Hari Tons per Day	739.392,22
		M^3 Hari M^3 per Day	1.848.146,88
	4. *Stevadoring*	Ton Tons	23.215.184,52
		M^3	161.110,67
		Unit	7.529,00
	5. *Cargodoring*	Ton Tons	832.035,75
		M^3	-
		Unit	-
	6. *Receiving/Delivery*	Ton Tons	832.035,75

h. Rencana Kerja Manajemen Strategis *Corporate*
Corporate Strategic Management Plan

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	Target Penyelesaian Completion Target	Target *Outcome/Output*
1	Melakukan Ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia *Expanding throughout Indonesia*	Pengoperasian *Ship to Ship* *Ship to Ship Operation*	Desember 2024 *December 2024*	EBT Rp500.000.000
2	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang Terintegrasi *Integrated Port Operational and Commercial Standardization*	Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP *Implementation of Standardized Operational Procedures across PTP Branches*	Desember 2024 *December 2024*	Standarisasi Tanjung Priok Internasional dan *enhancement* Banten *Standardization of Tanjung Priok International and Enhancement Banten*
3	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang Terintegrasi *Integrated Port Operational and Commercial Standardization*	Implementasi HSSE Di Seluruh Cabang PT PTP *HSSE Implementation across All PTP Branches*	Desember 2024 *December 2024*	a. *Zero Fatality* b. Implementasi Kegiatan HSSE c. Tindak Lanjut Paska Audit d. *Emergency Drilling* 1x e. Evaluasi Program K3 1x per semestrer f. Capaian BA/Pakta Integritas ke External a. *Zero Fatality* b. *HSSE activities implementation* c. *Follow-Up Actions post Audit* d. *Emergency Drilling 1x* e. *OHS Evaluation Program once per semester* f. *Achievement of BA/Integrity Pact with External Parties*
4	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif *Enhancement of Production Capacity and Competitive Market Share*	Pelaksanaan Investasi Pengadaan Fasilitas Pendukung Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Kijing *Execution of Investment in Supporting Facilities for Port Kijing Cargo Handling Wharf*	Desember 2024 *December 2024*	EBT Rp1.028.701.701
5	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif *Enhancement of Production Capacity and Competitive Market Share*	Pengadaan dan Optimalisasi Alat Bongkar Muat Kebutuhan Cabang-Cabang PTP *Procurement and Optimization of Cargo Handling Equipment for PTP Branches*	Desember 2024 *December 2024*	EBT Rp4.000.000.000
6	Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan Pendukungnya *Systemization and Digitalization of Port Operations and Supporting Functions*	Pengadaan Perangkat IT Di PTP Kantor Pusat dan Cabang-Cabang *Procurement of IT Infrastructure at PTP Head Office and Branches*	Desember 2024 *December 2024*	Penyediaan layanan *backup server* dan/atau jaringan di area PT Pelabuhan Tanjung Priok *Provision of Backup Server and/or Network Services within the PT Pelabuhan Tanjung Priok area.*

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	Target Penyelesaian Completion Target	Target Outcome/Output
7	*Rightsizing* Organisasi *Organizational Rightsizing*	Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi PTP dan Anak Perusahaan *Organizational Structure Review and Implementation for PTP and Its Subsidiaries*	Desember 2024 *December 2024*	a. Reviu Struktur b. Penempatan SDM Anak Perusahaan a. *Structure Review* b. *Placement of Subsidiaries Human Capital*
8	Program *Learning and Development* SDM yang Terintegrasi *Integrated Human Capital Learning and Development Programs*	Sentralisasi *knowledge management* kepelabuhan *Centralization of Port-Related Knowledge Management*	Desember 2024 *December 2024*	a. *Roadmap* KM b. *Knowledge Map* PTP c. Pelaksanaan program budaya AKHLAK a. *KM Roadmap* b. *PTP Knowledge Map* c. *AKHLAK Culture Program Implementation*
9	Penerapan Manajemen Risiko *Implementation of Risk Management*	Peningkatan Kompetensi dan *Skill* Pengelolaan Manajemen Risiko *Enhancement of Competency and Skills in Risk Management*	Desember 2024 *December 2024*	Sertifikasi *Certification*

i. *Key Performance Indikator*

NO	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	POLARITAS POLARITY	TARGET PTP 2024 2024 PTP Target	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Indonesia Economic and Social Value for Indonesia			50			
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	4	*Maximize*	283,57	Triwulanan Quarterly
2	Pendapatan Revenue	Rp Miliar Rp Billion	4	*Maximize*	1.738,04	Triwulanan Quarterly
3	BOPO	%	3	*Minimize*	85,88	Triwulanan Quarterly
4	*Market Share* Bongkar Muat Curah Market Share of Bulk Loading and Unloading	%	6	*Maximize*	50,00	Tahunan Annually
5	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	5	*Maximize*	49,86	Triwulanan Quarterly
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	%	7	*Maximize*	100	Tahunan Annually
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	%	7	*Maximize*	100	Triwulanan Quarterly
8	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Non Container Mooring Effectiveness Rate (ET/BT)	%	3	*Maximize*	64	Triwulanan Quarterly
9	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	%	7	*Maximize*	100	Tahunan Annually

NO	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	POLARITAS POLARITY	TARGET PTP 2024 2024 PTP Target	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD
10	Implementasi Program TJSL SER Program Implementation	%	7	*Maximize*	100	Tahunan Annually
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		15			
11	Layanan non-petikemas tambahan & ekspansi bisnis Additional non-container services & business expansion	%	4	*Maximize*	100	Semester Semi-Annually
12	Tingkat *Compliance* Perusahaan Corporate Compliance Level	%	7	*Maximize*	100	Triwulanan Quarterly
13	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	4	*Maximize*	90	Triwulanan Quarterly
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		8			
14	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non Container Services	%	4	*Maximize*	100	Triwulanan Quarterly
15	Implementasi HSSE dan Tingkat *Fatality* HSSE Implementation and Fatality Rate	%	4	*Maximize*	100	Triwulanan Quarterly
D.	Peningkatan Investasi Investment Growth		12			
16	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Port Equipment and Infrastructure Investment Development	%	5	*Maximize*	90,00	Triwulanan Quarterly
17	*Value Creation* Optimalisasi Aset operasi non-kontainer Value Creation Optimization of non-container operating assets	Rp Miliar Rp Billion	5	*Maximize*	4	Triwulanan Quarterly
E.	Pengembangan Talenta Talent Development		15			
18	Implementasi Hubungan Industrial Industrial Relationship Implementation	%	3	*Maximize*	100,00	Tahunan Annually
19	Pengelolaan *Talent* Pelindo (*Talent* Perempuan/Milenial, Organ Pengelola Risiko dan Budaya Pelindo Talent Management (Female/ Milenial Talent, Risk and Culture Management Organ)	%	6	*Maximize*	100	Tahunan Annually
20	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Innovation Idea Implementation	%	6	*Maximize*	100	Tahunan Annually
TOTAL			100			

2. Menyetujui Kontrak Manajemen Tahun 2024 sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS ini;
3. Pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan tersebut di atas, agar dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan, prosedur dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Approved the 2024 Management Contract, as attached and deemed an integral part of this GMS.
3. The execution of the above resolutions shall be carried out in accordance with the provisions, procedures, and principles of Good Corporate Governance (GCG), as well as prevailing laws and regulations.

Tindak Lanjut
Follow-Up Actions:
Telah direalisasikan.
Has Been Implemented

2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

2. GMS on the Approval of Annual Report and ratification of Financial Statement Fiscal Year 2023

Undangan Invitation	**Pelaksanaan** Implementation	**Hasil RUPS** GMS Resolutions
Disampaikan pada 15 Juni 2024 melalui Surat Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.02/15/6/1/GDCG/DIRU/PTP-24. Delivered on June 15, through the Letter of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: K.02/15/6/1/GDCG/DIRU/PTP-24.	Selasa, 25 Juni 2024 yang dilaksanakan di Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16, Jalan Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara. Tuesday, June 25, 2024, held at PT Pelabuhan Tanjung Priok Office, Pelindo Tower, 16th Floor, Yos Sudarso Street No. 9, North Jakarta.	Risalah RUPS PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 dan SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 tanggal 25 Juni 2024 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok. Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 and SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 dated June 25, 2024 regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 25 Juni 2024 Tuesday, June 25, 2024
Waktu Time	:	10.00 WIB - 12.00 WIB 10.00 AM-12.00 PM
Tempat Venue	:	Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16 Jalan Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara Meeting Room 16th floor of Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.
Kehadiran Attendance		**Pemegang Saham** Shareholders • PT Pelindo Multi Terminal Yoni Setiawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management • PT Pelabuhan Indonesia Investama Arief Karna Kepala Divisi Hukum, Pengadaan, dan Kesekretariatan Head of Legal, Procurement, and Secretariat Division **Dewan Komisaris** Board of Commissioners • Prakosa Hadi T Komisaris Utama President Commissioner • Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner • Andi Hamdani Komisaris Commissioner • Lukijanto Komisaris Independen diwakilkan oleh Komisaris Utama dengan Surat Kuasa tanggal; 25 Juni 2024 Independent Commissioner represented by President Commissioner according to Power of Attorney dated June 25, 2024
Kehadiran Attendance	:	**Direksi** Board of Directors • Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director • Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development • Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations • Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management
Pihak Independen Pelaksana Independent Party	:	PTP Terminal Nonpetikemas tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara karena bukan emiten/perusahaan publik. PTP Terminal Nonpetikemas does not engage an independent party for vote counting as it is not a publicly listed company.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Meeting resolutions were made based on consensus. The resolutions of the GMS for the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statement Fiscal Year 2023 along with their implementation and follow-up actions by the Company's Management through the end of 2023, are as follows:

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 1:
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun 2023.
Pokok-pokok Laporan Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2023, sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ditutup dengan total aset serta total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp1.053.843.037.956,- (satu triliun lima puluh tiga miliyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
2. Perhitungan Laba Setelah Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi laba bersih sebesar Rp158.059.257.120,- (seratus lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Accountability for the 2023 Financial Statements
The key highlights of PT Pelabuhan Tanjung Priok Audited 2023 Financial Statements are as follows:

1. Statement of Financial Position of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the year ended December 31, 2023 recorded total assets, total liabilities, and equity amounting to Rp1,053,843,037,956 (one trillion fifty-three billion eight hundred forty-three million thirty-seven thousand nine hundred fifty-six rupiah).
2. Net Profit Calculation after income Tax for the period of January 1 to December 31, 2023 with net profit realization of Rp158,059,257,120 (one hundred fifty-eight billion fifty-nine million two hundred fifty-seven thousand one hundred twenty rupiah).

Keputusan:
Mengesahkan laporan tahunan tahun buku 2023 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (*member of Ernst and Young Global*), sesuai laporannya Nomor: 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 Atas Laporan Keuangan tahun buku 2023 dengan Opini "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahana dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Resolutions:
Approval of Annual Report for 2023 Fiscal Year, including Supervisory Report of Board of Commissioners, and approval of the Company's Financial Statements for 2023 Fiscal Year, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd), as stated in report number: 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 dated April 24, 2024, with the opinion "Presenting fairly, in all material aspects", simultaneously granting full discharge and release (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions undertaken during Fiscal Year ended on December 31, 2023, provided that such actions were not criminal in nature or in violation of applicable laws, regulations, and procedures, and are properly reflected in the 2023 Annual Report and Financial Statements of the Company.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-up Actions:
Has been realized.

Agenda 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
Determination of Utilization of the Company's Net Profit for 2023 Fiscal Year.

Keputusan:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, ditetapkan yaitu sebagai berikut:
1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp79.029.628.560,- (tujuh puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagai dividen;
2. Sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp7.902.962.856,- (tujuh miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) sebagai cadangan wajib;
3. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp71.126.665.704,- (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) sebagai cadangan lainnya.

Resolutions:
The Allocation of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year, as stipulated in the following:
1. 50%(fifty percent) or Rp79,029,628,560 (seventy-nine billion twenty-nine million six hundred twenty-eight thousand five hundred sixty rupiah) shall be distributed as dividends;
2. 5% (five percent) or Rp7,902,962,856 (seven billion nine hundred two million nine hundred sixty-two thousand eight hundred fifty-six rupiah) shall be allocated to the statutory reserve;
3. 45%(forty-five percent) or Rp71,126,665,704 (seventy-one billion one hundred twenty-six million six hundred sixty-five thousand seven hundred four rupiah) shall be allocated to other reserves.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-up Actions:
Has been realized.

Agenda 3:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024.
Determination of Tantiem for 2023 Fiscal Year, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Benefits for 2024.

Keputusan:
Resolutions
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024, akan ditetapkan secara tersendiri.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-up Actions:
Has been realized.

Agenda 4:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2024 Fiscal Year.

Keputusan:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global Ltd*).

Resolutions:
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2024 Fiscal Year, will use Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd).

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-up Actions:
Has been realized.

3. RUPS Sirkuler
   Di tahun 2024, Perseroan secara sirkuler menghasilkan 7 (Tujuh) Surat Keputusan sebagai berikut:

3. Circular GMS
   In 2024, the Company circularly formalized 7 (seven) Decree as follows:

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not been implemented	Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024 Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.005/PII-SK.DIR.I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.005/PII-SK.DIR.I/2024 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1. Memberhentikan dengan hormat sdr. H. Sabri Saiman sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana terhitung pada pengangkatannya yang sebelumnya melalui Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/25/10/1/MTI-2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 2. Mengesahkan pengangkatan secara definitf Sdr. Andi Hamdani sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Ogi Rulino : Komisaris Utama b. Lukijanto : Komisaris c. Marta Hardisarwono : Komisaris d. Andi Hamdani : Komisaris 4. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama. 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut. 6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan. 7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Honorably dismiss Mr. H. Sabri Saiman from his position as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok, effective from the date of his appointment as stated in the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/25/10/1/MTI-2018 dated October 25, 2018 regarding the Change in the Composition of the Board of Commissioners, which ended on October 24, 2024. We extend our gratitude for his contributions and dedication during his tenure and grant full discharge and release from all responsibilities and actions carried out during his term of office (acquit et de charge), provided that such actions were not unlawful and/or criminal in nature. 2. Formalize the definitive appointment of Mr. Andi Hamdani as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok effective from January 1, 2024, for a term of 5 (five) years without prejudice to the rights of the GMS to dismiss him at any time. 3. With this decision, the composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. Ogi Rulino: President Commissioner b. Lukijanto: Commissioner c. Marta Hardisarwono: Commissioner d. Andi Hamdani: Commissioner 4. This resolution may be executed in multiple counterparts by one or more Shareholders, each of which, when signed, shall be deemed an original, and all such counterparts collectively shall constitute one and the same instrument. 5. Authority, with the right of substitution, is hereby granted to the Board of Directors of the Company to formalize the contents of this resolution into an authentic deed before a notary public or other authorized officials, and to submit notifications and/or request approvals from relevant regulatory bodies as necessary. Accordingly, the Board of Directors or its authorized proxy shall be entitled to appear before notaries and/or officials and/or relevant agencies, provide statements, prepare or instruct the preparation of, and sign all necessary letters, deeds, and documents required for the execution of this authority. 6. This resolution is hereby declared valid and legally binding, both internally and externally to the Company 7. Should any inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary.		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Penetapan Kembali Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/1/DIRU/DIRU/PII-24 concerning Changes to the Organizational Structure and Reappointment of the Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Penyesuaian nama Jabatan Direktur PT Pelabuhan Tanjung Priok yang semula Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. 2. Menetapkan kembali Sdr. Bambang Sakti yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Direktur Keungan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan sampai dengan 02 Juni 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Rino Wisnu Putro : Direktur Utama b. Bambang Sakti : Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko c. Dwi Rahmat Toto : Direktur Operasi d. Rino Wisnu Putro : Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha 4. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama. 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut. 6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan. 7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Adjustment to the title of the Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok, changing from Director of Finance and Human Capital to Director of Finance, Human Capital, and Risk Management. 2. Reappoint Mr. Bambang Sakti, who previously served as Director of Finance and Human Capital, as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok for a term ending on June 2, 2027, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss him at any time. 3. With this decision, the composition of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. Rino Wisnu Putro: President Director b. Bambang Sakti: Acting Director of Finance, Human Capital, and Risk Management c. Dwi Rahmat Toto: Director of Operations d. Rino Wisnu Putro: Acting Director of Commercial and Business Development 4. This resolution may be executed in multiple counterparts by one or more Shareholders, each of which, when signed, shall be deemed an original, and all such counterparts collectively shall constitute one and the same instrument. 5. Authority, with the right of substitution, is hereby granted to the Board of Directors of the Company to formalize the contents of this resolution into an authentic deed before a notary public or other authorized officials, and to submit notifications and/or request approvals from relevant regulatory bodies as necessary. Accordingly, the Board of Directors or its authorized proxy shall be entitled to appear before notaries and/or officials and/or relevant agencies, provide statements, prepare or instruct the preparation of, and sign all necessary letters, deeds, and documents required for the execution of this authority. 6. This resolution is hereby declared valid and legally binding both internally and externally to the Company. 7. Should any inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary.		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/ PII-24 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 Regarding the Changes in the Composition of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Memberhentikan dengan hormat sdr. Rino Wisnu Putro sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 2. Memberhentikan dengan hormat sdr. Rino Wisnu Putro sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Persetujuan atas Perubahan Logo Perusahaan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-004/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 3. Memberhentikan dengan hormat sdr. Dwi Rahmad Toto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 4. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Indra Hidayat Sani sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 5. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Dwi Rahmat Toto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	6. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Kabar Yanto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 7. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Indra Hidayat Sani : Direktur Utama b. Dwi Rahmat Toto : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha c. Kalbar Yanto : Direktur Operasi d. Bambang Sakti : Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko 8. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama. 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut. 10. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan. 11. Keputusan Sirkuler ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 1 Maret 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not been implemented	Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024 Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Honorable Discharged of Mr. Rino Wisnu Putro as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok. He was previously appointed pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) regarding changes in the Board of Directors as stipulated in Decree No. SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022. The Company extends its gratitude for his contributions during his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) for all acts and/or decisions made in the execution of his duties and authorities, provided such actions were not unlawful or constitute criminal acts. 2. Honorable Discharge of Mr. Rino Wisnu Putro as Acting Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok, who was appointed pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok concerning the Approval of the Corporate Logo Change and Changes in the Board of Directors, as stipulated in Decree No. SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Decree No. SK-004/PII-SK.D/IV/2022 dated April 18, 2022. The Company extends its gratitude for his contributions during his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) for all acts and/or decisions made in the execution of his duties and authorities, provided such actions were not unlawful or constitute criminal acts. 3. Honorable Discharge of Mr. Dwi Rahmad Toto as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok, who was appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) regarding changes in the composition of the Board of Directors, as stipulated in Decree No. SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and Decree No. SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022. The Company extends gratitude for his valuable service and contributions during his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) for all actions and decisions taken in the performance of his duties and responsibilities, provided such actions were not unlawful and/or did not constitute a criminal offense. 4. The appointment of Mr. Indra Hidayat Sani as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok was ratified for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time. 5. The appointment of Mr. Dwi Rahmat Toto as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok was ratified for a term of 5 (five) years, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss him at any time. 6. The appointment of Mr. Kabar Yanto as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok was ratified for a term of 5 (five) years, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss him at any time. 7. With this resolution, the composition of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. Indra Hidayat Sani: President Director b. Dwi Rahmat Toto: Director of Commercial and Business Development		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	c. Kabar Yanto: Director of Operations d. Bambang Sakti: Director of Finance, Human Capital, and Risk Management 8. This resolution may be executed in multiple counterparts by one or more Shareholders, each of which, when signed, shall be deemed an original, and all such counterparts collectively shall constitute one and the same instrument. 9. Authority, with the right of substitution, is hereby granted to the Board of Directors of the Company to formalize the contents of this resolution into an authentic deed before a notary public or other authorized officials, and to submit notifications and/or request approvals from relevant regulatory bodies as necessary. Accordingly, the Board of Directors or its authorized proxy shall be entitled to appear before notaries and/or officials and/or relevant agencies, provide statements, prepare or instruct the preparation of, and sign all necessary letters, deeds, and documents required for the execution of this authority. 10. This resolution is hereby declared valid and legally binding, both internally and externally to the Company. 11. This Circular Resolution is deemed valid as of March 1, 2024, with the understanding that any errors or inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary.		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 regarding the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Memberhentikan dengan hormat sdr. Ogi Rulino sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor SK-003/PII-D1-1/2020 tanggal 13 Mei 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 2. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Prakosa Hadi T sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 3. Menetapkan pengangkatan kembali Sdr. Lukijanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-008/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun meneruskan masa jabatan sebelumnya. 4. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Komisaris Utama : Prakosa Hadi T b. Komisaris : Marta Hardisarwono c. Komisaris : Andi Hamdani d. Komisaris Independen : Lukijanto Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2024. 5. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. 6. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan ini jika diperlukan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan hal-hal yang diatur dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, maka mengikuti hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Honorable Discharge of Mr. Ogi Rulino as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok, who was appointed pursuant to the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as stipulated in Decree No. KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 and No. SK-003/PII-D1-1/2020 dated May 13, 2020. The Company extends gratitude for his service and valuable contributions during his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) from all acts and/or decisions made in the execution of his duties and responsibilities, provided that such actions were not in violation of applicable laws and/or did not constitute a criminal offense. 2. The appointment of Mr. Prakosa Hadi T as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok was ratified for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time. 3. Mr. Lukijanto was reappointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok. He previously served as a Commissioner of the Company, having been appointed as commissioner pursuant to the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, under Decree No. SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and No. SK-008/PII-SK.D/IV/2022 dated April 26, 2022, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok. His reappointment is effective for a term of 5 (five) years, continuing from his previous term of office. 4. With this resolution, the composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. President Commissioner : Prakosa Hadi T b. Commissioner : Marta Hardisarwono c. Commissioner : Andi Hamdani d. Independent Commissioner : Lukijanto The resolution is deemed valid as of April 1, 2024. 5. Should any inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary. 6. The Shareholders of the Company hereby grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to state all or part of this Circular Resolution of the Shareholders in a separate notarial deed, if necessary. In the event of any inconsistency between the provisions of the Company's Articles of Association and the matters stipulated in this Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, the provisions of this Circular Resolution shall prevail.		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Memberhentikan dengan hormat sdr. Marta Hardisarwono sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan Nomor SK.002/PII-SK.D1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 2. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Dedy Cahyadi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Komisaris Utama : Prakosa Hadi T b. Komisaris : Dedy Cahyadi c. Komisaris : Andi Hamdani d. Komisaris Independen : Lukijanto 4. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. 5. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan ini jika diperlukan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan hal-hal yang diatur dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, maka mengikuti hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini. 6. Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2024.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not been implemented	Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024 Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Honorable Discharge of Mr. Marta Hardisarwono as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok, pursuant to the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as stated in Decree No. KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 and No. SK.002/PII-SK.D1/VI/2021 dated June 21, 2021. The Company expresses gratitude for his dedication and contributions during his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) for all actions and decisions undertaken in the execution of his duties and responsibilities, provided such actions did not constitute a violation of law and/or a criminal offense. 2. The appointment of Mr. Dedy Cahyadi as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok was ratified for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time. 3. With this resolution, the composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. President Commissioner : Prakosa Hadi T b. Commissioner : Dedy Cahyadi c. Commissioner : Andi Hamdani d. Independent Commissioner : Lukijanto 4. Should any inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary. 5. The Shareholders of the Company hereby grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to state all or part of this Circular Resolution of the Shareholders in a separate notarial deed, if necessary. In the event of any inconsistency between the provisions of the Company's Articles of Association and the matters stipulated in this Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, the provisions of this Circular Resolution shall prevail. 6. This Resolution is deemed valid as of August 1, 2024,		

No. RUPS GMS No.	**Hasil Keputusan** Resolutions	**Telah/ Belum Terlaksana** Has/Has not been implemented	**Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024** Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and Number: SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 regarding the Changes in the Composition of the Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Memberhentikan dengan hormat sdr. Kalbar Yanto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan pidana. 2. Menunjuk Sdr. Dwi Rahmat Toto sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Direktur Operasi definitif yang baru. 3. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Dewan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut: a. Direktur Utama : Indra Hidayat Sani b. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Dwi Rahmat Toto c. Plt. Direktur Operasi : Dwi Rahmat Toto d. Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko : Bambang Sakti 4. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama. 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut. 6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan. 7. Keputusan Sirkuler ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 1 September 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.	V	Telah direalisasikan. Has been realized

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not been implemented	Realisasi dan/ atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2024 Realization and/or Follow-Up Action by Management as of December 31, 2024
	1. Honorable Discharge of Mr. Kalbar Yanto as Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok, who was appointed pursuant to the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok regarding the Changes in the Composition of the Management, as stipulated in Decree No. SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024. The Company expresses gratitude for his service and contributions throughout his tenure and grants full release and discharge (acquit et de charge) for all acts and/or decisions made in the execution of his duties and responsibilities, provided such actions were not in violation of applicable law and/or did not constitute a criminal offense. 2. Mr. Dwi Rahmat Toto was appointed as Acting Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok, effective until the appointment of a new Acting or definitive Director of Operations. 3. With this resolution, the composition of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows: a. President Director : Indra Hidayat Sani b. Director of Commercial and Business Development : Dwi Rahmat Toto c. Acting Director of Operations : Dwi Rahmat Toto d. Director of Finance, Human Capital, and Risk Management : Bambang Sakti 4. This resolution may be executed in multiple counterparts by one or more Shareholders, each of which, when signed, shall be deemed an original, and all such counterparts collectively shall constitute one and the same instrument. 5. Authority, with the right of substitution, is hereby granted to the Board of Directors of the Company to formalize the contents of this resolution into an authentic deed before a notary public or other authorized officials, and to submit notifications and/or request approvals from relevant regulatory bodies as necessary. Accordingly, the Board of Directors or its authorized proxy shall be entitled to appear before notaries and/or officials and/or relevant agencies, provide statements, prepare or instruct the preparation of, and sign all necessary letters, deeds, and documents required for the execution of this authority. 6. This resolution is hereby declared valid and legally binding, both internally and externally to the Company. 7. This Circular Resolution is deemed valid as of March 1, 2024, with the understanding that any errors or inaccuracies discovered in the future shall be subject to correction as deemed necessary.		

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Di tahun 2023, Perusahaan melaksanakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 1 (satu) kali RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, 1 (satu) kali RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, dan 1 (satu) keputusan RUPS Sirkuler.

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023

IMPLEMENTATION OF THE GMS IN 2023

In 2023, the Company held a total of 3 (three) GMS, consisting of 1 (one) GMS for the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2023, 1 (one) GMS for the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2022; and 1 (one) Circular Resolution of the Shareholders.

1. GMS for the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2023

Tahapan pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

The stages of the GMS process for the approval of the RKAP for 2023 are outlined in the table below.

Undangan Invitation	**Pelaksanaan** Implementation	**Hasil RUPS** GMS Resolutions
Disampaikan pada 10 Januari 2023 melalui Surat Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.332/10/1/5/ PTP-23. Delivered on January 10, 2023 through PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Letter Number: M.332/10/1/5/ PTP-23	Senin, 30 Januari 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat PT Pelabuhan Tanjung Lt. 19 Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarso No. 9, Jakarta Utara. Monday, January 30, 2023 held at PT Pelabuhan Tanjung Meeting Room 19th floor of Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.	Risalah RUPS PT Pelabuhan Tanjung Priok No. PJ.03.06/2/1/1/ PAPS/ DIRU/PLMT-23 dan No. SK-009/PII-SK.DIR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Minutes of PT Pelabuhan Tanjung Priok GMS No. PJ.03.06/2/1/ PAPS/DIRU/PLMT-23 and No. SK-009/PII-SK.DIR/I/2023 dated January 30, 2023 concerning Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023.

Hari/Tanggal Day/Date	:	Senin, 30 Januari 2023 Monday, January 30, 2023
Waktu Time	:	10.00 WIB - 12.00 WIB 10.00 AM - 12.00 PM
Tempat Venue	:	Ruang Rapat PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 19 Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarso No. 9, Jakarta Utara Meeting Room 19th floor of Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.
Kehadiran Attendance	:	**Pemegang Saham** Shareholders : • PT Pelindo Multi Terminal Yon Irawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management • PT Pelabuhan Indonesia Investama Sugeng Mulyadi Direktur Director **Dewan Komisaris** Board of Commissioners : • Ogi Rulino Komisaris Utama President Commissioner • Lukijanto Komisaris Commissioner • Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner • Sabri Saiman Komisaris Independen Independent Commissioner **Direksi** Board of Directors : • Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director • Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Acting Director of Commerce and Business Development • Dwi Rahmad Toto Direktur Operasi Director of Operations • Bambang Sakti Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital)
Pihak Independen Pelaksana Independent Party	:	PTP Terminal Nonpetikemas tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara karena bukan emiten/perusahaan publik. PTP Terminal Nonpetikemas did not assign an independent party to count votes because it is not a public Listed Company.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Meeting resolutions are taken based on deliberation by consensus. 2023 RKAP Ratification GMS resolutions along with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023 areas follows:

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 1:
1. Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023
2. Persetujuan Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI) Tahun 2023
1. Approval of the Company Work Plan & Budget (RKAP) Year 2023
2. Approval of Management Contract and Key Performance Indicators (KPI) for 2023

Keputusan | Resolutions: :
1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok pada kuadran Netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Approved and ratified the Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok for 2023 Fiscal Year, including determination of risk classification of PT Pelabuhan Tanjung Priok in Neutral quadrant, with the following points :

a. Target Laba (Rugi) Perseroan
Company's Profit (Loss) Target

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	Pendapatan Usaha Operating Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	1.475.447
2	Reduksi Pendapatan Revenue Reduction	Juta Rupiah Million Rupiah	-
3	Pendapatan Bersih Net Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	1.475.447
4	Beban Usaha Operating Expenses	Juta Rupiah Million Rupiah	1.246.775
5	Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	Juta Rupiah Million Rupiah	228.672
6	Pendapatan (Beban) Diluar Usaha Non-operating Income (Expenses)	Juta Rupiah Million Rupiah	12.867
7	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	Juta Rupiah Million Rupiah	241.539
8	Beban Pajak Tax Expenses	Juta Rupiah Million Rupiah	50.138
9	Laba Bersih Net Profit	Juta Rupiah Million Rupiah	191.400

b. Proyeksi Arus Kas Perseroan
The Company's Cash Flows Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	163.422
2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	(108.000)
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	Juta Rupiah Million Rupiah	-
4	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas & Setara Kas Net Increase/Decrease in Cash & Cash Equivalents	Juta Rupiah Million Rupiah	55.422
5	Saldo Kas & Setara Kas Awal Periode Cash & Cash Equivalents at Beginning of the Period	Juta Rupiah Million Rupiah	580.874
6	Saldo Kas & Setara Kas Akhir Periode Cash & Cash Equivalents at End of the Period	Juta Rupiah Million Rupiah	636.296

c. Proyeksi Posisi Keuangan Perseroan
• *The Company's Financial Position Projection*

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	Aset Lancar Current Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	992.705
2	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	309.111
3	Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	1.301.816
4	Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	Juta Rupiah Million Rupiah	602.441
5	Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	Juta Rupiah Million Rupiah	656
6	Ekuitas Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	698.719
7	Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities and Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	1.301.816

d. Proyeksi Posisi Keuangan Perseroan
The Company's Financial Position Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	Investasi Murni Pure Investment	Juta Rupiah Million Rupiah	34.600
2	Investasi Multi *Year* 2023 Multi-Year Investment 2023	Juta Rupiah Million Rupiah	25.066
3	Investasi Multi *Year* 2022 Multi-Year Investment 2022	Juta Rupiah Million Rupiah	20.095
4	Investasi Multi *Year* 2021 Multi-Year Investment 2021	Juta Rupiah Million Rupiah	23.000
5	Investasi Multi *Year* 2020 Multi-Year Investment 2020	Juta Rupiah Million Rupiah	10.000
6	Investasi Multi *Year* 2019 Multi-Year Investment 2019	Juta Rupiah Million Rupiah	5.000
7	Jumlah Investasi Total Investment	Juta Rupiah Million Rupiah	117.761

e. Proyeksi Kebutuhan SDM Perseroan
The Company's Human Capital Needs Projection

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	BOD Pelindo (Penugasan) Pelindo BOD (Assignment)	Orang People	3
2	BOD Non Pelindo Non Pelindo BOD	Orang People	1
3	Organik Pelindo (Penugasan) Pelindo Organic (Assignment)	Orang People	346
4	Organik Perusahaan Company Organic	Orang People	2
5	PKWT Perusahaan Company's Fixed Term Contracts Employees (PKWT)	Orang People	6
6	Tenaga Alih Daya Outsourcing	Orang People	789
7	JUMLAH Total	Orang People	1.147

f. Target Operasional Perseroan
The Company's Operational Targets

No.	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP
1	*General Cargo*	Ton Tons	9.430.697
		M^3	923.320
2	*Bag Cargo*	Ton Tons	4.169.786
3	Curah Cair Liquid Bulk	Ton Tons	12.230.179
4	Curah Kering Dry Bulk	Ton Tons	25.070.330
5	Kendaraan Vehicles	Unit	108.893
6	Hewan Livestock	Ekor Head	375.094
Total		Ton Tons	50.900.992
		M^3	923.320
		Unit	108.893
		Ekor Head	375.094

g. Rencana Kerja Manajemen Strategis *Corporate*
Corporate Strategic Management Plan

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	*Output*	Divisi Division
1	Penguatan *Branding* Perusahaan & Komunikasi Pemasaran	Program CSR	1. Penyusunan *Roadmap* Program Unggulan 2. Peningkatan ekonomi masyarakat (kegiatan akademi UMKM PTP Terminal Nonpetikemas) 3. Hijau Bersama PTP - Penanaman *Mangrove* 4. Cerdas Bersama PTP - Kejar Paket C 5. Cerdas Bersama PTP - PTP Perbaiki Sarana Sekolah 6. Sehat Bersama PTP - PTP Khitanan Massal 7. Sehat Bersama PTP - PTP Donor Darah 8. Mudik Bersama PTP 9. Qurban Bersama PTP 10. Berbagi Bersama PTP - PTP Berbagi Takjil 11. Berbagi Bersama PTP - PTP Berbagi Sembako 12. Berbagi Bersama PTO - PTP Berbagi Santunan Anak Yatim 13. Bantuan Sosial 14. Pelindo *Joint* CSR 15. Pelaporan Angka SROI	Sekretaris Perusahaan

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	*Output*	Divisi Division
	The Company's Operational Targets	*CSR Programs*	1. Preparation of a Roadmap for Flagship Programs 2. Improving the community's economy (PTP Terminal Nonpetikemas MSME academy activities) 3. Green with PTP - Mangrove Planting 4. Smart with PTP - Study Group for Package C 5. Smart Together with PTP - PTP Improves School Facilities 6. Healthy Together with PTP - PTP Mass Circumcision 7. Healthy Together PTP - PTP Blood Donation 8. Homecoming with PTP 9. Qurban with PTP 10. Sharing with PTP - PTP Sharing Takjil 11. Sharing with PTP - PTP Sharing Groceries 12. Sharing with PTO - PTP Sharing Orphan Compensation 13. Social Assistance 14. Pelindo Joint CSR 15. SROI Number Reporting	Corporate Secretary
2	Internalisasi Budaya Culture Internalization	Implementasi Program Inovasi Implementation of Innovation Program	BAST atau BAGo Live Implementasi BAST or Go Live BA Implementation	Perencanaan Strategis Strategic Planning
3	Melakukan Ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia Expanding throughout Indonesia	Kajian dan Kerjasama Pelayanan Operasi pada TUKS atau Pelabuhan K/L Review and Cooperation of Operational Services at TUKS or K/L Port	1. Kajian kerja Sama Pengoperasian TUKS atau Pelabuhan K/L 2. Kerja Sama Pengoperasian TUKS atau Pelabuhan K/L (PKS) 3. Laporan Pencapaian *Value Creation* atau Kerja Sama TUKS atau Pelabuhan K/L. 1. Feasibility Study for the Operation of TUKS or K/L Ports 2. Operational Cooperation Agreement for TUKS or K/L Ports (MoU/PKS) 3. Value Creation Achievement Report or TUKS/K/L Ports Cooperation Report	Pengembangan Usaha Business Development
4	Optimalisasi Aset Operasi Non- petikemas Optimization of Non-petikemas Operating Assets	Optimalisasi Utilisasi Fasilitas & Peralatan Pelabuhan Optimization of Utilization of Port Facilities & Equipment	1. Kebijakan terkait optimalisasi Fasilitas dan Peralatan 2. Peningkatan utilitas 3. Lapangan 5% 4. Gudang 5% 5. Peralatan 5% 6. Laporan Realisasi *Value Creation* pengoperasian gudang Banten 7. Laporan Realisasi *Value Creation* pengoperasian Gudang B Teluk Bayur 8. *Roadmap* Optimalisasi Utilitas *Asset*	Pemasaran & CR Marketing & CR

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	Output	Divisi Division
			1. Policies related to optimization of Facilities and Equipment 2. Utility upgrades 3. Field 5% 4. Warehouse 5% 5. Equipment 5% 6. Banten warehouse operation Value Creation Realization Report 7. Report on Realization of Value Creation for Warehouse B Teluk Bayur operation 8. Asset Utility Optimization Roadmap	
5	Melakukan ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia Expansion in all regions of Indonesia	Mengikuti Kegiatan Lelang untuk Kegiatan *Shorebase* *Participating in Bidding Activities for Shorebase Activities*	1. *Monitoring* berkesinambungan potensi lelang di CIVD/input lain 2. Kegiatan lelang periode triwulan 1,2,3,4 terlaksana 3. Perjanjian Kerjasama dengan K3S untuk penyediaan *Shorebase* 4. Laporan pencapaian *value creation* atas pengoperasian *shorebase* (Lhoksumawe) 1. Continuous monitoring of potential auctions in CIVD/other inputs 2. Auction activities for 1st,2nd,3rd,4th quarter of period conducted 3. Cooperation Agreement with K3S for Shorebase provision 4. Report on value creation achievement on shorebase operation (Lhoksumawe)	Satuan Kerja Work Unit
6	Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan Peralatan Operasi Improved Performance and Availability of Operating Equipment	Penyelenggaraan K3 di Kantor Pusat PT PTP & Cabang PT PTP dalam rangka mendukung terciptanya *zero accident* *Implementation of OHS PTP Head Office & PTP Branches in order to support the creation of zero accidents*	*Management WalkThrough* (min 1 cabang 1 x kunjungan Direksi) *Safety Forum* (internal & external) (min 4 x / thn) *2x *internal* & 2x external *Safety Patrol* {min 1 x / day per terminal) *Safety Briefing* {min 1 x / shift) *Zero accident (zero fatality)* *Management WalkThrough (min 1 branch 1 x Board of Directors visit)* *Safety Forum (internal & external) (min 4 x/ year) *2x internal & 2x external Safety Patrols (min 1 x/day per terminal)* *Safety Briefings {min 1 x/shift) Zero accident (zero fatality)*	Operasi Operation
7	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang Terintegrasi Integrated Port Operational and Commercial Standardization	Pembuatan *Guidelines* dan Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP Guidelines Development and Implementation of PTP Branch Operation Standardization	1. *Guidelines Standar* Operasi di semua Pelabuhan (sesuai kelas pelabuhan) 2. Implementasi standarisasi 3. Laporan *Value Creation* relokasi alat fasilitas Pelabuhan 4. Laporan peningkatan kinerja ET /BT dan TSO 1. Guidelines for Operating Standards in all Ports (according to port class) 2. Standardization implementation 3. Value Creation Report of Port facility equipment relocation 4. ET/BT and TSO performance improvement report	Operasi Operation

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	Output	Divisi Division
8	Peningkatan Kinerja dan ketersediaan Peralatan Operasi Improved Performance and availability of Operating Equipment	Pemenuhan Peralatan Pelabuhan di Cabang PTP Fulfillment of Port Equipment at PTP Branches	1. 2 (dua) unit *Grab* GJC tersedia di PTP Cabang Palembang 2. 2 (dua) unit *Forklift* Kap 3 ton tersedia di PTP Cabang Palembang 3. 2 (dua) unit *Grab* GLC Kap. Min. 17 m^3 tersedia di PTP Cabang Panjang 4. 2 (dua) unit *Hopper* Kap. 20 m^3 tersedia di PTP Cabang Panjang 5. 2 (dua) unit *Grab* GLC tersedia di PTP Cabang Banten 6. 2 (dua) unit *Excavator* tersedia di PTP Cabang Banten 7. 2 (dua) unit *Wheel Loader* Kapasitas Min. 3 m^3 tersedia di PTP Cabang Banten 8. 1 (satu) Unit *Bulldozer* tersedia di PTP Cabang Bengkulu 9. 1 (satu) set *Generator* Set tersedia di PTP Cabang Bengkulu	Teknik Engineering
			1. 2 (two) Grab GJC units available at PTP Palembang Branch 2. 2 (two) units of 3-ton Kap Forklift available at PTP Palembang Branch 3. 2 (two) Grab GLC units Kap. Min. 17 m^3 available at PTP Panjang Branch 4. 2 (two) Hopper units Kap. 20 m^3 available at PTP Panjang Branch 5. 2 (two) Grab GLC units available at PTP Banten Branch 6. 2 (two) Excavator units available at PTP Banten Branch 7. 2 (two) units of Wheel Loader Capacity Min. 3 m^3 available at PTP Banten Branch 8. 1 (one) Bulldozer Unit is available at PTP Bengkulu Branch 9. 1 (one) set of Generator Set available at PTP Bengkulu Branch	
9	Sistemisasi dan digitalisasi proses bisnis non-petikemas Systemization and digitization of non-container business processes	Pembangunan Sistem *Database* IT IT Database System Development	Dokumen Desain Documents Design	Sistem Informasi Information System

No.	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	RKM	Output	Divisi Division
10	Sistemasi dan Digitalisasi Systemization and Digitalization	Pengembangan Sistem IT IT System Development	Terimplementasinya: 1. TOS dan Billing di PTP Cabang Terimplementasi 2. e-RKM 3. Implementasi Aplikasi Ide Inovasi 4. Sistem *tracking tracing* pengadaan 5. Pengembangan Sistem STID 6. *Review* dan Evaluasi Sistem Eksisting PTP 7. Sistem pengembangan lainnya 8. Laporan Evaluasi & Rekomendasi Implementation of: 1. TOS and Billing in PTP Branches Implemented 2. e-RKM 3. Implementation of Idea Innovation Application 4. Procurement tracing system 5. STID System Development 6. Review and Evaluation of PTP Existing System 7. Other system development 8. Evaluation Report & Recommendation	Sistem Informasi Information System
11	Program L&D Terintegrasi Integrated L&D Program	*Talent Development*	Pelaksanaan program *Talent Development* untuk satu tingkat di bawah Direksi dan Milenial. Implementation of Talent Development program for one level below Board of Directors and Millennials.	SDM & Umum HC & General Affairs
12	Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Improved Corporate Governance	Implementasi PKB PKB implementation	PKB terimplementasi: 1. Sosialisasi PKB 2. *Alignment* 8 perdir (pelayanan kesehatan, indisipliner pekerja, tunjangan makan siang, diklat, disiplin pekerja, penghasilan pekerja, purnabakti dan pengabdian, dan bipartit) PKB has implemented: 1. PKB Socialization 2. Alignment of 8 BOD Decree (health services, worker indiscipline, lunch allowance, training, worker discipline, worker income, retirement and dedication, and bipartite)	SDM & Umum HC & General Affairs

h. *Key Performance Indikator*

NO	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	POLARITAS POLARITY	TARGET PTP 2023 2023 PTP TARGET
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Indonesia Economic and Social Value for Indonesia			46		
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	5	*Maximize*	256,92
2	Pendapatan Revenue	Rp Miliar Rp Billion	4	*Maximize*	1.4 75,45
3	BOPO	%	3	*Maximize*	84,50
4	*Market Share* Bongkar Muat Curah Market Share of Bulk Loading and Unloading	%	5	*Maximize*	47,00
5	*Non Container Throughput*	Juta Ton Millin Tons	5	*Maximize*	50,90
6a	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	T/S/D	6	*Maximize*	6.288,72
6b	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	T/S/D	6	*Maximize*	3.124,45
6c	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Non Container Mooring Effectiveness Rate (ET/BT)	%	3	*Maximize*	64,17
7	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	4	*Maximize*	2,90
8	Implementasi Program TJSL SER Program Implementation	%	5	*Maximize*	100,00
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation			16		
9a	Kerjasama dengan TUKS Cooperation with TUKS	Jumlah Total	4	*Maximize*	1,00
9b		Rp Miliar Rp Billion	4	*Maximize*	0,10
10	Layanan non-petikemas tambahan & ekspansi bisnis Additional non-container services & business expansion	Rp Miliar Rp Billion	4	*Maximize*	6,00
11	Tingkat *Compliance* Perusahaan Corporate Compliance Level	%	4	*Maximize*	100,00

NO	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	POLARITAS POLARITY	TARGET PTP 2023 2023 PTP TARGET
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership			14		
12	Integrasi antara pelabuhan nonkontainer untuk meningkatkan model konektivitas dengan konsolidasi data Integration between non-container ports to improve connectivity model with data consolidation	%	4	*Maximize*	100,00
13	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non Container Services	%	5	*Maximize*	100,00
14a	Tingkat *Fatality* *Fatality Rate*	Jumlah Total	3	*Minimize*	0,00
14b	Implementasi HSSE HSSE Implementation	%	2	*Maximize*	100,00
Peningkatan Investasi Investment Growth			10		
15	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Port Equipment and Infrastructure Investment Development	%	5	*Maximize*	90,00

NO	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	POLARITAS POLARITY	TARGET PTP 2023 2023 PTP TARGET
16	*Value Creation* Optimalisasi Aset operasi non-kontainer Value Creation Optimization of non-container operating assets	Rp Miliar Rp Billion	5	*Maximize*	0,27
Pengembangan Talenta Talent Development			14		
17	Implementasi PKB PKB Implementation	%	5	*Maximize*	100,00
18	*High Potential* dan *Promotable Talent*	%	4	*Maximize*	5,00
19	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Innovation Idea Implementation	Jumlah Total	5	*Maximize*	1,00
TOTAL			100		

1. Menyetujui Kontrak Manajemen Tahun 2023 sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS ini;
2. Pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan tersebut di atas, agar dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan, prosedur dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Approved the 2023 Management Contract, as attached and deemed an integral part of this GMS.
2. The execution of the above resolutions shall be carried out in accordance with the provisions, procedures, and principles of Good Corporate Governance (GCG), as well as prevailing laws and regulations.

Tindak Lanjut | Follow-Up Actions:
Telah direalisasikan.
Has Been implemented.

2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022

Tahapan pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

2. GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2022 Fiscal Year

The stages of holding the Annual Report Approval GMS and Ratification of 2022 Financial Statements are explained in the table below.

Undangan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Resolutions
Disampaikan pada 12 Juni 2023 melalui Surat Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/12/6/1/GDCG/DIRU/PTP-23. Delivered on June 12, 2023 through PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Letter Number: SK.03/12/6/1/ GDCG/DIRU/ PTP-23	Selasa, 27 Juni 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Lt. 16, Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara. Tuesday, June 27, 2023 held at PT Pelabuhan Tanjung VIP Meeting Room 16th Floor, Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No.9 North Jakarta.	Risalah RUPS PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/27 /6/1/PAPS/DISK/ PLMT-23 dan No. SK-017 /PII-SK. DIR/ VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Pelabuhan Tanjung Priok. Minutes of GMS of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/27/6/1/PAPS/ DISK/PLMT-23 and No. SK-017 /PII-SK. DIR/VI/2023 dated June 27, 2023 concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2022 Fiscal Year of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, June 27, 2023
Waktu Time	:	10.00 WIB - 12.00 WIB 10.00 AM - 12.00 PM
Tempat Venue	:	Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Lt. 16, Gedung Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara Meeting Room 16th floor of Pelindo Tower Building, Jalan Yos Sudarso No. 9, North Jakarta.
Kehadiran Attendance	:	**Pemegang Saham** **Shareholders :** • PT Pelindo Multi Terminal Kokok Susanto Direktur Strategi dan Komersial Kuasa Direktur Utama Director of Strategic and Commercial (The proxy of President Commissioner) • PT Pelabuhan Indonesia Investama Ikhwanoel Direktur Director **Dewan Komisaris** **Board of Commissioners :** • Lukijanto Komisaris Utama President Commissioner • Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner • Sabri Saiman Komisaris Independen Independent Commissioner **Direksi** **Board of Directors :** • Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director • Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Acting Director of Commercial and Business Development • Dwi Rahmad Toto Direktur Operasi Director of Operations • Bambang Sakti Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital
Pihak Independen Pelaksana Independent Party	:	PTP Terminal Nonpetikemas tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara karena bukan emiten/ perusahaan publik. PTP Terminal Nonpetikemas did not assign an independent party to count votes because it is not issuers/ a public Listed Company.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Meeting resolutions were adopted based on deliberation for consensus. The resolutions of GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2022 Fiscal Year along with the implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023 areas follows:

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 1:
Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
Pokok-pokok Laporan Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2022, sebagai berikut:

- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Posisi Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditutup dengan total aset serta total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp1.246.531.960.275,- (terbilang satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Laporan Laba (Rugi)

- Perhitungan Laba Setelah Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi laba bersih sebesar Rp168.373.938.635,- (terbilang seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Approval of the Company's Annual Report and Financial Statements for 2022 Fiscal Year as well as Board of Commissioners Supervisory Report for 2022 Fiscal Year.
The main points of PT Pelabuhan Tanjung Priok's Financial Report for 2022 Fiscal Year, as follows:

- Financial Position Report
- Financial Position Statement of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the year ended December 31, 2022 was closed with total assets and total liabilities and equity of Rp1,246,531,960,275 (fairly one trillion two hundred forty six billion five hundred thirty one million nine hundred sixty thousand two hundred seventy five rupiah).

Profit (Loss) Statement

- Calculation of Profit After Income Tax for the period January 1 to December 31, 2022 with a net profit realization of Rp168,373,938,635 (fairly one hundred sixty-eight billion three hundred seventy-three million nine hundred thirty-eight thousand six hundred thirty-five rupiah).

Keputusan:
Mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja *(member of Ernst & Young Global Ltd),* sesuai laporan nomor 01028/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023 Atas Laporan Keuangan tahun buku 2022 dengan Opini "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolutions:
Approval of Annual Report for 2022 Fiscal Year, including Supervisory Report of Board of Commissioners, and approval of the Company's Financial Statements for 2022 Fiscal Year, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd), as stated in report number: 01028/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/IV/2023 dated April 20, 2023, with the opinion "Presenting fairly, in all material aspects, the financial position of PT Pelabuhan Tanjung Priok as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards," and simultaneously granting full discharge and release (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions undertaken during Fiscal Year ended on December 31, 2022, provided that such actions were not criminal in nature or in violation of applicable laws, regulations, and procedures, and are properly reflected in the Company's reports.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Action:
Has been realized

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
Determination of Utilization of the Company's Net Profit for 2022 Fiscal Year.

Keputusan:
Penetapan Dividen Perseroan Tahun Buku 2022, ditetapkan yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan Cadangan Laba Ditahan Perseroan sebesar Rp118.373.938.635,- (seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Resolutions:
Determination of the Company's Dividend for 2022 Fiscal Year, amounting to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) and the Company's Retained Earnings Reserve amounting to Rp118,373,938,635 (one hundred eighteen billion three hundred seventy-three million nine hundred thirty-eight thousand six hundred thirty-five rupiah).

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has been realized.

Agenda 3:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya.
Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Benefits.

Keputusan:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya, akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Resolutions:
Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Benefits, will be determined in a separate decision.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has Been Realized

Agenda 4:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2023 Fiscal Year.

Keputusan:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja *(member of Ernst & Young Global Ltd).*

Resolutions:
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2023 Fiscal Year, will use Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd).

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has Been Realized

3. RUPS Sirkuler
   Di tahun 2023, Perseroan secara sirkuler menghasilkan 1 (satu) Surat Keputusan sebagai berikut:

3. Circular GMS
   In 2023, the Company circularly produced 1 (one) Decree as follows:

Agenda Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-Up Actions on Meeting Resolutions

Agenda 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
Determination of Utilization of the Company's Net Profit for 2022 Fiscal Year.

Keputusan:
Penetapan Dividen Perseroan Tahun Buku 2022, ditetapkan yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan Cadangan Laba Ditahan Perseroan sebesar Rp118.373.938.635,- (seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Resolutions:
Determination of the Company's Dividend for 2022 Fiscal Year, amounting to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) and the Company's Retained Earnings Reserve amounting to Rp118,373,938,635 (one hundred eighteen billion three hundred seventy-three million nine hundred thirty-eight thousand six hundred thirty-five rupiah).

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has been realized.

Agenda 3:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya.
Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Benefits.

Keputusan:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya, akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Resolutions:
Determination of Tantiem for 2022 Fiscal Year, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Benefits, will be determined in a separate decision.

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has Been Realized

Agenda 4:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2023 Fiscal Year.

Keputusan:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja *(member of Ernst & Young Global Ltd)*.

Resolutions:
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2023 Fiscal Year, will use Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd).

Tindak Lanjut:
Telah direalisasikan.

Follow-Up Actions:
Has Been Realized

3. RUPS Sirkuler
   Di tahun 2023, Perseroan secara sirkuler menghasilkan 1 (satu) Surat Keputusan sebagai berikut:

3. Circular GMS
In 2023, the Company circularly produced 1 (one) Decree as follows:

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.03.03/9/10/2/PAPS/DIRU/PLMT.23 dan SK.027/PII-SK.DIR/X/2023 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi Dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. Resolutions of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: *HM. 03 . 03/9/10/2/ PAPS/DIRU/PLMT.23 and SK . 02 7/PII - SK . DIR/X/2023 c o n c e r n i n g Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.*	1. Menetapkan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diberlakukan efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menetapkan Penghasilan Direksi Perseroan, sebagai berikut: 1. Determining the Income for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners effective as of January 1, 2023 with the following provisions: a. Determining the Income of the Company's Board of Directors, as follows:

No.	Jenis Penghasilan Income Types	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolutions
1	Gaji Salary	1. Direktur Utama: Rp85.000.000,- 2. Direktur Lainnya: Rp72.250.000,- 1. President Director: Rp85,000,000 2. Other Directors: Rp72,250,000
2	Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Hari Raya *Holiday* Allowance	1. Sebesar 1 (satu) bulan Gaji, per tahun 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. 1. 1 (one) month Salary, per year 2. Paid after the payment of Allowance, no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday
	Tunjangan Perumahan *Housing* Allowance	Rp20.000.000 ,- Rp20,000,000

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	v	Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya melalui Risalah RUPS Sirkuler Nomor HM.03.03/9/10/2/PAPS/DIRU/PLMT.23 dan SK.027/PII-SK.DIR/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023. *The resolution is deemed valid on the date of its enactment through the Circular GMS Minutes Number HM.03.03/9/10/2/PAPS/DIRU/PLMT.23 and SK.027/PII-SK.DIR/X/2023 dated October 9, 2023.*

	Keterangan Descriptions
	1. Direktur Utama: 100%, per bulan. 2. Direktur Lainnya: 85%, per bulan. 3. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/ PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 1. President Director: 100% per month. 2. Other Directors: 85% per month. 3. In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.
	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.
	40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp20.000.000,- sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/ PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 40% of the Salary with a maximum amount of Rp 20,000,000 in accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolutions
		Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing masing Direksi. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan di mana iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Direksi yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Pekerja. namun terhadap Direksi yang merupakan Penugasan Pelabuhan (Persero) Bisnis Pekerja PT Indonesia dan Grup. 6. Perusahaan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan didasarkan pada Gaji yang diterima sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan mekanisme berlaku pada Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan. 1. Granted during the tenure (from appointment to cessation) with monthly premiums. 2. Insurance premium of up to 25% of the annual salary 3. The selection of a retirement insurance program is determined by each Board of Directors. 4. Including Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the BPJS Employment payment contribution is part of the relevant Retirement Insurance. Retirement Insurance is not provided for Board of Directors who come from the Shareholders Element, who are still active as Employees. However, for Board of Directors who are Assigned Port (Persero) Business Workers of PT Indonesia and Group Companies, 5. Post-Employment Insurance is not provided for Directors who come from Shareholder and are still actively employed. However, this does not apply to Directors assigned from Port (Persero) Business Workers of PT Indonesia and its Group. 6. For the Company, the amount of contributions to the BPJS Employment and BPJS Health programs is based on the salary received as a Director, in accordance with the applicable mechanisms and regulations of BPJS Employment and BPJS Health.

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
Keterangan Descriptions		
1. Definisi dari Unsur Pemegang Saham adalah Direksi dan Komisaris Pelindo, Direksi dan Komisaris *Subholding* Pelindo, Pekerja Pelindo, Pekerja *Subholding* Pelindo, Pekerja Anak Perusahaan, Pekerja Perusahaan Teratiliasi, Pekerja KSO. 2. Grup Bisnis Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan unit kerja di bawah naungan PT Pelindo Multi Terminal yang terdiri dari Anak Perusahaan, KSO, Dana Pensiun, dan Perusahaan Teratiliasi. 3. Sesuai Dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan. Teratiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 1. Definition of Shareholder Elements are Board of Directors and Commissioners of Pelindo, Board of Directors and Commissioners of Subholding Pelindo, Pelindo Workers, Subholding Pelindo Workers, Subsidiary Workers, Affiliated Company Workers, JO Workers. 2. The Company's Business Group is defined as a collection of work units under PT Pelindo Multi Terminal consisting of Subsidiaries, JOs, Pension Funds, and Affiliated Companies. 3. In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/ PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolutions
	3	Fasilitas Facilities	
		Kendaraan Dinas Official Vehicles	1. 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. 2. Kendaraan Dinas disediakan dalam bentuk natura yang spesifikasi dan jenis kendaraannya diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 75 kWh untuk kendaraan bermotor berbasis listrik di luar biaya bahan bakar, biaya parkir dan biaya toll yang disediakan secara *at cost* dengan pengaturan batasan maksimal. 3. Bahan bakar secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya bahan bakar per bulan setara dengan 500 (lima ratus) liter pertamax atau yang setara untuk Direktur Utama dan 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax atau yang setara untuk Anggota Direksi lainnya. 4. Pengaturan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya disetarakan dengan biaya bahan bakar minyak dimaksud butir 3) di atas. 1. 1. (one) unit along with operational costs, taking into account the Company's financial condition. 2. Official vehicles are provided in the form of in-kind benefits, specifications and types of vehicles are determined by Board of Commissioners, with a maximum limit of 2,500 cc, excluding fuel costs, parking fees, and toll fees, which are provided at cost with maximum limit regulations. 3. Fuel costs are provided at cost with a maximum limit of fuel expenses per month equivalent to 500 (five hundred) liters of Pertamax for the President Director and 450 (four hundred fifty) liters of Pertamax for other members of the Board of Directors. 4. Setting the cost of using electric-based motorized vehicles at cost (in the form of reimbursement) with a maximum cost limit equal to the cost of fuel oil referred to in point 3) above.

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	**Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023** Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Descriptions		
	Sesuai dengan: 1. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/ 12/6/2/PSOS/ DIRU/PLMT- 23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 2. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/PLND-23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. In accordance with: 1. PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation Number: HK.01/ 12/6/2/PSOS/ DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal. 2. Letter of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/ PLND-23 dated October 03, 2023 regarding Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under Control of PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolutions
		Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Rawat Jalan dan Obat; c. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical Check Up*. 4. Dalam hal merangkap sebagai Direksi jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perseroan. 5. Bagi Direksi yang berasal dari pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup penugasan Bisnis maka Perusahaan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu sebagai Direksi.
	4	Biaya Operasional Operational Cost	
		Biaya Komunikasi Communication Cost	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp2.700.000,- untuk Direktur Utama dan Rp2.500.000,- untuk Anggota Direksi lainnya. According to the expenditure (at cost) with a maximum limit of Rp3,000,000 for President Director and Rp2,700,000 for other members of the Board of Directors.

	Keterangan Descriptions	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) unmarried or non-working children under the age of 25. 3. Health facilities are provided include: a. Health insurance programs organized by the Social Security Organizing Agency; b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and medicine equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. In the event that the Board of Director also holds a position as a Board of Commissioners in another unit within the Company 's Business Group, the individual will only be given one health facility, namely the health facility as Board of Director of the Company. 5. For Board of Directors who come from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group assignment employees, the individual will only be given one health facility, as Board of Director.		
	Dengan memperhatikan: 1. Kondisi dan kemampuan Perusahaan. 2. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/ SPAP/SDMA/PLND-23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. With attention to: 1. The condition and capability of the Company. 2. Letter of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/ PLND-23 dated October 3, 2023 regarding Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under Control of PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolutions
	4	Biaya Operasional Operational Cost	
		Pakaian Seragam Uniform	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to expenditure (at cost) in the form of in- kind, according to the budget in the RKAP, with a maximum limit set through the Company's Board of Commissioners approval.
		Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	Sesuai anggaran RKAP, dengan dalam batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the RKAP budget, within certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Descriptions		
	1. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/P SOS/ DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 2. Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. 1. In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal. 2. Only given to the Company that implements the provisions of wearing uniforms, taking into account the conditions and capabilities of the Company		
	Dengan memperhatikan: 1. Kondisi dan kemampuan Perusahaan. 2. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/ SPAP/SDMA/PLND- 23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. With attention to: 1. The condition and capability of the Company. 2. Letter of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/ PLND-23 dated October 3, 2023 regarding Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under Control of PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions

No.	Jenis Penghasilan Income Types	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolutions
	Club/Corporate Membership Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.
	Biaya Representasi Representation Cost	Sesuai dengan anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval

2. Menetapkan Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
2. Determine the income of the Company's Board of Commissioners, as follows:

No.	Jenis Penghasilan Income Types	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution
	Honorarium	Komisaris Utama: Rp38.250.000,- Komisaris: Rp34.425.000 , President Commissioner: Rp38,250,000 Commissioner: Rp34,425,000

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Descriptions		
	Dengan memperhatikan: 1. Kondisi dan kemampuan Perusahaan. 2. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/ SPAP/SDMA/PLND- 23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. With attention to: 1. The condition and capability of the Company. 2. Letter of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/ PLND- 23 dated October 3, 2023 regarding Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under Control of PT Pelindo Multi Terminal.		
	1. Dalam bentuk *corporate credit card*, berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/ SPAP/SDMA/PLND- 23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. 2. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. 1. In the form of a corporate credit card, based on the Letter of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/ SDMA/PLND- 23 dated October 3, 2023 regarding Determination of Adjustment of Income Amount in 2023 and Tantiem for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under the Control of PT Pelindo Multi Terminal. 2. By taking into account the conditions and capabilities of the Company.		

	Keterangan Description
	1. Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama, per bulan. 2. Komisaris: 90% dari Honorarium Komisaris Utama, per bulan Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 1. President Commissioner: 45% of President Director's Monthly Salary 2. Commissioner: 90% of President Commissioner's Monthly Salary In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Management Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	
	5 Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	1. Sebesar 1 (satu) bulan Honorarium, per tahun 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambatlambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. 1 (one) month of Honorarium, per year 2. Paid after the Company's Employee Holiday Allowance payment or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday Day 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors / Commissioners/ Employees.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	1. Tunjangan Transportasi Komisaris Utama ditetapkan 20% dari Honorarium, yaitu: a. Komisaris Utama sebesar Rp7.650.000,per bulan b. Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp6.885.000,- per bulan 2. Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/Pekerja. 1. Transportation Allowance for President Commissioner is set at 20% of Honorarium, as follows: a. President Commissioner of Rp7,650,000 per month b. Members of the Board of Commissioners of Rp6,885,000 2. For the Board of Commissioners who get a vehicle facility, no transportation allowance is given. 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group who are still active as Directors/ Commissioners/Employees

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	**Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023** Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
Sesuai dengan: 1. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/ DIRU/PLMT- 23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 2. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HM.03.03/3/10/2/ SPAP/ SDMA/PLND- 23 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2023 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di bawah Kendali PT Pelindo Multi Terminal. In Accordance with : 1. PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation Number: HK01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (JO) within PT Pelindo Multi Terminal. 2. Letter of Director of HC and Generals Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HM.03.03/3/10/2/SPAP/SDMA/ PLND- 23 dated October 03, 2023 regarding Determination of Adjustment for 2022 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries under PT Pelindo Multi Terminal	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/ PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/ PSOS/DIRU/ PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.	

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions	
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types
		Asuransi Purna Jabatan Retirement insurance

Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution
1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Komisaris 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jami nan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan di mana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. Provided during the term office (from appointment to termination) with monthly premiums. 2. Insurance premium at most 25% Salary in one year 3. The selection of program for Retirement Insurance is determined by each Board of Commissioners 4. Including Work Accident Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the payment of BPJS Employment contributions is part of relevant Retirement Insurance. 5. Retirement Insurance is not provided for the board of Commissioners who come from Shareholders Elements, who are still active as Directors/Commissioners/ Employees.

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Description		
	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolution
	6	Fasilitas Facilities	
		Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa. a. Rawat Jalan dan Obat; b. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan c. *Medical Check Up*. 4. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Komisaris/Pekerja. 1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost) 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (unmarried or unemployed). 3. Health Facilities provided include:. a. Outpatient care and medication; b. Inpatient care and Medication equivalent to VIP class; and c. Medical Check Up. 4. Not given to the Board of Commissioners who come from Shareholder Elements, who are still active as Directors/ Commissioners/ Employees.
		Bantuan Hukum Legal Legal Assistance	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang diberikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di lembaga Peradilan. 4. Perseroan tidak menanggung biaya Pengacara/ Konsultan Hukum dalam hal Dewan Komisaris Perseroan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah).

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Description		
	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terahliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT- 23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		
	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terahliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/ PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions		
	No.	**Jenis Penghasilan** Income Types	**Keputusan RUPS/RUP** GMS Resolution
			1. Provided in the event of actions or deeds for and on behalf of their position, given the purpose and objectives of the Company's business activities. 2. Board of Commissioners who will use Legal Assistance Facilities are required to make a statement on stamped paper, stating that their involvement in a specific case is not personal and they are willing to return the Legal Assistance Facilities to the Company if it is proven that their involvement in the case is personal 3. Provided in the form of financing for services of Law Firm/Legal Consultant, which includes the process of examination as a Witness, Suspect, and Defendant in judicial institutions. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/ Legal Consultant in the event the Company's Board of Directors becomes Witnesses, Suspects, or Defendants due to Criminal proceedings reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).
	7	Biaya Operasional Operational Costs	
		Pakaian Seragam Uniform	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan memperhatikan kondisi Perusahaan. According to expenditure (at cost) in the form of in-kind, according to the budget in the RKAP, taking into account the Company's condition.
		Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP dengan memperhatikan kondisi Perusahaan. According to the budget in the RKAP, taking into account the Company's conditions

		Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	**Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023** Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
	Keterangan Description		
	1. Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 2. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01/12/6/2/PSOS/ DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi {KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 1. Only given to the Company that implements the provisions of wearing uniforms, taking into account the conditions and capabilities of the Company. 2. In accordance with PT Pelindo Multi Terminal's Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		
	1. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/Pekerja. 2. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.01 /12/6/2/PSOS/ DIRU/PLMT-23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. 1. Not given to the Board of Commissioners from Shareholder Elements, who are still active as Directors/Commissioners/Employees. 2. In accordance with PT Pelindo Multi Terminals Board of Directors Regulation Number : HK.01 /12/6/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated June 12, 2023 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operation (JO) within PT Pelindo Multi Terminal.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions
	c. Anggota Direksi berhak mendapatkan Cuti Tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun tanpa diberikan Tunjangan Cuti Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: • Cuti Tahunan dapat diberikan apabila Direksi telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagai Direksi Perseroan; • Izin pelaksanaan Cuti Tahunan bagi Anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama; • Komisaris Utama dapat menunda Cuti Tahunan yang dimohonkan oleh Direksi berdasarkan alasan kepentingan Perseroan; • Bagi Direksi yang berasal dari Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, maka tetap memperhatikan hak Cuti Tahunan sebagai pekerja (pada tahun berjalan sebelum diangkat sebagai Direksi Perseroan) dan mengesampingkan ketentuan huruf a. di atas; • Anggota Direksi yang melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak Cuti Tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin dari Dewan Komisaris. 2. Menetapkan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menyetujui besaran Tantiem tahun buku 2022 bagi Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebesar Rp 926.000.000 (Sembilan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan pembagian bagi Direksi lainnya dan Dewan Komisaris sesuai dengan komposisi besaran sebagai berikut: • Anggota Direksi : 85% dari Direktur Utama • Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama • Anggota Komisaris : 90% dari Komisaris Utama b. Atas besaran/nilai tantiem yang diberikan, Perseroan harus menangguhkan pembayaran tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 21 % (dua puluh satu persen) yang disimpan dalam rekening penampungan (*escrow account*) dengan jangka waktu penangguhan pembayaran selama 3 (tiga) tahun. Pembayaran tantiem yang ditangguhkan tersebut harus diberikan secara prorata selama 3 (tiga) tahun; c. Perseroan dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh tantiem yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali tantiem tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh PT Pelindo Multi Terminal. Persetujuan penarikan kembali Tantiem tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) dituangkan dalam suatu perjanjian antara Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan; d. Pengaturan mengenai penangguhan pembayaran dimaksud butir 2.b dan 2.c diatur sebagaimana terlampir; e. Apabila besaran Tantiem melebihi nilai *accrue* Tantiem tahun buku 2022, maka atas kekurangannya diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku 2023; f. Bahwa besaran Tantiem tahun buku 2022 sebagaimana dimaksud butir 2.a hanya diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; g. Besaran Tantiem diberikan secara proporsional (dalam satuan hari) sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku 2022; h. Dalam hal terdapat kondisi rangkap jabatan dalam entitas yang sama dengan status Pelaksana Tugas (Plt.) dan/ atau Pelaksana Harian (Plh.), maka kepada yang bersangkutan berlaku prinsip *non double payment* sehingga kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) besaran Tantiem/ Insentif Khusus atas jabatan definitif sebagai Direksi (tidak diperkenankan mendapat Tantiem/ Insentif Khusus dari jabatan yang dirangkapnya); i. Dalam hal terdapat perbedaan tentang pengaturan pemberian tantiem dalam kondisi rangkap jabatan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan pengaturan butir 2.h. di atas, maka untuk selanjutnya agar dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan pengaturan dimaksud butir 2.h.; j. Perhitungan jasa produksi/bonus bagi Sekretariat Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris diserahkan kepada Perseroan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, berlaku prinsip non *double payment* dengan pengaturan kepada pekerja yang berasal dari Grup Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak diberikan jasa produksi/bonus.

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023

c. Board of Directors' Members are entitled to Annual Leave of 12 (twelve) working days per year without receiving Annual Leave Allowance, with following provisions:
   - Annual Leave can be granted if Board of Director has worked for a minimum of 12 (twelve) consecutive months as Board of Director;
   - Approval for implementation of Annual Leave for Board of Directors is granted by President Commissioner;
   - President Commissioner may postpone the requested Annual Leave by Board of Director based on the Company's interests;
   - For Directors who come from the Assigned Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, they still pay attention to their Annual Leave rights as workers (in the current year before being appointed as Directors of the Company) and override the provisions of letter a. above;
   - Members of the Board of Directors who perform religious duties that require time away from duties in excess of the Annual Leave entitlement, must obtain permission from the Board of Commissioners.

2. Determining Tantiem for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners with the following provisions:
   a. Approved the amount of Tantiem for 2022 fiscal year for President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok of Rp 926,000,000 (Nine hundred twenty-six million Rupiah) with the distribution for other Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the amount composition as follows:
      - Members of Board of Directors: 85% of President Director
      - President Commissioner: 45% of President Director
      - Commissioner members: 90% of President Commissioner
   b. For the amount/value of tantiem given, the Company shall suspend the tantiem payment to the Board of Directors and Board of Commissioners amounting to 21% (twenty one percent) which shall be deposited in an escrow account with a payment suspension period of 3 (three) years. The deferred tantiem payment must be given on a prorated basis for 3 (three) years;
   c. The Company may postpone the payment of part or all of the deferred tantiem (malus) or withdraw the cash tantiem that has been paid (clawback) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company under certain conditions determined by PT Pelindo Multi Terminal. Approval of the clawback is set forth in an agreement between Director of Human Capital of PT Pelindo Multi Terminal and members of Board of Directors or Board of Commissioners of the Company;
   d. Arrangements regarding the suspension of payments referred to in points 2.band 2.care regulated as attached;
   e. If the Tantiem amount exceeds the accrued Tantiem value for 2022 fiscal year, then the shortfall is calculated as an expense in 2023 fiscal year;
   f. That the Tantiem amount for 2022 fiscal year as referred to in point 2.a is only intended for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
   g. The Tantiem amount shall be given proportionally (in days) in accordance with the term of office of the person concerned in 2022 fiscal year;
   h. In the event that there is a condition of concurrent position in the same entity with the status of Acting Deputy (Pit.) and/or Daily Deputy (Pih.), then the principle of non-double payment applies to the person concerned so that only 1 (one) amount of Tantiem/Special Incentive is given to the definitive position as the Board of Directors (not allowed to receive Tantiem/Special Incentive from his/her concurrent position);

   i. In the event that there is a difference regarding the arrangement for the granting of tantiemin the condition of concurrent positions between the Company's Articles of Association and the arrangement in point 2.h. above, then henceforth an adjustment to the Company's Articles of Association shall be made in accordance with the arrangement referred to in point 2.h.;
   j. The calculation of production services/bonus for Secretariat of Board of Commissioners and Supporting Organ of Board of Commissioners is submitted to the Company based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, applying the principle of non-double payment with the arrangement that workers from the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Business Group are not given production services/bonus.

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions
	3. Atas penetapan penghasilan (Honorarium, Tunjangan Transportasi, Asuransi Purna Jabatan, Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: a. Pengaturan rangkap jabatan di lingkungan Grup Bisnis Perusahaan bagi Direksi Perseroan yang merangkap sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Grup Bisnis Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan diberlakukan efektif terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: • Direksi Perseroan yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada Grup Bisnis Perusahaan tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi atau Perusahaan Patungan tersebut; • Bagi Dewan Komisaris Perseroan yang berasal dari Pekerja Grup Bisnis Perusahaan hanya berhak menerima Honorarium. Dalam hal Pekerja Grup Bisnis Perusahaan menjabat lebih dari satu jabatan Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Grup Bisnis Perusahaan, maka yang bersangkutan hanya berhak menerima Honorarium tertinggi sebagai Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dari jabatan Komisaris dan/atau Pengawas yang dirangkapnya; • Ketentuan terkait dengan rangkap jabatan dimaksud dalam butir 3.a.2 tidak diberlakukan bagi pekerja yang sebelum *merger* merupakan pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Pemberian Tantiem/ Insentif Khusus bagi pekerja yang sebelum *merger* merupakan pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sepanjang pada pengaturan Pasal 41 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : HK.01 .05/I/ HOFS-2109 dan Nomor : 45/DPP-SPPI-III/IX-2019 masih berlaku, yang berbunyi : "Pegawai yang diangkat menjadi Komisaris Anak/Cucu/Afiliasi/ Dana Pensiun Perusahaan dapat memilih bonus tahunan pegawai atau Tantiem dari Anak Perusahaan/Afiliasi Dana Pensiun yang dipandang menguntungkan baginya, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Apabila pegawai yang bersangkutan memilih bonus maka terhadapnya diberikan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tantiem; ii. Apabila pegawai yang bersangkutan memilih tantiem maka terhadapnya diberikan tambahan 25% dari bonus. • Bagi Dewan Komisaris Perseroan yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di lingkungan Grup Bisnis Perusahaan maka yang bersangkutan hanya berhak menerima Honorarium tertinggi sebagai Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dari jabatan Komisaris dan/atau Pengawas yang dirangkapnya; • Terhadap penghasilan (Honorarium, Tunjangan Transportasi, Asuransi Purna Jabatan Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem) Direksi Perseroan yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Grup Bisnis Perusahaan yang tidak diberikan kepada Direksi Perseroan dimaksud butir 3.a.1) dan 3.a.4) untuk selanjutnya disetorkan kepada Perseroan sebagai pendapatan lain-lain. Khusus untuk Pekerja Penugasan dimaksud butir 3.a.2) dan 3.a.3) untuk selanjutnya disetorkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai pendapatan lain-lain.

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023 Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023
3. The determination of the income {Honorarium, Transportation Allowance, Retirement Insurance, Holiday Allowance, and Tantiem) for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows: a. Arrangement of concurrent positions within the Company's Business Group for the Company's Board of Directors who concurrently serve as the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company's Business Group refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER3/ MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises and is effective as of August 1, 2023, with the following provisions: • The Company's Board of Directors who serve as members of Board of Commissioners/Supervisory Board in the Company's Business Group may not receive all income as a member of Board of Commissioners concurrently in the Company'sAffiliated Subsidiary/Company or Joint Venture; • The Company's Board of Commissioners who are employees of the Company's Business Group are only entitled to receive Honorarium. In the event that an Employee of the Company'sBusiness Group holds more than one position of Board of Commissioners and/or Supervisory Board in the Company's Business Group, then the person concerned is only entitled to receive the highest Honorarium as the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of his/her concurrent position of Commissioner and/or Supervisor; • Provisions related to concurrent positions referred to in point 3.a.2) do not apply to employees who before the merger were employees of PT Pelabuhan Indonesia III {Persero). Special Tantiem/Incentive payments for workers who before the merger were employees of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as long as the arrangements in Article 41 of Collective Labor Agreement between PT Pelabuhan Indonesia III {Persero) and PT Pelabuhan Indonesia III {Persero) Workers Union Number: HK.01 .05/I/HOFS-2109 and Number: 45/DPP-SPPI-III/IX-2019 are still valid, which reads: "Employees who are appointed as Commissioners of Subsidiaries/Sub-Subsidiaries/Affiliates/Pension Funds of the Company may choose annual employee bonuses orTantiem from Subsidiaries/Affiliate Pension Funds that are deemed beneficial to them, with the following provisions: i. If the employee chooses the bonus, he/she will be given an additional 25%; {twenty-five percent) of the tantiem; ii. If the employee chooses tantiem, an additional 25% of the bonus shall be given to him/her. • For the Board of Commissioners of the Company who concurrently serves as Board of Commissioners/Supervisory Board within the Company's Business Group, the person concerned is only entitled to receive the highest Honorarium as the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of the concurrent position of Commissioner and/or Supervisor; • For the income {Honorarium, Transportation Allowance, Retirement Insurance, and Tantiem) of the Company's Board of Directors who serve as members of Board of Commissioners in the Company's Business Group that is not given to the Company's Board of Directors referred to in point 3.a.1) and 3.a.4) shall be deposited to the Company as other income. Specifically for Assignment Workers referred to in point 3.a.2) and 3.a.3) to be subsequently deposited to PT Pelabuhan Indonesia {Persero) as other income.		

No. RUPS GMS No.	Hasil Keputusan Resolutions
	b. Direksi Perseroan/Dewan Komisaris Perseroan yang merangkap sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Grup Bisnis Perusahaan tidak berhak menerima fasilitas yang terdiri dari namun tidak terbatas pada fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Grup Bisnis Perusahaan (*non double facilities*) yang telah diterimanya sebagai Direksi atau Komisaris Perseroan; c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong dan menyebabkan Direksi Perseroan lainnya menjalankan pekerjaan Direksi Perseroan yang lowong tersebut, baik dengan level yang sama dan/ atau jabatan lebih tinggi sebagai Pelaksana Tugas, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan penghasilan pada jabatan definitifnya dengan pemberlakuan prinsip *non double payment*; d. Pajak atas Penghasilan yang diperoleh Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut: • Pajak atas penerimaan Gaji Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas menjadi beban Perseroan; • Pajak atas penerimaan Tantiem/Insentif Kinerja menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tidak dapat dialihkan menjadi beban Perseroan. 4. Dalam hal terdapat penyesuaian perhitungan (kelebihan maupun kekurangan) yang timbul setelah adanya Keputusan ini, maka akan dilakukan perhitungan kembali menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal diberlakukannya. 5. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya; 6. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan ini jika diperlukan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan hal-hal yang diatur dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, maka mengikuti hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini.

	Telah/ Belum Terlaksana Has/Has not Been Realized	**Realisasi dan/atau Tindak Lanjut oleh Manajemen per 31 Desember 2023** Realization and/or Follow-up Actions by Management as of December 31, 2023

b. The Company's Board of Directors of /Board of Commissioners who concurrently serve as the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company's Business Group are not entitled to receive facilities consisting of but not limited to communication facilities and information technology facilities as the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company's Business Group (non-double facilities) that they have received as Board of Directors or Board of Commissioners of the Company;
c. If for any reason the position of a member of Board of Directors of the Company is vacant and causes other Board of Directors of the Company to carry out the work of vacant Board of Directors of the Company, either with the same level and/or higher position as Acting Director, then the person concerned is only given income in his/her definitive position with the application of non double payment principle;
d. Tax on income earned by Board of Directors and Board of Commissioners is regulated as follows:
   - Tax on the receipt of Salary, Honorarium, Allowances and Facilities shall be borne by the Company;
   - Tax on the receipt of Tantiem/Performance Incentive shall be borne by each of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and cannot be transferred to the Company.

4. In the event that there is an adjustment to the calculation (excess or deficiency) arising after this Decree, a follow-up recalculation will be made in accordance with the applicable regulations, starting from the date of enactment.

5. In the event that in the future there is a mistake in the matters stipulated in this Decree, appropriate corrections will be made;
6. The Company's Shareholders are authorized with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either individually or collectively, to state in a separate notarial deed all or part of Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders of the Company as set forth in this resolution if necessary. In the event that there are differences between the Company's Articles of Association and the matters set forth in this Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders, the matters decided in this Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders shall be followed.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Dalam hal ini, pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi diwujudkan dengan memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan. selalu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perusahaan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki acuan kerja yang termuat dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024.

Selain *Board Manual*, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Peraturan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/10/11/5/ PTP-2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pedoman-pedoman tersebut merupakan landasan dasar bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Pedoman tersebut juga mengatur pola hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, transparan, efektif, dan efisien.

Pedoman kerja terkait Dewan Komisaris di dalam buku *Board Manual* terdapat pada Bab III yang secara garis besar mengatur sebagai berikut:

- Fungsi Dewan Komisaris
- Keanggotaan Dewan Komisaris
- Etika Jabatan Dewan Komisaris
- Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris
- Kewajiban Dewan Komisaris
- Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Hak Dewan Komisaris
- Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
- Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitas
- Organ Pendukung Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat materil yaitu:
   a. Integritas;
   b. Dedikasi;

The Board of Commissioners is a corporate organ responsible for overseeing and providing advice to the Board of Directors in the management of the Company. This supervisory role of the Board of Commissioners to the Board of Directors is carried out by ensuring that the Company's operations are conducted in accordance with the provisions of the Articles of Association, Resolutions of the GMS, and prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners is also accountable for the implementation of GCG principles at all levels of the Company.

GUIDELINES AND RULES OF PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Board Manual, which governs the working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors within PT Pelabuhan Tanjung Priok which was established under Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24, dated December 17, 2024.

In addition to the Board Manual, the Board of Commissioners also adheres to the Supervisory and Advisory Guidelines, formalized through Regulation of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/10/11/5/PTP-2016, dated November 10, 2016, concerning the Supervisory and Advisory Guidelines of the Board of Commissioners.

These guidelines serve as the fundamental framework for the Board of Commissioners in fulfilling its duties, responsibilities, and authorities in overseeing the Company's management by the Board of Directors. The Guideline also establishes the formal working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and promotes professionalism, integrity, transparency, and efficiency in the execution of their respective roles.

Work guideline regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are outlined in Chapter III of the Board Manual, which broadly regulates the following matters:

- Functions of the Board of Commissioners
- Composition of the Board of Commissioners
- Code of Conduct for the Board of Commissioners
- Duties and Authorities of the Board of Commissioners
- Obligations of the Board of Commissioners
- Responsibilities of the Board of Commissioners
- Rights of the Board of Commissioners
- Principles of Decision-Making by the Board of Commissioners
- Orientation and Capability Enhancement Programs
- Supporting Organs to the Board of Commissioners
- Performance Assessment of the Board of Commissioners
- Performance Evaluation Criteria for the Board of Commissioners

QUALIFICATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. To be appointed as a member of the Board of Commissioners, an individual must meet the following material requirements:
   a. Integrity;
   b. Dedication;

c. Memahami masalah-masalh manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuj melaksanakan tugasnya.

2. Selain memenuhi kriteria angka 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat formal yaitu Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan, anak Perusahaan, dan/atau Badan Usaha dinyatakan pailit;
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Perusahaan, anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi syarat materil dan syarat formal sebagaimana poin 1 dan 2 diatas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislative, dan/atau anggota legislative pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
   d. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
   f. Sehat jasmani dan Rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Persyaratan lainnya
   Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Understanding of corporate management issues related to at least one area of managerial function;
d. Adequate knowledge in the business sector relevant to the Company to which the individual is being nominated; and
e. Availability of sufficient time to carry out duties effectively.

2. In addition to the material requirements above, to be appointed as member of the Board of Commissioners must also fulfill the formal requirements, such as the individual must be a person legally competent to perform legal acts, unless under the past 5 (five) prior to appointment, have:
   a. Been declared bankrupt;
   b. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company, subsidiary, and/or business entity to be declared bankrupt;
   c. Been convicted of a criminal offense resulting in financial harm to the State, Company, Subsidiary, or other business entity and/or related to the financial sector.

Compliance with these requirements must be supported by a signed declaration from the prospective member of the Board of Commissioners, which is to be retained by the Company.

3. In addition to fulfilling the material and formal requirements outlined in points 1 and 2 above, a candidate must also meet the following additional criteria to be eligible for appointment as a member of the Board of Commissioners:
   a. Must not be an official of a political party, a legislative candidate, and/or a member of the legislature at the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial DPR, or Regency/Municipal DPRD;
   b. Must not be a candidate for regional head/deputy head, and/or currently serving as a regional head/deputy head, including acting officials in such roles;
   c. Must not currently hold a position that may give rise to a conflict of interest with the relevant SOE or its Subsidiaries;
   d. Must not have served as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the SOE or its subsidiaries for two consecutive terms;
   e. Must not hold any concurrent position that is prohibited by prevailing laws and regulations to be concurrently with the role of Commissioner;
   f. Must be in good physical and mental health, with no medical conditions that could hinder the execution of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
   g. Must possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled personal income tax obligations for the past 2 (two) years.

4. Other Requirements
   In addition to general requirements, the appointment of members of the Board of Commissioners shall also be carried out in compliance with the relevant provisions stipulated in prevailing laws and regulations.

Mantan Anggota Direksi dapat menjadi Dewan Komisaris, setelah tidak menjabat sebagai Anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan Perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

Former members of the Board of Directors may be appointed as members of the Board of Commissioners after a minimum of 1 (one) year has passed since their resignation as Directors, unless specific considerations determined by the Minister justify a shorter interval in order to maintain the continuity of the Company's restructuring or recovery programs, provided that no other legal provisions prohibit such appointment.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan seorang calon anggota Dewan Komisaris mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

APPOINTMENT PROCESS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The appointment of candidates to the Board of Commissioners is subject to a fit and proper test, conducted by the Shareholders/GMS/Capital Owners in accordance with Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/2023 dated March 20, 2023, concerning the Governing Organs and Human Resources of State Owned Enterprises.

MASA JABATAN

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

TERM OF OFFICE

The term of office for a member of the Board of Commissioners is 5 (five) years and may be reappointed once for an additional term. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by resolution of the GMS, with stated reasons for dismissal.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Dewan Komisaris yang menjabat adalah yang telah dinyatakan lulus *fit and proper test*. Adapun komposisi Dewan Komisaris per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

Only individuals who have passed the fit and proper test may serve on the Board of Commissioners. As of December 2024, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa dan Periode Jabatan** Term of Office
Prakosa Hadi Takariyanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	Ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok pursuant to the Resolution of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, concerning the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 April 2024-2029*), Periode Ke-1 *April 1, 2024-2029*), First Term*
Andi Hamdani	Komisaris *Commissioner*	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan SK.005/PII-SK. DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok pursuant to the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, No. HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.005/PII-SK.DIR/I/2024 dated January 2, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 Januari 2024-2029*), Periode Ke-1 *January 1, 2024- 2029*), First Period*

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Dedy Cahyadi	Komisaris *Commissioner*	Ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, No. SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24 dated July 31, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 Agustus 2024- 2029*) August 1, 2024-2029*)
Lukijanto	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ditunjuk sebagai sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, No. SK.03/1/4/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/1/4/1/DIRU/DIRU/PII-24 dated April 1, 2024, concerning the Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 April 2024-2027*), Periode ke-1 April 1, 2024-2027*), First Period

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, Keputusan RKAP, ketentuan dan kepatuhan peraturan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi pengawasan internal serta Tata Kelola Terintegrasi.

a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan sebagaimana memiliki fungsi:
   1. Manajemen Risiko;
   b. Audit Internal; dan
   c. Tata Kelola Terintegrasi.
b. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:

   1. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko;
   2. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies of the Company, the overall performance of the Board of Directors in managing both the Company and its business operations, and for providing advice to the Board of Directors. It includes oversight of the implementation of the RJPP, the RKAP, decisions related to the RKAP, the Company's compliance with its Articles of Association, and prevailing laws and regulations. Such oversight must be carried out in the interest of the Company and in alignment with its objectives and purposes. The Board of Commissioners also supervises the implementation of risk management, internal control functions, and Integrated Governance.

a. Board of Commissioners/Board of Directors as stipulated in hold the following functions:
   1. Risk Management;
   2. Internal Audit; and
   3. Integrated Governance
b. In exercising the Risk Management function as stipulated in paragraph (1) letter a, the Board of Commissioners/Supervisory Board holds the following authorities, duties, and responsibilities:
   1. Evaluate and approve the Company's risk management policies and strategies;
   2. Evaluate the Board of Directors' accountability in implementing such risk management policies and strategies as stipulated in point a; and

3. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri.

c. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:

1. Memastikan bahwa Direksi dan Anak Perusahaan memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Internal;
2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
3. Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memberikan persetujuan atas piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
5. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
6. Menunjuk pengendali mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
7. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Internal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri.

d. Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasai penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anaka Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN induk;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan arahan atau nasehat kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
4. Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
5. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan tata kelola terintegrasi BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN; dan
6. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan atau Keputusan RUPS/Menteri.

Wewenang Dewan Komisaris

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen dokumen Perusahaan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

3. Oversee and advise on the execution of risk management functions in accordance with prevailing laws and regulations, the articles of association, and/or resolutions of the GMS/Minister Decree.

c. In carrying out the Internal Audit function as referred to in paragraph (1) letter b, the Board of Commissioners/Supervisory Board holds the following authorities, duties, and responsibilities:

1. Ensure that the Board of Directors and subsidiaries have an Internal Audit Unit (SPI) that effectively performs internal audit functions;
2. Approve the appointment and dismissal of the Head of SPI as proposed by the Board of Directors;
3. Ensure that SPI has access to the information and/or data of the SOE necessary to perform its duties;
4. Approve the Internal Audit Charter, proposed by the Board of Directors, considering input from the SPI;
5. Review the effectiveness and efficiency of the Internal Control System, based on information provided by the SPI, at least once a year;
6. Appoint an independent external quality assurance reviewer to evaluate the performance of the SPI at least once every 3 (three) years; and
7. Oversee and provide advice on other internal audit functions in accordance with laws and regulations, the articles of association, and/or resolutions of the GMS/Minister.

d. In carrying out the Integrated Governance function as referred to in paragraph (1), letter c, the Board of Commissioners/Supervisory Board holds the following authorities, duties, and responsibilities:

1. Evaluate and approve policies related to Integrated Governance;
2. Supervise the implementation of Integrated Governance in Subsidiaries of SOEs to ensure alignment with the parent SOE's risk management policies;
3. Oversee the performance of the Board of Directors in fulfilling their duties and responsibilities and provide direction or advice regarding the implementation of Integrated Governance policies;
4. Evaluate the effectiveness of Integrated Governance policies and recommend improvements;
5. Monitor the implementation of Integrated Governance in SOE subsidiaries to ensure alignment with the governance policies of both the parent and subsidiary SOEs; and
6. Carry out supervision and provide advice on other Integrated Governance functions in accordance with prevailing laws and regulations, the articles of association, and/or resolutions of the GMS/ Minister decree.

Authorities of the Board of Commissioners

a. To access and review the Company's books, records, and documents, verify cash and other securities, and inspect the Company's assets;
b. To enter the premises, buildings, and offices utilized by the Company;
c. To request explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding any matters related to the management of the Company;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu dan memberhentikannya;
g. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
h. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab pada RUPS;
2. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberikan nasehat kepada Direksi;
3. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana poin 2) di atas, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan atau golongan tertentu;
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Perusahaan kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengambilan Keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris pada poin 4) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan kepengurusan Perusahaan;
6. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atau kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bermasalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas;
8. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku secara tanggung jawab renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjabarkan tentang Pedoman Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris, yang meliputi:

d. To be informed of all policies and actions that have been or will be undertaken by the Board of Directors;
e. To summon the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors with the Board's knowledge, to attend meetings of the Board of Commissioners;
f. To appoint and, if necessary, dismiss the Secretary of the Board of Commissioners;
g. To temporarily suspend members of the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association;
h. To establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary, taking into consideration the Company's capacity;
i. To engage external experts for specific matters and for a defined period, at the Company's expense, if necessary;
j. To undertake corporate management actions in special circumstances and for a limited period, in line with the provisions of the Articles of Association;
k. To attend Board of Directors' meetings and provide opinions on matters being discussed;
l. To exercise any other supervisory authority, provided such authority does not conflict with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is accountable to the GMSI;
2. The Board of Commissioners supervises the management policies and overall management of the Company and its business operations, and provides advice to the Board of Directors;
3. Such supervision and advisory functions ,as of point 2), are performed in the best interest of the Company and are not intended to serve the interests of any individual or specific group;
4. In the course of its supervisory role, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making related to the Company's operational activities, unless expressly stipulated in the Articles of Association or in accordance with applicable laws and regulations;
5. Any involvement of the Board of Commissioners in operational decision-making, as stated in point 4), is considered part of its supervisory function and does not eliminate the accountability of the Board of Directors in the Company's management;
6. Each member of the Board of Commissioners is required to perform their supervisory and advisory duties in good faith, with due diligence, and with full responsibility;
7. Each member of the Board of Commissioners shall be personally liable for any losses suffered by the Company if proven to be at fault or negligent in carrying out their duties as referred to in point 3);
8. In the event the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or more, such liability shall be joint and several for each member of the Board of Commissioners, in accordance with point 4).

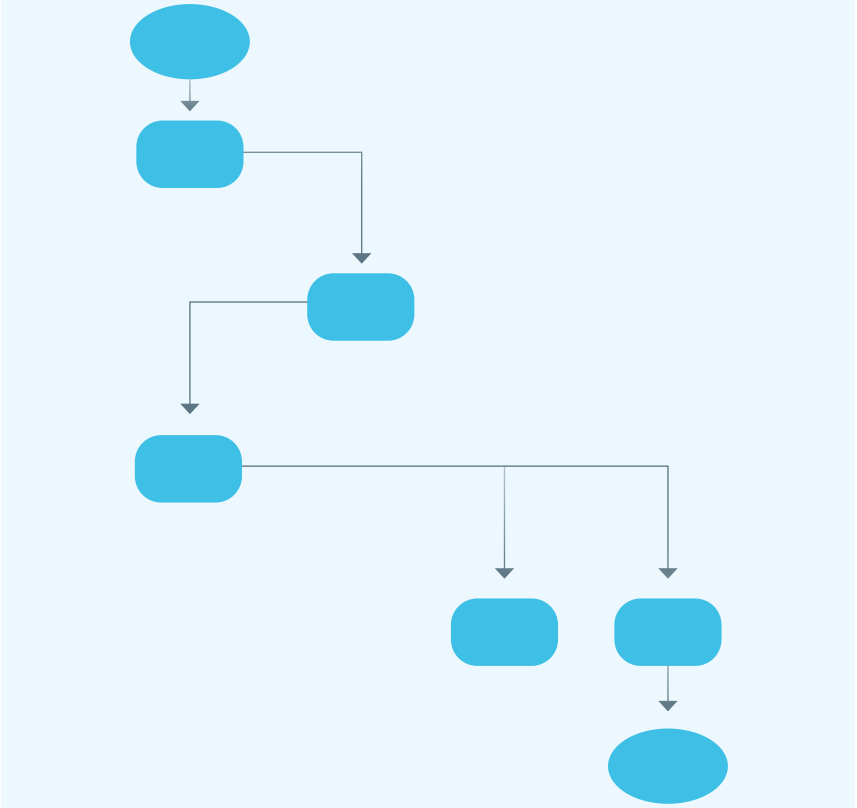
DIVISION OF DUTIES AMONG MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Supervisory and Advisory Guidelines of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok provide detailed provisions regarding the division of duties among Commissioners, which include the following principles:

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris;
2. Pembagian tugas tersebut dilakukan berdasarkan pembagian tugas Direksi dalam hal ini jumlah anggota Dewan Komisaris berbeda dengan jumlah anggota Direksi, perlu dipastikan bahwa seluruh bidang tugas Direksi telah dicakup dalam pembagian tugas anggota Dewan Komisaris;
3. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Dewan Komisaris dan diperbarui apabila terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris atau kebutuhan lainnya;
4. Pembagian tugas tersebut tidak dibatasi hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk memberikan saran, masukan, dan nasihat terkait dengan bidang tugas anggota Dewan Komisaris lainnya;
5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat internal Dewan Komisaris atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
6. Anggota Dewan Komisaris dengan kompetensi akuntansi atau manajemen atau hukum dapat ditunjuk menjadi Ketua Komite Audit;
7. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat meminta bantuan kepada Komite Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

1. To ensure effective execution of their roles and responsibilities, the Board of Commissioners delegates specific areas of oversight to its members;
2. The delegation of duties is aligned with the respective portfolios of the Board of Directors. In cases where the number of Commissioners differs from the number of Directors, the division of duties must still ensure full coverage of all areas of responsibility assigned to the Board of Directors;
3. The division of duties among Commissioners is formalized in the Annual Work Plan and Budget (RKAP) of the Board of Commissioners and shall be updated as needed, particularly in response to changes in Board composition or organizational needs;
4. This delegation does not restrict the rights and obligations of any member of the Board of Commissioners to provide input, advice, or recommendations on areas outside their assigned portfolio;
5. All decisions of the Board of Commissioners are made through internal meetings or other mechanisms as stipulated in the Company's Articles of Association;
6. A Commissioner with expertise in accounting, management, or law may be appointed as Chair of the Audit Committee;
7. In performing its duties, the Board of Commissioners may seek support from Board Committees, in accordance with relevant needs and areas of competence.

No.	Aktivitas/Kegiatan Activity	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Sekretaris Perusahaan Coroporate Secretary
1	Menyusun konsep pembagian tugas Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Dewan Komisaris. Preparing the concept of duties division for Board of Commissioners as outlined in Annual Work Plan and Budget (RKAP) of Board of Commissioners.				
2	Menerima konsep surat, memeriksa dan menetapkan pembagian kegiatan sesuai dengan pembagian tugas yang dimaksud. Receive the letter form, review and determine the division of activities according to the relevant division of tasks.				
3	Menyampaikan pembagian tugas Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari RKAP Communicating the division of duties for the Board of Commissioners as part of the RKAP.				
4	Menerima pembagian tugas Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP Dewan Komisaris. Accepting the division of duties for the Board of Commissioners as an integral part of the RKAP of the Board of Commissioners.				



Berdasarkan pedoman di atas, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/2/8/1/PTP-24 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan penjelasan sebagai berikut:

Based on the aforementioned guidelines, the Board of Commissioners has established a division of duties as stipulated in the Board of Commissioners Decree No. SK/2/8/1/PTP-24 dated August 2, 2024, concerning the Division of Duties and Supervisory Functions of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, with the following details:

Nama Name	Tugas Duties
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner	Sebagai Koordinator seluruh komite As Coordinator of all committees
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	Sebagai Ketua Komite Audit As Chairman of the Audit Committee
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko As Chairman of the Risk Monitoring Committee
Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner	Sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi As Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

RINCIAN TUGAS KOMISARIS UTAMA

Tugas Komisaris utama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/2/8/1/PTP-24 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai koordinator seluruh komite. Komisaris Utama telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.

DETAILS OF THE DUTIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER

The duties of the President Commissioner, as stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. SK/2/8/1/PTP-24 dated August 2, 2024, concerning the Division of Duties and Supervisory Functions of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, include serving as the coordinator of all committees. The President Commissioner has acted as the coordinator of the Board of Commissioners and ensured its overall effectiveness. He promotes a culture of openness and constructive dialogue that enables the expression of diverse views, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is allocated to discuss all agenda items. In addition, the President Commissioner also ensures that opportunities are provided for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan presentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. Pengecualian terhadap pendirian anak Perusahaan/ perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan RUPS;
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/ BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS

TYPES OF DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Pledging fixed assets as collateral for medium/long-term credit facilities;
2. Equity participation or reduction of equity interest in other companies that must be approved by the Shareholders;
3. Establishment of subsidiaries and/or joint ventures. Exceptions apply to subsidiaries/joint ventures established for the purpose of participating in tenders and/or implementing secured projects, which do not require GMS approval;
4. Divestment of shareholdings in subsidiaries and/or joint ventures;
5. Merger, consolidation, acquisition, spin-off, or dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);
7. Entering into cooperation agreements with other entities, such as license agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other strategic partnerships, with a value or duration exceeding the thresholds set by the GMS;

8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
10. Menetapkan *blueprint* organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;
12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Poin 1) (tentang pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris) yang belum ditetapkan dalam RKAP;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Pengusulan Wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
16. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;

17. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA KEBIJAKANNYA

Kebijakan Program Pengenalan

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024. Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan ataupun siapaun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan sebagaimana dimaksud poin 1 sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, risiko, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit.
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.

8. Write-off of uncollectible receivables that have been written off from the books;
9. Disposal or write-off of the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with a standard economic life of up to 5 (five) years, which shall require Shareholder approval;

10. Determination of the Company's organizational blueprint;
11. Determination or amendment of the Company's logo;
12. Execution of actions as referred to in item 1 (relating to Board of Directors' authority that requires written approval from the Board of Commissioners) which are not yet included in the approved RKAP;

13. Formation of foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company and that may have an impact on the Company;
14. Charging the Company's operational budget with recurring and fixed costs for the activities of foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company;
15. Nominating Company representatives as candidates for the Board of Directors or Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that contribute significantly to or are deemed strategically important by the GMS;

16. Execution of long-term investments and financing arrangements;
17. Issuance of bonds or other debt instruments by the Company.

CORPORATE ORIENTATION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND RELATED POLICIES

Orientation Program Policy

The orientation policy for newly appointed members of the Board of Commissioners is stipulated in the Board Manual particularly on Guidelines for the Working Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors at PT Pelabuhan Tanjung Priok, as set forth in Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024. The provisions regarding the orientation program are as follows:

1. Every newly appointed member of the Board of Commissioners must receive an orientation program providing a general overview of the Company.
2. The Corporate Secretary, or any individual acting in that capacity, is responsible for organizing the orientation program.

3. At a minimum, the orientation program must include:

   a. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company;
   b. An overview of the Company's purpose, nature, and scope of business activities; financial and operational performance; strategic plans; short-term and long-term objectives; competitive positioning; risks; and other strategic issues;
   c. Information on delegated authorities, internal and external audit functions, internal control systems and policies, and the Audit Committee;
   d. Roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as prohibited actions.

4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, kunjungan ke Pelabuhan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan.
5. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan program pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris, yaitu Andi Hamdani, Prakosa Hadi Takariyanto, dan Dedy Cahyadi masing-masing diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2024, 6 Mei 2024, dan 22 Agustus 2024.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS SERTA KEBIJAKANNYA

Kebijakan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
3. Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud,* bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum kepatuhan keuangan, akuntansi dan/atau audit;
4. Mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun dan sertifikasi paling sedikit 1 (satu) juknis SK-3 BUMN;
5. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut;
6. Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi;
7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional, sertifikasi memiliki standar profesi dan etika, sertifikasi diwajibkan selama masa jabatan.

4. The orientation program may include presentations, meetings, site visits to Company facilities or ports, document reviews, or any other method deemed suitable by the Company.
5. The orientation program must be completed no later than 90 (ninety) calendar days from the date of the GMS resolving the appointment of the new member of the Board of Commissioners.

Implementation of the Orientation Program for the Board of Commissioners

In 2024, the Company conducted a corporate orientation program for members of the Board of Commissioners as follows Andi Hamdani, Prakosa Hadi Takariyanto, and Dedy Cahyad conducted on May 6, 2024, May 6, 2024, and August 22, 2024 respectively.

TRAINING AND/OR CAPACITY BUILDING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND ITS POLICY

Competency Development Policy for the Board of Commissioners

The competency development policy for the Board of Commissioners is stipulated in the Board Manual on the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors at PT Pelabuhan Tanjung Priok, as outlined in Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024. Enhancing the capability of Commissioners is considered essential to ensure they stay informed on the latest developments in the Company's core business and prevailing laws and regulations. Key provisions of the competency development program include:

1. The program is conducted to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners in carrying out its duties;
2. The plan for such training must be included in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
3. Each year, every Commissioner is required to attend at least one training program covering topics such as risk management, fraud, business operations, corporate activities, legal compliance, finance, accounting, and/or auditing;
4. Commissioners must complete at least 20 training hours annually, and obtain at least one certification as per SOE Technical Guidelines SK-3;
5. Each Commissioner is personally responsible for preparing a report on the implementation of their capacity-building program, which must be submitted to the Board of Commissioners no later than 30 (thirty) calendar days following the program;
6. The Board of Commissioners is required to obtain at least one certification in relevant areas such as business, corporate governance, law, risk management, compliance, finance, or accounting;
7. Certifications must be issued by a recognized national and/or international certification body, regulator, or professional organization, and must adhere to established professional and ethical standards. Certification is mandatory during the term of office.

Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2024

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut:

Implementation of Training in 2024

The competency development programs attended by members of the Board of Commissioners in 2024 are disclosed as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Durasi Pelatihan (dalam jam)** Training Duration (in hours)	**Penyelenggara** Organizer
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman *Seminar on the Strategic Role of the Audit Committee in Establishing a Secure Cyber Environment*	1 Agustus 2024 *August 1, 2024*	8	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
Marta Hardisarwono*) Komisaris Commissioner	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman *Seminar on the Strategic Role of the Audit Committee in Establishing a Secure Cyber Environment*	1 Agustus 2024 *August 1, 2024*	8	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner	*Bootcamp* Penelitian Kuantitatif dengan *Software Smart* PLS *Bootcamp on Quantitative Research Using Smart PLS Software*	2-30 Januari 2024 *January 2-30, 2024*	96	Ebizmark
	Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai Peradilan Maritim Saat Ini dan Masa Depan *Strengthening the Institutional Role of the Maritime Court as a Present and Future Maritime Judiciary*	28 Mei 2024 *May 28, 2024*	8	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*
	Tip dan Trik Publikasi Jurnal Artikel Ilmiah *Tips and Tricks for Publishing Scientific Journal Articles*	8 Juni 2024 *June 8, 2024*	8	Institut Transportasi dan Logistik Trisakti *Trisakti Institute of Transportation and Logistics*
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	*Certification in Audit Committee Practices (CACP)*	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman *Seminar on the Strategic Role of the Audit Committee in Establishing a Secure Cyber Environment*	1 Agustus 2024 *August 1, 2024*	8	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*
	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	27-30 Agustus 2024 *August 27-30, 2024*	32	Cipta Karakter
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia *Indonesian Audit Committee Association*
	Unlocking the Blue Economy for Sustainable Growth: Creating Value and Promoting Investment to Improve Productivity	1-3 September 2024 *September 1-3, 2024*	24	Bappenas

*)Menjabat sampai dengan 1 Agustus 2024
*)Serving until August 1, 2024

PROGRAM KERJA TAHUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris PTP Terminal Nonpetikemas telah mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dalam memastikan pelaksanaan kebijakan strategis dan implementasi GCG berjalan lancar. Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip GCG. Berikut adalah Program Kerja Dewan Komisaris yang dilakukan di tahun 2024:

1. Rapat Dewan Komisaris
   Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Rencana Kegiatan
   a. Rapat Rutin Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan setiap bulan dengan waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris.
   b. Rapat-rapat internal lainnya yaitu:
      - Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok Bulanan tahun 2024 dengan Manajemen.
      - Pembahasan Laporan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.
      - Pembahasan Penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2025.
      - Pembahasan penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2024, laporan Kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP.
      - Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2025 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS.
      - Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya.

MEKANISME DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan komisaris mengapresiasi atau hubungan kerja sama yang terjalin dengan baik antara Dewan Komisaris dan Direksi, transparansi dan tepat waktu dalam penyampaian laporan, memfasilitasi kemudahan bagi Dewan Komisaris sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, menyediakan media bagi peningkatan kompetensi dan pengetahuan Komisaris.

Dewan Komisaris senantiasa menjalin hubungan kerja yang sangat baik dengan Direksi dan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris melaksanakan mekanisme pengawasan dan pemberian nasihat, baik ketika diminta oleh Direksi maupun berdasarkan inisiatif Dewan Komisaris, melalui, pertama, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan sebulan sekali dan Rapat Koordinasi *Partnership* secara rutin.

1. Pada tahun 2024, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan materi pembahasan antara lain:

   a. Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan akhir tahun 2024;
   b. Pembahasan Laporan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023 dalam rangka pelaporan konsolidasi dan persiapan Pra

2024 ANNUAL WORK PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, the Board of Commissioners of PTP Terminal Nonpetikemas has exercised its supervisory function over the Company's management, ensuring the effective implementation of strategic policies and the enforcement of GCG principles. The Board of Commissioners has developed its Work Program in accordance with prevailing legal provisions and GCG principles. The following outlines the Board of Commissioners' Work Program for the year 2024:

1. Board of Commissioners Meetings
   As regulated in the Company's Articles of Association.
2. Planned Activities
   a. The Board of Commissioners conducts regular meetings each month to oversee the management and operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok, scheduled based on mutual agreement among Commissioners.
   b. Other Internal Meetings, including:
      - Discussion of the Monthly Management Reports of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the year 2024.
      - Review of the Audited Annual Report for Fiscal Year 2023 in preparation for the Pre-GMS and GMS.
      - Discussion on the formulation of Board of Commissioners' KPIs for 2025;
      - Discussion on the appointment of a KAP to perform the General Audit of the Financial Statements for the 2024 fiscal year, performance audit of PT Pelabuhan Tanjung Priok, and compliance with prevailing laws and regulations, including the audit schedule and execution program by the KAP;
      - Review of the proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP) and Management Contract/KPIs as part of preparations for the Pre-GMS and GMS;
      - Holding special meetings as needed to address urgent matters and other strategic issues.

MECHANISM AND PROVISION OF ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners appreciates the strong and collaborative relationship established with the Board of Directors, characterized by transparency, timely reporting, and facilitation that enables the Board of Commissioners to effectively carry out its functions. The Company also provides platforms for enhancing the competencies and knowledge of the Commissioners.

The Board of Commissioners consistently maintains a constructive and respectful working relationship with the Board of Directors, upholding mutual respect for each party's authority. The Board of Commissioners carries out its supervisory and advisory functions both upon the request of the Board of Directors and on its own initiative, primarily through monthly Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as routine Partnership Coordination Meetings.

1. In 2024, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Coordination Meetings with the Board of Directors. The discussions included the following topics:

   a. Discussion of PT Pelabuhan Tanjung Priok's Management Reports through the end of 2024;
   b. Discussion of the Audited 2023 Annual Report in the context of consolidation reporting and preparation for the

RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham;

c. Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2023 dalam rangka pembahasan dengan Pemegang Saham;
d. Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General* Audit Laporan Keuangan, Laporan Kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
e. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2025 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemilik:
f. Pelaksanaan rapat-rapat khusus dengan masing-masing *Partnership* (Direktorat) PTP yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya.

Dalam rapat-rapat tersebut di atas Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Sekretaris Dewan Komisaris.

2. Rapat dengan Pemegang Saham
   a. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023.
   b. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok.

   Dalam rapat-rapat tersebut di atas Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Sekretaris Dewan Komisaris.

3. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan
   a. Kunjungan Berkala (dalam negeri)
      - Melakukan *Monitoring* dan pengawasan atas realisasi dari program kerja sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP.
      - Mendapatkan masukan dari manajemen tingkat bawah untuk penyusunan RKAP dan pengendalian internal. Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan lapangan ke Cabang Palembang pada tanggal 24-26 April 2024, Cabang Banten pada tanggal 6-8 Mei 2024, Bengkulu Palembang pada tanggal 12-14 Juni 2024, *Shorebase* Lhokseumawe pada tanggal 16-18 Oktober 2024, Cabang Teluk Bayur pada tanggal 25-26 November 2024, dan Banda Aceh-Sabang pada tanggal 18-20 Desember 2024. Hasil kunjungan tersebut kemudian dibahas dalam rapat *partnership* untuk tindak lanjut lebih lanjut.

   b. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (luar negeri) Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhannya (urgensinya) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Manajemen ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan bersama Dewan Komisaris.

4. Program Pengembangan
   Dimaksudnya sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kemampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu diklat dalam negeri dalam bentuk *short course*, seminar atau *workshop* yang berkaitan dengan Peran Dewan Komisaris.

Pre-GMS and GMS with Shareholders;

c. Discussion of PT Pelabuhan Tanjung Priok's 2023 Management Report in preparation for discussions with Shareholders;
d. Discussion of the appointment of a KAP to conduct the General Audit of the Financial Statements and 2024 Performance Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as well AS discussion on the audit schedule and implementation program
e. Discussion of the proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok and 2025 Management Contract/KPI as part of preparation for the Pre-GMS and GMS with the Shareholders;
f. Conduct of special meetings with respective PTP Directorates (Partnerships) to address urgent and strategic matters.

During the aforementioned meetings, the Secretary of the Board of Commissioners may also be involved, as needed.

2. Meetings with Shareholders
   a. Meetings held as part of the Pre-GMS and GMS for the Approval of the Audited Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2023.
   b. Meetings conducted as part of the Pre-GMS and GMS discussions on the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Management Contract/KPI of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The Board of Commissioners may involve the Secretary to the Board of Commissioners in these meetings as necessary.

3. Field Visit Program
   a. Domestic Site Visits
      - Conducted regular monitoring and supervisory visits to assess the implementation of work programs as allocated in the RKAP.
      - Gather feedback from operational-level management for RKAP preparation and internal control improvement. In 2024, the following field visits were carried out, Palembang Branch on April 24–26, 2024, Banten Branch on May 6–8, 2024, Bengkulu and Palembang on June 12–14, 2024, Shorebase Lhokseumawe on October 16–18, 2024, Teluk Bayur Branch on November 25–26, 2024, Banda Aceh–Sabang on December 18–20, 2024. The findings from these visits were further discussed in partnership coordination meetings for appropriate follow-up.

   b. International Visits (As Needed. International visits will be scheduled based on urgency and necessity, taking into account recommendations from Management or other relevant stakeholders, and subject to mutual agreement with the Board of Commissioners.

4. Development Program
   This program is intended to broaden the insight and knowledge of the Board of Commissioners, thereby enhancing their ability to perform their duties, roles, and responsibilities effectively. The planned activities include domestic education and training programs in the form of short courses, seminars, or workshops relevant to the role of the Board of Commissioners.

5. Program Pengendalian Internal
   Dimaksudkan agar kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen dapat memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan bilamana diterapkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite tersebut mendukung tugas Dewan Komisaris dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas. Dasar pelaksanaan penilaian kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
3. Peraturan Menteri NUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
4. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Prosedur Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian disusun oleh Dewan Komisaris pada awal tahun. Penilaian anggota Komite dilaksanakan secara mandiri/ *assessment* berdasarkan kriteria penilaian atau KPI anggota Komite.

Kriteria Evaluasi Kinerja Komite

Kriteria evaluasi kinerja Komite adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Kehadiran
2. Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja
3. Penugasan Organ Dewan Komisaris

Di tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang diwujudkan melalui kinerjanya sebagai berikut:
1. Komite Audit berfungsi untuk memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas- tugas eksternal auditor dan internal auditor, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan

5. Internal Control Program
   This program is designed to ensure that policies and procedures established by management provide adequate assurance for the achievement of the objectives of PT Pelabuhan Tanjung Priok. When implemented effectively and efficiently, the internal control system helps to mitigate business risks to an acceptable level as determined by the Company.

PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES AND EVALUATION BASIS

In carrying out its supervisory responsibilities, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These committees uphold high standards of competence and quality in supporting the duties of the Board of Commissioners. The performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is conducted based on the following legal and regulatory frameworks:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, dated March 3, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions in SOEs.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023, dated March 20, 2023, on SOE Governing Organs and Human Resource.
4. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024, concerning the Board Manual on the Guidelines for the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Performance Assessment Procedure

The performance evaluation criteria are formulated by the Board of Commissioners at the beginning of each year. Assessments of committee members are conducted independently, based on pre-established evaluation criteria or KPIs.

Committe Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the Committee includes:
1. Attendance Rate
2. Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits
3. Assignment of Board of Commissioners Organs

In 2024, the Board of Commissioners assessed that each committee had performed its duties and responsibilities effectively, as evidenced by the following:
1. The Audit Committee ensured the implementation of internal control systems and assisted the Board of Commissioners in overseeing the effectiveness of internal control, as well as the performance of both external and internal auditors. The Committee provided recommendations for improving management control systems and their implementation, and ensured that adequate evaluation procedures were in place for all information disclosed by the Company.

Perusahaan.

2. Komite Pemantau Risiko fokus dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan memadai untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko yang dihadapi. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko telah mengkaji diantaranya *risk appetite*, dan implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan serta melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi dalam kapasitasnya untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan penilaian kinerja Individu Dewan Komisaris dan Direksi serta melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi, termasuk pelaksanaan kebijakan strategis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Dewan Komisaris dibantu oleh tiga Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga Komite tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan. Ini termasuk evaluasi laporan bulanan dan triwulan, melakukan reviu telaahan, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta secara rutin mendampingi rapat baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Direktorat terkait lainnya. Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa kinerja para anggota komite dalam mendukung fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi telah berjalan dengan baik.

PENILAIAN INDIVIDU ANGGOTA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Komite Audit
   a. Lukijanto
      Sebagai Ketua Komite dan Anggota Komisaris, penilaian kinerja individu Lukijanto terintegrasi ke dalam KPI Individual Dewan Komisaris yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

   b. Tony Utartono (Anggota Komite Audit)

2. The Risk Monitoring Committee focused on enhancing the effectiveness of risk management oversight and confirmed that the risk management systems were adequate to protect the Company from various potential risks. The Business Development and Risk Monitoring Committee also reviewed the Company's risk appetite, promoted effective and sustainable GCG, and assessed compliance with prevailing laws and regulations.

3. The Nomination and Remuneration Committee contributed by evaluating remuneration policies for the Board of Directors and Board of Commissioners, conducting performance evaluations of individual Board members, and reviewing the achievement of the Company's Management Work Plan (RKM).

In carrying out its supervisory role over the Board of Directors, including the implementation of strategic policies and the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners is assisted by three Committees: the Audit Committee, the Business Development and Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These Committees have carried out their duties in accordance with the annual work plan. This includes evaluating monthly and quarterly reports, reviewing assessments, providing recommendations to the Board of Commissioners, and regularly attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, Head of Internal Audit Unit, Corporate Secretary, and other relevant Directorates. The Board of Commissioners concluded that the performance of the committee members in supporting the supervisory function and providing advice to the Board of Directors has been well implemented.

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF MEMBERS OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Audit Committee
   a. Lukijanto
      As Chairman of the Audit Committee and a member of the Board of Commissioners, Lukijanto's individual performance evaluation is integrated into the Individual KPI of the Board of Commissioners, which is presented in this Annual Report.
   b. Tony Utartono (Member of the Audit Committee)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Tingkat Kehadiran Attendance Rate						
a	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	7	12	13	108%	7,58

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
b	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	7	12	12	100%	7,00
c	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre-GMS and RKAP GMS	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
d	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and Annual GMS Report	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
e	Rapat Komite dan SPI Committee and SPI meetingsI	Kehadiran Attendance	7	12	12	100%	7,00
f	Rapat *Partnership* Partnership Meeting	Kehadiran Attendance	7	24	24	100%	7,00
2	Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits						
a	Pengembangan Kompetensi Organ Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners Organs	Kepesertaan Participation	9	3	3	100%	9,00
b	Laporan Hasil Kunjungan Visit Results Report	Laporan Report	9	9	5	56%	5,00
3	Penugasan Organ Dewan Komisaris Assignment of Board of Commissioners Organs						
a	Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester Monthly/Quarterly/Semester Reporting	Laporan Report	10	4	4	100%	10,00
b	Memo Tanggapan Penugasan Assignment Response Memo	Laporan Report	10	24	20	110%	11,00
c	Telaahan/Kajian/Kebijakan Analysis/Study/Policy	Laporan Report	10	1	1	100%	10,00
d	Risalah Rapat Komite Committee Meeting Minute	Risalah Minutes	10	4	4	100%	10,00
TOTAL			100				97,58

c. Hans Victor Sitepu (Anggota Komite Audit)

c. Hans Victor Sitepu (Member of Audit Committee)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Tingkat Kehadiran Attendance Rate						
a	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	7	12	13	108%	7,58

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
b	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	7	12	12	100%	7,00
c	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre-GMS and RKAP GMS	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
d	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and Annual GMS Report	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
e	Rapat Komite dan SPI Committee and SPI meetingsI	Kehadiran Attendance	7	12	12	100%	7,00
f	Rapat *Partnership* Partnership Meeting	Kehadiran Attendance	7	24	24	100%	7,00
2	Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits						
a	Pengembangan Kompetensi Organ Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners Organs	Kepesertaan Participation	9	3	3	100%	9,00
b	Laporan Hasil Kunjungan Visit Results Report	Laporan Report	9	9	6	67%	6,00
3	Penugasan Organ Dewan Komisaris Assignment of Board of Commissioners Organs						
a	Pelaporan Bulanan/Triwulan/ Semester Monthly/Quarterly/Semester Reporting	Laporan Report	10	4	4	100%	10,00
b	Memo Tanggapan Penugasan Assignment Response Memo	Laporan Report	10	24	30	110%	11,00
c	Telaahan/Kajian/Kebijakan Analysis/Study/Policy	Laporan Report	10	1	1	100%	10,00
d	Risalah Rapat Komite Committee Meeting Minute	Risalah Minutes	10	4	4	100%	10,00
TOTAL			100				98,58

2. Komite Pemantau Risiko

   a. Andi Hamdani (Ketua Komite Pemantau Risiko)
   Sebagai Ketua Komite dan Anggota Komisaris, penilaian kinerja individu Andi Hamdani terintegrasi ke dalam KPI Individual Dewan Komisaris yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

   b. Sumarman (Anggota Komite Pemantau Risiko)*)

*)Mulai menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 6 Juni 2024

2. Risk Monitoring Committee

   a. Andi Hamdani (Chairman of Risk Monitoring Committee)
   As Chairman of the Risk Monitoring Committee and a member of the Board of Commissioners, Andi Hamdani's individual performance evaluation is integrated into the Individual KPI of the Board of Commissioners, which is presented in this Annual Report.
   b. Sumarman (Member of the Risk Monitoring Committee)*)

*)Commenced service as a member of the Risk Monitoring Committee on June 6, 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Tingkat Kehadiran Attendance Rate						
a	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	7	7	7	100%	7,00
b	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	7	7	7	100%	7,00
c	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre-GMS and RKAP GMS	Kehadiran Attendance	7	0	0	100%	7,00
d	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and Annual GMS Report	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
e	Rapat Komite dan SPI Committee and SPI meetingsI	Kehadiran Attendance	7	7	6	86%	6,00
f	Rapat *Partnership* Partnership Meeting	Kehadiran Attendance	7	14	14	100%	7,00
2	Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits						
a	Pengembangan Kompetensi Organ Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners Organs	Kepesertaan Participation	9	3	3	100%	9,00
b	Laporan Hasil Kunjungan Visit Results Report	Laporan Report	9	5	2	40%	3,60
3	Penugasan Organ Dewan Komisaris Assignment of Board of Commissioners Organs						
a	Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester Monthly/Quarterly/Semester Reporting	Laporan Report	10	2	2	100%	10,00
b	Memo Tanggapan Penugasan Assignment Response Memo	Laporan Report	10	7	7	100%	10,00
c	Telaahan/Kajian/Kebijakan Analysis/Study/Policy	Laporan Report	10	1	1	100%	10,00
d	Risalah Rapat Komite Committee Meeting Minute	Risalah Minutes	10	2	2	100%	10,00
TOTAL			100				93,60

*)Mulai menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 6 Juni 2024
*)Commenced service as a member of the Risk Monitoring Committee on June 6, 2024

3. Komite Nominasi dan Remunerasi
   a. Dedy Cahyadi (Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi) Sebagai Ketua Komite dan Anggota Komisaris, penilaian kinerja individu Dedy Cahyadi terintegrasi ke dalam KPI Individual Dewan Komisaris yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

   b. Syska Naomi Hutagalung (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)

3. Nomination and Remuneration Committee
   a. Dedy Cahyadi (Chairman of Nomination and Remuneration Committee)
   As Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and a member of the Board of Commissioners, Dedy Cahyadi's individual performance evaluation is integrated into the Individual KPI of the Board of Commissioners, as presented in this Annual Report.
   b. Syska Naomi Hutagalung (Member of the Nomination and Remuneration Committee)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Tingkat Kehadiran Attendance Rate						
a	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	7	12	4	33%	2,33
b	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	7	12	4	33%	2,33
c	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre-GMS and RKAP GMS	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
d	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and Annual GMS Report	Kehadiran Attendance	7	1	1	100%	7,00
e	Rapat Komite dan SPI Committee and SPI meetingsI	Kehadiran Attendance	7	12	0	0%	0,00
f	Rapat Partnership Partnership Meeting	Kehadiran Attendance	7	24	4	17%	1,17
2	Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits						
a	Pengembangan Kompetensi Organ Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners Organs	Kepesertaan Participation	9	3	0	0%	0,00
b	Laporan Hasil Kunjungan Visit Results Report	Laporan Report	9	9	3	33%	3,00
3	Penugasan Organ Dewan Komisaris Assignment of Board of Commissioners Organs						
a	Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester Monthly/Quarterly/Semester Reporting	Laporan Report	10	4	4	100%	10,00
b	Memo Tanggapan Penugasan Assignment Response Memo	Laporan Report	10	12	12	100%	10,00
c	Telaahan/Kajian/Kebijakan Analysis/Study/Policy	Laporan Report	10	1	1	100%	10,00
d	Risalah Rapat Komite Committee Meeting Minute	Risalah Minutes	10	4	4	100%	10,00
TOTAL			100				62,83

c. Dewi Suryani Ekawati (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)*)

*)Mulai menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 6 Juni 2024

c. Dewi Suryani Ekawati (Member of the Nomination and Remuneration Committee)*)

*)Commenced service as a member of the Risk Monitoring Committee on June 6, 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Tingkat Kehadiran Attendance Rate						
a	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	7	7	7	100%	7,00
b	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran Attendance	7	7	7	100%	7,00
c	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre-GMS and RKAP GMS	Kehadiran Attendance	7	0	0	100%	7,00
d	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and Annual GMS Report	Kehadiran Attendance	7	0	0	100%	7,00
e	Rapat Komite dan SPI Committee and SPI meetingsI	Kehadiran Attendance	7	7	6	86%	6,00
f	Rapat Partnership Partnership Meeting	Kehadiran Attendance	7	14	14	100%	7,00
2	Peningkatan Kompetensi Organ Dewan Komisaris dan Kunjungan Kerja Increasing Competency of Board of Commissioners Organs and Work Visits						
a	Pengembangan Kompetensi Organ Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners Organs	Kepesertaan Participation	9	3	3	100%	9,00
b	Laporan Hasil Kunjungan Visit Results Report	Laporan Report	9	5	2	40%	3,60
3	Penugasan Organ Dewan Komisaris Assignment of Board of Commissioners Organs						
a	Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semester Monthly/Quarterly/Semester Reporting	Laporan Report	10	2	2	100%	10,00
b	Memo Tanggapan Penugasan Assignment Response Memo	Laporan Report	10	7	7	100%	10,00
c	Telaahan/Kajian/Kebijakan Analysis/Study/Policy	Laporan Report	10	1	1	100%	10,00
d	Risalah Rapat Komite Committee Meeting Minute	Risalah Minutes	10	2	2	100%	10,00
TOTAL			100				93,60

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2024 berjumlah 4 (empat) orang anggota dengan 1 (satu) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 25% dari total anggota Dewan Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit 20% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Informasi terkait profil Komisaris Independen Lukijanto telah diungkapkan pada Buku Laporan Tahunan ini, pembahasan Profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Adapun kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk;
4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners of the Company consisted of 4 (four) members, including 1 (one) Independent Commissioner, representing 25% of the total members. This composition complies with the provisions of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, which stipulates that the proportion of Independent Commissioners must be at least 20% of the total number of Board of Commissioners members.

An Independent Commissioner is defined as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who has no financial, managerial, shareholding, or familial relationship with other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or the controlling shareholders, or with the related SOE itself, that may affect their ability to act independently.

The profile of the Independent Commissioner, Lukijanto, has been disclosed in this Annual Report under the section Board of Commissioners Profile in the Company Profile Chapter.

Criteria for Determining Independent Commissioner Status

The criteria for Independent Commissioners, as stipulated in the Board Manual of the Company's Board of Commissioners, are as follows:

1. Not serving as a Director in any affiliated company;
2. Not employed by the Company or its affiliates within the past 1 (one) year;
3. Having no financial relationship, either directly or indirectly, with the Company or any other entity that provides goods or services to the Company;
4. Free from conflicts of interest, business activities, or other relationships that could hinder or compromise the Commissioner's ability to act or think independently within the Company.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab penuh secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dengan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan sesuai visi dan misinya.

The Board of Directors is a corporate organ authorized and responsible for managing the Company in the best interest of the Company, in accordance with its purpose and objectives, and represents the Company both within and outside the court of law in line with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors bears full collective responsibility in carrying out its duties for the benefit of the Company by implementing GCG across all levels of the organization, with the aim of achieving the Company's goals in line with its vision and mission.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi seseorang harus memenuhi syarat materil, yaitu:

   a. Keahlian;
   b. Integritas;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pengalaman;
   e. Jujur;
   f. Perilaku yang Baik;
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan & mengembangkan Perusahaan.

2. Selain memenuhi kriteria angka 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit;
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

   Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.
3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, selain memenuhi syarat materil dan syarat formal sebagaimana poin 1 dan 2 diatas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislative pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
   f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
   g. Sehat jasmani dan Rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

QUALIFICATIONS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. To be eligible for appointment as a member of the Board of Directors, a candidate must fulfill the following materia) requirements:
   a. Expertise;
   b. Integrity;
   c. Leadership;
   d. Experience;
   e. Honesty;
   f. Good conduct;
   g. Strong dedication to advancing & developing the Company

2. In addition to the point 1 above, candidates must also meet the following formal requirements, must be an individual legally competent to perform legal acts, except for those who, within the 5 (five) years prior to appointment, have:

   a. Been declared bankrupt;
   b. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a SOE, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt;
   c. Been convicted of a criminal offense that caused financial loss to the State, an SOE, a Subsidiary, and/or other business entity, or was related to the financial sector.

   Compliance with these requirements must be evidenced by a written statement signed by the candidate, which is to be retained by the Company.
3. In addition to fulfilling the material and formal requirements as mentioned in point 1 and point 2, candidates must also meet the following additional criteria:

   a. Not a board member or official of any political party, nor a legislative candidate or member of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial DPR, or Regency/Municipal DPRD;

   b. Not a candidate or incumbent for regional head/deputy head positions, including acting officials;

   c. Must not have served as a member of the Board of Directors of the relevant SOE or its Subsidiary for more than 2 (two) consecutive terms;
   d. Must not concurrently hold office in any ministry/agency, as a Commissioner/Supervisory Board member in another SOE, or as a Director in a Subsidiary or other business entity;
   e. Must not concurrently hold positions prohibited under prevailing laws and regulations along with the Board of Directors role;
   f. Must possess strong dedication and commit to full-time availability, as declared in a signed statement;

   g. Must be in good physical and mental health, and free from any condition that would impair their ability to perform their duties, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
   h. Must have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and be compliant with tax obligations for the past 2 (two) years.

4. Persyaratan lainnya
   Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan Anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum daoat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir termasuk mengundurkan diri dari jabatannya;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2024

PTP Terminal Nonpetikemas telah menyesuaikan jumlah anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan. Komposisi Direksi Perusahaan terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota, di mana salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, Tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan;
2. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;
3. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Direksi Perusahaan memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang;
4. Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dalam rangka pelaksanaan pada angka 3 tidak boleh merangkap peranan dari Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Direktur yang membidangi Pengelolaan Risiko;
5. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Direksi. Komposisi dan susunan anggota Direksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

4. Other Requirements
   Beyond general eligibility, the appointment of members of the Board of Directors must also comply with prevailing laws and regulations.

TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years, and may be renewed once for another term. If the term of a Director ends and a successor has not yet been appointed by the GMS, the duties of the vacant position shall be carried out in accordance with the applicable rules for filling vacant Director positions. A Director's term ends under the following circumstances:

1. Passed Away;
2. End of term, including voluntary resignation;
3. Dismissal by resolution of the GMS;
4. Failure to meet the requirements for serving as a Director, as stipulated in the Articles of Association and applicable regulations, including prohibited concurrent positions.

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

PTP Terminal Nonpetikemas has adjusted the number of members on the Board of Directors in accordance with the Company's operational needs. The Board of Directors consists of more than 1 (one) member, with one of them appointed as President Director. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors are conducted through the General Meeting of Shareholders.

The provisions regarding the composition and membership of the Board of Directors are as follows:

1. The number of Directors is determined based on the Company's needs, the level of complexity, and its strategic plans;
2. If the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, one shall be appointed as the President Director, and if necessary, a Vice President Director may also be appointed;
3. In support of effective risk management, the Board must consist of at least 2 (two) members;
4. The President Director as stated in point 2 and in the implementation of point 3 shall not concurrently serve in roles as Director in charge of Financial Management or Risk Management;
5. The composition, distribution of duties, and authorities within the Board of Directors are determined by the GMS. If not specified in the GMS resolution, the division of duties and authorities among Directors shall be determined by a resolution of the Board of Directors;
6. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.

In 2024, changes were made to the composition of the Board of Directors. As of December 31, 2024, the composition and structure of the Board of Directors are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Indra Hidayat Sani	Direktur Utama President Director	Ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor: SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, concerning the Change in the Management Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Director of Commercial and Business Development	Ditunjuk sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Director of Commercial and Business Development of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024, concerning the Change in the Management Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term
Dwi Rahmad Toto Sugiarto	Plt. Direktur Operasi Acting Director of Operation	Ditunjuk sebagai Plt. Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan susunan pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Appointed as Acting Director of Operations of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24 dated August 30, 2024, concerning the Change in the Management Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	1 September 2024-2029*) Periode Ke-1 September 1, 2024-2029*), First Term
Bambang Sakti	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko *Director of Finance, HC, and Risk Management*	Ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 14 tanggal 30, juni 2022 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 *Appointed as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of PT Pelabuhan Tanjung Priok based on the Deed of Statement of the Meeting Resolutions of the Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 14 dated June 30, 2022, and the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok concerning the Change in the Management Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and No. SK-001/PII-SK.D/VI/2022 dated June 2, 2022.*	2 Juni 2022 - 2027*), Periode Ke-1 June 2, 2022-2027*), First Term

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*)with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menetapkan Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana telah ditandatangani oleh seluruh anggota oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada 17 Desember 2024 dengan Nomor SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24.

Board Manual disusun dengan tujuan, antara lain:
1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kejelasan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Panduan bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan tugas organ-organ tersebut.

Penyusunan *Board Manual* mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik GCG. Selain itu, *Board Manual* dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.

Dalam *Board Manual* tersebut diatur tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

Adapun isi *Board Manual* PTP Terminal Nonpetikemas adalah sebagai berikut:

Deklarasi Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi

Bab I Pendahuluan
- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Daftar Istilah

Bab II Direksi
- a. Fungsi Direksi
- b. Keanggotaan Direksi
- c. Independensi (Kemandirian) Direksi
- d. Etika Jabatan dan Keanggotaan Direksi
- e. Tugas dan Wewenang Direksi
- f. Kewajiban Direksi
- g. Tanggung Jawab Direksi
- h. Hak Direksi
- i. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
- j. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- k. Organ Pendukung Direksi
- l. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Bab III Dewan Komisaris
- a. Fungsi Dewan Komisaris
- b. Keanggotaan Dewan Komisaris
- c. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- d. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris
- e. Kewajiban Dewan Komisaris

BOARD MANUAL AND CODE OF CONDUCT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok have jointly adopted the Board Manual, which governs their respective duties and responsibilities. This document was signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors on December 17, 2024, under Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24.

The purpose of the Board Manual includes:
1. Ensuring clarity of roles and responsibilities of both the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Defining the working relationship between the the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Serving as a guidance document for supporting organs of the Board of Commissioners and the Board Directors to understand the duties and responsibilities of each governing organ, as well as their interrelations.

The preparation of the Board Manual is based on corporate legal principles, relevant laws and regulations, the Company's Articles of Association, Shareholders' directives, and GCG best practices. The Board Manual is subject to regular evaluation and refinement.

The Board Manual governs the procedures for collaboration between the Board of Commissioners and the Board of Directors in operating their function to ensure the Company is managed in a professional, transparent, effective, and efficient manner, upholding integrity and honesty in the Company's business activities.

The contents of the Board Manual of PTP Terminal Nonpetikemas are as follows:

Declaration of Commitment by the Board of Commissioners and Board of Directors

Chapter I Introduction
- a. Background
- b. Purpose and Objectives
- c. Scope
- d. Glossary of Terms

Chapter II Board of Directors
- a. Functions of the Board of Directors
- b. Composition of the Board of Directors
- c. Independence of the Board of Directors
- d. Code of Conduct and Membership of the Board of Directors
- e. Duties and Authorities of the Board of Directors
- f. Obligations of the Board of Directors
- g. Responsibilities of the Board of Directors
- h. Rights of the Board of Directors
- i. Decision-Making Principles of the Board of Directors
- j. Orientation and Capability Development Programs
- k. Supporting Organs of the Board of Directors
- l. Performance Evaluation Criteria of the Board of Directors

Chapter III Board of Commissioners
- a. Functions of the Board of Commissioners
- b. Composition and Membership of the Board of Commissioners
- c. Code of Conduct and Membership of the Board of Commissioners
- d. Duties and Authorities of the Board of Commissioners
- e. Obligations of the Board of Commissioners

f. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
g. Hak Dewan Komisaris
h. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
i. Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitas
j. Organ Pendukung Dewan Komisaris
k. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
l. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Bab IV Keseimbangan Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
a. Prinsip Dasar dan Asas Hubungan Kerja;
b. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
c. Permintaan dan Penyampaian Informasi;
d. Aturan Peralihan.

Bab V Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
a. Rapat Dewan Komisaris;
b. Rapat Direksi.

Bab VI Penutup

f. Responsibilities of the Board of Commissioners
g. Rights of the Board of Commissioners
h. Decision-Making Principles of the Board of Commissioners
i. Orientation and Capability Development Programs
j. Supporting Organs of the Board of Commissioners
k. Performance Assessment and Evaluation
l. Criteria of the Board of Commissioners

Chapter IV Balance in the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
a. Fundamental Principles and Basis of the Working Relationship;
b. Working Relationship Guidelines of the Board of Commissioners and Directors;
c. Information Requests and Disclosure;
d. Transitional Provisions

Chapter V Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
a. Board of Commissioners Meetings
b. Board of Directors Meetings

Chapter VI Closing

TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI

a. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
b. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
c. Terkait dengan Manajemen Risiko
d. Terkait dengan Teknologi Informasi
e. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
f. Terkait dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi
g. Terkait dengan Sistem Pengawasan Internal
h. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
i. Terkait dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
j. Terkait Hubungan dan *Stakeholders*
k. Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan
l. Terkait Respon Terhadap Peluang Bisnis dan Perubahan Lingkungan Bisnis
m. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

KEWENANGAN DIREKSI SECARA KHUSUS

Direksi juga memiliki kewenangan secara khusus sebagai berikut:
1. Wewenang Mewakili Direksi dan Perusahaan
2. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya
3. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perusahaan
4. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
5. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Peraturan Direksi
6. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu
7. Pendelegasian Wewenang dalam Penyampaian Informal
8. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perusahaan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perusahaan

KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahkan dan menjamin terlaksanakannya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

a. In Relation to the General Meeting of Shareholders (GMS)
b. In Relation to Strategy and Work Plans
c. In Relation to Risk Management
d. In Relation to Information Technology
e. In Relation to Human Capital (HC)
f. In Relation to Business Ethics and Anti-Corruption
g. In Relation to Internal Control Systems
h. In Relation to Transparency and Information Confidentiality
i. In Relation to the Implementation of Good Corporate Governance (GCG)
j. In Relation to Stakeholder Engagement
k. In Relation to Accounting and Bookkeeping Systems
l. In Response to Business Opportunities and Environmental Changes
m. In Relation to Other Duties and Responsibilities

SPECIAL AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors have the following special authorities:
1. Authority to Represent the Board and the Company
2. Authority of the President Director and Its Delegation
3. Directors Not Authorized to Represent the Company
4. Delegation of Authority Among Members of the Board
5. Distribution of Duties and Authorities Through Board Regulations
6. Granting of Power of Attorney for Specific Actions
7. Delegation of Authority for Informal Communication
8. Authority to Take Actions Related to the Management and Ownership of the Company, and to Bind the Company to Third Parties and/or Third Parties to the Company.

OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its principal duties, the Board of Directors is obligated to:
1. Ensure the implementation of the Company's operations and activities in accordance with its purpose and business objectives;
2. Prepare the RJPP RKAP, and any amendments in a timely manner, and submit them to the Board of Commissioners and

Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk audit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan sahkan, serta Laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidaj tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaian Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
11. Memberikan laporan dan menyampaikan informasi berkala, tanpa penundaan dan secara komprehensif menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
12. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 dan 5 di atas;
13. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dna dokumen Keuangan Perusahaan lainnya sebagaimana dijelaskan pada poin 11 di atas;
14. Mengkomunikasikan secara efektif pedoman tentang perilaku dan etika kepada Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan;
15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
16. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal, Auditor Eksternal, pengawasan Dewan Komisaris, laporan BPK, laporan BPKP, rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi akurat, relevan dan tepat waktu;
18. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
19. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
20. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
21. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Shareholders for approval by the GMS;
3. Provide explanations to the GMS regarding the RJPP and RKAP;
4. Maintain the Shareholder Register, Special Register, GMS Minutes, and Minutes of Directors' Meetings;
5. Prepare the Annual Report as a form of accountability and maintain financial documents as required under applicable Company Law on Company Documents;
6. Prepare Financial Statements in accordance with Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit;
7. Submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification, along with a report on Company rights not recorded in the books, including those resulting from receivables write-offs;
8. Provide explanations to the GMS regarding the Annual Report;
9. Submit the approved Balance Sheet and Income Statement to the Minister of Law and Human Rights as required by prevailing laws and regulations;
10. Submit reports on changes in the composition of Shareholders, Directors, and Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;
11. Provide periodic and ad hoc reports and information in a timely and comprehensive manner as required by applicable regulations and upon request of the Board of Commissioners and/or Shareholders;
12. Maintain the Shareholder Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners' Meeting Minutes, Directors' Meeting Minutes, Annual Reports, financial documents, and other Company records as noted on point 4 and 5 above;
13. Store at the Company's registered office: the Shareholder Register, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings, Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Reports, and other financial documents of the Company as referred to in point 11 above;
14. Effectively communicate the Code of Conduct and Ethics Guidelines to the Board of Commissioners and all employees;
15. Develop an accounting system in line with Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly in management, recording, storage, and supervisory functions;
16. Follow up on findings and recommendations from Risk Management, Compliance, Internal Audit, External Audit, Supervisory Boards, the Audit Board of the Indonesia (BPK), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), and other required recommendations under applicable regulations;
17. Ensure that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information;
18. Prepare the Company's organizational structure along with detailed job descriptions;
19. Provide responses to any inquiries or requests made by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
20. Prepare and establish the organizational blueprint of the Company;
21. Fulfill all other obligations as stipulated in the Articles of Association and as determined by GMS resolutions under applicable laws and regulations;

22. Memenuhi permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham

22. Respond to and facilitate requests for access to Company data and documents submitted by Shareholders.

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi telah menyusun pembagian tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana termuat dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KP.05.01/29/2/2/SDM/DIRU/PTP-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun ruang lingkup pembagian tugas antar anggota Direksi, sebagai berikut:

SCOPE OF DIVISION OF DUTIES AMONG EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Each member of the Board of Directors has established their respective division of duties and responsibilities, as outlined in the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KP.05.01/29/2/2/SDM/DIRU/PTP-24 dated February 29, 2024, concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The scope of the division of duties among the members of the Board of Directors is as follows:

Nama Name	**Bidang Tugas** Division of Duties
Indra Hidayat Sani (Direktur Utama) (President Director)	1. Sebagai pimpinan Perusahaan: a. Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM); b. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP; c. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada: i. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP, RKAP dan RKM; ii. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan; d. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengawasan internal,perencanaan strategis korporasi, dan hukum & kepatuhan; e. Menandatangani seluruh Keputusan Direksi yang diputuskan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait; f. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan; g. Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengkoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham; h. Memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). 1. As the Company's leader: a. Act as the leader of the Board of Directors to develop the Company's Long-Term Plan (RIPP) and implement the Company's activities as defined in Annual Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM). b. Direct and control the implementation of policies, vision, mission, and strategies of the Company as established in the RJPP. c. Direct and control all Company activities, including but not limited to: i. Planning, implementing, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP, RKAP, and RKM. ii. Activities aimed at improving corporate culture, positive Company image, and corporate governance (Good Corporate Governance) to achieve the Company's objectives and goals inline with the Company's vision and mission. d. Lead and coordinate the formulation of strategies as a derivative of RJPP, RKAP, and RKM in the areas of corporate secretariat, internal audit unit, corporate strategic planning, and legal & compliance; e. Sign all Board of Directors' Resolutions made during or outside of Directors' Meetings, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, except for authorities delegated based on applicable policies and relevant Standard Operating Procedures (SOPs); f. Sign agreements, contracts, or other engagements with third parties related to the management of the Company, in accordance with the authorities stipulated in the Company's Articles of Association; g. Chair Board of Directors' meetings and other corporate meetings, and coordinate the Board of Directors in organizing Board of Commissioners' meetings and General Meetings of Shareholders; h. Provide information regarding all matters concerning the Company to stakeholders.

Nama Name	Bidang Tugas Division of Duties
Indra Hidayat Sani (Direktur Utama) (President Director)	2. Sebagai pimpinan Direktorat Utama: a. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, pengawasan internal dan hukum, dan perencanaan strategi korporasi; b. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan sekretariat Perusahaan (*corporate secretary*); c. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal & hukum berupa audit operasional dan audit/*review* dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/*review* untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko, proses hukum dan kesesuaian pereaturan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan; d. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan strategis Perusahaan; e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan sekretariat Perusahaan, pengawasan internal & hukum, dan perencanaan strategi korporasi; f. Memastikan pelaksanaan pembinaan pegawai di seluruh Perusahaan sesuai kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia. 2. As the leader of Main Directorates: a. Lead and establish strategies as a breakdown of the RJPP, RKAP, and RKM incorporate secretarial activities, internal and legal supervision, and corporate strategic planning. b. Determine, direct, and oversee/evaluate the strategy and implementation of corporate secretarial activities. c. Direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of internal audit and legal oversight activities, including conducting operational audits and targeted reviews effectively; monitor the follow-up actions on audit/review recommendations to support the Board of Directors in assessing the effectiveness of internal control implementation, risk management, legal processes, regulatory compliance, and corporate governance practices to achieve company objectives; d. Determine, direct, and oversee/evaluate the strategy and implementation of corporate strategic planning; e. Coordinate and evaluate the formulation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to corporate secretariat functions, internal audit and legal affairs, and strategic corporate planning; f. Ensure the implementation of employee development programs across the Company in accordance with human capital policies/guidelines. 3. Tugas/Jabatan Dalam rangka mendukung implementasi/pejabaran fungsi di atas maka Direktur Utama bertanggungjawab dalam hal sebagai berikut: a. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*); b. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksaan kegiatan perencenaan strategi korporasi; c. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksaaan kegiatan pengawasan internal (internal audit) berupa audit operasional dan audit/*review* dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/*review* untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan; d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) kegiatan sekretariat Perusahaan, pengawasan internal & hukum, dan perencanaan strategi korporasi; e. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengarsipan atas dokumen-dokumen Perusahaan; f. Mengoodirnasikan, mengendalian serta mengevaluasi kegiatan dukungan dalam aspek hukum, baik berupa pemberian pendapat hukum, reviu penyusunan dokumen hukum dan penyusunan peraturan internal Perusahaan, pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan internal Perusahaan pendampingan dan penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perusahaan; g. Menandatangani seluruh keputusan Direksi yang diputusukan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasrkan kebijakan dan SPO terkait; h. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan atau standar prosedur operasi; i. Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengkoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham; j. Memberikan informasi segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); k. Memastikan pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Perusahaan sesuai kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia.

Nama Name	**Bidang Tugas** Division of Duties
Indra Hidayat Sani (Direktur Utama) (President Director)	3. *Duties/Responsibilities* *In order to support the implementation/elaboration of the aforementioned functions, the President Director is responsible for the following:* a. *Establish, direct, and supervise/evaluate strategies and the implementation of Corporate Secretary functions;* b. Establish, direct, and supervise/evaluate strategies and the implementation of corporate strategic planning activities; c. Establish, direct, supervise/evaluate strategies and the execution of internal audit activities, including operational audits and special-purpose reviews/audit; monitor follow-up actions on audit/review recommendations to support the Board of Directors in assessing the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance; d. Coordinate and evaluate the formulation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to corporate secretariat, internal audit, legal affairs, and corporate strategic planning; e. Coordinate, control, and evaluate the archiving and management of Company documents; f. Coordinate, control, and evaluate legal support activities, including issuing legal opinions, reviewing and preparing legal documents and internal regulations, conducting compliance assessments, and providing legal assistance and resolution for Company-related legal matters. g. Sign all Board of Directors' resolutions adopted within or outside formal meetings, except for those delegated under relevant policies and SOPs. h. Sign agreements, contracts, and other legal engagements with third parties related to Company management, in accordance with applicable policies and SOPs. i. Chair Board of Directors' meetings and other corporate meetings; coordinate the Board of Directors in facilitating Board of Commissioners meetings and General Meetings of Shareholders. j. Provide relevant information regarding the Company to stakeholders. k. Ensure the implementation of employee development programs across the Company in alignment with human capital policies and guidelines. 4. Tugas lain yang terkait: a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*); b. Melaksanakan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan bisang tugasnya; c. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya; d. Memberikan hak akses terhadap data dan informasi sesuai dengan ketentuan apabila terdapat permintaan dari pihak eksternal/internal 4. Other Related Duties: a. Ensure the implementation of good corporate governance (GCG) principles and best practices across all functional areas; drive continuous improvement in systems and work procedures; b. Implement the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the assigned areas of responsibility; c. Follow up on and/or provide direction regarding audit findings relevant to the respective functional areas; d. Grant access to data and information in accordance with prevailing regulations in response to internal/external requests.
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (Director of Commercial and Business Development)	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis fungsional terkait, yang meliputi: 1. Kebijakan terkait dengan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan pada bidang pemasaran & *customer service* serta pengembangan usaha; 2. Kebijakan terkait dengan pembinaan, sinergi, dan hubungan dengan pemegang usaha; 3. Pembinaan cabang Pelabuhan yang meliputi pendampingan dan mediasi terhadap seluruh aspirasi dan permasalahan operasional cabang. Tugas/Jabatan: 4. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan, pemasaran,& *customer service* serta pengembangan usaha yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bagi Perusahaan; 5. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan proyek satuan kerja sebagai pendapatan unorganik, pemasaran & *customer service*, pengembangan usaha dari strategi yang telah ditetapkan; 6. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi kerja sama bisnis, mitra, dan investor baik dalam rangka implementasi strategi Perusahaan dan melaksanakan tugas dari Induk Perusahaan; 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang komersial dan pengembang usaha secara baik, akurat, aman dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan; 8. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang komersial dan pengembang usaha sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi; 9. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan bidang komersial dan pengembang usaha; 10. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas komersial dan pengembang usaha atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;

Nama Name	Bidang Tugas Division of Duties
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (Director of Commercial and Business Development)	11. Menandatangani perjanjian, kontrak, atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu; 12. Mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan program kerja dari Tim Satuan Kerja; 13. Memastikan pelaksanaan pembinaan pegawai di Direktorat Komersial dan Pengembang Usaha sesuai kebijakan/ pedoman di bidang sumber daya manusia; 14. Menjalankan tugas-tugas sebagai Direktur Pembina Cabang yang akan diatur dalam kebijakan tersendiri; 15. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang di bawah Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha yang dijalankan baik di cabang;
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (Director of Commercial and Business Development)	Formulate and lead strategic functional policies related to: 1. Strategies derived from the RJPP, RKAP, and RKM in the areas of marketing & customer service, and business development; 2. Development, synergy, and relationship management with business stakeholders; 3. Supervision of port branches, including facilitation and mediation in addressing operational aspirations and issues raised by the branches. Duties/Responsibilities : 4. Lead and establish strategies derived from the RJPP, RKAP, and RKM in marketing, customer service, and business development, aimed at optimizing Company revenue; 5. Coordinate, control, and evaluate the execution of work unit projects related to non-organic revenue, marketing & customer service, and business development in alignment with the defined strategies; 6. Coordinate, control, and evaluate activities to optimize business partnerships, alliances, and investor engagement in support of corporate strategy implementation and assignments from the Holding Company; 7. Coordinate, evaluate, and approve activities involving record-keeping, administration, documentation, and report preparation related to commercial and business development management, ensuring accuracy, security, and timeliness for both internal and external purposes; 8. Approve and decide on commercial and business development matters within delegated authority from the Board of Directors; 9. Coordinate and evaluate the development and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to commercial and business development activities; 10. Sign agreements, contracts, or other legal instruments with third parties related to Company operations within the commercial and business development domain or based on delegated authority under applicable policies and SOPs; 11. Sign agreements, contracts, or other legal instruments with third parties on behalf of the President Director, under specific delegated powers from the Board of Directors; 12. Coordinate and supervise the execution of work programs by the related work units or teams; 13. Ensure employee development initiatives within the Directorate of Commercial and Business Development are carried out in accordance with human capital policies and guidelines; 14. Perform duties as the Supervising Director for Branch Offices as governed by separate internal policies; 15. Coordinate and evaluate policies and activities across all areas under the Directorate of Commercial and Business Development, including those executed at the branch level.
	Tugas lain yang terkait: 1. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*); 2. Melaksanakan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan bisang tugasnya; 3. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya; 4. Memberikan hak akses terhadap data dan informasi sesuai dengan ketentuan apabila terdapat permintaan dari pihak eksternal/internal. Other Related Duties: 1. Ensure the implementation of good corporate governance (GCG) principles and best practices across all functional areas; drive continuous improvement in systems and work procedures; 2. Implement the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the assigned areas of responsibility; 3. Follow up on and/or provide direction regarding audit findings relevant to the respective functional areas; 4. Grant access to data and information in accordance with prevailing regulations in response to internal/external requests.

Nama Name	Bidang Tugas Division of Duties
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Plt. Direktur Operasi) (Acting Director of Operations)	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis fungsional terkait, yang meliputi: 1. Kebijakan terkait dengan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan pada bidang Operasi, teknik dan sistem informasi 2. Kebijakan terkait dengan pembinaan, sinergi, dan hubungan dengan pemegang usaha; 3. Pembinaan cabang Pelabuhan yang meliputi pendampingan dan mediasi terhadap seluruh aspirasi dan permasalahan operasional cabang. Direktur Operasi dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Operasi, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan operasi, teknik dan sistem informasi; 2. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi, teknik dan sistem informasi dari strategi yang telah ditetapkan; 3. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi Pelayanan Jasa Pelabuhanan baik dalam rangka implementasi strategi Perusahaan dan melaksanakan tugas dari pemegang saham; 4. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan implementasi pelaksanaan strategi kegiatan operasional Pelabuhan, konstruksi dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan, serta manajemen sistem informasi; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrais dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang operasi, teknik, dan sistem informasi secara baik, akurat, aman dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan; Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang operasi sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi; 6. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan operasi, teknik, dan sistem informasi; 7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas operasi, teknik, dan sistem informasi atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait; 8. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu; 9. Memastikan pelaksanaan pembinaan pegawai di Direktorat Operasi sesuai kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia; 10. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama dan/atau Direksi; 11. Menjalankan tugas-tugas sebagai direktur Pembina cabang yang akan diatur dalam kebijakan tersendiri; 12. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang dibawah Direktotrat Operasi yang dijalankan baik di cabang. 13. Tugas lain yang terkait: a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*); b. Melaksanakan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan bisang tugasnya; c. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya; d. Memberikan hak akses terhadap data dan informasi sesuai dengan ketentuan apabila terdapat permintaan dari pihak eksternal/internal Formulate and lead strategic functional policies related to: 1. Strategies derived from the RJPP, RKAP, and RKM in the areas of marketing & customer service, and business development; 2. Development, synergy, and relationship management with business stakeholders; 3. Supervision of port branches, including facilitation and mediation in addressing operational aspirations and issues raised by the branches. Director of Operations, in carrying out the main duties of Directorate of Operations, is authorized to perform the following functions: 1. Lead and establish strategies as a breakdown of the RJPP, RKAP, and RKM in the operations, engineering and Information System; 2. Coordinate, control, and evaluate implementation of operations, engineering and Information System derived from the establish strategies; 3. Coordinate, control, and evaluate activities to optimize Port Services, both in support of corporate strategy implementation and in fulfilling assignments from shareholders; 4. Coordinate, control, and evaluate the implementation of operational strategies in port operations, construction and maintenance of facilities and equipment, as well as information systems management; 5. Coordinate, evaluate, and approve activities related to record-keeping, administration, documentation, and reporting on Company operations in the areas of operations, engineering, and information systems, ensuring accuracy, safety, and timely delivery for both internal and external purposes; 6. Approve or decide on operational business matters within the delegated authority from the Board of Directors; 7. Coordinate and evaluate the formulation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to operations, engineering, and information systems; 8. Sign agreements, contracts, or other legal instruments with third parties related to Company operations specifically in the areas of operations, engineering, and information systems or based on delegated authority under applicable policies and SOPs; 9. Sign agreements, contracts, or other commitments with third parties related to the management of the Company based on the authority delegated by the President Director on behalf of the Board of Directors for specific matters. 10. Ensure the implementation of employee development within Operations Directorate in accordance with HC policies/guidelines.

Nama Name	Bidang Tugas Division of Duties
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Plt. Direktur Operasi) (Acting Director of Operations)	11. Report the duties as mentioned above to the President Director and/or Board of Directors. 12. Carry out duties as Branch Development Director, which will be regulated separately. 13. Coordinate and evaluate policies and activities across all areas under the Directorate of Operations, including those carried out at branch offices. 14. Other Related Duties: a. Ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and best practices across all work areas; implement continuous improvements in systems and work procedures. b. Implement the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the relevant scope of responsibility. c. Follow up on and/or provide direction regarding audit findings within each respective area. d. Grant access to data and information in accordance with applicable regulations upon request from internal or external parties.
Bambang Sakti (Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, HC, and Risk Management)	Bertanggung jawab atas kebijakan strategis fungsional terkait yang meliputi: 1. Kebijakan terkait dengan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan pada bidang keuangan serta strategi SDM & Umum; 2. Kebijakan terkait dengan pembinaan, sinergi, dan hubungan dengan pemegang saham; 3. Kebijakan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan; 4. Pembinaan Cabang Pelabuhan yang meliputi pendampingan dan mediasi terjadap seluruh aspirasi dan permasalahan operasional cabang. Tugas/Jabatan: 1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan di bidang keuangan dan strategi SDM & umum serta mengawasi/mengevaluasi pelaksanan strategi yang telah ditetapkan mencakup proyek strategi Perusahaan; 2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya Perusahaan (perencanaan sumber daya manusia, manajemen talenta dan pelatihan) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM yang selaras dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan; 3. Mengoodirnasikan, mengendalikan serta mengevalusi kegiatan rekrutmen, pengembangan dan mempertahankan sumber daya manusia; 4. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi program bagi SDM yang telah mencapai masa pensiun termasuk program persiapan pensiun ; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengarsipan atas dokumen-dokumen Perusahaan; 6. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perusahaan; 7. Mempertanggungjawabkan menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevalusi pencapaian RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana stratgis dari masing-masing direktorat; 8. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegaiatan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu; 9. Melaksanakan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan Perusahaan. 10. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegaiatan optimalisasi dana Perusahaan secara akuntabel dan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan penempatan dana pada Bank dan/atau *instrument* pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan daana guna membiayai kegiatan operasional Perusahaan; 11. Mengoordinasikan, mengendalian dan mengevaluasi kinerja cabang perusahan dalam mengimplementasikan RJPP dan RKAP, baik secara triwulan, semester dan tahunan atau sewakt-waktu (jika dianggap perlu); 12. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang akuntansi, perbendaharaan dan keuangan sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perusahaan; 13. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penggunaan anggaran Perusahaan (fungsi Kontrol) serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perusahaan; 14. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang akuntansi, perbendaharaan dan keuangan sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perusahaan; 15. Mengoordinasikan pelaksaanan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurus perusahan terkait dengan bidang keuangan & akuntansi; 16. Membantu Direktur Utama dalam menetapkan, mengarahkan, mengawasi/mengevaluasi dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan; 17. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaskanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan keuangan serta strategi SDM & umum; 18. Memberikan persetujuan atau Keputusan atas pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan serta strategi SDM & umym sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi 19. Menanndatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang-bidang dibawah Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait; 20. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu; 21. Memastikan pelaksanaan pembinaan karyawan di Direktorat Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko sesuai kebijakan/pedoman di bidang Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko; 22. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama dan/atau Direksi; 23. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang dibawah Direktorat Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko yang dijalankan di cabang

Nama Name	Bidang Tugas Division of Duties
	Formulate and lead strategic functional policies related to: 1. Strategies derived from the RJPP, RKAP, and RKM in the areas of marketing & customer service, and business development; 2. Development, synergy, and relationship management with business stakeholders; 3. Develop and oversee the implementation of corporate risk management policies and activities. 4. Supervision of port branches, including facilitation and mediation in addressing operational aspirations and issues raised by the branches. Duties/Responsibilities 1. Lead and define financial strategies and HC & general affairs strategies derived from the RJPP, RKAP, and RKM, and supervise/evaluate the implementation of corporate strategic projects; 2. Coordinate, control, and evaluate the development of policies for managing corporate resources (HR planning, talent management, and training) to enhance employee competence and productivity in alignment with the Company's short- and long-term plans; 3. Coordinate, control, and evaluate recruitment, development, and retention of human capital; 4. Coordinate, control, and evaluate retirement programs for employees, including pre-retirement preparation programs; 5. Coordinate, control, and evaluate Company document archiving activities; 6. Coordinate, control, and evaluate procurement of goods and services to optimally support the Company's operations; 7. Develop, coordinate, control, and evaluate the achievement of RKAP targets based on the needs and strategic plans of each directorate; 8. Coordinate, control, and evaluate financial transaction recording and the preparation of quarterly, semi-annual, and annual financial reports in accordance with applicable accounting standards; 9. Ensure compliance with corporate taxation obligations related to business activities; 10. Coordinate, control, and evaluate optimal and accountable fund management with prudence principles, including fund placements in banks and/or money market instruments, and administer such placements to ensure liquidity for the Company's operations 11. Coordinate, control, and evaluate the performance of Company branches in implementing RJPP and RKAP on a quarterly, semi-annual, annual, or ad-hoc basis as needed; 12. Coordinate, control, and evaluate the development of accounting, treasury, and financial functions in line with the RKAP, RJPP, and/or business plan; 13. Coordinate, control, and evaluate budget usage (budget control function); implement and control payment and collection activities related to Company operations; 14. Coordinate, control, and evaluate the development of accounting, treasury, and financial functions in accordance with the RKAP, RJPP, and/or the Company's business plan. 15. Coordinate, evaluate, and approve activities involving the recording, administration, documentation, and reporting in the areas of finance & accounting; 16. Support the President Director in establishing, directing, supervising/evaluating the implementation of corporate risk management activities; 17. Coordinate and evaluate the development and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to finance and HC & general strategies; 18. Approve or decide on the execution of activities in the areas of finance and HC & general affairs, in accordance with delegated authority from the Board of Directors; 19. Sign agreements, contracts, or other binding commitments with third parties concerning Company administration, particularly in areas under the Directorate of Finance, HC, and Risk Management, or as delegated under related policies and SOPs; 20. Sign agreements, contracts, or other legal instruments with third parties on behalf of the President Director under specific delegated authority; 21. Ensure the implementation of employee development programs within the Directorate of Finance, HC, and Risk Management in accordance with applicable policies/guidelines; 22. Report the execution of all aforementioned duties to the President Director and/or the Board of Directors; 23. Coordinate and evaluate policies and activities under the Directorate of Finance, HR, and Risk Management as carried out at branch level.
	24. Tugas lain yang terkait: a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang taat asas (GCG dan *best practices*) semua bidang kerja, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*); b. Melaksanakan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan bisang tugasnya; c. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor masing-masing bidangnya; d. Memberikan hak akses terhadap data dan informasi sesuai dengan ketentuan apabila terdapat permintaan dari pihak eksternal/internal 24. Other Related Duties: a. Ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and best practices across all work areas; implement continuous improvements in systems and work procedures. b. Implement the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the relevant scope of responsibility. c. Follow up on and/or provide direction regarding audit findings within each respective area. d. Grant access to data and information in accordance with applicable regulations upon request from internal or external parties.

INDEPENDENSI DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perusahaan;
2. Setiap Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

To ensure that the Board of Directors acts in the best interest of the Company as a whole, director independence is a critical principle that must be upheld. In support of this, the following provisions apply:

1. No parties other than members of the Board of Directors shall intervene in the Company's management;
2. Each member of the Board of Directors is prohibited from engaging in any activities that may compromise their independence in managing the Company.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Kebijakan Program Pengenalan

Kebijakan program pengenalan Direksi tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024. Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan ataupun siapaun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan sebagaimana dimaksud poin 1 sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, risiko, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit.
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan.
5. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Direksi

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan program pengenalan Perusahaan bagi Direksi, yaitu Indra Hidayat Sani dan Kalbar Yanto diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2024.

CORPORATE ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED DIRECTORS

Program Policy

The orientation program for newly appointed Directors is outlined in the Board Manual governing the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors at PT Pelabuhan Tanjung Priok, established under Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024. The policy includes the following provisions:

1. All newly appointed members of the Board of Directors must be provided with a general introduction program regarding the Company.
2. The Corporate Secretary, or any individual fulfilling the function of Corporate Secretary, is responsible for organizing the orientation program.
3. At a minimum, the program must include:
   a. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company;
   b. An overview of the Company's purpose, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short- and long-term plans, risks, competitive position, and other strategic issues;
   c. Information on the delegated authorities of Internal and External Audit functions, the internal control system and policies, and the Audit Committee;
   d. A clear explanation of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, including prohibited actions.
4. The orientation program may take the form of presentations, meetings, site visits, document reviews, or other formats deemed appropriate by the Company;
5. The orientation program must be conducted no later than 90 (ninety) calendar days following the GMS decision on the appointment of new Directors.

Implementation of the Orientation Program for the Board Of Directors

In 2024, the Company conducted the corporate introduction program for newly appointed Directors Indra Hidayat Sani and Kalbar Yanto on February 29, 2024.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan Peningkatan Kompetensi Direksi

Kebijakan peningkatan kompetensi Direksi tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Setiap tahun masing-masing anggota Direksi wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud,* bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, kegiatan korporasi signifikan BUMN dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
4. Dalam satu tahun Direksi wajib mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan;
5. Pelatihan yang diikuti merupakan Program Pelatihan Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh Lembaga profesi, regulator, Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN;
6. Direksi wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional, sertifikasi memiliki standar profesi dan etika, sertifikasi diwajibkan selama masa jabatan.
8. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut;
9. Direksi yang membidangi pengelolaan keuangan dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko memiliki kualifikasi dan sertifikasi tersendiri sesuai dengan Petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelolaan risiko di lingkungan BUMN.

Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2024

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi selama tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Competency Development Policy for the Board of Directors

The policy on competency development for the Board of Directors is set out in the Board Manual governing the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors at PT Pelabuhan Tanjung Priok, as stipulated in Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024. Enhancing capability is deemed essential for enabling Directors to stay informed of developments in the Company's core business, anticipate emerging issues, and ensure the Company's sustainability and growth. Key provisions of the competency development program include:

1. Competency development programs are conducted to improve the effectiveness of the Board of Directors' performance;
2. Plans for such programs must be incorporated into the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
3. Each Director is required to participate annually in at least one training program on topics such as risk management, fraud, business, corporate activities, law, compliance, finance, accounting, audit, significant SOE corporate actions, and/or other areas relevant to their respective duties;
4. The Board of Directors must complete a minimum of 40 (forty) hours of training per year;
5. The training must qualify as Continuing Professional Education (PPL) conducted by professional organizations, regulators, accredited training institutions, or training providers owned or controlled by SOEs;
6. Each Director must complete at least one professional certification in areas such as business, corporate governance, law, risk management, compliance, finance, or accounting relevant to their role;
7. Certifications must be issued by a nationally/internationally recognized certification board/regulator/ professional organization and must meet accepted professional and ethical standards. Certification is mandatory throughout the term of office;
8. Each Director is responsible for submitting a report on the implementation of the competency development program within 30 (thirty) days of program completion;
9. The Director responsible for financial management and the Director in charge of risk management must hold specific qualifications and certifications, in accordance with the Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOEs.

Training Implementation in 2024

The competency development programs attended by members of the Board of Directors during 2024 are disclosed as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Durasi Pelatihan (dalam jam)** Duration of the Training (in hour)	**Penyelenggara** Organizer
Indra Hidayat Sani (Direktur Utama) (President Director)	*Social Return of Investment*	27-28 Mei 2024 May 27-28, 2028	16	*Shared Value* Indonesia
	PT PSL *To be Integrated Logistics Ecosystem Player*	15 Desember 2024 December 15, 2024	1 Jam 30 Menit 1 Hour 30 Minutes	Pelindo
	Berlabuh 23 Februari 2024 "Kanker? *Be Healthy, Less Worry*!" BERLABUH February 23, 2024: "Cancer? Be Healthy, Less Worry!"	14 Desember 2024 December 14, 2024	1 Jam 37 Menit 1 Hour 37 Minutes	KM PMLI
	BERLABUH 28 Februari 2023 "*Unlocking Potential Through Innovation*" BERLABUH February 28, 2023: "Unlocking Potential Through Innovation"	10 Desember 2024 December 10, 2024	2 Jam 11 Menit 2 Hours 11 Minutes	Pelindo
	Tantangan Pemanduan Kapal di PT Pelindo Pasca Merger Challenges of Ship Piloting at PT Pelindo Post-Merger	2 Desember 2024 December 2, 2024	1 Jam 4 Menit 1 Hour 4 Minutes	Pelindo
	BERLABUH "*Is It a Disaster If My Office Mate Identified as NPD*"	2 Desember 2024 December 2, 2024	40 Menit 40 Minutes	KM PMLI
	P-Active Talk Online Self Learning	14 Juni 2024 June 14, 2024	1 Jam 35 Menit 1 Hour 35 Minutes	Pelindo
	Engagement Program: Safety Culture Safe Behavior Ahli K3 Dalam *Safety Culture* *Engagement Program: Safety Culture & Safe Behavior OHS Experts in Safety Culture*	13 Juni 2024 June 13, 2024	24 Menit 24 Minutes	Pelindo
	Transformasi SDM Paska merger Be Ready ! HR Transformation Post Merger Be Ready!	28 Mei 2024 May 28, 2024	1 Jam 48 Menit 1 Hour 48 Minutes	Pelindo
	Tugas dan Tanggung Jawab Ship Operator Assistant (SOA) & Wharf Operator Assistant (WOA) Duties and Responsibilities of Ship Operator Assistant (SOA) & Wharf Operator Assistant (WOA)	25 Mei 2024 May 25 2024	24 Menit 24 Minutes	Pelindo
	Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi Joint Commitment of the Port Community to Eradicate Corruption	20 Mei 2024 May 20, 2024	2 Jam 16 Menit 2 Hours 16 Minutes	Pelindo
	BERLABUH 20 Oktober 2023 "Safety Culture in Maritime Industry" BERLABUH October 20, 2023: "Safety Culture in Maritime Industry"	29 April 2024 April 29, 2024	1 Jam 14 Menit 1 Hour 14 Minutes	KM PMLI
	Unleash Your Potentials	23 April 2024 April 23, 2024	2 Jam 37 Menit 2 Hours 37 Minutes	Pelindo
	Penanganan *Cargo* Curah Cair di Pelabuhan Handling of Liquid Bulk Cargo at the Port	16 April 2024 April 16, 2024	1 Jam 29 Menit 1 Hour 29 Minutes	Pelindo
	Food and Feed Cargo Discharging Operation pada Terminal Curah Kering *Food and Feed Cargo Discharging Operation at the Dry Bulk Terminal*	29 Januari 2024 January 29, 2024	1 Jam 14 Menit 1 Hour 14 Minutes	Pelindo
	Managing Small Stresses Before They Create Big Problems	12 Juni 2024 June 12, 2024	29 Menit 29 Minutes	LinkedIn
	Communicating Values	4 November 2024 November 4, 2024	35 Menit 35 Minutes	LinkedIn
	Courageous Leadership	10 Oktober 2024 October 10, 2024	48 Menit 48 Minutes	LinkedIn
	11 Inactions that Ruin a Leader's Reputation	4 November 2024 November 4, 2024	49 Menit 49 Minutes	LinkedIn
	Developing Leadership Presence	10 Juni 2024 June 10, 2024	40 Menit 40 Minutes	LinkedIn
	Foundations of Performance Management	16 Mei 2024 May 16, 2024	44 Menit 44 Minutes	LinkedIn
	Interpersonal Communication	16 Mei 2024 May 16, 2024	42 Menit 42 Minutes	LinkedIn
	Managing a Multigenerational Team	23 September 2024 September 23, 2024	57 Menit 57 Minutes	LinkedIn
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (Director of Commercial and Business Development)	*Food and Feed Cargo Discharging Operation pada Terminal Curah Kering* Food and Feed Cargo Discharging Operation at the Dry Bulk Terminal	26 Januari 2024 January 26, 2024	1 Jam 11 Menit 1 Hour11 Minutes	Pelindo
	Mengenal Operasi Terminal Petikemas Getting to Know Container Terminal Operations	5 April 2024 April 5, 2024	2 Jam 04 Menit 2 Hours 4 Minutes	Pelindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Venue/Date	Durasi Pelatihan (dalam jam) Duration of the Training (in hour)	Penyelenggara Organizer
Dwi Rahmad Toto Sugiarto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (Director of Commercial and Business Development)	*Freight Forwarding and Its Business: The Architect of Logistics Services*	19 Juni 2024 June 19, 2024	1 Jam 21 Menit 1 Hour 21 Minutes	Pelindo
	Dasar-Dasar Operasi Terminal Non-Petikemas Basics of Non-Container Terminal Operations	27 April 2024 April 27, 2024	1 Jam 59 Menit 1 Hour 59 Minutes	KM PLMI
	BERLABUH 28 Februari 2023 "*Unlocking Potential Throught Innovation*" BERLABUH February 28, 2023: "Unlocking Potential Through Innovation"	10 Desember 2024 December 10, 2024	2 Jam 11 Menit 2 Hours 11 Minutes	Pelindo
	Legal Coaching Clinic | Penyalahgunaan Wewenang atau Perbuatan Melampaui Wewenang Legal Coaching Clinic | Abuse of Authority or Actions Beyond Authority	4 Juli 2024 July 4, 2024	1 Jam 5 Menit 1 Hour 5 Minutes	Pelindo
	Dry Bulk Terminal Operation | Online Self Learning	18 Juni 2024 June 18, 2024	1 Jam 24 Menit 1 Hour 24 Minutes	Pelindo
	Prosedur Pengoperasian Alat Bongkar Muat Pelabuhan - *Online Self Learning* *Port Cargo Handling Equipment Operation Procedures – Online Self-Learning*	1 Maret 2024 March 1, 2024	2 Jam 53 Menit 2 Hours 53 Minutes	Pelindo
	P-Active Talk Online Self Learning	23 Maret 2024 March 23, 2024	1 Jam 35 Menit 1 Hour 35 Minutes	Pelindo
	Berlabuh 23 Februari 2024 "Kanker? *Be Healthy, Less Worry*!" *BERLABUH February 23, 2024: "Cancer? Be Healthy, Less Worry!"*	27 Februari 2024 February 27, 2024	1 Jam 37 Menit 1 Hour 37 Minutes	KM PMLI
Bambang Sakti (Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko) *(Director of Finance, HC, and Risk Management)*	*Global mindset for developing leaders*	25-26 April 2024 April 25-26, 2024	16	Thunderbird School of Global Management
	Port and people development from design to operate	8 Agustus 2024 August 8, 2024	4 Jam 42 Menit 4 Hours 42 Minutes	Pelindo
	Unlocking potential through innovation	13 Mei 2024 May 13, 2024	2 Jam 11 Menit 2 Hours 11 Minutes	Pelindo
	Unleash potentials	14 Mei 2024 May 14, 2024	2 Jam 37 Menit 2 Hours 37 Minutes	Pelindo
	Navigating the merger landscape	14 Mei 2024 May 14, 2024	3 Jam 16 Menit 3 Hours 16 Minutes	Pelindo
	Seminar manajemen resiko Risk Management Seminar	14 Mei 2024 May 14, 2024	3 Jam 48 Menit 3 Hours 48 Minutes	Pelindo
	Transformasi layanan berbasis *planning & control* Planning & Control-Based Service Transformation	14 Mei 2024 May 14, 2024	2 Jam 48 Menit 2 Hours 48 Minutes	Pelindo
	Loyalitas dan nasionalisme insan pelindo di era industri 4.0 Loyalty and nationalism of Pelindo Personnel in the Industry 4.0	15 Mei 2024 May 15, 2024	2 Jam 01 Menit 2 Hours 1 Minute	Pelindo
	Ruang kolaborasi pasca integrasi Post-Integration Collaboration Space	15 Mei 2024 May 15, 2024	1 Jam 28 Menit 1 Hour 28 Minutes	Pelindo
	Problem solving with design thinking	15 Mei 2024 May 15, 2024	2 Jam 23 Menit 2 Hours 23 Minutes	Pelindo
	Leaders role in culture transformation	31 Mei 2024 May 31,	1 Jam 15 Menit 1 Hour 15 Minutes	Pelindo

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Direksi telah menjalankan tugasnya dengan memutuskan dan mengimplementasikan berbagai keputusan di berbagai aspek operasional, keuangan, dan pendukung usaha melalui berbagai instrumen kebijakan seperti Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, dan Instruksi Direksi.

BRIEF REPORT ON THE EXECUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

In 2024, the Board of Directors carried out its duties by making and implementing various decisions across operational, financial, and business support aspects through several policy instruments, including Directors' Resolutions, Directors' Regulations, and Directors' Instructions.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal About
1	HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24	21 Maret 2024 *March 21, 2024*	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Procurement Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok environment,*
2	SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24	13 September 2024 *September 13, 2024*	Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Good Corporate Governance Guideline in PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment*
3	HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24	13 September 2024 *September 13, 2024*	Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Anti-Bribery Management System Governance in the PT Pelabuhan Priok Environment*
4	HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24	22 Oktober 2024 *October 22, 2024*	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Gratification Control Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment*
5	HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24	22 Oktober 2024 *October 22, 2024*	Pedoman Anti *Fraud* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Anti-Fraud Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment*
6	SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24	25 November 2024 *November 25, 2024*	Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang Sekaligus sebagai Unti Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok *Directors' Decree on the Formation of the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP), which also serves as the Gratification Control Unit (UPG), Conflict of Interest and Fraud Management Unit, in the context of implementing the Anti-Bribery Management System at PT Pelabuhan Tanjung Priok*
7	SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24	28 November 2024 *November 28, 2024*	Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Business Code of Conduct Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.*
8	SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24	28 November 2024 *November 28, 2024*	Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Whistleblowing System Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.*
9	HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24	28 November 2024 *November 28, 2024*	Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan Terintegrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Integrated Conflict of Interest Management Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.*
10	HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24	12 Desember 2024 *December 12, 2024*	Pedoman *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Governance, Risk, & Compliance (GRC) Guidelines in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.*
11	SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24	17 Desember 2024 *December 17, 2024*	Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Board Manual on the Working Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners in PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment.*

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga akhir Desember 2024, Perusahaan belum memiliki Komite di bawah Direksi. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait penilaian kinerja Komite di bawah Direksi. Namun, Direksi memiliki organ pendukung yakni Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal & Hukum. Penilaian terhadap organ pendukung Direksi tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian target pelaksanaan tugasnya masing-masing.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of the end of December 2024, the Company did not have any committees operating under the Board of Directors. Accordingly, there is no information available regarding the performance evaluation of such committees. However, the Board of Directors is supported by two key functional units: the Corporate Secretary and the Internal Audit & Legal Unit. The performance of these supporting organs is evaluated based on the achievement of their respective work targets.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
INFORMATION TRANSPARENCY REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN TERKAIT HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi harus berjalan selaras, seimbang dan saling menghormati atas hak dan kewajiban masing-masing sesuai fungsi dan tugasnya. Prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat ditemukan dalam *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perusahaan, yang menjadi panduan dalam menjalankan fungsi dan kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan mematuhi pedoman ini, keduanya dapat bekerja bersama secara efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan dengan baik.

PRINSIP DASAR DAN ASAS HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja organ di dalam Perusahaan harus berlandaskan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjabarkan atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut, juga didasarkan pada prinsip dasar hubungan yang *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. *Transparency*, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan di antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya;
2. *Accountabillity*, pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas dengan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perusahaan;
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi sesuai fungsi di dalam melaksanakan tugasnya dalam Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana Perusahaan berada;
4. *Independency*, sebagai keadaan dimana Dewan Komisaris dan Direksi bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme Perusahaan;
5. *Trusted*, terciptanya kesetaraan perlakuan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang saling berkepentingan;
6. *Trusted*, mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Keenam prinsip GCG ini menjadi dasar hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Oleh karena itu, dengan landasan GCG ini maka dalam pelaksanaannya terdapat pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam memberikan nilai tambah bagi kepentingan Perusahaan.

Adapun asas dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

POLICY ON THE WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be harmonious, balanced, and based on mutual respect for each other's rights and obligations in accordance with their respective functions and responsibilities. The principles governing this relationship are outlined in the Board Manual and the Company's Articles of Association, which serve as guidance in carrying out the duties and obligations of both governing bodies. By adhering to these guidelines, the two bodies can collaborate effectively to achieve the Company's objectives.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND BASIS OF THE WORKING RELATIONSHIP

The working relationship between the Company's organs is grounded in Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. In addition to these laws and their implementing regulations, the relationship is also founded on the core principles of Good Corporate Governance (GCG), which include:

1. Transparency, transparency in processes and interactions between the Board of Commissioners and the Board of Directors, aimed at creating added value for the Company and benefiting shareholders and other stakeholders;
2. Accountability, accountability for the execution of duties and functions with authority hold by the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company;
3. Responsibility, fulfillment of duties by both Boards of Commissioners and Board of Directors in accordance with their functions as corporate citizens accountable to stakeholders and the surrounding environment;
4. Independency, freedom of the Board of Commissioners and Board of Directors from undue influence or pressure from external parties that may disrupt the Company's governance mechanisms;
5. Fairness, equal treatment and fairness between the Board of Commissioners and the Board of Directors in matters of mutual interest;
6. Trusted, building and maintaining the full trust and support of all stakeholders.

These six GCG principles form the foundation of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Based on these principles, the relationship is structured to deliver added value and safeguard the best interests of the Company.

The key principles that guide the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

1. Asas Keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak didasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (*no vested interest*);
2. Asas Formal, yaitu hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi didasarkan tugas/tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku;
3. Asas Kelembagaan, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaannya sebagai *collegial*;
4. Asas Harmonis, yaitu sedapat mungkin menghilangkan perpecahan yang dapat merugikan Perusahaan;
5. Asas Saling Menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing-masing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya;
6. Asas Kemitraan, yaitu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan partner kerja sama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perusahaan.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut;
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

1. Principle of Transparency reflects the relationship is free from personal interests, and nothing is concealed (no vested interest);
2. Principle of Formality reflects the relationship is based on the official duties and responsibilities of each party and conducted through formal procedures;
3. Principle of Institutionalism reflects each party acts on behalf of their institution in a collegial and representative manner;
4. Principle of Harmony reflects conflicts that may harm the Company should be minimized or avoided;
5. Principle of Mutual Respect reflects each party must respect the authority and responsibilities of the other, avoiding overreach;
6. Principle of Partnership reflects the relationship is based on mutual commitment to the Company's best interests, positioning both Boards as collaborative partners.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WORK RELATIONSHIP

Creating a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is very important as it enables each Company organ to work effectively and efficiently based on its function. For this reason, the Company maintains a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors by applying the following principles:

1. Board of Commissioners respects the function and role of Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association;
2. Board of Directors respects the function and role of Board of Commissioners to supervise and provide advice on management policies of the Company;
3. Correspondence between Board of Commissioners and Board of Directors must use a letter format that contains an explanation of purpose of the letter;
4. All working relationships between Board of Commissioners and Board of Directors are formal, meaning they must always be based on a standard mechanism or accountable correspondence;
5. Informal relationship can be carried out by Members of Board of Commissioners and Board of Directors, but they cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence;
6. Work relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is an institutional relationship in sense that Board of Commissioners and Board of Directors holds a collective position that represents all of its members, meaning that any working relationship between a member of Board of Commissioners and a member of Board of Directors must be known to all other members of Board of Commissioners and Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dasar Pelaksanaan Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
4. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS;

2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya;
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris;
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris menetapkan indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Basis for Performance Assessment of Members of Board of Commissioners

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.
3. Regulation of the Minister of SOE Number: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.
4. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024 concerning the Guidelines for the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Performance Assessment Procedure

1. Board of Commissioners shall submit a performance report of Board of Commissioners and Members of Board of Commissioners to be evaluated by the Shareholders in the GMS;
2. The performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association as well as the Shareholders' mandate. Formal evaluation criteria are disclosed to members of Board of Commissioners from the date of their appointment;
3. The evaluation of the performance of Board of Commissioners as a whole and the performance of each member of Board of Commissioners individually is an integral part of the compensation and incentive scheme for members of Board of Commissioners;
4. The evaluation result of the performance of each member of the Board of Commissioners individually is one of the basis of consideration for the Shareholders to dismiss and/or reappoint the member of the Board of Commissioners concerned. The results of the performance evaluation area means of assessing and improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners performance is periodically evaluated based on a Board of Commissioners Decree and is conducted with the following conditions:
1. Board of Commissioners has policies regarding Board of Commissioners performance measurement and assessment;
2. Board of Commissioners determines the Performance Achievement indicators that are ratified by GMS every year;
3. Board of Commissioners or their supporting organs conducts Board of Commissioners performance assessment, records the results in Board of Commissioners Meeting Minutes and includes the results in the Board of Commissioners Implementation of Duties Report;

4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komite, dan setiap individu Komisaris;
5. Evaluasi tahunan pada poin 4 di atas didasarkan pada tolak ukur atau kriteria penilaian spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
6. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi. Hasil penilaian sendiri tersebut juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dan Arahan Terhadap Direksi atas Rencana dan Kebijakan Perusahaan;
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Adapun realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2024, adalah sebagai berikut:

4. The Board of Commissioners conducts an objective annual evaluation to assess the effectiveness of the Board, its Committees, and each individual Commissioner;
5. The annual evaluation referred to in point 4 is based on specific, measurable, achievable, and relevant criteria;
6. The results of the annual evaluation are reported by the Board of Commissioners to the GMS.

Party Responsible for the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by self-assessment which is then submitted to the Shareholders in the GMS for evaluation. The results of self-assessment are also disclosed in the Annual Report.

Performance Evaluation Criteria for the Board of Commissioners

As stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP- 24 dated December 17, 2024, concerning the Guidelines for the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual), the performance evaluation criteria for the Board of Commissioners and its individual members, as proposed by the Board and approved at the General Meeting of Shareholders (GMS), are as follows:
1. Contribution to the achievement of the Company's performance;
2. Timeliness in providing opinions and recommendations, as part of the Board of Commissioner responsibilities;
3. Contribution to the GCG implementation;
4. Attendance at meetings and participation in site visits by the Board of Commissioners;
5. Oversight and Advice provided to the Board of Directors regarding the Company's plans and policies;
6. Effectiveness of supporting activities conducted by the Board of Commissioners.

The realization of the 2024 KPI for the Board of Commissioners is presented as follows:

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners KPI in 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Targets						
	Kontribusi terhadap Realisasi Capaian KPI Direksi Contribution to the Achievement Realization of Board of Directors' KPIs	Poin *Point*	6	100	96,99	97%	5,82
2	Ketepatan Waktu Penyampaian Pendapat dan Saran yang Menjadi Kewajiban Dewan Komisaris Timeliness in Providing Opinions and Suggestions as Obligations of the Board of Commissioners						
	Pendapat dan Saran atas RJPP Opinions and Suggestions on RJPP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners KPI in 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	Pendapat dan Saran atas RKAP Opinions and Suggestions on RKAP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Opinions and Suggestions on Annual Reports	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	Tanggapan atas Tindakan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan RUPS Response to Actions by the Board of Directors Requiring GMS' Approval	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
3	Kontribusi terhadap Penerapan GCG Contribution to GCG Implementation						
a.	Kontribusi Kualitas Penerapan GCG Contribution to the Quality of GCG Implementation	Poin *Point*	5	100	94,12	94%	4,71
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG – Dekom Follow-up on Recommendations from GCG Assessment Results - Board of Commissioners	%	5	100	100	100%	5,00
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Rate of Board of Commissioners Members						
	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	13	108%	5,42
	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	12	100%	5,00
	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre- GMS and GMS for RKAP	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and GMS for Annual Reports	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners KPI in 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
5	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities for Board of Commissioners						
	1) Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Increasing Competency of Board of Commissioners						
	a. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners	Kepesertaan *Participation*	4	1	5	110%	4,40
	b. Laporan Kunjungan Kerja Work Visit Reports	Laporan *Report*	3	4	6	110%	3,30
	2) Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
	Komite Audit Audit Committee						
	Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance Rate of Audit Committee Members	Kehadiran *Attendance*	3	62	63	102%	3,05
	Risalah Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	3	4	4	100%	3,00
	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Reports	Laporan *Reports*	3	29	35	110%	3,30
	Komite Pemantau Risiko (PR) Risk Monitoring Committee (PR)						
	Tingkat Kehadiran Anggota Komite PR Attendance Rate of PR Committee	Kehadiran *Attendance*	3	62	61	98%	2,95
	Risalah Rapat Anggota Komite PR PR Committee Member Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	3	4	4	100%	3,00
	Laporan Penugasan Anggota Komite PR PR Committee Assignment Reports	Laporan *Reports*	3	17	17	100%	3,00
	Komite Nominasi & Remunerasi (N&R) Nomination & Remuneration Committee (N&R)						
	Tingkat Kehadiran Anggota Komite N&R Attendance Rate of N&R Committee Member	Kehadiran *Attendance*	3	62	59	95%	2,95
	Risalah Rapat Anggota Komite N&R N&R Committee Member Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	3	4	4	100%	3,00

KPI Dewan Komisaris 2024
Board of Commissioners KPI in 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	Laporan Penugasan Anggota Komite N&R N&R Committee Member Assignment Reports	Laporan *Reports*	3	17	17	100%	3,00
	TOTAL		**100**				**100,80**

PENILAIAN INDIVIDUAL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Prakosa Hadi Takariyanto (Komisaris Utama)
   Penilaian kinerja individual Prakosa Hadi Takariyanto terintegrasi ke dalam KPI Dewan Komisaris secara keseluruhan.
2. Lukijanto (Komisaris Independen)

INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Prakosa Hadi Takariyanto (President Commissioner)
   The individual performance evaluation of Prakosa Hadi Takariyanto is integrated into the overall KPI of the Board of Commissioners.
2. Lukijanto (Independent Commissioner)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Targets						
	Kontribusi terhadap Realisasi Capaian KPI Direksi *Contribution to the Achievement Realization of Board of Directors' KPIs*	Poin *Point*	10	100	96,99	97%	9,70
2	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Targets						
	a. Pendapat dan Saran atas RJPP Opinions and Suggestions on RJPP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	b. Pendapat dan Saran atas RKAP Opinions and Suggestions on RKAP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	c. Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
	d. Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Opinions and Suggestions on Annual Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	e. Tanggapan atas Tindakan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan RUPS Response to Actions by the Board of Directors Requiring GMS' Approval	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
3	Kontribusi terhadap Penerapan GCG Contribution to GCG Implementation						
	a. Kontribusi Kualitas Penerapan GCG Contribution to the Quality of GCG Implementation	Poin *Point*	6	100	94,12	94%	5,65
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG – Dekom Follow-up on Recommendations from GCG Assessment Results - Board of Commissioners	%	6	100	100	100%	6,00
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Rate of Board of Commissioners Members						
	a Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	13	108%	5,42
	b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	12	100%	5,00
	c. Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre- GMS and GMS for RKAP	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
	d. Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and GMS for Annual Reports	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
5	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities for Board of Commissioners						
	1) Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Increasing Competency of Board of Commissioners						
	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners	Kepesertaan *Participation*	5	1	5	100%	5,00
	Laporan Kunjungan Kerja Work Visit Reports	Laporan *Reports*	5	4	6	110%	5,50

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	2) Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
	Komite Audit Audit Committee						
a.	Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance Rate of Audit Committee Members	Kehadiran *Attendance*	5	62	63	102%	5,08
b.	Risalah Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	5	4	4	100%	5,00
c.	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Reports	Laporan *Reports*	5	29	35	110%	5,50
	TOTAL		**100**				**100,84**

3. Andi Hamdani (Komisaris)

3. Andi Hamdani (Commissioner)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Targets						
	Kontribusi terhadap Realisasi Capaian KPI Direksi *Contribution to the Achievement Realization of Board of Directors' KPIs*	Poin *Point*	10	100	96,99	97%	9,70
2	Ketepatan Waktu Penyampaian Pendapat dan Saran yang Menjadi Kewajiban Dewan Komisaris Timeliness in Providing Opinions and Suggestions as Obligations of the Board of Commissioners						
a.	Pendapat dan Saran atas RJPP Opinions and Suggestions on RJPP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
b.	Pendapat dan Saran atas RKAP Opinions and Suggestions on RKAP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
c.	Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
d.	Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Opinions and Suggestions on Annual Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	e. Tanggapan atas Tindakan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan RUPS Response to Actions by the Board of Directors Requiring GMS' Approval	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
3	Kontribusi terhadap Penerapan GCG Contribution to GCG Implementation						
	a. Kontribusi Kualitas Penerapan GCG Contribution to the Quality of GCG Implementation	Poin *Point*	6	100	94,12	94%	5,65
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG – Dekom Follow-up on Recommendations from GCG Assessment Results - Board of Commissioners	%	6	100	100	100%	6,00
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Rate of Board of Commissioners Members						
	a. Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	13	108%	5,42
	b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	12	12	100%	5,00
	c. Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre- GMS and GMS for RKAP	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
	d. Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and GMS for Annual Reports	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
5	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities for Board of Commissioners						
	1) Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Increasing Competency of Board of Commissioners						
	a. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners	Kepesertaan *Participation*	5	1	5	100%	5,00

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
	b. Laporan Kunjungan Kerja Work Visit Reports	Laporan *Reports*	5	4	6	110%	5,50
	2) Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities for Board of Commissioners						
	Komite Pemantau Risiko (PR) Risk Monitoring Committee (PR)						
	a. Tingkat Kehadiran Anggota Komite PR Attendance Rate of PR Committee	Kehadiran *Attendance*	5	62	61	98%	4,92
	b. Risalah Rapat Anggota Komite PR PR Committee Member Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	5	4	4	100%	5,00
	c. Laporan Penugasan Anggota Komite PR PR Committee Assignment Reports	Laporan *Reports*	5	17	17	100%	5,00
	TOTAL		**100**				**100,18**

4. Dedy Cahyadi (Komisaris)

4. Dedy Cahyadi (Commissioner)

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
1	Kontribusi terhadap Capaian Kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Targets						
	Kontribusi terhadap Realisasi Capaian KPI Direksi Contribution to the Achievement Realization of Board of Directors' KPIs	Poin *Point*	10	100	96,99	97%	9,70
2	Ketepatan Waktu Penyampaian Pendapat dan Saran yang Menjadi Kewajiban Dewan Komisaris Timeliness in Providing Opinions and Suggestions as Obligations of the Board of Commissioners						
	a. Pendapat dan Saran atas RJPP Opinions and Suggestions on RJPP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00
	b. Pendapat dan Saran atas RKAP Opinions and Suggestions on RKAP	Hari *Day*	6	14	14	100%	6,00

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
c.	Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
d.	Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Opinions and Suggestions on Annual Reports	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
e.	Tanggapan atas Tindakan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan RUPS Response to Actions by the Board of Directors Requiring GMS' Approval	Hari *Day*	7	14	14	100%	7,00
3	Kontribusi terhadap Penerapan GCG Contribution to GCG Implementation						
a.	Kontribusi Kualitas Penerapan GCG Contribution to the Quality of GCG Implementation	Poin *Point*	6	100	94,12	94%	5,65
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG – Dekom Follow-up on Recommendations from GCG Assessment Results - Board of Commissioners	%	6	100	100	100%	6,00
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Rate of Board of Commissioners Members						
a.	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	5	5	100%	5,00
b.	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Kehadiran *Attendance*	5	4	6	110%	5,50
c.	Pra RUPS dan RUPS RKAP Pre- GMS and GMS for RKAP	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00
d.	Pra RUPS dan RUPS Laporan Tahunan Pre-GMS and GMS for Annual Reports	Kehadiran *Attendance*	5	1	1	100%	5,00

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Wight	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Skor Capaian Tahun 2024 (%) 2024 Achievement Score (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=7 x 4
5	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities for Board of Commissioners						
	1) Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Increasing Competency of Board of Commissioners						
	a. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development of Board of Commissioners	Kepesertaan *Participation*	5	1	5	100%	5,00
	b. Laporan Kunjungan Kerja Work Visit Reports	Laporan *Reports*	5	4	6	110%	5,50
	2) Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
	Komite Nominasi & Remunerasi (N&R) Nomination & Remuneration Committee (N&R)						
	a. Tingkat Kehadiran Anggota Komite N&R Attendance Rate of N&R Committee Member	Kehadiran *Attendance*	5	62	59	95%	4,76
	b. Risalah Rapat Anggota Komite N&R N&R Committee Member Meeting Minutes	Risalah *Minutes*	5	4	4	100%	5,00
	c. Laporan Penugasan Anggota Komite N&R N&R Committee Member Assignment Reports	Laporan *Reports*	5	17	17	100%	5,00
TOTAL			**100**				**99,60**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, di mana Pemegang Saham (RUPS) mengesahkan dan menetapkan indikator penilaian kinerja Direksi yaitu *Key Performance Indicator* Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang memuat indikator kinerja utama, target, bobot, dan pedoman kamus penilaiannya. Sementara itu Dewan Komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/ RUPS.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

1. Pemegang Saham/RUPS mengesahkan dan menetapkan indikator penilaian kinerja Direksi yaitu *Key Performance Indicator* Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang memuat indikator kinerja utama, target, bobot dan pedoman kamus penilaiannya;

2. Dewan Komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dengan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi. Hasil penilaian sendiri tersebut juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan menggunakan 5 (lima) perspektif pengukuran kinerja usaha/bisnis berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi Model Bisnis;
3. Kepemimpinan Teknologi;
4. Peningkatan Investasi;
5. Pengembangan Talenta.

Berikut realisasi KPI Direksi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd) dengan skor penilaian 96,61 dari bobot 100,00.

Adapun realisasi KPI Direksi tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The assessment of Board of Directors' performance is conducted by the Board of Commissioners and the Shareholders, where the Shareholders (GMS) approves and establishes the performance evaluation indicators for the Directors, namely the Key Performance Indicators (KPIs) for the Directors outlined in the Management Contract, which includes key performance indicators, targets, weights, and guidelines for assessment criteria. Meanwhile, the Board of Commissioners evaluates the performance achievements of Directors (both collectively and individually), which are then presented to the Shareholders'/GMS.

Board of Directors Performance Appraisal Procedure

1. Shareholders/GMS authorize and determine the performance assessment indicators of Board of Directors, namely the Key Performance Indicator of Board of Directors as stated in the Management Contract which contains key performance indicators, targets, weights and dictionary guidelines for assessment;
2. Board of Commissioners evaluates the performance achievements of Board of Directors (collegial and individual) to be submitted to the Shareholders/GMS;

Party Responsible for the Assessment

The performance of the Board of Directors is assessed through a self-assessment process, the results of which are submitted to the GMS for further evaluation. The outcome of the self-assessment is also disclosed in the Annual Report.

Performance Evaluation Criteria for the Board of Directors

The performance evaluation criteria for the Board of Directors are proposed by the Directors and subsequently approved at the General Meeting of Shareholders (GMS). These criteria are based on the following 5 (five) business performance perspectives:

1. Economic and Social Value for Indonesia;
2. Business Model Innovation;
3. Technology Leadership;
4. Investment Enhancement;
5. Talent Development.

The realization of the Board of Directors' KPI has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd) with a performance score of 96.61 out of a total weight of 100.00.

The realization of the Board of Directors' KPI for the year 2024 is as follows:

Key Performance Indicator
Key Performance Indicator

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot 2024 2024 Weight	Polaritas Polarity	Revisi RKAP PTP Tahun 2024 PTP RKAP Revision in 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Capaian Tahun 2024 Achievement in 2024	Skor Tahun 2024 Score in 2024
A.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Indonesia Economic and Social Value for Indonesia		50					44,38
1	EBITDA	Rupiah (Miliar)	4	*Maximize*	283,57	(4,19)	(1,48%)	0,00
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar)	4	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	3,38
3	BOPO	%	3	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	2,39
4	*Market Share* Bongkar Muat Loading and Unloading Market Share	%	6	*Maximize*	50,00	50,72	101,44%	6,09
5	*Non Container Throughput*	Juta Ton	5	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	4,58
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Loading and Unloading Market Share	%	4	*Maximize*	100,00	93,16	93,16%	3,73
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	%	7	*Maximize*	100,00	103,60	103,60%	7,25
8	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Non Container Mooring Effectiveness Rate (ET/BT)	%	3	*Maximize*	64,00	63,20	98,75%	2,96
9	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Improvement	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
10	Implementasi Program TJSL SER Program Implementation	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		15					15,18
11	Layanan non-*container* tambahan & ekspansi bisnis Additional non-container services & business expansion	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
12	Tingkat *Compliance* Perusahaan Corporate Compliance Level	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
13	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	4	*Maximize*	90,00	94,16	104,62%	4,18
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		8					8,40
14	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non Container Services	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00

Key Performance Indicator
Key Performance Indicator

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot 2024 2024 Weight	Polaritas Polarity	Revisi RKAP PTP Tahun 2024 PTP RKAP Revision in 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Capaian Tahun 2024 Achievement in 2024	Skor Tahun 2024 Score in 2024
15	Implementasi HSSE dan Tingkat *Fatality* HSSE Implementation and Fatality Rate	%	4	*Maximize*	100,00	165,90	165,90%	4,40
D.	Peningkatan Investasi Investment Growth		12					13,40
16	Pengembangan investasi Peralatan dan infrastruktur Pelabuhan Port Equipment and Infrastructure Investment Development	%	5	*Maximize*	90,00	96,16	106,84%	5,34
17	*Value Creation* Optimalisasi Aset operasi non-kontainer Value Creation Optimization of non-container operating assets	Rp (Miliar)	7	*Maximize*	4,00	6,68	167,00%	7,70
E.	Pengembangan Talenta Talent Development		15					15,60
18	Implementasi Hubungan Industrial Industrial Relationship Implementation	%	3	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	3,00
19	Pengelolaan *Talent* Pelindo (*Talent* Perempuan/ Milenial, Organ Pengelola Risiko dan Budaya Pelindo Talent Management (Female/Millennial Talent, Risk and Culture Management Organ)	%	6	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	6,00
20	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Total of Innovation Ideas Implemented	%	6	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	6,60
	TOTAL		**100**					**96,61**

PENILAIAN INDIVIDUAL ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan penilaian kinerja masing-masing Direksi. Penilaian individual masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

In 2024, the Company conducted performance evaluations for each member of the Board of Directors. The individual performance assessments for each Director are as follows:

KPI DIREKTUR UTAMA
BOARD OF DIRECTORS KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
A.	KPI Bersama Collective KPIs		40					34,95
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	4	Maximize	283,57	(4,19)	(1,48%)	0,00

KPI DIREKTUR UTAMA
BOARD OF DIRECTORS KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	4	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	3,38
3	BOPO	%	3	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	2,39
4	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	5	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	4,58
5	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Practice Improvements	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
7	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
8	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implemented Innovation Ideas	%	6	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	6,60
B.	KPI Direktorat Directorate KPIs		60					61,65
9	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Practice Improvements	%	6	*Maximize*	50,00	50,72	101,44%	6,09
10	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	4	*Maximize*	100,00	93,16	93,16%	3,73
11	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	*Maximize*	100,00	103,60	103,60%	7,25
12	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implemented Innovation Ideas	%	3	*Maximize*	64,00	63,20	98,75%	2,96
13	*Market Share* Bongkar Muat Loading and Unloading Market Share	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00

KPI DIREKTUR UTAMA
BOARD OF DIRECTORS KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
14	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
15	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	%	4	*Maximize*	90,00	94,16	104,62%	4,18
16	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Effectiveness Rate of Non-Container Berth (ET/BT)	%	4	*Maximize*	100,00	165,90	165,90%	4,40
17	Implementasi Program TJSL Implementation of CSR/ CSER Programs	%	5	*Maximize*	90,00	96,16	106,84%	5,34
18	Layanan *non-container* tambahan & ekspansi bisnis Additional Non-Container Services & Business Expansion	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	7	*Maximize*	4,00	6,68	167,00%	7,70
19	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	3	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	3,00
20	Implementasi HSSE dan Tingkat *Fatality* HSSE Implementation and Fatality Rate	%	6	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	6,00
TOTAL			**100,00**					**96,61**

KPI DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, HC, AND RISK MANAGEMENT KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
A.	KPI Bersama Collective KPIs		40					32,54
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	6	*Maximize*	283,58	(4,19)	(1,48%)	0,00
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	4	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	3,38
3	BOPO	%	5	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	3,99

KPI DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, HC, AND RISK MANAGEMENT KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
4	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	4	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	3,66
5	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Practice Improvements	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	5	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	5,00
7	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
8	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implemented Innovation Ideas	%	5	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	5,50
B.	KPI Direktorat Directorate KPIs		60					62,10
9	Implementasi Hubungan Industrial Implementation of Industrial Relations	%	6	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	3,00
10	Pengelolaan *Talent* Pelindo (*Talent* Perempuan/ Milenial, Organ Pengelola Risiko dan Budaya) Pelindo Talent Management (Women/ Millennial Talents, Risk and Culture Management Entities)	%	8	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	6,00
11	Penurunan Piutang Receivables Reduction	%	4	*Maximize*	5,00	10,70	214,00%	4,40
12	Hasil Opini KAP Audit Opinion Result from KAP	Opini Opinions	8	*Maximize*	WTP	WTP	WTP	8,80
13	*Average Collection Period* (ACP) Average Collection Period (ACP)	Hari Days	4	*Minimize*	17	11,39	133,00%	4,40
14	Program Penyusunan *Dashboard* Keuangan Financial Dashboard Development Program	%	5	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	5,00
15	*Compliance* Pajak Tax Compliance	%	5	Maximize	100,00	100,00	100,00%	5,00

KPI DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, HC, AND RISK MANAGEMENT KPIs

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
16	Pengelolaan Kinerja Individu Individual Performance Management	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
17	Penguatan Budaya Perusahaan & *Change Management* Corporate Culture Strengthening & Change Management	%	8	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	8,00
18	Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Bersama Implementation of Joint Procurement of Goods and Services	Jumlah Total	5	*Maximize*	1	2	200,00%	5,50
19	Utilisasi *Portaverse* dan Pengembangan *Knowledge Map* Utilization of Portaverse and Development of Knowledge Map	%	5	*Maximize*	80,00	80,00	100,00%	5,00
TOTAL			**100,00**					**94,64**

KPI DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
DIRECTOR OF COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
A.	KPI Bersama Collective KPIs		40					32,70
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	5	*Maximize*	283,58	(4,19)	(1,48%)	0,00
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	7	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	5,92
3	BOPO	%	5	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	3,99
4	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	6	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	5,49
5	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Practice Improvements	%	5	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	5,00

KPI DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
DIRECTOR OF COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	5	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	5,00
7	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
8	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implemented Innovation Ideas	%	3	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	3,30
B.	KPI Direktorat Directorate KPIs		60					56,58
9	*Market Share* Bongkar Muat Loading and Unloading Market Share	%	7	*Maximize*	50,00	50,72	101,44%	7,10
10	Layanan *non-cantainer* tambahan & ekspansi bisnis Additional Non-Container Services & Business Expansion	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00
11	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Investment Development in Port Equipment and Infrastructure	%	7	*Maximize*	90,00	96,16	106,84%	7,48
12	*Value Creation* Optimalisasi Aset operasi non-kontainer Value Creation from Optimization of Non-Container Operating Assets	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	7	*Maximize*	4,00	6,68	167,00%	7,70
13	Penurunan Piutang Receivables Reduction	Hari	4	*Maximize*	5,00	10,70	214,00%	4,40
14	*Average Collection Period* (ACP) Average Collection Period (ACP)	%	4	*Minimize*	17	11,39	133,00%	4,40
15	Implementasi *customer relationship management* dan *key account management* terintegrasi Implementation of Integrated Customer Relationship Management and Key Account Management	%	8	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	8,00
16	Peningkatan Utilitas Lapangan dan Gudang Improvement of Yard and Warehouse Utilization	%	6	*Maximize*	5,00	(4,92)	(98,32%)	0,00

KPI DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
DIRECTOR OF COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
17	Kerjasama dengan TUKS (Jumlah) dan atau K/L Partnerships with TUKS (Quantity) and/or Ministries/ Agencies	Jumlah	5	*Maximize*	1,00	1,00	100,00%	5,00
18	Kerjasama dengan TUKS (EBT) dan atau K/L Partnerships with TUKS (Renewable Energy) and/or Ministries/Agencies	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	5	*Maximize*	0,33	1,38	417,93%	5,50
TOTAL			**100,00**					**89,28**

KPI DIREKTUR OPERASIONAL
DIRECTOR OF OPERATIONS

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
A.	KPI Bersama Collective KPIs		40					34,64
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	4	*Maximize*	283,57	(4,19)	(1,48%)	0,00
2	Pendapatan Revenue	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	4	*Maximize*	1.738,04	1.470,39	84,60%	3,38
3	BOPO	%	5	*Minimize*	85,88	103,20	79,83%	3,99
4	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	4	*Maximize*	49,86	45,63	91,51%	3,66
5	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Practice Improvements	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	6	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	6,00
7	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	7,00

KPI DIREKTUR OPERASIONAL
DIRECTOR OF OPERATIONS

Key Performance Indicator								
No.	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Bobot 2024** 2024 Weight	**Polaritas** Polarity	**Revisi RKAP PTP Tahun 2024** PTP RKAP Revision in 2024	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Capaian Tahun 2024** Achievement in 2024	**Skor Tahun 2024** Score in 2024
8	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implemented Innovation Ideas	%	6	*Maximize*	100,00	150,00	150,00%	6,60
B.	KPI Direktorat Directorate KPIs		60					61,69
9	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	%	6	*Maximize*	100,00	93,16	93,16%	5,59
10	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Loading and Unloading Productivity	%	8	*Maximize*	100,00	103,60	103,60%	8,29
11	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT) Effectiveness Rate of Non-Container Berth (ET/BT)	%	4	*Maximize*	64,00	63,20	98,75%	3,95
12	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	7	*Maximize*	90,00	94,16	104,62%	7,32
13	Implementasi HSSE dan Tingkat *Fatality* HSSE Implementation and Fatality Rate	%	5	*Maximize*	100,00	165,90	165,90%	5,50
14	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Investment Development in Port Equipment and Infrastructure	%	8	*Maximize*	90,00	96,16	106,84%	8,55
15	*Value Creation* Optimalisasi Aset operasi non-kontainer Value Creation from Optimization of Non-Container Operating Assets	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billions)	7	*Maximize*	4,00	6,68	167,00%	7,70
16	Pengembangan Layanan Operasi pada TUKS dan atau Pelabuhan K/L Development of Operational Services at TUKS and/or Ministry/ Agency Ports	%	4	*Maximize*	100,00	100,00	100,00%	4,00
17	Pemeliharaan Fasilitas Facility Maintenance	%	5	*Maximize*	90,00	95,20	100,00%	5,29
18	Implementasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Implementation	Jumlah Total	6	*Maximize*	1	4	105,78%	5,50
TOTAL			**100,00**					**96,32**

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR NOMINASI
Prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Pelindo, di mana pencalonan, pengusulan, hingga penetapan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi kewenangan Pelindo sebagai *Holding* Perusahaan.

SUKSESI ANGGOTA DIREKSI DAN MANAJEMEN KUNCI
Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi, sebagaimana termuat di dalam Board Manual

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II telah dilakukan penggabungan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/ Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan, yang telah diratifikasi oleh PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30.8/2/ PCOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan.
4. Bahwa PT Pelindo Multi Terminal sebagai pemegang saham mayoritas pada Perusahaan mempunyai kebijakan untuk melakukan integrasi, harmonisasi, dan sinergi terkait penyelarasan pedoman penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan KSO.
5. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT/-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan, kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat diberikan Tantiem atau Intensif Kinerja berdasarkan penetapan RUPS apabila:

NOMINATION PROCEDURE
The nomination procedure for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the provisions established by Pelindo, whereby the nomination, proposal, and appointment of Commissioners is entirely under the authority of Pelindo as the Holding Company.

SUCCESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT PERSONNEL
The Board of Commissioners or the committee performing the nomination function formulates a succession policy as part of the nomination process for members of the Board of Directors, as outlined in the Board Manual

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to:

1. Article 91 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies jo. Article 25 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, which stipulates that shareholders may adopt legally binding resolutions without holding a physical General Meeting of Shareholders, provided that all shareholders have been notified in writing and have signed the resolution. Such resolutions carry the same legal weight as those adopted in a formally convened General Meeting of Shareholders.
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 101 of 2021 concerning the Merger of State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which has been consolidated into State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia .
3. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/ PLND-24 dated February 16, 2024 on Guidelines for Determining the Income of Directors/Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Business Group of the Company, ratified by PT Pelindo Multi Terminal through Decree Number KP.07.02/30.8/2/PCOS/DIRU/ PLMT-24 dated August 30, 2024;
4. PT Pelindo Multi Terminal, as the majority shareholder of the Company, has adopted a policy to integrate, harmonize, and synergize guidelines on income determination for Directors and Commissioners across Subsidiaries, Affiliates, and KSO;
5. Article 12 paragraph (1) of the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024, states that performance bonuses (tantiem) or incentives may be awarded to Directors and Commissioners upon GMS approval, provided the following conditions are met:

a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
b. Realisasi Tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/ keuntungan akibat tindakan sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
d. Kondisi Perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perusahaan dalam kondisi rugi, Perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

6. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.03/30/9/2/SPAP/STRA/PLND-24 tanggal 30 September 2024 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

7. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of* Ernest & Young Global Ltd) dalam Laporan Auditor Independen (LAI) KAP Nomor 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

a. The auditor's opinion on the financial statements is Unqualified (WTP);
b. The Company's financial health rating is at least BBB, disregarding the effects of prior or uncontrollable actions;
c. KPI achievement reaches a minimum of 80%, excluding factors beyond the Directors' control;
d. The Company's financial condition has not worsened compared to the previous year, or if previously profitable, has not turned to a loss, excluding uncontrollable factors.

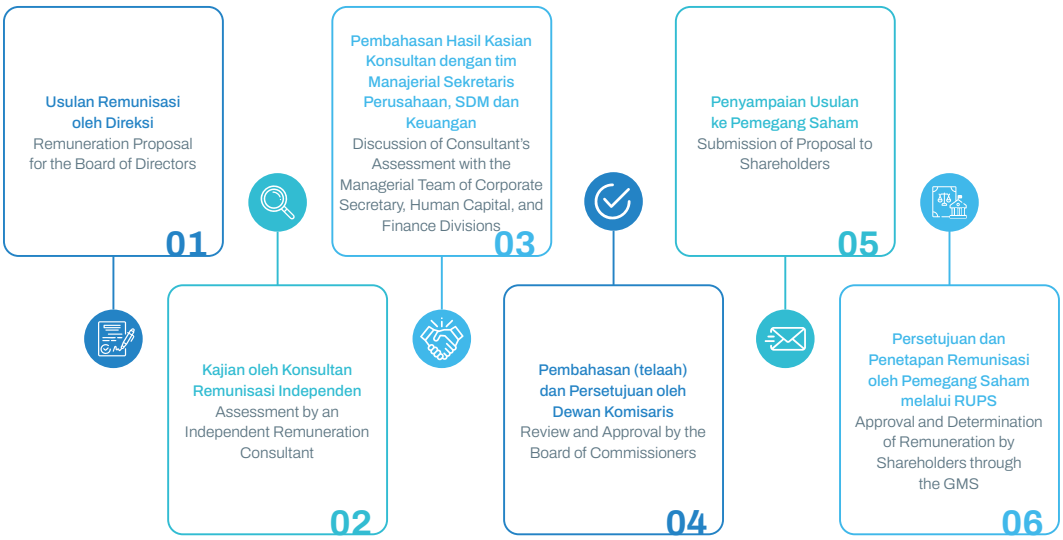
6. Letter from the Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number SK.03/30/9/2/SPAP/STRA/PLND-24 dated September 30, 2024, concerning the Determination of the 2024 Income Adjustment and the Granting of Performance Bonuses (Tantiem) for Fiscal Year 2023 for Directors and Commissioners within PT Pelindo Multi Terminal;
7. The 2023 Annual Report, audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Ltd), as stated in the Independent Auditor's Report No. 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 dated April 24, 2024.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan dengan diawali kajian oleh konsultan independen yang berkompeten dalam bidang tersebut dan kemudian melalui tahap telaah pada level fungsi pengawasan sampai kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mekanisme pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Procedure for Proposing and Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is proposed following a study conducted by a qualified independent consultant, followed by review at the oversight function level, and finally determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). The mechanism for awarding remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 concerning the Determination of the 2024

Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Income Adjustment and the Granting of Performance Bonuses (Tantiem) for Fiscal Year 2023 to the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the remuneration structure is as follows:

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
1	Gaji Salary	a. Direktur Utama Rp89.000.000,- b. Direktur Lain Rp75.650.000,- a. President Director Rp89,000,000 b. Other Director Rp75,650,000	a. Direktur Utama 100%, per bulan. b. Direktur Lainnya: 85%, per bulan. Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan a. *President Director: 100% per month.* b. *Other Directors: 85% per month.* In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Supervisory Board within the Company's Business Group Environment.
2	Tunjangan Allowance		
	a. Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	a. Sebesar 1 (satu) bulan Gaji, per tahun. b. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. a. 1 (one) month Salary, per year b. Paid after the payment of Allowance, no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Direksi yang tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari calendar sebelum hari raya keagamaan. 1. The calculation of the religious holiday allowance (THR) amount is carried out proportionally based on the active period since the last THR payment. 2. For Directors who are not former employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the proportional THR mentioned above is not granted to Directors who no longer hold a position within the Company's Business Group for more than 30 (thirty) calendar days before the religious holiday.
	b. Tunjangan Perumahan Housing Allowance	a. Direktur Utama: Rp20.000.000,- b. Direktur Lain: Rp20.000.000,- a. President Director: Rp20,000,000 b. Other Director: Rp20,000,000	40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp20.000.000,- sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkunga Grup Bisnis Perusahaan 40% of the salary with a maximum amount of IDR 20,000,000, in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Direksi. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuannya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan Dimana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Direksi yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Pekerja, namun terhadap Direksi yang merupakan Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan didasarkan pada Gaji yang akan diterima sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 1. Granted during the tenure (from appointment to cessation) with monthly premiums. 2. Insurance premium of up to 25% of the annual salary 3. The selection of a retirement insurance program is determined by each Board of Directors. 4. Including Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the BPJS Employment payment contribution is part of the relevant Retirement Insurance. 5. Retirement Insurance is not provided for Board of Directors who come from the Shareholders Element, who are still active as Employees. However, for Board of Directors who are Assigned Port (Persero) Business Workers of PT Indonesia and Group Companies, the amount of BPJS Employment and BPJS Health contributions is based on the salary received as Board of Directors in accordance with the provisions of mechanism applicable to BPJS Employment and BPJS Health.	1. Definisi dari Unsur Pemegang Saham adalah Direksi dan Dewan Komisaris Pelindo, Direksi dan Komisaris Subholding Pelindo, Pekerja Anak Perusahaan, Pekerja Perusahan Terafiliasi, Pekerja KSO. 2. Grup Bisnis Perusahaan didefinisikan sebagai Kumpulan unit kerja di bawah naungan PT Pelindo Multi Terminal yang terdiri dari Anak Perusahaan, KSO, Dana Pensiun, dan Perusahaan Terafiliasi. 3. Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. The definition of Shareholder Elements includes: the Directors and Board of Commissioners of Pelindo, the Directors and Commissioners of Pelindo Subholdings, Employees of Subsidiaries, Employees of Affiliated Companies, and KSO (Joint Operation) Employees. 2. The Company's Business Group is defined as a group of work units under the supervision of PT Pelindo Multi Terminal, consisting of Subsidiaries, KSOs, Pension Funds, and Affiliated Companies. 3. This is in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
3	Fasilitas Facilities		
	a. Kendaraan Dinas Official Vehicles	1. 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan an biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 2. Kendaraan Dinas disediakan dalam bentuk natura yang spesifikasi dan jenis kendaraannya diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 75 kwh untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik di luar biaya bahan bakar, biaya parkir dan biaya toll yang disediakan secara *at cost* dengan pengaturan batasan maksimal. 3. Bahan bakar secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan Batasan maksimal biaya bahan bakar per bulan setara dengan 500 (lima ratus) liter pertamax atau setara untuk Direktur Utama dan 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax atau yang setara untuk Anggota Direksi lainnya. 4. Pengaturan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbasis Listrik secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya disetarakan dengan biaya bahan bakar minyak dimaksud butir 3) di atas.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
		1. 1 (one) unit along with operational costs, taking into account the Company's financial condition. 2. Official vehicles are provided in the form of in-kind benefits, specifications and types of vehicles are determined by Board of Commissioners, with a maximum limit of 2,500 cc, excluding fuel costs, parking fees, and toll fees, which are provided at cost with maximum limit regulations. 3. Fuel costs are provided at cost with a maximum limit of fuel expenses per month equivalent to 500 (five hundred) liters of Pertamax for the President Director and 450 (four hundred fifty) liters of Pertamax for other members of the Board of Directors. 4. Setting the cost of using electric-based motorized vehicles at cost (in the form of reimbursement) with a maximum cost limit equal to the cost of fuel oil referred to in point 3) above.	In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
	b. Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 24 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Obat; c. Rawat Inap dan Obat setara dengan Kelas VIP;dan d. *Medical Check Up.* 4. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perseroan. 5. Bagi Direksi yang berasal dari pekerja penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu sebagai Direksi Perseroan 1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) unmarried or non-working children under the age of 24. 3. Health facilities are provided include: a. Health insurance programs organized by the Social Security Organizing Agency; b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and medicine equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. In the event that the Board of Director also holds a position as a Board of Commissioners in another unit within the Company 's Business Group, the individual will only be given one health facility, namely the health facility as Board of Director of the Company. 5. For Board of Directors who come from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group assignment employees, the individual will only be given one health facility, as Board of Director.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Bantuan Hukum Legal Assistance	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang diberikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perseroan tidak menanggung biaya Pengacara/ Konsultan Hukum dalam hal Direksi Perseroan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Provided in the event of actions or deeds for and on behalf of their position, given with the purpose and objectives of the Company's business activities. 2. Board of Directors who will use Legal Assistance Facilities are required to make a statement on stamped paper, stating that their involvement in a specific case is not personal and they are willing to return the Legal Assistance Facilities to the Company if it is proven that their involvement in the case is personal. 3. Provided in the form of financing for services of Law Firm/Legal Consultant, which includes process of examination as a Witness, Suspect, and Defendant in judicial institutions. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/ Legal Consultants in the event that the Company's Board of Directors becomes Witnesses, Suspects, or Defendants due to Criminal proceedings reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapa Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
4	Biaya Operasional Operational Cost		
	a. Biaya Komunikasi Communication Cost	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp2.700.000,- untuk Direksi Utama dan Rp2.500.000,- untuk Anggota Direksi lainnya According to the expenditure (at cost) with a maximum limit of Rp2,700,000 for President Director and Rp2,500,000 for other members of the Board of Directors.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	b. Pakaian Seragam Uniforms	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan According to expenditure (at cost) in the form of in- kind, according to the budget in the RKAP, with a maximum limit set through the Company's Board of Commissioners approval.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only granted to companies that enforce a uniform policy, by taking into account the condition and capability of the Company.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuannya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the RKAP budget, within certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	d. *Club/Corporate Membership*	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	e. Biaya Representasi Representation Cost	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuannya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval	Dalam bentuk *corporate credit card* dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. In the form of a corporate credit card, by taking into account the condition and capability of the Company.

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
1	Honorarium	a. Komisaris Utama: Rp40.050.000,- b. Komisaris: Rp36.045.000,- a. President Commissioner: Rp40,050,000 b. Commissioner: Rp36,045,000	c. Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama, per bulan d. Komisaris: 90% dari Honoraium Komisaris Utama, per bulan Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan a. President Commissioner: 45% of President Director's Monthly Salary b. Commissioner: 90% of President Commissioner's Monthly Salary In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
2	Tunjangan Allowances		

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	1. Sebesar 1 (satu) bulan Honorarium, per tahun 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. 1 (one) month of Honorarium, per year 2. Paid after the Company's Employee Holiday Allowance payment or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday Day 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors / Commissioners/ Employees.	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Dewan Komisris yang tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan. 1. The calculation of the THR (Religious Holiday Allowance) amount is carried out proportionally based on the active period of service since the previous year's THR payment. 2. The aforementioned proportional THR will not be granted to members of the Board of Commissioners who are no longer serving in the Company's Business Group for more than 30 (thirty) calendar days prior to the religious holiday.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	1. Tunjangan Transportasi Komisaris Utam ditetapkan 20% dari Honorarium, masing-masing dari Dewan Komisaris yaitu: a. Komisaris Utama Sebesar Rp8.010.000,- per bulan b. Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp7.209.000,- per bulan 2. Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. Transportation Allowance for President Commissioner is set at 20% of Honorarium, as follows: a. President Commissioner of Rp8,010,000 per month b. Members of the Board of Commissioners of Rp7,209,000 2. For the Board of Commissioners who get a vehicle facility, no transportation allowance is given. 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group who are still active as Directors/Commissioners/Employees	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Komisaris 4. sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuannya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Provided during the term office (from appointment to termination) with monthly premiums. 2. Insurance premium at most 25% Salary in one year 3. The selection of program for Retirement Insurance is determined by each Board of Commissioners 4. Including Work Accident Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the payment of BPJS Employment contributions is part of relevant Retirement Insurance. 5. Retirement Insurance is not provided for the board of Commissioners who come from Shareholders Elements, who are still active as Directors/ Commissioners/Employees.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
3	Fasilitas Facilities		
	a. Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Inap Obat c. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical Check Up.* 4. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/ Pekerja.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan
		1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost) 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (unmarried or unemployed). 3. Health Facilities provided include: a. Health Insurance Program organized by the Social Security Administering Body (BPJS) b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and Medication equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. Not given to the Board of Commissioners who come from Shareholder Elements, who are still active as Directors/ Commissioners/ Employees.	In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	b. Bantuan Hukum Legal Assistance	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang diberikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perseroan tidak menanggung biaya Pengacara/ Konsultan Hukum dalam hal Dewan Komisaris Perseroan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (sebagai Badan Hukum atau Lembaga Pemerintahan). 1. Provided in the event of actions or deeds for and on behalf of their position, given the purpose and objectives of the Company's business activities. 2. Board of Commissioners who will use Legal Assistance Facilities are required to make a statement on stamped paper, stating that their involvement in a specific case is not personal and they are willing to return the Legal Assistance Facilities to the Company if it is proven that their involvement in the case is personal. 3. Provided in the form of financing for services of Law Firm/Legal Consultant, which includes the process of examination as a Witness, Suspect, and Defendant in judicial institutions. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/ Legal Consultant in the event the Company's Board of Directors becomes Witnesses, Suspects, or Defendants due to Criminal proceedings reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	a. Pakaian Seragam Uniforms	1. Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. According to expenditure (at cost) in the form of in-kind, according to the budget in the RKAP, with a maximum limit set through the Company's Board of Commissioners approval. 2. Not granted to members of the Board of Commissioners originating from Shareholder Elements who are still actively serving as Directors/ Commissioners/Employees.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only provided to Companies that implement uniform usage regulations, taking into account the condition and capability of the Company

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	b. Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	1. Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval 2. Not granted to members of the Board of Commissioners originating from Shareholder Elements who are still actively serving as Directors/ Commissioners/Employees	

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Indikator yang dimaksud adalah *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak manajemen Direksi sebagai salah satu acuan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem/bonus yang bersifat *variabel*, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan, serta faktor lainnya yang relevan.

Long Term Incentive (LTI)

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak memberikan Long Term Incentive (LTI) kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Indicators for Determining Directors' Remuneration

The indicators for determining the remuneration of the Board of Directors have been established by the Shareholders. These indicators include the Key Performance Indicators (KPI) or the management contract of the Directors, which serve as one of the benchmarks in evaluating the performance of the Board of Directors.

The determination of income in the form of allowances and variable compensation such as bonuses or tantiem is carried out by considering target achievement, the company's financial health and capability, as well as other relevant factors.

Long Term Incentive (LTI)

In 2024, the Company did not distribute Long Term Incentive (LTI) to the Board of Commissioners and Board of Directors.

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of Board of Commissioners Remuneration in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner	1 April 2024-2029*), Periode Ke-1 *April 1 2024-2029*), First Term*	40.050.000	8.010.000	-	48.060.000	432.540.000	40.050.000	472.590.000
Ogi Rulino Komisaris Utama President Commissioner	13 Mei 2020 - 1 April 2024, Periode Ke-1 *May 13, 2020-April 1, 2024*	40.050.000	8.010.000	-	48.060.000	144.180.000	40.050.000	184.230.000
Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner	1 Agustus 2024-2029*), Periode Ke-1 *August 1, 2024-2029*), First Term*	36.045.000	7.209.000	45.056.250	88.310.250	441.551.250	36.045.000	477.596.250

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of Board of Commissioners Remuneration in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode Ke-1 *June 21, 2021-August 1, 2024, First Term*	36.045.000	7.209.000	63.078.750	106.332.750	744.329.250	36.045.000	780.374.250
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	1 Januari 2024-2029*), Periode Ke-1 *January 1, 2024- 2029*), First Term*	36.045.000	7.209.000	108.135.000	151.389.000	1.816.668.000	36.045.000	1.852.713.000
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	26 April 2022 - 2027*), Periode Pertama *April 26, 2022 – 2027*), First Term*	36.045.000	7.209.000	108.135.000	151.389.000	1.816.668.000	36.045.000	1.852.713.000
Jumlah (Rp) Total (Rp)								5.620.216.500

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2024
Table of Board of Directors Remuneration in 2024

Direksi Board of Directors	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Gaji Salary	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term	89.000.000	20.000.000	222.500.000	331.500.000	3.315.000.000	89.000.000	3.404.000.000
Rino Wisnu Putra Direktur Utama President Director	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Pertama June 2, 2022-March 1, 2024, First Term	89.000.000	20.000.000	44.500.000	153.500.000	307.000.000	89.000.000	396.000.000
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Operasi Director of Operation	18 April 2022-1 Maret 2024, Periode Ke-1 April 18, 2022-March 1, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	37.825.000	133.475.000	266.950.000	75.650.000	342.600.000

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2024
Table of Board of Directors Remuneration in 2024

Direksi Board of Directors	**Periode Menjabat** Term of Office	**Perhitungan per Bulan** Monthly Calculation			**Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan** Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	**Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024** Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowances	**Jumlah Remunerasi Tahun 2024** Total Remuneration in 2024
		Gaji Salary	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowances	**Asuransi Purna Jabatan** Retirement Insurance				
Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operation	1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024, Periode Ke-1 March 1, 2024-August 30, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	113.475.000	209.125.000	1.254.750.000	75.650.000	1.330.400.000
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term	75.650.000	20.000.000	189.125.000	284.775.000	2.847.750.000	75.650.000	1.330.400.000
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management)	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Ke-1 June 2, 2022-March 1, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	37.825.000	133.475.000	266.950.000	75.650.000	342.600.000
Jumlah (Rp) Total (Rp)								8.739.000.000

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu
*) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Uraian Description	**Jumlah (Rp)** Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	5.620.216.500
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	8.739.000.000
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024	14.359.216.500

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan dan dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Permintaan tertulis dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

PIMPINAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris dipimpin dan dibuka oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apanila terdapat lebih dari 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

ETIKA RAPAT

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanakan rapat Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat harus memperhatikan etika rapat sebagai berikut:

1. Setiap rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat;
2. Setiap rapat diharapkan hadir tepat pada waktunya di dalam rapat;
3. Bagi peserta rapat yang berhalangan hadir di dalam rapat maka yang bersangkutan harus menyampaikan konfirmasi atas kehadirannya, termasuk apabila mengirimkan surat kuasanya;
4. Dalam rapat setiap peserta rapat harus fokus dan berepran aktif mengikuti jalannya rapat;
5. Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya termasuk bertanya dan menghormati pendapat peserta rapat lainnya;
6. Apabila terpaksa harus melakukan panggilan atau menjawab panggilan telepon, maka yang bersangkutan dimungkinkan untuk keluar dari ruang rapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Meeting Policy of the Board of Commissioners

The policy regarding meetings of the Board of Commissioners is outlined in the Board Manual of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as stipulated in Regulation No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024. According to the policy, meetings of the Board of Commissioners shall be held at least once a month and may involve the attendance of the Board of Directors. Board of Commissioners meetings may also be convened at any time, if deemed necessary by:

1. One or more members of the Board of Commissioners.
2. A written request from the Board of Directors.

Such meetings are considered urgent and/or strategic in nature.

MEETING CHAIRPERSON

Meetings of the Board of Commissioners are chaired and opened by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting shall be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

If the President Commissioner does not make such an appointment, the longest-serving member of the Board of Commissioners shall act as chairperson of the Board of Commissioners meeting. If 2 (two) or more members have served for the same duration, the eldest by age shall assume the role of meeting chair.

MEETING ETIQUETTE

Each participant is expected to contribute to ensuring that Board of Commissioners meetings are conducted effectively. The Board of Commissioners is required to establish rules of conduct for its meetings. During the meeting, each participant must adhere to the following etiquette:

1. Participants must come prepared before attending the meeting;
2. Punctual attendance is expected of all participants;
3. Any member unable to attend must provide confirmation of absence and, if applicable, submit a power of attorney;
4. All attendees must remain focused and actively participate in the discussions;
5. Each participant has the right to voice their opinions and ask questions, while also respecting the views of others;
6. If a participant must make or receive a phone call during the meeting, they may leave the room only after obtaining permission from the chairperson.

KUORUM RAPAT

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa satu anggota Dewan Komisaris hanya mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

MEETING QUORUM

A meeting of the Board of Commissioners shall be deemed valid and authorized to make binding decisions if it is attended by more than ½ (one-half) of the total number of Board members, either in person or by proxy.

Representation of a Board member in a meeting may only be carried out by granting written proxy to another Board of Commissioners member, specifically for that meeting, with the provision that one member of the Board of Commissioners may only represent one other member.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Internal Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berikut rincian mengenai rapat internal dan rapat gabungan dengan Direksi:

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Internal Meetings of the Board of Commissioners

In 2024, the Board of Commissioners held a total of 13 (thirteen) internal meetings. The following section provides details on the internal meetings and joint meetings held with the Board of Directors:

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	26 Januari 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 January 26, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Penyesuaian Usulan RKAP Tahun 2024 2. Hal-hal strategis Lainnya 1. Adjustment of Proposed 2024 RKAP 2. Other Strategic Matters	1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner
2	29 Januari 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 January 29, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Tahun 2023 (*Unaudited*) 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Directors Coordination Meeting (Rakomdir) 2. Company Performance Report for 2023 (Unaudited) 3. Other Strategic Matters	1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner
3	26 Februari 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 February 26, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for January 2024 3. Other Strategic Matters	1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4	30 Maret 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 March 30, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for February 2024 3. Other Strategic Matters	1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner
5	23 April 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 April 23, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for March 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner
6	31 Mei 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 May 31, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan April 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for April 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner
7	25 Juni 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 June 25, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for May 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner
8	22 Juli 2024, Ruang Rapat The 101 Tugu Hotel, Yogjakarta July 22, 2024, Meeting Room at The 101 Tugu Hotel, Yogyakarta	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Triwulan II 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for Q2 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9	22 Agustus 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 August 22, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2024 3. Divestasi PT Pelindo 3 Terminal Peti Kemas 4. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for July 2024 3. Divestment of PT Pelindo 3 Terminal Peti Kemas 4. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner
10	26 September 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 September 26, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for August 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner
11	31 Oktober 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 October 31, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan September 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for September 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 3. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Andi Hamdani tidak dapat menghadiri Rakomdir dikarenakan ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan dan dikuasakan oleh Lukianto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2024 Andi Hamdani was unable to attend the Board of Directors Coordination Meeting (Rakomdir) due to unavoidable commitments and was represented by Lukijanto based on the Power of Attorney dated October 31, 2024.
12	28 November 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 November 28, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for October 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13	17 Desember 2024, Kantor PTP, Pelindo Tower Lantai 16 December 17, 2024, PTP Office, Pelindo Tower 16th Floor	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan November 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Rakomdir 2. Company Performance Report for November 2024 3. Other Strategic Matters	1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner

RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS INVOLVING THE BOARD OF DIRECTORS

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	29 Januari 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok January 29, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Tahun 2023 *Unaudited* 3. Agenda Lainnya 1. Follow-up on Previous Board of Directors Coordination Meeting 2. Company Performance Report for Fiscal Year 2023 Unaudited 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris *Board of Commissioners* 1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors 1. Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director 2. Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Acting Director of Commercial & Business Development 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance & HC 4. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Operasi Director of Operations

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
2.	26 Februari 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok February 26, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for January 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris *Board of Commissioners* 1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors 1. Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director 2. Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Acting Director of Commercial & Business Development 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance & HC 4. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Operasi Director of Operations
3.	21 Maret 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok March 21, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for February 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris *Board of Commissioners* 1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4.	23 April 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok April 23, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for March 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
5.	31 Mei 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok May 31, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan April 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. *Follow-up on Previous Coordination Meeting* 2. *Company Performance Report for April 2024* 3. *Other Strategic Matters*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners* 1. Ogi Rulino Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6.	25 Juni 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok June 25, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for May 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris| Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisari Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
7.	11 Juli 2024, Ruang Rapat The 101 Yogyakarta Tugu Hotel, Jl, Margo Utomo No. 103, Yogyakarta July 11, 2024, Meeting Room, The 101 Yogyakarta Tugu Hotel, Jl. Margo Utomo No. 103, Yogyakarta	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Triwulan II 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for Q2 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8.	22 Agustus 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok August 22, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Pengenalan Komisaris baru 2. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 3. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2024 4. Divestasi PT Pelindo Terminal Peti Kemas 5. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Introduction of New Commissioner 2. Company Performance Report for July 2024 3. Divestment of PT Pelindo Terminal Petikemas 4. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
9.	26 September 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok September 26, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for August 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Dwi Rahmad Toto S. Plt Direktur Operasi Acting Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
10.	31 Oktober 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok October 31, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan September 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for September 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 3. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Andi Hamdani tidak dapat menghadiri Rakomdir dikarenakan ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan dan dikuasakan oleh Lukianto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2024 Andi Hamdani was unable to attend the Board of Directors Coordination Meeting (Rakomdir) due to unavoidable commitments and was represented by Lukijanto based on the Power of Attorney dated October 31, 2024. Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Dwi Rahmad Toto S. Plt Direktur Operasi Acting Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
11.	28 November 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok November 28, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for October 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Dwi Rahmad Toto S. Plt Direktur Operasi Acting Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12.	17 Desember 2024, Ruang Rapat Lantai 16 Pelindo Tower PT Pelabuhan Tanjung Priok December 17, 2024, Meeting Room, 16th Floor, Pelindo Tower, PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan November 2024 3. Hal-hal Strategis Lainnya 1. Follow-up on Previous Coordination Meeting 2. Company Performance Report for November 2024 3. Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner 2. Andi Hamdani Komisaris Commissioner 3. Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner 4. Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner Direksi Board of Directors 1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Dwi Rahmad Toto S. Plt Direktur Operasi Acting Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Table of Meeting Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meetings			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meetings Between Board of Commissioners and Board of Directors			Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Board of Commissioners Attendance in GMS		
	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama*) President Commissioner*)	9	9	100%	9	9	100%	1	1	100%
Ogi Rulino Komisaris Utama**) President Commissioner**)	4	4	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dedy Cahyadi Komisaris***) Commissioner***)	5	5	100%	5	5	100%	-	-	-
Marta Hardisarwono Komisaris****) Commissioner****)	8	8	100%	7	7	100%	2	2	100%
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	13	12	92%	12	11	92%	2	2	100%
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	12	12	100%	2	1	50%
Rata-rata (%) Average (%)			98,67%			99%			90%

*) Menjabat sejak 1 April 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 April 2024.
***) Menjabat sejak 1 Agustus 2024.
****) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024.
*) Serving since April 1, 2024.
**)Ceased serving as of April 1, 2024.
***) Serving since August 1, 2024.
****) Ceased serving as of August 1, 2024.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris;
   c. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan;
3. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
   a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
   b. Di luar rencana dalam RKAP;
   c. Bersifat mendesak;
   d. Menyangkut pekerja dalam jabatan strategis.

Jadwal Rapat

Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih Anggota Direksi;
2. Permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
4. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Board of Directors Meeting Policy

The policy governing the Board of Directors meetings is outlined in Guidelines for the Implementation of Working Relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Mmanual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok, as stipulated in Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024.

The Board of Directors' Meetings are internal meetings where binding decisions are made. Decisions can also be made without holding a meeting of the Board of Directors, as long as the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

Matters Requiring Decisions Through Board of Directors Meeting

Board of Directors decisions requiring Board of Directors meeting include:

1. Actions related to authority levels in accordance with the Articles of Association provisions, include:
   a. Authorities that require approval of Board of Directors;
   b. Authorities that require approval of Board of Commissioners;
   c. Authorities that require approval of the GMS.
2. Actions related to procurement of goods and services in accordance with applicable Company regulations;
3. Other strategic actions:
   a. Strategically/significantly impacting Company operations;
   b. Beyond the plans outlined in RKAP
   c. Urgent in nature;
   d. Involving employees in strategic positions.

Meeting Schedule

Board of Directors Meetings are held when deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors meetings may be held outside of the routine schedule, if requested by:

1. One or more members of Board of Directors;
2. Written requests from one or more members of Board of Commissioners;
3. Written request by one or more Shareholders who have the largest number of shares stating the matters to be discussed;
4. This Board of Directors meeting is an immediate and strategic meeting,with an agenda of matters that require decision-making at Board of Directors level.

Meeting Venue

Board of Directors' meetings can be held at the domicile of the Company, or at the business place of the Company, or at other places in the territory of the Republic of Indonesia determined by the Board of Directors.

Meetings Through Electronic Means

Board of Directors' meetings can be held through teleconferencing, video conferencing or other electronic means that allow all Board of Directors meeting participants to see and hear each other directly and can participate in the meetings.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi;
3. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
4. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan Agenda Rapat Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan sebagai berikut:
   a. Setiap dan hanya Anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
   b. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat;
   c. Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

2. Agenda Rapat Susulan
   Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai;
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.

Pimpinan Rapat

Pimpinan rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/ Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana dijelaskan dalam butir (b) di atas, maka:
   a. Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat;

   b. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi.
   c. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

Meeting Invitation

Meeting Invitation is regulated as follows:

1. Invitation for Board of Directors' meeting in writing by authorized members of the Board representing the Company, and shall be delivered at least 3 (three) days before the meeting is held, or in a shorter time frame in urgent situations;

2. Invitation and organization of Board of Directors meetings may be delegated to the Corporate Secretary, unless otherwise regulated by Board of Directors' Meeting;
3. Invitation for Board of Directors meetings must state the agenda, date, time and place of meeting and as well as Companying meeting materials;
4. Invitation for Board of Directors meetings may be sent through electronic means (such as SMS, email, and other electronic platforms) to ensure that the meeting agenda is conveyed more quickly, without disregarding the provisions of the Articles of Association regarding the procedures for written meeting invitations.

Meeting Agenda

1. Meeting Agenda Determination Process Board of Directors' meeting agenda is determined as follow:
   a. Each and only members of the Board of Directors are entitled to propose meeting agendas. Agenda proposals may also be submitted by individuals other than by Board of Directors, but they still require approval from relevant Director;
   b. Agenda proposals are collected by the Corporate Secretary for verification of meeting agenda requirements.

   c. Members of the Board of Directors, whose proposed agenda are set as meeting agendas, must prepare adequate material according to the agenda they are proposing.

2. Supplementary Meeting Agenda
   In the event that there is a proposal to add an agenda item during a meeting that is about to take place, the following provisions apply:
   a. The proposed meeting agenda must contain adequate material;
   b. The supplementary meeting agenda must be approved by all attending members of the Board of Directors.

Meeting Chairman

The Chairman of Board of Directors meeting is regulated as follows:

1. All Board of Directors meetings are chaired by President Director;
2. In the event that President Director is absent or unable to attend, the Board of Directors meeting shall be chaired by another Director appointed and authorized by President Director;
3. In the event that President Director does not make appointment as described in point (b) above, then:
   a. The Vice President Director shall act as the Chairman of the Board of Directors meeting;
   b. In the event the Vice President Director is absent, one of the longest-serving Directors shall be appointed as Chairman;
   c. If more than 1 (one) Director has served for the same duration, the longest-serving and oldest in age shall act as the Chairman of the meeting.

Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya.

Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya.

Dalam hal Anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka Anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada Anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

Kehadiran dalam Rapat Direksi yang Dilakukan Melalui Sarana Elektronik

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024.

Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan atas undangan dari Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

1. Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk hadir dalam rapat Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris;
2. Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris;
3. Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat.

Pengambilan Keputusan Sirkuler Direksi

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan. Adapun ketentuan Keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi melalui sirkuler diajukan oleh salah seorang atau lebih Anggota Direksi atau oleh unit pengusul melalui salah seorang Anggota Direksi, dan seluruh Anggota Direksi

Meeting Quorum

Board of Directors meeting is valid and entitled to make binding decisions, if it is attended by more than ½ (one half) of Board of Directors' members or their representatives.

A member of the Board of Directors may be represented in the meeting only by another Director based on a written power specifically granted for this purpose. A Member of the Board of Directors can only represent one other Member of the Board of Directors.

In the event that a Member of Board of Directors does not attend a routine meeting, Member of Board of Directors may represent another Member of Board of Directors by providing a power of attorney for attendance with a statement of approval or rejection of the meeting agenda, with reasons stated.

Board of Directors' Meetings Attendance through electronic means

Members of Board of Directors may participate in Board of Directors' meetings held through teleconference media, video conferences, or other electronic means that allow all members of Board of Directors' meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting and such participation states the attendance of person concerned at Board of Directors' meeting.

Board of Commissioners' Attendance at Board of Directors' Meetings

Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners Policy

The policy governing joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners is also stipulated in the Implementation of Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok, as set stipulated in Decree No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024.

Members of the Board of Commissioners can attend the Board of Directors' meeting and provide views on matters discussed at invitation of Board of Directors or at request of Board of Commissioners.

Board of Commissioners' attendance at Board of Directors' meeting is conducted in accordance with the following procedures:

1. The Board of Directors invites the Board of Commissioners to attend Board of Directors meetings or upon the request of the Board of Commissioners;
2. The Board of Directors conducts meetings attended by the Board of Commissioner;
3. The Corporate Secretary prepares meeting minutes and distributes them to meeting participants.

Circular Decision Making of the Board of Directors

Decisions may also be made outside of a Board of Directors meeting, provided that all members of the Board agree on the procedures and the subject matter of the decision. The provisions governing decisions made through circular resolution are as follows:

1. Circular resolutions of the Board of Directors may be proposed by one or more members of the Board or by a proposing unit through a member of the Board, and such proposals must

harus memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan dalam sirkuler tersebut. Apabila terhadap usulan yang diajukan terdapat Anggota Direksi yang tidak memberikan persetujuan maka Keputusan sirkuler tidak bisa diambil;
2. Keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah Keputusan yang bersifat strategis;
3. Bukan merupakan sebuah Keputusan atas suatu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/ RUPS;
4. Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas;

5. Keputusan yang diambil, disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi;
6. Keputusan secara sirkuler dilakukan dengan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan pertama sampai dengan penandatanganan terakhir. Dalam hal terdapat seorang atau lebih Anggota Direksi tidak menandatangani usulan tersebut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah sirkuler tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi, maka Direksi wajib melaksanakan rapat secara fisik.

receive unanimous written approval from all members of the Board of Directors. If any member of the Board does not grant approval to the proposed resolution, the circular resolution shall not be deemed valid or adopted;
2. Circular decisions shall not cover strategic matters;

3. The resolution must not concern actions by the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners/GMS;
4. The matter must be previously known or previously discussed by the Board;
5. The decision must be approved in writing and signed by all members of the Board of Directors;
6. Circular resolutions must be finalized within a maximum of 14 (fourteen) working days, starting from the date of the first signature until the last. If one or more members of the Board of Directors do not sign the proposal within that time frame, then no later than 14 (fourteen) working days after the circular remains unsigned by all members, the Board of Directors is required to hold a physical meeting.

PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Pada tahun 2024, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Berikut rincian mengenai rapat internal Direksi:

IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

In 2024, the Board of Directors held a total of 25 (twenty-five) internal meetings. The following section outlines the details of the internal meetings convened by the Board of Directors:

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	26 Januari 2024, Ruang Rapat Direktur Utama January 26, 2024, President Director's Meeting Room	1. Pembahasan Materi Rakomdir 2. Pembahasan Materi RUPS 1. Discussion of Rakomdir Materials 2. Discussion of GMS Materials	1. Dwi Rahmad Toto S. Plh. Direktur Utama Acting President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Operasi Director of Operations Bambang Sakti Direktur Keuangan & SDM Director of Finance and HC 3. Bambang Sakti Plh. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Acting Director of Commercial & Business Development
2.	22 Februari 2024, Ruang Rapat VIP PTP February 22, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan PTOS-M untuk Aspek Komersial 2. Pembahasan Materi Rakomdir Februari 2024 1. Discussion on PTOS-M for Commercial Aspects 2. Discussion of Rakomdir Materials for February 2024	1. Rino Wisnu Putro Direktur Utama President Director 2. Rino Wisnu Putro Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Acting Director of Commercial & Business Development 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC 4. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Operasi Director of Operations
3.	15 Maret 2024, Ruang Rapat VIP PTP March 15, 2024, PTP VIP Meeting Room	Pemenuhan Alat Bongkar Muat Kargo PT BAI di Terminal Kijing Fulfillment of Cargo Handling Equipment for PT BAI at Kijing Terminal	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 3. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4.	1 April 2024, Ruang Rapat Direktur Utama April 1, 2024, President Director's Meeting Room	Hal-hal strategis PT Pelabuhan Tanjung Priok Strategic matters of PT Pelabuhan Tanjung Priok	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 3. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business
5.	16 April 2024, Ruang Rapat Direktur Utama April 16, 2024, President Director's Meeting Room	1. Pembahasan strategis atas utilisasi Proyek Kijing dan Ketapang 2. Pembahasn aspirasi dari Cabang Bengkulu 3. Pembahasan implementasi sistem operasi SAP 1. Strategic discussion on utilization of Kijing and Ketapang Projects 2. Discussion on aspirations from Bengkulu Branch 3. Discussion on SAP operating system implementation	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations
6.	22 April 2024, Ruang Rapat VIP PTP April 22, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan Materi Rakomdir 2. Pembahasan Progres Usulan RKAP Investasi 2025 3. Pembahasan Perbaikan *Breasting* Dolphin 01 dan Dermaga Ferocement 02 di Pelabuhan Talang Duku Jambi 4. Pembahasan arah kerja sama dengan PT Walie Jaya Teladan dan PT Rizki Anugerah Pratama 1. Discussion of Rakomdir Materials 2. Discussion on Progress of Investment RKAP Proposal 2025 3. Discussion on Repairs of Breasting Dolphin 01 and Ferrocement Wharf 02 at Talang Duku Jambi Port 4. Discussion on cooperation direction with PT Walie Jaya Teladan and PT Rizki Anugerah Pratama	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
7.	15 Mei 2024, *Via Zoom* May 15, 2024, Via Zoom	Pembahasan optimalisasi proses bisnis di Terminal Kijing Discussion on optimizing business processes at Kijing Terminal	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
8.	21 Mei 2024, Ruang Rapat VIP PTP May 21, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan laporan Hasil Peningkatan HSSE 2. Pembahasan usulan *improvement* Cabang-Cabang yang merugi 3. Pembahasan Progres Piutang PT RAP 1. Discussion on HSSE Improvement Report 2. Discussion on improvement proposals from Loss-Making Branches 3. Discussion on Progress of PT RAP Receivables	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9.	29 Mei 2024, Ruang Rapat VIP PTP May 29, 2024, PTP VIP Meeting Room	Pembahasan Materi Rakomdir Capaian Kinerja April 2024 Discussion on Rakomdir Materials for April 2024 Performance Achievement	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
10.	21 Juni 2024, Ruang Rapat VIP PTP June 21, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan Materi Pertaja tahun buku 2023 2. Pembahasan Materi Rakomdir Bulan Juni 2024 1. Discussion on Pertaja Materials for FY 2023 2. Discussion on Rakomdir Materials for June 2024	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
11.	8 Juli 2024, Ruang Rapat VIP PTP July 8, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan Transformasi dan optimalisasi kegiatan operasional cabang PTP 2. Pembahasan Prognosa RKAP 2024 dan RKAP 2025 1. Discussion on Transformation and Optimization of PTP Branch Operations 2. Discussion on RKAP 2024 Forecast and RKAP 2025	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
12.	24 Juli 2024, Ruang Rapat VIP PTP July 24, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan usulan Revisi Investasi Tahun 2024 2. Pembahasan Piutang PT RAP dan PT Indo Energy 1. Discussion on Proposed Revision of 2024 Investment 2. Discussion on Receivables of PT RAP and PT Indo Energy	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
13.	5 Agustus 2024, Ruang Rapat VIP PTP & *Zoom Meeting* August 5, 2024, PTP VIP Meeting Room & Zoom Meeting	1. Perkenalan Sekper PTP baru 2. Tindak lanjut Rapat Evaluasi Kinerja *Branch* SPMT 3. Pembahasn Pola Pembayaran TKBM 4. *Checklist* kesediaan peralatan di Cabang 5. Upaya peningkatan pendapatan Cabang 1. Introduction of New PTP Corporate Secretary 2. Follow-up on Branch SPMT Performance Evaluation Meeting 3. Discussion on TKBM Payment Scheme 4. Checklist of Equipment Availability at Branches 5. Efforts to Increase Branch Revenue	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14.	19 Agustus 2024, Ruang Rapat VIP PTP August 19, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Perpanjangan kerja sama dengan PT Walie Jaya Teladan 2. Pembahasan materi Rakomdir 3. Pembahasan terkait kebutuhan bantuan hukum di lingkungan PTP 4. Menyepakati ketentuan penerapan BAKD 1. Extension of Partnership with PT Walie Jaya Teladan 2. Discussion on Rakomdir Materials 3. Discussion on Legal Assistance Needs within PTP 4. Agreement on BAKD Implementation Provisions	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
15.	27 Agustus 2024, Ruang Rapat VIP PTP August 27, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. BOD Director 2. *Update* Kajian Bidang Hukum terkait Perpanjangan Kerja Sama dengan PT Walie Jaya Teladan 3. Realisasi Investasi PTP 2024 1. BOD Director 2. Legal Review Update on Partnership Extension with PT Walie Jaya Teladan 3. Realization of PTP Investment 2024	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
16.	3 September 2024, Ruang Rapat VIP PTP September 3, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. *Monitoring* tindak lanjut Radir sebelumnya 2. Pembahasan Berita Acara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* 3. *Initial Project* Satuan Kerja PTP 4. Paparan pragnosa 2024 dan RKAP 2025 5. *Study Roadmap* terminalisasi PTP 6. *Monitoring* penyesuaian tarif 1. Monitoring follow-up of previous Radir 2. Discussion on Minutes of Implementation Guidelines for Multipurpose Terminal Operations and Maintenance Agreement 3. Initial Project of PTP Working nit 4. Presentation on 2024 Forecast and RKAP 2025 5. Roadmap Study of PTP Terminalization 6. Monitoring of Tariff Adjustments	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
17.	10 September 2024, Ruang Rapat VIP PTP September 10, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. CEO *Direction* 2. Progres penghapusan sisa aset alat bongkar muat petikemas di Terminal 009 3. Evaluasi Bongkar Bauksit di Kijing 1. CEO Direction 2. Progress on Disposal of Remaining Container Handling Equipment at Terminal 009 3. Bauxite Unloading Evaluation at Kijing	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
18.	24 September 2024, Ruang Rapat VIP PTP September 24, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. *Update* Kesepakatan Perpanjangan Kerja Sama dengan PT Walie Jaya Teladan 2. Pembahasan Piutang PT Rizki Angerah Pratama 3. Pengadaan *Manpower* di Terminal Kijing 4. Tindak lanjut penghapusan aset di Terminal 009 1. Update on Agreement to Extend Partnership with PT Walie Jaya Teladan 2. Discussion on Receivables of PT Rizki Anugerah Pratama 3. Manpower Procurement at Kijing Terminal 4. Follow-up on Asset Disposal at Terminal 009	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19.	07 Oktober 2024, Ruang Rapat VIP PTP October 7, 2024, PTP VIP Meeting Room	Pembahasan materi BOD *Meeting* Discussion on BOD Meeting Materials	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
20.	11 November 2024, Ruang Rapat VIP PTP November 11, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. CEO *Direction* 2. Diskusi Internal Manajemen PTP 1. CEO Direction 2. Internal Discussion with PTP Management	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
21.	22 November 2024, Ruang Rapat VIP PTP November 22, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan materi Rakomdir November 2024 2. Pembahasan Terminal Kijing 3. Evaluasi Investasi 4. Usulan *Dashboard* Keuangan 5. Proyeksi PTP 2024 dampak PBM *Sharing* 1. Discussion on November 2024 Rakomdir Materials 2. Discussion on Kijing Terminal 3. Investment Evaluation 4. Financial Dashboard Proposal 5. PTP 2024 Projection on PBM Sharing Impact	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
22.	28 November 2024, Ruang Rapat VIP PTP November 28, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Tindak lanjut kerja sama dengan PT Walie Jaya Teladan 2. Pembahasan Investasi di Terminal Kijing 3. Rencana Kerja Sama dengan PT Bukit Asam 1. Follow-up on Cooperation with PT Walie Jaya Teladan 2. Discussion on Investment at Kijing Terminal 3. Work Plan with PT Bukit Asam	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
23.	4 Desember 2024, Ruang Rapat VIP PTP December 4, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Kerja sama Ex-TBS di Pelabuhan Pangkal Balam 2. Perpanjangan kerja sama lahan Kalijapat 3. Pengadaan *Flexible Hose* di Terminal Kijing 4. Tindak lanjut kerja sama dengan PT Walie Jaya Teladan 1. Ex-TBS Cooperation at Pangkal Balam Port 2. Extension of Kalijapat Land Cooperation 3. Procurement of Flexible Hoses at Kijing Terminal 4. Follow-up on Cooperation with PT Walie Jaya Teladan	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management
24.	17 Desember 2024, Ruang Rapat VIP PTP December 17, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. CEO *Direction* 2. Pembahasan Materi Rakomdir Bulan Desember 2024 1. CEO Direction 2. Discussion on Rakomdir Materials for December 2024	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

No	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
25.	24 Desember 2024, Ruang Rapat VIP PTP December 24, 2024, PTP VIP Meeting Room	1. Pembahasan Materi BPR Capaian Kinerja s.d. November PTP 2. Pembahasan Laporan Satgas HSSE PTP Tahun 2024 1. Discussion on BPR Materials Performance Achievement up to November at PTP 2. Discussion on HSSE Task Force Report for 2024	1. Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director 2. Dwi Rahmad Toto S. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business 3. Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operations 4. Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC & Risk Management

Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

The proceedings and decisions made during Board of Directors meetings were properly documented in the minutes of meetings. The minutes were signed by the Chairman of the meeting and distributed to all members of the Board of Directors, both those who attended and those who were absent. Any dissenting opinions expressed during the meetings were recorded in the minutes, along with the reasons for such dissent.

RAPAT GABUNGAN

Risalah rapat gabungan terdapat pada bab Tata Kelola Perusahaan subbab Dewan Komisaris.

JOINT MEETINGS

The minutes of joint meetings are presented in the Corporate Governance chapter, under the Board of Commissioners subsection.

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi
Table of Meeting Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Direksi Internal Board of Directors Meetings			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Joint Meetings Between Board of Directors and Board of Commissioners			Kehadiran Direksi dalam RUPS Board of Directors Attendance in GMS		
	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%
Indra Hidayat Sani Direktur Utama*) President Director*)	23	22	96%	10	10	100%	1	1	100%
Rino Wisnu Putra Direktur Utama**) President Director**)	2	1	50%	2	2	100%	1	1	100%
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha***) Director of Commercial and Business Development***)	25	25	100%	12	12	100%	2	2	100%
Kalbar Yanto Direktur Operasi****) Director of Operation****)	13	12	92%	6	5	83%	1	1	100%
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC, Risk Management	25	23	92%	12	12	100%	2	2	100%
Rata-rata (%) Average(%)			86%			97%			100%

*) Menjabat sejak 1 Maret 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 Maret 2024
***) Berhenti menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 1 Maret 2024 dan mulai menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sejak 1 Maret 2024.
****) Menjabat sejak 1 Maret 2024-30 Agustus 2024.
*) Serving since March 1, 2024.
**)Ceased serving as of March 1, 2024.
***) Ceased serving as Director of Operations as of March 1, 2024 and began serving as Director of Commercial and Business Development on March 1, 2024.
****) Serving from March 1, 2024 to August 30, 2024.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria for determining affiliation between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders include:

1. Affiliation between members of the Board of Commissioners themselves;
2. Affiliation between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
3. Affiliation between members of the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholders.

Details of any affiliation between members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Controlling Shareholders are presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship						Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship						Kepemilikan Saham Shareholding				Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		di PTP Terminal Nonpetikemas In PT Terminal Nonpetikemas		Perusahaan Lain Other Company			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama*) President Commissioner*)		v		v		v		v		v		v		v		v	v	
Ogi Rulino Komisaris Utama**) President Commissioner**)		v		v		v		v		v		v		v		v	v	
Dedy Cahyadi Komisaris***) Commissioner***)		v		v		v		v		v		v		v		v	v	
Marta Hardisarwono Komisaris****) Commissioner****)		v		v		v		v		v		v		v		v	v	
Andi Hamdani Komisaris Commissioner		v		v		v		v		v		v		v		v	v	
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner		v		v		v		v		v		v		v		v	v	

*) Menjabat sejak 1 April 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 April 2024.
***) Menjabat sejak 1 Agustus 2024.
****) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024.
*) Serving since April 1, 2024.
**)Ceased serving as of April 1, 2024.
***) Serving since August 1, 2024.
****) Ceased serving as of August 1, 2024.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATION

Board of Directors always act independently, in the sense that there is no conflict of interest that could interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in their relationship to each other and their relationship to the Board of Commissioners.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan, maupun jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Board of Directors has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or familial relationship with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company, so that it can carry out its duties and responsibilities independently.

Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or Directors at other State, Regional and Private Owned Enterprises or other positions related to management of the Company, including structural positions and other functional positions at central and local government agencies/institutions, as well as other positions, in accordance with the Company's Articles of Association provisions and other prevailing laws and regulations. Affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Majority and/or Controlling Shareholders, which includes:

1. Affiliation between Board of Directors' members and other members of Board of Directors.
2. Affiliation between Board of Directors' members and members of Board of Commissioners.
3. Affiliation between Board of Directors' members and the Majority and/or controlling Shareholders.

Board of Directors' independence is shown in the table below:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Hubungan Keluarga Dengan** Familial Relationship						**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationship						**Kepemilikan Saham** Shareholding				**Rangkap Jabatan** Concurrent Position	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham** Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham** Shareholders		**di PTP Terminal Nonpetikemas** In PT Terminal Nonpetikemas		**Perusahaan Lain** Other Company			
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Indra Hidayat Sani Direktur Utama*) President Director*)		v		v		v		v		v		v		v		v		v
Rino Wisnu Putra Direktur Utama**) President Director**)		v		v		v		v		v		v		v		v		v
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha***) Director of Commercial and Business Development***)		v		v		v		v		v		v		v		v		v
Kalbar Yanto Direktur Operasi****) Director of Operation****)		v		v		v		v		v		v		v		v		v
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance,HC, Risk Management		v		v		v		v		v		v		v		v		v

*) Menjabat sejak 1 Maret 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 Maret 2024
***) Berhenti menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 1 Maret 2024 dan mulai menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sejak 1 Maret 2024.
****) Menjabat sejak 1 Maret 2024-30 Agustus 2024.
*) Serving since March 1, 2024.
**)Ceased serving as of March 1, 2024.
***) Ceased serving as Director of Operations as of March 1, 2024 and began serving as Director of Commercial and Business Development on March 1, 2024.
****) Serving from March 1, 2024 to August 30, 2024.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITION

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors concurrent positions in 2024 can be seen in the following table:

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain
Management at Other Companies/Institutions

	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As member of Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As member of Board of Directors	**Rangkap Jabatan di Pelindo Grup** Concurrent Position in Pelindo Group	**Rangkap Jabatan di Instansi/ Perusahaan Lain** Concurrent Position in Institutions/ Other Companies	**Jabatan Lainnya** Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama*) President Commissioner*)	x	x	v	x	x
Ogi Rulino Komisaris Utama**) President Commissioner**)	x	x	v	x	x
Dedy Cahyadi Komisaris***) Commissioner***)	x	x	x	x	v
Marta Hardisarwono Komisaris****) Commissioner****)	x	x	x	v	v
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	x	x	v	x	x
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	x	x	x	v	v
Direksi Board of Directors					
Indra Hidayat Sani Direktur Utama*****) President Director*****)	x	x	x	x	x
Rino Wisnu Putra Direktur Utama******) President Director******)	x	v	x	x	x

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain
Management at Other Companies/Institutions

	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As member of Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As member of Board of Directors	**Rangkap Jabatan di Pelindo Grup** Concurrent Position in Pelindo Group	**Rangkap Jabatan di Instansi/ Perusahaan Lain** Concurrent Position in Institutions/ Other Companies	**Jabatan Lainnya** Other Position
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha*******) Director of Commercial and Business Development*******)	x	v	x	x	x
Kalbar Yanto Direktur Operasi********) Director of Operation********)	x	x	v	x	x
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance,HC, Risk Management	x	x	x	x	x

*) Menjabat sejak 1 April 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 April 2024.
***) Menjabat sejak 1 Agustus 2024.
****) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024.
*****) Menjabat sejak 1 Maret 2024.
******)Berhenti menjabat sejak 1 Maret 2024
*******) Berhenti menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 1 Maret 2024 dan mulai menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sejak 1 Maret 2024.
********) Menjabat sejak 1 Maret 2024-30 Agustus 2024.
*) Serving since April 1, 2024.
**)Ceased serving as of April 1, 2024.
***) Serving since August 1, 2024.
****) Ceased serving as of August 1, 2024.
*****) Serving since March 1, 2024.
******)Ceased serving as of March 1, 2024.
*******) Ceased serving as Director of Operations as of March 1, 2024 and began serving as Director of Commercial and Business Development on March 1, 2024.
********) Serving from March 1, 2024 to August 30, 2024.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors concurrent positions outside in the Company as follows:

Nama Name	**Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain** Position in the Company/Other Institution
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama*) President Commissioner*)	**Di dalam Perusahaan:** Kordinator seluruh Komite (April 2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2022-2024) **Within the Company:** Coordinator of all Committees (2020-March 2024) **Outside the Company:** President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2022–2024)
Ogi Rulino Komisaris Utama**) President Commissioner**)	**Di dalam Perusahaan:** Kordinator seluruh Komite (2020-Maret 2024) **Di luar Perusahaan:** Direktur PT Rukun Raharja Tbk **Within the Company:** Coordinator of all Committees (2020-March 2024) **Outside the Company:** Director of PT Rukun Raharja Tbk

Nama Name	**Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain** Position in the Company/Other Institution
Dedy Cahyadi Komisaris***) Commissioner***)	**Di dalam Perusahaan:** Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Agustus 2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Sekretaris BPTJ di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kemenhub (2024-sekarang) **Within the Company:** Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (August 2024-present) **Outside the Company:** Secretary of BPTJ at the Greater Jakarta Transportation Management Agency, Ministry of Transportation (2024–present)
Marta Hardisarwono Komisaris****) Commissioner****)	**Di dalam Perusahaan:** Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Januari 2024-Juli 2024) **Di luar Perusahaan:** Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (2020-Sekarang) **Within the Company:** Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (January 2024-July 2024) **Outside the Company:** Secretary of the Directorate General of Land Transportation, Ministry of Transportation (2020–present)
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	**Di dalam Perusahaan:** Ketua Komite Pemantau Risiko (Januari 2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** *Group Head* Pelayanan Terminal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang) **Within the Company:** Chairman of the Risk Monitoring Committee (January 2024-present) **Outside the Company:** Terminal Services General Head, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023–present)
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	**Di dalam Perusahaan:** Ketua Komite Audit (2022-sekarang) **Di luar Perusahaan:** • Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (2021-sekarang) • Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi periode (2020-sekarang) **Within the Company:** Chairman of the Audit Committee (2022–present) **Outside the Company:** • Acting Deputy Assistant for Connectivity Infrastructure at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2021–present) • Secretary to the Deputy for Infrastructure and Transportation at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2020–present)

*) Menjabat sejak 1 April 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 April 2024.
***) Menjabat sejak 1 Agustus 2024.
****) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024.
*) Serving since April 1, 2024.
**)Ceased serving as of April 1, 2024.
***) Serving since August 1, 2024.
****) Ceased serving as of August 1, 2024.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE

Secara rinci dapat dilihat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tabel berikut:

In detail, share ownership of Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the following table:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Table of Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PTP	**Perusahaan Lain** Other Company
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama*) President Commissioner*)	Ada Owned	Ada Owned
Ogi Rulino Komisaris Utama**) President Commissioner**)	Nihil None	Nihil None
Dedy Cahyadi Komisaris***) Commissioner***)	Nihil None	Nihil None
Marta Hardisarwono Komisaris****) Commissioner****)	Nihil None	Nihil None
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	Nihil None	Ada Owned
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Direcors		
Indra Hidayat Sani Direktur Utama*****) President Director*****)	Nihil None	Nihil None
Rino Wisnu Putra Direktur Utama******) President Director******)	Nihil None	Nihil None
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha*******) Director of Commercial and Business Development*******)	Nihil None	Nihil None
Kalbar Yanto Direktur Operasi********) Director of Operation********)	Nihil None	Nihil None
Bambang Sakti (Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko | Director of Finance,HC, Risk Management)	Nihil None	Nihil None

*) Menjabat sejak 1 April 2024.
**)Berhenti menjabat sejak 1 April 2024.
***) Menjabat sejak 1 Agustus 2024.
****) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024.
*****) Menjabat sejak 1 Maret 2024.
******)Berhenti menjabat sejak 1 Maret 2024
*******) Berhenti menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 1 Maret 2024 dan mulai menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sejak 1 Maret 2024.
********) Menjabat sejak 1 Maret 2024-30 Agustus 2024.
*) Serving since April 1, 2024.
**)Ceased serving as of April 1, 2024.
***) Serving since August 1, 2024.
****) Ceased serving as of August 1, 2024.
*****) Serving since March 1, 2024.
******)Ceased serving as of March 1, 2024.
*******) Ceased serving as Director of Operations as of March 1, 2024 and began serving as Director of Commercial and Business Development on March 1, 2024.
********) Serving from March 1, 2024 to August 30, 2024.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Hingga akhir tahun 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak melakukan perdagangan saham sehingga. tidak terdapat Kebijakan informasi pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

As of the end of 2024, PT Pelabuhan Tanjung Priok does not engage in share trading activities. Accordingly, there is no policy in place regarding the disclosure of share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak melaksanakan dan tidak memiliki pemberian kompensasi jangka panjang dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program* atau MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program* atau ESOP) dan/atau penghargaan kompensasi dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, Laporan tahunan ini tidak mengungkapkan informasi mengenai:

1. Jumlah saham dan/atau opsi;
2. Jangka waktu pelaksanaan;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan
4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan

As of the end of 2024, the Company neither implemented nor maintained any form of long-term compensation in the form of a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP), nor did it provide any other form of share-based compensation. Accordingly, the Annual Report does not disclose information regarding:

1. The number of shares and/or options;
2. The vesting or exercise period;
3. Eligibility criteria for employees and/or management; and
4. The exercise price or the pricing methodology.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGAN

Di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan memiliki Komite yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan manajemen risiko. Di antaranya terdapat Sekretaris Dewan Komisaris serta Komite Pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi utama komite-komite ini adalah membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih efektif.

Under the Board of Commissioners' supervision, the Company has Committees established to improve the effectiveness of supervision and risk management. These include Secretary of Board of Commissioners and Supporting Committees consisting of Audit Committee, Business Development and Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The main function of these committees is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties more effectively.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam upaya memperkuat struktur administratif, Dewan Komisaris memiliki mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Tugas utamanya adalah memastikan kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretaris ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris untuk memastikan segala proses berjalan dengan efektif dan efisien.

PEJABAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK/26/10/1/PTP-22 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sondang Rumiris Patricia.

In an effort to strengthen the administrative structure, the Board of Commissioners has appointed a Secretary of the Board of Commissioners. The main duty is to ensure the smooth implementation of administrative and secretarial duties of the Board of Commissioners. The Secretary has direct responsibility to the Board of Commissioners to ensure all processes run effectively and efficiently.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS OFFICIAL

Based on the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok Decree NumberSK/26/10/1/PTP-22 dated October 26, 2022 concerning Dismissal and Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Secretary of Board of Commissioners is held by Sondang Rumiris Patricia.



Sondang Rumiris Patricia

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Periode Jabatan : 2022-Sekarang, Periode Ke-1
Term of Office: 2022-Present, First Period

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	:	Kisaran, 6 April 1986 Kisaran, April 6, 1986
Usia Age	:	38 tahun per 31 Desember 2024 38 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Medan, Sumatera Utara Medan, North Sumatra
Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas Join Date	:	26 Oktober 2022 October 26, 2022
Riwayat Pendidikan Education Background	:	• Magister (S2) Ekonomi Maritim, MEL EUR, Rotterdam (2017) • Sarjana (S1) Psikologi, Universitas Sumatera Utara (2008) • Master of Maritime Economy, MEL EUR, Rotterdam (2017) • Bachelor of Psychology, Sumatera Utara University (2008)
Sertifikasi Certifications	:	Tidak ada None
Pengalaman Kerja Career Experience	:	• *Vice President* Perencanaan Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal (2021-sekarang) • *Vice President* Perencanaan Strategis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2021) • *Vice President* Pengembangan Kapabilitas SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2019) • Vice President of Corporate Planning of PT Pelindo Multi Terminal (2021-present) • Vice President of Strategic Planning of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2021) • Vice President of Human Capital Capability Development PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019)

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, salinan risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
11. Menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi

Untuk memastikan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris senantiasa memperbaharui perkembangan yang berkaitan dengan Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris secara aktif terlibat dalam program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut:

WORKING GUIDELINES FOR THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out duties and responsibilities, the Secretary to the Board of Commissioners refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024, concerning the Board Manual Governing the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the Board of Commissioners, the Secretary is tasked with the following responsibilities:

1. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Drafting minutes of meetings in accordance with prevailing regulations;
3. Administering Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing correspondence, copies of meeting minutes, and other documents;
4. Preparing the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Drafting reports of the Board of Commissioners;
6. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners;
7. Ensuring compliance of the Board of Commissioners with applicable laws and regulations, as well as adherence to good corporate governance principles;
8. Providing information required by the Board of Commissioners regularly and/or upon request;
9. Coordinating with committee members, when necessary, to facilitate the tasks of the Board of Commissioners;
10. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties;
11. Safeguarding the confidentiality of corporate documents, data, and information from internal and external parties, using such materials solely for the purpose of executing assigned duties.

Training and/or Competency Development

In order to keep updated on the latest developments related to the Company, the Secretary to the Board of Commissioners actively participates in competency development programs such as seminars, workshops, or other activities designed to enhance knowledge and professional capabilities.

The competency development programs attended by the Secretary to the Board of Commissioners in 2024 are disclosed as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Durasi Pelatihan (dalam jam)**	**Penyelenggara** Organizer
Sondang Rumiris Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	*Corporate Rating Measurement*	18 Maret 2024 March 18, 2024	8	Moody
	Awareness ISO	11 September 2024 September 11, 2024	8	PMLI
	Public Speaking for Leader	31 Desember 2024 December 31, 2024	8	PMLI

Kebijakan Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris diberi honorarium setiap bulan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024

Pada tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris
   Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Rencana Kegiatan
   a. Rapat Rutin Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan setiap bulan dengan waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris.
   b. Rapat-rapat internal lainnya yaitu:
      - Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok Bulanan tahun 2024 dengan Manajemen.
      - Pembahasan Laporan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.

Remuneration Policy for the Secretary to the Board of Commissioners

The remuneration for the Secretary to the Board of Commissioners refers to the provisions set forth in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. According to this regulation, the Secretary to the Board of Commissioners is entitled to a monthly honorarium equal to 15% of the President Director's base salary, with applicable taxes borne by the Company.

In addition, the determination of remuneration is based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok, No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24, concerning the Adjustment of the 2024 Remuneration and Granting of Tantiem for the 2023 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Duties Performed by the Secretary to the Board of Commissioners in 2024

In 2024, the Secretary to the Board of Commissioners carried out various responsibilities, including:

1. Board of Commissioners' Meetings
   As stipulated in the Company's Article of Association.
2. Planned Activities
   a. The regular Board of Commissioners meetings for the management and administration of PT Pelabuhan Tanjung Priok are held monthly at a time agreed upon by the Board of Commissioners.
   b. Other internal meetings included discussions on:
      - Discussion of PT Pelabuhan Tanjung Priok's Monthly Management Reports for the year 2024 with the Management.
      - Discussion of the 2023 Audited Annual Report as part of the preparations for the Pre-GMS and GMS.

- Pembahasan Penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2025.
- Pembahasan penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan tahun buku 2024, laporan Kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 serta jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP.
- Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2023 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS.
- Pelaksanaan Rapat-Rapat Khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya.

3. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
   a. Rapat Rutin dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan setiap bulan dan waktunya sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
   b. Rapat-Rapat Koordinasi Lainnya, yaitu:
      - Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan akhir tahun 2024.
      - Pembahasan Laporan Tahunan (*Audited*) Tahun 2023 dalam rangka pelaporan konsolidasi dan persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham.
      - Pembahasan Laporan Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2023 dalam rangka pembahasan dengan Pemegang Saham.
      - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan Kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP.
      - Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2025 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemilik.
      - Pelaksanaan rapat-rapat khusus dengan masing-masing *Partnership* (Direktorat) PTP Terminal Nonpetikemas yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* serta hal strategis lainnya.
4. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
5. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
6. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
7. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
8. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

- Discussion on the formulation of the 2025 KPI for the Board of Commissioners.
- Discussion on the appointment of a KAP for the General Audit of the Financial Statements for fiscal year 2024, performance report of PT Pelabuhan Tanjung Priok, and compliance with the 2024 applicable laws and regulations, including the audit schedule and program.
- Discussion on the proposed 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok and the 2023 KPI/Management Contract in preparation for the Pre-GMS and GMS.
- Conducting special meetings related to significant/urgent matters and other strategic issues.

3. Joint Coordination Meetings with the Board of Directors
   a. Monthly joint coordination meetings conducted based on mutual agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
   b. Other Coordination Meetings, includes:
      - Discussion of PT Pelabuhan Tanjung Priok's Management Report up to the end of 2024.
      - Discussion of the 2023 Audited Annual Report for the purpose of consolidated reporting and preparation for the Pre-GMS and GMS with Shareholders.
      - Discussion of PT Pelabuhan Tanjung Priok's 2023 Management Report as part of deliberations with Shareholders.
      - Discussion on the appointment of a KAP for conducting the General Audit of the Financial Statements and 2024 Performance Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok, as well as the Audit Schedule and Program.
      - Discussion of the proposed 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Tanjung Priok and the 2025 KPI/Management Contract in preparation for the Pre-GMS and GMS with the Owner.
      - Conducting special meetings with each Partnership (Directorate) of PTP Terminal Nonpetikemas concerning critical/urgent matters and other strategic issues.
4. Preparing meetings, including briefing materials for the Board of Commissioners;
5. Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the Articles of Association;
6. Administering Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
7. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
8. Drafting reports of the Board of Commissioners.
9. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Perusahaan membentuk Komite Audit. Komite ini bertugas untuk mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait efektivitas Tata Kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam memberikan nasihat, wawasan, dan rekomendasi kepada manajemen Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan.

Pembentukan Komite Audit PTP Terminal Nonpetikemas mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. DK/18/11/3/ PTP14 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok kemudian diperbarui dengan SK Dewan Komisaris No. DK/24/11/8/PTP-17 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan terakhir diperbarui dengan SK Dewan Komisaris No. SK/15/9/1/PTPMultipurpose-20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite PT Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PTP Terminal Nonpetikemas dalam waktu 6 bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PTP Terminal Nonpetikemas;
3. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir;
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama PTP Terminal Nonpetikemas;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
6. Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perseroan.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

In order to support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Company has established an Audit Committee. This committee is tasked with evaluating and providing recommendations for improving the effectiveness of the Company's governance, risk management, and internal control. In addition, the Audit Committee plays a role in offering advice, insights, and recommendations to Company management and other stakeholders to enhance the Company's operational effectiveness and efficiency.

The establishment of the Audit Committee of PTP Terminal Nonpetikemas refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The Company's Audit Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK/18/11/3/PTP14 dated December 1, 2014 regarding the Establishment and Appointment of the Chairperson and Members of the Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok. It was subsequently renewed through Decree No. DK/24/11/8/PTP-17 concerning the Reappointment of Members of the Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok and most recently updated through Decree No. SK/15/9/1/PTPMultipurpose-20 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok. All members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

AUDIT COMMITTEE MEMBER QUALIFICATIONS

The membership requirements for the Company's Audit Committee are as follows:

1. Not an insider of any public accounting firm, legal consultant office, or other party providing audit, non-audit, or other consulting services to PTP Terminal Nonpetikemas within the last 6 months;
2. Not having direct or indirect share ownership in PTP Terminal Nonpetikemas;
3. Not having the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months;
4. Not having family relationships by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or major shareholders of PTP Terminal Nonpetikemas;
5. Not having a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities; and
6. Not affiliated with any institution whose business activities provide services to the Company.

TERM OF OFFICE

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a further term of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE AUDIT 2024

Pada tahun 2024, tidak terdapat pergantian keanggotaan Komite Audit. Susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION FOR 2024

In 2024, there were no changes in Audit Committee membership. The composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Lukijanto	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK/12/6/1/PTP-22 tanggal 2 Juni 2022. Appointed as Chairman of the Audit Committee based on Board of Commissioners Decree No. SK/12/6/1/PTP-22 dated June 2, 2022.	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the term of office as a Member of the Board of Commissioners.
Hans Victor Sitepu	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK/15/9/1/PTP-20. Appointed as Member of the Audit Committee based on Board of Commissioners Decree No. SK/15/9/1/PTP-20.	2022 - 2027
Tony Utartono	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK/24/2/1/PTP-23 tanggal 24 Februari 2023. Appointed as Member of the Audit Committee based on Board of Commissioners Decree No. SK/24/2/1/PTP-23 dated February 24, 2023.	2023 - 2028

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE



Lukijanto

Komisaris Independen/
Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/
Chairman of Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit Lukijanto dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the Audit Committee, Lukijanto, can be found in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



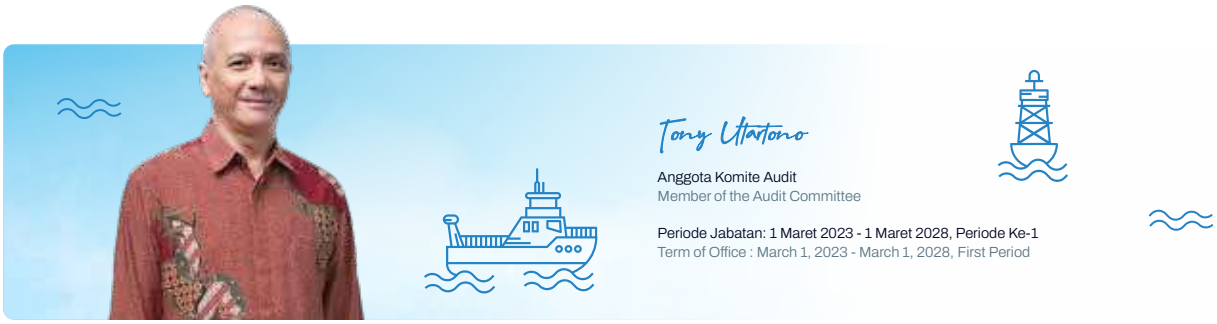
Hans Victor

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode Jabatan: 26 Oktober 2022 - 26 Oktober 2027, Periode Ke-1
Term of Office: October 26, 2022- October 26, 2027, First Term

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Jenis Kelamin/Usia Gender/Age	:	Laki-laki/43 tahun per Desember 2024 Male/43 years old as of December 2024

Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas Join Date	:	26 Oktober 2022 October 26, 2022
Riwayat Pendidikan Education Background	:	• Magister Manajemen, Universitas Lambung Mangkurat (2018) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2005) • Master of Management, Lambung Mangkurat University (2018) • Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2005)
Pengalaman Kerja Career Experience	:	• *Financial, Accounting & Tax Advisor* PT United Equipment Indonesia (2021 - 2022) • *GM Accounting & Finance* PT DTS Indonesia (2020 - 2021) • *Head of Finance & Accounting* PT AKR Corporindo Tbk (2014 - 2020) • *System & Procedure Assistant Manager* PT Antam (Persero) Tbk (2008 - 2014)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	:	Tidak ada None
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	:	Tidak memiliki rangkap jabatan Has no concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other Committee members, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or Majority and Controlling Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Nihil None
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/26/10/2/PTP-22 tanggal 26 Oktober 2022 Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/26/10/2/PTP-22 dated October 26, 2022



Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Jenis Kelamin/Usia Gender/Age	:	Laki-laki/56 tahun per Desember 2024 Male/56 years old as of December 2024
Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas Join Date	:	1 Maret 2023 March 1, 2023
Riwayat Pendidikan Education Background	:	• Magister bidang Keuangan dan Perbankan, Institut Teknologi Bandung (2002) • Sarjana Manajemen Informasi, Universitas Gunadarma (1993) • Master of Finance and Banking, Bandung Institute of Technology (2002) • Bachelor of Information Management, Gunadarma University (1993)
Pengalaman Kerja Career Experience	:	• Komite Audit PT Multi Terminal Indonesia (2020-2022) • *Consultant* PT Elnusa Tbk (2021-2022) • *Chief Internal Auditor* ASEAN Secretariat (2017) • *Risk & Audit Director* MCA-Indonesia (2016-2017) • *General Manager* Internal Audit PT Nusantara Infrastructure, Tbk (2011-2016) • Audit Committee of PT Multi Terminal Indonesia (2020-2022) • PT Elnusa Tbk Consultant (2021-2022) • Chief Internal Auditor ASEAN Secretariat (2017) • Risk & Audit Director MCA-Indonesia (2016-2017) • General Manager Internal Audit PT Nusantara Infrastructure, Tbk (2011-2016)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	:	• Indonesia *Internal Audit Practitioner* (IIAP) • *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) • *Certified Forensic Auditor* (CFrA) • *Certified International Business Analyst* (CIBA) • *Certified Fraud Examiner* (CFE) • *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA) • *Certified Management Accountant* (CMA)

Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	:	• Komite Audit PT Uni-Charm Indonesia, Tbk (2020 - Sekarang) • *Senior Technical Advisor* GLC Consulting (2018 - Sekarang) • Audit Committee of PT Uni-Charm Indonesia, Tbk (2020 - Present) • Senior Technical Advisor GLC Consulting (2018 - Present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other Committee members, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or Majority and Controlling Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Nihil None
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK/24/2/1/PTP-23 tanggal 24 Februari 2023 Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK/24/2/1/PTP-23 dated February 24, 2023

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit di PTP Terminal Nonpetikemas yang telah terpilih merupakan anggota yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konfiik kepentingan terhadap Perusahaan. Adapun kriteria independensi pada anggota Komite Audit diuraikan pada tabel di bawah ini:

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The members of the Audit Committee at PTP Terminal Nonpetikemas have met all the requirements necessary to be appointed as members of the Audit Committee. These members do not have any personal interests or affiliations that could result in negative impacts or conflicts of interest with the Company. The criteria for independence of Audit Committee members are outlined in the table below:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Lukijanto	Hans Victor Sitepu	Tony Utartono
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PTP Terminal Nonpetikemas dalam waktu 6 bulan terakhir. Not a person who worked in a public accounting firm, legal consulting firm, or any other party providing audit and non-audit or other consulting services to PTP Terminal Nonpetikemas within the last 6 months.	x	x	x
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PTP Terminal Nonpetikemas. Does not own shares, either directly or indirectly in PTP Terminal Nonpetikemas.	x	x	x
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who had the authority and responsibility to plan, lead and/or control the Company within the last six months.	x	x	x
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama PTP Terminal Nonpetikemas. Has no familial relationships due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Commissioners, Directors, or majority shareholders of PTP Terminal Nonpetikemas.	x	x	x
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Does not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	x	x	x
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Does not currently work in an institution providing services to the Company.	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta fungsi Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/24/11/7/PTP-2017 tanggal 24 November 2017. Pedoman tersebut disusun berdasarkan fungsinya serta ketentuan yang berlaku di Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The duties, responsibilities, authorities, and functions of the Audit Committee are guided by the Audit Committee Charter as established through the Decree of the Board of Commissioners No. DK/24/11/7/PTP-2017 dated November 24, 2017. This charter was developed in accordance with the Committee's functions and the Company's applicable regulations, aligned with prevailing laws and regulations.

Secara periodik, Pedoman Komite Audit disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha dan organisasi Perusahaan untuk memastikan relevansinya. Selain itu, kebutuhan Komite yang ada di Perusahaan dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam memperbarui Pedoman Komite Audit untuk periode berikutnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Komite Audit meliputi:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian Internal serta pelaksanaannya;
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
9. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   b. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat :
      - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
      - Melakukan audit investigasi dapat bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu komite audit.
10. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab di antara Komite Audit:

The Audit Committee Charter is periodically updated in line with the development of the Company's business activities and organization to ensure its relevance. Additionally, the needs of the Committee within the Company are considered in accordance with applicable laws and regulations as well as best practices, which serve as the basis for revising the Audit Committee Charter for future periods.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

As stipulated in the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee include:

1. The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners;
2. The Audit Committee acts independently, both in performing its duties and in reporting, and is accountable to the Board of Commissioners;
3. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the duties carried out by the Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI);
4. The Audit Committee evaluates the activities and audit results conducted by the KAP and SPI;
5. The Audit Committee provides recommendations for improvements to the internal control system and its implementation;
6. The Audit Committee ensures the presence of adequate procedures to review all information released by the Company;
7. The Audit Committee identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners and performs other tasks assigned by the Board of Commissioners;
8. The Audit Committee proposes candidates for the KAP to audit the Annual Financial Statements to the Board of Commissioners, along with the rationale and the proposed audit fees;
9. Special Assignments from the Board of Commissioners
   a. The scope of special assignments for the Audit Committee is fully determined by the Board of Commissioners as long as it does not conflict with prevailing laws and regulations;
   b. In carrying out special assignments, the Audit Committee may:
      - Review all records, documents, and other necessary information, including minutes of meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, if deemed necessary;
      - Conduct investigative audits in cooperation with the IAU or by engaging external experts or consultants to support the Committee.
10. The Audit Committee submits reports on the execution of special assignments to the Board of Commissioners.

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES WITHIN THE AUDIT COMMITTEE

The division of duties and responsibilities among the members of the Audit Committee is as follows:

Nama/Jabatan Name/Position	**Tugas dan Tanggung Jawab** Duties and Responsibilities
Lukijanto Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	• Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang Keuangan dan Sumber daya manusia (SDM) serta sebagai Ketua Komite Audit; • Memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas eksternal auditor dan *Internal Auditor*, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan. • Providing guidance and supervision in the field of finance and Human Capital (HC) and acting as the Audit Committee Chairman; • Ensuring implementation of internal control and assisting Board of Commissioners in supervising the implementation of its functions to ensure the effectiveness of internal control system and external auditor and internal auditor's duties, providing recommendations on improvements to the management control system and its implementation, and ensuring there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the Company.
Hans Victor Sitepu Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	• Memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas eksternal auditor dan internal auditor, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan; • Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris; • Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; • Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI); • Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP; • Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya; • Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan; • Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris; • Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut; • Tugas Khusus dari Dewan Komisaris: 1. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat: a. Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu. b. Melakukan audit investigasi dapat bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit. c. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris. • Ensuring the implementation of internal control and assisting Board of Commissioners in supervising implementation of functions to ensure the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditor's duties, providing recommendations on management control system improvement and its implementation, and ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure for all information disclosed by the Company; • Audit Committee works collectively in carrying out its duties when assisting the Board of Commissioners; • Audit Committee is independent both when carrying out its duties and when reporting, and is responsible to Board of Commissioners; • Audit Committee assists Board of Commissioners in ensuring effectiveness of internal control system, and effectiveness of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI) auditors' duties; • Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors; • Audit Committee provides recommendations on internal control system improvement and its implementation; • Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information disclosed by the Company; • Audit Committee identifies matters that require the attention of Board of Commissioners as well as other tasks assigned by Board of Commissioners; • Audit Committee proposes to Board of Commissioners candidates for KAP auditor's Annual Financial Report together with the reasons for nomination and the amount of proposed honorarium/remuneration for KAP auditor; • Board of Commissioners Special Duties: 1. The scope of work for Audit Committee special duties is fully determined by Board of Commissioners so long as it does not conflict with the applicable laws and regulations; 2. In carrying out special duties, Audit Committee may: a. Review all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meetings and Board of Commissioners meetings; if deemed necessary. b. Conduct investigative audits with SPI or ask for help from experts or consultants to assist the Audit Committee. c. The Audit Committee submits reports on implementation of special tasks to the Board of Commissioners

Nama/Jabatan Name/Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Tony Utartono Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	• Memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas eksternal auditor dan internal auditor, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan; • Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris; • Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; • Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI); • Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP; • Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya; • Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan; • Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris; • Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut; • Tugas Khusus dari Dewan Komisaris: 1. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat: a. Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu; b. Melakukan audit investigasi dapat bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit; c. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris. • Ensuring the implementation of internal control and assisting Board of Commissioners in supervising implementation of functions to ensure the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditor's duties, providing recommendations on management control system improvement and its implementation, and ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure for all information disclosed by the Company; • Audit Committee works collectively in carrying out its duties when assisting the Board of Commissioners; • Audit Committee is independent both when carrying out its duties and when reporting, and is responsible to Board of Commissioners; • Audit Committee assists Board of Commissioners in ensuring effectiveness of internal control system, and effectiveness of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI) auditors' duties; • Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors; • Audit Committee provides recommendations on internal control system improvement and its implementation; • Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information disclosed by the Company; • Audit Committee identifies matters that require the attention of Board of Commissioners as well as other tasks assigned by Board of Commissioners; • Audit Committee proposes to Board of Commissioners candidates for KAP auditor's Annual Financial Report together with the reasons for nomination and the amount of proposed honorarium/remuneration for KAP auditor; • Board of Commissioners Special Duties: 1. The scope of work for Audit Committee special duties is fully determined by Board of Commissioners so long as it does not conflict with the applicable laws and regulations; 2. In carrying out special duties, Audit Committee may: a. Review all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meetings and Board of Commissioners meetings; if deemed necessary. b. Conduct investigative audits with SPI or ask for help from experts or consultants to assist the Audit Committee. c. The Audit Committee submits reports on implementation of special tasks to the Board of Commissioners

RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat Komite Audit

Kebijakan rapat komite audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/24/11/7/PTP-2017 tanggal 24 November 2017, adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

MEETINGS AND ATTENDANCE RATE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee's meeting policy

The Audit Committee's meeting policy, as stipulated in the Audit Committee Charter based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK/24/11/7/PTP-2017 dated 24 November 2017, is as follows:

1. The Audit Committee shall hold meetings at least as frequently as the minimum number of meetings required for the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association;

2. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
3. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
5. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

2. Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee or, in their absence, by the most senior Audit Committee member;
3. If deemed necessary, the Audit Committee may invite Management personnel relevant to the meeting agenda to attend the meeting;
4. Each Audit Committee meeting must be documented in minutes, signed by all Audit Committee members present;
5. The Audit Committee shall hold coordination meetings with the SPI at least once every 3 (three) months.

In 2024, the Audit Committee held 36 (thirty six) meetings, with the following details:

Jumlah Rapat Komite Audit
Total Audit Committee Meetings

No	Nama Rapat Meeting Name	Jumlah Rapat Total Meetings
1	Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI Coordination Meeting between Committee and SPI	12
2	Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP Partnership Meeting with Divisions in PT PTP	24
Jumlah Rapat Total Meetings		36

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit Pada Rapat
Audit Committee Attendance Recapitulation on Internal Meeting

No	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Hadir Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
1	Lukijanto	36	36	100%
2	Hans Victor Sitepu	36	36	100%
3	Tony Utartono	36	36	100%
Rata-Rata (%) Average (%)				100%

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI:

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Coordination Meeting between Committee and SPI:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/8/1/2/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	• Progress Tindak Lanjut LHA tahun 2023 • Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 • Follow-up Progress on Audit Findings Report (LHA) for 2023 • Annual Supervision Work Program (PKPT) for 2024
2	DK/9/2/2/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan bulan Januari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings January 2024
3	DK/11/3/2/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Februari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to February 2024
4	DK/11/4/2/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Triwulan I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings for Q1 2024

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
5	DK/13/5/2/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. April 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to April 2024
6	PW.02.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Mei 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to May 2024
7	DK/9/7/3/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Semester I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings for Semester I 2024
8	KU.01.04/14/8/1/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Juli 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to July 2024
9	PW.02.01/6/9/1/DK/DK/KPTP-24	9 September 2024 September 9, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Agustus 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to August 2024
10	KU.01.08/23/10/1/DK/DK/KPTP-24	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Laporan Hasil Audit Cabang bulan Agustus-September dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Branch Audit Report for August-September and Follow-up Progress on Findings
11	PW.02.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Hasil Audit Cabang Pontianak & Pangkal Balam dan Progress Tindak Lanjut Temuan Audit Results for Pontianak & Pangkal Balam Branches and Follow-up Progress on Findings
12	PW.02.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 December 12, 2024	• Tindak Lanjut Pengisian Jabatan SM Pengawasan Internal dan Hukum serta Struktur Organisasi yang baru • Laporan Hasil Audit Cabang Cirebon • Progress Tindak Lanjut Temuan • Follow-up on the Appointment of SM for Internal Supervision and Legal Affairs, and the New Organizational Structure • Audit Report of Cirebon Branch • Follow-up Progress on Findings

Rapat *Partnership* dengan Divisi di PTP Terminal Nonpetikemas:

Partnership Meeting with Division at PTP Terminal Nonpetikemas:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/8/1/1/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan 2023 *Unaudited* Evaluation of Unaudited 2023 Financial Performance
2	DK/9/2/1/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Januari 2024 Evaluation of Financial Performance up to January 2024
3	DK/11/3/1/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Februari 2024 Evaluation of Financial Performance up to February 2024
4	DK/11/4/1/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan I 2024 Evaluation of Q1 2024 Financial Performance
5	DK/13/5/1/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. April 2024 Evaluation of Financial Performance up to April 2024
6	KU.04.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Mei 2024 Evaluation of Financial Performance up to May 2024
7	DK/9/7/2/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Semester I 2024 Evaluation of Semester I 2024 Financial Performance
8	KU.01.04/14/8/2/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Juli 2024 Evaluation of Financial Performance up to July 2024
9	KU.04.01/6/9/1/DK/DK/KPTP-24	9 September 2024 September 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Agustus 2024 Evaluation of Financial Performance up to August 2024
10	KU.01.08/23/10/2/DK/DK/KPTP-24	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Triwulan III 2024 Evaluation of Financial Performance up to Q3 2024

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
11	KU.04.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Oktober 2024 Evaluation of Financial Performance up to October 2024
12	KU.04.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 December 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. November 2024 Evaluation of Financial Performance up to November 2024
13	DK/8/1/3/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023 Risk Management Implementation Report for 2023
14	DK/20/6/1/PTP-24	24 Juni 2024 June 24, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. Mei 2024 Risk Management Implementation Report up to May 2024
15	DK/2/7/1/PTP-24	4 Juli 2024 July 4, 2024	Perhitungan Peringkat Komposit Risiko Triwulan I 2024 Risk Composite Rating Calculation for Q1 2024
16	DK/13/7/1/PTP-24	15 Juli 2024 July 15, 2024	Peringkat Komposit Triwulan II 2024 Composite Rating for Q2 2024
17	PW.05.01/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	16 Agustus 2024 August 16, 2024	• Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. Juli 2024 • Laporan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) • Perhitungan Peringkat Komposit Risiko s.d. Juli 2024 • Risk Management Implementation Report up to July 2024 • Occupational Health and Safety (OHS) Implementation Report • Risk Composite Rating Calculation up to July 2024
18	PW.05.01/17/9/1/DK/DK/KPTP-24	19 September 2024 September 19, 2024	• *Update* Profil Risiko s.d. bulan Agustus 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Risk Profile Update up to August 2024 • Other Strategic Matters
19	PW.05.01/28/10/1/DK/DK/KPTP-24	28 Oktober 2024 October 28, 2024	• *Update* Profil Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Laporan Peringkat Komposit Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Risk Profile Update up to Q3 2024 • Risk Composite Rating Report up to Q3 2024
20	PW.05.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	21 November 2024 November 21, 2024	• Laporan Profil Risiko s.d Oktober 2024 • Laporan Profil Risiko Cabang Teluk Bayur • Risk Profile Report up to October 2024 • Risk Profile Report of Teluk Bayur Branch
21	PW.05.01/16/12/1/DK/DK/KPTP-24	16 Desember 2024 December 16, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. November 2024 Risk Management Implementation Report up to November 2024
22	DK/11/3/3/PTP-24	20 Maret 2024 March 20, 2024	Capaian RKM dan KPI s.d. Februari 2024 Achievement of RKM and KPI up to February 2024
23	DK/26/6/1/PTP-24	1 Juli 2024 July 1, 2024	Analisa Beban Kerja dan Ketidaktercapaian RKM Strategis Direktorat Workload Analysis and Underachievement of Directorate Strategic RKM
24	PR.05/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Tindak lanjut Analisis Beban Kerja • Laporan Pelatihan • Tindak lanjut Efisiensi BOPO • Follow-up on Workload Analysis • Training Report • Follow-up on BOPO Efficiency

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tahun 2024, anggota Komite Audit mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

In 2024, members of the Audit Committee participated in various competency development programs in the form of training and education aimed at enhancing their capabilities and supporting the execution of their duties, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Venue/Date	Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hour)	Penyelenggara Organizer
Lukijanto Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 May 20-22, 2024	24	Ikatan Komite Audit Indonesia
	Unlocking the Blue Economy for Sustainable Growth: Creating Value and Promoting Investment to Improve Productivity	1-3 September 2024 September 1-3, 2024	24	Bappenas

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Venue/Date	Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hour)	Penyelenggara Organizer
Hans Victor Sitepu Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	• *Certified* Internal Auditor – Part 1 • *Certified* Internal Auditor – Part 2 • *Certified* Internal Auditor – Part 3	• 3 - 20 Juni 2024 • 12 - 14 Agustus 2024 • 19 - 21 Agustus 2024 • June 3-20, 2024 • August 12-14, 2024 • August 19-21, 2024	32 24 24	The Institute of Internal Auditors
Tony Utartono Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	• *Certified Information Systems Auditor* (CISA) • *Continuous Audit and Data Analytic* • *Fraud Awareness Week* & HAKORDIA 2024 Seminar: "*Understanding Fraud from Criminological Perspective*"	• 4 Mei 2024 - 29 Juni 2024 • 20 - 21 November 2024 • 19 Desember 2024 • May 4, 2024 - June 29, 2024 • November 20-21, 2024 • Desember 19, 2024	64 16 3	• Pusilkom Universitas Indonesia • The Institute of Internal Auditors • ACFE Indonesia

KEBIJAKAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi bagi Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Komite Audit diberikan honorarium paling banyak sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

REMUNERATION POLICY

The determination of remuneration for the Audit Committee refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, which stipulates that Audit Committee members may receive an honorarium of no more than 20% of the President Director's salary, with taxes borne by the Company. They are not allowed to receive any other form of income beyond this honorarium. Members of the Board of Commissioners who serve as Chairman or members of the Audit Committee are not entitled to additional income from such roles apart from their income as members of the Board of Commissioners.

In addition, this policy is reinforced by the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24, regarding the Adjustment of the 2024 Remuneration and the Distribution of 2023 Fiscal Year Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Remunerasi Komite Audit
Audit Committee Remuneration

Nama Name	Honorarium per Bulan Honorarium per Month	Honorarium 1 Tahun Honorarium for 1 Year
	(Rp)	(Rp)
Hans Victor Sitepu	17.800.000	213.600.000
Tony Utartono	17.800.000	213.600.000
Jumlah Total		427.200.000

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan yang disampaikan oleh Direksi. Dalam hal ini, Komite Audit juga mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari Dewan Komisaris. Berikut rincian pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2024:

1. Rapat koordinasi
   a. Internal
      - Rapat koordinasi Dewan Komisaris, 13 kali;

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES IN 2024

In 2024, the Audit Committee provided professional and independent opinions to the Board of Commissioners on reports submitted by the Board of Directors. The Audit Committee also identified matters requiring special attention from the Board of Commissioners. The following are the details of the Audit Committee's duties carried out in 2024:

1. Coordination Meetings
   a. Internal
      - Board of Commissioners coordination meetings, 13 times;

- Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, 12 kali;
- Rapat koordinasi antar Komite dan SPI,12 kali;
- Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP, 24 kali.

b. Eksternal
- *Kick off meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 28 Maret 2024;
- *Closing meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 24 Juni 2024;
- RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 (*Audited*) pada tanggal 25 Juni 2024;
- *Kick off meeting General Audit* Laporan Keuangan Subholding Pelindo Multi Terminal Tahun Buku 2024 pada tanggal 24 Oktober 2024;
- *Sharing session* Proses *Oil Field Service, Shorabes* dan Logistik pada tanggal 11 November 2024;
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Maluku Energi Abadi dan Perumda Panca Karya perihal *Plan of Shorabes Operation Support* Blok Abadi Masela pada tanggal 19 Desember 2024

2. Tugas Khusus sesuai bidang
a. Menyusun Program Kerja Komite Audit;
b. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap pelaksanaan *Assessment* GCG (*open* s.d. *exit meeting*) dengan *counterpart* dari pihak eksternal;
c. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap pelaksanaan audit laporan keuangan GCG (*open* s.d. *exit meeting*) dengan *counterpart* dari pihak auditor eksternal;
d. Melakukan *review* terhadap Laporan Kecukupan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023;
e. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023;
f. Melakukan *review* terhadap laporan Kinerja bulanaan;
g. Melakukan *review* terhadap Laporan Manajemen triwulan;
h. Melakukan *review* terhadap Usulan RKAP tahun 2025;
i. Melakukan *review* terhadap Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal;
j. Melakukan *review* terhadap laporan hasil audit rutin di seluruh cabang;
k. Melakukan *review* terhadap laporan kegiatan tahunan SPI tahun 2023;
l. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap hasil kunjungan kerja;
m. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap rencana pelepasan saham PT P3TPK;
n. Menyampaokan saran dan tanggapan terhadap Kajian Upaya Memperkuat Independensi dan Profesionalitas Internal Auditor sesuai Three Lines Model;
o. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap rencana kerjasama pengoperasian aset dermaga & lahan Regional 2 Pangkal Balam;
p. Melakukan *review* terhadap Piagam Audit Internal;
q. Melakukan *review* terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI tahun 2024;
r. Pemberian *InHouse Technical Training* kepada tim Satuan Pengawas Internal (SPI);
s. Menyusun Laporan Pengawasan Komite Audit.

- Board of Commissioners and Board of Directors coordination meetings, 12 times;
- Coordination meetings with other Committees and Internal Audit Unit (SPI), 12 times;
- Partnership meetings with PT PTP Divisions, 24 times.

b. External
- Kick-off meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on March 28, 2024;
- Closing meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on June 24, 2024;
- Annual GMS for the Approval of the 2023 (Audited) Annual Report and Financial Statements on June 25, 2024;
- Kick-off meeting for the 2024 Financial Statement General Audit of Pelindo Multi Terminal Subholding on October 24, 2024;
- Sharing session on Oil Field Service, Shorebase, and Logistics Processes on November 11, 2024;
- Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Maluku Energi Abadi, and Perumda Panca Karya regarding the Plan of Shorabes Operation Support for the Abadi Masela Block on December 19, 2024

2. Special Duties
a. Preparation of the Audit Committee Work Program;
b. Providing input and feedback on the GCG assessment process (from open to exit meeting) with external counterparts;
c. Providing input and feedback on the GCG financial audit process (from open to exit meeting) with external auditors;
d. Reviewing the 2023 Anti-Bribery Management System (SMAP) Implementation Adequacy Report;
e. Providing input and feedback on the approval and ratification of the 2023 Financial Statements;
f. Reviewing monthly performance reports;
g. Reviewing quarterly management reports;
h. Reviewing the 2025 RKAP proposal;
i. Reviewing Monitoring Reports on Follow-up Actions to Internal and External Audit Recommendations;
j. Reviewing routine audit reports from all branches;
k. Reviewing the 2023 annual activity report from SPI;
l. Providing input and feedback on the results of working visits;
m. Providing input and feedback on the planned divestment of PT P3TPK shares;
n. Providing input and feedback on the Study to Strengthen Auditor Independence and Professionalism based on the Three Lines Model;
o. Providing input and feedback on the planned cooperation in asset operation of wharf & land in Regional 2 Pangkal Balam;
p. Reviewing the Internal Audit Charter;
q. Reviewing the 2024 SPI Annual Supervision Work Program (PKPT);
r. Delivering In-House Technical Training to the Internal Audit Unit (SPI) team;
s. Preparing the Audit Committee Supervision Report

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki Komite khusus yang bertugas dalam Pemantauan Risiko. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk memberikan dukungan yang efektif dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab atas pemantauan seluruh aspek risiko yang terkait dengan operasional Perusahaan, serta mengawasi implementasi praktik GCG di seluruh lingkup Perusahaan.

Pembentukan Komite ini diatur melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. SK/6/6/1/PTP-24 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. Anggota-anggota yang tergabung dalam Komite ini akan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan semua keputusan yang diambil oleh komite ini akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kualifikasi dan persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PTP Terminal Nonpetikemas dalam waktu 6 bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PTP Terminal Nonpetikemas;
3. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir;
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama PTP Terminal Nonpetikemas;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
6. Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perseroan.

MASA JABATAN

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pada tahun 2024, terdapat pergantian keanggotaan Komite Pemantau Risiko dengan susunan dan komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

The Company's Board of Commissioners has established a dedicated committee responsible for Risk Monitoring. The primary objective of establishing this committee is to provide effective support in the supervisory functions carried out by the Board of Commissioners. The Risk Monitoring Committee is responsible for overseeing all aspects of risks related to the Company's operations and supervising the GCG implementation across the Company.

The establishment of this committee is regulated by the Board of Commissioners' Decree No. SK/6/6/1/PTP-24 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Monitoring Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok. The members of this committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and all decisions made by this committee shall be reported to the General Meeting of Shareholders (GMS).

QUALIFICATIONS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

The qualifications and requirements for members of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Not an insider from a public accounting firm, legal consulting firm, or any other party providing audit and non-audit services or other consulting services to PTP Terminal Nonpetikemas within the last 6 months;
2. Does not hold shares, either directly or indirectly, in PTP Terminal Nonpetikemas;
3. Has not held authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months;
4. Has no family relationship by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with any Commissioner, Director, or majority Shareholder of PTP Terminal Nonpetikemas;
5. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities; and
6. Is not currently affiliated with any institution whose business activities provide services to the Company.

TERM OF OFFICE

Members of the Risk Monitoring Committee are appointed for a maximum term of 5 (five) years and may be reappointed for only one additional term, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

COMPOSITION OF THE RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

In 2024, there were changes in the membership of the Risk Monitoring Committee. The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Officeeee
Andi Hamdani	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	Diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomo:SK/6/6/1/PTP-24 Appointed as Chairman of the Risk Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok No: SK/6/6/1/PTP-24.	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the term of Office as a member of the Board of Commissioners.
Sumarman	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee *Member of the Risk Monitoring Committee*	Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK/6/6/1/PTP-24 *Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No: SK/6/6/1/PTP-24.*	2024-2029



Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Andi Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, Andi Hamdani, can be found in the Board of Commissioners' profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Jenis Kelamin/Usia Gender/Age	Laki-laki/54 tahun per Desember 2024 Male / 54 years old as of December 2024
Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Termina Nonpetikemas Join Date	6 Juni 2024 June 6, 2024
Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana Teknik Mesin Universitas Muhammadya (1998) • Diploma 3 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (1993) • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, University of Muhammadiyah (1998) • Diploma in Mechanical Engineering, University of Gadjah Mada (1993)
Pengalaman Kerja Career Experience	• *Deputy Vice President* Risiko Operasional Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2018-2021) • *Deputy Vice President* Jaminan Mutu Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2017-2018) • *Asisten Senior Manager* Jaminan Mutu Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2012-2017) • *Deputy Vice President of Operational Risk, Head Office* of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2018–2021) • *Deputy Vice President of Quality Assurance, Head Office* of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2017–2018) • *Senior Assistant Manager of Quality Assurance, Head Office* of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2012–2017)

Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	• *Qualified Risk Governance Profesional* (QRGP) • *Qualified Risk Management Professional* (QRMP) • *Certified in Enterprise Risk Governance* (CERG) • *Certified Governance Risk Management Compliance Professional* (CGRCP)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	*Department Head* Risiko Operasional Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang) *Department Head of Operational Risk, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021–present)*
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee members, the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Nihil None
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK/6/6/1/PTP-24 Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/6/6/1/PTP-24

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko PTP Terminal Nonpetikemas yang telah terpilih merupakan anggota yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite juga tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan. Adapun kriteria independensi pada anggota Pemantau Risiko diuraikan pada tabel di bawah ini:

INDEPENDENCE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The appointed members of the Risk Monitoring Committee at PTP Terminal Nonpetikemas have fulfilled all the requirements necessary to serve as members of the Risk Monitoring Committee. These individuals do not possess any personal interests or affiliations that could negatively impact or create conflicts of interest with the Company.The criteria for independence among members of the Risk Monitoring Committee are outlined in the table below:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Andi Hamdani	Sumarman
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PTP Terminal Nonpetikemas dalam waktu 6 bulan terakhir. Not a person who worked in a public accounting firm, legal consulting firm, or any other party providing audit and non-audit or other consulting services to PTP Terminal Nonpetikemas within the last 6 months.	x	x
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PTP Terminal Nonpetikemas. Does not own shares, either directly or indirectly in PTP Terminal Nonpetikemas.	x	x
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan/ atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who had the authority and responsibility to plan, lead and/or control the Company within the last six months.	x	x
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama PTP Terminal Nonpetikemas. Has no familial relationships due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Commissioners, Directors, or majority shareholders of PTP Terminal Nonpetikemas.	x	x
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Does not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.
Does not currently work in an institution providing services to the Company.
Andi Hamdaini x
Sumarman x
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.
Does not currently work in an institution providing services to the Company.
Andi Hamdaini x
Sumarman x

PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta fungsi Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/18/8/5/PTP-2020 tanggal 18 Agustus 2020. Pedoman tersebut disusun berdasarkan fungsinya serta ketentuan yang berlaku di Perusahaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Komite Pemantau Risiko secara berkala dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
   a. Melakukan *review* atas pelaksanaan Kebijakan GCG dan Manajemen Risiko;

   Tugas Bidang Pemantau antara lain:
   - Melakukan *review* atas kebijakan, prosedur, usulan, dan pelaksanaan RKAP, RJPP dan/atau kebijakan strategis bisnis;
   - Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, pengendalian internal perusahaan, termasuk kebijakan metodologi dan infrastruktur;
   - Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memantau pelaksanaan manajemen risiko;
   - Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan serta mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko atas permintaan dari Dewan Komisaris;
   - Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan rencana pendidikan berkelanjutan bagi personel dalam bidang manajemen risiko serta melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam perusahaan;
   - Melakukan *monitoring* pelaksanaan investasi/ CAPEX yang telah disetujui Dewan Komisaris.

   Tugas di bidang Pengawasan GCG antara lain:
   - Mendapatkan pemahaman atas pelaksanaan GCG perusahaan yang mencakup berbagai pengawasan yang dilakukan perusahaan;
   - Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan dengan ketentuan GCG dan peraturan yang berlaku, termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab pada bidang pengawasan pelaksanaan GCG;
   - Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan GCG Perseroan.
     i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris untuk melakukan kajian atas masalah tertentu;
     ii. Membuat rencana kegiatan dan anggaran komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The execution of duties, responsibilities, authority, and functions of the Risk Monitoring Committee is guided by the Risk Monitoring Committee Charter, which was established through the Decree of the Board of Commissioners No. DK/18/8/5/PTP-2020 dated August 18, 2020. This charter was developed based on the Committee's functions and the applicable Company regulations, adjusted to comply with prevailing laws and regulations. The charter is periodically reviewed to ensure its alignment with the latest regulatory developments.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MONITORING COMMITTEE

In accordance with the Charter of the Business Development and Risk Management Monitoring Committee, the Committee's duties and responsibilities are as follows:

1. The Risk Monitoring Committee supports the Board of Commissioners in:
   a. Reviewing the implementation of GCG, and Risk Management Policies.

   Tasks in the Area of Risk Monitoring include:
   - Reviewing policies, procedures, proposals, and the implementation of the RKAP, RJPP, and/or strategic business policies;
   - Gaining an understanding of the company's risk management, covering the various risks faced by the Company, internal controls, including policies, methodologies, and infrastructure;
   - Monitoring the alignment of various risk management policies and their implementation, including overseeing the performance of the division responsible for risk management and monitoring the overall execution of risk management;
   - Monitoring various potential risks faced by the Company and evaluating related risk management policies upon request from the Board of Commissioners;
   - Monitoring and providing recommendations related to the continuous education plans for personnel in the field of risk management, as well as coordinating the implementation and supervision of the existence and effectiveness of each component of the Company's Enterprise Risk Management (ERM);
   - Monitoring the implementation of investments/ CAPEX approved by the Board of Commissioners.

   Tasks in the Area of GCG Supervision include:
   - Gaining an understanding of the Company's implementation of GCG and related supervision processes';
   - Monitoring the compliance of policies and implementations with GCG provisions and regulations, including supervising the division responsible for GCG implementation;
   - Monitoring and recommending adjustments regarding changes to the Company's GCG implementation policies.
     i. Performing special tasks assigned by the Board of Commissioners to conduct assessments on specific matters;
     ii. Preparing a committee activity plan and budget to be submitted to the Board of Commissioners.

2. Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang Manajemen Risiko serta memahami peraturan perundang-undangan terkait. Komite Pemantau Risiko dapat dibantu oleh satu atau lebih staf;
3. Komite Pemantau Risiko harus menjalankan tugas secara objektif dan independen.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/18/8/5/PTP-2020 tanggal 18 Agustus 2020.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

2. The Risk Monitoring Committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and/or external parties who are independent and possess expertise and experience in Risk Monitoring as well as knowledge of relevant laws and regulations. The Risk Monitoring Committee may be assisted by one or more staff members;
3. The Risk Monitoring Committee must perform its duties objectively and independently.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

The policy governing the Risk Monitoring Committee meetings is outlined in the Risk Monitoring Committee is guided by the Risk Monitoring Committee Charter, which was established through the Decree of the Board of Commissioners No. DK/18/8/5/PTP-2020 dated August 18, 2020.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

In 2024, the Risk Monitoring Committee held 35 (thirty five) meetings, with the details as follows:

Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko
Total Risk Monitoring Committee Coordination Meetings

No	Nama Rapat Meeting Name	Jumlah Rapat Total Meetings
1	Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI Coordination Meeting between Committee and SPI	11
2	Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP Partnership Meeting with Divisions in PT PTP	24
Jumlah Rapat Total Meetings		35

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko Pada Rapat Internal
Risk Monitoring Committee Attendance Recapitulation at Internal Meeting

No	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Hadir Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
1	Marta Hardisarwono*)	8	8	100%
2	Andi Hamdani**)	28	27	96%
3	Sugiarto***)	15	15	100%
4	Sumarman****)	21	20	95%
Rata-Rata (%) Average (%)				98%

*) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024
**) Menjabat sejak 2 Agustus 2024
***) Berhenti menjabat sejak 1 Juni 2024
****) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Ceased to serve as of August 1, 2024
**) Appointed as of August 2, 2024
***) Ceased to serve as of June 1, 2024
****) Appointed as of June 2, 2024

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO PADA RAPAT INTERNAL

Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI:

RISK MONITORING COMMITTEE MEETING AGENDA ON INTERNAL MEETINGS

Coordination Meeting between Committee and SPI:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/8/1/2/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	• *Progress* Tindak Lanjut LHA tahun 2023 • Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 • Follow-up Progress on Audit Findings Report (LHA) for 2023 • Annual Audit Supervision Work Program (PKPT) for 2024

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
2	DK/9/2/2/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan bulan Januari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings January 2024
3	DK/11/3/2/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Februari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to February 2024
4	DK/11/4/2/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Triwulan I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings Q1 2024
5	DK/13/5/2/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. April 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to April 2024
6	PW.02.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Mei 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to May 2024
7	DK/9/7/3/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Semester I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings – Semester I 2024
8	KU.01.04/14/8/1/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Juli 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to July 2024
9	KU.01.08/23/10/1/DK/DK/KPTP-24	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Laporan Hasil Audit Cabang bulan Agustus-September dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Branch Audit Report for August–September and Follow-up Progress on Findings
10	PW.02.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Hasil Audit Cabang Pontianak & Pangkal Balam dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Audit Results for Pontianak & Pangkal Balam Branches and Follow-up Progress on Findings
11	PW.02.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 December 12, 2024	• Tindak Lanjut Pengisian Jabatan SM Pengawasan Internal dan Hukum serta Struktur Organisasi yang baru • Laporan Hasil Audit Cabang Cirebon • *Progress* Tindak Lanjut Temuan • Follow-up on the Appointment of Senior Manager for Internal Supervision and Legal Affairs, and the New Organizational Structure • Audit Report of Cirebon Branch • Follow-up Progress on Findings

Rapat *Partnership* dengan Divisi di PTP Terminal Nonpetikemas:

Partnership Meetings with Divisions at PTP Terminal Nonpetikemas:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/8/1/3/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023 Risk Management Implementation Report for 2023
2	DK/20/6/1/PTP-24	24 Juni 2024 June 24, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. Mei 2024 Risk Management Implementation Report up to May 2024
3	DK/2/7/1/PTP-24	4 Juli 2024 July 4, 2024	Perhitungan Peringkat Komposit Risiko Triwulan I 2024 Composite Risk Rating Calculation for Q1 2024
4	DK/13/7/1/PTP-24	15 Juli 2024 July 15, 2024	Peringkat Komposit Triwulan II 2024 Composite Rating for Q2 2024

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
5	PW.05.01/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	16 Agustus 2024 August 16, 2024	• Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. Juli 2024 • Laporan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) • Perhitungan Peringkat Komposit Risiko s.d. Juli 2024 • Risk Management Implementation Report up to July 2024 • Occupational Health and Safety (OHS) Implementation Report • Composite Risk Rating Calculation up to July 2024
6	PW.05.01/17/9/1/DK/DK/KPTP-24	19 September 2024 September 19, 2024	• Update Profil Risiko s.d. bulan Agustus 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Risk Profile Update up to August 2024 • Other Strategic Matters
7	PW.05.01/28/10/1/DK/DK/KPTP-24	28 Oktober 2024 October 28, 2024	• Update Profil Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Laporan Peringkat Komposit Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Risk Profile Update up to Q3 2024 • Composite Risk Rating Report up to Q3 2024
8	PW.05.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	21 November 2024 November 21, 2024	• Laporan Profil Risiko s.d Oktober 2024 • Laporan Profil Risiko Cabang Teluk Bayur • Risk Profile Report up to October 2024 • Risk Profile Report of Teluk Bayur Branch
9	PW.05.01/16/12/1/DK/DK/KPTP-24	16-Dec December 16, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. November 2024 Risk Management Implementation Report up to November 2024
10	DK/8/1/1/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan 2023 Unaudited Evaluation of Unaudited 2023 Financial Performance
11	DK/9/2/1/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Januari 2024 Evaluation of Financial Performance up to January 2024
12	DK/11/3/1/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Februari 2024 Evaluation of Financial Performance up to February 2024
13	DK/11/4/1/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan I 2024 Evaluation of Q1 2024 Financial Performance
14	DK/13/5/1/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. April 2024 Evaluation of Financial Performance up to April 2024
15	KU.04.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Mei 2024 Evaluation of Financial Performance up to May 2024
16	DK/9/7/2/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Semester I 2024 Evaluation of Semester I 2024 Financial Performance
17	KU.01.04/14/8/2/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Juli 2024 Evaluation of Financial Performance up to July 2024
18	KU.04.01/6/9/1/DK/DK/KPTP-24	9 September 2024 September 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Agustus 2024 Evaluation of Financial Performance up to August 2024
19	KU.01.08/23/10/2/DK/DK/KPTP-24	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Triwulan III 2024 Evaluation of Financial Performance up to Q3 2024
20	KU.04.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Oktober 2024 Evaluation of Financial Performance up to October 2024
21	KU.04.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 Desember 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. November 2024 Evaluation of Financial Performance up to November 2024
22	DK/11/3/3/PTP-24	20 Maret 2024 March 20, 2024	Capaian RKM dan KPI s.d. Februari 2024 Achievement of RKM and KPI up to February 2024
23	DK/26/6/1/PTP-24	1 Juli 2024 July 1, 2024	Analisa Beban Kerja dan Ketidaktercapaian RKM Strategis Direktorat Workload Analysis and Underachievement of Directorate Strategic RKM
24	PR.05/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Tindak lanjut Analisis Beban Kerja • Laporan Pelatihan • Tindak lanjut Efisiensi BOPO • Follow-up on Workload Analysis • Training Report • Follow-up on BOPO Efficiency

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tahun 2024, anggota Komite Pemantau Risiko mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

In 2024, members of the Risk Monitoring Committee participated in various competency development programs in the form of training and education aimed at enhancing their capabilities and supporting the execution of their duties, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Venue/Date	Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hour)	Penyelenggara Organizer
Marta Hardisarwono*) Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman *Seminar on the Strategic Role of Audit Committees in Ensuring a Secure Cyber Environment*	1 Agustus 2024 *August 1, 2024*	8	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
Andi Hamdani**) Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	*Certification in Audit Committee Practices (CACP)*	20-22 Mei 2024 *May 20-22, 2024*	24	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
Andi Hamdani**) Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman *Seminar on the Strategic Role of Audit Committees in Ensuring a Secure Cyber Environment*	1 Agustus 2024 *August 1, 2024*	8	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*
	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	27-30 Agustus 2024 *August 27-30, 2024*	32	Cipta Karakter
Sumarman***) Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	• *Key Risk Indicator* • E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi • Pelatihan *Certified Chief Risk Officer* (QCRO) • Pelatian *Risk Based Planning & Risk Modelling* • Key Risk Indicator • E-Learning on Increasing Gratification Understanding • Certified Chief Risk Officer (QCRO) training • Risk Based Planning & Risk Modelling training	• 15 - 16 Agustus 2024 • 24 Agustus 2024 • 6 - 8 Nopember 2024 • 3 September 2024 • August 15-16, 2024 • August 24, 2024 • November 6 - 8, 2024 • September 3, 2024	16 8 24 16	Proxsis GRC Indonesia Pusat Edukasi Antikorupsi CRMS - PMLI KBUMN - PMLI

*) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024
**) Menjabat sejak 2 Agustus 2024
***) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Ceased to serve as of August 1, 2024
**) Appointed as of August 2, 2024
***) Appointed as of June 2, 2024

KEBIJAKAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko diberikan honorarium paling banyak sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

REMUNERATION POLICY

The determination of remuneration for the Risk Monitoring Committee refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, which stipulates that Audit Committee members may receive an honorarium of no more than 20% of the President Director's salary, with taxes borne by the Company. They are not allowed to receive any other form of income beyond this honorarium. Members of the Board of Commissioners who serve as Chairman or members of the Risk Monitoring Committee are not entitled to additional income from such roles apart from their income as members of the Board of Commissioners.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

In addition, this policy is reinforced by the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24, regarding the Adjustment of the 2024 Remuneration and the Distribution of 2023 Fiscal Year Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko
The Risk Monitoring Committe

Nama Name	Honorarium per Bulan Honorarium per Month	Honorarium 1 Tahun Honorarium for 1 Year
	(Rp)	(Rp)
Sugiarto*)	17.800.000	89.000.000
Sumarman**)	17.800.000	124.600.000
Jumlah Total		213.600.000

*) Berhenti menjabat sejak 1 Juni 2024
**) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Ceased to serve as of June 1, 2024
**) Appointed as of June 2, 2024

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan fungsinya yang diwujudkan melalui realisasi pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi
   a. Internal
      - Rapat koordinasi Dewan Komisaris, 13 kali;
      - Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, 12 kali;
      - Rapat koordinasi antar Komite dan SPI, 12 kali;
      - Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP, 24 kali.

   b. Eksternal
      - *Kick off meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 28 Maret 2024;
      - *Closing meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 24 Juni 2024;
      - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 (*Audited*) pada tanggal 25 Juni 2024;
      - *Kick off meeting General Audit* Laporan Keuangan *Subholding* Pelindo Multi Terminal Tahun Buku 2024 pada tanggal 24 Oktober 2024;
      - *Sharing session* Proses *Oil Field Service, Shorabes* dan Logistik pada tanggal 11 November 2024;
      - Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Maluku Energi Abadi dan Perumda Panca Karya perihal *Plan of Shorabes Operation Support* Blok Abadi Masela pada tanggal 19 Desember 2024.

2. Tugas Khusus sesuai bidang
   a. Menyusun Program Kerja Komite Pemantau Risiko;
   b. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap pelaksanaan *Assessment* GCG (*open* s.d *exit meeting*) dengan *counterpart* dari pihak eksternal;
   c. Melakukan *review* terhadap Laporan Kecukupan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023;

IMPLEMENTATION OF THE RISK MONITORING COMMITTEE'S DUTIES IN 2024

In 2024, the Risk Monitoring Committee carried out its functions, as reflected in the following implementation of duties:

1. Coordination Meetings
   a. Internal
      - Board of Commissioners coordination meetings, 13 times;
      - Board of Commissioners and Board of Directors coordination meetings, 12 times;
      - Coordination meetings with other Committees and Internal Audit Unit (SPI), 12 times;
      - Partnership meetings with PT PTP Divisions, 24 times.

   b. External
      - Kick-off meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on March 28, 2024;
      - Closing meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on June 24, 2024;
      - Annual GMS for the Approval of the 2023 (Audited) Annual Report and Financial Statements on June 25, 2024;
      - Kick-off meeting for the 2024 Financial Statement General Audit of Pelindo Multi Terminal Subholding on October 24, 2024;
      - Sharing session on Oil Field Service, Shorebase, and Logistics Processes on November 11, 2024;
      - Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Maluku Energi Abadi, and Perumda Panca Karya regarding the Plan of Shorabes Operation Support for the Abadi Masela Block on December 19, 2024

2. Special Duties by Function
   a. Preparing the Work Program of the Risk Monitoring Committee;
   b. Providing input and responses on the implementation of the GCG assessment (from open to exit meetings) with external counterparts;
   c. Reviewing the 2023 Adequacy Report on the Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP);

d. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023;
e. Melakukan *review* terhadap Laporan Kinerja bulanan;
f. Melakukan *review* terhadap Laporan Manajemen triwulanan;
g. Melakukan *review* terhadap Usulan RKAP tahun 2025;
h. Melakukan *review* terhadap Laporan *Monitoring Risiko;*
i. Melakukan *review* terhadap perhitungan Peringkat Komposit Risiko;
j. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap hasil kunjungan kerja;
k. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap rencana pelepasan saham PT P3TPK;
l. Melakukan *monitoring* terhadap kebijakan Manajemen Risiko yang dijalankan Perusahaan selama tahun 2024;
m. Menyusun Laporan Pengawasan Komite Pemantauan Risiko.

d. Providing input and responses regarding the approval and ratification of the 2023 Financial Statements;
e. Reviewing monthly performance reports;
f. Reviewing quarterly management reports;
g. Reviewing the 2025 RKAP proposal;
h. Reviewing the Risk Monitoring Report;
i. Reviewing the calculation of the Risk Composite Rating;
j. Providing input and responses on the results of site visits;
k. Providing input and responses on the planned divestment of PT P3TPK shares;
l. Monitoring the implementation of the Company's Risk Management policies throughout 2024;
m. Preparing the Supervision Report of the Risk Monitoring Committee.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan eksekutif Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pembentukan Komite ini diatur melalui Surat Keputusan (SK) Nomor SK/1/8/2/-PTP-20 tanggal 1 Agustus 2020. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan keputusan tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu:

1. Ketua Komite merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
   b. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
   d. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi.

The Nomination and Remuneration Committee was established by the Board of Commissioners of the Company to assist the Board of Commissioners in performing its functions related to nominations and remuneration for the Board of Commissioners, Directors, and the Company's executives in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The establishment of this Committee is stipulated by Decree (SK) Number SK/1/8/2/-PTP-20 dated August 1, 2020. The members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and such decisions are reported to the General Meeting of Shareholders (GMS).

STRUCTURE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERSHIP

The Committee shall consist of at least 3 (three) members, as follows:

1. The Chairman, who concurrently serves as a member and must be an Independent Commissioner and meet the following requirements:
   a. Does not own shares either directly or indirectly in the Company;
   b. Has no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities;
   c. Has not worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company within six (6) months prior to appointment by the Board of Commissioners;
   d. Has no familian relation up to the third degree, either vertically or horizontally, or by marriage, with any other member of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

2. Anggota Komite lainnya dapat berasal dari:
   a. Anggota Dewan Komisaris;
   b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan;
   c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
3. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi Anggota Komite.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Persyaratan Umum:
   a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses penetapan Nominasi dan Remunerasi serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait penetapan Nominasi dan Remunerasi;
   d. Memiliki pengetahuan mengenai Nominasi dan Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
   e. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki pengalaman dalam bidang Sumber Daya Manusia.
2. Persyaratan Khusus:
   Selain persyaratan umum yang telah disebutkan di atas, khusus bagi Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan juga harus memenuhi persyaratan yakni tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

MASA JABATAN

Anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2024

Pada tahun 2024, terdapat pergantian keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

2. Other members of the Committee may come from:
   a. Members of the Board of Commissioners;
   b. External parties outside the Company;
   c. Individuals holding managerial positions under the Director in charge of Human Resources.
3. A majority of the members of the Committee must not come from parties holding managerial positions under the Director in charge of Human Resources.
4. Members of the Board of Directors are not eligible to serve as members of the Committee.

QUALIFICATION OF MEMBERSHIP

1. General Requirements:
   a. Possess integrity, dedication, capability, education, independence, and relevant experience in their field of work, and be able to communicate both verbally and in writing all results of their duties to the Board of Commissioners according to applicable procedures;
   b. Have sufficient knowledge to understand the principles and processes of Nomination and Remuneration determination, and be able to communicate the execution of their tasks and functions to the Board of Commissioners;
   c. Possess adequate knowledge of the Company's Articles of Association, laws and regulations, and other rules related to Nomination and Remuneration;
   d. Have knowledge of Nomination and Remuneration practices applicable in industries with similar business activities and the scale of the Company's operations;
   e. At least one member must have an educational background or experience in the field of Human Resources.
2. Specific Requirements:
   In addition to the general requirements above, members from outside the Company must not have any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's majority shareholders.

TERM OF OFFICE

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed for a maximum term of 5 (five) years and may be reappointed for only one additional term, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

In 2024, there were changes in the membership of the Nomination and Remuneration Committee. The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Dedy Cahyadi	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Diangkat sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK/2/8/1/PTP-24 Appointed as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee based on Board of Commissioners Decree No. SK/2/8/1/PTP-24	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Term follows the tenure as a member of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Syska Naomi Hutagalung	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/28/6/1/PTP-23 tanggal 28 Juni 2023 Appointed as Member of the Nomination and Remuneration Committee pursuant to Board of Commissioners Decree No. SK/28/6/1/PTP-23 dated June 28, 2023	2023 – 2028
Dewi Suryani Ekawati	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/6/6/2/PTP-24 Appointed as Member of the Nomination and Remuneration Committee pursuant to Board of Commissioners Decree No. SK/6/6/2/PTP-24	2024-2029

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE



Dedy Cahyadi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Dedy Cahyadi dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Dedy Cahyadi, can be found in the Board of Commissioners' profile section within the Company Profile chapter of this Annual Report.



Syska Naomi Hutagalung

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan: 1 Juli 2023 - 1 Juli 2028, Periode Ke-1
Term of Office : July 1, 2023- July 1, 2028, First Period

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jenis Kelamin/Usia Gender/Age	Perempuan/35 tahun per Desember 2024 Female/35 years old as of December 2024
Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas Join Date	1 Juli 2023 July 1, 2023
Riwayat Pendidikan Education Background	• Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2023) • Sarjana Hukum, Atmajaya (2012) • Master of Public Administration and Policy, University of Indonesia (2023) • Bachelor of Law, Atmajaya (2012)

Pengalaman Kerja Career Experience	• Tenaga Ahli Muda, Kantor Staf Presiden (2015-2019) • *Associate Lawyer*, MR & Partners Law Firm. Legal & Business Consulting Group (2013-2015) • *Legal Team*, Yayasan Luhur Bakti (YLBP) - Toba Sejahtera Grup (2012-2014) • Junior Expert, Presidential Staff Office (2015-2019) • Legal Team, Yayasan Luhur Bakti (YLBP) - Toba Sejahtera Group (2012-2014) • Associate Lawyer, MR & Partners Law Firm. Legal & Business Consulting Group (2013-2015)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	Tidak ada None
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden (2019 - Sekarang) Associate Expert, Presidential Staff Office (2019 - Present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee members, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or Majority and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Nihil None
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/28/6/1/PTP-23 tanggal 28 Juni 2023. Board of Commissioners Decree No. SK/28/6/1/PTP-23 dated June 28, 2023.



Dewi Suryani Ekawati

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan 2024-sekarang, Periode Ke-1
Term of Office 2024-present, First Term

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Jenis Kelamin/Usia Gender/Age	Perempuan/44 tahun per Desember 2024 Female/44 Years old as of December 2024
Bergabung di PTP Terminal Nonpetikemas PTP Terminal Nonpetikemas Join Date	6 Juni 2024 June 6, 2024
Riwayat Pendidikan Education Background	• Master/Magister Universitas Sumatera Utara (2014) • Sarjana Universitas Islam Indonesia (2001) • Master's Degree, University of Sumatera Utara (2014) • Bachelor's Degree, University of Islam Indonesia (2001)
Pengalaman Kerja Career Experience	• Senior *Vice President* Perencanaan & Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal (2022-2023) • Senior *Vice President* Perencanaan & Pengelolaan SDM Regional 1 PT Pelindo Multi Terminal (2021-2022) • SVP Manajemen Strategis Regional 1 *Head Office* (2021-2021) • Kadep Perencanaan Strategis Regional 1 *Head Office* (2019-2021) • Senior Vice President of Human Capital Planning & Management, PT Pelindo Multi Terminal (2023–present) • Senior Vice President of Human Capital Planning & Management, PT Pelindo Multi Terminal (2022–2023) • Senior Vice President of Human Capital Planning & Management, Regional 1, PT Pelindo Multi Terminal (2021–2022) • SVP of Strategic Management, Regional 1 Head Office (2021-2021) • Head of Strategic Planning Department, Regional 1 Head Office (2019–2021)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	• Sertifikasi kompetensi Manajamen *Human Resource General Manager* (BNSP) • Sertfiikasi kompetensi *Corporate Culture Specialist* • Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO). • Human Resource General Manager (BNSP) Management Competency Certification • Sertfiikasi kompetensi Corporate Culture Specialist Competency Certification • Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Certification

Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	*Senior Vice President* Perencanaan & Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal (2023-sekarang) Senior Vice President of Human Capital Planning & Management, PT Pelindo Multi Terminal (2023–present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komite lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Has no affiliation with other Committee members, the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's majority or controlling shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Nihil None
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK/6/6/2/PTP-24 Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/6/6/2/PTP-24

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria independensi pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan pada tabel di bawah ini:

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any parties that are not in accordance with prevailing laws and regulations. The criteria for independence of the members of the Nomination and Remuneration Committee are outlined in the table below:

Kriteria Independensi Independency Criteria	Dedy Cahyadi	Syska Naomi Hutagalung	Dewi Suryani Ekawati
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Does not own, either directly or indirectly, any shares in the Company.	x	x	x
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	x	x	x
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Has not been employed by, nor held any authority or responsibility for planning, leading, controlling, or supervising the Company within 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners.	x	x	x
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi. Has no familial relationship up to the third degree, either in a direct or collateral line, nor any relationship arising from marriage with any other member of the Board of Commissioners or the Board of Directors	x	x	x
Tidak menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Does not hold any managerial position under the Board of Directors in charge of Human Capital.	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v= yes | x= no

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/29/8/10/PTP-18 tanggal 29 Agustus 2018, Pedoman tersebut disusun berdasarkan fungsinya serta ketentuan yang berlaku di Perusahaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara periodik, Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan organisasi Perusahaan. Selain itu, kebutuhan Komite yang ada pada Perusahaan dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam memperbarui Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode selanjutnya.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

The execution of duties, responsibilities, authorities, and functions of the Nomination and Remuneration Committee is guided by the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was established based on the Board of Commissioners' Decree No. SK/29/8/10/PTP-18 dated August 29, 2018. This charter was prepared based on the committee's function and applicable regulations within the Company, in alignment with prevailing laws and regulations.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is reviewed periodically in accordance with the development of the Company's business and organizational activities. Furthermore, the Company's committee needs are evaluated in compliance with relevant regulations and best practices, which serve as a reference for updating the Charter for the following period.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- Tugas
  a. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
  b. Melakukan penelaahan remunerasi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dan mengajukan kepada RUPS;
  c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
  d. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan secara berkala antar Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*;
  e. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.

- Tanggung Jawab
  1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
  2. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan laporan sebagai berikut:
     1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
     2) Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
     3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
  3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/29/8/10/PTP-18 tanggal 29 Agustus 2018.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

As stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter, the duties and responsibilities are as follows:

- Duties:
  a. The Nomination and Remuneration Committee works collectively to assist the Board of Commissioners in performing its duties;
  b. Review the remuneration for the Directors and the Board of Commissioners and submit it to the GMS;
  c. Review and assess periodic and annual reports prepared by the Directors and sign the annual report;
  d. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices, including holding regular meetings between the Board of Commissioners and Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance;
  e. Review and oversee to ensure that the Company has nomination policies in place, covering organizational analysis, recruitment procedures and criteria, as well as selection and promotion processes.

- Responsibilities:
  1. The Nomination and Remuneration Committee is accountable to the Board of Commissioners;
  2. Accountability is provided through the following reports to the Board of Commissioners:
     1) Annual report on the Nomination and Remuneration Committee's duties;
     2) Quarterly reports on the Nomination and Remuneration Committee's duties;
     3) Special task reports for each specific assignment carried out by the Committee.
  3. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

The policy governing the Nomination and Remuneration Committee meetings is outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was established based on the Board of Commissioners' Decree No. SK/29/8/10/PTP-18 dated August 29, 2018.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 33 (thirty three) meetings, with the following details:

Rapat Koordinasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Coordination Meeting

No	Nama Rapat Meeting Name	Jumlah Rapat Total Meeting
1	Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI Coordination Meeting between Committee and SPI	11
2	Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP Partnership Meeting with Divisions in PT PTP	22
Jumlah Rapat Total Meeting		33

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Rapat Internal
Nomination and Remuneration Committee Recapitulation on Internal Meeting

No	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Hadir Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
1	Marta Hardisarwono*)	10	10	100%
2	Dedy Cahyadi**)	23	23	100%
3	Syska Naomi Hutagalung	33	4	12%
4	Dewi Suryani Ekawati***)	21	20	95%
Rata-Rata (%) Average (%)				77%

*) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024
**) Menjabat sejak 2 Agustus 2024
***) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Ceased to serve as of August 1, 2024
**) Appointed as of August 2, 2024
***) Appointed as of June 2, 2024

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Koordinasi antar Komite dan SPI:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING AGENDA

Coordination Meeting between Committee and SPI:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/8/1/2/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	• *Progress* Tindak Lanjut LHA tahun 2023 • Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 • Follow-up Progress on Audit Findings Report (LHA) for 2023 • Annual Audit Supervision Work Program (PKPT) for 2024
2	DK/9/2/2/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan bulan Januari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings January 2024
3	DK/11/3/2/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Februari 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to February 2024
4	DK/11/4/2/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Triwulan I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings Q1 2024
5	DK/13/5/2/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. April 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to April 2024
6	PW.02.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Mei 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to May 2024
7	DK/9/7/3/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Semester I 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings Semester I 2024
8	KU.01.04/14/8/1/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Operasional Tim Audit dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan s.d. Juli 2024 Evaluation of Audit Team Operational Performance and Follow-up Progress on Findings up to July 2024
9	KU.01.08/23/10/1/DK/DK/KPTP-24	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Laporan Hasil Audit Cabang bulan Agustus-September dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Branch Audit Report for August–September and Follow-up Progress on Findings
10	PW.02.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Hasil Audit Cabang Pontianak & Pangkal Balam dan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Audit Results for Pontianak & Pangkal Balam Branches and Follow-up Progress on Findings

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
11	PW.02.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 December 12, 2024	• Tindak Lanjut Pengisian Jabatan SM Pengawasan Internal dan Hukum serta Struktur Organisasi yang baru • Laporan Hasil Audit Cabang Cirebon • *Progress* Tindak Lanjut Temuan • Follow-up on the Appointment of Senior Manager for Internal Supervision and Legal Affairs, and the New Organizational Structure • Audit Report of Cirebon Branch • Follow-up Progress on Findings

Rapat *Partnership* dengan Divisi di PTP Terminal Nonpetikemas:

Partnership Meetings with Divisions at PTP Terminal Nonpetikemas:

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	DK/11/3/3/PTP-24	20 Maret 2024 March 20, 2024	Capaian RKM dan KPI s.d. Februari 2024 Achievement of RKM and KPI up to February 2024
2	DK/26/6/1/PTP-24	1 Juli 2024 July 1, 2024	Analisa Beban Kerja Workload Analysis
3	DK/26/6/1/PTP-24	1 Juli 2024 July 1, 2024	Ketidaktercapaian RKM Strategis Direktorat Underachievement of Directorate Strategic RKM
4	PR.05/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Tindak lanjut Analisis Beban Kerja • Laporan Pelatihan • Tindak lanjut Efisiensi BOPO • Follow-up on Workload Analysis • Training Report • Follow-up on BOPO Efficiency
5	PR.05/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Pending matters RKM terkait aplikasi • Progress Inisiatif Strategis • Capaian KPI s.d. Juli 2024 • Pending RKM Matters Related to Application • Progress of Strategic Initiatives • KPI Achievement up to July 2024
6	OT.01.03/30/10/1/DK/DK/KPTP-24	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Perubahan Struktur Organisasi & Penetapan *Job Grading* Organizational Structure Changes & Job Grading Determination
7	DK/8/1/1/PTP-24	9 Januari 2024 January 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan 2023 *Unaudited* Evaluation of Unaudited 2023 Financial Performance
8	DK/9/2/1/PTP-24	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Januari 2024 Evaluation of Financial Performance up to January 2024
9	DK/11/3/1/PTP-24	13 Maret 2024 March 13, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Februari 2024 Evaluation of Financial Performance up to February 2024
10	DK/11/4/1/PTP-24	15 April 2024 April 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan I 2024 Evaluation of Q1 2024 Financial Performance
11	DK/13/5/1/PTP-24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. April 2024 Evaluation of Financial Performance up to April 2024
12	KU.04.01/20/6/1/DK/DK/KPTP-24	21 Juni 2024 June 21, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Mei 2024 Evaluation of Financial Performance up to May 2024
13	DK/9/7/2/PTP-24	10 Juli 2024 July 10, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan Semester I 2024 Evaluation of Semester I 2024 Financial Performance
14	KU.01.04/14/8/2/DK/DK/KPTP-24	15 Agustus August 15, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Juli 2024 Evaluation of Financial Performance up to July 2024
15	KU.04.01/6/9/1/DK/DK/KPTP-24	9 September 2024 September 9, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Agustus 2024 Evaluation of Financial Performance up to August 2024
16	KU.01.08/23/10/2/DK/DK/KPTP-24	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Triwulan III 2024 Evaluation of Financial Performance up to Q3 2024
17	KU.04.01/19/11/1/DK/DK/KPTP-24	22 November 2024 November 22, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. Oktober 2024 Evaluation of Financial Performance up to October 2024
18	KU.04.01/10/12/1/DK/DK/KPTP-24	12 Desember 2024 December 12, 2024	Evaluasi Kinerja Keuangan s.d. November 2024 Evaluation of Financial Performance up to November 2024

No	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tanggal Date	Agenda
19	PW.05.01/16/8/1/DK/DK/KPTP-24	16 Agustus 2024 August 16, 2024	• Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. Juli 2024 • Laporan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja • (K3) • Perhitungan Peringkat Komposit Risiko s.d. Juli 2024 • Risk Management Implementation Report up to July 2024 • Occupational Health and Safety (OHS) Implementation Report • Composite Risk Rating Calculation up to July 2024
20	PW.05.01/17/9/1/DK/DK/KPTP-24	19 September 2024 September 19, 2024	• Update Profil Risiko s.d. bulan Agustus 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Risk Profile Update up to August 2024 • Other Strategic Matters
21	PW.05.01/28/10/1/DK/DK/KPTP-24	28 Oktober 2024 October 28, 2024	• Update Profil Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Laporan Peringkat Komposit Risiko s.d. Triwulan III 2024 • Risk Profile Update up to Q3 2024 • Composite Risk Rating Report up to Q3 2024
22	PW.05.01/16/12/1/DK/DK/KPTP-24	16 Desember 2024 December 16, 2024	Laporan Implementasi Manajemen Risiko s.d. November 2024 Risk Management Implementation Report up to November 2024

KEBIJAKAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan honorarium paling banyak sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

REMUNERATION POLICY

The determination of remuneration for the Nomination and Remuneration Committee refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, which stipulates that Audit Committee members may receive an honorarium of no more than 20% of the President Director's salary, with taxes borne by the Company. They are not allowed to receive any other form of income beyond this honorarium. Members of the Board of Commissioners who serve as Chairman or members of the Nomination and Remuneration Committee are not entitled to additional income from such roles apart from their income as members of the Board of Commissioners.

In addition, this policy is reinforced by the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24, regarding the Adjustment of the 2024 Remuneration and the Distribution of 2023 Fiscal Year Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Honorarium per Bulan Honorarium per Month	Honorarium 1 Tahun Honorarium for 1 Year
	(Rp)	(Rp)
Syska Naomi Hutagalung	17.800.000	213.600.000
Dewi Suryani Ekawati*)	17.800.000	124.600.000
Jumlah Total		338.200.000

*) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Appointed as of June 2, 2024

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2024, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2024, members of the Nomination and Remuneration Committee participated in various competency development programs in the form of training and education aimed at enhancing their capabilities and supporting the execution of their duties, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Venue/Date	Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hour)	Penyelenggara Organizer
Marta Hardisarwono*) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi As Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	20-22 Mei 2024 May 20-22, 2024	24	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
	Seminar tentang Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman Seminar on the Strategic Role of Audit Committees in Ensuring a Secure Cyber Environment	1 Agustus 2024 August 1, 2024	8	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
Dedy Cahyadi**) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi As Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	*Bootcamp* Penelitian Kuantitatif dengan *Software Smart* PLS Quantitative Research Bootcamp Using SmartPLS Software	2-30 Januari 2024 January 2–30, 2024	96	Ebizmark
	Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai Peradilan Maritim Saat Ini dan Masa Depan Strengthening the Institutional Role of the Maritime Court as a Present and Future Maritime Judiciary	28 Mei 2024 May 28, 2024	8	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
	Tip dan Trik Publikasi Jurnal Artikel Ilmiah Tips and Tricks for Publishing Scientific Journal Articles	8 Juni 2024 June 8, 2024	8	Institut Transportasi dan Logistik Trisaktti Trisakti Institute of Transportation and Logistics
Dewi Suryani Ekawati***) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	• Sertifikasi kompetensi Manajamen *Human Resource General Manager* (BNSP) • Sertfiikasi kompetensi *Corporate Culture Specialist* • Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO).	27 - 30 Agustus 2024 20 - 22 November 2024 2 - 4 September 2024	32 24 24	
	• Human Resource General Manager (BNSP) Management Competency Certification • Sertfiikasi kompetensi Corporate Culture Specialist Competency Certification • Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Certification	August 27 - 30, 2024 November 20 - 22, 2024 September 2 - 4, 2024		

*) Berhenti menjabat sejak 1 Agustus 2024
**) Menjabat sejak 2 Agustus 2024
***) Menjabat sejak 2 Juni 2024
*) Ceased to serve as of August 1, 2024
**) Appointed as of August 2, 2024
***) Appointed as of June 2, 2024

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

Berikut rincian pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2024:

1. Rapat Koordinasi
   a. Internal
      - Rapat koordinasi Dewan Komisaris, 13 kali;
      - Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, 12 kali;
      - Rapat koordinasi antar Komite dan SPI, 12 kali;
      - Rapat *Partnership* dengan Divisi di PT PTP, 22 kali

IMPLEMENTATION OF DUTIES BY THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

The following outlines the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties in 2024:

1. Coordination Meetings
   a. Internal
      - Board of Commissioners coordination meetings, 13 times;
      - Board of Commissioners and Board of Directors coordination meetings, 12 times;
      - Coordination meetings with other Committees and Internal Audit Unit (SPI), 12 times;
      - Partnership meetings with PT PTP Divisions, 24 times.

b. Eksternal
   - *Kick off meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 28 Maret 2024;
   - *Closing meeting Audit Good Corporate Governance* (GCG) pada tanggal 24 Juni 2024;
   - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 (*Audited*) pada tanggal 25 Juni 2024;
   - *Kick off meeting General Audit* Laporan Keuangan *Subholding* Pelindo Multi Terminal Tahun Buku 2024 pada tanggal 24 Oktober 2024;
   - *Sharing session* Proses *Oil Field Service, Shorabes* dan Logistik pada tanggal 11 November 2024;
   - Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Maluku Energi Abadi dan Perumda Panca Karya perihal *Plan of Shorabes Operation Support* Blok Abadi Masela pada tanggal 19 Desember 2024.

2. Tugas Khusus sesuai bidang
   a. Menyusun Program Kerja Komite Nominasi & Remunerasi;
   b. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023;
   c. Melakukan *review* terhadap Laporan Kinerja bulanan;
   d. Melakukan *review* terhadap Laporan Manajemen triwulanan;
   e. Melakukan *review* terhadap Usulan RKAP tahun 2025;
   f. Melakukan *review* terhadap Laporan Rencana Kerja Manajemen Strategi;
   g. Melakukan *review* terhadap Laporan KPI *Corporate*;
   h. Menyusun Laporan KPI Dewan Komisaris, KPI Individu Dewan Komisaris dan Komite;
   i. Melakukan evaluasi usulan Penilaian Kinerja Individu Dewan Komisaris dan Komite;
   j. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap pengisian jabatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
   k. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap hasil kunjungan kerja;
   l. Menyampaikan saran dan tanggapan terhadap rencana pelepasan saham PT P3TPK;
   m. Melakukan *monitoring* terhadap kebijakan Nominasi & Remunerasi yang dijalankan Perusahaan selama tahun 2024;
   n. Menyusun Laporan Pengawasan Komite Nominasi & Remunerasi.

b. External
   - Kick-off meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on March 28, 2024;
   - Closing meeting for the Good Corporate Governance (GCG) Audit on June 24, 2024;
   - Annual GMS for the Approval of the 2023 (Audited) Annual Report and Financial Statements on June 25, 2024;
   - Kick-off meeting for the 2024 Financial Statement General Audit of Pelindo Multi Terminal Subholding on October 24, 2024;
   - Sharing session on Oil Field Service, Shorebase, and Logistics Processes on November 11, 2024;
   - Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Maluku Energi Abadi, and Perumda Panca Karya regarding the Plan of Shorabes Operation Support for the Abadi Masela Block on December 19, 2024

2. Special Duties by Function
   a. Preparing the Nomination & Remuneration Committee Work Program;
   b. Providing input and responses regarding the Approval and Ratification of the 2023 Financial Statements;
   c. Reviewing monthly Performance Reports;
   d. Reviewing quarterly Management Reports;
   e. Reviewing the 2025 RKAP Proposal;
   f. Reviewing the Strategic Management Work Plan Report;
   g. Reviewing the Corporate KPI Report;
   h. Preparing the KPI Report of the Board of Commissioners, Individual KPI of Commissioners, and Committees;
   i. Evaluating proposed Individual Performance Assessments of Commissioners and Committees;
   j. Providing input and responses regarding position appointments requiring Board of Commissioners' approval;
   k. Providing input and responses to the outcomes of working visits;
   l. Providing input and responses regarding the planned divestment of PT P3TPK shares;
   m. Monitoring the Nomination & Remuneration policies implemented by the Company throughout 2024;
   n. Preparing the Nomination & Remuneration Committee's Supervisory Report

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' SUPPORTING ORGAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung Direksi yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antarorgan Perusahaan dan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan Perusahaan dengan regulator, Pemegang Saham, media, dan pihak eksternal lainnya. Disamping itu, Sekretaris Perusahaan juga menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan dan memastikan kepatuhan Perusahaan kepada peraturan dan prinsip GCG. Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis dalam membangun corporate image PTP.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi *liaison officer* dan menjalankan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan. Divisi Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh seorang Senior Manager Sekretaris Perusahaan.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi, Nama Jabatan dan Uraian Jabatan pada Kantor Pusat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan PTP Terminal Nonpetikemas adalah sebagai berikut:

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Pada tahun 2024, SM Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fiona Sari Utami yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: Kp.10.05/1/8/3/Rktk/Sdma/Plnd-24 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan Pt Pelabuhan Indonesia (Persero).

The Corporate Secretary is a supporting organ of the Board of Directors that plays a vital role in facilitating communication among the Company's internal organs and serves as a liaison connecting the Company with regulators, shareholders, the media, and other external stakeholders. In addition, the Corporate Secretary performs corporate secretarial functions and ensures the Company's compliance with prevailing regulations and GCG principles. The Corporate Secretary holds a strategic position in shaping and maintaining PTP's corporate image.

The Corporate Secretary also serves as a liaison officer and is responsible for executing the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The Corporate Secretary Division is led by a Senior Manager of Corporate Secretary.

CORPORATE SECRETARY STRUCTURE
Based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 dated February 29, 2024, regarding the Organizational Structure, Position Titles, and Job Descriptions at the Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the organizational structure of the Corporate Secretary Division at PTP Terminal Nonpetikemas is as follows:

CORPORATE SECRETARY PROFILE
In 2024, the position of Senior Manager of Corporate Secretary was held by Fiona Sari Utami, appointed pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.05/1/8/3/Rktk/Sdma/Plnd-24 concerning the Reassignment of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).



Fiona Sari Utami

SM Sekretaris Perusahaan
Senior Manager of Corporate Secretary

1 Agustus 2024
August 1, 2024

Usia Age	37 Tahun per 31 Desember 2024 37 Years as of December 31, 2024
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Batusangkar, 7 Juli 1987 Batusangkar, July 7, 1987
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: Kp.10.05/1/8/3/Rktk/Sdma/Plnd-24 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.05/1/8/3/Rktk/Sdma/Plnd-24 concerning the Reassignment of Duties/Positions of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Pendidikan Education	S1 Ilmu Komunikasi-Public Relations, Universitas Padjajaran, Bandung (2009) S1 Ilmu Komunikasi-Public Relations, Universitas Padjajaran, Bandung (2009)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	• Sertifikasi Humas Manajerial, Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) (2018) • *International Corporate Communications* (3 bulan), Christelijke Hoogeschool Ede, University of *Applied Sciences* / Ede-Wageningen, Belanda (2016) • *Container Terminal Management*, Flanders *Government* / Antwerp, Belgia (2014) • *Port Management*, *Port of* Rotterdam / Medan (2014)
	• Managerial Public Relations Certification, National Professional Certification Agency (BNSP), Indonesia (2018) • International Corporate Communications (3-month program), Christelijke Hogeschool Ede – University of Applied Sciences, Ede-Wageningen, Netherlands (2016) • Container Terminal Management, Flanders Government / Antwerp, Belgium (2014) • Port Management, Port of Rotterdam / Medan, Indonesia (2014)
Pengalaman Kerja Career Experiences	• *Vice President Humas* dan Hubungan Antar Lembaga , PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-Agustus 2024) • *Public Relations Officer for* PT Pelabuhan Indonesia I (persero) (1 Februari 2016 – 09 Februari 2016) • *News Presenter (freelance),* Sindo TV Medan (2011-2014) • *News Reporter and Presenter for* ANTV dan Trans TV (2009-2010) • Vice President of Public Relations and Inter-Institutional Affairs, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016 – August 2024) • Public Relations Officer, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (February 1, 2016 – February 9, 2016) • News Presenter (Freelance), Sindo TV Medan (2011 – 2014) • News Reporter and Presenter, ANTV and Trans TV (2009 – 2010)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan, di antaranya:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Berkelanjutan (*Surtainability Report*) Perusahaan;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan pemangku kepentingan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities carried out by the Corporate Secretary include, but are not limited to, the following:

1. Ensuring the Company complies with disclosure requirements in accordance with the implementation of GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners or Supervisory Board on a regular basis and/or upon request;
3. Preparing and coordinating data and information necessary for the preparation of the Company's Annual Report and Sustainability Report;
4. Acting as a liaison officer with stakeholders;

5. Ketatausahaan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS;
6. Direksi wajib mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI

PTP Terminal Nonpetikemas memberikan dukungan kepada tim SDM yang tergabung dalam Sekretaris Perusahaan. Dukungan tersebut meliputi program pengembangan kompetensi seperti seminar, *workshop*, dan kegiatan lainnya. Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan dalam mengikuti perkembangan terkait dunia usaha, perubahan internal Perusahaan, serta regulasi yang relevan. Berikut pelatihan atau program peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan:

5. Managing and safeguarding the Company's administrative documents, including but not limited to the Special Register, Shareholder Register, and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS;
6. The Board of Directors is required to evaluate the performance quality of the Corporate Secretary function.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

PTP Terminal Nonpetikemas provides full support to the Human Capital team within the Corporate Secretary function. The support includes participation in competency development programs such as seminars, workshops, and other related activities. The objective of these programs is to enhance the Corporate Secretary's capabilities in keeping pace with developments in the business environment, internal organizational changes, and evolving regulatory frameworks. The following are training programs or competency development initiatives attended by the Corporate Secretary:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal Place/Date**	**Penyelenggara** Organizer
Fiona Sari Utami (SM Sekretaris Perusahaan| SM Corporate Secretary)	*Workshop*	Kegiatan *Business Leader upskilling for Great Performance* Business Leader Upskilling for Great Performance Activities	Medan, 4-6 Januari 2024 Medan, January 4-6, 2024	UPSKILLING
	Workshop	Pelatihan pemahaman dan pengukuran *Social Return on Investment* (SROI) Training on Understanding and Measuring Social Return on Investment (SROI)	Medan, 1 Februari 2024 Medan, February 1, 2024	PT OLAH KARSA
	Workshop	Pelatihan *Measurement Public Relation and Stakeholder Mapping* Measurement in Public Relations and Stakeholder Mapping Training	Medan, 2 Februari 2024 Medan, February 2, 2024	REPUTASIA
	Workshop	*Teamwork Makes The Dream Work*	Online, 15-16 Februari 2024 Online, February 15-16, 2024	PT PMLI
	Workshop	*Accelerated Leadership Program for* Pelabuhan (ALPI) *Cycle* 2	Jakarta dan Dubai, Oktober 24 - Mei 25 Jakarta and Dubai, October 2024 – May 2024	PT PMLI
	Workshop	Pelaksanaan E-*Learning* Penguatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK RI E-Learning on Understanding Gratification (by KPK RI)	Online, 13 -28 Juni 2024 Online, June 13-28, 2024	KPK
	Workshop	*Workshop Subject Matter Expert (SME) & Community of Practice* (CoP) Batch 5	Jakarta, 16 - 18 Juli 2024 Jakarta, July 16-18, 2024	PT PMLI
	Workshop	Pelatihan Program "*Leader as a Coach*" "Leader as a Coach" Program	Online 3 Juni - 3 Agustus 2024 Online, June 3 - August 3, 2024	PT PMLI

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal Place/Date**	**Penyelenggara** Organizer
Fiona Sari Utami (SM Sekretaris Perusahaan| SM Corporate Secretary)	*Workshop*	Peltihan Kehumasan Public Relations Training	Jakarta, 25 Oktober 2024 dan 25 November 2024 Jakarta, October 25, 2024 and November 25, 2024	PERHUMAS
	Workshop	Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301 ISO 37301 Compliance Management Training	Jakarta, 28 September 2024 Jakarta, September 28, 2024	PTP Terminal Nonpetikemas
	Workshop	HR Expo	Jakarta, 11-12 Desember 2024 Jakarta, December 11-12, 2024	PT INTI PESAN
	Sertifikasi Certification	*Media Relations Advisor*	Jakarta, 12 Desember 2024 Jakarta, December 12, 2024	BNSP
	Sertifikasi Certification	*Digital Brand And Reputation Manager & Media Relations Advisor*	Jakarta, 12 Desember 2024 Jakarta, December 12, 2024	BNSP
	Sertifikasi Certification	*Managerial Public Relations*	Jakarta, 12 Desember 2024 Jakarta, December 12, 2024	BNSP
	Sertifikasi Certification	*Strategic Public Relations Advisor*	Jakarta, 12 Desember 2024 Jakarta, December 12, 2024	BNSP

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan sejumlah kegiatan sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Direksi setiap bulan
2. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional bersama SPMT
3. Menyelenggarakan Ceo *Talk*
4. Menyelenggarakan Ulang Tahun Perusahaan ke-10
5. Menyelenggarakan lomba internal Perusahaan
6. Mengelola social media Perusahaan
7. *Sponshorship/Advertorial*
8. Berpartisipasi dalam *awarding*
9. Menerbitkan 48 rilis dengan jumlah total berita 479 berita dan pemberitaan Perusahaan
10. Media Port Visit
11. Media *gatering/meeting*
12. Melakukan *Assessment* GCG
13. Menyusun *Annual Report* dan *Sustainability Report*
14. Menyelenggarakan sosialisasi GCG, SMAP ISO 37001 dan Audit SMAP
15. Pengelolaan ASPUJA
16. Pengelolaan kendaraan dinas Direksi
17. Menyelenggarakan Kesekretariatan Direksi
18. Menyelenggarakan 16 (enam belas) Program TJSL
19. *Corporate Branding*

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY FUNCTIONS IN 2024

In carrying out its functions, the Corporate Secretary conducted various activities throughout 2024, including the following:

1. Organized monthly Board of Directors meetings
2. Held a National Work Meeting (Rakernas) in collaboration with SPMT
3. Conducted CEO Talk sessions
4. Organized the Company's 10th Anniversary celebration
5. Held internal company competitions
6. Managed the Company's social media accounts
7. Coordinated sponsorships /advertorials
8. Participated in corporate awards and recognition events
9. Issued 48 press releases, resulting in a total of 479 news coverages and media exposure
10. Organized a Media Port Visit
11. Hosted media gatherings/meetings
12. Conducted a GCG assessment
13. Prepared the Annual Report and Sustainability Report
14. Conducted socialization sessions on GCG, ISO 37001 SMAP, and SMAP audit
15. Managed ASPUJA (employee and official protocol affairs)
16. Managed executive service vehicles for the Board of Directors
17. Provided secretarial support for the Board of Directors
18. Implemented 16 (sixteen) TJSL/CSR programs
19. Led Corporate Branding initiatives

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM
INTERNAL AUDIT / INTERNAL AUDIT & LEGAL UNIT

Internal audit di PTP Terminal Nonpetikemas berada di bawah wewenang Satuan Pengawasan Internal & Hukum dengan tanggung jawab membantu Direksi dengan memberikan keyakinan dan konsultasi independen serta objektif. Fokusnya adalah pada peningkatan nilai tambah dan perbaikan operasional Perusahaan. Melalui pendekatan sistematis, Satuan Pengawas Internal & Hukum bertugas untuk mengevaluasi dan meningkatkan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan proses Tata Kelola Perusahaan. Tujuannya adalah mendukung Perusahaan dalam mencapai tujuan dengan pendekatan terdisiplin dan sistematis. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Kepala Satuan Pengawasan Internal & Hukum PTP Terminal Nonpetikemas dijabat oleh *Senior Manager* Pengawasan Internal & Hukum.

The internal audit function at PTP Terminal Nonpetikemas operates under the authority of the Internal Audit & Legal Unit, with the responsibility of supporting the Board of Directors by providing independent and objective assurance and consulting services. The function focuses on enhancing value and improving the Company's operations. Through a systematic approach, the Internal Audit & Legal Unit is tasked with evaluating and improving risk management, internal controls, and corporate governance processes. Its ultimate goal is to assist the Company in achieving its objectives through a disciplined and structured methodology that enhances the effectiveness of risk management, control, and good governance practices. The Internal Audit & Legal Unit is led by the Senior Manager of Internal Audit & Legal.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN *SENIOR MANAGER* PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM

Divisi Pengawasan Internal & Hukum dipimpin oleh SM Pengawasan Internal & Hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Perintah No.KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 tanggal 24 Desember 2024, Heru Susetyohadi diangkat sebagai Plh. *Senior Manager* Pengawasan Internal & Hukum.

PARTY RESPONSIBLE FOR THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE SENIOR MANAGER OF INTERNAL AUDIT & LEGAL

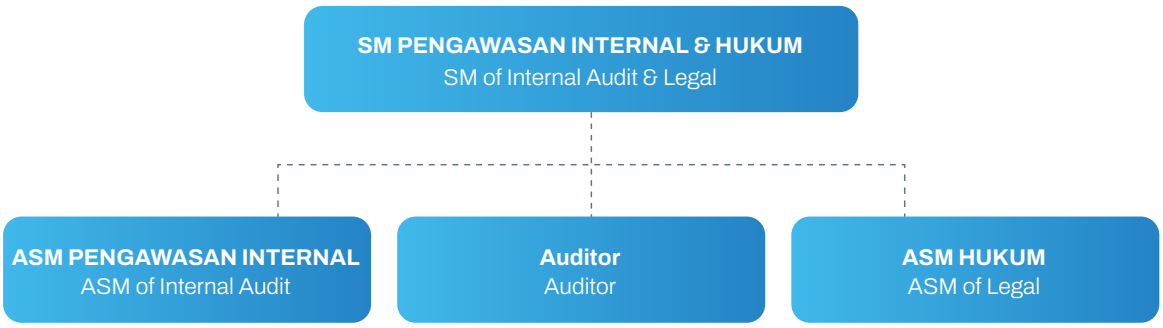
The Internal Audit & Legal Division is led by a Senior Manager of Internal Audit & Legal, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Pursuant to Instruction Letter No. KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 dated December 24, 2024, Heru Susetyohadi was appointed as the Acting Senior Manager of Internal Audit & Legal.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan Satuan Pengawas Internal dalam struktur organisasi berada di bawah Direktorat Utama. Dalam hal ini, *Senior Manager* sebagai pimpinan Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama.

POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT WITHIN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The position of the Internal Audit Unit in the organizational structure is under the Main Directorate. In this case, the Senior Manager as the chairman of the Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director. The Internal Audit Unit reports the results of the Company's internal audit directly to the President Director.



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM

PROFILE OF THE INTERNAL AUDIT & LEGAL UNIT



Heru Susetyohadi

Plh SM Pengawasan Internal & Hukum
Acting Senior Manager Internal Audit & Legal

27 Desember 2024
December 27, 2024

Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sleman, 11 Desember 1970 Sleman, December 11, 1970
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Plh SM Pengawasan Internal & Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 tanggal 24 Desember 2024 Appointed as Acting Senior Manager of Internal Audit & Legal based on Decree Number: KP.20.01/24/12/1/SDMA/DIKS/PTP-24 dated December 24, 2024.
Pendidikan Education	Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1995) Bachelor's Degree (S1) in Management, University of Gadjah Mada (1995)
Sertifikasi Profesi Professional Certifications	QIA Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) – Managerial Level
Pengalaman Kerja Work Experience	• Auditor Anak Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (Anak Perusahaan) (2021– sekarang) • *Vice President Treasury & Corporate Finance* PT Pelabuhan Tanjung Priok (Anak Perusahaan) (2020-2021) • Deputi *Vice President* Pusat Layanan Keuangan Pelanggan (2018-2020) • Deputi *General Manager* Keuangan dan SDM Cabang Teluk Bayur (2017-2018) • Keuangan dan Pajak PT IPC Terminal Petikemas (Anak Perusahaan) (2015-2017) • Subsidiary Auditor at PT Pelabuhan Tanjung Priok (Subsidiary) (2021–present) • Vice President of Treasury & Corporate Finance, PT Pelabuhan Tanjung Priok (Subsidiary) (2020–2021) • Deputy Vice President of Customer Financial Services Center (2018–2020) • Deputy General Manager of Finance and Human Resources, Teluk Bayur Branch (2017–2018) • Finance and Taxation Department, PT IPC Terminal Petikemas (Subsidiary) (2015–2017)

PEDOMAN PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka mendorong efektivitas pengawasan terhadap implementasi GCG, Satuan Pengawasan Internal & Hukum telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disusun dan disahkan pada tanggal 17 Juni 2022. Piagam tersebut mengatur tentang posisi Pengawasan Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personel, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Kode Etik Pengawasan Internal

Di dalam Piagam Audit Internal juga tercantum prinsip-prinsip dalam Kode Etik SPI seperti berikut:

1. Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.
2. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau

INTERNAL AUDIT CHARTER

In order to enhance the effectiveness of oversight related to the GCG implementation, the Internal Audit & Legal Unit has adopted an Internal Audit Charter, which was established and ratified on June 17, 2022. The charter outlines the authority and scope of the internal audit function within the Company, granting access to relevant documents, personnel, and property for audit assignments, and defining the scope of audit responsibilities.

Code of Conduct For Internal Audit

The Internal Audit Charter includes the following key principles of the Internal Audit Code of Conduct:

1. Internal auditors must demonstrate integrity, which forms the foundation of trust in their professional judgment.
2. Internal auditors must exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the processes or activities being examined.

proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
3. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
4. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

ATURAN PERILAKU

Auditor Internal:

1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
5. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
6. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
7. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.
8. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
9. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
10. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
11. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
12. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian Internal, dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko (*risk based audit*) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.
3. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan program kerja dimaksud dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit pada saatpartnership.
4. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan.
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan Perusahaan.

They must make balanced assessments on relevant matters and remain free from personal and external influence .

3. Internal auditors must respect the value and ownership of information received and must not disclose it without proper authorization, unless legally or professionally required.
4. Internal auditors must apply the necessary knowledge, skills, and experience in delivering internal audit services.

RULES OF CONDUCT

Internal auditors must:

1. Perform their duties honestly, diligently, and responsibly.
2. Comply with laws and make disclosures as required by law or the profession.
3. Not knowingly participate in illegal activities or any actions that may discredit the profession or organization.
4. Support and respect legitimate and ethical objectives of the organization.
5. Avoid participation in activities or relationships that could impair, or be perceived to impair, their unbiased judgment particularly activity or relation that present conflicts of interest to the Company interest.
6. Not accept anything that could impair, or appear to impair, their professional judgment.
7. Disclose all material facts known to them that could distort the reporting of activities under review.
8. Exercise prudent principle in using and safeguarding information obtained during audits.
9. Not use information for personal gain or in a manner that violates the law or harms the organization's legitimate and ethical objectives.
10. Only provide services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.
11. Conduct internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
12. Continuously improve their proficiency, effectiveness, and quality of services

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

1. Evaluating the adequacy and effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance.
2. Preparing the Annual Audit Work Plan (PKPT) using a risk-based audit approach, and submitting it to the Board of Commissioners via the Audit Committee for review and recommendations.
3. Implementing the Annual Audit Work Plan (PKPT) as approved by the President Director, with the work plan communicated to the Board of Directors and the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee during the partnership stage.
4. Maintaining auditor professionalism through appropriate training, certification, and relevant experience.
5. Providing objective recommendations and insights on audited activities across all Company units.

6. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Melakukan audit khusus atas aktivitas yang terindikasi kecurangan (*fraud*) dan/atau karena sebab lain berdasarkan perintah Direksi dan melaporkan hasil audit tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
8. Melakukan rapat koordinasi secara periodik dengan Komite Audit.
9. Membuat program penilaian untuk mengevaluasi mutu pelaksanaan audit yang dilakukan.
10. Berkoordinasi dengan auditor eksternal.
11. Memonitor, menganalisis dan melaporkan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM

Meningkatkan kualitas individu dalam Satuan Pengawasan Internal & Hukum menjadi prioritas utama, karena hal ini akan memperkuat kemampuan dan profesionalisme secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja Satuan Pengawasan Internal & Hukum dengan memastikan bahwa SDM yang kompeten ditempatkan di dalam Divisi Satuan Pengawasan Internal & Hukum. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan memperkuat fondasi Satuan Pengawasan Internal & Hukum dan memastikan efektivitasnya dalam menjalankan tugas pengawasan.

Pada tahun 2024, Satuan Pengawasan Internal & Hukum memiliki 11 Personil (diantaranya, 1 orang ASM, 2 orang Auditor Utama, 4 orang Junior Auditor, 2 orang Assisten Auditor dan 2 orang Administrator).

6. Reporting audit findings directly to the President Director and the Board of Commissioners.
7. Conducting special audits on suspected fraud and or other matters upon request from the Board of Directors and reporting the results accordingly to the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. Holding periodic coordination meetings with the Audit Committee.
9. Developing evaluation programs to assess the quality of audit execution.
10. Coordinating with external auditors.
11. Monitoring, analyzing, and reporting the follow up on audit findings, both internal and external and communicating results to the President Director with copies to the Board of Commissioners via the Audit Committee.

HUMAN CAPITAL OF THE INTERNAL AUDIT & LEGAL UNIT

Enhancing the quality of personnel within the Internal Audit & Legal Unit is a top priority, as it strengthens the unit's overall capability and professionalism. The Company is therefore committed to continuously improving the performance of this unit by ensuring that competent and qualified human capital are assigned to the Internal Audit & Legal Division. These efforts aim to reinforce the foundation of the Internal Audit and Legal unit and ensure its effectiveness in carrying out audit and supervisory functions.

As of 2024, the Internal Audit & Legal Unit consisted of 11 personnel, comprising of 1 ASM, 2 Lead Auditors, 4 Junior Auditors, 2 Assistant Auditors, and
2 Administrative Staff.

Heru Susetyohadi Auditor Utama yang merangkap sebagai Plh. SM Pengawasan Internal & Hukum Principal Auditor also serves as Acting SM Internal Audit & Legal	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1) Managemen, UGM 1995 Bachelor of Management, University of Gadjah Mad, 1995
Pengalaman Kerja Career Experience	• Staf Keuangan (1995-2005) • Asman Anggaran Akuntansi (2005-2007) • Auditor (2007-2012) • Manager Keuangan Pontianak (2012-2015) • Manager Keuangan IPC TPK (2015-2017) • Manager Keuangan & SDM Teluk Bayur (2017-2018) • DVP Pusat Layanan Keuangan Pelanggan (2018-2020) • VP Treasury PTP (2020-2021) • Auditor Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-sekarang) • Finance Staff (1995–2005) • Assistant Manager of Budget & Accounting (2005–2007) • Auditor (2007–2012) • Finance Manager Pontianak (2012–2015) • Finance Manager IPC TPK (2015–2017) • Finance & HC Manager Teluk Bayur (2017–2018) • Deputy Vice President Customer Financial Services Center (2018–2020) • Vice President of Treasury PTP (2020–2021) • Lead Auditor PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021–present)
Doni Restindia Chandra Auditor Utama Lead Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian

Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana (S1) Akuntansi, Universitas Andalas, 2003 • Magister (S2) Hukum, Universitas Gajah Mada, 2010 • Bachelor of Accounting, University of Andalas, 2003 • Master of Law, University of Gadjah Mada, 2010
Pengalaman Kerja Career Experience	• *Junior Specialist* PT Pelabuhan Tanjung Priok (2019-2021) • Auditor Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-sekarang) • Junior Specialist, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2019-2021) • Lead Auditor, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-present)

Arie Wibowo ASM Pengawasan Internal ASM Internal Audit	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1) Universitas Trisakti, 2010 Bachelor's Degree, University of Trisakti, 2010
Pengalaman Kerja Career Experience	• *Senior Officer* Sistem Informasi (2014-2018) • SM Akuntansi Pajak dan Sistem Informasi PT PII (2018-2020) • *Senior Officer* Akutansi dan Pajak (2020-2021) • ASM Akutansi Pajak (2021-2022) • *Senior Officer* Pengawasan Internal (2022-2024) • ASM Pengawasan Internal (2024) • Senior Information Systems Officer (2014–2018) • Senior Manager of Tax Accounting and Information Systems PT PII (2018–2020) • Senior Officer of Accounting and Tax (2020–2021) • Assistant Senior Manager of Tax Accounting (2021–2022) • Senior Officer of Internal Audit Unit (2022–2024) • Assistant Senior Manager of Internal Audit (2024)

Ronny Simanjuntak Auditor Muda Junior Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1) Universitas Bina Nusantara, 2023 Bachelor's Degree, University of Bina Nusantara, 2023
Pengalaman Kerja Career Experience	• Pelks. Pelayanan Gudang & Lapangan Senior (1999) • Plk. Pely. Gudang dan Lapangan Senior (2001) • Plks.Perenc.Kapal/Lapangan Senior Div.UTPK (2001) • Pelaks Koord. Perenc.& Pengend. Kapal dan Lapangan (2005) • Pj. Supervisor Adm. Pelayanan Jasa (2008) • Spv. Administrasi Pelayanan Jasa (2009) • Spv. Administrasi Dan Tata Usaha Pelayanan Operasi (2010) • Ass. *Manager* Perencanaan & Pengendalian Cabang Pelabuhan Palembang (2014-2018) • Ass. *Manager* Perencanaan & Pengendalian Cabang Pelabuhan Panjang (2018-2019) • DGM Adm Pemanduan (2019-2021) • DM Operasi & Tekhnik wilayah II (2021-2022) • *Junior* Auditor (2022- Januari 2024) • *Branch Manager* Pontianak (Februari 2024-Agustus 2024 • Junior Auditor (September 2024 – sekarang)
	• Senior Warehouse & Yard Services Executive (1999) • Senior Warehouse and Yard Services Executive (2001) • Senior Ship/Yard Planning Officer, UTPK Division (2001) • Coordinator for Ship and Yard Planning & Control (2005) • Acting Service Administration Supervisor (2008) • Service Administration Supervisor (2009) • Supervisor of Administration and Business Operations Services (2010) • Assistant Manager of Planning & Control, Palembang Port Branch (2014–2018) • Assistant Manager of Planning & Control, Panjang Port Branch (2018–2019) • Deputy General Manager of Pilotage Administration (2019–2021) • Deputy Manager of Operations & Engineering, Region II (2021–2022) • Junior Auditor (2022 – January 2024) • Branch Manager, Pontianak (February 2024 – August 2024) • Junior Auditor (September 2024 – Present)

Ida Pitarti Auditor Muda Junior Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, 1995 Bachelor's Degree, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, 1995
Pengalaman Kerja Career Experience	• Pelks. Tu Kantoran (1998-1999) • Pelks.Adm. Umum Junior, Adm Umum Dan Rumah Tangga (1999-2002) • Pel. Adm. Pukk. Senior (2002-2003) • Pel. Pukk. Junior (2003-2005) • Pel. Pukk. Senior (2005-2009) • Pel. Koor. Administrasi & Keuangan Terminal I (2009-2010) • Spv. Adm. & Keuangan Terminal I Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2010-2015) • *Deputy Manager* Pendukung Operasi Cabang Tanjung Priok • Junior Auditor (2023-sekarang) • Office Administration Executive (1998-1999) • Junior General Administration, General Administration and Housekeeping Executive (1999-2002) • Executive Adm. Pukk. Senior (2002-2003) • Junior Pukk Executive (2003-2005) • Senior Pukk Executive (2005-2009) • Terminal I Administration & Finance Coordinator (2009-2010) • Spv. Adm. & Finance Terminal I Tanjung Priok Port Branch (2010-2015) • Deputy Manager of Operations Support at Tanjung Priok Branch • Junior Auditor (2023-present)

Meyudilah Afrin Auditor Muda Junior Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1), Universitas Sriwijaya 2005 Magister (S2), Universitas Muhammadiyah 2008 Bachelor's Degree, University of Sriwijaya – 2005 Master's Degree, University of Muhammadiyah – 2008
Pengalaman Kerja Career Experience	• Asmen Umum & Pengadaan (2010-2016) • Kepala Usaha Terminal Pelabuhan Palembang (2016-2017) • Ass. DGM Operasi Umum Cabang Pelabuhan Palembang (2017-2018) • Ass. DGM Operasi Umum Cabang Pelabuhan Panjang (2018-2019) • *General Manager* PTP Cabang Bengkulu (2019-2021) • *Branch Manager* PTP Cabang Panjang (2021-2022) • *Branch Manager* PTP Cabang Palembang (2022-2024) • *Junior* Auditor (Februari 2024-sekarang) • Assistant Manager of General Affairs & Procurement (2010–2016) • Head of Terminal Operations Palembang Port (2016–2017) • Assistant to DGM of General Operations Palembang Branch (2017–2018) • Assistant to DGM of General Operations Panjang Branch (2018–2019) • General Manager PTP Bengkulu Branch (2019–2021) • Branch Manager PTP Panjang Branch (2021–2022) • Branch Manager – PTP Palembang Branch (2022–2024) • Junior Auditor (February 2024 – present)

Richa Astralila Auditor Muda Junior Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana (S1) Universitas Tanjung Pura Bachelor's Degree, Tanjung Pura University

Pengalaman Kerja Career Experience	• Supervisor Pengadaan Regional 2 Pontianak (2021-2022) • DM Pendukung Operasi PTP Cabang Pontianak (2022-2024) • Junior Auditor (2024) • Junior Analyst PTP Cabang Pontianak (2025) • Supervisor Procurement Regional 2 Pontianak (2021-2022) • Operations Support DM PTP Pontianak Branch (2022-2024) • Junior Auditor (2024) • Junior Analyst, PTP Pontianak Branch (2025)

Aris Petrus Maure Asisten Auditor Assistant Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	SMA Saribuana - Panakkupang Ujung Pandang, 1994 Saribuana Senior Highschool – Panakkukang, Ujung Pandang 1994
Pengalaman Kerja Career Experience	• Pelks. Adm Usaha Terminal Junior (1999-2008) • PEL. Pelayanan Bongkar Muat Senior (2009-2013) • Kepala Kawasan Muara Sabak dan Kuala Tungkal Cabang Pelabuhan Jambi (2014-2019) • DM Pendukung Operasi PTP Cabang Palembang (2019-2020) • DM Operasi Bongkar Muat PTP Cabang Panjang (2020-2021) • DM Operasi dan Teknik PTP Cabang Cirebon (2021-2023) • ASM Pengawasan Internal dan Hukum PT Pelabuhan Tanjung Priok (2023-2024) • Asisten Auditor PT PTP, 01 Februari 2024 samapai sekarang. • Junior Terminal Business Administration Executive (1999–2008) • Senior Loading and Unloading Services Executive (2009–2013) • Head of Muara Sabak and Kuala Tungkal Area Jambi Branch (2014–2019) • Deputy Manager of Operations Support Palembang Branch (2019–2020) • Deputy Manager of Loading and Unloading Operations Panjang Branch (2020–2021) • Deputy Manager of Operations & Engineering Cirebon Branch (2021–2023) • ASM of Internal Audit Unit & Legal PT Pelabuhan Tanjung Priok (2023–2024) • Assistant Auditor PT PTP (February 1, 2024 – Present)

Kustanto Wibowo Assisten Auditor Assistant Auditor	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	Diploma 3, 2021 Diploma 3, 2021
Pengalaman Kerja Career Experience	• Pelks. Pranota pada Subdin TU (1996-1998) • Pelks. Administrasi Pelayanan Jasa (1999-2002) • SPV Rendal Kapal & Barang (2002-2009) • SPV Administrasi Terminal Petikemas (2009-2010) • SVP Anggaran Cabang Pelabuhan Pontianak (2010-2014) • *Chief Manager* Perintis Ketapang (2017-2018) • *Junior Analyst* PTP (2021-2022) • *Branch Manager* PTP Pontianak (2022-2024) • *Assisten* Auditor (2024-sekarang) • Subdivision Administration Executive- General Administration (1996–1998) • Service Administration Executive (1999–2002) • Supervisor of Vessel & Cargo Scheduling (2002–2009) • Supervisor of Container Terminal Administration (2009–2010) • Senior Vice President of Budget Pontianak Branch (2010–2014) • Chief Manager Ketapang Pioneer Services (2017–2018) • Junior Analyst PTP (2021–2022) • Branch Manager PTP Pontianak (2022–2024) • Assistant Auditor (2024–Present)

Muchammad Reza Hazairin Senior Adm. Pengawasan Internal Senior Administrator of Internal Audit	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	SMK Muhammadiyah 12, 2014 Vocational High School Muhammadiyah 12, 2014

Pengalaman Kerja Career Experience	• Operator RTGC yang Diperbantukan pada PT Jakarta International Container Terminal (September 2014-Juni 2017) • *Senior* Administrator Operasi Umum Cabang Cirebon (Juni 2017 Juni 2019) • Operator Alat Angkat/Angkut Bongkar Muat Cirebon PTP Multipurpose-Cabang Cirebon (Juli 2019-November 2020) • *Senior* Administrator Pengawasan Internal (2020-sekarang) • RTGC Operator Assigned to PT Jakarta International Container Terminal (Sep 2014 – Jun 2017) • Senior Administrator of General Operations Cirebon Branch (Jun 2017 – Jun 2019) • Equipment Operator for Loading and Unloading PTP Multipurpose, Cirebon Branch (Jul 2019 – Nov 2020) • Senior Administrator of Internal Supervision (2020–Present)

Kurniadi Pangaribowo Administrator Pengawasan Internal Internal Audit Administrator	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Riwayat Pendidikan Education Background	SMAN 100 Jakarta 2004 Senior High School 100, Jakarta (2004)
Pengalaman Kerja Career Experience	• Junior Off Adm. Kesejahteraan SDM Kantor Pusat (2021-2022) • Compensation & Benefit Team Member 1 (2022-2023) • Adm. Pelayanan SDM (2023-2024) • Adm. Pengawasan Internal (September 2024-sekarang) • Junior Officer HC Welfare Administration, Head Office (2021-2022) • Compensation & Benefits Team Member 1 (2022-2023) • HC Services Administration (2023-2024) • Internal Audit Administration (September 2024-present)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL & HUKUM

PTP Terminal Nonpetikemas memberikan dukungan kepada tim SDM yang tergabung dalam Satuan Pengawasan Internal & Hukum. Dukungan tersebut meliputi program pengembangan kompetensi seperti seminar, workshop, dan kegiatan lainnya. Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi Satuan Pengawasan Internal & Hukum dalam mengikuti perkembangan terkait dunia usaha, perubahan internal Perusahaan, serta regulasi yang relevan. Berikut pelatihan atau program peningkatan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Internal & Hukum:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE INTERNAL AUDIT & LEGAL UNIT

PTP Terminal Nonpetikemas provides continuous support to the human capital team within the Internal Audit & Legal Unit. This support includes participation in various competency development programs such as seminars, workshops, and other professional activities. These programs are designed to enhance the capabilities of the unit in keeping pace with developments in the business environment, internal organizational changes, and relevant regulatory frameworks. The following are training sessions or competency development programs attended by the Internal Audit & Legal Unit:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Doni Restindia Chandra Plh. SM Pengawasan Internal & Hukum Acting SM Internal Audit & Legal	Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Management Officer Analyst* (QRMA)	Jakarta, 19 - 21 Juni 2024 Jakarta, June 19-21, 2024	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)
	Workshop	Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301 Compliance Management Training based on ISO 37301	Jakarta, 26 September 2024 Jakarta, September 26, 2024	Sucofindo
Heru Susetyohadi Plh. SM Pengawasan Internal & Hukum Acting SM Internal Audit & Legal	Pelatihan Training	*Anti Briberry Management System based on* ISO 37001:2016	Jakarta, 26 - 27 Maret 2024 Jakarta, March 26-27, 2024	BSI Training Academy
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Brevet Pajak Tax Brevet Certification	Jakarta, 4 Juni 2024 - 4 September 2024 Jakarta, June 4, 2024 - September 4, 2024	Taxsam.co

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Arie Wibowo ASM Pengawasan Internal Senior Officer Internal Audit	Pelatihan Training	*Anti Briberry Management System based on* ISO 37001:2016	Jakarta, 26 - 27 Maret 2024 Jakarta, March 26-27, 2024	BSI Training Academy
	Pelatihan Training	*Training Knowledge Management*	Jakarta, 13 Juni 2024 Jakarta, June 13, 2024	KMPlus
	Workshop	Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301 Compliance Management Training based on ISO 37301	Jakarta, 26 September 2024 Jakarta, September 26, 2024	Sucofindo
Ronny Simanjuntak Junior Auditor Junior Auditor	Sertifikasi Certification	Sertifikasi PFSO - ISPS Code PFSO Certification – ISPS Code	Bandung, 15 - 16 Februari 2024 Bandung, February 15-16, 2024	Donpro
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Brevet Pajak Tax Brevet Certification	Jakarta, 4 Juni 2024 - 4 September 2024 Jakarta, June 4, 2024-September 4, 2024	Taxsam.co
Ida Pitarti Junior Auditor Junior Auditor	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Brevet Pajak Tax Brevet Certification	Jakarta, 4 Juni 2024 - 4 September 2024 Jakarta, June 4, 2024-September 4, 2024	Taxsam.co
Meyudilah Afrin Junior Auditor Junior Auditor	Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Auditor Certification	Jakarta, 22 April 2024 – 06 Mei 2024 Jakarta, April 22, 2024-May 06, 2024	YPIA
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA Certification	Jakarta, 24 Juni 2024 – 6 Juli 2024 Jakarta, June 24, 2024-July 4, 2024	YPIA
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA Certification	Jakarta, 18 – 27 November 2024 Jakarta, November 18-27, 2024	YPIA
Kustanto Wibowo Assisten Auditor Assistant Auditor	Sertifikasi Certification	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA Certification	Jakarta, 24 Juni 2024 – 6 Juli 2024 Jakarta, June 24, 2024- July 6, 2024	YPIA
Muchammad Reza Hazairin Senior Adm. Pengawasan Internal Senior Administrator of Internal Audit	Pelatihan Training	*Anti Briberry Management System based on* ISO 37001:2016	Jakarta, 25 - 27 Maret 2024 Jakarta, March 25-27, 2024	BSI Training Academy
	Pelatihan Training	*Training Knowledge Management*	Jakarta, 13 Juni 2024 Jakarta, June 13, 2024	KMPlus

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Dalam meningkatkan keahlian dan kualitas kinerja, Satuan Pengawasan Internal & Hukum telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

To enhance expertise and performance quality, the Internal Audit & Legal Unit holds the following professional audit certifications:

Nama Name	Sertifikasi Certifications
Doni Restindia Chandra	*Qualified Risk Management Officer Analyst* (QRMA), Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301 Qualified Risk Management Officer Analyst (QRMA), Compliance Management Training based on ISO 37301
Heru Susetyohadi	*Risk Base* Internal Audit dan ISO 37001:2016 dan Brevet Pajak Risk Based Internal Audit, ISO 37001:2016, Tax Brevet

Nama Name	Sertifikasi Certifications
Arie Wibowo	Pelatihan Manajemen Kepatuhan ISO 37301, *Risk Base* Internal Audit, ISO 37001:2016 dan *Training Knowledge Management* Compliance Management Training (ISO 37301), Risk-Based Internal Audit, ISO 37001:2016, and Knowledge Management Training
Ronny Simanjuntak	PFSO - ISPS Code dan Brevet Pajak PFSO - ISPS Code and Tax Brevet
Ida Pirarti	Brevet Pajak Tax Brevet
Meyudilah Afrin	*Qualified Internal Audit* (QIA) Tingkat Dasar, QIA Tingkat Lanjutan dan QIA Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) Basic, Advanced, and Managerial Levels
Aris Petrus Maure	Belum memiliki sertifikasi Audit No audit certification yet
Kustanto Wibowo	QIA Tingkat Dasar QIA Basic Level
Muchammad Reza Hazairin	*Risk Base Internal Audit* dan ISO 37001:2016 dan *Training Knowledge Management* Risk Based Internal Audit, ISO 37001:2016, and Knowledge Management Training

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI RAPAT DENGAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU RISIKO, DAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2024, Satuan Pengawasan Internal & Hukum mengadakan rapat/pertemuan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali. Berikut pelaksanaan rapat dan peserta rapat Satuan Pengawas Internal.

POLICY AND FREQUENCY OF MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEE, RISK MONITORING COMMITTEE, AND NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In 2024, the Internal Audit & Legal Unit held a total of 37 (thirty-seven) meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The following table outlines the meetings conducted and the respective participants from the Internal Audit Unit:

Rapat Satuan Pengawasan Internal & Hukum
Meeting of Internal Audit and Legal Unit

No	Nama Rapat Meeting Name	Jumlah Rapat Total Meetings
1	Rapat koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Coordination Meeting with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee	12
2	*Entry Meeting Audit*	12
3	*Exit Meeting Audit*	12
4	Pembahasan Laporan Kegiatan Tahunan dan PKPT 2024 Discussion on 2024 Annual Activity Report and Annual Audit Work Plan (PKPT)	1
Jumlah Rapat Total Meetings		37

Rekapitulasi Kehadiran Satuan Pengawasan Internal & Hukum pada Rapat
Attendance Recapitulation of the Internal Audit & Legal Unit in Meetings

No	Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Hadir Presence	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
1	Doni Restindia Chandra	37	26	70%
2	Heru Susetyohadi	37	29	78%
3	Arie Wibowo	37	29	78%
4	Ronny Simanjuntak	7	6	86%
5	Ida Pirarti	37	25	68%
6	Meyudilah Afrin	28	20	71%

Rekapitulasi Kehadiran Satuan Pengawasan Internal & Hukum pada Rapat
Attendance Recapitulation of the Internal Audit & Legal Unit in Meetings

No	Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Hadir Presence	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
7	Aris Petrus Maure	37	23	62%
8	Kustanto Wibowo	28	20	71%
9	Muchammad Reza Hazairin	37	27	73%
Rata-Rata (%) Average 9%)				73%

PELAKSANAAN TUGAS INTERNAL AUDIT TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Internal Audit telah merealisasikan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan Jasa *Assurance*
2. Mengevaluasi kinerja dan kepatuhan Perusahaan
3. Pemeriksaan khusus atau Audit Investigasi (atas permintaan Direktur Utama)
4. Memberikan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan saran perbaikan yang dibutuhkan oleh Manajemen.

INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2024

In 2024, the Internal Audit Unit carried out the following duties and activities:

1. Provided Assurance Services
2. Evaluated the Company's performance and compliance
3. Conducted special audits or investigative audits (upon request by the President Director)
4. Delivered consulting services to provide added value and improvement recommendations as needed by management.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan Governansi, karena dapat mendorong Perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Seluruh Manajemen dan pegawai PTP Terminal Nonpetikemas memiliki peran dan tanggung jawab memastikan penerapan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian internal yang andal dan efektif. Perusahaan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.

The Internal Control System is a critical component in the Governance, as it promotes transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and credibility within the Company. All management and employees of PTP Terminal Nonpetikemas play a role in ensuring the effective and reliable application of internal controls. The Company continuously monitors the effectiveness of its internal control system in response to changing internal and external conditions.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan memiliki Pedoman sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.56/6/6/1/AUDITPTP-17 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tepat dapat membantu manajemen dalam mengelola bisnisnya secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurangi risiko terjadinya kerugian.

Dalam wilayah Perusahaan, implementasi sistem pengendalian internal mencakup semua aspek kegiatan, baik yang bersifat operasional maupun keuangan. Tujuan utama sistem pengendalian internal adalah untuk memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat:

1. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

INTERNAL CONTROL GUIDELINES

The Company has established formal Internal Control Guidelines under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.56/6/6/1/AUDITPTP-17 dated June 6, 2017, regarding the General Guidelines for Internal Control Systems within PT Pelabuhan Tanjung Priok. An effective internal control system supports management in conducting business operations in an efficient, effective, and economical (3E) manner, securing the Company's investments and assets, ensuring reliable financial reporting, enhancing compliance with laws and regulations, and mitigating the risk of losses.

Within the Company, the internal control system is implemented across all aspects of activities, both operational and financial. The primary objective of the internal control system is to provide assurance that all activities carried out within the Company are able to:

1. Ensure all business operations comply with applicable laws and regulations;

2. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, dan tepat waktu;
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

KERANGKA KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perusahaan mengacu pada standar internasional, yaitu COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework*. Kerangka ini menggambarkan sistem pengendalian internal dalam 5 (lima) komponen utama untuk mengatur konsep pengendalian internal di PTP Terminal Nonpetikemas, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian.
   Menciptakan sebuah komitmen bersama terhadap tanggung jawab, kompetensi, integritas, dan nilai-nilai Perusahaan serta membentuk struktur, pembagian tugas, tanggung jawab yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka membentuk lingkungan pengendalian dari level unit bisnis sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris (*control environment*).
2. Penilaian Risiko.
   Identifikasi dan penilaian terhadap kemungkinan munculnya *fraud* dan risiko (*risk assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian.
   Merancang dan mengembangkan aktivitas pengendalian dan kontrol terhadap teknologi secara keseluruhan melalui kebijakan dan prosedur (*control activities*).
4. Informasi dan Komunikasi.
   Mengembangkan dan mengontrol sistem akuntansi, informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi Perusahaan (*information and communication*).
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal.
   Melakukan evaluasi dan kontrol secara terus-menerus serta mengkomunikasikan setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan (*monitoring activities*).

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perusahaan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Melalui organ organ utama maupun organ pendukung yang ada, Perusahaan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Pengendalian internal pada aspek operasional, meliputi upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, melakukan *update* berkala atas seluruh kebijakan, prosedur dan sistem operasional yang berlaku di Perusahaan agar dapat menggambarkan kegiatan operasional yang aktual. Penerapan pengendalian operasional bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan prosedur atau kebijakan internal yang berlaku.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan telah menindaklanjuti pemenuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-

2. Provide accurate, complete, and timely financial and management information;
3. Improve efficiency, effectiveness, and economy in operational activities.

INTERNAL CONTROL SYSTEM FRAMEWORK

The internal control system implemented by the Company refers to the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework. The Framework outlines 5 (five) key components that form the basis of internal control at PTP Terminal Nonpetikemas, including:

1. Control Environment
   Establishes a shared commitment to responsibility, competence, integrity, and corporate values, while defining a clear and accountable structure of roles and responsibilities from the business unit level up to the Board of Directors and Board of Commissioners (control environment).
2. Risk Assessment
   Involves the identification and assessment of potential risks and fraud (risk assessment).
3. Control Activities
   Encompasses the design and implementation of control measures, including technology controls, policies, and procedures (control activities)
4. Information and Communication
   Focuses on developing and controlling internal and external information and communication systems that deliver relevant information to support decision-making.
5. Monitoring Activities
   Entails continuous evaluation of the internal control system and communication of areas requiring improvement or corrective action.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROLS, AND COMPLIANCE WITH REGULATIONS

The financial aspect of the internal control system aims to ensure the accuracy of financial information, the efficiency and effectiveness of corporate management processes, and compliance with prevailing laws and regulations. Through both its primary and supporting organs, the Company ensures that every business activity complies with prevailing statutory and regulatory requirements. The Board of Directors is responsible for establishing an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets.

Internal Control in regards of operational controls are designed to improve business efficiency and involve regular updates to all policies, procedures, and operational systems to ensure alignment with current operational practices. The application of operational controls ensures consistency between actual business practices and the Company's established internal policies and procedures.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company has followed up on the implementation of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of

2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK. 01/29/12/4/SPGI/UTMA/PLND-22 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/8/9/1/MRIO/UTMA/PLND-23 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta sebagai tindak lanjut dari *Area of Improvement* (AoI) atas hasil *assessment Risk Maturity Index* (RMI) PT PTP Tahun 2023 dimana Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan atau disebut pula dengan *internal control testing* yang dilakukan oleh lini kedua.

Internal control testing dilakukan dalam rangka menguji kehandalan pengendalian *intern* dalam mendukung pencapaian target RKAP. Hasil atas *internal control testing* tersebut dan langkah perbaikan yang telah dilakukan kemudian dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Manajemen Risiko kepada Pemegang Saham secara Triwulanan dan Tahunan.

Internal control testing dapat diartikan sebagai upaya menguji kehandalan prosedur-prosedur dan proses-proses yang dijalankan oleh Perusahaan untuk melindungi aset Perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan dalam kaitan untuk mencapai target RKAP.

Prosedur/proses yang akan diuji melalui *internal control testing* adalah prosedur/proses yang merupakan alat pengendalian intern dalam rangka pengelolaan risiko unit kerja dan/atau risiko signifikan perusahaa. Prosedur/proses dimaksud merupakan alat pertama dan utama bagi unit kerja dalam mengelola atau mengendalikan risiko sebelum melakukan upaya-upaya tambahan melalui perlakuan risiko (Mitigasi Risiko). Skor kualitas penerapan manajamen risiko (KPMR) adalah 85,80 (artinya memiliki kualitas penerapan manajemen risiko *Satisfactory*).

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Governansi dijalankan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Salah satu implementasi Governansi adalah memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan tepat. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan selama tahun 2024 telah memadai dan digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal Perusahaan.

Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as, Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/29/12/4/SPGI/UTMA/PLND-22 on the General Guidelines for the Internal Control System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/8/9/1/MRIO/UTMA/PLND-23 on the Implementation of Risk Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The initiative also serves as a follow-up to the Area of Improvement (AoI) identified in the 2023 Risk Maturity Index (RMI) assessment of PT PTP, where the Company is required to conduct a Self-Assessment on the Implementation of the Internal Control System, also referred to as internal control testing, carried out by the second line of defense.

Internal control testing is conducted to assess the reliability of internal controls in supporting the achievement of the Company's RKAP) targets. The results of the internal control testing, along with any corrective actions taken, are reported as part of the Risk Management Report to the shareholders on a quarterly and annual basis.

Internal control testing is defined as an effort to evaluate the reliability of procedures and processes implemented by the Company to safeguard corporate assets, manage information accurately, and ensure compliance with laws and regulations, all in the process of achieving RKAP objectives.

The procedures and processes subject to testing are those that serve as internal control tools to manage risks at the business unit level and/or address significant corporate risks. These are considered the first and primary line of control for each unit prior to undertaking additional risk treatment measures (Risk Mitigation). The risk management implementation quality score (KPMR) is 85.80 (meaning it has a Satisfactory risk management implementation quality).

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners are fully committed to ensuring that governance is properly implemented to achieve the objective of safeguarding and enhancing the Corporate value. One of the key aspects of governance implementation is ensuring that the internal control system is adequately established and functioning. The Board of Directors is responsible for implementing an effective internal control system to support the achievement of the Company's objectives.

The Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, is responsible for overseeing the implementation of the internal control system as a whole, including monitoring the policies established by the Board of Directors in relation to internal controls. The internal control system is designed to manage and mitigate risks in a sound and appropriate manner. The Board of Directors and the Board of Commissioners declare that the Company's internal control system during the year 2024 was adequate and served its intended purpose in supporting the achievement of internal control objectives.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien menjadi salah satu aspek penunjang keberlanjutan Perusahaan. Oleh karenanya, Perusahaan menerapkan sistem secara terpadu, komprehensif, dan saling terintegrasi agar senantiasa dapat memberikan informasi dini tentang potensi risiko. Perusahaan senantiasa berupaya mengidentifikasi risiko baru serta mewaspadai kondisi internal maupun eksternal Perusahaan.

Perusahaan terus berupaya membangun kepekaan atau kepedulian karyawan (*risk awareness*) terhadap budaya risiko (*risk culture*). Budaya risiko menjadi semakin nyata pentingnya karena implementasi suatu sistem manajemen risiko meliputi tugas dalam operasional sehari-hari.

Untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan *risk owner* maka Perusahaan mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai manajemen risiko kepada unit-unit kerja.

The implementation of an effective and efficient risk management system is a key factor in supporting the Company's sustainability. Therefore, the Company applies a comprehensive, integrated, and systematic risk management approach to consistently provide early warnings of potential risks. The Company continues to identify emerging risks and remains vigilant toward both internal and external conditions.

The Company also strives to cultivate risk awareness among employees and strengthen a risk-aware culture throughout the organization. This risk culture is increasingly recognized as essential, as the implementation of risk management systems is embedded in day-to-day operational responsibilities.

To uphold its commitment and ensure that the risk culture policy is well understood and consistently applied by all management and risk owners, the Company regularly conducts education and socialization programs on risk management across all business units.

KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

JOINT COMMITMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



1.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

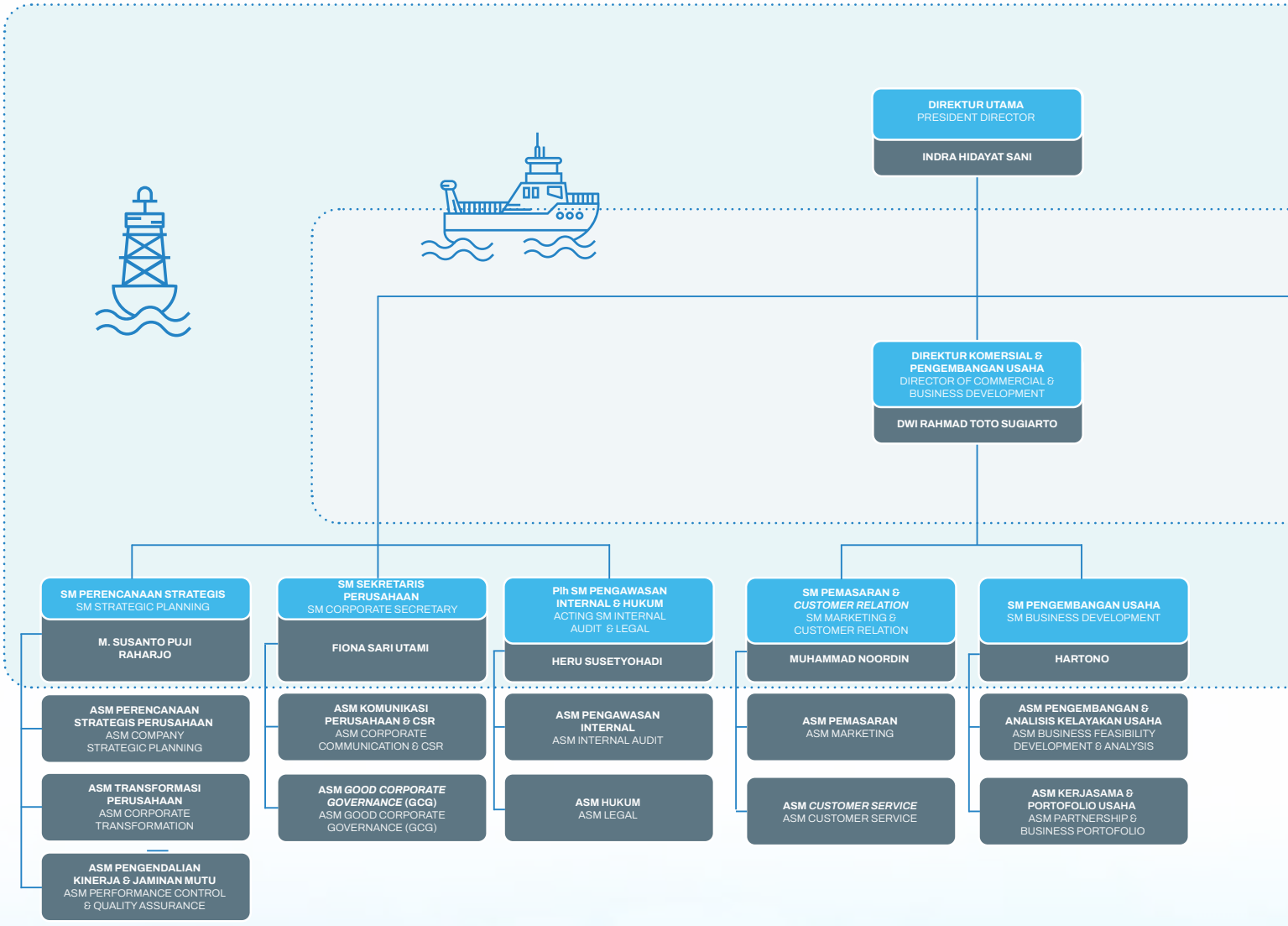
Pengelola manajemen risiko dipimpin oleh *Senior Manager* Pengawasan Internal & Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi, Nama Jabatan dan Uraian Jabatan pada Kantor Pusat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

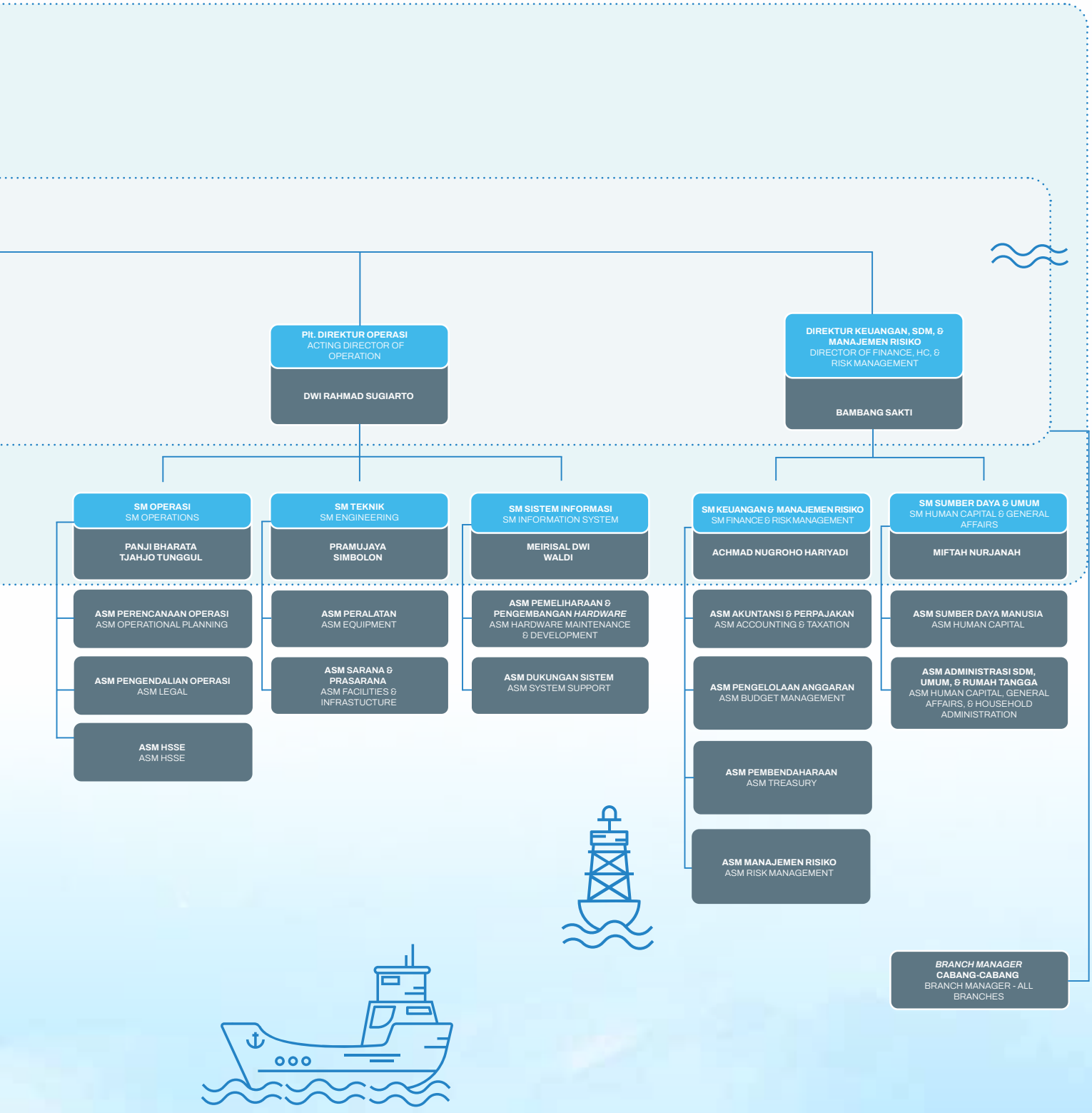
Struktur Organisasi Pengelola Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok

RISK MANAGEMENT STRUCTURE

The risk management function is led by the Senior Manager of Internal Audit & Legal, as stipulated in Decree No. KP.05.01/29/2/2/SDMA/DIRU/PTP-24 dated February 29, 2024, concerning the Organizational Structure, Position Titles, and Job Descriptions at the Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

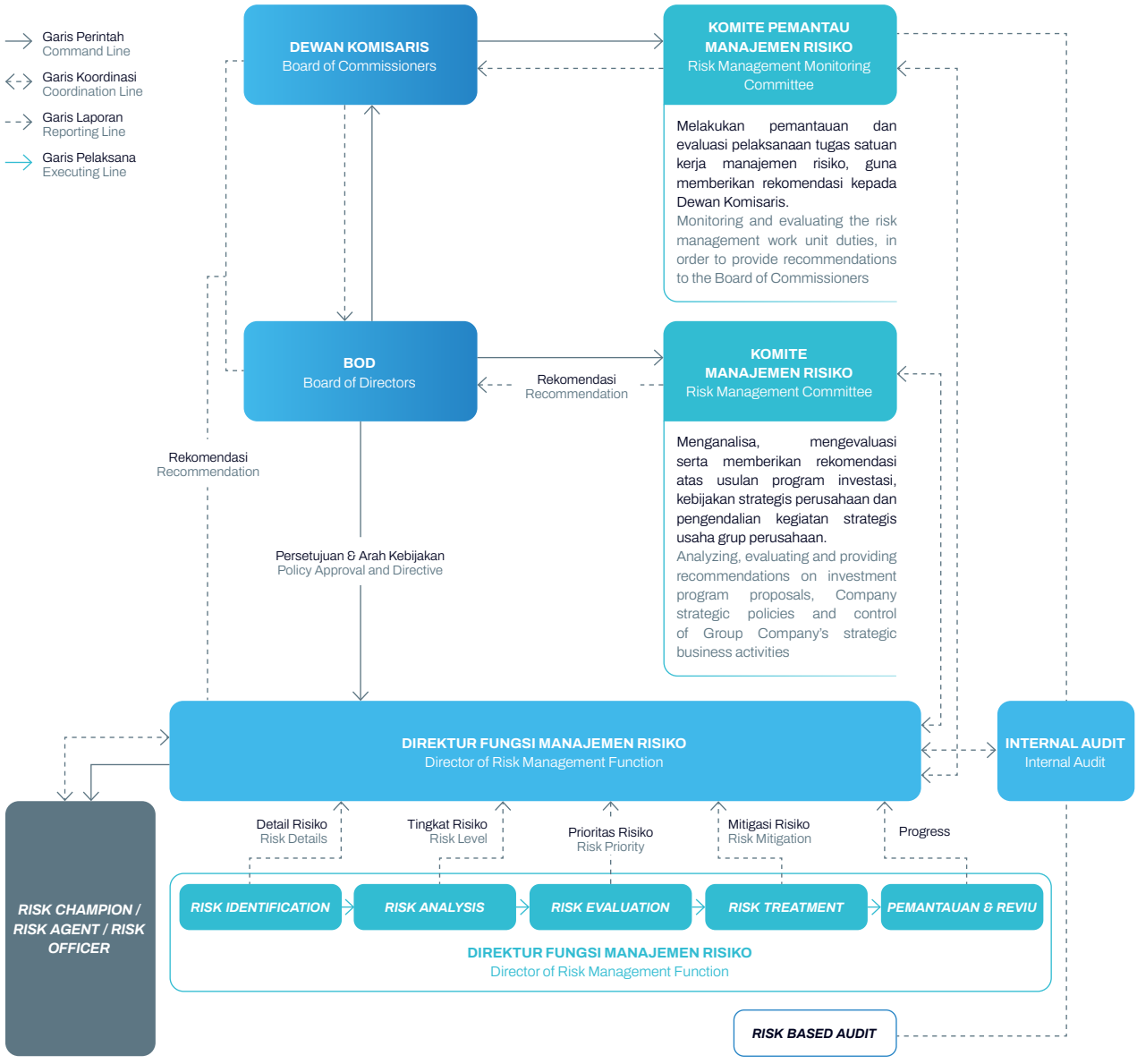
Risk Management Organizational Structure of PT Pelabuhan Tanjung Priok




Plt. DIREKTUR OPERASI
ACTING DIRECTOR OF OPERATION
DWI RAHMAD SUGIARTO
DIREKTUR KEUANGAN, SDM, & MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, HC, & RISK MANAGEMENT
BAMBANG SAKTI
SM OPERASI
SM OPERATIONS
PANJI BHARATA TJAHJO TUNGGUL
ASM PERENCANAAN OPERASI
ASM OPERATIONAL PLANNING
ASM PENGENDALIAN OPERASI
ASM LEGAL
ASM HSSE
ASM HSSE
SM TEKNIK
SM ENGINEERING
PRAMUJAYA SIMBOLON
ASM PERALATAN
ASM EQUIPMENT
ASM SARANA & PRASARANA
ASM FACILITIES & INFRASTUCTURE
SM SISTEM INFORMASI
SM INFORMATION SYSTEM
MEIRISAL DWI WALDI
ASM PEMELIHARAAN & PENGEMBANGAN HARDWARE
ASM HARDWARE MAINTENANCE & DEVELOPMENT
ASM DUKUNGAN SISTEM
ASM SYSTEM SUPPORT
SM KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO
SM FINANCE & RISK MANAGEMENT
ACHMAD NUGROHO HARIYADI
ASM AKUNTANSI & PERPAJAKAN
ASM ACCOUNTING & TAXATION
ASM PENGELOLAAN ANGGARAN
ASM BUDGET MANAGEMENT
ASM PEMBENDAHARAAN
ASM TREASURY
ASM MANAJEMEN RISIKO
ASM RISK MANAGEMENT
SM SUMBER DAYA & UMUM
SM HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIRS
MIFTAH NURJANAH
ASM SUMBER DAYA MANUSIA
ASM HUMAN CAPITAL
ASM ADMINISTRASI SDM, UMUM, & RUMAH TANGGA
ASM HUMAN CAPITAL, GENERAL AFFAIRS, & HOUSEHOLD ADMINISTRATION
BRANCH MANAGER CABANG-CABANG
BRANCH MANAGER - ALL BRANCHES

Struktur Koordinasi & Komunikasi Manajemen Risiko

Risk Management Coordination & Communication Structure



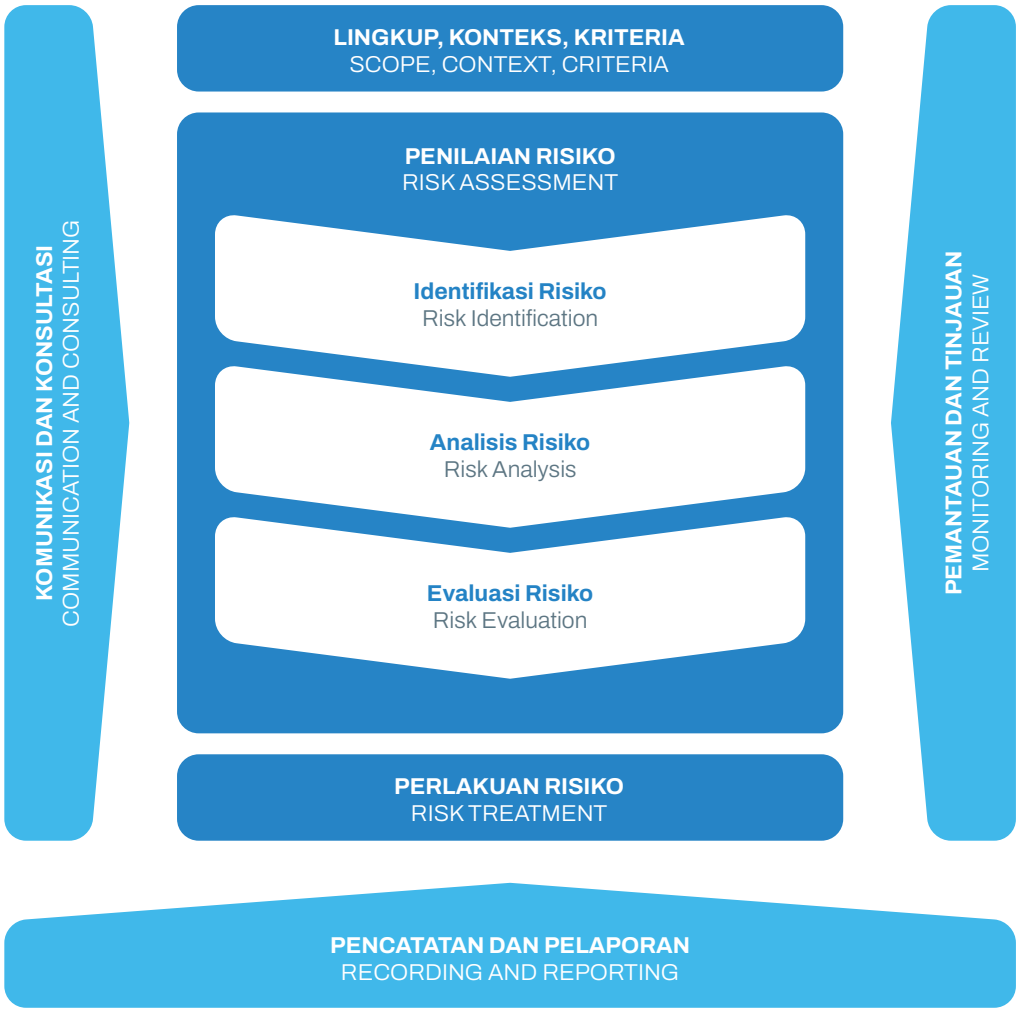
KEBIJAKAN DAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/22/3/2/PTP-21 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2021 mengenai Panduan Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen perusahaan untuk memperkuat pengelolaan risiko dalam operasionalnya, yang tergambar dalam proses manajemen di bawah ini.

RISK MANAGEMENT POLICY AND FRAMEWORK

The Company has implemented a risk management system in accordance with Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/22/3/2/PTP-21, issued on March 22, 2021, concerning the Risk Management Policy Guidelines of PT Pelabuhan Tanjung Priok. This initiative represents an integral part of the Company's commitment to strengthening risk management within its operations, as illustrated in the following risk management process framework:

PROSES MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Process



RISIKO PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASI

Risiko-risiko yang dihadapi oleh PTP Terminal Nonpetikemas mencakup segala aspek dari operasi bisnis yang dilakukan dalam lingkungan Perusahaan. Berikut jenis risiko yang telah diidentifikasi Perusahaan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) profil risiko, dengan uraian sebagai berikut:

COMPANY RISKS AND MITIGATION MEASURES

The risks faced by PTP Terminal Nonpetikemas span across all aspects of its business operations within the Company's environment. The following are the types of risks identified by the Company, consisting of 10 (ten) risk profiles, with descriptions as follows:

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
1	Kegagalan mempertahankan pasar eksisting Failure in maintaining existing market	1. Program *Customer Retention* dan KAM (*Key Account Management*), (progress overall 100% dan progress expected sebesar 100%) 2. Tindak lanjut dan *monitoring* hasil SKP 2023 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%. 3. Implementasi standarisasi operasi Cab. PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Customer Retention Program and KAM (Key Account Management) (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 2. Follow-up and monitoring of 2023 SKP results (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 3. Implementation of operational standardization across PTP branches (Overall progress: 100%, expected progress: 100%)	Realisasi trafik berdasarkan kemasaran secara rata-rata s.d. Des 2024 tercapai sebesar 112,34% jika dibandingkan dengan RKAP s.d. Des 2024, Adapun detail capaian sbb: • Petikemas terealisasi 233.581 Teus dari target RKAP 188.401 Teus (123,98%) • *General Cargo* Ton teralisasi 10,13 juta Ton dari target RKAP 10,02 juta Ton (101,05%), sedangkan untuk M^3 terealisasi 1,42 juta dari RKAP 1,31 juta (108,34%) • Bag Cargo terealisasi 3,05 juta dari target RKAP 3,38 juta (90,05%) • Curah cair terealisasi 10,27 dari target RKAP 11,08 juta (92,76%) • Curah kering teralisasi 22,17 juta dari target RKAP 25,36 juta (87,40%) • Kendaraan terealisasi 101,127 unit dari target RKAP 116.193 (87,03%) • Hewan terealisasi 535.937 ekor dari target RKAP 328.725 ekor (163,04%) Dari sisi pendapatan, terlihat peningkatan pada cabang: Tj. Priok: pendapatan s.d Des'24 tercapai 860,12 M atau 104,68% dibandingkan RKAP; Pangkal Balam: pendapatan s.d Des'24 tercapai 26,5M atau 119,94% dibandingkan RKAP; Pontianak: pendapatan s.d Des'24 tercapai 11,13 M atau 143,77% dibandingkan RKAP dan Kijing: pendapatan s.d Des'24 tercapai 64,08 M atau 188,82% dibandingkan RKAP. As of December 2024, average traffic realization based on packaging reached 112.34% compared to the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The detailed achievements are as follows: • Container cargo was realized at 233,581 Teus out of RKAP 188,401 Teus (123.98%) • General Cargo Tons was realized at 10.13 million Tons out of 10.02 million Tons (101.05%) of RKAP target, while M3 was realized at 1.42 million out of 1.31 million (108.34%) of RKAP target. • Bag Cargo 3.05 million tons realized, compared to the RKAP target of 3.38 million tons (90.05%) • Liquid Bulk 10.27 million tons realized, compared to the RKAP target of 11.08 million tons (92.76%) • Dry Bulk 22.17 million tons realized, compared to the RKAP target of 25.36 million tons (87.40%) • Vehicles 101,127 units realized, compared to the RKAP target of 116,193 units (87.03%) • Livestock 535,937 heads realized, significantly exceeding the RKAP target of 328,725 heads (163.04%) Revenue realization as of December 2024 showed notable increases across several branches Tanjung Priok: Rp860.12 billion, 104.68% of RKAP; Pangkal Balam: Rp26.5 billion, 119.94% of RKAP; Pontianak: Rp11.13 billion, 143.77% of RKAP; and, Kijing: Rp64.08 billion, 188.82% of RKAP.

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
1	Kegagalan mempertahankan pasar eksisting Failure in maintaining existing market	1. Program *Customer Retention* dan KAM (*Key Account Management*), (progress overall 100% dan progress expected sebesar 100%) 2. Tindak lanjut dan *monitoring* hasil SKP 2023 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%. 3. Implementasi standarisasi operasi Cab. PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Customer Retention Program and KAM (Key Account Management) (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 2. Follow-up and monitoring of 2023 SKP results (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 3. Implementation of operational standardization across PTP branches (Overall progress: 100%, expected progress: 100%)	Pendapatan Usaha PTP s.d Des 2024 sebesar Rp1,47 T atau 86,40% jika dibandingkan dengan RKAP s.d Des'24 sebesar Rp1,73 T. Jika dibandingkan dengan pendapatan s.d Des'23 yaitu 1,83 T dengan *trend* YoY 80,10% Dengan ketidaktercapaian terhadap pendapatan, juga berpengaruh terhadap ketidaktercapaian laba dimana laba bersih s.d Des'24 mengalami penurunan signifikan sebesar -28,19 M sedangkan RKAP 176,73 M yang artinya hanya tercapai -15,95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan laba bersih sd Des'23 yaitu 158,06 M artinya *trend* laba bersih YoY -17,84%. Berbagai upaya maksimal sebagai mitigasi telah dilakukan oleh Perusahaan sampai dengan Des'24, seperti: 1. Pelaksanaan *Customer Visit* & Interaksi Pelanggan Desember: 28 *visit* & interaksi pelanggan Juni: 61 interaksi, sudah melakukan *Coffee Morning* di Cabang Banten pada tanggal 8 Maret 2024 dan di Cabang Tanjung Pandan tanggal 30 Juli 2024 2. Pelaporan *TOP Customer* 3. Tindak lanjut bulan hasil temuan SKP sudah selesai 4. Telah dilakukan *Go Live* PTOS-M Pombo dan PTOS-M Ambon pada bulan Agustus 2024 5. Cabang Cirebon dan Teluk Bayur sudah menggunakan tarif baru pada tahun 2024 6. Kerjasama dengan PT Sindulang sudah berjalan sejak 7 Mei 2024, sedangkan untuk PT Salim Ivomas sudah dilakukan pada 16 November 2024 7. Sudah ada BA penyesuaian Curah Kering dan Gencar di Kijing dari 49% ke 16% untuk regional 2 yang mulai berlaku per-1 Agustus 2024 PTP's total operating revenues as of December 2024 reached Rp1.47 trillion, or 86.40% of the RKAP target of Rp1.73 trillion. When compared to the operating revenues as of December 2023 of Rp1.83 trillion, this reflects a YoY 80.10% achievement. This shortfall in revenue also impacted profitability. Net income as of December 2024 amounted to -28.19 billion, significantly below the RKAP target of Rp176.73 billion, achieving only -15.95% of the target. Compared to the net income of Rp158.06 billion in December 2023, this reflects a YoY decline in net income of -17.84%. The Company undertook various mitigation efforts through Dec 2024, including: 1. Customer Engagement Activities: Conducted 28 customer visits and interactions in December, and 61 interactions in June, Organized Coffee Morning sessions at Banten Branch on March 8, 2024, and Tanjung Pandan Branch on July 30, 2024. 2. TOP Customer Reporting 3. Follow-up on SKP Audit Findings 4. Successful go-live of PTOS-M Pombo and PTOS-M Ambon in August 2024 5. Cirebon and Teluk Bayur Branches implemented new tariffs during 2024 6. Partnership with PT Sindulang commenced on May 7, 2024, while Partnership with PT Salim Ivomas initiated on November 16, 2024. 7. Minutes of Agreement for adjustment of Dry Bulk and GENCAR tariffs at Kijing Branch, reducing Regional 2 tariffs from 49% to 16%, effective August 1, 2024.

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
1	Kegagalan mempertahankan pasar eksisting Failure in maintaining existing market	1. Program *Customer Retention* dan KAM (*Key Account Management*), (progress overall 100% dan progress expected sebesar 100%) 2. Tindak lanjut dan *monitoring* hasil SKP 2023 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%. 3. Implementasi standarisasi operasi Cab. PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Customer Retention Program and KAM (Key Account Management) (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 2. Follow-up and monitoring of 2023 SKP results (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 3. Implementation of operational standardization across PTP branches (Overall progress: 100%, expected progress: 100%)	Namun, mitigasi yang dijalankan belum cukup efektif. Penyebab penurunan pencapaian pendapatan disebabkan karena: • Tanjung Priok: menurunnya arus barang komoditi *steel product*, penurunan untuk kegiatan B/M atas mitra PT Kaluku Maritim Utama, penurunan sewa lapangan *stufing-striping* dari PT Tanto dan SPIL karena pemurnian bisnis yang beralih ke PT MTI, penurunan komoditi CPO karena penurunan produksi • Teluk Bayur: Penurunan pengiriman karet ke USA (2 pabrik tutup karena harga karet rendah) dan rendahnya arus trafik komoditi *project cargo*, penurunan penjualan PT Padang Raya Cakrawala serta kunjungan kapal CPO *impact* dari periode *replanting* di perkebunan sehingga produksi kelapa sawit menurun • Bengkulu: kunjungan kapal *bag cargo* berkurang dan pendangkalan alur • Jambi: penurunan kegiatan Muat *General Cargo* seperto Alat Proyek, Pipa dan *Piywood* serta dermaga ferrocement 02 dan 03 rusak, menurunnya kegiatan *loading* Batubara dikarenakan adanya penutupan tambang sementara serta pembatasan *hauling* dan kerusakan *Dolphin* Dermaga *Jetty Conveyor* yang roboh • Banten: Penurunan arus barang dalam melayani kegiatan B/M *cargo Marine Fuel Oil, Asphalt, Methanol*, HSD, *Acetic Acid, Base Oil Kinetric* 4, *Nickle Ore*, Semen Curah dan *Split Stone* • Panjang: Penurunan komoditi CPO, CPKO dan minyak sawit karena beralih ke TUKS milik PT SJIM sendiri, Penundaan Ekspor Batubara Berdasarkan hal tersebut maka Tingkat dampak dipandang tinggi karena ketidaktercapaian pendapatan dan laba Perusahaan sedangkan kemungkinan berada di level 5 (hampir pasti terjadi) karena dari 12 bulan terdapat 12x terjadi ketidaktercapaian laba terhadap RKAP. Despite these initiatives, the mitigation measures implemented have not proven sufficiently effective. The revenue shortfall was primarily driven by the following factors: • Tanjung Priok Branch, the Company experienced a decline in cargo flow for steel products, reduced L/U activities involving partner PT Kaluku Maritim Utama, and a drop in yard lease revenues for stuffing and stripping operations from PT Tanto and SPIL due to business realignment toward PT MTI. Additionally, a decrease in CPO volume was noted due to reduced production levels. • Teluk Bayur, rubber exports to the United States declined following the closure of two factories caused by low rubber prices. There was also weak traffic for project cargo commodities, a decline in sales from PT Padang Raya Cakrawala, and fewer CPO vessel calls due to decreased palm oil production during the plantation replanting cycle. • Bengkulu Branch, vessel visits for bag cargo decreased, compounded by siltation in the shipping channel. • Jambi Branch recorded a decline in general cargo activities, such as the loading of project equipment, pipes, and plywood, alongside damage to Ferrocement Wharf 02 and 03. Coal loading activities were disrupted by temporary mine closures, hauling restrictions, and the collapse of the Jetty Conveyor Dolphin Wharf.

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
1	Kegagalan mempertahankan pasar eksisting Failure in maintaining existing market	1. Program *Customer Retention* dan KAM (*Key Account Management*), (progress overall 100% dan progress expected sebesar 100%) 2. Tindak lanjut dan *monitoring* hasil SKP 2023 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%. 3. Implementasi standarisasi operasi Cab. PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Customer Retention Program and KAM (Key Account Management) (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 2. Follow-up and monitoring of 2023 SKP results (Overall progress: 100%, expected progress: 100%) 3. Implementation of operational standardization across PTP branches (Overall progress: 100%, expected progress: 100%)	• Banten, the branch faced reduced cargo volume for several B/M activities, including Marine Fuel Oil, Asphalt, Methanol, HSD, Acetic Acid, Base Oil Kinetric 4, Nickel Ore, Bulk Cement, and Split Stone. • Panjang Branch, CPO, CPKO, and palm oil volumes decreased as cargo handling was redirected to the privately operated terminal (TUKS) owned by PT SJIM, alongside delays in coal export activities. Given these conditions, the impact level is considered high, driven by the Company's failure to meet its revenue and profit targets. The likelihood of recurrence is classified at Level 5 (almost certain), as profit realization fell short of the RKAP targets in all 12 months of the year.
2	Kecelakaan kerja Workplace Accidents	• Implementasi HSSE di seluruh Cabang PT PTP (tercapai *progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) • Adanya *monitoring* dan *control* secara periodic terhadap prosedur kerja menggunakan *dashboard* hssl https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth (bukan RKM) • Implementation of HSSE across all PT PTP branches (Overall progress achieved: 100%, expected progress: 100%) • Periodic monitoring and control of work procedures through the HSSL dashboard [https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth] (not part of RKM)	Sampai dengan Desember 2024, terdapat kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut: 1. April-Petugas PBM swasta di Cirebon mengalami kaki terlindas *excavator* (*medical treatment*) 2. April-kernet supir truk eksternal terlindas hingga meninggal oleh supir truk di Tanjung Priok (*fatality*) 3. Juni-Pekerja TKBM kakinya tertimpa rel yang sedang dibongkat dan terjatuh akibat tersenggol *ship crane* yang sedang *swing* (*medical treatment*) Terhadap kejadian ini, mitigasi yang dilakukan sampai dengan Desember 2024 adalah: • Peningkatan *safety control* (target Des'24: 713 kali dan realisasi Des'24: 1.274 kali dan *safety briefing* (target Des'24: 1.320 kali dan realisasi Des'24: 7.562 kali) setiap hari dan manajemen *walkthrough* • HSSE Forum telah dilaksanakan pada tanggal 6 Des'24 • Sosialisasi HSSE *Dashboard* pada tanggal 16 Des'24 • Pelaksanaan *Audit External* ISO 14001 & 45001 As of December 2024, the Company recorded the following work-related incidents: 1. April, a PBM worker in Cirebon sustained a foot injury after being run over by an excavator (medical treatment case). 2. April, a fatal incident occurred in Tanjung Priok, where an external truck assistant was fatally struck by a truck driver (fatality). 3. In June, a TKBM laborer suffered a foot injury caused by a falling rail during unloading, triggered by contact with a swinging ship crane (medical treatment case). In response to these incidents, the Company implemented various mitigation measures through December 2024, including: • Enhanced Safety Controls (Dec' 24 Target 713 times and Dec'24 realization : 1,274 times and safety briefing (Dec'24: 1,320 times and Dec'24 realization: 7,562 tim) Daily briefings and regular management walkthroughs were also conducted. • HSSE Forum held on December 6, 2024 • HSSE Dashboard socialization conducted on December 16, 2024 • External audits for ISO 14001 and ISO 45001 certification carried out

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
2	Kecelakaan kerja Workplace Accidents	• Implementasi HSSE di seluruh Cabang PT PTP (tercapai *progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) • Adanya *monitoring* dan *control* secara periodic terhadap prosedur kerja menggunakan *dashboard* hssl https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth (bukan RKM) • Implementation of HSSE across all PT PTP branches (Overall progress achieved: 100%, expected progress: 100%) • Periodic monitoring and control of work procedures through the HSSL dashboard [https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth] (not part of RKM)	• Koordinasi Evaluasi Kinerja *Security* PT PTP pada tanggal 31 Desember 2024 • Pendampingan Tim Satgas PTP Pangkal Balam pada Des'24 • Sosialisai Pengamanan Terpadu bersama Reg-2 pada 12 Des'24 • Pelaksanaan *safety forum* sebanyak 13 kali: HSSE Forum dilakukan dengan 2 jenis pelaksanaan yaitu HSSE eksternal setiap satu tahun sekali dan dihadiri seluruh *stakeholder* (regulator, TKBM, Asosiasi, Vendor, Mitra, dll) • Telah dilaksanakan 21 *media blasting* mengenai *awerness* terhadap *safety* • Pelaksanaan *management walkthrough* sebanyak 271 kali s.d Nov'24 • Pelaksanaan *Emergency Drill* di Cabang Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang, Tjg Pandan • *Monitoring* implementasi program preventif (*fit to work*) dan promotif keselamatan kerja • *Monitoring* Pelaporan data kecelakaan kerja (*zero fatality*) • *Monitoring* implementasi program lingkungan kerja • *Monitoring* implementasi program kesehatan kerja • Pelaksanaan training IMO level di seluruh cabang • *Safety induction visitor & truck driver* • Menerapkan SMK3 pada Mitra PBM yang bekerja di wilayah PPTP, mulai dari Pra Kualifikasi hingga implementasinya • Pengaturan ulang alur masuk kendaraan dan alur masuk orang pada lini 1 • *Development* sistem aplikasi HSSE *Dashboard* (*safety* patrol, SOC, *safety briefing*, MWT) • Coordination of PT PTP Security Performance Evaluation held on December 31, 2024 • Deployment of the PTP Task Force Team to Pangkal Balam Branch in Dec 2024 • Integrated Security Socialization with Region 2 conducted on December 12, 2024 • Implementation of 13 safety forums, including two types of HSSE Forums: External HSSE Forums held annually, attended by all key stakeholders (regulators, TKBM, associations, vendors, partners, etc.) • Execution of 21 safety awareness media blasts • Completion of 271 management walkthroughs as of November 2024 • Emergency drills conducted at the following branches: Tanjung Priok, Banten, Pontianak (Kijing), Bengkulu, Panjang, and Tanjung Pandan • Monitoring the implementation of preventive (fit to work) and promotive occupational safety programs • Monitoring of occupational incident reporting (zero fatality target) • Monitoring of workplace environmental safety program implementation • Monitoring of occupational health program implementation • Delivery of IMO-level safety training across all branches • Safety induction sessions for visitors & truck drivers • Implementation of the SMK3 for PBM, covering pre-qualification to on-site implementation • Reconfiguration of vehicle and personnel entry routes in Line 1 • Development of the HSSE Dashboard application system, (safety patrol, SOC, safety briefing, MWT)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
2	Kecelakaan kerja Workplace Accidents	• Implementasi HSSE di seluruh Cabang PT PTP (tercapai *progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) • Adanya *monitoring* dan *control* secara periodic terhadap prosedur kerja menggunakan *dashboard* hssl https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth (bukan RKM) • Implementation of HSSE across all PT PTP branches (Overall progress achieved: 100%, expected progress: 100%) • Periodic monitoring and control of work procedures through the HSSL dashboard [https://hsse-dashboard.ptp.co.id/auth] (not part of RKM)	• Program *Safety Observation Card* (Sistem pelaporan *unsafe action* dan *unsafe condition* yang terjadi di lapangan dengan tujuan meningkatkan *awareness* karyawan dan memperbaiki lingkungan kerja dari bahaya risiko tinggi. Untuk pelapor SOC terbanyak dan terbaik akan mendapatkan *reward*) • Memberikan pengetahuan mengenai kecelakaan kerja kepada seluruh cabang setiap ada insiden atau kecelakaan kerja di tempat lain sebagai pembelajaran dengan dihadiri *stakeholder* • Penempatan satgas HSSE di PTP Cabang Teluk Bayur, Cirebon,dan Bengkulu Dengan kematian Tunggal pada Arpil 2024, maka dampak berada di level 4 dan kemungkinan di level 2 (Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 6 bulan. Kecelakaan terakhir di bulan April berarti sudah lebih dari 6 bulan) • Launch of the Safety Observation Card (SOC) Program, a reporting system for unsafe actions and conditions in the field, aimed at increasing employee awareness and improving workplace safety. Top-performing reporters of SOCs are eligible to receive recognition and rewards • The Company ensures that every occupational incident or accident occurring at any branch is shared as a learning opportunity with all other branches. These sessions are conducted with the involvement of relevant stakeholders to promote safety awareness and preventive actions. • Deployment of HSSE task force units at the Teluk Bayur, Cirebon, and Bengkulu branches. Following the fatality incident in April 2024, the impact level is assessed at Level 4, while the likelihood is rated at Level 2. (The risk has occurred previously but infrequently, with an estimated frequency of once every 6 months. As the last recorded incident occurred in April, more than 6 months have passed without recurrence.)
3	Kegagalan meraih *market* baru Failure in seizing new market	1. Peningkatan pangsa pasar dengan *self operated* dan Pemasaran aktif kepada *cargo owner*, *logistic company*, dan *shipping line* (*progress overall* 92,44% dan *progress expected* sebesar 100%) 2. Kerjasama pelayanan operasi pada TUKS atau pelabuhan K/L (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 3. Pengembangan kerja sama Terminal Curah Kering (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 4. Pengembangan Terminal Curah Cair melalui kerja sama mitra Strategis Reg 2 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 5. Mengikuti kegiatan lelang untuk kegiatan *shorebase* di Indonesia (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 6. Pengoperasian *Ship to Ship* (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%)	Total realisasi *market share* s.d. Des'24 adalah 50,72% sedangkan target RKAP Tahun 2024 adalah 50% artinya meningkat 0,72% Selain itu, pendapatan dari *market shorebase* telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, yaitu realisasi sebesar 147,29 s.d Des'24 dimana meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu YoY yaitu 55,66M pada Desember 2023. Realisasi mitigasi yang telah dilakukan adalah talah dilakukan: 1. Evaluasi komprehensif terhadap kinerja perusaaahn pada tahun 2024 meliputi *monitoring sales call/sales visit*, laporan *market share*, pemantauan utilisasi aset, dan tinjauan terhadap penyesuaian tarif 2. Penandatanganan perjanjian antara PTP dengan PT Timah Perhitungan *value creation* tahun 2024 3. Telah ada Berita Acara (BA) kesepakatan perjanjian kerja sama Pengoperasian Lapangan Kalijapat antara PTP dengan Reg 2 Tanjung Priok dan ketel uap Ancol Timur untuk bongkar muat Curah Kering dengan menghitung *value creation* 4. *Draft* kerja sama pengoperasian Aset Dermaga dan lahan eks TBS di Pk. Balam dengan menghitung *value creation*

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
3	Kegagalan meraih *market* baru Failure in seizing new market	1. Market share expansion through self-operated services and active marketing to cargo owners, logistics companies, and shipping lines (Overall progress: 92.44%, Expected progress: 100%) 2. Operational service cooperation at TUKS or K/L ports (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 3. Development of partnerships for dry bulk terminal operations (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 4. Development of liquid bulk terminal through strategic partnership in Region 2 (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 5. Participation in tenders for shorebase operations in Indonesia, (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 6. Operation of Ship to Ship (STS) services (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	5. Telah disusun kajian bisnis *shorebase* Fak-fak; Penyampaian RFI ke Patra Drilling Contractor, penandatanganan kontrak kerja sama antara PTP dengan Medco, penyusunan kajian bisnis *Shorebase Genting Oil* 6. Penandatanganan Perjanjian *Transhipment* Batubara dengan PT Borneo Indobara, Penandatanganan Perjanjian kerja sama PTP dengan PT EPS Shipping, Pelayanan stevadoring untuk kegiatan STS PT Multi Guna Maritim dan untuk kegiatan STS PT Pelayaran Kartika Samudera Adijaya As of Dec 2024, the Company's total realized market share reached 50.72%, surpassing the 2024 RKAP target of 50%, reflecting a growth of 0.72%. In addition, revenue from the shorebase market segment experienced a significant increase compared to the previous year. The realized revenue reached Rp147.29 billion as of Dec 2024, a marked improvement from the Rp55.66 billion recorded in December 2023, representing a strong YoY growth. The following strategic mitigation measures and initiatives have been implemented to support performance improvement: 1. Comprehensive evaluation of the Company's 2024 performance, including monitoring of sales calls and visits, market share reports, asset utilization tracking, and review of tariff adjustments 2. Signing of an agreement between PTP and PT Timah, including the calculation of value creation for 2024 3. A Memorandum of Agreement has been signed regarding the cooperation for operating the Kalijapat Yard between PTP and Region 2 Tanjung Priok, as well as the operation of the Ancol Timur boiler for dry bulk handling, along with a value creation assessment 4. Draft of a cooperation agreement for operating the jetty and former TBS yard assets in Pangkal Balam, including value creation calculation 5. A business feasibility study for the Fak-Fak Shorebase has been prepared; RFI submitted to Patra Drilling Contractor, cooperation contract signed between PTP and Medco, and a business study developed for the Genting Oil Shorebase 6. Signing of a coal transshipment agreement with PT Borneo Indobara, signing of a cooperation agreement between PTP and PT EPS Shipping, and provision of stevedoring services for STS activities by PT Multi Guna Maritim and PT Pelayaran Kartika Samudera Adijaya Selama tahun 2024, terdapat beberapa kerja sama dengan mitra baru antara lain: 1. Kerja sama Bongkar Muat (BM) batu *split* PTP Jambi dengan CV Willa Transpor senilai 3,4 M 2. Kerja sama pelayanan BM curah cair PT Laban Raya, Jambi senilai 65 juta 3. Kerja sama lapangan dan dermaga Kalijapat senilai 10,75 M 4. Kerja sama Petikemas konvensional di Ketapang senilai 1,6 M Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini PT PTP berhasil mendapatkan *market* baru dari *shorebase*, yang dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan dan sedang ber*progress* untuk meraih *market* lainnya seperti ke Patra Drilling Contractor dan kegiatan StS dengan PT Pelayaran Kartika Samudera

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
3	Kegagalan meraih *market* baru Failure in seizing new market	1. Peningkatan pangsa pasar dengan *self operated* dan Pemasaran aktif kepada *cargo owner*, *logistic company*, dan *shipping line (progress overall* 92,44% dan *progress expected* sebesar 100%) 2. Kerjasama pelayanan operasi pada TUKS atau pelabuhan K/L (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 3. Pengembangan kerja sama Terminal Curah Kering (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 4. Pengembangan Terminal Curah Cair melalui kerja sama mitra Strategis Reg 2 (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 5. Mengikuti kegiatan lelang untuk kegiatan *shorebase* di Indonesia (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 6. Pengoperasian *Ship to Ship* (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Market share expansion through self-operated services and active marketing to cargo owners, logistics companies, and shipping lines (Overall progress: 92.44%, Expected progress: 100%) 2. Operational service cooperation at TUKS or K/L ports (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 3. Development of partnerships for dry bulk terminal operations (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 4. Development of liquid bulk terminal through strategic partnership in Region 2 (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 5. Participation in tenders for shorebase operations in Indonesia, (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 6. Operation of Ship to Ship (STS) services (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	Sehingga level risiko dapat diturunkan dengan skala dampak pada level 1 (Penurunan pangsa pasar sampai dengan 5%) karena pangsa pasar tidak mengalami penurunan, malah terjadi kenaikan 0,72% dibandingkan dengan target *market share* tahun 2024 adalah 50% Kemungkinan berada di level 2 (probabilitas kejadian risiko dari 20% sampai dengan 40%), hal ini dikarenakan dalam 12 bulan berjalan terdapat 3 bulan yang capaian *market share* nya <50%. Artinya hanya 25% yang tidak melampaui target In 2024, the Company entered into several new partnerships with the following parties: 1. Unloading partnership for crushed stone between PTP Jambi and CV Willa Transpor valued at Rp3.4 billion 2. Liquid bulk BM cooperation with PT Laban Raya in Jambi valued at Rp65 million 3. Cooperation for Kalijapat yard and jetty operations valued at Rp10.75 billion 4. Conventional container handling partnership in Ketapang valued at Rp1.6 billion Based on the above explanation, it can be concluded that PT PTP has successfully captured new market segments in the shorebase sector, as evidenced by increased revenue. The Company is also making progress in securing additional markets, such as with Patra Drilling Contractor and STS activities with PT Pelayaran Kartika Samudera. As a result, the risk level may be downgraded to Impact Level 1 (market share decline of up to 5%), since no decline has occurred, in fact, market share increased by 0.72% compared to the 2024 target of 50%. The likelihood is assessed at Level 2 (risk occurrence probability between 20% and 40%), as during the 12-month period, there were 3 months in which market share fell below 50%, meaning only 25% of the time the target was not exceeded.
4	*Cyber attact* Cyber Attack	1. Pengadaan *software End Poin Protection* (EPP) bentuk mitigasi perlindungan terhadap data dan informasi yang terdapat pada aset TI Perusahaan 2. Penyediaan layanan *backup server* jaringan di PTP (Selesai 100%) 1. Procurement of End Point Protection (EPP) software as a mitigation measure to protect data and information stored on the Company's IT assets 2. Provision of network server backup services at PTP (Completed 100%)	Hingga Desember 2024, tidak ada *case cyber attack* pada aplikasi ataupun sistem informasi yang di *handle* secara langsung oleh PTP Realisasi mitigasi risiko *cyber attack* adalah: • Telah menggunakan perangkat *firewall* dalam mengantisipasi percobaan serangan *cyber* • Telah dilakukan pemasangan software *Endpoint Protection* (*trend micro*) di *end user devices* sebagai software *Endpoint Protection* • Penggunaan *instrusion prevention system* (IPS) sebagai *firewall* utama untuk pemblokiran *threat* yang terdeteksi. Berdasarkan *threat activity report* terdapat 5.400 *threat* dan sudah dilakukan *blocking activity* sebanyak 1.960 *vulnerability* dan blocking pada 32 *spyware*. ACC *Risk Factor* bulan Des adalah 2,9 Dengan penjelasan di atasm maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi risiko *cyber attack*, sehingga Tingkat risiko dapat diturunkan dengan dampak di level 1. Karena tidak terjadi *cyber attack* pada tahun 2024 maka level kemungkinan dapat diturunkan ke level 1 (Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
4	*Cyber attact* Cyber Attack	1. Pengadaan *software End Poin Protection* (EPP) bentuk mitigasi perlindungan terhadap data dan informasi yang terdapat pada aset TI Perusahaan 2. Penyediaan layanan *backup server* jaringan di PTP (Selesai 100%) 1. Procurement of End Point Protection (EPP) software as a mitigation measure to protect data and information stored on the Company's IT assets 2. Provision of network server backup services at PTP (Completed 100%)	As of December 2024, there were no recorded cases of cyber attacks on any applications or information systems directly managed by PTP. Realization of risk mitigation for cyber attack as follows: • Deployment of firewall devices to anticipate cyber intrusion attempts • Protection (trend micro) di end user devices sebagai software Endpoint Protection Installation of Endpoint Protection software (Trend Micro) on end user devices to safeguard the system • Utilization of an Intrusion Prevention System (IPS) as the primary firewall to block detected threats. According to the threat activity report, a total of 5,400 threats were detected, with blocking actions executed for 1,960 vulnerabilities and 32 spyware incidents. The ACC Risk Factor score for December was recorded at 2.9 Based on the above, it can be concluded that no cyber attacks occurred in 2024, and thus the risk level may be downgraded to Impact Level 1. As there were no cyber attacks in 2024, the likelihood level can also be downgraded to Level 1 (the risk is considered very rare, with an estimated occurrence of no more than once per year).
5	Rendahnya penyerapan investasi Low Investment Absorption	*Monitoring* atas pelaksanaan investasi Monitoring of Investment Implementation	Di tahun 2024, terdapat 5 rencana program investasi RKAP Tahun 2024 dan per-Desember 2024 telah terealisasi 5 program investasi (terealisasi 100% untuk prosentanse program tahun 2024). Sedangkan progress fisik s.d Desember 2024 terserap= 73,26% dibandingkan dengan RKAP 2024, Dimana item investasi yang sedang dalam tahap pelaksanaan sbb: • Pembangunan TCC Bengkulu (*Multiyear* 2019, RKAP 1M): Menunggu penyusunan pola kerjasama; selesai tahap perencanaan konsultan; Menunggu pelaksanaan Pembangunan *Jetty* TCC oleh Reg. 2 Bengkulu • *Conveyor Belt* Jambi (*Multiyear* 2020, RKAP 1 M): Selesai tahap perencanaan; Menunggu penyusunan pola Kerjasama; Menunggu pelaksanaan Pembangunan *Jetty conveyor Belt* di Pelabuhan Jambi • Instalasi fasilitas Pelabuhan (*Multiyear* 2021, RKAP 22 M): Pengadaan Fasilitas Pendukung Bongkar Muat di Dermaga Pelabuhan Kijing-Pekerja Pembangunan *Pipe Rack* Dermaga *Jetty* dan *Trestle* di Terminal Kijing PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak, Kalimantan Barat (80%); Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan *Piperack* Dermaga *Jetty* dan *Trestle* di Pelabuhan Terminal Kijing Kalimantan Barat (80%) • Pengadaan & optimalisasi alat B/M cabang (*Multiyear* 2023, RKAP 18,4M): Pekerjaan Jembatan Timbang termasuk jalan Akses dan Ruang Operator di Dermaga F Pelabuhan Panjang (50%). Dengan penjelasan diatas, maka investasi yang tidak terserap adalah 26,74%. Berdasarkan histori serapan investasi dari tahun 2021, rata-rata serapan adalah 55,53%. Artinya dengan serapan 73,26% dapat dianggap capaian cukup tinggi. Jika menggunakan skala dampak KBUMN maka untuk capaian yang tidak terserap hanya 26,74% yang artinya berada apa skala 2-rendah (20% < x < 40%). Sedangkan kemungkinan berada pada level 2 (probabilitas kejadian Risiko dari 20% sampai dengan 40%) karena yang tidak terserap hanya 26,74%.

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
5	Rendahnya penyerapan investasi Low Investment Absorption	*Monitoring* atas pelaksanaan investasi Monitoring of Investment Implementation	In 2024, a total of five investment programs were planned under the 2024 RKAP, and by December 2024, all five investment programs had been realized, (realizing 100% completion in terms of program count in 2024). However, physical realization as of December 2024 reached 73.26% of the 2024 RKAP target. The investment items currently in progress include the following: • Construction of TCC Bengkulu (Multiyear 2019, RKAP Rp1 billion): Awaiting the development of a partnership scheme; consultant planning phase completed; awaiting jetty construction by Region 2 Bengkulu. • Conveyor Belt Jambi (Multiyear 2020, RKAP Rp1 billion): Planning phase completed; awaiting partnership structure and conveyor jetty development at Jambi Port. • Port Facility Installation (Multiyear 2021, RKAP IDR 22 billion): This project includes the procurement of supporting loading and unloading (L/U) facilities at the Kijing Port Wharf. The scope of work involves the construction of the jetty pipe rack and trestle at the Kijing Terminal of PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pontianak Branch, West Kalimantan (progress achieved: 80%). In addition, it includes consultancy services for the supervision of the pipe rack, jetty, and trestle construction at the same terminal (progress achieved: 80%). • Procurement and Optimization of BM Equipment – Branch Level (Multiyear 2023, RKAP Rp18.4 billion): This initiative includes the development of a weighbridge, access roads, and operator room facilities at Wharf F of Panjang Port, (50%.) Based on the explanation above, the portion of unabsorbed investment stands at 26.74%. Historically, the average investment absorption rate since 2021 has been 55.53%. Therefore, the current absorption rate of 73.26% can be considered relatively high. According to the impact scale issued by the KBUMN, an unabsorbed investment rate of 26.74% corresponds to a Level 2 – Low Impact classification (defined as >20% and < 40%). Meanwhile, the possibility is at level 2 (Risk occurrence probability between 20% to 40%) because only 26.74% were not absorbed.

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
6	Stagnansi pertumbuhan bisnis Business Growth Stagnation	1. Kajian strategis Pengembangan Perusahaan (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 2. Kajian/Evaluasi Rencana Kerjasama Mitra Strategis (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Strategic review of corporate development initiatives (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%) 2. Review/evaluation of strategic partnership plans (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	1. Telah dilakukan *shortbrief* pengembangan cabang berdasarkan RIP dan Addendum V pekerjaan FDD dan KJPP PT TNU 2. Telah dilakukan BAMK pekerjaan Terminalisasi 3. Telah dilakukan pembongkaran Caustic Soda untuk pertama kali, kolaborasi Pertamina Patra Niaga dengan Produktifitas per jam 120 ton sd 150 ton 4. Penandatanganan PTP dengan PT SPIL untuk Kerjasama B/M Petikemas Konvesional dan *ship to ship* Pelabuhan Perinting Ketapang, dengan total pendapatan 1,6 M 5. Telah ada 1 ide inovasi yaitu proses bongkar muat curah cair menggunakan *drop tank* dengan, dimana salah satu *impact* nya adalah peningatan pendapatan Pada tahun 2024, sedang dilaksanakan dan sedang berprogress beberapa tahapan anatara lain: • *Kick off meeting* terminalisasi • Laporan Akhir Kajian Kelayakan *Business, Finance, Tax and Legal Due Diligence* Pekerjaan Rencana Akusisi PT TNU • Proses Lelang untuk Kerjasama *Jetty Operation & Management Service* IGP Morowali – *at Vale Port* Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini PT PTP belum mengalami stagnansi bisnis yang dibuktikan dengan adanya bisnis baru dan inovasi yang akan meningkatkan pendapatan. Sehingga level risiko dapat diturunkan dengan skala dampak pada level 3 dan kemungkinan pada level 1 (Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun) 1. A short briefing on branch development was conducted, aligned with the RIP and Addendum V of the FDD and KJPP assignments for PT TNU. 2. The BAMK for terminalization work has been completed. 3. The first-ever unloading of Caustic Soda was successfully carried out in collaboration with Pertamina Patra Niaga, achieving a productivity rate of 120 to 150 tons per hour. 4. PTP signed a cooperation agreement with PT SPIL to manage conventional container B/M, as well as ship-to-ship operations at Perinting Ketapang Port, generating total revenue of Rp1.6 billion. 5. One innovation initiative has been recorded, involving the unloading process of liquid bulk using drop tank technology. This innovation is expected to contribute positively to revenue growth. In 2024, several business activities are currently ongoing and progressing through key stages, including: • Kick-off meeting for terminalization projects • Completion of the Final Report for Business, Financial, Tax, and Legal Due Diligence related to the planned acquisition of PT TNU • Ongoing tender process for the Jetty Operation & Management Service partnership for IGP Morowali - at Vale Port Based on the aforementioned developments, it can be concluded that PT PTP is not experiencing business stagnation. It is evidenced by the emergence of new business activities and innovation efforts aimed at revenue enhancement. Accordingly, the risk level can be downgraded to an impact scale of Level 3 and a likelihood of Level 1 (indicating the risk is very unlikely to occur, at most once per year)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
7	Piutang macet dan piutang bermasalah Delinquent and Impaired Receivables	1. Berkoordinasi dengan cabang-cabang agar melakukan penagihan atas piutang yang sudah jatuh tempo 2. Berkoordiasi dengan divisi komersial dan divisi hukum atas penanganan piutang tidak lancar Adapun *list* RKM, sebagai rencana penanganan risiko adalah sbb: Penanganan Piutang tidak lancar umur piutang >90 hari (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Coordination with branch offices to ensure collection efforts on overdue receivables 2. Coordination with the Commercial Division and Legal Division for the resolution of non-performing receivables Risk Mitigation Plan (RKM) initiatives include the following: Resolution of non-performing receivables aged over 90 days (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	Jumlah piutang usaha s.d Desember 2024 Rp135.52M turun Rp0,8M atau 0,58% dibandingkan bulan November 2024 yaitu Rp137.31M, terjadinya penurunan piutang pada Cabang Banten, Jambi, Kijing, Pangkal Balam, Satker, Tanjung Priok dan Teluk Bayur. Total Piutang macet Rp83.42M, Piutang tidak lancar Rp34,86M dan piutang lancar 18,23M • Piutang lancar 0-30 hari, mengalami kenaikan 78,97% dibandingkan bulan November 2024 karena penerbitan nota baru atas PYMAD minimum *throughput* antara lain nama rizki anugrah pratama sebesar Rp8.6M. • Penurunan 22,7% pada piutang aging tidak lancar karena adanya pembayaran nota satker atas nama Rp2,3M, Cabang Banten NUTRINDO BOGARASA sebesar Rp3,3M, serta di Cabang Tanjung Priok karena pembayaran PRIMA BANDAR SAMUDERA sebesar Rp1,3M • Piutang macet juga mengalami kenaikan 1,7% dibandingkan periode November 2024 karena perpindahan Aging tidak lancar menjadi macet dibandingkan dengan total piutang Desember 2023 (*Audited*) yaitu 152,87M juga telah turun 10,70% dikarenakan turunnya piutang Cabang Banten, Jambi, Kijing, Palembang, Satker, Tanjung Priok dan Teluk Bayur karena adanya *switching invoice* ke *Subholding*. Hal-hal yang akan dilakukan • Dilakukan konfirmasi piutang usaha setiap bulan, kunjungan lapangan kepada beberapa Perusahaan bersar di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok di masing-masing Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok. • Melakukan kajian keuangan, khususnya *cash catio* untuk melakukan pengecekan kemampuan mitra dalam membayar piutang sebelum melakukan Kerjasama usaha • Revisi Perdir Kerjasama usaha, bahwa mitra sebelum melakukan Kerjasama akan dilakukan kajian/analisa keuangan dan analisa risiko atas Kesehatan keuangan mitra terlebih dahulu • *Monitoring Progress* Penanganan Piutang di JPN ACP sampai dengan Desember 2024 11,56 hari sedangkan jika dibandingkan dengan ACP November 2024 adalah 12,77 hari. ACP RKAP 2024 16,08 hari yang artinya sudah dibawah RKAP. Jika dibandingkan dengan ACP *Audited* Desember 2023 ACPnya adalah 16,72 Hari yang artinya ACP YoY juga mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Level dampak dianggap masih sangat tinggi karena beban penyisihan piutang sampai dengan Desember 34,85M, sedangkan limit risiko 14M. Artinya posisi piutang 249% dibandingkan dengan limit risiko PTP secara korporasi. Dengan kondisi beban penyisihan piutang yang dibandingkan limit risiko, dampak piutang berada di level 5 (karena >80% dari limit) dan kemungkinannya di level 1 karena berdasarkan threshold KRI piutang yaitu ACP berhasil turun 11,56 hari Dimana ACP<15 hari masuk dalam level “Sangat Aman” sehingga untuk level kemungkinan menjadi level 1 (sangat jarang terjadi)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
7	Piutang macet dan piutang bermasalah Delinquent and Impaired Receivables	1. Berkoordinasi dengan cabang-cabang agar melakukan penagihan atas piutang yang sudah jatuh tempo 2. Berkoordiasi dengan divisi komersial dan divisi hukum atas penanganan piutang tidak lancar Adapun *list* RKM, sebagai rencana penanganan risiko adalah sbb: Penanganan Piutang tidak lancar umur piutang >90 hari (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Coordination with branch offices to ensure collection efforts on overdue receivables 2. Coordination with the Commercial Division and Legal Division for the resolution of non-performing receivables Risk Mitigation Plan (RKM) initiatives include the following: Resolution of non-performing receivables aged over 90 days (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	As of December 2024, total trade receivables amounted to Rp135.52 billion, a decrease of Rp0.8 billion or 0.58% compared to November 2024, which stood at Rp137.31 billion. This decline was primarily driven by decreased receivables in the Banten, Jambi, Kijing, Pangkal Balam, Satker, Tanjung Priok, and Teluk Bayur branches. The Delinquent receivables: Rp83.42 billion, Non-current receivables: Rp34.86 billion, Current receivables: Rp18.23 billion. • Current receivables (0–30 days) increased by 78.97% compared to November 2024, driven by the issuance of new invoices related to minimum throughput charges, including a receivable from Rizki Anugrah Pratama amounting to Rp8.6 billion. • Non-current receivables decreased by 22.7% due to collections from Satker Rp2.3 billion, NUTRINDO BOGARASA at Banten Branch Rp3.3 billion, and PRIMA BANDAR SAMUDERA at Tanjung Priok Branch Rp1.3 billion. • Delinquent receivables increased by 1.7% compared to November 2024 due to reclassification of aging receivables from non-current to delinquent. When compared to audited total receivables as of December 2023, which stood at Rp152.87 billion, the December 2024 figure reflects a decline of 10.70%. This decrease was mainly due to reduced receivables at the Banten, Jambi, Kijing, Palembang, Satker, Tanjung Priok, and Teluk Bayur branches, following the transition of invoice processing to the Subholding entity. Thing to do • Monthly confirmations of trade receivables are conducted, including field visits to major customer companies operating within the business environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok across all branch offices. • Financial assessments, particularly cash ratio analysis, are carried out to evaluate the partners' ability to settle outstanding receivables prior to entering into any business partnership. • The Board of Directors Regulation on Business Partnerships has been revised to require that prospective partners undergo both financial and risk assessments to evaluate their financial health before any formal cooperation is established • As of December 2024, the monitoring of receivables collection progress through the JPN ACP system recorded an Average Collection Period (ACP) of 11.56 days, showing an improvement compared to 12.77 days in November 2024. This figure is already below the 2024 RKAP target of 16.08 days, indicating strong collection performance. When compared to the audited ACP as of December 2023, which stood at 16.72 days, the YoY ACP has declined significantly, demonstrating improved receivables efficiency. However, the impact level of receivables risk is still considered critical due to the provision for delinquent receivables reaching Rp34.85 billion as of December 2024, while the corporate risk limit is set at Rp14 billion. It means that the provision level has reached 249% of the established risk limit. Based on this condition: The impact level is categorized at Level 5 (Due to > 80% the risk limit) and the likelihood is at Level 1 because, based on the receivables KRI threshold, the ACP has successfully decreased to 11.56 days, where an ACP of less than 15 days falls within the 'Highly Secure' level, thus the likelihood is classified as Level 1 (Highly rarely occurs).

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
8	Inefisiensi Biaya	Pengendalian melalui *Budget Control* dengan mekanisme PR/POw	Telah dilakukan pengendalian beban usaha, dengan beban usaha s.d Desember 2024 sebesar Rp1.517M sedangkan RKAP 1.492M atau terserap 101,67%. Bahkan jika dibandingkan dengan Realisasi Beban Usaha Tahun 2023 sebesar Rp1.634M yang artinya serapan biaya juga terserap lebih tinggi secara YoY yaitu 92,84%. Realisasi BOPO *Unaudited* 2024 adalah 104,20% sedangkan target BOPO 85,88%. Beban yang telah berhasil diturunkan antara lain: 1. Beban bahan teralisasi dibawah anggaran 85,95% 2. Beban Pemeliharaan terealisasi dibawah anggaran 95,95% 3. Beban asuransi terealisasi 58,48% 4. Beban administrasi kantor terealisasi 87,44% Serapan biaya tertinggi pada Beban Penghasilan 101,70% (karena penyesuaian *base salary* dan tunjangan kelas individu), beban penyusutan amotisasi 112,48% (adanya kapitalisasi aset dan amortisasi atas beban ditangguhkan), serta beba umum 176,37% (meningkatnya beban penyisihan piutang). Meskipun Perusahaan telah berupaya maksimal dengan melakukan mitigasi yaitu sosialisasi pengendalian biaya ke seluruh divisi dan cabang, serta *monitoring* pengendalian biaya setiap bulan dengan *meeting one on one* secara *online*. Namun, belum dapat dilakukan Upaya efisiensi dengan maksimal karena ada penyebab lainnya yaitu: • KSMU *Revenue Sharing*, karena Perusahaan masih mencatatkan beban *Revenue Sharing* atas pendapatan di luar BASO dan pendapatan yang tidak terakomodir di sistem keuangan SPMT, sedangkan asumsi RKAP 2024 beban KSMU sudah tidak memperhitungkan beban *Revenue Sharing*. • Serta adanya kenaikan beban KSMU *outsourcing* atas bonus dan Cadangan PHK dengan PT PDS • Kenaikan beban pemeliharaan alat faspel dengan PT BIMA • Adanya realisasi beban PBB dari tahun 2022-2024. Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan beban usaha sebesar 24,86M di atas RKAP atau 1,67% diatas RKAP. Operating expense control has been implemented, with total operating expenses as of December 2024 reaching Rp1,517 billion, compared to the RKAP target of Rp1,492 billion, resulting in a realization rate of 101.67%. When compared to the actual operating expenses in 2023 of Rp1,634 billion, the YoY absorption rate increased to 92.84%, indicating higher expenditure in 2024. The unaudited BOPO for 2024 stood at 104.20%, exceeding the RKAP target of 85.88%. Despite this, several expense components were successfully reduced, including: 1. Materials expense realized at 85.95% of the budget 2. Maintenance expense realized at 95.95% 3. Insurance expense realized at 58.48% 4. Office administration expense realized at 87.44% The highest levels of cost absorption were recorded in several key expense categories. Employee compensation expenses reached 101.70%, (primarily due to adjustments in base salary and individual class allowances), Depreciation and amortization expenses stood at 112.48%, (resulting from the capitalization of assets and the amortization of deferred charges), while general expenses significantly exceeded the budget at 176.37%, (largely due to increased provisions for doubtful accounts).

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
8	Inefisiensi Biaya	Pengendalian melalui *Budget Control* dengan mekanisme PR/POw	Despite the Company's proactive mitigation efforts including cost control socialization across all divisions and branches and monthly one on one online monitoring meetings, cost efficiency measures have not yet been fully optimized due to other contributing factors, particularly: • One of the key contributing factors is the KSMU Revenue Sharing, as the Company continues to record revenue-sharing expenses for income sources outside BASO and revenues not yet accommodated in the SPMT financial system. The 2024 RKAP assumption has excluded revenue sharing expenses. • A rise in KSMU outsourcing costs, particularly related to bonuses and severance reserves in partnership with PT PDS. • An increase in maintenance expenses for port facility equipment, particularly those managed by PT BIMA • The realization of outstanding Land and Building Tax (PBB) liabilities for the fiscal years 2022–2024 Based on the above, it can be concluded that the operating expenses exceeded the RKAP by Rp24.86 billion, or 1.67% above the RKAP. Sehingga level dampak meningkat di level 5- sangat tinggi (>80% dari limit) karena beban usaha s.d Desember meningkat: Rp24,86M, sedangkan limit risiko Rp14M. Artinya posisi beban usaha 177% dibandingkan dengan limit risiko PTP secara korporasi. Sedangkan Tingkat kemungkinannya menjadi 5 (Probabilitas kejadian Risiko antara 80% sampai dengan 100%) karena belum terlihat efisiensi biaya pada tahun 2024 yang dibuktikan dengan meningkatnya beban usaha pada tahun 2024 (terserap 101,67% dibanding target) As a result, the impact level has increased to Level 5 – Very High (>80% of the risk limit), as operating expenses as of December rose by Rp24.86 billion, while the corporate risk limit is set at Rp14 billion. This indicates that the operating expense position has reached 177% of PTP's corporate risk threshold. Meanwhile, the likelihood level is also categorized at Level 5 (Risk occurrence probability between 80% and 100%) due to the absence of visible cost efficiency improvements in 2024, as reflected in the increased operating expenses in 2024 (realized 101.67% of the target)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
9	Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution	1. Lingkungan, inspeksi khusus lingkungan, *Health* dan *Evironment Campaign* 2. *Spill Management, Waste Management* 2. RKM: Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan di Cabang PT PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Environmental inspections, including dedicated environmental audits and Health and Environment Campaigns 2. Spill management and waste management initiatives 3. RKM: Implementation of the Environmental Management System at PTP branch offices (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	Hingga Desember 2024, tidak ada *case* pencemaran lingkungan. Mitigasi yang telah dilakukan: • Penyusunan standar lingkungan-sedang dilakukan pemantauan dokumen OSCP (*Oil Spill Contingecy Plan*) di seluruh cabang. Saat ini cabang yang sudah memiliki OSCP:Tj Priok, Panjang, TI Bayur, Kijing. • Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan Hidup Cabang Pontianak, Bengkulu, Panjang dan Pangkal Balam • Pengajuan Pelaksanaan *training* IMO OPRC Lv.1 • *Spill & waste management*: *On progress* pemenuhan *oil boom* di Kijing (kontrak dengan PT Legi) dan cabang-cabang lain • Telah dilaksanakan *Forum Ecosport* KSOP Tanjung Priok pada tanggal 31 Oktober 2024, *Contractor Townhall* HCML pada 8 November dan *Training Awareness* ISO 1400, ISO 45001, SMK3 & Proper PTP 18 November 2024 • Rekonsiliasi pengelolaan limbah B3 Triwulan III Tahun 2024 dengan KSOP Tanjung Priok | 4 November 2024 • Melakukan inspeksi lingkungan kerja di ruangan, meliputi kualitas udara dalam ruangan, kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, radiasi elektro *magnetic*, air minum, *ergonomic*, psikologi kerja • Telah dilaksanakan Forum *Ecosport* KSOP Tanjung Priok | 4 November 2024 • Pembahasan temuan audit SMK3 dan ISPS Regional 2 | 12 November 2024 • Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 14001 di Cabang-cabang PTP • *Drill* Penanganan Pencemaran Perairan PTP Priok pada 23 Desember 2024 PTP Berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait lingkungan diantarannya: *Certified* ISO 14001 dan 45001, Sertifikasi Proper dengan Regional atas implementasi pengelolaan lingkungan, Sertifikasi SMK3 bersama dengan Regional, Sertifikasi *Greenport* Bersama Regional megenai lingkungan Pelabuhan. Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi risiko pencemaran lingkungan, sehingga Tingkat risiko dapat diturunkan dengan dampak 1 (efek jangka pendek 1-2 tahun tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem) dan kemungkinan 1 (Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun)

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
9	Pencemaran Lingkungan Environmental Pollution	1. Lingkungan, inspeksi khusus lingkungan, *Health* dan *Evironment Campaign* 2. *Spill Management, Waste Management* 2. RKM: Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan di Cabang PT PTP (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Environmental inspections, including dedicated environmental audits and Health and Environment Campaigns 2. Spill management and waste management initiatives 3. RKM: Implementation of the Environmental Management System at PTP branch offices (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	As of December 2024, no environmental pollution cases have been reported. The Company has undertaken several mitigation measures, including: • Development of environmental standards, currently in progress through the monitoring of (OCSP) Oil Spill Contingency Plan documentation across all branches. Branches that have completed OSCP implementation include Tj Priok, Panjang, Teluk Bayur, and Kijing. • Environmental Impact Aspect Identification Conducted at Pontianak, Bengkulu, Panjang, and Pangkal Balam branches. • Submission for IMO OPRC Lv. 1 training implementation. • Spill and waste management initiatives: Ongoing fulfillment of oil boom equipment at the Kijing branch (a contract with PT Legi), as well as at other branches. • Execution of the PTP Care for Environment– Green Port Program. • Workplace environmental inspections, covering indoor air quality, noise levels, lighting, workplace climate, electromagnetic radiation, drinking water quality, ergonomics, and psychosocial working conditions. • Participation in the Ecosport Forum organized by KSOP Tanjung Priok on October 31, 2024, Contractor Townhall HCML on November 4, 2024, and Training Awareness ISO 1400, ISO 45001, SMK3 & Proper PTP on November 18, 2024 • Reconciliation of B3 waste management for the third quarter of 2024 with KSOP Tanjung Priok | November 4, 2024 • Discussion on audit findings of the SMK3 and ISPS audits for Region 2 on November 12, 2024. • Implementation of external ISO 14001 environmental management system audits at various PTP branches. • Execution of marine pollution response drills at PTP Tanjung Priok on December 23, 2024. PTP has successfully obtained several environment-related awards and certifications, including ISO 14001 and ISO 45001 certifications, PROPER Certification in collaboration with the Regional Office for the implementation of effective environmental management, SMK3 Certification along with the Regional Office, and Green Port Certification jointly awarded for port environmental stewardship. Based on the aforementioned explanation, it can be concluded that no environmental pollution risks occurred throughout 2024. Therefore, the overall environmental risk level can be downgraded, with the impact assessed at Level 1 (short-term effects 1–2 years that do not impair ecosystem function) and the likelihood assessed at Level 1 (reflecting a very rare occurrence, at most once per year).

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
10	Penyuapan dalam aktivitas di terminal maupun di *back office* Bribery Risks in Terminal and Back Office Operations	1. Lingkup SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) 37001 2. *Surveillance* sertifikasi *management system* ISO (9001, 14001, 45001, 37001)- (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with ISO 37001 2. Surveillance audits for ISO-certified management systems (ISO 9001, 14001, 45001, and 37001) (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	Berdasarkan nodin dari SM Sekretaris Perusahaan Nomor: SK.01.01/27/11/1/GDCG/SKPR-24 tanggal 27 November 2024 • Periode s.d bulan Oktober 2024, tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran di saluran *Whistleblowing System* (WBS) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di lingkungan PTP dan berdasarkan hasil Konfirmasi ke Group Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelindo, bahwa sampai dengan Desember 2024 tidak ada laporan pengaduan/indikasi pelanggaran pada saluran *whistleblowing system* • Sampai dengan Desember 2024 tidak ada pemberian/penerimaan gratifikasi yang termasuk kategori suap • Secara keseluruhan Implementasi SMAP dilingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok berjalan efektif dan memenuhi standar ISO 370001:2016, hal ini terlihat dengan tidak adanya temuan audit kategori Major Dalam rangka mengurangi probabilitas penyuapan, telah dilaksanakan: 1. *Training Awareness* dan Auditor ISO 370001:2016 dengan total peserta 100 orang 2. Pelaksanaan Audit Internal ISO Kantor Pusat dan Cabang PTP dan saat ini sedang proses penyusunan dan penyampaian temuan audit internal ISO integrasi KP dan Cabang 2024 3. Telah ada BAMK Audit Eksternal, dan pelaksanaan audit di Cabang Pontianak, Palembang dan Banten 4. *Sharing session* terkait *awareness* SMAP 37001 untuk seluruh managerial dan *staff* 5. Telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai PTP 6. Telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh pihak ketiga 7. Peraturan Direksi tentang WBS, Gratifikasi, dan Anti Penyuapan, serta sedang dalam proses penerbitan SK Tim FKAP dan UPG telah ditandatangani oleh Direktur Utama 8. Telah dibuat matriks kompetensi SMAP dan matriks komunikasi PTP 9. Telah ada satgas harian pada beberapa cabang, dengan salah satu item pemeriksaan pada dokumen checklistadalah "Menerima Penyuapan/gratifikasi *security*" Risiko pelanggaran kode etik/*fraud*, penyuapan akan berdampak besar pada turunnya reputasi Perusahaan. untuk itu PT PTP telah berupaya maksimal dalam meningkatkan pemberitaan positif bagi Perusahaan. PT Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pemberitaan sejumlah 145 pemberitaan baik berkaitan dengan pusat maupun cabang. Berita ditulis dari 60 media massa dan keseluruhan berita 100% memiliki sentiment positif. Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi risiko pelanggaran kode etik dapat diturunkan dengan dampak 1 (publikasi negatif yang terisolasi di wilayah sectoral melalui media konvesional) dan kemungkinan 1 (Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun).

No.	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Penanganan Risiko Risk Management Realization
10	Penyuapan dalam aktivitas di terminal maupun di *back office* Bribery Risks in Terminal and Back Office Operations	1. Lingkup SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) 37001 2. *Surveillance* sertifikasi *management system* ISO (9001, 14001, 45001, 37001)- (*progress overall* 100% dan *progress expected* sebesar 100%) 1. Implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with ISO 37001 2. Surveillance audits for ISO-certified management systems (ISO 9001, 14001, 45001, and 37001) (Overall progress: 100%, Expected progress: 100%)	Based on the internal memorandum issued by the Corporate Secretary Division, Number: SK.01.01/27/11/1/GDCG/SKPR-24 dated November 27, 2024 • As of October 2024, no whistleblowing reports or allegations of violations were received through the Whistleblowing System (WBS) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) within the PT PTP environment. Furthermore, based on confirmation with the Governance, Risk Management, and Compliance Group of PT Pelindo, no whistleblowing reports or indications of violations had been recorded through December 2024. • In addition, no incidents involving the giving or receiving of gratification classified as bribery were identified through December 2024. • Overall, the implementation of the SMAP within PT Pelabuhan Tanjung Priok has been effective and in alignment with ISO 37001:2016 standards, as evidenced by the absence of major findings during external audits. To mitigate the probability of bribery, the Company has carried out the following initiatives: 1. Conducted ISO 37001:2016 Awareness and Auditor Training, with a total of 100 participants 2. Executed internal ISO audits at the Head Office and branch levels, with the ongoing process of compiling and submitting integrated audit findings for 2024 3. Finalized BAMK for external audits, with audits completed at the Pontianak, Palembang, and Banten branches 4. Held sharing sessions on SMAP 37001 awareness for all managerial-level employees and staff 5. Completed Integrity Pact signings by all PTP employees 6. Ensured Integrity Pact signings by third-party partners 7. Enacted Board of Directors Regulations concerning the WBS, Gratification, and Anti-Bribery, along with the ongoing issuance of decrees for the FKAP and UPG teams, already signed by the President Director 8. PTP has developed a SMAP competency matrix as well as a corporate communication matrix. 9. Daily task forces have been established at several branches, with one of the items on the inspection checklist specifically addressing the risk of "acceptance of bribes/gratification by security personnel." The risks associated with violations of the code of conduct, fraud, or bribery pose a significant threat to the Company's reputation. In response, PT PTP has made strong efforts to strengthen its positive public image. Throughout the year, PTP recorded a total of 145 media coverages, covering both head office and branch activities. These were published across 60 media outlets, with 100% of the coverage reflecting positive sentiment. Based on these developments, it can be concluded that no code of conduct violations occurred during 2024. Therefore, the associated risk level can be downgraded, with the impact categorized at Level 1, (isolated negative publicity within sectoral media channels) and the likelihood categorized at Level 1, (Risk is very unlikely to occur, with a maximum of once per year).

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT(BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha PTP Terminal Nonpetikemas. Oleh karena itu, Direksi memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu prosedur *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa pelanggan dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional Perusahaan, mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/ operasional terpenting, dan menjaga aset Perusahaan dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana. Prosedur BCM tertuang pada prosedur *Business Continuity Management* No. QP.01/PIH/RIS/05 yang mencakup dokumen *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Emergency Response Plan* (ERP). Implementasi BCM merupakan salah satu langkah mitigasi Perusahaan dalam menghadapi risiko gangguan/ bencana yang dapat menghambat aktivitas Perusahaan sebagai contoh serangan *cyber*, bencana alam dan sebagainya.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan telah memberikan landasan yang kokoh untuk mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul di lingkungan operasionalnya. Melalui pengidentifikasian 10 (sepuluh) risiko signifikan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja, Perusahaan telah menunjukkan kepekaan terhadap potensi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya. Langkah ini tidak hanya memungkinkan Perusahaan untuk lebih memahami risiko-risiko yang dihadapinya, tetapi juga membuka peluang untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

PTP Terminal Nonpetikemas melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko.

Pada tahun 2024, Evaluasi Fungsi Manajemen Risiko dilakukan melalui *Risk Maturity Index* (RMI). Penilaian RMI berbasis kinerja adalah penilaian yang menggabungkan antara Penilaian RMI berdasarkan Dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) dan Peringkat Komposit Risiko. Aspek penilaian kinerja memperhatikan skala penyesuaian yang dipandang bahwa kualitas penerapanManajemen Risiko sinkron dengan hasil kinerja. yang terdiri dari 12 aspek, yang terdiri dari:

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

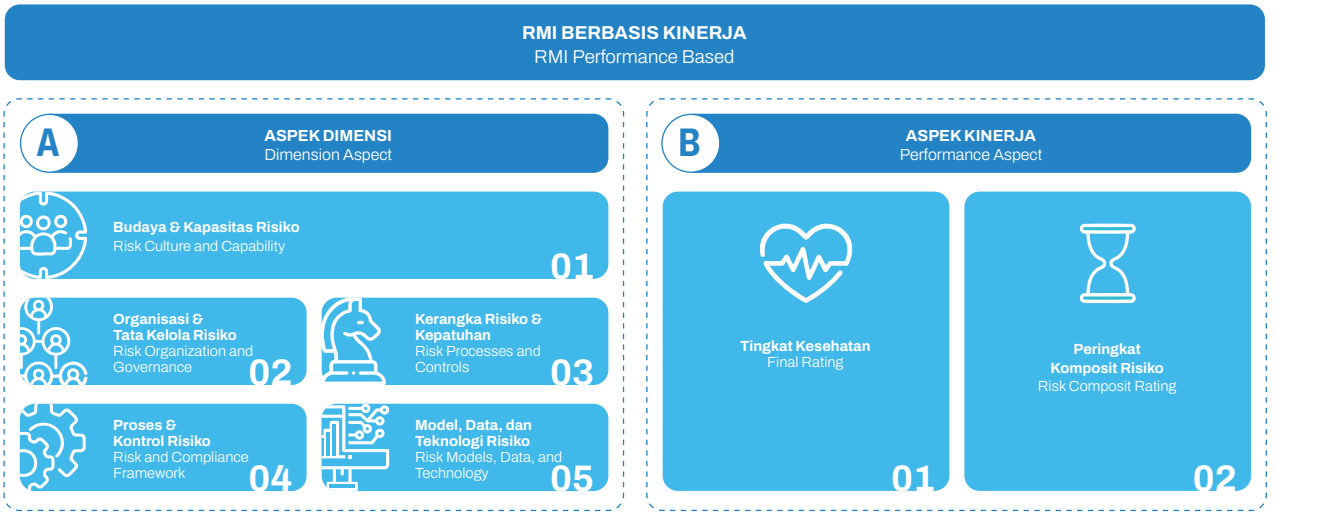
Potential disruptions/ disasters, whether caused by nature, human activity, or technology, pose a threat to the business continuity of PTP Terminal Nonpetikemas. Therefore, the Board of Directors deems it necessary to develop and implement a Business Continuity Management (BCM) procedure to protect the safety and security of workers, ensure the safety of customers and other stakeholders within the Company's operational units, maintain the continuity of critical business/operational activities, safeguard Company assets, and provide an adequate response in the event of disruptions or disasters. The BCM procedure is outlined in the Business Continuity Management Procedure No. QP.01/PIH/ RIS/05, which includes the Disaster Recovery Plan (DRP) and the Emergency Response Plan (ERP). The implementation of BCM serves as one of the Company's mitigation strategies in facing risks of disruption/disaster that may hinder its operations, such as cyberattacks, natural disasters, and others.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company has established a solid foundation for managing and controlling potential risks within its operations. Through the identification of ten (10) significant risks that could impact the achievement of performance targets, the Company has demonstrated awareness of potential challenges and obstacles it may face in its operations. This step not only allows the Company to better understand the risks it encounters but also provides opportunities to take appropriate preventive measures.

PTP Terminal Nonpetikemas conducts periodic evaluations of the effectiveness of its risk management system. The evaluation results are used to adjust and strengthen the system's risk management practices.

In 2024, the evaluation of the Risk Management Function was conducted using the Risk Maturity Index (RMI). The performance-based RMI assessment combines the Dimension-based RMI Evaluation with actual performance realization, which includes the Final Rating and the Composite Risk Rating. The performance assessment aspect considers the adjustment scale, based on the perspective that the quality of risk management implementation should be in sync with performance results. The assessment consists of 12 aspects, including:



Proses penilaian RMI ini mengacu pada juknis SK-8/DKU. MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dengan menggunakan 42 parameter pengukuran. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan metode *Cross Assessment*, Dimana PTP dinilai oleh tim asesor dari anak Perusahaan PT IKT (Indonesia Kendaraan Terminal), PT TCU (Terminal Curah Utama), serta tim dari induk Perusahaan (PT Pelindo Multi Terminal).

The RMI assessment process refers to the Technical Guidelines SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning the Technical Guidelines for the Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises, using 42 measurement parameters. The assessment was conducted using the Cross Assessment method, in which PTP was evaluated by an assessor team from PT IKT (Indonesia Kendaraan Terminal), PT TCU (Terminal Curah Utama), and the parent company team from PT Pelindo Multi Terminal.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, PTP memperoleh skor RMI sebesar 2,90. Skor ini menempatkan PTP pada fase "Praktik yang Baik" dalam spektrum penilaian RMI. Aspek yang menunjukkan kekuatan PTP adalah Aspek 2 (Organisasi dan Tata Kelola Risiko) dan Aspek 4 (Proses dan Kontrol Risiko), sementara aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Aspek 1 (Budaya dan Kapabilitas Risiko) dan Aspek 3 (Kerangka Risiko dan Kepatuhan). Berikut adalah hasil penilaian RMI PTP untuk setiap aspek dimensi.

Based on the assessment conducted, PTP obtained an RMI score of 2.90. This score places PTP in the "Good Practice" phase on the RMI assessment spectrum. The aspects that demonstrated PTP's strengths were Aspect 2 (Risk Organization and Governance) and Aspect 4 (Risk Process and Control), while the aspects requiring more attention were Aspect 1 (Risk Culture and Capability) and Aspect 3 (Risk Framework and Compliance). The following section presents PTP's RMI assessment results by dimension aspect.

Aspek Dimensi
Dimension Aspect

Parameter	Dimensi Dimension	Deskripsi Description	Skor DImensi Dimension Score	Skor Score
1 s.d 3	1	Budaya dan Kapabilitas Risiko Risk Culture and Capability	2,00	
4 s.d 19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko Risk Organization and Governance	3,13	
20 s.d 33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Framework	2,64	
34 s.d 40	4	Proses dan Kontrol Risiko Risk Processes and Controls	3,28	
41 s.d 42	5	Model, Data, dan Teknologi Risiko Risk Models, Data, and Technology	3,00	
	Skor Aspek Dimensi Dimension Score Aspect			2,90

Capaian ini mengidentifikasikan bahwa fondasi manajemen risiko telah terbangun.Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar PTP dapat mencapai level maturitas yang lebih optimal. PTP diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan maturitas manajemen risiko dan pencapaian sasaran strategi Perusahaan.

This achievement indicates that the foundation of risk management has been established. However, there is still room for improvement for PTP to reach a more optimal level of maturity. PTP is expected to consistently and continuously implement these recommendations as part of its efforts to enhance risk management maturity and achieve the Company's strategic objectives.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Direksi menyatakan bahwa sistem tersebut sudah diterapkan dengan cukup memadai. Evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penilaian profil risiko. Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Selain itu, rencana mitigasi yang diajukan oleh unit kerja operasional juga dinilai efektif dan memadai dalam mengatasi risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang dapat membahayakan keamanan, lingkungan, dan reputasi perusahaan, memberikan jaminan kepada para mitra bisnis dan pemangku kepentingan bahwa PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk menjadi pelaku yang bertanggung jawab dalam industri kepelabuhanan.

STATEMENZT OF THE BOARD OF DIRECTORS/ OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors affirms that the risk management system has been implemented adequately. The effectiveness of the risk management system is evaluated through periodic reviews of risk management policies and procedures, as well as assessments of the Company's risk profile. Meanwhile, the Board of Commissioners, assisted by the Risk Monitoring Committee, conducts oversight and evaluation of the implementation of the risk management system carried out by the Board of Directors. In addition, the mitigation plans proposed by operational work units have been assessed as effective and adequate in addressing the risks faced by the Company. The Company continues to enhance its operational efficiency by minimizing the likelihood of incidents that may jeopardize safety, the environment, and corporate reputation, thereby providing assurance to business partners and stakeholders that PTP Terminal Nonpetikemas is committed to acting as a responsible player in the port industry.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Fungsi Audit Eksternal dilaksanakan melalui audit atas Laporan Keuangan Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik independen. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun dan disajikan dengan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Audit tersebut mencakup pemberian opini atas kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan. Selain itu, audit juga melibatkan penelaahan ulang atas hal-hal yang telah diperiksa oleh Internal Audit dan pengamatan terhadap prosedur yang dilaksanakan oleh Internal Audit. Proses pemilihannya KAP dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Sebagai perusahaan terminal nonpetikemas, PTP Terminal Nonpetikemas bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kepatuhan ini memastikan laporan keuangan akurat, relevan, dan dipercaya. Manajemen secara terus-menerus memantau perubahan SAK dan melibatkan profesional akuntan untuk memastikan kepatuhan dan kualitas laporan keuangan Perusahaan.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja auditor eksternal dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas, maka terdapat standar audit yang harus dipenuhi, yaitu mencakup:

1. Inspeksi
2. Pengamatan
3. Konfirmasi
4. Permintaan keterangan

The External Audit function is carried out through the audit of the Company's Financial Statements by an independent Public Accounting Firm. This process aims to ensure that financial information is prepared and presented in accordance with the applicable Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The audit includes the issuance of an opinion on the fairness of the Company's Financial Statements. In addition, the audit involves reviewing matters previously examined by the Internal Audit and observing procedures performed by the Internal Audit. The selection of the KAP follows the applicable goods and services procurement procedures. It is to ensure the independence and quality of the audit results. The appointed External Auditor must not have any conflict of interest with the Company.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

As a non-container terminal company, PTP Terminal Nonpetikemas is responsible for presenting its financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). This compliance ensures that the financial statements are accurate, relevant, and reliable. Management continuously monitors changes in the SAK and engages professional accountants to ensure compliance and the quality of the Company's financial reporting.

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

To maintain the quality of the external auditor's performance and audit results, there are established audit standards that must be followed, including:

1. Inspection
2. Observation
3. Confirmation
4. Inquiry

5. Penelusuran
6. Perhitungan
7. *Scanning*
8. Pelaksanaan ulang
9. Pelaporan hasil audit

5. Tracing
6. Calculation
7. Scanning
8. Re-performance
9. Reporting of audit results

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Akuntan Publik dimulai dengan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dalam hal ini pemegang saham akan memperhatikan arahan dari *Holding*. Setelah mendapatkan persetujuan RUPS, Perusahaan mengajukan surat izin prinsip untuk penunjukan KAP yang dilakukan melalui proses tendersesuai keputusan RUPS kepada Dewan Komisaris. Proses selanjutnya melibatkan pembuatan pembuatan Nota Dinas untuk kemudian diproses dalam pengadaan guna menyelesaikan penunjukan KAP.

MECHANISM FOR APPOINTING A PUBLIC ACCOUNTANT

The appointment of a Public Accountant begins with the approval of shareholders at the GMS. In this process, the shareholders consider directions from the Holding Company. Following GMS approval, the Company submits a request for principal approval for the appointment of the Public Accounting Firm through a tender process in accordance with the GMS decision to the Board of Commissioners. The next step involves preparing a Memorandum which is then processed through the procurement mechanism to finalize the appointment of the KAP.

Akuntan Publik Tahun 2024
Public Accountant in 2024

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	: Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst* & Young Global Ltd)
Akuntan Accountant	: Moch. Dadang Syachruna
Tahun Audit Audit Year	: 2024
Periode Penugasan Assignment Period	: 31 Oktober 2024 s.d 30 April 2025 October 31, 2024 to April 30, 2025
Jasa Services	: Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 2024 Financial Statement Audit
Jasa Lainnya dan Biaya Jasa Lainnya Other Services and Other Services Fee	: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak memberikan jasa atestasi lainnya kepada Perusahaan selain jasa audit atas laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Biaya jasa lainnya : Tidak ada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja did not perform attestation services to the Company besides the audit services for the annual financial statement for the fiscal year dated December 31, 2024. Other Services Fee : None
Biaya Fee	: Rp 2.015.000.000,-

Daftar Akuntan Publik 5 (Lima) Tahun Terakhir 2020-2024
List of Public Accountant in the last 5 (five) Years 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Akuntan** Accountant	**Jasa** Service	**Opini Audit** Audit Opinion	**Jasa Lainnya** Other Services	**Biaya Audit (Rp)** Audit Fee (Rp)
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja (*member* of Ernst & Young Global Ltd)	Moch. Dadang Syachruna	Audit Laporan Keuangan tahun 2024 Audit for 2024 Financial Statement	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified opinion	Tidak memberikan jasa atestasi lainnya Did not perform attestation services	Rp2.015.000.000
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of* Ernst & Young Global Ltd)	Moch. Dadang Syachruna	Audit Laporan Keuangan tahun 2023 Audit for 2023 Financial Statement	*Audit for* 2024 *Financial Statement*	Tidak memberikan jasa atestasi lainnya Did not perform attestation services	Rp1.865.000.000

Daftar Akuntan Publik 5 (Lima) Tahun Terakhir 2020-2024
List of Public Accountant in the last 5 (five) Years 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Audit Audit Opinion	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (Rp)
2022	Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst & Young Global Ltd)	Moch. Dadang Syachruna	Audit Laporan Keuangan tahun 2022 Audit for 2022 Financial Statement	*Audit for* 2024 *Financial Statement*	Tidak memberikan jasa atestasi lainnya Did not perform attestation services	Rp1.858.890.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst & Young Global Ltd))	Moch. Dadang Syachruna	Audit Laporan Keuangan tahun 2021 Audit for 2021 Financial Statement	*Audit for* 2024 *Financial Statement*	Tidak memberikan jasa atestasi lainnya Did not perform attestation services	Rp1.858.890.000
2020	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst & Young Global Ltd)	Moch. Dadang Syachruna	Audit Laporan Keuangan tahun 2020 Audit for 2020 Financial Statement	*Audit for* 2024 *Financial Statement*	Tidak memberikan jasa atestasi lainnya Did not perform attestation services	Rp1.575.000.000

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

PTP Terminal Nonpetikemas senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

PTP Terminal Nonpetikemas consistently delivers accurate and up-to-date information regarding developments within the Company to its stakeholders. The information presented is the result of internal summarization and processing, which is then compiled into reports within a specified period in accordance with applicable information disclosure regulations.

Perusahaan meyakini penyebaran informasi yang transparan dan merata kepada seluruh Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal dapat membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta menciptakan persepsi positif mengenai Perusahaan di mata *stakeholder*. Namun demikian, transparansi informasi Perusahaan tetap harus memperhatikan batasan kerahasiaan informasi yang hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas.

The Company believes that the transparent and equitable dissemination of information to all stakeholders, both internal and external, helps maintain and enhance knowledge, understanding, and foster a positive perception of the Company among stakeholders. Nevertheless, the transparency of information must still consider confidentiality boundaries, whereby certain information may only be disclosed to a limited audience.

Akses informasi yang disediakan Perusahaan ditujukan khususnya bagi para pemangku kepentingan internal, yang mayoritas adalah karyawan Perusahaan. PTP Terminal Nonpetikemas memanfaatkan *platform online* seperti portal dan surel (*e-mail*) untuk menyebarkan informasi kepada seluruh karyawan. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan informasi kepada pihak eksternal melalui *leaflet* dan *Company Profile*.

The information access provided by the Company is primarily intended for internal stakeholders, the majority of whom are employees. PTP Terminal Nonpetikemas utilizes online platforms such as portals and emails to distribute information to all employees. In addition, the Company also provides external parties with information through leaflets and the Company Profile.

Perusahaan juga mengoperasikan beragam saluran komunikasi dan media informasi sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan. Saluran tersebut

The Company also operates various communication channels and information media as tools for disclosing information to stakeholders. These channels include the official company

meliputi situs web perusahaan, yaitu http://www.ptp.co.id/, serta akun media sosial seperti Facebook PT Pelabuhan Tanjung Priok, X @PTPNonpetikemas, Instagram @ptpnonpetikemas, dan saluran YouTube dengan nama PTP Terminal Nonpetikemas.

Perusahaan secara aktif menyampaikan beragam jenis informasi melalui media massa, salah satunya melalui kegiatan siaran pers. Pada tahun 2024, Perusahaan telah menerbitkan 48 siaran pers sebagai bentuk transparansi kepada publik dengan uraian sebagai berikut:

website: http://www.ptp.co.id/, and social media accounts such as Facebook (PT Pelabuhan Tanjung Priok), X (formerly Twitter) @PTPNonpetikemas, Instagram @ptpnonpetikemas, and a YouTube channel under the name PTP Terminal Nonpetikemas.

The Company actively disseminates various types of information through mass media, including press releases. In 2024, the Company published 48 press releases as a form of public transparency, with the following details:

No.	Bulan Month	Judul Title
1	Januari January	PTP Branch Teluk Bayur Apresiasi *Last Call & First Call Ship* pada Akhir Tahun 2023 dan Awal Tahun 2024 PTP Branch Teluk Bayur Commends Last Call & First Call Ship at Year-End 2023 and Early 2024
		Sambut Hari K3 Nasional PTP Terminal Nonpetikemas dengan tekad baru untuk melindungi setiap pekerja PTP Terminal Nonpetikemas Commemorates National OHS Day with Renewed Commitment to Worker Protection
		PTP Area Bengkulu *Handle* Pengapalan 20 Ton Kopi kepahiang PTP Bengkulu Area Handles Shipment of 20 Tons of Kepahiang Coffee
		Tingkatkan PAD, Pemkab Tanah Bumbu Jalin Kerja Sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok To Boost Regional Revenue, Tanah Bumbu Regency Government Establishes Cooperation with Tanjung Priok Port
2	Februari February	PTP Gelar Giat *Managemen Walktrough* Berkolaborasi Dengan Regional 2 Pelindo Tanjung Priok PTP Hosts Management Walkthrough in Collaboration with Pelindo Regional 2 Tanjung Priok
		PT Pelabuhan Tanjung Priok menerima penghargaan sebagai anak perusahaan terbaik PT Pelabuhan Tanjung Priok Recognized as Best Performing Subsidiary
		PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang banten bersama Pelindo Regional 2 Banten gelar acara forum K3 PT Pelabuhan Tanjung Priok Banten Branch and Pelindo Regional 2 Banten Host OHS Forum
3	Maret March	Regional 2 Tanjung Priok Gelar *Drill & Exercise* Gabungan Bersama Regional 2 Tanjung Priok Conducts Joint Emergency Drill and Exercise
		PTP Terminal Nonpetikemas Alami Pergantian dan Perubahan Pejabat Direksi PTP Terminal Nonpetikemas Division Announces Change in Board of Directors
		Pelindo Multi Terminal atau SPMT Berbagi Ramadhan 2024, serentak di seluruh *Branch* Pelabuhan dan Anak Perusahaan Pelindo Multi Terminal (SPMT) Shares Ramadan Blessings 2024 Across All Branches and Subsidiaries
		PTP Pangkal Balam Siapkan '*Droptank*' Curah Cair, untuk Dongkrak Produktivitas PTP Pangkal Balam Prepares 'Droptank' Liquid Bulk Facility to Boost Productivity
4	April April	Pacu Market Batu Bara, PTP Inisiasi *Conveyor Crusher* di Talang Duku Boost Coal Market Potential, PTP Initiates Conveyor Crusher Project in Talang Duku
5	Mei May	Potensi Bisnis di PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam Business Opportunities in PTP Terminal Nonpetikemas Pangkal Balam
		Romi Hasbeni Jabat sebagai *Branch Manager* PTP Terminal Nonpetikemas Jambi Romi Hasbeni Appointed as Branch Manager of PTP Terminal Nonpetikemas Jambi
		PTP Terminal Nonpetikemas Gelar Acara Pisah Sambut Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus halal - bihalal PTP Terminal Nonpetikemas Holds Farewell and Welcome Ceremony for Board of Commissioners and Directors, Combined with Eid Gathering
		Transformasi PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Banten PTP Terminal Nonpetikemas Banten Branch Undergoes Organizational Transformation
		PTP Terminal Nonpetikemas Realisasikan Program TJSL 21 Ekor Sapi Hewan Qurban 2024 PTP Terminal Nonpetikemas Distributes 21 Sacrificial Cattle under 2024 TJSL Program
		PTP Terminal Nonpetikemas Gelar RUPS Tahun Buku 2023 PTP Terminal Nonpetikemas Holds Annual General Meeting for Fiscal Year 2023
7	Juli July	PTP Branch Tanjung Priok Bongkar Soda ASH dari Kapal MV Anima PTP Tanjung Priok Branch Unloads Soda Ash from MV Anima
		PTP Branch Cirebon Bongkar Kargo Palm Kernel Shell Kapal BG Marine PTP Cirebon Branch Unloads Palm Kernel Shell Cargo from BG Marine Vessel
		PTP Terminal Nonpetikemas Cirebon *Branch, Dominates Dry Bulk Loading and Unloading*
		PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Palembang Gelar Sosialisasi *Host to Host Auto Colection & Supply Chine Managing* PTP Terminal Nonpetikemas Palembang Branch Conducts Host-to-Host Auto Collection and Supply Chain Management Socialization
		Indra Hidayat Sani, Direktur Utama PTP Terminal Nonpetikemas Kunjungi PTP *Branch* Panjang Indra Hidayat Sani, President Director of PTP Terminal Nonpetikemas, Visits PTP Panjang Branch
		Penganugerahan Pemenang Kompetisi PTP Inovasi Tahun 2024 Winners Announced for PTP Innovation Competition 2024
8	Agustus August	Transformasi PTP Cabang Banten Transformation of PTP Banten Branch
		PTP Terminal Nonpetikemas Memperluas Pangsa Pasar Bisnis *Shorebase* di Indonesia PTP Terminal Nonpetikemas Expands Shorebase Business Market Share in Indonesia

No.	Bulan Month	Judul Title
8	Agustus August	Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Hingga Kuartal II 2024 PTP Terminal Nonpetikemas Salurkan Dana TJSL ke Program Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Supporting Sustainable Development: By Q2 2024, PTP Terminal Nonpetikemas Allocates CSR Funds to Environmental, Economic, and Social Programs
		Penghijauan Lingkungan HUT RI ke 79 Greening Activities in Commemoration of the 79th Independence Day
9	September September	Tingkatkan Pelayanan, PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Telah Menerapkan PTOS-M Sejak 2023 To Improve Services, PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Has Implemented PTOS-M Since 2023
		PTP Terminal Nonpetikemas Perkuat Posisi dengan Sistem Digital PTOSM dan Standarisasi Layanan untuk Pelanggan PTP Terminal Nonpetikemas Strengthens Its Position Through Digital PTOS-M System and Standardized Customer Services
		PTP Terminal Nonpetikemas Perkuat Kompetensi SDM *Multipurpose* Melalui Program HiPO PTP Terminal Nonpetikemas Enhances Multipurpose Human Capital Competence Through HiPO Program
		PTP Terminal Nonpetikemas Gelar Program Pelindo Mengajar, Dorong Generasi Muda Mengenal Industri Kepelabuhanan PTP Terminal Nonpetikemas Launches "Pelindo Mengajar" Program to Introduce the Port Industry to the Younger Generation
		PTP Terminal Nonpetikemas Prioritaskan Keselamatan dan Keamanan dengan Target *Zero Fatality* PTP Terminal Nonpetikemas Prioritizes Safety and Security with a Target of Zero Fatality
		Sambut Hari Maritim Nasional, SPMT Grup Perkuat Ekosistem Pesisir Kalteng dengan 30.000 Bibit Mangrove In Commemoration of National Maritime Day, SPMT Group Strengthens Coastal Ecosystem in Central Kalimantan by Planting 30,000 Mangrove Seedlings
10	Oktober October	PTP Terminal Nonpetikemas Dukung Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Grade Alumina di Terminal Kijing PTP Terminal Nonpetikemas Supports the National Strategic Project for Smelter Grade Alumina Development at Kijing Terminal
		Memperkuat Budaya Risiko sebagai pilar utama,PTP Terminal Nonpetikemas selenggarakan Risk Award 2024 Strengthening Risk Culture as a Core Pillar, PTP Terminal Nonpetikemas Holds the 2024 Risk Award
		Jelang Satu Dekade: PTP Terminal Nonpetikemas selenggarakan Kegiatan Donor Darah, Capai Target 200 Kantong Darah! Approaching 1 Decade: PTP Terminal Nonpetikemas Holds Blood Donation Drive, Reaches Target of 200 Blood Bags
11	November November	Satu Dekade PTP Terminal Nonpetikemas Untuk Negeri, Transformasi Perusahaan Terus Dilakukan A Decade of PTP Terminal Nonpetikemas for the Nation: Ongoing Corporate Transformation
		Meningkatkan Keselamatan Kerja di Pelabuhan: PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu Gelar HSSE Forum dan Komitmen Bersama Stakeholder Pelabuhan Enhancing Port Occupational Safety: PTP Terminal Nonpetikemas Bengkulu Branch Hosts HSSE Forum and Joint Commitment with Port Stakeholders
		Transformasi PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi Operasional Operational Efficiency Boosted Through Transformation of PTP Terminal Nonpetikemas Teluk Bayur Branch
		PTP Terminal Nonpetikemas Kembali Raih Peringkat Perak di SNI Award 2024, Petahankan Komitmen terhadap Standardisasi Nasional PTP Terminal Nonpetikemas Wins Silver Rating Again at the 2024 SNI Award, Reinforcing Commitment to National Standards
12	Desember December	PTP Terminal Nonpetikemas Terus Tingkatkan Produktivitas dalam Layanan Bongkar Muat di Pelabuhan PTP Terminal Nonpetikemas Continues to Increase Productivity in Port Loading and Unloading Services
		PTP Terminal Nonpetikemas Peringati Hari Antikorupsi Sedunia 2024 PTP Terminal Nonpetikemas Observes International Anti-Corruption Day 2024
		PTP Terminal Nonpetikemas Optimis Tingkatkan Produktivitas, Songsong 2025 dengan Ekspansi dan Inovasi Optimistic for 2025: PTP Terminal Nonpetikemas to Drive Growth Through Expansion and Innovation
		PTP Terminal Nonpetikemas Dorong Terwujudnya Inklusivitas Melalui Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas PTP Terminal Nonpetikemas Promotes Inclusivity Through Educational Infrastructure Support for Persons with Disabilities
		200 Anak Ikuti Sunatan Massal: Wujud Kepedulian Keluarga Besar PTP Terminal Nonpetikemas Terhadap Masyarakat Sekitar 200 Children Participate in Mass Circumcision: A Reflection of PTP Terminal Nonpetikemas' Care for Local Communities
		PTP Terminal Nonpetikemas Rayakan Hari Ibu dengan Pelatihan Olahan Makanan Sehat (Ikan dan Rumput laut) di Kampung Nelayan Kalibaru In Celebration of Mother's Day, PTP Terminal Nonpetikemas Hosts Healthy Food Processing Training (Fish and Seaweed) for Kalibaru Fishing Village
		Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pelindo Multi Terminal Group Pastikan Kelancaran Bongkar Komoditas Beras Strengthening National Food Security: Pelindo Multi Terminal Group Ensures Smooth Unloading of Rice Commodities

KORPORASI MENERBITKAN LAPORAN TAHUNAN SECARA TERINTEGRASI

Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan, sebagaimana telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui website Korporasi pada laman: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/.

THE COMPANY PUBLISHES INTEGRATED ANNUAL REPORT

The Company has published an integrated annual report that places historical performance in context and provides a comprehensive view of the Company's risks, opportunities, and future prospects. This approach supports shareholders and stakeholders in understanding the Company's strategic objectives and its progress in creating sustainable value. The report has been published and is accessible through the Company's official website at: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/.

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk melaksanakan penerapan governansi sesuai dengan standar moral dan etika tertinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*). Secara umum pedoman kode etik bisnis Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk mendorong seluruh insan PTP Terminal Nonpetikemas untuk berperilaku baik dan melaksanakan segala aktivitas Perusahaan, sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyama dalam lingkungan Perusahaan.

Kode Etik ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, tetapi juga untuk memperkuat budaya Perusahaan secara menyeluruh. Dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Hal ini akan membantu manajemen dan karyawan untuk mematuhi standar yang diharapkan, serta memberikan nilai tambah bagi kelangsungan bisnis, kebutuhan para pemangku kepentingan, dan kepentingan para pemegang saham.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Berdedikasi kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik Perusahaan tertuang dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang berisi:

Deklarasi Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pendahuluan
   a. Latar Belakang
   b. Maksud dan Tujuan

PTP Terminal Nonpetikemas is committed to implementing governance in accordance with the highest moral and ethical standards by referring to best practices and the Business Code of Conduct. In general, the Company's Code of Conduct is intended to encourage all personnel of PTP Terminal Nonpetikemas to behave ethically and conduct all company activities responsibly. It serves as a behavioral guideline that must be followed by all members of the Company when conducting business activities, in order to foster a healthy and comfortable working environment.

This Code of Conduct not only aims to realize the Company's Vision and Mission but also to strengthen the overall corporate culture. By consistently applying the Company's values and culture, it is expected that a healthy work environment will be created. This will help both management and employees comply with expected standards and provide added value to business continuity, stakeholder needs, and shareholder interests.

CORPORATE VALUES

Trustworthy

Uphold the trust given

Competent

Continue to learn and develop capabilities

Harmonious

Caring for each other and respecting differences

Loyal

Dedicated and prioritizing the interest of the Nation and State

Adaptive

Continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing changes.

Collaborative

Build synergistic collaboration

KEY ELEMENTS OF THE CODE OF CONDUCT

The key elements of the Company's Code of Conduct are outlined in the Business Code of Conduct of PT Pelabuhan Tanjung Priok, which include:
Declaration of Commitment from the Board of Commissioners and Directors

1. Introduction
   a. Background
   b. Purpose and Objectives

c. Manfaat
d. Landasan Penyusunan Pedoman Kode Etik Bisnis
e. Visi-Misi
f. Nilai Perusahaan
g. Pelaporan dan Kepatuhan
h. Daftar Istilah

2. Etika Profesional
a. Hubungan dengan Pegawai
b. Hubungan dengan Pemegang Saham
c. Hubungan dengan Serikat Pekerja
d. Hubungan dengan Pelanggan
e. Hubungan dengan Vendor
f. Hubungan dengan Kreditur
g. Hubungan dengan Debitur
h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan
i. Hubungan dengan Pesaing
j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan
k. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah
l. Hubungan dengan Anak Perusahanan

3. Etika Kerja
a. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lain
b. Benturan Kepentingan
c. Korupsi dan Suap
d. Anti Kecurangan (Anti Fraud)
e. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya
f. Pencucian Uang
g. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi)
h. Kesempatan yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
i. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
j. Integritas Laporan Keuangan
k. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
l. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi
m. Pengelolaan Arsip
n. Perlindungan Harta Perusahaan
o. Pengendalian Internal
p. Perjalanan Dinas
q. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
r. Aktivitas Politik dan Sosial
s. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja
t. Pelanggaran *Insider Trading*

4. Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis
a. Komitmen Pedoman Kode Etik Bisnis
b. Sosialisasi dan Internalisasi
c. Pelanggaran
d. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
e. Sanksi atas Pelanggaran

5. Penutup
a. Lampiran 1-*Form* Pernyataan Pakta Integritas untuk Insan PTP
b. Lampiran 2- *Form* Kepatuhan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Dewan Komisaris dan Direksi
c. Lampiran 3-*Form* Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) berlaku bagi seluruh insan PTP Terminal Nonpetikemas di seluruh jenjang organisasi Perusahaan. Di mana Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan PTP Terminal Nonpetikemas wajib menandatangani Surat Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik

c. Benefits
d. Basis for Developing the Business Code of Conduct
e. Vision and Mission
f. Corporate Values
g. Reporting and Compliance
h. Glossary of Terms

2. Professional Ethics
a. Relationship with Employees
b. Relationship with Shareholders
c. Relationship with Labor Unions
d. Relationship with Customers
e. Relationship with Vendors
f. Relationship with Creditors
g. Relationship with Debtors
h. Relationship with Investors and Financial Institutions
i. Relationship with Competitors
j. Relationship with Society, Communities, and the Environment
k. Relationship with Regulators and Government Officials
l. Relationship with Subsidiaries

3. Work Ethics
a. Compliance with Laws, Regulations, and Other Provisions
b. Conflict of Interest
c. Corruption and Bribery
d. Anti-Fraud
e. Theft and Other Similar Misconduct
f. Money Laundering
g. Gratification (Giving and Receiving Gifts, Hospitality, Entertainment, and Donations)
h. Equal Opportunities for Employment and Promotion
i. Corporate Documentation and Recordkeeping
j. Integrity of Financial Reporting
k. Confidentiality of Data and/or Information
l. Media, Communication, and Information Dissemination
m. Archive Management
n. Protection of Company Assets
o. Internal Control
p. Business Travel
q. Intellectual Property Rights (IPR)
r. Political and Social Activities
s. Ethical Conduct Toward Fellow Employees
t. Insider Trading Violations

4. Enforcement of the Business Code of Conduct Guidelines
a. Commitment to the Code of Conduct
b. Socialization and Internalization
c. Violations
d. Violation Reporting Mechanism
e. Sanctions for Violations

5. Closing
a. Appendix 1– Integrity Pact Declaration Form for PTP Personnel
b. Appendix 2 – Compliance Declaration Form for the Board of Commissioners and Directors
c. Appendix 3 –Conflict of Interest Declaration Form for the Board of Commissioners and Directors

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT AT ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

The Company's Code of Conduct applies to all personnel of PTP Terminal Nonpetikemas across all levels of the organization. The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of PTP Terminal Nonpetikemas are required to sign an Integrity and Code of Conduct Compliance Statement annually,

setiap tahunnya untuk menaati dan melaksanakan isi pedoman secara konsisten dan bertanggung jawab.

as a commitment to consistently and responsibly uphold and implement the contents of the Code.

Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis

Integrity and Business Code of Conduct Compliance Statement



PELINDO

SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI KOMITMEN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
UNTUK MELAKSANAKAN PAKTA INTEGRITAS
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL



PELINDO



PELINDO

JANJI KODE ETIK BISNIS

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, saya yang menyatakan dan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Hidayat Sani
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kedudukan : Jl. Yos Sudarso No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Janji Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan komitmen kami terhadap pelaksanaan bisnis yang adil, transparan dan beretika, serta kami akan sepenuhnya mematuhi peraturan dan regulasi yang tertulis di dalam Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan ini menyatakan Janji Kode Etik Bisnis saya kepada Perusahaan sebagai berikut:

1. Akan bekerja sama dengan seluruh *Stakeholders* kami dengan integritas dan transparansi, sehingga dapat mencapai visi Perusahaan;
2. Akan menunjukan kejujuran, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Bisnis dan secara tegas mematuhi semua peraturan yang tertulis di dalamnya;
3. Akan mematuhi Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyelaraskan rekan kerja dan *Stakeholders* lain dengan gambaran yang lebih luas, dalam usaha mendukung pertumbuhan bangsa;
4. Akan menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan organisasi dengan menerapkan perilaku sesuai dengan Kode Etik Bisnis;
5. Akan bertanu sebagai insan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang bertanggung jawab, memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan penuh tanggung jawab serta menjaga lingkungan dan komunitas di Perusahaan;
6. Akan berkomitmen untuk melaksanakan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Akan menjaga kerahasiaan informasi PT Pelabuhan Tanjung Priok dan selalu berkoordinasi dengan atasan langsung dalam memberikan informasi kepada pihak luar.



PELINDO

Demikian JANJI KODE ETIK BISNIS ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, bilamana ternyata dalam pelaksanaan tugas Perusahaan saya terbukti secara sah dan meyakinkan TIDAK MELAKSANAKAN KODE ETIK BISNIS PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK, maka saya BERSEDIA DIBERIKAN SANKSI sesuai ketentuan yang berlaku.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA

INDRA HIDAYAT SANI

SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Setiap Insan PTP yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dengan melalui mekanisme indisiplner.
2. Mendapatkan rekomendasi dari Tim Indisipline. Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/ mekanisme indisipliner.
3. Sanksi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

4. Bila mitra usaha atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Dalam rangka membangun kultur Perusahaan berbasis nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *Corporate Culture*, maka Perusahaan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisni ini kepada seluruh Insan PTP secara berkala.

PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK BISNIS

Komitmen Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (Stakeholders), maka seluruh Insan PTP memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan;
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuna serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota Masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan PTP dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku; dan
9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik

PELANGGARAN

Setiap Insan PTP maupun pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan laporan/pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pedoman Kode Etik Bisnis dan/atau pelanggaran atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan pengaduaan (*Whistleblowing*).

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

1. Any personnel of PTP found to have violated the Business Code of Conduct will be subject to sanctions in accordance with the applicable regulations and policies of the Company, through a disciplinary mechanism.
2. Upon receiving a recommendation from the Disciplinary Team, the Board of Commissioners and/or Directors will decide on corrective actions, disciplinary sanctions, and/ or other necessary measures and preventive actions to be implemented by the direct supervisor within each respective unit/work environment, following the disciplinary mechanism.
3. Sanctions for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations will be determined by the Shareholders.
4. If a business partner or other stakeholder commits a violation, they will be subject to the provisions outlined in the contract and other applicable regulations. If the violation involves a criminal act, the matter may be referred to the appropriate legal authorities.

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION

To build a Company culture based on the values of Good Corporate Governance and Corporate Culture, the Company is obligated to periodically socialize and internalize the values contained in this Business Code of Conduct to all PTP personnel.

ENFORCEMENT OF THE BUSINESS CODE OF CONDUCT

Commitment to Enforce the Business Code of Conduct
As part of the Company's commitment to stakeholders, all PTP personnel are committed to:

1. Always think and act corporately by prioritizing the interests of the Company above personal and/or group interests, to give their best for the Company;

2. Always be mindful of and maintain the Company's good image and reputation;
3. Perform duties professionally, with full responsibility, upholding integrity, honesty, and a spirit of togetherness;

4. Be attentive and responsive to customer/business partner complaints and promptly follow up according to applicable regulations;
5. Have a strong motivation to develop themselves and broaden their knowledge, as well as be willing to share knowledge and skills and assist colleagues without fear of competition;

6. Always behave commendable as individuals and as members of society and refrain from disgraceful acts that could damage the Company's image;
7. Avoid any actions that may violate regulations and or abuse authority;
8. Practice their respective religious beliefs properly and understand and comply with ethical behavior; and

9. Work in accordance with the principles of Good Corporate Governance

VIOLATIONS

Any PTP personnel or relevant parties may submit reports/ grievances regarding suspected violations of the Business Code of Conduct and/or violations that fall within the scope of complaint management (Whistleblowing).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Pelapor dapat atau tidak mengungkapkan identitasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di Perusahaan;
2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor apabila pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran pedoman Kode Etik Bisnis ini;
3. Perusahaan menjamin kerahasiaan data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor dan menjamin perlindungan bagi pelapor atas:
   a. Dihilangkannya/ditunda hak-hak/sanksi kepegawaian;
   b. Diskriminasi, tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan/atau;
   c. Tindakan-tindakna lainnya sebagai response (tindakan yang bersifat pembalasan) dari manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan olehnya.
4. Kerahasian pelapor akan dijaga secara ketat, kecuali apabila:
   a. Yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan;
   b. Diperlukan dalam kaitannya dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
   c. Sejalan dengan kepentingan perusahaan dan sesuai dengan Pedoman Kode Etik Bisnis ini;
   d. Diperlukan oleh unit yang membidangi hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan dihadapan hukum.

Pada tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Bisnis sehingga tidak ada sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Bisnis oleh Perusahaan.

Important points to consider:

1. The whistleblower may choose to remain anonymous or disclose their identity, according to the Company's policy;
2. The whistleblower will not be penalized if the reported violation is proven true, unless the whistleblower is also involved in the violation of Code of Conduct;
3. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's data and other information, and ensures protection against:
   a. The removal or postponement of employment rights/ sanctions;
   b. Discrimination, physical or psychological pressure; and/or
   c. Other retaliatory actions from management or the reported party in response to the report/complaint.
4. Whistleblower confidentiality will be strictly maintained, except in the following cases:
   a. The whistleblower consents to the disclosure of information for the purpose of investigation;
   b. Disclosure is required in connection with legal reports or investigations by law enforcement authorities;
   c. Disclosure is aligned with the interests of the Company and complies with this Business Code of Conduct;
   d. Disclosure is needed by the legal division to defend the Company's legal position.

In 2024, there were no violations of the Business Code of Conduct; therefore, no sanctions were imposed by the Company for such violations.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA
POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS, AND ITS IMPLEMENTATION

PTP Terminal Nonpetikemas bukan merupakan perusahaan terbuka, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahaan kepemilikan saham perusahaan terbuka.

PTP Terminal Nonpetikemas is not a publicly listed company; therefore, there is no information regarding share ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners that must be disclosed within 3 (three) working days following the acquisition or any change in share ownership, as required for publicly listed companies.

PERNYATAAN KOMITMEN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION COMMITMENT STATEMENT

Sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PTP Terminal Nonpetikemas menegakkan kepatuhan hukum dan moralitas tinggi, serta melindungi reputasi Perusahaan. Melalui tindakan nyata seperti pencegahan korupsi, sistem *whistleblowing*, dan penolakan terhadap praktik ilegal, Perusahaan

As part of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PTP Terminal Nonpetikemas upholds legal compliance and high moral standards while protecting the Company's reputation. Through concrete actions such as corruption prevention, whistleblowing systems, and rejection of illegal practices, the Company serves

berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh staf PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk mempertahankan tingkat persaingan yang sehat, mengedepankan nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme, serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain itu, Perusahaan juga terus berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menghindari perilaku atau tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Insan PTP Terminal Nonpetikemas juga diinstruksikan untuk menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan.

PTP Terminal Nonpetikemas telah menegaskan komitmennya dalam menjalankan prinsip anti-korupsi melalui berbagai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan. Pernyataan komitmen anti-korupsi yang terangkum dalam Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024, Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, dan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024.

as a positive agent of change in society and supports sustainable economic growth in Indonesia.

In this regard, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all staff of PTP Terminal Nonpetikemas are committed to maintaining fair competition, prioritizing the values of sportsmanship and professionalism, and implementing the principles of good corporate governance. Moreover, the Company continues to strive to create a conducive business environment and avoid behaviors or actions that may lead to conflicts of interest, corruption, collusion, and nepotism (KKN). All personnel of PTP Terminal Nonpetikemas are instructed to place the interests of the Company above personal, family, group, or class interests.

PTP Terminal Nonpetikemas has reaffirmed its anti-corruption commitment through various policies and established guidelines. The anti-corruption commitment is outlined in the following documents: Whistleblowing System Guidelines within PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024; Gratification Control Guidelines within PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024; Anti-Bribery Management System Governance Guidelines within PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22 2024; Integrated Conflict of Interest Guidelines No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

STATEMENT OF COMMITMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Perusahaan telah menetapkan kebijakan anti korupsi yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan, Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024, Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, dan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024. Dalam pelaksanaannya, pedoman-pedoman tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya secara berkala, yaitu setiap tahun.

The Company has established an anti-corruption policy as stated in the Company's Code of Conduct, the Whistleblowing System Guidelines at PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, the Gratification Control Guidelines at PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, the Anti-Bribery Management System Governance Guidelines at PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, and the Integrated Conflict of Interest Guidelines No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024. These guidelines have been properly implemented in practice. Furthermore, the Company regularly evaluates their effectiveness on an annual basis.

PROGRAM DAN PROSEDUR DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

Dalam upayanya untuk menangani praktik korupsi, Perusahaan telah menetapkan komitmen yang kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai program dan prosedur yang diterapkan, seperti program dan prosedur penerapan *Whistleblowing System*, pengelolaan gratifikasi, anti *Money Laundering*, pencegahan dan pelaporan pungutan liar. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan standar ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai langkah konkret dalam memastikan kepatuhan dan transparansi dalam operasi bisnisnya.

PROGRAMS AND PROCEDURES TO COMBAT CORRUPTION

As part of its commitment to combating corruption, the Company has implemented a strong framework of programs and procedures. These include the implementation of a Whistleblowing System, gratification management, anti-money laundering measures, and prevention and reporting of illegal levies. In addition, the Company has adopted the ISO 37001:2016 standard for the Anti-Bribery Management System (ABMS), as a concrete step to ensure compliance and transparency in its business operations.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Dalam upaya memperkuat integritas dan meningkatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip anti korupsi, Perusahaan merancang sebuah rangkaian program sosialisasi yang komprehensif. Langkah pertama dalam rangkaian ini adalah menyampaikan kebijakan anti korupsi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan manajemen dan karyawan melalui berbagai *platform* yang tersedia .

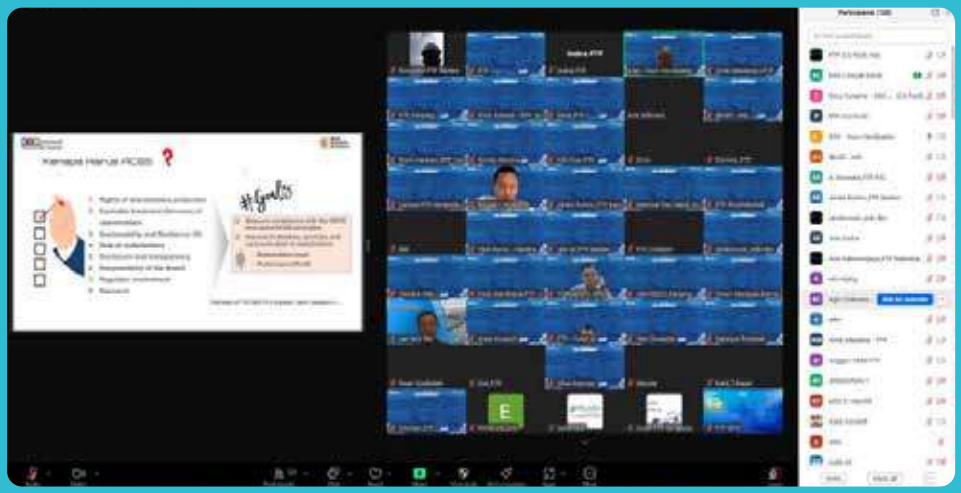
ANTI-CORRUPTION TRAINING/ SOCIALIZATION

To strengthen integrity and enhance adherence to anti-corruption principles, the Company has designed a comprehensive socialization program. The first step in this initiative involves thoroughly communicating the anti-corruption policy to all levels of management and employees through various available platforms.

No	Bentuk Sosialisasi Form of Socialization	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	Sosialisasi Pemahaman GCG melalui P-*Good* Socialization of GCG Understanding through P-Good	6 Februari 2024-31 Maret 2024 February 6, 2024-March 31, 2024	Pemahaman GCG saat pengisian survey GCG dan penandatanganan Pakta Integritas Understanding of Good Corporate Governance (GCG) During the GCG Survey Completion and Integrity Pact Signing
2	Sosialisasi *Awerness* GCG: (@KIM.consult | Linktree) 1. Pemahaman Governansi Korporat 2. Pemahaman PUGKI yang merupakan Pedoman Praktik Governansi Korporat Indonesia 3. Sosialisasi ACGS Awareness GCG Awareness Socialization (@KIM.consul|LIinktree) 1. Corporate Goverance Understanding 2. PUGKI Understanding, known as General Guideline for Indonesian Corporate Governance 3. ACGS Awareness Socialization	2 Agustus 2024 August 2, 2024	Melalui platform Zoom Meeting Conducted via the Zoom Meeting



SOSIALISASI PEMAHAMAN GCG MELALUI PGOOD
SOCIALIZATION OF GCG UNDERSTANDING THROUGH P-GOOD



SOSIALISASI *AWARENESS* GCG OLEH KIM CONSULT
GCG AWARENESS SOCIALIZATION KIM

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan berkomitmen menjaga kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan dan masyarkat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi. Dalam implementasi komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola dengan transparan dan adil melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan PTP dan seluruh *stakeholder* dihimbau untuk berbicqara melalui sistem uang independen ini, kapanpun melihat adanya pelanggaran kode etika, kepatuhan dan tata Kelola yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan PTP atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh "telapor". Dengan melaporkan adanya pelanggaran, insan PTP atau *stakeholder* telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Di samping itu, insan PTP atau *stakeholder* juga telah membantu PT Pelabuhan Tanjung Priok meminimalisasi tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok yang digunakan oleh seluruh Grup Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja uang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasa. Seluruh saluran pelaporan terpusat yang disediakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah *Whistleblowing System* yang independen.

Dalam penerapannya, Perusahaan memiliki Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024, Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024, dan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024.

The Company is committed to maintaining the trust and credibility of the public, shareholders, government, business partners, and other stakeholders by upholding high standards of integrity and commitment. As part of its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the Company has established a transparent and fair grievance channel through the Whistleblowing System (WBS).

The management of PT Pelabuhan Tanjung Priok believes in fostering a culture of transparency, open and honest communication. Therefore, all PTP personnel and stakeholders are encouraged to speak up through this independent system whenever they observe violations of the code of conduct, compliance, or governance. This system ensures the protection of whistleblowers, including the confidentiality of their identity and protection against retaliation from the "reported party". By reporting violations, PTP personnel and stakeholders contribute to creating a safe environment for interaction and transactions. Moreover, they help PT Pelabuhan Tanjung Priok minimize fraud, theft, and corruption within the workplace.

Pelindo Bersih is a tangible program initiated by the management of PT Pelabuhan Tanjung Priok and implemented across the Company Group, aiming to create a workplace free from fraud, corruption, and extortion. The centralized reporting channel provided by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for all stakeholders with information or who wish to report potential violations committed by PTP personnel is the independent Whistleblowing System.

In its implementation, the Company has adopted the following Whistleblowing System Guidelines in PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, Gratification Control Guidelines No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, Anti-Bribery Management System Governance Guidelines No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, and Integrated Conflict of Interest Guidelines No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024.

PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Komite Pelindo Bersih

Penanggung Jawab WBS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah Direktur utama yang dibantu oleh Wakil Direktur Utama selaku Direktur penanggung jawab penerapan GCG PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Utama membentuk Komite Pelindo Bersih yang diketuai oleh salah satu pimpinan Divisi sebagai pengelola WBS. Komite Pelindo Bersih bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama. Direktur Utama sebagai Penanggung

PARTY RESPONSIBLE FOR GRIEVANCES MANAGEMENT

Pelindo Bersih Committee

The person in charge of the Whistleblowing System (WBS) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is the President Director, assisted by the Vice President Director who is responsible for the GCG implementation at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In carrying out his duties, the President Director establishes the Pelindo Bersih Committee, which is chaired by one of the Division Heads acting as the WBS administrator. The Pelindo Bersih Committee reports to the President Director through the Vice

jawab WBS menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tersebut berakhir.

Dalam penerapan program Pelindo Bersih, pengelolaan WBS dibantu oleh Petugas WBS dari pihak independen yang berpengalaman dalam bidang forensik dan profesional. Penunjukan/pengangkatan petugas WBS tersebut dilakukan oleh Direktur utama dan/atau Wakil Direktur Utama atas usul dari Komite Pelindo Bersih. Perusahaan juga membentuk Komite Pelindo Bersih yang ditugaskan dalam pelaksanaan manajemen anti *fraud* dan penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi. Susunan Komite Pelindo Bersih dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdiri dari Ketua merangkap menjadi anggota, Wakil Ketua merangkap menjadi anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota. Jumlah dari anggota Komite Pelindo Bersih bersifat ganjil untuk memenuhi kuorum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan laporan dari pengelolaan WBS;
2. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pelindo Bersih berupa Kesimpulan hasil pembahasan laporan *Whistleblowing System* (laporan dapat ditindaklanjuti dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) serta melihat urgensi laporan. Kemudian Komite Pelindo Bersih dapat menyurati pejabat Perusahaan sebagaimana yang diatur pada Bab II Poin D dan rekomendasi urgensi laporan serta menyurati pejabat Perusahaan terkait sebagaimana yang diatur pada Bab II Poin D;
3. Menindaklanjuti & melakukan verifikasi semua laporan yang masuk (termasuk *out of scope*) untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tipe pelanggarannya selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan;
5. Memonitoring tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan oleh Senior *Manager* Sumber Daya Manusia dan Umum;
6. Melakukan rapat internal Komite Pelindo Bersih minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System.*
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan saluran *Whistleblowing System* kepada Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir;
8. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan *Whistleblowing System* Perusahaan;

President Director. As the WBS Officer, the President Director is required to submit reports on the handling of alleged violations to senior officials in charge of complaint handling at the Ministry of SOEs on a semiannual basis, no later than 1 (one) month after the reporting period ends.

In the implementation of the Pelindo Bersih program, the management of the WBS is supported by an independent WBS Officer who is experienced in forensic and professional practices. The appointment of this WBS Officer is made by the President Director and/or the Vice President Director upon the recommendation of the Pelindo Bersih Committee. The Company has also formed a Pelindo Bersih Committee tasked with implementing anti-fraud management and the Whistleblowing System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as designated by the Board of Directors. The composition of the Pelindo Bersih Committee for implementing the Whistleblowing System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consists of A Chairman who also serves as a member, A Vice Chairman who also serves as a member, A Secretary who also serves as a member. The number of members in the Pelindo Bersih Committee must be an odd number to meet quorum requirements.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PELINDO BERSIH COMMITTEE

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on whistleblowing reports within no later than 14 (fourteen) working days from the receipt of the report by the WBS administrator;
2. The recommendations provided by the Pelindo Bersih Committee include a conclusion on the review of the whistleblowing report (whether the report is actionable and requires further investigation or not), taking into account the urgency of the matter. Furthermore, the Pelindo Integrity Committee may issue formal correspondence to Company officials as stipulated in Chapter II, Point D, along with recommendations regarding the urgency of the report, and may also correspond with relevant Company officials as outlined in Chapter II, Point D.
3. Follow up and verify all reports received (including those considered out of scope), to be acted upon according to the type of violation within 30 (thirty) working days after the report is received, with the assistance of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/Gratification Control Unit (UPG) of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Conduct verification and formulate conclusions, suggestions, and recommendations on the results of examinations/requests, and seek expert opinions when necessary;
5. Monitor the follow-up/actions taken on reports found to involve violations. Internal follow-up or decisions must be coordinated by the Senior Manager of Human Capital and General Affairs;
6. Conduct internal meetings of the Pelindo Bersih Committee at least once every 3 (three) months and/or whenever a report of alleged violation is received through the Whistleblowing System;
7. Submit whistleblowing system management reports to the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders on a semiannual basis, no later than 1 (one) month after the end of the reporting period;
8. Supervise the independence and effectiveness of the Company's Whistleblowing System;

9. Melakukan *benchmarking* pada Perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema *Whistleblowing System*;
10. Setiap anggota Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya;
11. Membuat dan me*review* kebijakan dan Sistem Prosedur Operasi (SOP) terkait *Whistleblowing System* dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk Perusahaan;
12. Melakukan sosialisasi kepada Insan PTP dan *Stakeholder* terkait penggunaan saluran *Whistleblowing System*;
13. Pengelolaan WBS Pelindo oleh Komite Pelindo Bersih diutamakan dibantu oleh Pihak Independen dalam pelaksanaannya dengan proses penunjukannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Person In Charge (PIC) *Whistleblowing* Di Pelindo *Group*

1. PIC WBS di PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah Sekretaris Perusahaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab PIC WBS Pelindo *Group:*
   a. Membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih di lingkungan masing-masing wilayah kerja Pelindo *Group;*
   b. Menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasian laporan dan identitas pelapor serta terlapor dalam menjalankan tugasnya;
   c. Menerima laporan yang diteruskan komite Pelindo Bersih kepada PIC WBS;
   d. Memonitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih;
   e. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih setelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersih dan melaporkan kepada Komite Pelindo Bersih;
   f. Membuat laporan atas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Pelindo Bersih;
   g. Membuat Program dalam mensosialisasikan penggunaan saluran WBS kepada internal dan eksternal beserta perlindungan dan *reward* bagi pelapor;
   h. Membuat laporan berkala atas sosialisasi di lingkungan Perusahaan masing-masing;
   i. Melakukan koordinasi kepada PIC WBS di lingkungan Perusahaan/wilayah kerja masing-masing, yaitu:
      - PIC WBS Anak Perusahaan *Subholding* dapat berkoordinasi langsung dengan PIC WBS *Subholding.*
      - Laporan tindak lanjut dari Cabang & Anak Perusahaan *Subholding* agar ditembuskan kepada Komite Pelindo Bersih.

Lain-lain

1. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan *Whistleblowing System* di Perusahaan;
2. Proses penunjukan terkait poin diatas, mengikuti ketentuan yang berlaku.

9. Benchmark other companies to track the development of whistleblowing system schemes;
10. Each member of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/Gratification Control Unit (UPG) is required to sign an integrity pact to maintain confidentiality while performing their duties;
11. Develop and review policies and Standard Operating Procedures (SOP) related to the Whistleblowing System, assisted by an independent party appointed by the Company;
12. Conduct socialization activities for PTP Personnel and stakeholders regarding the use of the Whistleblowing System;
13. The management of Pelindo's WBS by the Pelindo Bersih Committee shall preferably be assisted by an Independent Party, whose appointment follows applicable regulations.

Person In Charge (PIC) of Whistleblowing System (WBS) within Pelindo Group

1. The PIC for WBS at PT Pelabuhan Tanjung Priok is the Corporate Secretary.

2. Duties and Responsibilities of the WBS PIC in Pelindo Group:
   a. Establish a Follow-up Team for Reports from the Pelindo Bersih Committee within each working area of the Pelindo Group;
   b. Sign an integrity pact to ensure the confidentiality of reports and the identities of both the whistleblower and the reported party in carrying out their duties;
   c. Receive reports forwarded by the Pelindo Bersih Committee to the WBS PIC;
   d. Monitor the follow-up of reports forwarded by the Pelindo Bersih Committee;
   e. Follow up and investigate reports forwarded by the Pelindo Bersih Committee within 30 (thirty) working days, assisted by the Follow-up Team of the Pelindo Bersih Committee, and report the results to the Committee;
   f. Prepare a report on the resolution of the follow-up actions to the Pelindo Bersih Committee;
   g. Develop programs to socialize the use of the WBS channel to internal and external parties, including protection and rewards for whistleblowers;
   h. Prepare periodic reports on the socialization activities within their respective companies;
   i. Coordinate with WBS PICs in each company/working area, with the following details:
      - WBS PICs of subsidiaries under subholdings may coordinate directly with the WBS PIC at the subholding level;
      - Follow-up reports from branches and subholding subsidiaries must be copied to the Pelindo Bersih Committee.

Others

1. The Company may appoint external parties/KAP or other third parties to manage the Whistleblowing System in the Company;
2. The appointment process for the above shall follow the applicable regulations.

KERAHASIAN DAN PERLINDUNGAN

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib dan terlapor dijamin kerahasiaannya selama proses tindak lanjut laporan;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;
4. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dan terlapor atas kemungkinan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
   c. Catatan yang merugikan dalam *file*data pribadinya (*personal file record*);
6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelaporan pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;
7. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor dan terlapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

JENIS-JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (Sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem *Whistleblowing System,* diantarannya sebagai berikut:

1. Tindakan Curang/Tidak Adil
2. Korupsi
3. Pencurian
4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan
5. Benturan Kepentingan
6. Penyuapan/Gratifikasi
7. Penipuan
8. Pemerasan
9. Penggelapan

SALURAN PELAPORAN

Telepon: +62 21 2782 2345
Fax: +62 21 2782 3456
SMS &WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665
E-mail: pelindobersih@whistleblowing.link
Website: https://pelindobersih.pelindo.co.id
PO BOX: Pelindo Bersih PO Box 1074 JKS 12010

CONFIDENTIALITY AND PROTECTION

1. The Company guarantees the confidentiality of both the whistleblower's and the reported party's identities, unless such disclosure is required in connection with reports or investigations conducted by the authorities. The identity of the reported party remains confidential throughout the follow-up process;
2. Anonymous reports will still be processed; however, their substance, credibility, supporting evidence, and the possibility of verification will be considered beforehand;
3. The Company enforces sanctions for misuse of the WBS channel and affirms that individuals who submit false accusations or fabricated reports will be subject to sanctions, including legal proceedings, and will not be entitled to confidentiality or whistleblower protection;
4. The Company guarantees protection for whistleblowers from any legal claims, whether criminal or civil, intimidation, disciplinary action, or mistreatment from any party in relation to the testimony and/or report submitted, unless such testimony or report was submitted in bad faith.
5. The Company provides protection to both the whistleblower and the reported party from the following:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion or reduction in rank without clear justification;
   c. Adverse records in personal files.
6. The Company ensures the interests and provides legal assistance for whistleblowers before, during, and after the case resolution process.
7. The Company grants the right to both the whistleblower and the reported party to participate in choosing and determining the form of protection and legal support, as long as it does not conflict with Company regulations.

TYPES OF VIOLATIONS

There are 9 (nine) types of violations that can be reported through the Whistleblowing System, including:

1. Fraud/Unfair Actions
2. Corruption
3. Theft
4. Violation of Company Policies and Regulations
5. Conflict of Interest
6. Bribery/Gratification
7. Deception
8. Extortion
9. Embezzlement

GRIEVANCES CHANNELS

Telephone: +62 21 2782 2345
Fax: +62 21 2782 3456
SMS & WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665
E-mail: pelindobersih@whistleblowing.link
Website: https://pelindobersih.pelindo.co.id
PO BOX: Pelindo Bersih PO Box 1074 JKS 12010

ALUR PROSES PELAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Setelah pelapor melaporkan melalui Pelindo Bersih, Laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersih dengan alur sebagai berikut:

1. Alur Pengaduan Kantor Pusat dan cabang PTP

WHISTLEBLOWING SYSTEM REPORTING FLOW

Once a report is submitted through Pelindo Bersih, it will be reviewed and followed up by the Pelindo Bersih Committee according to the following process flow:

1. Reporting Flow for PTP Head Office and Branches

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to
1	Komisaris utama President Commissioner	**Pemegang Saham** (dengan sepengetahuan Direktur Utama) **Shareholders** (with the knowledge of President Director)
2	• Direktur Utama; • Anggota Dewan Komisaris. • President Director; • Member of Board of Commissioner;	**Komisaris Utama** Tembusan: Pemegang Saham **President Commissioner** Copy to: Shareholders
3	Anggota Direksi (selain Direktur Utama) Member of Directors (exclude President Director)	**Direktur Utama** Tembusan: Pemegang Saham **President Director** Copy to : Shareholders
4	Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)/Unit UPG (yang bersangkutan bila dilaporkan tidak akan mendapatkan laporan/notification dari saluran Pelindo Bersih serta tidak diikutsertakan dalam rapat pembahasan Komite Pelindo Bersih Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/Unit UPG Unit (if the person is reported, they will not receive any report/notification from the Pelindo Bersih channel and will not be involved in the committee discussion.	**Direktur Utama** **President Director**
5	• *Senior Manager/Branch Manager* • Asisten *Senior Manager/Deputy Manager* • Koordinator Satuan Kerja • Pegawai • Senior Manager/Branch Manager • Assistant Senior Manager/Deputy Manager • Work Unit Coordinator • Employee	**Direktur Utama** (Dengan dibantu oleh Senior Manager/Manager Pengawasan Internal dan Hukum serta SDM dan Umum dalam tindak lanjutnya) **President Director** (Assisted by the Senior Manager/Manager of Internal Audit, Legal, and Human Resources & General Affairs for further follow-up)

2. Alur Pengaduan Anak Perusahaan

2. Reporting Flow for Subsidiaries

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to
1	Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	**Komisaris Utama** Tembusan: Pemegang Saham **President Commissioner** Copy to: Shareholders
2	*Senior Manager/Manager/ Asisten Senior Manager* Anak Perusahaan Senior Manager/Manager/Assistant Senior Manager Subsidiary	**Direksi Anak Perusahaan** Tembusan: Dewan Komisaris **Board of Directors of Subsidiaries** Copy to : Shareholders
3	Karyawan Anak Perusahaan Karyawan Anak Perusahaan	**Direktur Utama** (dengan dibantu oleh Senior Manager/Manager Pengawasan Internal dan Hukum serta SDM dan Umum dalam tindak lanjutnya) **President Director** (Assisted by the Senior Manager/Manager of Internal Audit, Legal, and Human Resources & General Affairs for further follow-up)

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to

1. Laporan kepada Perusahaan/Instansi/Lembaga Lain di Wilayah Kerja Perusahaan
   Laporan yang masuk kepada saluran WBS Perusahaan dan melaporkan Perusahaan/Instansi/Lembaga lain yang berada di wilayah kerja Perusahaan maka akan langsung diinformasikan kepada pelapor untuk dapat menghubungi saluran WBS Perusahaan/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
2. Untuk Laporan Segi Operasional/*Customer Complain* dan *Out of Scope*
   Laporan yang masuk kepada saluran WBS terkait laporan diluar cakupan dan operasional serta Customer Complain maka akan diinformasi langsung kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.

1. Reporting to Other Companies/Agencies/Institutions within the Company's Operational Area
   Reports submitted through the Company's WBS channel that pertain to other companies/agencies/institutions operating within the Company's operational area will be immediately informed to the reporter, advising them to contact the WBS channel of the respective company/agency/institution.
2. Reports Regarding Operations/Customer Complaints and Out of Scope Issues
   Reports submitted to the WBS channel that fall outside the scope, including those related to operational matters and customer complaints, will be directly forwarded to the President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

1. Pengelolaan WBS Pelindo Bersih dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independent termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih;
2. Komite Pelindo Bersih melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat Kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih denga prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;
8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Untuk tindak lanjut pelaporan dari Pelindo Bersih kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka investigasi akan dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)/Unit UPG Perusahan, Investigasi dapat melibatkan Tim Indisipliner, Senior Manager Pengawasan Internal dan Hukum, Senior Manager SDM & Umum dan Branch Manager di wilayah kerja masing-masing hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor;
10. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan/atau perundang-undangan.
11. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di Luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan terutama untuk menjaga nama baik Perusahan dan efektifitas

REPORT HANDLING PROCEDURE

1. The management of Pelindo Bersih WBS is assisted by an External Manager, who is an independent third party. This third party is responsible for receiving, administering, and confirming the completeness of the report before forwarding it to the Pelindo Bersih Committee;
2. The Pelindo Bersih Committee verifies the report submitted by the whistleblower to determine whether it meets the complaint requirements/criteria;
3. The Pelindo Bersih Committee then formulates the results of the verification and report identification;
4. The verification results are compiled in a verification report prepared in a systematic, concise, clear, and accountable manner. The report includes conclusions, supporting data, and follow-up recommendations;
5. The verification technique is confidential and falls under the authority of the Pelindo Bersih Committee, based on proportional principles corresponding to the content of the report;
6. If further investigation is deemed necessary, the Pelindo Bersih Committee may request approval from the President Director for the Internal Audit Unit to carry out the investigation;
7. If the complaint does not meet the requirements, the Pelindo Bersih Committee will not follow up, and the report will be archived;
8. Verified and agreed-upon results will be submitted to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and/or relevant parties for follow-up based on the investigation results;
9. For follow-up of reports from Pelindo Bersih to PT Pelabuhan Tanjung Priok, investigations will be conducted by the Company's Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/UPG Unit. The investigation may involve the Disciplinary Team, Senior Manager of Internal Supervision and Legal, Senior Manager of HC & General Affairs, and the Branch Manager in their respective areas until the follow-up is considered complete, while maintaining the confidentiality of the report and the whistleblower's identity;
10. Individuals found guilty may be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations and/or laws;
11. The Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok retains the authority to take actions outside of the Disciplinary Team, considering the Company's interests, especially to uphold the Company's reputation and ensure the effectiveness

penanganan penganduan tetapi tetap memberikan sanksi apabila terlampir terbukti bersalah.

PENGADUAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui sarana Pelindo Bersih ditetapkan sebagai berikut:

1. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
   b. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan PTP;
   c. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   d. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelaporan yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.
2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal dibawah ini:
   a. Identitas Pelapor
      Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta PT Pelabuhan Tanjung Priok dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (anonymous) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.
   b. Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
      1) Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas Perusahaan dan atau Anak Perusahaan;
      2) Lokasi kejadian;
      3) Waktu kejadian.
   c. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
   d. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya;
   e. Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.
3. Bukti-bukti sebagaimana point 2.b) meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Bukti tertulis berupa Dokumen, surat, kuitansi atau Nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau Surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
   b. Bukti Tidak Tertulis berupa saksi, Rekaman Suara (Audio), Rekaman Visual atau gambar (video);
   c. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dalam upaya memperdalam pemahaman tentang prosedur pengungkapan pelanggaran dan mempromosikan nilai-nilai etika, Perusahaan secara berkesinambungan menyelenggarakan sosialisasi mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs web Perusahaan, *platform* internal, pemasangan spanduk, dan aktivitas di media sosial.

of complaint handling, while still imposing sanctions if the reported party is proven guilty.

VIOLATION REPORTING

Violations reported through the Pelindo Bersih channel are subject to the following provisions:

1. A report may be followed up if it meets the following criteria:
   a. It falls within the predetermined categories of violations;
   b. The reported violation involves PTP personnel;
   c. The report has an impact on the performance and reputation of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   d. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management will prioritize follow-up on reports submitted by whistleblowers who disclose their identity and include at least two (2) pieces of supporting evidence.
2. The report must contain at least the following:
   a. Whistleblower Identity
      The whistleblower must provide their identity in order to receive protection from the management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelabuhan Tanjung Priok, and to facilitate follow-up if additional data is needed. Anonymous reporting is allowed, but identification is required for verification purposes.
   b. Description of the Violation, which must include at least:
      1) The issue: The reported violation must be related to the activities of the Company and/or its subsidiaries;
      2) Location of the incident;
      3) Time of the incident.
   c. Details of the reported individual and any other involved parties and their respective units (if applicable);
   d. Supporting documents and/or other evidence;
   e. Reports that will be further processed must involve incidents that occurred within the last 3 (three) years from the date the report is received by the Pelindo Bersih Committee.
3. The evidence referred to in point 2.b) includes, but is not limited to, the following:
   a. Written Evidence, such as documents, letters, receipts, or invoices recorded on paper or in digital form (e.g., emails) that are legally verifiable;
   b. Non-Written Evidence, such as witnesses, audio recordings, visual recordings, or videos;
   c. Other evidence as stipulated by applicable regulations.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

In an effort to deepen understanding of the violation disclosure procedures and promote ethical values, the Company continuously conducts socialization regarding the Whistleblowing System. This approach is carried out through various communication channels, including the corporate website, internal platforms, banner displays, and social media activities.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES SERTA SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES

Di tahun 2024, tidak terdapat laporan yang diterima atau terindikasi pelanggaran melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh PTP Terminal Nonpetikemas sebagaimana yang disampaikan melalui Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/6/8/1/TKPT/MRTK/PLND-24 tanggal 06 Agustus 2024. Hal ini menegaskan komitmen PTP Terminal Nonpetikemas untuk menjaga kepatuhan dan integritas dalam semua aspek operasional Perusahaan.

NUMBER OF REPORTS RECEIVED AND PROCESSED, AND SANCTIONS/ FOLLOW-UP ACTIONS ON RESOLVED REPORTS

In 2024, there were no reports received or any indications of violations through the reporting channels provided by PTP Terminal Nonpetikemas, as stated in the Letter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number SK.01.01/6/8/1/TKPT/MRTK/PLND-24 dated August 6, 2024. It reflects PTP Terminal Nonpetikemas' strong commitment to maintaining compliance and integrity in all aspects of its operations.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION MANAGEMENT

Sebagai Perusahaan yang profesional, independen, berintegrasi dan berkelanjutan, isu anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi Perusahaan dan insan PTP. Perusahaan terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk didalamnya upaya pengendalian praktik gratifikasi.

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Ketentuan mengenai gratifikasi mengacu pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan gratifikasi serta dalam rangka memenuhi standar-standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Perusahaan telah memiliki Pedoman Pencegahan Gratifikasi No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024.

PRINSIP DASAR GRATIFIKASI

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*)
   Insan PTP dialrang secara langsung atau tidak langsung memberi hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) kepda setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketetnuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*)
   Insan PTP yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarga inti insan PTP, dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu

As a professional, independent, integrated, and sustainable company, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) prioritizes anti-Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) efforts. The Company continues to take steps to eliminate KKN practices, including controlling the practice of gratification.

The Company acknowledges that in maintaining business relationships with third parties, it often encounters gratification practices, thus requiring clear guidelines to manage such practices. Provisions regarding gratification refer to Article 12B Paragraph (1) of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes and the Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 on Gratification Reporting. To comply with Anti-Bribery Management System standards, the Company has established the Gratification Prevention Guidelines No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024.

BASIC PRINCIPLES OF GRATIFICATION

1. Giving Gifts/Souvenirs and Entertainment
   PTP personnel are strictly prohibited, directly or indirectly, from giving gifts/souvenirs and/or entertainment to any party with a business relationship or competitor of the Company for the purpose of obtaining information or other benefits that are not in accordance with prevailing laws or to influence the said party to act or refrain from acting in connection with their position.

2. Receiving Gifts/Souvenirs and Entertainment
   PTP personnel, due to their position and/or their immediate family members, are prohibited from directly or indirectly receiving or requesting gifts/souvenirs and/or entertainment from any party that has a business relationship with or is a competitor of the Company, if such offerings are intended to obtain information or any other benefit not permitted under prevailing laws and regulations, or to influence the party concerned to take or refrain from taking actions related to their position. If PTP personnel are offered or given gifts/souvenirs

hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Insan PTP apabila ditawarkan/diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi, wajib melakukan penolakan dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

3. Pengecualian kondisi penerimaan gratifikasi
   a. Kewajiban melakukan penolakan gratifikasi ini mendapat pengecualian dengan kondisi sebagai berikut:
      - Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
      - Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
      - Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
      - Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain.
   b. Dalam hal gratifikasi yang memenuhi 4 (empat) kondisi oengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perusahaan di wilayah kerja masing-masing.

and/or entertainment that do not comply with the provisions of the gratification guidelines, they are obligated to politely decline the offer or gift and provide an explanation of this policy and regulation to the third party.

3. Exceptions to Receiving Gratification
   a. Refusal of gratification is exempted under the following conditions:
      - Gratification was not received directly;
      - The giver is unknown;
      - The recipient is unsure whether the item qualifies as gratification;
      - Certain unavoidable conditions such as potentially damaging institutional relationships, endangering oneself/career, or facing other threats;

   b. If gratification falls under the 4 (four) conditions above, it must be reported directly to the Corruption Eradication Commission (KPK) or via the Company's Gratification Control Unit (UPG) at each respective work area.

KATEGORI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
3. Gratifikasi yang terkait kedinasan

GRATIFICATION CATEGORIES

1. Gratification that must be reported
2. Gratification that does not need to be reported
3. Gratification related to official duty

PENANGANAN GRATIFIKASI

Setiap karyawan di PTP Terminal Nonpetikemas memiliki tanggung jawab untuk tidak menerima pemberian dari pihak ketiga di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ada pemberian yang diterima tanpa sepengetahuan Perusahaan atau melalui perantara, karyawan harus mengembalikannya. Jika pengembalian tidak memungkinkan, karyawan wajib melaporkan hal tersebut kepada Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dengan persetujuan langsung dari Atasan Langsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi PTP Terminal Nonpetikemas.

GRATIFICATION HANDLING

Every employee of PTP Terminal Nonpetikemas is responsible for refusing gifts from third parties that do not comply with the established provisions. If a gift is received without the Company's knowledge or through intermediaries, the employee must return it. If returning the gift is not possible, the employee must report it to the Gratification Control Unit (UPG) with prior approval from their direct supervisor, in accordance with the procedures outlined in the PTP Terminal Nonpetikemas Gratification Guidelines.

PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

Perusahaan telah membentuk Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim/Unit ini bertanggung jawab atas implementasi sistem pencegahan dan penanggulangan gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Tindakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 25 November 2024 yang menetapkan pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun susunan keanggotaan Tim Unit Pengendali Gratifikasi sebagai berikut:

GRATIFICATION REPORTING MANAGEMENT

The Company has established a Gratification Control Unit (UPG) directly accountable to the Board of Directors. This unit is responsible for implementing the Company's gratification prevention and mitigation system. This initiative is established under the Board of Directors Decree No. SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 25, 2024 concerning the establishment of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP), which also serves as the Gratification Control Unit (UPG), the Conflict of Interest and Fraud Management Unit in the implementation of the Anti-Bribery Management System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

The composition of the Gratification Control Unit team is as follows:

No	Jabatan dalam Tim Position in Team	Unit Kerja Work Unit
1	Ketua (sekaligus anggota) Chairman (also serving as member)	SM Sekretaris Perusahaan Senior Manager of Corporate Secretary
2	Wakil Ketua (sekaligus anggota) Vice Chairman (also serving as member)	SM Pengendalian Internal dan Hukum Senior Manager of Internal Control and Legal Affairs

No	Jabatan dalam Tim Position in Team	Unit Kerja Work Unit
3	Sekretaris 1 (sekaligus anggota) Secretary 1 (also serving as member)	ASM *Good Corporate Governance* Assistant Senior Manager of Good Corporate Governance
4	Sekretaris 2 (sekaligus anggota) Secretary 2 (also serving as member)	ASM Hukum Assistant Senior Manager of Legal Affairs
5	Anggota Member	SM Perencanaan Strategis Senior Manager of Strategic Planning
6	Anggota Member	SM Keuangan dan Manajemen Risiko Senior Manager of Finance and Risk Management
7	Anggota Member	SM SDM dan Umum Senior Manager of Human Capital and General Affairs
8	Anggota Member	ASM Sumber Daya Manusia Assistant Senior Manager of Human Capital
9	Koordiantor Cabang (sekaligus anggota) Branch Coordinator (also serving as member)	*Branch Manager* di lingkungan PTP Branch Managers within the PTP environment
10	Anggota Cabang Branch Member	Para *Deputy Manager* di lingkungan PTP Deputy Managers within the PTP environment

TUGAS DAN WEWENANG TIM/UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)

1. Tim FKAP merupakan sekaligus Tim UPG, Tim Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Mengawasi penyusunan rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Menyediakan petunjuk dan panduan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Memastikan berjalannya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
5. Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Tim Pelindo Bersih atas laporan dugaan pelanggaran penyuapan yang disampaikan melalui media pelaporan internal Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud;*
6. Tim FKAP sekaligus Tim UPG, Tim Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester;
7. Melakukan pengawasan dan tinjauan secara berkala terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti semua lapporan yang masuk terkait dengan adanya dugaan penyuapan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pelnggarannya berdasarkan ketetnuan yang berlaku. Penyuapan dimaksud dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut:
   a. Penyuapan oleh Perusahaan;
   b. Penyuapan oleh karyawan yang bertindak atas nama Perusahaan untuk keuntungan Perusahaan/Mitra Perusahaan;

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE GRATIFICATION CONTROL TEAM/UNIT (UPG)

1. The FKAP Team simultaneously serves as the UPG Team, the Conflict of Interest Management Unit, and the Fraud Unit at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Oversee the drafting and implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud Control at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Provide guidance and instructions on implementing the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud Control at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Ensure proper implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud Control in accordance with Indonesian National Standard ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems;
5. Discuss and provide recommendations to the Pelindo Bersih Committee regarding reports of alleged bribery submitted through internal reporting channels handled by the FKAP Team, also serving as the UPG, Conflict of Interest Management, and Fraud Unit;
6. The FKAP Team, concurrently functioning as the UPG and Fraud Unit, must hold internal meetings at least once every semester;
7. Regularly supervise and review the independence and effectiveness of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud Control at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Classify and follow up on all incoming reports of alleged bribery in accordance with the nature of the violation and applicable regulations. Such bribery may include:
   a. Bribery by the Company;
   b. Bribery by employees acting on behalf of the Company for the benefit of the Company or its partners;

c. Penyuapan oleh Mitra Perusahaan yang bertindak atas nama perusahaannya untuk keuntungan mitra tersebut;
d. Penyuapan kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas Perusahaan;
e. Penyuapan kepada Mitra Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas Perusahaan; dan
f. Penyuapan langsung maupun tidak langsung (misalnya: menawqarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga): Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Tim memiliki akses langsung kepada Direksi maupun Dewan Komisaris agar terhadap adanya isu-isu maupun informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan Penyuapan atau terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat diketahui segera;

9. Melakukan *benchmarking* pada perusaahan lain untuk melihat perkembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
10. Membuat laporan atas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* secara berkala minimal 1 tahun sekali kepada Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
11. Melakukan sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
12. Melakukan koordinasai dengan unit atau bagian terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud;*
13. Melakukan *review* dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi, pencegahan korupsi, benturan kepentingan dan *fraud* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
14. Menerima laporan, merekap, dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal Pelabuhan Tanjung Priok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
15. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
16. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratifikasi;
17. Berkoordinasi dengan tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
18. Menerapkan dan mengimplementasikan prinsip 5 NO's, yaitu: *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap pemerasan), *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya), *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku), *No Luxurious* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan), *No Corruption* (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri senddiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak disadari).
19. Para *Branch Manager* menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat dalam hal sistem manajemen anti penyuapan dan pengendalian gratifikasi, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* di wilayah *branch* masing-masing;
20. *Branch Manager* selaku Koordinator Cabang berkewajiban menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Ketua Tim FKAP sekaligus tim UPG, Unit Pengelola Benturan Kepentingan dan *Fraud.*

c. Bribery by partners acting on behalf of their company for their own benefit;
d. Bribery to employees in relation to corporate activities;
e. Bribery to partners in relation to corporate activities;
f. Direct or indirect bribery (for example: offering or receiving bribes through or by third parties): In carrying out these duties, the Team has direct access to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure that any issues or information related to suspected bribery or the implementation of the Anti-Bribery Management System can be promptly identified.

9. Benchmark the development of Anti-Bribery, Gratification control, Conflict of Interest Management, and Fraud Control in PT Pelabuhan Tanjung Priok
10. Prepare reports on the implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest, and Fraud Control at least annually to the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
11. Conduct socialization activities on the implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud within PT Pelabuhan Tanjung Priok;
12. Coordinate with relevant units or departments regarding the implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud;
13. Review and update policies related to management, the establishment of an anti-gratification culture, corruption prevention, conflict of interest, and fraud control within PT Pelabuhan Tanjung Priok;
14. Receive, record, and report gratification from internal parties of Pelabuhan Tanjung Priok to the Corruption Eradication Commission (KPK);
15. Store gratification items until the KPK officially determines their status;
16. Follow up on KPK's recommendations regarding the status of gratification items;
17. Coordinate with the KPK team regarding the implementation of gratification control in the workplace of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
18. Apply and implement the 5 NO's principles, namely: No Bribery, which prohibits any form of bribery or extortion; No Kickback, which forbids the acceptance of commissions or tokens of appreciation, whether in the form of money or other items; No Gift, which disallows the giving or receiving of gifts or gratification that violate applicable regulations; No Luxurious, which prohibits excessive hospitality or entertainment; and No Corruption, which strictly bans any corrupt practices aimed at personal or corporate gain, whether committed knowingly or unknowingly.
19. Branch Managers take responsibility for their respective working areas and coordinate with the Head Office regarding the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, Conflict of Interest Management, and Fraud within their branches;
20. As Branch Coordinators, Branch Managers store gratification items until the KPK determines their status and report them to the Head of the FKAP Team, who also serves as the UPG and Conflict of Interest and Fraud Management Unit.

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Apabila terdapat penerimaan hadiah/cendera mata dan/atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan. Maka Insan PTP yang bersangkutan wajib melaporkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saluran Pelaporan Gratifikasi, Jika Insan PTP Menerima Barang Gratifikasi:
   a. Pelaporan melalui KPK
      Laporan Gratifikasi disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://gol.kpk.go.id/login.
   b. Pelaporan Melalui Tim UPG Perusahaan
      Jika insan PTP menerima baik secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi dapat mengisi *form* laporan Gratifikasi UPG Perusahaan sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek Gratifikasi yang diterima.
      Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK dengan menggunakan form Laporan Gratifikasi yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK.
      Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaiman diatur dalam Pedoman Gratifikasi.
      Untuk penerimaan gratifikasi yang merupakan barang seperti cinderamata/uang/makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
2. Saluran Pelaporan Gratifikasi, Jika Insan PTP Melihat Adanya Dugaan Pelanggaran Terkait Gratifikasi:
   Penyampaian laporan Gratifikasi juga dapat dilakukan melalui saluran *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih) bagi insan PTP yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran gratifikasi, sebagaimana yang telah diatur pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR GRATIFIKASI

Pelapor Gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK wajib memberikan perlindungna terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 11 Agustus 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, Pelapor Gratifikasi dibutuhkan keterangannya sebagai saksi dan korban.

GRATIFICATION REPORTING MECHANISM

If there is a receipt of gifts/souvenirs and/or entertainment beyond the limits set by the Company, the concerned PTP personnel is required to report it according to the following procedures:

1. Gratification Reporting Channels When PTP Personnel Receive a Gratification Item:
   a. Reporting to the KPK:
      Gratification reports are submitted online through the Gratifikasi Online (GOL) application. The report will be processed by the Corruption Eradication Commission (KPK) within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received. More detailed information can be found at https://gol.kpk.go.id/login.
   b. Reporting Through the Company's UPG Team
      If a PTP personnel receives gratification, either directly or indirectly, they must complete the Company's UPG Gratification Report Form as attached, no later than 7 (seven) working days from the date the gratification was received, and submit the received gratification item.

      The UPG Team will compile a summary of the Gratification Report and submit it to the Corruption Eradication Commission (KPK) using the designated Gratification Report Form, no later than 14 (fourteen) working days from the date the report is received by the Company's UPG Team, in order to obtain a determination of the gratification item's status from the KPK.
      For the receipt of Gratification items that are perishable (e.g., food and beverages), the items may be donated to a social institution by submitting a proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date the Gratification was received, using the format provided in the Gratification Guidelines.

      For the receipt of non-perishable Gratification items, such as souvenirs, money, or non-perishable food, further action will be taken after the KPK determines the status of the Gratification object.
2. Gratification Reporting Channels When PTP Personnel Observe an Alleged Gratification Violation:
   Reports may also be submitted via the Whistleblowing System (Pelindo Bersih) by PTP personnel who are aware of suspected gratification violations, as stipulated in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Whistleblowing System Guidelines.

PROTECTION FOR GRATIFICATION WHISTLEBLOWERS

Gratification whistleblowers have the right to legal protection. Under Article 15 of Law No. 30 of 2002, the KPK is obliged to provide protection to witnesses or whistleblowers who have submitted reports or testimony regarding corruption offenses. Additionally, based on Law No. 13 of 2006 dated August 11, 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is responsible for providing protection and assistance to witnesses and victims. In this context, a Gratification Whistleblower is considered a witness and/or victim.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Sanksi telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk menangani pelanggaran terhadap Pedoman. Sanksi tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PTP Terminal Nonpetikemas dan berpotensi dikenakan Tindakan Pidana Suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Pelaksanaan sosialisasi gratifikasi diselaraskan dengan upaya sosialisasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PTP Terminal Nonpetikemas.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang melibatkan pegawai PTP Terminal Nonpetikemas.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The Company has established sanctions to address violations of this guideline. These sanctions are aligned with the applicable regulations in PTP Terminal Nonpetikemas and may also result in criminal bribery charges under Indonesian law.

GRATIFICATION POLICY SOCIALIZATION

Gratification awareness programs are integrated with efforts to socialize the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PTP Terminal Nonpetikemas.

GRATIFICATION REPORT 2024

As of December 31, 2024, there were no reported cases of receiving or giving gratification involving employees of PTP Terminal Nonpetikemas.

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti terjadinya penyuapan dan pencegahan terjadinya praktik penyuapan di lingkungan, Perusahaan senantiasa mematuhi setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di BUMN dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di BUMN dimana Kementerian Badan Usaha Milik Negara memerintahkan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan SMAP ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 8 Februari 2025 Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dikeluarkan oleh PT SGS Indonesia.

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan dan menjalankan semua bisnis dalam Perusahaan dengan cara yang jujur, etis, dan profesional di semua wilayah operasinal Perusahaan, mencakup seluruh insan PTP yang bekerja di semua tingkatan termasuk Pihak Berkepentingan serta selalu fokus menjadi Perusahaan yang berintegrasi dan bersih.

Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan yang sesuai dengan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang setiap praktik penerimaan atau pemberian suap dalam bentuk apapun dalam setiap proses bisnis Perusahaan;
2. Konsisten mematuhi setiap perundang-undangan dan peraturan lainnya tentang anti penyuapan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
3. Memenuhi dan menjalankan persyaratan SMAP secara efektif dan konsisten dengan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan Perusahaan;

As part of its commitment to prevent, detect, and respond to acts of bribery and to ensure the ongoing prevention of corrupt practices within its operational environment, the Company consistently adheres to all applicable laws and regulations. This includes, among others, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 of 2018 on the National Strategy for Corruption Prevention, Circular Letter of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) No. S-17/S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 concerning ISO 37001 Certification for Anti-Bribery Management Systems in SOEs, and Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs. In accordance with these directives, all State-Owned Enterprises are mandated to implement ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management Systems (ABMS). In response, on February 8, 2025, the Company successfully obtained ISO 37001:2016 certification for its Anti-Bribery Management System, issued by PT SGS Indonesia.

COMPANY'S ANTI-BRIBERY POLICY

The Company is committed to implementing an anti-bribery policy and conducting all business activities in an honest, ethical, and professional manner throughout all areas of operation. This includes all levels of PTP personnel and relevant stakeholders, with a strong emphasis on maintaining integrity and a clean business environment.

The Company's Anti-Bribery Policy, in accordance with the Anti-Bribery Management System Guidelines, governs the following:

1. Prohibits any form of bribery or acceptance of bribes in any business process;
2. Ensures consistent compliance with all anti-bribery laws and regulations applicable to the Company;
3. Fulfills and implements SMAP requirements effectively and consistently, with continuous improvement efforts to achieve objectives aligned with the Company's goals;

4. Mendorong peningkatan kepedulian insan PTP dan Pihak berkepentingan terhadap SMAP dengan itikad baik dan keyakinan yang wajar, tanpa takut terhadap tindakan balasan;
5. Penyempurnaan kebijakan, tujuan, dan perangkat SMAP secara berkelanjutan sesuai dengan SNI ISO 37001:2016;
6. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab operasional yang independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dalam penerapan, pengawasan, pelaporan dan peningkatan keberlanjutan terhadap SMAP;
7. Memberikan sanksi terhadap penyimpangan kebijakan anti penyuapan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerapan SMAP di lingkungan Perusahaan.

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah keputusan strategis bagi organisasi, memperkuat kinerja secara menyeluruh serta memberikan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Dokumen Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok merupakan informasi terdokumentasi yang mencakup kebijakan-kebijakan manajemen yang sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Ruang lingkuo Pedoman ini terkait implementasi dan persyaratan dalam standar ISO 37001:2016 berlaku bagi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang meliputi proses penetapan, pendokumentasian, pelaksanaan, pemeliharaan, peninjauan dan perbaikan SMAP, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.

Perusahaan menetapkan pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Pnyuapan. Pihak-pihak tersebut adalah orang atau Organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinyadipengaruhi oleh Keputusan atau aktivitas Perusahaan. Pihak berkepentingan yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Pemegang Saham;
2. Pelanggan;
3. Pekerja;
4. Pemerintah;
5. Mitra Kerja;
6. Media Massa;
7. Masyrakat;
8. Asosiasi.

SASARAN ANTI PENYUAPAN

Perusahaan menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkatan yang relevan mencakup:

1. Konsistem dengan kebijakan anti penyuapan;
2. Dapat diukur (jika dapat diterapkan);
3. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berlaku;
   a. Permasalahan terkait isu internal dan eksternal;
   b. Harapan para pihak berkepentingan;
   c. Risiko yang diidentifikasikan pada saat penilaian risiko.
4. Dapat dicapai;
5. Dimonitor;
6. Dikomunikasikan, baik internal maupun eksternal;
7. Diperbaharui sebagaimana mestinya.

4. Encourages PTP personnel and stakeholders to increase awareness and report in good faith and with reasonable belief, without fear of retaliation;
5. Continuously improves policies, objectives, and SMAP tools in accordance with SNI ISO 37001:2016;
6. Grants independent operational authority and responsibility to the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) for the implementation, supervision, reporting, and sustainable improvement of SMAP;
7. Imposes sanctions for violations of the anti-bribery policy in accordance with applicable laws and regulations;
8. Conducts regular monitoring and evaluation of SMAP implementation within the Company.

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINES

The implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS) represents a strategic decision for the organization, reinforcing overall performance and providing a solid foundation for sustainable development initiatives. The Anti-Bribery Management System Guidelines of PT Pelabuhan Tanjung Priok serve as a documented reference outlining management policies aligned with the requirements of ISO 37001:2016.

In accorsance with the Board of Director's Decree of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, concerning Governance of the Anti-Bribery Management System within the PT Pelabuhan Tanjung Priok. The scope of this Guideline encompasses the implementation and requirements under ISO 37001:2016. It applies to the establishment, documentation, implementation, maintenance, review, and continual improvement of the ABMS, including necessary processes and their interactions.

The Company identifies relevant interested parties in relation to the Anti-Bribery Management System. These are individuals or organizations that can affect, be affected by, or perceive themselves to be affected by the Company's decisions or activities. Relevant stakeholders identified by the Company include, but are not limited to:

1. Shareholders;
2. Customers;
3. Employees;
4. Government Agencies;
5. Business Partners;
6. Mass Media;
7. Local Communities;
8. Industry Associations.

ANTI-BRIBERY OBJECTIVES

The Company establishes ABMS objectives at relevant functions and levels that are:

1. Consistent with the anti-bribery policy;
2. Measurable (where applicable);
3. Taking into account the following contextual factors:
   a. Issues relating to internal and external conditions;
   b. Expectations of interested parties;
   c. Risks identified during the risk assessment process;
4. Achievable;
5. Monitored;
6. Communicated internally and externally;
7. Updated as necessary.

Strategi Perusahaan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan SMAP dan memastikan dalam perencanaan tersebut memenuhi hal-hal berikut:
1. Apa yang akan dilakukan;
2. Sumber daya apa yang dibutuhkan;
3. Siapa yang akan bertanggung jawab;
4. Kapan tujuan yang akan tercapai;
5. Bagaimana hasilnya akan dievaluasi dan dilaporkan;
6. Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

Perusahaan melakukan dokumentasi terhadap sasaran dan strategi mengenai SMAP. Pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran anti penyuapan dilakukan oleh Perusahaan secara berkala. Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan penyusunan laporan manajemen truwulan.

FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Perusahaan telah membentuk Tim Kepatuhan Anti Penyuapan yang sekaligus sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud*. Tim ini memberikan petunjuk dan panduan kepada personel terkait isu penyuapan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan, sebagai berikut:

1. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu terkait penyuapan;
2. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016;
3. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan Pengarah dan Direksi.

SOSIALISASI SMAP

Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada semua entitas yang terafiliasi. Dengan adanya penerapan SMAP secara menyeluruh, Perusahaan memperkuat integritasnya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan transparan.

The Company formulates a strategy to achieve these objectives and ensures that such planning includes:

1. Actions to be taken;
2. Resources required;
3. Assignment of responsibilities;
4. Target timelines for achievement;
5. Methods for evaluating and reporting results;
6. Identification of the authority responsible for imposing sanctions or disciplinary actions, if necessary.

The Company maintains documentation of its ABMS objectives and strategies. Monitoring and evaluation of anti-bribery objectives are conducted on a regular basis, aligned with the preparation of the Company's quarterly management reports.

ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION

The Company has established an Anti-Bribery Compliance Team, which also functions as the Gratification Control Unit (UPG), the Conflict of Interest Management Unit, and the Fraud Unit. This team is tasked with providing guidance and direction to personnel on bribery-related matters and ensuring compliance with the Company's policies. The responsibilities of the Anti-Bribery Compliance Team include:

1. Providing guidance and direction to personnel regarding the Anti-Bribery Management System (ABMS) and bribery-related issues;
2. Ensuring that the Anti-Bribery Management System complies with the requirements of ISO 37001:2016;
3. Reporting the performance of the Anti-Bribery Management System to the Supervisory Board and the Board of Directors.

ABMS SOCIALIZATION

To reinforce its commitment to the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company proactively conducts outreach and awareness programs on the Anti-Bribery Management System (ABMS) for all affiliated entities. Through the comprehensive implementation of the ABMS, the Company strengthens its integrity and upholds its position as a responsible and transparent business entity.

Sosialisasi SMAP ISO 37001
ABMS ISO 37001 Socializatio

No	Bentuk Sosialisasi Socialization Form	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	Interprestasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Interpretation of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	22 Februari 2024 February 22,2024	Narasumber: Faisal Arif dari PT SUCOFINDO Speaker: Faisal Arif from PT SUCOFINDO
2	*Awareness Training* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Awareness Training on Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	4-5 Juni 2024 June 4-5, 2024	PT SUCOFINDO PT SUCOFINDO
3	Persiapan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Preparation for Implementation of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	4 Juli 2024 July 4, 2024	Melalui *Platform Zoom Meeting* Via Zoom Meeting Platform

Sosialisasi SMAP ISO 37001
ABMS ISO 37001 Socializatio

No	Bentuk Sosialisasi Socialization Form	Tanggal Date	Keterangan Remarks
4	*Awareness* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Awareness on Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	1 Oktober 2024 October 1, 2024	Dalam rangka sertifikasi SMAP ISO 37001 PTP Cabang Palembang In the context of ISO 37001 certification for PTP Palembang Branch
5	*Awareness* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Awareness on Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	3 Oktober 2024 October 3, 2024	Dalam rangka sertifikasi SMAP ISO 37001 PTP Cabang Pangkal Balam In the context of ISO 37001 certification for PTP Pangkal Balam Branch
6	*Awareness* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Awareness on Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	14 Oktober 2024 October 14, 2024	Dalam rangka sertifikasi SMAP ISO 37001 PTP Cabang Bengkulu In the context of ISO 37001 certification for PTP Bengkulu Branch
7	Persiapan Audit Eksternal SMAP ISO 37001 PTP Cabang Cirebon Preparation for External Audit of ISO 37001 ABMS – PTP Cirebon Branch	16 Desember 2024 December 16, 2024	Melalui *Platform Zoom Meeting* Via Zoom Meeting Platform

AUDIT SERTIFIKASI SMAP ISO 37001

SMAP ISO 37001 AUDIT CERTIFICATION

No	Kegiatan Audit Audit Activity	Tanggal Date	Audit Result
1	Audit Stage 1 PTP Cabang Palembang Audit Stage 2 PTP Cabang Palembang Audit Stage 1 of PTP Palembang Branch Audit Stage 2 of PTP Palembang Branch	Tahap 1: 27 November 2024 Tahap 2: 4–6 Desember 2024 Stage 1: November 27, 2024 Stage 2: December 4–6, 2024	*Recommended to Certification Process*
2	Audit Stage 1 PTP Cabang Pangkal Balam Audit Stage 2 PTP Cabang Pangkal Balam Audit Stage 1 of PTP Pangkal Balam Branch Audit Stage 2 of PTP Pangkal Balam Branch	Tahap 1: 27 November 2024 Tahap 2: 9–11 Desember 2024 Stage 1: November 27, 2024 Stage 2: December 9–11, 2024	*Recommended to Certification Process*
3	Audit Surveilans SMAP ISO 37001 Kantor Pusat Surveillance Audit of ISO 37001 ABMS Head Office	11–12 Desember 2024 December 11–12, 2024	*Recommended to Continue Certification of ISO 37001:2016*
4	Audit Stage 1 PTP Cabang Bengkulu Audit Stage 2 PTP Cabang Bengkulu Audit Stage 1 of PTP Bengkulu Branch Audit Stage 2 of PTP Bengkulu Branch	Tahap 1: 27 November 2024 Tahap 2: 18–20 Desember 2024 Stage 1: November 27, 2024 Stage 2: December 18–20, 2024	*Recommended to Certification Process*
5	Audit Surveilans SMAP ISO 37001 Cabang Cirebon Surveillance Audit of ISO 37001 ABMS Cirebon Branch	19–20 Desember 2024 December 19–20, 2024	*Recommended to Continue Certification of ISO 37001:2016*

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK
DISCLOSURE OF POLITICAL CONTRIBUTIONS

Perusahaan memiliki kebijakan dalam hal pemberian dana kegiatan politik dalam Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah dimutakhirkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01/01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Kebijakan Perusahaan secara tegas melarang dana atau sumber daya Perusahaan digunakan untuk memberikan donasi kepada kandidat partai dan non-partai politik di manapun di seluruh dunia. Lebih jauh, kebijakan Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas ataupun sumber daya apa pun oleh Insan Perusahaan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh seorang Insan Perusahaan untuk mengkontribusikan waktu, uang, atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan Insan Perusahaan itu sendiri.

The Company has established a clear policy regarding political contributions, as stipulated in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Code of Business Ethics, which was most recently updated through the Board of Directors Regulation No. SK.01/01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 concerning the Code of Conduct within the Company.

The Company's policy explicitly prohibits the use of Company funds or resources to make donations to political parties or political candidates, whether affiliated or unaffiliated, in any part of the world. Furthermore, the policy strictly forbids the use of Company facilities or resources by employees for political campaigning, political fundraising, or any form of political participation. Accordingly, any decision made by an employee to contribute personal time, money, or resources to a political campaign or activity must be entirely voluntary and personal in nature, and shall not involve or imply the support of the Company in any form.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

Berdasarkan pada Peraturan Direksi Perusahaan No. HK.55/10/11/1/PTP-21, Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengelolaan LHKPN tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan Perseroan. Di mana kebijakan pengelolaan LHKPN tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan mengikuti beberapa dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses ini:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

DISCLOSURE AND MANAGEMENT POLICY FOR LHKPN

Based on PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Regulation No. HK.55/10/11/1/PTP-21, the Company has established a policy for managing LHKPN regarding the Obligation to Report Wealth for Officials within the Company. Management policy for LHKPN refers to Corruption Eradication Commission(KPK)Regulation No.7 of 2016 concerning Registration, Announcement,and Examination Procedures of State Officials' Wealth.

LEGAL BASIS AND REGULATIONS FOR IMPLEMENTING LHKPN IN THE COMPANY

In implementing LHKPN, the Company follows several legal bases and regulations that have been established. Here are some legal bases that serve as references in this process:

1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free-From Corruption, Collusion, and Nepotism State Officials;
2. Law No. 19 of 2019 on the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission;
3. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
5. Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 Year 2022;
6. Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;

7. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,SH.,M.kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024. AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, juncto Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 yang telah diaktakan sebagaimana Akta Nomor 376 Tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana surat Nomor AHU- AH.01.09-0123817 tanggal 27 Maret 2024.

WAJIB LAPOR LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan No. HK.55/10/11/1/PTP-21 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Pejabat di Perusahaan, pejabat yang wajib membuat atau menyampaikan LHKPN atau wajib LHKPN adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk dalam kriteria Penyelenggaraan Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun format laporan sebagaimana formulir LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

PENGELOLA LHKPN PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan No. HK.55/10/11/1/PTP-21 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan Perseroan, Direktur Keuangan dan SDM merupakan Koordinator Unit Pengelolaan LHKPN di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan tugas:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
   a. *Monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam pelaporan dan mengumumkan harta kekayaannya;
   b. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
2. Melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh KPK mengenai kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada KPK;
3. Mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
4. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN pada Kementerian BUMN mengenai pengelolaan LHKPN dan kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.

PENERAPAN SANKSI

Apabila Pejabat Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pejabat Wajib LHKPN, maka Perusahaan akan memberikan sanksi penundaan pembayaran honorarium atau tantiem sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban yang dibuktikan dengan bukti tanda terima LHKPN.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Direksi merupakan pejabat Perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara itu, pelaporan LHKPN bagi Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi, diselenggarakan secara terkoordinasi oleh Entitas Induk Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia

7. KPK Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to the Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Organizers' Wealth;
8. Deed of Establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number 27 dated July 10, 2013 made by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.kn, Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree Number AHU-42024. AH.01.01 of 2013 dated August 1, 2013, in conjunction with the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders Number SK.03 /29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 and SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 dated February 29, 2024 which has been notarized as Deed Number 376 dated March 26, 2024, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and the changes in the Company's data have been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights, as letter Number AHUAH.01.09-0123817 dated March 27, 2024.

MANDATORY REPORTING OF LHKPN

In accordance with PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Regulation No. HK.55/10/11/1/PTP-21 regarding the Obligation to Report Wealth for Officials in the Company, the officials who are required to create or submit LHKPN (State Officials' Wealth Report) are Directors and Board of Commissioners who meet the criteria of State Officials based on applicable laws and regulations. The report format follows the LHKPN form provided by the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

THE COMPANY'S LHKPN MANAGEMENT

Based on PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Regulation No. HK.55/10/11/1/PTP-21 regarding the Obligation to Report Wealth for Officials in the Company, Director of Finance and Human Capital is Coordinator of LHKPN Management Unit within PT Pelabuhan Tanjung Priok. Their tasks include:

1. Coordinating with KPK in terms of:
   a. Monitoring and evaluating compliance with the mandatory reporting of LHKPN and announcement of wealth.
   b. Providing socialization on LHKPN obligations and technical guidance on how to fill out LHKPN.
2. Verifying data submitted by KPK regarding compliance with mandatory reporting of LHKPN and providing the verification results to KPK;
3. Reminding the obligated individuals to comply with the obligation of submitting and announcing LHKPN;
4. Coordinating with LHKPN Coordinator at the Ministry of State-Owned Enterprises regarding management of LHKPN and compliance with mandatory submission of LHKPN to KPK.

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS

If a Company Official fails to fulfill their obligations as a Mandatory LHKPN Official, the Company will impose a sanction by delaying the payment of honorarium or bonuses until the individual fulfills their obligations, which must be proven with a receipt of the LHKPN submission.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY OFFICIAL'S LHKPN IN 2023

In 2024, the Board of Directors are the Company's officials who are required to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN). Meanwhile, LHKPN reporting for Board of Commissioners and Structural Officials one level below Board of Directors, is coordinated by the Parent Company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero). It is because these officials are employees of

(Persero). Ini dikarenakan para pejabat tersebut merupakan karyawan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditempatkan di PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) who are stationed at PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pejabat Position	**Jumlah Wajib Lapor** Total Mandatory Report	**Jumlah yang Telah Melaporkan** Total Reports	
		Jumlah Total	**%**
Direksi Board of Directors	3	3	100%

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICY

Sebagai bagian dari upaya mendukung operasional Perusahaan, Perusahaan telah menetapkan ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, proses pengadaan yang dilakukan Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka dan akuntabel, dengan menerapkan kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi PBJ guna mengoptimalkan *value for money*;
2. Menyelaraskan tujuan PBJ dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
3. Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri (PDN);
5. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang PBJ;
7. Memanfaatkan teknologi informasi;
8. Memberikan kesempatan kepada anak Perusahaan BUMN dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;
9. Melaksanakan PBJ yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
10. Memperkuat pengukuran kinerja PBJ dan pengelola risiko.

Operasional pengadaan produk dan jasa dalam lingkup perusahaan diselenggarakan oleh Unit Pengelola Pengadaan, yang mengikuti prosedur internal perusahaan serta peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum.

As part of its efforts to support operational activities, the Company has established provisions governing the Procurement of Goods and Services in accordance with applicable regulations. This policy is outlined in the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 dated March 21, 2024, concerning the Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Furthermore, the procurement process carried out by the Company consistently prioritizes the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, openness, and accountability, by implementing policies including :

1. Improving the quality of a consolidative planning and strategy for procurement of goods and services to optimize value for money;
2. Aligning the procurement objectives with the Company's achievement objectives;
3. Implementing more transparent, competitive and accountable procurement of goods and services;
4. Prioritizing domestic products in accordance with the provisions to use domestic products;
5. Providing opportunities for national and small businesses;
6. Strengthening institutional capacity and human capital for procurement of goods and services;
7. Utilizing information technology;
8. Providing opportunities for subsidiaries and/or synergies between SOE/SOE Subsidiaries/Affiliated Companies;
9. Conducting strategic, modern, innovative and/or procurement;
10. Strengthening performance measurement for procurement and risk management.

The operational procurement of products and services within the Company's domain is administered by the Procurement Management Unit, which follows the Company's internal procedures and complies with applicable regulations in accordance with the law.

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*
INSIDER TRADING POLICY

PT Pelabuhan Tanjung Priok bukan merupakan perusahaan publik/terbuka, sehingga tidak memiliki kebijakan tentang transaksi orang dalam/*insider trading*.

PT Pelabuhan Tanjung Priok is not a public/open company, hence does not have a policy regarding insider trading.

PERKARA PENTING
SIGNIFICANT CASES

Peraturan-peraturan terkait pengelolaan Perusahaan dijunjung tinggi demi memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Prioritas utama adalah untuk meminimalkan pelanggaran, khususnya yang terkait dengan masalah hukum. Adapun permasalahan hukum yang terjadi di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

The Company upholds all regulations related to corporate governance to ensure ongoing compliance. A key priority is to minimize violations, particularly those related to legal matters. The legal issues encountered during 2024 are outlined as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	**2024**		**2023**	
	Perdata Civil	**Pidana** Criminal	**Perdata** Civil	**Pidana** Criminal
Perusahaan Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In process of resolution	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with permanent legal force				
Dalam proses penyelesaian In process of resolution				
Jumlah Total	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In process of resolution	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan Overall Total	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Pada tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. Selain itu, tidak terdapat juga sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh otoritas terkait.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

In 2024, there were no material administrative sanctions affecting the continuity of the Company's business. In addition, there were no administrative sanctions imposed on the Company as a subsidiary, members of Board of Directors or members of Board of Commissioners by the relevant authorities

Perusahaan Company	**Sanksi Administratif** Administrative Sanction
Perusahaan Company	
Perusahaan Company	Tidak terdapat sanksi administratif No administrative sanction
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Tidak terdapat sanksi administratif No administrative sanction

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, Dewan Komisaris maupun Direksi.

SIGNIFICANT CASES OTHER THAN LEGAL ASPECT

As of December 31, 2024, the Company has not identified any significant non-legal matters involving the Company as an organization, Board of Commissioners, or Board of Directors.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, integritas, dedikasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu manajemen Perusahaan. Pendekatan ini memastikan adanya beragam perspektif, keterampilan, dan wawasan yang penting untuk tata kelola yang efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2024 tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The selection and appointment process for members of the Board of Commissioners takes into account various criteria, including age, gender, educational background, professional experience, integrity, dedication, and a strong understanding of the Company's management issues. This approach ensures a diverse range of perspectives, skills, and insights that are essential for effective governance, in alignment with applicable laws and regulations. Details of the diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of December 31, 2024, reflected in their education, work experience, age, and gender, are presented in the table below.

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Career Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioenr	Indonesia Indonesian	• Magister Manajemen Jurusan Manajemen (2013) • Magister Teknik Jurusan Sistem dan Transportasi Jalan Raya (1995) • Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil (1992) • Master of Management, Management Major (2013) • Master of Engineering, Roadway Systems and Transportation Major (1995) • Bachelor of Engineering, Civil Engineering Major (1992)	• Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2021-2023) • Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV (2018-2023) • GM pengembangan Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018) • MD Investasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2018) • Technical Director of PT Pelindo Multi Terminal (2021–2023) • Technical Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV (2018–2023) • GM of Business Development at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017–2018) • MD of Investment at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016–2018)	Manajemen dan Teknik Management and Engineering	59	Laki-laki Male
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	Indonesia Indonesian	• S2 *Shipping and Transformation*, Netherland Maritime University (2014) • S1 Ekonomi *Management*, Universitas Terbuka (2002) • Master's Degree in Shipping and Transportation, Netherlands Maritime University (2014) • Bachelor's Degree in Management Economics, Indonesia Open University (2002)	• Direktur Operasi dan Teknik PT IKT Tbk (2021-2023) • Specialis PT Pelindo 2 (2021-2021) • Direktur Komersial PT MTI (2019-2021) • Plt. Direktur Utama PT MTI (2019-2019) • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT MTI (2017-2019) • Director of Operations and Engineering, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021–2023) • Specialist, PT Pelindo II (2021) • Director of Commercial, PT Multi Terminal Indonesia (2019–2021) • Acting President Director, PT Multi Terminal Indonesia (2019) • Director of Commercial and Business Development, PT Multi Terminal Indonesia (2017–2019)	Ekonomi Manajemen dan *Shipping & Transformation* *Economy, Management, and Shipping & Transformation*	54	Laki-laki Male

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Career Experience	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner	Indonesia Indonesian	• S2 Magister Transportasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002) • D-IV Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi (2000) • D-III Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi (1995) • Master's Degree in Transportation, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002) • Diploma IV in Land Transportation, Land Transport Academy (STTD), Bekasi (2000) • Diploma III in Road Transport Traffic, Land Transport Academy (STTD), Bekasi (1995)	• Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2022-2024) • Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2021-2022) • Direktur Keselamatan Perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub (2021-2021) • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda di Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemenhub (2020-2021) • Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan di Sekretariat Jenderal, Kemenhub (2019-2020) • Head of the Center for Functional Transportation Position Development, Secretariat General, Ministry of Transportation (2022–2024) • Head of Bureau of Procurement Services and State Asset Management, Secretariat General, Ministry of Transportation (2021–2022) • Director of Railway Safety, Directorate General of Railways, Ministry of Transportation (2021) • Head of Research and Development Center for Intermodal Transportation, Research and Development Agency, Ministry of Transportation (2020–2021) • Head of Center for Sustainable Transportation Management, Secretariat General, Ministry of Transportation (2019–2020)	Transportasi Transportation	51	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Career Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia Indonesian	• S3 *Maritime System Engineering*, Kyushu University, Japan (2010) • S2 *Coastal Engineering and Geosciences*, Christian Albrechts Universitaet Kiel, Jerman (2002) • S1 lulusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Universitas Hasanuddin Makasar (1996) • Ph.D. in Maritime System Engineering, Kyushu University, Japan (2010) • Master's Degree in Coastal Engineering and Geosciences, Christian Albrechts Universitaet Kiel, Germany (2002) • Bachelor's Degree in Marine Science and Technology, University of Hasanuddin Makassar (1996)	• Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok (2022-2024) • Kepala Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2020-2020) • Kepala Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di Kemenko Kemaritiman (2015-2020) • Kepala Bagian Program, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Kemaritiman (2015-2015) • Kepala Sub Bidang Perlindungan Konsumen, Deputi Perniagaan di Kemenko Perekonomian (2014-2015) • Commissioner, • PT Pelabuhan Tanjung Priok (2022–2024) • Head of Water Resources and Coastal Infrastructure Division, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2020-2020) • Head of Integrated Maritime Logistics Development Division, Deputy for Infrastructure Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs (2015–2020) • Head of Program Section, Deputy for Infrastructure and Transportation Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs (2015-2015) • Head of Consumer Protection Subdivision, Deputy for Trade Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014–2015)	Teknik Engineering	55	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors						
Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director	Indonesia Indonesian	• Magister Administrasi Bisnis (Leadership & Logistics), Kühne Logistics University, Jerman (2013) • S2 *Master of Science*, World Maritime University, Swedia (2002) • Sarjana Teknik Listrik/Elektro, Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1996) • Master of Business Administration (Leadership & Logistics), Kühne Logistics University, Germany (2013) • Master of Science, World Maritime University, Sweden (2002) • Bachelor's Degree in Electrical Engineering, University of Gadjah Mada Yogyakarta (1996)	• *General Manager* TPK Koja (2022-2024) • Staf Madya Direktur Pengelola Pelindo (2021-2022) • *Junior Chief Specialist* Pelindo II (2020-2021) • *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia II, Cabang Pelabuhan Palembang (2019-2020) • Direktur Operasional PT Indonesia Kendaraan Terminal (2015-2019) • General Manager, TPK Koja (2022–2024) • Senior Staff to the Managing Director, Pelindo (2021–2022) • Junior Chief Specialist, Pelindo II (2020–2021) • General Manager, PT Pelabuhan Indonesia II, Palembang Branch (2019–2020) • Director of Operations, PT Indonesia Kendaraan Terminal (2015–2019)	Teknik Engineering	53	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Career Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Plt. Direktur Operasional Director of Commercial and Business Development Acting Director of Operations	Indonesia Indonesian	• S2 Manajemen Pemasaran di Universitas Hasanuddin (2012) • Sarjana Ilmu Ekonomi, STIEM Bongaya (2003) • Diploma Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Universitas Hasanuddin (1996) • Master's Degree in Marketing Management, Hasanuddin University (2012) • Bachelor's Degree in Economics, STIEM Bongaya (2003) • Diploma in Shipping and Port Management, Hasanuddin University (1996)	• Sekretaris Perusahaan Pelindo IV (2021-2021) • *Corporate Secreatry* (2020-2021) • Pelaksanaan Harian Direktur Utama PT Nusantara Terminal Services (2018-2020) • Direktur SBU Marine Service (2017- 2018) • Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan Kantor Pusat (2016- 2017) • Corporate Secretary at Head Office (2021–2021) • Corporate Secretary (2020–2021) • Acting President Director of PT Nusantara Terminal Services (2018–2020) • Director of Marine Service SBU (2017–2018) • Head of Corporate Planning and Strategy Bureau at Head Office (2016–2017)	Manajemen Pemasaran dan Ekonomi Management, Marketing, and Economy	51	Laki-laki Male
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management	Indonesia Indonesian	• S2 *Business Administration*, Monash University Melbourne (2000) • S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1995) • Master of Business Administration, Monash University, Melbourne (2000) • Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1995)	• *Executive Advisor to* CEO PT ANTAM Tbk (2020-2021) • *Business Advisor Independent Consultant* (2017-2020) • *Executive Advisor to Operations Director* (COO) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2017)	Administrasi Bisnis dan Teknik Industri Business Administration and Industrial Engineering	52	Laki-laki Male

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak mendapatkan laporan adanya aktivitas Perusahaan yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut didukung oleh perhatian khusus yang diberikan oleh Perusahaan terhadap seluruh aspek dalam kegiatan bisnis Perusahaan, termasuk aspek lingkungan di sekitar wilayah operasi Perusahaan dengan melalui pengelolaan limbah yang optimal.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya, Perusahaan selalu memastikan untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Salah satu aspek yang sangat diutamakan adalah kepatuhan terhadap regulasi terkait perpajakan. Per 31 Desember 2024 Perusahaan berkontribusi terhadap negara

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

As of December 31, 2024, the Company has not received any reports of Company activities that may pollute the environment. This is supported by the special attention given by the Company to all aspects of its business activities, including environmental aspects in the vicinity of the Company's operations, through optimal waste management.

DISCLOSURE OF TAX COMPLIANCE

In all its activities, the Company always ensures compliance with all applicable regulations and laws. One highly prioritized aspect is compliance with taxation regulations. As of December 31, 2024, the Company contributed to the state through tax obligations amounting to Rp254.81 billion. These taxes include Income Tax

melalui pemenuhan kewajiban pajak sebesar Rp254,81 miliar. Pajak tersebut terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPn, PPh 29, PPh 25, pajak lainnya (termasuk PBB), dan PNBP.

Adapun rincian kontribusi Perusahaan kepada Negara tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4(2), Value Added Tax (VAT), Income Tax Article 29, Income Tax Article 25, other tax (include land and building tax), and PNBP.

The details of the Company's contributions to the State in 2024 and its comparison with 2023 were as follows.

No	Kontribusi kepada Negara Contribution to the State	2023 (Jutaan Rupiah) 2023 (Million Rupiah)	2024 (Jutaan Rupiah) 2024 (Million Rupiah)
1	Penyetoran Kontribusi Dividen Dividend Contribution Payment	99.500	79.030
	Kontribusi Pajak Tax Contribution		
	1. Penyetoran PPh Pasal 25 dan 29 Deposit of Income Tax Articles 25 and 29	18.750	24.571
	2. Penyetoran PPN + PPN Impor + PPN WAPU Deposit of VAT + Import VAT + WAPUVAT	2.873	48.188
	3. Penyetoran PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 (2), PPh 26 Deposit of Income Tax 21,Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	52.985	69.156
	4. Penyetoran Pajak Lainnya (Termasuk PBB) Deposit of Other Tax (include Land and Building Tax)	-	14.881
	Total Kontribusi Pajak Total of Tax Contribution	74.607	156.797
2	PNBP:		
	1. Pandu & Tunda Pilotage and Towage	-	-
	2. Konsesi Concession	12.895	18.982
	Total PNBP	12.895	18.982
Jumlah Kontribusi Kepada Negara Total Contribution to the State		187.003	254.808

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Analisis dan pembahasan pada laporan tahunan ini sebagian besar mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of* Ernst & Young Global Ltd). Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak menerima laporan atau pengaduan kasus terkait dengan buruh dan karyawan di lingkungan kerja Perusahaan.

PENGUNGKAPAN SEGMEN OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perusahaan telah menyajikannya menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha dan berdasarkan geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Audit tahun buku 2024 catatan "Informasi Segmen".

COMPLIANCE WITH FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND REGULATORY REQUIREMENTS

The analysis and discussion presented in this Annual Report are primarily based on the Financial Statements for the years ended December 31, 2024, and December 31, 2023, which were audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Ltd).. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), specifically the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), including relevant interpretations and pronouncements issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI).

LABOR AND EMPLOYEE-RELATED CASES

In 2024, the Company did not receive any reports or complaints related to labor or employee issues within the workplace.

OPERATING SEGMENT DISCLOSURE IN THE FINANCIAL STATEMENTS

In accordance with PSAK No. 5 (2015 Revision) on Operating Segments and for internal management purposes, the Company has disclosed its operating segments based on business segment classification and geographical location. This disclosure is included in the audited Financial Statements for the fiscal year 2024 under the note titled "Segment Information."

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Perusahaan, baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

CONSISTENCY BETWEEN PRINTED AND DIGITAL VERSIONS OF THE ANNUAL REPORT

The Company's digital Annual Report, whether distributed to shareholders and stakeholders or uploaded to the Company's official website, is consistent with the printed version of the Annual Report as published and issued by the Company.

PEMENUHAN REKOMENDASI PUGKI
FULFILLMENT OF PUGKI RECOMMENDATIONS

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance results: • Competitive and focused on long-term performance; • Ethical and responsible for running the business; • Contribute positively to society and the environment; as well as	***Apply*** Direksi telah memiliki Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024, Tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Board of Directors has established a Business Code of Conduct as stipulated in the Board Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, concerning the Business Code of Conduct within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives by effectively leveraging innovation and technology.	***Apply*** Direksi telah memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif sebagaimana tercantum di dalam RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024. The Board of Directors has ensured that the vision, mission, goals, objectives, strategies, and both annual and medium-term plans are consistent with the long-term objectives by effectively utilizing innovation and technology as outlined in the 2024 RKAP of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that align with its vision, mission, goals, objectives, and strategies, while complying with applicable laws and standards.	***Apply*** Direksi telah memastikan Korporasi menerapkan manajemen risiko melalui penyusunan Laporan Manajemen Risiko yang termuat dalam Laporan Manajemen Unaudited Tahun 2024, Bab IV Manajemen Risiko, halaman 119, sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengendalian risiko di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Board of Directors has ensured that the Corporation implements risk management through the preparation of the Risk Management Report as included in the 2024 Unaudited Management Report, Chapter IV Risk Management, page 119, as a reference for managing and controlling risk within PT Pelabuhan Tanjung Priok. Direksi telah memastikan Korporasi menerapkan sistem pengendalian intern dengan ditetapkannya Peraturan Direksi No. HK.56/6/6/1/AUDITPTP-17 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Board of Directors has ensured that the Corporation implements an internal control system through the enactment of Board Regulation No. HK.56/6/6/1/AUDITPTP-17 dated June 6, 2017 concerning General Guidelines on Internal Control System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	***Apply*** Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Korporasi dan pengungkapan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi, sebagaimana diungkapkan di dalam laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2023, bagian Laporan Keuangan (*Financial Statements*) dan telah dipublikasi melalui *website* Korporasi. The Board of Directors has ensured the integrity of the Corporation's accounting and financial reporting system as well as the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation, as stated in the 2023 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia, section Financial Statements, and published through the Corporate website.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	***Apply*** Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan disusun sebagaimana mestinya sebagaimana telah terdapat penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 dan telah dipublikasi melalui website Korporasi. Penyusunan Laporan Keberlanjutan sesuai dengan standar GRI 2021. The Board of Directors has ensured that the sustainability report is properly prepared, as evidenced by the preparation of the 2023 Sustainability Report which has been published on the Corporate website. The report is prepared in accordance with the GRI 2021 standards.
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with the corporation's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the corporation's goals and strategies	***Apply*** Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi salah satunya dengan terdapatnya IT *Master Plan* (ITMP) 2020-2024. The Board of Directors has established a governance framework for corporate information technology (IT) aligned with the Corporation's business needs and priorities, promoting business opportunities and performance, strengthening risk management, and supporting the Company goals and strategies, including through the existence of the 2020–2024 IT Master Plan (ITMP).

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	**N/A (*Not Applicable*)** Korporasi tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. The Corporation does not conduct its business activities based on sharia principles.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Board of Directors' Decree.	***Apply*** Piagam Direksi telah secara periodik ditinjau, terakhir kali dimutakhirkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok NO : SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 17 Desember 2024. The Board Charter has been periodically reviewed, most recently updated through the Board Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No: SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 concerning the Work Implementation Guidelines for the Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok, dated December 17, 2024.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	***Apply*** Board Manual telah memuat kebijakan mengenai pengunduran Direksi namun di dalamnya belum diatur sebab pengunduran diri Direksi dikarenakan terlibat dalam Kejahatan Keuangan. The Board Manual has contained policies regarding the resignation of Directors; however, it does not regulate resignation due to involvement in financial crimes.
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members	
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	***Apply*** Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur, sebagaimana termuat di dalam *Board Manual*, Bab II. Direksi, Bagian L. Penilaian Kinerja Direksi, halaman 44. The Board of Commissioners has conducted an annual formal evaluation objectively and independently to assess the effectiveness of the Board of Directors and each individual director, as stated in the Board Manual, Chapter II. Board of Directors, Section L. Performance Evaluation of the Board of Directors, page 44.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nominations and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	***Apply*** Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya disampaikan dalam Risalah rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 17 Desember 2024. The evaluation and performance assessment of the President Director and other members of the Board of Directors were presented in the minutes of the joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners during the Coordination Meeting held on December 17, 2024.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	***Apply*** Dewan Komisaris telah mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Tanggapan atas Penyesuaian Usulan RKAP Tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor DK/26/1/1/PTP-24, Tanggal 26 Januari 2024. The Board of Commissioners has reviewed, provided recommendations, and approved the 2024 Business Plan and Company Work Plan and Budget (RKAP) as stated in the Response to the Adjustment of the 2024 RKAP Proposal of PT Pelabuhan Tanjung Priok, Number DK/26/1/1/PTP-24, dated January 26, 2024.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	***Apply*** Laporan Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok telah memuat jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. The Annual Report of PT Pelabuhan Tanjung Priok has included the types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras antar golongan dan *gender*. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the matters above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	***Explain*** Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham. The dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners are entirely under the authority of the Shareholders.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	***Apply*** Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi, sebagaimana termuat di dalam *Board Manual* halaman 9-11. The Board of Commissioners or the Committee carrying out the nomination function has established a succession policy in the nomination process of Board of Directors members, as stated in the Board Manual pages 9–11.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris The Board of Commissioners: a) proposes to the GMS, which may be preceded by recommendations from the committee performing remuneration functions, the amount of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in alignment with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	***Explain*** Belum terdapat usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS dari PT PTP dikarenakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris langsung diputuskan oleh PT PELINDO sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT PTP. There has been no remuneration proposal for the Board of Directors and the Board of Commissioners submitted to the GMS by PT PTP because the remuneration is directly determined by PT PELINDO in accordance with applicable policies at PT PTP.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	***Apply*** Dewan Komisaris telah mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan sebagaimana hal tersebut dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta telaah Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan governansi korporat di Perusahaan. The Board of Commissioners has overseen the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposed changes when necessary, as discussed in the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and through the Board's review of corporate governance practices within the Company.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are inline with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	***Apply*** Dewan Komisaris telah memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku, sebagaimana termuat di dalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Juli 2024. The Board of Commissioners has monitored and directed the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the Corporation's objectives, targets, and strategies, and comply with laws, codes of conduct, and applicable standards, as recorded in the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors in July 2024.
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	***Apply*** Dewan Komisaris telah mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal, sebagaimana termuat di dalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 17 Desember 2024. The Board of Commissioners has supervised and directed the achievement of integrity in accounting and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions, as stated in the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 17, 2024.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	***Apply*** Dewan Komisaris telah memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi, sebagaimana Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 telah disetujui dan dipublikasikan. The Board of Commissioners has monitored, reviewed, and approved the Corporation's annual and sustainability reports and ensured their integrity, and has supervised the disclosure and communication processes, as the 2023 Annual and Sustainability Reports have been approved and published.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	***Apply*** Piagam Dewan Komisaris telah secara periodik ditinjau, sebagaimana dilihat dari Board Manual PT PTP yang terakhir kali dimutakhirkan pada 17 Desember 2024. The Board of Commissioners Charter has been periodically reviewed, as evidenced by the PT PTP Board Manual which was last updated on December 17, 2024.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	***Apply*** Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan, sebagaimana termuat di dalam Board Manual halaman 49-51. The Board of Commissioners has had a policy regarding the resignation of its members in the event of involvement in financial crimes and proven misconduct, as stated in the Board Manual pages 49–51.
1.3.12	Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	***Apply*** Piagam Dewan Komisaris telah secara periodik ditinjau, sebagaimana dilihat dari Board Manual PT PTP yang terakhir kali dimutakhirkan pada 17 Desember 2024. The Board of Commissioners Charter has been periodically reviewed, as evidenced by the PT PTP Board Manual which was last updated on December 17, 2024.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	***Apply*** Komisaris Utama telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner has served as the coordinator of the Board of Commissioners and ensured its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of openness and constructive dialogue that enables the expression of diverse viewpoints, including coordinating the establishment of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is allocated to discuss all items. In addition, opportunities must be provided for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation	
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	***Apply*** Korporasi telah memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Manajemen Risiko (PUPMR). The Corporation has established an Audit Committee, a Nomination and Remuneration Committee, and a Business Development and Risk Management Monitoring Committee (PUPMR).

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	***Apply*** Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners has ensured that all members of the Audit Committee are independent and that the other committees formed by the Board consist of a majority of independent members. All committee members possess the necessary competence, commitment, and sufficient authority to perform their roles effectively and independently.
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	***Apply*** Ketua Komite Audit bukan merupakan Komisaris Utama korporasi, sebagaimana terlihat dalam struktur organisasi dan profil Komite Audit di dalam web korporasi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK/4/1/3/PTP-24 Tentang Penetapan Susunan Komite Audit Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Chairman of the Audit Committee is not the President Commissioner of the corporation, as reflected in the organizational structure and the Audit Committee profile on the corporate website, and in the Board of Commissioners' Decree of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: SK/4/1/3/PTP-24 concerning the Appointment of the Audit Committee Structure of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Members	
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komite dan setiap individu Komisaris. The Board of Commissioners conducts an objective formal annual evaluation to determine the effectiveness of the Board, its Committees, and each individual Commissioner.	***Apply*** Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris sebagaimana termuat dalam Board Manual Bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has conducted an annual formal and objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner, as stated in the Board Manual section on the Performance Evaluation of the Board of Commissioners.
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	***Apply*** Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation have obtained approval from the Board of Commissioners. A Commissioner informs the Board of Commissioners and the chairman of the committee performing the nomination function prior to accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed company, another directorship, or any position with a significant time commitment, as stated in the Circular Resolution of Shareholders Number: SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	***Apply*** Dewan Komisaris telah memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan, serta hal ini termuat di dalam Board Manual. The Board of Commissioners has monitored and managed potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Commissioners with a conflict of interest do not participate in the oversight or decision-making related to any potential conflict involving themselves or their affiliates, as stated in the Board Manual.
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Increasing the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang- undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui Sekretaris Perusahaan mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the Corporate Secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	***Apply*** Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan, sebagaimana dilakukan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Direktur Utama dan Direktur Komersial & Pengembangan Usaha, Tanggal 4 Maret 2024. The Board of Commissioners has ensured that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the corporation's characteristics and operations, applicable laws and regulations, relevant standards, and other prevailing obligations. The Board of Directors, through the Corporate Secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge required to fulfill their roles on the Board, as carried out during the Handover Ceremony (Sertijab) of the President Director and the Director of Commercial & Business Development on March 4, 2024.
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	***Explain*** Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, tidak memiliki kewenangan dalam hal menentukan kandidat calon Direktur dikarenakan penentuan kandidat calon Direktur sepenuhnya merupakan wewenang Pemegang Saham. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not have the authority to determine candidates for the position of Director, as the appointment of Director candidates is entirely under the authority of the Shareholders.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Apply Telah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai syarat anggota Direksi sebagaimana termuat dalam *Board Manual* PT PTP Tahun 2024, pada bagian Direksi. Policies governing the qualifications for members of the Board of Directors are outlined in the 2024 PT PTP Board Manual, under the Board of Directors section.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	***Apply*** Kebijakan mengenai keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan oleh Korporasi yang dapat dilihat dalam Laporan Tahunan PT PTP Tahun 2023 pada bagian Pengungkapan mengenai Direksi dan Pengungkapan mengenai Dewan Komisaris. The Corporation has disclosed its policy on diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners, which can be found in the 2023 PT PTP Annual Report under the sections on Board of Directors and Board of Commissioners disclosures.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	***Explain*** Pelaksanaan seleksi dan nominasi Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Korporasi. The selection and nomination process for Commissioners is under the authority of the Shareholders, in accordance with applicable regulations of the Corporation.
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	***Explain*** Proses nominasi dan seleksi anggota Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham. The nomination and selection process for members of the Board of Commissioners is the responsibility of the Shareholders.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan *gender* yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	***Apply*** Komposisi Dewan Komisaris telah dibentuk sedemikian rupa. Hal tersebut terlihat dari anggota Dewan Komisaris yang memiliki keberagaman latar belakang baik usia, pengalaman, serta kemampuan, sebagaimana dapat dilihat pada laman website Korporasi yakni pada laman: https://ptp.co.id/profil/manajemen/ dan juga dapat dilihat melalui Laporan Tahunan Korporasi yang telah dipublikasikan pada laman: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan The composition of the Board of Commissioners has been structured accordingly. This is evident from the diversity in age, experience, and expertise among its members, as shown on the Corporation's website at: https://ptp.co.id/profil/manajemen/ and also in the published Annual Report available at: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	***Apply*** Komposisi Dewan Komisaris pada Korporasi telah terdiri dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 April 2022. Informasi mengenai Dewan Komisaris Independen pada Korporasi telah dipublikasi oleh Korporasi pada website Korporasi yakni pada laman: https://ptp.co.id/profil/manajemen/ serta dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Korporasi yang dapat diakses melalui laman: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/ The composition of the Company's Board of Commissioners includes one (1) Independent Commissioner appointed through the Shareholders' Circular Resolution of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated April 26, 2022. Information on the Independent Commissioner has been published by the Corporation on its website: https://ptp.co.id/profil/manajemen/ and also in the Corporation's Annual Report accessible at: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	***Explain*** Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham. The appointment and assignment of members of the Board of Directors is fully under the authority of the Shareholders.
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Board of Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	***Explain*** Remunerasi Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT PTP The remuneration of the Board of Directors is entirely under the authority of the GMS, in accordance with the policies applicable at PT PTP.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
2.2.2	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be in the form of fixed remuneration. If any member of the Board of Commissioners is granted performance-related remuneration, the basis must be linked to the corporation's long-term development and must differ from that of the Directors.	***Explain*** Korporasi belum melakukan ratifikasi atas Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal No: KP.07.02/30/8/2/PS05S/DIRU/PLMT-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Group Bisnis Perusahaan. The Corporation has not yet ratified the Board of Directors Regulation of PT Pelindo Multi Terminal No: KP.07.02/30/8/2/PS05S/DIRU/PLMT-24 regarding the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/Commissioners and Boards of Commissioners/Supervisors within the Company's Business Group.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	***Explain*** Remunerasi Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT PTP. The remuneration of the Board of Directors is entirely under the authority of the GMS, in accordance with the policies applicable at PT PTP.
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Employment Relationships	
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	***Apply*** Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan diskusi dilakukan secara terbuka, namun tetap menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia, sebagaimana disampaikan sample risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada 17 Desember 2024. The Board of Directors and the Board of Commissioners conduct discussions openly, while maintaining the confidentiality of information to prevent the leakage of confidential data, as evidenced in the sample minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors on December 17, 2024.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	***Apply*** Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku untuk penyusunan RKAP tahun 2024. The Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision, and strategy, and regularly discusses their implementation in accordance with applicable regulations for the preparation of the 2024 RKAP.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	***Apply*** Sekretaris Korporasi telah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana termuat dalam tugas Sekretaris Perusahaan yang diuraikan di dalam Board Manual PT PTP Tahun 2024, bagian Sekretaris Perusahaan, halaman 43. The Corporate Secretary plays a vital role in supporting the effectiveness of working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners, promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders, as outlined in the Corporate Secretary's duties in the 2024 PT PTP Board Manual, section Corporate Secretary, page 43.
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access information on the Board of Commissioners	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	***Apply*** Direksi dalam menjalankan tugasnya telah memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Board Manual, bagian Kewajiban Direksi halaman 37-39. In carrying out its duties, the Board of Directors has the obligation and responsibility to ensure that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information, as stipulated in the Board Manual, section Duties of the Board of Directors, pages 37–39. Untuk memastikan Dewan Komisaris memperoleh informasi yang memadai, telah diatur pula ketentuan mengenai “Permintaan dan Penyampaian Informasi” pada *Board Manual*, halaman 80 yang memuat ketentuan mengenai proses permintaan dan penyampaian informasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. To ensure the Board of Commissioners receives adequate information, provisions on “Request and Delivery of Information” are also stipulated in the Board Manual, page 80, outlining the procedures for requesting and delivering information between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation	
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar- pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	***Apply*** Berdasarkan kajian dokumen, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan sehingga tidak mempengaruhi keputusan dalam operasional perusahaan, sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Pakta Integritas, Surat Pernyataan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Komisaris dan Direksi Tahun 2024. Based on document review, the Board of Directors and the Board of Commissioners do not hold shares in the Company, thereby not influencing decisions in the Company’s operations, as stated in the Integrity Pact Document, Statement Letter, Special Share Ownership Register, and the 2024 Conflict of Interest Declaration Letter of the Commissioners and Directors.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
4.	Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and responsible behavior	
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang- undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. • Menghormati perbedaan pendapat dan hak- hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; dan • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	***Apply*** Korporasi telah memiliki Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang memuat secara jelas mengungkapkan bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; dan • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya;

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
	This statement is outlined in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees will: • Act in the best interest of the corporation; • Act honestly and with high standards of integrity; • Act independently and on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and prudence; • Comply with the laws and regulations applicable to the corporation and its operations; • Avoid any action that violates laws or is unethical as per the corporation's code of ethics; • Not engage in or participate in any activity that would create a conflict of interest with the corporation's best interest or negatively impact its reputation; • Not take advantage of corporate-owned property, information, or other assets, or those of its customers, for personal gain or in a way that causes harm to the corporation and its customers; • Not misuse their position or exploit opportunities arising from their role for personal benefit; • Avoid soliciting or accepting from third parties any payments, gratification, or other benefits for themselves or others that create conflicts of interest or provide unlawful benefits to third parties; • Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; and • Ensure full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.	The Corporation has established a Code of Conduct and Business Ethics that clearly states that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employee shall: • Act in the best interest of the corporation; • Act honestly and with high standards of integrity; • Act independently and on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and prudence; • Comply with the laws and regulations applicable to the corporation and its operations; • Avoid any action that violates laws or is unethical as per the corporation's code of ethics; • Not engage in or participate in any activity that would create a conflict of interest with the corporation's best interest or negatively impact its reputation; • Not take advantage of corporate-owned property, information, or other assets, or those of its customers, for personal gain or in a way that causes harm to the corporation and its customers; • Not misuse their position or exploit opportunities arising from their role for personal benefit; • Avoid soliciting or accepting from third parties any payments, gratification, or other benefits for themselves or others that create conflicts of interest or provide unlawful benefits to third parties; • Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; and • Ensure full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti *fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other standards. other related.	***Apply*** Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (anti *fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. Kebijakan tersebut tertuang dalam: The Board of Directors has established policies and practices regarding anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards. These policies are stipulated in:
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Values and Culture	
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values.	***Apply*** Korporasi telah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi melalui sosialisasi *Code of Conduct* baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris maupun seluruh karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2024. The Corporation has articulated, fostered, and disclosed its corporate culture and values through the dissemination of the Code of Conduct to both the Board of Directors and Board of Commissioners as well as to all employees, conducted in 2024.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethics, Values and Culture Guidelines	
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	***Apply*** Korporasi telah memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik, sebagaimana termuat dalam Code Of Conduct PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2024. Dalam rangka memastikan Pedoman Perilaku dan Kode Etik (Code of Conduct), telah dilaksanakannya Sosialisasi Code of Conduct kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2024. The Corporation has established a whistleblowing guideline that encourages the reporting of behavior that violates laws or is unethical. This guideline also includes provisions on how the Corporation protects whistleblowers acting in good faith, as stated in the 2024 Code of Conduct of PT Pelabuhan Tanjung Priok. To ensure the implementation of the Code of Conduct, a socialization program was conducted for the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees in 2024.
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance	
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	***Apply*** Direksi telah melakukan review secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi, sebagaimana Laporan Tahunan dapat dilihat dan diakses pada website Korporasi: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/ The Board of Directors has conducted periodic reviews of the adequacy of the design and operational effectiveness of the corporate governance system, risk management, internal control, and compliance, and has reported the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's Annual Report, which can be viewed and accessed on the Corporation's website: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/
5.2	Manajemen Risiko Risk management	
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	***Apply*** Korporasi telah mengungkapkan risiko dan strategi penanganannya dalam Laporan Tahunan pada halaman 577, sebagaimana dapat diakses pada laman https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan Pengawasan aktif oleh Direksi dan dan Dewan Komisaris guna memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan melalui Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris. The Corporation has disclosed risks and their mitigation strategies in the Annual Report on page 577, which can be accessed via https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/ Active oversight by the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure the implementation of Risk Management has been carried out through Joint Meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists in carrying out the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	***Apply*** Dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko pada Korporasi, Board Manual PT PTP pada halaman 70, telah mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko sebagai organ Komite dibawah Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada: a. Memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; b. Memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); c. Mereviu setiap kejadian material yang melibatkan *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa *dating*; d. Menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; e. Menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; f. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan g. Mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. **Apply** To assist the Board of Commissioners in carrying out its oversight duties related to the implementation of Risk Management within the Corporation, the PT PTP Board Manual on page 70 stipulates the authority, duties, and responsibilities of the Business Development and Risk Management Oversight Committee as a committee under the Board of Commissioners, including but not limited to: a. Monitoring the Corporation's performance against the risk management framework, including whether the Corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; b. Monitoring controls over key risks, including key financial reporting risks and fraud risks; c. Reviewing any material incidents involving fraud or significant weaknesses in the Corporation's risk controls, and identifying lessons learned to prevent recurrence; d. Receiving reports from internal auditors regarding the adequacy of the Corporation's risk management processes; e. Receiving reports from management on new and emerging risks and the risk controls and mitigation measures taken by the Board of Directors to address such risks; f. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding necessary changes to the entity's risk management framework or risk appetite approved by the Board; anD g. Overseeing the Corporation's insurance programs, considering the Corporation's business operations and insurable risks.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance	
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	***Apply*** Direksi telah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya, hal tersebut dilakukan salah satunya dengan cara menetapkan Pedoman *Governance, Risk & Compliance* melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman *Governance, Risk & Compliance* (GRC) di PT Pelabuhan Tanjung Priok. The Board of Directors has established an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by addressing various uncertainties in a unified manner and with high integrity to ensure that the corporation achieves its objectives. This has been carried out, among others, by issuing the Governance, Risk & Compliance (GRC) Guidelines as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 dated December 12, 2024 concerning Governance, Risk & Compliance (GRC) Guidelines at PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	***Apply*** Direksi telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors has ensured that the unit in charge of the compliance function does not concurrently perform duties that may lead to a conflict of interest.
5.4.	Audit Internal Internal Audit	
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	***Apply*** Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat, pelaksanaan tersebut dilaksanakan salah satunya dengan terdapatnya pelaporan secara berkala oleh Internal Audit kepada Komite Audit berkaitan dengan Laporan Hasil Audit, Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has monitored and ensured that the internal audit function supports the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. This implementation is carried out, among others, through periodic reporting by Internal Audit to the Audit Committee regarding Audit Findings Reports and Audit Follow-up Reports.
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy	
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	***Apply*** Korporasi telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi, sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024, pada bagian Pengelolaan dan Keterbukaan Informasi, halaman 47. The Corporation has established disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and the safeguarding of sensitive and confidential corporate information, as stipulated in the 2024 Good Corporate Governance (GCG) Implementation Guidelines of PT Pelabuhan Tanjung Priok, section on Information Management and Disclosure, page 47.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be complied.	***Apply*** Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi telah dipenuhi sebagaimana ditunjukkan dengan disampaikannya: • Surat Nomor: KU.01.08/22/7/2/AN66/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Juli 2024 perihal Penyampaian Buku Laporan Manajemen Semester I 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pemegang Saham; dan • Surat Nomor: KU.01.08/23/10/1/ANGG/DIRU/PTP-24 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Penyampaian Buku Laporan Manajemen s.d Triwulan III 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok dari Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pemegang Saham; The shareholders' right to receive relevant material information about the corporation on a regular and timely basis has been fulfilled, as evidenced by the submission of: • Letter No: KU.01.08/22/7/2/AN66/DIRU/PTP-24 dated July 22, 2024 regarding the Submission of the PT Pelabuhan Tanjung Priok Semester I 2024 Management Report Book to Shareholders; and • Letter No: KU.01.08/23/10/1/ANGG/DIRU/PTP-24 dated October 23, 2024 regarding the Submission of the PT Pelabuhan Tanjung Priok Management Report Book up to Quarter III 2024 from the President Director to Shareholders.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports	
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	***Apply*** Korporasi telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat, sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024, pada bagian Pengelolaan dan Keterbukaan Informasi, halaman 47 yang dipublikasikan melalui website Korporasi pada laman: https://ptp.co.id/wp-content/uploads/2025/04/4.%20Pedoman%20Good%20Corporate%20Governance%20(GCG).pdf The Corporation has disclosed the systems and procedures to ensure that unaudited or unreviewed interim financial statements by external auditors are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make sound investment decisions, as stated in the 2024 Good Corporate Governance (GCG) Implementation Guidelines of PT Pelabuhan Tanjung Priok, section on Information Management and Disclosure, page 47, published on the Company's website at: https://ptp.co.id/wp-content/uploads/2025/04/4.%20Pedoman%20Good%20Corporate%20Governance%20(GCG).pdf

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan jika perlu pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	***Apply*** Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Namun terkait penunjukan auditor eksternal dari Dewan Komisaris menyerahkan kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham sebagaimana termuat dalam RUPS Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok The Audit Committee has ensured the quality of the financial statements audit conducted by the external auditor. This includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor. However, with respect to the appointment of the external auditor, the Board of Commissioners delegated authority and power to the Shareholders, as stated in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Pelabuhan Tanjung Priok concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year.
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and compiled in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	***Apply*** Korporasi telah menyiapkan dan mengungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional, sebagaimana dapat diakses pada website Korporasi pada laman: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-keberlanjutan/ The Corporation has prepared and disclosed its sustainability report accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks, as accessible on the Company's website at: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-keberlanjutan/
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan The corporation publishes an integrated annual report that places historical performance into context and outlines the company's future risks, opportunities, and prospects, thereby assisting shareholders and stakeholders in understanding the company's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	***Apply*** Korporasi telah menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan, sebagaimana telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui website Korporasi pada laman: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/ The Corporation has published an integrated annual report that places historical performance in context and outlines the Corporation's future risks, opportunities, and prospects, thereby assisting shareholders and stakeholders in understanding the Corporation's strategic goals and its progress in creating sustainable value, as published and accessible through the Company's website at: https://ptp.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan/
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination	
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	***Apply*** Korporasi telah memiliki saluran penyebaran informasi yang menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna, yakni: • *Website* Korporasi: https://ptp.co.id/ • Media Sosial Korporasi: https://www.instagram.com/ptpnonpetikemas/?hl=en The Corporation has established information dissemination channels that provide equal, timely, and relatively low-cost access to relevant information for users, namely: • Corporate Website: https://ptp.co.id/ • Corporate Social Media: https://www.instagram.com/ptpnonpetikemas/?hl=en

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing- masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs *web* selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	***Apply*** Korporasi telah memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web, sebagaimana dapat diakses pada laman https://ptp.co.id/pedoman-tata-kelola/ khususnya pada bagian Skor *Assessment* GCG Berdasarkan ACGS & PUGKI. The Corporation has ensured that the annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including explanations regarding the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on the website, accessible at https://ptp.co.id/pedoman-tata-kelola/, particularly under the section GCG Assessment Score Based on ACGS & PUGKI.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations registered on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	***Not Applicable*** **(N/A)** Dikarenakan Perusahaan bukan merupakan Perusahaan terbuka. As the Company is not a publicly listed company.
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights	
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	***Apply*** Korporasi telah memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor sebagaimana termuat dalam Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2022. The Corporation has established a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders or investors, as stipulated in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Good Corporate Governance Guidelines of 2022.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	***Apply*** Korporasi telah memiliki kebijakan governansi yang berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali sebagaimana mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal No: HK.01/28/4/1/PAPS/ DIRU/PLMT/-22 tentang Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. The Corporation has established a governance policy applicable to subsidiaries and entities under common control, as referred to in the Board of Directors Regulation of PT Pelindo Multi Terminal No: HK.01/28/4/1/PAPS/DIRU/PLMT/-22 regarding the Governance Guidelines for Subsidiaries within the PT Pelindo Multi Terminal environment.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	***Apply*** Korporasi telah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 29 terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum. The Corporation has established rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial corporate asset sales to ensure that transactions are conducted transparently, on fair terms, and in a manner that protects the rights of all shareholders according to their respective classes, as outlined in Article 29 of the Company's Articles of Association concerning Mergers, Consolidations, Takeovers, Spin-offs, and Changes in Legal Entity Form.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Equal Treatment of Shareholders	
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya Corporations have rules and procedures that ensure a) All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b) Disclosure of these rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	***Not Applicable*** (N/A) Dikarenakan Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka. Because the Company is not a publicly listed company.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	***Apply*** Korporasi telah memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham sebagaimana termuat dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Tanjung Priok bagian Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan Direksi halaman 15 dan Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris halaman 53. The Corporation has established rules and procedures to ensure that related party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are properly managed and that the interests of the Corporation and shareholders are protected, as stipulated in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Board Manual under Ethics Relating to Conflicts of Interest for Directors page 15 and Commissioners page 53.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading incorporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	***Not Applicable*** **(N/A)** Dikarenakan Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka. Because the Company is not a publicly listed company.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation invites for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website.	***Explain*** Pemanggilan RUPS atau penyampaian surat undangan RUPS oleh Korporasi kepada Pemegang Saham masih dilakukan kurang dari 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. The Company's notice or invitation letter to GMS is still delivered less than 28 days prior to the GMS.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	***Apply*** Korporasi telah memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS sebagaimana termuat dalam: • Anggaran Dasar pada Pasal 25 terkait Kuorum, Hak Suara dan Keputusan; dan • GCG *Code* PT Pelabuhan Tanjung Priok halaman 9 The Company has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS, as stipulated in: • Articles of Association Article 25 regarding Quorum, Voting Rights, and Resolutions; and • PT Pelabuhan Tanjung Priok GCG Code, page 9
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	***Apply*** Pemegang saham telah berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana pada praktiknya, penetapan anggota Direksi & Dewan Komisaris ditetapkan penuh oleh RUPS. Shareholders have effectively participated in the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as in practice, such appointments are entirely determined by the GMS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	***Apply*** Korporasi telah memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS sebagaimana ditunjukkan dalam Risalah RUPS Pertaja The Company has ensured transparency and accountability of the external auditor at the GMS, as reflected in the minutes of the latest GMS.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	***Apply*** Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS telah secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya, sebagaimana dapat diakses pada website Korporasi pada laman: https://ptp.co.id/rups/ The results of the voting and the summary of the GMS minutes have been fully announced to the public on the next business day, as available on the Company's website at: https://ptp.co.id/rups/

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders	
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Key Stakeholder Engagement	
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka The corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations, concerns, and the corporation's impact on them.	***Apply*** Korporasi melalui Sekretaris Perusahaan telah menyediakan saluran komunikasi untuk seluruh pemangku kepentingan PT PTP sebagaimana telah diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Korporasi untuk tahun buku 2023, yakni dengan terdapatnya: • Prosedur terkait mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang tercantum dalam SOP Nomor: QP.3/SDU/SDM/09 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Tanggapan Atas Keluhan Pekerja. • Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan yang disahkan oleh Direksi PTP Terminal Nonpetikemas dengan Dokumen No. QP.4/KOM/PEL/03 tanggal 3 Agustus 2020, yang dimana seluruh mitra kerja dapat melakukan pengaduan melalui sarana berikut ini: a) Pengaduan secara langsung melalui layanan customer service; b) Pengaduan melalui surat, telepon dan surat elektronik; c) Website www.ptp.co.id. The Company, through the Corporate Secretary, has provided communication channels for all stakeholders of PT PTP as disclosed in the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year, namely through: • Procedures regarding labor complaint mechanisms as stated in SOP Number: QP.3/SDU/SDM/09 dated December 10, 2018 concerning Implementation of Responses to Employee Complaints. • Customer Complaint Handling Procedures ratified by the Board of Directors of PTP Terminal Nonpetikemas under Document No. QP.4/KOM/PEL/03 dated August 3, 2020, where all business partners may submit complaints through the following channels: a) Direct complaints via customer service; b) Complaints via letter, telephone, and email; c) Website www.ptp.co.id.
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models	
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining Corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	***Apply*** Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko, sebagaimana termuat dalam Buku Laporan Manajemen 2024 *Unaudited*. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent in overseeing sustainability governance, including the establishment of corporate sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in the execution of their roles, including but not limited to the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management, as outlined in the 2024 Unaudited Management Report.

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders	
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	***Apply*** Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan, hal ini termuat dalam Laporan Keberlanjutan PT PTP tahun 2023 The Board of Directors ensures and discloses that the Company's operations reflect the implementation of high ethical standards, social and environmental responsibility throughout the organization and ensures that appropriate policies and procedures are in place to respect and uphold the rights of stakeholders, as disclosed in PT PTP's 2023 Sustainability Report.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability	***Apply*** Direksi telah mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan yaitu dengan menjalankan program-program CSR dengan baik, memberikan pertimbangan yang baik atas Kebijakan Remunerasi melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK 55/17/12/8/PTP-20 tentang Penghasilan non Bulanan Bagi Pekerja dan PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/1/9/2/PTP-21 tentang Pedoman Penghasilan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok The Board of Directors has encouraged employees to work in the long-term interest of the Company and to prioritize sustainability by implementing CSR programs effectively and giving thoughtful consideration to the Remuneration Policy through the Directors' Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number: HK 55/17/12/8/PTP-20 concerning Non-Monthly Income for Employees of PT Pelabuhan Tanjung Priok, and Directors' Regulation Number: HK.55/1/9/2/PTP-21 concerning Income Guidelines for Employees of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS





07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility (CSR)



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR)

Perusahaan senantiasa menyeimbangkan kegiatan usahanya dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

KOMITMEN, KEBIJAKAN, DAN PRINSIP

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, Perusahaan melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJLS) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya menjadi media pelibatan masyarakat, program TJSL sekaligus merupakan implementasi komitmen Perusahaan agar keberadaannya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perusahaan menetapkan kebijakan TJSL sebagai pedoman yang mencakup tujuan, strategi, dan tindakan konkret dalam mendukung masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan mengacu pada ISO 26000 sebagai Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*) yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization*/ISO) dalam penerapan kegiatan TJSL. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan terdiri dari 12 program turunan SDGs yang dikelompokkan kedalam beberapa kategori diantaranya:

1. PTP Peduli Lingkungan
2. PTP Peduli Ekonomi
3. PTP Peduli Sosial

VISI DAN MISI

VISI

Menjadikan Program CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan kepada seluruh *stakeholders* serta menjadi *benchmark* bagi perusahaan lain.

MISI

1. Mewujudkan program CSR unggul yang tepat sasaran, tepat guna (efisien), dan berdaya guna (efektif) yang memberikan kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan dan penerima manfaat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan CSR yang sistematis dengan tata kelola yang baik dan dikelola oleh sumber daya manusia dengan kompetensi unggul.
3. Mewujudkan kinerja CSR yang profesional dalam meningkatkan citra perusahaan, menciptakan hubungan yang selaras dan kondusif dengan para pemangku kepentingan serta mampu membantu terwujudnya strategi dan tujuan perusahaan secara terintegrasi.

ROADMAP CSR PTP

Perusahaan melakukan pemetaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang selaras dengan visi, misi serta kebijakan strategis Perusahaan. Perusahaan sudah melakukan pemetaan secara jangka panjang yang dimulai dari evaluasi *roadmap* CSR pada tahun sebelumnya hingga implementasi CSR di tahun 2025.

The Company consistently balances its business activities by contributing to the community.

COMMITMENT, POLICY, AND PRINCIPLES

As part of its responsibility to the community and the environment, the Company implements various Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility (CSR) programs in accordance with community needs. These programs not only serve as a means of community engagement but also represent the Company's commitment to ensuring its presence brings optimal benefits to society and contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Company has established a TJSL policy as a guideline outlining objectives, strategies, and concrete actions to support the surrounding community and environment. The Company refers to ISO 26000 as the Guidance on Social Responsibility issued by the International Organization for Standardization (ISO) in the implementation of its TJSL activities. The Company's TJSL programs consist of 12 derivative programs aligned with the SDGs, grouped into several categories, including:

1. PTP Cares for the Environment
2. PTP Cares for the Economy
3. PTP Cares for Social Welfare

VISION AND MISSION

VISION

Making PT Pelabuhan Tanjung Priok's CSR Programs able to provide economic, social and environmental benefits to all stakeholders and become a benchmark for other companies.

MISSION

1. Delivering superior CSR programs that are right on target, efficient, effective, and provide optimal contributions to stakeholders and beneficiaries.
2. Delivering a systematic CSR implementation with good governance and managed by human capital with superior competencies.
3. Delivering professional CSR performance that enhances corporate image, creates harmonious and conducive relationships with stakeholders and helps to realize corporate strategy and objectives in an integrated manner.

PTP CSR ROADMAP

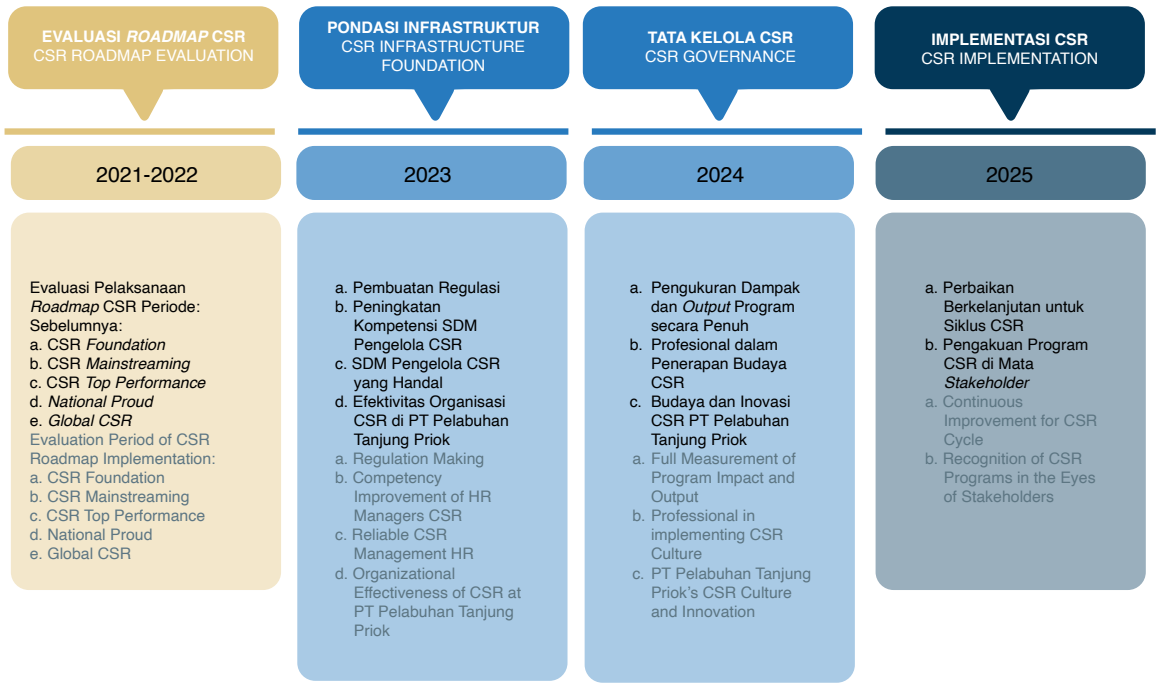
The Company conducts social, economic, and environmental mapping aligned with its vision, mission, and strategic policies. A long-term mapping plan has been implemented, starting with an evaluation of the previous year's CSR roadmap and leading up to CSR implementation in 2025. In 2024, the Company focuses on

Pada tahun 2024, Perusahaan berfokus pada Tata Kelola CSR yang pelaksanaannya meliputi:

1. Pengukuran Dampak dan *Output* Program secara Penuh.
2. Profesional dalam Penerapan Budaya CSR.
3. Budaya dan Inovasi CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok.

CSR Governance, with implementation including:

1. Comprehensive measurement of program impacts and outputs.
2. Professionalism in embedding CSR culture.
3. The culture and innovation of CSR at PT Pelabuhan Tanjung Priok.



DASAR HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Landasan hukum pelaksanaan TJSL adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   a. Pasal 15: Setiap penanam modal berkewajiban (antara lain) b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
   b. Pasal 34 Ayat 1: Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74:
   a. Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
   b. Ayat (2): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
   c. Ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

The legal foundations for the implementation of CSR are as follows:

1. Law No. 25 of 2007 on Investment
   a. Article 15: Every investor is obliged, among others, b. Implement corporate social responsibility;
   b. Article 34 Paragraph 1: Business entities or individuals that fail to fulfill their obligations under Article 15 may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, suspension of business activities and/or investment facilities, or revocation of business activities and/or investment facilities.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 74:
   a. Paragraph (1): Companies conducting business in or related to natural resources are required to implement Social and Environmental Responsibility.
   b. Paragraph (2): Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is a mandatory obligation of the Company that is budgeted and accounted for as company expenses, and implemented with due regard to propriety and fairness.
   c. Paragraph (3): Companies that fail to fulfill the obligations as referred to in paragraph (1) shall be subject to sanctions in accordance with prevailing laws and regulations.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
   a. Pasal 2: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
   b. Pasal 4 Ayat (1): Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
   c. Pasal 4 Ayat (2): Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
   d. Pasal 5 Ayat 1: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
   e. Pasal 5 Ayat 2: Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.
4. Pasal 6: Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU).
   a. Pasal 1 Ayat 8: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disebut TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
   b. Pasal 4 Ayat 1: TSLDU merupakan kegiatan sukarela di mana Perseroan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.
   c. Pasal 4 Ayat 2: TSLDU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas Perseroan.
   d. Pasal 5: Ruang lingkup SLDU meliputi: (a) bina sosial dan budaya, (b) bina ekonomi, (c) bina fisik lingkungan, dan (d) penanggulangan bencana.
   e. Pasal 6 Ayat 1: TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.01.04/6/9/1/KCSR/DIRU/PTP-23 tentang Pedoman Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Kebijakan Internal PT Pelabuhan Tanjung Priok, di antaranya:
   a. Surat Keputusan Direksi No. HK.55/30/10/2/PTP-17 tentang Penghasilan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Surat Keputusan Direksi No. HK.55/10/3/2/PTP-16 tentang Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan di

3. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies
   a. Article 2: Every Company, as a legal subject, has social and environmental responsibility.
   b. Article 4 Paragraph (1): Social and environmental responsibility is implemented by the Board of Directors based on the Company's annual work plan upon approval from the Board of Commissioners or the GMS, in accordance with the Company's Articles of Association, unless otherwise regulated.
   c. Article 4 Paragraph (2): The annual work plan as referred to in paragraph (1) shall contain activity plans and budgets required for implementing social and environmental responsibility.
   d. Article 5 Paragraph (1): Companies conducting business in or related to natural resources must consider propriety and fairness in preparing and setting their activity plans and budgets as referred to in Article 4 (2).
   e. Article 5 Paragarph (2): Budget realization for the implementation of social and environmental responsibility carried out by the Company as referred to in paragraph (1) is accounted for as company expenses.
4. Article 6: The implementation of social and environmental responsibility shall be included in the Company's annual report and shall be accounted for to the GMS. Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta No. 112 of 2013 on Social and Environmental Responsibility of the Business Sector (TSLDU)
   a. Article 1 Paragraph 8: Social and Environmental Responsibility of the Business Sector, hereinafter referred to as TSLDU, is the inherent responsibility of every company to create harmonious, balanced, and appropriate relationships with the environment, values, norms, and local community culture.
   b. Article 4 Paragraph 1: TSLDU is a voluntary activity where the Company has full discretion to determine the form of activity, the amount of funds to be allocated or spent, and the location and method of its implementation.
   c. Article 4 Paragraph 2: TSLDU as referred to in Paragraph (1) is not an obligation/compensation/requirement/incentive in exchange for licensing services related to the Company's activities.
   d. Article 5: The scope of TSLDU includes: (a) socio-cultural development, (b) economic development, (c) physical environmental development, and (d) disaster response.
   e. Article 6 Paragraph 1: TSLDU as referred to in Article 5 may be in the form of direct activities for the community or through participation in local government programs.
5. PT Pelabuhan Tanjung Priok Director Regulation Number: KP.01.04/6/9/1/KCSR/DIRU/PTP-23 concerning the Guidelines for the Implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
6. Internal Policies of PT Pelabuhan Tanjung Priok include the following:
   a. Director's Decree No. HK.55/30/10/2/PTP-17 concerning Employee Remuneration at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
   b. Director's Decree No. HK.55/10/3/2/PTP-16 concerning the Types and Levels of Education and Training within

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
c. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/18/10/1/PTP-22 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja dan Keluarga Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
d. Peraturan Direksi No.HK.55/23/1/1/PTP-19 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan *Key Account* Berdasarkan *Customer Relationship Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai salah satu BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia secara tidak langsung, pelaksanaan program CSR Perusahaan berpedoman pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
   a. Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
   b. Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
4. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

DUE DILIGENCE DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Perumusan TJSL diawali dengan proses *due diligence* terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh aktivitas yang dijalankan oleh Perusahaan. Tujuan Perusahaan dalam menjalankan *due diligence* adalah untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif agar Perusahaan mengetahui aspek yang harus ditingkatkan atau dikurangi dalam kegiatan CSR.

Metode *due diligence* yang digunakan oleh Perseroan merupakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity*

PT Pelabuhan Tanjung Priok;
c. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board Regulation No. HK.55/18/10/1/PTP-22 concerning Provision of Health Services for Employees and Their Families within PT Pelabuhan Tanjung Priok;
d. Director Regulation No. HK.55/23/1/1/PTP-19 concerning Guidelines for the Implementation of Key Account Management Based on Customer Relationship Management within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

As one of the SOEs which shares are indirectly owned by the Government of the Republic of Indonesia, the implementation of the Company's CSR program refers to several regulations, including:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.
2. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
3. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), including:
   a. Article 2: One of the purposes and objectives of establishing SOEs is to actively provide guidance and assistance to small-scale entrepreneurs, cooperatives, and local communities.
   b. Article 88: SOEs may allocate a portion of their net profits for the development of small businesses/cooperatives and the development of communities surrounding SOEs.
4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
5. Law No. 13 of 2011 concerning the Handling of the Underprivileged Groups.
6. Law No. 17 of 2023 concerning Health.
7. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
8. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
9. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems.
10. Government Regulation No. 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.
11. Minister of Manpower Regulation No. 26 of 2014 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System Assessment.
12. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/ MBU/03/2023 of 2023 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

DUE DILIGENCE ON SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES

The formulation of the Company's CSR program begins with a due diligence process to assess the social, economic, and environmental impacts of all Company activities. The objective of this due diligence is to identify both the positive and negative impacts so the Company can determine which aspects of its CSR activities should be enhanced or minimized.

The due diligence method used by the Company is based on a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)

and Threat). Berikut uraian mengenai *due diligence* yang dimiliki oleh Perusahaan.

Kekuatan:

1. Komitmen yang tinggi dari *top management* PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menerapkan CSR secara berkelanjutan;
2. Adanya hubungan baik PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan para *stakeholders* yang relevan;
3. Telah terlaksananya program-program CSR di sekitar lokasi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diselenggarakan oleh Perusahaan;
4. Adanya program CSR yang diimplementasikan dengan pendekatan metode Social Return on Investment (SOI); dan
5. Rencana Strategis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok sudah sesuai dengan Standar Internasional ISO 26000:2010.

Kelemahan:

1. Terbatasnya sumber daya untuk penyelenggaraan program CSR secara berkelanjutan; dan
2. Belum dibentuk standar dan prosedur serta infrastruktur lainnya dalam pelaksanaan program CSR yang mengacu pada ISO 26000:2010.

Peluang:

1. Pengembangan program CSR Perusahaan yang berkelanjutan; dan
2. Pengembangan program CSR Perusahaan dapat bersinergi dengan entitas lainnya dan pemerintah.

Tantangan:

1. Adanya tuntutan dan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk ikut mensejahterakan masyarakat;
2. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat;
3. Adanya ekspektasi dari pemerintah atau regulator dalam pelaksanaan CSR yang efektif;
4. Adanya perubahan kondisi alam yang berdampak dari kegiatan operasi di sekitar Pelabuhan, seperti potensi penurunan air tanah dan intrusi air laut (naiknya batas antara permukaan air tanah dengan air laut ke daerah daratan) serta adanya dampak polusi.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK/ BERDAMPAK

Perusahaan senantiasa membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder*. Komitmen itu terus ditumbuhkan karena Perusahaan meyakini setiap pemangku kepentingan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan cara dan perannya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder* yang dimaksud mencakup karyawan, mitra kerja, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, media massa dan pelanggan/pengguna akhir. Dengan melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan beserta dampak dan pengaruhnya, Perusahaan dapat menyusun program CSR secara terukur dan tepat sasaran. Berikut identifikasi Perusahaan terhadap *stakeholder* berdasarkan dampaknya terhadap kegiatan operasional juga sebaliknya.

analysis. The following outlines the results of the Company's due diligence:

Strengths:

1. Strong commitment from the top management of PT Pelabuhan Tanjung Priok to implement CSR on a sustainable basis;
2. Good relationships between PT Pelabuhan Tanjung Priok and relevant stakeholders;
3. CSR programs have been successfully implemented around the operational area of PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. CSR programs have been implemented using the Social Return on Investment (SROI) approach; and
5. The Strategic Plan for Social and Environmental Responsibility/CSR at PT Pelabuhan Tanjung Priok is aligned with ISO 26000:2010 international standards.

Weaknesses:

1. Limited resources for the sustainable implementation of CSR programs; and
2. The absence of established standards, procedures, and other infrastructure for CSR implementation aligned with ISO 26000:2010.

Opportunities:

1. Development of sustainable CSR programs; and
2. Potential collaboration with other entities and the government in CSR initiatives.

Threats:

1. High public demands and expectations for PT Pelabuhan Tanjung Priok to contribute to community welfare;
2. Increasingly stringent laws and regulations;
3. Heightened expectations from the government or regulators for effective CSR implementation;
4. Environmental changes resulting from operational activities near the port, such as groundwater depletion and seawater intrusion, as well as pollution-related impacts.

KEY STAKEHOLDERS AFFECTED/IMPACTING

The Company consistently builds strong cooperation and communication with its stakeholders. This commitment continues to be nurtured as the Company believes that each stakeholder contributes to corporate performance in their respective roles, whether directly or indirectly. These stakeholders include employees, business partners, shareholders, the government, the community, mass media, and end-users/customers. By mapping stakeholders along with their respective impacts and influences, the Company is able to design CSR programs that are measurable and well-targeted. Below is the Company's stakeholder identification based on their impact on the Company's operations and vice versa.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	**Keterangan** Description	**Metode Pendekatan** Approach Method	**Topik Kunci dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan** Key Topics and Stahelolder's Needs
Karyawan Employees	Pemangku kepentingan utama dan penggerak bisnis Perusahaan. Key stakeholders and drivers of the Company's business.	1. Rapat pembahasan Perjanjian Kerja Bersama; 2. Forum Komunikasi antara Pekerja Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Manajemen Perusahaan. 1. Collective Labor Agreement discussion meeting; 2. Communication Forum between Employees of PT Pelabuhan Tanjung Priok with the Management.	1. Pemenuhan hak normatif dan perlindungan kerja; 2. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 3. Kebebasan Berserikat; 4. Pelatihan dan Pendidikan; dan 5. Jenjang Karier. 1. Fulfillment of normative rights and employees' protection; 2. Occupational Health and Safety Insurance; 3. Freedom of association; 4. Training and education; 5. Career paths
Mitra Kerja Business Partners	Pemangku kepentingan yang menggerakkan rantai pasokan Perusahaan. Stakeholders who drive the Company's supply chain.	1. Saat tender; 2. Saat negoisasi; dan 3. Saat *Customer Gathering*. 1. During the tender process; 2. During negotiations; 3. At customer gatherings.	1. Pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan; 2. Jaminan K3; 3. Perolehan Kontrak 4. Evaluasi Penyediaan Jasa; 5. Kebijakan Fungsi Pengadaan; dan 6. Menyampaikan kondisi terkini Perusahaan. 1. Fulfillment of the right to work performed; 2. OHS Insurance; 3. Acquired Contracts; 4. Evaluation of Service Provisions; 5. Procurement Function Policy; 6. Delivering the Company's latest conditions
Pemegang Saham Shareholders	Pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan usaha/ tata kelola manajemen Perusahaan. Stakeholders who support business development/ management of the Company	RUPS Tahunan; dan RUPS Luar Biasa. Annual GMS; and Extraordinary GMS.	1. Kinerja tahunan; 2. Besarnya pendapatan yang diperoleh; 3. Laba/rugi Perusahaan; 4. Kinerja keberlanjutan; dan 5. Perubahan struktur manajemen. 1. Annual performance; 2. Amount of revenue earned; 3. Company profit/loss; 4. Sustainability performance; 5. Changes in the management structure.
Pemerintah Government	Pemangku kepentingan yang mengawasi terlaksananya kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Stakeholders who supervise the implementation of the Company's compliance with applicable regulations.	Memberikan laporan berkala Periodic reports	1. Memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan; 3. Menyampaikan laporan performansi operasional Perusahaan. 1. Fulfilling the requirements according to the applicable regulations; 2. Delivering information needed and relevant to the Company's activities; 3. elivering reports on the Company' s operational performance
Masyarakat Community	Pemangku kepentingan yang menjadi mitra dalam menyalurkan inisiatif pengembangan nilai sosial. Stakeholders who become partners in channeling social value development initiatives.	Pelaksanaan program tanggung jawab sosial sesuai dengan anggaran Perusahaan. Implementation of social responsibility programs in line with the Company's budget.	1. Mata Pencaharian Masyarakat; 2. Pendapatan Masyarakat 3. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan; 4. Kebutuhan untuk memperoleh pendapatan; 5. Dampak ekonomi tidak langsung dari operasional; dan 6. Dampak lingkungan proyek. 1. Community livelihood; 2. Community Earnings; 3. Environmental conditions that affect health; 4. The need to earn income; 5. Indirect economic impact of operations 6. Environmental impact of the projects.

ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan mengadakan diskusi dengan pihak internal dan eksternal terkait isu-isu penting mengenai sosial, ekonomi dan lingkungan yang berdampak pada kegiatan Perusahaan untuk mengidentifikasi isu yang harus diberi perhatian lebih. Berikut uraian topik material yang dibahas dalam diskusi tersebut:

IMPORTANT SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE COMPANY'S ACTIVITIES

The Company conducts discussions with both internal and external parties regarding key social, economic, and environmental issues that impact its operations in order to identify matters requiring greater attention. The following outlines the material topics discussed during these engagements:

Topik Material Material Topic	**Alasan Topik Tersebut Material** Why the Topic is Material	**Batasan** Limitation	
		Identifikasi Terjadinya Dampak Identification of Impacts Occurrence	**Keterlibatan atas Dampak yang Terjadi** Involvement of Impacts that Occur
Forum Lingkungan yang Aman	Mengevaluasi pelaksanaan aktivitas sehari-hari para mitra kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki kegiatan di lini I dari sisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan dan keamanan sehingga tercipta area dan lingkungan kerja yang Rajin, Rawat, Resik, Rapi, Ringkas (5R) serta Aman, Nyaman dan Sehat, sehingga tercapainya "*Zero Accident*" di area kerja PTP. Selain itu juga untuk mengingatkan para insan Perusahaan untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Evaluating the implementation of daily activities of PT Pelabuhan Tanjung Priok's partners who have activities in line I in terms of Occupational Health and Safety, Environment and security so as to create areas and work environments that are Diligent, Caring for, Clean, Neat, Concise (5R) and Safe, Comfortable and Healthy, in order to achieve "Zero Accident" in PTP work area. In addition, it is also to remind the Company's employees to reduce the use of plastic in everyday life.	Terjadinya Pencemaran di Area Kerja PT PTP. Occurrence of pollution in PT PTP Work Area.	Keberadaan *workshop* di area terminal yang masih belum tertata. The existence of workshop in the terminal area is still not organized.
Apel Pagi Morning Briefing	Mengingatkan agar kegiatan-kegiatan operasional perlu senantiasa disesuaikan dengan SOP yang ada sehingga target *zero accident* dan *zero* pencemaran dapat tercapai. Reminding that operational activities need to always be adjusted to existing SOPs so that the target of zero accidents and zero pollution can be achieved.	Terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran di area kerja. Occurrence of work accidents and pollution in the work area.	Semua orang yang memasuki area lini 1 PT Pelabuhan Tanjung Priok. Everyone who enters the line 1 area of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Kampanye Pelabuhan Bersih Clean Port Campaign	Menghindari adanya tindak kecurangan atas indikasi pungli, gratifikasi, dan penyuapan di wilayah kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok. Avoiding incidents of fraud, extortion, gratification, and bribery in the working area of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	Terjadinya tindakan pungli, gratifikasi dan penyuapan di wilayah kerja. Occurrence of acts of extortion, gratification and bribery in the work area.	Seluruh pegawai dan *stakeholder* PT Pelabuhan Tanjung Priok. All employees and stakeholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perusahaan mengacu pada ISO 26000 yang tidak hanya berlaku pada segelintir entitas saja, namun untuk seluruh pelaku usaha di dunia. Pedoman mengenai pelaksanaan CSR tersebut kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta segenap pemangku kepentingan. Selain itu, pedoman yang digunakan oleh Perusahaan juga telah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan sudah dijadikan sebagai Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012. Adapun inti yang terkandung dalam ISO 26000 meliputi:

1. Tata kelola organisasi yang baik;
2. Penegakkan hak asasi manusia;
3. Praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan;
4. Pengelolaan kegiatan Perusahaan terhadap Lingkungan;
5. Prosedur operasi yang wajar;
6. Tanggung jawab terhadap konsumen; dan
7. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company refers to ISO 26000, which is applicable not only to a limited number of entities but to all business actors globally. The guidelines for CSR implementation are further developed to align with the Company's needs and those of all stakeholders. Moreover, the guidelines adopted by the Company have been recognized by the Government of Indonesia and officially designated as a National Standard (SNI) in 2012. The core subjects outlined in ISO 26000 include:

1. Good organizational governance;
2. Upholding human rights;
3. Fair and humane labor practices;
4. Environmental responsibility in corporate operations;
5. Fair operating practices;
6. Consumer responsibility; and
7. Community involvement and development.



Program CSR Perusahaan dilaksanakan secara tepat guna (efisien) dan berdaya guna (efektif). Tujuan dilaksanakannya program CSR adalah untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Perencanaan program CSR dilandaskan pada hasil pertimbangan yang menggunakan pendekatan *Top Down* maupun pendekatan *Bottom Up* melalui metode studi pemetaan sosial dan *workshop/ Forum Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan memaknai keberlanjutan dalam empat fokus utama, yaitu:

The Company's CSR programs are implemented efficiently and effectively. The objective is to create a positive impact on communities surrounding the Company's operational areas. CSR Program planning is based on both top-down and bottom-up approaches, utilizing social mapping studies and stakeholder workshops/Focus Group Discussions (FGDs) to align with community needs. Accordingly, the Company embraces sustainability through four main pillars:

1. *Prosperity* sebagai Kinerja Operasional Keberlanjutan Manfaat Ekonomi yang Optimal;
2. *People* sebagai Katalisator Insan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Berkembang;
3. *Planet* Sebagai Komitmen Menjaga Lingkungan untuk Masa Depan;
4. *Prudence* sebagai Perwujudan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

TARGET DAN RENCANA 2024

Perusahaan telah mengkaji secara terstruktur, terukur dan tepat sasaran terkait rencana program CSR yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024, berdasarkan empat fokus utama. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen Perusahaan dalam menciptakan dampak baik bagi masyarakat serta segenap pemangku kepentingan untuk menyediakan lingkup kerja yang harmonis. Target dan rencana Perusahaan terkait program CSR tahun 2024 meliputi:

1. PTP Peduli Lingkungan
   Mengayomi program CSR Perusahaan terhadap menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
2. PTP Peduli Ekonomi
   Mengayomi program CSR Perusahaan terhadap bidang peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
3. PTP Peduli Sosial
   Mengayomi program CSR Perusahaan terhadap bidang sosial budaya dan kesehatan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan beradab.

STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan program CSR merupakan tanggung jawab suatu organ dalam struktur organisasi Perusahaan. Pelaksanaan tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan Perusahaan, sehingga harus dilakukan secara *professional* dan juga efisien. Berikut uraian terkait struktur organisasi penanggung jawab program CSR Perusahaan.

1. Prosperity as Operational performance delivering optimal economic benefits;
2. People as Empowering PT Pelabuhan Tanjung Priok personnel to grow and thrive;
3. Planet as Commitment to protecting the environment for future generations;
4. Prudence as Realization of Good Corporate Governance.

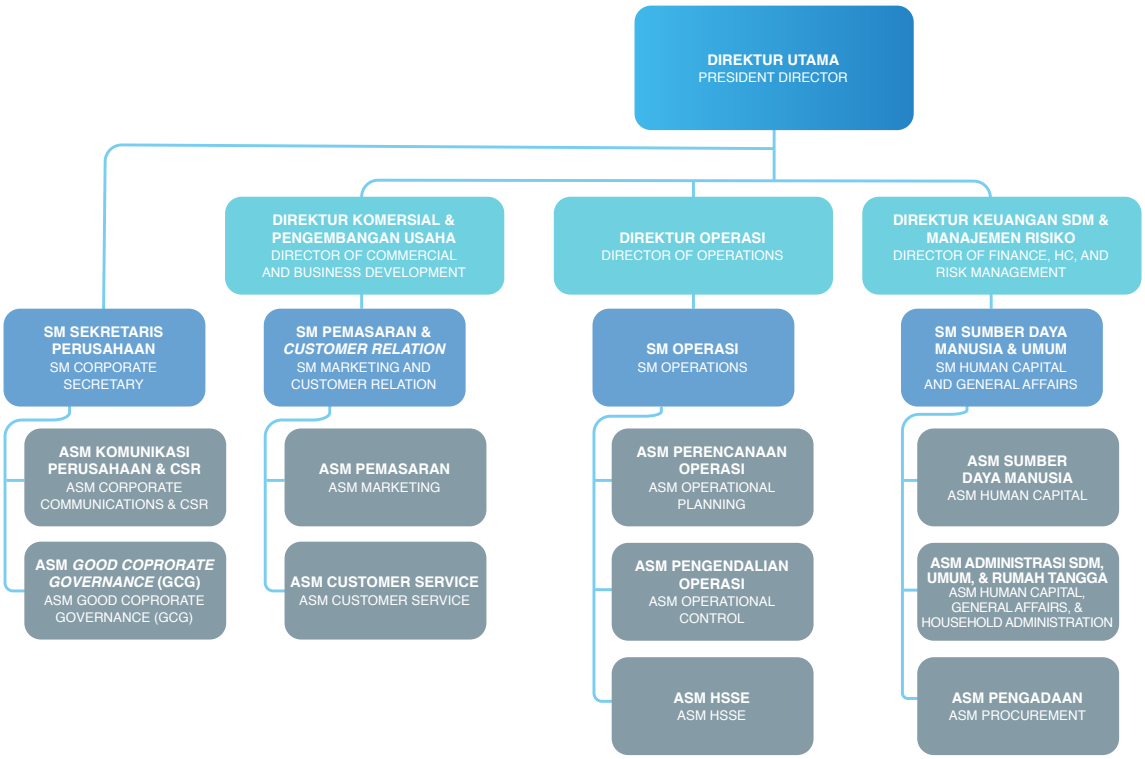
TARGETS AND PLANS FOR 2024

The Company has systematically reviewed, measured, and aligned its CSR planning for 2024 according to these key four pillars. This reflects the Company's commitment to creating positive impacts on society and fostering a harmonious working environment with all stakeholders. CSR program targets for 2024 include:

1. PTP Cares for the Environment
   Encompasses initiatives aimed at preserving environmental sustainability and ensuring the continued function of the natural ecosystem.
2. PTP Cares for the Economy
   Maintaining the Company's CSR programs on improving quality of life, particularly in the areas of education and local economic empowerment.
3. PTP Cares for Society
   Maintaining the Company's CSR programs on socio-cultural development and public health, with the aim of fostering a healthy and civilized society.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

CSR implementation is the responsibility of a designated organ within the Company's organizational structure. It is also an integral part of the Company's strategic development plan and must be executed professionally and efficiently. The following outlines the structure of the CSR responsible unit within the Company:



Berdasarkan struktur di atas, seluruh program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama. Namun, terdapat penanggung jawab khusus dalam setiap program CSR terkait masing-masing aspek. Berikut tabel terkait penanggung jawab program CSR menurut masing-masing *core subject*.

Based on the above structure, all CSR programs implemented by the Company fall under the responsibility of the President Director. However, there are designated individuals responsible for each specific CSR program according to its respective area of focus. The table below outlines the persons in charge of CSR programs based on each core subject.

	Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Aspect	**Penanggung Jawab di Lingkup Perusahaan** Responsible Parties within the Company
Tanggung Jawab Sosial Perseroan Corporate Social Responsibility	Lingkungan Environment	• Direktur Operasi • SM Operasi • ASM HSSE • Director of Operations • SM Operations • ASM HSSE
	Hak Asasi Manusia Human rights	• Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Risiko • SM Sumber Daya Manusia & Umum • ASM Sumber Daya Manusia • Director of Finance, HC, and Risk Management • SM Human Resources and General Affairs • ASM Human Capital
	Praktik Operasi yang Adil Fair Operating Practices	• Direktur Utama • Tim Unit Pengendali Gratifikasi • (Sekretaris Perusahaan, SDM, SPI, dan Hukum) • President Director • Gratification Control Unit Team • (Corporate Secretary, HC, SPI, and Legal)
	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Employment, Occupational Health and Safety Practices	• Direktur Keuangan dan SDM • Direktur Operasi • SM Sumber Daya Manusia dan Umum • ASM Sumber Daya Manusia • SM Operasi • ASM HSSE • Director of Finance and HC • Director of Operations • SM Human Capital and General Affairs • ASM Human Capital • SM Operations • ASM HSSE
	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	• SM Sekretaris Perusahaan • ASM Komunikasi Perusahaan & CSR • SM Corporate Secretary • ASM Corporate Communications & CSR
	Tanggung Jawab Konsumen dan Produk/Jasa serta Mitra Kerja Responsibilities on Consumers and Products/Services and Work Partners	• Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha • SM Pemasaran & *Customer Relation* • ASM Customer Service • Director of Commerce and Business Development • SM Commercial • ASM Customer Service

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

Berdasarkan pedoman ISO 26000 serta target dan rencana yang dimiliki, Perusahaan menyusun strategi untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program TJSL. Strategi yang dimaksud mencakup pendekatan yang digunakan, sasaran program serta biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program. Sepanjang tahun 2024, realisasi biaya kegiatan program TJSL sebesar Rp1.811.410.440 untuk pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial. Alokasi tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Adapun rincian mengenai biaya realisasi kegiatan CSR Perusahaan adalah sebagai berikut:

PROGRAM IMPLEMENTATION COSTS

Based on the ISO 26000 guidelines as well as the Company's established targets and plans, a strategic approach was developed to ensure the efficiency of implementing the CSR programs. This strategy includes the approach used, program objectives, and the expenditures incurred for program implementation. Throughout 2024, the realized cost for CSR program activities amounted to Rp1,811,410,440, allocated for the implementation of Social Responsibility initiatives. This allocation was outlined in the 2024 Company Work Plan & Budget (RKAP). The breakdown of the Company's CSR expenditure realization is as follows:

No	Perihal Subject	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penuruna 2024-2023 Increase/Decrease 2024-2023
		1	2	(1-2)/2
Realisasi program CSR CSR Programs Realization				
1	Program TJSL dengan Metode SRoI CSR Programs with SRoI Method	437.614.560	-	-
2	PTP Penyusunan *Roadmap* Program Unggulan PTP Drafting of Featured Programs Roadmap	-	239.886.528	(100,00%)
3	PTP Peduli Lingkungan PTP Cares for Environment	75.377.247	267.463.510	(71,82%)
4	PTP Peduli Ekonomi PTP Cares for Economy	137.491.969	-	-
5	PTP Peduli Sosial PTP Cares for Social	650.483.776	-	-
6	PTP Peduli Pendidikan PTP Cares for Education	-	56.858.500	(100,00%)
7	PTP Peduli Kesehatan PTP Cares for Health	-	25.736.200	(100,00%)
8	PTP Peduli Sesama PTP Cares for Others	-	1.144.057.275	(100,00%)
Realisasi Program Bantuan Sosial				
1	Bantuan Sosial	-	14.463.600	(100,00%)
Total		1.811.410.440	1.748.465.613	3,60%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA
SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
Perusahaan dalam menjalankan usahanya senantiasa memastikan dihormatinya hak asasi manusia (HAM). Perusahaan berkomitmen dalam menegakkan HAM yang meliputi non-diskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; menghindari kerumitan; hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak dasar pekerja.

Risiko perusahaan dan *stakeholder* terkait HAM dapat dikelola dengan pelaksanaan hak dasar karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak serta hak untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan perlakuan adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan pedoman ISO 26000.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM
Ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab Perusahaan terhadap perumusan tanggung jawab sosial terkait Hak Asasi Manusia meliputi pemenuhan hak terhadap pekerja Perusahaan, Pemegang Saham, mitra kerja, konsumen atau pelanggan, serta masyarakat sekitar yang memiliki kontribusi dan dampak langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Perusahaan.

ISU-ISU HAM TERKAIT KEGIATAN ATAU YANG RELEVAN DENGAN BISNIS PERUSAHAAN
Perusahaan berfokus pada isu-isu HAM yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Adapun isu yang dimaksud antara lain:

1. Kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja;
2. Pemenuhan kesejahteraan dan hak karyawan;
3. Kebebasan berserikat dan berkumpul;
4. Tenaga kerja anak:
5. Tenaga Kerja paksa; dan
6. Waktu kerja.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM
Sesuai dengan isu-isu yang telah dipetakan, salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh Perusahaan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kolaboratif dengan para pekerja, sehingga dapat menjadi fundamental yang kuat untuk keberlanjutan usaha Perusahaan di masa yang akan datang.

COMMITMENT AND POLICY
In conducting its business activities, the Company consistently ensures the respect of human rights (HR). The Company is committed to upholding HR, which includes non-discrimination and attention to vulnerable groups; avoidance of complicity; civil and political rights; economic, social and cultural rights; as well as fundamental labor rights.

Risks to the Company and stakeholders related to HR are managed through the implementation of basic employee rights, such as the right to decent welfare and a safe and comfortable work environment. The Company is responsible for providing fair and equal treatment to all stakeholders in accordance with applicable regulations and ISO 26000 guidelines.

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY FORMULATION ON HUMAN RIGHTS
The scope of the Company's social responsibility related to human rights includes the fulfillment of rights for employees, shareholders, business partners, consumers or customers, and surrounding communities that contribute to or are impacted by the Company's operations, directly or indirectly.

HUMAN RIGHTS ISSUES RELATED TO THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES
The Company focuses on human rights issues relevant to its business operations. These include:

1. Gender equality and employment opportunities;
2. Fulfillment of employee welfare and rights;
3. Freedom of association and assembly;
4. Child labor;
5. Forced labor; and
6. Working hours.

SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING ON HUMAN RIGHTS
In accordance with the mapped issues, one of the Company's key social responsibilities involves employment practices. The Company upholds the principles of human rights to foster a harmonious and collaborative industrial relationship with its employees, forming a strong foundation for the Company's long-term sustainability.

Perencanaan program kerja tanggung jawab sosial terkait HAM telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang salah satunya ditujukan untuk pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnis Perusahaan. Perusahaan selalu mengutamakan hak-hak pekerja seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar pekerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan memiliki serangkaian prosedur yang mengatur pemenuhan hak karyawan, juga akan terus melakukan evaluasi serta pengembangan selaras dengan perkembangan akan kebutuhan hidup.

DAMPAK DAN PENCAPAIAN

Pada tahun 2024, Perusahaan belum mencatatkan pencapaian terkait Hak Asasi Manusia.

The human rights-related social responsibility work program has been incorporated into the Company's Work Plan and Budget (RKAP), with specific focus on ensuring the fulfillment of HR across the Company's operational and business scope. The Company prioritizes workers' rights such as decent living standards, the right to associate and assemble, and the fulfillment of basic labor rights. To achieve this, the Company has implemented various procedures and will continue to evaluate and improve them in alignment with evolving life needs.

IMPACTS AND ACHIEVEMENTS

In 2024, the Company did not record any specific achievements related to human rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL
SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATING PRACTICES

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan senantiasa berupaya menjamin terlaksanya praktik operasi yang adil dengan menjauhi segala bentuk kecurangan dalam seluruh aspek operasional serta praktik bisnis. Perusahaan menerapkan operasi yang adil dengan berkomitmen pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. Upaya tersebut dilakukan demi mempertahankan kepercayaan seluruh *stakeholder*.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perumusan tanggung jawab sosial khususnya terkait operasi yang adil dijalankan dengan mekanisme *due diligence*. Perusahaan merumuskan lingkup tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dengan cakupan pengelolaan gratifikasi, *anti-money laundering*, anti penyuapan (*anti bribery*), pelaporan pungutan liar, dan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system*.

RENCANA KEGIATAN

Sebagai upaya menerapkan praktik operasi yang adil dalam seluruh kegiatan usaha, Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menciptakan lingkup kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan segenap pemangku kepentingan. Hal tersebut juga merupakan wujud dari kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi Kode Etik Bisnis.

Sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance*, pelaksanaan terkait tanggung jawab sosial yang adil oleh Perusahaan meliputi:

COMMITMENT AND POLICY

The Company consistently strives to ensure the implementation of fair operating practices by avoiding all forms of fraud across operational and business activities. The Company upholds fair operations by committing to the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, equity, and accountability. These efforts are carried out to maintain stakeholders' trust.

SCOPE OF FORMULATING SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONS

The formulation of social responsibility on fair operations is implemented through a due diligence mechanism. The scope covers the management of gratification, anti-money laundering, anti-bribery, reporting of illegal levies, and the establishment of a whistleblowing system.

ACTIVITY PLAN

In its effort to apply fair business practices across all operations, the Company remains committed to creating a working environment aligned with stakeholder needs and expectations. It is also a reflection of the Company's compliance with the Code of Conducts.

In accordance with Good Corporate Governance guidelines, the implementation of fair social responsibility includes:

1. Mematuhi Kode Etik Bisnis dengan tujuan pencegahan benturan kepentingan, memberikan hak berpolitik yang tetap patuh terhadap perundang-undangan;
2. Mematuhi larangan penerimaan hadiah/gratifikasi;
3. Penggunaan *Whistleblowing System* dalam pelaporan indikasi pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2024, Pelaksanaan program yang direalisasikan antara lain:

1. Kampanye Pelabuhan Bersih;
2. Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Anti Penyuapan;
3. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
4. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
5. Sosialisasi anti korupsi, gratifikasi, *anti-money laundering*, anti penyuapan (*anti bribery*), pelaporan pungutan liar, dan penerapan *whistleblowing system* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

DAMPAK DAN PENCAPAIAN

Perusahaan telah meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dikeluarkan oleh PT SGS Indonesia pada tanggal 22 Februari 2023, dan masih berlaku hingga 8 Februari 2025.

1. Adherence to the Business Code of Conduct to prevent conflicts of interest and uphold political rights while complying with regulations;
2. Compliance with the prohibition on receiving gifts/gratification;
3. Utilization of the Whistleblowing System to report any indications of violations of the Business Code of Conduct.

ACTIVITY IMPLEMENTATION

In 2024, the Company implemented the following programs:

1. Clean Port Campaign;
2. ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification;
3. Submission of State Official Wealth Reports (LHKPN);
4. Procurement of goods and services in accordance with applicable guidelines and regulations; and
5. Socialization on anti-corruption, gratification, anti-money laundering, anti-bribery, illegal levy reporting, and whistleblowing system application within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

IMPACTS AND ACHIEVEMENTS

The Company has obtained ISO 37001:2016 certification for its Anti-Bribery Management System (ABMS), issued by PT SGS Indonesia on February 22, 2023, and valid until February 8, 2025.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pengelolaan operasional Perusahaan dituntut untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab menjaga ekosistem lingkungan. Tuntutan ini, diperkuat dengan adanya kesadaran bersama tentang isu keberlanjutan yang menghendaki pengelolaan usaha untuk kebutuhan pada masa kini tidak mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

Isu ini mengemuka sejalan dengan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, namun mengabaikan aspek lingkungan. Dengan pendekatan keberlanjutan, pertumbuhan perekonomian harus diimbangi dengan dukungan dan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga mampu mencegah bencana ekologis.

COMMITMENT AND POLICY

The Company's operational management is required to demonstrate concern and responsibility in preserving ecosystems. This responsibility is reinforced by a collective awareness of sustainability issues, which demand that today's business practices do not compromise the ability of future generations to meet their needs.

The issue has gained attention in response to critiques of development approaches that focus heavily on economic aspects while neglecting environmental considerations. The sustainability approach emphasizes that economic growth must be balanced with support for and efforts to protect environmental quality, thereby helping to prevent ecological disasters.

Perusahaan secara aktif melestarikan budaya dalam bertanggung jawab atas lingkungan tidak hanya kepada pekerja, namun juga masyarakat secara umum.

DAMPAK DAN RISIKO

Perusahaan sangat meyakini bahwa lingkungan kerja yang lestari serta harmonis dapat memaksimalkan kinerja. Oleh karena itu, segala kegiatan operasional Perusahaan tidak pernah luput dari pertimbangan atas dampak yang diberikan terhadap lingkungan. Dampak yang dimaksud adalah pemakaian energi, limbah dari kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan, pemanfaatan air, sampah dan limbah serta perubahan kualitas udara ambien dari tingginya aktivitas peralatan dan manusia. Dengan begitu, Perusahaan berkomitmen untuk memitigasi dampak tersebut guna menjaga kepercayaan dan keharmonisan hubungan dengan segenap pemangku kepentingan.

RENCANA KEGIATAN

Perusahaan telah menyusun rangkaian rencana kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah implementasi Sistem Manajemen Lingkungan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dengan tujuan melakukan pengelolaan lingkungan, konservasi energi dan pengembangan masyarakat. Adapun uraian terkait rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanaman 30.000 bibit mangrove di Sungai Undang, Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah.
2. Berkolaborasi dalam kegiatan penghijauan lingkungan bertema "Pelindo Hijau *Green Belt*."
3. Penyusunan dokumen IADL (Identifikasi analisis dampak lingkungan)
4. Penyediaan fasilitas dan peralatan lingkungan.
5. Pelaksanaan training lingkungan

PENGGUNAAN MATERIAL DAN ENERGI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN DAPAT DIDAUR ULANG

Perusahaan senantiasa meningkatkan aspek keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan berkomitmen dengan mengoptimalkan operasional yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*), baik di perkantoran maupun di wilayah operasional. Perusahaan menyiasati penggunaan kertas dengan menggunakan kertas dua sisi untuk kebutuhan operasional.

PENGELOLAAN LIMBAH ATAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Limbah merupakan salah satu sumber pencemaran terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari dampak negatif tersebut Perusahaan melakukan pengelolaan limbah dengan memperhatikan sistem kualitas mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lingkungan. Sistem prosedur yang diterapkan oleh Perusahaan dalam mengelola limbah adalah sebagai berikut:

The Company actively cultivates a culture of environmental responsibility not only among employees but also across the broader community.

IMPACTS AND RISKS

The Company strongly believes that a sustainable and harmonious work environment contributes significantly to enhanced performance. Therefore, all of the Company's operational activities are carefully evaluated for their potential environmental impacts. These impacts include energy consumption, waste from ships docking at ports, water usage, waste and garbage generation, and changes in ambient air quality due to high levels of equipment and human activity. The Company is committed to mitigating these impacts to maintain stakeholder trust and harmonious relationships.

ACTIVITY PLAN

The Company has prepared a series of planned activities implemented throughout 2024 as part of the Environmental Management System implementation.

ACTIVITY IMPLEMENTATION

In 2024, the Company implemented various activities aimed at environmental management, energy conservation, and community development. Details on key activities carried out, as follows:

1. Planting 30,000 mangrove seedlings in Undang River, Seruyan Hilir, Central Kalimantan;
2. Collaborating in a reforestation initiative under the theme "Pelindo Hijau Green Belt";
3. Preparation of IADL documents (Environmental Impact Identification and Analysis)
4. Provision of environmental facilities and equipment
5. Implementation of environmental training

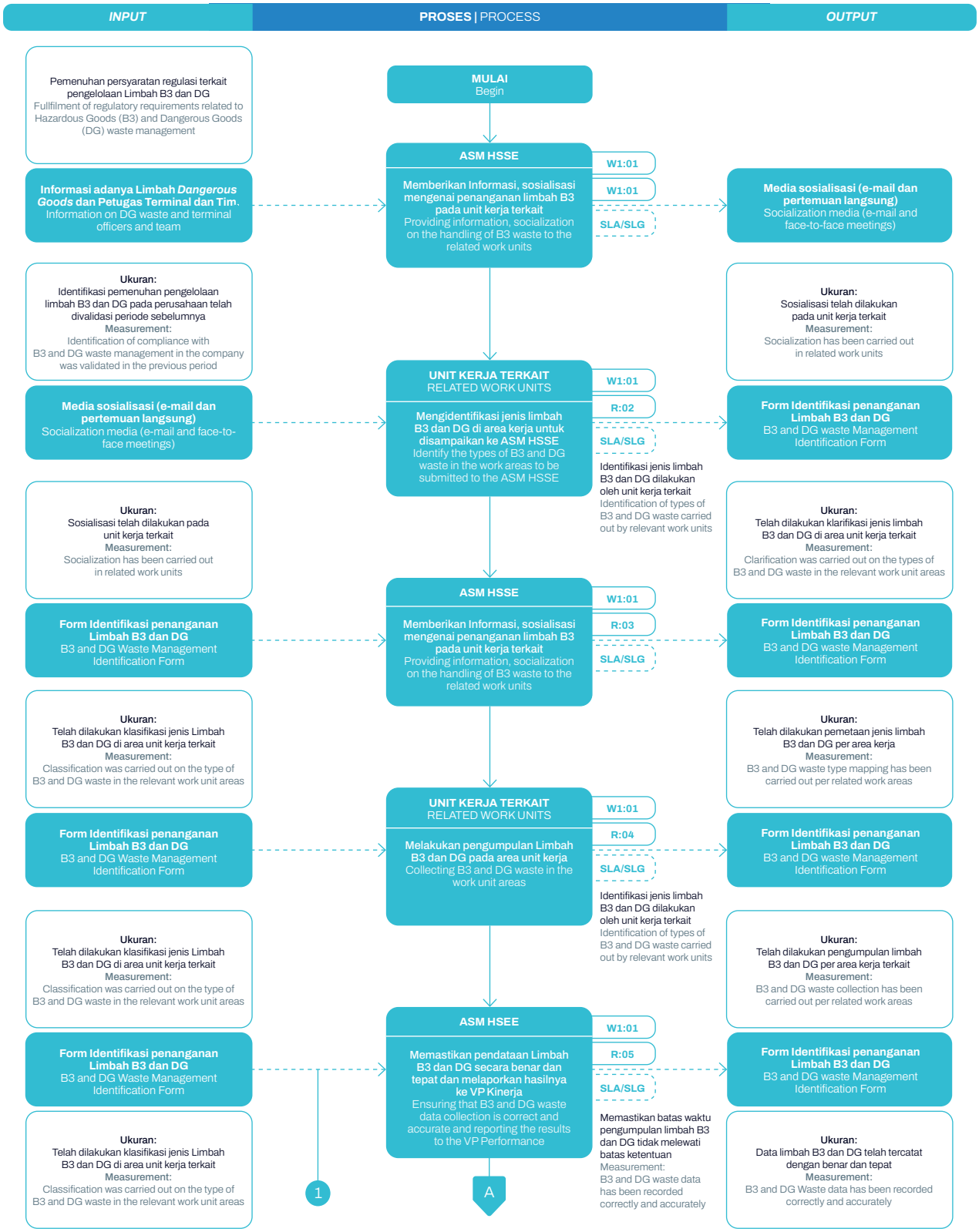
USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND RECYCLABLE MATERIALS AND ENERGY

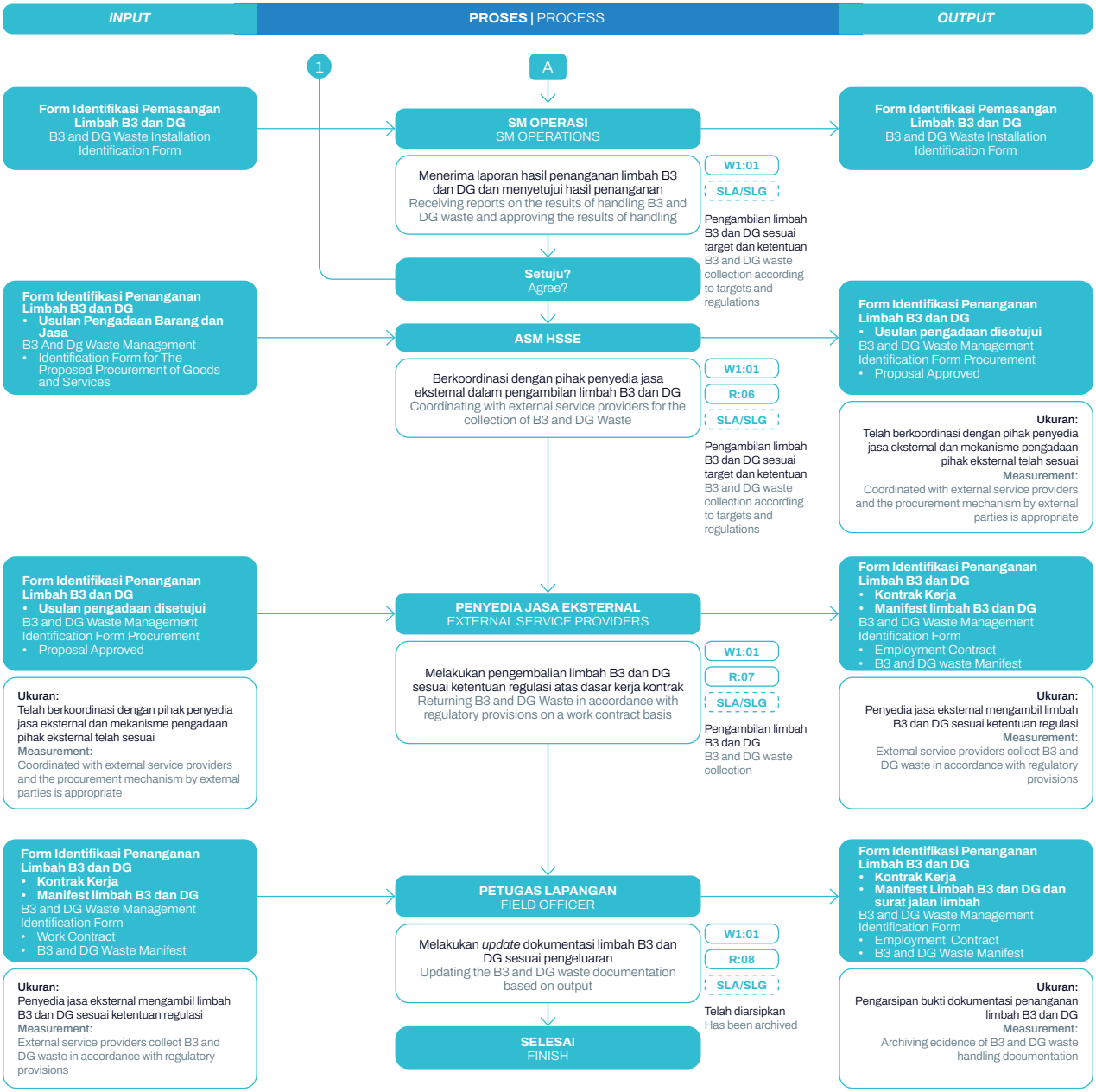
The Company consistently enhances its sustainability practices by promoting environmental conservation. It is committed to optimizing environmentally friendly operations through the 3R principles (Reduce, Reuse, and Recycle), both at office premises and operational sites. One such initiative includes double-sided printing to reduce paper usage in daily operations.

WASTE MANAGEMENT FROM BUSINESS ACTIVITIES

Waste is a significant source of environmental pollution if not properly managed. To avoid negative impacts, the Company implements waste management practices that comply with quality standards, Occupational Health and Safety (OHS), and environmental requirements. The procedures adopted by the Company for waste management include:

Bagan Prosedur Penanganan Limbah B3 dan Bebas Berbahaya
Procedure for Handling Hazardous Waste and Hazardous Materials





DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN

Dampak kuantitatif dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup tercermin dari efisiensi Perusahaan dalam menggunakan material dan energi. Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat penggunaan listrik sebesar 6.203.138 kWh. Selain itu, penggunaan kertas sepanjang 2024 tercatat sejumlah 365.000 lembar untuk Kantor Pusat. Konsumsi BBM di tahun 2024 untuk Bahan Bakar Alat tercatat sebesar 1.548.035 liter, sedangkan Penggunaan BBM (Bahan Bakar Rumah Tangga dan Alat) tercatat sebesar 52.998 Gigajoule. Lebih lanjut, penggunaan air di tahun 2024 tercatat sebesar 11.253 m³. Berikut uraian perbandingan penggunaan listrik, BBM, kertas dan air tahun 2024-2023.

QUANTITATIVE IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENT

The quantitative impact of implementing environmental social responsibility programs is reflected in the Company's efficiency in using materials and energy. In 2024, the Company recorded electricity consumption of 6,203,138 kWh. In addition, paper usage throughout 2024 totaled 365,000 sheets for the Head Office. Fuel consumption in 2024 for Operational Equipment Fuel was recorded at 1,548,035 liters, while Fuel Usage (Household and Equipment Fuel) amounted to 52,998 Gigajoule. Furthermore, water usage in 2024 reached 11,253 m³. The following is a comparative overview of electricity, fuel, paper, and water usage between 2024-2023:

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/decrease
Listrik Electricity	kWh	6.203.138	5.979.637	3,74%
Pengunaan BBM CN43 (Bahan Bakar Alat) Fuel CN 43 Usage (Equipment Fuel)	Liter	1.548.035	1.334.341	16,01%
Penggunaan BBM (Bahan Bakar Rumah Tangga dan Alat) Fuel Usage (Household and Equipment Fuel)	Gigajoule	52.998	45.634	16,14%
Kertas Paper	Lembar Sheet	365.000	170.000	114,71%
Air Water	Meter kubik M^3	11.253	11.803	(4,66%)

*Disajikan kembali karena adanya perbedaan metode penghitungan
*Restated due to difference in calculation method

SARANA PENGADUAN

Perusahaan memiliki sarana untuk pengaduan atas segala kegiatan operasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, melalui beberapa layanan di antaranya:

1. Menyampaikan langsung kepada *customer service* Perusahaan; atau
2. Surat yang dikirimkan langsung ke Kantor Pusat PTP, Divisi HSSE.

GRIEVANCE MECHANISM

The Company provides channels for submitting complaints related to any operational activities concerning environmental matters through the following services:

1. Directly reporting to the Company's customer service; or
2. Sending a letter directly to the PTP Head Office, HSSE Division.

Sertifikasi Certification			
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Issuance Date	Jenis Sertifikat Type of Certification	Dikeluarkan Oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity Period
7 Maret 2024 March 7, 2024	*Environmental Management System* - ISO 14001:2015	bsi	6 Maret 2027 March 6, 2027

BIAYA

Pada tahun 2024, Biaya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup sejumlah Rp2.211.477.247, menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah Rp486.893.510. Berikut uraian mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan:

COSTS

In 2024, the cost incurred for the implementation of Social and Environmental Responsibility amounted to Rp2,211,477,247, representing a decrease compared to Rp486,893,510 in 2023. The following is a breakdown of the expenditures made by the Company:

Perihal Subject	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan 2023-2022 Increase/Decrease 2023-2022
	1	2	(1-2)/2
PTP Peduli Lingkungan - PTP Penanaman Mangrove PTP Cares for Environment - PTP Mangrove planting	46.495.300	-	100%
PTP Peduli Lingkungan - *Green Port* PTP Cares for Environment - Green Port	28.881.947	194.950.000	(85,18%)
Penanaman pohon di area kerja PTP Tree planting in PTP Working Are	-	24.480.000	(100,00%)
PTP Peduli Lingkungan PTP Cares for Environment	-	267.463.510	(100,00%)
Pengadaan Peralatan *Oil Spill Response* Procurement of Oil Spill Response Equipment	2.136.100.000	-	100%
Jumlah Total	2.211.477.247	486.893.510	(71,82%)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan telah menyusun Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai pedoman seluruh organ untuk menunjang Standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Adapun kebijakan yang dimaksud tertuang pada:

1. Surat Keputusan Direksi No. HK.55/1/9/2/PTP-21 tentang Penghasilan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Surat Keputusan Direksi No.HK.55/30/12/2/PTP-22 tentang Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No.HK.55/18/10/1/PTP-22 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja dan Pensiunan Beserta Keluarganya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Peraturan Direksi No.HK.55/23/1/1/PTP-19 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan *Key Account* Berdasarkan *Customer Relationship Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/12/2/PTP-20 Tentang Pedoman Standarisasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/15/2/1/PTP-21 Tentang Pedoman Pelaksanaan Wabah Penyakit di Gedung Kantor Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
7. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/17/12/1/PTP-20 Tentang Pedoman Emergency Response Plan atau Rencana Tanggap Darurat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/18/12/1/PTP-18 Tentang Standarisasi Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS)/K3L Terhadap Penyedia Barang/Jasa dan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
9. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/3/12/1/PTP-20 Tentang Pedoman Sertifikasi ISPS Code di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan menyadari pentingnya keamanan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan operasional. Oleh karena itu, Perusahaan menjadikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama sesuai dengan Kebijakan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 yang mencakup peningkatan pelayanan dan operasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan aman dengan melakukan konservasi dan penghematan sumber daya, serta mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

RENCANA KEGIATAN

Perusahaan telah menyusun rencana terkait kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang di antaranya adalah sebagai berikut:

COMMITMENT AND POLICY

The Company has established a Social Responsibility Policy in the areas of Employment, Occupational Health, and Safety as a guideline for all organizational units to support ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards. The relevant policies are set forth in:

1. Board of Directors Decree No. HK.55/1/9/2/PTP-21 regarding Employee Remuneration at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Board of Directors Decree No. HK.55/30/12/2/PTP-22 regarding Education and Training Types and Levels within PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. PT Pelabuhan Tanjung Priok Director Regulation No. HK.55/18/10/1/PTP-22 concerning Health Maintenance and Services for Employees and Retirees and Their Families;
4. Director Regulation No. HK.55/23/1/1/PTP-19 concerning Guidelines for Key Account Management Based on Customer Relationship Management.
5. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number HK.55/30/12/2/PTP-20 Regarding Guidelines for the Standardization of Occupational Safety, Health, and Environment (K3L) at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/15/2/1/PTP-21 Regarding Guidelines for the Implementation of Disease Outbreaks in Office Buildings within the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment;
7. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number HK.55/17/12/1/PTP-20 concerning Guidelines for Emergency Response Plan or Emergency Response Plan in the PT Pelabuhan Tanjung Priok environment;
8. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok Number HK.55/18/12/1/PTP-18 concerning Standardization of the Implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS)/K3L for Goods/Service Providers and Partners in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Environment;
9. PT Tanjung Priok Port Regulation No. HK.55/3/12/1/PTP-20 on Guidelines for ISPS Code Certification at PT Tanjung Priok Port.

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY FORMULATION ON EMPLOYMENT, HEALTH, AND SAFETY

The Company recognizes the importance of ensuring stakeholder safety in all operational activities. Therefore, Occupational Health and Safety (OHS) is a top priority, in line with the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 Management Systems which includes improving services and operations that are sustainable, environmentally friendly, and safe by conserving and saving resources, as well as prioritizing Occupational Health and Safety.

ACTIVITY PLANS

The Company has outlined a work plan for Social Responsibility in the field of Employment, Occupational Health, and Safety, which includes:

1. Implementasi HSSE di seluruh Cabang PTP Terminal Nonpetikemas;
2. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan;
3. Pembangunan sistem *Dashboard* HSSE;
4. Memenuhi kebutuhan SDM untuk 11 (sebelas) Cabang meliputi Kantor Pusat, Cabang Tanjung Priok, Cabang Banten, Cabang Panjang, Cabang Bengkulu, Cabang Jambi, Cabang Teluk Bayur, Cabang Palembang, Cabang Cirebon, Cabang Pangkal Balam, Cabang Pontianak, dan Cabang Tanjung Pandan;
5. Melakukan *Medical Check Up* untuk seluruh karyawan Perusahaan;
6. Pelaksanaan survei kepuasan pekerja tahun 2024.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DAMPAKNYA

Perusahaan mengetahui betapa pentingnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang seluruh kegiatan operasional. Perusahaan senantiasa memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada segenap karyawan dan pemangku kepentingan, karena berkat organ-organ tersebut Perusahaan dapat meraih pertumbuhan serta pencapaian hingga saat ini.

Perusahaan memiliki karyawan dengan latar belakang, jenjang Pendidikan serta *gender* yang berbeda. Namun tanpa memandang perbedaan, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jaminan keselamatan secara menyeluruh, adil dan merata. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan melaksanakan rangkaian kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Tim Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3). Untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan capaian yang diharapkan, Perusahaan menjamin legalitas penanggung jawab serta memberi laporan terkait kegiatan K3 secara rutin kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KESETARAAN *GENDER* DAN KESEMPATAN KERJA

Perusahaan memberikan jaminan atas kesetaraan dan kesempatan kerja bagi setiap pekerja tanpa membedakan suku, ras dan agama. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karirnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/2/1/3/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

SARANA DAN FASILITAS KESELAMATAN KERJA

Komitmen Perusahaan dalam memastikan keselamatan seluruh pekerja diwujudkan dalam sarana dan fasilitas yang diberikan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) rambu K3, alat pemadam kebakaran (APAR), mobil patroli, CCTV, *Public Announcer*, pengecekan *fit to work*, fasilitas kesehjatan, *Office Shelter*, mobil *commuter*, toilet *portable*, pos jaga *check point*, dan peralatan P3K. Selain itu, Perusahaan juga memberikan fleksibilitas waktu kerja kepada karyawan yang sedang menjalani cuti, khususnya karyawan yang melahirkan atau keguguran serta fasilitas bagi ibu menyusui.

1. HSSE implementation across all branches of PTP Terminal Nonpetikemas;
2. Environmental Management System implementation;
3. Development of an HSSE dashboard system;
4. Fulfilling HC needs across 11 (eleven) branches including Head Office, Tanjung Priok Branch, Banten Branch, Panjang Branch, Bengkulu Branch, Jambi Branch, Teluk Bayur Branch, Palembang Branch, Cirebon Branch, Pangkal Balam Branch, Pontianak Branch, and Tanjung Pandan Branch;
5. Conducting Medical Check-Ups for all employees;
6. Conducting an employee satisfaction survey in 2024.

ACTIVITY IMPLEMENTATION AND IMPACTS

The Company acknowledges the vital role of Human Capital (HC) in supporting operational activities and extends its gratitude to all employees and stakeholders for their contributions. Despite employees having diverse backgrounds, education levels, and genders, the Company is committed to ensuring equal and fair safety provisions.

The Company employs individuals from diverse backgrounds, educational levels, and genders. However, regardless of these differences, the Company is committed to ensuring comprehensive, fair, and equitable safety for all. Throughout 2024, the Company implemented a series of Social Responsibility on Employment, especially on Occupational Health and Safety (OHS) and under the responsibility of the Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3). To ensure these activities meet the expected outcomes, the Company guarantees the legal standing of those in charge and submits regular reports on OHS activities to the Department of Manpower, Transmigration, and Energy of the DKI Jakarta Provincial Government.

GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The Company guarantees equal rights and employment opportunities for all employees, regardless of ethnicity, race, or religion. Every employee has the same opportunity to work and advance their career. This commitment is stated in the PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Directors Regulation Number: HK.55/2/1/3/PTP-18 dated January 2, 2018, concerning the Guidelines for Employee Recruitment within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

OCCUPATIONAL SAFETY FACILITIES AND INFRASTRUCTURES

The Company's commitment to ensuring the safety of all workers is realized through the provision of various facilities such as Personal Protective Equipment (PPE), OHS signboards, fire extinguishers (APAR), patrol vehicles, CCTV, public announcers, fit-to-work checks, health facilities, office shelters, commuter vehicles, portable toilets, checkpoint guard posts, and first aid equipment. In addition, the Company also provides flexible working hours for employees on leave, especially for those who are giving birth or have had a miscarriage, as well as facilities for breastfeeding mothers.

KESETARAAN KESEMPATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perusahaan percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan program-program pengembangan kepada pekerja secara adil tanpa melihat adanya perbedaan. Kebijakan terkait pengembangan kompetensi pekerja tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor: HK.55/30/12/2/PTP-22 tentang Jenis dan Jenjang Pelatihan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi pekerja menjadi tanggung jawab Divisi SDM berdasarkan pertimbangan atas kemampuan karyawan dalam bidangnya dan kebutuhan Perusahaan.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Perusahaan menyadari pentingnya menjamin kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki serangkaian kebijakan terkait pemenuhan kesejahteraan pekerja yang meliputi:

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No HK.55/1/9/2/PTP-21 tentang Penghasilan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Administrasi Manfaat Kesehatan antara PT Administrasi Medika dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: 514/LGL-01/PKS/AdM-PTP/XII/2023 dan Nomor: KP.21/02/29/9//2/SDMA/DIKS/PTP-2023;
3. Selain itu Pekerja berhak mendapatkan hak cuti yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55./1/7/1/PTP-22 tanggal 1 Juli 2022 tentang Cuti Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pemberian hak cuti terdiri dari cuti tahunan, cuti bersalin/keguguran, cuti haid, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.

SURVEI KEPUASAN PEGAWAI

Dalam mengevaluasi penerapan SDM, Perusahaan mengadakan survei kepuasan pegawai, untuk mendapatkan feedback mengenai bagaimana implementasi kebijakan Perusahaan terhadap ekspektasi pegawai agar senantiasa memberikan performa terbaik. Pada tahun 2024, survei kepuasan pegawai dilakukan oleh *holding*.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Sistem Remunerasi

Seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi No HK.55/1/9/2/PTP-21 tentang Penghasilan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Peraturan Direksi Nomor: HK.55/17/12/8/PTP-20 tentang Penghasilan Non-Bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditugaskan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok, berikut uraian terkait jumlah remunerasi periode 2018-2024:

EQUAL OPPORTUNITIES FOR COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company believes every individual possesses potential that can be developed. Therefore, the Company provides development programs to employees fairly, without discrimination. Policies related to employee competency development are outlined in the Director's Regulation Number: HK.55/30/12/2/PTP-22 concerning Types and Levels of Training within PT Pelabuhan Tanjung Priok. Furthermore, employee competency development is the responsibility of the HC Division, based on considerations of the employee's abilities in their field and the Company's needs.

EMPLOYEE WELFARE

The Company recognizes the importance of ensuring employee welfare in order to enhance work motivation and employee loyalty to the Company. Therefore, the Company has established a series of policies related to the fulfillment of employee welfare, including:

1. In accordance with the Decree of the Board of Directors No. HK.55/1/9/2/PTP-21 concerning Employee Remuneration at PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Partnership Agreement on Healthcare Benefit Administration Management between PT Administrasi Medika and PT Pelabuhan Tanjung Prio No: 514/LGL-01/PKS/AdM-PTP/XII/2023 dan No: KP.21/02/29/9//2/SDMA/DIKS/PTP-2023;
3. In addition, employees are entitled to leave as regulated under the Board of Directors Regulation No. HK.55/1/7/1/PTP-22 dated July 1, 2022, on Employee Leave at PT Pelabuhan Tanjung Priok. Leave entitlements include annual leave, maternity/miscarriage leave, menstrual leave, sick leave, leave for important reasons, extended leave, and collective leave as determined by the Government.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

In evaluating HC implementation, the Company conducts employee satisfaction surveys in order to gain feedback on the implementation of the Company policy. It is aimed to understand employee expectations in order to perform well. In 2024, employee satisfaction survey was condected by the Holding Company.

QUANTITATIVE IMPACT OF OCCUPATIONAL SAFETY ACTIVITIES

Remuneration System

As outlined in Director Decree No. HK.55/1/9/2/PTP-21 concerning Income for Workers of PT Pelabuhan Tanjung Priok and Director Decree Number: HK.55/17/12/8/PTP-20 concerning Non-Monthly Income for Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) assigned to PT Pelabuhan Tanjung Priok, the remuneration figures for the 2018–2024 period
are as follows:

Tahun Year	**Jumlah** Total
2024	222.979.871.540
2023	221.381.533.317
2022	200.125.985.219
2021	196.520.005.104
2020	195.506.943.287
2019	224.967.868.703
2018	214.108.541.482

TURNOVER KARYAWAN

Karyawan bagi Perusahaan merupakan aset strategis dalam menciptakan nilai bagi keberlanjutan Perusahaan. Dalam posisinya yang sangat strategis, Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus adalah mesin penggerak utama Perusahaan. Karyawan juga menjadi garda terdepan pelayanan sehingga sangat berperan dalam membentuk *image* PTP Terminal Nonpetikemas. Pada tahun 2024, tingkat *turnover* karyawan Perusahaan tercatat sejumlah 2,82%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perhitungan terkait tingkat *turnover* dilakukan berdasarkan rumus berikut:

EMPLOYEE TURNOVER

Employees are considered strategic assets by the Company in creating value for its long-term sustainability. In a highly strategic position, Human Resources (HC) also serves as the main driving force of the Company. Employees act as the front line of service and therefore play a crucial role in shaping the image of PTP Terminal Nonpetikemas. In 2024, the Company recorded an employee turnover rate of 2.82%, an increase compared to the previous year. The turnover rate is calculated based on the following formula:

Tingkat Turnover Karyawan =
Employee TurnoverRate

$$\frac{\text{Jumlah Karyawan Keluar}\ /\ \text{Number of Employees Leaving}}{[(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun x \%})]\ /\ [(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun x \%})]\ /\ [(\text{Number of Employees at Beginning of the Year} + \text{Number of Employees at End of the Year}) \times ½]}$$

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar

Penyebab Reasons	**2024** **(orang)**	**2023** **(orang)**
Pensiun alami Natural retirement	10	11
Pensiun dini Early retirement	0	0
Meninggal Passed away	1	0
Mengundurkan diri Resign	0	0
Diberhentikan karena melakukan pelanggaran Dismissed for committing violation	0	2
Jumlah karyawan keluar Number of employees leaving	11	13
Total karyawan Total employees	301	317
Persentase *turnover* (%) Turnover percentage (%)	2,82%	3,90%

TINGKAT KECELAKAAN KERJA

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan capaian positif dalam menjamin keselamatan kerja kepada seluruh karyawan, hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian *zero accident* dalam kegiatan operasional Perusahaan.

WORKPLACE ACCIDENT RATE

In 2024, the Company recorded a positive achievement in ensuring workplace safety for all employees, as evidenced by the accomplishment of a zero-accident rate across all operational activities.

Jenis dan Jumlah Kecelakaan Kerja 2023-2024
Type and Total Work Accidents in 2023-2024

Jenis Kecelakaan Kerja Type of Work Accident	2024	2023
Loss Time Injured (LTI)	0	0
FirstAid Case (FAC)	0	0
Medical Treatment Case (MTC)	0	0
Meninggal (FAT)	0	0

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan terkait Pendidikan dan pelatihan pegawai tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor HK.55/2/1/1/PTP-18 tentang Pengembangan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 2 Januari 2018. Pada tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan program pelatihan di bidang K3, seperti uraian berikut:

1. Ahli K3 Umum
2. Basic Safety
3. *Training Hiradic* (*hazard identification risk Assessment and determining control*)

SALURAN PENGADUAN

Perusahaan telah memiliki prosedur terkait mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang tercantum dalam SOP Nomor: QP.3/SDU/SDM/09 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Tanggapan Atas Keluhan Pekerja.

Berikut laporan atas masalah ketenagakerjaan yang diterima oleh Perusahaan sepanjang tahun 2024, beserta perbandingannya di tahun 2023.

EDUCATION AND TRAINING

The Company's policy on employee education and training is outlined in the Director's Regulation No. HK.55/2/1/1/PTP-18 concerning Employee Development within PT Pelabuhan Tanjung Priok dated January 2, 2018. In 2024, the Company implemented various OHS training programs, as detailed below:

1. General OHS Expert
2. Basic Safety
3. HIRADIC Training (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)

GRIEVANCE MECHANISM

The Company has established a procedure for handling employment-related grievances, as set forth in Standard Operating Procedure (SOP) No. QP.3/SDU/SDM/09 dated December 10, 2018, regarding the Handling of Employee Complaints.

Below is a summary of employment-related grievances received by the Company throughout 2024, along with a comparison to 2023.

Uraian Description	2024 (laporan) (reports)	2023 (laporan) (reports)
Jumlah Laporan Number of Reports	-	-
Laporan yang ditindaklanjuti Followed Up reports	-	-
Presentase (%) Percentage (%)	-	-

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tahun 2024
Awards in the Field of Employment, Occupational Health and Safety in 2024

Tanggal Dikeluarkannya Penghargaan Issuance Date of Award	Jenis Penghargaan Type of Award	Dikeluarkan Oleh Issued By
12 Februari 2024 February 12, 2024	Performasi Implentasi K3 Anak Usaha Terbaik Best OHS Implementation Performance by a Subsidiary	Pelindo Regional 2
7 Maret 2024 March 7, 2024	HSSE *Recognition* 2023	Mubadala Energy

Sertifikasi Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Masih Berlaku di Tahun 2024
Valid Certification in the Field of Employment, Occupational Health and Safety in 2024

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Issuance Date of Certificate	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Validity Period
7 Maret 2024 March 7, 2024	*Occupational Health & Safety Management System* - ISO 45001:2018	bsi	6 Maret 2027 March 6, 2027

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED ON CONSUMERS AND BUSINESS PARTNERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pemangku kepentingan utama bagi Perusahaan adalah konsumen dan mitra kerja. Dengan posisinya yang begitu penting, maka Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan kepuasan konsumen dan mitra kerja, sekaligus mempertahankan kepuasan tersebut agar tercipta konsumen yang loyal.

RENCANA KEGIATAN

Pada tahun 2024, Perusahaan menyusun rencana kegiatan antara lain:

1. *Customer Visit*
2. *Coffee Morning*
3. Survey Pelanggan
4. Kegiatan Hari Pelanggan
5. *Customer Hearing*

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DAMPAKNYA

Berdasarkan susunan rencana kegiatan, berikut realisasi kegiatan program CSR sepanjang tahun 2024 beserta dampaknya:

1. *Customer Visit* terealisasi sebanyak 399 kunjungan sepanjang tahun 2024
2. *Coffee morning* Cabang Banten di Bandung pada bulan Juni 2024 di Bandung
3. Kegiatan Hari Pelanggan dilaksanakan tanggal 4-6 Juni tahun 2024, acara ini serentak dilaksanakan diseluruh *branch* PTP Terminal Nonpetikemas dengan memberikan bingkisan berupa makanan/*souvenir* kepada Pengguna Jasa (sesuai aturan yang berlaku-SMAP)
4. *Customer Hearing* merupakan kegiatan tahunan bersama dengan SPMT *Group* yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus di Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh Direksi di lingkungan SPMT *Group* dan Pengguna Jasa. Terdapat sesi one on one antara Jajaran Direksi serta Manajemen PTP Terminal Nonpetikemas dengan Pengguna Jasa untuk mengetahui lebih dalam harapan dan ekpektasi pelanggan terhadap pelayanan PTP Terminal Nonpetikemas
5. Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2024 dilaksanakan secara online di seluruh *branch* PTP Terminal Nonpetikemas. Dengan hasil indeks Kepuasan Pelanggan pada angka 4,12 Skala *Likert*. Indeks Loyalitas Pelanggan pada 4,10 Skala *Likert*, serta Indeks Engagement Pelanggan pada 4,14 Skala *Likert*

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Dampak kuantitatif atas program dan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan dan produk atau jasa, dapat dilihat dari perolehan hasil survei tingkat kepuasan pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI).

COMMITMENT AND POLICY

The Company identifies consumers and business partners as its key stakeholders. Recognizing their vital role, the Company is committed to ensuring and maintaining their satisfaction, with the ultimate goal of fostering loyalty and long-term relationships.

ACTIVITY PLAN

In 2024, the Company outlined several planned activities, including:

1. Customer Visit
2. Morning Coffe
3. Customer Survey
4. Customer Day Activity
5. Customer Hearing

ACTIVITY IMPLEMENTATION AND IMPACT

Based on the planned activities, the following CSR initiatives were implemented throughout 2024 along with their respective impacts:

1. Customer Visits were realized in total of 399 visits throughout 2024
2. Morning Coffee Banten Branch was conducted in Bandung in June 2024
3. Customer Day was held on June 4-6, 2024. The event were held at once across all PTP Terminal Nonpetikemas Branches by distributing gifts in form of foods/souvenirs to Consumers (according to SMAP regulation)
4. Customer Hearing is a annual event hold in collaboration with SPMT Group. The event was held on August 29-30 in Yogyakarta. It was attended by all Directors from SPMT Group and Service Users. There were one on one sessions between PTP Terminal Nonpetikemas Management with Service Users to understand further customer expectations from PTP Terminal Nonpetikemas services
5. Customer Satisfaction Survey in 2024 was held online across all PTP Terminal Nonpetikemas Branches. With the Customer Satisfaction index of 4.12 Likert Scale. The Customer Loyalty Index was at 4.10 Likert Scale, and Customer Engagement Index of 4.14 Likert Scale

QUANTITATIVE IMPACT OF CSR ACTIVITIES ON CONSUMERS

The measurable impact of the Company's corporate social responsibility programs on consumers or customers and on the products or services is reflected in the results of the Customer Satisfaction Index (CSI) survey.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Kesehatan dan keselamatan konsumen telah tertuang dalam Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 1 November 2024, dan Pedoman Mutu, K3 dan Lingkungan revisi ke-4 tanggal 1 September 2021. Merujuk pada kebijakan tersebut, Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3) diberikan kepada setiap yang melakukan aktivitas di lingkungan kerja pelabuhan.

CONSUMER HEALTH AND SAFETY

Consumer health and safety are incorporated in PT Pelabuhan Tanjung Priok's Quality, Occupational Health & Safety, and Environmental Policy dated November 1, 2024, and the Quality, OHS, and Environmental Manual (4th revision) dated September 1, 2021. Based on this policy, Occupational Health and Safety (OHS) provisions apply to anyone conducting activities within the port work environment.



SALURAN PENGADUAN

Penanggulangan pengaduan konsumen dan mitra kerja telah disediakan oleh Perusahaan berdasarkan Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan yang disahkan oleh Direksi PTP Terminal Nonpetikemas dengan Dokumen No. QP.4/KOM/PEL/03 tanggal 3 Agustus 2020, melalui sarana berikut ini:

1. Pengaduan secara langsung melalui layanan *customer service*;
2. Pengaduan melalui surat, telepon dan surat elektronik;
3. *Website* www.ptp.co.id.

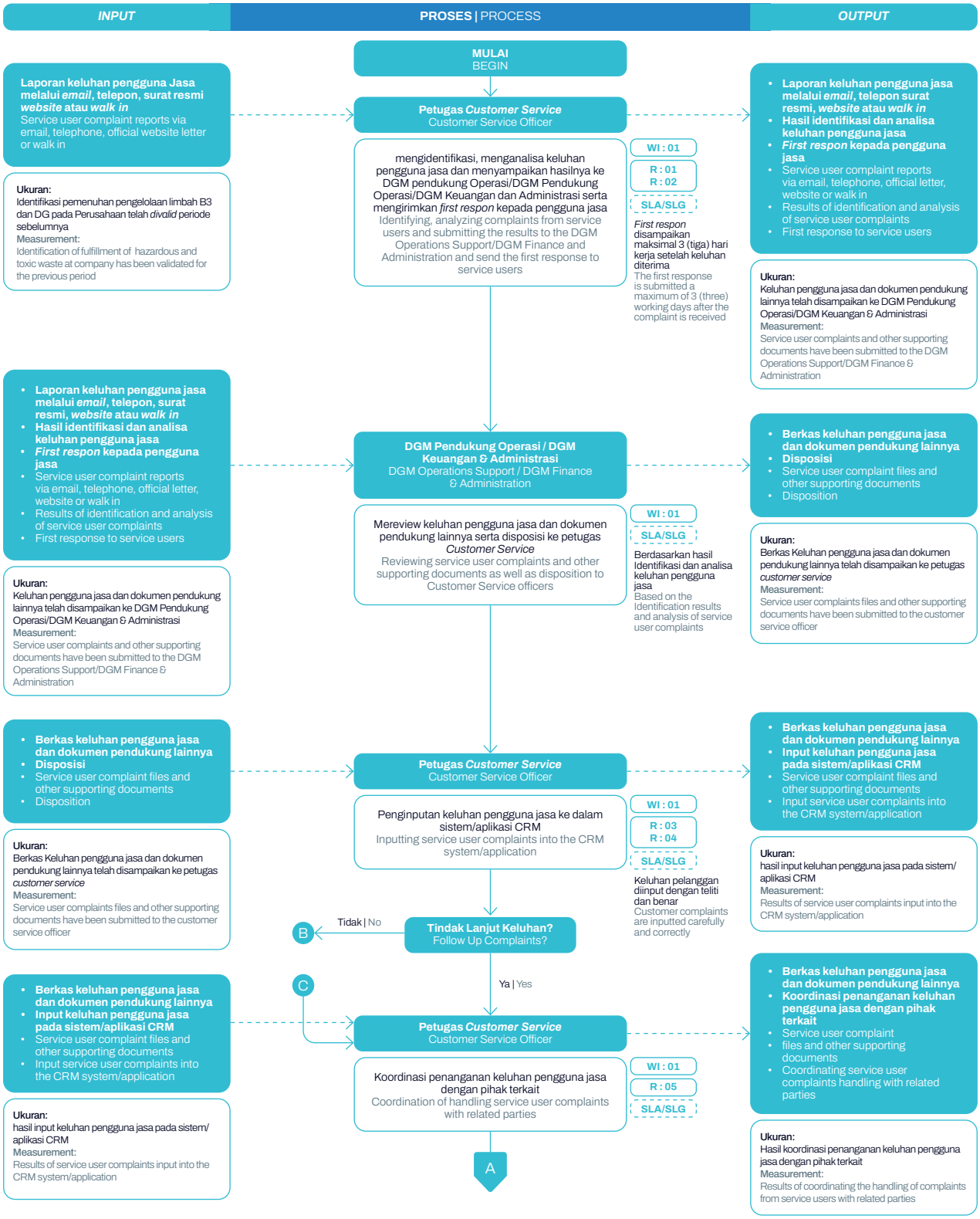
Melalui komitmen dan kerja keras segenap pihak yang terkait, Perusahaan berupaya untuk menyelesaikan keluhan pelanggan setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keluhan pengguna jasa dinyatakan jelas dan benar. Adapun prosedur penanganan keluhan disajikan melalui bagan berikut ini:

GRIEVANCE MECHANISM

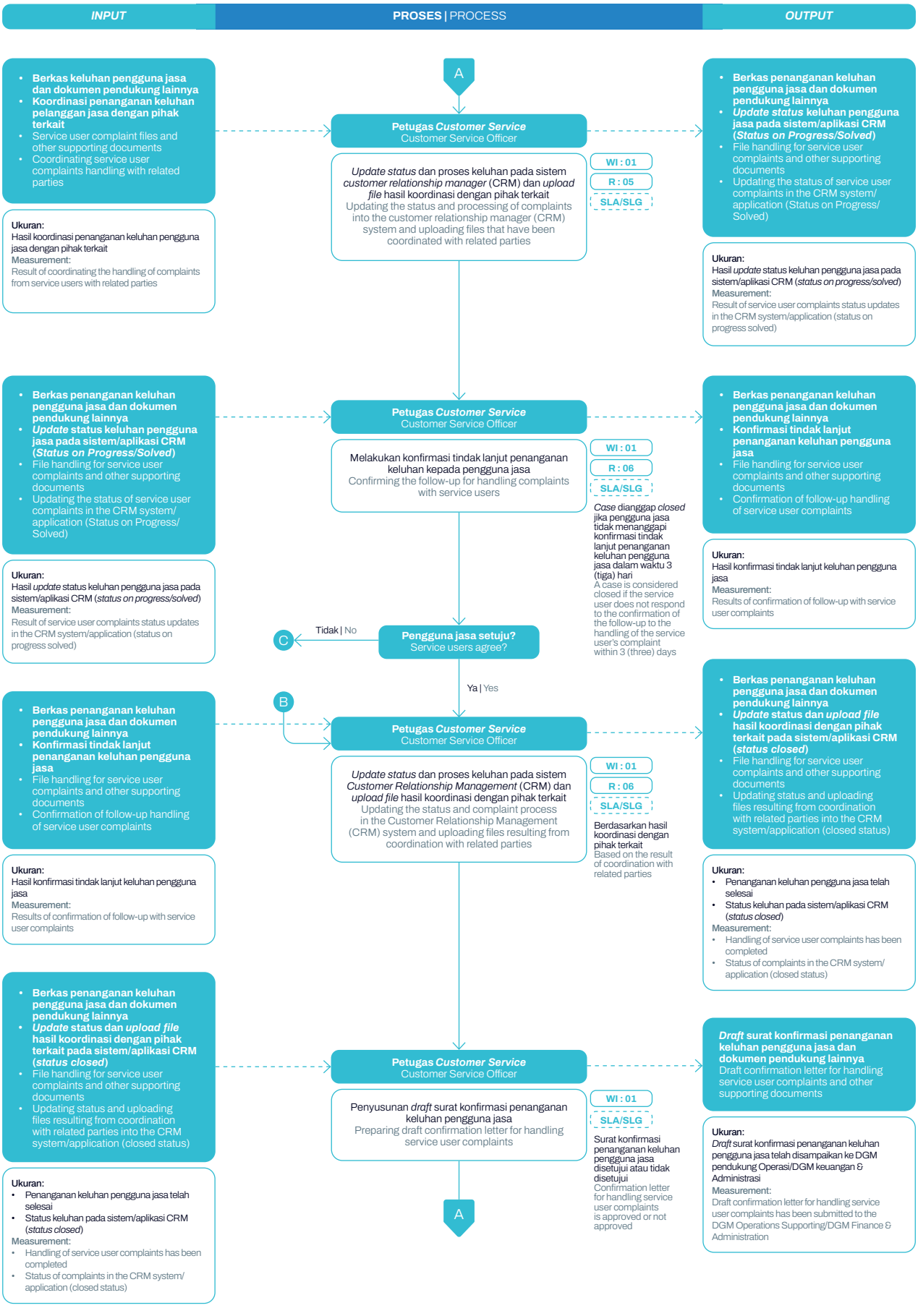
The Company provides grievance handling facilities for consumers and business partners as outlined in the Customer Grievances Handling Procedure approved by the Directors of PTP Terminal Nonpetikemas, under Document No. QP.4/KOM/PEL/03 dated August 3, 2020. Grievances can be submitted through the following channels:

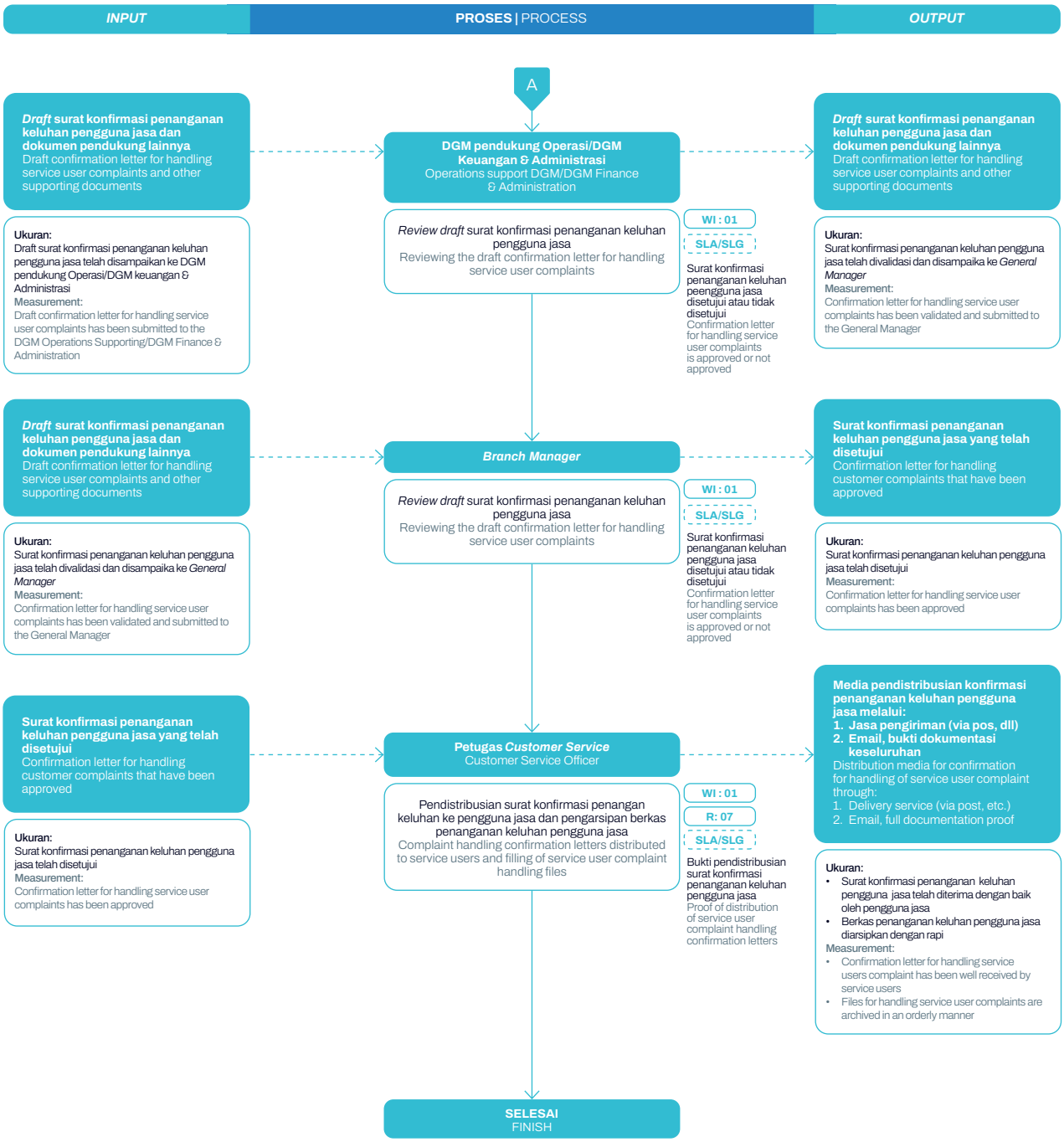
1. Direct submission to customer service;
2. Submission through letters, phone calls, or email;
3. Website www.ptp.co.id.

Through its commitment and collaborative efforts, the Company strives to resolve customer grievances within 30 (thirty) business days from the date the grievance is deemed valid and substantiated. The grievance handling procedure is illustrated in the following diagram:


INPUT
PROSES | PROCESS
OUTPUT
MULAI
BEGIN
Laporan keluhan pengguna Jasa melalui email, telepon, surat resmi website atau walk in
Service user complaint reports via email, telephone, official website letter or walk in
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
mengidentifikasi, menganalisa keluhan pengguna jasa dan menyampaikan hasilnya ke DGM pendukung Operasi/DGM Pendukung Operasi/DGM Keuangan dan Administrasi serta mengirimkan first respon kepada pengguna jasa
Identifying, analyzing complaints from service users and submitting the results to the DGM Operations Support/DGM Finance and Administration and send the first response to service users
WI : 01
R : 01
R : 02
SLA/SLG
First respon disampaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah keluhan diterima
The first response is submitted a maximum of 3 (three) working days after the complaint is received
Laporan keluhan pengguna jasa melalui email, telepon surat resmi, website atau walk in
Hasil identifikasi dan analisa keluhan pengguna jasa
First respon kepada pengguna jasa
Service user complaint reports via email, telephone, official letter, website or walk in
Results of identification and analysis of service user complaints
First response to service users
Ukuran:
Identifikasi pemenuhan pengelolaan limbah B3 dan DG pada Perusahaan telah divalid periode sebelumnya
Measurement:
Identification of fulfillment of hazardous and toxic waste at company has been validated for the previous period
Ukuran:
Keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya telah disampaikan ke DGM Pendukung Operasi/DGM Keuangan & Administrasi
Measurement:
Service user complaints and other supporting documents have been submitted to the DGM Operations Support/DGM Finance & Administration
DGM Pendukung Operasi / DGM Keuangan & Administrasi
DGM Operations Support / DGM Finance & Administration
Mereview keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya serta disposisi ke petugas Customer Service
Reviewing service user complaints and other supporting documents as well as disposition to Customer Service officers
WI : 01
SLA/SLG
Berdasarkan hasil Identifikasi dan analisa keluhan pengguna jasa
Based on the identification results and analysis of service user complaints
Berkas keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Disposisi
Service user complaint files and other supporting documents
Disposition
Ukuran:
Berkas Keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya telah disampaikan ke petugas customer service
Measurement:
Service user complaints files and other supporting documents have been submitted to the customer service officer
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Penginputan keluhan pengguna jasa ke dalam sistem/aplikasi CRM
Inputting service user complaints into the CRM system/application
WI : 01
R : 03
R : 04
SLA/SLG
Keluhan pelanggan diinput dengan teliti dan benar
Customer complaints are inputted carefully and correctly
Berkas keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Input keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM
Service user complaint files and other supporting documents
Input service user complaints into the CRM system/application
Ukuran:
hasil input keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM
Measurement:
Results of service user complaints input into the CRM system/application
B
Tidak | No
Tindak Lanjut Keluhan?
Follow Up Complaints?
Ya | Yes
C
Berkas keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Input keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM
Service user complaint files and other supporting documents
Input service user complaints into the CRM system/application
Ukuran:
hasil input keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM
Measurement:
Results of service user complaints input into the CRM system/application
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Koordinasi penanganan keluhan pengguna jasa dengan pihak terkait
Coordination of handling service user complaints with related parties
WI : 01
R : 05
SLA/SLG
Berkas keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Koordinasi penanganan keluhan pengguna jasa dengan pihak terkait
Service user complaint
files and other supporting documents
Coordinating service user complaints handling with related parties
Ukuran:
Hasil koordinasi penanganan keluhan pengguna jasa dengan pihak terkait
Measurement:
Results of coordinating the handling of complaints from service users with related parties
A




INPUT
PROSES | PROCESS
OUTPUT
A
Berkas keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Koordinasi penanganan keluhan pelanggan jasa dengan pihak terkait
Service user complaint files and other supporting documents
Coordinating service user complaints handling with related parties
Ukuran:
Hasil koordinasi penanganan keluhan pengguna jasa dengan pihak terkait
Measurement:
Result of coordinating the handling of complaints from service users with related parties
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Update status dan proses keluhan pada sistem customer relationship manager (CRM) dan upload file hasil koordinasi dengan pihak terkait
Updating the status and processing of complaints into the customer relationship manager (CRM) system and uploading files that have been coordinated with related parties
WI : 01
R : 05
SLA/SLG
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Update status keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM (Status on Progress/Solved)
File handling for service user complaints and other supporting documents
Updating the status of service user complaints in the CRM system/application (Status on Progress/Solved)
Ukuran:
Hasil update status keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM (status on progress/solved)
Measurement:
Result of service user complaints status updates in the CRM system/application (status on progress solved)
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Update status keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM (Status on Progress/Solved)
File handling for service user complaints and other supporting documents
Updating the status of service user complaints in the CRM system/application (Status on Progress/Solved)
Ukuran:
Hasil update status keluhan pengguna jasa pada sistem/aplikasi CRM (status on progress/solved)
Measurement:
Result of service user complaints status updates in the CRM system/application (status on progress solved)
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Melakukan konfirmasi tindak lanjut penanganan keluhan kepada pengguna jasa
Confirming the follow-up for handling complaints with service users
WI : 01
R : 06
SLA/SLG
Case dianggap closed jika pengguna jasa tidak menanggapi konfirmasi tindak lanjut penanganan keluhan pengguna jasa dalam waktu 3 (tiga) hari
A case is considered closed if the service user does not respond to the confirmation of the follow-up to the handling of the service user's complaint within 3 (three) days
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Konfirmasi tindak lanjut penanganan keluhan pengguna jasa
File handling for service user complaints and other supporting documents
Confirmation of follow-up handling of service user complaints
Ukuran:
Hasil konfirmasi tindak lanjut keluhan pengguna jasa
Measurement:
Results of confirmation of follow-up with service user complaints
C
Tidak | No
Pengguna jasa setuju?
Service users agree?
Ya | Yes
B
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Konfirmasi tindak lanjut penanganan keluhan pengguna jasa
File handling for service user complaints and other supporting documents
Confirmation of follow-up handling of service user complaints
Ukuran:
Hasil konfirmasi tindak lanjut keluhan pengguna jasa
Measurement:
Results of confirmation of follow-up with service user complaints
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Update status dan proses keluhan pada sistem Customer Relationship Management (CRM) dan upload file hasil koordinasi dengan pihak terkait
Updating the status and complaint process in the Customer Relationship Management (CRM) system and uploading files resulting from coordination with related parties
WI : 01
R : 06
SLA/SLG
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait
Based on the result of coordination with related parties
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Update status dan upload file hasil koordinasi dengan pihak terkait pada sistem/aplikasi CRM (status closed)
File handling for service user complaints and other supporting documents
Updating status and uploading files resulting from coordination with related parties into the CRM system/application (closed status)
Ukuran:
Penanganan keluhan pengguna jasa telah selesai
Status keluhan pada sistem/aplikasi CRM (status closed)
Measurement:
Handling of service user complaints has been completed
Status of complaints in the CRM system/application (closed status)
Berkas penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Update status dan upload file hasil koordinasi dengan pihak terkait pada sistem/aplikasi CRM (status closed)
File handling for service user complaints and other supporting documents
Updating status and uploading files resulting from coordination with related parties into the CRM system/application (closed status)
Ukuran:
Penanganan keluhan pengguna jasa telah selesai
Status keluhan pada sistem/aplikasi CRM (status closed)
Measurement:
Handling of service user complaints has been completed
Status of complaints in the CRM system/application (closed status)
Petugas Customer Service
Customer Service Officer
Penyusunan draft surat konfirmasi penanganan keluhan pengguna jasa
Preparing draft confirmation letter for handling service user complaints
WI : 01
SLA/SLG
Surat konfirmasi penanganan keluhan pengguna jasa disetujui atau tidak disetujui
Confirmation letter for handling service user complaints is approved or not approved
A
Draft surat konfirmasi penanganan keluhan pengguna jasa dan dokumen pendukung lainnya
Draft confirmation letter for handling service user complaints and other supporting documents
Ukuran:
Draft surat konfirmasi penanganan keluhan pengguna jasa telah disampaikan ke DGM pendukung Operasi/DGM keuangan & Administrasi
Measurement:
Draft confirmation letter for handling service user complaints has been submitted to the DGM Operations Supporting/DGM Finance & Administration



Per 31 Desember 2024, tidak terdapat pengaduan yang masuk.

As of December 32, 2024 there was no grievance received.

Tabel Penyelesaian Pengaduan Konsumen Selama Tahun 2023-2024
Table of Settlement of Consumer Grievances in 2023-2024

No	Tahun Year	Jumlah Pengaduan Masuk Number of Incoming Grievances	Jumlah Pengaduan Selesai Number of Grievances Resolved	Presentasi Penyelesaian Percentage of Completion
1	2024	0	0	0,00%
2	2023	87	81	93,10%

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2024, tidak terdapat penghargaan dan sertifikasi pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Konsumen dan Mitra Kerja.

AWARDS AND CERTIFICATIONS

In 2024, there were no awards and certification on Social Responsibility on Consumers and Business Partners.

BIAYA

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Konsumen dan Mitra Kerja. Adapun uraian biaya yang dialokasikan Perusahaan untuk penyelenggaraan program tersebut adalah sebagai berikut:

COSTS

In 2024, the Company implemented Corporate Social Responsibility (CSR) activities on Consumers and Business Partners. The breakdown of Costs allocated by the Company for the implementation of these programs is as follows:

Perihal Subject	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penuruna 2024-2023 (%) Increase/Decrease 2024-2023 (%)
	1	2	(1-2)/2
Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	731,78	1.882,21	(61,12%)
Coffee Morning	49,02	-	100%
Jumlah Total	780,80	1.882,21	(58,52%)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Untuk menjaga kelangsungan atau kelanjutan usaha dalam jangka panjang, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan, baik dengan aksi nyata maupun donasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

COMMITMENT AND POLICY

In order to ensure the continuity and sustainability of its business in the long term, the Company consistently upholds compliance with laws and regulations and carries out its social responsibility to society and the environment. This commitment is realized through a series of activities, both in the form of direct actions and donations conducted throughout 2024.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Perusahaan melihat adanya beberapa isu-isu yang penting dalam masyarakat sehingga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan merumuskan lingkup yang sesuai dengan isu yang telah diidentifikasi dan selaras dengan skala prioritasnya. Berikut hasil identifikasi/pemetaan sosial berdasarkan 3 (tiga) pilar program CSR Perusahaan:

1. Masyarakat kelompok rentan, yaitu pemulung, tukang ojek, dan kelompok miskin;

SCOPE OF FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL RELATED TO COMMUNITY ASPECTS

The Company recognizes several significant social issues that require special attention. Accordingly, in implementing its Social Responsibility programs, the Company formulates the scope based on identified issues aligned with priority scales. The following is the result of social identification/mapping based on the Company's 3 (three) CSR pillars:

1. Vulnerable community groups, including waste pickers, motorcycle taxi drivers, and low-income groups;

2. Komunitas Lingkungan;
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu pedagang eceran dan pedagang keliling;
4. Sekolah, di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, SMA atau Kejuruan serta Kelompok Kejar Paket C;
5. Kelompok pemuda (Karang Taruna) dan keagamaan;
6. Pekerja lokal seperti buruh TKBM, petugas kebersihan.
7. Petugas keamanan dan petugas taman.

2. Environmental communities;
3. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), such as street vendors and mobile vendors;
4. Schools, including Early Childhood Education, Elementary Schools, Junior and Senior High Schools, Vocational Schools, and Informal Education Groups;
5. Youth and religious groups (e.g., Karang Taruna);
6. Local workers such as port laborers (TKBM), sanitation workers;
7. Security officers and park caretakers.

RENCANA KEGIATAN

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, Perusahaan menyusun rencana kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan berdasarkan 3 (tiga) pilar CSR yang dimiliki. Berikut susunan rencana kegiatan yang telah disusun Perusahaan:

ACTIVITY PLAN

Based on the mapping above, the Company has prepared an activity plan for social and community development aligned with the 3 (three) CSR pillars. The following outlines the planned activities prepared by the Company:

Rencana Kegiatan Activity Plan	**Realisasi Kegiatan** Activity Realization
Program TJSL dengan Metode SRoI CSR Programs with SRoI Method	Implementasi Program Unggulan-Tahapan Lanjut UMKM Akademi PTP Implementation of Signature Program – Advanced Phase of PTP MSME Academy
PTP Peduli Lingkungan PTP Cares for Environment	• PTP Peduli Lingkungan - PTP Penanaman Mangrove • PTP Peduli Lingkungan - *Green Port* • PTP Cares for Environment – PTP Mangrove Planting • PTP Cares for Environment – Green Port
PTP Peduli Ekonomi PTP Cares for Economy	• PTP Peduli Ekonomi - PTP Perbaikan Sarana & Prasarana Sekolah • PTP Peduli Ekonomi - Cerdas Bersama PTP • Kolaborasi Program TJSL Pengembangan UMKM Binaan Pelindo • Program Pelindo *Day* 3 Kegiatan Pelindo Mengajar • PTP Cares for Economy - PTP School Facilities & Infrastructure Improvement • PTP Cares for Economy - Learn Smart with PTP • CSR Program Collaboration - Pelindo Partner MSME Development • Pelindo Day Program - Pelindo Teaching Activities
PTP Peduli Sosial PTP Cares for Social	• Peduli Bersama PTP - PTP Berbagi Takjil • Peduli Bersama PTP – PTP Berbagi Paket Sembako • Peduli Bersama PTP - Mudik Bersama PTP • Peduli Bersama PTP - PTP Berbagi Santunan Anak Yatim • Peduli Bersama PTP - Qurban Bersama PTP • Program Cegah *Stunting* • Peduli Bersama PTP – Donor Darah • Peduli Bersama PTP – Khitanan Masal • Peduli Bersama PTP – Pelatihan Inovasi Makanan Sehat Berbasis Ikan dan Rumpt Laut • PTP Cares Together - PTP Distributes Iftar Packages • PTP Cares Together - PTP Distributes Basic Food Packages • PTP Cares Together - Homecoming Travel with PTP • PTP Cares Together - PTP Shares with Orphans • PTP Cares Together - Qurban with PTP • Stunting Prevention Program • PTP Cares Together - Blood Donation • PTP Cares Together - Mass Circumcision • PTP Cares Together - Healthy Food Innovation Training Based on Fish and Seaweed

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DAMPAKNYA

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah disusun. Berikut uraian terkait realisasi kegiatan program Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan beserta dampak yang dihasilkan:

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES AND THEIR IMPACT

In 2024, the Company implemented activities based on the plans that had been previously established. The following outlines the realization of the Corporate Social Responsibility (CSR) program on Social and Community Development, along with the resulting impacts:

Nama Program Program Name	Deskripsi Kegiatan Activity Description	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Realisasi (Rp) Realization (Rp)
PTP Peduli Lingkungan PTP Cares for Environment			
PTP Peduli Lingkungan-PTP Penanaman Mangrove PTP Cares for Environment – PTP Mangrove Planting	Sebagai rangkaian Pelindo *Day* dan dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional serta sebagai bentuk kepeudulian terhadap lingkungan, SPMT Grup yang terdiri dari PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ptp Nonpetikemas), dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) melaksanakan penanaman 30.000 bibit mangrove di Sungai Undang, Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah. Aksi ini bekerja sama dengan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kahayan serta Kelompok Masyarakat Tani Lestari, bertujuan untuk menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, dan mendukung rehabilitasi lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) *Subholding* Pelindo *Group* dan telah memasuki tahun kedua, dengan harapan memberi dampak positif bagi lingkungan serta ekonomi masyarakat, khususnya melalui peningkatan hasil tangkapan laut. As part of the Pelindo Day series and in commemoration of National Maritime Day, as well as a form of environmental concern, the SPMT Group, comprising PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ptp Nonpetikemas), and PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), carried out the planting of 30,000 mangrove seedlings in the Undang River, Seruyan Hilir, Central Kalimantan. This initiative, in collaboration with the Kahayan Watershed and Protected Forest Management Center and the Lestari Farmers Community Group, aims to preserve coastal ecosystems, prevent erosion, and support environmental rehabilitation. The activity is part of the Pelindo Group Subholding's collaborative Social and Environmental Responsibility (CSR) program and has entered its second year, with hopes of generating a positive impact on both the environment and the local economy, particularly by boosting marine catch yields.	23 September 2024 September 23, 2024	46.495.300
PTP Peduli Lingkungan-*Green Port* PTP Cares for Environment – Green Port	Sebagai bentuk keberlanjutan Perusahaan dalam peduli lingkungan *Greenport*, Perusahaan berkolaborasi dalam kegiatan penghijauan lingkungan bertema "Pelindo Hijau *Green Belt*" yang diadakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Tanjung Priok dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Camat Kelapa Gading, Pelindo Muda, serta pengguna jasa Pelabuhan. Sebagai bagian dari acara, Perusahaan secara simbolis menyerahkan implementasi program *Greenport* kepada Pelindo *Group* dan *Communitree*, yang diwakili oleh PT Daisy Mutiara Samudra. Kegiatan ini merupakan keberlanjutan program pada tahun sebelumnya dan sebagai komitmen Perusahaan yang *sustainable* dalam menciptakan lingkungan operasi yang ramah lingkungan melalui pengurangan polusi udara dan emisi karbon dari aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok. As part of the Company's ongoing commitment to environmental sustainability through the Greenport initiative, the Company collaborated in an environmental greening activity themed "Pelindo Hijau Green Belt" organized by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Tanjung Priok Branch, in celebration of the 79th Anniversary of the Republic of Indonesia. The event was attended by the Head of Kelapa Gading Subdistrict, Pelindo Muda, and port service users.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	28.881.947

Nama Program Program Name	**Deskripsi Kegiatan** Activity Description	**Waktu Pelaksanaan** Execution Time	**Realisasi (Rp)** Realization (Rp)
	As part of the event, the Company symbolically handed over the implementation of the Greenport program to the Pelindo Group and Communitree, represented by PT Daisy Mutiara Samudra. This activity continues the previous year's program and reaffirms the Company's sustained commitment to fostering an environmentally friendly operational environment by reducing air pollution and carbon emissions from activities at Tanjung Priok Port.		
PTP Peduli Ekonomi PTP Cares for Economy			
PTP Peduli Ekonomi-PTP Perbaikan Sarana & Prasarana Sekolah PTP Cares for Economy - PTP School Facilities & Infrastructure Improvement	PT Pelabuhan Tanjung Priok memberikan bantuan sarana dan prasaran kepada Rumah Autis di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang terkena dampak dari intensitas curah hujan yang lebat dan angin kencang yang terjadi di wilayah Jabodetabek pada tanggal 18 April 2024 hingga merobohkan Rumah Autis tersebut. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kenyamanan kegiatan pelayanan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. PT Pelabuhan Tanjung Priok memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Yayasan Al Ihsan yang beralamat Jl. Al-Ihsan No. 1 (KOMP. BBD) Kelapa Gading Jakarta Utara bantuan ini bertujuan untuk mendukung fasilitas belajar mengajar, yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024. PT Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan kepeduliannya terhadap teman-teman berkebutuhan khusus dengan merayakan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2024. Melalui momentum ini PT Pelabuhan Tanjung Priok memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti media pembelajaran digital, seragam sekolah, dan paket peralatan sekolah yang dilaksanakan pada 18 Desember 2024 di Yayasan Rumah Autis Tanjung Priok. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dukungan Perusahaan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas yang dimulai dari masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan. PT Pelabuhan Tanjung Priok provided infrastructure assistance to Rumah Autis in Gunung Putri District, Bogor Regency, which was severely affected by heavy rainfall and strong winds across the Greater Jakarta area (Jabodetabek) on April 18, 2024, resulting in the collapse of the facility. This support aims to restore comfort in delivering educational services for children with special needs. PT Pelabuhan Tanjung Priok also extended infrastructure assistance to Yayasan Al Ihsan, located at Jl. Al-Ihsan No. 1 (KOMP. BBD), Kelapa Gading, North Jakarta. The aid, provided on November 18, 2024, is intended to support and enhance the foundation's teaching and learning facilities. Demonstrating its commitment to inclusivity, PT Pelabuhan Tanjung Priok commemorated the International Day of Persons with Disabilities on December 3, 2024. On this occasion, PT Pelabuhan Tnajung Priok donated educational facilities such as digital learning tools, school uniforms, and school supply packages on December 18, 2024, at Rumah Autis Tanjung Priok Foundation. This initiative reflects the Company's concrete support for the empowerment of persons with disabilities, beginning with communities surrounding its operational area.	18 April 2024, 18 November 2024, dan 18 Desember 2024 April 18, 2024, November 18, 2024, and December 18, 2024	30.791.200

Nama Program Program Name	Deskripsi Kegiatan Activity Description	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Realisasi (Rp) Realization (Rp)
PTP Peduli Ekonomi-Cerdas Bersama PTP PTP Cares for Economy - Learn Smart with PTP	Berdasarkan Rencana Kerja Manajemen (RKM) PT Pelabuhan Tanjung Priok terkait implementasi program TJSL Cerdas Bersama PTP, Perusahaan memberikan bantuan biaya pendukung pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya penyelesaian pendidikan dan berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan kepada Sdr. Amelia Widiyanti, mahasiswa aktif di Telkom University. Program ini dimulai sejak September 2023 hingga tahun 2025 dan dibayarkan dalam 5 (lima) tahap setiap 6 bulan. Penyaluran, pelaksanaan, dan monitoring program dilakukan bekrja sama dengan pihak independen, hingga akhir tahun 2024 pemberian bantuan telah mencapai tahap III. Based on the Management Work Plan (RKM) of PT Pelabuhan Tanjung Priok for the implementation of the Learn Smart with PTP CSR program, the Company provides educational support funding to outstanding university students who face financial difficulties in completing their studies and come from underprivileged families. Assistance was granted to Ms. Amelia Widiyanti, an active student at Telkom University. The program commenced in September 2023 and will run through 2025, with payments disbursed in 5 (five) installments every six months. The distribution, implementation, and monitoring of the program are conducted in collaboration with an independent third party. By the end of 2024, the program had reached its third installment.	September 2023 hingga tahun 2025 September 2023 to 2025	29.200.000
Kolaborasi Program TJSL Pengembangan UMKM Binaan Pelindo CSR Program Collaboration - Pelindo Partner MSME Development	Perusahaan bersama Pelindo *Group* mendukung program pemerintah melalui kolaborasi pembiayaan tenant "*Local Pride Spot*", di Pelindo Tower yang diresmikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pada Maret 2024. Tempat ini berfungsi sebagai wadah untuk memamerkan produk unggulan UMK dari seluruh Indonesia, seperti kain tradisional, perhiasan etnik, dan kuliner khas, serta bertujuan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Inisiatif ini juga mendukung pertumbuhan UMK melalui kurasi, seleksi, pelatihan, dan pameran nasional, dengan tujuan akhir mendorong ekspor produk lokal. The Company, together with Pelindo Group, supports the government's program through a collaborative financing initiative for the "Local Pride Spot" tenant at Pelindo Tower, which was inaugurated by PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) in March 2024. This venue serves as a platform to showcase outstanding MSMEs products from across Indonesia, such as traditional textiles, ethnic jewelry, and local culinary delights. It aims to expand market reach and boost sales. This initiative also supports MSME growth through curation, selection, training, and national exhibitions, with the ultimate goal of promoting the export of local products.	4 Maret 2024 March 4, 2024	9.621.619
Program Pelindo *Day* 3 Kegiatan Pelindo Mengajar Pelindo Day 3 Program - Pelindo Teaching Activities	PT Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan program Pelindo Mengajar di SMAN 8 Medan pada 13 September 2024, sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan rangkaian kegiatan Pelindo Day 3. Program bertema "*Empowering Youth for A Stronger Nation*" ini diikuti oleh 15 siswa dan bertujuan memperkenalkan industri kepelabuhan serta prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) kepada generasi muda. Direktur Utama Indra Hidayat Sani sebagai pengajar atau narasumber, memberikan wawasan tentang sektor logistik dan peran penting pelabuhan dalam perekonomian, sambil mendorong para siswa memahami peluang karier di industri tersebut. Pada kegiatan ini Perusahaan memberikan Bantuan Penunjang Pendidikan kepada SMAN 8 Medan, termasuk juga bantuan TIK dan bantuan alat belajar untuk siswa berprestasi.	13 September 2024 September 13, 2024	67.879.150

Nama Program Program Name	**Deskripsi Kegiatan** Activity Description	**Waktu Pelaksanaan** Execution Time	**Realisasi (Rp)** Realization (Rp)
	Penyelenggaraan kegiatan ini berkolaborasi dengan pihak terkait seperti para Pendidik SMAN 8 Medan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. PT Pelabuhan Tanjung Priok organized the Pelindo Mengajar (Pelindo Teaching) program at SMAN 8 Medan on September 13, 2024, as part of the Company's Social and Environmental Responsibility (CSR) initiative and the series of activities under Pelindo Day 3. Themed "Empowering Youth for a Stronger Nation," the program was attended by 15 students and aimed to introduce the port industry and the principles of ESG (Environmental, Social, Governance) to the younger generation. President Director Indra Hidayat Sani served as the instructor or speaker, sharing insights on the logistics sector and the vital role of ports in the economy, while encouraging students to explore career opportunities in the industry. During the event, the Company provided Educational Support Assistance to SMAN 8 Medan, which included IT equipment and learning tools for outstanding students. The program was carried out in collaboration with relevant parties, including the teaching staff of SMAN 8 Medan and the Head of the Medan City Education Office.		
PTP Peduli Sosial PTP Peduli Sosial			
PTP Peduli Sosial-PTP Berbagi Takjil PTP Cares Together - PTP Distributes Iftar Packages	Berbagi Takjil dan Sembako Gratis menjadi salah satu program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh PTP Terminal Nonpetikemas berupa kegiatan membagikan makanan dan minuman berbuka dan pemberian paket sembako gratis di lingkungan kerja perusahaan. Pembagian Takjil dan paket Sembako Gratis diberikan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan, Petugas Kebersihan Lapangan Operasional, Sopir Truck dan Personil Operasional yang masih bertugas di wilayah operasi menjelang waktu berbuka. Program Sembako Gratis tidak hanya menyasar kepada para pekerja, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Terdapat total jumlah 150 (seratus lima puluh) paket takjil, melibatkan peran aktif pegawai. Sharing Iftar Foods sand Basic Food supplies become annual program held by PTP Terminal Nonpetikemas in the form of Iftar foods and drinks and basic food supplies disrtribution accross the Company environment. Iftar foods and basic food supplies were distributed to Port Loading and Unloading Workforce (TKBM), Field Operational Cleaning staffs, Truck Drivers and Operational personnel that are in operations around Iftar time. The Free Food Supplies are not only targeting employees, but also communities surrounding the Company operational area. There were 150 (one hundred and fifty) iftar packages, involving employees active participations.	15 Maret 2024 Bulan Ramadhan 1445H March 15, 2024 Ramadhan 1445 H	15.354.000
PTP Peduli Sosial-PTP Berbagi Sembako PTP Cares Together - PTP Distributes Basic Food Packages	Sepanjang bulan Ramadhan 1454H, PT Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan program Pelindo Berbagi Ramadhan 2024 yang merupakan arahan dari Holding. Pada Program ini, PT Pelabuhan Tanjung Priok melibatkan peran serta karyawan (*employee social responsibility*). Throughout Ramadhan 1454H, PT Pelabuhan Tanjung Priok performed Pelindo 2024 Ramadhan sharing even as directed by the Holding. In the Program, PT Pelabuhan Tanjung Priok also engaged employees in the implementation (employee social responsibility).	03 April 2024 April 03, 2024	105.000.000

Nama Program Program Name	Deskripsi Kegiatan Activity Description	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Realisasi (Rp) Realization (Rp)
PTP Peduli Sosial-Mudik Bersama PTP PTP Cares Together - Homecoming Travel with PTP	PT Pelabuhan Tanjung Priok berpartisipasi dalam program Mudik Gratis Pelindo Group Tahun 2024. Program mudik ini diikuti oleh seluruh Subholding dan Anper PT Pelindo Group dengan target 7.300 pemudik. PT Pelabuhan Tanjung Priok menyediakan angkutan mudik sebanyak 3 bus dengan jumlah 150 pemudik tujuan Jakarta-Purwokerto PP. Kegiatan ini melibatkan peran aktif karyawan sebanyak 10 orang PT Pelabuhan Tanjung Priok participated in the Free Homecoming Pelindo Group in 2024. The Homecoming program involvlled all Subholding and Anper PT Pelindo Group targeting 7,300 travelers. PT Pelabuhan Tanjung Priok provided 3 buses with total 150 travelers Jakarta-Purwokerto round trip. The activitiy involved active participations from 10 employees.	4 April 2024 April 4, 2024	149.110.400
PTP Peduli Sosial-PTP berbagi Santunan Anak Yatim PTP Cares Together - PTP Shares with Orphans	Sebagai bentuk rasa Syukur PT Pelabuhan Tanjung Priok pada HUT ke-10, Perusahaan menyelenggarakan program PTP Peduku Sosial dengan memberikan santunan kepada 360 anak yatim dan piatu di seluruh wiklayah operasi Perusahaan, kegiatan ini melibatkan peran aktif karyawan atau *Employee Social Responsibility* (ESR). As a form of gratitude on its 10th anniversary, PT Pelabuhan Tanjung Priok organized the PTP Cares for Social program by providing donations to 360 orphans across all of the Company's operational areas. This activity involved the active participation of employees through the Employee Social Responsibility (ESR) initiative.	3 April 2024 dan 1 November 2024 April 3, 2024 and November 1, 2024	14.600.000
PTP Peduli Sosial-Qurban bersama PTP PTP Cares Together - Qurban with PTP	PT Pelabuhan Tanjung Priok melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengadakan kegiatan "Qurban Bersama PTP Idul Adha 1445H" yang serentak dilaksanakan diseluruh wilayah operasi PTP Nonpetikemas yaitu, Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Panjang, Palembang, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pandan, Pangkalbalam, Teluk Bayur, dan Pontianak dengan total pendistribusian hewan qurban sebanyak 21 ekor sapi qurban, kegiatan ini melibatkan peran aktif pegawai. Through its Social and Environmental Responsibility (CSR) program, PT Pelabuhan Tanjung Priok also conducted the "Qurban with PTP for Eid al-Adha 1445H" initiative, held simultaneously across all PTP Nonpetikemas operational areas, including Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Panjang, Palembang, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pandan, Pangkalbalam, Teluk Bayur, and Pontianak with a total of 21 sacrificial cows distributed. This program was also carried out with the active involvement of employees.	10 Agustus 2024 August 10, 2024	778.170.000
Program Cegah *Stunting* Stunting Prevention Program	PT Pelabuhan Tanjung Priok berkolaborasi dengan Mahasiswa Tim KKN Universitas Diponegoro 2024 dalam melaksanakan program multidisplin pencegahan stunting di Desa Silirejo. Fokus kegiatan ini adalah edukasi dan penyuluhan mengenai gizi ibu dan anak, bahaya pernikahan dini, pemilihan air layak konsumsi, serta pembuatan makanan bergizi seperti nugget ikan lele. Program ini juga menyertakan edukasi perencanaan anggaran rumah tangga untuk mendukung pencegahan *stunting*. Melalui langkah sederhana ini, Perusahaan berharap dapat terus mendukung program pemerintahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip "Gizi Seimbang, Anak Gemilang". PT Pelabuhan Tanjung Priok collaborated with the 2024 Community Service Program (KKN) Student Team from Diponegoro University to implement a multidisciplinary stunting prevention program in Silirejo Village.	10 Agustus 2024 August 10, 2024	1.908.000

Nama Program Program Name	**Deskripsi Kegiatan** Activity Description	**Waktu Pelaksanaan** Execution Time	**Realisasi (Rp)** Realization (Rp)
Program Cegah *Stunting* Stunting Prevention Program	The program focused on education and outreach regarding maternal and child nutrition, the dangers of early marriage, selection of safe drinking water, and the preparation of nutritious foods such as catfish nuggets. It also included education on household budgeting to support stunting prevention efforts. Through these simple initiatives, the Company aims to continue supporting government programs that raise public awareness and promote the principle of "Balanced Nutrition, Excellent Children.	10 Agustus 2024 August 10, 2024	1.908.000
PTP Peduli Sosial-Donor Darah PTP Cares Together - Blood Donation	Perusahaan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat menyelenggarakan PTP Peduli Sosial melalui kegiatan Donor Darah pada tanggal 22 Oktober 2024 di Gedung Pelindo Tower Lt. 5 Ball Room. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 200 kantong darah dan melibatkan peran aktif karyawan tidak hanya sebagai petugas program melainkan sebagai pendonor aktif. The Company also collaborated with the Indonesian Red Cross (PMI) Central Jakarta to organize a PTP Social Care blood donation event on October 22, 2024, at the Ballroom, 5th Floor, Pelindo Tower. This activity successfully collected 200 bags of blood and involved the active participation of employees not only as program staff but also as regular donors.	22 Oktober 2024 October 22, 2024	14.512.600
PTP Peduli Sosial-Khitanan Masal PTP Cares Together - Mass Circumcision	Sunatan Massal PT Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan dengan kolaborasi antara Pusat Pengembangan Dakwah Islam (PPDI Maziska), DPC Serikat Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdivisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan infaq dan shodaqoh Pegawai yang dikelola oleh PPDI Marizka PT Pelabuhan Tanjung Priok yang secara rutin disalurkan dalam bentuk bantuan kegiatan keagamaan. Pada tahun ini, TJSL turur berkontribusi dalam pendanaan programnya. Kegiatan ini diselenggarakan di dua lokasi yaitu Tanjung Priok dan Teluk Bayur dengan jumlah peserta sebanyak 200 anak. The Mass Circumcision Program organized by PT Pelabuhan Tanjung Priok is an annual event held in collaboration with the Islamic Da'wah Development Center (PPDI Maziska), the PT Pelabuhan Tanjung Priok Workers' Union Branch (DPC), and the Corporate Social and Environmental Responsibility Subdivision of PT Pelabuhan Tanjung Priok. This initiative reflects the Company's commitment to managing employee infaq and shodaqoh contributions, which are administered by PPDI Marizka PT Pelabuhan Tanjung Priok and regularly distributed in support of religious activities. This year, the CSR division also contributed to the program's funding. The event took place at two locations, Tanjung Priok and Teluk Bayur, with a total of 200 child participants.	18 Desember 2024 December 18, 2024	7.752.025
PTP Peduli Sosial-Pelatihan Inovasi Makanan Sehat Berbasis Ikan dan Rumput Laut PTP Cares Together - Healthy Food Innovation Training Based on Fish and Seaweed	Dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional, Perusahaan menggelar pelatihan "Inovasi Makanan Sehat Berbasis Ikan dan RUmput Laut untuk Keluarga Sehat Sejahtera dengan Tema: Perempuan Berdaya, Indonesai Maju. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh ibu-ibu Kader Berseri RW 08 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing yang merupakan istri-istri para nelayan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024. Tujuan sebagai SDGs: Bentuk dukungan Perusahaan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-1 Menghapus Kemiskinan, ke-3 Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, ke-4 Pendidikan Berkualitas, ke-5 Kesetaraan Gender, dan ke-12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab.	20 Desember 2024 December 20,2024	74.519.639

Nama Program Program Name	Deskripsi Kegiatan Activity Description	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Realisasi (Rp) Realization (Rp)
PTP Peduli Sosial-Pelatihan Inovasi Makanan Sehat Berbasis Ikan dan Rumput Laut PTP Cares Together - Healthy Food Innovation Training Based on Fish and Seaweed	To commemorate National Mother's Day, the Company organized a training program titled "Innovation in Healthy Foods Based on Fish and Seaweed for a Healthy and Prosperous Family" with the theme: Empowered Women, Advancing Indonesia. The event was held on December 20, 2024, and involved the Kader Berseri mothers from RW 08, Kalibaru Sub-district, Cilincing District, who are predominantly wives of local fishermen. This initiative aimed to support the achievement SDGs, particularly, SDG 1: No Poverty, SDG 3: Good Health and Well-being, SDG 4: Quality Education, SDG 5: Gender Equality, and, SDG 12: Responsible Consumption and Production.	20 Desember 2024 December 20,2024	74.519.639

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Perseoan memiliki kebijakan untuk mempekerjakan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya masyarakat lokal di wilayah operasional sebagai bentuk pemenuhan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan. Melalui upaya tersebut Perusahaan berharap dapat membangun hubungan yang harmonis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pertumbuhan usaha.

UTILIZATION OF LOCAL WORKFORCE

The Company upholds a policy of employing Indonesian citizens (WNI), particularly local communities in operational areas, as part of its commitment to Social and Community Development Responsibility. Through this initiative, the Company seeks to foster harmonious relations and enhance community welfare in parallel with business growth.

PROGRAM UNGGULAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

UMKM Akademi

Pada tahun 2024, Perusahaan secara *sustain* terus melanjutkan tahapan program UMKM Akademi PTP sesuai dengan *Roadmap* Program Unggulan CSR. Program yang telah dimulai pada tahun 2023 ini merupakan inisiatif unggulan dari PT Pelabuhan Tanjung Priok yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan kewirausahaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan agar mampu berwirausaha secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pada tahun 2023, penerima manfaat (*batch* 1) melaksanakan tahapan Fase 1 yaitu Pembibitan dengan tujuan membekali peserta dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk memulai usaha, dengan lokasi pelatihan di *Food Court* lantau 4 Pelindo Tower dengan produksi jus buah (Jus Mager). Sebagai tahapan lanjutan pada tahun 2024 peneriam manfaat (*batch* 1) mendapatkan program pada tahapan Fase 2 yaitu Pembinaan dengan lokasi pelatihan berada di Kios Jl. Swasembada Tanjung Priok, dan berlatih menjadi seorang manajer store pada penerimaan manfaat baru (*batch* 2 fase 1) yang melanjutkan program pembibitan baru.

Kegiatan ini juga melibatkan peran serta pegawai untuk *sharing* ilmu dan pengalaman dalam bidang pembuatan laporan keuangan, pengembangan usaha, pemasaran *digital* dan aksesbilitas platform *e-commerce*.

Program ini dapat memberikan dampak sosial yang dapat diukur melalui metode *Social Return on Investment* (SROI) untuk menghitung dampak sosial dari program ini. SROI adalah

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK'S SIGNATURE PROGRAM

MSME Academy

In 2024, the Company continued the implementation of the MSME Academy Program in line with the CSR Signature Program Roadmap. This program, launched in 2023, is a key initiative by PT Pelabuhan Tanjung Priok that focuses on entrepreneurial training and mentoring for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Its primary goal is to empower communities around the Company's operational areas to develop independent entrepreneurial skills, thereby improving their economic well-being.

In 2023, the beneficiaries (batch 1) entered Phase 1, Incubation, designed to equip participants with the fundamental skills required to start a business. Training was conducted at the Food Court, 4th Floor, Pelindo Tower, with a focus on juice production (under the brand "Jus Mager"). In 2024, the beneficiaries (batch 1) proceeded to Phase 2, Development, where training took place at kiosks on Jl. Swasembada Tanjung Priok. Here, participants were mentored to be store manager while supporting the new beneficiaries (Batch 2, Phase 1) entering the incubation phase.

The program also engaged employees who contributed their knowledge and experience in areas such as financial statements, business development, digital marketing, and e-commerce accessibility.

This program can generate measurable social impact through the Social Return on Investment (SROI) method, which calculates the social impact of the program. SROI is an approach measuring the

pendekatan yang mengukur nilai sosial yang dihasilkan oleh program sengan membandingkan investasi yang dilakukan dengan manfaat sosial yang dihasilkan.

Dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs, program UMKM Akademi PT Pelabuhan Tanjung Priok dapat berkontribusi pada point ke 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 dan 17 dalam tujuan SDGs. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan berwirausaha secara mandiri, program UMKM Akademi PT Pelabuhan Tanjung Priok dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat di sekitar PT Pelabuhan Tanjung Priok.

social value created by a program by comparing the investment made with the resulting social benefits.

In relation to achieving the SDGs, the MSME Academy program of PT Pelabuhan Tanjung Priok can contribute to Goals 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, and 17. In addition to improving the economic well-being of communities around PT Pelabuhan Tanjung Priok through independent entrepreneurship, the MSME Academy program also contributes to job creation and the empowerment of communities in the vicinity of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Inovasi

1. Pendekatan pemberdayaan seluruh rantai nilai UMKM dari hulu ke hilir;
2. Mengukur manfaat program menggunakan metode *Social Return On Investment* (SROI).

Visi

"Menjadikan Program CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan kepada seluruh *stakeholders* serta menjadi *benchmark* bagi perusahaan lain."

Misi

Tepat sasaran;
3. Efisien;
4. Efektif;
5. Tata kelola baik;
6. Kompetensi SDM unggul;
7. Kinerja CSR *professional*.

Innovation

1. Implement empowerment approach to the entire value chain of MSMEs from upstream to downstream;
2. Measuring program benefits using the Social Return on Investment (SROI) method

Vision

"To make the CSR Program of PT Pelabuhan Tanjung Priok a source of sustainable economic, social, and environmental value for all stakeholders, and a benchmark for other companies."

Mission

1. Targeted outcomes;
2. Efficiency;
3. Effectiveness;
4. Good governance;
5. Excellence in human capital competency;
6. Professional CSR performance.

ROADMAP UMKM AKADEMI

Pengembangan *Roadmap* program UMKM Akademi PT Pelabuhan Tanjung Priok diarahkan mulai dari pembibitan UMKM hingga Keberlanjutan UMKM. Hal ini dapat dilihat dalam bagan *Roadmap* program UMKM Akademi PT Pelabuhan Tanjung Priok berikut ini:

MSME ACADEMY ROADMAP

The development of the MSME Academy roadmap is directed from MSME incubation to MSME sustainability, as illustrated in the roadmap of PT Pelabuhan Tanjung Priok's MSME Academy Program:

Pembibitan UMKM MSME Incubation	**Pembinaan UMKM** MSME Coaching	**Pengembangan UMKM** MSME Development	**Keberlanjutan UMKM** MSME Sustainability
***Phase* 1**	***Phase* 2**	***Phase* 3**	***Phase* 4**
1. Pendidikan *Entrepreneurship* 2. Pelatihan Manajemen Usaha 3. Pelatihan Pemasaran Digital 4. Pelatihan Produksi 5. Pelatihan Optimasi *E-Commerce* 6. Praktik Usaha	1. Pembinaan Modal Bagi Usaha Skala Mikro 2. Akses ke Sumber Daya Modal Tahap 1 3. Konseling Operasional Usaha 4. *Coaching* Pengelolaan Modal Usaha Tahap 1 (Kepemilikan Tempat Usaha Mandiri)	1. Pembinaan Modal Bagi Usaha Skala Kecil 2. Akses ke Sumber Daya Modal Tahap 2 3. Akses Perizinan dan Legalitas Usaha 4. Konseling Kinerja Bisnis 5. *Coaching* Pengelolaan Modal Usaha Tahap 2 (Peningkatan Kapasitas Produksi dan Sumber Daya Manusia)	1. Pembinaan Modal Bagi Usaha Skala Menengah 2. Akses ke Sumber Daya Modal Tahap 3 3. Menjadi UMKM Binaan Perusahaan BUMN 4. Promosi Melalui *Event* dan Pameran UMKM Nasional 5. Konseling Peningkatan Skala Organisasi 6. *Coaching* Pengelolaan Modal Usaha Tahap 3 (Peningkatan keberlanjutan bisnis)

Pembibitan UMKM MSME Incubation	Pembinaan UMKM MSME Coaching	Pengembangan UMKM MSME Development	Keberlanjutan UMKM MSME Sustainability
***Phase* 1**	***Phase* 2**	***Phase* 3**	***Phase* 4**
1. Entrepreneurship Education 2. Business Management Training 3. Digital Marketing Training 4. Production Training 5. E-Commerce Optimization Training 6. Business Practice	1. Capital Support for Micro-Scale 2. Businesses Access to Capital Resources Phase 1 3. Operational Business Counseling 4. Coaching in Business Capital Management Phase 1 (Ownership of Independent Business Premises)	1. Capital Development for Small-Scale 2. Businesses Access to Capital Resources Phase 2 3. Access to Licensing and Business Legality 4. Business Performance Counseling 5. Coaching in Business Capital Management Phase 2 (Increasing Production Capacity and Human Resources)	1. Capital Development for MediumScale Businesses 2. Access to Capital Resources Phase 3 3. Becoming MSME Partner of StateOwned Enterprises 4. Promotion Through National MSME Events and Exhibitions 5. Counseling for Organizational Scale Improvement 6. Coaching in Business Capital Management Phase 3 (Enhancing Business Sustainability)

Penjabaran dari *Roadmap* UMKM program Akademi PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

1. Pembibitan UMKM (*Phase* 1)
   Pembibitan peserta UMKM Akademi merujuk pada proses pengembangan dan persiapan para peserta UMKM Akademi untuk terlibat dalam dunia usaha. Pembibitan UMKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengelola unit usaha. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
   a. Pendidikan *Entrepreneurship*
      Sebagai langkah awal untuk menjalankan sebuah usaha, dibutuhkan wawasan serta motivasi yang kuat sebagai seorang entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship membantu peserta UMKM Akademi dalam memahami esensi kewirausahaan, mengidentifikasi peluang, memiliki cara berpikir untuk berinovasi, meningkatkan motivasi sebagai seorang pemilik usaha, dan dapat mengambil serta mengelola risiko bisnis.
   b. Pelatihan Manajemen Usaha
      Pelatihan manajemen UMKM memiliki tujuan untuk memberikan para peserta UMKM Akademi keterampilan, pengetahuan, dan alat yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan manajemen UMKM juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.
   c. Pelatihan Pemasaran Digital
      Pelatihan pemasaran digital dilakukan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam memahami, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui *platform digital* dan *online* dengan tujuan agar dapat menjangkau *audiens* yang lebih luas, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan penjualan.
   d. Pelatihan Produksi
      Pelatihan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam memahami, mengembangkan, dan meningkatkan proses produksi barang atau layanan yang mereka tawarkan.
   e. Pelatihan Optimasi *E-Commerce*
      Pelatihan Optimasi *E-Commerce* dilakukan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam memahami dan mengimplementasikan strategi optimasi untuk

Explanation of the MSME Academy Program Roadmap of PT Pelabuhan Tanjung Priok is as follows:

1. MSME Incubation (Phase 1)
   The incubation of MSME Academy participants refers to the development and preparation process for MSME Academy participants to engage in the business world. The purpose of this phase is to equip participants with the knowledge, skills, and support needed to start and manage a business unit. The key steps include:
   a. Entrepreneurship Education
      As the initial step in starting a business, a strong foundation of knowledge and motivation as an entrepreneur is essential. Entrepreneurship education helps MSME Academy participants understand the essence of entrepreneurship, identify business opportunities, adopt an innovative mindset, enhance motivation as business owners, and develop the ability to take and manage business risks.
   b. Business Management Training
      The purpose of this training is to equip participants with the necessary skills, knowledge, and tools to manage their businesses more effectively and efficiently. It also aims to help them overcome common challenges faced by MSME entrepreneurs.
   c. Digital Marketing Training
      Digital marketing training is conducted to assist participants of the MSME Academy in understanding, implementing, and optimizing marketing strategies through digital and online platforms. The goal is to reach a wider audience, enhance brand visibility, and increase sales.
   d. Production Training
      Production training is a series of educational and practical activities designed to help MSME Academy participants understand, develop, and improve the production processes of the goods or services they offer.
   e. E-Commerce Optimization Training
      The training is designed to support MSME Academy participants in understanding and applying optimization strategies to improve the performance of their online

meningkatkan kinerja toko online mereka dengan tujuan memaksimalkan potensi penjualan serta meningkatkan konversi pelanggan.

f. Praktik Usaha
Praktik usaha adalah bentuk implementasi usaha setelah proses pendidikan dan pelatihan UMKM yang ditujukan agar peserta UMKM Akademi dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan ke dalam operasi bisnis sehari-hari dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Praktik Usaha merupakan langkah konkret untuk mengubah wawasan dan pengetahuan menjadi tindakan yang menghasilkan dampak nyata.

2. Pembinaan UMKM (*Phase* 2)
Setelah tahap pembibitan, dilakukan pembinaan kepada peserta UMKM Akademi untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Pembinaan UMKM Akademi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi bisnis. Adapun langkah- langkahnya sebagai berikut:
   a. Pembinaan Modal Bagi Usaha Skala Mikro
   Pembinaan modal bagi usaha skala mikro adalah rangkaian langkah dan dukungan yang ditujukan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam mengidentifikasi dan mengajukan permodalan dari berbagai sumber modal yang dapat mereka akses sesuai dengan ruang lingkup usaha skala mikro.
   b. Akses ke Sumber Daya Modal Tahap 1
   Dukungan akses ke sumber daya modal tahap 1 untuk unit usaha skala mikro mencakup berbagai bentuk bantuan dan layanan yang dilakukan untuk membantu peserta UMKM Akademi mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.
   c. Konseling Operasional Usaha
   Pada tahap ini, peserta UMKM Akademi akan menerima konseling dari mentor yang berfokus pada aspek operasional bisnis mereka. Ini bisa mencakup pengelolaan stok, manajemen persediaan, pencatatan penjualan, strategi harga, dan aspek-aspek operasional lainnya yang penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis.
   d. Pengelolaan Modal Usaha Tahap 1 (Kepemilikan Tempat Usaha Mandiri)
   Peserta UMKM Akademi akan mendapatkan bimbingan intensif terkait pengelolaan modal mereka. Fokusnya khusus pada bagaimana memanfaatkan modal untuk mengembangkan usaha, terutama peserta UMKM Akademi memiliki tempat usaha secara mandiri. Pengelolaan Modal Usaha Tahap 1 (satu) meliputi pengelolaan pembelian atau penyewaan tempat usaha, perawatan tempat usaha, dan pengelolaan biaya operasional.
3. Pengembangan UMKM (*Phase* 3)
Pengembangan UMKM merupakan langkah berikutnya setelah melalui tahap pembinaan. Pengembangan ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kinerja UMKM agar lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan pasar yang lebih luas.
   a. Pembinaan Modal Bagi Usaha Kecil
   Pembinaan modal bagi usaha kecil kepada peserta UMKM Akademi berfokus pada pembinaan terkait aspek modal bagi bisnis skala kecil. Prosesnya melibatkan pelatihan dan bimbingan tentang bagaimana mengelola modal dengan efisien, menghitung proyeksi keuangan, dan merencanakan penggunaan dana dengan bijak.

stores, with the goal of maximizing sales potential and increasing customer conversion rates.

f. Business Practice
Business practice is the implementation phase following the education and training process. It allows MSME Academy participants to apply the knowledge, skills, and concepts gained into their daily business operations to achieve better results and sustainable growth. This step is a concrete action to transform insights and knowledge into tangible impacts.

2. MSME Coaching (Phase 2)
Following the incubation stage, the participants of the MSME Academy undergo a coaching phase aimed at ensuring the growth and sustainability of their businesses. The MSME Academy development program consists of a series of activities designed to assist MSME Academy participants in overcoming challenges and unlocking their business potential. The following are the key components:
   a. Capital Development for Micro-Scale Enterprises
   Capital development for micro-scale enterprises is a series of steps and support aimed at helping MSME Academy participants identify and apply for funding from various accessible sources, appropriate to the scope of their micro-scale businesses.
   b. Access to Capital Resources Phase 1
   Access to capital resources stage 1 support for microscale business units encompasses various forms of assistance and services provided to help MSME Academy participants obtain the necessary capital to develop their businesses.
   c. Operational Business Counseling
   At this stage, MSME Academy participants receive counseling from mentors focused on the operational aspects of their businesses. It may include inventory management, stock control, sales recordkeeping, pricing strategies, and other essential operational elements to ensure efficiency and business sustainability.
   d. Coaching in Business Capital Management Phase 1 (Ownership of Independent Business Premises)
   MSME Academy participants will receive intensive coaching on managing their capital. The focus is specifically on how to utilize the capital to grow their business, particularly for those who own their business premises independently. Stage 1 Business Capital Management includes managing the purchase or rental of business premises, maintenance of the premises, and management of operational expenses.
3. MSME Development (Phase 3)
MSME Development is the next step after the development phase. This stage aims to scale and improve MSME performance to become more competitive, sustainable, and capable of facing broader market challenges.
   a. Capital Development for Small-scale Enterprises
   This component focuses on capital development for small-scale businesses among MSME Academy participants. It involves training and guidance on efficient capital management, financial projection, and wise financial planning.

b. Akses Ke Sumber Daya Modal Tahap 2
Dukungan akses ke sumber daya modal tahap 2 (dua) untuk unit usaha skala mikro mencakup berbagai bentuk bantuan dan layanan yang dilakukan untuk membantu peserta UMKM Akademi dalam mengidentifikasi dan mengajukan permodalan dari berbagai sumber modal yang dapat mereka akses sesuai dengan ruang lingkup usaha skala kecil.

c. Akses Perizinan dan Legalitas Usaha
Dukungan akses perizinan dan legalitas usaha berkaitan dengan membantu peserta UMKM Akademi dalam memperoleh dan memahami dokumen-dokumen regulasi terkait perizinan dan legalitas usaha, kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan bahwa bisnis memenuhi standar sesuai dengan regulasi dan izin usaha agar dapat tetap beroperasi.

d. Konseling Kinerja Bisnis
Konseling kinerja bisnis melibatkan analisis kinerja bisnis saat ini dan memberikan saran untuk peningkatan bisnis peserta UMKM Akademi. Konseling kinerja bisnis mencakup penilaian terhadap aspek operasional, keuangan, pemasaran, dan manajemen, serta membantu pemilik bisnis mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan.

e. *Coaching* Pengelolaan Modal Usaha Tahap 2 (Peningkatan Kapasitas Produksi dan Sumber Daya Manusia)
Setelah mendapatkan modal usaha tahap 2 (dua), pengelolaan modal berpindah fokus untuk tahap pengembangan yang lebih besar, yakni peningkatan kapasitas produksi, peningkatan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. *Coaching* pengelolaan modal usaha tahap 2 (dua) membantu peserta UMKM Akademi dalam merencanakan dan mengelola modal yang didapatkan untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dan sumber daya manusia.

4. Keberlanjutan UMKM (*Phase* 4)
Setelah melalui tahap pengembangan UMKM, upaya untuk mencapai keberlanjutan UMKM peserta UMKM Akademi menjadi sangat penting. Keberlanjutan bertujuan untuk memastikan UMKM dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan dan menghasilkan hasil positif dalam jangka panjang.

a. Pembinaan Modal Bagi Usaha Skala Menengah
Pembinaan modal bagi usaha skala menengah berfokus pada pembinaan yang lebih mendalam terkait modal untuk UMKM yang telah mencapai skala menengah. Pembinaan yang dilakukan melibatkan analisis keuangan yang lebih mendalam, perencanaan investasi jangka panjang, dan strategi pembiayaan yang lebih kompleks.

b. Akses Ke Sumber Daya Modal Tahap 3
Peserta UMKM Akademi akan diarahkan mencari modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan bisnis lebih lanjut. Akses ke sumber daya modal tahap 3 (tiga) melibatkan perluasan kemitraan dengan lembaga keuangan, investor, serta perusahaan BUMN lainnya yang mendukung program pendampingan UMKM Akademi.

c. Menjadi UMKM Binaan Perusahaan BUMN
Peserta UMKM Akademi akan menjadi UMKM binaan perusahaan BUMN. Kolaborasi antara UMKM Akademi dan perusahaan BUMN akan dapat memberikan peluang yang signifikan bagi peserta UMKM Akademi dalam akses ke sumber daya yang lebih banyak, pasar yang lebih besar, serta pelatihan dan pendampingan yang lebih baik.

b. Access to Capital Resources Phase 2
Phase 2 capital access support for small-scale business units includes various forms of assistance and services to help UMKM Academy participants identify and apply for funding from multiple sources suitable for the scope of small enterprises.

c. Access to Business Licensing and Legality
This support helps MSME Academy participants obtain and understand the regulatory documents required for licensing and legal compliance. It ensures that businesses meet the legal standards and possess the appropriate permits to operate lawfully.

d. Business Performance Counseling
Business performance counseling involves analyzing the current business performance and providing actionable advice to improve the operations of MSME Academy participants. It covers operational, financial, marketing, and managerial Assessments to help identify areas for enhancement.

e. Coaching in Business Capital Management Phase 2 (Increasing Production Capacity and HumanResources)
After obtaining business capital in phase 2, the focus of capital management shifts to a larger development stage, particularly increasing production capacity, improving marketing, and developing human resources. Coaching for the management of business capital in stage 2 (two) assists participants of the MSME Academy in planning and managing the capital acquired for the purpose of increasing production capacity and human resources.

4. MSME Sustainability (Phase 4)
After going through the MSME development phase, efforts to ensure the sustainability of MSME Academy participants become increasingly important. Sustainability aims to ensure that MSMEs can continue operating and generate positive outcomes in the long term.

a. Capital Development for Medium-Scale Businesses
Capital development for medium-scale enterprises focuses on more in-depth capital guidance for MSMEs that have reached a medium scale. This includes deeper financial analysis, long-term investment planning, and more complex financing strategies.

b. Access to Capital Resources Phase 3
MSME Academy participants will be directed to seek additional capital to support further business growth. Phase 3 (three) capital access involves expanding partnerships with financial institutions, investors, and other state-owned enterprises (SOEs) that support the MSME Academy mentoring program.

c. Becoming MSME Partner of State-Owned Enterprises
MSME Academy participants will become partner MSMEs under SOEs. This collaboration provides significant opportunities for access to greater resources, broader markets, and improved training and mentoring.

d. Promosi Melalui Event dan Pameran UMKM Nasional
Peserta UMKM Akademi berpartisipasi dalam event dan pameran UMKM nasional untuk mendapatkan eksposur yang lebih besar, membangun merek, serta menjalin koneksi dengan calon pelanggan dan mitra bisnis.

e. Konseling Peningkatan Skala Organisasi
Konseling peningkatan skala organisasi kepada peserta UMKM Akademi dilakukan untuk memperkuat pengelolaan manajemen internal dan struktur bisnis mereka, termasuk pengembangan tim manajemen yang kuat, sistem manajemen yang lebih canggih, dan peningkatan sistem operasional.

f. *Coaching* Pengelolaan Modal Usaha Tahap 3 (Peningkatan Keberlanjutan Bisnis)
Coaching pengelolaan modal usaha tahap 3 (tiga) dilakukan untuk peningkatan keberlanjutan bisnis peserta UMKM Akademi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan keuangan bisnis dengan strategi yang berkelanjutan dan berorientasi pada jangka waktu yang panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi, tumbuh, mandiri, dan memberikan nilai tambah dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Roadmap program unggulan ini akan diperbaharui secara berkala berdasarkan perkembangan dan kondisi terkini perusahaan.

Penghargaan dan Sertifikasi

Pada tahun 2024, Perusahaan belum mendapatkan penghargaan maupun sertifikasi terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Namun, Perusahaan tetap memegang teguh tanggung jawabnya dalam memberikan dampak baik untuk mempertahankan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Biaya

Perusahaan telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan. Berikut tabel uraian biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan:

d. Promotion Through National MSMEs Events and Exhibitions
MSME Academy participants will engage in national MSME events and exhibitions to gain broader exposure, build their brand, and connect with potential customers and business partners.

e. Counseling for Organizational Scale Improvement
Organizational scale-up counseling for MSME Academy participants is carried out to strengthen their internal management and business structure, including the development of a strong management team, more advanced management systems, and improved operational systems.

f. Coaching in Business Capital Management Phase 3 (Enhancing Business Sustainability)
Phase 3 (three) business capital coaching focuses on improving the sustainability of MSME Academy participants by managing resources and finances with sustainable and long-term strategies. The goal is to ensure the business continues to operate, grow, be independent, and provide long-term added value.

The signature program roadmap will be updated periodically based on the Company's latest developments and current conditions.

Awards and Certifications

As of 2024, the Company has not received any awards or certifications related to social and community development. However, the Company remains firmly committed to its responsibility to create a positive impact in order to maintain the trust of all stakeholders.

Costs

The Company has allocated a budget for the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) on Social and Community Development. The following table presents the details of expenses incurred by the Company:

Perihal Subject	**Realisasi Tahun 2024 (Rp)** Realization in 2024 (Rp)	**Realisasi Tahun 2023 (Rp)** Realization in 2023 (Rp)	**Kenaikan/Penurunan 2024-2023** Increase/Decrease 2024-2023
	1	**2**	**(1-2)/2**
Program TJSL dengan Metode SRoI CSR Programs with SRoI Method	437.614.560	-	-
PTP Penyusunan *Roadmap* Program Unggulan PTP Drafting of Featured Programs Roadmap	-	239.886.528	(100,00%)
PTP Peduli Lingkungan PTP Cares for Environment	75.377.247	267.463.510	(71,82%)
PTP Peduli Ekonomi PTP Cares for Economy	137.491.969	-	-
PTP Peduli Sosial PTP Cares for Social	650.483.776	-	-
PTP Peduli Pendidikan PTP Cares for Education	-	56.858.500	(100,00%)
PTP Peduli Kesehatan PTP Cares for Health	-	25.736.200	(100,00%)
PTP Peduli Sesama PTP Cares for Others	-	1.144.057.275	(100,00%)
Total	1.811.410.440	1.734.002.013	4,46%

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

PT Pelabuhan Tanjung Priok
dan entitas anaknya/ and its subsidiary

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2024 and
for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statements*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-88	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DAN ENTITAS ANAKNYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Indra Hidayat Sani
   Alamat kantor/*Office address* : Jl. Pelindo Tower Lt. 16, Jl. Yos Sudarso No 9, Koja, Jakarta Utara
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jalan Putri Tunggal Komplek Casa Soronsa No. 8, Harjamukti, Cimanggis, Depok
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Bambang Sakti
   Alamat kantor/*Office address* : Jl. Pelindo Tower Lt. 16, Jl. Yos Sudarso No 9, Koja, Jakarta Utara
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Tebet Utara II A / 37 RT 004/001 Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko/*Director of Finance, Human Resources and Risk Management*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
AND ITS SUBSIDIARY

We, the undersigned:

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary as of December 31, 2024 and for the year then ended.*

2. *The consolidated financial statements of the Company and its susbidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary, and*
   b. *The consolidated financial statements of the Company and its susbidiary do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*

4. *We are responsible for the Company and its subsidiary's internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2025/*April 30, 2025*



Indra Hidayat Sani
Direktur Utama/*President Director*

Bambang Sakti
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, & Manajemen Risiko/*Director of Finance, Human Resources and Risk Management*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Tanjung Priok ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025

The Shareholders and the Board of Commissioners and Directors
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Tanjung Priok (the "Company") and its subsidiary (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01171/2.1032/AU.1/06/0697-7/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

30 April 2025/*April 30, 2025*

01171

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	355.915.822	4,26a,27,28	541.815.204	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		5,27,28		*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	143.038.538	26b	1.985.085	*Related parties*
Pihak ketiga	25.143.950		76.615.921	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak berelasi	18.184.229	26c,27,28	16.171.279	*Related parties*
Aset kontrak		6,27,28		*Contract assets*
Pihak berelasi	12.523.309	26d	64.044.243	*Related parties*
Pihak ketiga	34.054.036		58.532.903	*Third parties*
Pajak dibayar di muka	15.277.966	17a	28.809.813	*Prepaid taxes*
Uang muka dan beban dibayar di muka	13.170.185	7	579.216	*Advances and prepaid expenses*
Total Aset Lancar	**617.308.035**		**788.553.664**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan	31.119.688	17e	23.451.523	*Deferred tax assets*
Investasi saham	3.860.000	8,27,28	3.860.000	*Investment in shares of stock*
Aset tetap - neto	216.867.342	9	211.356.841	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	4.719.415	10,26e	11.011.968	*Right-of-use assets - net*
Aset lain-lain - neto	21.626.460	11,26f	15.609.044	*Other assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	38.378.559	17c	-	*Estimated claim for tax refund*
Total Aset Tidak Lancar	**316.571.464**		**265.289.376**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**933.879.499**		**1.053.843.040**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK AND ITS SUBSIDIARY CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2024 (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		12,27,28		*Trade payables*
Pihak ketiga	12.836.057		6.817.975	*Third parties*
Utang lain-lain		13,27,28		*Other payables*
Pihak berelasi	226.484.003	26g	281.590.821	*Related parties*
Pihak ketiga	25.359.157		20.412.066	*Third party*
Liabilitas kontrak jangka pendek	1.868.869	14	866.229	*Short-term contract liabilites*
Uang titipan	9.478.655	15,26i,27,28	17.507.922	*Deposits from customers*
Beban akrual	211.263.205	16,26h,27,28	149.414.627	*Accrued expenses*
Utang pajak	2.206.252	17b	18.229.651	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	-	10,27,28,31	6.706.275	*Lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**489.496.198**		**501.545.566**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas kontrak jangka panjang	172.830	14	864.150	*Long-term contract liabilites*
TOTAL LIABILITAS	**489.669.028**		**502.409.716**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 100.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 25.000 saham	25.000.000	18	25.000.000	*Shared capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) Authorized - 100,000 shares Issued and fully paid - 25,000 shares*
Tambahan modal disetor	977	1c,19	977	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	144.815.520		136.912.557	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	274.393.974		389.519.790	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**444.210.471**		**551.433.324**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**933.879.499**		**1.053.843.040**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
Pendapatan operasi	1.470.387.490	21,26j,30	1.835.705.082	*Operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(1.345.471.507)	22,30	(1.512.369.196)	*Cost of revenue*
LABA BRUTO	**124.915.983**		**323.335.886**	***GROSS INCOME***
Beban umum dan administrasi	(171.954.384)	23	(122.170.157)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	2.338.320	24a	2.455.096	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(216.269)	24b	(338.224)	*Other operating expenses*
(RUGI) LABA USAHA	**(44.916.350)**		**203.282.601**	***(LOSS) INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	18.599.623	25a	20.255.114	*Finance income*
Beban keuangan	(498.461)	25b	(1.151.496)	*Finance costs*
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**(26.815.188)**		**222.386.219**	***(LOSS) INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(4.225.201)		(4.185.974)	*Final tax expense*
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**(31.040.389)**		**218.200.245**	***(LOSS) INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	(4.821.000)	17c,17d	(51.877.863)	*Current*
Tangguhan	7.668.165	17d,17e	(8.263.125)	*Deferred*
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	**(28.193.224)**		**158.059.257**	***(LOSS) INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain	-		-	*Other comprehensive income*
TOTAL (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(28.193.224)**		**158.059.257**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR***
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***(LOSS) INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	(28.193.224)		158.059.257	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	-		-	*Non-controlling interests*
	(28.193.224)		**158.059.257**	
(RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	(28.193.224)		158.059.257	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	-		-	*Non-controlling interests*
	(28.193.224)		**158.059.257**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2022		**25.000.000**	**-**	**186.912.557**	**231.460.533**	**443.373.090**	***Balance as of December 31, 2022***
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	1c,19	-	977	-	-	977	*Difference arising from business combination of entities under common control*
Pembagian dividen kas	20	-	-	(50.000.000)	-	(50.000.000)	*Distribution of cash dividend*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	158.059.257	158.059.257	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2023		**25.000.000**	**977**	**136.912.557**	**389.519.790**	**551.433.324**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian dividen kas	20	-	-	-	(79.029.629)	(79.029.629)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	20	-	-	7.902.963	(7.902.963)	-	*General reserve*
Total rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(28.193.224)	(28.193.224)	*Total comprehensive loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2024		**25.000.000**	**977**	**144.815.520**	**274.393.974**	**444.210.471**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	1.457.442.500		1.771.447.696	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(1.222.334.664)		(1.435.934.009)	*Payments to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(173.642.825)		(219.772.130)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(136.551.675)		(74.607.487)	*Payments for income taxes*
Penerimaan penghasilan bunga	18.599.623		20.255.114	*Receipts of interest income*
Pembayaran beban bunga dan keuangan lain	(49.649)		(129.468)	*Payments of interest and other financial charges*
Pembayaran untuk kegiatan operasional lain	(10.987.400)		(1.952.622)	*Payments for other operational activities*
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(67.524.090)**		**59.307.094**	***Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(32.190.577)		(87.808.827)	*Acquisitions of fixed assets*
Akuisisi entitas anak	-	1c	(675.707)	*Acquisitions of a subsidiary*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(32.190.577)**		**(88.484.534)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen kas	(79.029.629)	20,31	(99.500.000)	*Payments of cash dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	(7.155.086)	10,31	(10.526.515)	*Payments of lease liabilities*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(86.184.715)**		**(110.026.515)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(185.899.382)**		**(139.203.955)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**541.815.204**	4	**681.019.159**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**355.915.822**	4	**541.815.204**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Pelabuhan Tanjung Priok ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H., Mkn., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.76 Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H., Mkn, tanggal 14 Maret 2014 tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.10-17863 tanggal 13 Mei 2014.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo") dan Perusahaan mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Pelindo pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo setuju untuk memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Pelindo untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir melalui addendum II tanggal 27 Desember 2017 dimana Perusahaan dan Pelindo sepakat diantaranya untuk menghentikan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Pelindo Cabang Tanjung Priok (Catatan 29a).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 818 tanggal 29 September 2014, Perusahaan telah memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Berdasarkan Surat Direktur Utama Pelindo tanggal 29 November 2016, Perusahaan akan berperan sebagai operator terminal dengan mengelola kegiatan di terminal dan lini II (Catatan 29d).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and general information

PT Pelabuhan Tanjung Priok (the "Company") was established based on Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013. The Company's Article of Association have been amended, most recently based on Notarial Deed No.76 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, dated March 14, 2014 regarding changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved from the Ministry of Law and Human Rights through letter No. AHU-AH.01.10-17863 dated May 13, 2014.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo") and the Company entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of Pelindo on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, Pelindo agreed to provide the rights to the Company to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by Pelindo to perform port services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times, recently through addendum II dated December 27, 2017 whereas the Company and Pelindo agreed among others to cease the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Pelindo Tanjung Priok Branch (Note 29a).

Based on Decision of Minister of Transportation No. 818 dated September 29, 2014, the Company has been granted an operating permit as Port Operation Entity.

Based on the letter of the President Director of Pelindo dated November 29, 2016, the Company will be the terminal operator by operating activities in terminal and line II (Note 29d).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pelindo tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis Perusahaan di cabang pelabuhan Pelindo, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya (Catatan 29e).

Pada tanggal 16 Juli 2018, Perusahaan melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi (Catatan 29f).

Pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo mengadakan kerjasama optimalisasi pengoperasian kargo *multipurpose* di berbagai cabang pelabuhan milik Pelindo (Catatan 29g).

Pada tanggal 4 Januari 2022, Perusahaan dan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pengoperasian dan pemeliharaan terminal *multipurpose* (Catatan 29h).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Saham Pelindo pada Perusahaan kepada SPMT dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Pelindo kepada SPMT No. 2 tanggal 3 Januari 2022 dari Raj. SA. Rini Andrijani S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan seluruh saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000 kepada SPMT.

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Pengalihan saham tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company and general information (continued)

Based on Pelindo's Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, regulated the Company's business zonation in Pelindo port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation (Note 29e).

On July 16, 2018, the Company spins-off its container operation in Tanjung Priok port to PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), a related party (Note 29f).

On various date until December 31, 2021, the Company and Pelindo entered into a cooperation to handle multipurpose cargo in several port branches owned by Pelindo (Note 29g).

On January 4, 2022, the Company and PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) entered into a cooperation agreement regarding the operation and maintenance of multipurpose terminal (Note 29h).

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, currently, the Company activities are in container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

Based on Deed of Transfer of Rights of the Pelindo to SPMT in order Pelindo's Additional Participation Capital to SPMT No. 2 dated January 3, 2022 of notary Raj. SA. Rini Andrijani, S.H., notary in Jakarta, the shareholders of the Company agreed on the transfer of all the Company's shares owned by Pelindo amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000 to SPMT.

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. The transfer of shares has been notified to The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 November 2014.

Kantor Perusahaan berlokasi di Pelindo Tower, Lantai 16, Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas induk Perusahaan adalah SPMT dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Manajemen kunci dan informasi lainnya

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company and general information (continued)

The Company started its commercial activities on November 1, 2014.

The Company's office is located at Pelindo Tower, 16th floor, Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara, Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, the parent entity of the Company is SPMT and it's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Key management and other information

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Prakosa Hadi Takariyanto	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Lukijanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Dedy Cahyadi	*Commissioner*
Komisaris	Andi Hamdani	*Commissioner*
Direksi		*Directors*
Direktur Utama	Indra Hidayat Sani	*President Director*
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha	Dwi Rahmad Toto	*Commercial and Business Development Director*
Plt. Direktur Operasi	Dwi Rahmad Toto	*Act. Operation Director*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko	Bambang Sakti	*Financial, Human Resources and Risk Management Director*

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Ogi Rulino	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Lukijanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Marta Hadisarwono	*Commissioner*
Komisaris	Sabri Saiman	*Commissioner*
Direksi		*Directors*
Direktur Utama	Rino Wisnu Putro	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha	Rino Wisnu Putro	*Act. Commercial and Business Development Director*
Direktur Operasi	Dwi Rahmad Toto	*Operation Director*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Bambang Sakti	*Financial and Human Resource Director*

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen kunci dan informasi lainnya (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Key management and other information (continued)

The members of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***
Ketua/*Head*	Lukijanto	Lukijanto
Anggota/*Member*	Tony Utartono	Sugiarto
Anggota/*Member*	Hans Victor Stepu	Hans Victor Stepu

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki masing-masing sebesar 304 dan 320 karyawan (tidak diaudit). Karyawan tersebut merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Grup.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has a total of 304 and 320 employees (unaudited), respectively. These employees represent the employees of Pelindo which are assigned to the Group.

c. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki entitas anak dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

c. Subsidiary

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has subsidiary with effective percentage of ownership as follows:

Kepemilikan langsung:

Direct ownership:

Nama Perusahaan/ *Company name*	**Tempat kedudukan/ *Domicile***	**Kegiatan usaha/ *Nature of business activities***	**% Kepemilikan/*% Ownership***		**Tahun pendirian/ *Year of establishment***	**Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination***	
			31 Des/ *Dec 31, 2024*	**31 Des/ *Dec 31, 2023***		**31 Des/ *Dec 31, 2024***	**31 Des/ *Dec 31, 2023***
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*							
PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")	Surabaya	Jasa layanan bongkar muat/ *Cargo loading and unloading services*	100	100	2016	683.569	678.882

P3TPK

Berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., No. 99 dan 100 tanggal 28 April 2023, Perusahaan membeli saham P3TPK (sebelumnya PT Berlian Manyar Stevedore) dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), dengan total 500 saham atau 100% dari total saham P3TPK, dengan skema sebagai berikut:

- Penjualan dan pengalihan 495 saham yang dimiliki oleh TPS.
- Penjualan dan pengalihan 5 saham yang dimiliki oleh Kopelindo.

P3TPK

Based on Notary Deed Yatiningsih, SH., M.H., No. 99 and 100 dated April 28, 2023, the Company purchased shares of P3TPK (previously PT Berlian Manyar Stevedore) from PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) and the Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), with a total of 500 shares or 100% of the total P3TPK shares, with the following scheme:

- *Sale and transfer of 495 shares owned by TPS.*
- *Sale and transfer of 5 shares owned by Kopelindo.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

P3TPK (lanjutan)

TPS dan Perusahaan sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp668.949.930 (nilai penuh) untuk 495 saham. Kopelindo dan Perusahaan sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp6.757.070 (nilai penuh) untuk 5 saham.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada TPS dan Kopelindo pada tanggal 28 April 2023.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 (dahulu PSAK 38) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara aset neto yang dialihkan dengan imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiary (continued)

P3TPK (continued)

TPS and the Company agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp668,949,930 (full amount) for the 495 shares. Kopelindo and the Company agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp6,757,070 (full amount) for the 5 shares.

The Company has made payment of the shares transfer to TPS and Kopelindo on April 28, 2023.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 (formerly PSAK 38) "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference between the net assets transferred and the consideration paid by the Company is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Aset neto yang dialihkan	676.684	*Net assets transferred*
Imbalan yang dialihkan	675.707	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**977**	***Additional paid-in capital***

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidiasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2025. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

d. Completion of Consolidated Financial Statements

The Group's consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended were completed and authorized for issue on April 30, 2025 by the Company's Directors. The Company's Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2c dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI).

The consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2c.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that Group will continue to operate as a going concern.

b. Foreign currencies transactions and balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US$") adalah sebesar Rp16.162 (nilai penuh) (2023: Rp15.416 (nilai penuh)).

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 116: *Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik*

Amandemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual- penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: *Pengaturan Pembiayaan Pemasok*

Amandemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Foreign currencies transactions and balances (continued)

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

At December 31, 2024, the rate of exchange used for United States Dollar ("US$") 1 was Rp16,162 (full amount) (2023: Rp15,416 (full amount)).

c. Changes in accounting principles

Financial Accounting Standards Nomenclature

The revised nomenclature is reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for financial periods beginning on and after January 1, 2024.

Amendment of PSAK 116: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: *Pengaturan Pembiayaan Pemasok* (lanjutan)

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

d. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari investee,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements *(continued)*

The amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,

ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi Perusahaan dan entitas anaknya dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

e. Pengukuran nilai wajar

Grup mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

The Group re-assesses whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI, and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

e. Fair value measurement

The Group initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Fair value measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut: (lanjutan)

ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup mementukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risikonya, dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: (continued)

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115 (dahulu PSAK 72) "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", seperti yang diungkapkan dalam Catatan 21.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115 (formerly PSAK 72) "Revenue from Contracts with Customers", as disclosed in Note 21.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang).

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and contract assets.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the consolidated statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang). (lanjutan)

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada saham.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWLR.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments). (continued)

The Group's financial assets at FVOCI includes investment in shares of stock

The Group has no financial assets measured in FVTPL.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya.

Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss (ECL) for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha, dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 30 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang.

Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, uang titipan, liabilitas sewa, dan liabilitas kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account.

Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The group designates its financial liabilities as trade payables, other payables, accrued expenses, deposits from customers, lease liabilities, and contract liabilities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga.

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laporan laba rugi konsolidasian.

ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan lain-lain, beban akrual, uang titipan, liabilitas sewa, dan liabilitas kontrak dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing loans and borrowings.

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statement of profit or loss.

ii) Payables and accruals

Liabilities for trade and other payables, accrued expenses, deposits from customers, lease liabilities, and contract liabilities, are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 26.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

h. Transactions with related parties

The company and its subsidiary have transactions with related parties as defined in PSAK 224 (formerly PSAK 7) "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 26.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are third parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Beban ditangguhkan

Biaya-biaya tertentu, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, sehubungan dengan biaya perolehan yang tidak memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aset tetap, seperti diungkapkan pada Catatan 2k, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban-beban ini disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar – Aset lain-lain - neto" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya atau masa kontrak masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Seluruh aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Deferred expenses

Certain expenditures, which benefits extend over a period of more than one year, that do not fulfill the criteria to be recognized as fixed assets as disclosed in Note 2k, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method. These expenditures are presented as part of "Non-current Assets – Other assets - net" account in the consolidated statement of financial position.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited or the contract period of each expense using the straight-line method.

k. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

	Tahun/*Years*	
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20	*Port equipment*
Peralatan	4 - 25	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25	*Port facility installation*
Bangunan fasilitas pelabuhan	5 - 50	*Port facility building*
Jalan dan bangunan	10 - 40	*Roads and building*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Fixed assets (continued)

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Constructions in progress are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major repairs and maintenance is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

m. Perpajakan

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212 (dahulu PSAK 46) "Pajak Penghasilan".

Grup menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Impairment of non-financial assets (continued)

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

m. Taxation

Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scope out from PSAK 212 (formerly PSAK 46) "Income Tax".

The Group disclose final tax expense as separate item in the consolidated financial statements.

Current income tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interest and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expenses.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Grup telah menerapkan amandemen PSAK 212, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:
i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak,
ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendments to PSAK 212, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:
i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss,
ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

1. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

2. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

1. *here the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*
2. *in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.*

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak pertambahan nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kecuali:
1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value added tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of Value Added Tax (VAT) except:
1. *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
2. *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

n. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Perusahaan merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Perusahaan bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Perusahaan bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan jasa.

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "Aset Kontrak" pada laporan posisi keuangan.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perusahaan telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

The Company is an entity that operates in container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Revenues from an agency relationship are recorded based on the gross amount billed to the customers when the Company acts as principal in the sale of services. Revenues are recorded based on the net amount retained (the amount paid by the customer less amount paid to the suppliers) when, in substance, the Company has acted as agent and earned commission from the suppliers of the services sold.

At reporting date, revenue earned but not yet billed to customer are recorded as "Contract Assets" in the statement of financial position.

If a customer pays consideration before the Company transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company performs under the contract.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut ini:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa segera diakui dalam laba rugi.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

p. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.

Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;*
- *the stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. An expected loss on a service is recognized immediately in profit or loss.

Expenses recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

p. Segment information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Lease

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Rights-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar. (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah.

Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Lease (continued)

The Group as lessee (continued)

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets. (continued)

Lease liabilities (continued)

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value

Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

1. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
2. untuk diperdagangkan,
3. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lainnya diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

s. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup, namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 30 April 2025:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
4) cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

1. expected to be settled in the normal operating cycle,
2. held primarily for the purpose of trading,
3. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
4. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

s. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of April 30, 2025:

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup, namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 30 April 2025: (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

Amandemen PSAK 221: *Kekurangan Ketertukaran*

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut terhadap pelaporan keuangan Grup.

PSAK 117: *Kontrak Asuransi*

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 104: *Kontrak asuransi* berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of April 30, 2025: (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2025

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows. The amendments apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Earlier application is permitted which an entity is required to disclose that fact.

The Group is currently assessing the impact of the amendment on the Group's financial reporting.

PSAK 117: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidation financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee (continued)

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimate useful lifes of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2k. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan.

Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimate useful lifes of fixed assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2k. There is no change in the estimated useful life of fixed assets during the year.

Allowance for impairment of trade receivables

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information.

For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17c.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Perhitungan pajak penghasilan tangguhan diungkapkan dalam Catatan 17e.

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna selama 3 (tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 17c.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The calculation of deferred income tax is disclosed in Note 17e.

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lifes. Management estimates the useful lifes of these leased assets to be 3 (three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lifes and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: / *The details of cash and cash equivalents are as follows:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	56.182.296	71.579.488	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	30.697.799	30.451.159	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	-	347.108	*PT Bank Bukopin Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 26a)	119.035.727	89.437.449	*Related parties (Note 26a)*
Sub-total	205.915.822	191.815.204	*Sub-total*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 26a)	150.000.000	350.000.000	*Related parties (Note 26a)*
Total kas dan setara kas	**355.915.822**	**541.815.204**	***Total cash and cash equivalents***

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Suku bunga tahunan atas deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on time deposits are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Rupiah	6,56% - 7,60%	5,25% - 6,20%	*Rupiah*

Pendapatan bunga yang berasal dari kas di bank dan deposito berjangka disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Interest income from cash in bank and time deposits is presented as part of "Finance Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted to use at the reporting date.

5. PIUTANG USAHA - NETO / *5. TRADE RECEIVABLES - NET*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follows:*

a. Berdasarkan pelanggan / ***a. Based on customer***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak berelasi (Catatan 26b)	146.885.822	4.069.170	*Related parties (Note 26b)*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(3.847.284)	(2.084.085)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto	143.038.538	1.985.085	*Related parties - net*
Pihak ketiga	136.521.675	152.879.800	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(111.377.725)	(76.263.879)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	25.143.950	76.615.921	*Third parties - net*
Total piutang usaha - neto	**168.182.488**	**78.601.006**	***Total trade receivable - net***

b. Berdasarkan umur piutang / ***b. Based on age***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Belum jatuh tempo	158.318.078	51.866.318	*Current*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1 sampai 30 hari	5.250.458	6.055.170	*1 until 30 days*
31 sampai 60 hari	423.515	4.442.280	*31 until 60 days*
61 sampai 90 hari	1.804.266	2.287.827	*61 until 90 days*
91 sampai 180 hari	4.563.005	7.935.918	*91 until 180 days*
181 sampai 365 hari	25.981.418	13.627.605	*181 until 365 days*
Lebih dari 365 hari	87.066.757	70.733.852	*Over 365 days*
Sub-total	283.407.497	156.948.970	*Sub-total*
Penyisihan penurunan nilai	(115.225.009)	(78.347.964)	*Allowance for impairment*
Total piutang usaha - neto	**168.182.488**	**78.601.006**	***Total trade receivables - net***

Jatuh tempo piutang Perusahaan adalah 30 hari dari tanggal penerbitan tagihan.

The Company's due of receivables is 30 days from the date of invoice issuance.

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang / ***c. The movement in the allowance for impairment of receivables***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Saldo awal	78.347.964	80.524.852	*Beginning balance*
Penghapusan piutang	-	(10.149.268)	*Write-off of receivables*
Penyisihan tahun berjalan	36.877.045	7.972.380	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**115.225.009**	**78.347.964**	***Ending balance***

5. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan) / ***c. The movement in the allowance for impairment of receivables (continued)***

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Based on management's evaluation regarding collectability of each receivable account on December 31, 2024 and 2023, management believe that the allowances for impairment of trade receivables are adequate to cover for possible losses from uncollectible receivables.

Seluruh piutang usaha adalah dalam Rupiah.

All trade receivables are in Rupiah.

Piutang usaha tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Trade receivables were not used as collateral at reporting date.

6. ASET KONTRAK / *6. CONTRACT ASSETS*

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Rincian aset kontrak adalah sebagai berikut:

Contract assets represents receivables to customers for services which have been delivered by the Company, but not yet billed (unbilled receivable). Details of contract assets are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Pihak berelasi (Catatan 26d)	12.523.309	64.044.243	*Related parties (Note 26d)*
Pihak ketiga	34.054.036	58.532.903	*Third parties*
Total	**46.577.345**	**122.577.146**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset kontrak.

Based on the result of review for impairment at the end of the year, the management believe that there is no need for impairment of contract assets.

Aset kontrak tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Contract assets were not used as collateral at reporting date.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

Rincian uang muka dan beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

The details of advances and prepaid expenses are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Uang muka - pegawai	4.162.176	567.936	*Advances - employee*
Beban dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pemeliharaan	8.799.740	-	*Maintenance*
Asuransi	208.269	-	*Insurance*
Lain-lain	-	11.280	*Others*
Sub-total	9.008.009	11.280	*Sub-total*
Total	**13.170.185**	**579.216**	***Total***

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Uang muka - pegawai merupakan uang muka yang diajukan oleh pegawai cabang untuk kebutuhan operasional.

Beban dibayar di muka - pemeliharaan merupakan beban yang ditangguhkan atas perbaikan dermaga operasional milik Pelindo di cabang Jambi.

8. INVESTASI SAHAM

Investasi dalam saham merepresentasikan investasi di PT Akses Pelabuhan Indonesia (API).

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Modal dasar API sebesar Rp500.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp123.750.
- Perusahaan memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor API. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02 tanggal 27 April 2015.

Berdasarkan Akta tersebut, modal dasar API meningkat menjadi sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 35.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp90.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 8.910.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp89.100.000.
- Perusahaan memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 90.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (continued)

Advances - employees are advances proposed by the branch employee for operational needs.

Prepaid expenses – maintenance are deferred expenses for the repair of the operational dock owned by Pelindo at the Jambi branch.

8. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

Investment in shares of stock represents the investment in PT Akses Pelabuhan Indonesia (API).

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014.

The authorized capital of API is Rp500,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp125,000 with composition as follows:

- *PT Pelindo Solusi Logistik owns 99.00% or Rp123,750 constituted of 12,375 shares.*
- *The Company owns 1.00% or Rp1,250 constituted of 125 shares.*

Based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase API is authorized and paid-in capital. The Article of Association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02 dated April 27, 2015.

Based on the Deed, the authorized capital of API increased Rp350,000,000 which is divided into 35,000,000 shares with a Rp10,000 (full amount) par value per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp90,000,000 with composition as follows:

- *PT Pelindo Solusi Logistik owns 99.00% or Rp89,100,000 constituted of 8,910,000 shares.*
- *The Company owns 1.00% or Rp900,000 constituted of 90,000 shares.*

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor API. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta tersebut, modal dasar API meningkat menjadi sebesar Rp1.000.000.000 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp386.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 38.214.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp382.140.000.
- Perusahaan memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh API. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Berdasarkan Akta tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh API meningkat menjadi sebesar Rp805.760.000 yang terbagi atas 80.576.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp805.760.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik memiliki sebesar 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- Perusahaan memiliki sebesar 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

8. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK (continued)

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase API authorized and paid-in capital. The Article of Association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU- 0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on the Deed, the authorized capital of API increased Rp1,000,000,000 which is divided into 100,000,000 shares with a Rp10,000 (full amount) par value per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp386,000,000 with composition as follows:

- *PT Pelindo Solusi Logistik owns 99.00% or Rp382,140,000 constituted of 38,214,000 shares.*
- *The Company owns 1.00% or Rp3,860,000 constituted of 386,000 shares.*

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase API paid-in capital. The Article of Association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

Based on the Deed, the paid-in capital of API increased to Rp805,760,000 which is divided into 80,576,000 shares with a Rp10,000 (full amount) par value per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp805,760,000 with composition as follows:

- *PT Pelindo Solusi Logistik owns 99.52% or Rp801,900,000 constituted of 80,190,000 shares.*
- *The Company owns 0.48% or Rp3,860,000 constituted of 386,000 shares.*

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 18 November 2022 dari Notaris Ny.Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh API. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-81.AH.02.02 - Th. 2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Berdasarkan Akta tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh API meningkat menjadi sebesar Rp3.200.000.000 yang terbagi atas 320.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Akta tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh API meningkat menjadi sebesar Rp3.200.000.000 yang terbagi atas 320.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.845.760.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik memiliki sebesar 99,98% atau sebanyak 184.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.841.900.000.
- Perusahaan memiliki sebesar 0,02% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

8. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK (continued)

Based on Deed No. 35 dated November 18, 2022 of Notary Ny.Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase API paid-in capital. The Article of Association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-81.AH.02.02 - Th. 2011 dated October 12, 2011.

Based on the Deed, the paid-in capital of API increased Rp3,200,000,000 which is divided into 320,000,000 shares with a Rp10,000 (full amount) par value per share.

Based on the Deed, the paid-in capital of API increased Rp3,200,000,000 which is divided into 320,000,000 shares with a Rp10,000 (full amount) par value per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp1,845,760,000 with composition as follows:

- *PT Pelindo Solusi Logistik owns 99.98% or Rp1,841,900,000 constituted of 184,190,000 shares.*
- *The Company owns 0.02% or Rp3,860,000 constituted of 386,000 shares.*

9. ASET TETAP - NETO

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

9. FIXED ASSETS - NET

The movements in fixed assets are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ *Year Ended December 31, 2024*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Alat fasilitas pelabuhan	177.516.829	320.000	-	24.940.556	202.777.385	*Port equipment*
Peralatan	69.861.413	-	-	4.636.840	74.498.253	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	45.243.500	-	-	1.440.000	46.683.500	*Port facility installation*
Bangunan fasilitas pelabuhan	22.903.296	-	-	(8.082.416)	14.820.880	*Port facility building*
Jalan dan bangunan	-	-	-	8.935.596	8.935.596	*Roads and building*
Aset dalam penyelesaian	10.749.377	43.899.611	-	(38.816.027)	15.832.961	*Construction in progress*
Total	**326.274.415**	**44.219.611**	**-**	**(6.945.451)**	**363.548.575**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Alat fasilitas pelabuhan	(65.562.639)	(14.886.458)	-	-	(80.449.097)	*Port equipment*
Peralatan	(37.748.695)	(12.950.519)	-	-	(50.699.214)	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(10.089.732)	(2.620.010)	-	-	(12.709.742)	*Port facility installation*
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.516.508)	(489.047)	-	792.077	(1.213.478)	*Port facility building*
Jalan dan bangunan	-	(817.625)	-	(792.077)	(1.609.702)	*Roads and building*
Total	**(114.917.574)**	**(31.763.659)**	**-**	**-**	**(146.681.233)**	***Total***
Nilai tercatat neto	**211.356.841**				**216.867.342**	***Net carrying value***

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. FIXED ASSETS - NET (continued)

The movements in fixed assets are as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Alat fasilitas pelabuhan	154.288.052	3.804.526	-	19.424.251	177.516.829	*Port equipment*
Peralatan	67.967.740	1.144.118	-	749.555	69.861.413	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	43.124.470	2.119.030	-	-	45.243.500	*Port facility installation*
Bangunan fasilitas pelabuhan	14.782.100	43.793	-	8.077.403	22.903.296	*Port facility building*
Aset dalam penyelesaian	14.351.836	24.648.750	-	(28.251.209)	10.749.377	*Construction in progress*
Total	**294.514.198**	**31.760.217**	**-**	**-**	**326.274.415**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Alat fasilitas pelabuhan	(54.860.271)	(10.702.368)	-	-	(65.562.639)	*Port equipment*
Peralatan	(24.235.640)	(13.513.055)	-	-	(37.748.695)	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(7.729.851)	(2.359.881)	-	-	(10.089.732)	*Port facility installation*
Bangunan fasilitas pelabuhan	(235.215)	(1.281.293)	-	-	(1.516.508)	*Port facility building*
Total	**(87.060.977)**	**(27.856.597)**	**-**	**-**	**(114.917.574)**	***Total***
Nilai tercatat neto	**207.453.221**				**211.356.841**	***Net carrying value***

Seluruh beban penyusutan aset tetap dicatat pada beban pokok pendapatan (Catatan 22).

All depreciation expense of fixed assets recorded on cost of revenue (Note 22).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mengasuransikan aset tetap Perusahaan terhadap berbagai risiko pada PT Asuransi Ramayana dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp323.526.287 dan Rp300.593.580. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

On December 31, 2024 and 2023, the Company insured its fixed assets against various risks at PT Asuransi Ramayana with total insurance values of Rp323,526,287 and Rp300,593,580, respectively. Management believes that these amounts are sufficient to cover any possible losses related to the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap.

As of December 31, 2024 and 2023 based on a review on estimated useful lives, residual values, and methods of depreciation of fixed assets, the management believes that there were no change on useful lives, residual values and method of depreciation on all fixed assets.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tidak lancar lainnya - beban tangguhan sebesar Rp3.689.843 dan reklasifikasi aset tetap menjadi aset tidak lancar lainnya - beban tangguhan sebesar Rp3.255.608.

Reclassification as of December 31, 2024 includes reclassification of assets under construction into other non current assets - deferred expense amounting to Rp3,689,843 and reclassification of fixed asset to other non current assets - deferred expense amounting to Rp3,255,608.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that there was no impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

Aset tetap tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Fixed assets were not used as collateral at reporting date.

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *9. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Aset dalam penyelesaian terdiri dari: / *Construction in progress consists of:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Instalasi fasilitas pelabuhan	11.074.213	5.388.719	*Port facility installations*
Jalan dan bangunan	3.546.937	-	*Roads and building*
Alat fasilitas pelabuhan	1.211.811	3.875.581	*Port equipment*
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	1.485.077	*Port facility building*
Total	**15.832.961**	**10.749.377**	***Total***

Di bawah ini adalah persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024:

Below are the percentages of completion and estimated completion periods of the construction in progress as of December 31, 2024:

	Taksiran persentase penyelesaian/ *Estimated percentage of completion*	Taksiran jangka waktu penyelesaian/ *Estimated completion period*	
Jalan dan bangunan	95%	Mei/*May* 2025	*Roads and building*
Instalasi fasilitas pelabuhan	80%	Mei/*May* 2025	*Port facility installations*
Alat fasilitas pelabuhan	50%	Juni/*June* 2025	*Port equipment*

10. ASET HAK-GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA / *10. RIGHT-OF-USE ASSETS - NET AND LEASE LIABILITIES*

Grup memiliki kontrak sewa atas bangunan kantor yang digunakan untuk operasinya. Kontrak sewa ini memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun. Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The Group has lease contract for office building used in its operations. This contract lease has 3 (three) years of lease term. The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan	18.877.660	-	-	-	18.877.660	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	(7.865.692)	(6.292.553)	-	-	(14.158.245)	*Accumulated depreciation*
Nilai tercatat neto	**11.011.968**				**4.719.415**	***Net carrying value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan	19.109.709	-	(232.049)	-	18.877.660	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	(1.753.621)	(6.344.120)	232.049	-	(7.865.692)	*Accumulated depreciation*
Nilai tercatat neto	**17.356.088**				**11.011.968**	***Net carrying value***

10. ASET HAK-GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *10. RIGHT-OF-USE ASSETS - NET AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in consolidated statement of profit or loss are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban amortisasi aset hak-guna			*Amortization of right-of-use assets*
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	6.292.553	6.344.120	*Cost of revenue (Note 22)*
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 25b)	448.811	1.022.028	*Interest on lease liabilities (Note 25b)*

Pada tahun 2024, Grup memiliki total arus kas keluar untuk sewa sebesar Rp7.155.086 (2023: Rp10.526.515). / *In 2024, the Group had total cash outflows for leases of Rp7,155,086 (2023: Rp10,526,515).*

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut: / *Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Saldo awal	6.706.275	16.210.762	*Beginning balance*
Arus kas	(7.155.086)	(10.526.515)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	448.811	1.022.028	*Non-cash changes*
Total	**-**	**6.706.275**	***Total***

11. ASET LAIN-LAIN - NETO / *11. OTHER ASSETS - NET*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Beban ditangguhkan	27.749.374	17.097.870	*Deferred expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Akumulasi amortisasi (Catatan 22)	(7.322.914)	(2.688.826)	*Accumulated amortization (Note 22)*
Jaminan	1.200.000	1.200.000	*Guarantee*
Total	**21.626.460**	**15.609.044**	***Total***

Beban ditangguhkan terutama merupakan beban atas pemeliharaan alat berat dan sertifikasi yang diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. / *Deferred expenses mainly represent expenses for the maintenance of heavy equipment and certification which is amortized over the useful life.*

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, utang usaha terdiri dari utang kepada pihak ketiga, masing-masing senilai Rp12.836.057 dan Rp6.817.975.

As of December 31, 2024 and 2023, trade payables consisted of payables to third parties amounted to Rp12,836,057 dan Rp6,817,975.

Seluruh utang usaha adalah dalam Rupiah.

All trade payables are in Rupiah.

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

Rincian dari utang lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other payables are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Pihak berelasi (Catatan 26g)	226.484.003	281.590.821	*Related parties (Note 26g)*
Pihak ketiga	25.359.157	20.412.066	*Third party*
Total	**251.843.160**	**302.002.887**	***Total***

Utang lain-lain - pihak berelasi terutama merupakan utang konsesi, kompensasi, dan utang imbalan kerja kepada Pelindo.

Other payables - related parties mainly represents concession, royalty, and other payable of employee benefit to Pelindo.

Utang imbalan kerja kepada Pelindo merupakan biaya imbalan kerja atas karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan dan dialokasikan kepada Perusahaan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan.

Other payable of employee benefit to Pelindo represent employee benefit expenses for Pelindo's employee assigned to the Company and allocated to the Company based on the actuarial calculation performed by independent actuary, Actuarial Consultant Yusi dan Rekan.

Utang lain-lain - pihak ketiga merupakan beban akrual bonus dan tantiem direksi.

Other payable - third party represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

14. LIABILITAS KONTRAK / *14. CONTRACT LIABILITIES*

Rincian dari liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

The details of contract liabilities are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Liabilitas kontrak jangka pendek	1.868.869	866.229	*Short-term contract liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	172.830	864.150	*Long-term contract liabilities*
Total liabilitas kontrak	**2.041.699**	**1.730.379**	***Total contract liabilites***

15. UANG TITIPAN / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

Rincian dari uang titipan adalah sebagai berikut: / *The details of deposits from customers are as follows:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Pihak ketiga	6.761.726	15.743.673	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 26i)	2.716.929	1.764.249	*Related parties (Note 26i)*
Total	**9.478.655**	**17.507.922**	***Total***

Uang titipan - pihak ketiga terutama merupakan sisa uang pengguna jasa nonpetikemas dan jasa lainnya yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposits from customers - third party represents remaining deposits from customers for non-container services and other services which have not been settled to customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - pihak berelasi terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi, dan koperasi pegawai.

Deposits from customers – related parties mainly represents deposits from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance, and employee co-operative.

16. BEBAN AKRUAL / *16. ACCRUED EXPENSES*

Rincian dari beban akrual adalah sebagai berikut: / *The details of accrued expenses are as follows:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Kerjasama mitra usaha	109.268.085	74.066.264	*Partnership*
Pemeliharaan	62.468.746	24.650.901	*Maintenance*
Umum	25.128.534	36.329.760	*General*
Bahan	12.031.623	4.036.600	*Supplies*
Administrasi kantor	2.366.217	1.947.119	*Office administration*
Lain-lain	-	8.383.983	*Others*
Total	**211.263.205**	**149.414.627**	***Total***

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan biaya *sharing* dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terkait kegiatan bongkar muat (Catatan 29c).

Accrued expenses - partnership mainly represents sharing expenses in relation with Stevedoring Company (PBM) due to loading and unloading services (Note 29c).

Beban akrual - pemeliharaan terutama merupakan beban pemeliharaan alat-alat fasilitas pelabuhan, beban elektrikal, dan beban telekomunikasi.

Accrued expenses - maintenance mainly represents maintenance expenses of port facility tools, electrical expenses, and telecommunication expenses.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban konsesi dan beban imbalan pasca kerja.

Accrued expenses - general mainly represents accrued concession expenses and post-employment benefit expenses.

Beban akrual - bahan terutama merupakan biaya terkait biaya air dan bahan bakar untuk peralatan.

Accrued expenses - supplies mainly represents expenses related to water and fuels for equipment.

Beban akrual - administrasi kantor terutama merupakan biaya terkait jamuan rapat, biaya konsultan, dan biaya administrasi kantor lainya.

Accrued expenses - other mainly represents expenses related to feast meeting, consultant fee, and other office administration costs.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
PPN Masukan	14.200.230	22.365.580	*VAT In*
Lain-lain	1.077.736	6.444.233	*Other*
Total	**15.277.966**	**28.809.813**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 4 (2)	367.138	240.868	*Article 4 (2)*
Pasal 21	585.001	11.762.153	*Article 21*
Pasal 22	-	521	*Article 22*
Pasal 23	1.254.113	1.591.242	*Article 23*
Pasal 25	-	2.167.073	*Article 25*
Pasal 29	-	2.467.794	*Article 29*
Total	**2.206.252**	**18.229.651**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between (loss) income before corporate income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(31.040.389)	218.200.245	*(Loss) income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	4.686	3.675	*Income before corporate income tax of a subsidiary*
Jurnal eliminasi	-	(1.477)	*Elimination entries*
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(31.045.075)	218.198.047	*(Loss) income before corporate income tax expenses - the Company*
Saldo dipindahkan	(31.045.075)	218.198.047	*Balance brought forward*

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The reconciliation between (loss) income before corporate income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Saldo pindahan	(31.045.075)	218.198.047	*Balance carried forward*
Perbedaan temporer			*Temporary differences*
Imbalan kerja	33.004.370	25.647.428	*Employee benefits*
Bonus dan tantiem	6.447.435	(2.733.537)	*Bonus and tantiem*
Penyusutan aset tetap	(17.156.127)	(11.321.927)	*Depreciation of fixed asset*
Beban sewa	(770.974)	(3.160.368)	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	34.854.138	7.972.381	*Provision for impairment of receivables*
Perbedaan permanen			*Permanent differences*
Kesejahteraan karyawan dan beban lainnya	10.132.993	41.525.213	*Employee welfare and other expenses*
Promosi dan pemasaran	4.791.739	5.921.006	*Promotion and marketing*
Beban pajak	23.079.097		*Tax expenses*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(18.592.619)	(20.248.205)	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(22.831.339)	(25.991.568)	*Revenue subjected to final income tax*
Taksiran penghasilan kena pajak	**21.913.638**	**235.808.470**	***Estimated taxable income***
Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan	4.821.000	51.877.863	*Corporate income tax expense - current*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			*Less prepaid income tax:*
PPh pasal 23	23.263.398	28.846.532	*Income tax article 23*
PPh pasal 25	19.936.161	20.563.537	*Income tax article 25*
(Taksiran tagihan restitusi pajak)/Utang pajak penghasilan badan	**(38.378.559)**	**2.467.794**	***(Estimated claim for tax refund)/ Corporate income tax payable***

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / *c. Corporate income tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on income before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian	(31.040.389)	218.200.245	*(Loss) income before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	6.828.885	(48.004.054)	*Income tax expense calculated at applicable rate*
Perbedaan permanen			*Permanent differences*
Kesejahteraan karyawan, dan beban lainnya	(2.229.258)	(9.135.547)	*Employee welfare and other expenses*
Promosi dan pemasaran	(1.054.183)	(1.302.621)	*Promotion and marketing*
Beban pajak	(5.077.401)	-	*Tax expenses*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	4.090.376	5.718.145	*Revenue subjected to final income tax*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	5.022.895	4.454.600	*Finance income subject to final tax*
Penyesuaian	(4.734.149)	(11.871.511)	Adjustments
Manfaat (beban) pajak penghasilan	**2.847.165**	**(60.140.988)**	***Corporate income tax benefit (expense)***

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2024 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2024.

The calculation of estimated taxable income for the year 2024 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2024.

Penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Perusahaan tahun 2023.

The above taxable income for the year ended December 31, 2023 were already reported in its Annual Tax Return for the year 2032.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates and pays tax in the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time tax becomes due.

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

d. Rincian beban pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: / *The details of income tax expenses and final tax expenses are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pajak penghasilan badan			*Corporate income tax expense*
Beban pajak tahun berjalan	(4.821.000)	(51.877.863)	*Tax expenses for the year*
Manfaat (beban) pajak - tangguhan	7.668.165	(8.263.125)	*Income (expense) tax benefit - deferred*
Neto	**2.847.165**	**(60.140.988)**	***Net***

e. Pajak tangguhan / *Deferred taxes*

Perhitungan pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut: / *The computation of deferred income tax are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Penyisihan nilai piutang	17.701.985	7.667.910	(20.394)	25.349.501	*Provision impairment of receivables*
Penyusutan aset tetap	(4.413.490)	(3.774.348)	(3.982.827)	(12.170.665)	*Depreciation of fixed assets*
Bonus dan tantiem	4.490.654	1.418.436	166.639	6.075.729	*Bonus and tantiem*
Imbalan kerja	6.619.627	7.260.961	(977.193)	12.903.395	*Employee benefits*
Beban sewa	(947.253)	(169.614)	78.595	(1.038.272)	*Lease expense*
Total	**23.451.523**	**12.403.345**	**(4.735.180)**	**31.119.688**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Penyisihan nilai piutang	18.306.627	1.753.924	(2.358.566)	17.701.985	*Provision impairment of receivables*
Penyusutan aset tetap	(2.074.454)	(2.490.824)	151.788	(4.413.490)	*Depreciation of fixed assets*
Bonus dan tantiem	5.630.533	(601.378)	(538.501)	4.490.654	*Bonus and tantiem*
Imbalan kerja	10.103.914	(122.878)	(3.361.409)	6.619.627	*Employee benefits*
Beban sewa	(251.972)	(695.281)	-	(947.253)	*Lease expense*
Total	**31.714.648**	**(2.156.437)**	**(6.106.688)**	**23.451.523**	***Total***

18. MODAL SAHAM / *18. CAPITAL STOCK*

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of share ownership in the Company as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Pemegang saham / *Shareholders*	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah Modal Disetor/ *Total Paid-up Capital Stock*
PT Pelindo Multi Terminal	24.750	99,00%	24.750.000
PT Pelabuhan Indonesia Investama	250	1,00%	250.000
Total	**25.000**	**100,00%**	**25.000.000**

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., modal dasar Perusahaan berjumlah Rp100.000.000 yang terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25.000 saham dengan nilai nominal Rp25.000.000.

Based on Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., authorized shares of the Company amounted to Rp100,000,000 divided into 100,000 shares with a nominal amount of Rp1,000,000 (full amount) per share. Of the authorized shares, 25,000 shares have been issued and fully paid with nominal amount of Rp25,000,000.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya, yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam Perusahaan kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

Based on Shares Sales Purchase Deed No. 30 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all the shares owned, which are 250 shares in the Company to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) with a buying price of Rp16,549,000.

Berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Saham Pelindo pada Perusahaan kepada PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Pelindo kepada SPMT No. 2 tanggal 3 Januari 2022 dari Raj. SA. Rini Andrijani S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan seluruh saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000 kepada SPMT.

Based on Deed of Transfer of Rights of the Pelindo to SPMT in order Pelindo's Additional Participation Capital to PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) No. 2 dated January 3, 2022 of notary Raj. SA. Rini Andrijani, S.H., notary in Jakarta, the shareholders of the Company agreed on the transfer of all the Company's shares owned by Pelindo amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000 to SPMT.

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021.

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021.

Pengalihan saham tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

The transfer of shares has been notified to the Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Rincian dari tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The details of the additional paid-in capital are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali P3TPK	**977**	**977**	*Difference in value combination transaction under common control P3TPK*

20. DIVIDEN / *20. DIVIDEND*

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 dan SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 tanggal 25 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp79.029.629
- cadangan umum sebesar Rp7.902.963;
- sisanya sebesar Rp71.126.665 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. SK.03/25/6/2/PAPS/DKMR/PLMT-24 and SK.03/25/6/1/DIRU/DHKP/PII-24 dated June 25, 2024, the shareholders of the Company resolved the appropriation of the Company's net profit for the 2023 fiscal year as follows:

- *distribution of dividends to shareholders amounting to Rp79,029,629,*
- *general reserves amounting to Rp7,902,963;*
- *the remaining amounting to Rp71,126,665 as retained earnings.*

Pada tanggal 10 Juli 2024, Perusahaan telah melaksanakan pembayaran dividen kepada SPMT sebesar Rp78.239.332. Pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada PII masing-masing sebesar Rp671.752 dan Rp118.545.

On July 10, 2024, the Company has made dividend payments to SPMT amounting to Rp78,239,332. On August 9, 2024 and August 23, 2024, the Company made dividend payments to PII amounting to Rp671,752 and Rp118,545, respectively.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Nomor SK.03/27/6/1/PAPS/DISK/PLMT-23 dan SK-017/PII-SK.DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai atas dividen tahun buku 2022 sebesar Rp50.000.000. Pada tanggal 24 Juli 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada SPMT dan PII masing-masing sebesar Rp49.500.000 dan Rp500.000.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company Number SK.03/27/6/1/PAPS/DISK/PLMT-23 and SK-017/PII-SK.DIR/VI/2023 dated June 27, 2023, the shareholders of the Company agreed to distribute a cash dividend for the fiscal year 2022 amounting to Rp50,000,000. On July 24, 2023, the Company has made dividend payments to SPMT and PII amounting to Rp49,500,000 and Rp500,000, respectively.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK.03/2/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan SK-002/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai atas dividen tahun buku 2021 sebesar Rp50.000.000. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada PII sebesar Rp500.000 pada tanggal 5 September 2022. Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kepada SPMT sebesar Rp49.500.000.

Based on Deed of the Minutes of General Meeting of Shareholders of the Company dated June 2, 2022 No. SK.03/2/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and SK-002/PII-SK. 1/VI/2022, the shareholders of the Company approved to distribute a cash dividend for fiscal year 2021 amounting to Rp50,000,000. The Company has paid the dividend to PII amounting to Rp500,000 on September 5, 2022. On December 29, 2023, the Company has made dividend payments to SPMT amounting to Rp49,500,000.

21. PENDAPATAN OPERASI / *21. OPERATING REVENUES*

Rincian pendapatan operasi adalah sebagai berikut: / *The details of operating revenue are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan kerjasama pelabuhan	698.299.244	318.000.368	*Port sharing revenue*
Pendapatan terminal	613.482.631	1.391.577.831	*Terminal services*
Pendapatan terminal petikemas	80.650.620	24.839.337	*Container services*
Pendapatan pengusahaan alat	44.052.143	45.284.028	*Equipment services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	32.296.264	56.003.518	*Land, building, water and electricity services*
Lain-lain	1.606.588	-	*Others*
Total	**1.470.387.490**	**1.835.705.082**	***Total***

Rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif individual masing-masing melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of sales from customers with individual cumulative amount each exceeding 10% of the total consolidated sales are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pihak berelasi:			***Related party:***
SPMT	698.299.224	363.922.351	*SPMT*
Persentase dari total pendapatan operasi	47,49%	19,83%	*Percentage from total operating revenues*

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *22. COST OF REVENUE*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenue are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Kerjasama mitra usaha	890.160.706	1.064.490.520	*Partnership*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	217.564.599	200.931.871	*Salaries and employees welfare*
Pemeliharaan	103.888.649	110.065.034	*Maintenance*
Bahan bakar dan perlengkapan	66.346.868	61.602.796	*Fuels and supplies*
Penyusutan (Catatan 9)	31.763.659	27.856.597	*Depreciation (Note 9)*
Konsesi	12.785.612	22.642.445	*Concession*
Amortisasi (Catatan 10 dan 11)	10.926.641	8.687.724	*Amortization (Note 10 and 11)*
Lain-lain	12.034.773	16.092.209	*Others*
Total	**1.345.471.507**	**1.512.369.196**	***Total***

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *22. COST OF REVENUE (continued)*

Rincian pemasok dengan nilai transaksi melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of suppliers which transactions represent more than 10% of the total cost of revenue are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pihak berelasi:			***Related party:***
SPMT	123.518.435	302.187.761	*SPMT*
Persentase dari total beban pokok pendapatan	9,18%	19,98%	*Percentage from total cost of revenue*

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	52.282.960	45.571.784	*Salaries and employees welfare*
Pajak bumi dan bangunan	41.283.693	14.918.832	*Property taxes*
Penyisihan piutang	34.854.138	7.972.380	*Allowance for receivables*
Umum	24.876.811	27.628.119	*General*
Bahan bakar dan perlengkapan	5.803.829	9.243.518	*Fuels and supplies*
Konsultan	4.927.070	4.274.718	*Consultant*
Administrasi kantor	3.550.190	6.891.667	*Office administration*
Lain-lain	4.375.693	5.669.139	*Others*
Total	**171.954.384**	**122.170.157**	***Total***

24. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA / *24. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES*

Rincian pendapatan operasi lainnya dan beban operasi lainnya adalah sebagai berikut:

The details of other operating income and other operating expenses are as follows:

a. Pendapatan operasi lainnya / *a. Other operating income*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Denda/klaim	1.501.838	119.020	*Penalty/claim*
Laba selisih kurs - neto	161.461	-	*Gain from foreign exchange - net*
Lain-lain	675.021	2.336.076	*Others*
Total	**2.338.320**	**2.455.096**	***Total***

24. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA (lanjutan)

24. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES (continued)

Rincian pendapatan operasi lainnya dan beban operasi lainnya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of other operating income and other operating expenses are as follows: (continued)

b. Beban operasi lainnya / *b. Other operating expenses*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Denda pajak	-	1.000	*Tax penalties*
Rugi selisih kurs - neto	-	27.520	*Loss on foreign exchange - net*
Lain-lain	216.269	309.704	*Others*
Total	**216.269**	**338.224**	***Total***

25. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

25. FINANCE INCOME AND EXPENSES

Rincian pendapatan keuangan dan beban keuangan adalah sebagai berikut:

The details of finance income and finance expenses are as follows:

a. Pendapatan keuangan / *a. Finance income*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan bunga deposito	11.064.526	13.441.764	*Interest income from deposits*
Pendapatan jasa giro	7.535.097	6.813.350	*Interest income on current accounts*
Total	**18.599.623**	**20.255.114**	***Total***

b. Beban keuangan / *b. Finance expenses*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban bunga sewa (Catatan 10)	448.811	1.022.028	*Lease interest expense (Note 10)*
Beban administrasi bank	49.650	129.468	*Bank administrative expense*
Total	**498.461**	**1.151.496**	***Total***

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

26. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi:

The nature of transactions with the related parties:

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Pemegang saham/ *Shareholders*	PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)	Pembayaran *sharing revenue* dan dividen/ *Payment of sharing revenue and dividend*
	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	Pembayaran dividen dan pembelian jasa/ *Payment of dividend and purchase of services*
Entitas sepengendalian Pelindo/ *Entities under common control of Pelindo*	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)	Imbalan kerja/*employee benefit*
	PT Multi Terminal Indonesia (MTI)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)	Penjualan dan pembelian jasa/ *Sales and purchase of services*
	PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)	Pembelian layanan kesehatan/ *Purchase of health sevices*
	PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Investasi saham/*Investment in shares of stock*
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	Pembelian layanan teknologi informasi/ *Purchase of information technology sevices*
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	Pemeliharaan alat pelabuhan/ *Port equipment maintenance*
	PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)	Pembelian layanan teknologi informasi/ *Purchase of information technology*
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Penyedia Tenaga Ahli Daya/ *Outsourcings*
	PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Layanan sewa ruang kantor/ O*ffice leases*
	PT Prima Indonesia Logistik (PIL)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Berkah Multi Cargo (BMC)	Penjualan jasa/Sales of services
	PT Pelindo Energi Logistik (PEL)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Intan Sejarah Utama (ISMA)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Lamong Energi Indonesia (LEGI)	Penjualan jasa/*Sales of services*
Entitas berelasi dengan pemerintah/ *Government-related entities*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT BNI Life Insurance	Jasa asuransi/*Insurance services*
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Sarana Bandar Nasional	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Angkasa Pura Logistik	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Timah (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Prima Jasa Logistik	Penjualan jasa/*Sales of services*
	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)	Penjualan jasa/*Sales of services*

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The detail of balances and transactions with related parties are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
Bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104.502.189	11,19	79.037.455	7,50	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.399.985	0,79	7.304.821	0,69	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.472.427	0,69	2.878.373	0,27	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	661.126	0,07	216.800	0,02	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-total	119.035.727	12,74	89.437.449	8,48	*Sub-total*
Deposito Berjangka					***Time Deposits***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	150.000.000	16,06	350.000.000	33,21	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Total	**269.035.727**	**28,80**	**439.437.449**	**41,69**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

b. Piutang usaha - neto (Catatan 5)

b. Trade receivables - net (Note 5)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
SPMT	141.584.918	15,16	-	-	*SPMT*
PT Pertamina (Persero)	958.315	0,10	238.669	0,02	*PT Pertamina (Persero)*
PT Jasa Prima Logistik	822.802	0,09	-	-	*PT Jasa Prima Logistik*
TNI AL	721.447	0,08	-	-	*TNI AL*
PT Semen Batu Raja (Persero) Tbk	601.330	0,06	1.970.172	0,19	*PT Semen Batu Raja (Persero) Tbk*
PT Semen Padang	500.170	0,05	500.170	0,05	*PT Semen Padang*
ILCS	434.180	0,05	-	-	*ILCS*
JAI	322.686	0,03	-	-	*JAI*
Pelindo	271.621	0,03	-	-	*Pelindo*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	-	-	522.983	0,05	*PT Bandha Ghara Reksa (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	408.426	0,04	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain	668.353	0,07	428.750	0,04	*Others*
Sub-total	146.885.822	15,72	4.069.170	0,39	*Sub-total*
Dikurangi:					*Less:*
Penyisihan penurunan nilai – pihak berelasi	(3.847.284)	(0,41)	(2.084.085)	(0,20)	*Allowance for impairment – related parties*
Neto	**143.038.538**	**15,31**	**1.985.085**	**0,19**	***Net***

) dari total aset** / *) from total assets***

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The detail of balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

c. Piutang lain-lain / *c. Other receivables*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
SPMT	17.517.649	1,88	-	-	*SPMT*
Pelindo	507.446	0,05	2.773.357	0,26	*Pelindo*
JPPI	156.990	0,02	-	-	*JPPI*
MTI	1.596	0,00	427.064	0,04	*MTI*
IPC TPK	548	0,00	12.947.320	1,23	*IPC TPK*
IKT	-	-	23.538	0,00	*IKT*
Total	**18.184.229**	**1,95**	**16.171.279**	**1,53**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

d. Aset kontrak (Catatan 6) / *d. Contract assets (Note 6)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
SPMT	8.754.523	0,94	62.998.062	5,98	*SPMT*
MTI	2.313.792	0,25	487.510	0,05	*MTI*
Pelindo	1.454.994	0,16	558.671	0,05	*Pelindo*
Total	**12.523.309**	**1,35**	**64.044.243**	**6,08**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

e. Aset hak-guna - neto, dan liabilitas sewa (Catatan 10) / *e. Right-of-use asset - net, and lease liabilities (Note 10)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
MMI	4.719.415	0,51	11.011.968	1,04	*MMI*
Total	**4.719.415**	**0,51**	**11.011.968**	**1,04**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
MMI	-	-	6.706.275	1,33	*MMI*
Total	**-**	**-**	**6.706.275**	**1,33**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The detail of balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

f. Aset lain-lain - neto (Catatan 11) / *f. Other assets - net (Note 11)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
BMC	5.787.500	0,62	-	-	*BMC*
JPPI	5.289.117	0,57	2.335.822	0,22	*JPPI*
MTI	3.593.000	0,38	-	-	*MTI*
EPI	2.218.721	0,24	1.328.721	0,13	*EPI*
ILCS	1.579.350	0,17	-	-	*ILCS*
Total	**18.467.688**	**1,98**	**3.664.543**	**0,35**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

g. Utang lain-lain (Catatan 13) / *g. Other payables (Note 13)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
Pelindo	212.112.033	43,32	272.321.049	54,20	*Pelindo*
BIMA	4.468.921	0,91	-	-	*BIMA*
JAI	2.590.198	0,53	2.590.198	0,52	JAI
PDS	2.273.331	0,46	-	-	*PDS*
ILCS	1.598.487	0,33	-	-	*ILCS*
LEGI	705.355	0,14	-	-	*LEGI*
SPMT	657.573	0,13	354.722	0,07	*SPMT*
PT Prima Jasa Logistik	628.722	0,13	-	-	*PT Prima Jasa Logistik*
IPC TPK	479.440	0,10	4.219.146	0,84	*IPC TPK*
MTI	417.244	0,09	178.080	0,04	*MTI*
Lain - lain	552.699	0,11	1.927.626	0,38	*Others*
Total	**226.484.003**	**46,25**	**281.590.821**	**56,05**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

h. Beban akrual (Catatan 16) / *h. Accrued expenses (Note 16)*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
SPMT	40.505.644	8,27	36.958.763	7,36	*SPMT*
BIMA	27.022.720	5,52	-	-	*BIMA*
ILCS	14.484.856	2,96	6.547.569	1,30	*ILCS*
Pelindo	8.167.089	1,67	20.773.816	4,13	*Pelindo*
EPI	7.051.102	1,44	2.034.213	0,48	*EPI*
LEGI	4.544.919	0,93	-	-	*LEGI*
JPPI	3.225.906	0,66	28.232.857	5,62	*JPPI*
PDS	1.523.019	0,31	1.687.630	0,34	*PDS*
ISMA	-	-	2.669.858	0,53	*ISMA*
Lain - lain	5.179.904	1,06	12.028.749	2,39	
Total	**111.705.159**	**22,82**	**110.933.455**	**22,07**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

i. Uang titipan (Catatan 15)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	594.693	0,12	-	-	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	412.372	0,08	801.468	0,16	*PT BNI Life Insurance*
PT Taspen (Persero)	405.496	0,08	133.929	0,03	*PT Taspen (Persero)*
Lain - lain	1.304.368	0,27	828.852	0,16	*Others*
Total	**2.716.929**	**0,55**	**1.764.249**	**0,35**	***Total***

) dari total liabilitas** — *) from total liabilities***

j. Pendapatan operasi (Catatan 21)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31, 2024*		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31, 2023*		
	Total/ *Total*	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	**Total/ *Total***	**Persentase (*)/ *Percentage (*)***	
SPMT	698.299.244	47,49	363.922.351	19,82	*SPMT*
MTI	2.958.729	0,20	5.336.966	0,29	*MTI*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.449.129	0,10	3.478.768	0,19	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
ILCS	391.145	0,03	-	-	*ILCS*
IPC TPK	325.595	0,02	-	-	*IPC TPK*
JAI	287.750	0,02	-	-	*JAI*
Pelindo	262.196	0,02	1.849.388	0,10	*Pelindo*
PT Prima Indonesia Logistik	38.800	0,00	-	-	*PT Prima Indonesia Logistik*
PT Semen Padang	11.730	0,00	5.615	0,00	*PT Semen Padang*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	5.882.042	0,32	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara VII	-	-	3.082.981	0,17	*PT Perkebunan Nusantara VII*
PT Angkasa Pura Logistik	-	-	2.397.399	0,13	*PT Angkasa Pura Logistik*
PT Sarana Bandar Nasional	-	-	1.972.473	0,11	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Timah (Persero) Tbk	-	-	404.552	0,02	*PT Timah (Persero) Tbk*
PT Dharma Lautan Nusantara	-	-	288.765	0,02	*PT Dharma Lautan Nusantara*
JPPI	-	-	10.000	0,00	*JPPI*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	3.649	0,00	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Total	**704.024.318**	**47,88**	**388.634.949**	**21,17**	***Total***

) dari total pendapatan operasi** — *) from total operating revenue***

Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya dibayar atau diakui untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah Rp10.374.958 dan Rp7.187.876 masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023.

Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Company's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp10.374.958 and Rp7,187,876 for 2024 and 2023, respectively.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Grup bahwa aktivitas keuangan dikelola secara *prudent* sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Grup saat ini signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Grup terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Grup.

Grup menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Selain itu, Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cash flows, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. As of December 31, 2024 and 2023, the Group does not have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditures.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash on hand and in banks to finance the operational needs of the Group.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flows, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	12.836.057	-	-	-	12.836.057	*Third parties*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi	226.484.003	-	-	-	226.484.003	*Related parties*
Pihak ketiga	25.359.157	-	-	-	25.359.157	*Third party*
Uang titipan	9.478.655	-	-	-	9.478.655	*Deposits from customers*
Beban akrual	211.263.205	-	-	-	211.263.205	*Accrued expenses*
Total	**485.421.077**	**-**	**-**	**-**	**485.421.077**	***Total***

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	6.817.975	-	-	-	6.817.975	*Third parties*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi	281.590.821	-	-	-	281.590.821	*Related parties*
Pihak ketiga	20.412.066	-	-	-	20.412.066	*Third party*
Uang titipan	17.507.922	-	-	-	17.507.922	*Deposits from customers*
Beban akrual	149.414.627	-	-	-	149.414.627	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	6.706.275	-	-	-	6.706.275	*Lease liabilities*
Total	**482.449.686**	**-**	**-**	**-**	**482.449.686**	***Total***

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Grup dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from trade receivables, other receivables, and contract assets.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statement of financial position is as follow:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Kas dan setara kas	355.915.822	541.815.204	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	168.182.488	78.601.006	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	18.184.229	16.171.279	*Other receivables*
Aset kontrak	46.577.345	122.577.146	*Contract assets*
Investasi saham	3.860.000	3.860.000	*Investment in shares of stock*
Total	**592.719.884**	**763.024.635**	***Total***

Risiko suku bunga atas arus kas

Cash flows interest rate risk

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at floating interest rates are exposed to cash flows risk.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga:

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		**Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate***			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	**> 1 tahun/ *> 1 year***	**≤ 1 tahun/ *≤ 1 year***	**> 1 tahun/ *> 1 year***	**Total**	
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Aset						***Asset***
Kas dan setara kas	355.915.822	-	-	-	355.915.822	*Cash and cash equivalents*
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Aset						***Asset***
Kas dan setara kas	541.815.204	-	-	-	541.815.204	*Cash and cash equivalents*

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Cash flows interest rate risk (continued)

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to income before income tax is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Kenaikan 50 basis poin	1.000.000	(1.791.667)	*Increase by 50 basis points*
Penurunan 50 basis poin	(1.000.000)	(1.791.667)	*Decrease by 50 basis points*

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Grup dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

28. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

28. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	355.915.822	541.815.204	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	168.182.488	78.601.006	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	18.184.229	16.171.279	*Other receivables*
Aset kontrak	46.577.345	122.577.146	*Contract assets*
Investasi saham	3.860.000	3.860.000	*Investment in shares of stock*
Total	**592.719.884**	**763.024.635**	***Total***

28. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup: (lanjutan)

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

28. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments: (continued)

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang usaha	12.836.057	6.817.975	*Trade payables*
Utang lain-lain	251.843.160	302.002.887	*Other payables*
Uang titipan	9.478.655	17.507.922	*Deposits from customers*
Beban akrual	211.263.205	149.414.627	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	-	6.706.275	*Lease liabilities*
Total	**485.421.077**	**482.449.686**	***Total***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, investasi saham, utang usaha, utang lain-lain, uang titipan, beban akrual, dan liabilitas sewa dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, contract assets, investment in share of stocks, trade payables, other payables, deposits from customers, accrued expenses, and lease liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*

28. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Estimasi nilai wajar liabilitas sewa ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Grup tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 113 (dahulu PSAK 68) "Pengukuran Nilai Wajar".

28. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions: (continued)

- *The estimated fair values lease liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs), either directly or indirectly.*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Group does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Group does not present fair value hierarchy under PSAK 113 (formerly PSAK 68) "Fair Value Measurements".

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian serah operasi dengan Pelindo

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI.II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan Pelindo mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo setuju untuk memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengoperasikan fasilitas Pelabuhan, fasilitas penunjang pelabuhan dan tanah Hak Pengelola (HPL) pelabuhan yang merupakan aset milik Pelindo untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Fasilitas-fasilitas yang diserah operasikan mencakup gudang penumpukan, lapangan penumpukan, bangunan fasilitas pelabuhan, dermaga, alat-alat fasilitas pelabuhan, dan lain-lain.

Pelindo juga setuju untuk menyerahkan hak penggunaan atas lahan di daerah pelabuhan dengan total luas 6.254.145,75 m2.

Atas penggunaan aset-aset milik Pelindo tersebut di atas, Perusahaan berkewajiban membayar kompensasi sebesar 15% dari pendapatan kotor dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan addendum No. HK.566/3/11/5/PI.II-14 tanggal 3 November 2014, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian No. HK.566/20/13/PI.II-13, diantaranya, tanah yang diserah operasikan tersebut tidak termasuk tanah yang telah dikerjasamakan sebelumnya dengan MTI, JICT, Hutchison Port Indonesia (HPI), dan IKT.

Selain itu, berdasarkan addendum tersebut, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menaikkan besaran kompensasi yang harus dibayarkan dari 15% menjadi 40%.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/15/12/2/PI-II-15 tanggal 15 Desember 2015, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk mengubah beberapa pasal dalam addendum perjanjian No. HK.566/3/11/5/PI.II-14, diantaranya adalah perhitungan kompensasi kepada Pelindo menggunakan hasil analisis *asset pricing*.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Operational hand-operation agreement with Pelindo

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI.II-13 dated December 27, 2013, the Company and Pelindo entered into Operational Handover Agreement of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land located at Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, Pelindo agreed to provide the rights to the Company to operate port facilities, port supporting facilities and land under Right to Operate (HPL) which are assets owned by Pelindo to perform port services and other services based on the terms and conditions stipulated in the agreement.

The facilities handed over include warehouses, yard, port facilities building, dock, port facilities equipment, and others.

Pelindo also agreed to hand over its rights on a parcel of land in port with area of 6,254,145.75 m2.

From the usage of the Pelindo's assets, the Company has an obligation to pay compensation of 15% from the gross revenue plus Value Added Tax.

Based on addendum No. HK.566/3/11/5/PI.II-14 dated November 3, 2014, the Company and Pelindo agreed to add and change several articles in the agreement No.HK.566/20/13/PI.II-13, among others, the hand over of land will not include the land previously has been entered into cooperation with MTI, JICT, Hutchison Port Indonesia (HPI), and IKT.

Furthermore, based on the addendum, the Company and Pelindo agreed to increase the paid compensation from 15% to 40%.

Based on agreement No. HK.566/15/12/2/PI-II-15 dated December 15, 2015, the Company and Pelindo agreed to change several articles in the addendum No. HK.566/3/11/5/PI.II-14, among others, the calculation of compensation to Pelindo by using the result of asset pricing analysis.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian serah operasi dengan Pelindo (lanjutan)

Berdasarkan addendum No. HK.566/24/ 2/2/C.Tpk-17 dan No. HK.566/24/2/1/PTP-17 tanggal 24 Februari 2017, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian No. HK.566/15/12/2/PI.II-15, diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian kecuali diputuskan lebih awal dimana jangka waktu perjanjian akan berakhir pada tanggal pemutusan perjanjian serta tidak lagi mengadakan kerjasama serah terima operasi HPL milik Pelindo Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan addendum II No. KS.03/27/12/3/ DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/ PTP-17 tanggal 27 Desember 2017, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian No. HK.566/15/12/2/PI.II-15 serta addendum No. HK.566/24/2/2/C.Tpk-17 dan No. HK.566/24/2/1/PTP-17, diantaranya, jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Berdasarkan addendum III No. HK.566/27/12/1/PTP-18 tanggal 27 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian No. HK.566/15/12/2/PI.II-15 serta addendum No. HK.566/24/2/2/C.Tpk-17, No. HK.566/24/2/1/PTP-17 dan No. HK.566/27/ 12/1/PTP-17, diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Operational hand-operation agreement with Pelindo (continued)

Based on addendum No. HK.566/24/ 2/2/C.Tpk-17 and No. HK.566/24/2/1/PTP-17 dated February 24, 2017, the Company and Pelindo agreed to add and change several articles in the agreement No. HK.566/15/12/2/PI.II-15, among others, the term of the agreement is for 2 (two) years from the date of entry into force of the agreement unless it is decided earlier where the term of the agreement will expire on the date of termination and no longer holds the cooperation of handover of the HPL owned by Pelindo Tanjung Priok Branch.

Based on addendum II No. KS.03/27/12/3/ DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/ PTP-17 dated December 27, 2017, the Company and Pelindo agreed to add and change several articles in the agreement No. HK.566/15/12/2/PI.II-15 also addendum No. HK.566/24/2/2/C.Tpk-17 and No.HK.566/24/ 2/1/PTP-17, among others, the term of the agreement is for 2 (two) years from from January 1, 2016 until December 31, 2017 and extended for 1 (one) year from Januari 1, 2018 until December 31, 2018.

Based on addendum III No. HK.566/27/12/1/PTP-18 dated December 27, 2018, the Company and Pelindo agreed to add and change several articles in the agreement No. HK.566/15/12/2/PI.II-15 also addendum No. HK.566/24/2/2/C.Tpk-17, No. HK.566/24/2/1/PTP-17 and No. HK.566/27/12/ 1/PTP-17, among others, the term of the agreement is for 2 (two) years from January 1, 2016 until December 31, 2017, extended for 1 (one) year from January 1, 2018 until December 31, 2018 and extended again for 6 (six) months period from January 1, 2019 until June 30, 2019.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian serah operasi dengan Pelindo (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/23/9/1/PTP-19 tanggal 23 September 2019, Perusahaan dan Pelindo Cabang Tanjung Priok mengadakan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pendayagunaan Aset Pelindo Cabang Tanjung Priok oleh Perusahaan untuk Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Berupa Jasa Barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo setuju untuk memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengoperasikan fasilitas Pelabuhan, fasilitas penunjang pelabuhan dan tanah HPL pelabuhan yang merupakan aset milik Pelindo untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Fasilitas-fasilitas yang diserah operasikan mencakup gudang penumpukan, lapangan penumpukan, bangunan fasilitas pelabuhan, dermaga, alat-alat fasilitas pelabuhan, dan lain-lain.

Pelindo juga setuju untuk menyerahkan hak penggunaan atas lahan di daerah Pelabuhan dengan total luas 403.183,37 m2. Perjanjian tersebut berjangka waktu 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2032.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pelindo dan SPMT menandatangani perjanjian kerjasama tentang serah operasi bisnis dan pelayanan terminal *multipurpose* dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2042. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka berakhirlah kerjasama pengoperasian antara Pelindo dengan Perusahaan (Catatan 29g).

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Operational hand-operation agreement with Pelindo (continued)

Based on agreement No. HK.566/23/9/1/PTP-19 dated September 23, 2019, the Company and Pelindo Tanjung Priok Branch entered into an Agreement on the Optimization of the Utilization of Pelindo Asset of the Tanjung Priok Branch by the Company for the Port of Concession Services in the Form of Goods Services at Tanjung Priok Port. Based on the agreement, Pelindo agreed to provide the rights to the Company to operate port facilities, port supporting facilities and land under HPL which assets are owned by Pelindo to perform port services and other services based on the terms and conditions stipulated in the agreement.

The facilities handed over include warehouses, yard, port facilities building, dock, port facilities equipment, and others.

Pelindo also agreed to hand over its rights on a parcel of land in Port with area of 403,183.37 m2. The agreement is valid for 15 (fifteen) years covering January, 1 2018 until December 31, 2032.

As of December 29, 2021, Pelindo and SPMT entered into a cooperation agreement regarding the operation and maintenance of multipurpose terminal with period of validity of this agreement is 20 (twenty) years started form January 1, 2022 to December 31, 2042. Based on this agreement, the cooperation agreement between Pelindo and the Company has been ended (Note 29g).

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Pelindo dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang diusahakan oleh Pelindo (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016 yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Pelindo untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Pelindo sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Pelindo diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi.

Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Pelindo di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Pelindo, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Pelindo.

Atas perjanjian konsesi tersebut di atas, Perusahaan dikenakan biaya konsesi sebesar, Rp12.785.612 dan Rp22.642.445 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Concession agreement

On November 11, 2015, Pelindo and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by Pelindo (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to Pelindo to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 on Sailing.

Based on the Concession Agreement, Pelindo is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Receipt every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area.

At the end of Concession Agreement, all of the Pelindo's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, still remain assets and landrights and/or land of the Pelindo.

Based on the above mention concession agreement, the Company is charged a concession fee amounting to Rp12,785,612 and Rp22,642,445 respectively for the year ended on December 31, 2024 and 2023.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan dan beberapa PBM terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana Perusahaan dan SPMT sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di terminal yang telah ditentukan pada wilayah kerja cabang Tanjung Priok.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Loading and Unloading Activities Cooperation

On various dates from March 1, 2021, the Company and selected PBM entered into a Service Level Agreement (SLA) where the Company and SPMT agreed to carry out loading and unloading activities at the terminals specified in the Tanjung Priok's branch area.

No	Perusahaan/ *Company*	No. Perjanjian / *Agreement No.*	Wilayah kerja/ *Work location*	Jangka waktu/ *Time period*	Throughput minimum/ *Minimum throughput*
1.	PT Daisy Mutiara Samudera	PR.102/29/12/9/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	815.002 ton per tahun/*ton per year*
2.	PT Temas Port	PR.102/29/12/31/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	386.001 ton per tahun/*ton per year*
3.	PT Kaluku Maritima Utama	PR.102/29/12/13/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	1.106.000 ton per tahun/*ton per year*
4.	PT Karya Abdi Luhur	PR.102/29/12/8/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	500.001 ton per tahun/*ton per year*
5.	PT Bongkar Muat Mahardi Saranatama	PR.102/29/12/18/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	600.001 ton per tahun/*ton per year*
6.	PT Amanah Pratama Mandiri	PR.102/29/12/16/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	300.000 ton per tahun/*ton per year*
7.	PT Andhaka Adidaya Samudera	PR.102/29/12/26/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	42.500 ton per tahun/ton *per year*
8.	PT Atho Tama	PR.102/29/12/14/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	120.000 ton per tahun/ton *per year*
9.	PT Batuta Jaya Perkasa	PR.102/29/12/15/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	128.000 ton per tahun/*ton per year*
10.	PT Cinta Harapan Jaya	PR.102/29/12/6/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	250.000 ton per tahun/*ton per year*
11.	PT Citra Dermaga Perkasa	PR.102/29/12/21/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	420.000 ton per tahun/*ton per year*
12.	PT Delta Berkat Jaya Sejati	PR.102/29/12/27/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	35.000 ton per tahun/*ton per year*
13.	PT Hemprisa Karya Saksama	PR.102/29/12/2/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	183.400 ton per tahun/*ton per year*
14.	PT Jasa Anugerah Samudera	PR.102/29/12/1/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	108.332 ton per tahun/*ton per year*
15.	PT Jayacargo Gemilang Indonesia	PR.102/29/12/35/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	90.683 ton per tahun/*ton per year*
16.	PT Lapantiga Lintas Buana	PR.102/29/12/3/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	150.000 ton per tahun/*ton per year*
17.	PT Lima Insan Maritima	PR.102/29/12/12/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	60.000 ton per tahun/*ton per year*
18.	PT Maritim Polykarya Tama	PR.102/29/12/11/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	108.332 ton per tahun/*ton per year*
19.	PT Meraseti Maritim Indonesia	PR.102/29/12/5/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	73.000 ton per tahun/*ton per year*
20.	PT Prima Bandar Samudera	PR.102/29/12/22/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	800.001 ton per tahun/*ton per year*
21.	PT Radja Rizky Samudera	PR.102/29/12/7/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	100.000 ton per tahun/*ton per year*
22.	PT Roswell Pasific Indonesia	PR.102/29/12/19/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	537.904 ton per tahun/*ton per year*
23.	PT Sapta Kencana Buana	PR.102/29/12/23/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	14.700 ton per tahun/*ton per year*
24.	PT Sarana Bandar Nasional	PR.102/29/12/24/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023-30/06/2023	27.068 ton per tahun/*ton per year*

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan dan beberapa PBM terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana Perusahaan dan SPMT sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di terminal yang telah ditentukan pada wilayah kerja cabang Tanjung Priok. (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

On various dates from March 1, 2021, the Company and selected PBM entered into a Service Level Agreement (SLA) where the Company and SPMT agreed to carry out loading and unloading activities at the terminals specified in the Tanjung Priok's branch area. (continued)

No	Perusahaan/ *Company*	No. Perjanjian / *Agreement No.*	Wilayah kerja/ *Work location*	Jangka waktu/ *Time period*	Throughput minimum/ *Minimum throughput*
25.	PT Sima Jasa Maritim	PR.102/29/12/25/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	100.000 ton per tahun/*ton per year*
26.	PT Sinar Citra Lestari	PR.102/29/12/4/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	240.288 ton per tahun/*ton per year*
27.	PT Srikreasi Unggul Persada	PR.102/29/12/10/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	600.000 ton per tahun/*ton per year*
28.	PT Tao Abadi Jaya	PR.102/29/12/33/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	160.000 ton per tahun/*ton per year*
29.	PT Trans Trijaya Samudera	PR.102/29/12/29/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	352.000 ton per tahun/*ton per year*
30.	PT Triutama Kurnia Sejahtera	PR.102/29/12/34/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	67.965 ton per tahun/*ton per year*
31.	PT Sinar Berlian Indrapura	PR.102/29/12/20/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	330.000 ton per tahun/*ton per year*
32.	PT Tri Mulia Baruna Perkasa	PR.102/29/12/32/ TPK.PTP-22	Terminal I & II	1/1/2023- 30/06/2023	255.900 ton per tahun/*ton per year*

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Based on the above mentioned agreements, the Company has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM have obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and others equipment needed to perform the loading and unloading activities.

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan dan beberapa PBM terseleksi mengadakan novasi SLA dimana Perusahaan dan SPMT sepakat untuk melakukan pengalihan kewajiban Perusahaan kepada SPMT dalam kegiatan bongkar muat di terminal yang telah ditentukan pada wilayah kerja cabang Tanjung Priok.

On September 11, 2023, the Company and several selected PBM carried out a novation of the SLA where the Company and SPMT agreed to transfer the Company's obligations to SPMT in loading and unloading activities at the specified terminal in the Tanjung Priok branch work area.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas, Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Awal kepada SPMT sejak berlakunya Perjanjian Pengalihan.

Based on the above mentioned agreements, the Company transfers all its rights and obligations as in the Initial Agreement to SPMT since the enactment of the Transfer Agreement.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Segmentasi Bisnis Anak Perusahaan dan Cabang Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok

Pada tanggal 29 November 2016, Pelindo selaku pemegang saham Perusahaan menerbitkan Surat Direktur Utama tentang Segmentasi Bisnis Anak Perusahaan dan Cabang Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok dimana diantaranya mengatur bahwa kegiatan terminal, lini II dan fasilitas pendukung dilaksanakan oleh anak perusahaan, sedangkan kegiatan nonterminal dilaksanakan oleh Pelindo cabang Tanjung Priok. Rincian pelayanan kegiatan kepelabuhanan berikut perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Business Segmentation of Subsidiaries and Branches of Pelindo in Tanjung Priok Port

On November 29, 2016, Pelindo as the Company's shareholder issued President Director's Letter regarding Business Segmentation of Subsidiaries and Branches of Pelindo in Tanjung Priok Port which among others regulated that terminal activities, line II and supporting facilities are conducted by subsidiaries, while non-terminal activities are conducted by Pelindo Tanjung Priok branch. The detail of port activities services and the companies which conduct the related services are as follows:

Kegiatan/*Activities*	Perusahaan/ *The Company*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Pelindo Tanjung Priok
Jasa kapal/*Vessel services*			
- Tambat/*Mooring*			√
- Pemanduan/*Pilotage*			√
- Penundaan/*Tug*		√	
Jasa barang/*Cargo services*			
- Dermaga/*Dock*	√		
- Penumpukan/*Stacking*	√		
Jasa terminal/*Terminal services*			
- TO 1	√		
- TO 2	√		
- TO 3	√		
Properti/*Property*			
- Tanah/*Land*			√
- Aneka usaha/*Various services*			√
Lini 2*/Line 2*	√		

Pada tanggal 1 Februari 2024, Perusahaan mengalihkan operasi bisnis di Lini II kepada MTI sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan No. KS.02/1/2/1/TPK3/BTPK/TPK.PTP-24 dan No. KS.01/1/2/1/TCTM/DUTM/MTI-24

On February 1, 2024, the Company transferred the business operations in Line II to MTI in accordance with the Agreement Minutes No. KS.02/1/2/1/TPK3/BTPK/TPK.PTP-24 and No. KS.01/1/2/1/TCTM/DUTM/MTI-24

e. Zonasi Bisnis Anak Perusahaan Pelindo

Pelindo selaku pemegang saham Perusahaan menerbitkan Surat Keputusan Direksi tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, tentang Zonasi Bisnis Anak Perusahaan di Cabang Pelabuhan Pelindo yang mengatur tentang transformasi pengelolaan terminal di cabang pelabuhan Pelindo. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai penyusunan zonasi bisniaas berikut kegiatan pengoperasiannya, pola kerjasama dan pembagian zonasi bisnis anak perusahaan di cabang pelabuhan Pelindo, termasuk zonasi bisnis Perusahaan.

e. Subsidiaries Business Zonation of Pelindo

Pelindo as the Company's shareholder issued Directors' Decision Letter on December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, regarding Subsidiaries's Business Zonation in Pelindo Port Branches which regulated the transformation of terminal operation in Pelindo port branches. The Decision Letter regulates preparation of business zonation as well as the operational activities, agreement scheme and allocation of subsidiaries's business zonation in Pelindo port branches, including the Company's business zonation.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. *Spin-off* Segmentasi Bisnis Petikemas

Berdasarkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2018 tentang Kesepakatan Mekanisme Transisi Terkait *Spin-off* Segmentasi Bisnis Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Perusahaan dan IPC TPK sepakat bahwa *spin-off* segmentasi bisnis petikemas di pelabuhan Tanjung Priok terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan pelayanan nonpetikemas dan IPC TPK melaksanakan kegiatan pelayanan petikemas sesuai dengan zonasi bisnis masing-masing.

g. Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dengan Pelindo

Pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo mengadakan kerjasama optimalisasi pengoperasian kargo *multipurpose* di berbagai cabang pelabuhan milik Pelindo sebagai berikut:

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Spin-off Segmentation of Container Business

Based on Minutes of Agreement dated July 16, 2018 regarding Transition Scheme Agreement Related to Spin-off Segmentation of Container Business in Tanjung Priok port, the Company and IPC TPK agreed that spin-off segmentation of container business effective starting July 16, 2018 whereas the Company operates non-container service activities and IPC TPK operated container service activities in accordance with respective business area.

g. Cooperation in Optimization of Multipurpose Cargo Handling with Pelindo

On various date until December 31, 2021, the Company and Pelindo entered into a cooperation to handle multipurpose cargo in several port branches owned by Pelindo as follows:

No	Perusahan/ *Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Keterangan/*Description*
1.	Pelindo Cabang Banten/*Pelindo Banten Branch*	KU.01/22/12/1/D4/GM/C.BTN-20 dan/*and* HK.55/22/12/7/PTP-20	01/01/21 - 30/06/21	Rp9.663.732	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Banten milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose/ Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Banten Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
2.	Pelindo Cabang Banten/*Pelindo Banten Branch*	KS.02/6/7/1/B1.2/GM/C.BTN-21 dan/and HK.556/6/7/1/PTP.BTN-21	01/07/21 - 31/12/21	Rp9.656.930	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Banten milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Banten Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
3.	Pelindo Cabang Bengkulu/ *Pelindo Bengkulu Branch*	KU.02/22/12/1/D4.1/GM/C.BKL-20 dan/and HK.55/22/12/6/PTP-20	01/01/21 - 30/06/21	Rp7.971.552	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Bengkulu milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Bengkulu Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dengan Pelindo (lanjutan)

Pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo mengadakan kerjasama optimalisasi pengoperasian kargo *multipurpose* di berbagai cabang pelabuhan milik Pelindo sebagai berikut: (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. Cooperation in Optimization of Multipurpose Cargo Handling with Pelindo (continued)

On various date until December 31, 2021, the Company and Pelindo entered into a cooperation to handle multipurpose cargo in several port branches owned by Pelindo as follows: (continued)

No	Perusahaan/ *Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Keterangan/*Description*
4.	Pelindo Cabang Bengkulu/ *Pelindo Bengkulu Branch*	KS.02/5/7/1/B1.1/GM/C.BKL-21 dan/and HK.566/5/7/1/PTP-21	01/07/21 - 31/12/21	Rp7.681.722	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Bengkulu milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Bengkulu Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
5.	Pelindo Cabang Cirebon/ *Pelindo Cirebon Branch*	KU.02.08/22/12/1/D4.2/GM/C.C BN-20 dan/and HK.566/22/12/1/PTP-20	01/01/21 - 31/12/21	Rp8.152.264	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Cirebon milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Cirebon Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
6.	Pelindo Cabang Jambi/*Pelindo Jambi Branch*	KS.02/22/12/1/D4/GM/C.JBI-20 dan/and HK.55/22/12/5/PTP-20	01/01/21 - 31/12/21	Rp6.321.636	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Jambi milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Jambi Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
7.	Pelindo Cabang Palembang/ *Pelindo Palembang Branch*	KS.02/22/12/1/D4/GM/C.PLG-20 dan/*and* HK.55/22/12/3/PTP-20	01/01/21 - 31/12/21	Rp13.741.210	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Palembang milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose/ Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Palembang Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
8.	Pelindo Cabang Panjang/ *Pelindo Panjang Branch*	HK.55/22/12/4/PTP-20	01/01/21 - 30/06/21	Rp9.706.192	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Panjang milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose/ Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Panjang Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dengan Pelindo (lanjutan)

Pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo mengadakan kerjasama optimalisasi pengoperasian kargo *multipurpose* di berbagai cabang pelabuhan milik Pelindo sebagai berikut: (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. Cooperation in Optimization of Multipurpose Cargo Handling with Pelindo (continued)

On various date until December 31, 2021, the Company and Pelindo entered into a cooperation to handle multipurpose cargo in several port branches owned by Pelindo as follows: (continued)

No	Perusahan/ *Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Keterangan/*Description*
9.	Pelindo Cabang Panjang/ *Pelindo Panjang Branch*	KS.01/30/6/2/B6.1/GM/C.PJG-21 dan/*and* HK.566/30/6/1/PTP-21	01/07/21 - 31/12/21	Rp12.464.681	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Panjang milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose*/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Panjang Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
10.	Pelindo Cabang Pangkal Balam/ *Pelindo Pangkal Balam Branch*	KS.02/4/1/1/D2.1/GM/C9.PBM-21 dan/*and* HK.566/4/1/1/PTP-21	01/01/21 - 31/12/21	Rp7.376.845	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Pangkal Balam milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose*/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Pangkal Balam Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
11.	Pelindo Cabang Pontianak/ *Pelindo Pontianak Branch*	HK.566/5/5/1/PTP-21	01/06/21 - 31/05/22	28% dari Pendapatan Bruto/*28% from Gross Revenue*	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Pontianak milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose*/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Pontianak Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
12.	Pelindo Cabang Sunda Kelapa/ *Pelindo Sunda Kelapa Branch*	KS.02/30/4/1/D2.4/GM/C.Pska-21 dan/*and* HK.566/30/4/1/PTP-21	01/06/21 - 31/10/21	Rp14.022.593	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Sunda Kelapa milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose*/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Sunda Kelapa Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
13.	Pelindo Cabang Sunda Kelapa/ *Pelindo Sunda Kelapa Branch*	KS.02/29/10/1/B1/GM/C.PSKA-21 dan/*and* HK.566/29/10/2/PTP-21	01/11/21 - 31/12/21	Rp4.998.483	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal *multipurpose* dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Sunda Kelapa milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal *multipurpose*/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Sunda Kelapa Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dengan Pelindo (lanjutan)

Pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo mengadakan kerja sama optimalisasi pengoperasian kargo *multipurpose* di berbagai cabang pelabuhan milik Pelindo sebagai berikut: (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. Cooperation in Optimization of Multipurpose Cargo Handling with Pelindo (continued)

On various date until December 31, 2021, the Company and Pelindo entered into a cooperation to handle multipurpose cargo in several port branches owned by Pelindo as follows: (continued)

No	Perusahan/ *Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Keterangan/*Description*
14.	Pelindo Cabang Tanjungpandan/ *Pelindo Tanjung Pandan Branch*	KS.02/22/12/1/D2/GM/C.TGDN-20 dan/*and* HK.55/22/12/2/PTP-20	01/01/21 - 31/12/21	Rp1.611.132	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Tanjungpandan milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Tanjungpandan Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
15.	Pelindo Cabang Tanjung Priok/*Pelindo Tanjung Priok Branch*	KS.02/21/9/1/D2.1/GM/C.TPK-20 dan/*and* PR.102/21/9/1/OPS.TGP.PTP-20	16/09/20 - 15/09/21	Rp11.164.302	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Tanjung Priok milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Tanjung Priok Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
16.	Pelindo Cabang Teluk Bayur/*Pelindo Teluk Bayur Branch*	2KS.02/22/12/2/D4.1/GM/C.TBS-20 dan/*and* HK.566/22/12/8/PTP-20	01/01/21 - 30/06/21	Rp12.586.736	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Teluk Bayur milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Teluk Bayur Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
17.	Pelindo Cabang Teluk Bayur/*Pelindo Teluk Bayur Branch*	KS.02/30/6/1/B1.1/GM/C.TBS-21 dan/*and* HK.566/30/6/5/PTP-21	01/07/21 - 31/12/21	Rp12.049.292	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Teluk Bayur milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Teluk Bayur Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*
18.	Pelindo Cabang Tanjung Priok//*Pelindo Tanjung Priok Branch*	KS.01/16/9/1/B1.1/GM/C.TPK-21 dan/*and* PR.102/16/9/1/TPK.PTP-20	16/09/21 - 15/09/22	40% dari total realisasi pendapatan bruto/40% from the realization of gross revenue	Pelindo memberikan hak kepada Perusahaan dalam kerjasama untuk pengoperasian terminal multipurpose dan menggunakan fasilitas pelabuhan Cabang Tanjung Priok milik Pelindo untuk kegiatan pelayanan jasa terminal multipurpose/ *Pelindo gives rights to the Company in multipurpose terminal operation and uses the facilities of Tanjung Priok Branch's port facilities owned by Pelindo for multipurpose terminal service activities.*

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dengan Pelindo (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pelindo dan SPMT menandatangani Perjanjian Kerjasama No. HK.03/29/12/4/DUKM/UTMA/PLND-21 dan No.HK.05/01/9/PLMT-202 tentang serah operasi bisnis dan pelayanan terminal *multipurpose* dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2042.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka berakhirlah kerjasama pengoperasian antara Pelindo dengan Perusahaan.

h. Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan SPMT

Pada tanggal 4 Januari 2022, Perusahaan dan SPMT menandatangani Perjanjian Kerjasama No. HK.05.01/2/PLMT-2022 dan No. HK.566/4/1/1/PTP-22 tentang pengoperasian dan pemeliharaan terminal *multipurpose* dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031.

Objek kerja sama untuk perjanjian ini sebelumnya merupakan objek yang dilakukan kerjasama langsung antara Pelindo dengan Perusahaan. Berdasarkan Berita Acara Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal *Multipurpose* dari Pelindo kepada SPMT No.KS.01/21/12/LAUH/KMPR/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021 nilai *sharing revenue* dari total pendapatan per cabang antara Perusahaan, SPMT, dan Pelindo sebagai berikut:

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. Cooperation in Optimization of Multipurpose Cargo Handling with Pelindo (continued)

As of December 29, 2021, Pelindo and SPMT entered into a Cooperation Agreement No. HK.03/29/12/4/DUKM/UTMA/PLND-21 and No.HK.05/01/9/PLMT-202 regarding the operation and maintenance of multipurpose terminal with period of validity of this agreement is 20 (twenty) years started form January 1, 2022 to December 31, 2042.

Based on this agreement, the cooperation agreement between Pelindo and the Company has been ended.

h. Cooperation in Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal with SPMT

On January 4, 2022, the Company and SPMT entered into a cooperation agreement No. HK.05.01/2/PLMT-2022 and No. HK.566/4/1/1/PTP-22 regarding the operation and maintenance of multipurpose terminal with period of validity of this agreement is 10 (ten) years started form January 1, 2022 to December 31, 2031.

The object of cooperation for this agreement previously had direct cooperation between Pelindo and the Company. Based on the Minutes of Handover of Business Operations and Multipurpose Terminal Services from Pelindo to SPMT No.KS.01/21/12/LAUH/KMPR/PLND-21 dated December 21, 2021 the revenue sharing from total revenue per branch between the Company, SPMT, and Pelindo as following:

Cabang/*Branch*	Pelindo	SPMT	Perusahaan/ *The Company*
Tanjung Priok	16,5%	5,5%	78%
Cirebon	12%	3%	85%
Tanjung Pandan	25%	3%	72%
Jambi	23%	3%	74%
Bengkulu	20%	5%	75%
Banten	15%	5%	80%
Panjang	25%	5%	70%
Palembang	20%	5%	75%
Teluk Bayur	27,5%	5%	67,5%
Pangkal Balam	30%	3%	67%
Pontianak	23%	5%	72%

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan SPMT (lanjutan)

Atas perjanjian kerjasama dan berita acara tersebut di atas, Perusahaan melakukan pengalihan hak penerbitan nota (*switching invoice*) dan peralihan perikatan perjanjian dari Perusahaan kepada SPMT untuk seluruh cabang Perusahaan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Cooperation in Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal with SPMT (continued)

Based on the cooperation agreement and the minutes mentioned above, the Company had transferred the rights to issue invoices (switching invoice) and the transfer of obligations under the agreement to SPMT for all branches of the Company in stages as follows:

Cabang/*Branch*	Tanggal/*Date*
Jambi	1 Juni/*June 1*, 2022
Palembang, Bengkulu, dan/*and* Teluk Bayur	1 September/ *September 1*, 2022
Cirebon	1 Juni/*June 1*, 2023
Tanjung Pandan	1 Juli/ *July 1*, 2023
Panjang dan/*and* Pangkal Balam	1 Agustus/ *August 1*, 2023
Tanjung Priok - Domestik/*Domestic*	11 September/*September 11*, 2023
Pontianak	1 Desember/ *December 1*, 2023
Banten	20 Desember/*December 20*, 2023
Tanjung Priok - Internasional/*International*	1 September/ *September 1*, 2024

i. Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* - Kijing dengan SPMT

Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan dan SPMT menandatangani Perjanjian Kerjasama No. PJ.03.06/1/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan No. HK.566/1/8/1/PTP-22 tentang Peroperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2041.

Objek yang dikerjasamakan dalam Perjanjian ini adalah Area Terminal *Multipurpose* Kijing merupakan objek yang baru dikerjasamakan antara Perusahaan dengan SPMT (bukan merupakan objek peralihan yang dikerjasamakan sebelumnya dengan Pelindo). Nilai *revenue sharing* yang disepakati adalah sebagai berikut:

i. Cooperation in Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal - Kijing with SPMT

On August 1, 2022, the Company and SPMT signed a cooperation agreement No. PJ.03.06/1/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 and No. HK.566/1/8/1/PTP-22 in Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal with a contract duration of 20 (twenty) years starting from August 1, 2022, until December 31, 2041.

The object of this cooperation agreement is Multipurpose Terminal Area Kijing, which is a new collaborative project between the Company and SPMT (and not a transferred object that was previously cooperated with Pelindo). The agreed revenue sharing value is as follows:

Tahun/*Year*	SPMT	Perusahaan/ *The Company*	Pelindo
Tahun 1 s.d 3/ *Year 1 until 3*	3%	48%	49%
Tahun 4 s.d dst/ *Year 4 and thereafter*	5%	46%	49%

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* - Kijing dengan SPMT (lanjutan)

Pada tanggal 12 Juli 2024, SPMT dan Pelindo Regional 2 menandatangani Berita Acara Kesepakatan No. KS.03/19/8/1/HBPL/PGLA/PLND-24 tentang kesepakatan evaluasi penyesuaian *revenue sharing* atas kerja sama kegiatan jasa bongkar muat di Pelabuhan Kijing. Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 dan akan ditindaklanjuti dengan proses addendum Berita Acara Serah Operasi (BASO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran *revenue sharing* dari SPMT ke Pelindo di Pelabuhan Kijing yang berlaku untuk seluruh pelanggan adalah sebagai berikut:

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

i. Cooperation in Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal - Kijing with SPMT (continued)

On July 12, 2024, SPMT and Pelindo Regional 2 signed the Minutes of Agreement No. KS.03/19/8/1/HBPL/PGLA/PLND-24 regarding the agreement on the evaluation of revenue sharing adjustments for the cooperation in loading and unloading services at Kijing Port. This agreement is effective starting from August 1, 2024, and will be followed up with the process of an addendum to the Berita Acara Serah Operasi (BASO) in accordance with the applicable regulations. The amount of revenue sharing from SPMT to Pelindo at Kijing Port that applies to all customers is as follows:

Pendapatan stevedoring, jasa dermaga, jasa kebersihan, dan alat di Terminal Kijing/ *Stevedoring revenue, port services, cleaning services, and equipment at Kijing Terminal.*	***Revenue sharing***	
	Pelindo	**SPMT Grup/*Group***
Cargo curah kering dan *general cargo*/*Dry bulk cargo and general cargo*	16%	84%
Cargo curah cair/*Liquid bulk cargo*	49%	51%

30. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen operasi kepelabuhan yang menyediakan jasa nonpetikemas dan jasa lainnya.

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

30. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in a single segment of port operation which provides non-container services and other services.

Information concerning the Company's geographical segment are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan operasi			***Operating revenue***
Tanjung Priok	840.332.675	1.055.682.737	*Tanjung Priok*
Banten	118.928.332	159.002.245	*Banten*
Bengkulu	115.112.113	122.514.893	*Bengkulu*
Panjang	97.472.445	163.608.388	*Panjang*
Teluk Bayur	82.763.735	80.830.983	*Teluk Bayur*
Pontianak	76.469.505	73.596.488	*Pontianak*
Cirebon	47.128.407	52.264.661	*Cirebon*
Palembang	37.183.869	49.168.482	*Palembang*
Pangkal Balam	26.707.525	32.188.570	*Pangkal Balam*
Jambi	20.606.144	36.770.438	*Jambi*
Tanjung Pandan	7.682.740	10.077.197	*Tanjung Pandan*
Total pendapatan operasi	**1.470.387.490**	**1.835.705.082**	***Total operating revenue***

30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *30. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Information concerning the Company's geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pokok pendapatan			***Cost of revenue***
Tanjung Priok	791.824.279	913.114.835	*Tanjung Priok*
Banten	111.289.733	129.412.520	*Banten*
Panjang	99.765.750	111.056.943	*Panjang*
Bengkulu	88.755.954	86.301.104	*Bengkulu*
Pontianak	57.877.186	65.634.087	*Pontianak*
Teluk Bayur	52.173.300	45.392.010	*Teluk Bayur*
Palembang	45.281.013	42.265.814	*Palembang*
Cirebon	42.156.645	49.096.390	*Cirebon*
Jambi	25.197.604	34.719.983	*Jambi*
Pangkal Balam	24.828.048	28.389.989	*Pangkal Balam*
Tanjung Pandan	6.321.995	6.985.521	*Tanjung Pandan*
Total beban pokok pendapatan	**1.345.471.507**	**1.512.369.196**	***Total cost of revenue***

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / *31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION*

Transaksi non-kas Grup adalah sebagai berikut:

Non-cash transactions of the Group are as follow:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Perolehan aset tetap melalui utang *payables*	15.531.128	5.205.369	*Acquisition of fixed assets through*

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Non-arus kas/ *Non-cash flows*** **Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Liabilitas sewa	6.706.275	(7.155.086)	448.811	-	*Lease liabilities*

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Non-arus kas/ *Non-cash flows*** **Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Liabilitas sewa	16.210.762	(10.526.515)	1.022.028	6.706.275	*Lease liabilities*
Utang dividen	49.500.000	(99.500.000)	50.000.000	-	*Dividend payable*

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA / *32. SUBSEQUENT EVENT*

Pengalihan Saham Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo") No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 tanggal 30 April 2025, Perusahaan setuju untuk menjual seluruh saham milik P3TPK, yang telah disetorkan dan ditempatkan penuh sejumlah 500 lembar saham kepada Rukindo berikut seluruh hak-hak serta seluruh kepentingan atas atau terkait saham yang melekat saat ini atau di kemudian hari.

Transfer of Shares of Subsidiary Entity

Based on the Share Purchase Agreement between the Company and PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo") No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 dated April 30, 2025, the Company agreed to sell all shares of P3TPK, which have been issued and fully paid, totaling 500 shares to Rukindo, along with all rights and interests related to the shares that are currently attached or will be attached in the future.

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Pengalihan Saham Entitas Anak (lanjutan)

Penjualan dan pengalihan saham dilakukan dengan total Rp684.441.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.368.882 (nilai penuh) per saham.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Akta Jual Beli Saham dengan Notaris masih dalam proses pembuatan.

32. SUBSEQUENT EVENT (continued)

Transfer of Shares of Subsidiary Entity (continued)

The sale and transfer of shares are conducted at a total of Rp684.441.000 (full amount) dividen into 500 shares with a nominal amount of Rp1,368,882 (full amount) per share.

As of the date of completion of this consolidated financial statement, the Deed of Sale and Purchase of Shares with the Notary is still being prepared.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Gedung Pelindo Tower Lt. 16
Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230
Email : ptpnonpetikemas@ptp.co.id

Laporan Tahunan 2024 Annual Report